



PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Energizing Trade. Energizing Indonesia.



Laporan Tahunan **2019** *Annual Report*

BUSINESS EXPANSION

FOR SUSTAINABLE SUPERIOR PERFORMANCE

EKSPANSI BISNIS UNTUK MENCAPAI KINERJA UNGGUL YANG BERKELANJUTAN

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

BUSINESS EXPANSION

FOR SUSTAINABLE SUPERIOR PERFORMANCE

EKSPANSI BISNIS UNTUK MENCAPAI KINERJA UNGGUL YANG BERKELANJUTAN

Pada tahun 2019, Perseroan memiliki target untuk meningkatkan laba dari pertumbuhan organik dan *non* organik. Hal ini dicapai selain dengan meningkatkan performa 12 (dua belas) Cabang yang telah dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Anak Perusahaan yang bergerak di bisnis pelabuhan, Perseroan juga akan berfokus pada kegiatan akuisisi pelabuhan baru di beberapa wilayah, seperti Patimban, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan lain-lain. Untuk mendukung target ini, Perseroan juga bekerja sama dengan beberapa kawasan industri, perusahaan pelayaran serta akan meningkatkan performansi Anak Perusahaan khususnya yang bergerak di bisnis pendukung. Di samping itu, pada tahun 2019 Perseroan telah melakukan *National Connectivity Program* dengan mengimplementasikan proyek strategis yaitu Pembangunan Container Terminal 2 (CT 2) di New Priok, Pelabuhan Kijing di Pontianak, Jalan Tol Cilincing Cibitung dan beberapa proyek strategis lain. Sebagai langkah untuk mewujudkan *Global Expansion*, Perseroan melakukan kerjasama dengan beberapa *sister port*, ekspansi bisnis Anak Perusahaan, aktif dalam kegiatan atau organisasi internasional seperti *chainport*, APA, IAPH serta beberapa kegiatan lain.

In 2019, the Company has a target to increase profit from organic growth and non-organic. This was achieved by improving the performance of 12 (twelve) branches managed by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and its subsidiaries engaged in the port business, and the Company will also focus on the acquisition of new ports in several regions, such as Patimban, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) and others. To support this target, the Company also cooperated with several industrial estates, shipping companies and improved the performance of Subsidiaries, especially those engaged in supporting businesses. Apart from that, in 2019 the Company has carried a National Connectivity Program by implementing the strategic projects, namely the Construction of Container Terminal 2 (CT 2) in New Priok, Kijing Port in Pontianak, Cilincing Cibitung Toll Road and several other strategic projects. As a step towards realizing Global Expansion, the Company entered into cooperation with several sister ports, performed Subsidiaries' business expansion, and actively involved in international activities or organizations such as chainport, APA, IAPH and several other activities.





KESINAMBUNGAN TEMA

THEME CONTINUITY



2018

Establishment of Excellence Digital Port

Arah menuju *World Class Performance* di 2020 telah mampu dicapai sesuai dengan roadmap yang telah dicanangkan. Pada tahun 2018, PT Pelindo II (Persero) telah melalui fase *Establishment of Performance*. Kinerja Perseroan tahun 2018 telah mampu melampaui yang telah ditargetkan. Hal ini merupakan hasil dari diterapkannya aktivitas pelayanan dan operasional berbasis teknologi informasi (*Digital Port*). Bahkan, Perseroan merupakan *Digital Port* pertama di Indonesia. Perseroan telah menerapkan enam fitur digital pelayanan secara efektif, sehingga pelayanan yang diberikan telah mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan yang selanjutnya mampu meningkatkan kinerja Perseroan. Keenam fitur layanan tersebut, yaitu *Master Customer Data*, *Customer Profiling*, *Customer Service*, *Customer Visit Management*, *Customer Survey*, dan *Sales* dikemas dalam fitur aplikasi *Digital Customer Relationship Management (CRM)* di seluruh Kantor Cabang dan dua Anak Perusahaan IPC, yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok dan PT IPC Terminal Peti Kemas.

The direction towards *World Class Performance* in 2020 has been achieved in accordance with the planned roadmap. In 2018, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has gone through the phase of *Establishment of Performance*. The Company's performance in 2018 has been able to exceed the targets. This achievement is the result of the implementation of information technology-based service and operational activities (*Digital Port*). In fact, the Company is the first *Digital Port* in Indonesia. The Company has implemented the six digital service features effectively, hence the services provided have succeeded in increasing customer satisfaction and loyalty, which in turn improving the Company's performance. The six service features, namely *Master Customer Data*, *Customer Profiling*, *Customer Service*, *Customer Visit Management*, *Customer Survey*, and *Sales* are contained in the *Digital Customer Relationship Management (CRM)* application feature in all Branch Offices and two Subsidiaries of IPC, i.e. PT Pelabuhan Tanjung Priok and PT IPC Terminal Peti Kemas.



2017

Strengthening Capabilities Towards Digital Port

Tahun 2017 dalam *Corporate Roadmap* IPC merupakan tahun "*Enhancement*" dimana Perseroan memperkuat kapabilitas menuju *digital port* guna mewujudkan kinerja unggul yang berkesinambungan.

Enhancement mencakup peningkatan aspek operasional dan pelayanan, modernisasi alat terbaru, pengembangan Anak Perusahaan dan program pemasaran, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan-pelabuhan baru. Dengan mewujudkan *digital port*, IPC mampu terus melaju menjadi penyedia jasa pelabuhan terkemuka di Indonesia dan mencapai tujuan menjadi operator pelabuhan berkelas dunia.

2017 in the IPC Corporate Roadmap is a year of "*Enhancement*", in which the Company strengthens its capabilities towards *digital port* in order to realize sustainable superior performance.

Enhancement includes improvement of operational and service aspect, modernization of latest equipment, development of subsidiaries and marketing programs, and development of infrastructure and superstructure of new ports. By realizing *digital port*, IPC will be able to move forward and become the leading port service provider in Indonesia and achieve its goal of becoming a world class port operator.



2016

Creating Values Through Governance

Melalui fase *Fit in infrastructure*, Perseroan menyusun *Corporate GCG Roadmap* untuk lima tahun ke depan dan mengimplementasikannya secara menyeluruh demi terciptanya *Good Corporate Citizenship* yang komprehensif. Suksesnya implementasi fase ini terbukti berhasil mendorong keberhasilan Perseroan untuk melalui masa-masa sulit. Ke depannya, Perseroan terus memperkuat komitmen terhadap implementasi kepatuhan yang optimal demi memberikan nilai-nilai terbaik bagi Bangsa Indonesia dan seluruh Pemangku Kepentingan.

Through the *Fit in Infrastructure* phase, the Company prepared its roadmap for the next five years and is implementing it comprehensively for the creation of a comprehensive *Corporate Citizenship*. The successful implementation of this phase is proven to drive the Company's success to go through difficult times. Moving forward, the Company will continue to strengthen its commitment in implementing optimal compliance, in order to provide the best values for Indonesia and all Stakeholders.



2015

Advancing Excellence Through Performance

Melewati tahun 2015 yang penuh tantangan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tetap mampu mempertahankan kinerja keuangan yang baik dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Perseroan mencatat sejarah penerbitan *global bond* yang memberikan dukungan penuh untuk sektor-sektor prioritas negara, terutama untuk pengembangan infrastruktur dan investasi jangka panjang yang dinilai strategis. Selain itu, Perseroan juga telah memulai proses uji coba operasional mega proyek terminal New Priok secara bertahap.

Through the challenging year of 2015, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) still managed to maintain good financial performance and provide added value for all stakeholders. The Company recorded a history in *global bond* issuance, which provided full support for the country's priority sectors, especially for strategic infrastructure development and long-term investments. In addition, the Company has also begun the operational trial process of New Priok terminal mega project gradually.



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

4	KESINAMBUNGAN TEMA Theme Continuity	161	PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN Employee Profile and Competency Development	310	ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis
6	DAFTAR ISI Table of Contents	181	KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM Shareholder Composition	312	TINJAUAN PEREKONOMIAN Economy Review
8	SEKILAS TENTANG PERSEORAN The Company At A Glance	182	DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ ATAU ENTITAS ASOSIASI List of Subsidiaries and/or Associates	338	TINJAUAN OPERASIONAL Operational Review
10	JEJAK LANGKAH Milestones	214	STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN Organization Group Structure	346	TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA Operational Review Per Business Segment
12	KONTRIBUSI TERBAIK KAMI Our Best Contribution	215	KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM Chronology of Issuing Stock	432	KINERJA ENTITAS ANAK Subsidiary Performance
17	INISIATIF 2019 2019 Initiatives	217	KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ ATAU PENCATATAN OBLIGASI Chronology Of Share Issuance	447	PROYEK STRATEGIS 2019 Strategic Projects in 2019
18	CORPORATE ROADMAP Corporate Roadmap	220	KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA Chronology of Other Securities Issuance and/ Listing	453	PROSPEK USAHA Business Outlook
20	KILAS KINERJA Performance Highlights	221	NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ ATAU PROFESI PENUNJANG Name and Address of Supporting Institutions and/or Professionals	458	STRATEGI KE DEPAN TAHUN 2020 Future Strategies in 2020
22	PERFORMA 2019 2019 Performance	230	PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI Awards and Certification	462	TINJAUAN KEUANGAN Financial Review
24	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Key Financial Highlights	244	NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, KANTOR CABANG DAN/ ATAU KANTOR WILAYAH Name And Address of Subsidiaries, Associates, Branches and/or Regional Offices	462	KINERJA KEUANGAN Financial Performance
38	PERISTIWA PENTING DI TAHUN 2019 2019 Event Highlights	248	INFORMASI PADA WEBSITE PERSEROAN Information On The Company Website	489	LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
48	LAPORAN MANAJEMEN Management Report	250	PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL Education and/or Training of Board of Commissioners, Board of Directors , Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit	504	KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG Ability To Pay Debt and Receivables Collectibility
50	LAPORAN DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners' Report	260	TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS Business Function Supports	508	STRUKTUR MODAL Capital Structure
62	LAPORAN DIREKSI Board of Directors' Report	262	KERANGKA STRATEGI MANAJEMEN HUMAN CAPITAL Human Capital Management Strategy Framework	509	IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL Material Commitments For Capital Goods Investment
80	PROFIL PERUSAHAAN Company Profile	263	PENGEMBANGAN ORGANISASI Organizational Development	510	INVESTASI BARANG MODAL Capital Goods Investment
82	IDENTITAS PERUSAHAAN Company Identity	264	PROFIL DIVISI HUMAN CAPITAL Profile of Human Capital Division	514	INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL Material Information On Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt and Capital Restructuring
84	RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN Brief History of The Company	273	MANAJEMEN HUMAN CAPITAL Human Capital Management	515	PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET KE DEPAN Target Achievement and Future Target
85	BRAND PERUSAHAAN Company Brand	297	TEKNOLOGI INFORMASI Information Technology	542	INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN Information and Material Facts Subsequent to The Date of Accountant Report and Its Impact
86	BIDANG USAHA Business Fields			542	INFORMASI KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI Reported Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events
90	PETA WILAYAH USAHA Business Area Map				
92	STRUKTUR ORGANISASI Organizational Structure				
96	VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN Company Vision, Mission and Corporate Value				
98	REVIEW VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Vision and Mission Review By The Board of Commissioners and Board of Directors				
102	PROFIL DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners' Profiles				
120	PROFIL DIREKSI Board of Directors' Profiles				
146	PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF Executive Officers' Profiles				

542	DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN Impact of Price Changes On Sales or Net Income of The Company	564	ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance Roadmap	924	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Corporate Social Responsibility
542	KOMPONEN-KOMPONEN SUBSTANSI DARI PENDAPATAN DAN BEBAN LAINNYA Substantial Components of Income and Other Expenses	565	PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance Principles	926	TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL Corporate Social Responsibility Governance
542	PENINGKATAN/PENURUNAN MATERIAL DARI PENJUALAN/PENDAPATAN BERSIH Material Increase/Decrease from Net Sales/Income	566	PENCAPAIAN ROADMAP 2019 2019 Roadmap Achievement	934	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA Corporate Social Responsibility Related To Human Rights
543	KEBIJAKAN, PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN Dividend Policy, Announcement and Payment	572	STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN GCG Structure and Mechanism	937	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI ADIL Corporate Social Responsibility Related To Fair Operations
544	PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN (ESOP/MSOP) Employee and Management Stock Option Plan (ESOP/MSOP)	573	INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI Information on Major/Controlling Shareholders	942	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP Corporate Social Responsibility Related To The Environment
544	REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN Realization of The Use of Public Offering Proceeds	600	DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners	964	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Corporate Social Responsibility Related To Employment, Occupational Health and Safety
545	INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANUDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI Information On Material Transactions Containing Conflict of Interest And/or Transactions With Affiliated Parties	683	DIREKSI Board of Directors	981	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN Corporate Social Responsibility Related To Consumers
550	ASPEK PERPAJAKAN Taxation Aspect	764	ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS Organs and Committees Under The Board of Commissioners	990	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN Corporate Social Responsibility Related to Social Community Development
552	PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA Regulatory Changes and the Impact	800	ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI Organs and Committees Under The Board of Directors	1.006	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA PEMASOK Corporate Social Responsibility Related To Responsibilities To Suppliers
552	PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Changes in Accounting Policies	837	AKUNTAN PUBLIK Public Accountant	1.013	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KREDITOR Corporate Social Responsibility Related To Responsibilities To Creditors
553	TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN The Company's Soundness Level	839	MANAJEMEN RISIKO Risk Management	1.016	LAPORAN KEUANGAN Financial Report
556	INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA Information on Business Continuity	855	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Internal Control System	1.215	REFERENSI SILANG KRITERIA ARA 2018 Cross Reference of ARA's Criteria 2018
559	TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance	866	PERKARA PENTING Legal Issues		
561	KERANGKA PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Framework of Corporate Governance Implementation	876	PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK Social and/or Political Funding		
562	DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Basis For Corporate Governance Application	876	AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN Access to Company Information and Data		
563	TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance Objectives	883	PROGRAM ANTI KORUPSI Anti Corruption Program		
		884	KODE ETIK Code of Conduct		
		890	KEBIJAKAN GRATIFIKASI Gratification Policy		
		897	WHISTLEBLOWING SYSTEM Whistleblowing System		
		908	PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) Management of State Assets Reports (LHKPN)		
		909	ASESMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN GCG Implementation Assessment		
		920	ASESMEN KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL Assessment Criteria for Excellence Performance Assessment		



SEKILAS TENTANG PERSEROAN

THE COMPANY AT A GLANCE







JEJAK LANGKAH MILESTONE

1960

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan dengan status Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1960 tentang pengelolaan pelabuhan umum yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established with the status of State Enterprise (PN) in accordance to the Government Regulation Number 19 year 1960 regarding the management of ports by the Port Management Agency (BPP).

1964-1969

Kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga Pemerintah yang disebut Otoritas Pelabuhan, meskipun PN masih menangani aspek komersial

The port's operational activities were coordinated by a government agency called the Port Authority, though PN still handled its commercial aspects.

1969-1983

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1969, BPP dikelola masing-masing pelabuhan. BPP menggantikan PN setelah Otoritas Pelabuhan dibubarkan.

According to the Government Regulation Number 18 year 1969, the BPP managed each seaport. BPP replaced PN after the Port Authority was dissolved.

1985

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1983 juncto PP No.5 tanggal 5 Februari 1985, Perum Pelabuhan dilebur dan dibagi menjadi 4 wilayah operasi, dengan nama Perum Pelabuhan I sampai IV. Keempat Perum itu merupakan BUMN yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Based on the Government Regulation No. 15 year 1983 juncto PP No.5 dated February 5, 1985, Perum Pelabuhan was merged and divided into four operational areas, under the names of Perum Pelabuhan I to IV. The four Companies later on became State Owned Enterprises under the supervision of Ministry of Transportation of Republic of Indonesia.

Badan hukum Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1991, yang sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan perubahan pada nama Perusahaan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, dan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN, sebagaimana diatur dalam Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 1 Desember 1992.

The legal form of Perum was changed into Limited Liability Company (PT) based on the Government Regulation No. 57 year 1991, whose shares are fully owned by the Republic of Indonesia resulted in changes to the Company's name to Perseroan Company (Persero) of PT Pelabuhan Indonesia II, under the management of the Ministry of SOEs, stipulated in Notarial deed No. 3 dated December 1, 1992.

1992

Pada tanggal 22 Februari 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) meluncurkan branding identitas baru dan bertransformasi menjadi IPC, sebuah perusahaan penyedia jasa pelabuhan terkemuka di Indonesia, yang lebih efisien dan modern dalam berbagai aspek operasional, dalam rangka mencapai tujuan menjadi operator pelabuhan kelas dunia.

On February 22, 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) launched its new branding identity and transformed into IPC, a leading port services company in Indonesia, to be more efficient and modern in every aspect of operations in order to achieve its goal to become a world-class port operator.

2012

IPC fokus kepada pengembangan langkah strategis perusahaan. Melanjutkan keberhasilan transformasi, IPC harus bergerak lebih cepat, efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan jasa pelanggan atau pengguna jasa kepelabuhanan. Dengan optimisme dan keyakinan yang sungguh-sungguh, IPC siap melangkah mencapai terobosan-terobosan usaha di tahun-tahun selanjutnya serta menyiapkan diri menjadi yang terdepan, terbaik dan tersehat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pelabuhan yang dipandang oleh dunia. Salah satu capaian terbesar di tahun ini adalah *Ground breaking* Terminal New Priok oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

IPC focused on developing Company's strategic steps. Continuing the success of corporate transformation, the Company must move faster, effectively and efficiently in serving the needs of customer service or port service user. Through optimism and confidence, the Company was ready to step into business breakthroughs in the next years and prepare to be the leader, the best and healthiest in supporting Indonesia's economic growth and the respected port of the world. One of biggest achievements in this year was New Priok Terminal groundbreaking by President of Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono

2013

Pada tahun 2014, IPC melakukan banyak investasi pada Entitas Anak, yang nilainya sebesar Rp1,43 triliun, meningkat 33,64% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp1,07 triliun. Selain itu, IPC juga menanamkan investasi pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan yang dilakukan di dalam dan luar negeri. Dalam rangka terus meningkatkan kinerja, IPC juga telah melakukan sejumlah studi dan riset terkait dengan industri maritim. Di antaranya dilakukan bersama World Bank tentang "Implementation of reducing logistic cost in Indonesia & Port Development priority projects and financing strategy". Untuk mewujudkan pelayanan satu atap yang memuaskan bagi seluruh pelanggan, IPC melalui Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha bekerja sama dengan Direktorat Operasi dan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pilot project, telah menyediakan tempat pelayanan dengan suasana yang nyaman, terbuka, fleksibel, dan modern.

In 2014, the Company invested Rp1.43 trillion in subsidiaries, increased 33.64% compared to 2013 which amounted to Rp1.07 trillion. In addition, the Company also invested in human capital development, particularly in domestic and overseas education. In order to perform better, the Company has also conducted several studies and researches related to maritime industry. Among them are jointly carried out with the World Bank on "Implementation of Reducing Logistic Cost in Indonesia & Port Development Priority Projects and Financing Strategy". To establish onestop service to meet customers' demand, the Company provides an open, convenient, flexible, and modern service area through cooperation between its Directorate of Commercial/Business Development and Directorate of Operations and Branches of Tanjung Priok Port.

2014

2015

Di tahun ini, IPC berhasil menerbitkan obligasi di pasar modal internasional atau *global bond* sebesar USD1,6 miliar. Selain itu, IPC juga semakin menorehkan prestasi di jaringan komunitas pelabuhan dunia dengan menjalin kerja sama dalam rangka *sister port* dengan Port of Townsville Ltd, Australia dan Shenzhen Port Authority. Dari sisi operasional, IPC telah melakukan banyak pemanfaatan dan pembaharuan di seluruh aspek fasilitas kepelabuhanan eksisting seperti penerapan sistem OPUS dalam pengelolaan terminal peti kemas di Tanjung Priok, Panjang, Pontianak dan Palembang. Salah satu Prestasi lainnya yang diukir oleh IPC di tahun 2015 adalah diresmikannya IPC *Corporate University* oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo. IPC *Corporate University* merupakan bagian dari program transformasi strategis dan visioner dalam rangka menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan *soft infrastructure*. Melalui IPC *Corporate University*, IPC berharap untuk dapat mencetak generasi gemilang yang berdaya saing tinggi dengan kompetensi teknis kepelabuhanan dan logistik, manajemen dan kepemimpinan yang dapat diandalkan.

In this year, IPC successfully issued bonds in the international capital markets or the global bond amounted to USD1.6 billion. In addition, IPC also increasingly created some achievements in the world with a network port community and worked together as the sister port of the Port of Townsville Ltd, Australia and Shenzhen Port Authority. From the operational point of view, the Company did a lot of utilization and renewal in all aspects of port existing facilities such as the implementation of the OPUS system in the management of container terminal in Tanjung Priok, Panjang, Pontianak and Palembang. Another achievement made by IPC in 2015 was the launch of IPC Corporate University by the President of Republic of Indonesia Joko Widodo. IPC Corporate University is part of a strategic and visionary transformation program in order to prepare things related to soft infrastructure. Through IPC Corporate University, the Company expects to be able to produce a glorious generation of highly competitive with the technical competence of port and logistics, management and reliable leadership.

Tahun 2018 merupakan tahun "Establishment" dengan fokus tahun ini adalah "volume growth", "profitability growth" dan "holding establishment".

2018 is the year of "Establishment" with the focus of "volume growth", "profitability growth" and "holding establishment".

2018

2016

Perusahaan memasuki fase pertama Corporate Roadmap, yaitu *Fit in Infrastructure* dengan fokus pada penataan tata kelola atau *governance* yang mencakup proses bisnis, SOP dan struktur; budaya perusahaan; restrukturisasi korporasi dan model bisnis; dan mendefinisikan kembali bisnis; yang disertai dengan penyesuaian (*fine-tuning*) dalam semua aspek. Salah satu pencapaian terbesar Perusahaan di tahun 2016 adalah peresmian pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok/ New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 13 September 2016. Selain itu Perusahaan juga berhasil mencapai skor GCG dengan nilai 93,316 dan skor KPKU dengan nilai 532,25.

The Company began the first phase of the Corporate Roadmap, The Fit in Infrastructure phase with the focus to governance management that covers business process, SOP and structure; corporate culture, corporate and business model restructuring; and business redefinition; along with fine tuning in all aspects. One of the biggest achievements of the Company in 2016 was the inauguration of the Kalibaru Container Terminal at Tanjung Priok/New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) by the President of the Republic of Indonesia Mr. Joko Widodo on September 13, 2016. In addition, the Company also managed to achieve 93.316 GCG score and 532.5 KPKU score.

2017

Pada *Phase Enhancement*, IPC menutup tahun 2017 dengan membukukan capaian kinerja keuangan dan operasional yang luar biasa. Hal ini disebabkan oleh karena untuk pertama kalinya dalam sejarah IPC didirikan, IPC mampu meraih pencapaian tertinggi yaitu untuk tahun buku 2017 pendapatan usaha dicatatkan sebesar Rp10,91 triliun dan laba bersih Rp2,21 triliun EBITDA Rp4,03 triliun, BOPO 70,15%. Sementara pada aspek operasional, realisasi trafik arus peti kemas tercapai 6,93 juta TEUs, arus barang terealisasi 57,09 juta ton, kunjungan kapal pencapaiannya 34.662 unit serta arus penumpang sebanyak 612.680 orang. IPC memberikan jasa layanan yang diberi nama "*Java South East Asia Express Services/Java SEA Express Services*" atau disingkat "*JAX Services*", dengan rute pelabuhan Tanjung Priok ke West Coast (LA dan Oakland) Amerika Serikat. Rute ini dilayani melalui perusahaan pelayaran CMA-CGM atau *Compagnie Maritime d'Affrètement-Compagnie Générale Maritime* yang juga membuka akses langsung ke Eropa. Kehadiran kapal kontainer berkapasitas 10.000 TEUs di Pelabuhan Tanjung Priok itu merupakan kapal terbesar yang pernah sandar di pelabuhan tersebut.

In Enhancement Phase, IPC closed the year 2017 by posting outstanding financial and operational performance achievements. This is because for the first time in the history since IPC was established, IPC achieved the highest achievement for the fiscal year 2017. Revenue was recorded at Rp10.91 trillion and net profit was at Rp2.21 trillion, EBITDA was at Rp4.03 trillion, BOPO was at 70.15%. While operationally, the realization of container flow traffic reached 6.93 million TEUs, the flow of goods reached 57.09 million tons, ships visit reached 34,662 units and passengers were as much as 612,680 people. IPC provides services under the JavaSouth East Asia Express Services/ Java SEA Express Services, or abbreviated as "JAX Services", connecting Tanjung Priok Port to US West Coast ports at LA and Oakland. This route is served through the CMA-CGM (Compagnie Maritime d'Affrètement-Compagnie Générale Maritime) shipping company, which also opens direct access to Europe. The presence of the first 10,000 TEUs container vessel at the Tanjung Priok Port signals the milestone of the largest ship ever to dock at the port.

Capaian IPC di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 12 cabang pelabuhan telah memiliki sistem operasi berbasis digital yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing cabang pelabuhan.
- IPC memperkenalkan *Single Truck Identity Database* (TID) yang merupakan basis data truk yang hilir mudik di pelabuhan IPC. Tanjung Priok sebagai *pilot project* dan akan diimplementasikan secara penuh di cabang pelabuhan lainnya pada tahun 2020.
- IPC berhasil membangun kerjasama *sister port* dengan 11 pelabuhan yaitu *Port of Ningbo-China, Port of Guangzhou - China, Port of Shenzhen-China, Port of Baku-Azerbaijan, Port of Townsville - Australia, Port of Lazaro Cardenas - Mexico, Port of Hamad-Qatar, Port of Djibouti - Afrika Timur, Port of Sabah-Malaysia dan Port of Los Angeles - Amerika*.
- Pertengahan tahun 2019, lembaga pemeringkat independen Standard & Poor's meningkatkan peringkat IPC menjadi BBB dari peringkat sebelumnya BBB- dengan *outlook stable* (prospek *stable*) yang menunjukkan bahwa tren kinerja positif perusahaan.
- Penilaian KPKU dan skor GCG menunjukkan tren peningkatan selama 4 tahun terakhir. Untuk skor KPKU pada tahun 2019 IPC berhasil mencapai 616,75 dengan predikat *Emerging Industry Leader*. Sementara dari aspek GCG tahun 2019 kembali mencatat peningkatan signifikan dan mencapai skor 98,550 dengan kategori Sangat Baik.
- Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Akta No. 09 tanggal 21 Agustus 2019 Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,

IPC's achievements in 2019 are as follows:

- 12 port branches already have digital-based operating systems that are to the level of needs of each port branch.
- IPC introduced Single Truck Identity Database (TID), which is a database of trucks going back and forth at the ports of IPC. Tanjung Priok as a pilot project and will be fully implemented in other port branches in 2020.
- IPC succeeded in establishing sister port cooperation with 11 ports, namely Port of Ningbo-China, Port of Guangzhou-China, Port of Shenzhen-China, Port of Baku-Azerbaijan, Port of Townsville - Australia, Port of Lazaro Cardenas - Mexico, Port of Hamad-Qatar, Port of Djibouti - East Africa, Port of Sabah-Malaysia and Port of Los Angeles - America.
- In mid-2019, the independent rating agency Standard & Poor's upgraded IPC rating to BBB from the previous rating of BBB- with a stable outlook indicating a positive performance trend of a company.
- KPKU assessment and GCG scores show an increasing trend over the past 4 years. For 2019 KPKU score, IPC reached 616.75 with the title of Emerging Industry Leader. While 2019 GCG aspect was recorded a significant increase once more and reached a score of 98.550 with the category of Very Good.
- Changes in Types of Share and Changes in Articles of Association Deed No. 09 dated August 21, 2019 Notariat Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,

2019



KONTRIBUSI TERBAIK KAMI

OUR BEST CONTRIBUTION

Sebagai operator pelabuhan terbesar di Indonesia, IPC memiliki visi untuk menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan. Dalam mewujudkan visi tersebut, IPC telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis mulai dari penguatan posisi dan arah IPC, termasuk penajaman visi, nilai dan karakter Perseroan. Manajemen juga telah menyusun *corporate roadmap* 2016-2020, yang secara berturut-turut ditetapkan sebagai tahapan *fit in infrastructure, enhancement, establishment, sustainable* dan *world class port*. Tahun 2019, yang merupakan fase *Sustainable*, dimana dalam tahap ini IPC melakukan ekspansi bisnis untuk mencapai kinerja unggul yang berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita IPC sebagai pengelola pelabuhan kelas dunia di tahun 2020, sebagai wujud kontribusi IPC sebagai BUMN kepada Indonesia.

Pada tahun 2019 IPC berfokus pada budaya bisnis berkinerja superior yakni dengan terus mencari cara untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dengan kebutuhan infrastruktur, waktu, tenaga usaha dan biaya yang sama atau kurang. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) juga terus mencari cara-cara baru atau berbeda untuk menambah nilai kepada pelanggan dan masyarakat Indonesia melalui inovasi-inovasi diantara meliputi:

DIGITALISASI PELABUHAN

IPC terus melakukan transformasi kepelabuhan, tidak terkecuali di tahun *sustainable* 2019. Di tahun ini IPC bertekad untuk bertransformasi menjadi *smart port* atau *digital port* dengan menggunakan basis IT. Adapun inovasi transformasi digitalisasi pelabuhan ini IPC lakukan di 3 area yang berbeda, antara lain operation/operasi pelabuhan, *back office* dan *Customer Satisfaction*.

1. *Operation*: Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan bongkar muat dengan pemangkasan waktu bongkar muat peti kemas akan menjadi modal utama dalam mendukung program tol laut dan sekaligus menjadi langkah penting menuju *World Class Port*;
2. *Back office*: Digitalisasi ini bertujuan untuk mengurangi proses berulang dan manual yang di lakukan di area administrasi perkantoran IPC;
3. *Customer*: Bertujuan untuk meningkatkan hubungan retensi dan kedekatan dengan pelanggan guna memenuhi ekspektasi pelanggan.

Dalam Aspek Operasi, di tahun 2019 Perseroan telah membuat terobosan dengan implementasi *digital port* pada lini darat dan laut, diantaranya yaitu implementasi *autogate*, NPK TOS (*Non Petikemas Terminal Operating System*), *Integrated Container Freight*

As the largest port operator in Indonesia, IPC has a vision to become a world-class port operator that excels in operations and services. To realize this vision, IPC has implemented various strategic steps ranging from strengthening IPC's position and directions, including sharpening the Company's vision, values and character. The management has also prepared a 2016-2020 corporate roadmap, broken down into the stages of infrastructure, enhancement, establishment, sustainable and world-class port. 2019 was the Sustainable phase, where in this phase IPC expanded its business to achieve sustainable superior performance to realize IPC's aspiration to be the world-class port operator in 2020, as a form of IPC's contribution as an SOE to Indonesia.

In 2019, IPC focused on superior performance business culture by keep on seeking for methods to reach more customers with the same or less infrastructure, time, labor and cost. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) also continued to look for new or different ways to add value to customers and Indonesian society, through innovations that include:

DIGITIZING PORTS

IPC continued to transform ports, including in the 2019 sustainable year. In this year, IPC was determined to transform into a smart port or digital port using an IT base. The port transformation digitalization innovation has been done by IPC in 3 different areas, including port operations, back office and Customer Satisfaction.

1. *Operation*: This digitalization aims to improve the effectiveness and efficiency of loading and unloading activities by reducing container loading and unloading time to become a major capital in supporting the sea toll program and at the same time an important step towards World Class Port;
2. *Back office*: This digitalization aims to reduce the repetitive and manual processes carried out in IPC office administration area;
3. *Customer*: Aiming to improve retention and closeness with customers to meet customer expectations.

In the Operational Aspect, in 2019, the Company has made a breakthrough with the implementation of digital ports for its land and sea lines, including the implementation of autogate, NPKTOS (*Non-Container Terminal Operating System*), *Integrated*

Station (CFS Center), Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Online, Terminal Operating System (TOS) dan Auto Tally di terminal peti kemas, penerapan Marine Operating System (MOS), Vessel Traffic System (VTS), Vessel Management System (VMS), serta E-Service pada sejumlah Cabang Pelabuhan.

Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan jasa kepelabuhanan ini selain bertujuan untuk memudahkan pengguna jasa dalam bertransaksi, juga untuk mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) terhadap transparansi biaya pelayanan jasa. Sebagai salah satu contohnya yaitu CFS Center, yang merupakan opsi yang dapat dipilih pengguna jasa untuk memudahkan transaksi. Keunggulannya adalah proses pelayanan menjadi ringkas/ sederhana dan transparan sehingga menjadi efisien bagi pengguna jasa.

Integrasi CFS mencakup manajemen data pelanggan, CFS booking service, layanan nota, pembayaran elektronik, tracking kargo, dan customer care. Selain sistem CFS yang sudah berjalan online dan beroperasi 24/7, ke depannya, sistem layanan CFS akan terus disempurnakan dan ditambah fitur baru, seperti multichannel payment serta invoice langsung ke pemilik barang/ consignee.

Di sisi Back Office, pada tahun 2019 IPC telah melakukan integrasi antar aplikasi system Human Capital, Pengembangan dashboard Kinerja BI Analytics Capability, iBOS atau IPC Board Organizing System sebagai media komunikasi dan rapat direksi IPC, implementasi sistem akuntansi biaya pelayanan terminal petikemas dan beberapa sistem lain.

Sedangkan dalam aspek hubungan pelanggan, IPC juga telah mengembangkan sistem pada sisi pengelolaan interaksi pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa. IPC mengaktifkan enam fitur aplikasi digital Customer Relationship Management (CRM) di seluruh Kantor Cabang dan dua Entitas Anak IPC (PT Pelabuhan Tanjung Priok dan PT IPC Terminal Peti Kemas). Keenam fitur aplikasi Digital CRM, yang terdiri dari Master Customer Data; Customer Profiling; Customer Service; Customer Visit Management; Customer Survey; dan Sales, seluruhnya telah diaktifkan (go live). Aplikasi tersebut merupakan bagian dari strategi dan proses pengelolaan interaksi dengan pelanggan.

Dengan adanya aplikasi digital ini, pelanggan atau calon pelanggan punya akses khusus untuk menyampaikan pertanyaan, permintaan atau keluhan melalui e-mail, yang akan direspon secara otomatis (auto reply). Sesuai standar ketentuan Service

Container Freight Station (CFS Center), Temporary Piling Place (TPS) Online, Terminal Operating System (TOS) and Auto Tally at container terminals, the application of Marine Operating System (MOS), Vessel Traffic System (VTS), Vessel Management System (VMS), and E-Service in a number of Port Branches.

Optimizing information technology in port services is not only aimed at facilitating service users in transactions, but also to support Good Corporate Governance (GCG) related to the transparency of service costs. One example being the CFS Center, which is an option that can be chosen by service users to facilitate transactions. The advantage being that the service process becomes concise/simple and transparent so that it becomes efficient for service users.

CFS integration includes customer data management, CFS booking services, receipt services, electronic payments, cargo tracking, and customer care. As well as the CFS system that runs online and operates 24/7, the CFS service system will continue to be refined and new features will be added, such as multichannel payments and direct invoices to goods owners / consignees.

In terms of the Back Office, in 2019 IPC has integrated Human Capital system applications, Development of BI Analytics Capability Performance dashboard, iBOS or IPC Board Organizing System as an IPC director's communication media and meeting, implementation of accounting system for container terminal service costs and several other systems.

Whereas in the customer relations aspect, IPC has also developed a customer interaction management system that aims to increase service user satisfaction. IPC runs six digital Customer Relationship Management (CRM) application features in all Branch Offices and its two IPC Subsidiaries (PT Tanjung Priok Port and PT IPC Container Terminal). The six Digital CRM application features includes: Customer Data Master; Customer Profiling; Customer Service; Customer Visit Management; Customer Survey; and Sales, all of which have gone live. This application is part of the strategy and process of managing interactions with customers.

Through this digital application, customers or prospective customers will have special access to submit questions, requests or complaints via email, which will be responded to automatically (auto reply). In accordance with the standards of the Service Level



Level Agreement (SLA), saran atau keluhan tersebut kemudian akan direspon oleh IPC dalam waktu paling lambat satu jam. Dengan demikian, CRM dapat memberikan manfaat besar bagi pelanggan, salah satunya dengan adanya *tools* untuk memonitor dan menganalisis semua kebutuhan pelanggan maka respon dapat diberikan dengan lebih cepat dan tepat. Dengan fitur *customer service* misalnya, manajemen bisa mendapatkan gambaran tentang interaksi pelanggan di semua cabang, serta memantau penyelesaian persoalannya secara *real time*.

Penerapan CRM ini juga merupakan langkah nyata atas komitmen IPC yang terus meningkatkan kapabilitas sebagai *Digital Port*. Selain CRM, IPC juga mengembangkan layanan *e-service* berupa *Integrated Billing System (IBS)* yang akan mengintegrasikan sistem pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan yang dioperasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero) yang sekaligus menjadi implementasi program Kementerian BUMN.

PENGEMBANGAN TRANSHIPMENT PORT

Upaya penting berikutnya yang telah dilaksanakan Manajemen yaitu penguatan peran Pelabuhan Tanjung Priok sebagai *transhipment port* yang secara reguler telah melayani kapal-kapal besar dengan *direct call services* ke beberapa tujuan akhir baik di Eropa, Amerika, Australia maupun China melalui kerjasama dengan *shipping line* raksasa dunia seperti CMA-CGM, COSCO dan MSC. IPC telah berhasil merealisasikan kerjasama dengan CMA-CGM untuk menghubungkan Indonesia dengan Amerika secara langsung, melalui pembukaan rute Jakarta - Los Angeles (*direct call*) dengan menggunakan kapal berukuran besar berkapasitas lebih dari 10.000 TEUs.

Selain kapal-kapal CMA CGM, terdapat beberapa kapal besar (*mother vessel*) yang juga rutin berlabuh di Tanjung Priok seperti generasi *Post – Panamax APL* yang memiliki kapasitas di atas 10.000 TEUs dengan rute layanan langsung yang ditawarkan antara lain tujuan Eropa Utara, Pantai Barat Amerika Serikat dan Intra Asia. IPC juga menambah layanan *direct call* ke Asia/China dengan *shipping line* COSCO, layanan *direct call* ke Asia/Vietnam dengan *shipping line* SM Lines, serta layanan *direct call* ke Korea Selatan oleh MSC.

Pencapaian ini membuktikan bahwa IPC mampu menyediakan layanan setara dengan pelabuhan kelas dunia lainnya dan memiliki kapasitas yang baik dalam operasional dan pelayanan. *Direct call* tersebut sekaligus menjadi wujud kontribusi aktif IPC

Agreement (SLA) provisions, the suggestions or complaint will then be responded to by IPC within a maximum of one hour. As a result, CRM will provide great benefits for customers, one being tools to monitor and analyze all customer needs so that responses can be made more quickly and precisely. Through the customer service feature, management can get an overview of customer interactions in all branches, as well as be able to monitor the resolution of problems in real time.

The CRM application is also a real step towards IPC's commitment to continually improving its capabilities as a Digital Port. In addition to CRM, IPC has also developed an e-service service called the Integrated Billing System (IBS), which integrates the port service systems in ports operated by PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero) and at the same time will become part of the Ministry of SOE program.

TRANSHIPMENT PORT DEVELOPMENT

The next important effort implemented by Management was the strengthening of Tanjung Priok Port's role as a transhipment port that regularly served large vessels with direct call services to several final destinations in Europe, America, Australia and China through cooperation with giant global shipping lines such as CMA-CGM, COSCO and MSC. IPC has successfully collaborated with CMA-CGM to directly connect Indonesia and the USA, resulting in the opening of the Jakarta - Los Angeles (direct call) route using large-sized ships (capacity of more than 10,000 TEUs).

In addition to CMA CGM ships, there are several mother vessels that also routinely dock in Tanjung Priok such as the APL Post-Panamax generation which has a capacity of more than 10,000 TEUs with direct service routes offered including the North European destination, the American West Coast Union and Intra Asia. IPC has also added direct call services to Asia/China with the COSCO shipping line, direct call services to Asia/Vietnam with shipping line SM Lines, as well as direct call services to South Korea by MSC.

These achievements prove that IPC is capable of providing services equal to other world-class ports, and has good capacity for operations and services Direct call is also a manifestation of IPC's active contribution in reducing logistics costs and facilitating

dalam pengurangan biaya logistik dan fasilitasi kegiatan ekspor-impor Indonesia, dimana dengan adanya pelayaran langsung dari Pelabuhan Tanjung Priok baik menuju Amerika Serikat, Eropa maupun negara tujuan lainnya biaya pengiriman barang ekspor maupun impor menjadi lebih efisien karena tidak perlu transit di pelabuhan negara lain terlebih dahulu. Selain itu kapal-kapal besar tersebut memberikan layanan angkutan barang yang lebih kompetitif dan waktu pengiriman yang lebih cepat sehingga berpotensi meningkatkan daya saing produk-produk ekspor Indonesia.

Catatan penting lainnya adalah sampai tahun 2019 telah direalisasikannya 10 (sepuluh) kerjasama *sister port* yaitu antara Pelabuhan Tanjung Priok dengan Port of Djibouti (Afrika Timur), port of Lazaro Cardenas (Mexico), port of Townsville (Australia), Port of Hamad (Qatar), Port of Shenzhen (China), port of Ningbo (China), Port of Guangzhou (China), Port of Baku (Azerbaijan), Port of Sabah, dan Bangladesh. Lingkup kerjasama dari *Sister Port* di antaranya adalah terkait *sharing knowledge*, kerja sama bisnis, *internship program*, *benchmarking*, pertukaran informasi, dan potensi kerja sama lainnya dalam rangka memperluas jaringan di sektor maritim dan logistik. Inisiatif *Direct Call* dan pengembangan kerjasama *Sister Port* tersebut secara keseluruhan merupakan bagian dari dukungan IPC pada upaya Pemerintah dalam merealisasikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Fokus di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga performansi perusahaan yang telah dicapai dengan berbagai cara diantaranya Integrasi CSR yang saling menguntungkan, *engagement* prinsip GCG & standarisasi GCG di Lingkungan IPC (Anak Perusahaan), Implementasi "*customer retention*", Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan/SML (ISO 14001:2015) dan sertifikasi di bidang lainnya;
2. *National Connectivity Program by Implementing National Strategic Project* dengan pembangunan Pelabuhan Kijing, gedung Maritime Tower, Pengoperasian Museum Maritim & Pengoperasian Pelabuhan Kalibaru;
3. *Growth Strategy - Organic & An-organic* dengan mencari peluang bisnis baru dengan bekerja sama dengan mitra strategis misal *Shipping Line* atau *Bunkering in western java*, atau sektor maritim lain yang memungkinkan, pengembangan KEK Kijing, KEK Bengkulu, Pembangunan *New Priok Eastern Access* dan Pembangunan Tol Cibitung-Cilincing;

Indonesia's import-export activities, where the direct shipping from Tanjung Priok Port to the United States, Europe and other destination countries is more efficient as there is no need to transit in other countries' ports. In addition, these large vessels provide more competitive freight services and faster delivery times, which has the potential to increase the competitiveness of Indonesian export products.

Another important note is until the year of 2019, 10 (ten) sister port collaborations have been realized, namely between Tanjung Priok Port and Port of Djibouti (East Africa), Port of Lazaro Cardenas (Mexico), Port of Townsville Australia, Port of Hamad (Qatar), Port of Shenzhen (China), Port of Ningbo (China), Port of Guangzhou (China), Port of Baku (Azerbaijan), Port of Sabah, and Bangladesh. The scope of cooperation with the Sister Ports includes knowledge sharing, business cooperation, internship programs, benchmarking, information exchange, and other potential cooperations to expand the maritime and logistics sector network. The Direct Call initiative and the Sister Port collaboration development are part of IPC's support for the Government's efforts in realizing Indonesia as a World Maritime Axis.

Focuses in 2019 are:

1. Maintain Company performance that has been achieved in various ways, including CSR integration that is mutually beneficial, engagement with GCG principles and GCG standardization in IPC environment (subsidiaries), implementation of "*customer retention*", implementation of Environmental Management Systems/SML (ISO 14001: 2015) and certification in other fields;
2. National Connectivity Program by implementing the National Strategic Project with the construction of Kijing Port, Maritime Tower building, the operation of Maritime Museum and the operation of Kalibaru Port;
3. Growth Strategy - Organic and An-organic by looking for new business opportunities through collaborating with strategic partners such as shipping line or bunkering in western java, or other possible maritime sectors, development of Kijing KEK, Bengkulu KEK, New Priok Eastern Access development and construction of Cibitung-Cilincing Toll.



4. *Initiation of global expansion* dilakukan dengan Inisiasi Kerjasama dengan *Port Operator/Authority* beberapa pelabuhan (Vietnam, Australia, dan wilayah asia lainnya - eg: Bangladesh) & *Follow up* kerja sama dengan *Port Operator/Authority* beberapa pelabuhan (Djibouti, Baku, Ning Bo, dll).

Target dimaksud diturunkan menjadi target per Direktorat dimana masing-masing Direktorat mempunyai fokus masing-masing yaitu, target Direktorat Utama adalah *Governance Culture*, Target Wakil Direktur Utama adalah *Excellent Parenting Strategy and Procurement Process*, target Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha adalah *Ecosystem Revenue Creativity*, Target Direktorat Teknik adalah *Port Development and infrastructure/ equipment 1st class performance and green port*, target Direktorat Operasi adalah *Digitalized Ecosystem*, target Direktorat Keuangan adalah *financial solidity creative financing IPC Group*, target Direktorat SDM adalah *Fully implemented HRD system and corporate culture*, dan target Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis adalah *logistic business enhancement and transformation in IPC group*.

4. Initiation of global expansion, which is carried out by initiating cooperation with several port operators/authorization ports (Vietnam, Australia and other Asian regions such as Bangladesh) and following up on cooperation with several port operators/ authorization ports (Djibouti, Baku, Ning Bo, and others).

The intended targets are cascade to target per Directorate, in which each Directorate has their respective focus namely, the Main Directorate's target is Governance Culture, the Deputy President Director's target is Excellent Parenting Strategy and Procurement Process, the Directorate of Commercial and Business Development's target is Ecosystem Revenue Creativity, the Directorate of Engineering's target is Port Development and infrastructure/equipment 1st class performance and green port, the Directorate of Operations' target is Digitalized Ecosystem, the Directorate of Finance's target is financial solidity creative financing of IPC Group, the Directorate of Human Capital's target is Fully implemented HRD system and corporate culture, and the Directorate of Transformation and Business Development's target is logistics business enhancement and transformation in IPC group.

Inisiatif di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2019 merupakan fase “*Sustainable Superior Performance*” yang fokus pada *Growth Strategy* antara lain *Non-Organic and Organic Growth, National Connectivity Program by implementing strategic project* dan *Global Expansion Program*;
2. Fokus dari *Growth Strategy* antara lain:
 - a. *Non-Organic and Organic Growth* yang merupakan peningkatan pendapatan Perusahaan dengan mengimplementasikan growth strategy dan ekspansi ke Luar Negeri melalui Anak Perusahaan.
 - b. *National Connectivity Program by implementing strategic project* yang berkomitmen untuk dapat meningkatkan konektivitas antar pelabuhan dan kawasan industri melalui program *Integrated Port Network* dan Pengembangan Pembangunan Proyek;
 - c. *Global Expansion Program*, inisiasi aliansi pasar global.

Sustainable Superior Performance merupakan target per Direktorat di IPC. Target Direktorat Utama adalah *Governance Culture*, Target Wakil Direktur Utama adalah *Excellent Parenting Strategy and Procurement Process*, target Direktorat Komersial dan Pengembangan adalah *Usaha Ecosystem Revenue Creativity*, Target Direktorat Teknik adalah *Port Development and infrastructure/ equipment 1st class performance and green port*, target Direktorat Operasi adalah *Digitalized Ecosystem*, target Direktorat Keuangan adalah *Financial solidity creative financing IPC Group and parenting system implementation*, target Direktorat SDM adalah *Fully implemented HRD system and corporate culture*, dan target Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis adalah *Logistic business enhancement and transformation in IPC group*.

Initiatives in 2019 are as follows:

1. The year 2019 is the phase of “*Sustainable Superior Performance*” which focuses on the *Growth Strategy* including *Non-Organic and Organic Growth*, the *National Connectivity Program* by implementing strategic projects and *Global Expansion Program*;
2. The focus of the *Growth Strategy* includes:
 - a. *Non-Organic and Organic Growth* is an increase in Company's revenue by implementing growth strategies and expansion abroad through its subsidiaries.
 - b. *National Connectivity*
This program carries out strategic projects that are committed to improving connectivity between ports and industrial areas through *Integrated Port Network program* and *Project Development*;
 - c. *Global Expansion Program*. initiating global market alliance.

Sustainable Superior Performance is a target per Directorate at IPC. The Main Directorate's target is *Governance Culture*, The Vice President Director's target is *Excellent Parenting Strategy and Procurement Process*, the target of the Directorate of Commercial and Development is *Ecosystem Revenue Creativity Business*, the Technical Directorate's Target is *Port Development and infrastructure / equipment, 1st class performance and green port*, the Directorate of Operation's target is *Digitalized Ecosystem*, The Finance Directorate's target is *Financial Solidity, IPC Group's creative financing and parenting system implementation*, The Directorate of Human Capital's target is *Fully implemented HRD system and corporate culture*, and the target of Directorate of Business Transformation and Development is *Logistics business enhancement and transformation in the IPC group*.



CORPORATE ROADMAP

CORPORATE ROADMAP

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki target untuk menjadi *World Class Modern Port, Excellent in Operation and Service*. Proses untuk mencapai target ini dibagi menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu *Fit in Infrastructure, Enhancement, Establishment, Sustainable* dan *World Class*. Masing-masing tahapan ini direncanakan dapat tercapai dalam kurun waktu satu tahun.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) aims to become *A World Class Modern Port, Excellent in Operation and Service*. The process to achieve this target is divided into 5 (five) stages, including *Fit in Infrastructure, Enhancement, Establishment, Sustainable* and *World Class*. Each of these stages is planned to be attained with in one year.

2016 FIT IN INFRASTRUCTURE

FINE TUNING IN EVERY AREA

- Governance: Business Process, SOP, Structure
- Culture
- Corporate and Sub Business Model/Restructuring
- Re-define Business

2018 ESTABLISHMENT

ESTABLISHMENT OF PERFORMANCE

- Volume Growth
- Profitability Growth
- Holding Establishment

2017 ENHANCEMENT

STRENGTHENING/ENHANCING BUSINESS

- Operational and Service in Procurement
- Expansion of Subsidiaries
- Infrastructure Development (Greenfield Project) and Holding
- Optimize IT Utilization

2019 SUSTAINABLE

SUSTAINABLE SUPERIOR PERFORMANCE

- Sustain Corporate Performance that have been achieved
- National Connectivity Program by Implementing National Strategic Project
- Growth Strategy : Organic & An-organic
- Initiation of Global Expansion

2020 WORLD CLASS

WORLD CLASS PERFORMANCE

- *Establishment of Global Foot Print*
- *Establishment of World Class Terminal Operator*
- *Implementation of Green Port and Smart Port*
- *Excellence Competing Subsidiaries*
- *Initiation Integrated Port Network (IPN) & Implementation Proyek Strategis Nasional (PSN)*



KILAS KINERJA

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

CAPAIAN PENTING 2019

2019 KEY ACHIEVEMENTS



Realisasi pendapatan operasi tahun 2019 **Rp11,14** triliun atau turun 2,58% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp11,44 triliun.

Operating revenues in 2019 was realized at Rp11.14 trillion, decreased by 2.58% compared to 2018 realization of Rp11.44 trillion.



Pendapatan Operasional Lainnya dan Pendapatan Keuangan tahun 2019 **Rp1,80** triliun atau naik **19,85%** dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,50 triliun.

Other Operating Revenues and Financial Revenues in 2019 amounted to Rp1.80 trillion, increased by 19.85% compared to 2018 realization of Rp1.50 trillion.



Laba tahun berjalan naik **3,01%** di tahun 2019 mencapai **Rp2,50 triliun** dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp2,43 triliun.

Profit for the year grew by 3.01% in 2019 to reach Rp2.50 trillion, compared to 2018 of Rp2.43 trillion.



Total Aset naik **1,18%** di tahun 2019 mencapai **Rp52,04 triliun** dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp51,43 triliun.

Total Assets increased by 1.18% in 2019 to reach Rp52.04 trillion, compared to 2018 of Rp51.43 trillion.



Ekuitas naik **10,29%** di tahun 2019 mencapai **Rp18,13 triliun** dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp16,43 triliun.

Equity increase of 10.29% in 2019 to reach Rp18.13 trillion, compared to 2018 of Rp16.43 trillion.



Arus penumpang naik **59,20%** di tahun 2019 mencapai **1.138.179 orang** dibandingkan tahun 2018 yang sebanyak 714.931 orang.

Passenger flows increased by 59.20% in 2019 reaching 1,138,179, compared to 2018 of 714,931 people.



Skor GCG di tahun 2019 naik menjadi **98,550** dibanding tahun 2018 sebesar 98,303

GCG score in 2019 increased to 98,550 compared to 2018 by 98,303



Peringkat 1 kategori BUMN Non Keuangan Non Listed Penghargaan Laporan Tahunan 2018 pada ajang *Annual Report Award 2018*.

Rank 1 in the category of 2018 Annual Report of Non-Listed Non-Financial SOEs at the 2018 Annual Report Award.



PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Sebagai **Big Corporate Kategori Tata Kelola Terbaik** pada ajang Anugerah BUMN 2019.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as the Big Corporate in Best Governance Category at the 2019 SOE Award event.



PERFORMA 2019

2019 PERFORMANCES



Sepanjang tahun 2019, Perseroan berhasil meningkatkan Laba Tahun Berjalan sebesar 3,01% dan meningkatkan Total Aset sebesar 1,18%.

Throughout 2019, the Company succeeded in increasing Income for the Year by 3.01% and increasing Total Assets by 1.18%.



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

IKHTISAR KEUANGAN DAN RASIO KEUANGAN

FINANCIAL HIGHLIGHTS AND FINANCIAL RATIO

Tabel Ikhtisar Keuangan (dalam Ribuan Rupiah)
Financial Highlights (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION					
Aset					
Assets					
Aset Lancar					
Current assets					
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	15.603.533.329	18.018.671.479	14.207.330.332	14.467.875.678	16.409.813.901
Investasi jangka pendek Short term investment	2.596.701.126	3.836.007.289	6.999.082.698	4.787.160.000	3.059.900.000
Piutang usaha – neto					
Trade receivables - net					
Pihak ketiga Third parties	712.826.744	634.078.032	549.154.117	404.004.378	444.862.341
Pihak berelasi Related parties	135.198.738	155.875.322	149.599.560	80.267.487	98.101.853
Piutang lain-lain – neto					
Other receivables - net					
Pihak ketiga Third parties	45.117.978	9.530.083	49.765.763	31.679.063	471.142.531
Pihak berelasi Related parties	784.951.419	640.168.731	738.312.346	108.443.481	54.843.542
Uang muka dan beban dibayar di muka Advances and prepaid expenses	104.181.981	120.068.178	144.176.602	153.791.098	137.364.743
Pendapatan masih akan diterima					
Accrued revenues					
Pihak ketiga Third parties	258.865.863	256.914.263	303.926.301	201.554.511	301.819.703
Pihak berelasi Related parties	46.586.491	65.953.809	26.573.499	63.312.642	30.686.264
Persediaan Inventories	82.940.596	59.139.424	56.480.952	49.241.502	53.122.512
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	680.605.067	751.789.998	557.236.979	432.913.175	449.603.826
Aset lancar Lainnya Other current assets	10.253.126	6.139.521	-	-	-
Total Aset Lancar Total Current Assets	21.061.762.458	24.554.336.129	23.781.639.149	20.780.243.015	21.511.261.216
Aset Tidak Lancar					
Non-current Assets					
Investasi jangka Panjang Long term investment	3.211.023.600	3.211.737.431	1.554.888.854	1.619.970.587	1.792.763.739
Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in Associates	2.757.291.330	2.362.825.278	1.554.888.854	1.619.970.587	1.792.763.739

Tabel Ikhtisar Keuangan (dalam Ribuan Rupiah)
Financial Highlights (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
Investasi pada Penyertaan Saham Investment in Share of Stocks	2.757.291.330	2.362.825.278	1.554.888.854	1.619.970.587	1.792.763.739
Properti investasi – neto Investment properties - net	357.295.487	377.142.447	394.342.020	415.822.791	435.830.922
Aset tetap – neto Fixed assets - net	13.387.155.835	12.628.997.433	11.325.850.596	10.436.641.420	10.275.380.615
Aset kerjasama operasi – neto Joint operation assets - net	461.100.101	482.390.189	507.560.396	535.920.134	553.704.635
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	73.873.814	47.498.765	44.644.534	37.017.244	15.271.329
Aset tak berwujud – neto Intangible assets - net	10.818.271.480	9.038.949.144	8.296.435.366	8.617.040.414	7.181.073.270
Taksiran tagihan restitusi pajak Estimated claims for tax	958.917.154	841.931.567	839.786.756	668.961.286	655.267.475
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	1.711.199.806	249.893.918	474.940.688	359.883.364	167.951.508
Total Aset Tidak Lancar Total Non-current Assets	30.978.837.277	26.878.540.894	23.438.449.210	22.691.257.240	21.077.243.493
Total Aset Total Assets	52.040.599.735	51.432.877.023	47.220.088.359	43.471.500.255	42.588.504.709
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity					
Liabilitas Liabilities					
Liabilitas Jangka Pendek Current liabilities					
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	34.193.914	4.000.000	-	-	-
Utang usaha Trade payables					
Pihak ketiga Third parties	359.929.551	418.899.213	367.571.206	401.719.610	626.787.335
Pihak berelasi Related parties	1.076.552.787	1.247.008.500	999.183.968	944.037.756	806.699.888
Pendapatan diterima di muka jangka pendek Short-term unearned revenues	845.489.224	834.098.021	778.706.786	457.410.169	349.955.442
Utang pajak Taxes payable	445.015.994	389.495.675	441.919.999	195.577.132	398.803.105
Beban akrual Accrued expenses	2.274.726.626	2.290.832.616	2.168.022.495	1.148.153.513	902.033.374



Tabel Ikhtisar Keuangan (dalam Ribuan Rupiah)
Financial Highlights (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang Current maturities of long-term liabilities					
Utang bank Bank loans	12.000	-	1.860.603	1.724.970	1.535.322
Sewa pembiayaan Finance leases	-	-	-	635.202	586.829
Liabilitas jangka panjang lainnya - pihak berelasi Other long-term liabilities - Related parties	19.887.737	38.272.280	54.127.289	63.047.890	60.432.856
Liabilitas jangka pendek lainnya Other short-term liabilities					
Pihak ketiga Third parties	206.170.895	185.350.553	165.639.036	183.421.670	187.083.860
Pihak berelasi Related parties	91.743.873	90.237.622	95.916.891	96.993.402	130.253.043
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	5.353.722.601	5.498.194.480	5.072.948.273	3.492.721.314	3.464.171.054
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current liabilities					
Utang obligasi Bonds payables	21.984.178.194	22.890.166.969	21.376.332.500	21.178.512.268	21.732.391.821
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar Long-term liabilities - net of current maturities					
Utang bank Bank loans	114.978.000	-	-	1.860.603	3.676.610
Sewa pembiayaan Finance leases	-	-	-	-	431.796
Liabilitas jangka panjang lainnya Other long-term liabilities					
Pihak ketiga Third parties	225.013.928	234.402.238	219.299.877	221.112.329	227.020.287
Pihak berelasi Related parties	10.250.000	-	-	-	-
Pendapatan diterima di muka jangka panjang Short-term unearned revenues	4.005.631.257	4.290.892.916	4.496.181.101	4.754.664.509	4.532.294.577
Liabilitas imbalan kerja Employee benefit liabilities	1.966.325.908	1.776.917.294	1.806.109.326	1.554.159.311	1.291.162.024
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	254.289.069	307.846.807	301.299.484	356.873.980	389.960.436

Tabel Ikhtisar Keuangan (dalam Ribuan Rupiah)
Financial Highlights (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	28.560.666.356	29.500.226.224	28.199.222.288	28.067.183.000	28.176.937.551
Total Liabilitas Total Liabilities	33.914.388.957	34.998.420.704	33.272.170.561	31.559.904.314	31.641.108.605
Ekuitas Equity					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owner of parent entity					
Modal saham - nilai nominal Rp1,000,000 (nilai penuh) per saham Share capital - par value Rp1,000,000 (full amount) per share					
Modal dasar – 4,000,000 saham Authorized capital - 4,000,000 shares					
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1,444,029 saham Issued and fully paid capital - 1,444,029 shares	1.444.029.000	1.444.029.000	1.444.029.000	1.444.029.000	1.444.029.000
Modal donasi Donated capital	26.825.982	26.825.982	26.825.982	26.825.982	26.825.982
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	(317.597.475)	(317.597.475)	(317.597.475)	(317.597.475)	(317.597.475)
Saldo laba Retained earnings					
Ditetapkan penggunaannya Appropriated	13.273.514.540	11.726.994.846	10.201.069.392	9.153.232.292	8.196.831.000
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	2.455.762.802	2.379.261.695	2.179.893.506	1.415.580.254	1.232.455.771
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income	(105.008.860)	(114.597.288)	(72.365.832)	53.674.364	236.226.457
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk – neto Equity attributable to owner of parent entity - net	16.777.525.989	15.144.916.760	13.461.854.573	11.775.744.417	10.818.770.735
Kepentingan nonpengendali Non-controlling interests	1.348.684.789	1.289.539.559	486.063.225	135.851.524	128.625.369



Tabel Ikhtisar Keuangan (dalam Ribuan Rupiah)
Financial Highlights (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
Ekuitas – neto Equity - net	18.126.210.778	16.434.456.319	13.947.917.798	11.911.595.941	10.947.396.104
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equities	52.040.599.735	51.432.877.023	47.220.088.359	43.471.500.255	42.588.504.709

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Pendapatan operasi Operating revenues	11.141.752.225	11.436.700.894	10.655.574.667	8.926.064.770	7.703.628.326
Pendapatan konstruksi Construction revenues	1.542.697.617	781.658.834	319.744.293	1.392.135.798	2.623.090.159
Beban operasi Operating expenses	(8.520.357.673)	(8.042.554.820)	(7.397.914.132)	(6.411.461.985)	(5.795.468.490)
Beban konstruksi Construction expenses	(1.542.697.617)	(781.658.834)	(319.744.293)	(1.392.135.798)	(2.623.090.159)
Pendapatan operasi lainnya – neto Other operating income - net	717.114.514	(196.360.574)	11.410.021	208.659.785	141.403.991
LABA USAHA INCOME FROM OPERATIONS	3.338.509.066	3.197.785.500	3.269.070.556	2.723.262.570	2.049.563.827
Pendapatan keuangan Finance income	836.260.112	688.914.300	534.789.328	287.625.782	247.860.282
Beban keuangan Finance Expenses	(1.200.237.089)	(1.130.782.016)	(1.064.136.560)	(1.043.385.641)	(885.967.925)
Bagian laba entitas asosiasi Equity in income of associates	240.568.343	376.200.594	79.081.852	72.794.376	286.217.128
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan Profit Before Final Tax and Corporate Income Tax	3.215.100.432	3.132.118.378	2.818.805.176	2.040.297.087	1.697.673.312
Beban pajak final Final tax expenses	(509.692.491)	(357.113.222)	(345.222.944)	253.178.548	(118.463.540)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Profit Before Corporate Income Tax	2.705.407.941	2.775.005.156	2.473.582.232	1.787.118.539	1.579.209.772
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax Benefit (Expense)					
Kini Current	(259.917.054)	(353.981.768)	(291.831.888)	(237.965.664)	(259.454.472)
Tangguhan Deferred	58.319.461	9.686.466	23.976.675	(11.938.104)	35.325.324
LABA TAHUN BERJALAN INCOME FOR THE YEAR	2.503.810.348	2.430.709.854	2.205.727.019	1.537.214.771	1.355.080.624

Tabel Ikhtisar Keuangan (dalam Ribuan Rupiah)
Financial Highlights (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Items that will not be reclassified to profit or loss					
Pengukuran kembali program imbalan pasti Remeasurement of defined benefit plan	(68.567.665)	32.019.693	(159.232.831)	(179.146.070)	(100.865.711)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Items that will be reclassified to profit or loss					
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Exchange difference due to financial statements translation	254.857.849	(18.329.765)	23.609.863	(3.987.667)	159.036.520
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual Changes in fair value of available-for-sale financial assets	(170.053.962)	(54.273.223)	8.946.393	-	-
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	2.520.046.570	2.390.120.559	2.079.050.444	1.354.081.034	1.413.251.433
Labanya Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Income for the year attributable to:					
Pemilik entitas induk Owner of parent entity	2.455.762.801	2.379.261.695	2.179.893.506	1.511.459.775	1.328.335.292
Kepentingan non pengendali Non-controlling interests	48.047.547	51.448.159	25.833.513	25.754.996	26.745.332
Labanya Tahun Berjalan Income for the year	2.503.810.348	2.430.709.854	2.205.727.019	1.537.214.771	1.355.080.624
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total comprehensive income for the year attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	2.473.310.918	2.337.030.239	2.053.853.310	1.328.907.682	1.386.359.578



Tabel Ikhtisar Keuangan (dalam Ribuan Rupiah)
Financial Highlights (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
Kepentingan Non Pengendalian Non-controlling interests	46.735.652	53.090.320	25.197.134	25.173.352	26.891.855
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	2.520.046.570	2.390.120.559	2.079.050.444	1.354.081.034	1.413.251.433
Laba Per Saham Dasar (Nilai Penuh) Basic Earnings Per Share (Full Amount)	1.700.633	1.647.655	1.509.591	1.046.696	919.881

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities					
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	11.677.175.952	10.414.180.403	9.545.892.387	8.512.075.301	7.620.375.727
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya Payment to contractors, suppliers and others	(5.642.396.334)	(4.849.497.861)	(4.316.101.188)	(4.118.471.372)	(3.406.547.357)
Pembayaran kepada karyawan Payment to employees	(2.609.390.364)	(2.324.087.858)	(2.245.546.714)	(1.833.435.900)	(1.172.297.373)
Pembayaran pajak penghasilan Payment for income tax	(1.995.196.071)	(541.932.045)	(391.972.308)	(141.735.373)	(685.793.665)
Penghasilan bunga Interest received	719.435.193	604.025.265	439.649.013	243.908.383	212.351.217
Pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya Payment of interest and other financial charges	(1.025.736.701)	(1.064.789.688)	(984.317.563)	(960.401.313)	(885.967.925)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	1.123.891.675	2.237.898.216	2.047.603.627	1.701.939.726	1.682.120.624
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities					
Penerimaan Dividen Receipt of dividends	281.858.622	272.747.364	130.367.400		
Penerimaan Premium Receipt of Premium				193.335.930	202.786.500
Perolehan aset tetap dan aset tak berwujud Acquisition of fixed assets and intangible assets	(3.312.163.703)	(1.984.667.658)	(775.034.171)	(2.125.974.262)	(4.234.352.077)

Tabel Ikhtisar Keuangan (dalam Ribuan Rupiah)
Financial Highlights (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
Penerimaan investasi jangka pendek Receipt of short-term investments	1.239.306.163	3.163.075.409	(2.011.922.698)	(1.727.260.000)	(2.969.900.000)
Penerimaan sewa di muka Receipt of advanced rental fee	124.255.688	318.174.500	308.934.500	526.670.000	
Laba penjualan aset tetap Profit from sale of fixed assets	80.629.851	5.442.459	-		
Penempatan deposito jangka panjang Placement of long-term deposit				(200.000.000)	
Penempatan investasi saham Placement of investment in shares	(787.067.050)	(327.615.532)	449.500.127	154.264.311	(386.505.596)
Penerimaan dana yang dibatasi pencairannya Penerimaan dana yang dibatasi pencairannya					450.881.147
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(2.373.180.429)	1.447.156.542	(1.898.154.842)	(3.178.964.021)	(3.604.966.953)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Funding Activities					
Penerimaan Utang Obligasi Receipt from bond payables					21.732.391.821
Penerimaan pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya Receipt of loans from banks and other financial institutions	145.183.914	2.139.397	(2.360.172)	(1.626.360)	(6.883.134.093)
Pembayaran dividen Payment of dividends	(832.742.000)	(653.968.052)	(453.437.932)	(371.934.000)	(309.741.136)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash used in Funding Activities	(687.558.086)	(651.828.655)	(455.798.104)	(373.560.360)	14.539.516.592
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	(478.291.310)	778.115.044	45.803.973	(91.353.568)	84.142.215
Penurunan Neto Kas Dan Setara Kas Net Decrease in Cash and Cash Equivalents	(2.415.138.150)	3.811.341.147	(260.545.346)	(1.941.938.223)	12.700.812.478



Tabel Ikhtisar Keuangan (dalam Ribuan Rupiah)
Financial Highlights (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	18.018.671.479	14.207.330.332	14.467.875.678	16.409.813.901	3.709.001.423
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	15.603.533.329	18.018.671.479	14.207.330.332	14.467.875.678	16.409.813.901

RASIO KEUANGAN
FINANCIAL RATIO

Profitabilitas Profitability					
ROA	4,81%	4,73%	4,67%	3,54%	3,18%
ROE	15,73%	17,31%	18,82%	14,79%	14,00%
ROI	13,37%	11,15%	11,03%	10,20%	7,25%
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Pendapatan Return on Revenues Ratio	22,47%	21,25%	20,21%	17,22%	17,59%
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset Debt to Asset Ratio	65,17%	68,05%	70,46%	72,60%	74,29%
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	187,10%	212,96%	238,55%	264,95%	289,03%
Likuiditas Liquidity					
Rasio Kas Cash Ratio	341,11%	397,49%	418,03%	551,20%	562,03%
Rasio Lancar Current Ratio	394,74%	446,59%	468,79%	594,96%	620,96%
Rasio Perputaran Total Aset Asset Turnover Ratio	32,62%	27,32%	27,60%	25,34%	19,64%
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Equity to Asset Ratio	34,83%	31,95%	28,33%	27,09%	25,40%

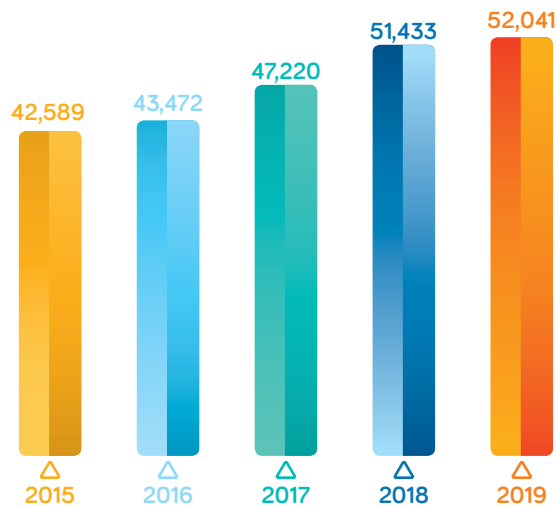
Catatan untuk pembaca laporan:

Tabel dan grafik pada laporan ini memaparkan data numerik dengan standar Bahasa Inggris, sedangkan pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai dengan konteks.

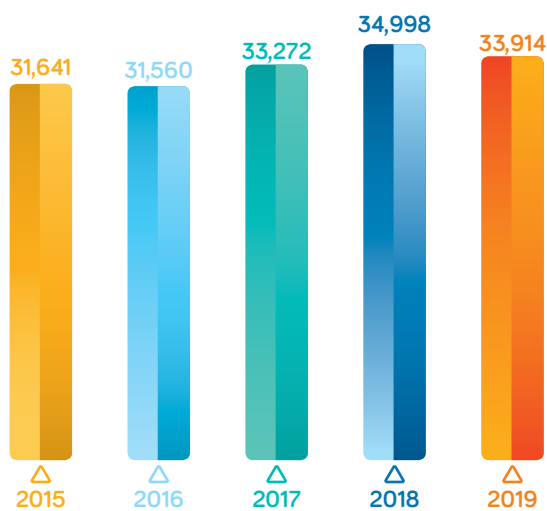
Note to report readers:

Tables and graphs in this report describe numerical data with the English standard, while the numerical description in the text uses Indonesian and English standards according to context.

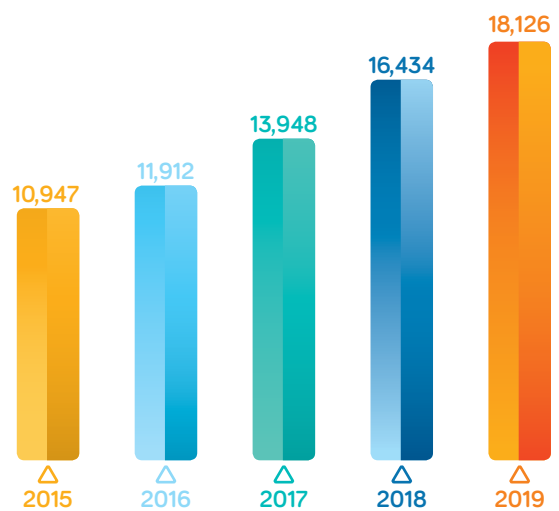
Grafik Pertumbuhan Aset 2015-2019
Assets Growth 2015-2019



Grafik Pertumbuhan Liabilitas 2015-2019
Liabilities Growth 2015-2019



Grafik Pertumbuhan Ekuitas 2015-2019
Equity Growth 2015-2019



IKHTISAR OPERASIONAL

OPERATIONAL HIGHLIGHTS

Tabel Kinerja Operasional
Operational Performance

Keterangan Description	Satuan Unit	2019	2018	2017	2016	2015
Kunjungan Kapal Ship Calls	Unit GC	33.082 209.121.201	35.771 224.298.619	34.662 202.153.652	33.370 173.468.382	43.847 201.729.503
Arus Barang Cargo Flow	Ton	60.035.441	61.971.277	57.091.681	55.506.634	85.653.195



Tabel Kinerja Operasional
Operational Performance

Keterangan Description	Satuan Unit	2019	2018	2017	2016	2015
Arus Petikemas Container Flow	Box TEUs	5.616.445 7.660.485	5.655.399 7.640.312	5.187.936 6.925.046	4.673.090 6.222.798	4.441.096 5.935.330
Arus Penumpang Passenger Flow	Orang Person	1.138.179	714.931	612.680	707.033	816.735

INFORMASI HARGA SAHAM

Modal ditempatkan dan disetor penuh tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebanyak 1.444.029 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per saham, sehingga total modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp1.444.029.000.000 (satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar dua puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia merupakan satu-satunya pemilik dan pemegang saham tunggal yang berhak atas 1.444.029 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp1.444.029.000.000 (satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar dua puluh sembilan juta rupiah) dalam perseroan tersebut yang merupakan keseluruhan saham yang dikeluarkan dan ditempatkan serta disetor penuh dalam perseroan hingga saat ini.

INFORMATION ON SHARE PRICE

Issued and fully paid capital as of December 31, 2019 and 2018 are 1,444,029 shares with par value of Rp1,000,000 (one million rupiah) per share, thus total issued and fully paid capital amounted to Rp1,444,029,000,000 (one trillion four hundred forty-four billion twenty-nine million rupiah).

That the Republic of Indonesia, represented by the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia is the only owner and sole shareholder entitled to 1,444,029 shares with par value of Rp1,000,000 (one million rupiah) or a total of Rp1,444,029,000,000 (one trillion four hundred forty-four billion twenty-nine million rupiah) in the company, which is the total issued, placed, and fully paid in the company to date.

Tabel Informasi Saham (dalam ribuan Rupiah)
Information on Share (in thousands of Rupiah)

Keterangan Information	2019	2018
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham	1.444.029.000	1.444.029.000
Modal dasar – 4.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.444.029 saham		
Share capital - nominal value Rp1,000,000 (full amount) per share		
Authorized capital - 4,000,000 shares		
Issued and fully paid capital - 1,444,029 shares		

Sampai dengan 31 Desember 2019, Perseroan belum melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai harga saham, kapitalisasi pasar dan volume perdagangan.

As of December 31, 2019, the Company had not yet listed its shares on the Indonesia Stock Exchange. Accordingly, there is no information regarding stock prices, market capitalization and trading volume.



PETA MIGRASI AUSTRALIA

Taiwan
5000 yrs

Philippines

Sumatra
4000 yrs

Java



AKSI KORPORASI

Sampai dengan 31 Desember 2019, Perseroan merupakan badan usaha *non listed* yang belum melakukan pencatatan saham, sehingga tidak terdapat informasi mengenai aksi korporasi.

AKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*)

Sampai dengan 31 Desember 2019, Perseroan tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI

INFORMASI OBLIGASI

No.	Uraian <i>Description</i>	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik <i>Date of Electronically Bonds Distribution</i>	Tenor <i>Tenor</i>	Mata Uang <i>Currency</i>	Jumlah Obligasi (miliar) <i>Amount of Bonds (billion)</i>
1.	Obligasi Global (<i>Global Bond</i>) Seri 1 Series 1 Global Bonds	05 Mei 2015 May 5, 2015	10 Tahun 10 years	USD	1.1
2.	Obligasi Global (<i>Global Bond</i>) Seri 2 Series 2 Global Bonds		30 Tahun 30 years		0.5

INFORMASI SUKUK

Sampai dengan 31 Desember 2019, IPC tidak menerbitkan sukuk atau surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai sukuk.

INFORMASI OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan 31 Desember 2019, IPC tidak menerbitkan obligasi konversi, dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai obligasi konversi.

INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Sampai dengan 31 Desember 2019, IPC tidak memiliki sumber pendana yang berasal dari efek lainnya, dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai sumber pendanaan lainnya.

CORPORATE ACTION

As of December 31, 2019, the Company is a non-listed business entity that has not yet listed is shares, so there is no information about corporate actions.

STOCK TRADING TEMPORARY SUSPENSION AND/OR DELISTING

As of December 31, 2019, the Company has never been sanctioned with suspension of stock trading and/or delisting of shares.

INFORMATION ON BONDS, SHARIA BONDS AND/OR CONVERTIBLE BONDS

INFORMATION ON BONDS

INFORMATION ON SHARIA BONDS

As of December 31, 2019, IPC had not issued sharia bonds or state securities based on sharia principles, thus there is no information regarding sharia bonds.

INFORMATION ON CONVERTIBLE BONDS

As of December 31, 2019, IPC had not issued convertible bonds, thus there is no information regarding convertible bonds.

INFORMATION ON OTHER FUNDING SOURCES

As of December 31, 2019, IPC had no funding sources from other securities, thus there is no information about other funding sources

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

	Tanggal Jatuh Tempo <i>Maturity Date</i>	Tingkat Suku Bunga <i>Interest Rate</i>	Status Pembayaran <i>Payment Status</i>	Peringkat Rating		Dicatatkan di <i>Listed in</i>
				2019	2018	
	05 Mei 2025 May 5, 2025	4.250% per tahun 4,250% per year	Pembayaran pokok obligasi akan dilakukan pada saat akan jatuh tempo Payment of the principal will be made when due	S&P: BBB (<i>Outlook: Stable</i>)	S&P: BBB- (<i>Outlook: Stable</i>)	Singapore Stock Exchange
	05 Mei 2045 May 5, 2045	5.375% per tahun 5,375% per year		Moody's: Baa2 (<i>Outlook: Stable</i>)	Moody's: Baa2 (<i>Outlook: Stable</i>)	
				Fitch: BBB (<i>Outlook: Stable</i>)	Fitch: BBB (<i>Outlook: Stable</i>)	



PERISTIWA PENTING DI TAHUN 2019

2019 EVENT HIGHLIGHTS

JANUARI | JANUARY



1 Januari | January 1

IPC Dorong *Stakeholder* Manfaatkan *Platform* Layanan Berbasis Digital.
IPC Encouraged Stakeholders to Take Advantage of Digital-Based Service Platform.

3 Januari | January 3

Kunjungan Kementerian BUMN – *On Site Training* CPNS Kementerian BUMN.
Ministry of SOE Visit - On Site Training of CPNS of Ministry of SOE.

7 Januari | January 7

CEO *Speech* dan Pelepasan Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis IPC.
CEO Speech and Release of IPC's Transformation and Business Development Director.

10 Januari | January 10

Pengalihan Tugas dan Serah Terima Jabatan bagi Jajaran Pejabat Struktural di Bawah Direksi.
Job Transfer and Handover for Structural Officials Under the Board of Directors.

11 Januari | January 11

Membuka 2019, IPC Lakukan Pengalihan Tugas dan Serah Terima Jabatan IPC Group.
Entering 2019, IPC Held the Job Transfer and Handover of IPC Group.

18 Januari | January 18

Penandatanganan Komitmen Bersama Wujudkan Visi dan Misi IPC.
Signing of Joint Commitment to Realize IPC's Vision and Mission.

25 Januari | January 25

I'm CINTA – *Event Millennials* IPC Group untuk Memajukan Dunia Kepelabuhanan.
I'm CINTA – IPC Group Millennials Event for the Advancement of Port World.

31 Januari | January 31

Kunjungan Duta Besar Panama.
Ambassador of Panama Visit.

FEBRUARI | FEBRUARY



4 Februari | February 4

Penandatanganan MoU Meringankan Tarif Jasa Pelabuhan antara Kementerian Perhubungan dengan Pelindo I, II, III dan IV (Persero).
Signing of MoU to Relieve Port Service Tariff between the Ministry of Transportation and Pelindo I, II, III and IV (Persero).

6 Februari | February 6

Forum Komersial IPC Group.
IPC Group Commercial Forum.

12 Februari | February 12

Genjot Layanan di Pelabuhan Tanjung Priok, IPC Kolaborasi dengan Dirjen Bea dan Cukai.
Boost Services at Tanjung Priok Port, IPC Collaborated with the Director General of Customs and Excise.

17 Februari | February 17

Wakil Presiden Apresiasi Rencana Pengembangan dan Penataan Pelabuhan Bengkulu.
Vice President Appreciation of Bengkulu Port Development and Structuring Plan.

18 Februari | February 18

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pembentukan Dewan Transformasi dalam rangka Implementasi Cluster Prioritas Pelindo Incorporated antara Pelindo I, II, III dan IV (Persero).
Joint Decree (SKB) concerning the Establishment of Transformation Board in the Implementation of Pelindo Incorporated Priority Cluster between Pelindo I, II, III and IV (Persero).

19 Februari | February 19

Sharing Session Direktur Utama IPC dengan Pemimpin Redaksi dan Perwakilan Media.
Sharing Session of IPC President Director with Media Editor in Chief and Representative.

20 Februari | February 20

Perkuat Sinergi, IPC Gelar Stakeholder Gathering.
Strengthening Synergy, IPC Held Stakeholder Gathering.

26 Februari | February 26

Dukung Penataan Kampung Nelayan, IPC Resmi Serahkan Lahan 12,18 Ha kepada Pemerintah.
Supporting the Fishing Village, IPC Officially Handed Over 12.18 Ha land to the Government.

MARET | MARCH



3 Maret | March 3

IPC Mantapkan Realisasi KEK Pulau Baai Bengkulu.
IPC Strengthened the Realization of KEK in Baai Island, Bengkulu.

4 Maret | March 4

Gelar Rapat Kerja Nasional 2019, IPC Sambut Era Baru Pelabuhan Indonesia. Held 2019 National Work Meeting, IPC Welcomed the New Era of Indonesian Ports.

15 Maret | March 15

Tandatangani 3 MOU, IPC Dorong Pengembangan dan Optimalisasi Pelabuhan di Provinsi Sumatera Selatan. Signing 3 MOUs, IPC Encouraged the Development and Optimization of Ports in South Sumatra Province.

17 Maret | March 17

Wujudkan *Zero Accident*, IPC Dukung Deklarasi Pengemudi Truk Pelopor Keselamatan.
Realizing Zero Accident, IPC Supported the Declaration of Safety Pioneer Truck Drivers.

18 Maret | March 18

Media *Gathering* Bertema "Era Baru Pelabuhan", IPC Menuju *Trade Facilitator*.
Media Gathering with the theme "New Era of Ports", IPC is Moving Towards Trade Facilitator.

18 Maret | March 18

Era Baru Pelabuhan, IPC Menuju *Trade Facilitator*.
New Era of Ports, IPC Towards Trade Facilitator.

26 Maret | March 26

Dorong Tumbuhnya Peluang Usaha, IPC Gelar Kelas Kreatif di Pontianak.
Encouraging the Growth of Business Opportunities, IPC Held Creative Class in Pontianak.

APRIL | APRIL



2 April | April 2

Rayakan HUT Kementerian BUMN, IPC Berbagi dengan 1500 Warga Ciamis.
Celebrating the Ministry of SOE's Anniversary, IPC is Sharing with 1500 Citizens of Ciamis.

8 April | April 8

IPC Memiliki Dua Direksi Baru.
IPC Has Two New Directors.

12 April | April 12

Forum *Human Capital* IPC Group 2019.
IPC Group Human Capital Forum 2019.

12 April | April 12

Go-Live Non-Petikemas Stuffing/Stripping (NPK-S) di IPC Cabang Pelabuhan Pontianak.
Go-Live Non-Container Stuffing/Stripping (NPK-S) at IPC Pontianak Port Branch.

15 April | April 15

IPC Siap Berkolaborasi dengan Jaringan Dekom IPC *Group* dalam Menciptakan Perusahaan yang Solid.
IPC Is Ready to Collaborate with the Board of Commissioners of IPC Group in Creating a Solid Company.

22 April | April 22

Bangkitkan Semangat Kartini, IPC Gelar *Field Trip* Ke Museum Maritim.
Awakening Kartini's Spirit, IPC Held Field Trip to the Maritime Museum.

26 April | April 26

IPC Memperpanjang Kerja Sama Program *Sisterport* antara Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Ningbo.
IPC Extended *Sisterport* Program Cooperation between Tanjung Priok Port and Ningbo Port.

30 April | April 30

IPC Ditunjuk Jadi Koordinator Posko BUMN Peduli Bencana di Bengkulu.
IPC is Appointed as Coordinator of SOE Care for Disaster Post in Bengkulu.



MEI | MAY



7 Mei | May 7

Berbagi Cinta di Bulan Ramadhan, IPC Buka Bersama Anak Yatim.
Sharing Love in the Month of Ramadan, IPC Held Iftar with Orphans.

8 Mei | May 8

Perkuat Jaringan Internasional, IPC menjadi Pembicara pada IAPH *World Ports Conference* di Guangzhou.
Strengthening International Networks, IPC Became a Speaker at IAPH World Ports Conference in Guangzhou.

16 Mei | May 16

Trilogi Maritim akan Turunkan Biaya Logistik Nasional.
Maritime Trilogy will Reduce National Logistics Costs.

21 Mei | May 21

Dukung Program BUMN, IPC Gelar Program 3.000 Pangan Murah Ramadhan bagi Warga Cinere.
Supporting an SOE Program, IPC Organized the 3,000 Cheap Basic Food Program in Ramadhan for Cinere Residents.

25 Mei | May 25

IPC Serahkan Beasiswa untuk Anak-anak Berkebutuhan Khusus di Palembang.
IPC Granted Scholarships for Children with Special Needs in Palembang.

26 Mei | May 26

Mudik Gratis dengan Kapal Laut, IPC Berangkatkan Ribuan Pemudik Tujuan Batam.
Free Homecoming by Ship, IPC Departed Thousands of Homecoming Participants to Batam.

27 Mei | May 27

Mendekati Lebaran, IPC Gelar Pasar Murah untuk Warga.
Approaching Ied Al-Fitr, IPC Holds Cheap Market Event for Surrounding Communities.

29 Mei | May 29

IPC Lepas 22 Ribu Peserta Mudik Gratis Tujuan 16 Kota di Jawa dan Sumatera.
IPC Released 22 Thousand Free Homecoming Participants in 16 Cities in Java and Sumatera.

30 Mei | May 30

Direktur Utama IPC Menghadiri Kegiatan Mudik Bareng Asik Lancar yang diadakan Kementerian BUMN.
IPC President Director Attended the Mudik Bareng Asik Lancar activity held by the Ministry of SOEs.

JUNI | JUNE



26 Juni | June 26

Direktur Utama IPC Lakukan Penyegaran Pejabat Struktural IPC Group.
IPC President Director Performed a Refreshment of IPC Group Structural Officials.

14 Juni | June 14

Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya, Menerima Kunjungan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.
IPC President Director, Elvyn G. Masassya, Received a Visit from the Tanjung Priok Port Police Chief.

JULI | JULY



11 Juli | July 11

IPC Percepat Pembangunan Terminal Kijing.
IPC Accelerated the Development of Kijing Terminal.

19 Juli | July 19

IPC, Pelindo I dan PT Perusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) Bersinergi Kelola Pelabuhan Batu Ampar.
IPC, Pelindo I and PT Perusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) are Synergizing for Batu Ampar Port Management.

26 Juli | July 26

Laba Bersih IPC Naik 25% di Semester I 2019.
IPC Net Profit Increased 25% in the 1st Semester of 2019.



AGUSTUS | AUGUST



2 Agustus | August 2

Pasca Gempa, Operasional Seluruh Pelabuhan IPC Berjalan Normal.
Post-Earthquake, the entire operational activities of IPC Ports are Back to Normal.

4 Agustus | August 4

Layanan Operasional Pelabuhan Tetap Berjalan Saat Listrik Padam (*Blackout*).
Port Operational Services Keep Running When Power Outages (*Blackout*).

10 Agustus | August 10

Jelang Idul Adha, IPC Serahkan Ratusan Hewan Kurban.
Ahead of Eid al-Adha, IPC Granted Hundreds of Sacrificial Animals.

14 Agustus | August 7

Program Siswa Mengenal Nusantara, IPC Fasilitasi Kunjungan 23 Siswa Asal Kalimantan Tengah ke Sumatera Selatan.
Student Getting to Know the Archipelago Program, IPC Facilitated the Visit of 23 Students from Central Kalimantan to South Sumatra.

17 Agustus | August 17

Sambut Hari Kemerdekaan, IPC Peduli Gelar CSR di Palembang
Welcoming Independence Day, IPC Cares Organized CSR Program in Palembang

17 Agustus | August 17

Tebar Semangat Nasionalisme, IPC Hadirkan Peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI di Palembang, Sumatera Selatan.
Spreading the Spirit of Nationalism, IPC Presents the 74th Anniversary of Indonesian Independence in Palembang, South Sumatra.

22 Agustus | August 22

Ajak Peserta SMN Kunjungi Kantor Kementerian BUMN, IPTutup Program Siswa Mengenal Nusantara 2019.
Inviting SMN Participants to Visit the Office of the Ministry of SOEs, IPC Closed the 2019 Students Getting to Know the Archipelago Program.

29 Agustus | August 29

Perluas Kemitraan, IPC Jalin Kerjasama dengan 2 Pelabuhan di Sabah.
Expanding Partnership, IPC Collaborated with 2 Ports in Sabah.

30 Agustus | August 30

IPC Tandatangani MoU dengan Intraco Ltd. Bangladesh.
IPC Signed an MoU with Intraco Ltd. Bangladesh.

SEPTEMBER | SEPTEMBER



5 September | September 5

Milenial IPC Siap Berkolaborasi Memajukan Dunia
Kepelabuhanan.

IPC Millennials are Ready to Collaborate to Advance the
Port.

17 September | September 17

Pelindo Gelar Meriah Upacara Pembukaan *13th APA
Sports Meet* di Yogyakarta.

Pelindo Held a Festive Opening Ceremony for the
13th APA Sports Meet in Yogyakarta.

20 September | September 20

Gerak Cepat IPC Jadi *World Class Port*.

IPC is Progressing Fast to Become a *World Class*
Port.

20 September | September 20

IPC Bersama Pelindo I, III, dan IV Menjadi Tuan Rumah
Penyelenggaraan *13th Asean Ports Association (APA)
Sports Meet 2019*.

IPC Together with Pelindo I, III, and IV Became the Host of
the *13th Asean Ports Association (APA) Sports Meet 2019*.



OKTOBER | OCTOBER



7 Oktober | October 7

Menteri Perhubungan Tinjau Kegiatan Bongkar Muat *Direct Call* Tujuan Korea.
The Minister of Transportation Reviewed the Korea's Direct Call Loading and Unloading Activities.

10 Oktober | October 10

Progress 60% Lebih, IPC Optimis JTCC Beroperasi Tahun 2020.
With 60% Progress, IPC is Optimistic that JTCC will Operate in 2020.

17 Oktober | October 17

Komite Keamanan Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Apel Siaga Pastikan Keamanan dan Ketertiban di Pelabuhan.
Security Committee of Tanjung Priok Port Held a Muster to Ensure the Security and Order at the Port.

30 Oktober | October 30

IPC Gandeng Pertamina, Jamin Kelancaran Pasokan BBM di Pelabuhan.
IPC Collaborated with Pertamina to Ensure the Supply of Fuel at the Port.

NOVEMBER | NOVEMBER



11 November | November 11

Employee Social Responsibility (ESR) IPC Libatkan Warga Lakukan Aksi Peduli Lingkungan di Sekitar Pelabuhan.
IPC Employee Social Responsibility (ESR) Involved Residents to Participate in the Action of Caring for the Environment Around the Port.



14 November | November 14

IPC Raih Juara 1 Penghargaan *Annual Report Award* 2018.
IPC Won 1st Place in the 2018 Annual Report Award.

19 November | November 19

IPC Memiliki Wakil Direktur Utama.
IPC Has a Vice President Director.

20 November | November 20

Hingga Kuartal III 2019, IPC Catat Laba Rp2,21 Triliun.
Until the Third Quarter of 2019, IPC Posted a Profit of Rp2.21 Trillion.



21 November | November 21

ESR IPC Kembali Lakukan Aksi Peduli Lingkungan di Sekitar Pelabuhan.
ESR IPC Held Care for Environmental Care Action Around the Port.



27 November | November 27

5.000 Anak Dapat Layanan Pemeriksaan Mata Gratis dari IPC.
5,000 Children Received Free Eye Examination Services from IPC.

DESEMBER | DECEMBER



5 Desember | December 5

IPC Layani Shorebase Pengeboran Minyak Lepas Pantai Pertamina Hulu Energi.
IPC Served Shorebase Offshore Pertamina Upstream Oil Drilling.



13 Desember | December 13

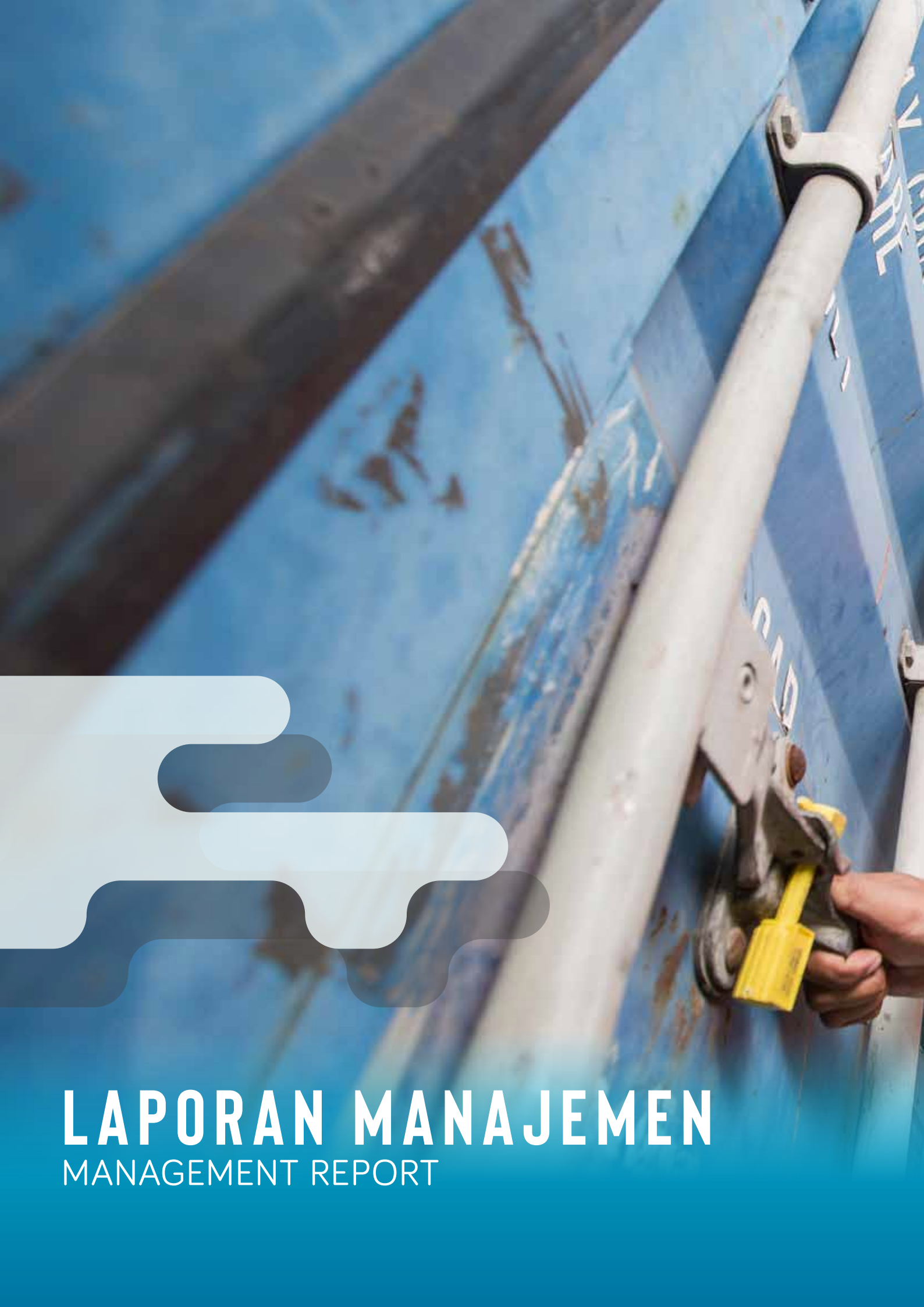
IPC Bangun Kemitraan Strategis dengan Pelabuhan Los Angeles.
IPC Builds Strategic Partnership with Port of Los Angeles.

16 Desember | December 16

Cinta Difabel, IPC Dukung Pemerintah Wujudkan Indonesia Inklusi Difabel Unggul.
Cinta Difabel, IPC Supported the Government to Achieve Indonesia the Superior People with Disability Inclusion.

20 Desember | December 20

Peringati Natal dan Tahun Baru, IPC Serahkan Santunan untuk 500 Anak Panti Asuhan di Sulawesi Utara.
Commemorating Christmas and New Year, IPC Granted Donation to 500 Orphanage Children in North Sulawesi.



LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT



Hingga 2019, Perseroan telah membuat terobosan dengan diimplementasikannya digital port pada lini darat dan laut, diantaranya yaitu implementasi autogate, Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Online, Terminal Operating System (TOS) dan Auto Tally di terminal peti kemas, penerapan Marine Operating System (MOS), serta Vessel Management System (VMS) pada sejumlah Cabang Pelabuhan.

Until 2019, the Company has made breakthroughs by implementing digital port on land and sea lines, including the implementation of autogate, Online Temporary Piling Place (TPS), Terminal Operating System (TOS) and Auto Tally at container terminals, the application of Marine Operating System (MOS) and Vessel Management System (VMS) in a number of Port Branches.



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT



Moermahadi Soerja Djanegara
Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner



Berbagai inisiatif strategi di tahun 2019 telah berimplikasi terhadap kinerja Perseroan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, skor kinerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk realisasi tahun 2019 berjumlah 91,50 sehingga kesehatan berada dalam kategori SEHAT (AA), meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 88,00.

A variety of strategic initiatives in 2019 have impacted the Company's performance. Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning the Soundness Level Assessment of State-Owned Enterprises, the performance score of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for the realization in 2019 was 91.50, hence the soundness was in the HEALTHY (AA) category, increased from the previous year of 88.00.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sepanjang tahun 2019. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris senantiasa menjunjung tinggi integritas dan independensi sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA DIREKSI

Dalam melaksanakan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan berbagai hal, khususnya pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Perusahaan dan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Dewan Komisaris menyadari bahwa pencapaian KPI dan target RKAP dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, sehingga menjadi salah satu hal yang juga menjadi pertimbangan Dewan Komisaris.

Perekonomian dunia selama 2019 belum menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang signifikan. Kondisi tersebut tercermin dari penurunan aktivitas konsumsi dan investasi seiring melemahnya sentimen konsumen dan bisnis akibat masih berlanjutnya ketidakpastian global. IMF memprediksi ekonomi dunia pada 2019 tumbuh sebesar 2,9% (YoY), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 3,6% (YoY). Pada 2020, IMF memproyeksikan ekonomi dunia tumbuh membaik mencapai 3,6%. Perbaikan prospek ekonomi global 2020 tersebut didasarkan asumsi bahwa kondisi ekonomi dari negara *emerging* dan *developing* yang mengalami tekanan, seperti Argentina dan Turki, akan mengalami perbaikan.

Tantangan perekonomian dunia juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional yang meskipun mengalami peningkatan pertumbuhan, namun masih belum cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan stabil dalam kisaran 5%-6% dengan tren meningkat sepanjang 2015-2019. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Pemerintah Indonesia sendiri lebih optimis dalam memprediksikan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Dalam rancangan teknokratis RJPMN 2020-2024 yang disusun oleh Bappenas (2018), pertumbuhan ekonomi 2020-2024 akan berada pada kisaran 5.406% per tahun.

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

We hereby would like to submit the Board of Commissioners' report on its supervisory and advisory function to the Board of Directors throughout 2019. In carrying out its duties and responsibilities, Board of Commissioners at all times upholds integrity and independence in accordance with the mandate in the Company's articles of association.

BOARD OF COMMISSIONERS' ASSESSMENT ON BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

When assessing Board of Directors' performance, Board of Commissioners considers various factors, specifically the achievement of the Company's Key Performance indicators (KPI) and the targets set out in the Company's Work Plan and Budget (RKAP). Board of commissioners is aware that the achievement of KPI and RKAP targets are influenced by economic conditions, so that it is also one of the things that are taken into consideration by Board of Commissioners.

The world economy in 2019 has not shown a significant growth. This condition was reflected in the declining consumption and investment activities in line with the weakening consumer and business sentiment due to continued global uncertainty. IMF predicted that the world economy grew by 2.9% in 2019 (YoY), lower than the 2018 economic growth of 3.6% (YoY). In 2020, IMF projected that the world economy will improve to 3.6%. The improvement in the global economic outlook for 2020 is based on the assumption that the economic conditions of emerging and developing countries that are under pressure, such as Argentina and Turkey, will experience an improvement.

The challenges of the world economy also affected national economic growth which, despite increasing a growth, was still not significant enough. Indonesia's economic growth has remained stable in the range of 5%-6% with an upward trend throughout 2015-2019. Even so, Indonesia's economic growth in 2019 that grew 5.02% was lower than the achievement in 2018 of 5.17%. The Indonesian government is more optimistic in predicting future economic growth. In the technocratic design of the 2020-2024 RJPMN compiled by Bappenas (2018), economic growth in 2020-2024 will be in the range of 5,406% per year.



Kondisi perekonomian dunia dan nasional tersebut memberikan dampak pada industri kepelabuhanan di Indonesia diantaranya adalah inisiatif *Belt and Road* yang digagas oleh Tiongkok yang akan mendorong arus dan volume transportasi kapal di Asia Tenggara. Inisiatif *21st Century Maritime Silk Road* (MSR) merupakan bagian dari inisiatif *Belt and Road* (BRI) dari President Xi Jinping untuk mendukung kerja sama arus perdagangan laut dan meningkatkan konektivitas antar wilayah yang diprediksikan mendorong peningkatan lalu lintas pelayaran. Peningkatan ukuran dan kapasitas maksimum dari kapal kontainer akan terdorong meningkat guna mencapai skala ekonomi. Terjadi pula adaptasi pada pelabuhan pada umumnya – ukuran *crane* dan pelabuhan yang dapat mengakomodir ukuran kapal yang terus bertambah. Hal ini menjadi salah satu pemacu penggabungan perusahaan pelayaran – tidak semua perusahaan mempunyai kapabilitas untuk meningkatkan kapasitas kapal.

Berdasarkan analisis perekonomian dan kondisi industri kepelabuhanan, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas kinerja Direksi yang mampu menghadapi tantangan makro dengan baik.

Direksi telah berhasil dalam mengimplementasikan *digital port* yang mampu meningkatkan pendapatan Perseroan secara signifikan. Terobosan *digital port* yang telah dilakukan di antaranya adalah implementasi autogate, Tempat Penimbunan Sementara (TPS) *Online*, dan *auto tally* di terminal peti kemas, operasi berbasis *Terminal Operating System* (TOS), penerapan *Marine Operating System* (MOS), dan *Vessel Management System* (VMS) pada sejumlah cabang pelabuhan.

Perseroan juga telah melakukan inisiasi program *direct call* yang memungkinkan kapal berukuran besar untuk langsung menuju pelabuhan akhir di luar negeri tanpa harus singgah di pelabuhan negara lain. Program *direct call* ini telah menghubungkan Indonesia dengan Amerika, Eropa, China, Vietnam dan Korea Selatan secara langsung.

Berbagai inisiatif strategi tersebut telah berimplikasi terhadap kinerja Perseroan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, skor kinerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk realisasi tahun 2019 berjumlah 91,50 sehingga kesehatan berada dalam kategori SEHAT (AA), meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 88,00.

Dewan Komisaris juga memberikan Apresiasi atas kinerja Direksi dalam pemenuhan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal. Menunjuk Surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara

The world and national economic conditions had impacted the port industry in Indonesia, including the Belt and Road initiative by China, aiming to drive the traffic and volume of ship transportation in Southeast Asia. The 21st Century Maritime Silk Road (MSR) initiative is part of the Belt and Road (BRI) initiative of President Xi Jinping to support the co-operation of sea trade traffic and improve connectivity between regions, which is predicted to encourage the increase in shipping traffic. Increased size and maximum capacity of container ships will be increase and achieve economies of scale. Adaptation will also occur to ports in general - the size of cranes and ports that can accommodate ship sizes that continue to grow. This has become one of the triggers for the merging of shipping companies - not all companies have the capability to increase ship capacity.

Based on the economic and port industry analysis, Board of Commissioners would like to appreciate Board of Directors' well performance in dealing with the macro challenges.

Board of Directors has succeeded in implementing a digital port that is able to significantly increase the Company's revenue. Digital port breakthroughs that have been made include the implementation of autogate, Online Temporary Piling (TPS), and auto tally at container terminals, Terminal Operating System (TOS) based operations, implementation of Marine Operating System (MOS), and Vessel Management System (VMS) on a number of port branches.

The Company has also initiated a direct call program that allows large-sized vessels to go directly to final ports overseas without having to stop at other ports. This direct call program has directly connected Indonesia with America, Europe, China, Vietnam and South Korea.

These various strategic initiatives have brought positive implications for the Company's performance. Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 on Health Level Assessment of State-Owned Enterprises, the performance score of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for the realization of 2019 was 91.50 or fell into the HEALTHY (AA) category, increased from the previous year of 88.00.

Board of Commissioners would also like to appreciate Board of Directors' performance in fulfilling the Aspirations of Shareholders/Capital Owners. Refers to the Letter from the Minister of State-Owned

kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas BUMN No: S-564/MBU/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk penyusunan RKAP Tahun 2019. Arahan umum tersebut menyebutkan bahwa seluruh BUMN wajib membangun *Integrated Talent Management System* (ITMS) dan mengirimkan talenta Perseroan ke dalam *talent pool* di Kementerian BUMN yang terdiri dari minimal 20% dari seluruh pejabat satu level di bawah Direksi dan kandidat calon Direksi minimal 3 (tiga) orang suksesor per posisi Direksi. Secara umum pencapaian tahun 2019 atas Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal telah memenuhi yang ditargetkan, dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Perseroan juga telah mampu mencapai target *Net Income Margin* yaitu sebesar 22,47 melampaui yang ditargetkan sebesar 19,33.

Dengan berbagai capaian kinerja yang baik di 2019, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Direksi dalam menjalankan fungsi kepengurusan Perusahaan telah sesuai dengan arahan Dewan Komisaris dan Aspirasi Pemegang Saham. Secara umum, Dewan Komisaris berpendapat bahwa kinerja Direksi di tahun 2019 menunjukkan kinerja yang baik. Dewan Komisaris memberikan arahan agar kedepannya Direksi tetap mempertahankan kinerjanya dengan mengatasi beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait peningkatan pendapatan operasional.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI

Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa strategi Perseroan telah dijalankan dengan efektif. Mekanisme pengawasan khususnya dilakukan melalui Rapat Gabungan dan Rapat Pembahasan Masalah Strategis, serta berbagai Evaluasi dan Arahan, khususnya terkait dengan penyusunan dan pemantauan RKAP. Dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan, Dewan Komisaris juga melakukan kunjungan kerja ke cabang-cabang, baik khusus mengenai kinerja, maupun kunjungan dalam rangka kegiatan tertentu.

Beberapa pembahasan yang bersifat strategis pada tahun 2019 yang telah dilakukan antara lain pembahasan mengenai persetujuan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), rencana *hedging*, rencana penyaluran PKBL, pengembangan teknologi informasi, permasalahan hukum, serta tindakan-tindakan Direksi yang berdasarkan ketentuan memerlukan persetujuan/rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Enterprises to the Board of Directors and Board of Commissioners/ Supervisory Board of SOEs No: S-564/MBU/08/2018 dated August 21, 2018 concerning the Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the preparation of 2019 RKAP. The general directives stated that all SOEs are required to build an Integrated Talent Management System (ITMS) and send Company talents into the talent pool at the Ministry of SOEs consisting of a minimum of 20% of all officials one level below the Board of Directors and candidates for the Board of Directors of at least 3 (three) successors per Director position. In general the achievements in 2019 have met the targets of the Shareholders/Capital Owners' Aspirations, and increased compared to the previous year. The Company has also managed to achieve the Net Income Margin target of 22.47, exceeding the target of 19.33.

With numerous satisfactory performance achievements in 2019, Board of Commissioners considers that the performance of Board of Directors in carrying out the Company's management function is in accordance with Board of Commissioners' Directives and Shareholders' Aspirations. In general, Board of Commissioners believes that Board of Directors has demonstrated a good performance in 2019. However, Board of Commissioners would like to remind Board of Directors to continue to maintain its performance in the future, by overcoming several matters that still need to be improved, especially related to increasing operating revenues.

BOARD OF COMMISSIONERS' SUPERVISION ON STRATEGY IMPLEMENTATION

To ensure the Company's strategies are carried out effectively, Board of Commissioners conducts supervision, primarily through joint meetings and strategic issues discussion meetings, as well as through evaluations and directives, particularly related to the RKAP preparation and monitoring. In addition, Board of Commissioners conducts work visits to branches to monitor performance, and for specific purposes

A number of strategic discussions in 2019 that have been carried out include discussion on the approval of the Company's Long-Term Plan (RJPP), hedging plan, PKBL distribution plan, information technology development, legal issues, and the actions made by Board of Directors that required an approval/recommendation from Board of Commissioners.



Secara umum, strategi Perseroan telah disusun dan dilaksanakan dengan baik dan telah mendorong peningkatan kinerja Perseroan di 2019. Dewan Komisaris akan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan, khususnya dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang berdampak terhadap kinerja Perseroan, khususnya terkait pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2020-2024.

FREKUENSI DAN TATA CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dalam memberikan arahan kepada Direksi, Dewan Komisaris menggunakan beberapa mekanisme antara lain melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Pembahasan Permasalahan Strategis serta mekanisme evaluasi, arahan, tanggapan dan persetujuan. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi pada tahun 2019, telah dilaksanakan 12 (dua belas) kali rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Dalam rapat tersebut antara lain dibahas mengenai kinerja perusahaan berkala, laporan masing-masing Direktorat, tindak lanjut rapat sebelumnya, serta beberapa agenda lainnya. Pada tahun 2019 Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Pembahasan Permasalahan Strategis dengan Direksi yang antara lain membahas mengenai persetujuan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan rencana strategis Perseroan lainnya.

Dewan Komisaris juga telah memberikan Evaluasi/Arahan/Tanggapan/Persetujuan yang antara lain meliputi:

1. Evaluasi RJPP dan Pembahasan dengan Direksi serta Menyusun Rekomendasi. Persetujuan Konsep RJPP.
2. Evaluasi rencana kerja dan target tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam RKAP tahun 2019 dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pembahasan dalam rapat internal Dewan Komisaris, rapat koordinasi dengan Direksi, serta penyampaian surat mengenai telaahan Dewan Komisaris pada Direksi;
3. Memberikan arahan perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan, dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui penyampaian arahan dalam penyusunan RJPP 2020-2024;
4. Evaluasi dan menyampaikan arahan tentang:
 - a. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan;
 - b. Manajemen Risiko Perusahaan;
 - c. Sistem teknologi Informasi Perusahaan;
 - d. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir Pekerja;

In most cases, the Company's strategy has been well prepared and implemented and drove the Company's performance in 2019. Board of Commissioners will continue to increase the effectiveness of its supervision of the Company's strategies, especially in the face of changes in the business environment that affect the Company's performance, particularly the strategies related to the Company's 2020-2024 Long-Term Plan.

FREQUENCY AND PROCEDURES FOR GIVING ADVICE TO BOARD OF DIRECTORS

To provide direction to Board of Directors, Board of Commissioners uses several mechanisms, including joint meetings between Board of Commissioners and Board of Directors, strategic issues discussion meetings and evaluation, directives, responses and approval mechanisms. 12 (twelve) joint meetings between Board of Commissioners and Board of Directors were held in 2019.

In the meetings, discussions were held concerning periodic company performance, reports from each directorate, follow-up of previous meetings, as well as several other agendas. In 2019, Board of Commissioners has held Strategic Issue Discussion Meeting with Board of Directors which discussed, among others, the approval of the Company's Long-Term Plan (RJPP) and other Company's strategic plans.

Board of Commissioners also delivered evaluations/directives/responses/agreements including:

1. Evaluation of RJPP and Discussion with Board of Directors and Preparation of Recommendations on RJPP Concept Approval.
2. Evaluation of 2020 work plan and target as stated in the 2019 RKAP, which is carried out by Board of Commissioners through discussion in the internal meeting of Board of Commissioners, coordination meetings with Board of Directors, as well as submitting a letter regarding Board of Commissioners' review on Board of Directors;
3. Provided direction for changes in the business environment that were expected to have a major impact on the business and performance of the Company, which is carried out by Board of Commissioners through delivering directives in the preparation of RJPP 2020-2024;
4. Evaluated and gave directives on:
 - a. The Company's Internal Control System Strengthening;
 - b. Company Risk Management;
 - c. Company Information Technology system;
 - d. Employee Career Development and Policy and Implementation;

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> e. Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan sesuai PSAK; f. Pengadaan dan Pelaksanaan; g. Kebijakan Mutu pelayanan dan Pelaksanaan, dilakukan oleh Dewan Komisaris baik melalui forum rapat Dewan Komisaris dengan Direksi maupun penyampaian surat. <ol style="list-style-type: none"> 5. Evaluasi usulan/rekomendasi kepada RUPS tentang calon Anggota Direksi, serta Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan. 6. Evaluasi kinerja Direksi telah dilaksanakan yaitu melalui tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja perusahaan tahun buku 2018 serta tanggapan kinerja Dewan Komisaris atas kinerja Triwulan I, II, dan III Tahun 2019; 7. Membuat tanggapan Dewan Komisaris tentang Realisasi Triwulan I, II, III, dan IV disampaikan ke Pemegang Saham. Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan atas laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi, dalam jangka waktu sesuai dengan target; 8. Membuat Tanggapan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Tahun Buku 2019 dan RKAP 2020 dengan memperhatikan perkembangan perusahaan dan menyampaikan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Direksi maupun Pemegang Saham; 9. Mengajukan usulan auditor eksternal. Berdasarkan hasil pemilihan KAP, Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro & Surya (EY) kepada Menteri BUMN sebagai RUPS IPC, untuk melakukan audit laporan keuangan dan laporan PKBL tahun buku 2019; 10. Memberikan Tanggapan terhadap Hal-hal Terkait dengan Tupoksi Dewan Komisaris dalam Pengelolaan Perusahaan. Dewan Komisaris pada tahun 2019 telah menetapkan surat tanggapan dan persetujuan atas usulan Direksi yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar memerlukan tanggapan/persetujuan dari Dewan Komisaris. | <ul style="list-style-type: none"> e. Accounting Policies and Preparation of Financial Statements in accordance with PSAK; f. Procurement and its Implementation; g. Service Quality and Implementation Policy, carried out by Board of Commissioners both through Board of Commissioners' meeting forum with Board of Directors and the delivery of letters. <ol style="list-style-type: none"> 5. Evaluation of proposals/recommendations to the GMS regarding prospective members of Board of Directors, as well as Directors and Commissioners of Subsidiaries. 6. Evaluation of the performance of Board of Directors, has been carried out through the Board of Commissioners' response on the Company's performance in the 2018 fiscal year and the Board of Commissioners' response on the performance of the first, second and third quarter of 2019; 7. Provided the Board of Commissioners' response regarding the Realization of first, second, third, and fourth Quarter to the Shareholders. Board of Commissioners provided responses to periodic reports submitted by Board of Directors, within a period according to the target; 8. Provided Responses on Financial Accountability Report for Fiscal Year 2019 and RKAP 2020 by taking into account the Company's development and conveying matters that need attention from the Directors and Shareholders; 9. Proposed an external auditor. Based on the results of KAP election, Board of Commissioners has submitted a proposal for the appointment of KAP Purwantono, Sungkoro & Surya (EY) to the Minister of SOEs as IPC GMS, to audit financial statements and PKBL report for the fiscal year 2019; 10. Provided Responses on Matters Related to Board of Commissioners' Duties in Company Management. Board of Commissioners in 2019 has prepared letter of response and approval on Board of Directors' proposals, which based on the Articles of Association require a response/approval from the Board of Commissioners. |
|--|--|

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PROSPEK USAHA YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Kunci keberhasilan usaha adalah adanya keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Direksi diharapkan untuk dapat melihat prospek usaha yang telah memperhitungkan berbagai faktor. Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa prospek usaha telah dianalisis dengan baik oleh Direksi. Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan berbagai peluang dan tantangan yang ada di industri kepelabuhanan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan dalam merespon berbagai peluang tersebut.

BOARD OF COMMISSIONERS' VIEW ON THE BUSINESS OUTLOOK PREPARED BY BOARD OF DIRECTORS

The key to business success is long-term business continuity. Therefore, Board of Directors is expected to recognize business outlook after taken into account various factors. Board of Commissioners ensures that the business outlook have been analyzed by Board of Directors, and to do this, Board of Commissioners considers the various opportunities and challenges that exist in the port industry and the strengths the Company has in responding to these opportunities.



Dalam industri kepelabuhanan saat ini dihadapkan pada berkembangnya ukuran kapal dan konsolidasi muatan kapal sehingga pelabuhan dihadapkan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas terminalnya karena semakin besarnya kapal. Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Perusahaan. Dewan Komisaris menilai bahwa transformasi yang dilakukan oleh Perseroan sejak tahun 2016 dengan target menjadi *World Class Port* di 2020 akan mampu mengatasi tantangan dan menangkap peluang yang ada di industri kepelabuhanan. Hal ini terlihat dari capaian-capaian baik dari sisi kinerja operasional maupun keuangan yang terus mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun dan terlampaunya target-target kunci Perseroan secara berkelanjutan.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam melakukan kegiatan usaha dibutuhkan mekanisme tata kelola yang baik, karena akan mendorong terpenuhinya hak Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya yang tercermin dari semakin meningkatnya kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris menekankan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik senantiasa diterapkan secara efektif di Perusahaan. Beberapa mekanisme tata kelola yang baik yang menjadi perhatian utama Dewan Komisaris adalah pelaksanaan sistem pengendalian internal dan pencegahan pelanggaran, khususnya dalam penerapan *whistleblowing system* (WBS).

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Tujuan pengendalian internal adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya Perusahaan dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah kehandalan laporan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab untuk memastikan pengendalian internal telah berjalan secara efektif. Pengawasan yang efektif oleh Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal, dapat mendeteksi risiko lebih dini sehingga dapat mencegah permasalahan menjadi lebih besar.

Komponen utama sistem pengendalian internal Perusahaan yang terdiri dari lima unsur utama yang saling berkaitan, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), serta Pemantauan (*Monitoring*) telah berjalan dengan baik. Perseroan telah memiliki sistem pengendalian yang reliabel dan konsisten dalam menerapkannya.

The port industry is currently faced with the problems of ship size and ship cargo consolidation, so ports need to be able to increase their terminal capacity and capability due. This is both a challenge and an opportunity for the company. Board of Commissioners considers that the transformation carried out by the Company since 2016 targeting being *World class* in 2020 will overcome the challenges and seize the opportunities in the port industry. This is evident from the achievements, both in terms of operational and financial performance, which continue to grow year on year and the Company's key sustainable targets.

BOARD OF COMMISSIONERS' VIEW ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Good governance mechanisms are needed when conducting business activities as they encourage the fulfillment of shareholders and other stakeholders' rights, and are reflected in the increasing company performance. Therefore, Board of Commissioners emphasizes that good governance principles are applied constantly and effectively in the Company. The governance mechanisms that are of major concern to Board of Commissioners include the internal control system, and the implementation of a *Whistleblowing System* (WBS) to prevent violations.

IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The purpose of the internal control is to improve effectiveness and efficiency in managing the Company's resources to achieve the Company's objectives. These include the reliability of financial reporting reports and compliance with laws and regulations. Board of commissioners has the responsibility to ensure that internal control is carried out effectively. Board of Commissioners' effective supervision of the internal control system helps detect risks early so as to prevent problems from growing.

The Company's internal control system is made up of five main interrelated elements, namely the *Control Environment*, *Risk Assessment*, *Control Activities*, *Information and Communication*, and *Monitoring*. The Company's control system is reliable and consistent and is functioning well.

PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system (WBS) sangat diperlukan untuk memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh Insan IPC dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik.

Mekanisme WBS telah dikembangkan dengan nama "IPC Bersih" yang merupakan sebuah program nyata dari untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan.

Perseroan bersama Pihak Ketiga selaku mitra dalam penerapan sistem WBS telah menerima dan memonitor pengaduan baik internal dan eksternal serta membuat laporan bulanan kepada Tim "IPC Bersih" sebagai *counterpart*.

Dewan Komisaris telah menjalankan perannya secara aktif dalam penerapan WBS dan menjadi salah satu bagian penting dalam Komite "IPC Bersih". Dalam menjalankan perannya dalam Komite "IPC Bersih" Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit khususnya dalam melakukan proses investigasi.

Meskipun penerapan WBS telah berjalan baik, namun Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan untuk lebih meningkatkan efektivitas sosialisasi mekanisme WBS, agar para *stakeholder* lebih termotivasi dalam menyampaikan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Komisaris dibantu oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang terdiri atas 3 (dua) Komite. Komite-komite tersebut antara lain:

1. Komite Audit
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Komite Pemantau Manajemen Risiko

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

IMPLEMENTATION OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM

A Whistleblowing system (WBS) is required to strengthen the good corporate governance systems, and provides opportunities to all IPC personnel and other stakeholders to submit reports, with good intentions, any indications of violations of applicable ethical values, based on evidence that can be accounted for and good intention.

The WBS mechanism has been developed under the name "IPC Bersih", a riil program to create a workplace that is clean from fraudulent acts, corruption and extortion.

The Company together with a Third Party as the partner, has implemented the WBS system to receive and monitor internal and external complaints, and to produce monthly reports to "IPC Bersih" Team as a counterpart.

Board of Commissioners plays an active role as supervisors in the WBS and is an important part of "IPC Bersih" committee. in carrying out its role in the committee, Board of Commissioners is supported by the Audit Committee, especially for conducting investigation processes.

Although the WBS runs well, Board of Commissioners has provided directives to further improve its effectiveness through socialization, so that stakeholders become more motivated in reporting violations that could harm the Company.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS AND BASIS OF ASSESSMENT

Board of commissioners is assisted by 3 (three) committees including:

1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. Risk Management Monitoring Committee

During 2019, Board of Commissioners considered that these committees had carried out their duties and responsibilities properly.



Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan IPC sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Selama tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dasar pertimbangannya adalah bahwa, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dan telah melaksanakan tugas antara lain:

1. Evaluasi kinerja KAP dan proses penunjukkan KAP yang akan mengaudit laporan keuangan tahun buku 2019.
2. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut temuan auditor eksternal dan internal.
3. Evaluasi kinerja Divisi Satuan Pengawas Internal.
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi ke cabang-cabang pelabuhan.

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memberikan dukungan bagi Dewan Komisaris dalam mengawasi implementasi kebijakan Nominasi dan Remunerasi Direksi, Tim Manajemen dan karyawan. Selama tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dasar pertimbangannya adalah bahwa, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 46 (empat puluh enam) kali dan telah melaksanakan tugas antara lain:

1. Melakukan evaluasi atas usulan calon Direksi Perusahaan dan Anak Perusahaan.
2. Melakukan evaluasi atas usulan remunerasi.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi ke cabang-cabang pelabuhan.

Komite Pemantau Manajemen Risiko dibentuk untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dalam risiko manajemen Perusahaan *Enterprise Risk Management* (ERM). Selama tahun 2019, Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dasar pertimbangannya adalah bahwa, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dan telah melaksanakan tugas antara lain:

1. Memastikan terlaksananya implementasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMRISK) Fase 3 di IPC Group.
2. Memastikan terlaksananya pelatihan manajemen risiko secara terstruktur.
3. Memonitor implementasi Risk and *Control Self Assessment* (RCSA) dan *Assessment* terhadap *Corporate Initiative*.
4. Memastikan terimplementasinya *Business Continuity Management* berkelanjutan.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi cabang pelabuhan

The Audit Committee is a committee formed to help Board of Commissioners supervise that the management of IPC is in accordance with the principles of *Good Corporate Governance* (GCG). Audit Committee has carried out its duties well. In 2019, Audit Committee held 33 (thirty-three) meetings and performed its tasks as follows:

1. Evaluating the KAP performance, and the appointment process of a KAP to audit the financial statements for fiscal year 2019.
2. Monitoring and evaluating follow-up findings of the external and internal auditors.
3. Performance Evaluation of Internal Audit Unit Division.
4. Monitoring and evaluating the port branches

The Nomination and Remuneration Committee is a committee formed to help Board of Commissioners supervise the nomination and remuneration policies implementation for the Directors, Management Teams and employees. Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties well. In 2019, Nomination and Remuneration Committee held 46 (fourty-six) meetings and performed its tasks as follows:

1. Evaluating the proposals for prospective directors for the Company and its subsidiaries.
2. Evaluating the proposed remuneration.
3. Monitoring and evaluating the port branches.

The Risk Management Monitoring Committee was established to improve the quality of supervision and advice from Board of Commissioners regarding the *Enterprise Risk Management* (ERM). Risk Management Monitoring Committee has carried out its duties well. In 2019, Risk Management Monitoring Committee held 12 (twelve) meetings and performed its tasks as follows:

1. Ensuring the implementation of Risk Management Information System (SIMRISK) Phase 3 at IPC Group.
2. Ensuring the implementation of structured risk management training.
3. Monitoring the implementation of Risk and Control Self Assessment (RCSA) and Assessment of the Corporate Initiative.
4. Ensuring the implementation of sustainable Business Management.
5. Monitoring and evaluating the port branch

Penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris merupakan bagian dari KPI Dewan Komisaris, dengan kriteria yaitu efektivitas pelaksanaan tugas dan jumlah rapat Komite. Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana KPI tersebut di atas, seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris dapat mencapai target yang ditetapkan pada KPI. Seluruh komite telah melaksanakan tugas dengan pencapaian 100% dan melaksanakan rapat dengan pencapaian 120%.

The performance assessment of committees below Board of Commissioners form part of the Board of commissioners' KPI, namely the criteria of effectively executing its duties, and the number of committee meetings held. Based on these KPI performance measurements, all the committees below the Board of Commissioners achieve the set KPI targets. All committees carried out their tasks achieving 100%, and conducted their meetings achieving 120%.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

Selama tahun 2019, Komposisi anggota Dewan Komisaris IPC mengalami perubahan sebagaimana penjelasan berikut.

CHANGES TO BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION IN 2019

During 2019, the composition of members of IPC Board of Commissioners underwent changes as explained below.

PERIODE 1 JANUARI 2019 – 20 DESEMBER 2019

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris IPC berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 5 (lima) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC.

PERIOD OF JANUARY 1, 2019 – DECEMBER 20, 2019

The number and membership composition of IPC's Board of Commissioners amounted to 7 (seven) persons consisting of 1 (one) President Commissioner and Independent Commissioner, 1 (one) Independent Commissioner and 5 (five) Commissioners. All Board of Commissioners members were domiciled in the working area of IPC Head Office.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Tumpak H. Panggabean	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-79/MBU/06/2015 Tanggal 03 Juni 2015 dan SK Komisaris Independen No. SK-40/MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016 Minister of SOE Decree No. SK-79/MBU/06/2015 dated June 3, 2015 and Independent Commissioner Decree No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	3 Juni 2015 June 3, 2015
Montty Girianna	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-40/MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016 Minister of SOE Decree No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	1 Maret 2016 March 1, 2016
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-40/MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016 Minister of SOE Decree No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	1 Maret 2016 March 1, 2016
Djadmiko	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-40/MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016 Minister of SOE Decree No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	1 Maret 2016 March 1, 2016
Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-133/MBU/07/2017 Tanggal 14 Juli 2017 Minister of SOE Decree No. SK-133/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 July 14, 2017



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
D. Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-215/MBU/10/2017 Tanggal 04 Oktober 2017 Minister of SOE Decree No. SK-215/MBU/10/2017 dated October 04, 2017	4 Oktober 2017 October 4, 2017
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No SK-26/MBU/01/2018 Tanggal 22 Januari 2018 Minister of SOE Decree No. SK-26/MBU/01/2018 dated January 22, 2018	22 Januari 2018 January 22, 2018

PERIODE 20 DESEMBER - 31 DESEMBER 2019

Pada tanggal 20 Desember 2019, Bapak Tumpak H. Panggabean diangkat sebagai Dewan Pengawas KPK sehingga beliau berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor SK-68/MBU/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama IPC. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris IPC Periode 20 Desember – 31 Desember 2019 berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 5 (lima) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC.

PERIOD OF DECEMBER 20 - DECEMBER 31, 2019

On December 20, 2019, Tumpak H. Panggabean was appointed as the Supervisory Board of KPK so he stopped serving as President Commissioner and Independent Commissioner according with the Minister of SOE Letter No. SK-68/MBU/2020 concerning the Dismissal of Appointment of IPC's President Commissioner. The number and composition of Board of Commissioners of IPC for the period of December 20 – December 31, 2019 amounted to 6 (six) persons consisting of 1 (one) Independent Commissioner and 5 (five) Commissioners. All Board of Commissioners members were domiciled in the working area of IPC Head Office.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Montty Girianna	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-40/MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016 Minister of SOE Decree No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	1 Maret 2016 March 1, 2016
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-40/MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016 Minister of SOE Decree No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	1 Maret 2016 March 1, 2016
Djadmiko	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-40/MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016 Minister of SOE Decree No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	1 Maret 2016 March 1, 2016
Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-133/MBU/07/2017 Tanggal 14 Juli 2017 Minister of SOE Decree No. SK-133/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 July 14, 2017
D. Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-215/MBU/10/2017 Tanggal 04 Oktober 2017 Minister of SOE Decree No. SK-215/MBU/10/2017 dated October 04, 2017	4 Oktober 2017 October 4, 2017
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No SK-26/MBU/01/2018 Tanggal 22 Januari 2018 Minister of SOE Decree No. SK-26/MBU/01/2018 dated January 22, 2018	22 Januari 2018 January 22, 2018

PENUTUP

Demikian Laporan kami sampaikan. Atas kepercayaan Pemegang Saham dan dukungan Direksi serta pemangku kepentingan lainnya, Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pada khususnya kepada Direksi dan seluruh pegawai, Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Berkat dedikasi dan profesionalitas kerja yang diberikan, Perseroan dapat menghasilkan kinerja yang cukup membanggakan. Dewan Komisaris berharap agar kerja sama yang efektif dapat senantiasa dipertahankan, guna memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

CLOSING REMARKS

Accordingly, we submit our report. With the trust of the shareholders and the support of Board of Directors and other stakeholders, Board of Commissioners was able to carry out its duties and responsibilities properly. In particular to Board of Directors and all employees, Board of Commissioners would like to convey its highest appreciation. Thanks to the dedication and professionalism of the work provided, the Company has produced a proud performance. Board of Commissioners hopes that this effective cooperation can always be maintained, in order to provide benefits to the nation and the state.

Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of Board of Commissioners



Moermahadi Soerja Djanegara
Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner



LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTOR'S REPORT



Arif Suhartono

Direktur Utama
President Director



Perseroan berhasil melampaui target kinerja yang telah ditetapkan dengan mencatatkan Laba bersih tahun 2019 sebesar Rp2,50 triliun atau meningkat 3,01%, Pendapatan Operasional Lainnya dan Pendapatan Keuangan tahun 2019 sebesar Rp1,80 triliun atau naik 19,85%. Sementara di sisi aset, nilainya menunjukkan tren positif yaitu tercatat sebesar Rp52,04 triliun atau naik 1,18%.

The Company has been successful in exceeding the performance target that had been set by posting a Net Profit of Rp2.50 trillion in 2019 or an increase of 3.01%, Other Operating Income and Financial Income in 2019 of Rp1.80 trillion or an increase of 19.85%. Meanwhile, assets showed a positive trend, which was recorded at Rp52.04 trillion or an increase of 1.18%.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan Lainnya yang kami hormati,

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya, sehingga kinerja Perseroan di tahun 2019 secara umum telah sesuai dengan harapan Pemegang Saham. Bersama ini kami laporkan hasil pelaksanaan tugas kepengurusan Perseroan yang telah dilaksanakan di tahun 2019.

ANALISIS KINERJA PERSEROAN

Direksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya seluruh pegawai atas kontribusi yang telah diberikan, sehingga Perseroan mampu menghasilkan kinerja yang baik di tahun 2019. Capaian kinerja di tahun 2019 tidak terlepas dari pengaruh perekonomian dan industri serta pemilihan dan pelaksanaan kebijakan strategis yang efektif.

TINJAUAN PEREKONOMIAN

Meskipun perekonomian dunia berada dalam kondisi yang stagnan, namun perekonomian nasional di tahun 2019 masih cukup stabil dalam kisaran 5%-6%. Sebagian besar lapangan usaha tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara komposisi terhadap PDB, industri Pengolahan merupakan sektor penyumbang PDB terbesar yaitu 19,8%. Pertumbuhan Industri Pengolahan pada Triwulan II tahun 2019 sebesar 3,5%, lebih rendah dibandingkan Triwulan I tahun 2018 maupun Triwulan sebelumnya. Pertumbuhan sektor ini di dorong oleh pertumbuhan subsektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi sebesar 20,7%, (YoY) serta Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman sebesar 12,5% (YoY), ditopang antara lain oleh agenda Pemilihan Umum pada bulan April. Selain itu, Industri Makanan dan Minuman juga tumbuh lebih cepat sebesar 8,0%.

Seiring dengan stabilnya perekonomian nasional, industri kepelabuhanan dapat melanjutkan tren yang telah berlangsung pada beberapa tahun terakhir. Peran pelabuhan saat ini telah berevolusi menjadi "one-stop service provider" dan "integrator ekosistem kepelabuhanan" yang menyebabkan revolusi operasi dan skala bisnis kepelabuhan. Secara global, terdapat pola pengembangan pelabuhan dari pelabuhan yang terpisah-pisah menjadi kawasan yang terintegrasi dan

Dear Honorable Shareholders and other Stakeholders,

With praise and thanks to God Almighty, for His Grace, the Company's performance in 2019 has generally been in line with the Shareholders' expectations. Through this report, we submit the results of the Company management duties conducted during 2019.

COMPANY PERFORMANCE ANALYSIS

Board of Directors would like to thank all parties, especially all our employees for their contribution that has enabled the Company to deliver a good performance in 2019. The 2019 performance achievements cannot be separated from the influence of the economy and industry as well as the selection and execution of effective strategic policies.

ECONOMIC REVIEW

Even though the world economy was in a stagnant condition, the national economy in 2019 was remained quite stable in the range of 5%-6%. Most business sectors grew more slowly than in the previous quarter. In terms of composition to GDP, the Manufacturing industry is the largest contributor to GDP at 19.8%. The growth of the processing industry in the second quarter of 2019 was 3.5%, lower than the first quarter of 2018 and the previous quarter. The growth of this sector was driven by the growth of the Textile and Garment Industry sub-sector by 20.7% (YoY) and the Paper and Goods of Paper, Printing and Reproduction of Recording Media Industry by 12.5% (YoY), supported by among others the National Election in April. In addition, the food and beverage industry also grew faster by 8.0%.

Along with the stability of the national economy, the port industry was able to continue the trend that has been undergoing in recent years. The role of ports has now evolved to become a "one-stop service provider" and "port ecosystem integrator" that has led to a revolution in the operation and scale of the port business. Globally, there is a pattern of port development from separate port to integrated region and global port companies have begun to enter supporting



perusahaan kepelabuhanan global sudah mulai memasuki bisnis-bisnis pendukung dan *adjacencies* yang ada di rantai nilai. Tren ini dapat mengintegrasikan pelabuhan dengan kawasan ekonomi khusus yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Berdasarkan analisis perekonomian dan industri yang telah dilakukan, Perseroan telah menetapkan kebijakan-kebijakan strategis yang diperlukan. Sebagai bagian dari *Corporate Roadmap* 2016-2020, dengan target menjadi *World Class Port* di tahun 2020, tahun 2019 menekankan pada strategi *Sustainable*. Strategi *Sustainable* dilakukan setelah pengembangan dan penguatan bisnis selesai dilaksanakan di tahun 2018 dengan strategi "*Establishment*". Fokus pada tahap *Sustainable* yaitu *Growth Strategy: Non-Organic and Organic Growth* untuk meningkatkan pendapatan Perusahaan dengan mengimplementasikan *growth strategy* dan ekspansi ke Luar Negeri melalui Entitas Anak, *National Connectivity Program* by implementing strategic project yang berkomitmen untuk dapat meningkatkan konektivitas antar pelabuhan dan kawasan industri melalui program *Integrated Port Network* dan Pengembangan Pembangunan Proyek serta *Global Expansion Program* untuk menginisiasi *global expansion*.

Untuk merealisasikan hal itu, Perseroan telah melaksanakan beberapa langkah. Pertama, IPC mentransformasi pelabuhan menjadi *smart port* atau *digital port* dengan menggunakan basis IT, termasuk dalam sistem operasionalnya. Transformasi ini menjadi prioritas Perseroan seiring dengan perbaikan infrastruktur pelabuhan. Program *digital port* dan pemangkasan waktu tunggu bongkar muat peti kemas akan menjadi modal utama dalam mendukung program tol laut dan sekaligus menjadi langkah penting menuju *World Class Port*. Hingga 2019, Perseroan telah membuat terobosan dengan diimplementasikannya *digital port* pada lini darat dan laut, diantaranya yaitu implementasi *autogate*, Tempat Penimbunan Sementara (TPS) *Online*, *Terminal Operating System* (TOS) dan *Auto Tally* di terminal peti kemas, penerapan *Marine Operating System* (MOS), serta *Vessel Management System* (VMS) pada sejumlah Cabang Pelabuhan.

Kedua, *E-Service*. Hadirnya pelayanan berbasis elektronik seperti *e-registration*, *e-booking*, *e-tracking and tracing*, *e-payment*, *e-billing*, dan *e-care*. Pelayanan-pelayanan tersebut menjadi basis *Integrated Billing System* (IBS) yang akan mengintegrasikan sistem pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan yang dioperasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero) yang sekaligus menjadi implementasi program Kementerian BUMN.

businesses and *adjacencies* in the value chain. This trend can integrate ports with special economic zones and support economic growth.

STRATEGIC POLICIES

Based on economic and industry analysis, the Company has established the necessary strategic policies. As part of the 2016-2020 Corporate Roadmap, with the target of becoming a World Class Port in 2020, the 2019 emphasize Sustainable strategy. The Sustainable Strategy is carried out after business development and strengthening is completed in 2018 with the "Establishment" strategy. The focus on Sustainable stage is Growth Strategy: Non-Organic and Organic Growth to increase the Company's revenue by implementing growth strategies and overseas expansion through subsidiaries, the National Connectivity Program by implementing strategic projects that are committed to improving connectivity between ports and industrial areas through Integrated Port Network program as well as Project Development and Global Expansion Program to initiate global expansion.

To realize this, IPC has taken several steps towards becoming a World Class Port. Firstly, through IT, IPC is transforming its ports into smart ports or digital ports as a priority, accompanied by improvements to port infrastructure, and use of information technology in operational systems. The digital port program, and the reduction in container loading and unloading waiting times, will be a mainstay to supporting the sea toll and the first step towards becoming a World Class Port. Up to 2019, the Company made a breakthrough in its digital ports, both in land and sea, including implementing autogate, Online Temporary Storage (TPS), and Auto Tally in container terminals, Terminal Operating System (TOS) based operations, Marine Operating System (MOS), and Vessel Management System (VMS) in a number of port branches.

Secondly, through e-service that consists of electronic-based services such as e-registration, e-booking, e-tracking and tracing, e-payment, e-billing, and e-care. These services form the basis for the Integrated Billing System (IBS) that will be integrated into the port service systems at ports operated by PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero) and at the same time will become part of the Ministry of SOE program.

Ketiga, Peningkatan Pelayanan, salah satunya melalui upaya merealisasikan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebagai *Transshipment Port*. IPC telah berhasil merealisasikan kerjasama dengan CMA-CGM untuk menghubungkan Indonesia dengan Amerika secara langsung, melalui pembukaan rute Jakarta – Los Angeles (*direct call*) dengan menggunakan kapal berukuran besar (kapasitas lebih dari 10.000 TEUs). Selain Amerika, kerjasama dengan CMA-CGM juga membuka rute baru SEANE yakni Jakarta-Eropa (*direct call*) yang sebelumnya belum pernah ada. IPC juga menambah layanan *direct call* ke Asia/China dengan *shipping line* COSCO, layanan *direct call* ke Asia/Vietnam dengan *shipping line* SM Lines, serta layanan *direct call* ke Korea Selatan oleh MSC. Inisiatif *Direct Call* tersebut juga dilakukan sebagai bagian dari dukungan IPC pada upaya Pemerintah dalam merealisasikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Direct Call* telah memberikan implikasi bagi para eksportir berupa efisiensi biaya karena dapat secara langsung mengirimkan produk ke negara tujuan tanpa harus transit di pelabuhan negara lain.

Keempat, Pembangunan proyek strategis, yakni pembangunan terminal di Kalimantan Barat untuk menjadi *hub port* dan mendukung program tol laut yang telah dicanangkan Pemerintah, yakni Terminal Kijing. Selain Terminal Kijing, IPC juga mengupayakan proyek pembangunan Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL) yang merupakan upaya optimalisasi alur sungai dengan menggunakan kapal tongkang sebagai alternatif moda transportasi barang yang dapat menjadi penghubung antara pelabuhan dengan area *hinterland*. CBL diharapkan dapat mengurangi kongesti jalan di darat dan diharapkan berdampak pada efisiensi waktu dan biaya. Proyek strategis lainnya yaitu pembangunan Pelabuhan Sorong di Papua Barat. Pelabuhan ini diproyeksikan untuk menjadi pelabuhan hub di Indonesia Timur sehingga jalur tol laut nasional yang dicita-citakan Pemerintah dari sisi barat hingga ke timur Indonesia dapat diwujudkan. IPC berencana untuk memulai pembangunan Tahap I Pelabuhan Sorong dengan kapasitas 500.000 TEUs.

Catatan positif lainnya adalah telah direalisasikannya 8 (delapan) kerjasama *Sister Port* yaitu antara Pelabuhan Tanjung Priok dengan Port of Lazaro Cardenas Mexico, Port of Baku, Port of Qatar, Port of Djibouti, Port of Ningbo, Port of Shenzhen, Port of Guangzhou, dan Port of Townsville. Lingkup kerja sama dari *Sister Port* diantaranya adalah terkait *sharing knowledge*, kerja sama bisnis, *internship* program, *benchmarking*, pertukaran informasi, dan potensi kerja sama lainnya dalam rangka memperluas jaringan di sektor maritim dan logistik.

Thirdly, through service improvement efforts to realize Tanjung Priok Port Branch as a *Transshipment Port*. IPC has successfully collaborated with CMA-CGM to directly connect Indonesia and the USA, resulting in the opening of the Jakarta - Los Angeles (*direct call*) route using largesized ships (capacity of more than 10,000 TEUs). in addition to the USA, in collaboration with CMA-CGM, a new SEANE route has been opened, namely Jakarta-Europe (*direct call*) that had never before existed. IPC has also added *direct call* services to Asia/China with the COSCO shipping line, *direct call* services to Asia/Vietnam with shipping line SM lines, as well as *direct call* services to South Korea by MSC. The *direct call* initiative was also carried out as part of IPC's support for the government's efforts to realize Indonesia as a World Maritime Axis. *Direct Call* has implications for exporters in the form of cost efficiency as they can now directly send products to destination countries without having to transit in other countries' ports.

Fourthly, the strategic project development, specifically construction of Kijing Terminal in West Kalimantan as a hub port to support the sea toll program that has been launched by the Government. In addition to Kijing Terminal, IPC is also looking to develop the Cikarang Bekasi Laut (CBL) canal project in an effort to optimize river channels using barges as an alternative mode of goods transportation to link the port and the hinterland area. CBL is expected to reduce congestion on land and is expected to have an impact on time and cost efficiencies. another strategic project is the construction of Sorong Port in West Papua. This port is projected to become a hub port in eastern indonesia so that the Government's plan to link the west to the east of indonesia through a national sea toll road can be realized. IPC plans to start construction of Phase I of Sorong Port with a capacity of 500,000 TEUs.

Another positive has been the realization of 8 (eight) *Sister Port* collaborations, namely Tanjung Priok Port working together with the Port of Lazaro Cardenas Mexico, Port of Baku, Port of Qatar, Port of Djibouti, Port of Ningbo, Port of Shenzhen, Port of Guangzhou, and Port of Townville. The scope of cooperation with the *Sister Ports* includes knowledge sharing, business cooperation, internship programs, benchmarking, information exchange, and other potential cooperations to expand the maritime and logistics sector network.



Di samping itu, penguatan entitas induk juga menjadi fokus tahun 2019. Langkah Perseroan dalam hal ini diantaranya adalah dengan standarisasi operasi dan infrastruktur pelabuhan guna mendukung *integrated port network*, *subsidiaries expansion*, implementasi Pelindo *Incorporated*, kerja sama dengan kawasan industri, serta pembangunan Container Terminal 2, Container Terminal 3, Produk Terminal 1 dan Produk Terminal 2 New Priok Port. IPC terus memberikan dukungan penuh untuk sektor-sektor prioritas negara, terutama untuk pengembangan infrastruktur dan investasi jangka panjang yang strategis serta program pemerintah di bidang kemaritiman.

PENCAPAIAN TARGET

Hasil dari implementasi kebijakan-kebijakan strategis telah memberikan dampak yang positif terhadap kinerja Perseroan. Secara umum, Perseroan telah mencapai kinerja melampaui yang ditargetkan. Berdasarkan hasil laporan keuangan IPC tahun buku 2019 (*audited*), Perseroan berhasil mencatatkan Laba bersih tahun 2019 sebesar Rp2,50 triliun atau meningkat 3,01% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan operasi tahun 2019 Rp11,14 triliun atau turun 2,58% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp11,44 triliun, sedangkan Pendapatan Operasional Lainnya dan Pendapatan Keuangan tahun 2019 Rp1,80 triliun atau naik 19,85% dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,50 triliun. Pada sisi aset, berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perusahaan per 31 Desember 2019 (*audited*), nilainya menunjukkan tren positif yaitu tercatat sebesar Rp52,04 triliun atau naik 1,18% dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp51,43 triliun.

Sementara pada aspek operasional, Pencapaian pelayanan jasa barang dari dermaga umum dalam satuan Ton dan M3 masing-masing mencapai 8,99% dan 22,04% berada di atas target RKAP 2019. Demikian pula dengan pelayanan terminal dari *stevedoring* dalam satuan Ton yang mencapai 5,04%, di atas target tahun 2019, hal tersebut seiring dengan meningkatnya kegiatan B/M Komoditi curah kering batu bara di Pelabuhan Jambi dan Cirebon, *general cargo* dan *bag cargo* di *car terminal* Banten dan Teluk Bayur. Sedangkan pelayanan terminal dari *cargodoring* dalam satuan Ton mencapai 113,38% yang dipengaruhi peningkatan kegiatan *handling* komoditi *bag cargo*, bungkil, pupuk dan kelapa yang terdapat di Cabang Teluk Bayur dan Jambi.

Implementasi *digital port* juga telah mendapatkan apresiasi dari pihak eksternal. Pada tahun 2019 Perseroan telah mendapatkan *award* terkait dengan digitalisasi yaitu; *Innovative Company In Developing Marine Operating System (MOS) Category: Transportation & Warehousing*.

In addition, strengthening the holding company was a focus in 2019. The Company's steps in this regard included standardization of port operations and infrastructure to support integrated port networks, subsidiary expansion, implementation of Pelindo incorporated, cooperation with industrial estates, and construction of Container Terminal 2, Container Terminal 3, Terminal 1 Products, and New Priok Port Terminal 2 Products. IPC continues to provide full support for the country's priority sectors, especially for strategic long-term infrastructure and investment development and government programs in the maritime sector.

TARGET ACHIEVEMENTS

The result of implementing the strategic policies has had a positive impact on the Company's performance. In general, the Company's performance has exceeded its targets. Based on IPC financial statements for fiscal year 2019 (*audited*), the Company managed to record a net profit in 2019 of Rp2.50 trillion, an increase of 3.01% compared to the previous year's realization. Operating revenue in 2019 was realized at Rp11.14 trillion, a decrease of 2.58% compared to 2018 realization of Rp11.44 trillion, while Other Operating Income and Finance Income in 2019 were Rp1.80 trillion, increased by 19.85% compared to 2018 realization Rp1.50 trillion. In terms of Assets, based on the Statement of Company's Audited Financial Position as of December 31, 2019 (*audited*), the value showed a positive trend at Rp52.04 trillion, an increase of 1.18% from the previous year's position of Rp51.43 trillion.

While in the operational aspect, the achievement of cargo services from the public dock in Ton and M3 unit reached 8.99% and 22.04%, respectively, above the 2019 RKAP target. Likewise, terminal services from *stevedoring* in Ton unit reached 5.04%, above the 2019 target, in line with the increase in loading/unloading activities of dry bulk coal commodity in Jambi and Cirebon Ports, general cargo and bag cargo in Banten and Teluk Bayur car terminal. While the terminal services of *cargodoring* in Ton unit reaching 113.38% was influenced by the increase in commodity baggage handling activities, cakes, fertilizers and coconuts in Teluk Bayur and Jambi Branches.

The implementation of digital port has also received appreciation from external parties. In 2019, the Company received an award related to digitalization namely; *Innovative Company In Developing Marine Operating Systems (MOS) Category: Transportation & Warehousing*.

KENDALA/TANTANGAN YANG DIHADAPI SERTA STRATEGI PENYELESAIANNYA

Keberhasilan yang telah dicapai Perseroan juga tercermin dari upaya Perseroan dalam menghadapi kendala/tantangan dalam menjalankan usaha. Dalam upaya penerapan digitalisasi pelayanan pelabuhan secara menyeluruh, Perseroan menghadapi tantangan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Perseroan telah melaksanakan strategi peningkatan kompetensi SDM diantaranya melalui penyelenggaraan pelatihan-pelatihan yang diidentifikasi berdasarkan *gap analysis*, termasuk di dalamnya pelatihan yang ditujukan untuk persiapan kompetensi sebelum datangnya peralatan baru. Perseroan juga melaksanakan program-program *internship* khususnya melalui kerja sama *sister port*. Di samping upaya peningkatan kompetensi *hard skill*, Perseroan juga senantiasa meningkatkan kesadaran para pegawai dalam menginternalisasikan nilai perusahaan yang disebut CINTA IPC (*Customer Centric, Integrity, Nationalism, Teamwork, dan Action*). Hal ini dikarenakan implementasi *digital port* sangat terkait dengan penerapan tata kelola yang baik.

Dengan menerapkan nilai-nilai perusahaan secara efektif maka implementasi terhadap nilai-nilai perusahaan akan berjalan secara efektif. *Customer centric*, dapat diartikan bahwa bagi IPC yang merupakan perusahaan jasa, *customer* merupakan prioritas utama dan perusahaan tidak akan berarti tanpa mereka. *Integrity*, memberikan ketulusan dalam setiap kegiatan usaha sehingga menjadi perusahaan yang hebat. *Nationalism*, apa yang kita kerjakan oleh IPC ditujukan untuk kepentingan negara. *Teamwork*, dengan bekerjasama, tujuan perusahaan dapat tercapai. *Action*, bermakna bahwa tidak cukup hanya berbicara dalam tataran teori tetapi harus ada aksi nyata untuk menggapai tujuan.

ANALISIS PROSPEK USAHA PERSEROAN

IPC telah melakukan analisis terhadap lingkungan bisnis baik tataran global maupun nasional yang dapat berpengaruh pada keberlangsungan usaha terkait dengan isu perdagangan, industri pelayaran dan kepelabuhanan, teknologi dan isu lingkungan hidup. Berikut ini adalah poin-poin terpenting hasil analisis lingkungan bisnis IPC. Laju pertumbuhan volume perdagangan dunia terdapat korelasi yang tinggi antara pertumbuhan PDB global dan perdagangan via laut. Ekonomi global dan Indonesia saat ini sedang menyesuaikan diri dengan tingkat pertumbuhan PDB riil yang lebih rendah. Efek *Belt Road Initiatives* China berdampak moderat terhadap kargo *Dry Bulk*, Tanker dan Gas, berdampak kecil terhadap Petikemas. Dari sisi pelayaran dan kepelabuhanan, konsolidasi Perusahaan Pelayaran akan

CONSTRAINTS/CHALLENGES AND THE SOLUTION

The Company's success is also reflected in the efforts taken in facing the constraints/challenges that arose in running the business. In an effort to implement overall digitalization of the port services, the Company faced the challenge of preparing its Human Capital with the required competencies. In this regard, the Company followed a Human Capital competency improvement strategy that including identifying training needs based on a gap analysis, and training aimed at competency preparation before the arrival of new equipment. The Company also implemented a special internship programs in collaboration with its sister ports. In addition to increasing hard skill competencies, the Company is continuously raising the employees' awareness to the company value CINTA IPC (*Customer Centric, Integrity, Nationalism, Teamwork, and Action*). This is because the digital ports implementation is very much related to the implementation of good governance.

Applying a corporate culture will ensure it runs effectively. *Customer centric*, means that to IPC, as a service company, customers are the top priority and the Company can do nothing without them. *Integrity*, means it is impossible for the Company to be great if it does not have integrity. *Nationalism*, means that what is done by IPC is aimed at the state's interest. *Teamwork*, means it is impossible for anyone to work alone, and there must be teamwork so that the goals can be achieved. *Action*, means that it is not enough just to talk theory but there must be real action to reach the goals

ANALYSIS ON COMPANY'S BUSINESS OUTLOOK

IPC has analyzed the business environment both at global and national level that can affect its business sustainability, related to the trade issues, shipping and port industry and, technology and environmental issues. The following are the most important points from the analysis of IPC business environment. The growth rate in the volume of world trade, there is a high correlation between global GDP growth and sea trade. The global economy as well as Indonesia's economy are currently adjusting to lower real GDP growth rate. The China Belt Road Initiatives effect has a moderate effect on *Dry Bulk*, Tanker and Gas cargoes, with mild impact on containers. In terms of shipping and port, the Shipping Line consolidation will have an impact on the Port: Terminal Handling Cost Efficiency, Alliance joint contracts,



berdampak pada Pelabuhan: Efisiensi Biaya *Handling Terminal*, Kontrak bersama aliansi, *Shipping Line* akan memperluas cakupan bisnis (misal: layanan *door to door*). Selain itu, terjadi perubahan strategi *Shipping Line*, dari *Hardware (Big Ship)* ke arah *Software (Integrator Supply Chain Global)* dan terjadi perubahan strategi *Port Operator*, dari *Hardware* (membangun banyak terminal/ pelabuhan) ke arah *software (Global Trade Enablers)* dengan membangun jaringan pemilik barang skala global.

Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, perekonomian nasional diprediksi akan cukup stabil dan masih memberikan peluang pertumbuhan di 2020. Di Asia Tenggara, Indonesia memimpin penambahan kapasitas TEU secara keseluruhan di terminal petikemas dan *multipurpose*. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I sampai dengan IV memiliki proyek perluasan kapasitas pelabuhan baik yang sedang berlangsung dan yang direncanakan. Pelabuhan-pelabuhan ini kemungkinan akan menjadi peluang investasi bagi pendatang baru mulai dari sekarang hingga lima tahun ke depan. CAGR dari *throughput* Tanjung Priok tercatat sebesar 4,6% dalam sepuluh tahun terakhir, merupakan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional sekitar 3,5%. Perkiraan (*forecast*) atas *throughput* kontainer Tanjung Priok telah dilakukan berdasarkan faktor ekonomi makro. Pemanfaatan Tanjung Priok saat ini adalah sekitar 70%. Diperkirakan akan melampaui 90% pada tahun 2025. Namun, pertumbuhan *throughput* kontainer cenderung moderat secara signifikan setelah peralihan modal Indonesia ke Kalimantan serta dimulainya operasi Patimban dan Kramatwatu.

Selain *trend* global dan *trend* nasional yang di jabarkan di atas, pada awal Januari tahun 2020 terjadi *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang mulai merebak di Tiongkok. Proses pemulihan ekonomi global tertahan setelah COVID-19 merebak di Tiongkok sejak akhir Januari 2020. COVID-19 mulai tersebar di Wuhan, Tiongkok dan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Tingkat persebaran COVID-19 lebih cepat dengan masa inkubasi yang lebih panjang. Tingkat persebaran yang cepat disebabkan oleh munculnya virus tersebut jelang tahun baru Lunar, pada saat lalu lintas penumpang lebih tinggi di Tiongkok. Penyebaran COVID-19 yang cepat berdampak langsung terhadap perlambatan perekonomian Tiongkok.

COVID-19 memberikan tantangan bagi upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia menurunkan prospek pertumbuhan ekspor barang Indonesia, meskipun pada Februari 2020 meningkat didorong ekspor batu bara, CPO,

Shipping Line will expand business coverage (eg *door to door* service). Besides that, there is a change in the *Shipping Line* strategy, from *Hardware (Big Ship)* to *Software (Global Supply Chain Integrator)* and there is a change in the *Port Operator* strategy, from *Hardware* (building many terminals/ports) to *software (Global Trade Enablers)* by building a global scale network of goods owners.

In the midst of slowing world economic growth, the national economy is predicted to be quite stable and still provide growth opportunities in 2020. In Southeast Asia, Indonesia is leading the overall increase in TEU capacity at container and multipurpose terminals. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I to IV have port capacity expansion projects both ongoing and planned. These ports are likely to become investment opportunities for new arrivals from now until the next five years. CAGR from Tanjung Priok throughput was 4.6% in the last ten years, which is a much higher growth compared to the national average of around 3.5%. The forecast regarding Tanjung Priok container throughput has been made based on macroeconomic factors. The utilization of Tanjung Priok is currently around 70% and is estimated that it will surpass 90% by 2025. However, container throughput growth tends to be moderate significantly after the shift of Indonesian capital to Kalimantan and the commencement of Patimban and Kramatwatu operations.

In addition to the global and national trend as described above, the *Corona Virus Disease (COVID-19)* that began to spread in China has occurred in early January of 2020. The process of global economic recovery was halted after COVID-19 broke out in China since late January 2020. COVID-19 began to spread in Wuhan, China and has different characteristics compared to *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. The spread rate of COVID-19 is faster with a longer incubation period. The rapid spread is caused by the emergence of the virus ahead of the Lunar New Year, when passenger traffic is higher in China. The rapid spread of COVID-19 had a direct impact on the economic slowdown in China.

COVID-19 has given a challenge for efforts to drive the momentum of domestic economic growth. Slowing growth prospects for the world economy will reduce the growth prospects for Indonesia's goods exports, although in February 2020 the increase will be driven by exports of coal, CPO and some manufactured

dan beberapa produk manufaktur. Ekspor jasa terutama sektor pariwisata diperkirakan juga menurun akibat terhambatnya proses mobilitas antar negara sejalan dengan upaya memitigasi risiko perluasan COVID-19. Investasi nonbangunan berisiko melambat dipengaruhi menurunnya prospek ekspor barang dan jasa serta terganggunya rantai produksi. Bank Indonesia mengapresiasi langkah stimulus fiskal Pemerintah dalam meminimalkan dampak COVID-19, yang bersamaan dengan rencana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak diperkirakan dapat menopang prospek pertumbuhan ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 dari 5,0%-5,4% menjadi 4,2%-4,6%. Pasca berakhirnya COVID-19, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan kembali meningkat menjadi 5,2%-5,6%, antara lain dipengaruhi upaya Pemerintah memperbaiki iklim investasi melalui RUU Cipta Kerja dan Perpajakan. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan.

Dalam menghadapi tahun 2020, IPC telah melakukan analisis secara internal untuk mengidentifikasi peluang-peluang usaha yang dapat dicapai dengan berbekal keunggulan yang dimiliki oleh IPC. Di tengah ketidakpastian yang ada dalam dunia kepelabuhanan, Indonesia dan IPC khususnya masih memiliki peluang untuk terus mengembangkan bisnis inti maupun non-inti pada pasar domestik maupun internasional. Peluang yang dimiliki IPC antara lain akan mulai dioperasikannya salah satu Proyek Strategis Nasional yaitu Terminal Tanjung Pura/Kijing di Kalimantan Barat, potensi peningkatan volume petikemas yang terus menunjukkan trend positif dan semakin meningkatnya trend alih kemasan dari *bulk* ke kemasan petikemas, potensi peningkatan volume komoditas inti yang menunjukkan trend positif dan *market size* yang masih besar untuk komoditas curah, rencana pemerintah dalam pengembangan industri, kawasan industri, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Jawa melalui peluang kerjasama dalam pengembangan industri dan KEK yang terintegrasi pelabuhan di luar Jawa dan *Holding* BUMN Layanan Pelabuhan melalui rencana sinergi antara PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) serta entitas (anak atau cucu perusahaan) yang sejenis, kerjasama perdagangan bebas Indonesia dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* yang memudahkan kerjasama perusahaan global, khususnya negara yang bermitra dengan Indonesia,

products. Exports of services, particularly the tourism sector, are also predicted to decline due to hampered inter-country mobility processes in line with efforts to mitigate the risk of expanding COVID-19. Non-construction investment risks are slowing down due to the decline in the prospects for exports of goods and services and disruption of the production chain. Bank Indonesia appreciates the Government's fiscal stimulus measures in minimizing the impact of COVID-19, which together with the planned implementation of Regional Head Election is predicted to be able to sustain economic growth prospects. With these developments, Bank Indonesia revised its forecast for Indonesia's economic growth in 2020 from 5.0%-5.4% to 4.2%-4.6%. After the end of COVID-19, economic growth in 2021 is predicted to increase to 5.2%-5.6%, partly influenced by the Government's efforts to improve the investment climate through the Draft of Omnibus Law. Bank Indonesia continues to strengthen coordination with the Government and OJK to closely monitor the dynamics of the spread of COVID-19 and their impact on Indonesia from time to time, as well as further policy coordination actions that need to be taken to maintain macroeconomic and financial system stability, and sustain Indonesia's economic growth to stay favorable and enduring.

In facing the year of 2020, IPC has conducted an internal analysis to identify business opportunities that can be achieved with a number of advantages possessed by IPC. In the midst of uncertainty in the port world, Indonesia and IPC in particular still have the opportunity to continue to develop core and non-core businesses in the domestic and international markets. Opportunities owned by IPC, among others are one of the National Strategic Projects will commence its operation, namely Tanjung Pura/Kijing Terminal in West Kalimantan, potential increase in container volume that continues to show a positive trend and increasing trend of packaging shifting from bulk to container packaging, potential increase in volume of core commodities that shows a positive trend and market size for bulk commodities that remains to be large, the government's plan to develop industries, industrial estates, and Special Economic Zones (KEK) outside Java through cooperation opportunities in industrial development and integrated SEZs outside Java and SOE Port Service Holding through a synergy plan between PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, and IV (Persero) and similar entities (subsidiaries or subsidiaries of subsidiary), Indonesian free trade cooperation and the Comprehensive Economic Partnership Agreement which facilitates the cooperation of global companies, especially countries that partner with Indonesia, Cooperation in developing ports with cargo owners (cooperation in developing



Kerjasama pengembangan pelabuhan dengan pemilik *cargo* (kerjasama pengembangan DUKS/TUKS baru) melalui kerjasama pengembangan dermaga/terminal dengan pemilik barang dan Trend digital yang membuka peluang bisnis baru dan perbaikan efisiensi operasional pelabuhan.

Dalam menangkap peluang tersebut, berbagai strategi telah dipersiapkan dan mulai dilaksanakan, khususnya memberdayakan seluruh sumber daya dan upaya untuk mewujudkan visi sebagai Pengelola Pelabuhan Kelas Dunia yang Unggul dalam Operasional dan Pelayanan. Di sisi lain, Perseroan memiliki kinerja keuangan yang cukup kuat, sehingga Perseroan optimis, bahwa prospek usaha Perseroan kedepannya akan berada pada arah yang positif. Faktor penting lainnya terkait dengan prospek usaha adalah adanya keinginan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan poros maritim terkemuka di dunia. IPC sebagai Perseroan yang bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan terus melakukan upaya dengan cara ekspansi bisnis untuk mendukung realisasi target Pemerintah tersebut. IPC juga aktif mendukung program Pemerintah melalui Program Tol Laut yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas nasional dari kawasan barat hingga timur Indonesia melalui jalur laut. IPC berinvestasi dalam pembangunan beberapa pelabuhan yang menjadi proyek strategis nasional yang diharapkan dapat memperlancar konektivitas antar pulau di Indonesia, memperkuat jaringan pelayaran, menumbuhkan perekonomian di daerah dan memangkas biaya transportasi laut.

Kami optimis dengan fondasi yang telah disiapkan pada fase *sustainable* di tahun 2019, IPC dapat meneruskan kinerja positif IPC dan menyukseskan tahun 2020 yang memasuki fase *World Class Port*.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DI 2019

Seluruh proses bisnis di Perusahaan wajib memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Kami percaya bahwa dengan penerapan GCG maka peningkatan kinerja Perseroan secara berkelanjutan dapat terwujud.

IPC memiliki komitmen terhadap penerapan GCG di seluruh lini Perseroan, tidak hanya di Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan namun juga termasuk di seluruh Entitas Anak. Perseroan memiliki sebuah *Roadmap Good Corporate Governance* (GCG) yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.568/17/3/1/PI.II-17 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan *Roadmap Good Corporate Governance* (GCG) 2017-2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

new DUKS/TUKS) through cooperation in developing docks/ terminals with goods owner and digital trends that open up new business opportunities and improve the efficiency of port operations.

In seizing these opportunities, a number of strategies have been prepared and started to be implemented, specifically empowering all resources and efforts to realize the vision of becoming a World Class Port Operator that Excels in Operations and Services. On the other hand, the Company has a fairly strong financial performance, hence the Company is optimistic that its future business outlook will be in a positive direction. Another important factor related to business outlook is the desire of President Joko Widodo to make Indonesia a country with the world's leading maritime axis. IPC as a company engaged in port management continues to expand its business to support the realization of the Government's targets. IPC is also actively supporting the Government's program through the Sea Toll Program, which aims to strengthen national connectivity from the western to eastern regions of Indonesia through the sea. IPC makes investments in the construction of several ports which are national strategic projects, that are expected to facilitate inter-island connectivity in Indonesia, strengthen shipping networks, grow the economy in the regions and reduce sea transportation costs.

We are optimistic that with the foundations laid in the sustainable phase in 2019, IPC can continue its positive performance and succeed in 2020 which enters the World Class Port phase.

CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN 2019

All business processes in the Company must follow the principles of Good Corporate Governance (GCG). We believe that by adopting GCG, sustainable improvements in the Company's performance can be realized.

IPC is committed to applying GCG in all areas of the company, not only at the Head Office and Port Branches but also all Subsidiaries. The Company has established a Good Corporate Governance (GCG) Roadmap that was ratified by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors Decree No. HK.568/17/3/1/PI.II-17 dated March 17, 2017 concerning the implementation of the 2017-2020 Good Corporate Governance (GCG) Roadmap in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Selaras dengan Rencana Strategis Perseroan, *Roadmap* GCG disusun untuk jangka panjang. Penyusunan *Roadmap* GCG IPC 2017-2020 ini dilakukan untuk menentukan arah dan capaian jangka panjang dalam aspek tata kelola yang dapat mendukung pencapaian kinerja bisnis dan menciptakan manfaat bersama dengan *stakeholder* (*shared value*). *Roadmap* GCG dengan seluruh kelengkapannya harus menjadi rujukan seluruh Insan IPC dalam menjalankan bisnis. *Roadmap* GCG juga ditujukan untuk semakin meningkatkan kesadaran kepada seluruh *stakeholder*, baik internal maupun eksternal tentang pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dengan adanya *Roadmap* GCG ini, *stakeholder* dapat memahami komitmen serta posisi IPC dalam menegakkan bisnis yang beretika.

Sejak disahkan, *Roadmap* GCG ini telah berjalan dengan baik. Sebagian hasil dari pelaksanaan *Roadmap* GCG 2017-2020 sudah dapat dirasakan sebagai sebuah capaian jangka pendek (*quick win*), di antaranya yaitu; telah terbentuknya struktur *governance* dan infrastruktur GCG (pedoman-pedoman dan *Roadmap* penyempurnaan GCG); meningkatnya nilai *assessment* GCG berdasarkan aturan Kementerian BUMN; dan diperolehnya penghargaan tingkat nasional di bidang GCG.

Di tahun 2019 yang merupakan fase ketiga, implementasi GCG ditargetkan mencapai fase *Sustainable* yaitu penerapan CGC yang secara kesinambungan mampu tampil sebagai perusahaan terkemuka dengan terus membangun budaya GCG dalam setiap rantai bisnisnya. Fase ini diharapkan menjadi dasar dalam pencapaian fase berikutnya yaitu fase *Citizenship*. Pada tahun 2019, Perseroan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi *assessment* GCG untuk tahun buku 2018. Selain itu, IPC juga melaksanakan kegiatan lain guna peningkatan kualitas penerapan GCG diantaranya yaitu; penandatanganan Janji Kode Etik Perusahaan dan Pakta Integritas, yang merupakan bentuk komitmen bersama atas kepatuhan kepada asas-asas GCG. Hingga akhir 2019, persentase penandatanganan pakta ini oleh karyawan IPC mencapai 100%.

Perseroan juga telah melaksanakan survei pemahaman GCG tahun 2019 kepada Insan IPC, yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai organik. Dari hasil survei pemahaman GCG IPC Tahun 2019 didapatkan nilai rata – rata pemahaman GCG dari Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 94,61%, dan Pekerja IPC di Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan sebesar 85,75%. Dengan masing-masing berpredikat "SANGAT BAIK". Kegiatan lain yang telah dilaksanakan yaitu *review* internal atas pedoman-pedoman GCG perusahaan, dengan mengacu pada kriteria dalam SK-16/S.MBU/2011. Berdasarkan hasil *review*, tersebut selanjutnya dilaksanakan pemutakhiran pedoman-pedoman yang ada.

In line with the Company's Strategic Plan, the GCG Roadmap was prepared for the long term. The 2017-2020 IPC GCG Roadmap determines the direction and long-term achievements in governance aspects that will support the achievement of business performance and create benefits for our stakeholders (*shared value*). The GCG Roadmap with all its features is a reference for all IPC Personnel in conducting business. The GCG Roadmap is also aimed at increasing the awareness of all stakeholders, both internal and external about the importance of Good Corporate Governance. Through this GCG Roadmap, stakeholders can understand the commitment and position of IPC in upholding its ethical business position.

Since it was approved, the GCG Roadmap has worked well. Some of the 2017-2020 GCG Roadmap results have already been felt as quick win, including; the formalization of the governance structure and GCG infrastructure (guidelines and roadmap for improving GCG); increased GCG assessment results based on the Ministry of SOE Regulation; and receiving national-level awards in the field of GCG.

In 2019, which is the third phase, GCG implementation is targeted to reach the Sustainable phase, namely the implementation of CGC that can continuously appear as a leading company by continuing to build a GCG culture in each of its business chains. This phase is expected to be the basis for achieving the next phase, the Citizenship phase. In 2019, the Company followed up on the recommendations of GCG assessment for the 2018 fiscal year. In addition, IPC also carried out other activities to improve the quality of GCG implementation including; the signing of the Company's Code of Ethics and Integrity Pact, which is a form of joint commitment on compliance with GCG principles. Until the end of 2019, the percentage of this pact signing by IPC employees reached 100%.

The Company has also conducted a 2019 GCG understanding survey for IPC personnel, which includes Board of Commissioners, Board of Directors and organic employees. From the survey results of IPC GCG understanding in 2019, the average score of GCG understanding from Board of Directors and Board of Commissioners was 94.61%, and IPC Employees at Head Office, Port Branches and Subsidiaries were 85.75%. With each obtaining the predicate of "VERY GOOD". Other activity that has been carried out was the internal review of corporate GCG guidelines, with reference to the criteria in SK-16/S.MBU/2011. Based on the review results, an update of the existing guidelines was then performed.



Peningkatan kualitas penerapan tata kelola yang baik salah satunya tercermin pada adanya peningkatan skor Penilaian GCG. Penilaian GCG tahun buku 2019 yang dilaksanakan di tahun 2020 menunjukkan skor 98,505, atau mengalami kenaikan skor sebesar 0,25 poin dari pencapaian di tahun buku sebelumnya sebesar 98,30. Tahun 2019, IPC juga melakukan penilaian GCG PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menggunakan standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* periode penilaian tahun buku 2019 dan menghasilkan total skor capaian (level 1 dan level 2) sebesar 89,74. Kenaikan ini secara umum dikarenakan adanya peningkatan wujud komitmen Perseroan dalam penerapan GCG.

Sejak tahun 2018, IPC berhasil mengembangkan sistem digitalisasi untuk meningkatkan efektifitas penerapan budaya GCG melalui aplikasi yaitu *I-Good, I-Move, I-Save, EPIC System* dan *Dashboard Kinerja IPC*. Pada tahun 2019 ini IPC kembali melakukan improvement terkait digitalisasi yaitu aplikasi *I-Bos (IPC Board Organizing System)*. *I-BOS (IPC Board Organizing System)* merupakan aplikasi *online* yang digunakan oleh Manajemen IPC dalam proses monitoring dan tindak lanjut keputusan Direksi serta digunakan oleh Sekretariat Perusahaan dalam pengelolaan administrasi Direksi dan *end to end* proses kegiatan BOM (*Board of Director Meeting*) dan BOMM (*Board of Management Meeting*). Ruang lingkup dari sistem *I-BOS* terdiri dari dua modul besar yaitu Modul Manajemen Rapat Direksi antara lain:

1. Persiapan Rapat Direksi seperti penyusunan dan dokumentasi jadwal rapat, agenda rapat, materi rapat serta kehadiran Rapat Direksi.
2. Monitoring hasil Rapat Direksi diantaranya penyusunan keputusan dan risalah rapat serta distribusi keputusan rapat dan *pending matters*.
3. Administrasi Direksi antara lain E-Payslip, proses pengajuan dan dokumentasi pembayaran reimbursement, uang harian perjalanan dinas, asuransi purna jabatan, dan administrasi perjalanan dinas luar negeri Direksi.

Sepanjang tahun 2019, IPC juga mencatat hasil implementasi GCG yaitu :

1. Asesmen GCG Tahun Buku 2019 oleh Auditor Eksternal, PT Multi Utama Indojasa. Capaian asesmen penerapan GCG Perusahaan pada tahun buku 2019 mencapai 98.55 atau mengalami kenaikan skor sebesar 0,247 poin dari pencapaian di tahun sebelumnya sebesar 98,303. Dalam pelaksanaannya IPC telah mengaplikasikan 95% dari penerapan indikator asesmen GCG yang diwajibkan oleh Kementerian BUMN
2. Berbagai penghargaan dalam bidang GCG yang diraih adalah :
 - a. Annual Report Award 2018, Peringkat 1 BUMN Non Keuangan Non Listed Penghargaan Laporan Tahunan 2018.
 - b. Anugerah BUMN 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Big Corporate kategori Tata Kelola Terbaik.

One of the improvements in the quality of good governance implementation is reflected in an increase in GCG assessment scores. GCG Assessment for the 2019 fiscal year carried out in 2020 showed a score of 98.505, or an increase in score of 0.25 points from the achievement in the previous fiscal year of 98.30. In 2019, IPC also conducted GCG assessment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) using the ASEAN Corporate Governance Scorecard standard for the 2019 fiscal year evaluation period and obtained a total achievement score (level 1 and level 2) of 89.74. This increase was generally due to an increase in the Company's commitment to implementing GCG.

Since 2018, IPC has succeeded in developing a digitizing system to improve the effectiveness of the implementation of GCG culture through applications, namely *I-Good, I-Move, I-Save, EPIC System* and *IPC Performance Dashboard*. In 2019, IPC also made improvements related to digitization, namely *I-Bos application (IPC Board Organizing System)*. *I-BOS (IPC Board Organizing System)* is an online application used by IPC Management in the process of monitoring and following up on Board of Directors' decisions and is used by the Corporate Secretariat in managing the Board of Directors' administrations and end to end process of BOM (Board of Directors Meeting) and BOMM (Board of Management Meeting) activities. The scope of *I-BOS* system consists of two major modules, namely the Board of Directors Meeting Management Module, including:

1. Preparation of Board of Directors' Meeting such as preparation and documentation of meeting schedules, meeting agendas, meeting materials and meeting attendance.
2. Monitoring the results of Board of Directors' meeting including the preparation of decisions and minutes of meeting as well as the distribution of meeting decisions and pending matters.
3. Board of Directors' Administration includes E-Payslip, the process of filing and documenting reimbursement payment, official travel daily money, post-service insurance, and official foreign travel administration.

Throughout 2019, IPC also recorded the following results of GCG implementation:

1. GCG Assessment for Fiscal Year 2019 by External Auditor, PT Multi Utama Indojasa. The achievement of the Company's GCG assessment in the 2019 fiscal year reached 98.55 or an increase in score of 0.247 points from the achievement in the previous year of 98,303. In its implementation, IPC has applied 95% of GCG assessment indicators required by the Ministry of SOEs
2. A number of GCG awards achieved are:
 - a. 2018 Annual Report Award, 1st Rank Non-Financial Non Listed SOE 2018 Annual Report Award.
 - b. Anugerah BUMN 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as the Big Corporate in the Best Governance category.

- c. TOP GRC Awards 2019, Elvyn G. Masassya sebagai The Most Committed GRC Leader 2019.
 - d. Indonesia Good Corporate Governance Award 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI).
3. Penetapan standarisasi GCG di Anak Perusahaan dan Cabang Pelabuhan.

- c. TOP GRC Awards 2019, Elvyn G. Masassya as The Most Committed GRC Leader 2019.
 - d. Indonesia Good Corporate Governance Award 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as Trusted Company Based on the Corporate Governance Perception Index (CGPI).
3. Establishment of GCG standardization in Subsidiaries and Port Branches.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh komite-komite di bawah Direksi yang terdiri atas 2 (dua) Komite. Komite-komite tersebut antara lain:

1. Komite Investasi dan Manajemen Risiko
2. Komite IPC Bersih

Selama tahun 2019, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Komite Investasi dan Manajemen Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengelolaan investasi dan risiko Perseroan. Selama tahun 2019, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite IPC Bersih merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam memastikan efektivitas penerapan *whistleblowing system* di IPC. Selama tahun 2019, Komite IPC Bersih telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Penilaian kinerja Unit audit internal merupakan bagian dari KPI Perusahaan, dengan kriteria hasil Temuan Audit yang telah selesai ditindaklanjuti. Penilaian tersebut didasari oleh kontrak kinerja yang di tandatangani oleh EVP Satuan Pengawas Internal dan Direktur Utama. Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana KPI tersebut di atas, Divisi Audit Internal telah dapat mencapai target yang ditetapkan pada KPI.

Penilaian kinerja Unit Manajemen Risiko merupakan bagian dari KPI Perusahaan, dengan kriteria risk maturity level. Penilaian tersebut didasari oleh kontrak kinerja yang di tandatangani oleh VP Manajemen Risiko dan Direktur Teknik dan Manajemen Risiko yang diketahui oleh Direktur Utama. Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana KPI tersebut di atas, Divisi Manajemen Risiko telah dapat mencapai target yang ditetapkan pada KPI.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS AND BASIS OF ASSESSMENT

In carrying out its management duties, Board of Directors is assisted by 2 (two) committees:

1. Investment and Risk Management committee
2. IPC Bersih committee

During 2019, Board of Directors considered that these committees had carried out their duties and responsibilities properly.

The Investment and Risk Management Committee is a committee formed to help Board of Directors in managing the Company's investments and risks. In 2019, Investment and Risk Management Committee has performed its duties well.

The IPC Bersih Committee is a committee formed to help Board of Directors ensure the effectiveness of the whistleblowing system in IPC. In 2019, IPC Bersih Committee has performed its duties properly.

The performance assessment of the internal audit unit is part of the Corporate KPI, with Audit Finding results have been completely followed up as the criteria. The evaluation is based on a performance contract signed by EVP Internal Audit Unit and President Director. Based on performance measurements as mentioned above, the Internal Audit Division has been able to achieve the targets set in KPI.

The performance assessment of the Risk Management Unit is part of the Corporate KPI, with risk maturity level as the criteria. The evaluation is based on a performance contract signed by VP Risk Management and Director of Technical and Risk Management with the consent of President Director. Based on performance measurements as mentioned above, the Risk Management Division has been able to achieve the targets set in KPI.



PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI TAHUN 2019

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dengan susunan, persyaratan, nominasi dan pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi selama periode tahun 2019 di jabarkan sebagai berikut.

PERIODE 1 JANUARI - 4 JANUARI 2019

Komposisi Direksi periode 1 Januari – 4 Januari 2019 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direktur berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Pengangkatan <i>Appointment Basis</i>	Tanggal Efektif <i>Effective Date</i>
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016 SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016	22 April 2016 April 22, 2016
Saptono R. Irianto	Direktur Komersial Commercial Director	SK-48/MBU/03/2014 tanggal 11 Maret 2014 SK-48/MBU/03/2014 dated March 11, 2014	11 Maret 2014 March 11, 2014
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik Technical Director	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan Finance Director	SK-295/MBU/11/2018 tanggal 26 November 2018 SK-295/MBU/11/2018 dated November 26, 2018	26 November 2018 November 26, 2018
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Human Capital Director	SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 July 14, 2017
Riry Syeried Jetta	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Business Development Director	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016

PERIODE 4 JANUARI – 10 MARET 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan Nomor SK-04/MBU/01/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II menyatakan dalam rangka penataan anggota Direksi Perseroan, maka RUPS memutuskan pemberhentian Bapak Riry Syeried Jetta sebagai Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis. Sehingga Komposisi Direksi periode 4 Januari – 10 Maret 2019 sebanyak 6 (enam)

CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION IN 2019

The Company is managed and led by the Board of Directors consisting of a Director or more with the composition, requirements, nominations and appointment of Members of Board of Directors determined by the GMS in accordance with the provisions of the Articles of Association and the applicable laws and regulations. The composition and basis for appointment of Board of Directors during 2019 were as follows.

PERIOD OF JANUARY 1 – JANUARY 4, 2019

The composition of IPC Board of Directors for period of January 1 – January 4, 2019 consisted of 7 (seven) persons including 1 (one) President Director and 6 (six) Directors. All members of Board of Directors reside in the working area of IPC Head Office. The composition and basis for appointment of Board of Directors can be seen in the table below.

PERIOD OF JANUARY 4 – MARCH 10, 2019

Based on the Minister of SOEs Decree as the Company's GMS Number SK-04/MBU/01/2019 dated January 4, 2019 concerning the Dismissal of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) stating that in the restructuring of members of Board of Directors, the GMS decided dismissal of Riry Syeried Jetta as Director of Business Transformation and Development. So that the composition of Board of Directors for period of January 4 to March 10, 2019 will be 6 (six) persons consisting of 1 (one)

orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur. Seluruh anggota Direktur berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

President Director and 5 (five) Directors. All members of Board of Director reside in the working area of IPC Head Office. The composition and basis for appointment of Board of Directors can be seen in the table below.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016 SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016	22 April 2016 April 22, 2016
Saptono R. Irianto	Direktur Komersial Commercial Director	SK-48/MBU/03/2014 tanggal 11 Maret 2014 SK-48/MBU/03/2014 dated March 11, 2014	11 Maret 2014 March 11, 2014
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik Technical Director	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan Finance Director	SK-295/MBU/11/2018 tanggal 26 November 2018 SK-295/MBU/11/2018 dated November 26, 2018	26 November 2018 November 26, 2018
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Human Capital Director	SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 July 14, 2017

PERIODE 11 MARET – 7 APRIL 2019

Pada tanggal 11 Maret 2019 masa jabatan Bapak Saptono R. Irianto berakhir sebagai Direktur Komersial. Sehingga Komposisi Direksi periode 11 Maret – 7 April 2019 sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur. Seluruh anggota Direktur berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PERIOD OF MARCH 11 – APRIL 7, 2019

On March 11, 2019, Saptono R. Irianto's tenure ended as Commercial Director. So that the composition of Board of Directors for the period of March 11 - April 7, 2019 totaled 5 (five) persons consisting of 1 (one) President Director and 4 (four) Directors. All members of Board of Director reside in the working area of IPC Head Office. The composition and basis for appointment of Board of Directors can be seen in the table below.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016 SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016	22 April 2016 April 22, 2016
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik Technical Director	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan Finance Director	SK-295/MBU/11/2018 tanggal 26 November 2018 SK-295/MBU/11/2018 dated November 26, 2018	26 November 2018 November 26, 2018
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Human Capital Director	SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 July 14, 2017

PERIODE 8 APRIL 2019 – 17 NOVEMBER 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-80/MBU/04/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perseroan tanggal 8 April 2019 yang

PERIOD OF APRIL 8 – NOVEMBER 17, 2019

Based on SOE Ministerial Decree Number SK-80/MBU/04/2019 concerning Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors of the Company dated April 8, 2019 which confirmed



menyatakan mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak Saptono R. Irianto sebagai Direktur Komersial Perseroan terhitung sejak tanggal 11 Maret 2019 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan serta mengangkat Bapak Ogi Rulino sebagai Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis dan Bapak Arif Suhartono sebagai Direktur Komersial.

Sehingga Komposisi Direksi periode 8 April – 17 November 2019 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direktur berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

the dismissal of Saptono R. Irianto as Commercial Director of the Company as of March 11, 2019 with highest gratitude for all contributions of energy and thoughts during his tenure and the appointment of Ogi Rulino as Director of Business Transformation and Development and Arif Suhartono as Commercial Director.

So that the composition of Board of Directors for the period of April 8 - November 17, 2019 is 7 (seven) persons consisting of 1 (one) President Director and 6 (six) Directors. All members of Board of Director reside in the working area of IPC Head Office. The composition and basis for appointment of Board of Directors can be seen in the table below.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016 SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016	22 April 2016 April 22, 2016
Arif Suhartono	Direktur Komersial Commercial Director	SK-80/MBU/40/2019 tanggal 8 April 2019 SK-80/MBU/40/2019 dated April 8, 2019	8 April 2019 April 8, 2019
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik Technical Director	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan Finance Director	SK-295/MBU/11/2018 tanggal 26 November 2018 SK-295/MBU/11/2018 dated November 26, 2018	26 November 2018 November 26, 2018
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Human Capital Director	SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 July 14, 2017
Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Business Development Director	SK-80/MBU/40/2019 tanggal 8 April 2019 SK-80/MBU/40/2019 dated April 8, 2019	8 April 2019 April 8, 2019

PERIODE 18 NOVEMBER – 31 DESEMBER 2019

Sesuai Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-272/MBU/11/2019 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Utama Perseroan tanggal 18 November 2019 yang menyatakan mengangkat Bapak Hambra sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan. Sehingga Komposisi Direksi periode 18 November – 31 Desember 2019 sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direktur berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PERIOD OF NOVEMBER 18 – DECEMBER 31, 2019

In accordance with the Minister of SOE Decree Number SK-272/MBU/11/2019 concerning the Appointment of Vice President Director of the Company on November 18, 2019 which stated to appoint Hambra as Vice President Director of the Company. Therefore, Board of Directors Composition for the period of November 18 - December 31, 2019 totaling 8 (eight) persons consisting of 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director and 6 (six) Directors. All members of Board of Director reside in the working area of IPC Head Office. The composition and basis for appointment of Board of Directors can be seen in the table below.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016 SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016	22 April 2016 April 22, 2016
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	SK-272/MBU/11/2019 tanggal 18 November 2019 SK-272/MBU/11/2019 dated November 18, 2019	18 November 2019 November 18, 2019
Arif Suhartono	Direktur Komersial Commercial Director	SK-80/MBU/40/2019 tanggal 8 April 2019 SK-80/MBU/40/2019 dated April 8, 2019	8 April 2019 April 8, 2019
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik Technical Director	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan Finance Director	SK-295/MBU/11/2018 tanggal 26 November 2018 SK-295/MBU/11/2018 dated November 26, 2018	26 November 2018 November 26, 2018
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Human Capital Director	SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 July 14, 2017
Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Business Development Director	SK-80/MBU/40/2019 tanggal 8 April 2019 SK-80/MBU/40/2019 dated April 8, 2019	8 April 2019 April 8, 2019

PENUTUP

Atas dukungan berbagai pihak, khususnya kepada seluruh pegawai, kami segenap jajaran Direksi mengucapkan terima kasih. Berkat dukungan yang diberikan, Perseroan telah mencatatkan kinerja yang baik di 2019. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pemegang Saham atas kepercayaan yang diberikan dan kepada Dewan Komisaris atas pengawasan dan arahnya dalam menjalankan kepengurusan Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus memantapkan komitmennya untuk meraih standar *World Class* dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan.

CLOSING REMARKS

With the support of many parties, especially all employees, we, the entire Board of Directors, would like to send our gratitude. Thanks to the support provided, the Company has recorded a good performance in 2019. The same gratitude also goes to the shareholders for the trust given and to the Board of Commissioners for their supervision and direction in running the management of the Company. Going forward, the Company will continue to strengthen its commitment to achieving World class standards in port services.

Atas Nama Direksi
On Behalf of Board of Directors

Arif Suhartono
Direktur Utama
President Director



SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019 PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019 telah di muat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Moermahadi Soerja Djanegara

Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

Suaidi Marasabessy

Komisaris/Komisaris Independen
Commissioner/Independent Commissioner

Djadmiko

Komisaris
Commissioner

Montty Girianna

Komisaris
Commissioner

Kushari Suprianto

Komisaris
Commissioner

D. Andhi Nirwanto

Komisaris
Commissioner

R. Agus H. Purnomo

Komisaris
Commissioner

STATEMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ON THE RESPONSIBILITY FOR THE 2019 ANNUAL REPORT OF PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)

We, the undersigned, testify that all information contained in the 2019 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has been presented in its entirety and are fully responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report and Financial Statement of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

This statement is hereby made in all truthfulness

DIREKSI


Board of Directors



Arif Suhartono
Direktur Utama
President Director



Hambra
Wakil Direktur Utama
Vice President Director



Rima Novianti
Direktur Komersial
Commercial Director



Dani Rusli Utama
Direktur Teknik
Technical Director



Muarip
Direktur Operasi
Operation Director



Yon Irawan
Direktur Keuangan
Finance Director



Ihsanuddin Usman
Direktur Sumber Daya Manusia
dan Umum
Human Capital and General
Affairs Director



Ogi Rulino
Direktur Transformasi dan
Pengembangan Bisnis
Transformation and Business
Development Director



PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE



IPC didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

IPC was established with the purposes and objectives of conducting business in the field of in the field of port business services and operations, as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce high-quality and highly competitive goods and/or services to obtain/pursue profit in order to increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company.



IDENTITAS PERUSAHAAN

COMPANY IDENTITY

Nama Perusahaan Company Name	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Jenis/Badan Hukum Perusahaan Type/Company Legal Entity	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) State-Owned Enterprise
Bidang Usaha Line of Business	Jasa Kepelabuhan dan Logistik Port and Logistic Services
Produk dan Jasa Products and Services	Pelayanan Kapal, Pelayanan Barang dan Pelayanan Rupa-Rupa Ship Services, Cargo Services, and Miscellaneous Services
Tanggal Pendirian Date of Establishment	5 Februari 1960 February 5, 1960
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	<p>Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 4 tanggal 5 Mei 1998 yang keduanya dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan diubah lagi dengan Akta Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dan Akta Nomor 3 tanggal 30 Juli 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., Notaris di Bekasi.</p> <p>Kemudian diubah lagi dengan Akta Nomor 12 tanggal 21 September 2012, yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 09 tanggal 21 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.</p> <p>Certificate of Establishment Number 3 dated December 1, 1992, amended by Certificate Number 4 dated May 5, 1998, both of which were made before Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta and amended by Certificate of Amendment Number 2 dated August 15, 2008 and Certificate Number 3 dated July 30, 2009, both of which were made before Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., Notary in Bekasi.</p> <p>Later amended by Certificate of Amendment Number 12 dated September 12, 2012 which was made before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta with the latest amended by Certificate of Amendment Number 9 dated August 21, 2019 which was made before Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.</p>
Kepemilikan Ownership	Negara Republik Indonesia: 100% The Government of The Republic of Indonesia: 100%
Modal Dasar Authorized Capital	Rp4.000.000.000.000 (empat triliun rupiah) Rp4,000,000,000,000 (four trillion rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital	Rp1.444.029.000.000 (satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar dua puluh sembilan juta rupiah) Rp1,444,029,000,000 (one trillion four hundred forty four billion twenty nine million rupiah)
Data Jaringan Kantor Office Network Data	<p>1 Kantor Pusat 10 Wilayah Kerja 12 Kantor Cabang 20 Grup Perusahaan yang terdiri dari: 14 Entitas Anak Perusahaan 4 Entitas Asosiasi 2 Kerja Sama Operasi</p> <p>1 Head Office 10 Work Areas 12 Branch Offices 20 Company Group, consist of: 14 Subsidiaries 4 Associates 2 Joint Venture</p>
Jumlah Pegawai Total Employees	2.669
Total Aset Total Assets	Rp52,04 triliun Rp52.04 trillion
Sekretariat Perusahaan Corporate Secretary	EVP Sekretariat Perusahaan: Shanti Puruhita Email: corp_sec@indonesiaport.co.id
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Jl. Pasoso No.1, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, 14310 Phone: (6221) 4301080 Fax: (6221) 43911704

Situs Web Website	www.indonesiaport.co.id
Contact Address Contact Address	<p>Sekretariat Perusahaan / Corporate Secretary corp_sec@indonesiaport.co.id</p> <p><i>Investor Relation</i> <i>Email</i> : investor.relations@indonesiaport.co.id</p> <p>Media Sosial / Social Media <i>Facebook</i> : Pelabuhan Indonesia II /IndonesiaPort <i>Twitter</i> : @indonesiaport <i>Instagram</i> : @indonesiaportcorp <i>Youtube</i> : Pelabuhan Indonesia II/IPC</p>
Wilayah Kerja dan Pelabuhan Work Areas & Port Branches	<p>Terdapat 10 (sepuluh) wilayah kerja dan 12 (dua belas) pelabuhan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat 2. Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu 3. Pelabuhan Jambi, Jambi 4. Pelabuhan Palembang, Sumatera Selatan 5. Pelabuhan Pangkal Balam, Bangka Belitung 6. Pelabuhan Panjang, Lampung 7. Pelabuhan Tanjung Pandan, Bangka Belitung 8. Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta 9. Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat 10. Pelabuhan Banten, Banten 11. Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat 12. Pelabuhan Sunda Kelapa, DKI Jakarta <p>10 (ten) work areas and 12 (twelve) port branches, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Port of Teluk Bayur, West Sumatra 2. Port of Pulau Baai, Bengkulu 3. Port of Jambi, Jambi 4. Port of Palembang, South Sumatra 5. Port of Pangkal Balam, Bangka Belitung 6. Port of Panjang, Lampung 7. Port of Tanjung Pandan, Bangka Belitung 8. Port of Tanjung Priok, DKI Jakarta 9. Port of Pontianak, West Kalimantan 10. Port of Banten, Banten 11. Port of Cirebon, West Java 12. Port of Sunda Kelapa, DKI Jakarta
Entitas Anak Subsidiaries	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Multipurpose) 2. PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) 3. PT Multi Terminal Indonesia (MTI) 4. PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPC Marine/JAI) 5. PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) 6. PT Rumah Sakit Pelabuhan (RSP) 7. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IKT) 8. PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) 9. PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) 10. PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI) 11. PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) 12. PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) 13. PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI) 14. PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII)
Entitas Cucu Subsidiaries of Subsidiaries	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Menara Maritim Indonesia (MMI) 2. PT Akses Pelabuhan Indonesia (API)
Entitas Asosiasi Associates	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Jakarta International Container Terminal (JICT) 2. PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI) 3. PT New Priok Container Terminal One (NPCT1) 4. PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP)
Kerja sama Operasi Joint Venture	<ol style="list-style-type: none"> 1. KSO Terminal Petikemas Kojas (TPK KOJA) 2. Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia (MKO MTKI)



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

PT Pelabuhan Indonesia II (selanjutnya disebut "IPC" dan "Perseroan") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1983 *juncto* PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998, Perseroan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 09 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., tanggal 21 Agustus 2019 mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-38219 tanggal 12 September 2013.

Berdasarkan Akta No. 03 tersebut di atas, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada PT Pengerukan Indonesia dalam rangka restrukturisasi PT Pengerukan Indonesia.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp1.017.611.000.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.000.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA

Sesuai dengan uraian riwayat singkat, IPC tidak pernah melakukan perubahan nama sejak pertama kali berdiri hingga saat ini. Namun demikian, IPC telah melakukan perubahan status perusahaan dari semula perusahaan umum menjadi Perusahaan Perseroan sehingga nama IPC menjadi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Perubahan ini efektif berlaku pada 19 April 2004 sesuai dengan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 tanggal 17 Juni 1993.

PT Pelabuhan Indonesia II (hereinafter referred to as "IPC" and "Company") was originally established as a Public Company ("Perum") Pelabuhan II based on Government Regulation ("PP") No. 15 of 1983 *juncto* PP No. 5 of 1985. Perum Pelabuhan II is a State-Owned Enterprise ("SOE") under the guidance of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on PP No. 57 of 1991, Perum Pelabuhan II changed its status to Limited Liability Company (PT). as a follow up, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on Imas Fatimah, S.H., Notarial Certificate No. 3 dated December 1, 1992. The Certificate of establishment was approved by the Republic of Indonesia Ministry of Justice Decree No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 dated June 17, 1993. Since the establishment of the Ministry of SOE in 1998, the Company has come under its guidance. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on the Shareholders Decision notarized in the Notarial Certificate No. 09 from Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 21, 2019 concerning additional issued and fully paid capital in the Company. The Articles of Association amendment was notified to the Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights through the Letter of Acceptance Notification No. AHU-AH.01.10-38219 dated September 12, 2013.

Based on the Certificate No. 03, the Republic of Indonesia Government, represented by the Ministry of SOEs added Rp426,418,000,000 in equity to the Company, which was derived from the transfer of all the Republic of Indonesia's shares to PT Pengerukan Indonesia in the context of restructuring PT Pengerukan Indonesia.

With the addition of the Republic of Indonesia's shares, the Company's issued and fully paid capital increased from Rp1,017,611,000,000 to Rp1,444,029,000,000.

INFORMATION ON NAME CHANGE

As described in the brief history, IPC has never made a name change since it was first established. However, IPC has changed the company status from a general public company to a Limited Liability Company so the name IPC changed to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). This change took effect on April 19, 2004 in accordance with the approval of the Republic of Indonesia Ministry of Justice Decree No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 dated June 17, 1993.

BRAND PERUSAHAAN COMPANY BRAND



PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Energizing Trade. Energizing Indonesia.

Adapun penjelasan dari *brand* Perseroan di atas adalah sebagai berikut:

Company brand explanation:

1	Anak panah yang melesat di atas air atau horizon dan menjadi representasi dari konsep pergerakan Perusahaan yang dinamis.	A dashed arrow above the water or horizon represents a concept of dynamic movement of the Company.
2	Cahaya matahari pagi yang merepresentasikan perubahan, kekuatan, optimisme dan simbol kebanggaan seluruh karyawan terhadap perusahaannya dalam usaha bersama untuk meraih tujuan Perusahaan.	The sunrise represents the spirit of change, strength, optimism, and the pride of employees toward their company that drives them to work together to achieve the Company's goals.
3	Sisi biru logo menggambarkan kesiapan memasuki era baru yang dinamis, serta fleksibilitas dari setiap komponen Perseroan dalam menghadapi setiap tantangan.	The blue represents a dynamic new era for both the company and employees where all of the Company's elements move in a flexible way when facing challenges.
4	IPC dengan tulisan abu-abu gelap merupakan <i>brand</i> yang merepresentasikan citra modern, keyakinan dan profesionalitas serta menginspirasi kepercayaan kepada seluruh Pemangku Kepentingan.	IPC's name written in dark grey font becomes a brand that represents a modern image, confidence, and professionalism as well as illustrating our trust to all Stakeholders.
5	"Energizing Trade. Energizing Indonesia" merupakan <i>tagline</i> yang mencerminkan pergeseran paradigma Perusahaan dari sekedar <i>Serving Indonesia Economic Growth</i> menjadi <i>Driving Indonesia Economic Growth</i> .	"Energizing Trade. Energizing Indonesia" is a tagline that reflects of paradigm shift for the Company from <i>Serving Indonesia economic growth</i> into <i>Driving Indonesia Economic Growth</i> .



BIDANG USAHA BUSINESS FIELDS

KEGIATAN USAHA

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar terakhir, IPC didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

BUSINESS ACTIVITIES

Based on Article 3 paragraph 1 of the latest Articles of Association, IPC was established with the intention and purpose of conducting business in the field of port business services and operations, as well as optimizing the utilizing the Company's resources to produce high-quality and highly competitive goods and/or services to obtain/pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company.

Kegiatan Usaha <i>Business Activities</i>	Sudah Dijalankan <i>Has been carried out</i>	Belum Dijalankan <i>Not yet carried out</i>
Utama		
Main		
Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal <i>Port basins and water pools for traffic and vessels dock</i>	✓	
Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan dan penundaan kapal <i>Services related to pilotage and vessel delays</i>	✓	
Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering, <i>multi purpose</i> , barang termasuk hewan (<i>general cargo</i>), dan fasilitas naik turunnya penumpang <i>Docks and other facilities for anchoring, container stevedoring, liquid bulk, dry bulk, multi purpose, goods including animals (general cargo), and facilities for passenger embarkation/debarkation facilities</i>	✓	
Jasa bongkar muat, peti kemas, curah cair, curah kering (<i>general cargo</i>), dan kendaraan <i>Stevedoring services, containers, liquid bulk, dry bulk (general cargo), and vehicles</i>	✓	
Jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, <i>multi purpose</i> , penumpang, pelayanan rakyat, dan Ro-Ro <i>Container terminal services, liquid bulk, dry bulk, multi purpose bulk, passengers, public services, and Ro-Ro</i>	✓	
Gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan <i>Warehouses, stockpiles and goods storage, transportation, equipment stevedoring, and port equipment</i>	✓	
Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multi moda <i>Land for buildings and land and warehouses/buildings needed for smooth multi-mode transportation</i>	✓	
Penyediaan listrik, air minum dan instalasi limbah pembuangan sampah <i>Provision of electricity, drinking water and waste disposal waste installations</i>	✓	
Jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan <i>Fuel filling services for vessels and vehicles in the port environment</i>		✓
Kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan <i>Consolidation and distribution activities for goods including animals</i>	✓	
Jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhan <i>Consultancy, education and training services related to the port</i>	✓	
Depo peti kemas dan perbaikan, <i>cleaning</i> , fumigasi serta pelayanan logistik <i>Container depots and repair, cleaning, fumigation and logistics services</i>	✓	
Kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara <i>Customs areas and temporary storage</i>	✓	
Pendukung		
Supporting		
Jasa angkutan <i>Transportation</i>	✓	

Kegiatan Usaha <i>Business Activities</i>	Sudah Dijalankan <i>Has been carried out</i>	Belum Dijalankan <i>Not yet carried out</i>
Persewaan dan perbaikan fasilitas peralatan <i>Rental and repair of equipment</i>	✓	
Perawatan kapal dan peralatan di bidang kepelabuhan <i>Ship and equipment maintenance in the port sector</i>	✓	
Pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (<i>ship to ship transfer</i>) termasuk jasa ikutan lainnya <i>Ship to ship transfer including other follow-up services</i>	✓	
<i>Property</i> di luar kegiatan utama kepelabuhan <i>Property outside the main port activities</i>	✓	
Kawasan industri <i>Industrial estate</i>	✓	
Fasilitas pariwisata <i>Tourism facilities</i>	✓	
Perhotelan <i>Hospitality</i>		✓
Jasa konsultan dan <i>surveyor</i> kepelabuhan <i>Port consultancy and surveyor services</i>	✓	
Jasa komunikasi dan informasi <i>Information and communication services</i>	✓	
Jasa konstruksi kepelabuhan <i>Port construction services</i>	✓	
Jasa <i>forwarding</i> /ekspedisi <i>Forwarding/expediting services</i>	✓	
Jasa kesehatan <i>Health services</i>		
Perbekalan dan <i>catering</i> <i>Supplies and catering</i>	✓	
Tempat tunggu kendaraan bermotor dan <i>shuttle bus</i> <i>Motor vehicles and shuttle buses parking places</i>	✓	
Jas penyelaman (<i>salvage</i>) <i>Salvage diving suits</i>	✓	
Jasa <i>tally</i> dan jasa pas pelabuhan <i>Tally services and port pass services</i>	✓	
Jasa timbangan <i>Weighing services</i>	✓	

PRODUK DAN JASA

Sesuai dengan Akta Perseroan, produk/jasa Perseroan adalah sebagai berikut:

PELAYANAN KAPAL

Pelayanan kapal merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. Pelayanan kapal meliputi:

- **Jasa Tambat**
Jasa yang diberikan untuk kapal yang merapat ke dermaga untuk melakukan kegiatan bongkar muat.
- **Jasa Pandu**
Jasa yang diberikan untuk kapal keluar masuk menuju dermaga melalui alur pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.

PRODUCTS AND SERVICES

In accordance with the Company's Certificate, the Company's products/services include:

SHIP SERVICES

Is a service for vessel operations from the time of entering the port until exit. Ship services include:

- **Anchorage services**
Services provided for docked ships to carry out loading and unloading activities
- **Pilotage services**
Services provided for ships going in and out of the dock through the port channel, so that navigation can be carried out safely, orderly and smoothly for the safety of ships and the environment



- **Jasa Tunda**
Jasa yang diberikan oleh kapal tunda untuk mendorong atau menarik kapal menuju atau keluar dermaga
- **Jasa Pelayanan Air, Sampah dan Limbah**
Jasa yang diberikan untuk pelayanan air, pengelolaan sampah dan limbah kapal.

PELAYANAN BARANG

Pelayanan barang merupakan pelayanan bongkar muat mulai dari kapal hingga penyerahan ke pemilik barang. Pelayanan barang meliputi:

- **Dermaga**
Bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan atau tempat kapal untuk ditambatkan atau merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang kapal.
- **Gudang Penumpukan**
Suatu bangunan atau tempat tertutup yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal.
- **Lapangan Penumpukan**
Sebuah lahan terbuka di dalam area terminal yang digunakan untuk menempatkan atau menumpuk petikemas atau barang lainnya yang disusun secara berencana baik barang yang akan dimuat ke kapal ataupun barang setelah dibongkar dari kapal.
- **Receiving/Delivery**
Pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.

PELAYANAN RUPA-RUPA

Pelayanan rupa-rupa merupakan jasa pelayanan yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan. Pelayanan rupa-rupa meliputi:

- **Pas Pelabuhan**
Biaya masuk area pelabuhan untuk perseorangan dan kendaraan bermotor.
- **Jasa Pemeliharaan Alat-Alat Pelabuhan**
Jasa yang diberikan, berupa persewaan forklift, kran (darat, apung dan listrik), kapal tunda, motor boat dan alat pemadam kebakaran.
- **Jasa Penyewaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik (TBAL)**
Merupakan jasa persewaan lahan, bangunan, air bersih serta energi listrik.

- **Towage services**
Services provided by tugs to push or pull ships to or out of the dock
- **Fresh Water, Garbage and Waste Services**
Services provided for water services, waste management and ship waste

CARGO SERVICES

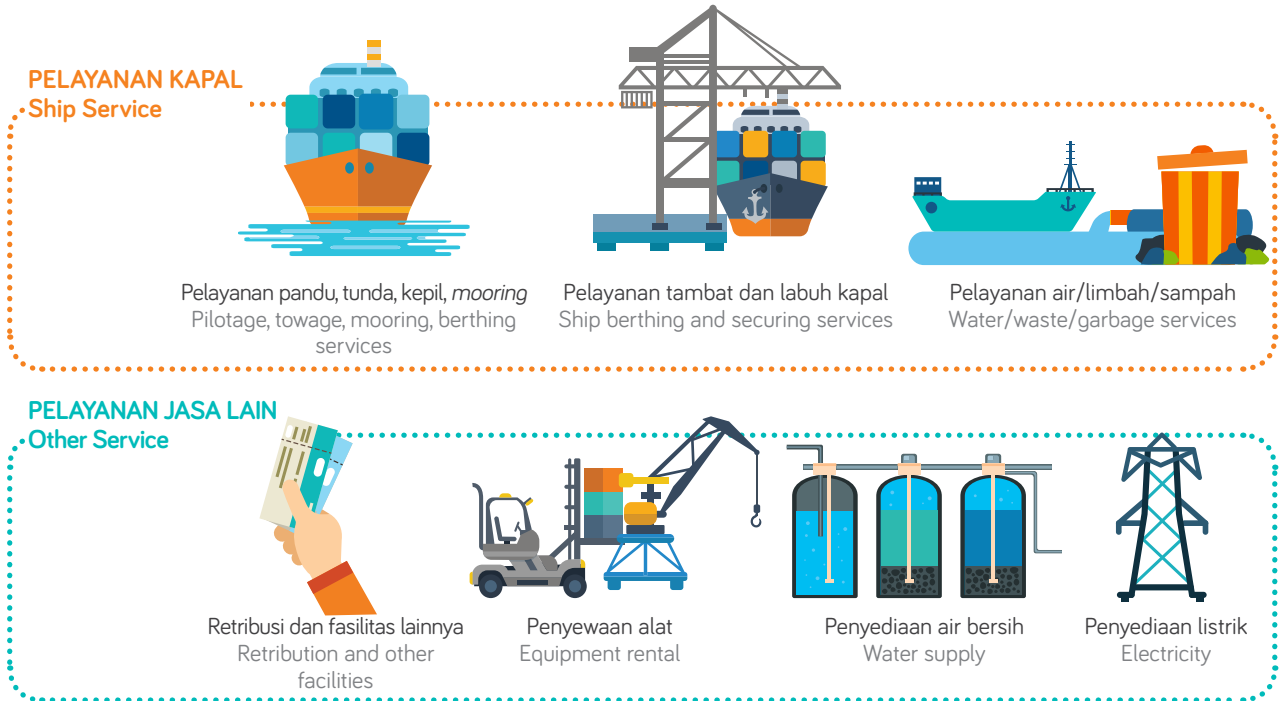
Is a stevedoring service from the vessels to cargo delivery to the owners. Cargo services includes:

- **Berthing**
Buildings specifically designed at the port or a place for ships to be tethered or docked to carry out loading and unloading activities of goods and passengers.
- **Storage Warehouse**
A building or closed place used to store items originating from ships, or to be loaded onto ships.
- **Storage Yards**
An open area within the terminal area used to place or stack containers or other items, arranged in a planned manner, for goods to be loaded onto ships, or for goods after being unloaded from ships.
- **Receiving/Delivery**
Moving goods from stockpiles in warehouses/stacking areas, onto vehicles at the warehouse/stacking gates or vice versa.

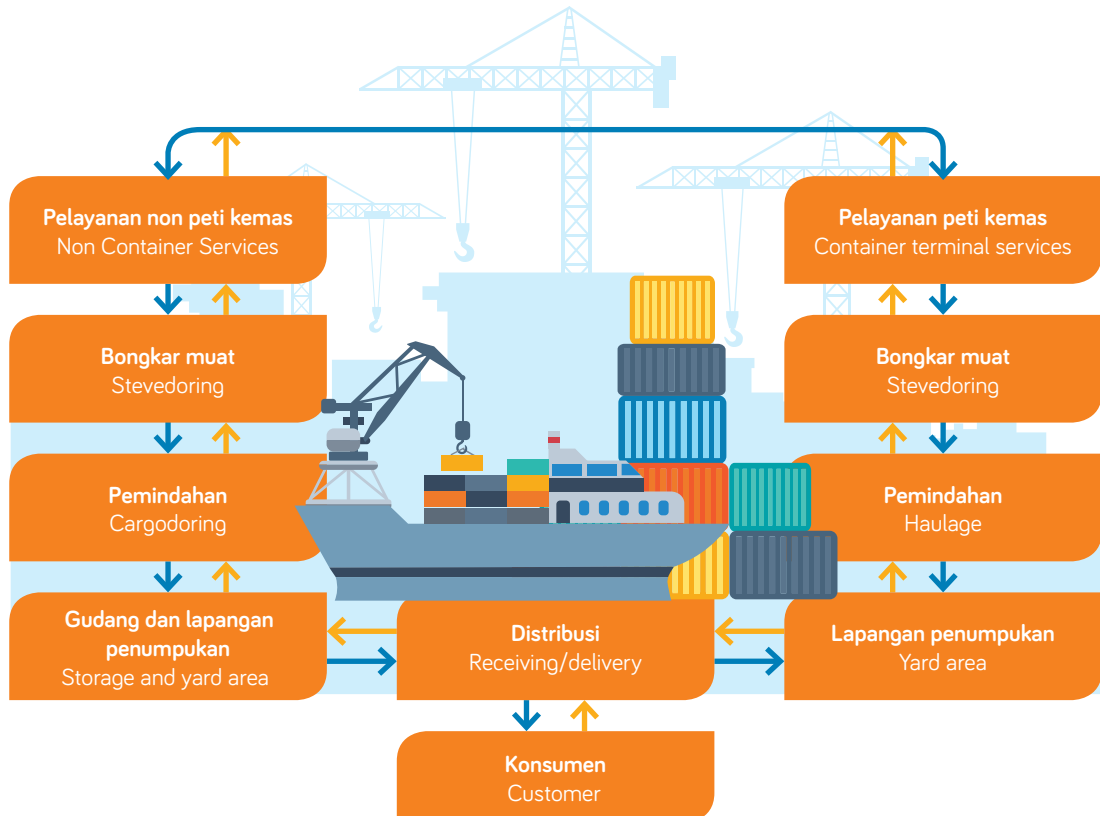
MISCELLANEOUS SERVICES

Are services that support the port activities. Miscellaneous Services include:

- **Port Pass**
Cost of entering a port area for individuals and motorized vehicles
- **Port Equipment Maintenance Services**
Services provided, in the form of forklift rental, faucets (land, buoyancy and electricity), tugboats, motorboats and fire extinguishers
- **Land, Building, Water and Electricity Rental Services (TBAL)**
A rental service for land, buildings, clean water and electricity.



Pelayanan barang dan peti kemas
Goods and Container Services





PETA WILAYAH USAHA

BUSINESS AREA MAP

Saat ini Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 12 (dua belas) kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

At present the Company has 1 Head Office and 12 branch offices spread throughout Indonesia.

Tabel Jaringan Kantor Tahun selama 5 tahun terakhir
Office Network for the past 5 years

Jenis Kantor Type of Office	2019	2018	2017	2016	2015
Kantor Pusat Head Office	1	1	1	1	1
Kantor Cabang Branch Office	12	12	12	12	12

Cabang Pelabuhan Utama Main Port Branch	Cabang Pelabuhan Madya Madya Port Branch	Cabang Pelabuhan Pratama Pratama Port Branch
1. Tanjung Priok	4. Teluk Bayur	10. Pangkal Balam
2. Banten	5. Pontianak	11. Sunda Kelapa
3. Panjang	6. Palembang	12. Tanjung Bandan
	7. Bengkulu	
	8. Jambi	
	9. Cirebon	





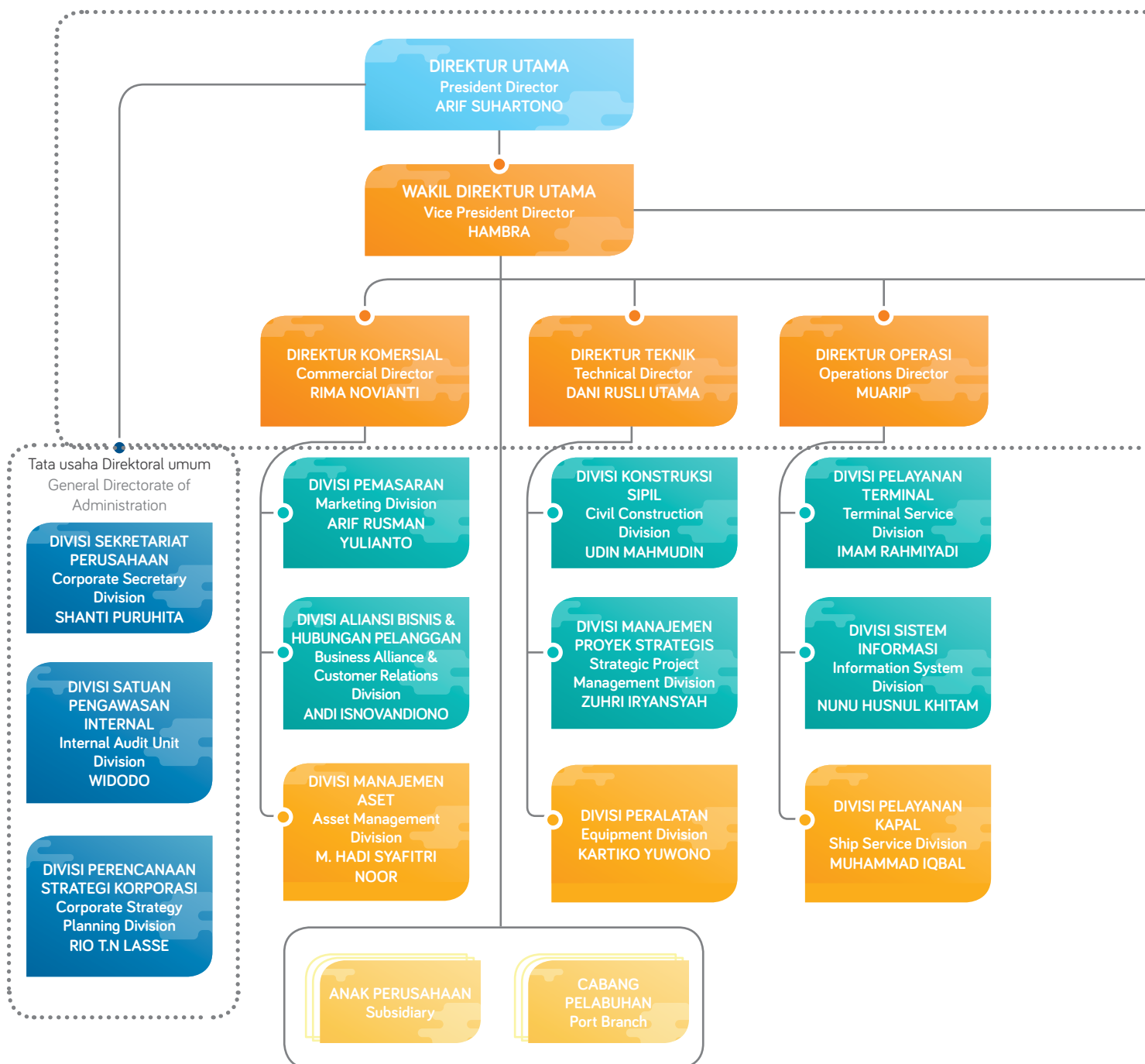


STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

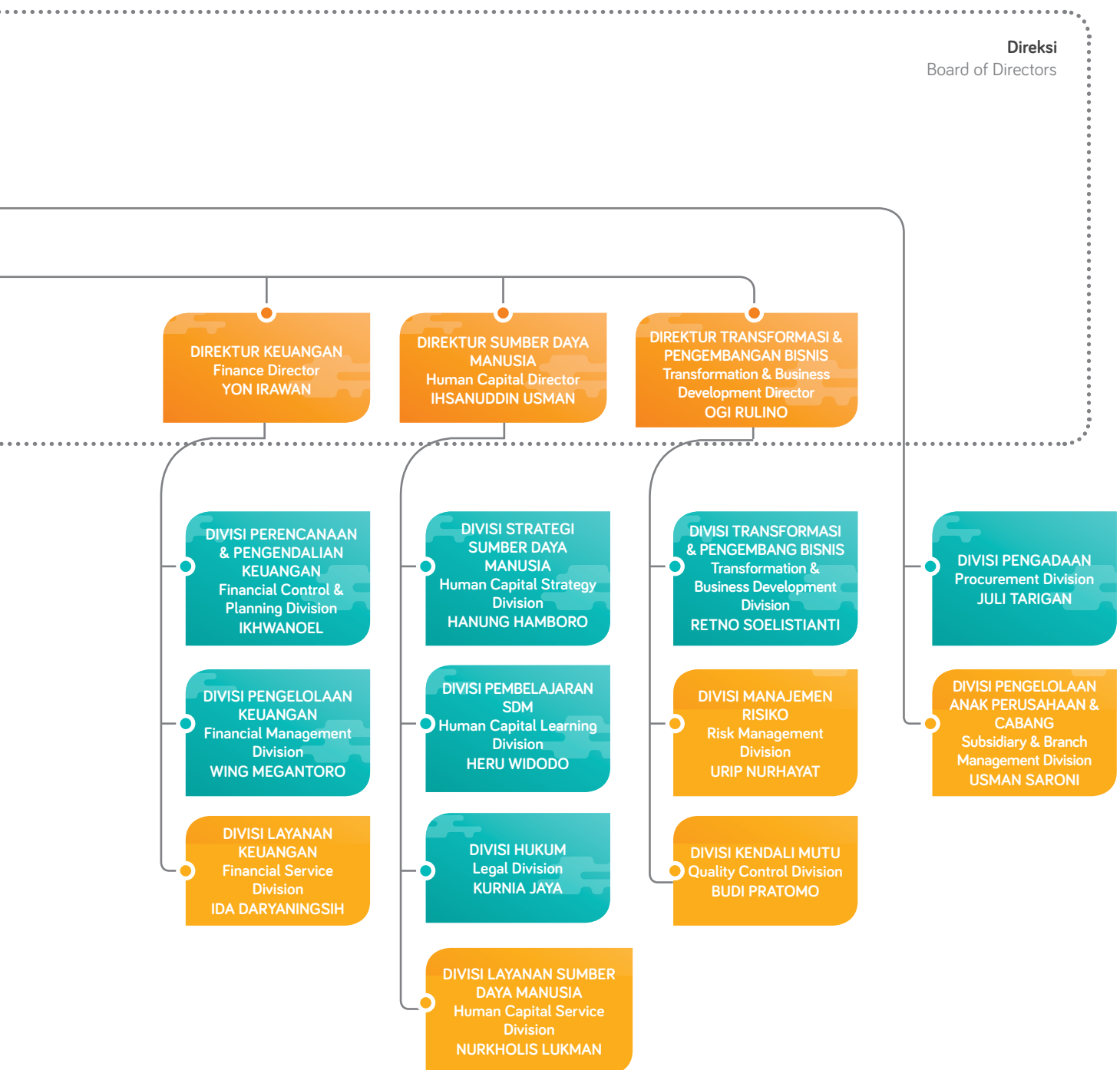
Tahun 2019, IPC mengalami perubahan struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Perihal Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 tanggal 20 November 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

In 2019, IPC changed to the organizational structure and has been ratified through Board of Directors Decree concerning the Amendment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors' Decree Number: OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 dated November 20, 2019 on Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).



STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

- Direksi
Board of Directors
- Executive Vice President
Executive Vice President
- Senior Vice President
Senior Vice President
- Vice President
Vice President
- Garis konfirmasi & penyampaian informasi
Information confirmation & delivery lines
- Garis koordinasi & supervise
Coordination & supervision lines

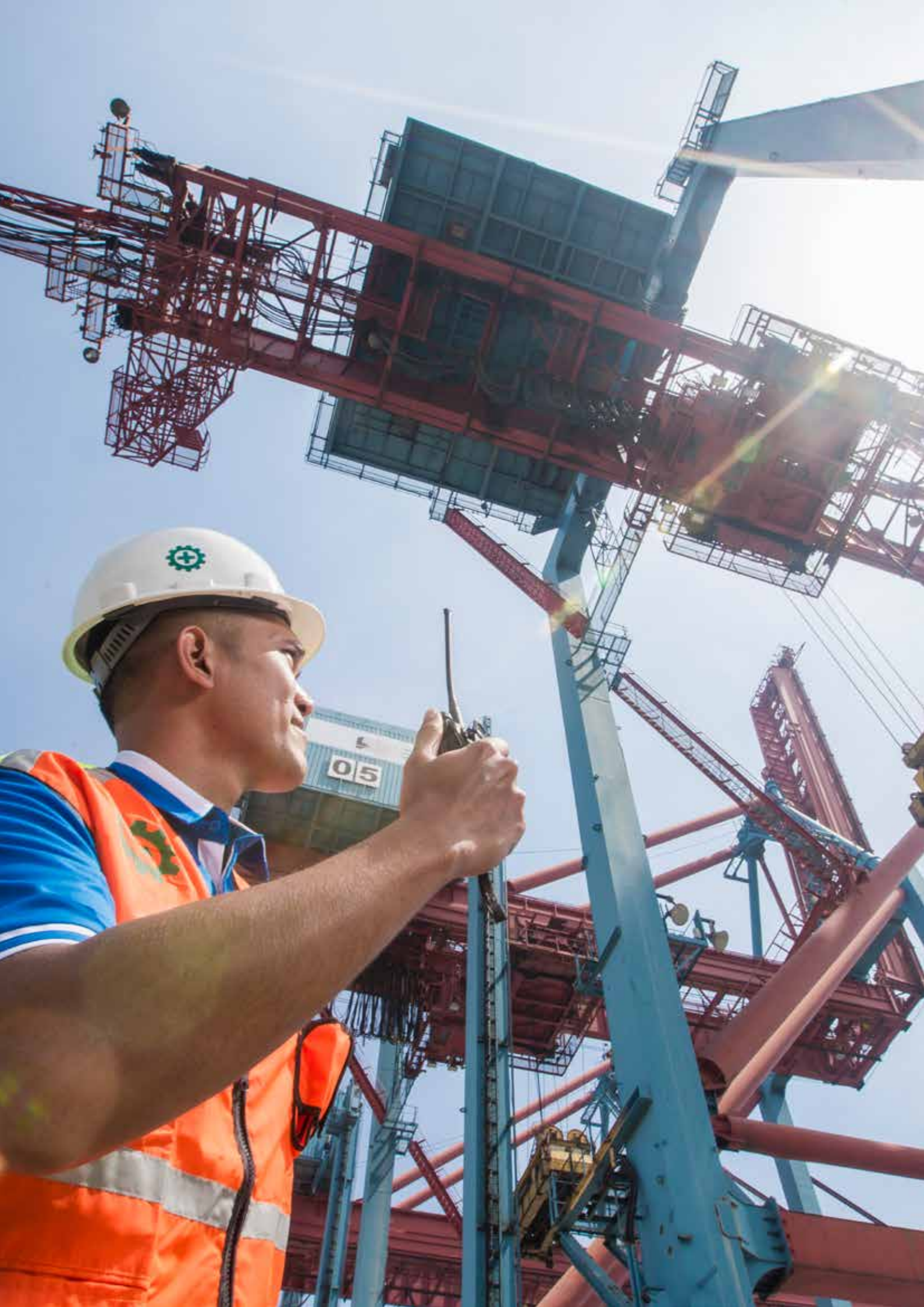




Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK272/MBU/11/2019 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelindo II, maka struktur organisasi IPC mengalami perubahan kembali, dengan perubahan terakhir yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan No. OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 tanggal 20 November 2019. Adapun perihal susunan struktur organisasi Perseroan diuraikan di bawah ini:

As a follow up to the Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. SK272/MBU/11/2019 concerning the Appointment of PT Pelindo II's Deputy President Director of the Company, the IPC organizational structure has once again changed, with the latest changes stipulated through the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 dated November 20, 2019. As for the Company's organizational structure is described below:

Direktur Directorate	Divisi Division
Direktur Utama President Director	Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Satuan Pengawasan Internal dan Divisi Perencanaan Strategi Korporasi. Corporate Secretary Division, Internal Audit Unit Division and Corporate Strategy Planning Division
Wakil Direktur Utama Vice President Director	Divisi Pengadaan dan Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan & Cabang. Procurement Division and Subsidiary & Branch Management Division
Direktur Komersial Commercial Director	Divisi Pemasaran, Divisi Aliansi Bisnis & Hubungan Pelanggan, Divisi Manajemen Aset. Marketing Division, Business Alliances and Customer Relations Division, Asset Management Division
Direktur Teknik Technical Director	Divisi Konstruksi Sipil, Divisi Peralatan dan Divisi Manajemen Proyek Strategis. Civil Construction Division, Equipment Division and Strategic Project Management Division
Direktur Operasi Operations Director	Divisi Pelayanan Kapal, Divisi Pelayanan Terminal dan Divisi Sistem Informasi. Ship Service Division, Terminal Service Division and Information System Division
Direktur Keuangan Financial Director	Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan, Divisi Pengelolaan Keuangan dan Divisi Layanan Keuangan. Financial Planning & Control Division, Financial Management Division, and Financial Services Division
Direktorat Sumber Daya Manusia Human Capital Director	Divisi Strategi SDM, Divisi Pembelajaran SDM, Divisi Layanan SDM dan Divisi Hukum. HC Strategy Division, HC Learning Division, HC Services Division, Legal Division and Procurement Division
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Business Transformation and Development Director	Divisi Transformasi dan Pengembangan Bisnis, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kendali Mutu. Business Transformation and Development Division, Risk Management Division and Quality Control Division





VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

COMPANY VISION, MISSION AND CORPORATE VALUE

VISI | VISION

“Menjadi Pengelola Pelabuhan Kelas Dunia yang Unggul dalam Operasional dan Pelayanan”
"To be a World-Class Port Operator that excels in Operations and Services"

IPC mampu menjadi perusahaan pengelola pelabuhan profesional dan dapat disejajarkan serta bersaing dengan penyedia layanan kepelabuhanan terbaik di dunia.

- *Image* perusahaan yang baik;
- Fasilitas infrastruktur yang modern;
- Sistem yang terintegrasi.

IPC is able to become a professional port management company and can be aligned and compete with the best port service providers in the world.

- Good corporate image;
- Modern infrastructure facilities;
- Integrated systems.

Sedangkan penjelasan dari Visi Perseroan adalah sebagai berikut:

Company Vision Explanation:

“Pelabuhan yang Unggul Dalam Operasional”

"A Port with Excellent Operations"

IPC mampu menarik pengguna jasa pelabuhan baik domestik maupun internasional untuk bekerjasama dengan IPC.

IPC is able to attract domestic and international port services users to cooperate with IPC.

- Menerapkan standar operasional terbaik di dunia;
- Memiliki produktivitas yang tinggi;
- Bekerja secara efektif dan efisien, menerapkan "*International Best Practice*";
- Mengimplementasikan kebijakan "*zero accident*", serta mampu memenuhi SLA/SLG yang disepakati dengan pengguna jasa.

- Implements the best operational standards in the world;
- With high productivity;
- Works effectively and efficiently, implementing "international best practices";
- Implements a "zero accident" policy, and able to meet agreed SLA / SLG with service users.

“Pelabuhan yang Unggul Dalam Pelayanan”

"A Port With Excellent Service"

IPC diharapkan menjadi penyedia jasa pelabuhan yang bersahabat, mengerti akan kebutuhan pengguna jasanya serta mampu memenuhi bahkan melebihi ekspektasi pelanggannya.

IPC is expected to be a friendly port service provider, understanding the customers' needs and able to meet and exceed the customers' expectations.

- Memberikan berbagai macam pelayanan dengan kualitas terbaik;
- Menerapkan pelayanan dengan cepat;
- Menyediakan kemudahan akses sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna jasa pelabuhan.

- Provides a wide range of highest quality services;
- Implements swift services;
- Provides easy access in accordance with the port customers' requirements.



MISI | MISSION

Sebagai pengelola pelabuhan yang memaksimalkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholder*) secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional.

1. Pelanggan dan Mitra
Menyediakan, membangun dan mengoperasikan pelayanan kepelabuhanan dan logistik secara terintegrasi, berkualitas dan handal untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan mitra;
2. Karyawan
Menciptakan lingkungan yang nyaman bagi karyawan, mewujudkan Insan perusahaan yang fokus pada pelanggan, berintegrasi, bangga kepada perusahaan dan budayanya, serta memberikan kesejahteraan dan kepuasan kepada karyawan;
3. Pemegang Saham
Memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan meningkatkan kesehatan perusahaan secara profesional dengan memenuhi aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik;
4. Masyarakat dan Negara
Menjamin kelancaran dan keamanan arus kapal dan barang untuk mewujudkan efisiensi biaya logistik dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

As an Operator that Maximizes Added Value for All Stakeholders on an ongoing basis in order Increasing the National Economy.

1. Customers and Partners
Provide, build and operate port and logistics services in an integrated, high quality and reliable way to meet customer and partner satisfaction;
2. Employees
Create a comfortable work environment for employees, promote employees that are customer-focused, have integrity, and have pride in the company and its culture, while providing welfare and satisfaction to employees.
3. Shareholders
Maximize the Company's value to shareholders and improve the Company's health in a professional manner through the fulfillment of good corporate governance.
4. Community and Country
Ensure the smooth and safe flow of ships and goods to realize logistical cost efficiency to accelerate the national economic growth and to improve the people's welfare





REVIEW VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pada Tahun 2019, visi dan misi Perseroan telah di-review dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penetapan Visi dan Misi, berdasarkan:

1. Surat Keputusan Direksi Nomor HK.568/8/9/5/ PI.II-16 tanggal 8 September 2016 tentang Penetapan Visi, Karakter Perusahaan, Nilai-Nilai Perusahaan dan *Corporate Roadmap* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
2. Visi dan Misi Perusahaan terdapat dalam RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan). RJPP Perusahaan Tahun 2015-2019 telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan surat No. 58/DK/PI.II/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Penyampaian Telaah atas Usulan RJPP 2015–2019.

Terdapat ukuran atau *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditentukan untuk menjadi representatif pencapaian visi dan misi Perseroan. KPI tersebut, dilakukan *monitoring* secara periodik. Untuk memudahkan proses *monitoring* pencapaian KPI saat ini, Perseroan sedang mengembangkan *dashboard* kinerja Perseroan. Pada *dashboard* tersebut, jika terlihat indikator yang tidak tercapai atau menurun angka pencapaiannya, maka akan dilakukan evaluasi terhadap program kerja dan/atau proses kerja yang dilaksanakan untuk mencapai indikator tersebut.

Dengan dilakukannya evaluasi, maka akan muncul inisiatif perbaikan dalam pelaksanaan program kerja atau proses kerja tersebut. Organisasi juga memantau pencapaian tata nilai perusahaan dengan menetapkan hasil pencapaian nilai-nilai organisasi dan realisasi pelaksanaan *morning briefing* pada setiap unit kerja yang menjadi KPI Perseroan, dan dilakukan pula *monitoring* pencapaiannya selama triwulanan.

Berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2018, arah pencapaian visi dan misi telah sesuai dengan yang ditargetkan dan ditunjukkan dengan pencapaian KPI di tahun 2019. Hasil *review* tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

VISION AND MISSION REVIEW BY BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In 2019, the Company's Vision and Mission have been reviewed by the Board of Commissioners and Board of Directors. The stipulation of Vision and Mission is based on:

1. Board of Directors' Decree Number HK.568/8/9/5/PI.II-16 dated September 8, 2016 concerning Determination of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Vision, Company Character, Corporate Values and Corporate Roadmap;
2. The Company's Vision and Mission are contained in the RJPP (Company Long-Term Plan), and the Corporate RJPP for 2015-2019 was approved by the Board of Directors and Board of Commissioners based on letter No. 58/DK/PI.II/III/2017 dated March 21, 2017 concerning Submission of Review on the 2015–2019 RJPP Proposal.

There is Key Performance Indicators (KPI) that have been determined to be representative for achieving the Company's vision and mission. The KPI is monitored periodically. To facilitate the monitoring process of KPI achievement, currently, the Company is developing a company performance dashboard. On the dashboard, if you see indicators that have not been reached or decreases in the number of achievements, an evaluation of the work program and/or work process will be carried out to achieve these indicators.

Through these evaluations, improvement initiatives will be determined for the work programs or work processes. The organization also helps monitor the corporate values achievement by translating the organizational values achievement results, and realization in the morning briefings in each work unit into the company's KPI, and monitors achievements quarterly.

Pursuant to the results of evaluation in 2018, the direction of achieving the vision and mission was in accordance with the target and indicated by the achievement of KPI in 2019. The results of review were approved by Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Nilai-nilai perusahaan IPC dapat dijelaskan sebagai berikut:

CORPORATE VALUE

IPC Corporate Values explanation:



C *Customer Centric: "Meet Customer Expectation"*

- Secara proaktif mencari tahu serta memahami kebutuhan pelanggan untuk memberikan solusi-solusi yang inovatif;
 - Membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan para pelanggan;
 - Secara konsisten memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas untuk membantu para pelanggan tumbuh dan berkembang.
- Proactively seeking and understanding customer needs to provide innovative solutions;
 - Building good long-term relationships with customers;
 - Consistently provide reliable and best in class service to help our customers grow.

I *Integrity: "Walk the Talk"*

- Menumbuhkan rasa percaya dengan mengatakan apa yang kita rasakan serta melakukan apa yang kita ucapkan;
 - Menunjukkan sikap profesional dan jujur dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun eksternal;
 - Berperilaku disiplin dan patuh terhadap kode etik bisnis di dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari.
- Inspire trust by saying what we mean and doing what we say;
 - Demonstrate professionalism and honesty in our interactions with internal and external stakeholders;
 - Demonstrate discipline and adherence to our code of business ethics in our day-to-day work.

N *Nationalism: "National Pride"*

- Menumbuhkan semangat dan ikut berperan mensukseskan program pemerintah dalam pembangunan Nasional;
 - Menumbuhkan rasa bangga dan semangat nasionalisme dalam berkarya;
 - Terus berkembang dan mampu bersaing dengan perusahaan pengelola pelabuhan kelas dunia.
- Grow the spirit and contribute to the success of government programs in national development;
 - Foster a sense of pride and spirit of nationalism in working;
 - Continue to grow and capable to compete with world class port companies.

T *Team Work: "Together We Can"*

- Berkolaborasi dalam tim untuk mendapatkan hasil yang terbaik;
 - Bekerja bersama-sama menghasilkan ide-ide implementatif untuk solusi kebutuhan pengguna jasa pelabuhan;
 - Semangat kebersamaan dan menghargai orang lain.
- Collaborating with teams to get the best results;
 - Working together to produce implementable ideas for solving the needs of port service users;
 - The spirit of togetherness and respect for others.

A *Action: "Make It Happen"*

- Berani bermimpi dan berusaha mewujudkannya;
 - Proaktif untuk mencari cara dalam mewujudkan visi perusahaan;
 - Melakukan terobosan-terobosan dan langkah nyata dalam mendorong perkembangan perusahaan.
- Dare to dream and try to make it happen
 - Proactive to find ways to realize the Company's vision
 - Make breakthroughs and concrete steps in encouraging the Company's development.



Selain nilai-nilai perusahaan, Perseroan juga memiliki karakter perusahaan sebagai berikut:

In addition to Corporate Values, the Company has the following corporate characteristics.

1 *Less Bureaucratic (Decision Making Process)*

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki karakter cepat, tepat dan akurat dalam proses pengambilan keputusan.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has fast, precise and accurate character in decision making process.



2 *Less Feudalism (Professional Intimacy)*

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki karakter yakni hubungan komunikasi yang dibangun berdasarkan profesionalisme kerja.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has the character of a communication relationship that built based on work professionalism.



3 *More Modern (World Class Company, Technology Based & Customer Centric)*

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki karakter perusahaan berkelas dunia yang berbasis IT dan fokus terhadap kepuasan pelanggan.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has a world class IT-based corporate character and focuses on customer satisfaction.



4 *More Friendly (World Class Services)*

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki karakter pelayanan optimal, berkelas dunia dan memiliki hubungan yang dekat dengan pelanggan.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has a character of optimal services, world class, and has close relationship with customer.







PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE



Moermahadi Soerja Djanegara
Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Bandung, 31 Mei 1955. Berusia 64 tahun per Desember 2019. Born in Bandung, West Java, on July 29, 1943. 64 years old as of December 2019.
Riwayat Pendidikan Educational background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Padjadjaran. • Master dari STIE IPWI Jakarta (2000). • Doktor bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2005). <ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Economics degree from Universitas Padjadjaran. • Master degree from STIE IPWI Jakarta (2000) • Doctorate of Economic in Accounting form Universitas Padjadjaran (2005).
Pengalaman Kerja Work experience	<p>Pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pulau Kencana Raya (PKR), Komisaris Independen PT Mitra Rajasa Tbk dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI.</p> <p>Served as Commissioner of PT Pulau Kencana Raya (PKR), Independent Commissioner of PT Mitra Rajasa Tbk. and Chairman The Audit Board of The Republic of Indonesia.</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Komisaris IPC sejak 2020, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara SK- 68/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020. Saat ini tidak memiliki rangkap jabatan di lingkungan IPC.</p> <p>First appointed as IPC President Commissioner in 2020, based on Ministry of SOEs' Decree number No. SK-68/MBU/03/2020 dated 2 March, 2020. Does not have concurrent positions in IPC Group.</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	Nihil None



Tumpak H. Panggabean

Komisaris Utama/Komisaris Independen
(Berhenti menjabat sejak 20 Desember 2019)
President Commissioner/Independent Commissioner
(ended service since December 20, 2019)

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Sanggau Kapuas Kalimantan Barat, 29 Juli 1943. Berusia 76 tahun per Desember 2019. Born in Sanggau Kapuas, West Kalimantan, on July 29, 1943. 76 years old as of December 2019.
Riwayat Pendidikan Educational background	Sarjana bidang Hukum dari Universitas Negeri Tanjungpura (UNTAN), Pontianak (1972). Bachelor of Law from Universitas Negeri Tanjungpura (UNTAN), Pontianak (1972).
Pengalaman Kerja Work experience	<p>Kariernya dimulai sejak 1973 sampai 2003 sebagai Jaksa di Kejaksaan Agung RI dengan menjabat beberapa posisi yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Dili, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Riau, Kepala Sub Direktorat Intelijen pada JAM Intelijen Kejaksaan Agung RI, Asisten Intelijen Kejati DKI Jakarta. Kemudian menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Jaksa Tinggi Maluku, Jaksa Tinggi Sulawesi Selatan dan terakhir sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Sesjampidsus) Kejaksaan Agung RI.</p> <p>Setelah memasuki masa pensiun Pegawai Negeri Sipil, dengan pangkat terakhir IV E. Beliau diamanatkan untuk memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode pertama sebagai Wakil Ketua (2003-2007). Pada 2008 diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN. Beliau akhirnya dipilih kembali untuk memimpin KPK dengan menduduki posisi Pimpinan/Ketua Sementara KPK (Oktober 2009 - Maret 2010). Kemudian menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (Maret 2010 - 2015).</p> <p>Between 1973 to 2003 served as Prosecutor at the Indonesian Attorney General's Office holding several positions, namely Chief Prosecutor Pangkalan Bun, Senior Prosecutor Intelligence Assistant Central Sulawesi, Head of Dili District Prosecutor's Office, Assistant Special Crime Attorney Riau, Head of Intelligence Sub-Directorate at the JAM Supreme Court of Indonesia, Jakarta Attorney General Intelligence Assistant. Then served as Deputy Chief of the Maluku Senior Prosecutor's Office, Maluku Senior Prosecutor, South Sulawesi Senior Prosecutor and finally as Secretary of the Deputy Attorney General for Special Crimes (Sesjampidsus) Republic of Indonesia Attorney General's Office.</p> <p>After retirement, with a last Civil Service level of IV E, was mandated to head the Corruption Eradication Commission (KPK) for the first period as Deputy Chair (2003-2007). In 2008 was appointed as a member of PT Pos Indonesia (Persero) Board of Commissioners based on a Ministry of SOEs Decree. Was finally re-elected to head KPK with the position of KPK Chairperson/Provisional Chairperson (October 2009 - March 2010).</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Utama IPC sejak 2015, berdasarkan akta keputusan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-79/MBU/06/2015 tanggal 03 Juni 2015. Kemudian Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016.</p> <p>First appointed as IPC President Commissioner in 2015, based on Ministry of SOEs' Decree number No. SK-79/MBU/06/2015 dated June 3, 2016. Then appointed President Commissioner and Independent Commissioner in 2015, based on Ministry of SOEs' Decree number No. SK- 40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016.</p>
Periode Jabatan Position Period	Periode menurut SK pengangkatan: 3 Juni 2015 – 2 Juni 2020 (Periode Pertama). Period based on legal appointment: June 3, 2015 – June 2, 2020 (First Period).
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain. Does not have concurrent positions in other companies or institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	Nihil None



Djadmiko
Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Magelang, 3 Februari 1955. Berusia 64 tahun per Desember 2019. Born in Magelang, on February 3, 1955. 64 years old as of December 2019.
Riwayat Pendidikan Educational background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana bidang Administrasi Negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN (1985). • <i>Master of Social Science in Development Finance</i> dari University of Birmingham, United Kingdom (Inggris) (1988). • Bachelor of Public Administration from Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN (1985). • Master of Social Science in Development Finance dari University of Birmingham, United Kingdom (Inggris) (1988).
Pengalaman Kerja Work experience	<p>Pernah menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan (1990-1991), Kepala Bagian Perlengkapan dan Urusan Dalam pada Sekretariat Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekuin dan Wasbang (1991-1993), Kepala Bagian Protokol dan Persidangan pada Kantor Menko Ekku Wasbang (1993-1995), Asisten Deputy Urusan Peningkatan Ekspor, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2007-2009), Staf Ahli Bidang Investasi dan Kemitraan Pemerintah-Swasta, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2009-2011), Deputy Bidang Administrasi, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2011-2015), serta Kepala Satuan Kerja Pengelola Portal Indonesia <i>National Single Window</i> (PP-INSW) Kementerian Keuangan (2015-2019).</p> <p>Served as Head of Budgeting Subdivision of Directorate General of Budgeting at the Ministry of Finance (1990-1991), Equipment and Internal Affairs Head at the Secretariat Office of the Coordinating Minister for Economic Affairs and Nationality Insight (1991-1993), Protocol and Conference Head at the Ministry for Economic Affairs Coordinating Office 1993-1995), Assistant Deputy for Export Improvement, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2007-2009), Expert Staff for Public-Private Investment and Partnerships, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2009-2011), Administration Deputy, Republic of Indonesia Cabinet Secretariat (2011-2015), Head of the Indonesian National Single Window Portal Management Unit (PPINSW) for the Ministry of Finance (2015-2019).</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Komisaris IPC sejak 2016, berdasarkan akta keputusan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016.</p> <p>First appointed as IPC Commissioner in 2016, based on Ministry of SOEs' Decree number SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016.</p>
Periode Jabatan Position Period	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama).</p> <p>Period based on legal appointment: March 1, 2016 – February 28, 2021 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	<p>Kepala Satuan Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PPINSW) Kementerian Keuangan (2015-2019).</p> <p>Head of the Indonesian National Single Window Portal Management Unit (PPINSW) for the Ministry of Finance (2015-2019).</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	Nihil None



Suaidi Marasabessy

Komisaris/Komisaris Independen

Commissioner/Independent Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Ambon Maluku, 5 Januari 1947. Berusia 72 tahun per Desember 2019. Born in Ambon, Maluku, on January 5, 1947. 72 years old as of December 2019.
Riwayat Pendidikan Educational background	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung (1992). • Sarjana bidang Ilmu Politik dari Universitas Terbuka di Jakarta (1995). <ul style="list-style-type: none"> • Indonesian Armed Forces Staff and Command School in Bandung (1992). • Bachelor of Political Science from Universitas Terbuka in Jakarta (1995).
Pengalaman Kerja Work experience	<p>Setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Darat pada 1971, beberapa jabatan penting yang pernah diemban antara lain Danyonif 202/Jaya (1984-1985), Dandim 0504/Jakbar (1986-1988), Asops Divisi-2/Kostrad (1992-1993), Asops Kasdam-IV/Dip (1993-1994), Danmentar Akmil (1994), Waasops Kasad (1994-1995), Waasops Kasum ABRI (1995-1996), Asops Kasad (1996-1998), Pangdam-VII/WRB (1998-1999), Anggota MPR-RI (1999), Kasum TNI (1999-2000).</p> <p>After completing his education in the Indonesian Armed Forces Academy of Army Section in 1971, held a number of important positions including Danyonif 202/Jaya (1984-1985), Dandim 0504/West Jakarta (1986-1988), Asops Divisi-2/Kostrad (1992-1993), Asops Kasdam-IV/Dip (1993-1994), Danmentar Akmil (1994), Waasops Kasad (1994-1995), Waasops Kasum ABRI (1995-1996), Asops Kasad (1996-1998), Pangdam-VII/WRB (1998-1999), Member of MPR-RI (1999), Kasum TNI (1999-2000).</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Komisaris IPC sejak 2016, berdasarkan akta keputusan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016.</p> <p>First appointed as IPC Commissioner in 2016, based on Ministry of SOEs' Decree number SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016.</p>
Periode Jabatan Position Period	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 1 Maret 2016 – 28 Februari 2021 (Periode Pertama).</p> <p>Period based on legal appointment: March 1, 2016 – February 28, 2021 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.</p> <p>Does not have concurrent positions in other companies or institutions.</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	<p>Nihil</p> <p>None</p>



Montty Girianna

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Bandung, 22 Januari 1963. Berusia 55 tahun per Desember 2019. Born in Bandung, on January 22, 1963. 55 years old as of December 2019.
Riwayat Pendidikan Educational background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1985). • <i>Master of Science</i> bidang Transportasi dari Institut Teknologi Bandung (1989). • <i>Master in City Planning</i> (MCP) bidang <i>Project Finance</i> di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat (1996). • Doktor bidang Sistem Transportasi University of Illinois at Urbana Champaign (UIUC), Amerika Serikat (2002) • <i>Project Finance, Executive Program</i> dari Harvard Business School - Harvard University, MA, Amerika Serikat (2005) • <i>Strategy and Organization Executive Program</i> di Graduate School of Business, Standford University, CA, Amerika Serikat (2011). <ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Civil Engineering from Bandung Institute of Technology Bandung (1985). • Master of Science in Transportation from Bandung Institute of Technology (1989) • Doctor of Transportation Systems from University of Illinois at Urbana Champaign (UIUC), USA (2002) • Project Finance, Executive Program at Harvard Business School - Harvard University, MA, USA (2005). • Strategy and Organization Executive Program at Graduate School of Business, Standford University, CA, USA (2011)
Pengalaman Kerja Work experience	<p>Pernah menjabat sebagai Kasubdit Pembiayaan dan Investasi Infrastruktur BAPPENAS (2003-2005), Anggota Kelompok Kerja Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI) (2003-2005), Peneliti atau <i>Research Associate</i> di LPEM Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (2003-2010), serta Perwakilan Tetap Dewan Energi Nasional (DEN) (periode 2009 - 2014), Sekretaris Tim Kerja Konektivitas, MP3EI (2012- 2014), Ketua Tim Teknis Kerjasama Indonesia – Green Global Growth Institute/GGGI (2013- 2014), Staf Pengajar di Universitas Pertahanan, Program Ketahanan Energi (2012 – saat ini), serta Deputy Menteri Koordinator Bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Perekonomian (2014 - saat ini).</p> <p>Served as Infrastructure Financing and Investment Sub-Directorate Head at BAPPENAS (2003-2005), Working Group Member for Infrastructure Development Acceleration Policy (KKPPI) (2003-2005), Research Associate at LPEM Faculty of Economics, University of Indonesia (2003-2010), Permanent National Energy Council (DEN) Representative (2009 - 2014 period), Secretary of Connectivity Work Team, MP3EI (2012-2014), Chairperson of Indonesia-Green Global Growth Institute/GGGI Technical Team (2013-2014), Teaching Staff at Defense University, Energy Security Program (2012-present), and Deputy of Coordinating Minister of Energy, Natural Resources and Environment Management Division, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2014 - present).</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Komisaris IPC sejak 2016, berdasarkan akta Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK- 40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016.</p> <p>First appointed as IPC Commissioner in 2016, based on Ministry of SOEs' Decree number SK- 40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016.</p>
Periode Jabatan Position Period	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 1 Maret 2016 –28 Februari 2021 (Periode Pertama).</p> <p>Period based on legal appointment: March 1, 2016 – February 28, 2021 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	<p>Staf Pengajar di Universitas Pertahanan, Program Ketahanan Energi (2012 sampai saat ini), serta Deputy Menteri Koordinator Bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Perekonomian (2014 -saat ini).</p> <p>Teaching Staff at Defense University, Energy Security Program (2012-present), and Deputy of Coordinating Minister of Energy, Natural Resources and Environment Management Division, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2014 - present).</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	Nihil None



Kushari Suprianto

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Madiun Jawa Timur, 2 Oktober 1966. Berusia 53 tahun per Desember 2019. Born in Madiun, East Java, on October 2, 1966. 53 years old as of December 2019.
Riwayat Pendidikan Educational background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang, (1990). • Magister Manajemen bidang Sumber Daya Manusia Universitas Borobudur, Jakarta (2007). • Magister Ekonomi bidang Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Jakarta (2009). • Bachelor of Economics in Accounting from Brawijaya University, Malang, (1990). • Master of Management in Human Capital from Borobudur University, Jakarta (2007). • Master of Economics in Public Policy from University of Indonesia, Jakarta (2009)
Pengalaman Kerja Work experience	<p>Pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam (2007), Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (2008), Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (2009), Direktur Teknis Kepabeanan (2012), Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai (2015 - 26 November 2018), serta Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai (26 November 2018-saat ini).</p> <p>Served as Head of Customs and Excise Main Service Office Type B in Batam (2007), Head of Tanjung Priok Customs and Excise Service Office Type A (2008), Director of Customs and Excise Reception Regulations (2009), Customs Technical Director (2012), Secretary Directorate General of Customs and Excise (2015-November 26, 2018), Customs and Excise Audit Director (November 26, 2018-present).</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Komisaris IPC sejak 2017, berdasarkan akta Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-133/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017.</p> <p>First appointed as IPC Commissioner in 2017, based on Ministry of SOEs' Decree number SK-133/MBU/07/2017 dated July 14, 2017.</p>
Periode Jabatan Position Period	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 14 Juli 2017 –13 Juli 2022 (Periode Pertama).</p> <p>Period based on legal appointment: July 17, 2017 – July 13, 2022 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	<p>Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai sejak 26 November 2018 sampai saat ini.</p> <p>Customs and Excise Audit Director from November 26, 2018 until present.</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	<p>Nihil</p> <p>None</p>



D. Andhi Nirwanto

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Kudus Jawa Tengah, 8 Januari 1956. Berusia 63 tahun per Desember 2019. Born in Kudus, Central Java, on January 8, 1956. 63 years old as of December 2019.
Riwayat Pendidikan Educational background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana bidang Hukum Pidana dari Universitas 17 Agustus 1945, Semarang (1979). • Master bidang Manajemen Internasional dari Institut Bisnis dan Informatika, Jakarta (1998). • Doktor bidang Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung (2015). <ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Law in Criminal Law from 17 Agustus 1945 University, Semarang (1979) • Master of International Management from Institut Bisnis dan Informatika, Jakarta (1998) • Doctor of Law from Padjajaran University, Bandung (2015)
Pengalaman Kerja Work experience	<p>Karier dimulai tahun 1981 sampai dengan 2016, selama 35 tahun menjabat sebagai Jaksa, beberapa jabatan pernah didudukinya, antara lain: KAJARI Maros (1997-1999), Kabag Rumah Tangga Kejagung RI (1999-2000), KAJARI Jakarta Pusat (2000-2001), Aswas Kejati Jawa Barat (2001-2003), Kabag Kepangkatan Kejagung RI (2003-2004), WAKAJATI Sumatera Barat (2004- 2005), WAKAJATI Kalimantan Selatan (2005-2006), Direktur Uheksi pd JAM Pidum (2006), KAJATI Kalimantan Timur (2006-2008), Inspektur Pegasum pada JAM Was (2008), KAJATI DKI Jakarta (2008-2009), Ses JAM Pidsus (2009-2011), JAM Pidsus (2011-2013), serta Wakil Jaksa Agung RI/Merangkap Ketua Tim Pemburu Koruptor (2013-2016), Dosen Program Magister dan Doktor Ilmu Hukum UNTAG Semarang (2015-saat ini), <i>Senior Advisor</i> Santosa Hospital Bandung (2016-saat ini), dan Ketua Dewan Pengawas Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN) (2016-saat ini).</p> <p>Started his career since 1981 until 2016, and for 35 years served as a Prosecutor, has been occupied several positions, including: KAJARI Maros (1997-1999), Kabag Rumah Tangga Kejagung RI (1999-2000), KAJARI Jakarta Pusat (2000-2001), West Java Attorney General (2001-2003), Kabag Kepangkatan Kejagung RI (2003-2004), WAKAJATI West Sumatra (2004-2005), WAKAJATI South Kalimantan (2005-2006), Uheksi Director at JAM Pidum (2006), KAJATI Kalimantan Timur (2006-2008), Inspector Pegasum at JAM Was (2008), KAJATI DKI Jakarta (2008-2009), Ses JAM Pidsus (2009-2011), JAM Pidsus (2011-2013), Vice Attorney General RI/ Accompanying Corruption Investigation Team Leader (2013-2016), Law Magister and Doctorate Program Lecturer at UNTAG Semarang (2015-present), Santosa Hospital Bandung Senior Advisor (2016-present), National Strategy Review Center (PPSN) Supervisory Board Chair (2016-present).</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Komisaris IPC sejak 2017, berdasarkan akta Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-215/MBU/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017.</p> <p>First appointed as IPC Commissioner in 2017, based on Ministry of SOEs Decree of the No. SK-215/MBU/10/2017 dated October 4, 2017.</p>
Periode Jabatan Position Period	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 4 Oktober 2017 – 3 Oktober 2022 (Periode Pertama).</p> <p>Period based on legal appointment: October 4, 2017 – October 3, 2022 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	<p>Dosen Program Magister dan Doktor Ilmu Hukum UNTAG Semarang sejak 2015, <i>Senior Advisor</i> Santosa Hospital Bandung sejak 2016, dan Ketua Dewan Pengawas Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN) sejak 2016.</p> <p>Law Magister and Doctorate Program Lecturer at UNTAG Semarang (2015-present), Santosa Hospital Bandung Senior Advisor (2016-present), National Strategy Review Center (PPSN) Supervisory Board Chair (2016-present).</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	Nihil None



R. Agus H. Purnomo

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Sleman Jawa Tengah, 24 Agustus 1961. Berusia 58 tahun per Desember 2019. Born in Sleman, Central Java, on August 24, 1961. 58 years old as of December 2019.
Riwayat Pendidikan Educational background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana bidang Teknik Mesin dari Universitas Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, (1985). • Magister bidang Manajemen dari STIE Arta Bodhi Iswara (2008). • Bachelor of Mechanical Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya (1985). • Master of Management from STIE Arta Bodhi Iswara (2008).
Pengalaman Kerja Work experience	<p>Karirnya dimulai sejak 1985 hingga tahun 2012 di PT Barata Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai CEO (2008-2012), CEO PT INKA (Persero) (2012-2017), serta Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2017- saat ini).</p> <p>Career started in 1985 until 2012 at PT Barata Indonesia with last position as CEO (2008-2012), CEO of PT INKA (Persero) (2012-2017), Director General of Sea Transportation, Ministry of Transportation (2017-present).</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Komisaris IPC sejak 22 Januari 2018, berdasarkan akta keputusan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-26/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018.</p> <p>First appointed as IPC Commissioner on January 22, 2018, based on Ministry of SOEs' Decree number SK-26/MBU/01/2018 dated January 22, 2018.</p>
Periode Jabatan Position Period	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 22 Januari 2018 –21 Januari 2023 (Periode Pertama).</p> <p>Period based on legal appointment: January 22, 2018 – January 21, 2023 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	<p>Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini.</p> <p>Director General of Sea Transportation, Ministry of Transportation since 2017 until present.</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or the Majority and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	<p>Nihil</p> <p>None</p>



4

MONTTY GIRIANNA
Komisaris
Commissioner

3

SUAIDI MARASABESSY
Komisaris/Komisaris Independen
Commissioner/Independent Commissioner

2

DJADMIKO
Komisaris
Commissioner

1

MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA
Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent
Commissioner



5

KUSHARI SUPRIANTO
Komisaris
Commissioner

6

D. ANDHI NIRWANTO
Komisaris
Commissioner

7

R. AGUS H. PURNOMO
Komisaris
Commissioner



PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



Arif Suhartono

Direktur Utama

(Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial)

President Director

(Previously served as Commercial Director)

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Banyumas, Jawa Tengah pada 8 Mei 1970. Berusia 49 tahun per Desember 2019. Born in Banyumas, Central Java on May 8, 1970. 49 years old as of December 2019.
Riwayat Pendidikan Educational background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1994). • Master bidang Manajemen Infrastruktur dari Yokohama National University, Jepang (2001). • Bachelor of Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (1994). • Master of Infrastructure Management from Yokohama National University, Japan (2001).
Pengalaman Kerja Work experience	<p>Sejumlah posisi yang pernah dijabat antara lain: Direktur Utama PT Pengerukan Indonesia (2014-2015), Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2017), Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2019), serta Komisaris Utama PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (2019).</p> <p>Held several positions: President Director of PT Pengerukan Indonesia (2014-2015), President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2017), President Director of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2019), and President Commissioner of PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (2019).</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Direktur IPC sejak 8 April 2019, berdasarkan akta Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-80/MBU/04/2019 tanggal 8 April 2019.</p> <p>First appointed as IPC Director since April 8, 2019, based on Minister of State-Owned Enterprises Decree No. SK-80/MBU/04/2019 dated April 8, 2019.</p>
Periode Jabatan Position Period	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 8 April 2019 –7 April 2024 (Periode Pertama).</p> <p>Period according to legal appointment: April 8, 2019 - April 7, 2024 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain kecuali di Entitas anak dengan menjabat sebagai Komisaris Utama di Entitas Anak yaitu Komisaris Utama PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia sejak 14 Juni 2019.</p> <p>Does not have concurrent positions in other companies or institutions except in subsidiaries by holding the position of President Commissioner of Subsidiary, i.e. President Commissioner of PT Jasa Layanan Pelabuhan Indonesia since June 14, 2019.</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or Major and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	Nihil None



Elvyn G. Masassya

Direktur Utama (Berhenti menjabat sejak 2 Maret 2020)
President Director (ended service since March 2, 2020)

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Medan Sumatera Utara, 18 Juni 1967. Berusia 52 tahun per Desember 2019. Berusia 52 tahun per Desember 2019. Born in Medan North Sumatra, June 18, 1967. 52 years old as of December 2019.
Riwayat Pendidikan Educational background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Jayabaya, Jakarta (1990). • Profesional <i>Development Program</i> di Institut Bankir Indonesia, Jakarta (1991). • Magister bidang Keuangan dari Institut Teknologi Bandung, Jakarta (2000). <ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Economy from Jayabaya University, Jakarta (1990), • Professional Development Program at Indonesian Bankers Institute, Jakarta (1991) • Master of Finance from Bandung Institute of Technology, Jakarta (2000).
Pengalaman Kerja Work experience	<p>Mengawali karier di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan menjabat sebagai <i>Credit Analyst</i>, Bank BNI (Persero) Tbk (1991), dan berbagai posisi hingga <i>Group Head</i> atau <i>Vice President</i> (2001), <i>Chairman Financial Intelligence</i> (2001). Kemudian menduduki jabatan diantaranya: <i>Commissioner of Bali Bank</i> (2002), <i>Director of Permata Bank</i> (2002 – 2006), <i>Corporate Secretary of Bank BNI</i> (2007), <i>Managing Director PT Tuban Petrochemical</i> (2008), <i>Investment Director of PT Jamsostek</i> (2008 – 2012), <i>President Director of PT Jamsostek</i> (2012 – 2013), <i>President Director of BPJS Ketenagakerjaan</i> (2014-2016), <i>Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok</i> (Juli 2017-saat ini), dan <i>Komisaris Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk</i> (Januari 2017-saat ini).</p> <p>Started career at Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, as Credit Analyst, BNI (Persero) Tbk (1991), and several positions until Group Head or Vice President (2001), Chairman of Financial Intelligence (2001). Then held other positions including: Commissioner of Bali Bank (2002), Director of Permata Bank (2002 - 2006), Corporate Secretary of Bank BNI (2007), Managing Director of PT Tuban Petrochemical (2008), Investment Director of PT Jamsostek (2008 - 2012), President Director of PT Jamsostek (2012 - 2013), President Director of BPJS Employment (2014 - 2016), President Commissioner of PT Pelabuhan Tanjung Priok (July 2017 – present), and President Commissioner of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (January 2017 – present).</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama IPC sejak 22 April 2016, berdasarkan akta Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016.</p> <p>First appointed as IPC President Director since April 22, 2016, based on Minister of State-Owned Enterprises Decree No. SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016.</p>
Periode Jabatan Position Period	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 22 April 2016 – 2 Maret 2020 (Periode Pertama).</p> <p>Period according to legal appointment: April 22, 2016 - March 2, 2020 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain kecuali di Entitas anak dengan menjabat sebagai Komisaris Utama di Entitas Anak yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak 26 Juli 2017, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk sejak 19 Januari 2017 dan PT IPC Terminal Petikemas sejak 18 Desember 2019</p> <p>Does not have concurrent positions in other companies or institutions except in subsidiaries by holding the position of President Commissioner of subsidiary, i.e. PT Pelabuhan Tanjung Priok since July 26, 2017, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk since January 19, 2017 and PT IPC Terminal Petikemas since December 18, 2019</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or Major and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	Nihil None



Hambra

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Ketapang Maluku, 10 Oktober 1968. Berusia 51 tahun per Desember 2019. Born in Ketapang, Maluku, October 10, 1968. 51 years old as of December 2019.
Riwayat Pendidikan Educational background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana bidang Ilmu Hukum dari Universitas Pattimura, Ambon (1994). • Sarjana bidang Hukum Bisnis dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2010). • Bachelor of Law in from Pattimura University, Ambon (1994). • Bachelor of Business Law from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2010).
Pengalaman Kerja Work experience	<p>Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di PT PG Candi Baru pada tahun 2007 - 15 Januari 2011. Beliau juga pernah menduduki berbagai jabatan antara lain: Komisaris PTPN XII (15 November 2010 - September 2012), Komisaris PT Askes (Persero) (Juni 2012 - Desember 2013), Komisaris PT KAI (Persero) (Januari 2014 - Agustus 2015), Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Maret 2015 - Maret 2016), Komisaris PT PGN LNG (April 2016 - Maret 2017), Komisaris PT Semen Indonesia (Persero), Komisaris PT PGN per 26 April 2018, Wakil Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk per 13 Mei 2019 dan Deputy bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN (Februari 2016 - November 2019).</p> <p>Served as President Commissioner of PT PG Candi Baru in 2007 - January 15, 2011. Also held various positions including: Commissioner of PTPN XII (15 November 2010 - September 2012), Commissioner of PT Askes (Persero) (June 2012 - December 2013), Commissioner of PT KAI (Persero) (January 2014 - August 2015), Commissioner of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (March 2015 - March 2016), Commissioner of PT PGN LNG (April 2016 - March 2017), Commissioner of PT Semen Indonesia (Persero), Commissioner of PT PGN as of 26 April 2018, Vice President Commissioner of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk since May 13, 2019 and Deputy Business Infrastructure Ministry of SOE (February 2016 - November 2019).</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Wakil Direktur Utama IPC sejak 18 November 2019, berdasarkan akta Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-272/MBU/11/2019 tanggal 18 November 2019.</p> <p>First appointed as IPC Vice President Director since November 18, 2019, based on Minister of State-Owned Enterprises Decree No. SK-272/MBU/11/2019 dated November 18, 2019.</p>
Periode Jabatan Position Period	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 18 November 2019 – 17 November 2024 (Periode Pertama)</p> <p>Period according to legal appointment: November 18, 2019 – November 17, 2024 (First Period)</p>
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain kecuali di Entitas anak dengan menjabat sebagai Komisaris Utama di Entitas Anak yaitu PT Pendidikan Maritim Logistik Indonesia sejak 26 Juli 2017 dan PT Rumah Sakit Pelabuhan sejak 19 Januari 2017.</p> <p>Does not have concurrent positions in other companies or institutions except in subsidiaries by holding the position of President Commissioner of subsidiary, i.e. PT Pendidikan Maritim Logistik Indonesia since July 26 2017 and PT Rumah Sakit Pelabuhan since January 19, 2017.</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or Major and Controlling Shareholders</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	Nihil None



Rima Novianti

Direktur Komersial
Commercial Director

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 1 November 1970. Berusia 49 tahun per Desember 2019. Born in Sukabumi, West Java on November 1, 1970. 49 years old as of December 2019.
Riwayat Pendidikan Educational background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana bidang Sosial Politik dari Universitas Indonesia (1996). • Master bidang Manajemen Komunikasi dari Universitas Indonesia (2005). <ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Social Politics from the University of Indonesia (1996). • Master of communication Management from the University of Indonesia (2005).
Pengalaman Kerja Work experience	<p>Pernah menjabat sebagai <i>Corporate Communication Officer</i> (1994 –1996) dan <i>Manager Corporate Communication</i> (1996 –1998) di PT Sempati Air, <i>Secretary to Managing Director</i> –(1999 –2001), <i>Junior Staff</i> (2001 –2004), <i>Permanent Secretary Coordinator for PI I –IV</i> –(2004 –2007), <i>Assistant Corp. Secretary</i> (2007 –2009) dan <i>Corporate Secretary</i> (2009 –2012) di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), <i>Commercial Director</i> di PT Jakarta International Container Terminal (2012 –2013), <i>Head of PMO</i> (2013) dan <i>Corporate Secretary</i> (2013 –2015) di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), <i>Board of Commissioners</i> PT Multi Terminal Indonesia (2014 –2015), <i>Commercial Director</i> di PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015 –2017), <i>Senior Vice President Commercial</i> di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017 – 2019), serta <i>Direktur Pengembangan dan Pemasaran</i> PT Rumah Sakit Pelabuhan (2019 - 2020).</p> <p>Served as Corporate Communication Officer (1994-1996) and Manager of Corporate Communication (1996-1998) at PT Sempati Air, Secretary to Managing Director (1999-2001), Junior Staff (2001-2004), Permanent Secretary Coordinator for PI I–IV (2004–2007), Assistant Corp. Secretary (2007-2009) and Corporate Secretary (2009-2012) at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Commercial Director at PT Jakarta International Container Terminal (2012-2013), Head of PMO (2013) and Corporate Secretary (2013-2015) at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Board of Commissioners of PT Multi Terminal Indonesia (2014-2015), Commercial Director at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015 -2017), and Development and Marketing Development of PT Rumah Sakit Pelabuhan (2019 - 2020)</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai <i>Direktur IPC</i> sejak 2 Maret 2020, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020.</p> <p>First appointed as IPC Director since March 2, 2020, based on Minister of State-Owned Enterprises Decree No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020.</p>
Periode Jabatan Position Period	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama).</p> <p>Period according to legal appointment: March 2, 2020 - March 1, 2025 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain.</p> <p>Does not have concurrent positions in other companies or institutions.</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or Major and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	<p>Nihil</p> <p>None</p>



Dani Rusli Utama

Direktur Teknik
Technical Director

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Bandung Jawa Barat, 14 Januari 1971. Berusia 48 tahun per Desember 2019. Born in Bandung, West Java, on January 14, 1971. 48 years old as of December 2019.
Riwayat Pendidikan Educational background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1994). • Magister Manajemen bidang Infrastruktur dari Yokohama University, Jepang (1999). • Bachelor of Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (1994), • Master of Infrastructure Management from Yokohama University, Japan (1999).
Pengalaman Kerja Work experience	<p>Pernah menjabat sebagai <i>General Manager</i> Pelabuhan Palembang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2009-2010), Direktur Sumber Daya Manusia PT Jakarta Internasional Container Terminal (2010-2011), Kepala Biro Strategis Perseroan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2011-2012), Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2012), dan Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (2015), Komisaris Utama PT Pengerukan Indonesia (2017-2019), Komisaris Utama PT Jasa Armada Indonesia (Januari 2017-saat ini), serta Komisaris Utama PT EDI Indonesia (Desember 2019-saat ini).</p> <p>Served as General Manager of Palembang Port at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2009-2010), Director of Human Capital at PT Jakarta Internasional Container Terminal (2010-2011), Head of Strategy Bureau at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2011-2012), President Director at PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2012), and President Director at PT Jakarta International Container Terminal (2015), President Commissioner at PT Jasa Armada Indonesia (January 2017 – present) and President Commissioner at PT EDI Indonesia (December 2019 – present).</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Direktur IPC sejak 2016, berdasarkan akta keputusan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016.</p> <p>First appointed as IPC Director in 2016, based on Ministry of State-Owned Enterprises Decree No. SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016.</p>
Periode Jabatan Position Period	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 16 Mei 2016 – 15 Mei 2021 (Periode Pertama).</p> <p>Period according to legal appointment: May 16, 2016 – May 15, 2021 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain kecuali di Entitas Anak dengan menjabat sebagai Komisaris Utama di entitas anak yaitu PT EDI Indonesia sejak 2 Desember 2019 dan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. sejak 19 Januari 2017.</p> <p>Does not have concurrent positions in other companies or institutions except in Subsidiaries by serving as President Commissioner in subsidiary, i.e. PT EDI Indonesia since December 2, 2019 and PT Jasa Armada Indonesia Tbk. since January 19, 2017.</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or Major and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	Nihil None



Muarip

Direktur Operasi
Operation Director

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Bogor
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Juwana, Jawa Tengah pada 20 Juli 1970 Berusia 49 tahun per Desember 2019. Born in Juwana, Central Java, on July 20, 1970. 49 years old as of December 2019
Riwayat Pendidikan Educational background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Bidang Hukum dari Universitas Islam, Jakarta (2001). • Master Bidang Administrasi Bisnis (MBA) dari Kuehne Logistics University – Hamburg, Germany (2017). • Bachelor of Law from the Islamic University, Jakarta (2001). • Master of Business Administration (MBA) from Kuehne Logistics University - Hamburg, Germany (2017).
Pengalaman Kerja Work experience	<p>Pernah menjabat sebagai <i>Staff Operations, Manager Control Tower, Manager Performance Development dan Manager Operations Development</i> di PT Jakarta International Container Terminal (JICT) (1991 – 2013). Kemudian beliau menjabat sebagai <i>Director of Operations</i> (Juli 2013 – Juli 2015) dan <i>Senior Trainer, Container Terminal Operations</i> (Juli 2013 – saat ini) di PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI). Beliau juga pernah menjabat sebagai <i>Director of Operations and Engineering</i> di PT IPC Terminal Petikemas (Juli 2015 – Agustus 2017) dan terakhir sebagai <i>Junior Chief Specialist of Operations and IT</i> di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Agustus 2017 – 2020).</p> <p>Served as Staff Operations, Control Tower Manager, Performance Development Manager and Operations Development Manager at PT Jakarta International Container Terminal (JICT) (1991 - 2013). Then served as Director of Operations (July 2013 - July 2015) and Senior Trainer, Container Terminal Operations (July 2013 - present) at PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI). Also served as Director of Operations and Engineering at PT IPC Terminal Petikemas (July 2015 - August 2017) and most recently as Junior Chief Specialist of Operations and IT at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (August 2017 - 2020).</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Direktur IPC sejak 2 Maret 2020, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020.</p> <p>First appointed as IPC Director since March 2, 2020, based on Minister of State-Owned Enterprises Decree No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020.</p>
Periode Jabatan Position Period	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama).</p> <p>Period according to legal appointment: March 2, 2020 - March 1, 2025 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain.</p> <p>Does not have concurrent positions in other companies or institutions.</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or Major and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	<p>Nihil</p> <p>None</p>



Prasetyadi

Direktur Operasi (Berhenti menjabat sejak 2 Maret 2020).
Operation Director (ended service since March 2, 2020)

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Bandung Jawa Barat, 7 Agustus 1969. Berusia 50 tahun per Desember 2019. Born in Bandung, West Java, on August 7, 1969. 50 years old as of December 2019.
Riwayat Pendidikan Educational background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik bidang Mesin/Konstruksi dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya (1993). • Master bidang <i>Port Engineering</i> dari University of Le Havre, Prancis (1998). • Magister bidang Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya (2015). <ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Mechanical/Construction Engineering from Sepuluh November Institute of Technology (ITS) Surabaya (1993), • Master of Port Engineering from the University of Le Havre, France (1998), • Master of Management from Airlangga University, Surabaya (2015).
Pengalaman Kerja Work experience	<p>Pernah menjabat sebagai Supervisor Peralatan Peti Kemas di Terminal Peti Kemas Cabang Makassar, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2000-Maret 2002), Kepala Dinas Peralatan Peti Kemas di Terminal Peti Kemas Cabang Makassar, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (Maret 2002-November 2002), Asisten <i>Senior Manager</i> Alat Bongkar Muat PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (November 2002-Mei 2004), Asisten <i>Senior Manager</i> Sigi dan Rekayasa PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (Mei 2004-Maret 2007), <i>Senior Manager</i> Pemeliharaan Bangunan dan Peralatan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (Maret 2007-Maret 2009), <i>Senior Manager</i> Pengembangan Fasilitas Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (Maret 2009-Desember 2010), Staf Ahli Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Januari 2011-Desember 2011), <i>Senior Manager</i> Pemeliharaan Fasilitas PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Januari 2012-Desember 2013), Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong (Januari 2014-Mei 2016), Komisaris Utama PT Electronic Data Interchange Indonesia (2017-2019), Komisaris New Priok Container Terminal 1 (2018), Komisaris Utama PT Terminal Peti Kemas Indonesia (2016), Komisaris Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (2017), Komisaris Utama PT Pengerukan Indonesia (2019-saat ini), serta Ketua Dewan Pengawas KSO Terminal Petikemas Koja (2019-saat ini).</p> <p>Served as Container Equipment Supervisor at Makassar Branch Container Terminal, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2000-March 2002), Head of Container Equipment Office at Makassar Branch Container Terminal, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (March 2002-November 2002), Senior Assistant Manager of Loading Equipment at PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (November 2002-May 2004), Senior Assistant Manager of Sigi and Engineering at PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (May 2004-March 2007), Senior Manager Building and Equipment Maintenance at PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (March 2007-March 2009), Senior Manager of Port Facilities Development at PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (March 2009-December 2010), Expert Staff for Board of Directors at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (January 2011-December 2011), Senior Manager Facility Maintenance at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (January 2012-December 2013), and President Director at PT Terminal Teluk Lamong (January 2014-May 2016), President Commissioner at PT Electronic Data Interchange Indonesia (2017-2019), Commissioner at New Priok Container Terminal 1 (2018), President Commissioner at PT Terminal Petikemas Indonesia (2016), President Commissioner at PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (2017), President Commissioner at PT Pengerukan Indonesia (2019-present) and Chairman of Supervisory Board at KSO Terminal Petikemas Koja (2019-present).</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Direktur IPC sejak 2016, berdasarkan akta Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016.</p> <p>First appointed as IPC Director in 2016, based on Ministry of State-Owned Enterprises Decree No. SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016.</p>
Periode Jabatan Position Period	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 16 Mei 2016 – 2 Maret 2020 (Periode Pertama).</p> <p>Period based on legal appointment: May 16, 2016 – March 2, 2020 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain kecuali di Entitas Anak dengan menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pengerukan Indonesia serta 19 Desember 2019, serta Ketua Dewan Pengawas KSO Terminal Petikemas Koja sejak 8 Maret 2019.</p> <p>Does not have concurrent positions in other companies or institutions except in Subsidiaries by serving as President Commissioner of PT Pengerukan Indonesia and December 19, 2019, as well as Chairman of Supervisory Board of KSO Terminal Petikemas Koja since March 8, 2019.</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or Major and Controlling Shareholders</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	Nihil None



Yon Irawan

Direktur Keuangan
Finance Director

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Yogyakarta, tahun 13 Februari 1974. Berusia 46 tahun per Desember 2020. Born in Yogyakarta, February 13, 1974. 46 years old as of December 2020.
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1998). • Magister Manajemen di Universitas Airlangga (2013). <ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Economy from Diponegoro University, Semarang (1998). • Master of Management from Airlangga University (2013).
Pengalaman Kerja Work Experience	<p>Pernah menjabat sebagai <i>Senior Manager Treasury</i> PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2012 – 2014), <i>Corporate Secretary</i> di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2014 – 2017), <i>Komisaris</i> di PT Terminal Teluk Lamong (2014 – 2017), <i>President Director</i> di PT Terminal Petikemas Surabaya (Maret – Desember 2017), dan <i>Director of Finance</i> di Pelabuhan Indonesia IV (Persero), dan Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) (2018 – saat ini).</p> <p>Served as Senior Manager of Treasury of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2012-2014), Corporate Secretary at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2014-2017), Commissioner at PT Terminal Teluk Lamong (2014-2017), President Director at PT Terminal Petikemas Surabaya (March - December 2017), and Finance Director at Pelabuhan Indonesia IV (Persero), and Member of Supervisory Board of Port and Dredging Company Pension Fund (DP4) (2018 - present).</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Direktur IPC sejak 2 Maret 2020, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020.</p> <p>First appointed as IPC Director since March 2, 2020, based on Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020.</p>
Periode Jabatan Position Period	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama).</p> <p>Period according to legal appointment: March 2, 2020 – March 1, 2025 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain.</p> <p>Does not have concurrent positions in other companies or institutions.</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or Major and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	<p>Nihil</p> <p>None</p>



Widyaka Nusapati

Direktur Keuangan (Berhenti menjabat sejak 2 Maret 2020).
Finance Director (ended service since March 2, 2020)

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Jakarta, tahun 12 Januari 1967. Berusia 52 tahun per Desember 2019. Born in Jakarta, on January 12, 1967. 52 years old as of December 2019.
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ilmu Perikanan bidang Manajemen Sumberdaya Perairan di Institut Pertanian Bogor (IPB) (1990). • <i>Master in Business Administration</i> (MBA) Major in Financial Management/Quantitative Analysis dari Cleveland State University (1994). • Bachelor of Fisheries Science in Water Resources Management from Bogor Agricultural Institute (IPB) (1990) • Master of Business Administration (MBA) Majoring in Financial Management/Quantitative Analysis from Cleveland State University (1994)
Pengalaman Kerja Work Experience	<p>Pernah menjabat sebagai <i>Senior Analyst</i> di Mashill Dresdner Kleinwort Benson Securities (Januari 1995 – Juli 1997), <i>Head of Research and Corporate Finance Manager</i> di PT Sigma Batara Securities (Agustus 1997 – Juli 2000), Dosen pada bidang <i>Corporate Finance and Financial Analysis</i> di Magister Management Sahid University (Juni 1998 – Juni 2004), <i>Team Leader Shareholder Settlement and Asset Disposal</i> di Assets Management Investment Division, Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (Agustus 2000 – Juni 2002), <i>Group Head Assets Management Investment</i> di Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) (Juni 2002 – Mei 2004), <i>Director Business Advisory and Finance Administration</i> di PT PNM Investment Management (Entitas Anak PT PNM Persero) (Mei 2004 – Februari 2007).</p> <p>Beliau juga menduduki berbagai posisi penting antara lain: Finance and Business di PT PNM Persero (Mei 2004 – Februari 2007), President Director di PT Wawasan Global Citrajaya (2012– 2014), Komisaris di PT PNM Investment Management – Entitas Anak di PT PNM Persero (2012 – 2014), Finance Director di PT ReIndo (ReAsuransi Indonesia Utama) Persero (September 2013 – November 2014), Finance Director di PT IndonesiaRe (ReAsuransi Indonesia Utama) Persero (November 2014 – November 2015), Founder di PT Widyaka Propertindo (Developer Properti) (2015-Juli 2018), Investment Director di PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri Persero (Juli 2018-November 2018), Komisaris Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia (2019-saat ini), serta Komisaris Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (2019-saat ini).</p> <p>Served as Senior Analyst at Mashill Dresdner Kleinwort Benson Securities (January 1995 - July 1997), Head of Research and Corporate Finance Manager at PT Sigma Batara Securities (August 1997 - July 2000), Lecturer in Corporate Finance and Financial Analysis at Magister Management Sahid University (June 1998 - June 2004), Team Leader for Shareholder Settlement and Asset Disposal at Assets Management Investment Division, Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (August 2000 - June 2002), Assets Management Investment Group Head at the Financial Sector Policy Committee (FSPC) - Financial Sector Policy Committee (KKSK) (June 2002 - May 2004), Business Advisory and Finance Administration Director at PT PNM Investment (subsidiary of PT PNM Persero) (May 2004 - Feb 2007).</p> <p>Has held various important positions including: Finance and Business at PT PNM Persero (May 2004 - Feb 2007), President Director at PT Wawasan Global Citrajaya (2012 - 2014), Commissioner at PT PNM Investment Management - subsidiary of PT PNM Persero (2012 - 2014), Finance Director at PT ReIndo (ReAsuransi Indonesia) (Sep 2013 - Nov 2014), Finance Director at PT IndonesiaRe (ReAsuransi Indonesia Utama) (Nov 2014 - Nov 2015), Founder of PT Widyaka Propertindo (Developer Property) (2015 - July 2018), Investment Director at PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (July 2018 - November 2018), President Commissioner at PT Energi Pelabuhan Indonesia (2019 - present), President Commissioner of PT PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (2019 - present).</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Direktur IPC sejak 26 November 2018, berdasarkan akta keputusan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK-295/MBU/11/2018 tanggal 26 November 2018.</p> <p>First appointed as IPC Director since November 26, 2018, based on the Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-295/MBU/11/2018 dated November 26, 2018.</p>
Periode Jabatan Position Period	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 26 November 2018 –2 Maret 2020 (Periode Pertama).</p> <p>Period according to legal appointment: November 26, 2018 - March 2, 2020 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain kecuali di Entitas Anak sebagai Komisaris Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia sejak 1 Juli 2019, serta Komisaris Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi sejak 1 Desember 2019.</p> <p>Does not have concurrent positions in other companies or institutions except in Subsidiaries as President Commissioner of PT Energi Pelabuhan Indonesia since July 1, 2019, and President Commissioner of PT Integrasi Logistik Cipta Solusi since December 1, 2019.</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or Major and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	Nihil None



Ihsanuddin Usman

Direktur Sumber Daya Manusia
Human Capital Director

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Jakarta pada 7 Juli 1969 Berusia 50 tahun per Desember 2019. Born in Jakarta, on July 7, 1969. 50 years old as of December 2019.
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana bidang Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung, Bandung (1994). • Master bidang Innovation & Technology Management dari TSM Business School – Twente University, Belanda (2000). • Bachelor of Mining Engineering from the Bandung Institute of Technology, Bandung (1994). • Master in Innovation & Technology Management from TSM Business School - Twente University, Netherlands (2000).
Pengalaman Kerja Work Experience	<p>Pernah menjabat sebagai Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) November 2018 – Maret 2020, SVP <i>Human Capital Development</i> PT Pertamina (Persero) pada Oktober 2017 - November 2018, VP HR & GA PT Pertamina Hulu Energi pada Mei - September 2017, VP Pertamina Corporate University PT Pertamina (Persero) pada September 2014 - April 2017, <i>Leadership & People Development Manager</i> PT Pertamina (Persero) pada Mei 2010 - Agustus 2014, <i>Recruitment Manager</i> PT Pertamina (Persero) pada Januari 2009 - April 2010, Direktur PT Prima Kompetensi pada April 2004 - Desember 2008, <i>Executive Director</i> Forum Inovasi Universitas Indonesia pada April 2001 - Maret 2004, <i>Project Executive</i> - HRMIS GE Plastics Europe - the Netherlands pada Juli 1999 - Februari 2001 dan <i>Industrial Engine Department Head</i> Volvo Penta Indonesia pada Juli 1997 - Agustus 1998.</p> <p>Pernah menjabat sebagai Direktur transformasi dan pengembangan bisnis PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) November 2018 – Maret 2020, SVP Human Capital Development PT Pertamina (Persero) pada Oktober 2017 - November 2018, VP HR & GA PT Pertamina Hulu Energi pada Mei - September 2017, VP Pertamina Corporate University PT Pertamina (Persero) pada September 2014 - April 2017, Leadership & People Development Manager PT Pertamina (Persero) pada Mei 2010 - Agustus 2014, Recruitment Manager PT Pertamina (Persero) pada Januari 2009 - April 2010, Direktur PT Prima Kompetensi pada April 2004 - Desember 2008, Executive Director Forum Inovasi Universitas Indonesia pada April 2001 - Maret 2004, Project Executive - HRMIS GE Plastics Europe - the Netherlands pada Juli 1999 - Februari 2001 dan Industrial Engine Department Head Volvo Penta Indonesia pada Juli 1997 - Agustus 1998.</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Direktur IPC sejak 2 Maret 2020, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020.</p> <p>First appointed as IPC Director since March 2, 2020, based on the Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020.</p>
Periode Jabatan Position Period	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 2 Maret 2020 – 1 Maret 2025 (Periode Pertama).</p> <p>Period according to legal appointment: March 2, 2020 - March 1, 2025 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain.</p> <p>Does not have concurrent positions in other companies or institutions.</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or Major and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	<p>Nihil</p> <p>None</p>



Rizal Ariansyah

Direktur Sumber Daya Manusia
(Berhenti menjabat sejak 11 Februari 2020).
Human Capital Director
(ended service since February 11, 2020)

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Surabaya Jawa Timur, 24 Juni 1975. Berusia 44 tahun per Desember 2019. Born in Surabaya, East Java, on June 24, 1974. 44 years old as of December 2019.
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana bidang Hukum dari Universitas Indonesia (1996). • Master bidang Hukum dari Universitas Indonesia (2006). <ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Law from the University of Indonesia in 1996. • Master of Law from the University of Indonesia in 2006.
Pengalaman Kerja Work Experience	<p>Pernah menjabat sebagai <i>Vice President Group</i> Hukum di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Desember 1999-Februari 2004), <i>Senior Manager</i> Hukum di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (April 2004-Agustus 2005), <i>Senior Vice President Group</i> Hukum di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (September 2005-Mei 2009), dan Partner di Radjiman Bilita & Partners (Juli 2009-April 2012), <i>Executive Vice President</i> di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (April 2012-September 2016), <i>Executive Vice President</i> di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (September 2016 - Juli 2017), Komisaris Utama PT Rumah Sakit Pelabuhan (Februari 2018-saat ini), <i>Vice President Commissioner</i> PT Jakarta International Container Terminal (JICT) (Maret 2018-saat ini), serta Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia Investama (2019-saat ini).</p> <p>Served as Legal Group Vice President at the National Bank Restructuring Agency (December 1999-February 2004), Senior Legal Manager at PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (April 2004-August 2005), Legal Group Senior Vice President at PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (September 2005-May 2009) Partner at Radjiman Bilita & Partners (July 2009-April 2012), Executive Vice President at PT Asset Management Company (Persero) (April 2012-September 2016), and Executive Vice President at PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (September 2016 - July 2017), President Commissioner at PT Rumah Sakit Pelabuhan (February 2018-present), Vice President Commissioner at PT Jakarta International Container Terminal (JICT) (March 2018-present), and President Commissioner at PT Pelabuhan Indonesia Investama (2019-present).</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Direktur IPC sejak 2017, berdasarkan akta keputusan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017.</p> <p>First appointed as IPC Director since 2017, based on the Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017.</p>
Periode Jabatan Position Period	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 14 Juli 2017 – 11 Februari (Periode Pertama).</p> <p>Period according to legal appointment: July 14, 2017 - February 11 (First Period).</p>
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain kecuali di Entitas Anak dengan menjabat sebagai Komisaris Utama PT Rumah Sakit Pelabuhan sejak 19 Februari 2018, <i>Vice President Commissioner</i> PT JICT berdasarkan <i>Circular Resolutions of Shareholders</i> PT Jakarta International Container Terminal (JICT) sejak 22 Maret 2018, serta Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia Investama sejak 19 Desember 2019.</p> <p>Does not hold concurrent positions in other companies or institutions except in Subsidiaries by serving as President Commissioner of PT Rumah Sakit Pelabuhan since February 19, 2018, Vice President Commissioner of PT JICT based on Circular Resolutions of Shareholders of PT Jakarta International Container Terminal (JICT) since March 22, 2018, and President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia Investama since December 19, 2019.</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or Major and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	Nihil None



Ogi Rulino

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis
Transformation and Business Development Director

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Lahir di Banda Aceh, 27 September 1968. Berusia 51 tahun per Desember 2019. Born in Banda Aceh, September 27, 1968. 51 years old as of December 2019
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana bidang Mechanical Engineering dari Institut Teknologi Bandung (1987). • Sarjana bidang Teknik dari Graduate School University of Electro-Communications, Tokyo (1993). • Master bidang Teknik dari University of Electro -Communications, Tokyo (1995). <ul style="list-style-type: none"> • Bachelor in Mechanical Engineering from the Bandung Institute of Technology (1987). • Bachelor of Engineering from the University School of Electro -Communications, Tokyo (1993). • Master of Engineering from the University of Electro -Communications, Tokyo (1995).
Pengalaman Kerja Work Experience	<p>Pernah menjabat sebagai <i>Director of Logistics & Business Development</i> PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (Present), <i>Director of Logistics</i> PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2015-2018), <i>Director of PT Portco Infranasantara</i>, member of Rajawali Corpora, <i>Business Development General Manager</i> of PT Nusantara Infrastructure Tbk, Rajawali Corpora, <i>Regional Process Leader for ASEAN South of Mitsui OSK Lines Ltd.</i>, <i>National Logistic & Operation Manager</i> of PT Mitsui OSK Lines Indonesia, <i>Account Manager</i> of PT Dentsu Indonesia, dan <i>Business Development Executive</i> of Mitsui & Co. Ltd.</p> <p>Served as Director of Logistics & Business Development at PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (Present), Director of Logistics at PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2015-2018), Director at PT Portco Infranasantara, member of Rajawali Corpora, Business Development General Manager at PT Nusantara Infrastructure Tbk, Rajawali Corpora, Regional Process Leader for ASEAN South of Mitsui OSK Lines Ltd., National Logistics & Operations Manager at PT Mitsui OSK Lines Indonesia, Account Manager at PT Dentsu Indonesia, and Business Development Executive at Mitsui & Co. Ltd.</p>
Riwayat Penunjukan Appointment History	<p>Diangkat pertama kali sebagai Direktur IPC sejak 8 April 2019, berdasarkan akta Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-80/MBU/04/2019 tanggal 8 April 2019.</p> <p>First appointed as IPC Director since April 8, 2019, based on the Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-80/MBU/04/2019 dated April 8, 2019.</p>
Periode Jabatan Position Period	<p>Periode menurut SK pengangkatan: 8 April 2019 –7 April 2024 (Periode Pertama)</p> <p>Period according to legal appointment: April 8, 2019 – April 7, 2024 (First Period)</p>
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan atau lembaga lain kecuali di Entitas anak dengan menjabat sebagai Komisaris Utama di Entitas Anak yaitu Komisaris Utama PT Multi Terminal Indonesia sejak 14 Juni 2019 dan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia sejak 14 Juni 2019</p> <p>Does not have concurrent positions in other companies or institutions except in subsidiaries by holding the position as President Commissioner of Subsidiary, i.e. President Commissioner of PT Multi Terminal Indonesia since June 14, 2019 and PT Pengembang Pelabuhan Indonesia since June 14, 2019</p>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p> <p>Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or Major and Controlling Shareholders.</p>
Kepemilikan Saham di IPC Share Ownership in IPC	Nihil None



4

DANI RUSLI UTAMA
Direktur Teknik
Technical Director

3

RIMA NOVIANTI
Direktur Komersial
Commercial Director

2

HAMBRA
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

1

ARIF SUHARTONO
Direktur Utama
President Director

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



5

MUARIP
Direktur Operasi
Operation Director

6

YON IRAWAN
Direktur Keuangan
Finance Director

7

IHSANUDDIN USMAN
Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum
Human Capital and
General Affairs Director

8

OGI RULINO
Direktur Transformasi &
Pengembangan Bisnis
Transformation & Business
Development Director



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF EXECUTIVE OFFICERS PROFILES

KANTOR PUSAT

Berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. OT.01.03/20/11/1/ PSO/UT/PI.II-19 pada tanggal 20 November 2019. Adapun profil Pejabat Eksekutif dijelaskan sebagai berikut:

HEAD OFFICE

Based on the Board of Directors Decree No. OT.01.03/20/11/1/ PSO/UT/PI.II-19 dated November 20, 2019, the executive officers profiles are as follows:

No	Keterangan Jabatan <i>Description Position</i>	Nama <i>Name</i>	SK Pengangkatan <i>Legal Appointment</i>
Direktur Utama Main Directorate			
A	Divisi Sekretariat Perusahaan Corporate Secretary Division		
	EVP Sekretariat Perusahaan EVP Corporate Secretary	Shanti Puruhita	KP.428/10/3/1/PI.II-17 Tanggal 10 Maret 2017 KP.428/10/3/1/PI.II-17 dated March 10, 2017
	SDVP Komunikasi Korporasi SDVP Corporate Communications	Fajar Setyono	KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018
	SDVP Penerapan Tata Kelola Korporasi SDVP Corporate Governance Implementation	Raden Rachmadi Gustrian	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 Tanggal 5 Juli 2019 KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 5, 2019
	SDVP Protokoler & TU Direksi SDVP Board of Directors Protocol & Administration	Siti Nurrochmah	KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 Tanggal 22 September 2017 KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 dated September 22, 2017
	SDVP Pelayanan Masyarakat SDVP Community Development	Angga Iriano Nugroho	KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 Tanggal 22 September 2017 KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 dated September 22, 2017
	SDVP Hubungan Lembaga SDVP Institutional Relations	Chandra Irawan	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 10 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 10, 2019
B	Divisi Perencanaan Strategi Korporasi Corporate Strategic Planning Division		
	EVP Perencanaan Strategi Korporasi SDVP Corporate Strategic Planning	Rio T.N Lasse	KP.428/31/8/1/PI.II-16 Tanggal 31 Agustus 2016 KP.428/31/8/1/PI.II-16 dated August 31, 2016
	SDVP Perencanaan Strategi SDVP Strategic Planning	Bobby Hardian	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016
	SDVP Pengendalian Strategis & Inovasi SDVP Strategic Control & Innovation	-	-
	SDVP Pengendalian Kinerja SDVP Performance Control	Pratiwi Karim	KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018
	SDVP Project Management Office (PMO) SDVP Project Management Office (PMO)	Meidhy Praharsa	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 Tanggal 10 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 10, 2019
C	Divisi Satuan Pengawasan Internal Internal Audit Unit Division		
	EVP Satuan Pengawasan Internal EVP Internal Audit Unit Division	Widodo	KP.428/31/8/1/PI.II-16 Tanggal 31 Agustus 2016 KP.428/31/8/1/PI.II-16 dated August 31, 2016
	SDVP Perencanaan Pengawasan Internal SDVP Internal Audit Planning	Mintarso	KP.428/30/9/1/PI.II-16 Tanggal 30 September 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated September 30, 2016
	SDVP Pelaksanaan Pengawasan Internal SDVP Internal Audit Implementation	Dhena Nugraha	KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 Tanggal 30 Mei 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 dated May 30, 2018
	SDVP Pengendalian Pengawasan Internal SDVP Internal Audit Control	Risman	KP.10.02/9/8/3/SBP/SUM/PI.II-17 Tanggal 09 Agustus 2017 KP.10.02/9/8/3/SBP/SUM/PI.II-17 dated August 09, 2017

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
EXECUTIVE OFFICERS PROFILES

	Usia Age	Gelar Pendidikan Education Level	Universitas University	Tahun Kelulusan Graduation Year
	42 tahun 42 years old	Sarjana Hukum, dan M.B.A Bachelor of Laws, and M.B.A	Kuhne Logistics University, Hamburg	2014
	36 tahun 36 years old	M.Sc	Cardiff University, UK	2015
	40 tahun 40 years old	Sarjana Teknik Sipil dan MM Bachelor of Civil Engineering and MM	Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Prasetiya Mulya School of Management	2009
	35 tahun 35 years old	M.Sc	Shanghai Maritime University, PR China	2012
	36 tahun 36 years old	M.Sc	Shanghai Maritime University, PR China	2013
	38 tahun 38 years old	SSiT, MM., MSc.	Shanghai Maritime University	2013
	46 tahun 46 years old	M.Sc.	The University New South Wales	1999
	39 tahun 39 years old	S.E., Akt, CA, M.Sc.	Erasmus Universiteit Rotterdam	2011
	-	-	-	-
	31 tahun 31 years old	S.T., M.Sc.	Plymouth University, UK	2013
	38 tahun 38 years old	S.T.	Institut Teknologi Bandung Bandung Institute of Technology	2004
	50 tahun 50 years old	Ir., M.Sc.	Netherlands Maritime University	2013
	55 tahun 55 years old	Ir.	STMIK Gunadarma STMIK Gunadarma	1992
	45 tahun 45 years old	S.T., M.Sc., Mstr.,	Universitas Indonesia University of Indonesia	2011
	50 tahun 50 years old	S.E., M.M	Universitas Pancasila University of Pancasila	2005



No	Keterangan Jabatan Description Position	Nama Name	SK Pengangkatan Legal Appointment
Wakil Direktur Utama Vice President Director			
A	Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan & Cabang Subsidiary and Branch Management		
	VP Pengelolaan Anak Perusahaan & Cabang VP Subsidiary & Branch Management	Usman Saroni	KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 25 Juni 2019 KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 dated June 25, 2019
	DVP Pengelolaan Anak Perusahaan DVP Subsidiary Management	Yanuar Evyanto	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019
	DVP Pengelolaan Cabang DVP Branch Management	-	-
B	Divisi Pengadaan Procurement Division		
	SVP Pengadaan SVP Procurement	Juli Tarigan	KP.06.02/21/8/1/SBP/SUM/PI.II-17 Tanggal 21 Agustus 2017 KP.06.02/21/8/1/SBP/SUM/PI.II-17 dated August 21, 2017
	DVP Pengadaan Teknik DVP Technical Procurement	Deby Rahmad	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019
	DVP Pengadaan Non Teknik DVP Non-technical Procurement	Dedi Daryono Tanjung	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 tanggal 8 Juli 2019 KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 8, 2019
	DVP Administrasi & Dokumentasi Pengadaan DVP Procurement Administration & Documentation	Asep Kusnadi	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019
Direktur Komersial Commercial Director			
A	Divisi Pemasaran Marketing Division		
	SVP Pemasaran SVP Marketing	Arif Rusman Yulianto	KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 19 Desember 2019 KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 dated December 19, 2019
	DVP Strategi Pemasaran DVP Marketing Strategy	Yosua Na Bongar	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 tanggal 8 Juli 2019 KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 8, 2019
	DVP Pentarifan DVP Tariff	Moh. Taufik Hidayat	KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 tanggal 22 September 2017 KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 dated September 22, 2017
	DVP Kerjasama Usaha DVP Business Cooperation	Vonny Oktaviana Sari	KP.428/30/9/1/PI.II-16 tanggal 1 Oktober 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated October 1, 2016

	Usia Age	Gelar Pendidikan Education Level	Universitas University	Tahun Kelulusan Graduation Year
--	-------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

	41 tahun 41 years old	<i>Master of Maritime Affair</i>	World Maritime University	2015
	46 tahun 46 years old	M.B.A	Renmin University	2012
	-	-	-	-

	51 tahun 51 years old	M.Sc.	Kuhne Logistics University	2017
	36 tahun 36 years old	S.T.	Institut Teknik Sepuluh November Institute of Technology 10 th of November	2007
	46 tahun 46 years old	S.E.	Universitas Gunadarma Gunadarma University	2001
	53 tahun 53 years old	S.H	Universitas Pasundan Pasundan University	1992

	44 tahun 44 years old	M.B.A	Kuhne Logistics University	2014
	42 tahun 42 years old	M.B.A.	Universiteit Twente	2003
	42 tahun 42 years old	<i>Master of International Transport & Logistic</i>	Shanghai Maritime University	2012
	31 tahun 31 years old	<i>Master of Economics and Logistic</i>	Erasmus University	2013



No	Keterangan Jabatan Description Position	Nama Name	SK Pengangkatan Legal Appointment
B	Divisi Aliansi Bisnis & Hubungan Pelanggan Business Alliance & Customer Relations		
	SVP Aliansi Bisnis & Hubungan Pelanggan	Andi Isnovandiono	KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 19 Desember 2019
	SVP Business Alliance & Customer Relations		KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 dated December 19, 2019
	DVP Aliansi Bisnis	Arya Adhiguna Sayogyo	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019
	DVP Business Alliance		KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019
	DVP Hubungan Pelanggan Terminal Petikemas	Pramestie Wulandary	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019
	DVP Container Customer Relations		KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019
	DVP Hubungan Pelanggan Terminal Non Petikemas	Roro Endah Dwi Liesly	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 tanggal 8 Juli 2019
	DVP Non-Container Customer Relations		KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 8, 2019
C	Divisi Manajemen Aset Asset Management Division		
	VP Manajemen Aset	M. Hadi Syafitri Noor	KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 25 Juni 2019
	VP Asset Management		KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 dated June 25, 2019
	DVP Portofolio Aset	Burhanudinsyah	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 tanggal 8 Juli 2019
	DVP Aset Portfolio		KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 8, 2019
	DVP Penyelesaian Aset Bermasalah	Aryo Kuncoro	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 tanggal 8 Juli 2019
	DVP Troubled Asset Settlement		KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 8, 2019
Direktur Teknik			
Technical Director			
A	Divisi Konstruksi Sipil Civil Construction Division		
	SVP Konstruksi Sipil	Udin Mahmudin	KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 19 Desember 2019
	SVP Civil Construction		KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 dated December 19, 2019
	DVP Perencanaan Sipil	Siti Hadijah	KP.428/30/9/1/PI.II-16 tanggal 1 Oktober 2016
	DVP Civil Planning		KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated October 1, 2016
	DVP Survei & Lingkungan	Endra Sutanto	KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 tanggal 22 September 2017
	DVP Survey & Environment		KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 dated September 22, 2017
	DVP Konstruksi	R. Apriyanto	KP.428/30/9/1/PI.II-16 tanggal 1 Oktober 2016
	DVP Construction		KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated October 1, 2016
	DVP Pemeliharaan Fasilitas	Rikky Afrianto	KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 tanggal 4 Juni 2018
	DVP Facility Maintenance		KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 dated June 4, 2018
B	Divisi Manajemen Proyek Strategis Strategic Project Management Division		
	SVP Manajemen Proyek Strategis	Zuhri Iryansyah	KP.10.02/9/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 10 Januari 2019
	SVP Strategic Project Management		KP.10.02/9/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 10, 2019
	DVP Perencanaan Proyek Strategis		
	DVP Strategic Project Planning		
	DVP Pengendalian Proyek Strategis	Ika Oktania	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019
	DVP Strategic Project Control		KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
EXECUTIVE OFFICERS PROFILES

Usia Age	Gelar Pendidikan Education Level	Universitas University	Tahun Kelulusan Graduation Year
48 tahun 48 years old	<i>Port Management</i>	World Maritime University Swedia	2000
33 tahun 33 years old	MM	World Maritime University Swedia	2015
37 tahun 37 years old	<i>Master of Law</i>	Monash University	2005
39 tahun 39 years old	<i>Maritime Economics and Logistics</i>	Erasmus University Rotterdam	2014
50 tahun 50 years old	<i>Water Science And Engineering</i>	UNESCO IHE	2011
32 tahun 32 years old	<i>Coastal Engineering dan Port Development</i>	IHE DELFT	2015
42 tahun 42 years old	M.Sc.	World Maritime University	2011
52 tahun 52 years old	M.M.	STIE Budi Luhur STIE Budi Luhur	2002
36 tahun 36 years old	M.Sc.	Unescoihe, Delft	2013
53 tahun 53 years old	S.T.	Trisakti	1993
37 tahun 37 years old	M.Sc.	Unescoihe, Delft	2012
43 tahun 43 years old	<i>Master of Shipping and Transportation</i>	Netherlands Maritime University	2016
50 tahun 50 years old	M.Sc.	UNESCO IHE	2011
34 tahun 34 years old	M.Sc.	UNESCOIHE, Delft Netherlands	2013



No	Keterangan Jabatan Description Position	Nama Name	SK Pengangkatan Legal Appointment
C	Divisi Peralatan Equipment Division		
	VP Peralatan VP Equipment	Kartiko Yuwono	KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 19 Desember 2019 KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 dated December 19, 2019
	DVP Teknik Mesin & Listrik DVP Machine & Electricity Engineering	Nurwahyudi Panca	KP.428/30/9/1/PI.II-16 tanggal 1 Oktober 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated October 1, 2016
	DVP Alat Apung DVP Floating Equipment	Mohammad Reza	KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 tanggal 22 September 2017 KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 dated September 22, 2017
	DVP Alat Bongkar Muat DVP Loading and Unloading	Achmad Yoga	KP.428/30/9/1/PI.II-16 tanggal 1 Oktober 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated October 1, 2016
Direktur Operasi Operations Director			
A	Divisi Pelayanan Terminal Terminal Services Division		
	SVP Pelayanan Terminal SVP Terminal Services	Imam Rahmiyadi	KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 25 Juni 2019 KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 dated June 25, 2019
	DVP Pelayanan Petikemas DVP Container Services	Hermana Widhyohadi	KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 Tanggal 22 September 2017 KP.10.02/22/9/1/SBP/UT/PI.II-17 dated September 22, 2017
	DVP Pelayanan Non Petikemas & Penumpang DVP Non-Container and Passengers Services	Fauzi	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 tanggal 8 Juli 2019 KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 8, 2019
	DVP Manajemen K3L DVP SHE Management	Bambang Ruwadi	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019
B	Divisi Sistem Informasi Information System Division		
	SVP Sistem Informasi SVP Information System	Nunu Husnul Khitam	KP.10.02/11/9/1/PI.II-17 tanggal 11 September 2017 KP.10.02/22/9/1/PI.II-17 dated September 11, 2017
	DVP Perencanaan & Manajemen Informasi DVP Planning & Management Information	Raden Mulyadi	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019
	DVP Pengembangan Sistem Informasi DVP Information System Development	Donald H Sitompul	KP.428/30/9/1/PI.II-16 tanggal 1 Oktober 2016 KP.428/30/9/1/PI.II-16 dated October 1, 2016
	DVP Pengoperasian & Pengendalian Sistem Informasi DVP Information Operation & Maintenance	Bombom Cepi Nugraha	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019
C	Divisi Pelayanan Kapal Ship Services Division		
	VP Pelayanan Kapal VP Ship Services	Muhammad Iqbal	KP.10.02/9/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 10 Januari 2019 KP.10.02/9/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 10, 2019
	DVP Pemanduan & Penundaan DVP Pilotage & Towage	Santoso	KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 tanggal 4 Juni 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 dated June 4, 2018
	DVP Sarana & Prasarana Pelayanan Kapal DVP Ship Services Infrastructure & Facilities	Adi Priyatmono	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
EXECUTIVE OFFICERS PROFILES

Usia Age	Gelar Pendidikan Education Level	Universitas University	Tahun Kelulusan Graduation Year
52 tahun 52 years old	M.Sc.	World Maritime University	2000
30 tahun 30 years old	S.T	Universitas Indonesia	2002
44 tahun 44 years old	S.T	Universitas Pancasila	2009
44 tahun 44 years old	<i>Master of Economics and Transportation</i>	University of Antwerp Belgia	2010
42 tahun 42 years old	M.Sc.	World Maritime University	2012
44 tahun 44 years old	M.Sc.	Shanghai Maritime University	2013
48 tahun 48 years old	<i>Leadership and Logistics</i>	Kuhne Logistics University	2016
55 tahun 55 years old	S.E	STIE KU	2000
49 tahun 49 years old	M.B.A	Kuhne Logistics University	2015
45 tahun 45 years old	S.T	Universitas Krisnadwipayana Krisnadwipayana University	2001
42 tahun 42 years old	S.T	Institut Sains Dan Teknologi Nasional National Institute of Science and Technology	2017
46 tahun 46 years old	S.E	STIE Jambi	2008
51 tahun 51 years old	M. Mar	Marine Master, STIP.	2006
47 tahun 47 years old	M.Sc.	Marine Master, STIP.	2009
37 tahun 37 years old	M.Sc.	Institut Teknologi Sepuluh November Institute of Technology 10 th of November	2007



No	Keterangan Jabatan Description Position	Nama Name	SK Pengangkatan Legal Appointment
Direktorat Keuangan Finance Director			
A	Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan Financial Planning & Control Division		
	SVP Perencanaan dan Pengendalian Keuangan SVP Financial Planning & Control	Ikhwanoeel	KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 19 Desember 2019 KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 dated December 19, 2019
	DVP Perencanaan Keuangan DVP Financial Planning	Yuli Wahyu Wibowo	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 tanggal 8 Juli 2019 KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 8, 2019
	DVP Pengendalian Keuangan DVP Financial Control	Fadhilah Yuniarti	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 tanggal 8 Juli 2019 KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 8, 2019
	DVP Penganggaran Investasi DVP Investment Budgeting	Marwan Hakim	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 tanggal 8 Juli 2019 KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 8, 2019
B	Divisi Pengelolaan Keuangan Financial Management Division		
	SVP Pengelolaan Keuangan SVP Financial Management	Wing Megantoro	KP.10.02/9/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 10 Januari 2019 KP.10.02/9/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 10, 2019
	DVP Perbendaharaan DVP Treasury	Kartika Alfriana	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 tanggal 8 Juli 2019 KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 8, 2019
	DVP Keuangan Korporasi DVP Corporate Finance	Muhammad Hadiyan Azmi	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 tanggal 8 Juli 2019 KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 8, 2019
	DVP Pencatatan Aset DVP Aset Listing	Abdul Latief	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019
C	Divisi Layanan Keuangan Financial Services Division		
	VP Layanan Keuangan VP Financial Services	Ida Daryaningsih	KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 19 Desember 2019 KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 dated December 19, 2019
	DVP Akuntansi Umum & Sistem Keuangan DVP General Accounting & Financial System	Dudung Abdul Aziz	KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 tanggal 4 Juni 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 dated June 4, 2018
	DVP Pajak DVP Tax	Agus Wahyudi	KP.10.02/22/1/1/SBP/SUM/PI.II-18 tanggal 1 Februari 2018 KP.10.02/22/1/1/SBP/SUM/PI.II-18 dated February 1, 2018
	DVP Pusat Layanan Keuangan Pelanggan DVP Customer Finance Service Center	Heru Susetyohadi	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019
Direktorat SDM Human Capital Director			
A	Divisi Strategi SDM HC Strategy Division		
	SVP Strategi SDM SVP HC Strategy	Hanung Hamboro	KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 19 Desember 2019 KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 dated December 19, 2019
	DVP Perencanaan SDM & Organisasi DVP HC Planning & Organization	Devi Saraswati	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 tanggal 8 Juli 2019 KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 8, 2019
	DVP Manajemen Talenta DVP Talent Management	Dian Vegawati	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 tanggal 8 Juli 2019 KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 8, 2019
	DVP Kebijakan Remunerasi & Fasilitas SDM DVP HC Remuneration & Facilities Policy	Audy Nirsa Kusuma	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 tanggal 8 Juli 2019 KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 8, 2019

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
EXECUTIVE OFFICERS PROFILES

	Usia Age	Gelar Pendidikan Education Level	Universitas University	Tahun Kelulusan Graduation Year
	45 tahun 45 years old	S.E	Universitas Persada Indonesia University of Persada Indonesia	2004
	35 tahun 35 years old	S.E	Universitas Gajah Mada University of Gajah Mada	2008
	39 tahun 39 years old	M.M.	Universitas Airlangga University of Airlangga	2007
	34 tahun 34 years old	S.E	Universitas Pasundan University of Pasundan	2009
	47 tahun 47 years old	M.B.A	Kuhne Logistics University	2015
	35 tahun 35 years old	M.Ak.	Universitas Gajah Mada University of Gajah Mada	2008
	33 tahun 33 years old	S.E	Universitas Sebelas Maret University of Sebelas Maret	2008
	47 tahun 47 years old	M.M	Universitas Pancasila University of Pancasila	2008
	53 tahun 53 years old	M.B.A	Kuhne Logistics University	2016
	44 tahun 44 years old	S.E	Universitas Terbuka Open University	2015
	45 tahun 45 years old	S.E	Universitas Muhammadiyah University of Muhammadiyah	1999
	49 tahun 49 years old	S.E	Universitas Gajah Mada University of Gajah Mada	1995
	49 tahun 49 years old	M.Sc.	World Maritim University Sweden	2004
	44 tahun 44 years old	M.Sc.	Netherlands Maritime University	2015
	38 tahun 38 years old	M.Sc.	Netherlands Maritime University	2012
	37 tahun 37 years old	M.Sc.	World Maritime University	2014



No	Keterangan Jabatan Description Position	Nama Name	SK Pengangkatan Legal Appointment
B	Divisi Pembelajaran SDM Human Capital Learning Division		
	SVP Pembelajaran SDM SPV Human Capital Learning	Heru Widodo	KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 19 Desember 2019 KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 dated December 19, 2019
	DVP Perencanaan Pembelajaran DVP Learning Planning	Desi Yulfia	KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 tanggal 4 Juni 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 dated June 4, 2018
	DVP Penyelenggaraan Pembelajaran DVP Learning Management	Fransiska Riana S.	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 tanggal 8 Juli 2019 KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 8, 2019
	DVP Budaya Korporasi DVP Corporate Culture	Hewynda Silvira	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 tanggal 8 Juli 2019 KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 8, 2019
C	Divisi Hukum Legal Division		
	SVP Hukum SVP Legal	Kurnia Jaya	KP.428/31/8/1/PI.II-16 tanggal 1 September 2016 KP.428/31/8/1/PI.II-16 dated September 1, 2016
	DVP Dukungan Hukum DVP Legal Support	Eko Budyasmoro	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019
	DVP Litigasi DVP Litigation	Sutanto	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019
	DVP Pemeriksaan Kepatuhan DVP Compliance Audit	Dwi Hertanto	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019
D	Divisi Layanan SDM HC Services Division		
	VP Layanan SDM VP HC Services	Nurkholis Lukman	KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 19 Desember 2019 KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 dated December 19, 2019
	DVP Hubungan Pekerja DVP Employee Relations	Agus Fazri	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 tanggal 8 Juli 2019 KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 8, 2019
	DVP Kearsipan DVP Archive	Guswita Dewi	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019
	DVP Layanan & Administrasi SDM DVP HC Services & Administration	Indah Lestari	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019
	DVP Umum & Rumah Tangga DVP General & Household	Budy Setiawan	KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 tanggal 8 Juli 2019 KP.10.02/5/7/1/MTA/SDM/PI.II-19 dated July 8, 2019
Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis Transformation & Business Development Director			
A	Divisi Transformasi & Pengembangan Bisnis Transformation & Business Development Division		
	SVP Transformasi & Pengembangan Bisnis SVP Transformation & Business Development	Retno Soelistianti	KP.10.02/9/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 10 Januari 2019 KP.10.02/9/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 10, 2019
	DVP Portofolio Bisnis DVP Business Portfolio	Hari Wahyudi	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019
	DVP Pengembangan Bisnis Inti DVP Core Business Development	Arief Adhi Wibowo	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019
	DVP Pengembangan Bisnis Pendukung DVP Supporting Business Development	Rizqi Wijayanto	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
EXECUTIVE OFFICERS PROFILES

	Usia Age	Gelar Pendidikan Education Level	Universitas University	Tahun Kelulusan Graduation Year
	54 tahun 54 years old	S.Psi	Universitas Gadjah Mada University of Gajah Mada	1991
	36 tahun 36 years old	M.Sc.	World Maritim University Sweden	2013
	42 tahun 42 years old	M.B.A	Kuhne Logistic University	2017
	39 tahun 39 years old	M.M.	Sekolah Tinggi Manajemen PPM PPM School of Management	2005
	44 tahun 44 years old	M.H., M.B.A	Kuhne Logistic University	2017
	46 tahun 46 years old	M.H	Universitas Jayabaya University of Jayabaya University	2005
	38 tahun 38 years old	S.H	Universitas 17 Agustus 1945 University of August 17, 1945	2009
	54 tahun 54 years old	M.H	Universitas Sriwijaya University of Sriwijaya	2012
	46 tahun 46 years old	S.T	Universitas Bina Darma University of Bina Darma	2009
	49 tahun 49 years old	M.B.A	Kuhne Logistics University	2015
	52 tahun 52 years old	M.H	Universitas Sumatera Utara University of Northern Sumatra	1997
	41 tahun 41 years old	M.Sc.	Netherlands Maritime University	2014
	47 tahun 47 years old	S. Adm.	Universitas Tulang Bawang University of Tulang Bawang	2008
	46 tahun 46 years old	M.Sc.	IHE DELFT	2002
	37 tahun 37 years old	M.B.A	Prasetya Mulya	2015
	49 tahun 49 years old	M.Sc.	World Maritime University	2005
	39 tahun 39 years old	S.T., M.M	Universitas Gadjah Mada University of Gajah Mada	2016



No	Keterangan Jabatan Description Position	Nama Name	SK Pengangkatan Legal Appointment
B	Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division		
	VP Manajemen Risiko VP Risk Management	Urip Nurhayat	KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 25 Juni 2019 KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 dated June 25, 2019
	DVP Risiko Operasional DVP Operational Risk	Sumarman	KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 tanggal 4 Juni 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 dated June 4, 2018
	DVP Risiko Non Operasional DVP Non-operational Risk	Basril Nofaris	KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 tanggal 4 Juni 2018 KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 dated June 4, 2018
C	Divisi Kendali Mutu Quality Control Division		
	VP Kendali Mutu VP Quality Control	Budi Pratomo	KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 19 Desember 2019 KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 dated December 19, 2019
	DVP Kendali Mutu Korporasi DVP Corporate Quality Control	Hari Toto Budiarto	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019
	DVP Penyusunan Standar Prosedur Operasi DVP Standard Operating Procedure Preparation	Oka Sudarsono	KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 tanggal 11 Januari 2019 KP.10.02/10/1/1/MTA/UT/PI.II-19 dated January 11, 2019

PROFIL KEPALA CABANG PELABUHAN

PORT BRANCH HEAD PROFILE

No	Cabang Pelabuhan Port Branch	Nama Name	SK Pengangkatan Legal Appointment	Usia Age	Gelar Pendidikan Education Level	Universitas University	Tahun Kelulusan Graduation Year
1	Cabang Pelabuhan Tanjung Priok	Suparjo	KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 Tanggal 24 Juni 2019	53 tahun	M.B.A	National University of Singapore	2014
	Tanjung Priok Port Branch		KP.10.02/24/6/1/MTA/UT/PI.II-19 dated June 24, 2019	53 years old			
2	Cabang Pelabuhan Panjang	Drajat Sulistyono	KP.10.02/26/2/1/SBP/SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018	40 tahun	M.Sc.	Kuhne Logistics University	2014
	Panjang Port Branch		KP.10.02/26/2/1/SBP/SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	40 years old			
3	Cabang Pelabuhan Palembang	Indra Sani Hidayat	KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 Tanggal 17 Desember 2019	48 tahun	M.Sc.	Kuhne Logistics University	2014
	Palembang Port Branch		KP.10.02/17/12/1/MTA/UT/PI.II-19 dated December 17, 2019	48 years old			

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
EXECUTIVE OFFICERS PROFILES

Usia Age	Gelar Pendidikan Education Level	Universitas University	Tahun Kelulusan Graduation Year
50 tahun 50 years old	S.E	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara The State School of Accountancy	1997
49 tahun 49 years old	S.T	Universitas Muhammadiyah University of Muhammadiyah	1998
46 tahun 46 years old	M.B.A	Kuhne Logistics University	2015
40 tahun 40 years old	M.I.T	Queensland University	2008
53 Tahun 53 years old	M.M.	STIE Widya Jayakarta STIE Widya Jayakarta	2000
50 tahun 50 years old	S.S.T. Pel	STTK Hatawana STTK Hatawana	2003

No	Cabang Pelabuhan Port Branch	Nama Name	SK Pengangkatan Legal Appointment	Usia Age	Gelar Pendidikan Education Level	Universitas University	Tahun Kelulusan Graduation Year
4	Cabang Pelabuhan Teluk Bayur	Wardoyo	KP.10.02/24/6/1/ MTA/UT/PI.II-19 Tanggal 24 Juni 2019	55 tahun	S.A.N	Universitas Tulang Bawang	2008
	Teluk Bayur Port Branch		KP.10.02/24/6/1/ MTA/UT/PI.II-19 dated June 24, 2019	55 years old		University of Tulang Bawang	
5	Cabang Pelabuhan Pontianak	Adi Sugiri	KP.10.02/26/2/1/ SBP/SUM/PI.II-18 Tanggal 27 Februari 2018	42 tahun	M.B.A	Renmin University	2012
	Pontianak Port Branch		KP.10.02/26/2/1/ SBP/SUM/PI.II-18 dated February 27, 2018	42 years old			
6	Cabang Pelabuhan Banten	Agus Hendrianto	KP.10.02/9/1/1/MTA/ UT/PI.II-19 Tanggal 9 Januari 2019	53 tahun	M.B.A	Kuhne Logistics Univeristy	2014
	Banten Port Branch		KP.10.02/9/1/1/MTA/ UT/PI.II-19 dated January 9, 2019	53 years old			



No	Cabang Pelabuhan Port Branch	Nama Name	SK Pengangkatan Legal Appointment	Usia Age	Gelar Pendidikan Education Level	Universitas University	Tahun Kelulusan Graduation Year
7	Cabang Pelabuhan Cirebon	Wahyu Pradityo	KP.10.02/17/12/1/ MTA/UT/PI.II-19 Tanggal 17 Desember 2019	36 tahun	M.Sc.	Unescoihe, Delft	2012
	Cirebon Port Branch		KP.10.02/17/12/1/ MTA/UT/PI.II-19 dated December 17, 2019	36 years old			
8	Cabang Pelabuhan Jambi	Sandha Trisharjantho	KP.10.02/24/6/1/ MTA/UT/PI.II-19 Tanggal 24 Juni 2019	44 tahun	S.S.T.Pel	PLAP	2000
	Jambi Port Branch		KP.10.02/24/6/1/ MTA/UT/PI.II-19 dated June 24, 2019	44 years old			
9	Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa	Abdul Wahab	KP.10.02/17/12/1/ MTA/UT/PI.II-19 Tanggal 17 Desember 2019	54 tahun	S.H.	Universitas tanjung Pura University of Tanjung Pura	1992
	Sunda Kelapa Port Branch		KP.10.02/17/12/1/ MTA/UT/PI.II-19 dated December 17, 2019	54 years old			
10	Cabang Pelabuhan Bengkulu	Silo Santoso	KP.10.02/17/12/1/ MTA/UT/PI.II-19 Tanggal 17 Desember 2019	53 tahun	S.H.	Universitas Sebelas Maret University of Sebelas Maret	1991
	Bengkulu Port Branch		KP.10.02/17/12/1/ MTA/UT/PI.II-19 dated December 17, 2019	53 years old			
11	Cabang Pelabuhan Pangkal Balam	Cucu Kuswoyo	KP.10.02/17/12/1/ MTA/UT/PI.II-19 Tanggal 17 Desember 2019	41 tahun	M.Sc.	Kuhne Logistics University	2013
	Pangkal Balam Port Branch		KP.10.02/17/12/1/ MTA/UT/PI.II-19 dated December 17, 2019	41 years old			
12	Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan	Yossianis Marciano	KP.10.02/9/1/1/MTA/ UT/PI.II-19 Tanggal 9 Januari 2019	35 tahun	M.Sc.	Netherlands Maritime University	2013
	Tanjung Pandan Port Branch		KP.10.02/9/1/1/MTA/ UT/PI.II-19 dated January 9, 2019	35 years old			

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN EMPLOYEE PROFILE AND COMPETENCY DEVELOPMENT

IPC memiliki 2 (dua) kategori karyawan yaitu karyawan organik dan karyawan *non* organik. Karyawan organik adalah Pekerja Perseroan termasuk Pekerja Dalam Masa Percobaan yang diangkat/ditetapkan oleh Perseroan yang memiliki Nomor Induk Pekerja Pelabuhan (NIPP) sedangkan karyawan *non* organik adalah Pekerja Non Organik adalah Pekerja Perseroan ditetapkan oleh Perseroan yang tidak memiliki Nomor Induk Pekerja Pelabuhan (NIPP). Profil karyawan berdasarkan level organisasi, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin dan masa kerja yang disajikan pada laporan tahunan ini adalah untuk karyawan organik. Jumlah karyawan Organik pada tahun 2019 adalah sebanyak 2.669 orang sedangkan jumlah karyawan di tahun 2018 adalah sebanyak 2.603.

IPC has 2 (two) categories of employee, namely organic employee and non-organic employee. Organic employees are workers of the Company including probation workers who are appointed/stipulated by the Company and have Port Employee Identification Number (NIPP) while non-organic employees are Non-Organic Employees are workers of the Company who are appointed by the Company and do not have Port Employee Identification Number (NIPP). Employee profile based on organizational level, education level, age, gender and years of service presented in this annual report are for organic employees. The number of Organic employees in 2019 was 2,669 persons, while the number of employees in 2018 was 2,603.

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON ORGANIZATIONAL LEVEL

Tabel Jumlah Karyawan Organik Berdasarkan Level Organisasi pada Induk Perusahaan (dalam satuan orang)
Number of Employees Based on Organization Level at the Parent Company (people)

Level Organisasi Organization Level	2019			2018		
	Pria Male	Wanita Female	Total Total	Pria Male	Wanita Female	Total Total
1	-	-	-	-	-	-
2	1	1	2	1	1	2
3	9	2	11	10	2	12
4	44	6	50	44	6	50
5	25	-	25	26	-	26
6	70	4	74	58	3	61
7	105	16	121	111	15	126
8	85	14	99	92	15	107
9	203	24	227	175	23	198
10	446	123	569	447	110	557
11	268	84	352	273	67	340
12	301	92	393	307	102	409
13	187	47	234	151	46	197
14	183	22	205	168	33	201
15	131	3	134	198	6	204
16A	148	25	173	102	11	113
Jumlah Total	2.206	463	2.669	2.163	440	2.603



JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON EDUCATIONAL LEVEL

Tabel Jumlah Karyawan Organik Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Induk Perusahaan (dalam satuan orang)
Number of Employees Based on Education Level at the Parent Company (people)

Tingkat Pendidikan Education Level	2019			2018		
	Pria Male	Wanita Female	Total Total	Pria Male	Wanita Female	Total Total
Doktoral Doctoral	1	1	2	-	-	-
Pasca Sarjana Postgraduate	337	84	421	331	81	412
Sarjana Undergraduate	953	255	1.208	878	230	1.108
Diploma Diploma	230	77	307	237	79	316
SLTA Senior High school	679	46	725	706	50	765
SLTP Junior high school	6	-	6	11	-	11
Jumlah Total	2.206	463	2.669	2.163	440	2.603

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON EMPLOYMENT STATUS

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian pada Induk Perusahaan (dalam satuan orang)
Number of Employees Based on Employment Status at the Parent Company (people)

Uraian Description	2019	2018
Pegawai Organik Organic Employees	2.669	2.603
Pegawai Non Organik Non Organic Employees	1.975	6.489
Jumlah Total	4.644	9.092

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN RENTANG USIA

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON AGE GROUP

Tabel Jumlah Karyawan Organik Berdasarkan Rentang Usia pada Induk Perusahaan (dalam satuan orang)
Number of Employees Based on Age Group at the Parent Company (people)

Rentang Usia Age Group	2019			2018		
	Pria Male	Wanita Female	Total Total	Pria Male	Wanita Female	Total Total
≥55	32	3	35	48	3	51
51 ≤ x < 55	211	13	224	173	10	183
46 ≤ x < 51	459	35	494	427	33	460
36 ≤ x < 46	690	73	763	711	71	782
26 ≤ x < 36	780	327	1107	761	311	1.072
<26	34	12	46	43	12	55
Jumlah Total	2206	463	2669	2.163	440	2.603

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON GENDER

Tabel Jumlah Karyawan Organik Berdasarkan Jenis Kelamin pada Induk Perusahaan (dalam satuan orang)
Number of Employees Based on Gender (people)

Uraian Description	2019	2018
Pria Male	2.206	2.163
Wanita Female	463	440
Jumlah Total	2.669	2.603

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON PERIOD OF SERVICE

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Masa Kerja pada Induk Perusahaan (dalam satuan orang)
Number of Employees Based on Period of Service at the Parent Company (people)

Masa Kerja Period of Service	2019			2018		
	Pria Male	Wanita Female	Total Total	Pria Male	Wanita Female	Total Total
≥35	2	0	2	17	2	19
30 ≤ x < 35	7	2	9	12	3	15
25 ≤ x < 30	169	5	174	183	6	189
20 ≤ x < 25	400	32	432	408	30	438
15 ≤ x < 20	218	23	241	223	24	247
10 ≤ x < 15	213	45	258	252	52	304
5 ≤ x < 10	928	283	1211	566	247	813
<5	269	73	342	502	76	578
Jumlah Total	2.206	463	2.669	2.163	440	2.603

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

KEBIJAKAN

POLICY

Dalam menjalankan pengembangan kompetensi karyawan, IPC mengacu pada Surat Menteri BUMN No. S-574/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020. Berdasarkan aspirasi Pemegang Saham tersebut, seluruh BUMN wajib membangun *Integrated Talent Management System* (ITMS) dan mengirimkan talenta Perseroan ke dalam *talent pool* di Kementerian BUMN, yang terdiri dari minimal 20% dari seluruh pejabat satu level di bawah Direksi dan kandidat Calon Direksi minimal 3 orang suksesor per posisi Direksi. Anggaran untuk Program Pengembangan *Human Capital/SDM* agar dialokasikan dalam RKAP minimal 5% dari total biaya *human capital/SDM* dalam 1 tahun.

In carrying out employee competency development, IPC refers to the SOE Ministry's Letter No. S-574/MBU/08/2019 dated August 30, 2019 concerning Shareholders/Capital Owners' Aspirations for Preparation of the Company's Work Plan and Budget in 2020. Based on the Shareholders' aspirations, all SOEs are required to build an Integrated Talent Management System (ITMS) and send company talent to the talent pool at the Ministry of SOEs, which should consist of at least 20% of all officials one level below the Board of Directors and candidates for a minimum of 3 successors per Director's position. The Human Capital/HC Development Program budget as allocated in the RKAP should be at least 5% of the total human capital/HC costs in 1 year.



Dalam rangka mendukung visi perusahaan menjadi operator pelabuhan kelas dunia, IPC melakukan restrukturisasi dengan Pembentukan Dewan Pembelajaran dalam rangka Implementasi *Corporate University*. Divisi Pembelajaran SDM diberikan tugas untuk menjalankan fungsi *Corporate University* yang sebelumnya berada di Entitas Anak PT PMLI. Hal ini kemudian diikuti dengan penetapan beberapa kebijakan seperti Surat Keputusan Direksi Nomor: OT.01.03/20/8/1/PRB/UT/PI.II-19 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: OT.01.03/9/5/1/PDM/UT/PI.II-18 tanggal 9 Mei 2018 Tentang Struktur Organisasi Virtual IPC *Corporate University*.

In order to support the Company's vision to become a world-class port operator, IPC performed a restructuring by Establishment of Learning Board in the framework of Implementing Corporate University. The Human Capital Learning Division is given the task to carry out the Corporate University function that was previously under a subsidiary of PT PMLI. This was then followed by the stipulation of several policies such as Board of Directors Decree No: OT.01.03/20/8/1/PRB/UT/PI.II-19 dated August 20, 2019 concerning Amendments to the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No: OT.01.03/9/5/1/PDM/UT/PI.II-18 dated May 9, 2018 about the Virtual Organizational Structure of IPC Corporate University.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERDASARKAN LEVEL JABATAN

COMPETENCY DEVELOPMENT BASED ON POSITION LEVEL

Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019
Table of Competency Development by Position Level in 2019

No	Jenis Pelatihan Type of Training	Level Jabatan Position Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Purpose
1	Leadership	BOD-1	<p>ASEAN <i>Global Leadership Program</i> (AGLP)</p> <p><i>Strategic Briefing</i></p> <p><i>Executive Engagement</i> Direksi Anper</p> <p>Executive Engagement Subsidiary's Board of Directors</p>	<p>Mendapatkan pengetahuan tentang ilmu kepemimpinan secara global Gain knowledge about global leadership</p> <ul style="list-style-type: none"> Menanamkan IPC <i>Corporate Value</i> menjadi karakter; Pemimpin (<i>leader</i>) di lingkungan Entitas Anak IPC; Meningkatkan loyalitas kepada kepentingan dan arah Perusahaan. <ul style="list-style-type: none"> Embed IPC Corporate Value into character; Leaders within IPC Subsidiary; Increase loyalty to the interests and direction of the Company. <ul style="list-style-type: none"> Menguatkan <i>Corporate Values</i>; Menjadi insan IPC yang menjunjung loyalitas kepada kepentingan dan arah perusahaan, serta meningkatkan kecakapan berkepedulian dalam perspektif yang luas; Menjadi insan IPC yang berpikiran terbuka menyikapi perubahan dalam mewujudkan kinerja unggul yang berkesinambungan dan meningkatkan profesionalisme dengan prinsip 5K. <ul style="list-style-type: none"> Strengthen Corporate Values; Become an IPC employee who fosters loyalty to the interests and direction of the company, and increase awareness in a broader perspective; Become an open-minded IPC employee in responding to changes to realize sustainable superior performance and enhancing professionalism with the 5K principle.

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
EMPLOYEE PROFILE AND COMPETENCY DEVELOPMENT

	Jumlah Batch Number of Batch	Jumlah Durasi Pelatihan Total Training Hours	Total Peserta Number of Participants	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Level Jabatan Percentage of Employees who Have Attended Training for Each Position Level
	2	10	Batch 1 = 3 Batch 2 = 3	Batch 1 = 100% Batch 2 = 100%
	1	1	Batch 1 = 44	Batch 1 = 94%
	1	2	Batch 1 = 15	Batch 1 = 82%



Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019

Table of Competency Development by Position Level in 2019

No	Jenis Pelatihan Type of Training	Level Jabatan Position Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Purpose
2	Managerial	BOD-2	<i>Executive Presence (BOD-1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Menguasai bahasa tubuh , postur, dan teknik komunikasi yang mencerminkan <i>Presence</i> Kepemimpinan; Meningkatkan kemampuan <i>Impactful Public Speaking, Business Small Talk & Networking</i>; Meningkatkan kemampuan intelegensia dalam memimpin diri, orang lain dan organisasi.
			<i>EDP II-Seri Building Business Partnership</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mastering body language, posture, and communication techniques that reflect Leadership Presence; Improve the skills of Impactful Public Speaking, Business Small Talk & Networking; Improve the intellectual ability in leading themselves, others and organization.
			<i>Character Building MDP</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menjadi <i>role model</i> dalam menciptakan iklim/budaya membangun hubungan kerja sama secara strategis pada level perusahaan; Mampu mengelola perbedaan yang terdapat di lingkungan kerja dan memanfaatkannya sebagai faktor pendukung kesuksesan.
			<i>Executive Presence (BOD-2)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Able to be a role model in creating climate/culture of building strategic cooperative relationships at corporate level; Able to manage existing differences in work environment and use them as a supporting factor for success.
			<i>Executive Presence (BOD-2)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan peluang yang ada; Meningkatkan kemampuan dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang dihadapi; Meningkatkan kemampuan dalam penggunaan waktu yang efektif, pengambilan keputusan dan sumber daya yang efisien; Meningkatkan efektifitas kerjasama dan komunikasi antar unit di tingkat Kantor Pusat, Cabang dan Anak Perusahaan.
			<i>Executive Presence (BOD-2)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Able to optimize available resources and opportunities; Improve the ability to deal with obstacles and challenges faced; Improve the ability to use effective time, decision-making and efficient resources; Improve the effectiveness of cooperation and communication between units at Head Office, Branches and Subsidiary level.
			<i>Executive Presence (BOD-2)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Menguasai bahasa tubuh, postur, dan teknik komunikasi yang mencerminkan <i>Presence</i> Kepemimpinan; Meningkatkan Kemampuan <i>Impactful Public Speaking, Business Small Talk & Networking</i>; Meningkatkan kemampuan intelegensia dalam memimpin diri, orang lain dan organisasi.
			<i>Executive Presence (BOD-2)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mastering body language, posture, and communication techniques that reflect Leadership Presence; Improve the skills of Impactful Public Speaking, Business Small Talk & Networking; Improve the intellectual ability in leading themselves, others and organization.

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
EMPLOYEE PROFILE AND COMPETENCY DEVELOPMENT

	Jumlah Batch Number of Batch	Jumlah Durasi Pelatihan Total Training Hours	Total Peserta Number of Participants	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Level Jabatan Percentage of Employees who Have Attended Training for Each Position Level
	2	4	Batch 1 = 16 Batch 2 = 22	Batch 1 = 96% Batch 2 = 61%
	2	2	Batch 1 = 38 Batch 2 = 45	Batch 1 = 83% Batch 2 = 81%
	3	12	Batch 1 = 8 Batch 2 = 11 Batch 3 = 10	Batch 1 = 98% Batch 2 = 79% Batch 3 = 95%
	2	4	Batch 1 = 21 Batch 2 = 9	Batch 1 = 96% Batch 2 = 97%



Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019

Table of Competency Development by Position Level in 2019

No	Jenis Pelatihan Type of Training	Level Jabatan Position Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Purpose
	<i>Managerial</i>	BOD-2	MDP II-Seri <i>Building Business Partnership</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mampu mengevaluasi permasalahan di tingkat perusahaan yang berimplikasi strategis bagi perusahaan; Mampu mengevaluasi implementasi keputusan di tingkat perusahaan yang diambil telah dijalankan sebagaimana mestinya; Mampu mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu utama untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan di tingkatan perusahaan. Able to evaluate problems at corporate level that have strategic implications for the company; Able to evaluate the implementation of decisions at corporate level that have been taken accordingly; Able to identify and prioritize key issues to facilitate the decision-making process at corporate level.
			EDP I- <i>Personal Aspect & Interpersonal Skill</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menetapkan standar kinerja pribadi yang tinggi serta memastikan standar tersebut realistis; Mampu mengambil inisiatif untuk memperbaiki proses dan hasil kerja pribadi; Mampu berperilaku dan bertutur kata sesuai dengan peraturan, budaya, dan nilai-nilai perusahaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis demi kepentingan Perseroan. Able to set high personal performance standards and ensure that they are realistic; Able to take initiative to improve the process and results of personal work results; Able to behave and speak according to company regulations, culture, and values both written and unwritten for the benefit of the company.
			EDP I- <i>Leadership Skill Seri Coaching</i>	<ul style="list-style-type: none"> Menciptakan <i>leader</i> yang cakap dalam mengembangkan timnya; Menciptakan gaya kepemimpinan yang sesuai untuk memimpin para millennials; Membekali para pemimpin dengan keterampilan dan <i>tools coaching</i>. Creating capable leaders in developing their teams; Creating appropriate leadership styles to lead millennials; Equipping leaders with coaching skills and tools.

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
EMPLOYEE PROFILE AND COMPETENCY DEVELOPMENT

	Jumlah Batch <i>Number of Batch</i>	Jumlah Durasi Pelatihan <i>Total Training Hours</i>	Total Peserta <i>Number of Participants</i>	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Level Jabatan <i>Percentage of Employees who Have Attended Training for Each Position Level</i>
	5	10	<i>Batch 1 = 25</i> <i>Batch 2 = 38</i> <i>Batch 3 = 44</i> <i>Batch 4 = 34</i> <i>Batch 5 = 33</i>	<i>Batch 1 = 89%</i> <i>Batch 2 = 83%</i> <i>Batch 3 = 96%</i> <i>Batch 4 = 83%</i> <i>Batch 5 = 91%</i>
	3	9	<i>Batch 1 = 8</i> <i>Batch 2 = 11</i> <i>Batch 3 = 10</i>	<i>Batch 1 = 82%</i> <i>Batch 2 = 85%</i> <i>Batch 3 = 83%</i>
	2	4	<i>Batch 1 = 10</i> <i>Batch 2 = 7</i>	<i>Batch 1 = 95%</i> <i>Batch 2 = 64%</i>



Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019

Table of Competency Development by Position Level in 2019

No	Jenis Pelatihan Type of Training	Level Jabatan Position Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Purpose
	<i>Managerial</i>	BOD-2	EDP I- <i>Managing The Business</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan Pemangku Kepentingan; • Mampu mengevaluasi permasalahan di tingkat perusahaan yang berimplikasi strategis bagi Perseroan; • Mampu mengevaluasi implementasi keputusan di tingkat perusahaan yang diambil telah dijalankan sebagaimana mestinya; • Mampu mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu utama untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan; • Mampu membuat perencanaan dalam memanfaatkan peluang pasar yang strategis. <ul style="list-style-type: none"> • Able to provide recommendations for improving the quality of service to customers and stakeholders; • Able to evaluate problems at corporate level that have strategic implications for the company; • Able to evaluate the implementation of decisions at corporate level that have been taken accordingly; • Able to identify and prioritize key issues to facilitate the decision-making process at corporate level; • Able to make plans in utilizing strategic market opportunities.
3	<i>Pre Managerial</i>	BOD-3	<i>Character Building Pre MDP</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan peluang yang ada; • Meningkatkan kemampuan dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang dihadapi; • Meningkatkan kemampuan dalam penggunaan waktu yang efektif, pengambilan keputusan dan sumber daya yang efisien; • Meningkatkan efektifitas kerjasama dan komunikasi antar unit di tingkat Kantor Pusat, Cabang dan Entitas Anak. <ul style="list-style-type: none"> • Able to optimize available resources and opportunities; • Improve the ability to deal with obstacles and challenges faced; • Improve the ability to use effective time, decision-making and efficient resources; • Improve the effectiveness of cooperation and communication between units at Head Office, Branches and Subsidiary level.

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
EMPLOYEE PROFILE AND COMPETENCY DEVELOPMENT

Jumlah Batch <i>Number of Batch</i>	Jumlah Durasi Pelatihan <i>Total Training Hours</i>	Total Peserta <i>Number of Participants</i>	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Level Jabatan <i>Percentage of Employees who Have Attended Training for Each Position Level</i>
2	6	Batch 1 = 10 Batch 2 = 10	Batch 1 = 83% Batch 2 = 87%
1	4	Batch 1 = 34	Batch 1 = 78%



Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019

Table of Competency Development by Position Level in 2019

No	Jenis Pelatihan Type of Training	Level Jabatan Position Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Purpose
	<i>Pre Managerial</i>	BOD-3	<i>MDP I-Personal Aspect & Interpersonal Skill</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengevaluasi realisasi pencapaian kinerja di unit kerjanya serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dalam penetapan standar kinerja di unit kerjanya sesuai dengan standar internasional; • Mampu mengembangkan dan atau menghasilkan program kerja baru untuk meningkatkan efektivitas sistem, proses, dan sumber daya serta memastikan pencapaiannya; • Mampu mengevaluasi dan memastikan kebijakan dan prosedur Perseroan sesuai dengan regulasi pemerintah; • Mampu mengembangkan hubungan kerja secara berkelanjutan untuk membangun kepercayaan dengan pihak internal dan atau eksternal dalam mencapai tujuan bersama. <ul style="list-style-type: none"> • Able to evaluate the realization of performance achievements in his/her work unit and provide recommendations to improve effectiveness in setting performance standards in his/her work unit in accordance with international standards; • Able to develop and or produce new work programs to improve the effectiveness of systems, processes and resources and ensure their achievement; • Able to evaluate and ensure company policies and procedures comply with government regulations; • Able to develop work relationships on an ongoing basis to build trust with internal and/or external parties in achieving common goals.
	<i>Pre Managerial</i>	BOD-3	<i>MDP I-Managing The Business</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan Pemangku Kepentingan; • Mampu mengevaluasi proses dan prosedur pelayanan pelanggan internal maupun eksternal; • Mampu mengevaluasi permasalahan di tingkat perusahaan yang berimplikasi strategis bagi Perseroan; • Mampu mengevaluasi implementasi keputusan di tingkat perusahaan yang diambil telah dijalankan sebagaimana mestinya; • Mampu melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi terhadap penciptaan peluang pasar dan pencapaian sasaran Perseroan; • Mampu membuat perencanaan dalam memanfaatkan peluang pasar yang strategis. <ul style="list-style-type: none"> • Able to provide recommendations for improving the quality of service to customers and stakeholders; • Able to evaluate internal and external customer service processes and procedures; • Able to evaluate problems at corporate level that have strategic implications for the company; • Able to evaluate the implementation of decisions at corporate level that have been taken accordingly; • Able to evaluate and provide recommendations for the creation of market opportunities and the achievement of company targets; • Able to make plans in utilizing strategic market opportunities.

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
EMPLOYEE PROFILE AND COMPETENCY DEVELOPMENT

	Jumlah Batch <i>Number of Batch</i>	Jumlah Durasi Pelatihan <i>Total Training Hours</i>	Total Peserta <i>Number of Participants</i>	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Level Jabatan <i>Percentage of Employees who Have Attended Training for Each Position Level</i>
	4	12	<i>Batch 1 = 14</i> <i>Batch 2 = 19</i> <i>Batch 3 = 13</i> <i>Batch 4 = 17</i>	<i>Batch 1 = 82%</i> <i>Batch 2 = 100%</i> <i>Batch 3 = 87%</i> <i>Batch 4 = 100%</i>
	4	12	<i>Batch 1 = 13</i> <i>Batch 2 = 17</i> <i>Batch 3 = 16</i> <i>Batch 4 = 18</i>	<i>Batch 1 = 96%</i> <i>Batch 2 = 88%</i> <i>Batch 3 = 88%</i> <i>Batch 4 = 98%</i>



Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019

Table of Competency Development by Position Level in 2019

No	Jenis Pelatihan Type of Training	Level Jabatan Position Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Purpose
4	Officer	BOD-4	Character Building ODP	<ul style="list-style-type: none"> Mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan peluang yang ada; Meningkatkan kemampuan dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang dihadapi; Meningkatkan kemampuan dalam penggunaan waktu yang efektif, pengambilan keputusan dan sumber daya yang efisien; Meningkatkan efektifitas kerjasama dan komunikasi antar unit di tingkat Kantor Pusat, Cabang dan Entitas Anak. <ul style="list-style-type: none"> Able to optimize available resources and opportunities; Improve the ability to deal with obstacles and challenges faced; Improve the ability to use effective time, decision-making and efficient resources; Improve the effectiveness of cooperation and communication between units at Head Office, Branches and Subsidiary level.
	Officer	BOD-4	Pre MDP I-Personal Aspect & Interpersonal Skill	<ul style="list-style-type: none"> Mampu mengevaluasi realisasi pencapaian kinerja di unit kerjanya serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dalam penetapan standar kinerja di unit kerjanya sesuai dengan standar internasional; Mampu mengelola potensi, kepentingan dan minat individu dan kelompok yang beragam untuk mencapai tujuan bersama; Mampu mengembangkan hubungan kerja secara berkelanjutan untuk membangun kepercayaan dengan pihak internal dan atau eksternal dalam mencapai tujuan bersama. <ul style="list-style-type: none"> Able to evaluate the realization of performance achievements in his/her work unit and provide recommendations to improve effectiveness in setting performance standards in his/her work unit in accordance with international standards; Able to manage the potential, stake and interests of diverse individuals and groups to achieve common goals; Able to develop work relationships on an ongoing basis to build trust with internal and/or external parties in achieving common goals.
			Pre MDP I-Leadership Skill Seri Coaching	<ul style="list-style-type: none"> Mampu mengevaluasi realisasi pencapaian kinerja di unit kerjanya serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dalam penetapan standar kinerja di unit kerjanya sesuai dengan standar internasional; Mampu mengelola potensi, kepentingan dan minat individu dan kelompok yang beragam untuk mencapai tujuan bersama; Mampu mengembangkan hubungan kerja secara berkelanjutan untuk membangun kepercayaan dengan pihak internal dan atau eksternal dalam mencapai tujuan bersama. <ul style="list-style-type: none"> Able to evaluate the realization of performance achievements in his/her work unit and provide recommendations to improve effectiveness in setting performance standards in his/her work unit in accordance with international standards; Able to manage the potential, stake and interests of diverse individuals and groups to achieve common goals; Able to develop work relationships on an ongoing basis to build trust with internal and/or external parties in achieving common goals.

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
EMPLOYEE PROFILE AND COMPETENCY DEVELOPMENT

	Jumlah Batch <i>Number of Batch</i>	Jumlah Durasi Pelatihan <i>Total Training Hours</i>	Total Peserta <i>Number of Participants</i>	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Level Jabatan <i>Percentage of Employees who Have Attended Training for Each Position Level</i>
	2	6	Batch 1 = 45 Batch 2 = 48	Batch 1 = 89% Batch 2 = 89%
	2	6	Batch 1 = 23 Batch 2 = 22	Batch 1 = 100% Batch 2 = 100%
	2	4	Batch 1 = 22 Batch 2 = 17	Batch 1 = 98% Batch 2 = 85%



Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019

Table of Competency Development by Position Level in 2019

No	Jenis Pelatihan Type of Training	Level Jabatan Position Level	Program Pelatihan Training Program	Tujuan Pelatihan Training Purpose
	Officer	BOD-4	Pengembangan Kepemimpinan IPC Muda Young IPC Leadership Development	<ul style="list-style-type: none"> Mempersiapkan IPC <i>millennials</i> dalam menghadapi tantangan di era VUCA; Mampu menanamkan nilai dan budaya organisasi sebagai bentuk etika, serta meningkatkan komitmen setiap peserta untuk menerapkan di dalam lingkungan pekerjaan; Mampu memahami <i>mindset</i> dan organisasi yang benar dalam bekerja bagi generasi <i>millennials</i>. Prepare IPC millennials in facing challenges in VUCA era; Able to instill organizational values and culture as an ethical form, and increase the commitment of each participant to apply them in work environment; Able to understand the accurate mindset and organization in working for millennials.
5	Operational	BOD-5	Character Building OPDP	<ul style="list-style-type: none"> Mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan peluang yang ada; Meningkatkan kemampuan dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang dihadapi; Meningkatkan kemampuan dalam penggunaan waktu yang efektif, pengambilan keputusan dan sumber daya yang efisien; Meningkatkan efektifitas kerjasama dan komunikasi antar unit di tingkat Kantor Pusat, Cabang dan Entitas Anak. Able to optimize available resources and opportunities; Improve the ability to deal with obstacles and challenges faced; Improve the ability to use effective time, decision-making and efficient resources; Improve the effectiveness of cooperation and communication between units at Head Office, Branches and Subsidiary level.
	Operational	BOD-5	ODP I-Personal Aspect & Interpersonal Skill	<ul style="list-style-type: none"> Mampu mengevaluasi realisasi pencapaian kerja di unit kerjanya serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dalam penetapan standar kinerja di unit kerjanya sesuai dengan standar internasional; Mampu mengelola potensi, kepentingan dan minat individu dan kelompok yang beragam untuk mencapai tujuan bersama; Mampu mengembangkan hubungan kerja secara berkelanjutan untuk membangun kepercayaan dengan pihak internal dan/atau eksternal dalam mencapai tujuan bersama Able to evaluate the realization of performance achievements in his/her work unit and provide recommendations to improve effectiveness in setting performance standards in his/her work unit in accordance with international standards; Able to manage the potential, stake and interests of diverse individuals and groups to achieve common goals; Able to develop work relationships on an ongoing basis to build trust with internal and/or external parties in achieving common goals.

Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Jenis Pelatihan

Percentage of Employees who Have Attended Training for Each Type of Training

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
EMPLOYEE PROFILE AND COMPETENCY DEVELOPMENT

	Jumlah Batch <i>Number of Batch</i>	Jumlah Durasi Pelatihan <i>Total Training Hours</i>	Total Peserta <i>Number of Participants</i>	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan untuk Setiap Level Jabatan <i>Percentage of Employees who Have Attended Training for Each Position Level</i>
	3	6	Batch 1 = 21 Batch 2 = 23 Batch 3 = 17	Batch 1 = 87% Batch 2 = 98% Batch 3 = 69%
	1	3	Batch 1 = 49	Batch 1 = 94%
	2	6	Batch 1 = 25 Batch 2 = 27	Batch 1 = 100% Batch 2 = 96%



BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

COMPETENCY DEVELOPMENT COSTS

Secara keseluruhan realisasi anggaran pelatihan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Overall the realization of training budget for 2019 is as follows

Biaya Pengembangan Kompetensi (Rp) Competency Development Cost (in RP)		Pertumbuhan Growth	
2019	2018	Rupiah	%
51.869.836.487	24.843.949.074	27.025.887.413	108.78

Adapun realisasi biaya untuk Program Pengembangan Kompetensi berdasarkan Level Jabatan adalah sebesar:

The cost realization for the Competency Development Program by Position Level is

No	Level Jabatan Position Level	Program Pelatihan Training Program	Biaya Cost
1	BOD-1	ASEAN Global Leadership Program (AGLP)	521.676.000
		Executive Engagement Direksi Anper Executive Engagement Subsidiary's Board of Directors	326.106.000
		Executive Presence (BOD-1)	367.866.000
		EDP II-Seri Building Business Partnership	120.900.000
		Jumlah Total	1.336.548.000
2	BOD-2	Character Building MDP	1.798.800.000
		Executive Presence (BOD-2)	233.580.000
		MDP II-Seri Building Business Partnership	225.680.000
		EDP I-Personal Aspect & Interpersonal Skill	250.400.000
		EDP I-Leadership Skill Seri Coaching	314.736.000
		EDP I-Managing The Business	332.800.000
Jumlah Total	3.155.996.000		
3	BOD-3	Character Building Pre MDP	680.000.000
		MDP I-Personal Aspect & Interpersonal Skill	458.000.000
		MDP I-Managing The Business	475.400.000
Jumlah Total	1.613.400.000		
4	BOD-4	Character Building ODP	1.338.750.000
		Pre MDP I-Personal Aspect & Interpersonal Skill	292.400.000
		Pre MDP I-Leadership Skill Seri Coaching	105.600.000
		Pengembangan Kepemimpinan IPC Muda Young IPC Leadership Development	543.651.000
		Jumlah Total	2.280.401.000
5	BOD-5	Character Building OPDP	621.000.000
		ODP I-Personal Aspect & Interpersonal Skill	324.500.000
		Jumlah Total	945.500.000

EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

1. Evaluasi pelatihan telah dilaksanakan terhadap reaksi peserta setelah mengikuti pelatihan (evaluasi level 1) maupun hasil pembelajaran peserta (evaluasi level 2). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program pelatihan. Adapun untuk skala evaluasi hasil pembelajaran adalah sebagai berikut:

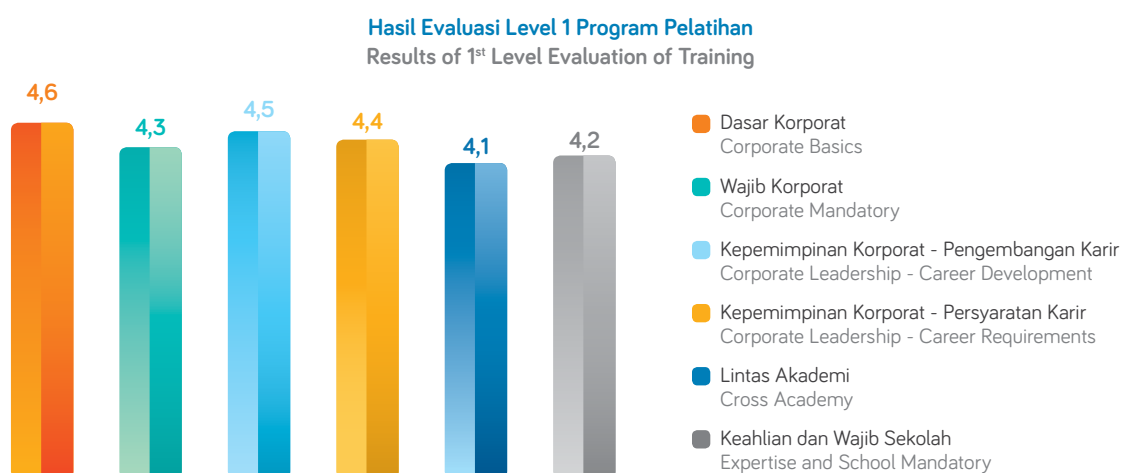
EVALUATION OF COMPETENCY DEVELOPMENT IMPLEMENTATION

1. Training evaluation has been carried out on the participants' reaction after attending the training (1st level evaluation) and the participants' learning outcome (2nd level evaluation). The evaluation aims to improve the quality of training programs implementation. As for the evaluation scale of learning outcomes are as follows:

Kategori Hasil Pembelajaran Category of Learning Outcome			
No	Skala Evaluasi Level 1 1 st Level Evaluation Scale	Skala Evaluasi Level 2 2 nd Level Evaluation Scale	Kategori Category
1.	0 – 1	0 - 20	Buruk Sekali Very Bad
2.	1,1 – 2	21 - 40	Buruk Bad
3.	2,2 – 3	41 - 60	Rata- Rata Average
4.	3,1 – 4	61 - 80	Baik Good

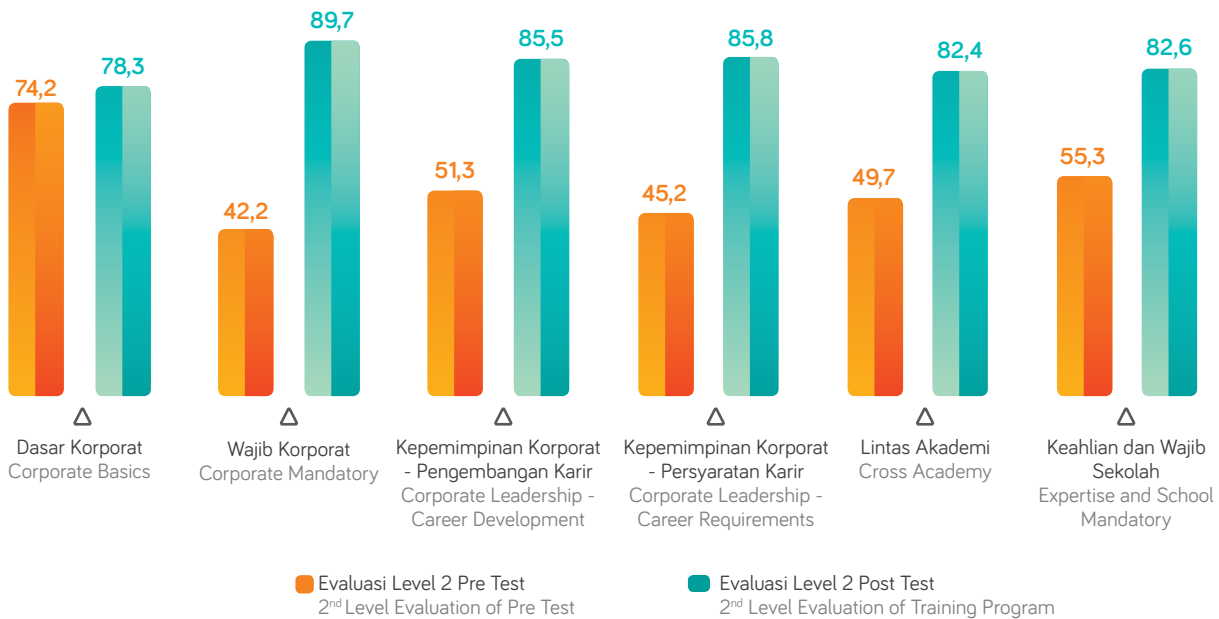
Pada evaluasi level 1 yaitu penilaian terkait reaksi peserta terhadap pelatihan *inhouse* selama tahun 2019 mendapatkan rata-rata nilai 4,4 dari skala 0-4 atau dikategorikan Baik.

In the evaluation level 1, the assessment is related to the reaction of participants to inhouse training during 2019, and obtained an average score of 4.4 from a scale of 0-4 or fell into Good category.





Hasil Evaluasi Level 2 Program Pelatihan
Results of 2nd Level Evaluation of Training Program



Sesuai pada diagram di atas, evaluasi level 2 yaitu hasil pembelajaran peserta pada saat mengikuti program pelatihan rata-rata mencapai 52,9 untuk *pre test* dan 84 dari skala 0-100 untuk *post test* atau dikategorikan Baik Sekali.

In accordance with the diagram above regarding the 2nd level evaluation, namely the learning outcomes of participants when participating in the training program obtained the average score of 52.9 for pre-test and 84 for post-test of the scale of 0-110 or fell into Very Good category.

PERNYATAAN TENTANG KESETARAAN

IPC memiliki konsep kesetaraan untuk pekerjaannya yang ditunjukkan dalam SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dimana pekerja adalah seluruh pekerja IPC, tanpa dibedakan berdasarkan SARA dan gender. Pengembangan karier maupun pelatihan di IPC juga tidak dibedakan berdasarkan SARA dan gender. Pengembangan karier telah diatur dalam SK Pengembangan SDM dan Pola Karir. Untuk Pengembangan SDM, syarat pengembangan pekerja didasarkan pada hasil *performance* dan *assessment*. Sedangkan untuk karier pekerja didasarkan pada hasil performansi, talenta, dan juga minat dari pekerja.

STATEMENT OF EQUALITY

IPC has the concept of equality for its employees which is shown in the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) where employees are all IPC employees, without differentiation based on ethnicity, religion, race, and gender. Career development and training in IPC are also not differentiated based on ethnicity, religion, race, and gender. The career development has been regulated in the Decree on Human Capital Development and Career Patterns. For Human Capital Development, employee's development requirements are based on the results of performance and assessment. As for the employee's career are based on the results of performance, talent, and also his/her interests.

Untuk informasi lebih lengkap terkait Pembahasan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dalam Bab Fungsi Pendukung Bisnis bagian Sumber Daya Manusia dalam Laporan Tahunan ini.

More complete information related to the Discussion of Human Capital can be seen in the Business Supporting chapter of the Human Capital section in this Annual Report.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDER COMPOSITION

Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Number of issued and fully paid shares</i>	Kepemilikan Saham <i>Shareholding</i>	Total (Rp) <i>Total (Rp)</i>
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	1.444.029 lembar 1,444,029 shares	100,00%	1.444.029.000.000

Bahwa Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia merupakan satu-satunya pemilik dan pemegang saham tunggal yang berhak atas 1.444.029 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp1.444.029.000.000 dalam perseroan tersebut yang merupakan keseluruhan saham yang dikeluarkan dan ditempatkan serta disetor penuh dalam perseroan hingga saat ini.

The Republic of Indonesia represented by the Minister of State-Owned Enterprises is the only owner and sole shareholder entitled to 1,444,029 shares with a nominal value of Rp1,000,000.00, or Rp1,444,029,000,000 in the company, which constitutes the total shares issued and placed and fully paid in the company to date.

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

20 LARGEST SHAREHOLDERS COMPOSITION

Sampai dengan 31 Desember 2019, IPC merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi 20 (dua puluh) pemegang saham terbesar.

As of December 31, 2019, IPC is a State-Owned Enterprise whose shares are 100% owned by the Republic of Indonesia Government. Thus, there is no information regarding the 20 (twenty) largest shareholders composition.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM 5% ATAU LEBIH

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS WITH 5% OR MORE

Sampai dengan 31 Desember 2019, IPC merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih Perseroan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

As of December 31, 2019, IPC is a State-Owned Enterprise whose shares are 100% owned by the Republic of Indonesia Government. Information regarding shareholders with 5% or more composition has been explained above at the description on shareholders composition.

KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT KURANG DARI 5%

GROUP OF PUBLIC SHAREHOLDERS WITH LESS THAN 5%

Sampai dengan 31 Desember 2019, IPC merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih Perseroan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

As of December 31, 2019, IPC is a State-Owned Enterprise whose shares are 100% owned by the Republic of Indonesia Government. Information regarding composition of shareholders with 5% or more has been explained above at the description on shareholders composition.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP

Direksi maupun Dewan Komisaris IPC tidak mempunyai kepemilikan saham atas IPC. Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%. Dengan demikian, IPC tidak menyajikan rincian anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang memiliki saham langsung maupun tidak langsung.

IPC Board of Directors and Board of Commissioners do not own shares in IPC. 100% of the shares are owned by the Republic of Indonesia Government. As such, IPC does not present information regarding Board of Directors or Board of Commissioners members who own direct or indirect shares.



DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI

LIST OF SUBSIDIARIES AND/OR ASSOCIATES

ENTITAS ANAK

SUBSIDIARIES

Nama Name	Kegiatan Usaha Business	Kepemilikan Saham Share Ownership	Tahun Pendirian Year of Establishment	Status Operasi Operation State	Jumlah Aset Total Assets (Rp)	Domisili Domicile
PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP)	Terminal <i>Multipurpose Non</i> Peti Kemas dan Konvensional Multipurpose Non-container Terminal and Conventional	99,99%	2013	Beroperasi Operating	1.715.524.349.997	Jakarta
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PT PPI)	Pengembangan Pelabuhan Port Development	99,99%	2012	Beroperasi Operating	1.794.427.208.698	Jakarta
PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI)	Jasa Logistik Logistic Service	99,00%	2002	Beroperasi Operating	884.682.897.342	Jakarta
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (PT JAI Tbk)	Penyedia Jasa Transportasi Laut Sea Transportation Service	76,89%	2013	Beroperasi Operating	1.277.801.802.446	Jakarta
PT Pengerukan Indonesia (PT Rukindo)	Pengerukan Alur Dredging Grooves	99,91%	1991	Beroperasi Operating	365.147.021.867	Jakarta
PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP)	Rumah Sakit Hospital	99,84%	1999	Beroperasi Operating	575.930.021.301	Jakarta
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (PT IKT Tbk)	Terminal Kendaraan Vehicle terminal	71,28%	2012	Beroperasi Operating	1.262.080.951.045	Jakarta
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (PT ILCS)	Sistem Informasi Information System	51,00%	2012	Beroperasi Operating	160.100.917.645	Jakarta
PT Electronic Data Interchange Indonesia (PT EDII)	Sistem Informasi Information System	51,00%	1995	Beroperasi Operating	179.282.585.916	Jakarta
PT Energi Pelabuhan Indonesia (PT EPI)	Penyedia Energi Listrik Supplier of Electrical Power	55,00%	2012	Beroperasi Operating	145.180.374.474	Jakarta
PT IPC Terminal Peti Kemas (PT IPC TPK)	Terminal Peti Kemas dan Konvensional Container Terminal and Conventional	99,00%	2013	Beroperasi Operating	1.099.123.569.646	Jakarta
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (PT JPPI)	Jasa Peralatan Pelabuhan Port Equipment Services	99,00%	2012	Beroperasi Operating	157.272.077.231	Jakarta
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI)	Jasa Pelatihan dan Pendidikan Maritim dan Logistik Training Services and Maritime Education and Logistics	99,00%	2013	Beroperasi Operating	71.354.013.647	Jakarta
PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII)	Investasi pasar modal dan Konsultan bisnis Capital market investment and business consultants	99,00%	2017	Beroperasi Operating	1.036.864.363.103	Jakarta

Penjelasan singkat mengenai masing-masing Entitas Anak diuraikan sebagai berikut:

A brief description of each of the Subsidiaries is described as follows:

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PT PTP MULTIPURPOSE)

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PT PTP MULTIPURPOSE)

PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) didirikan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

PT Tanjung Priok Port (PTP) is a subsidiary established on June 10, 2013 through the Certificate of Establishment no. 27 dated June 10, 2013 of Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. and has been legalized by the Ministry of Law and Human Rights No.AHU-42024.AH.01.01. Year 2013 dated August 1, 2013.

Berdasarkan perjanjian No. HK.566/20/13/PI/II-13 tanggal 27 Desember 2013, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Pelindo II) dan PTP mengadakan Perjanjian Serah Operasi Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan serta Penggunaan Lahan Pelabuhan berdasarkan Hak Pengelolaan (HPL) Pelindo II pada Cabang Tanjung Priok. Berdasarkan perjanjian tersebut, Pelindo II setuju untuk memberikan hak kepada PTP untuk mengoperasikan fasilitas pelabuhan dan fasilitas penunjang pelabuhan serta penggunaan lahan pelabuhan yang merupakan aset milik Pelindo II untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perjanjian tersebut telah diperpanjang beberapa kali. Terakhir dengan *addendum* II No.KS.03/27/12/3/DI.1/GM/C.Tpk-17 dan No. HK.566/27/12/1/PTP-17 tanggal 27 Desember 2017 dimana PTP dan Pelindo II sepakat untuk menambah dan mengurangi beberapa hal, diantaranya tidak lagi mengadakan kerjasama serah operasi Hak Pengelolaan (HPL) milik Pelindo II Cabang Tanjung Priok.

Based on agreement No. HK.566 / 20/13 / PI / II-13 dated December 27, 2013, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Pelindo II) and PTP entered into an Agreement on Handover of Port Facility Operations and Port Support Facilities and Port Land Use based on Pelindo II Management Rights (HPL) at Tanjung Priok Branch. Based on the agreement, Pelindo II agreed to grant PTP the right to operate port facilities and port support facilities as well as port land use which are assets owned by Pelindo II for the implementation of port services and other services based on the terms and conditions as stipulated in agreement. The agreement has been extended several times. Latest with addendum II No.KS.03/27/12/3/DI.1/GM/C.Tpk-17 and No. HK.566/27/12/1/PTP-17 dated December 27, 2017 where PTP and Pelindo II agreed to add and reduce a number of things, including no longer cooperating to hand over the management right operations (HPL) owned by Pelindo II Tanjung Priok Branch.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 30 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia (MTI) mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam PTP kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) dengan harga pembelian sebesar Rp16.549.000.

Based on the Share Buy and Sell Certificate No. 30 dated December 28, 2018 from Silfia, S.H., substitute notary of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia (MTI) transferred and surrendered all of its shares, namely as many as 250 shares in PTP to PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) with a purchase price of Rp16,549,000.

Modal dasar PTP sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

PTP's authorized capital of Rp100,000,000 consists of 100,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

- IPC memiliki 99,00% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000;
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

- IPC has 99.00% or 24,750 shares with a value of Rp24,750,000;
- PII has 1.00% or as many as 250 shares with a value of Rp250,000.



Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pelindo II tanggal 22 Desember 2017, sebagaimana telah diubah pada tanggal 18 Mei 2018, diatur mengenai zonasi bisnis PTP di cabang pelabuhan Pelindo II, termasuk kegiatan pengoperasian dan pola kerjasama serta pembagiannya.

Pada tanggal 16 Juli 2018, PTP melakukan *spin-off* operasi petikemasnya di pelabuhan Tanjung Priok kepada PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK), pihak berelasi. Pada tanggal 1 September 2018, PTP melakukan kerjasama dengan Pelindo II cabang Banten terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas. Saat ini, PTP bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair, bunkering serta jasa pergudangan dan lapangan.

Bidang usaha Perusahaan terkait kepelabuhanan sesuai Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, terdiri dari 2 (dua) kelompok usaha yaitu:

1. Penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
2. Penyediaan dan pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan.

Sementara itu, untuk kelompok jasa kepelabuhanan meliputi penyediaan dan pelayanan barang terdiri dari:

Pelayanan Barang

Merupakan pelayanan bongkar muat dari kapal ke lapangan/gudang atau sebaliknya yakni antara lain:

1. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas;
2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; dan
3. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro.

Pelayanan Lain-Lain

Meliputi pelayanan yang mendukung aktivitas kepelabuhanan antara lain:

1. Penyewaan alat-alat pelabuhan; dan
2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa *Stuffing*.

Based on the Decree of Board of Directors of Pelindo II dated December 22, 2017, as amended on May 18, 2018, it is regulated regarding the PTP business zoning in Pelindo II port branch, including operating activities and cooperation patterns and their distribution.

On July 16, 2018, PTP carried out a spin-off its container operations at Tanjung Priok port to PT IPC Container Terminal (IPC TPK), a related party. On September 1, 2018, PTP cooperated with Banten branch of Pelindo II regarding the operation and management of non-container terminal services. At present, PTP is engaged in container terminal services, dry bulk services, liquid bulk, bunkering and warehousing and field services.

The business sector of the Company is related to port according to Law No. 17 of 2008 concerning Shipping, consisting of 2 (two) business groups, namely:

1. Provision and port services; and
2. Provision and port-related services.

Meanwhile, for port service groups, the provision and service of goods consists of:

Goods Services

Is a loading and unloading service from the ship to the field/warehouse or vice versa namely:

1. Provision and/or dock services for carrying out loading and unloading activities of goods and containers;
2. Provision of and/or warehouse services and stockpiling of goods, loading and unloading equipment, and port equipment; and
3. Provision and/or service of container, liquid bulk, dry bulk and Ro-Ro terminals;

Other Services

Includes services that support port activities including:

1. Rental of port equipment; and
2. Provision and/or *Stuffing* services.

Adapun visi dan Misi PT Pelabuhan Tanjung Priok yakni:

Vision and mission of PT Tanjung Priok Port are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
Menjadi Operator Terminal Kelas Dunia yang Unggul dalam Operasional dan Pelayanan.	Sebagai operator terminal yang memaksimalkan nilai tambah bagi seluruh Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional. Dengan penjelasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan, membangun dan mengoperasikan pelayanan terminal dan logistik secara terintegrasi, berkualitas dan andal untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan mitra. Menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, berintegritas, dan adil; • Memaksimalkan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham dan meningkatkan kesehatan perusahaan secara profesional dengan memenuhi aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik; • Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan, mewujudkan insan perusahaan yang fokus pada pelanggan, berintegritas, bangga kepada perusahaan dan budayanya, serta memberikan kesejahteraan dan kepuasan kepada karyawan; dan • Menjamin kelancaran dan keamanan arus barang untuk mewujudkan efisiensi biaya logistik dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
To become a World-Class Terminal Operator that excels in Operations and Services	As a terminal operator that maximizes added value for all Stakeholders continuously in order to improve the national economy. With explanation as follows: <ul style="list-style-type: none"> • Providing, building and operating terminal and logistics services in an integrated, quality and reliable manner to meet customer and partner satisfaction. Organizing corporate governance that is transparent, accountable, responsible, integrity and fair; • Maximizing company value for Shareholders and improving the health of the company in a professional manner by fulfilling aspects of good corporate governance; • Creating a comfortable work environment for employees, creating company people who focus on customers, integrity, pride in the company and culture, and provide welfare and satisfaction to employees; and • Ensuring the smooth and safe flow of goods to realize logistical cost efficiency to spur national economic growth that has an impact on improving people's welfare

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT PTP Nomor: SK.03/19/12/9/MTA/UT/PI.II-19 dan Nomor: SK-055/PII-SK.D1/XII/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT PTP, serta Keputusan Para Pemegang Saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT PTP Nomor: SK.03/18/12/3/MTA/UT/PI.II-19 dan Nomor: SK-051/PII-SK.D1/XII/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT PTP, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT PTP adalah sebagai berikut:

Based on PT PTP Shareholders' Decision without going through General Meeting of Shareholders Number: SK.03/30/8/1/PBI/UT/PI.II-18 and Number: HK.476/30/8/1/MTI-2018 concerning Determination of PTP Board of Directors' Members, and PT PTP Shareholders Decision without going through General Meeting of Shareholders Number: SK.03/25/10/1/PBI/UT/PI.II-18 and Number: HK.476/25/10/1/MTI-2018 concerning Determination of Changes to PT PTP Board of Commissioners, the composition of PT PTP Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>
Komisaris Utama President Commissioner : Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director : Imanuddin
Komisaris Commissioner : Sabri Saiman	Direktur Operasi dan Teknik (Plt) Acting Operations and Technical Director : Rino Wisnu Putro
Komisaris Commissioner : Nugroho Indrio	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HC Director : Salusra Wijaya
Komisaris Commissioner : Heru D. Adhiningrat	Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Commercial and Business Development Director : Rati Farini



PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PT PPI)

PPI didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57925.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 13 September 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp900.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp225.000.000 yang diambil bagian oleh IPC dan PT Multi Terminal Indonesia (MTI) masing-masing sebesar Rp224.750.000 dan Rp250.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0230843 tanggal 9 Agustus 2018.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 25.000 saham yang ada dalam PPI kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) dengan harga pembelian sebesar Rp342.000. Modal dasar PPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC memiliki 99,89% atau sebanyak 22.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp224.750.000;
- PII memiliki 0,11% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, PPI bergerak dalam bidang pengembangan pelabuhan.

Adapun visi dan Misi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia yakni:

Visi Perusahaan Company Vision

Menjadi perusahaan Indonesia terkemuka, memberikan solusi terpadu untuk setiap aspek di bidang Infrastruktur Kepelabuhanan, antara lain: terminal, dermaga, lapangan penumpukan, pergudangan dan fasilitas lainnya. Pengembangan kepelabuhanan, yang antara lain: sistem informasi, sistem pengelolaan, rekonfigurasi dan sistem lainnya.

To become the leading Indonesian company, that provides integrated solutions for every aspect in the area of Port Infrastructure, including: terminals, docks, stacking fields, warehousing, and other facilities. Development of ports, among others: information systems, management systems, reconfiguration, and other systems.

Misi Perusahaan Company Mission

- Menjadi perusahaan pengembangan infrastruktur kepelabuhanan tingkat dunia;
- Menjadi perusahaan terbesar dalam bidang pengembangan infrastruktur kepelabuhanan;
- Memberikan nilai tinggi dan berkelanjutan bagi setiap Pemangku Kepentingan dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan;
- Memberikan keuntungan bagi Pemegang Saham dan Memberikan kontribusi bagi pembangunan di Indonesia.

- Become a world-class port infrastructure development company;
- Become the largest company in the field of port infrastructure development;
- Provide high value and sustainability for each Stakeholder & deliver customer satisfaction;
- Provide benefits to shareholders & contribute to the development of Indonesia.

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PT PPI)

PPI was established based on Deed No. 9 dated November 5, 2012 from Yulianti Irawati, S.H., a substitute Notary of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-57925.AH.01.01 of 2012 dated November 13, 2012.

Based on Deed No. 11 dated September 13, 2018 from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, M.Kn., a notary in Jakarta, the Company increased its authorized capital to Rp900,000,000 and its issued and fully paid capital to Rp225,000,000, taken part by IPC and PT Multi Terminal Indonesia (MTI) respectively Rp224,750,000 and Rp250,000. This Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.03-0230843 on August 9, 2018.

Based on the Share Purchase Deed No. 38 dated December 28, 2018 from Silfia, S.H., a substitute notary of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transferred and handed over all of its 25,000 shares in PPI to PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) at a purchase price of Rp342,000. PPI's authorized capital in the amount of Rp100,000,000 consists of 10,000,000 shares with a nominal value of Rp 10,000 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC owns 99.89% or 22,475,000 shares with a value of Rp224,750,000;
- PII owns 0.11% or 25,000 shares with a value of Rp250,000.

At present, PPI is engaged in port development.

Vision and mission of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia are:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PPI No. 25 tanggal 26 September 2018, yang dibuat di hadapan Silfia, S.H., Notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PPI No. 14 tanggal 26 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT PPI adalah sebagai berikut:

Based on PT PPI Shareholders Decision Certificate No. 25 dated September 26, 2018, made before Silfia, S.H., a replacement Notary for Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and PT PPI Shareholders Decision Certificate No. 14 dated June 26, 2018, made before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The composition of PT PPI Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	: Ogi Rulino	Direktur Utama President Director	: Prastyo Wasis P
Komisaris Commissioner	: Apep Fajar Kurniawan	Direktur Teknik Technical Director	: Eko Aprilianto
Komisaris Commissioner	: Irsal Yunus	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Commercial and Business Development Director	: Kiki M Hikmat
Komisaris Commissioner	: Dachamer Munthe	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HC Director	: Henri Panggabean

PT MULTI TERMINAL INDONESIA (PT MTI)

MTI didirikan berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 tanggal 15 Februari 2002. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 April 2002.

Modal dasar MTI sebesar Rp28.500.000 terdiri dari 57.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 34.629.439 saham atau sebesar Rp17.314.719.

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah:

- IPC memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 34.283.150 saham dengan nilai nominal Rp17.141.575;
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 1,00% atau sebanyak 346.289 saham dengan nilai nominal Rp173.144.

Saat ini, MTI bergerak dalam bidang jasa logistik. Adapun visi dan Misi PT Multi Terminal Indonesia yakni:

PT MULTI TERMINAL INDONESIA (PT MTI)

MTI was established based on Notarial Certificate of Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 dated February 15, 2002. The Certificate obtained legal status based on the Ministry of Law and Human Rights Decree No. C-06123.HT.01.01.TH.2002 dated April 11, 2002.

MTI's authorized capital of Rp28,500,000 consists of 57,000,000 shares with a nominal value of Rp500 (full amount) per share. The total issued and fully paid capital is 34,629,439 shares or equal to Rp17,314,719.

The composition of the capital that has been placed and fully paid is:

- IPC has 99.00% or 34,283,150 shares with a nominal value of Rp17,141,575;
- The Maritime Employee Cooperative has 1.00% or as many as 346,289 shares with a nominal value of Rp173,144.

At present, MTI is engaged in logistics services. Vision and mission of PT Multi Terminal Indonesia are:



Visi Perusahaan Company Vision	Misi Perusahaan Company Mission
Menjadi perusahaan logistik nasional yang terpercaya.	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan visi <i>Shareholder</i> dalam menurunkan biaya logistik nasional; Memberikan nilai tambah bagi pelanggan dengan harga yang kompetitif serta pelayanan yang lebih cepat dan lebih aman; Menjadi tempat bekerja yang nyaman bagi seluruh Pekerja Perusahaan.
To become a trusted national logistics company.	<ul style="list-style-type: none"> Realize the Shareholders' vision in reducing the national logistics costs; Provide added value for the customers with competitive price and faster and more secure services; Become a favorable workplace for all employees of the company.

Berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 20 September 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT MTI sebagai berikut:

Based on Certificate Number 19 dated September 20, 2018, the composition of Board of Commissioners and Board of Directors of PT MTI is as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Komisaris Utama President Commissioner : Ogi Rulino	Direktur Utama President Director : Mulyadi
Komisaris Commissioner : Buyung Lalana	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HC Director : Miftahul Huda
Komisaris Commissioner : Ricky Handersend	Direktur Operasi Operations Director : David Pandapotan Sirait
Komisaris Commissioner : Solikhin	Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Commercial and Business Development Director : Andi Hamdani

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK (IPC MARINE/JAI)

JAI didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 10 Juli 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-47228.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 9 September 2013.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 14 tanggal 11 Oktober 2017 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham JAI menyetujui diantaranya:

- Perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham menjadi Rp100 (nilai penuh) per saham;
- Pengeluaran saham dari portepel JAI, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum selesai dilaksanakan atau sejumlah sebanyak-banyaknya 1.743.987.600 saham baru, yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham JAI;

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK (IPC MARINE/JAI)

JAI was established based on Certificate No. 24 dated July 10, 2013 from Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-47228.AH.01.01. Year 2013 dated September 9, 2013.

Based on the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 14 dated October 11, 2017 from Fathiah Helmi, S.H., a notary in Jakarta, JAI shareholders agreed on:

- Changes in the nominal value of shares from the initial Rp1,000,000 (full amount) per share to Rp100 (full amount) per share;
- Issuance of shares from JAI portfolio, which are as many as 30% of new shares issued from the portfolio of issued and paid-up capital after the public offering has been completed or a maximum of 1,743,987,600 new shares offered to the public through JAI's initial public offering;

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI
LIST OF SUBSIDIARIES AND/OR ASSOCIATES

- Meningkatkan modal dasar JAI dari sebesar Rp100.000.000 menjadi Rp1.500.000.000, yang terbagi atas 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp58.000.000 menjadi Rp406.930.460 dimana peningkatan sebesar Rp348.930.460 atau sebesar 3.489.304.600 saham dilakukan oleh Perusahaan melalui *inbreng* 21 unit kapal, terdiri dari 9 unit kapal pandu, 10 unit kapal tunda dan 2 unit kapal kepil. *Inbreng* kapal tersebut telah dilakukan penilaian oleh KJPP Toto Suharto & Rekan dengan hasil penilaian No. P.PP.17.00.0111 tanggal 9 Juni 2017.
- Increase JAI's authorized capital from Rp100,000,000 to Rp1,500,000,000, divided into 15,000,000,000 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share and increase issued and paid-up capital from Rp58,000,000 to Rp406,930,460 where the increase in the amount of Rp348,930,460 or 3,489,304,600 shares carried out by the Company through the *inbreng* of 21 units of vessels, consisting of 9 units of pilotage vessels, 10 units of tugboats and 2 units of mooring vessels. The *inbreng* of vessels was assessed by KJPP Toto Suharto & Rekan with the results of assessment No. P.PP.17.00.0111 dated June 9, 2017.

Modal dasar JAI sebesar Rp1.500.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC memiliki 76,89% atau sebanyak 4.063.504.600 saham dengan nilai sebesar Rp406.350.460;
- MTI memiliki 0,11% atau sebanyak 5.800.000 saham dengan nilai sebesar Rp580.000;
- PII memiliki 4,75% atau sebanyak 250.864.747 saham dengan nilai sebesar Rp25.086.474;
- Masyarakat memiliki 18,25% atau sebanyak 964.641.753 saham dengan nilai sebesar Rp96.464.175.
- JAI's authorized capital of Rp1,500,000,000 consists of 100,000 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:
 - IPC has 76.89% or 4,063,504,600 shares with a value of Rp406,350,460;
 - MTI has 0.11% or 5,800,000 shares with a value of Rp580,000;
 - PII have 4.75% or as many as 250,864,747 shares with a value of Rp25,086,474;
 - The community owns 18.25% or 964,641,753 shares with a value of Rp96,464,175.

Saat ini, JAI bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan kapal, penundaan kapal, angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan, penyewaan kapal dan keagenan kapal.

Currently, JAI's activities consist of pilotage and tug services, sea, river, lake and crossing transportation, ship rental and ship agencies.

Adapun visi dan Misi PT Jasa Armada Indonesia Tbk yakni:

Vision and mission of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, are as follows:

Visi Perusahaan Company Vision	Misi Perusahaan Company Mission
Menjadi terdepan dalam pengelolaan armada kapal sehingga dapat menjadi perusahaan penyedia kapal <i>Harbour Tug</i> pilihan utama di Indonesia memberikan pelayanan yang dapat diandalkan dan terkemuka di Asia.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran dan kontribusi ke <i>Shareholder</i> dengan memberikan pelayanan profesional dan <i>safety</i> kepada <i>customer</i>, dan penggunaan Teknologi Informasi untuk seluruh proses; • Memberikan pelayanan yang efisien dan bersahabat; • Mencapai standar profesionalisme tertinggi melalui integritas, kualitas, kerja sama dan efisiensi serta meyakinkan kesinambungan jangka panjang demi keuntungan semua pihak yang berkepentingan.
To be the leader in ship fleet management and to become the leading Harbor Tug provider company of choice from Indonesia that provides reliable and reputable services in Asia.	<ul style="list-style-type: none"> • To increase the role and contributions to Shareholders by providing excellent services to customers, and through the utilization of information technology in all processes; • To provide efficient and friendly service; • To achieve the highest standards of professionalism through integrity, quality, cooperation and efficiency, and to ensure long-term sustainability for the benefit of all interested parties.



Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Armada Indonesia Tbk pada tanggal 15 Oktober 2019, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT JAI Tbk adalah sebagai berikut:

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jasa Armada Indonesia Tbk on October 15, 2019, the composition of Board of Commissioners and Board of Directors of PT JAI Tbk is as follows:

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	: Dani Rusli Utama	Direktur Utama President Director	: Chiefy Adi K
Komisaris Commissioner	: Jimmy A.B. Nikijuluw	Direktur Komersial dan Operasi Operations and Commercial Director	: Herman Susilo
Komisaris Commissioner	: Albertus Sumardi	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HC Director	: Rizki Pribadi Hasan
		Direktur Armada dan Teknik Fleet and Technical Director	: Supardi

PT Pengerukan Indonesia (PT RUKINDO)

Rukindo didirikan dengan nama PT Pengerukan Indonesia (Persero) berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 Oktober 1991 dari Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H., yang kemudian diubah dengan Akta No. 51 tanggal 11 Februari 1992 dari Notaris Imas Fatimah, S.H. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Maret 1992.

Modal dasar Rukindo sebesar Rp2.000.000.000 terdiri dari 2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 47 tanggal 28 Desember 2017, para pemegang saham Perusahaan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula berjumlah Rp195.000.000 yang akan dikonversi menjadi modal pada akhir tahun ke-10 (sepuluh). Saham yang diterbitkan sejumlah 195.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 48 tanggal 28 Desember 2017 yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHUAH. 01.03-0007913 tanggal 10 Januari 2018, Perusahaan menerima 70.000 saham baru sebagai hasil konversi utang Rukindo kepada Perusahaan. Kepemilikan saham Perusahaan di Rukindo bertambah menjadi 99,93%. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC memiliki 99,91% atau sebanyak 806.622 saham dengan nilai sebesar Rp806.622.000;

PT Pengerukan Indonesia (PT RUKINDO)

Rukindo was established under the name PT Pengerukan Indonesia (Persero) based on Certificate No. 2 dated October 1, 1991 from Achmad Bajumi, S.H., replacement to Notary Imas Fatimah, S.H., which was later amended by Certificate No. 51 dated February 11, 1992 from Notary Imas Fatimah, S.H. This Certificate of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 dated March 3, 1992.

Rukindo's authorized capital of Rp2,000,000,000 consists of 2,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Based on Notarial Certificate Fathiah Helmi, S.H., No. 47 dated December 28, 2017, the Company's shareholders agreed to the following matters:

- The increase in issued and paid-up capital from the original amounted to Rp195,000,000 which will be converted into capital at the end of the 10th (tenth) year. Shares issued amounted to 195,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share.

Based on Notarial Certificate Fathiah Helmi, S.H., No. 48 dated 28 December 2017 which was approved by the Ministry of Law and Human Rights No AHUAH. 01.03-0007913 dated January 10, 2018, the Company received 70,000 new shares as a result of the conversion of Rukindo's debt to the Company. The Company's share ownership in Rukindo increased to 99.93%. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC has 99.91% or 806,622 shares with a value of Rp806,622,000;

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI
LIST OF SUBSIDIARIES AND/OR ASSOCIATES

- PPI memiliki 0,09% atau sebanyak 542 saham dengan nilai sebesar Rp542.000.

- PPI has 0.09% or 542 shares with a value of Rp542,000.

Saat ini, Rukindo terutama bergerak dalam bidang pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan, reklamasi dan transportasi hasil keruk.

At present, Rukindo is mainly engaged in the dredging of shipping lanes, port pools, reclamation and transportation of dredged products.

Adapun Visi dan Misi PT Pengerukan Indonesia yakni:

Vision and mission of PT Pengerukan Indonesia are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
Menjadi pemimpin dalam pasar pengerukan di Indonesia. To be the leader in the dredging market in Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pekerjaan pengerukan dan reklamasi sesuai dengan kebutuhan konsumen; Menyediakan jasa pemeliharaan kapal, konstruksi kapal dan jasa pendukung lainnya; Menyediakan jasa sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang reliabel; Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sehingga pekerja dapat mempunyai kinerja yang tinggi; Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi terkini yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan. <ul style="list-style-type: none"> Carry out dredging and reclamation work in accordance with consumers needs; Provide ship maintenance and ship construction services, as well as other support services; Provide services in accordance with reliable Standard Operating Procedure (SOP); Developing human capital competencies to generate workers with high performance; Develop and implement the latest integrated information technology as needed.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Rukindo No. 6 tanggal 6 April 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Rukindo No. 48 tanggal 28 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Dahlia, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Rukindo adalah sebagai berikut:

Based on PT Rukindo's Shareholders Decision Certificate No. 06 dated April 6, 2018, made before Notary Nanda Fauz Iwan, Bachelor, and PT Rukindo's Shareholders Decision Certificate No. 48 dated December 28, 2017, made before Notary Dahlia, the composition of PT Rukindo's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Dewan Komisaris <i>The board of Commissioners</i>	Direksi <i>The Directors</i>
Komisaris Utama President Commissioner : Prasetyadi	Direktur Utama President Director : Wahyu Hardiyanto
Komisaris Commissioner : Bambang S Ervan	Direktur Keuangan dan SDM Finance & HC Director : Indra Sigit S
Komisaris Commissioner : Syaiful Islam	Direktur Komersial dan Teknik Commercial and Operations Director : Ari Santoso

PT RUMAH SAKIT PELABUHAN (PT RSP)

RSP didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Nelly Elsy Tahamata. SH., No. 2 tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.11876.HT.01.01 tanggal 29 Juni 1999. Modal dasar RSP sebesar Rp150.000.000 terdiri dari 150.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC memiliki 99,84% atau sebanyak 37.452 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.452.000;

PT RUMAH SAKIT PELABUHAN (PT RSP)

RSP was established based on Notarial Certificate Ny. Nelly Elsy Tahamata. SH., No. 2 dated May 1, 1999 and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree No. C.11876.HT.01.01 dated June 29, 1999. RSP's authorized capital of Rp150,000,000 consists of 150,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC has 99.84% or 37,452 shares with a nominal value of Rp37,452,000;



- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,16% atau sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.

- The Maritime Employee Cooperative has 0.16% % or 180 shares with a nominal value of Rp180,000.

Saat ini, RSP bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya.

At present, RSP is engaged in health services and other health support services.

Adapun Visi dan Misi PT Rumah Sakit Pelabuhan Indonesia yakni:

Vision and mission of PT Rumah Sakit Pelabuhan Indonesia are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
Menjadi perusahaan terbaik dalam industri kesehatan nasional dengan layanan profesional kelas dunia. To become the best company in the national health industry with world-class professional services.	Menjalankan usaha layanan kesehatan berkualitas, berorientasi pada sinergi sumber daya dan teknologi terkini serta pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Running a quality healthcare business, oriented towards the synergy of resources and the latest technology as well as sustainable growth of the company.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT RSP No. 47 tanggal 14 September 2018, yang dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT RSP No. 40 tanggal 15 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT RSP adalah sebagai berikut:

Based on PT RSP's Shareholders Decision Certificate No. 47 dated September 14, 2018, made before Herdimansyah Chaidirsyah, Bachelor of Law, Notary in Jakarta, and PT RSP's Shareholders Decision Certificate No. 40 dated March 15, 2018, made before Herdimansyah Chaidirsyah, Bachelor of Law Notary in Jakarta. The composition of PT RSP's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	: Hambra	Direktur Utama President Director	: Irwan Favoriet
Komisaris Commissioner	: Amir Hamzah Dilaga	Direktur Medik Medical Director	: R. Suhasbagyo
Komisaris Commissioner	: Said Aqil Siradj	Direktur Pengembangan dan Pemasaran Development and Marketing Director	: Rima Novianti
		Direktur Keuangan dan SDM Finance and HC Director	: Try Djunaidy

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK (PT IKT TBK/ IPCC)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK (PT IKT TBK/ IPCC)

IKT didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 November 2012 oleh Yulianti Irawati, SH., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012.

IKT was established based on Certificate No. 10 dated November 5, 2012 by Yulianti Irawati, SH., a successor to Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-58515.AH.01.01 Year 2012 dated November 19, 2012.

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa IKT No. 19 tanggal 18 Juli 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui, jumlah saham yang

Based on the Certificate of IKT's Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 19 dated July 18, 2018 by Fathiah Helmi, SH, notary in Jakarta, the shareholders agreed that the number of

telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, atau sejumlah sebanyak-banyaknya 557.142.800 saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana IKT, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham, termasuk pengalokasian sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari saham baru yang dikeluarkan dengan program ESA (*Employee Stock Option*). Modal dasar IKT sebesar Rp181.838.482 terdiri dari 1.818.384.820 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh IKT adalah sebagai berikut:

- IPC memiliki 71,28% atau sebanyak 1.296.144.749 saham dengan nilai sebesar Rp129.614.475;
- MTI memiliki 0,72% atau sebanyak 13.092.371 saham dengan nilai sebesar Rp1.309.237;
- PII memiliki 5,54% atau sebanyak 100.682.600 saham dengan nilai sebesar Rp10.068.260;
- Masyarakat memiliki 22,46% atau sebanyak 408.465.100 saham dengan nilai sebesar Rp40.486.510.

shares issued in the context of a Public Offering of no more than 30% of the issued and paid-up capital after the Public Offering has been completed, or maximum of 557,142,800 new shares offered to the public through IKT Initial Public Offering, each with a nominal value of Rp100 (full amount) per share, including allocation of a maximum of 10% of new shares issued with the ESA program (Employee Stock Option). IKT's authorized capital of Rp181,838,482 consists of 1,818,384,820 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share. IKT's issued and fully paid capital composition is as follows:

- IPC has 71.28% or 1,296,144,749 shares with a value of Rp129,614,475;
- MTI has 0.72% or 13,092,371 shares with a value of Rp1,309,237;
- PII have 5.54% or as many as 100,682,600 shares with a value of Rp10,068,260;
- The community has 22.46% or as many as 408,465,100 shares with a value of Rp40,486,510.

Saat ini, IKT bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan, bongkar muat barang, pelayanan penumpukan dan pelayanan logistik lainnya.

At present, IKT is engaged in managing vehicle terminals, loading and unloading of goods, stacking services and other logistics services.

Adapun Visi dan Misi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. yakni:

Vision and mission of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
<p>Menjadi perusahaan logistik kendaraan terbaik di kawasan Asia dengan pelayanan kelas dunia.</p> <p>To become the best vehicle logistics company in the Asian region with world-class service</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemudahan dan kelancaran untuk mendorong arus ekspor impor dan bongkar muat kendaraan; • Memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dukungan pengembangan industri otomotif nasional; • Mewujudkan pelayanan terbaik dengan tingkat keselamatan tinggi yang memberikan kepuasan kepada pengguna jasa, melalui pengelolaan secara profesional dan didukung Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi tinggi, sehingga mampu bersaing di pasaran dunia dengan mewujudkan efisiensi biaya logistik; • Menjalankan bisnis unit sebagai pendukung pelayanan inti dalam upaya meningkatkan keuntungan perusahaan. <ul style="list-style-type: none"> • Providing ease and smoothness to encourage the flow of export imports and loading and unloading vehicles; • Provide a significant contribution to the national economic growth including support for the development of the national automotive industry; • Realizing the best services with a high level of safety that gives satisfaction to service users, through professional management and supported by highly competent Human Capital that can compete in the world market by realizing logistical cost efficiencies; • Running a business unit as a support for the core services in an effort to increase company profits.



Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk pada tanggal 17 Desember 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT IKT Tbk adalah sebagai berikut:

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk on December 17, 2019, the composition of Board of Commissioners and Directors of PT IKT Tbk is as follows:

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	: Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	: Ade Hartono
Komisaris Commissioner	: M. Fathony Akbar	Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Commercial & Business Development Director	: Arif Isnawan
Komisaris Commissioner	: Bay Mokhamad Hasani	Direktur Operasi dan Teknik Operations & Technical Director	: Bunyamin Sukur
Komisaris Commissioner	: Marta Hardisarwono	Direktur Keuangan dan SDM Finance & HC Director	: Sophia Isabella Wattimena
		Direktur Kepatuhan (Direktur Independen) Compliance Director (Independent Director)	: -

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI (PT ILCS)

ILCS didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 21 September 2012 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 September 2012.

Modal dasar ILCS sebesar Rp400.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC memiliki 51,00% atau sebanyak 5.100.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp51.000.000;
- PT Multimedia Nusantara memiliki 49,00% atau sebanyak 4.900.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp49.000.000.

Saat ini, ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *e-trade logistic* dan jasa lainnya yang meliputi jasa pengelolaan data, jasa *e-commerce*, konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, jasa pembuatan perangkat lunak, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa konsultan teknologi informasi.

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI (PT ILCS)

ILCS was established based on the Certificate of Establishment No. 11 dated September 21, 2012 by Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn. The certificate of establishment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights No. AHU.50211.AH.01.01 Year 2012 dated September 26, 2012.

ILCS' authorized capital of Rp400,000,000 consists of 40,000,000 shares with a nominal value of Rp10,000 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC has 51.00% or 5,100,000 shares with a value of Rp51,000,000;
- PT Multimedia Nusantara owns 49.00% or 4,900,000 shares with a value of Rp49,000,000.

At present, ILCS is engaged in the provision of e-trade logistic services and other services which include data management services, e-commerce services, computer consulting and informatics engineering, software manufacturing services, multimedia supply and utilization services through telecommunications equipment and services. information technology consultant.

Adapun Visi dan Misi PT Integrasi Logistik Cipta Solusi yakni: Vision and mission of PT Integrasi Logistik Cipta Solusi are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
Menjadi pemain nasional terkemuka di Indonesia di bidang logistik <i>e-trade</i> yang mengaplikasikan standar kelas dunia.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia melalui penyediaan layanan portal <i>e-trade</i>; • Menyediakan <i>platform</i> teknologi informasi dan komunikasi terpercaya bagi komunitas logistik; • Memberikan imbal hasil yang terbaik bagi Pemegang Saham; • Menyediakan lingkungan kerja terbaik bagi karyawan untuk bertumbuh dengan sistem penghargaan yang terbaik pula bagi para sumber daya manusianya.
To become the leading national company in Indonesia in the <i>e-trade</i> logistics sector that applies world-class standards	<ul style="list-style-type: none"> • Improving competitiveness of Indonesia economy through <i>e-trade</i> portal services; • Providing a trusted ICT Platform for Logistic Community; • Delivering best return to Shareholders; • Providing best environment for talent to grow with best reward system.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT ILCS No. 45 tanggal 29 September 2017, yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT ILCS adalah sebagai berikut:

Based on PT ILCS' Shareholders Decision Certificate No. 45 dated September 29, 2017, made before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The composition of PT ILCS' Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>
Komisaris Utama President Commissioner : Widyaka Nusapati	Direktur Utama President Director : Heru Satrio
Komisaris Commissioner : Pranyoto	Direktur IT dan Operasi Operations and IT Director : A. Syaiful Amin
Komisaris Commissioner : Mohammad Alfuniam	Direktur Keuangan dan Administrasi Finance and Administration Director : Sumarno
	Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Commercial and Business Development Director : Milono Wahyu Wibowo

PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA (PT EDII)

EDII didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1995 dari Notaris Sulami Mustafa, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2- 9572.HT.01.01.TH.95 tanggal 3 Agustus 1995.

Pada tanggal 31 Desember 2016, modal dasar EDII adalah sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 25.000.000 saham atau sebesar Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA (PT EDII)

EDII was established based on Notarial Certificate No. 1 dated June 1, 1995 from Notary Sulami Mustafa, S.H., and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree No. C2- 9572.HT.01.01.TH.95 dated August 3, 1995.

As of December 31, 2016, EDII's authorized capital of Rp100,000,000 consist of 100,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000 (full amount) per share. The amount of issued and fully paid capital is 25,000,000 shares or in the amount of Rp25,000,000 with the following composition:



- IPC memiliki 51,00% atau sebanyak 12.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp12.750.000;
- PT Sisindokom Teknologi memiliki 49,00% atau sebanyak 12.250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.250.000.

Saat ini, EDII bergerak dalam bidang penyediaan data informasi, transfer data, penjualan *software* dan pelayanan administrasi efek.

Adapun Visi dan Misi PT Electronic Data Interchange Indonesia yakni:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>
Menjadi penyedia layanan <i>e-Business</i> yang terkemuka di Asia, di mana perusahaan ingin menempatkan posisinya menjadi <i>pioneer</i> di dalam negeri dan menjadi dikenal di lingkup internasional khususnya diawali dari Asia terlebih dahulu.
To be the leading <i>e-Business</i> service provider in Asia. Where the company wants to put its position as the pioneer in the country and become known in the international scope, starting in Asia first.

- IPC has 51.00% or 12,750,000 shares with a value of Rp12,750,000;
- PT Sisindokom Teknologi has 49.00% or as many as 12,250,000 shares with a nominal value of Rp12,250,000.

At present, EDII is engaged in providing information data, data transfer, software sales and securities administration services.

Vision and mission of PT Electronic Data Interchange Indonesia are:

Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
Mengutamakan layanan <i>e-Business</i> yang inovatif berstandar internasional dengan menjunjung tinggi <i>Good Corporate Governance</i> untuk memberikan suatu nilai tambah yang berkelanjutan bagi para <i>Stakeholder</i> .
Prioritize innovative <i>e-Business</i> services with international standards while upholding <i>Good Corporate Governance</i> to provide a continuous added value for the Stakeholders.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) PT Electronic Data Interchange Indonesia nomor SK.03/14/11/1/PBP/UT/PI.II-18 dan nomor KS-089/LEG/SISTEK-PELINDOII/XI/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT EDII No. 19 tanggal 15 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Adi Triharso. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT EDII adalah sebagai berikut:

Based on PT Electronic Data Interchange Indonesia's Shareholders Decision without going through the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) number SK.03/14/11/1/PBP/UT/PI.II-18 and number KS KS-089/LEG/SISTEK-PELINDOII/XI/2018 dated November 14, 2018 concerning Appointment of Board of Directors Members, and PT EDII Shareholders Decision Certificate No. 19 dated August 15, 2017, made before Notary Adi Triharso. The composition of PT EDII's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>
Komisaris Utama President Commissioner : Dani Rusli Utama	Direktur Utama President Director : E. Helmi Wantono
Komisaris Commissioner : Herry Andriejanssen	Direktur Keuangan dan Pendukung Finance and Support Director : Elon Manurung
	Direktur Komersial dan Operasi Commercial and Operations Director : Yan Budi Santoso

PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA (PT EPI)

EPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU- 58019.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 14 November 2012.

PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA (PT EPI)

EPI was established based on the Certificate of Establishment No. 11 dated November 5, 2012 from Yulianti Irawati, S.H., a successor to Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-58019.AH.01.01.Year 2012 dated November 14, 2012.

Modal dasar EPI sebesar Rp600.000.000 terdiri dari 60.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC memiliki 55,00% atau sebanyak 8.250.000 saham dengan nilai sebesar Rp82.500.000;
- PT Haleyora Power memiliki 45,00% atau sebanyak 6.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp67.500.000.

EPI's authorized capital of Rp600,000,000 consists of 60,000,000 shares with a nominal value of Rp10,000 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC has 55.00% or 8,250,000 shares with a value of Rp82,500,000;
- PT Haleyora Power has 45.00% or 6,750,000 shares with a value of Rp67,500,000.

Saat ini, EPI bergerak dalam bidang penyedia pasokan energi listrik di wilayah pelabuhan dan sekitarnya.

At present, EPI is engaged in providing electricity in the port area and its surroundings.

Adapun Visi dan Misi PT Energi Pelabuhan Indonesia yakni:

Vision and mission of PT Energi Pelabuhan Indonesia are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
Menyediakan Energi Listrik dengan kualitas handal dengan mutu pelayanan <i>Good Governance</i> di Kawasan Pelabuhan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya penggunaan Energi Listrik yang ramah lingkungan di kawasan pelabuhan dan sekitarnya; • Terwujudnya layanan pasokan Energi Listrik dengan <i>Level of service</i> premium kepada pelanggan; • Terwujudnya penggunaan Energi Listrik yang berbasis Tarif <i>Non Subsidisi</i>.
Providing electrical energy with reliable quality with <i>Good Governance</i> service quality in the Port Area.	<ul style="list-style-type: none"> • Realization of environmentally friendly electricity energy used in port area and its surroundings; • Realization of electricity supply service with premium level of service to customer; • Realization of electricity energy use based on non-subsidized tariff.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) PT Energi Pelabuhan Indonesia nomor SK.03/13/9/1/PBP/UT/PI.II-18 dan nomor 067.RUPS/DIR-HP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Direksi dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT EPI No. 02 tanggal 05 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Bambang Heryanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT EPI adalah sebagai berikut:

Based on PT Energi Pelabuhan Indonesia's Shareholders Decision without going through the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) number SK.03/13/9/1/PBP/UT/PI.II-18 and number 067.RUPS/DIR-HP/2018 dated September 13, 2018 concerning Dismissal of Board of Directors Members, and PT EPI's Shareholders Decision Certificate No. 02 October 5, 2017, made before Bambang Heryanto, Bachelor of Law, Notary in Jakarta. The composition of PT EPI's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>
Komisaris Utama President Commissioner : Widyaka Nusapati	Direktur Utama President Director : Randi Pangalila
Komisaris Commissioner : Ida Bagus Ari Wardana	Direktur Operasi dan Niaga Operations and Commercial Director : Ramaedi
Komisaris Commissioner : Victor Vikki Subroto	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HC Director : Osman Syarif

PT IPC TERMINAL PETI KEMAS (PT IPC TPK)

IPC TPK didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 40641.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013.

PT IPC TERMINAL PETI KEMAS (PT IPC TPK)

IPC TPK was established through a Certificate of Establishment No. 25 dated July 10, 2013 by Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The certificate of establishment has been legalized by the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-40641.AH.01.01.Year 2013 dated July 25, 2013.



Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 36 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia (MTI) mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam IPC TPK kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII) dengan harga pembelian sebesar Rp7.915.500.

Modal dasar IPC TPK sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC memiliki 99,00% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000;
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, IPC TPK bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas dan jasa kepelabuhanan lainnya.

Adapun Visi dan Misi PT IPC Terminal Peti Kemas yakni:

Based on the Share Buy and Sell Certificate No. 36 dated December 28, 2018 from Silfia, S.H., a substitute notary of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia (MTI) transferred and handed over all of its shares, namely as many as 250 shares in IPC TPK to PT Pelabuhan Indonesia Investama (PT PII) with a purchase price of Rp7,915,500.

The authorized capital of IPC TPK of Rp100,000,000 consists of 100,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC has 99.00% or 24,750 shares with a value of Rp24,750,000;
- PII has 1.00% or 250 shares with a value of Rp250,000.

At present, IPC TPK is engaged in container terminal services and other port services.

Vision and Mission of PT IPC Terminal Peti Kemas are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
Menjadi Operator Terminal Petikemas Berstandar Internasional yang Unggul dalam Operasional dan Layanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan dan meningkatkan sistem operasi berstandar internasional di setiap terminal untuk memperkuat terminal peti kemas berkinerja tinggi; • Menyediakan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berstandar internasional; • Melakukan ekspansi bisnis dan membangun jaringan nasional dan internasional yang sinergis antar terminal di seluruh Indonesia yang memiliki nilai komersial tinggi.
To become an International Standard Container Terminal Operator that excels in Operations and Services.	<ul style="list-style-type: none"> • Provide and upgrade international standard operating systems in each terminal to strengthen high-performance container terminals; • Provide and improve Human Capital with international standards; • Perform business expansion and building national and international networks synergies between terminals across Indonesia that have high commercial value.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT IPC Terminal Petikemas Nomor: HK.568/20/4/2/PII-17 dan Nomor HK.476/20/4/4/MTI-2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris PT IPC TPK, serta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT IPC Terminal Petikemas Nomor: SK.03/18/12/1/MTA/UT/PII-19 dan Nomor SK-049/PII-SK.D1/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT IPC TPK. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT IPC TPK adalah sebagai berikut:

Based on PT IPC Terminal Petikemas Shareholders' Decision without going through General Meeting of Shareholders (Circular) Number: HK.568/20/4/2/PII-17 and Number HK.476/20/4/4/MTI-2018 dated April 20, 2018 concerning the Dismissal and Appointment of Commissioners of PT IPC TPK, as well as PT IPC Terminal Petikemas Shareholders' Decision without going through General Meeting of Shareholders (Circular) Number: SK.03/18/12/1/MTA/UT/PII-19 and Number SK-049/PII-SK.D1/XII/2019 dated December 18, 2019 concerning Dismissal and Appointment of Board of Commissioners of PT IPC TPK. The composition of Board of Commissioners and Board of Directors of PT IPC TPK is as follows:

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	: Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	: M. Adji
Komisaris Commissioner	: Hary Kriswanto	Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Commercial and Business Development Director	: Ari Henryanto
Komisaris Commissioner	: Achmad Riadi	Direktur Operasi dan Teknik Operations and Technical Director	: Rizki Widhiono
Komisaris Commissioner	: Sumantri Suwarno	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HC Director	: Rahmat Prayogi

PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA (PT JPPI)

JPPI didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU- 57978.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia (MTI) mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 25.000 saham yang ada dalam JPPI kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) dengan harga pembelian sebesar Rp227.500.

Modal dasar JPPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC memiliki 99,00% atau sebanyak 2.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000;
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, JPPI bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan usaha teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrikal dan mekanikal, bejana tekan (*boiler/pressure vessel*), serta bidang usaha terkait.

PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA (PT JPPI)

JPPI was established based on Certificate No. 8 dated November 5, 2012 from Yulianti Irawati, S.H., successor to Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Certificate of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-57978.AH.01.01. Year 2012 dated November 13, 2012.

Based on the Share Buy and Sell Certificate No. 38 dated 28 December 2018 from Silfia, S.H., a replacement notary of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia (MTI) transferred and handed over all of its shares, namely 25,000 shares in JPPI to PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) with a purchase price of Rp227,500.

PII's authorized capital of Rp100,000,000 consists of 10,000,000 shares with a nominal value of Rp10,000 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC has 99.00% or 2,475,000 shares with a value of Rp24,750,000;
- PII has 1.00% or as many as 25,000 shares with a value of Rp250,000.

At present, JPPI is engaged in the field of technical business services including installation/assembly, repair and maintenance (maintenance) and installation of technical equipment, installation of equipment for water, gas, telecommunications, electrical and mechanical, pressure vessels (boilers/pressure vessels) and related business fields.



Adapun Visi dan Misi PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia yakni: Vision and mission of PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
<p>Menjadi Perusahaan yang Unggul di Bidang Penyediaan Peralatan dan <i>Engineering Services</i>.</p> <p>To Be a Company that Excels in the Field of Supply of Equipment and Engineering Services.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi partner handal dan terpercaya sebagai penyedia peralatan di semua sektor industri; Fokus pada mutu dengan biaya pelayanan yang efisien sesuai dengan standar dan kebutuhan pengguna jasa. <ul style="list-style-type: none"> To become a reliable and trusted partner as equipment provider in all industry sectors; Focus on quality with cost efficient services in accordance with the standards and needs of service users.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT JPPI No. 39 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Jhonni Marihotua Sianturi, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT JPPI adalah sebagai berikut:

Based on PT JPPI Shareholders Decision Certificate No. 39 dated January 24, 2019, made before Notary Jhonni Marihotua Sianturi. The composition of PT JPPI's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>
Komisaris Utama President Commissioner : Arif Suhartono	Direktur Utama President Director : Bimo Widhiatmoko
Komisaris Commissioner : Abdur Rahim Hasan	Direktur SDM dan Keuangan HC and Finance Director : Budi Setijadi Kurjanto
Komisaris Commissioner : Eko Putro Adijayanto	Direktur Teknik dan Operasi Technical and Operations Director : Agus Sulistyio

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA (PT PMLI)

PMLI didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 45955. AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 2 September 2013.

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA (PT PMLI)

PMLI was established based on Certificate of Establishment No. 26 dated July 10, 2013 by Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The certificate of establishment has been legalized by the Ministry of Law and Human Rights No.AHU-45955. 2013 AH.01.01.Year 2013 dated September 2, 2013.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia (MTI) mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 300 saham yang ada dalam PMLI kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama (PIL) dengan harga pembelian sebesar Rp173.500.

Based on the Share Buy and Sell Certificate No. 38 dated December 28, 2018 from Silfia, S.H., a replacement notary for Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia (MTI) transferred and handed over all of its shares, namely as many as 300 shares in PMLI to PT Pelabuhan Indonesia Investama (PIL) with a purchase price of Rp173,500.

Modal dasar PMLI sebesar Rp120.000.000 terdiri dari 120.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

PMLI's authorized capital of Rp120,000,000 consists of 120,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI
LIST OF SUBSIDIARIES AND/OR ASSOCIATES

- IPC memiliki 99,00% atau sebanyak 29.700 saham dengan nilai sebesar Rp29.700.000;
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.

Saat ini, PMLI bergerak dalam bidang penyediaan jasa pendidikan, pelatihan, konsultasi di bidang maritim dan logistik serta mengelola fasilitas dan infrastruktur pendidikan dan pelatihan.

At present, PMLI is engaged in providing education, training, consulting services in the maritime and logistics fields and managing education and training facilities and infrastructure.

PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI) atau juga dikenal dengan IPC Corporate University didirikan pada tanggal 10 Juli 2013 dengan Akta Pendirian no. 26 tanggal 10 Juli 2013 dan Akta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) no.AHU-45955. AH.01.01 tahun 2013.

PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI) or also known as IPC Corporate University was established on July 10, 2013 with the Certificate of Establishment no. 26 dated July 10, 2013 and the Certificate of the Ministry of Law and Human Rights no.AHU-45955.AH.01.01.Year 2013.

Adapun Visi dan Misi PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia yakni:

Vision and mission of PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia are:

Visi Perusahaan Company Vision	Misi Perusahaan Company Mission
Menjadi pusat keunggulan dan mitra strategis dalam pengembangan pelabuhan, maritim dan bisnis logistik di Indonesia dan Asia Pasifik.	Menjadi pilihan utama dan kebanggaan bagi pelanggan, karyawan dan Pemangku Kepentingan dalam mempersiapkan manusia unggul dan membangun kapasitas organisasi bagi pengembangan maritim dan logistik di Indonesia dan Asia Pasifik.
To be the center of excellence and strategic partner in developing port, maritime, and logistics businesses in Indonesia and Asia Pacific.	Being the top choice and pride of customers, employees, and Stakeholders in providing excellent people and organization capacity building for maritime and logistics development in Indonesia and Asia Pacific.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PMLI No. 18 tanggal 19 April 2018, yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PMLI No. 7 tanggal 12 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT PMLI adalah sebagai berikut:

Based on PT PMLI's Shareholders Decision Certificate No. 18 dated April 19, 2018, made before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and PT PMLI's Shareholders Decision Certificate No. 7 dated March 12, 2018, made before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The composition of PT PMLI's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Komisaris Utama President Commissioner : Hambra	Direktur Utama President Director : Edy Purwanto
Komisaris Commissioner : Marwansyah	Direktur Keuangan dan Pengembangan Usaha Finance & Business Development Director : Nurjadin Surur
Komisaris Commissioner : Eko B. Supriyanto	



PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA (PT PII)

PII didirikan berdasarkan Akta No. 112 tanggal 17 November 2017 dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0052776.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 21 November 2017.

Modal dasar PII sebesar Rp800.000.000 yang terbagi atas 800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC memiliki 99,00% atau sebanyak 198.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp198.000.000;
- MTI memiliki 1,00% atau sebanyak 2.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.

Saat ini, PII bergerak dalam bidang investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan maupun jasa terkait kepelabuhanan lainnya, investasi di pasar modal dan pasar uang, jasa konsultasi bisnis serta bertindak sebagai penasihat.

Adapun Visi dan Misi PT Pelabuhan Indonesia Investama yakni:

Visi Perusahaan Company Vision	Misi Perusahaan Company Mission
Menjadi perusahaan investasi global di sektor kepelabuhanan dan pendukungnya demi menciptakan nilai tambah bagi <i>stakeholders</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi IPC melalui konsolidasi kepemilikan anak perusahaan, pengembangan SDM yang profesional, dan sistem pengelolaan yang berkelas dunia; • Memperkuat pendanaan untuk anak perusahaan melalui inisiatif <i>capital raising</i> baik dari internal IPC maupun dari sumber dana eksternal untuk mencapai pertumbuhan investasi yang optimal; • Mengoptimalkan potensi sinergi dalam kepelabuhanan.
To become a global investment company in the port and supporting sector to create added value for stakeholders.	<ul style="list-style-type: none"> • Improve the effectiveness of IPC investment management through consolidated subsidiary ownership, professional HC development, and world-class management system; • Strengthen funding for subsidiaries through capital raising initiatives both from internal IPC as well as from external funding sources to achieve optimal investment growth; • Optimizing the potential for synergy in seaports.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Pelabuhan Indonesia Investama Nomor: SK.03/18/12/1/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor HK.476/18/12/2/MTI-2018 tanggal 18 Desember 2018 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia Investama dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Pelabuhan Indonesia Investama Nomor: SK.03/18/2/2/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor HK.476/18/12/3/MTI-2018 Tentang Penetapan Anggota-Anggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia Investama, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT PII adalah sebagai berikut:

PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA (PT PII)

PII was established based on the Certificate of Establishment No. 112 dated November 17, 2017 from Notary Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. This certificate of establishment was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0052776.AH.01.01. Year 2017 dated November 21, 2017.

The authorized capital of PII is Rp800,000,000 which is divided into 800,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC has 99.00% or 198,000 shares with a nominal value of Rp198,000,000;
- MTI has 1.00% or 2,000 shares with a nominal value of Rp2,000,000.

At present, PII is engaged in investment in companies engaged in port services and other port related services, investment in the capital market and money market, business consulting services and acting as an advisor.

Vision and mission of PT Pelabuhan Indonesia Investama are:

Based on the Decision of PT Pelabuhan Indonesia Investama's Shareholders without going through the General Meeting of Shareholders (Circular) Number: SK.03/18/12/1/PBI/UT/PI.II-18 and Number HK.476/18/12/2/MTI-2018 dated December 18, 2018 concerning the Termination and Determination of PT Pelabuhan Indonesia Investama's Board of Commissioners, and the Decision of PT Pelabuhan Indonesia Investama's Shareholders without going through the General Meeting of Shareholders (Circular) Number: SK.03/18/2/2/PBI/UT/PI.II-18 and Number HK.476/18/12/3/MTI-2018 concerning the Determination of PT Pelabuhan Indonesia Investama Board of Directors Members. The composition of PT PII's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI
LIST OF SUBSIDIARIES AND/OR ASSOCIATES

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	: Ito Warsito	Direktur Utama President Director	: Amri Yusuf
Komisaris Commissioner	: M. Ali Yusuf	Direktur Keuangan dan Operasi Operations and Finance Director	: Sugeng Mulyadi
Komisaris Commissioner	: Rizal Ariansyah	Direktur Investasi Investment Director	: Jeffry Haryadi P.M.

ENTITAS CUCU

SUBSIDIARIES OF SUBSIDIARY

Nama <i>Name</i>	Kegiatan Usaha <i>Business</i>	Kepemilikan Saham <i>Share Ownership</i>	Tahun Pendirian <i>Year of Establishment</i>	Status Operasi <i>Operation State</i>	Jumlah Aset <i>Total Assets (Rp)</i>	Domisili <i>Domicile</i>
PT Akses Pelabuhan Indonesia (API)	Penyertaan Saham pada proyek Jalan Tol Equity Participation in the Toll Road project	99,52%	2014	Beroperasi Operating	779.593.101	Jakarta
PT Menara Maritim Indonesia (MMI)	Jasa pengelola properti Property management services	70,00%	2018	Belum Beroperasi Not yet Operating	357.601.919	Jakarta

Penjelasan singkat mengenai masing-masing Entitas Cucu diuraikan sebagai berikut:

A brief description of each the Subsidiaries of Subsidiary is described as follows:

PT AKSES PELABUHAN INDONESIA (API)

PT AKSES PELABUHAN INDONESIA (API)

API didirikan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 24 Juli 2014 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-19255.40.10.2014 tanggal 4 Agustus 2014. Anggaran Dasar API telah mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 26 Maret 2015 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 27 April 2015.

API was established based on Certificate No. 29 dated July 24, 2014 from Yulianti Irawati, S.H., successor to Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-19255.40.10.2014 dated 4 August 2014. The Articles of Association of API have been amended based on Certificate No. 29 dated March 26, 2015 from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, concerning the increase in authorized capital and paid-up capital, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0934117.AH.01.02.YEAR 2015 dated April 27, 2015.

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 21 Desember 2017 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp1.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp386.000.000 yang diambil bagian oleh PPI dan PTP masing-masing sebesar Rp382.140.000 dan Rp3.860.000.

Based on Certificate No. 33 dated December 21, 2017 from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, M.Kn., notary in Jakarta, the Company increased its authorized capital to Rp1,000,000,000 and issued and fully paid-up capital to Rp386,000,000 which was taken part by PPI and PTP amounting to Rp382,140,000 and Rp3,860,000, respectively. This Certificate has been approved



Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 27 Desember 2017.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 28 Desember 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, API melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp805.760.000 yang diambil bagian oleh PPI dan PTP masing-masing sebesar Rp801.900.000 dan Rp3.860.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0018880 tanggal 11 Januari 2019. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PPI memiliki 99,52% atau sebanyak 80.190.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp801.900.000;
- PTP memiliki 0,48% atau sebanyak 386.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.860.000.

Saat ini, kegiatan API terutama terkonsentrasi pada investasi pada CTP, entitas asosiasi yang bergerak dalam penyelenggaraan proyek jalan tol.

by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0027756.AH.01.02.YEAR 2017 dated December 27, 2017.

Based on Certificate No. 26 December 28, 2018 from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, M.Kn., notary in Jakarta, API increased its issued and fully paid capital to Rp805,760,000, which was taken part by PPI and PTP amounting to Rp801,900,000 and Rp3,860,000 respectively. This Certificate has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.03-0018880 dated January 11, 2019.

The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- PPI has 99.52% or 80,190,000 shares with a nominal value of Rp801,900,000;
- PTP has 0.48% or 386,000 shares with a nominal value of Rp3,860,000.

Currently, API activities are mainly concentrated in investment in CTP, an associate engaged in the operation of toll road projects.

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	: Eko Afrilianto	Direktur Utama President Director	: Iwan Ridwan
Komisaris Commissioner	: Hotman Napitupulu	Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis Operations and Business Development Director	: Nofal Hayin
Komisaris Commissioner	: Eddy Kuswaedi	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HC Director	: Agus Edi Santoso
Komisaris Commissioner	: Andi Megantara		

PT MENARA MARITIM INDONESIA (MMI)

MMI didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 5 Juli 2018 dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0033122.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018.

Modal dasar MMI sebesar Rp350.000.000 yang terbagi atas 350.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PPI memiliki 70,00% atau sebanyak 612.500.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp61.250.000;
- PT PP Properti Tbk memiliki 30,00% atau sebanyak 262.500.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp26.250.000.

PT MENARA MARITIM INDONESIA (MMI)

MMI was established based on Certificate No. 16 dated July 5, 2018 from Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. This certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0033122.AH.01.01.Year 2018 on July 16, 2018.

MMI's authorized capital is Rp350,000,000 which is divided into 350,000 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

- PPI owns 70.00% or 612,500,000 shares with a nominal value of Rp61,250,000;
- PT PP Properti Tbk owns 30.00% or 262,500,000 shares with a nominal value of Rp26,250,000.

Saat ini, MMI belum melakukan kegiatan komersial.

At present, MMI has not carried out commercial activities.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT MMI adalah sebagai berikut:

The composition of PT MMI's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	: Kiki M. Hikmat	Direktur Utama President Director	: Bagus Dwipoyono
Komisaris Commissioner	: Nanang Siswanto	Wakil Direktur Utama Vice President Director	: Yunas Rudianto
		Direktur Director	: Rudy Istiawan

ENTITAS ASOSIASI

ASSOCIATES

Nama <i>Name</i>	Kegiatan Usaha <i>Business</i>	Kepemilikan Saham <i>Share Ownership</i>	Tahun Pendirian <i>Year of Establishment</i>	Status Operasi <i>Operation State</i>	Jumlah Aset <i>Total Assets (Rp)</i>	Domisili <i>Domicile</i>
PT New Priok Container Terminal One (NPCT1)	Terminal Petikemas Container Terminal	51,00%	2014	Beroperasi Operating	7.375.640.508	Jakarta
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP)	Operasi Jalan Tol Toll Road Operation	45,00%	2006	Beroperasi Operating	4.342.577.010	Jakarta
PT Jakarta International Container Terminal (JICT)	Terminal Petikemas Container Terminal	48,90%	1999	Beroperasi Operating	4.342.577.010	Jakarta
PT Terminal Petikemas Indonesia (PT TPI)	Terminal Petikemas Container Terminal	25,00%	2013	Belum Beroperasi Not yet Operating	131.111.708	Jakarta

Penjelasan singkat mengenai masing-masing Entitas Asosiasi diuraikan sebagai berikut:

A brief description of each of the Associates is described as follows:

PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE (NPCT 1)

PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE (NPCT 1)

NPCT1 didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-11432.40.10.2014 tanggal 3 Juni 2014.

NPCT1 was established based on Certificate No. 33 dated May 28, 2014 from Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn. This Certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-11432.40.10.2014 dated June 3, 2014.

Modal dasar NPCT1 sebesar Rp340.725.600 yang terbagi atas 510 saham Kelas A dan 490 saham Kelas B masing-masing dengan nilai nominal Rp340.725.600 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

The authorized capital of NPCT1 is Rp340,725,600 which is divided into 510 Class A shares and 490 Class B shares with a nominal value of Rp340,725,600 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC TPK memiliki 51,00% atau sebanyak 510 saham Kelas A dengan nilai nominal sebesar Rp173.770.056;

- IPC TPK owns 51.00% or 510 Class A shares with a nominal value of Rp173,770,056;



- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., memiliki 49,00% atau sebanyak 490 saham Kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp166.955.544.

Saat ini, NPCT1 bergerak dalam bidang pelayanan jasa bongkar muat barang. Adapun kegiatan usaha yang telah dijalankan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan usaha perusahaan terdiri dari 3 (tiga) kelompok usaha yaitu:

1. Untuk memuat dan membongkar Petikemas di Pelabuhan;
2. Untuk memindahkan Petikemas ke dan dari Pelabuhan ke Pangkalan Petikemas;
3. Untuk menangani dan mengelola petikemas di Terminal Petikemas dan kegiatan yang terkait termasuk kegiatan penampungan, pengawasan, penyusunan dan pengangkutan yang berkaitan dengan kegiatan penanganan dan pengelolaan petikemas dan kegiatan *Container Freight Station* (CFS) pada umumnya.

Adapun Visi dan Misi PT New Priok Container Terminal One yakni:

- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., owns 49.00% or as many as 490 Class B shares with a nominal value of Rp166,955,544.

At present, NPCT1 is engaged in loading and unloading services. The business activities that have been carried out, can be described as follows:

The company's business activities consist of 3 (three) business groups, namely:

1. Loading and unloading containers at the port;
2. Moving containers to and from the Port to the Base of Containers;
3. Handling and managing containers at the Container Terminals and related activities including storage, supervision, preparation and transportation activities related to container handling and management activities and Container Freight Station (CFS) activities in general.

Vision and Mission of PT New Priok Container Terminal One are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
To be the leading gateway terminal operator in Indonesia.	Provide best-in-class container terminal services to energize Indonesia's international trade and achieve its full growth potential by building successful partnerships with our customers and stakeholders.

Berdasarkan *Circular Resolutions In Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT New Priok Container Terminal One* (sedang dimintakan ttd ke Singapura), Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT NPCT 1 adalah sebagai berikut:

Based on *Circular Resolutions in Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT New Priok Container Terminal One* (waiting signatory from Singapore), the composition of the Board of Commissioners and Directors of PT NPCT 1 is as follows:

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	: Prasetyadi	Direktur Utama President Director	: Takao Omori
Komisaris Commissioner	: M. Adji	Direktur Regional Regional Director	: Wee Hiang Keong
Komisaris Commissioner	: Takayuki Hori		
Komisaris Commissioner	: Eiji Onishi		

PT CIBITUNG TANJUNG PRIOK PORT TOLLWAYS (CTP)

Berdasarkan Perjanjian Pengambil bagian Saham Bersyarat dan Perjanjian Pemegang Saham MTDX tanggal 14 April 2015, yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 28 Agustus 2015, API, MTD Capital Bhd dan PT Nusacipta Etika Pratama sepakat bahwa API akan melakukan investasi di MTDX dengan

PT CIBITUNG TANJUNG PRIOK PORT TOLLWAYS (CTP)

Based on the Conditional Share Taking Agreement and Shareholder Agreement of MTDX dated April 14, 2015, which was amended and restated on August 28, 2015, API, MTD Capital Bhd and PT Nusacipta Etika Pratama agreed that API will invest in MTDX by taking part of 130,220 new shares with a total nominal

caramengambil bagian atas 130.220 saham baru dengan total nilai nominal Rp118.500.200 (mewakili 45% kepemilikan saham) yang diterbitkan MTDX. Pada tanggal 18 September 2015, transaksi telah diselesaikan dan API menjadi pemilik 45% saham MTDX.

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., MTDX mengganti nama menjadi PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP"). Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0011468.AH.01.02 tanggal 26 Mei 2017.

Saat ini, CTP bergerak dalam bidang Operasi Jalan Tol.

Adapun Visi dan Misi PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways yakni:

value of Rp118,500,200 (representing 45% share ownership) issued by MTDX. On September 18, 2015, the transaction was completed and API became the owner of 45% of MTDX shares.

Based on Deed No. 17 May 24, 2017 made before Drs. Soebiantoro, S.H., MTDX changed its name to PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP"). This Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree No. AHU-0011468.AH.01.02 on May 26, 2017.

At present, CTP is engaged in Toll Road Operations.

The vision and mission of PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
Menjadi Perusahaan Indonesia terkemuka di bidang investasi dan pengelolaan jalan tol To become a leading Indonesian company in the investment and management of toll road	Meningkatkan nilai perusahaan yang berkelanjutan melalui SDM yang berkompeten, Sistem dan teknologi terintegrasi, sinergi dengan mitra usaha, dan inovasi. Increase sustainable corporate value through competent human capital, integrated systems and technology, synergy with business partners, and innovation.

PT JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (PT JICT)

JICT didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 27 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsy Tahamata, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-5466.HT.01.01.TH'99 tanggal 29 Maret 1999.

Berdasarkan Akta Perubahan No. 77 dan No. 78 tanggal 30 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsy Tahamata, S.H., dinyatakan bahwa modal dasar JICT adalah sebesar Rp221.450.406 terbagi atas 1 saham seri A porsi Pemerintah Republik Indonesia dan 442.900.812 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 48,90% atau sebanyak 216.578.498 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp108.289.249;
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,10% atau sebanyak 442.899 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp221.449;

PT JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (PT JICT)

JICT was established based on Certificate No. 72 dated March 27, 1999 by Notary Nelly Elsy Tahamata, S.H., M.Kn. The Certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-5466.HT.01.01.TH'99 dated March 29, 1999.

Based on the Amendment Certificate No. 77 and No. 78 dated March 30, 1999 by Notary Nelly Elsy Tahamata, SH, stated that the authorized capital of JICT amounted to Rp221,450,406 divided into 1 series A share of the Government of the Republic of Indonesia and 442,900,812 series B shares with a nominal value of Rp500 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company has 48.90% or 216,578,498 series B shares with a nominal value of Rp108,289,249;
- The Maritime Employee Cooperative has 0.10% or as many as 442,899 Series B shares with a nominal value of Rp221,449;



- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (dahulu Grosbeak Pte. Ltd.) memiliki 51,00% atau sebanyak 225.879.415 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp112.939.707.

- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (formerly Grosbeak Pte. Ltd.) owns 51.00% or as many as 225,879,415 series B shares with a nominal value of Rp112,939,707.

Saat ini, JICT bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan, jasa terminal petikemas, lapangan penumpukan dan jasa lainnya. Bidang usaha PT JICT yaitu melaksanakan pelayanan jasa terminal petikemas antara lain:

At present, JICT is engaged in port services, container terminal services, stacking and other services. The business field of PT JICT is to carry out container terminal services including:

- Memuat dan membongkar petikemas di dermaga terminal petikemas;
- Memindahkan petikemas dari dermaga ke lapangan petikemas dan sebaliknya;
- Menangani petikemas di lapangan petikemas, termasuk pengangkatan, penurunan, penyerahan dan penerimaan petikemas;
- Memberikan jasa pengelolaan dan pengoperasian terminal petikemas;
- Melakukan kegiatan transportasi multimoda;
- Melakukan kegiatan gudang transit (*Container Freight Station*) yang meliputi *stuffing* dan *unstuffing* petikemas dan penumpukan barang di gudang transit; dan
- Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan terminal petikemas termasuk tapi tidak terbatas pada kegiatan pembersihan (*cleaning*), pemeriksaan laik guna (*Pre-Trip Inspection*), Fumigasi dan perbaikan petikemas.

- Loading and unloading containers at the container terminal dock;
- Transfer containers from the dock to the container field and vice versa;
- Handling containers in the container field, including lifting, dropping, submitting and receiving containers;
- Providing management and operation services for container terminals;
- Carry out multimodal transportation activities;
- Carry out transit warehouse activities (*Container Freight Station*) which includes stuffing and container unstuffing and stacking of goods in the transit warehouse; and
- Conduct activities related to container terminal activities including but not limited to cleaning activities, Pre-Trip Inspection, Fumigation and container repair.

Adapun Visi dan Misi PT Jakarta International Container Terminal yakni:

Vision and Mission of PT Jakarta International Container Terminal are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
Menjadi Terminal Peti kemas Kelas Dunia. To be a World Class Container Terminal.	Tumbuh berkembang dengan mengutamakan kepuasan pelanggan serta sumber daya yang handal. Growing and developing by emphasizing on customer satisfaction and reliable resources.

Berdasarkan *Circular Resolutions In Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jakarta International Container Terminal (JICT)* tanggal 4 Juli 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT JICT sebagai berikut:

Based on *Circular Resolutions In Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jakarta International Container Terminal (JICT)* dated July 4, 2018, the composition of PT JICT's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	: Wibowo Suseno Wirjawan	Direktur Utama President Director	: Gunta Prabawa
Komisaris Commissioner	: Rizal Ariansyah	Wakil Direktur Utama Vice President Director	: Riza Erivan
Komisaris Commissioner	: Kamil Sjoeb	Direktur Operasional Operation Director	: Thavaneswaran Palasanthiran

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>	
Komisaris Commissioner	: Taufan Hunneman	Direktur Keuangan Finance Director	: Budi Cahyono
Komisaris Commissioner	: Rianti Ang	Direktur Komersial Commercial Director	: Reini Delfianti
Komisaris Commissioner	: John Stephen Ashworth	Direktur SDM HC Director	: Banu Astrini
Komisaris Commissioner	: Ruth Sin Ling Tsim		
Komisaris Commissioner	: Supomo Hidjazie		

PT TERMINAL PETIKEMAS INDONESIA (PT TPI)

TPI didirikan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 April 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan AHU-21873.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

Modal dasar TPI sebesar Rp500.000.000 yang terbagi atas 500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000;
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000;
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000;
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

Saat ini, TPI belum melakukan kegiatan operasi komersial.

PT TERMINAL PETIKEMAS INDONESIA (PT TPI)

TPI was established based on Certificate No. 36 dated 10 April 2013 from Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. This Certificate of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree AHU-21873.AH.01.01. 2013 dated April 24, 2013.

TPI's authorized capital of Rp500,000,000 which is divided into 500,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The composition of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company has 25.00% or 37,500 shares with a nominal value of Rp37,500,000;
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) owns 25.00% or as many as 37,500 shares with a nominal value of Rp37,500,000;
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 25.00% or as many as 37,500 shares with a nominal value of Rp37,500,000;
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 25.00% or as many as 37,500 shares with a nominal value of Rp37,500,000.

At present, TPI has yet not carried out commercial operations.



Adapun visi dan Misi PT Terminal Petikemas Indonesia yakni: Vision and mission of PT Terminal Petikemas Indonesia are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
<p>Menjadi Operator Terminal Peti kemas terpercaya di Indonesia, yang memfasilitasi dan membantu pertumbuhan ekonomi nasional melalui pelayanan yang efisien, handal, dan biaya yang efektif.</p> <p>To Become a trusted Container Terminal Operator in Indonesia, which facilitates and fosters national economic growth through efficient, reliable, and cost-effective services.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bersaing di tingkat nasional dan internasional dalam pelayanan terminal peti kemas di Indonesia dengan memberikan keandalan dan produktivitas terbaik; • Menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan melalui pengelolaan terminal peti kemas secara terintegrasi (internasional dan terminal domestik) yang bisa memfasilitasi jadwal pelayaran yang teratur dan biaya <i>handling</i> yang efektif di seluruh terminal yang dioperasikan dalam sebuah konektivitas yang efisien; • Mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan (dari barat ke timur Indonesia) dengan memberikan pengelolaan terminal peti kemas yang profesional dan efisien; • Memberikan produktivitas terbaik dan konsisten di tiap terminal yang dioperasikan melalui implementasi perbaikan proses yang berkelanjutan; • Memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk pegawai dan pemangku kepentingan lainnya. <ul style="list-style-type: none"> • Compete at the national and international level in container terminal services in Indonesia by providing the best reliability and productivity; • Create values for the stakeholder through the management of integrated containers (international and domestic terminals) that facilitates regular shipping schedules and cost-effective handling across all terminals operated in an efficient connectivity; • Support and facilitate sustainable national economic growth (from west to east of Indonesia) by providing professional and efficient container terminal management; • Ensure productivity and consistency at every operational terminal through implementing an improving and sustainable process; • Provide a safe and healthy working environment for employees and other stakeholders.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Terminal Petikemas Indonesia No. UM.58/91/7/PI-18.TU, No. SK.03/22/11/1/PBI/UT/PI.II-18, No. KEP.0491/KU.04/HOFC-2018 dan No. SK.93/KP.304/DUT.2018 tanggal 22 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Terminal Petikemas Indonesia, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT TPI adalah sebagai berikut:

Based on the Decision of PT Terminal Petikemas Indonesia's Shareholders without going through the General Meeting of Shareholders (Circular) Number: UM.58/91/7/PI-18.TU, Number SK.03/22/11/1/PBI/UT/PI.II-18, Number: KEP.0491/KU.04/HOFC-2018 and Number: SK.93/KP.304/DUT.2018 dated November 22, 2018 concerning Dismissal and Appointment of PT Terminal Petikemas Indonesia's Board of Commissioners Members, the composition of PT TPI's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>	
Komisaris Utama President Commissioner	: Prasetyadi	Direktur Utama President Director	: Hadi Mohammad Lukmantyo
Komisaris Commissioner	: Syahputera Sembiring	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HC Director	: Abadi Sembiring

OPERASI BERSAMA

JOINT OPERATIONS

Nama Name	Kegiatan Usaha Business	Kepemilikan Saham Share Ownership	Tahun Pendirian Year of Establishment	Status Operasi Operation State	Jumlah Aset Total Assets (Rp)	Domisili Domicile
Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (TPK Koja) Koja Container Terminal Operations Cooperation (TPK Koja)	Terminal Petikemas Container Terminal	54,91%	1994	Beroperasi Operating	511.880.094.704	Jakarta
Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia (MKO MTKI) Joint Operations Management for Maspion Indonesian Vehicle Terminal (MKO MTKI)	Terminal Kendaraan Vehicle Terminal	45,00%	2015	Beroperasi Operating	4.339.729	Gresik

KSO TERMINAL PETI KEMAS KOJA (TPK KOJA)

Kerjasama Operasi TPK Koja didirikan berdasarkan Akta No. 53 tanggal 23 Oktober 1996 oleh Imas Fatimah, S.H. dan Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja pada tanggal 16 Agustus 1994 antara Perusahaan dengan PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). Perjanjian tersebut kemudian diubah secara substansial pada tanggal 26 Maret 1999 (Amandemen I) dan selanjutnya diubah pada tanggal 22 Juni 2011 (Amandemen II), tanggal 5 Agustus 2014 (Amandemen III) dan tanggal 22 Juni 2015. Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun sejak tanggal operasi komersial, yaitu tanggal 1 November 1998 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Maret 2039.

Proporsi investasi partisipan untuk tahun 2018 adalah 54,91% untuk IPC dan 45,09% untuk HPI. Saat ini, TPK Koja bergerak dalam bidang pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan dan terminal petikemas. Adapun kegiatan usaha tersebut diuraikan sebagai berikut:

- *Discharging* adalah Kegiatan pembongkaran peti kemas dari kapal;
- *Loading* adalah kegiatan pemuatan peti kemas ke kapal;
- *Receiving* adalah kegiatan penerimaan peti kemas ekspor;
- *Delivery* adalah kegiatan penyerahan peti kemas ekspor;
- *Transshipment* adalah kegiatan pemindahan peti kemas dari terminal satu ke terminal lain;
- *Over Brengen* adalah kegiatan pemindahan peti kemas dari *container yard* ke Tempat Penimbunan Sementara;
- *Behandle* adalah kegiatan pemeriksaan isi peti kemas oleh instansi Bea Cukai;
- Karantina adalah kegiatan pemisahan dan pemeriksaan isi peti kemas hewan dan tumbuhan oleh instansi Karantina terkait; dan
- *Verified Gross Mass (VGM)* adalah Penimbangan berat kotor peti kemas yang terverifikasi.

KSO KOJA CONTAINER TERMINAL (TPK KOJA)

TPK Koja Joint Operations was established based on Certificate No. 53 dated October 23, 1996 by Imas Fatimah, S.H. and the Agreement on Joint Operations Koja on August 16, 1994 between the Company and PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). The agreement was amended substantially on March 26, 1999 (Amendment I) and further amended on June 22, 2011 (Amendment II), August 5, 2014 (Amendment III) and June 22, 2015. The agreement is valid for 20 years from the date of commercial operation, namely November 1, 1998 and has been extended to March 26, 2039.

The participant investment proportion for 2018 is 54.91% for IPC and 45.09% for HPI. At present, TPK Koja is engaged in the operation and management of port and container terminals. The business activities are described as follows:

- *Discharging* is the activity of dismantling containers from the ship;
- *Loading* is the activity of loading containers to ships;
- *Receiving* is an export container receiving activity;
- *Delivery* is the activity of delivering export containers;
- *Transshipment* is the activity of moving containers from one terminal to another;
- *Over Brengen* is the activity of transferring containers from container yards to Temporary Hoarding Places;
- *Behandle* is an activity of checking container contents by Customs authorities;
- *Quarantine* is the activity of separating and examining the contents of animal and plant containers by the relevant Quarantine agency; and
- *Verified Gross Mass (VGM)* is Weighing the gross weight of verified containers.



Adapun Visi dan Misi KSO Terminal Peti Kemas Koja yakni:

Vision and Mission of KSO Terminal Peti Kemas Koja are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
Menjadi Terminal Peti kemas Kelas Dunia.	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan layanan terminal peti kemas yang komprehensif, inovatif, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan; Mengembangkan sumber daya manusia yang handal, berkualitas, dan profesional; Menjaga kepercayaan para <i>Stakeholder</i>.
To be a World Class Container Terminal.	<ul style="list-style-type: none"> Providing comprehensive and innovative container terminal services, as well as providing added value to the customers; Developing reliable, qualified, and professional human capital; Maintaining the confidence of the Stakeholders

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Pemilik Nomor: SK.03/7/7/2/PBI/UT/PI.II-17 dan Nomor: 115/SKB-HPI/VII/17 tanggal 7 Juli 2017, susunan Dewan Pengawas dan Direksi TPK Koja sebagai berikut:

Based on the Joint Ownership Decree Number: SK.03/7/7/2/PBI/UT/PI.II-17 and Number: 115/SKB-HPI/VII/17 dated July 7, 2017, the Composition of Supervisory Board and Board of Directors of TPK Koja is as follows:

Dewan Pengawas <i>Supervisory Board</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>
Ketua Dewan Pengawas Chairman of Supervisory Board : Prasetyadi	General Manager : Hudadi Soerja Djanegara
Dewan Pengawas Supervisory Board : Muhammad Imron Zubaidy	DGM Keuangan DGM of Finance : Aris Soebagyo
Dewan Pengawas Supervisory Board : Kasman	DGM Operasi dan Informasi DGM of Operations and Information : Chang Ho Song
Dewan Pengawas Supervisory Board : Yos Nugroho	DGM Teknik DGM of Technical : Uzaimah
Dewan Pengawas Supervisory Board : Seto Baskoro	DGM SDM dan Administrasi DGM of HC and Administration : Yana Pratapa
Dewan Pengawas Supervisory Board : Marinus Rante Saroengallo	DGM Komersial DGM of Commercial : Achmad Syaicu

MANAJEMEN KERJASAMA OPERASI MASPION TERMINAL KENDARAAN INDONESIA (MKO MTKI)

Pada tanggal 9 April 2015, IKT mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur dengan PT Maspion Industrial Estate ("MIE") dengan membentuk MKO MTKI. Jangka waktu perjanjian adalah 25 tahun dengan porsi pendanaan IKT dan MIE masing-masing sebesar 45,00% dan 55,00%. Pada bulan Maret 2016, MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia telah beroperasi secara komersial dan bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan.

JOINT OPERATIONS MANAGEMENT OF MASPION INDONESIAN VEHICLE TERMINAL (MKO MTKI)

On April 9, 2015, IKT entered into a Cooperation Agreement for the Construction and Operation of Vehicle Terminal in Gresik East Java with PT Maspion Industrial Estate ("MIE") by forming MTKI MKO. The term of the agreement is 25 years with the portion of IKT and MIE funding respectively 45.00% and 55.00%. In March 2016, MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia has operated commercially and is engaged in the management of vehicle terminals.

Adapun Visi dan Misi Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia yakni:

The Vision and Mission of Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia are:

Visi Perusahaan <i>Company Vision</i>	Misi Perusahaan <i>Company Mission</i>
Menjadi salah satu pengelola Terminal Kendaraan yang membanggakan di Indonesia yang Unggul dalam Operasional dan Pelayanan	Sebagai pengelola terminal kendaraan yang memaksimalkan nilai tambah bagi seluruh Pemangku Kepentingan (Stakeholder) secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional.
To be one of the leading operators of Vehicle Terminals in Indonesia that excels in operations and services	As a vehicle terminal manager that maximizes added value for all Stakeholders on an ongoing basis in order to improve the national economy.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT CTP adalah sebagai berikut:

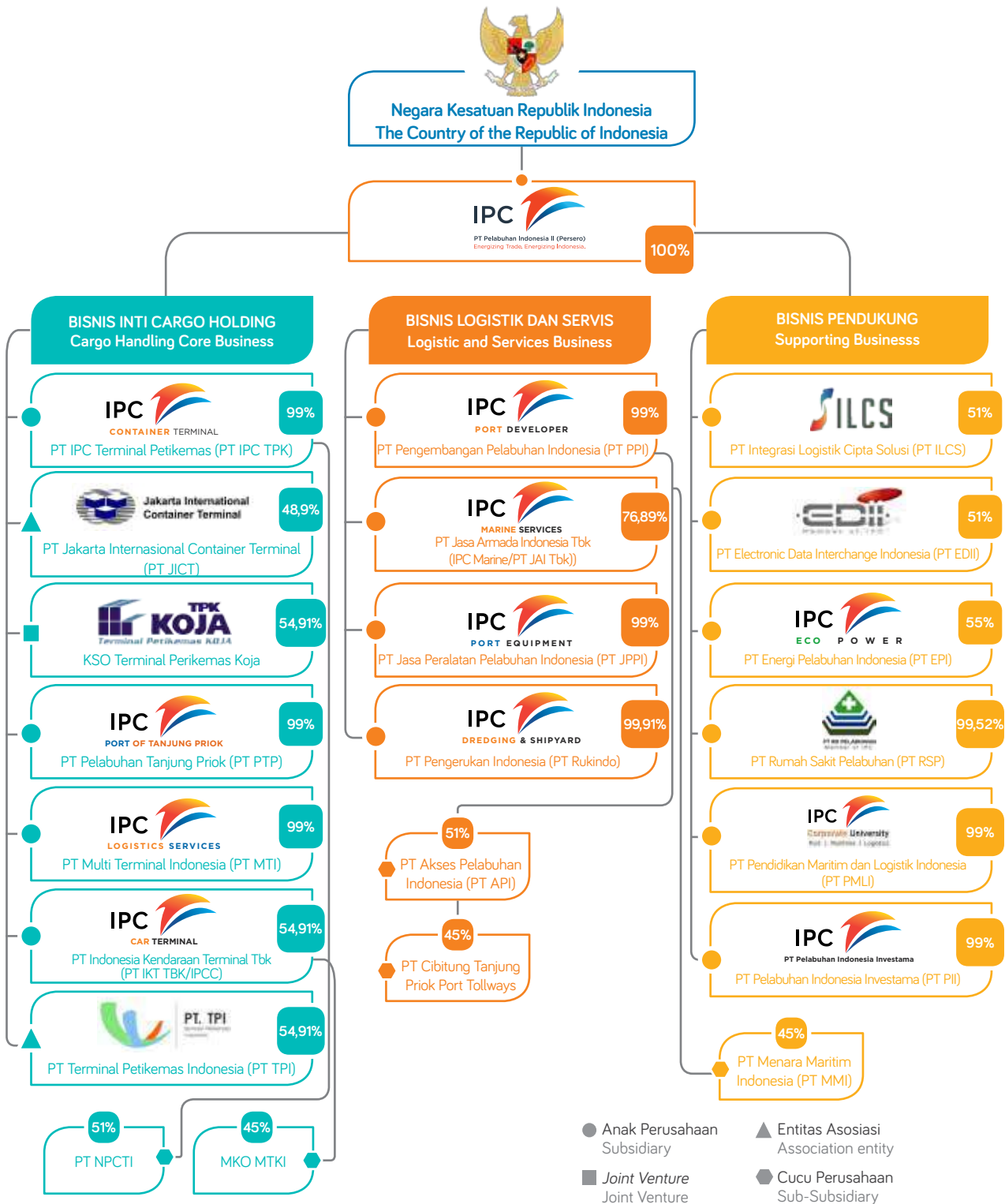
Based on the Decision of Shareholders of PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways, the composition of Board of Commissioners and Board of Directors of PT CTP is as follows:

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>
Komisaris Utama President Commissioner : Iwan Ridwan	Direktur Utama President Director : Ir. Thorry Hendrarto
Komisaris Commissioner : Oktarina Kartika Ayu	Direktur Director : Tri Yuharlina
	Direktur Director : Ari Sunaryono



STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

COMPANY GROUP STRUCTURE



Sampai dengan 31 Desember 2019, IPC tidak memiliki *Special Purpose Vehicle* (SPV).

As of December 31, 2019, IPC did not have a *Special Purpose Vehicle* (SPV).

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) per 31 Desember 2019 merupakan salah satu BUMN *Non Listed/Non* Keuangan atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek. Dengan demikian tidak terdapat informasi tentang tindakan korporasi (*corporate action*), harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi, dan nama bursa tempat saham Perseroan dicatatkan.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as of December 31, 2019 is a Non Listed/Non Financial SOE Company and does not yet list its shares on the Indonesia Stock Exchange. Therefore, there are no information regarding the share issuance year, total shares, shares value, proposing price for each corporate action, total listed shares after each corporate action and the stock company where the shares are listed.

Tabel Kronologis Pendirian Perseroan dan Penerbitan Saham Perseroan
Chronology of the Company's Establishment and Shares Issuance

No.	PP/ Akta No. dan Tanggal PP/Deed Number and Date	Notaris Notary	Pengesahan Ratification	Keterangan Remarks
1	PP No. 57 Tahun 1991 PP No. 57 of 1991	-	-	Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perum Pelabuhan II changed its form and become a Limited Liability Company (Persero).
2	Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 Desember 1992 Deed of Establishment No. 3 dated December 1, 1992	Imas Fatimah, S.H	Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 tanggal 17 Juni 1993 Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 dated June 17, 1993	Pendirian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) The establishment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
3	Akta No. 4 tanggal 5 Mei 1998 Deed No. 4 dated May 5 1998	Imas Fatimah, S.H	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. C2-17612.HT.01.04.TH.98 tanggal 6 Oktober 1998 Minister of Law and Human Rights No. C2-17612.HT.01.04.TH.98 dated October 6, 1998	Perubahan Anggaran Dasar Amendment to Articles of Association
4	Akta No. 2 tanggal 15 Agustus 2008 Deed No. 2 dated August 15, 2008	Agus Sudiono Kuntjoro, S.H	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-80894.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 November 2008 Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-80894.AH.01.02.Th 2008 dated November 3, 2008	Perubahan Anggaran Dasar. Telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12 Desember 2008 Amendment to Articles of Association. Has been announced in the Official Gazette of the Republic of Indonesia dated December 12, 2008
5	Akta No. 3 tanggal 30 Juli 2009 Deed No. 3 dated July 30, 2009	Agus Sudiono Kuntjoro, S.H	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-04026 tanggal 16 Februari 2010 Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-04026 dated February 16, 2010	Perubahan Anggaran Dasar. Amendment to Articles of Association



Tabel Kronologis Pendirian Perseroan dan Penerbitan Saham Perseroan
Chronology of the Company's Establishment and Shares Issuance

No.	PP/ Akta No. dan Tanggal PP/Deed Number and Date	Notaris Notary	Pengesahan Ratification	Keterangan Remarks
6	Akta No. 12 tanggal 21 September 2012 Deed No. 12 dated September 21, 2012	Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Pua, S.H., M.Kn.,	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-35061 tanggal 27 September 2012 Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-04026 dated February 16, 2010	Perubahan Anggaran Dasar terakhir. Amendment to Articles of Association
7	Akta Notaris No. 03 tanggal 02 Agustus 2013 Notarial Deed No. 03 dated August 2, 2013	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,	-	Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-38219 tanggal 12 September 2013 The additional issued and fully paid capital by the Company and has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Notification of Acceptance Letter No. AHU-AH.01.10-38219 dated September 12, 2013
8	Akta Notaris No. 03 tanggal 02 Agustus 2013 Notarial Deed No. 03 dated August 2, 2013	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000.000; • Dengan adanya penambahan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan/disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.017.611.000.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.000 • The Government of the Republic of Indonesia, in this case represented by the Minister of SOEs, added capital investment to the Company amounting to Rp426,418,000,000; • With the addition of capital from the Republic of Indonesia, the Company's issued/paid up capital which was originally Rp1,017,611,000,000 became Rp1,444,029,000,000
9	Akta No. 09 tanggal 21 Agustus 2019 Deed No. 09 dated August 21, 2019	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,	-	Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Changes in Types of Share and Changes in Articles of Association

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN OBLIGASI CHRONOLOGY OF BOND ISSUANCE AND/OR LISTING

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menerbitkan obligasi global (*Global Bond*) perdana senilai total USD1,60 miliar atau setara dengan Rp22,02 triliun pada tanggal 5 Mei 2015. Obligasi global tersebut terbagi menjadi 2 (dua) seri yaitu obligasi dengan jangka waktu 10 tahun dengan tanggal jatuh tempo tanggal 5 Mei 2025 tingkat bunga 4,250% per tahun dan 30 tahun dengan tanggal jatuh tempo tanggal 5 Mei 2045 tingkat bunga 5,375% per tahun yang dibayarkan 2 (dua) kali dalam setahun.

Nama Bursa Tempat Obligasi Perseroan Dicatatkan

Obligasi Global (*Global Bond*) ini tercatat di Bursa Efek Singapura dan telah meraih peringkat internasional dari berbagai lembaga pemeringkat, yaitu:

Peringkat tahun 2015:

- S&P : BB+ (*Outlook : Stable*)
- Moody's : Baa3 (*Outlook : Stable*)
- Fitch : BBB- (*Outlook : Stable*)

Peringkat Tahun 2016:

- S&P : BB+ (*Outlook : Positive*)
- Moody's : Baa3 (*Outlook : Stable*)
- Fitch : BBB- (*Outlook : Stable*)

Peringkat tahun 2017:

- S&P : BBB- (*Outlook : Stable*)
- Moody's : Baa3 (*Outlook : Positive*)
- Fitch : BBB- (*Outlook : Positive*)

Peringkat tahun 2018:

- S&P : BBB- (*Outlook : Stable*)
- Moody's : Baa2 (*Outlook : Stable*)
- Fitch : BBB (*Outlook : Stable*)

Peringkat tahun 2019:

- S&P : BBB (*Outlook : Stable*)
- Moody's : Baa2 (*Outlook : Stable*)
- Fitch : BBB (*Outlook : Stable*)

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has issued its first Global Bond in the amount of USD1.60 billion, or equivalent to Rp22.02 trillion, on May 5, 2015. The global bond was divided into 2 (two) series, namely 10 year bond with due date on May 5, 2015 and coupons of 4.250% per year, and 30 year bond with due date on May 5, 2045 and coupons of 5.375% per year, paid twice a year.

Name of the Stock Exchange where the Company's Bonds are Listed

The Global Bond is listed on the Singapore Stock Exchange and has attained international ratings from various rating agencies, namely:

2015 Rating:

- S&P: BB+ (Outlook: Stable)
- Moody's: Baa3 (Outlook: Stable)
- Fitch: BBB- (Outlook: Stable)

2016 Rating:

- S&P: BB+ (Outlook: Positive)
- Moody's: Baa3 (Outlook: Stable)
- Fitch: BBB- (Outlook: Stable)

2017 Rating:

- S&P: BBB- (Outlook: Stable)
- Moody's: Baa3 (Outlook: Positive)
- Fitch: BBB- (Outlook: Positive)

2018 Rating:

- S&P: BBB- (Outlook: Stable)
- Moody's: Baa2 (Outlook: Stable)
- Fitch: BBB (Outlook: Stable)

2019 Rating:

- S&P : BBB (Outlook : Stable)
- Moody's : Baa2 (Outlook : Stable)
- Fitch : BBB (*Outlook : Stable*)



No.	Uraian Description	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik Date of Bond Electronic distribution	Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Obligasi (miliar) Amount of Bonds (billion)	Harga Penawaran per Lembar (USD) Offering Price per Sheet (USD)
1.	Obligasi Global (<i>Global Bond</i>) Seri 1	05 Mei 2015 May 05, 2015	10 tahun 10 years	USD	1,1	98.996
2.	Obligasi Global (<i>Global Bond</i>) Seri 2		30 tahun 30 years		0,5	98.996

Tabel Kronologis Pembayaran Bunga Obligasi Global (Global Bond) PT Pelindo II (Persero)
Chronology of Payment for PT Pelindo II (Persero) Global Bond

Bunga Ke- Interest	Tanggal Pembayaran Bunga Interest Payment Date	Status Pembayaran Bunga Interest Payment Status
1.	5 November 2015 November 5, 2015	Telah dibayarkan Has been paid
2.	5 Mei 2016 May 5, 2016	Telah dibayarkan Has been paid
3.	5 November 2016 November 5, 2016	Telah dibayarkan Has been paid
4.	5 Mei 2017 May 5, 2017	Telah dibayarkan Has been paid
5.	5 November 2017 November 5, 2017	Telah dibayarkan Has been paid
7.	5 Mei 2018 May 5, 2018	Telah dibayarkan Has been paid
8.	5 November 2018 November 5, 2018	Telah dibayarkan Has been paid
9.	5 Mei 2019 May 5, 2019	Telah dibayarkan Has been paid
10.	5 November 2019 November 5, 2019	Telah dibayarkan Has been paid

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN OBLIGASI
CHRONOLOGY OF BOND ISSUANCE AND/OR LISTING

	Tanggal Jatuh Tempo <i>Maturity Date</i>	Tingkat Suku Bunga <i>Interest Rate</i>	Status Pembayaran <i>Payment Status</i>	Peringkat <i>Rating</i>		Dicatatkan di <i>Listed in</i>
				2019	2018	
	05 Mei 2025 May 05, 2025	4.250% per tahun 4.250% per year	Pembayaran akan dilakukan pada saat jatuh tempo	S&P: BBB (<i>Outlook: Stable</i>) Moody's: Baa2 (<i>Outlook: Stable</i>)	S&P: BBB- (<i>Outlook: Stable</i>) Moody's: Baa2 (<i>Outlook: Stable</i>)	Singapore Stock Exchange
	05 Mei 2045 May 05, 2045	5.375% per tahun 5.375% per year	Payment will be made at maturity	Fitch: BBB (<i>Outlook: Stable</i>)	Fitch: BBB (<i>Outlook: Stable</i>)	



KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES ISSUANCE AND/LISTING

Sampai dengan 31 Desember 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak memiliki efek lainnya sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya selain obligasi.

As of December 31, 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has no other securities, hence there is no information regarding chronology of issuance and/or listing of other securities other than bond.

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG NAME AND ADDRESS OF SUPPORTING INSTITUTIONS AND/OR PROFESSIONALS

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm		
Purwanto, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernest & Young Global Limited)		
Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 12190 Tel.: +62 21 52895000 Fax: : +62 21 52895555 Website: //www.ey.com Email: dudi.muhammad.kurniawan@id.ey.com dan wibisono.wibisono@id.ey.com		
Jasa Utama Main Services	:	Melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Yang berlaku di Indonesia.
Jasa Lainnya Other Services:	:	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan prosedur atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Pencapaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; Melaksanakan audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern tahun buku 2019; Melaksanakan audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; Melaksanakan prosedur yang disepakati atas Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) sesuai dengan Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia.
Jumlah Periode Audit Total Audit Period	:	6 tahun (2014–2019)
Besaran Fee Fee	:	Rp3.874.519.000 (Tahun 2019)
		6 years (2014–2019)
		Rp3,874,519,000 (2019)

Pencatatan Obligasi Bond Listing		
Singapore Exchange Securities Trading Limited		
2 Shenton Way #02-02 SGX Centre 1 Singapore 068804 www.sgx.com Tel : +65 6236 8888 Fax : +65 6535 6994 Website: https://www2.sgx.com/ Email: sgxnet.services@sgx.com		
Jasa yang diberikan Services provided	:	Pencatatan Obligasi
Periode Penugasan Assignment period	:	2015–Saat ini.
		Bond Listing
		2015–Present.



Lembaga Pemeringkat
Rating Agency

Moody's Investors Service Singapore Pte. Ltd

50 Raffles Place #23-06 Singapore Land Tower Singapore 048623
Tel : +65 6398 8300
Fax : +65 6398 8301
Website: www.moodys.com
Email: -

Jasa yang diberikan Services provided	: Lembaga Pemeringkat	Rating Agency
Periode Penugasan Assignment period	: 2015 – Saat ini.	2015 - Present.

Fitch Ratings Ltd

30 North Colonnade London E14 5GN
United Kingdom
Tel : +44 (0)20 3530 1000
Fax : +44 (0)20 3530 1500
Website: www.fitchratings.com
Email:

Jasa yang diberikan Services provided	: Lembaga Pemeringkat	Rating Agency
Periode Penugasan Assignment period	: 2015 – Saat ini.	2015 - Present.

Standard & Poor's Singapore Pte. Ltd

12 Marina Boulevard #23-01 Marina Bay Financial Centre Tower 3 Singapore 018982
Tel : +65 6438 2881
Fax : +65 6438 2320
Website: www.standardandpoors.com
Email:

Jasa yang diberikan Services provided	: Lembaga Pemeringkat	Rating Agency
Periode Penugasan Assignment period	: 2015 – Saat ini.	2015 - Present.

Wali Amanat
Trustee

The Bank of New York

Mellon One Temasek Avenue #03-01
Millenia Tower Singapore 039192
Tel : +65 6432 0222
Fax : +65 6883 0338
Website: www.bnymellon.com
Email: -

Jasa yang diberikan Services provided	: Wali Amanat	Trustee
Periode Penugasan Assignment period	: 2015 – Saat ini.	2015 - Present.

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG
NAME AND ADDRESS OF SUPPORTING INSTITUTIONS AND/OR PROFESSIONALS

Notaris <i>Notary</i>	
Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn	
Royal Palace Blok C/16 Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178 A, Jakarta Tel : +62 21 8313383 Fax: +62 21 83134308 <i>Email: nanda.fauz@gmail.com</i>	
Jasa yang diberikan Services provided	: Notarialisasi Notary
Periode Penugasan Assignment period	: 21 Maret 2019 – 20 Maret 2020 (selama 12 bulan sejak perjanjian). March 21, 2019 - March 20, 2020 (for 12 months from the agreement).
Konsultan Hukum <i>Legal Consultant</i>	
ASREK & CO Law Firm	
Jl. Trip K. Jamaksari No.1, Serang, Banten Tel: +62 54 7001064 Fax: +62 201472 <i>Email: asrek_co1@yahoo.co.id</i> Jasa yang diberikan: Konsultan permasalahan lahan di bojonegara Periode Penugasan: tahun 2015 Services provided: Consultant on land issues in Bojonegara Assignment Period: 2015	
Widjojanto, Sonhadji & Associate	
City Loft Sudirman, Lt 21 Suite 2108 Jl KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Tel : +62 21 25556740 Fax: +62 21 25556741 <i>Email: Wsalawfirm@gmail.com</i> Jasa yang diberikan: Konsultan Hukum Periode Penugasan: 13 Februari 2017 s/d 12 Februari 2018 Services provided: Legal Consultant Appointment Period: February 13, 2017 until February 12, 2018	
Kemalsjah & Associates	
Graha CIMB Niaga, Lantai 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Tel: +62 21 2505010 Fax: - <i>Email: Kemal@kemalsjahlaw.com</i> Jasa yang diberikan: Konsultan Hukum Periode Penugasan: Berlaku sejak 13 November 2019 sampai dengan putusan diterima Services provided: Legal Consultant Assignment Period: from November 13, 2019 until the verdict is accepted	
A. Hakim Garuda Nusantara, Harman & Partners	
Office 8 th , Lantai 12 Jl. Senopati Raya No. 8B, Jakarta Tel: +62 21 29333122 Fax: +62 21 29333125 <i>Email: ahgn@nhplaw.com</i> Jasa yang diberikan: Konsultan Hukum Periode Penugasan: Sejak Surat Kuasa Khusus (SKK) diberikan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (perjanjian sudah berakhir, karena putusan kasasi sudah diterima) Assignment Period: Since the Special Power of Attorney (SKK) is given until court decision with permanent legal force is valid (the agreement has expired, because the cassation decision has been received)	



Prof. Oemar Seno Adji, S.H., & Rekan

Jl. Tulodong Bawah Blok D No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tel: (021) 5703299

Fax: (021) 25556741

Email: osa_lawfirm@yahoo.co.id

Jasa yang diberikan: Kepengacaraan/Advokasi

Periode Penugasan: Berlaku sejak ditandatangani (1 Agustus 2017) s/d putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

Services provided: Advocacy

Assignment Period: Valid since signatory (August 1, 2017) until the court's decision is legally binding

Kiagus Ahmad & Associates

Menara Rajawali Lantai 8, Mega Kuningan Jakarta, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan

Tel: (021)576 2722 / 085310459900 (Kiagus Ahmad Bella Sati)

Fax: -

Email: Contact@kiaguslaw.com

Jasa yang diberikan: Kepengacaraan/Advokasi

Periode Penugasan: Jangka waktu 1 tahun atau sampai pekerjaan selesai terhitung sejak 1 Oktober 2019

Services provided: Advocacy

Assignment Period: 1 year or until the work is completed from October 1, 2019

Rahmad Irwan & Partners

Gandaria 8 Office Lantai 15 D, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240

Tel: (021) 29303560, 29303570, 29303580 / 081212801560 (Rahmad Irwan)

Fax: (021) 29303581

Email: rahmad.irwan@yahoo.com

Jasa yang diberikan: Kepengacaraan/Advokasi

Periode Penugasan: Jangka waktu selama 1 tahun atau sejak putusan inkrah Terhitung sejak 15 November 2019

Services provided: Advocacy

Assignment Period: 1 year or since the inkrah decision, since November 15, 2019

SAY'n Partners Law Firm

Gedung Menara MTH, Lantai 11 – Suite 1107 Jl. Letjen MT Haryono Kav 23, Tebet – Pancoran, Jakarta Selatan

Tel: (021) 83788531

Fax: (021) 83788532

Email: Saypartnerlawfirm@gmail.com

Jasa yang diberikan:

Periode Penugasan: Kepengacaraan/Advokasi

Services provided:

Assignment Period: Advocacy

Radjiman Billitea & Partners

The H Tower, 19th Floor, Suite E Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C. 20 – 21 Jakarta 12940

Tel: (021) 29516868

Fax: (021) 29516869

Email: andri@rbplaw.co.id

Jasa yang diberikan: Kepengacaraan/Advokasi

- a. Memberikan advis-advis dan konsultasi di bidang korporasi sehubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan sehari-hari maupun kegiatan transaksi khusus lainnya;
- b. Mempersiapkan dan/atau melakukan review terhadap draft-draft surat korespondensi yang diterbitkan oleh perusahaan;
- c. Mempersiapkan dan/atau melakukan review terhadap draft-draft perjanjian yang diperlukan Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pihak ketiga dengan kegiatan usaha sehari-hari dan/atau transaksi-transaksi perusahaan;
- e. Memberikan pendapat hukum atas permasalahan korporasi;
- f. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Perusahaan dan dengan pihak-pihak terkait guna memberikan paparan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan maupun atas pendapat hukum yang disampaikan oleh Konsultan RBP;
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan tindakan-tindakan dan/atau kebijakan yang diambil terkait dengan kegiatan perusahaan;
- h. Melakukan identifikasi resiko-resiko, kajian strategis atas penyusunan mitigasi-mitigasi penanganan resiko kepada Perusahaan berdasarkan pemeriksaan dokumen dan hasil kajian hukum sebagaimana diuraikan di atas, sehubungan dengan transaksi. Periode Penugasan: 12 bulan
Besaran Fee: Rp. 896.500.000,-

Services provided: Advocacy

- a. Providing advice and consultation in corporate matters related to daily business activities and other special transaction activities;
- b. Preparing and / or conducting review on the draft of correspondence letters issued by company;
- c. Preparing and / or conducting review of Company's agreements draft for its business activities;
- d. Reviewing the laws and regulations related to third parties or daily business activities and / or company transactions;
- e. Providing legal opinion on corporate matters;
- f. Holding meetings with Company and related parties to provide exposure to relevant laws and regulations as well as legal opinions submitted by RBP Consultants;
- g. Checking all documents related to actions and / or policies taken related to company activities;
- h. Identifying risks, conducting strategic review of Company's risk mitigation based on documents and the results of legal review described above, in connection with the transaction. Assignment Period: 12 months Fee: Rp. 896,500,000..

Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR)

Graha CIMB Niaga 25th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta 12190

Tel: (021) 2505125 / 08111554520 (Ayik Candrawulan gunadi)

Fax: (021) 2505001

Email: info@abnrllaw.com

Jasa yang diberikan: Kepengacaraan/Advokasi

Periode Penugasan: 3 bulan

Services provided: Advocacy

Assignment Period: 3 months

Tjajo & Partners

Satrio Tower 15th Floor Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4 Jakarta 12950

Tel: (021) 22513653

Fax: (021) 22513555

Email: general.mail@tjajolaw.id

Jasa yang diberikan: Kepengacaraan/Advokasi

Periode Penugasan: 15 bulan

Services provided: Advocacy

Assignment Period: 15 months



ADVOKAT

ADVOCATE

No.	Nama Kantor Advokat <i>Name of Advocate Office</i>	Alamat <i>Address</i>	Nomor Telepon <i>Phone Number</i>	Nomor Fax <i>Fax Number</i>	Contact Person <i>Contact Person</i>
1.	A. Hakim Garuda Nusantara, Harman & Partners	Office 8, lantai 12 Jl. Senopati Raya No.8 B, Jakarta Selatan.	(021) 29333122, 29333123, 29333124.	(021) 29333125	A. Hakim Garuda Nusantara
2.	Kemalsjah & Associates	Graha CIMB Niaga, lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman kav.58, Jakarta.	(021) 2505010.		A. Kemalsjah Siregar
3.	Kiagus Ahmad & Associates	Menara Rajawali Lantai 8, Mega Kuningan Jakarta, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan	(021) 576 2722		Kiagus Ahmad Bella Sati
4.	Rahmad Irwan & Partners	Gandaria 8 Office Lantai 15 D, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240	(021) 29303560, 29303570, 29303580	(021) 29303581	Rahmad Irwan
5.	Radjiman Billitea & Partners	The H Tower, 19th Floor, Suite E Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C. 20 – 21 Jakarta 12940	(021) 29516868	(021) 29516869	Savitri Kusumawardhani
6.	Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR)	Graha CIMB Niaga 25 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta 12190	(021) 2505125	(021) 2505001	Ayik Candrawulan Gunadi
7.	Tjajo & Partners	Satrio Tower 15 th Floor Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4 Jakarta 12950	(021) 22513653	(021) 22513555	

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG
NAME AND ADDRESS OF SUPPORTING INSTITUTIONS AND/OR PROFESSIONALS

E Mail	Jasa Yang Diberikan <i>Service Provided</i>	Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>
ahgn@nhplaw.com	Konsultan Hukum Legal Consultant	Sejak Surat Kuasa Khusus (SKK) diberikan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (perjanjian sudah berakhir, karena putusan kasasi sudah diterima) Since the Special Power of Attorney (SKK) is given until the court verdict with permanent legal force (the agreement has ended, because the cassation decision has been received)
Kemal@kemalsjahlaw.com	Konsultan Hukum Legal Consultant	Berlaku sejak 13 November 2019 sampai dengan putusan diterima Valid from November 19, 2019 until the verdict is accepted
Contact@kiaguslaw.com	Konsultan Hukum Legal Consultant	Jangka waktu 1 tahun atau sampai pekerjaan selesai terhitung sejak 1 Oktober 2019 1-year period until the work is completed from October 1, 2019
rahmad.irwan@yahoo.com	Konsultan Hukum Legal Consultant	Jangka waktu selama 1 tahun atau sejak putusan inkrah Terhitung sejak 15 November 2019 1-year period or from the date of the inkrah decision as of November 15, 2019
vinna@rbplaw.co.id andri@rbplaw.co.id	Konsultan Hukum Legal Consultant	Jangka waktu 3 bulan sejak 3 Oktober 2019 3 months period from October 3, 2019
info@abnrlaw.com	Kepengacaraan/Advokas Advocacy	Jangka waktu 3 bulan sejak 22 Januari 2019 (sudah berakhir) 3 months period from January 22, 2019 (already completed)
general.mail@tjajolaw.id	Konsultan Hukum Legal Consultant	Jangka waktu 15 bulan sejak 1 Januari 2019 15 months period from January 1, 2019



No.	Nama Kantor Advokat <i>Name of Advocate Office</i>	Alamat <i>Address</i>	Nomor Telepon <i>Phone Number</i>	Nomor Fax <i>Fax Number</i>	Contact Person <i>Contact Person</i>
8.	Akmalsyah & Co	The ABISATYA 2 nd , Jl. Kalibata Utara II No. 25, Pancoran, Jakarta Selatan 12740	(021) 79172354		Damba Summa Akmala
9.	Muhtar Halim & Partners	Citylofts Sudirman, 19th Floor, Suite 1907 Jl. KH Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220	(021) 29912898	(021) 29912897	Muhtar Ali
10.	Sugih Ardhian Pramono & Partners	Gedung Dana Pensiun Telkom, Jl. Letjen S. Parman, Slipi, Jakarta 11410	(021) 53653623		Achmad Yudha Ardhian
11.	Andyka Andlan Law Firm & Partners	Jl. Merdeka Nomor 1069/C RT 05 RW 02 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil, Palembang	081272001400		Andyka Andlan Tama
12.	Jusuf Indradewa & Partners	Menara BCA (Gradn Indonesia) Lantai 50 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat 10310	(021) 22544117	(021) 22544367	Cecilia Sianawati
13.	Imanuddin, Gazali & Partner	Cilandak Apartment 5th Floor Room 10 Jl. Let. Jend. TB Simatupang Kav. 17, Jakarta 12430	(021) 7665942	(021) 7665943	Agus Imanuddin
14.	Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn	Royal Palace Blok C/16 Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178 A, Jakarta	(021) 8313383	(021) 83134308	Nanda Fauz Iwan

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG
NAME AND ADDRESS OF SUPPORTING INSTITUTIONS AND/OR PROFESSIONALS

E Mail	Jasa Yang Diberikan <i>Service Provided</i>	Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>
info@akmalsyah.com	Kepengacaraan/Advokas Advocacy	Terhitung sejak 31 Desember 2019 sampai dengan salinan putusan diterima As of December 31, 2019 until a copy of the decision is received
muhtar.ali@mhplawoffice.com	Konsultan Hukum Legal Consultant	Jangka waktu 12 bulan sejak 20 Juni 2019 12 months period from June 20, 2019
sap.partners@yahoo.com	Konsultan Hukum Legal Consultant	
nugroho_adv@yahoo.co.id	Konsultan Hukum Legal Consultant	Jangka waktu 1 tahun sejak 27 September 2019 atau sampai dengan putusan diterima 1 year period from September 27, 2019 or until the verdict is accepted
Info@jusufind.com , cecilianawati@jusufind.com	Kepengacaraan/Advokasi Advocacy	5 Bulan 5 Month
agusimanuddin@igplawyers.com	Kepengacaraan/Advokasi Advocacy	1 Tahun 1 year
nanda.fauz@gmail.com	Notaris Notary	21 Maret 2019 - 20 Maret 2020 March 21, 2019 - March 20, 2020



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI AWARDS & CERTIFICATION

- 1**

Nama Penghargaan / Award Name: Gold Winner Kategori the Best of State Owned Enterprises

Acara / Event: Inhouse Magazine Awards 2019

Penyelenggara / Organizer: Serikat Perusahaan Pers (SPS) Union of Press Companies (SPS)

Tanggal / Date: 7 Februari 2019
February 7, 2019
- 2**

Nama Penghargaan / Award Name: Gold Winner Kategori the Best of E-Magazine State Owned Enterprises

Acara / Event: Inhouse Magazine Awards 2019

Penyelenggara / Organizer: Serikat Perusahaan Pers (SPS) Union of Press Companies (SPS)

Tanggal / Date: 7 Februari 2019
February 7, 2019
- 3**

Nama Penghargaan / Award Name: Silver Winner Kategori the Best of State Owned Enterprises

Silver Winner in The Best of State-Owned Enterprises category

Acara / Event: Inhouse Magazine Awards 2019

Penyelenggara / Organizer: Serikat Perusahaan Pers (SPS) Union of Press Companies (SPS)

Tanggal / Date: 7 Februari 2019
February 7, 2019
- 4**

Nama Penghargaan / Award Name: Ranking 1 Predikat: Platinum (Kategori BUMN)

Rank 1 for Platinum Predicate (SOE category)

Acara / Event: Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award IV 2019

Penyelenggara / Organizer: Majalah Economic Review
Economic Review Magazine

Tanggal / Date: 22 Februari 2019
February 22, 2019
- 5**

Nama Penghargaan / Award Name: Innovative Company in Developing Marine Operating System (MOS) Category: Transportation & Warehousing.

Acara / Event: Indonesia Digital Innovation Award 2019

Penyelenggara / Organizer: Majalah Warta Ekonomi
Warta Ekonomi Magazine

Tanggal / Date: 22 Februari 2019
February 22, 2019
- 6**

Nama Penghargaan / Award Name: Obsession Awards 2019, Elvyn G. Masassya, Best CEO'S

Acara / Event: Obsession Award 2019

Penyelenggara / Organizer: Obsession Media Group (Majalah Mens Obsession)
Obsession Media Group (Mens Obsession Magazine)

Tanggal / Date: 6 Maret 2019
March 6, 2019
- 7**

Nama Penghargaan / Award Name: Ranking 1 Predikat: Platinum (Kategori BUMN)

Rank 1 for Platinum Predicate (SOE category)

Acara / Event: Indonesia CSR Award III 2019

Penyelenggara / Organizer: Majalah Economic Review
Economic Review Magazine

Tanggal / Date: 7 Maret 2019
March 7, 2019
- 8**

Nama Penghargaan / Award Name: Prasetyadi sebagai The Most Influential CIO

Prasetyadi as The Most Influential CIO

Acara / Event: iCIO Awards 2019

Penyelenggara / Organizer: iCIO Community

Tanggal / Date: 13 Maret 2019
March 13, 2019



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS & CERTIFICATION

9

Nama Penghargaan / Award Name: Big Corporate Kategori Tata Kelola Terbaik
Big Corporate for Best Governance Category

Acara / Event: Anugerah BUMN 2019
SOE Award 2019

Penyelenggara / Organizer: BUMN Track & PPM Manajemen
BUMN Track & PPM Management

Tanggal / Date: 28 Maret 2019
March 28, 2019

10

Nama Penghargaan / Award Name: Pemenang Kategori BUMN Non Tbk. Terpopuler di Media
Winner of the Most popular Non-Tbk SOE in the media category

Acara / Event: PR Indonesia Awards 2019

Penyelenggara / Organizer: Majalah PR Indonesia
PR Indonesia Magazine

Tanggal / Date: 28 Maret 2019
March 28, 2019

11

Nama Penghargaan / Award Name: Penghargaan atas Dukungan dan Partisipasi Pelaksanaan Program Strategis Pertanahan Tahun 2018 di Kalimantan Barat
Appreciation for Supporting and Participating in the Implementation of the 2018 Strategic Land Program in West Kalimantan

Acara / Event: Piagam Penghargaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Piagam Penghargaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Penyelenggara / Organizer: Menteri Agraria dan Tata Ruang
Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning

Tanggal / Date: 23 April 2019
April 23, 2019

12

Nama Penghargaan / Award Name: Silver Winner the Most Promising Company In Entrepreneurial SOEs.

Acara / Event: BUMN Marketeers Award 2019

Penyelenggara / Organizer: Forum Humas BUMN dan MarkPlus.
SOE PR Forum and MarkPlus

Tanggal / Date: 24 April 2019
April 24, 2019

13

Nama Penghargaan / Award Name: Silver Winner the Most Promising Company in Tactical Marketing

Acara / Event: BUMN Marketeers Award 2019

Penyelenggara / Organizer: Forum Humas BUMN dan MarkPlus
SOE PR Forum and MarkPlus

Tanggal / Date: 24 April 2019
April 24, 2019

14

Nama Penghargaan / Award Name: Silver Winner The Most Promising Company In Strategic Marketing

Acara / Event: BUMN Marketeers Award 2019

Penyelenggara / Organizer: Forum Humas BUMN dan MarkPlus
SOE PR Forum and MarkPlus

Tanggal / Date: 24 April 2019
April 24, 2019

15

Nama Penghargaan / Award Name: Silver Winner the Most Promising Company In Marketing 3.0

Acara / Event: BUMN Marketeers Award 2019

Penyelenggara / Organizer: Forum Humas BUMN dan MarkPlus
SOE PR Forum and MarkPlus

Tanggal / Date: 24 April 2019
April 24, 2019

16

Nama Penghargaan / Award Name: Smart BUMN

Acara / Event: Teropong BUMN Award 2019

Penyelenggara / Organizer: Teropong Senayan.com

Tanggal / Date: 10 Mei 2019
May 10, 2019





17

Nama Penghargaan / Award Name: PKBL Terbaik Pengelola Pelabuhan (Program Unggulan Peningkatan Kesejahteraan Veteran)

The Best PKBL of Port Managers (Flagship Program for Veterans Welfare Improvement)

Acara / Event:

Anugerah PKBL Indonesia 2019 Indonesia PKBL Award 2019

Penyelenggara / Organizer:

Warta Ekonomi

Tanggal / Date:

27 Mei 2019
May 27, 2019

18

Nama Penghargaan / Award Name: Indonesia Most Creative Company 2019

Acara / Event:

Outstanding Corporate Innovator (OCI) Award 2019

Penyelenggara / Organizer:

Majalah SWA
SWA Magazine

Tanggal / Date:

17 Juni 2019
June 17, 2019

19

Nama Penghargaan / Award Name: Marketeers Omni Brand of the Year 2019

Acara / Event:

Marketeers Omni Brand of the Year 2019

Penyelenggara / Organizer:

MarkPlus. Inc

Tanggal / Date:

24 Juni 2019
June 24, 2019

20

Nama Penghargaan / Award Name: 2nd The Best Indonesia Risk Management 2019 Category : State Owned Enterprises (BUMN)

Acara / Event:

Indonesia Enterprise Risk Management Award III 2019

Penyelenggara / Organizer:

Majalah Economic Review
Economic Review Magazine

Tanggal / Date:

3 Agustus 2019
August 3, 2019

21

Nama Penghargaan / Award Name: Top GRC 2019 #4 Stars

Acara / Event:

TOP GRC Awards 2019

Penyelenggara / Organizer:

Majalah Top Business
Top Business Magazine

Tanggal / Date:

22 Agustus 2019
August 22, 2019

22

Nama Penghargaan / Award Name: Elvyn G. Masassya sebagai The Most Committed GRC Leader 2019

Elvyn G. Masassya as The Most Committed GRC Leader 2019

Acara / Event:

TOP GRC Awards 2019

Penyelenggara / Organizer:

Majalah Top Business
Top Business Magazine

Tanggal / Date:

22 Agustus 2019
August 22, 2019

23

Nama Penghargaan / Award Name: Social Economy Contribution Gold

Acara / Event:

RRI BUMN Award 2019

Penyelenggara / Organizer:

RRI & Iconomics

Tanggal / Date:

26 September 2019
September 26, 2019

24

Nama Penghargaan / Award Name: Pelaksana Dokumentasi Program BHUN Terbaik II Dalam Rangka Pelaksanaan Program BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2018

The Second Best Documentation of BHUN Program in SOE Present for the Country Program in 2018

Acara / Event:

BUMN Hadir Untuk Negeri Award 2019

SOE Present For the Country Award 2019

Penyelenggara / Organizer:

Kementerian BUMN

Tanggal / Date:

6 Oktober 2019
October 6, 2019



25

Nama Penghargaan / Award Name:
Best In Class Award

Acara / Event:
Global Performance Excellence Awards 2019

Penyelenggara / Organizer:
Asia Pacific Quality Organization, Inc. (APQO)

Tanggal / Date:
15 Oktober 2019
October 15, 2019

26

Nama Penghargaan / Award Name:
Elvyn G. Masassya President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan kategori APQO President Award For Demonstrated Excellence 2019
Elvyn G. Masassya President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in the category of APQO President Award For Demonstrated Excellence 2019

Acara / Event:
AIIA 2019 Awards

Penyelenggara / Organizer:
Asia Pacific Quality Organization, Inc. (APQO)

Tanggal / Date:
15 Oktober 2019
October 15, 2019

27

Nama Penghargaan / Award Name:
Elvyn G. Masassya sebagai the Best CEO of State Owned Enterprise (SOE) Kategori Global Vision 2019
Elvyn G. Masassya as The Best CEO Of State-Owned Enterprise (SOE) Global Vision 2019

Acara / Event:
Infobank the Best SOE 2019

Penyelenggara / Organizer:
Majalah Infobank

Tanggal / Date:
25 Oktober 2019
October 25, 2019

28

Nama Penghargaan / Award Name:
The Best State Owned Enterprise (SOE) Tahun 2019

Acara / Event:
Infobank The Best SOE 2019

Penyelenggara / Organizer:
Majalah Infobank
Infobank Magazine

Tanggal / Date:
25 Oktober 2019
October 25, 2019

29

Nama Penghargaan / Award Name:
Choir Competition Vocal Group & Acapella Category Achieving Silver Medal

Acara / Event:
Jakarta World Choir Festival 2019

Penyelenggara / Organizer:
Bandung Choral Society

Tanggal / Date:
27 Oktober 2019
October 27, 2019

30

Nama Penghargaan / Award Name:
Top 10 Innovative SOE Category: Transporting & Warehousing

Acara / Event:
*BUMN Award 2019
SOE Award 2019*

Penyelenggara / Organizer:
Warta Ekonomi

Tanggal / Date:
28 Oktober 2019
October 28, 2019





31

Nama Penghargaan / Award Name:
Peringkat 1 BUMN Non Keuangan Non Listed
Penghargaan Laporan Tahunan 2018
1st Rank Non-Financial Non Listed SOE 2018 Annual
Report Award

Acara / Event:
Annual Report Award 2018

Penyelenggara / Organizer:
Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bursa
Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
Bank Indonesia (BI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI),
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
Ministry of Finance, Ministry of SOE, Indonesian
Stock Exchange (BEI), Financial Services Authority
(OJK), Bank Indonesia (BI), Indonesian Accountants
Association (IAI), National Committee on
Governance Policy (KNKG)

Tanggal / Date:
14 November 2019
November 14, 2019

34

Nama Penghargaan / Award Name:
Trusted Company Based on Corporate
Governance Perception Index (CGPI)

Acara / Event:
Indonesia Good Corporate Governance
Award 2019

Penyelenggara / Organizer:
Majalah SWA
SWA Magazine

Tanggal / Date:
11 Desember 2019
December 11, 2019

32

Nama Penghargaan / Award Name:
Gold Organisasi Besar Jasa
Gold Large Services Organization

Acara / Event:
SNI Award 2019

Penyelenggara / Organizer:
Badan Standardisasi Nasional
National Standardization Agency

Tanggal / Date:
20 November 2019
November 20, 2019

33

Nama Penghargaan / Award Name:
Badan Publik Cukup Informatif Dalam
Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Informative Public Institution In Implementing
Law Number 14 Year 2008 Regarding Public
Information Disclosure

Acara / Event:
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2019
Award for Public Information Disclosure 2019

Penyelenggara / Organizer:
Komisi Informasi Pusat
Central Information Commission

Tanggal / Date:
21 November 2019
November 21, 2019

35

Nama Penghargaan / Award Name:
Sertifikat Green Port
Green Port Certificate

Acara / Event:
Peringatan Hari Nusantara
Commemoration of Nusantara Day

Penyelenggara / Organizer:
Kementerian Koordinator Maritim dan
Investasi
Ministry of Maritime and Investment

Tanggal / Date:
14 Desember 2019
December 14, 2019

36

Nama Penghargaan / Award Name:
Most Admired CEO 2019 - Excellent
Leadership for Strategic Transformation
Into Global Standard Business Category
Transportation

Acara / Event:
Indonesia Most Admired CEO 2019

Penyelenggara / Organizer:
Warta Ekonomi

Tanggal / Date:
16 Desember 2019
December 16, 2019



Penghargaan Cabang
Port Branch Award

Cabang Pelabuhan Bengkulu
Bengkulu Port Branch

Nama Penghargaan / Award Name:
Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Award for Occupational Safety and Health Management Systems

Acara / Event:
Penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan
Award from the Ministry of Manpower

Penyelenggara / Organizer:
Kementerian Ketenagakerjaan
Ministry of Manpower

Tanggal / Date:
29 Maret 2019
March 29, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:
Penerapan SNI
Application of SNI

Acara / Event:
SNI Award 2019

Penyelenggara / Organizer:
Badan Standardisasi Nasional
National Standardization Agency

Tanggal / Date:
20 November 2019
November 20, 2019

Cabang Pelabuhan Banten
Banten Port Branch

Nama Penghargaan / Award Name:
The Best Reliable Company in Service Excellent of the Year

Acara / Event:
Indonesia 50 Best Companies Award 2019

Penyelenggara / Organizer:
Indonesia Achievement Center bekerjasama dengan Tre Uno Event Management
Indonesia Achievement Center in collaboration with Tre Uno Event Management

Tanggal / Date:
11 Januari 2019
January 11, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:
Sebagai Wajib Pajak Panutan PBB-P2
As a Role Mode of Taxpayer PBB-P2

Acara / Event:
Apresiasi Wajib Pajak PBB Cilegon 2019
Appreciation for the 2019 Cilegon PBB Taxpayer

Penyelenggara / Organizer:
Walikota Cilegon
Mayor of Cilegon

Tanggal / Date:
11 Juli 2019
July 11, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:
Apresiasi Wajib Pajak Pembayaran Pajak Terbesar Tahun 2019
Appreciation of the Largest Tax Payment Taxpayer in 2019

Acara / Event:
Penghargaan Pajak
Tax Award

Penyelenggara / Organizer:
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cilegon
Cilegon City Primary Tax Service Office

Tanggal / Date:
24 Oktober 2019
October 24, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:
Penerapan SNI
Application of SNI

Acara / Event:
SNI Awards Tahun 2019
SNI Awards in 2019

Penyelenggara / Organizer:
Badan Standardisasi Nasional
National Standardization Agency

Tanggal / Date:
20 November 2019
November 20, 2019

Cabang Pelabuhan Jambi
Jambi Port Branch

Nama Penghargaan / Award Name:
The Most Improved Cabang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for Improving Customer Satisfaction Index 2018
The Most Improved Branch of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) For Improving Customer Satisfaction Index 2018

Acara / Event:
MUC Award 2018

Penyelenggara / Organizer:
MUC Consulting Group

Tanggal / Date:
7 Februari 2019
February 7, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:
Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Kategori Baik
Corporate Social Responsibility (CSR) with Good category

Acara / Event:
Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia
World Environment Day

Penyelenggara / Organizer:
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi
Muaro Jambi Regency Environmental Agency

Tanggal / Date:
5 Juni 2019
June 5, 2019



Penghargaan Cabang Port Branch Award

Nama Penghargaan / Award Name:

Juara 1 Futsal
1st place in Futsal

Acara / Event:

Hari Perhubungan Nasional Tingkat Provinsi Jambi
Jambi Provincial Level National Transportation

Penyelenggara / Organizer:

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
Jambi Provincial Transportation Agency

Tanggal / Date:

7–8 September 2019
September 7–8, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

Juara 1 Tenis Lapangan Kontingen Pelindo se Indonesia
1st Place in Pelindo Contingent Tennis Court in Indonesia

Acara / Event:

ASEAN Ports Association (APA) Sports Meet 13th

Penyelenggara / Organizer:

Lembaga Pengelola Seluruh Pelabuhan ASEAN
Management of All ASEAN Ports

Tanggal / Date:

12–16 September 2019
September 12–16, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

Juara III Lomba Taman Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Kategori
Instansi Vertikal
3rd Place of Muaro Jambi Regency Level Competition in the Vertical
Institution Category

Acara / Event:

#Smart Park & #DusunBerhijab (Bersih, Hijau, Indah, Jernih, Aman dan
Berkelanjutan
#Smart Park & #DusunBerhijab (Clean, Green, Beautiful, Clear, Safe
and Sustainable)

Penyelenggara / Organizer:

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Muaro Jambi
Muaro Jambi Regency Housing and Settlement Regional Office

Tanggal / Date:

17 Oktober 2019
October 17, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

Medali Silver untuk Penerapan SNI
Silver Medal for SNI Application

Acara / Event:

SNI Awards Tahun 2019
SNI Awards in 2019

Penyelenggara / Organizer:

Badan Standardisasi Nasional
National Standardization Agency

Tanggal / Date:

20 November 2019
November 20, 2019

Cabang Pelabuhan Palembang

Palembang Port Branch

Nama Penghargaan / Award Name:

The Best Indonesia Port Company in Service Excellent of the Year

Acara / Event:

The Best Indonesia Port Company in Service Excellent of the Year

Penyelenggara / Organizer:

Indonesia Achievement Centre

Tanggal / Date:

11 Januari 2019
January 11, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

*The Committed Company for Contributing Community Development of
The Year 2019*

Acara / Event:

Innovative Business Excellent Award 2019

Penyelenggara / Organizer:

Venna Event Manajemen
Venna Event Management

Tanggal / Date:

28 Januari 2019
January 28, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

Apresiasi Kinerja Memuaskan BUMN & CEO BUMN 2019
Appreciation of Satisfying Performance of SOE & CEO 2019

Acara / Event:

Apresiasi I'M Indonesia
I'M Indonesia Appreciation

Penyelenggara / Organizer:

I'M Indonesia dan 7SkyMedia
I'M Indonesia and 7SkyMedia

Tanggal / Date:

1 Februari 2019
February 1, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

Outstanding Environmental Care Companies in South Sumatera

Acara / Event:

Environmental Care Award

Penyelenggara / Organizer:

Tribun Sumsel

Tanggal / Date:

2 Juli 2019
July 2, 2019

Penghargaan Cabang
Port Branch Award

Nama Penghargaan / Award Name:

Perusahaan Cabang BUMN Terbaik dalam tata kelola perusahaan dan pelayanan

The Best SOE Branch Company in corporate governance and services

Acara / Event:

7 Sky Media

Penyelenggara / Organizer:

7 Sky Media

Tanggal / Date:

30 Juli 2019

July 30, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

Kontribusi dan Kepedulian terhadap Pengembangan Kopi di Sumatera Selatan

Contribution and Concern for Coffee Development in South Sumatra

Acara / Event:

Pemilihan Duta Kopi tahun 2019

Election of Coffee Ambassador in 2019

Penyelenggara / Organizer:

Duta Kopi Indonesia

Indonesian Coffee Ambassador

Tanggal / Date:

5 September 2019

September 5, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

Penerapan SNI

Application of SNI

Acara / Event:

SNI Awards Tahun 2019

SNI Awards in 2019

Penyelenggara / Organizer:

Badan Standardisasi Nasional

National Standardization Agency

Tanggal / Date:

20 November 2019

November 20, 2019

Cabang Pelabuhan Cirebon

Cirebon Port Branch

Nama Penghargaan / Award Name:

BUP Terbaik dalam Penatausahaan PNPB Konsesi di Wilayah Kerja KSOP Tanjung Priok Tahun Anggaran 2018

The Best BUP in the Administration of Concession PNPB in Tanjung Priok KSOP Working Area for Fiscal Year 2018

Acara / Event:

Penata Usahaan Konsesi PNPB

PNBP Concession Administration

Penyelenggara / Organizer:

Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok

Tanjung Priok Main Port Authority

Tanggal / Date:

22 April 2019

April 22, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

Mitra Pembangunan Jawa Barat melalui Program CSR/PKBL selama 5 Tahun berturut-turut

West Java Development Partners through the CSR/PKBL Program for 5 years in a row

Acara / Event:

Mitra Pembangunan Jawa Barat

West Java Development Partners

Penyelenggara / Organizer:

Gubernur Jawa Barat

Governor of West Java

Tanggal / Date:

15 November 2019

November 15, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

Mitra Pembangunan Jawa Barat melalui Program CSR/PKBL 2019

West Java Development Partners through the 2019 CSR/PKBL Program

Acara / Event:

Mitra Pembangunan Jawa Barat

West Java Development Partners

Penyelenggara / Organizer:

Gubernur Jawa Barat

Governor of West Java

Tanggal / Date:

15 November 2019

November 15, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

BUMN Peduli Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SOE Care for the Development of Women's Empowerment and Child Protection

Acara / Event:

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon

Cirebon City Women's Empowerment and Child Protection Program

Penyelenggara / Organizer:

Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Cirebon City Government

Tanggal / Date:

20 Desember 2019

December 20, 2019



Penghargaan Cabang
Port Branch Award

Cabang Pelabuhan Pangkalbalam
Pangkalbalam Port Branch

Nama Penghargaan / Award Name:

Tanggung jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan IPC Cabang Pangkalbalam
The Corporate Social Responsibility and Partnership and Community Development Program of IPC Pangkalbalam Branch

Acara / Event:

Bina Lingkungan Propinsi
Provincial Environmental Development

Penyelenggara / Organizer:

Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
Governor of Bangka Belitung Islands Province

Tanggal / Date:

28 November 2019
November 28, 2019

Cabang Pelabuhan Panjang
Panjang Port Branch

Nama Penghargaan / Award Name:

The Best Digital Port

Acara / Event:

Tribun Award

Penyelenggara / Organizer:

Tribun Lampung

Tanggal / Date:

27 Juni 2019
June 27, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

BUMN Terdepan dalam Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan
Leading SOE in Port Infrastructure Development
Leading SOE in Port Infrastructure Development

Acara / Event:

Momentum Award

Penyelenggara / Organizer:

Harian Momentum
Momentum Daily

Tanggal / Date:

9 Agustus 2019
August 9, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

Indonesia Unggul Dalam Program Digital Port
Indonesia Excels in Digital Port Program

Acara / Event:

Kompas Gramedia Lampung Award

Penyelenggara / Organizer:

Kompas Gramedia

Tanggal / Date:

3 Oktober 2019
October 3, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

The Most Leading Indonesia Port Company in Satisfactory Performance of The Year

Acara / Event:

Indonesia Most Leading Companies Award 2019

Penyelenggara / Organizer:

Indonesia Achievement Centre

Tanggal / Date:

4 Oktober 2019
October 4, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

Responden Terbaik III survei Liaison bank Indonesia Tahun 2019
III Best Respondents in the Indonesian bank Liaison survey in 2019

Acara / Event:

Temu Responden Bank Indonesia
Meeting of Bank Indonesia Respondents

Penyelenggara / Organizer:

Bank Indonesia Perwakilan Lampung
Bank Indonesia Representative in Lampung

Tanggal / Date:

22 Oktober 2019
October 22, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

Medali Perak untuk Penerapan SNI
Silver Medal for SNI Application

Acara / Event:

SNI Award 2019

Penyelenggara / Organizer:

Badan Standardisasi Nasional
National Standardization Agency

Tanggal / Date:

20 November 2019
November 20, 2019

Penghargaan Cabang
Port Branch Award

Nama Penghargaan / Award Name:

Predikat Cukup Informatif KI
Quite Informative KI Predicate

Acara / Event:

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Lampung 2019
Lampung Province Public Information Disclosure Award 2019

Penyelenggara / Organizer:

Komisi Informasi Provinsi Lampung
Lampung Province Information Commission

Tanggal / Date:

11 Desember 2019
December 11, 2019

Cabang Pelabuhan Pontianak

Pontianak Port Branch

Nama Penghargaan / Award Name:

Dukungan dan Partisipasi Pelaksanaan Program Pertanahan Tahun 2018 di Kalimantan Barat 2018
Support and Participation in the Implementation of the 2018 Land Program in West Kalimantan 2018

Acara / Event:

Program Pertanahan Tahun 2018
2018 Land Program

Penyelenggara / Organizer:

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency

Tanggal / Date:

23 April 2019
April 23, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

Kontribusi Memberikan Bantuan Sarana Penunjang Untuk Start Up Hubungan Kota Pontianak
Contribution in Providing Supporting Facilities for Start Up of Pontianak City Relations

Acara / Event:

Pontianak Smart City

Penyelenggara / Organizer:

Pemerintah Kota Pontianak
Pontianak City Government

Tanggal / Date:

26 September 2019
September 26, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

Medali Silver untuk Penerapan SNI
Silver Medal for SNI Application

Acara / Event:

SNI Award 2019

Penyelenggara / Organizer:

Badan Standardisasi Nasional
National Standardization Agency

Tanggal / Date:

20 November 2019
November 20, 2019



Penghargaan Cabang
Port Branch Award

Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa
Sunda Kelapa Port Branch

Nama Penghargaan / Award Name:

Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health Management System Award

Acara / Event:

Penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan
Award from the Ministry of Manpower

Penyelenggara / Organizer:

Kementerian Ketenagakerjaan
Ministry of Manpower

Tanggal / Date:

29 Maret 2019
March 29, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

Atas Partisipasi melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan patuh, tepat waktu, dan tepat jumlah.

Participation in Paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in compliance, on time, and in the right amount.

Acara / Event:

Pembayaran PBB-P2
PBB-P2 payment

Penyelenggara / Organizer:

Walikota Administrasi Jakarta Utara
Mayor of North Jakarta Administration

Tanggal / Date:

9 Agustus 2019
August 9, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

Atas Partisipasi melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan patuh, tepat waktu, dan tepat jumlah.

Participation in Paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in compliance, on time, and in the right amount.

Acara / Event:

Pembayaran PBB-P2
PBB-P2 payment

Penyelenggara / Organizer:

Walikota Administrasi Jakarta Utara
Mayor of North Jakarta Administration

Tanggal / Date:

4 September 2019
September 4, 2019

Nama Penghargaan / Award Name:

Atas Kepercayaan dan Kerjasamanya dalam Penyelesaian Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

The Trust and Cooperation in Resolving Legal Issues in the Civil and State Administration Sector

Acara / Event:

Penyelesaian Masalah Hukum
Legal Issues Resolution

Penyelenggara / Organizer:

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
North Jakarta District Attorney's Office

Tanggal / Date:

6 September 2019
September 6, 2019

Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan
Tanjung Pandan Port Branch

Nama Penghargaan / Award Name:

Partisipasi Dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum di Lokasi Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Seberang Bersatu Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Participation in Public Facilities and Infrastructure Development Activities at the Location of Community Forest (Hkm) Seberang Bersatu Juru Seberang Village Tanjung Pandan District Belitung Regency Bangka Belitung Islands Province

Acara / Event:

Penghargaan HKM Seberang Bersatu
HKM Seberang Bersatu Award

Penyelenggara / Organizer:

HKM Seberang Bersatu

Tanggal / Date:

17 Desember 2019
December 17, 2019

Sertifikasi
Certification

Jenis Sertifikasi / Certification Type:
ISO 9001:2015

Validasi / Validation:
29 Desember 2017–28 Desember 2020
December 29, 2017–December 28, 2020

Penerima Sertifikasi / Recipient:
Kantor Pusat
Head Office

Dikeluarkan Oleh / Issued by:
Sucofindo International Certification Service

Jenis Sertifikasi / Certification Type:
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health Management System

Validasi / Validation:
30 Juli 2018–30 Juli 2021
July 30, 2018–July 30, 2021

Penerima Sertifikasi / Recipient:
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Dikeluarkan Oleh / Issued by:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Minister of Manpower of Republic of Indonesia

Jenis Sertifikasi / Certification Type:
ISO 9001:2015

Validasi / Validation:
19 Desember 2018–18 Desember 2021
December 19, 2018–December 18, 2021

Penerima Sertifikasi / Recipient:
Cabang Bengkulu
Bengkulu branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:
Sucofindo International Certification Service

Jenis Sertifikasi / Certification Type:
Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan
Statement of Port Facility Safety Compliance

Validasi / Validation:
8 Oktober 2019–13 Oktober 2024
October 8, 2019–October 13, 2024

Penerima Sertifikasi / Recipient:
Cabang Bengkulu
Bengkulu branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Directorate General of Marine Transportation

Jenis Sertifikasi / Certification Type:
ISO 9001:2015

Validasi / Validation:
28 November 2018–27 November 2021
November 28, 2018–November 27, 2021

Penerima Sertifikasi / Recipient:
Cabang Banten
Banten Branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:
Sucofindo International Certification Service

Jenis Sertifikasi / Certification Type:
Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan
Statement of Port Facility Safety Compliance

Validasi / Validation:
20 Agustus 2014–19 Agustus 2019
August 20, 2014–August 19, 2019

Penerima Sertifikasi / Recipient:
Cabang Jambi
Jambi branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Directorate General of Marine Transportation

Jenis Sertifikasi / Certification Type:
ISO 9001:2015

Validasi / Validation:
13 Desember 2018–12 Desember 2021
December 13, 2018–December 12, 2021

Penerima Sertifikasi / Recipient:
Cabang Jambi
Jambi branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:
Sucofindo International Certification Service

Jenis Sertifikasi / Certification Type:
Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan
Statement of Port Facility Safety Compliance

Validasi / Validation:
16 September 2019–19 Agustus 2024
September 16, 2019–August 19, 2024

Penerima Sertifikasi / Recipient:
Cabang Jambi
Jambi branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Directorate General of Marine Transportation



Sertifikasi Certification

Jenis Sertifikasi / Certification Type:
ISO 9001:2015

Validasi / Validation:
2 Maret 2018–1 Maret 2021
March 2, 2018–March 1, 2021

Penerima Sertifikasi / Recipient:
Cabang Palembang
Palembang branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:
Sucofindo International Certification Service

Jenis Sertifikasi / Certification Type:
OHSAS 18001:2007

Validasi / Validation:
23 Mei 2019–22 Mei 202
May 23, 2019–May 22, 202

Penerima Sertifikasi / Recipient:
Cabang Palembang
Palembang branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:
Sucofindo International Certification Service

Jenis Sertifikasi / Certification Type:
Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan
Statement of Port Facility Safety Compliance

Validasi / Validation:
29 November 2019–20 Oktober 2024
November 29, 2019–October 20, 2024

Penerima Sertifikasi / Recipient:
Cabang Palembang
Palembang branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Directorate General of Marine Transportation

Jenis Sertifikasi / Certification Type:
ISO 9001:2015

Validasi / Validation:
26 Desember 2018–25 Desember 2021
December 26, 2018–December 25, 2021

Penerima Sertifikasi / Recipient:
Cabang Cirebon
Cirebon Branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:
Sucofindo International Certification Service

Jenis Sertifikasi / Certification Type:
Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan
Statement of Port Facility Safety Compliance

Validasi / Validation:
14 Oktober 2019–1 Oktober 2024
October 14, 2019–October 1, 2024

Penerima Sertifikasi / Recipient:
Cabang Cirebon
Cirebon Branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Directorate General of Marine Transportation

Jenis Sertifikasi / Certification Type:
ISO 9001:2015

Validasi / Validation:
28 Februari 2019–27 Februari 2022
February 28, 2019–February 27, 2022

Penerima Sertifikasi / Recipient:
Cabang Pangkalbalam
Pangkalbalam branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:
Sucofindo International Certification Service

Jenis Sertifikasi / Certification Type:
ISO 9001:2015

Validasi / Validation:
13 Desember 2018–12 Desember 2021
December 13, 2018–December 12, 2021

Penerima Sertifikasi / Recipient:
Cabang Panjang
Panjang Branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:
Sucofindo International Certification Service

Jenis Sertifikasi / Certification Type:
Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan
Statement of Port Facility Safety Compliance

Validasi / Validation:
12 September 2019 –13 Agustus 2024
September 12, 2019–August 13, 2024

Penerima Sertifikasi / Recipient:
Cabang Panjang
Panjang Branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Directorate General of Marine Transportation

Sertifikasi
Certification

Jenis Sertifikasi / Certification Type:
ISO 9001:2015

Validasi / Validation:

14 Maret 2019–13 Maret 2022
March 14, 2019–March 13, 2022

Penerima Sertifikasi / Recipient:

Cabang Pontianak
Pontianak Branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:

Sucofindo International Certification Service

Jenis Sertifikasi / Certification Type:

Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan
Statement of Port Facility Safety Compliance

Validasi / Validation:

21 Agustus 2019–14 September 2024
August 21, 2019–September 14, 2024

Penerima Sertifikasi / Recipient:

Cabang Pontianak
Pontianak Branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Directorate General of Marine Transportation

Jenis Sertifikasi / Certification Type:

ISO 9001:2015

Validasi / Validation:

5 Februari 2018–4 Februari 2021
February 5, 2018–February 4, 2021

Penerima Sertifikasi / Recipient:

Cabang Sunda Kelapa
Sunda Kelapa Branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:

Sucofindo International Certification Service

Jenis Sertifikasi / Certification Type:

ISO 9001:2015

Validasi / Validation:

22 Februari 2019–21 Februari 2022
February 22, 2019–February 21, 2022

Penerima Sertifikasi / Recipient:

Cabang Tanjung Pandan
Tanjung Pandan Branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:

Sucofindo International Certification Service

Jenis Sertifikasi / Certification Type:

Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan
Statement of Port Facility Safety Compliance

Validasi / Validation:

5 September 2019–28 Agustus 2024
September 5, 2019–August 28, 2024

Penerima Sertifikasi / Recipient:

Cabang Tanjung Pandan
Tanjung Pandan Branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Directorate General of Marine Transportation

Jenis Sertifikasi / Certification Type:

ISO 9001:2015

Validasi / Validation:

31 Agustus 2018–30 Agustus 2021
August 31, 2018–August 30, 2021

Penerima Sertifikasi / Recipient:

Cabang Tanjung Priuk
Tanjung Priuk Branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:

Sucofindo International Certification Service

Jenis Sertifikasi / Certification Type:

Penyediaan Layanan Pelabuhan Untuk Gedung Cabang Tanjung Priuk, Terminal Penumpang dan Reception Facilities
Provision of Port Services for Tanjung Priuk Branch Building, Passenger Terminals and Reception Facilities

Validasi / Validation:

31 Agustus 2018–30 Agustus 2021
August 31, 2018–August 30, 2021

Penerima Sertifikasi / Recipient:

Cabang Tanjung Priuk
Tanjung Priuk Branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:

Badan Sertifikasi TUV NORD Indonesia
TUV NORD Indonesia Certification Agency

Jenis Sertifikasi / Certification Type:

ISO 9001:2015

Validasi / Validation:

31 Desember 2018–30 Desember 2021
December 31, 2018–December 30, 2021

Penerima Sertifikasi / Recipient:

Cabang Teluk Bayur
Teluk Bayur Branch

Dikeluarkan Oleh / Issued by:

Sucofindo International Certification Service



NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, KANTOR CABANG DAN/ATAU KANTOR WILAYAH

NAME AND ADDRESS OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, BRANCHES AND/OR REGIONAL OFFICES

ENTITAS ANAK

SUBSIDIARIES

Kantor Entitas Anak <i>Subsidiaries</i>	Alamat <i>Address</i>	Telp./Fax/Situs Web <i>Tel./Fax/Website</i>
PT IPC Terminal Peti Kemas (IPC TPK)	Gedung Operasi Terminal 3 Jl. Raya Pelabuhan No. 23, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara 14310	Tel : +62-21 4000 3899 / 4301080 ext IPC TPK 7051 & 7052 <i>Email</i> : corp_sec@ipctpk.co.id <i>Website</i> : www.ipctpk.co.id <i>Twitter</i> : @ipctpk <i>Instagram</i> : ipctpk
PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP)	Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta 14310	Tel: +62-21 4301 080 <i>Fax</i> : +62-21 4372 947 <i>Email</i> : corsecptp@indonesiaport.co.id <i>Website</i> : www.priokport.co.id <i>Twitter</i> : @ptpmultipurpose <i>Instagram</i> : @ptpmultipurpose
PT Multi Terminal Indonesia (MTI)	Jl. Pulau Payung No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310	Tel: +62-21 2910 4000 <i>Email</i> : cs@multiterminal.co.id <i>Website</i> : www.ipclogistic.co.id <i>Twitter</i> : @ipcLogistic <i>Instagram</i> : Ipc_logisticservices <i>Youtube</i> : IPC Logistic Services
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC)	Jl. Sindang Laut No. 100, Cilincing, Jakarta Utara 14110	Customer Care: +62 811 933 9930 +62-21 4393 2251 <i>Fax</i> : +62-21 4393 2250 <i>Email</i> : info@indonesiacarterminal.co.id ; ikt.care@indonesiacarterminal.co.id <i>Website</i> : www.indonesiacarterminal.co.id <i>Twitter</i> : @pt_ikt <i>Instagram</i> : IPC Car Termnal
KSO Terminal Peti Kemas Koja (TPK Koja)	Jl. Digul No 1, Koja, Jakarta Utara 14210	Tel: +62-21 4374 142 <i>Fax</i> : +62-21 4374 150 <i>Email</i> : corsec@tpkkoja.co.id <i>Website</i> : www.tpkkoja.co.id <i>Twitter</i> : @ksotpkkoja
PT Jakarta International Container Terminal (JICT)	Jl. Sulawesi Ujung No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310	Tel: +62-21 4390 5111 <i>Fax</i> : +62-21 4390 2446 <i>Email</i> : ca@jict.co.id <i>Website</i> : www.jict.co.id <i>Twitter</i> : @JICTIndonesia
PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO)	Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur Jakarta 14310	Tel: +62-21 4301 380 <i>Fax</i> : +62-21 4353 669 <i>Website</i> : www.rukindo.co.id <i>Twitter</i> : @pt_rukindo
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI)	Kobexindo Tower, Lt. 4 Jl. Pasir Putih Raya Blok E5-D, Ancol Timur, Jakarta 14430	Tel: +62-21 6471 8081 <i>Fax</i> : +62-21 6471 8083 <i>Email</i> : corp.sec@portdevco.com <i>Website</i> : www.portdevco.com <i>Twitter</i> : @portdevco <i>Instagram</i> : @portdevco
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI)	Sentra Bisnis Artha Gading Blok A-6A No. 2 Jl. Boulevard Artha Gading, Jakarta Utara 14240	Tel: +62-21 4587 4549 <i>Fax</i> : +62-21 4587 4548 <i>Email</i> : corpsec@jppi.co.id <i>Website</i> : www.jppi.co.id <i>Twitter</i> : @jppi_official <i>Instagram</i> : ipcportequipment

NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, KANTOR CABANG DAN/ATAU KANTOR WILAYAH
NAME AND ADDRESS OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, BRANCHES AND/OR REGIONAL OFFICES

Kantor Entitas Anak Subsidiaries	Alamat Address	Telp./Fax/Situs Web Tel./Fax/Website
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM)	Rukindo Building Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta Utara 14310	Tel: +62-21 4306 789 Fax: +62-21 4366 789 Email: contact@ipcmarine.co.id Website: www.ipcmarine.co.id Instagram: ipcmarine
PT Rumah Sakit Pelabuhan (RSP)	Jl. Kramat Jaya, Tugu Utara, Koja, Jakarta 14260	Tel: +62-21 4403 026 Email: info@rspelabuhan.com Website: www.rspelabuhan.com Twitter: @rspelabuhan Instagram: @rs_pelabuhan
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI)	Campus 1: Jl. Beringin I No. 1 Gadog, Pandansari, Kec. Ciawi Kab. Bogor 16720 Campus 2: Jl. Dewi-dewi No. I Walang, Jakarta Utara 14260	Tel: +62-251 7555 622 / +62-251 7555 614 Email: corpsec@pml.co.id Website: www.pml.co.id Twitter: @pt_pml Instagram: @pt_pml
PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII)	Gedung Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Lt. 7 Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310	Tel: +61-21 4301080 Ext : 4113 Fax: +62-21 5701 789 Email: corp_sec@indonesiaport.co.id Website: www.indonesiaport.co.id Twitter: @InvestcolPC Instagram: @IPC-investco
PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI)	Gedung PLN AP Prima, Lt. 1 Jl. Yos Sudarso, No. 30, Tanjung Priok, Jakarta Utara	Tel : +62-21 4305 047 Fax: +62-21 4305 052 Email: cs@ecopowerport.co.id Website: www.ecopowerport.co.id Twitter: @energipelabuhan Facebook: Energi Pelabuhan Instagram: @eco.power
PT EDI Indonesia (EDII)	Wisma SMR, Lt. 10 Jl. Yos Sudarso, Kav. 89, Jakarta 14350	Tel: +62-21 6505 829 Fax: +62-21 6505 987 Email: marketing@edi-indonesia.co.id Website: www.edi-indonesia.co.id; corporate@edi-indonesia.co.id Twitter: @ediindonesia Instagram: @ediindonesia Youtube: PT EDI Indonesia
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS)	Plasa Telkom, Lt. 4 Jl. Yos Sudarso, Kav. 23-24, Tanjung Priok Jakarta Utara	Tel: +62-21 1500 950 Fax: +62-21 4393 6555 Email: customercare@ilcs.co.id dan corcom@ilcs.co.id Website: www.ilcs.co.id Twitter: @ilcs_id Instagram: ilcs.co



ENTITAS ASOSIASI

ASSOCIATES

Kantor Entitas Asosiasi <i>Associates</i>	Alamat <i>Address</i>	Telp./Fax/Situs Web <i>Tel./Fax/Website</i>
PT Terminal Petikemas Indonesia (PT TPI)	Gedung Kobexindo Lt 2 Jl. Pasir Putih Raya Blok E5-D Ancol Timur. Jakarta Utara 14430	Tel: +62-21 6456301 Fax: +62-21 6456302 Email: info@petikemas-indonesia.co.id Website: www.petikemas-indonesia.co.id
PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API)	Gedung Kobexindo Jl. Pasir Putih Raya Blok E5-D Ancol Timur. Jakarta Utara 14430	Tel: +62-21 654 6310 Website: www.portaccess.co.id
PT New Priok Container Terminal One (NPCT1)	Gedung Terminal Operasi III, Pelabuhan Tanjung Priok	Tel:+62-21 29144888 Email: commercial@npct1.co.id Website: www.npc.co.id
PT Menara Maritim Indonesia (MMI)	Gedung Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (lantai 6)	Tel: +62-21 22444557 Email: corporate@menara-maritim.co.id Website: menara-maritim.co.id

KANTOR CABANG

BRANCHES

Kantor Cabang <i>Branches</i>	Alamat <i>Address</i>	Telp./Fax/ Situs Web <i>Tel./Fax/Website</i>
Pelabuhan Tanjung Priok Port of Tanjung Priok	Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta, 14310	Tel: +62-21 4301080, +62-21 4367505 Fax: +62-21 4372933 Email: cs.tanjungpriok@indonesiaport.co.id & pelanggan_ctpk@indonesiaport.co.id Website: www.priokport.co.id
Pelabuhan Cirebon Port of Cirebon	Jl. Perniagaan No. 4, Cirebon, Jawa Barat, 45112	Tel: +62-231 204109 Fax: +62-231 203201 Email: cirebon@indonesiaport.co.id Website: www.cirebonport.co.id
Pelabuhan Panjang Port of Panjang	Jl. Yos Sudarso No. 337, Panjang, Bandar Lampung, 35241	Tel: +62-721 31149, 31146 Fax: +62-721 31155 Email: cs.panjangport@indonesiaport.co.id Website: www.panjangport.co.id
Pelabuhan Jambi Port of Jambi	Jl. Raya Pelabuhan Km. 9, Talang Duku, Jambi, 36383	Tel: +62-741 35067 Fax: +62-741 7553323 Hotline CS: 0811 7434 282 Email CS: cs.jambi@indonesiaport.co.id Website: www.jambiport.co.id
Pelabuhan Sunda Kelapa Port of Sunda Kelapa	Jl. Raya Maritim No.8, Sunda kelapa, Jakarta, 14430	Tel: +62-21 6928888 Fax: +62-21 6904759 Email: sundakelapa@indonesiaport.co.id Website: www.sundakelapa.co.id
Pelabuhan Palembang Port of Palembang	Jl. Belinyu No.1, Boom Baru, Palembang, 30115	Tel: +62-711 710611 Fax: +62-711 711758 Mail CS: cs.palembang@indonesiaport.co.id; marketing.plg@indonesiaport.co.id Website: www.palembangport.co.id
Pelabuhan Bengkulu/ Pelabuhan Pulau Baai Port of Bengkulu/ Port of Pulau Baai	Jl. Yos Sudarso No.9, Pulau Baai, Bengkulu, 38216	Tel: +62-736 51409 Fax: +62-736 51956 Email: Bengkulu@indonesiaport.co.id ; cs.bengkulu@indonesiaport.co.id ; Bengkulu2@indonesiaport.co.id Website: www.ipcbengkulu.co.id

NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, KANTOR CABANG DAN/ATAU KANTOR WILAYAH
NAME AND ADDRESS OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, BRANCHES AND/OR REGIONAL OFFICES

Kantor Cabang Branches	Alamat Address	Telp./Fax/ Situs Web Tel./Fax/Website
Pelabuhan Teluk Bayur Port of Teluk Bayur	Jl. Semarang No. 3, Teluk Bayur, Sumatera Barat, 25217	Tel: +62-751 61646, 61639 Fax: +62-751 611169 Email: telukbayur@indonesiaport.co.id ; telukbayuripc@gmail.com Website: www.telukbayurport.co.id
Pelabuhan Pangkal Balam Port of Pangkal Balam	Jl. Yos Sudarso No. 01, Pangkalbalam, Pangkalpinang Bangka Belitung, 33114	Tel: +62-717 423500 Email: pelabuhan2_pangkalbalam@yahoo.co.id ; ipcpankalbalam@gmail.com Website: www.indonesiaport.co.id/pangkalbalam
Pelabuhan Pontianak Port of Pontianak	Jl. Pak Kasih No. 11, Pontianak, Kalimantan Barat, 78113	Tel: +62-561 732181, 732094 Fax: +62-561 732612 Website: www.pontianakport.co.id Email : pontianak@indonesiaport.co.id
Pelabuhan Tanjung Pandan Port of Tanjung Pandan	Jl. Pelabuhan No.1, Tanjung Pandan Bangka Belitung, 33411	Tel: +62-719 21049 Fax: +62-719 21885 Email: tanjungpandan@indonesiaport.co.id
Pelabuhan Banten Port of Banten	Jl. Raya Pelabuhan No. 1, Ciwandan, Banten, 42166	Tel: +62-254 601221 / 602 703 Fax: +62-254 601419 Hotline CS: 08111 250 111 Email: banten@indonesiaport.co.id Website: www.bantenport.co.id



INFORMASI PADA WEBSITE PERSEROAN

INFORMATION ON THE COMPANY WEBSITE

Pada situs resmi perusahaan telah memuat berbagai informasi terkini mengenai IPC. Selain informasi yang bersifat umum, *website* Perseroan juga memberikan informasi yang lebih spesifik, sesuai dengan kriteria ACGS. Informasi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Profile:

- Tentang Kami
- Manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi)
- Komite-Komite (Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko)
- Organ Perusahaan (Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal)
- Cabang dan *Group* Perusahaan
- Struktur Organisasi
- Penghargaan

GCG

- Pedoman GCG (Pedoman GCG, Pedoman *Board Manual*, Pedoman Kode Etik Bisnis, Pedoman Gratifikasi, Pedoman *Whistle Blowing System*)
- Organ GCG (Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawas Internal)

Layanan:

- Layanan Barang
- Layanan Kapal
- Layanan Rupa-Rupa

IPC Peduli:

- IPC Peduli Pendidikan
- IPC Peduli Lingkungan
- IPC Peduli Kesehatan
- Galeri CSR

Hubungan Investor

- Laporan Tahunan (lebih dari 5 (lima) tahun)
- Laporan Keberlanjutan
- Laporan Keuangan
- Laporan RUPS
- Obligasi
- Peringkat Utang

Media dan Publikasi

- IPC News
- Siaran Pers
- Media Eksternal
- Media Sosial

The Company's official website has contained various up-to-date information about IPC. In addition to general information, the Company's website also provides more specific information, in accordance with the ACGS criteria. Such information includes the following:

Profile:

- About Us
- Management (Board of Commissioners and Board of Directors)
- Committees (Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Monitoring Committee)
- Organs (Corporate Secretary, Internal Audit Unit)
- Branches and Subsidiaries
- Organizational Structure
- Awards

GCG

- GCG Guidelines (Code of GCG, Board Manual, Code of Business Conduct, Gratification Guidelines, Whistle Blowing System Guidelines)
- GCG Organs (General Meeting Shareholders (GMS), Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Monitoring Committee, Corporate Secretary, Internal Audit Unit)

Service:

- Cargo Services
- Ship Services
- Other Services

IPC Care:

- IPC For Education
- IPC For Environment
- IPC For Health
- CSR Gallery

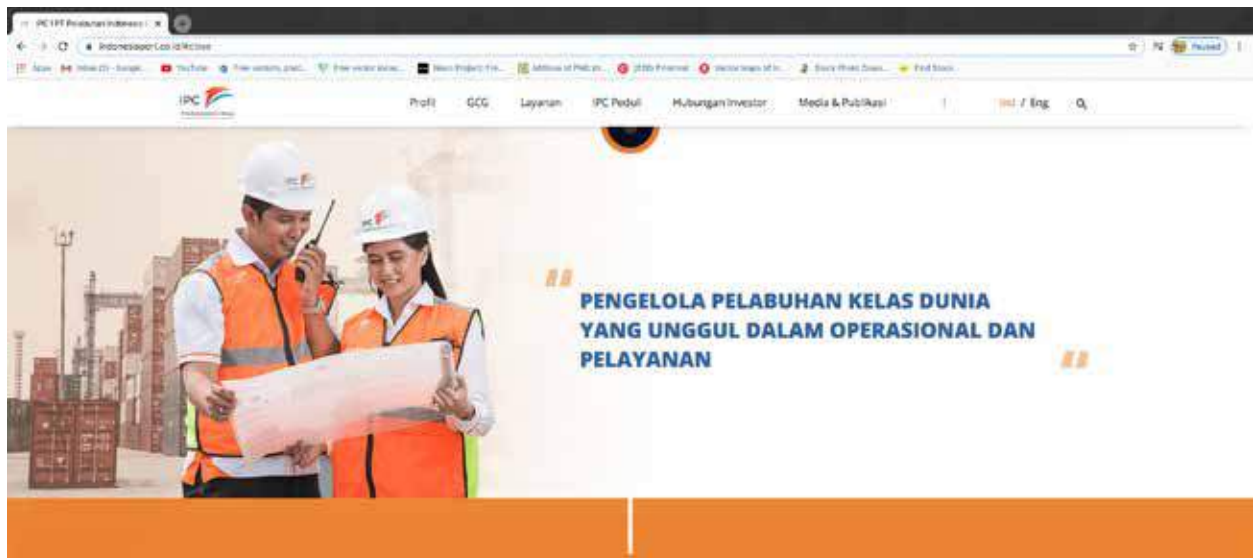
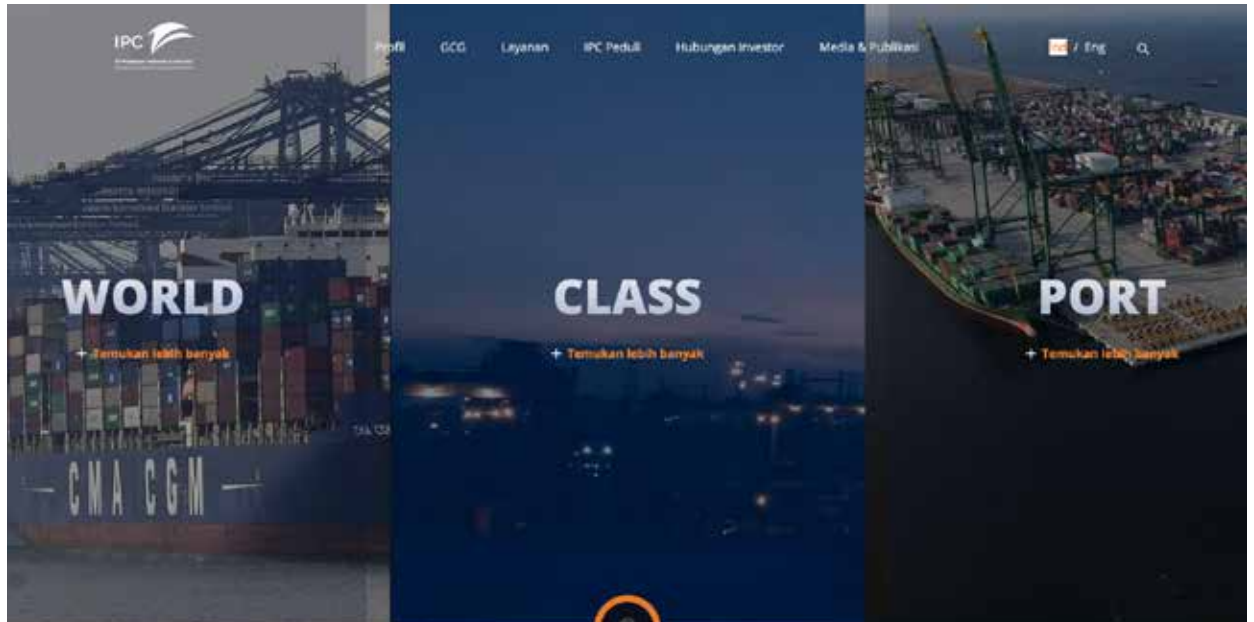
Investor Relations

- Annual Report (more than 5 (five) years)
- Sustainability Report
- Financial Report
- GMS Report
- Bond
- Bond Rating

Media and Publications

- IPC News
- Press Release
- External Media
- Social media

INFORMASI PADA WEBSITE PERSEROAN
INFORMATION ON THE COMPANY WEBSITE





PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIAT PERUSAHAAN, DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

EDUCATION AND/OR TRAINING OF BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, AND INTERNAL AUDIT UNIT

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2019, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini.

BOARD OF COMMISSIONERS COMPETENCY DEVELOPMENT

Throughout 2019, the Company's Board of Commissioners members participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as shown in the following table.

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Competency Development

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Material of Competency Development/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizer
Tumpak H. Panggabean	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	Seminar "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi di BUMN" tanggal	The Patra Bali Resort & Villas – Bali, 21-22 Maret 2019	Ntrinsics (Indonesia Training Institute & Consulting Service)
		Seminar "Corporation Criminal Law Enforcement in SOE"	The Patra Bali Resort & Villas – Bali, March 21–22, 2019	
		<i>Workshop "Expand Leadership Program for BoD/BoC"</i>	H. Sheraton Bali Kuta Resort-Bali, 28–31 Agustus 2019	CLDI (Corporate Leadership Development Institute)
			H. Sheraton Bali Kuta Resort-Bali, August 28–31, 2019	
		Seminar Manajemen Risiko "Mendukung Bisnis Perseroan dengan GRC terintegrasi"	Kantor Pusat IPC/Pelindo II, 25 September 2019	IPC-FMR BUMN – CRMS-IRMAPA
	Seminar "Support Company's business with integrated GRC"	Head Office, September 25, 2019		
Djadmiko	Komisaris Commissioner	Seminar "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi di BUMN" tanggal	The Patra Bali Resort & Villas – Bali, 21–22 Maret 2019	Ntrinsics (Indonesia Training Institute & Consulting Service)
		Seminar "Corporation Criminal Law Enforcement in SOE"	The Patra Bali Resort & Villas – Bali, March 21–22, 2019	
		<i>Workshop "Expand Leadership Program for BoD/BoC"</i>	H. Sheraton Bali Kuta Resort-Bali, 28–31 Agustus 2019	CLDI (Corporate Leadership Development Institute)
			H. Sheraton Bali Kuta Resort-Bali, August 28–31, 2019	
		Seminar Manajemen Risiko "Mendukung Bisnis Perseroan dengan GRC terintegrasi"	Kantor Pusat IPC/Pelindo II, 25 September 2019	IPC-FMR BUMN – CRMS-IRMAPA
	Risk Management Seminar "Support Company's business with integrated GRC "	IPC/Pelindo II Head Office, September 25, 2019		

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIAT PERUSAHAAN, DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
EDUCATION AND/OR TRAINING OF BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, AND INTERNAL AUDIT UNIT

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Competency Development

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Material of Competency Development/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizer
Suaidi Marasabessy	Komisaris/ Komisaris Independen Commissioner/ Independent Commissioner	Seminar Manajemen Risiko "Mendukung Bisnis Perseroan dengan GRC terintegrasi"	Kantor Pusat IPC/Pelindo II, 25 September 2019	IPC-FMR BUMN – CRMS-IRMAPA
		Risk Management Seminar "Support Company's business with integrated GRC "	IPC/Pelindo II Head Office, September 25, 2019	
Montty Girianna	Komisaris Commissioner	Workshop "Expand leadership for BOD/BOC"	H. Sheraton Bali Kuta Resort-Bali, 24–27 April 2019	CLDI (Corporate Leadership Development Institute)
			H. Sheraton Bali Kuta Resort-Bali, 24–27 April 2019	
		Seminar Manajemen Risiko "Mendukung Bisnis Perseroan dengan GRC terintegrasi"	Kantor Pusat IPC/Pelindo II, 25 September 2019	IPC-FMR BUMN – CRMS-IRMAPA
		Risk Management Seminar "Support Company's business with integrated GRC	IPC/Pelindo II Head Office, September 25, 2019	
Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner	Seminar Manajemen Risiko "Mendukung Bisnis Perseroan dengan GRC terintegrasi"	Kantor Pusat IPC/Pelindo II, 25 September 2019	IPC-FMR BUMN – CRMS-IRMAPA
		Risk Management Seminar "Support Company's business with integrated GRC "	IPC/Pelindo II Head Office, September 25, 2019	
D. Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	Seminar "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi di BUMN"	The Patra Bali Resort & Villas – Bali, 21–22 Maret 2019	Ntrinsics (Indonesia Training Institute & Consulting Service)
		Seminar "Corporation Criminal Law Enforcement in SOE"	The Patra Bali Resort & Villas – Bali, March 21–22, 2019	
		Seminar Manajemen Risiko "Mendukung Bisnis Perseroan dengan GRC terintegrasi"	Kantor Pusat IPC/Pelindo II, 25 September 2019	IPC-FMR BUMN – CRMS-IRMAPA
		Risk Management Seminar "Support Company's business with integrated GRC "	IPC/Pelindo II Head Office, September 25, 2019	
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	Seminar Manajemen Risiko "Mendukung Bisnis Perseroan dengan GRC terintegrasi"	Kantor Pusat IPC/Pelindo II, 25 September 2019	IPC-FMR BUMN – CRMS-IRMAPA
		Risk Management Seminar "Support Company's business with integrated GRC	IPC/Pelindo II Head Office, September 25, 2019	



PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

BOARD OF DIRECTORS COMPETENCY DEVELOPMENT

Throughout 2019, the Company's Board of Directors members participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as follows:

Tabel Pengembangan Kompetensi Direksi
Board of Directors Competency Development

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Material of Competency Development/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizer
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	<i>IAPH Guangzhou 2019 World Port Conference</i>	Guangzhou, China, 6–10 Mei 2019 Guangzhou, China, May 6–10, 2019	International Association of Port and Harbors
		<i>Indonesia Infrastructure Investment Forum 2019</i>	London, UK, 4 Juli 2019 London, UK, July 4, 2019	Medef International
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Beliau baru menjabat di tahun 2020, sehingga tidak terdapat pengembangan kompetensi/pelatihan di tahun 2019. He took office in 2020, hence there was no competency development/training attended in 2019.		
Saptono R. Irianto	Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Commercial and Business Development Director	Selama tahun 2019, Beliau tidak mengikuti pengembangan kompetensi/pelatihan. During 2019, he did not participate in competency development/training.		
Arif Suhartono	Direktur Komersial Commercial Director	<i>Shaping Strategy to Create Value</i>	Sydney, Australia, 23–26 Oktober 2019 Sydney, Australia, October 23–26, 2019	UNSW Business School
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik Technical Director	<i>Finance For Non-Finance Executives</i>	London, Inggris, 23–28 Juni 2019 London, England, June 23–28, 2019	London Business School
Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director	<i>Digital Innovation</i>	Rotterdam, Belanda, 10–13 September 2019 Rotterdam, the Netherlands, September 10–13, 2019	Rotterdam School of Management Erasmus University (RSM)
Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan Finance Director	<i>Leading Strategically</i>	Brussels, Belgia, 14–18 Oktober 2019 Brussels, Belgium, October 14–18, 2019	Center for Creative Leadership

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIAT PERUSAHAAN, DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
EDUCATION AND/OR TRAINING OF BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, AND INTERNAL AUDIT UNIT

Tabel Pengembangan Kompetensi Direksi
Board of Directors Competency Development

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Material of Competency Development/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizer
Rizal Ariansyah	Direktur Sumber Daya Manusia Human Capital Director	ASEAN Global Leadership Program	Shanghai dan Hangzhou, Tiongkok, 16–30 September 2019 Shanghai and Hangzhou, China, September 16–30, 2019	SRW&Co. dan Cheung Kong Graduate School of Business
Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Business Development Director	Enterprise Risk Management: Become a Certified Enterprise Risk Management Professional (CERMP)	1–3 Juli 2019, London, Inggris July 1–3, 2019, London, England	International Institute for Executive Training

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2019, anggota Komite Audit Perseroan telah mengikuti berbagai program kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

AUDIT COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Throughout 2019, the Audit Committee members participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as follows:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Audit
Audit Committee Competency Development

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan Material of Competency Development/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizer
Kushari Suprianto	Ketua Komite Audit Head of Audit Committee	Pengembangan kompetensi dapat dilihat di pengembangan kompetensi Dewan Komisaris Competency development can be seen in the Board of Commissioners competency development		
Rakhmat Adi Santosa	Anggota Komite Audit Audit Committee	Seminar dengan Agenda "Teknik-Teknik Mendeteksi Indikasi <i>Fraud</i> & Kesalahan Pelaporan Keuangan, Pelaporan Keuangan dan Sukses Audit PKBL-CSR BUMN" Seminar with Agenda "Techniques to Detect Fraud Indications & Errors in Financial Reporting, Financial Reporting and PKBL-CSR SOE Audit Success"	H. Papandayan-Bandung, 15 Februari 2019 Papandayan Hotel-Bandung, February 15, 2019	Koran BUMN PT Barka Cahaya Mediatama



Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Audit
Audit Committee Competency Development

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan Material of Competency Development/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizer
Rakhmat Adi Santosa	Anggota Komite Audit Audit Committee	Seminar "Menakar Tanggung Jawab dan risiko Pengurus Korporasi Praktisi Akuntan Publik (KAP) dalam Pelaporan Keuangan"	H. Prime Park - Bandung, 23 Agustus 2019	Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat
		Seminar "Measuring Responsibility and Risk of Corporate Management Practitioner Public Accountant (KAP) in Financial Reporting"	Prime Park Hotel- Bandung, August 23, 2019	Indonesian Institute of Accountants West Java Region
		Seminar Manajemen Risiko "Mendukung Bisnis Perseroan dengan GRC terintegrasi"	Kantor Pusat IPC/Pelindo II, 25 September 2019	IPC-FMR BUMN – CRMS-IRMAPA
		Risk Management Seminar "Support Company's business with integrated GRC"	Head Office, September 25, 2019	
		Workshop PSAK 71, 72, dan 73	H. Alia grand Prapatan, Senen- Jakarta Pusat, 6-8 November 2019	IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia)
	Workshop on PSAK 71, 72 and 73	Alia Grand Prapatan Hotel, Senen- Central Jakarta, November 6-8, 2019	Alia Grand Prapatan Hotel, Senen- Central Jakarta, November 6-8, 2019	
Muhamad Al Fajar	Anggota Komite Audit	Seminar Manajemen Risiko "Mendukung Bisnis Perseroan dengan GRC terintegrasi"	Kantor Pusat IPC/Pelindo II, 25 September 2019	IPC-FMR BUMN – CRMS-IRMAPA
	Member of Audit Committee	Risk Management Seminar "Support Company's business with integrated GRC"	IPC/Pelindo II Head Office, September 25, 2019	

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sepanjang tahun 2019, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Throughout 2019, the Nomination and Remuneration Committee members participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as follows:

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIAT PERUSAHAAN, DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
EDUCATION AND/OR TRAINING OF BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, AND INTERNAL AUDIT UNIT

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Competency Development

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan Material of Competency Development/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizer
D. Andhi Nirwanto	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration	Pengembangan kompetensi dapat dilihat di pengembangan kompetensi Dewan Komisaris Competency development can be seen in the Board of Commissioners competency development		
Aries Fikirman	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of Nomination and Remuneration Committee	Seminar dengan Agenda "Teknik-Teknik Mendeteksi Indikasi <i>Fraud</i> & Kesalahan Pelaporan Keuangan, Pelaporan Keuangan dan Sukses Audit PKBL-CSR BUMN" Seminar with Agenda "Techniques to Detect Fraud Indications & Errors in Financial Reporting, Financial Reporting and PKBL-CSR SOE Audit Success" Seminar "Menakar Tanggung Jawab dan risiko Pengurus Korporasi Praktisi Akuntan Publik (KAP) dalam Pelaporan Keuangan" Seminar "Measuring the Responsibilities and Risks of Corporate Management Practitioners of Public Accountants (KAP) in Financial Reporting"	H. Papandayan-Bandung, 15 Februari 2019 Papandayan Hotel-Bandung, February 15, 2019 H. Prime Park - Bandung, 23 Agustus 2019 Prime Park Hotel - Bandung, August 23, 2019	Koran BUMN PT Barka Cahaya Mediatama Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat
		Seminar Manajemen Risiko "Mendukung Bisnis Perseroan dengan GRC terintegrasi"	Kantor Pusat IPC/Pelindo II, 25 September 2019	IPC-FMR BUMN – CRMS-IRMAPA
		Seminar "Measuring Responsibility and Risk of Corporate Management Practitioner Public Accountant (KAP) in Financial Reporting"	Prime Park Hotel-Bandung, August 23, 2019	Indonesian Institute of Accountants West Java Region
		Seminar Manajemen Risiko "Mendukung Bisnis Perseroan dengan GRC terintegrasi"	Kantor Pusat IPC/Pelindo II, 25 September 2019	IPC-FMR BUMN – CRMS-IRMAPA
		Risk Management Seminar "Support Company's business with integrated GRC"	IPC/Pelindo II Head Office, September 25, 2019	

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2019, anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

RISK MONITORING COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Throughout 2019, the Risk Monitoring Committee members participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as follows:



Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Competency Development

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Material of Competency Development/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizer
Monty Girianna	Ketua Komite Pemantau Risiko Head of Risk Monitoring Committee	Pengembangan kompetensi dapat dilihat di pengembangan kompetensi Dewan Komisaris Competency development can be seen in the Board of Commissioners competency development		
Pionir Harapan	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	Seminar dengan Agenda "Teknik-Teknik Mendeteksi Indikasi <i>Fraud</i> & Kesalahan Pelaporan Keuangan, Pelaporan Keuangan dan Sukses Audit PKBL-CSR BUMN"	H. Papandayan- Bandung, 15 Februari 2019	Koran BUMN PT Barka Cahaya Mediatama
		Seminar with Agenda "Techniques to Detect Fraud Indications & Errors in Financial Reporting, Financial Reporting and PKBL-CSR SOE Audit Success"	Papandayan Hotel- Bandung, February 15, 2019	
		Seminar Manajemen Risiko "Mendukung Bisnis Perseroan dengan GRC terintegrasi"	Kantor Pusat IPC/Pelindo II, 25 September 2019	IPC-FMR BUMN – CRMS-IRMAPA
R. Nurhidayat	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	Seminar dengan Agenda "Teknik-Teknik Mendeteksi Indikasi <i>Fraud</i> & Kesalahan Pelaporan Keuangan, Pelaporan Keuangan dan Sukses Audit PKBL-CSR BUMN"	H. Papandayan- Bandung, 15 Februari 2019	Koran BUMN PT Barka Cahaya Mediatama
		Seminar with Agenda "Techniques to Detect Fraud Indications & Errors in Financial Reporting, Financial Reporting and PKBL-CSR SOE Audit Success"	Hotel- Bandung, February 15, 2019	
		Seminar Manajemen Risiko "Mendukung Bisnis Perseroan dengan GRC terintegrasi"	Kantor Pusat IPC/Pelindo II, 25 September 2019	IPC-FMR BUMN – CRMS-IRMAPA
		Risk Management Seminar "Support Company's business with integrated GRC"	IPC/Pelindo II Head Office, September 25, 2019	

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2019, Sekretariat Perusahaan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

CORPORATE SECRETARY COMPETENCY DEVELOPMENT

Throughout 2019, the Corporate Secretary participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as follows:

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIAT PERUSAHAAN, DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
EDUCATION AND/OR TRAINING OF BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, AND INTERNAL AUDIT UNIT

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretariat Perusahaan
Corporate Secretary Competency Development

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Material of Competency Development/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizer
Shanti Puruhita	EVP Sekretariat Perusahaan EVP Corporate Secretary	IPC Train the Trainer Batch I	Ciawi, 31 Januari–1 Februari 2019 Ciawi, January 31–February 1, 2019	In-house, PMLI
		EDP II - Seri Building Business Partnership Batch II EDP II - Building Business Partnership Series Batch II	Ciawi, 24 April 2019 Ciawi, April 24, 2019	In-house, PMLI
		GCG BOD - 1 Batch II	Ciawi, 12–13 September 2019 Ciawi, September 12–13, 2019	In-house, PMLI

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Sepanjang tahun 2019, Satuan Pengawasan Internal telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini.

INTERNAL AUDIT UNIT COMPETENCY DEVELOPMENT

Throughout 2019, the Internal Audit Unit participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as follows:

Tabel Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawasan Internal
Internal Audit Unit Competency Development

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Material of Competency Development/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizer
Widodo	EVP Satuan Pengawasan Internal EVP Internal Audit Unit	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) tahun 2019 National Internal Audit Seminar (SNIA) in 2019	Palembang, 24–25 April 2019 Palembang, April 24–25, 2019	Publik, Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Public, Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Konferensi Nasional IIA Indonesia 2019 Indonesia IIA National Conference in 2019	Solo, 24–25 Juli 2019 Solo, July 24–25, 2019	Publik, IIA Indonesia Public, Indonesia IIA
		EDP II - Seri Building Business Partnership Batch II EDP II - Building Business Partnership Series Batch II	Ciawi, 28 Maret 2019 Ciawi, March 28, 2019	In-house, PMLI
		Executive Presence Batch II	Ciawi, 10–11 Mei 2019 Ciawi, May 10–11, 2019	In-house, PMLI



PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2019, Manajemen Risiko telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

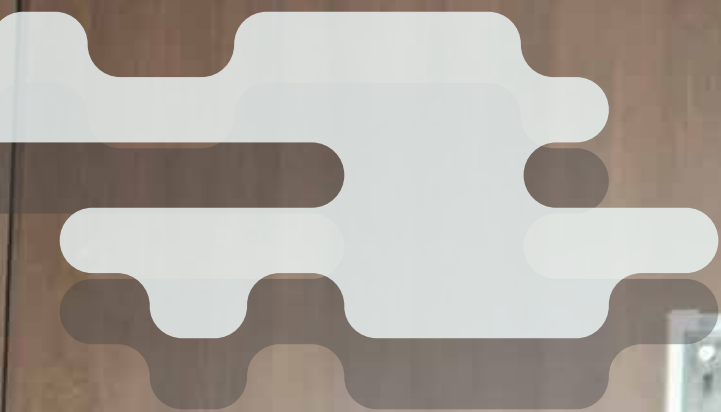
RISK MANAGEMENT COMPETENCY DEVELOPMENT

Throughout 2019, the Risk Management participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as follows:

Tabel Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko
Risk Management Competency Development

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Material of Competency Development/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizer
Eko Afrilianto	VP Manajemen Risiko VP Risk Management	<i>IPC Train the Trainer Batch 2</i>	Ciawi, 14–15 Februari 2019 Ciawi, February 14–15, 2019	PT PMLI
		<i>EDP II – Seri Building Business Partnership Batch II</i> <i>EDP II - Building Business Partnership Series Batch II</i>	Ciawi, 24 April 2019 Ciawi, April 24, 2019	PT PMLI
Urip Nurhayat	VP Manajemen Risiko VP Risk Management	<i>Financial Risk Management and Fraud Enhance Value of the Firm Disruption Era</i>	Bali, 3 Agustus 2019 Bali, August 3, 2019	Publik, Economic Review Public, Economic Review
		<i>Workshop Sinergi BUMN</i> <i>Workshop on SOE Synergy</i>	Bandung, 13 September 2019 Bandung, September 13, 2019	Publik, HC BUMN Public, HC SOE





FUNGSI PENUNJANG BISNIS

BUSINESS FUNCTION SUPPORTS



Perseroan telah melakukan berbagai pengembangan dan implementasi teknologi informasi 2019 yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan yang tertuang dengan di dalam arsitektur bisnis dan selaras dengan arsitektur aplikasi sebagai pendukung bisnis proses perusahaan. Pengembangan tersebut antara lain Pengembangan dan Implementasi Aplikasi, Pengembangan Infrastruktur serta Tata Kelola Teknologi Informasi.

The Company has carried out various developments and implementations of information technology in 2019 in accordance with the Company's business needs as stipulated in the business architecture and in line with the application architecture as the Company's business process support. These developments include the Development and Implementation of Applications, Infrastructure Development and Information Technology Governance.



SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN CAPITAL



KERANGKA STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

IPC telah menyusun strategi pengelolaan SDM dengan menetapkan pilar kebijakan SDM di antaranya rekrutmen, pengembangan, pola karier, predikat jabatan fungsional, promosi jabatan struktural dan fungsional dan penghasilan *non* bulanan. Kebijakan ini ditetapkan untuk menumbuhkan daya saing organisasi. IPC mengelola SDM melalui:

1. Penyusunan *Individual Development Plan* bagi para pekerja;
2. Pelatihan baik *inhouse* maupun di luar IPC;
3. Pengembangan, yaitu melalui *on the job training* atau magang di dalam dan di luar IPC.

Strategi pengelolaan SDM mengacu pada *roadmap* Perseroan periode tahun 2016–2020. Strategi pengelolaan dan pengembangan SDM terdiri dari tahapan *fit in infrastructure, enhancement, establishment* dan sampai tahapan *world class port operator*. Berdasarkan *roadmap* Perseroan tersebut, Direktorat SDM telah menyusun *roadmap* SDM sebagai berikut:

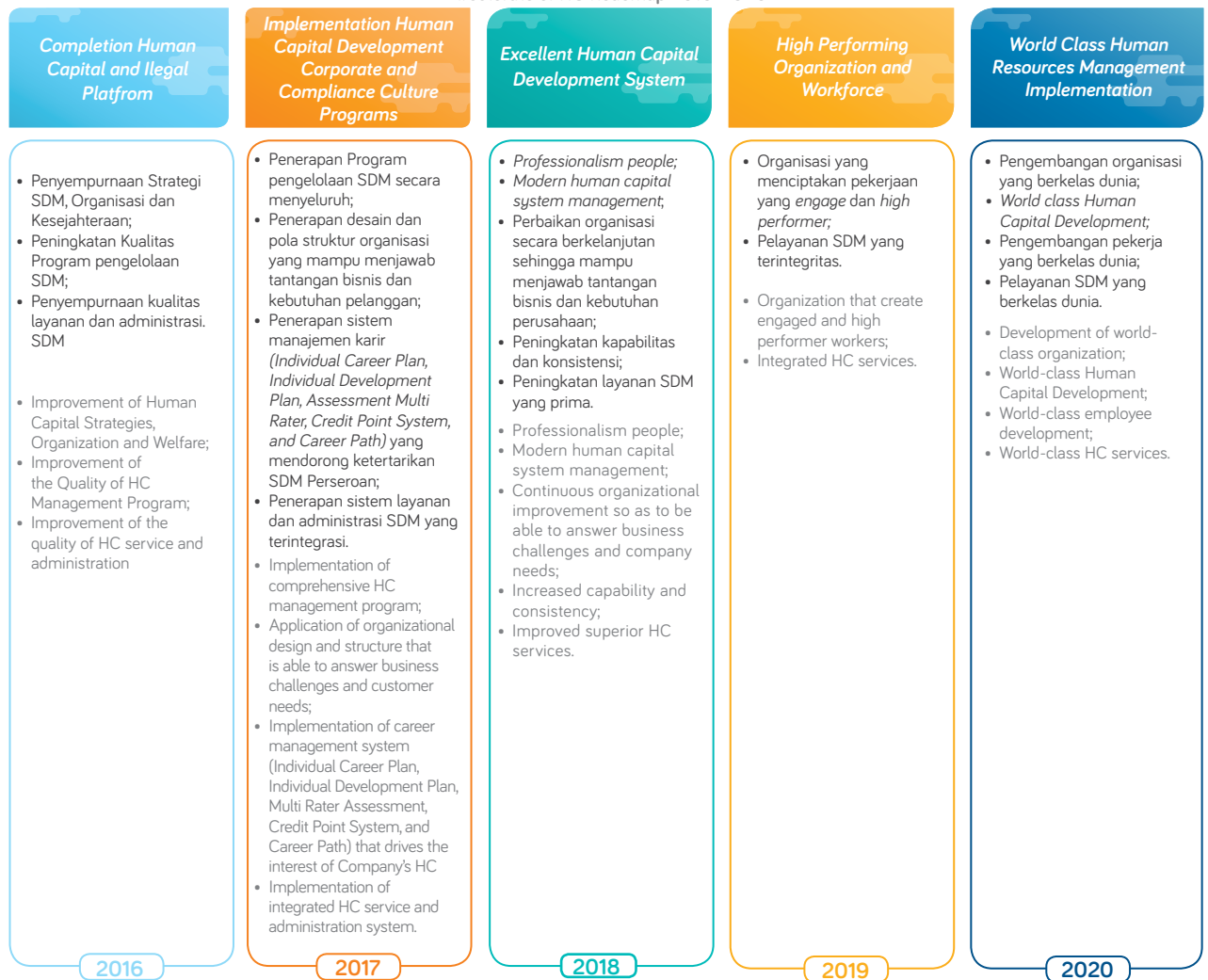
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT STRATEGY FRAMEWORK

IPC has developed the human Capital management strategy policy by establishing the HC policy pillars, among others recruitment, development, career pattern, functional position predicate, promotion of structural and functional position, and non-monthly income. The policy is established to foster the organization's competitiveness. IPC manages Human Capital through:

1. Individual Development Plan for employees;
2. Training, both inhouse and outside of IPC;
3. Development, through on the job training or internship in the Company or outside the Company.

The HC management strategy refers to the Company's *roadmap* for the period of 2016-2020. The management and development of Human Capital consists of *fit in infrastructure, enhancement, establishment* and up to the *world class port operator* stage. Based on the Company's *roadmap*, the HC Directorate has compiled the HC *roadmap* as follows:

Roadmap Direktorat SDM 2016-2020
Directorate of HC Roadmap 2016-2020



PENGEMBANGAN ORGANISASI

Tahun 2019 terdapat perubahan struktur organisasi. Menunjuk Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK272/MBU/11/2019 tentang Pengangkatan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Kementerian BUMN mengangkat Sdr. Hambra sebagai Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Sebagai tindak lanjut atas surat keputusan tersebut, Perseroan telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Perihal Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 tanggal 20 November 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

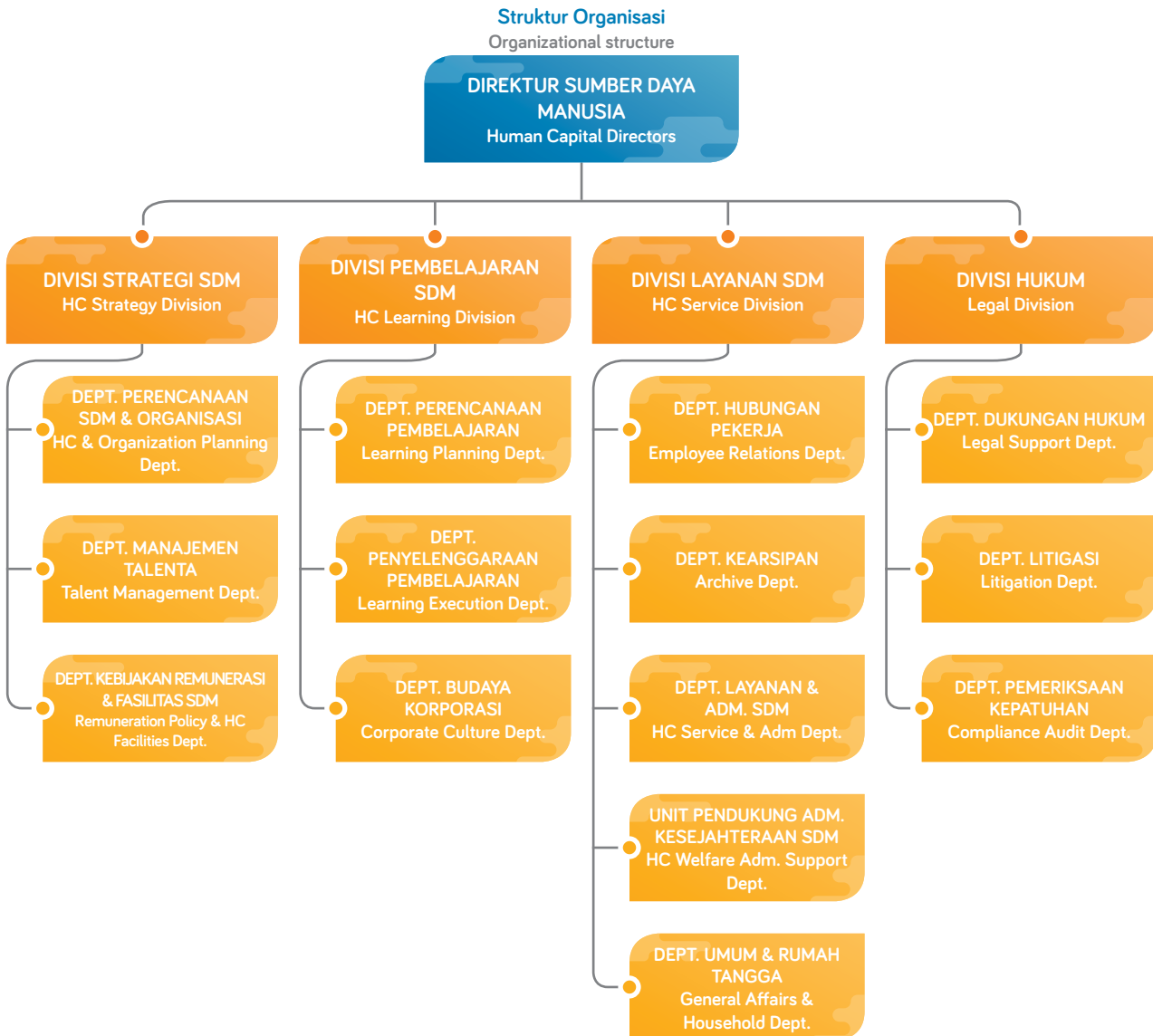
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

In 2019, there were changes in organizational structure. Pursuant to the Copy of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK272/MBU/11/2019 concerning the Appointment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), the Ministry of SOE appointed Hambra as Vice President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). As a follow-up to the Decree, the Company issued the Board of Directors Decree on the Amendment to the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 dated November 20, 2019 concerning Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).



PROFIL DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA

PROFILE OF HUMAN CAPITAL DIVISION



FUNGSI DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA

Direktorat SDM membawahi 4 (empat) Divisi yaitu:

1. Divisi Strategi Sumber Daya Manusia, membawahi 3 (tiga) departemen yaitu:
 - a. Departemen Perencanaan SDM dan Organisasi;
 - b. Departemen Manajemen Talenta;
 - c. Departemen Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas SDM.

HUMAN CAPITAL DIVISION FUNCTION

The Directorate of Human Capital oversees 4 (four) divisions, namely:

1. Human Capital Strategy division, in charge of 3 (three) departments, namely:
 - a. HC and Organization Planning department;
 - b. Talent Management department;
 - c. HC Remuneration Policy and Facilities department.

Adapun uraian pekerjaan SVP Strategi Sumber Daya Manusia yaitu:

- a. Bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perencanaan strategi SDM dan organisasi, manajemen talenta, dan kebijakan remunerasi dan fasilitas SDM;
- b. Bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan sumber daya manusia secara komprehensif dan *best practice* antara lain meliputi perencanaan organisasi, remunerasi, dan manajemen talenta pada Induk Perusahaan dan Entitas Anak;
- c. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas pemenuhan pekerja tetap, pekerja tidak tetap dan perhitungan pemberian pekerjaan borongan sesuai dengan kebutuhan Perseroan;
- d. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas penempatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak, termasuk pengesahan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada Entitas Anak untuk maksud tersebut;
- e. Bertanggung jawab untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi kebijakan sumber daya manusia;
- f. Bertanggung jawab untuk mengintegrasikan dan mengembangkan seluruh kebijakan SDM melalui sistem informasi teknologi;
- g. Bertanggung jawab untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja Dana Pensiun Pekerja Pelabuhan dan Pengerukan;
- h. Bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dari Satuan Pengawasan Internal;
- i. Bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan kepada Direktur SDM atas pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawabnya;
- j. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan RUPS terkait pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi/pengurus/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas/Entitas Anak/Afiliasi/penyertaan serta remunerasi dan/atau fasilitasnya.

2. Divisi Pembelajaran SDM, membawahi 3 (tiga) departemen yaitu:

- a. Departemen Perencanaan Pembelajaran;
- b. Departemen Penyelenggaraan Pembelajaran;
- c. Departemen Budaya Korporasi.

Adapun uraian pekerjaan SVP Pembelajaran SDM:

- a. Bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program kerja dan *Key*

SVP Human Capital Strategy's Job Descriptions:

- a. Responsible for formulating policies, Operating Procedure Standards (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) related to their main duties and responsibilities related to HC and organizational strategy planning, talent management, and HC remuneration policies and facilities;
- b. Responsible for developing comprehensive human capital policies and best practices including organizational planning, remuneration, and talent management at the Parent Company and Subsidiary;
- c. Responsible for planning, implementing and evaluating the fulfillment of permanent workers, non-permanent workers and the calculation of provision of bulk works in accordance with company needs;
- d. Responsible for planning, implementing and evaluating the placement of members of Board of Directors and Board of Commissioners of a Subsidiary, including approval in the General Meeting of Shareholders of a Subsidiary for this purpose;
- e. Responsible for monitoring and evaluating human capital policies;
- f. Responsible for integrating and developing all HC policies through information technology systems;
- g. Responsible for monitoring and evaluating the performance of Port and Dredging Workers Pension Funds;
- h. Responsible for following up on recommendations from the findings of Internal Audit Unit;
- i. Responsible for reporting to the HC Director on the implementation of main tasks and responsibilities;
- j. Responsible for coordinating the implementation of General Meeting of Shareholders regarding the appointment and/or dismissal of Directors/management/Board of Commissioners/Supervisory Board/Subsidiaries/Affiliates/equity participation as well as remuneration and/or facilities.

2. HC Learning division, in charge of 3 (three) departments, namely:

- a. Learning Planning department;
- b. Learning Management department;
- c. Corporate Culture department.

SVP HC Learning Job Descriptions:

- a. Responsible for preparing policies, Operational Procedure Standards (SPO), work programs and *Key*



Performance Indicator (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran dan budaya korporasi;

- b. Bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan pengembangan, pembelajaran dan budaya korporasi pada Induk Perusahaan dan Entitas Anak;
- c. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas pemenuhan pengembangan kebijakan pembelajaran Perseroan baik kompetensi teknis dan kepemimpinan;
- d. Bertanggung jawab terhadap kurikulum, silabus serta desain program pembelajaran;
- e. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan *monitoring* program pembelajaran;
- f. Bertanggung jawab terhadap evaluasi pembelajaran dan peningkatan kompetensi SDM;
- g. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi dan evaluasi program terkait dengan budaya korporasi;
- h. Bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dari Satuan Pengawasan Internal;
- i. Bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan kepada Direktur SDM atas pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawabnya.

3. Divisi Layanan SDM, membawahi 3 departemen dan 3 (tiga) unit kerja, yaitu:
 - a. Departemen Hubungan Pekerja;
 - b. Departemen Kearsipan;
 - c. Departemen Umum dan Rumah Tangga;
 - d. Departemen Layanan dan Administrasi SDM;
 - e. Unit Pendukung Sistem Informasi dan Administrasi SDM.
 - f. Unit Pendukung Administrasi Kesejahteraan SDM.

Adapun uraian pekerjaan SVP Layanan SDM:

- a. Bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait hubungan pekerja, kearsipan, layanan administrasi SDM, umum dan rumah tangga pada Induk Perusahaan dan Entitas Anak;
- b. Bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan SDM, *monitoring* dan evaluasi serta pengembangan atas penerapan layanan SDM pada Induk Perusahaan dan Entitas Anak;
- c. Bertanggung jawab terhadap penyusunan program bagi SDM yang telah mencapai masa pensiun termasuk program persiapan pensiun;

Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to learning planning, organizing learning and corporate culture;

- b. Responsible for developing development policies, learning and corporate culture in the Parent Company and Subsidiaries;
- c. Responsible for planning, implementing and evaluating the fulfillment of the development of company learning policies both in technical and leadership competencies;
- d. Responsible for the curriculum, syllabus and design of learning programs;
- e. Responsible for organizing and monitoring learning programs;
- f. Responsible for evaluating HC learning and competency development;
- g. Responsible for planning, implementation and evaluation of programs related to corporate culture;
- h. Responsible for following up on recommendations from the findings of Internal Audit Unit;
- i. Responsible for reporting to the HC Director on the implementation of main tasks and responsibilities.

3. HC Services division, in charge of 3 (three) departments and 3 (three) work units, namely:
 - a. Employee Relations department;
 - b. Archive department;
 - c. General Affairs and Household department;
 - d. General Services and HC Administration department;
 - e. Information System and HC Administration supporting unit;
 - f. HC Welfare Administration supporting unit.

SVP HC Services Job Descriptions:

- a. Responsible for preparing policies, Operational Procedure Standards (SPO), work programs and Key Performance Indicators (KPI) related to their main duties and responsibilities related to employee relations, archives, HC administration services, general affairs and household at the Parent Company and Subsidiaries;
- b. Responsible for improving HC services, monitoring and evaluation as well as developing the implementation of HC services at the Parent Company and Subsidiaries;
- c. Responsible for the preparation of programs for HC who have reached retirement including pension preparation programs;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> d. Bertanggung jawab dalam menyusun rencana, implementasi dan evaluasi hubungan industrial meliputi penyusunan program-program kerja pelaksanaan penegakan aturan kedisiplinan pekerja, pembinaan serikat pekerja, kerohanian dan kesenian, serta pengelolaan yayasan Barunawati di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan organisasi istri kepelabuhanan; e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis/transaksional dari kebijakan SDM dan program yang berlaku; f. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan penyedia akomodasi serta logistik Perseroan; g. Bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan, perencanaan, implementasi dan evaluasi pengelolaan arsip Perseroan; h. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengawasan dan pengamanan aset bangunan kantor, kendaraan dan inventaris kantor serta aset <i>non</i> komersial; i. Bertanggung jawab untuk mengajukan usulan penghapusan aset bangunan kantor, kendaraan dan inventaris kantor kepada Direktur Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku; j. Bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dari Satuan Pengawasan Internal; k. Bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan kepada Direktur SDM atas pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawabnya. <p>4. Divisi Hukum, membawahi 3 (tiga) departemen yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Departemen Penelaahan Hukum Dan Peraturan Perseroan; b. Departemen Penanganan Masalah Hukum; c. Departemen Jaringan dan Dokumentasi Hukum. | <ul style="list-style-type: none"> d. Responsible for preparing plan, implementation and evaluation of industrial relations including the preparation of work programs for implementing the rules of discipline of workers, fostering trade unions, spirituality and arts, as well as managing Barunawati Foundation within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and the port wife organization; e. Responsible for the technical/transactional implementation of HC policies and programs in force; f. Responsible for the management of accommodation providers and logistics companies; g. Responsible for the preparation of policies, planning, implementation and evaluation of company's archives management; h. Responsible for the management, supervision and security of office building assets, vehicles and office inventory and non-commercial assets; i. Responsible for submitting proposals for the elimination of office building assets, vehicles and office inventory to the Finance Director in accordance with applicable regulations; j. Responsible for following up on recommendations from the findings of Internal Audit Unit; k. Responsible for reporting to the HC Director on the implementation of main tasks and responsibilities. <p>4. Legal division, in charge of 3 (three) departments, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Legal and Corporate Regulation Review department; b. Legal Issues Handling department; c. Legal Network and Documentation department. |
|--|---|

Adapun uraian pekerjaan SVP Hukum:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program kerja dan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait dengan dukungan hukum, litigasi dan pemeriksaan kepatuhan kepada Induk Perusahaan dan Entitas Anak; b. Bertanggung jawab untuk memberikan dukungan aspek hukum kepada unit kerja, Cabang Pelabuhan dan Entitas Anak baik berupa pemberian pendapat hukum, dukungan dalam penyusunan perjanjian dan dokumen hukum lainnya; c. Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan/reviu atas penyusunan peraturan internal Perseroan, reviu atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- | <p>SVP Legal Job Descriptions:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Responsible for developing policies, Standard Operating Procedures (SPO), work programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to legal support, litigation and compliance checks to the Parent Company and Subsidiaries; b. Responsible for providing legal aspects support to the work unit, Port Branch and Subsidiaries in the form of providing legal opinion, support in the preparation of agreements and other legal documents; c. Responsible for examining/reviewing the preparation of the Company's internal regulations, reviews for compliance with statutory regulations, Board of |
|---|---|



- undangan, keputusan Direksi, dokumen RUPS Perseroan dan Entitas Anak serta dokumen-dokumen lainnya;
- d. Bertanggung jawab untuk menangani sengketa, perkara dan pendampingan masalah hukum Perusahaan, termasuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan berdasarkan surat kuasa;
 - e. Bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan terhadap pekerja untuk mendapatkan masalah hukum dalam menjalankan tugas;
 - f. Bertanggung jawab untuk melakukan reviu atas penyesuaian kebijakan Perseroan sehubungan dengan peraturan perundang-undangan baru yang terkait dengan usaha Perseroan;
 - g. Bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dari Satuan Pengawasan Internal;
 - h. Bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan kepada Direktur SDM atas pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawabnya.

- Directors' decisions, the Company and Subsidiary's GMS documents and other documents;
- d. Responsible for handling disputes, cases and accompaniment of Corporate legal matters, including representing the Company in and out of court based on power of attorney;
 - e. Responsible for assisting workers to get legal problems in carrying out their duties;
 - f. Responsible for reviewing adjustments to the Company's policies in connection with new laws and regulations relating to the Company's business;
 - g. Responsible for following up on recommendations from the findings of Internal Audit Unit;
 - h. Responsible for reporting to the HC Director on the implementation of main tasks and responsibilities.

DEPARTEMEN KEARSIPAN

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kompleksitas kegiatan bidang kepelabuhanan memerlukan suatu manajemen arsip dinamis untuk mengelola arsip yang tercipta agar dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam bidang kegiatan sektor kepelabuhanan. Arsip tersebut perlu dikelola dengan baik, sistematis dan kronologis agar apabila suatu saat diperlukan dapat ditemukan kembali secara cepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, dari sinilah dipandang perlu adanya manajemen pelayanan informasi arsip yang handal dimana arsip dapat disajikan dengan cepat, tepat serta lengkap dalam rangka pengambilan keputusan, penentuan kebijakan dan sebagai bahan bukti pertanggungjawaban kegiatan oleh pimpinan atau pengguna, serta untuk kepentingan organisasi lainnya.

Sesuai dengan struktur organisasi bahwa Departemen Kearsipan berada pada Divisi Layanan SDM yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Departemen Kearsipan mempunyai beberapa tugas, yaitu:

1. Pelayanan Surat Masuk;
2. Pelayanan Surat Keluar;
3. Pembinaan Pengelolaan Arsip;
4. Penyimpanan Arsip;
5. Peminjaman Arsip;
6. Pemusnahan Arsip; dan
7. Pelayanan Kebutuhan ATK dan Cetakan Kantor Pusat.

ARCHIVE DEPARTMENT

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as a State-Owned Enterprise that has a complexity of port sector activities requires a dynamic archive management to manage the records that are created, so that those records can be used effectively and efficiently in the port sector activities. The archive needs to be managed properly, systematically and chronologically, hence can be recovered quickly and accurately and can be accounted for if needed in the future. Departing from this, it is deemed necessary to have reliable archival information service management, where records can be presented quickly, accurately and completely in order to make decisions, determining policies and as evidence of accountability for activities by leaders or users, and for other purposes for the organization.

In accordance with the organizational structure, the Archive Department is under the HC Services Division that reports directly to the HC Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The Archive Department has several tasks:

1. Incoming Mail Service;
2. Outgoing Mail Service;
3. Archive Management;
4. Archive Storage;
5. Archive Borrowing;
6. Extermination of Archives; and
7. Stationery and printing needs for the Head Office.

Kerjasama Penataan Arsip

Record Center atau Gedung Arsip merupakan sarana yang dimiliki Departemen Kearsipan. Gedung Arsip adalah pusat data arsip Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang digunakan sebagai tempat penyimpanan arsip aktif dan inaktif. Sejak tahun 2017 Departemen Kearsipan telah melakukan kerjasama tentang pengelolaan arsip dengan Pusat Jasa Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan Nomor Kesepakatan No. KS.02/15/1/URT/SUM/PI.II-18 dan No. KE.00/00/09/2018.

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan kerjasama dalam kegiatan pengelolaan arsip. Kesepakatan bersama ini juga bertujuan untuk membangun kemitraan dan sinergi antara dengan prinsip saling menguntungkan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak yang didasarkan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) serta tunduk pada semua ketentuan hukum.

Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Pembuatan Pedoman Kearsipan;
2. Pembenahan Arsip;
3. Pembuatan Aplikasi Sistem Kearsipan;
4. Penyimpanan Arsip;
5. Pemeliharaan dan Perawatan Arsip.

Kerjasama pembenahan arsip Kantor Pusat dan 12 Cabang Pelabuhan yang telah dilakukan pembenahan arsip adalah Kantor Pusat, Cabang Tanjung Priok, Cabang Sunda Kelapa, Cabang Banten dan Cabang Panjang. Untuk Cabang yang belum dilakukan penataan, akan dilaksanakan penataan pada Tahun 2020.

Archive Arrangement Cooperation

The Record Center or Archive Building is a facility owned by the Archive Department. The Archive Building is a data center archive of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Head Office which is used as an active and inactive archive repository. Since 2017, the Ministry of Archives has collaborated on managing records with the National Archives Service Center of the Republic of Indonesia (ANRI) with the Agreement No. KS.02/15/1/URT/SUM/PI.II-18 and No. KE.00/00/09/2018.

The purpose of this agreement is to prepare everything related to collaborative planning in archive management activities. This agreement also aims to build partnerships and synergies between the principle of mutual benefit in utilizing the potential of each party based on the principles of Good Corporate Governance (GCG) and subject to all legal provisions.

The scope of agreement includes:

1. Preparing Archive Guidelines;
2. Improving the Archives;
3. Making Archive System Application;
4. Archive Storage;
5. Maintenance and Care of Archive.

Collaborative efforts to re-arrange the archives of Head Office and 12 Port Branches have been carried out by the Head Office, Tanjung Priok Branch, Sunda Kelapa Branch, Banten Branch and Panjang Branch. For branches that have not been re-arranged, will be carried out in 2020.



Kondisi dan Jenis Arsip

Conditions and Types Of Archive

KONDISI ARSIP

Conditions Of Archive

1. Sebagian arsip sudah memberkas namun belum menggunakan sistem sesuai peraturan perundangan;
2. Arsip belum tertata fisik dan informasi;
3. Belum ada sarana temu kembali arsip dan daftar arsip;
4. Sarana dan prasarana belum sesuai standar kearsipan;
5. Belum ada SDM pengelola arsip.

1. Some archives have been filed but have not used the system in accordance with laws and regulations;
2. Archive has not been arranged physically and information;
3. There is no means to retrieve archives and archive lists;
4. Facilities and infrastructure are not in accordance with archival standards;
5. There is no archive manager.

JENIS ARSIP

Types Of Archive

- | | |
|---|--|
| 1. Arsip Keuangan; | 1. Financial Archives; |
| 2. Arsip Tata Usaha; | 2. Administrative Archives; |
| 3. Arsip Umum; | 3. Public Archives; |
| 4. Arsip Hukum (pengendalian internal); | 4. Legal Archives (internal control); |
| 5. Arsip Operasional dan Teknik; | 5. Operational and Technical Archives; |
| 6. Arsip SDM; | 6. Human Capital Archives; |
| 7. Arsip Logistik Pengadaan; | 7. Logistics Procurement Archives; |
| 8. Arsip Komersial dan Humas; | 8. Commercial and Public Relations Archives; |
| 9. Arsip Korespondensi; | 9. Correspondence Archives; |

Kegiatan Penataan Arsip

Archive Arrangement Activities

1 Pemilahan arsip dan non-arsip
Sorting archives and non-archives

2 Pendeskripsian dan pemasukan data arsip
Describe and entry archive data

3 Pengolahan data arsip
Archive data processing

4 Penataan fisik arsip
Archive physical arrangement

5 Pembuatan daftar arsip dan lokasi simpannya
Making an archive list and storage locations

6 Uji coba penemuan kembali arsip
Retry archive retrieval

SEBELUM
Before



SESUDAH
After



MANAJEMEN HUMAN CAPITAL

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REKRUTMEN

Pola rekrutmen yang dilakukan di IPC melalui pengumuman secara terbuka, sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Rekrutmen di IPC dilaksanakan sesuai analisa kebutuhan pekerja berdasarkan formasi kebutuhan yang disusun oleh Divisi SDM IPC. Rekrutmen dipublikasikan secara *online* melalui *website*: www.ipc.e-seleksi.com dan media surat kabar nasional. Pada tahun 2019, kegiatan rekrutmen yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Posisi *Officer* sebanyak 41 orang dari rekrutmen *fresh graduate* dan 3 orang dari rekrutmen BUMN sehingga berjumlah total 44 orang pada posisi *officer*;
2. Posisi Administrator sebanyak 64 orang dari rekrutmen alih daya serta 2 orang dari rekrutmen BUMN (disabilitas) sehingga berjumlah total 66 orang pada posisi Administrator;
3. Posisi Pandu berjumlah 18 orang dari rekrutmen pandu.

Tahapan pelaksanaan rekrutmen adalah:

No	Tahapan rekrutmen <i>Recruitment stage</i>	Jenis Rekrutmen <i>Recruitment Type</i>		
		<i>Officer</i>	<i>Administrator</i>	Pandu <i>Pilotage</i>
1	Pengumuman Pembukaan secara Terbuka <i>Announcement of Job Vacancy</i>	✓	✓	✓
2	Registrasi melalui <i>Website</i> <i>Register through Website</i>	✓	✓	✓
3	Seleksi Administrasi <i>Administration Selection</i>	✓	✓	✓
4	Tes Berenang <i>Swimming Test</i>	-	-	✓
5	Tes Seleksi Tahapan Pertama (Tes Potensi Akademik) <i>First Stage Selection Test (Academic Potential Test)</i>	✓	✓	✓
6	Tes Seleksi Tahapan Kedua (Psikotes dan Bahasa Inggris) <i>Second Stage Selection Test (Psychological Test and English)</i>	✓	✓	✓
7	<i>Interview User</i> <i>User Interview</i>	✓	✓	✓
8	Tes Kesehatan <i>Medical Check Up</i>	✓	✓	✓
9	<i>Interview Direksi</i> <i>Director Interview</i>	✓	-	✓

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dalam menjalankan pengembangan kompetensi karyawan, IPC mengacu pada Surat Menteri BUMN No. S-564/MBU/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

RECRUITMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

The recruitment pattern at IPC is through public announcements, according to the position required. Recruitment at IPC is carried out according to an analysis of manpower needs based on the formation of needs compiled by IPC HC Division. Recruitment is published online through the website: www.ipc.e-seleksi.com and national newspaper media. In 2019, the recruitment activities carried out is as follows:

1. Officer positions as many as 41 people from fresh graduate recruitment and 3 people from SOE recruitment, hence there are a total of 44 people in officer positions;
2. Administrator positions as many as 64 people from outsourcing recruitment and 2 people from SOE recruitment (disability), hence there are a total of 66 people in Administrator positions;
3. Pilotage positions as many as 18 people from pilotage recruitment.

The stages of recruitment are:

COMPETENCY DEVELOPMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

In carrying out employee competency development, IPC refers to the Minister of SOE Letter no. S-564/MBU/08/2018 dated August 31, 2018 regarding the aspirations of Shareholders/ Capital Owners for the Preparation of Corporate Work Plan and



Perusahaan Tahun 2019. Berdasarkan aspirasi Pemegang Saham tersebut, seluruh BUMN wajib membangun *Integrated Talent Management System (ITMS)* dan mengirimkan talenta Perseroan ke dalam *talent pool* di Kementerian BUMN, yang terdiri dari minimal 20% dari seluruh pejabat satu level di bawah Direksi dan kandidat Calon Direksi minimal 3 (tiga) orang Suksesor per posisi Direktur Utama. Anggaran untuk Program Pengembangan *Human Capital/SDM* agar dialokasikan dalam RKAP minimal 5% dari total biaya *Human Capital/SDM* dalam 1 tahun.

Lebih lanjut, untuk mengimplementasikan Program Pembelajaran Karyawan yang terstruktur dan terencana, IPC merujuk kepada Surat Keputusan Direksi Nomor DL.01.15/4/1/PRB/OT/PI.II-19 tentang Pembelajaran Karyawan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Surat Keputusan Direksi menjadi pedoman dalam rangka menyelenggarakan Program Pembelajaran Karyawan yang sejalan dengan Visi, Misi, dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.

Dalam rangka mendukung visi perusahaan menjadi operator pelabuhan kelas dunia, IPC melakukan restrukturisasi dengan membentuk Divisi Pembelajaran SDM pada 13 April 2018 sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: OT.01.03/13/4/1/SRP/UT/PI.II-18. Divisi Pembelajaran diberikan tugas untuk menjalankan fungsi *Corporate University* yang sebelumnya berada di Entitas Anak PT PMLI. Hal ini kemudian diikuti dengan penetapan beberapa kebijakan seperti Surat Keputusan Direksi Nomor: OT.01.03/20/8/1/PRB/UT.PII-19 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: OT.0.03/9/5/1/PDM/UT/PI.II-18 tanggal 9 Mei 2018 tentang Struktur Organisasi Virtual IPC *Corporate University*. Kemudian, disusun SK Program Pembelajaran yang memberikan pedoman dalam rangka mengembangkan kompetensi karyawan sehingga dapat berjalan selaras dengan Visi, Misi dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta menambah nilai Perusahaan dihadapan *Stakeholder*. Selain itu, telah disusun Surat Keputusan Direksi tentang Struktur, Kurikulum dan Silabus Pembelajaran di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang bertujuan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan Program Pembelajaran sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

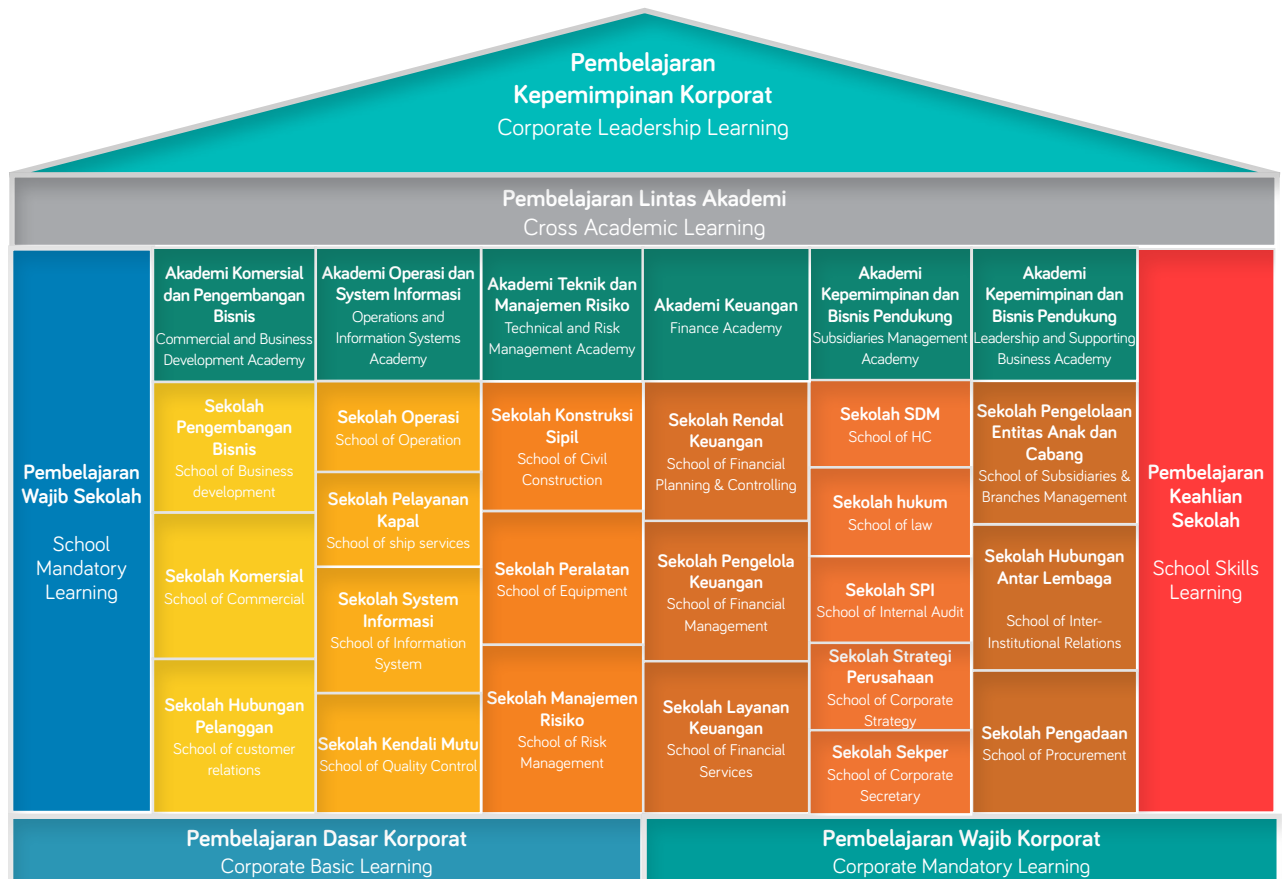
IPC merancang Program Pengembangan Karyawan secara terstruktur mulai dari program pembelajaran dasar korporat sampai dengan program kepemimpinan korporat. Sebagai gambaran, Struktur Pembelajaran IPC sebagai berikut:

Budget in 2019. Based on the shareholders' aspirations, all SOEs must build an Integrated Talent Management System (ITMS) and send Company's talents to the talent pool of ministry of SOE, which consists of a minimum of 20% of all officials one level below Board of Directors and candidates for Directors of at least 3 (three) successors per Director position. The budget for Human Capital Development Program should be allocated in the RKAP of at least 5% of the total Human Capital expenses in 1 (one) year.

Furthermore, to implement a structured and planned Employee Learning Program, IPC refers to the Decree of Board of Directors Number DL.01.15/4/1/PRB/OT/PI.II-19 concerning Employee Learning in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The Decree of Board of Directors is a guideline for organizing Employee Learning Program that is in line with the Company's Vision, Mission and Long-Term Plan.

In order to support the Company's Vision of becoming a world-class port operator, IPC performed a restructuring by forming the Human Capital Learning Division on April 13, 2018 according to the Board of Directors Decree No: OT.01.03/13/4/1/ SRP/UT/PI.II-18. The Learning division is given the task of carrying out the function of Corporate University which previously in a subsidiary PT PMLI. This is then followed by the establishment of several policies such as Board of Directors Decree Number: OT.01.03/20/8/1/PRB/UT.PII-19 dated August 20, 2019 concerning Amendment to the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number: OT.0.03/9/5/1/PDM/UT/PI.II-18 dated May 9, 2018 on Virtual Organizational Structure of IPC Corporate University. Then, the Learning Program Decree was prepared, which provides guidance in Employee Competency Development in order to run in line with the Vision, Mission and long Term Plan of the Company and add corporate values to Stakeholders. In addition, the Board of Directors Decree has been drafted on the Learning Structure, Curriculum and Syllabus in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), as a guideline in planning and implementing Learning Programs so that they can run effectively, efficiently and on target.

IPC designed a structured Employee Development Program ranging from corporate basic learning programs to corporate leadership programs. As an illustration, the Learning Structure of IPC is as follows:



Keterangan:

1. Pembelajaran Dasar Korporat adalah Program Pembelajaran yang wajib diikuti seluruh calon karyawan Perseroan;
2. Pembelajaran Wajib Korporat adalah Program Pembelajaran yang wajib diikuti seluruh karyawan sesuai levelnya;
3. Pembelajaran Kepemimpinan Korporat terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. Program Pengembangan Karir adalah pelatihan atau serangkaian pelatihan kepemimpinan yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan zona jabatannya;
 - b. Program Persyaratan Karir adalah serangkaian pelatihan kepemimpinan yang diberikan kepada karyawan yang akan naik zona karir.
4. Pembelajaran Wajib dan Keahlian Sekolah adalah Program Pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis bidang tertentu;
5. Pembelajaran Lintas Akademi adalah Program Pembelajaran bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensi teknis akademi lainnya.

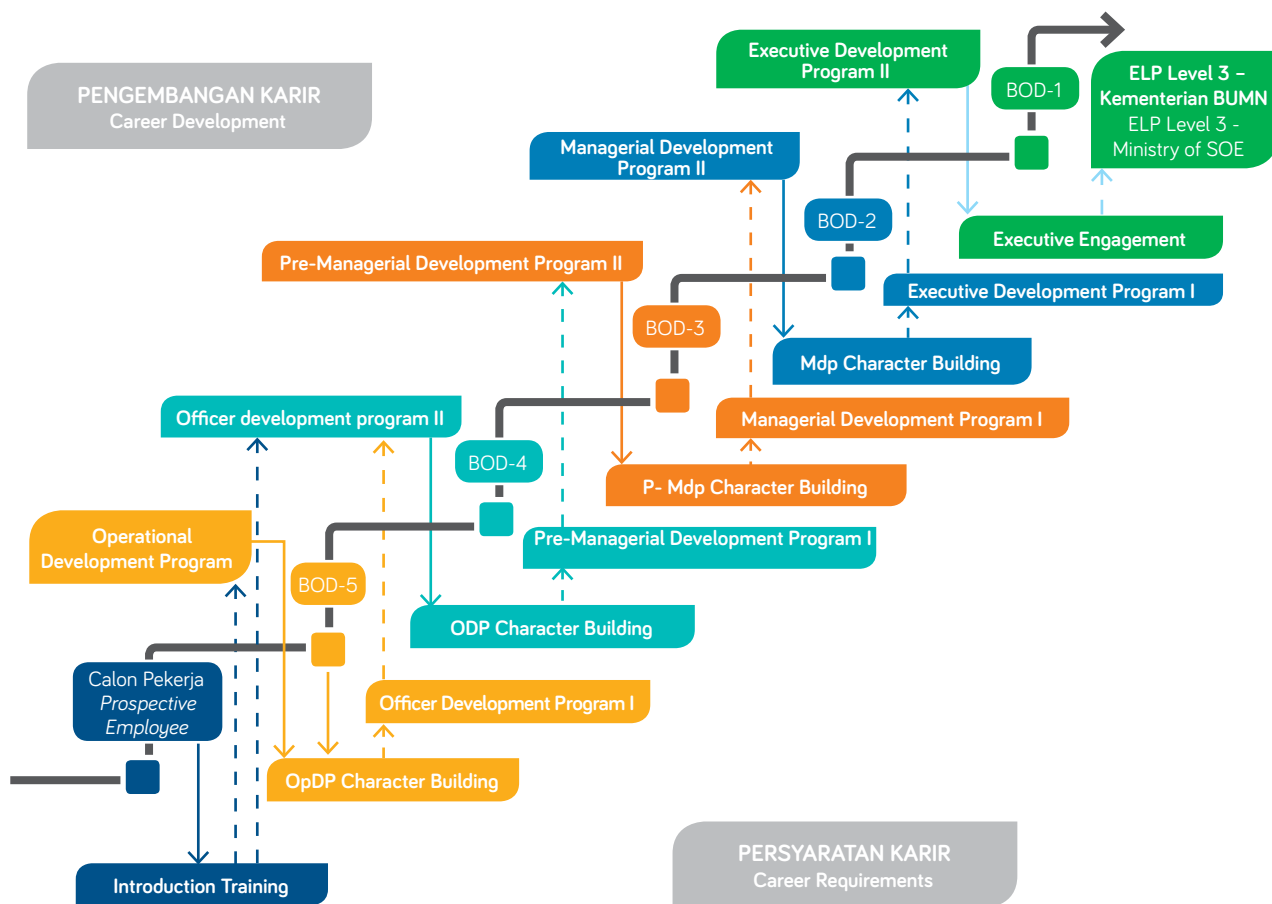
Description:

1. Corporate Basic learning is a learning program that must be followed by all prospective employees of the Company;
2. Corporate Mandatory learning is a learning Program that must be followed by all employees according to their level;
3. Corporate Leadership learning is divided into 2 (two) categories, namely:
 - a. Career Development Program, is a training or a series of leadership training given to employees in accordance with their career zone;
 - b. Career Requirement Program is a series of leadership training given to employees who will rise in the career zone.
4. School Mandatory and Skills learning is a learning Program that aims to improve technical competencies in certain fields;
5. Cross Academic learning is a learning Program for employees to improve the technical competencies of other academies.



Untuk menjawab Aspirasi *Shareholders* dimana BUMN diminta untuk menyiapkan suksesor minimal 3 (tiga) orang per Direktur Utama, IPC merancang dan menjalankan Program Pembelajaran Kepemimpinan Korporat dengan mengacu pada kamus kompetensi BUMN. Struktur Pembelajaran Kepemimpinan Korporat di IPC sebagai berikut:

To answer the Aspirations of Shareholders, in which SOEs are asked to prepare successor of at least 3 (three) persons per Director, IPC designed and runs a Corporate Leadership Learning Program by referring to the SOE competency dictionary. The Corporate Leadership Learning Structure in IPC is as follows:



PROGRAM PENGEMBANGAN KARYAWAN

Program Pengembangan Karyawan antara lain meliputi program pendidikan, pelatihan dan magang yang difasilitasi oleh Perseroan untuk mendukung peningkatan kompetensi karyawan sehingga sejalan dengan pencapaian visi, misi, dan *roadmap* Perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi para Pemangku Kepentingan.

Program pendidikan merupakan program peningkatan kompetensi karyawan melalui pendidikan formal yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Pada tahun ini, terdapat 1 (satu)

EMPLOYEE DEVELOPMENT PROGRAM

The employee development program includes education, training and apprenticeship programs facilitated by the Company to support the improvement of employee competencies in order to be in line with the achievement of the Company's vision, mission and roadmap and increase corporate values for stakeholders.

The education program is an employee competency development program through formal education organized by education providers both at home and abroad. This year, there was 1 (one) participant in the Overseas Education program

orang peserta program Pendidikan Luar Negeri yang telah menyelesaikan Program Studinya dengan jurusan *S-3 Project Management* di Manchester University, United Kingdom. Adapun untuk Program Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri telah selesai masa studi pada tahun anggaran 2019. Terdapat 3 (tiga) orang peserta yang menunggu jadwal wisuda dan 2 (dua) orang peserta yang menunggu jadwal sidang di tahun 2020. Saat ini, pelaksanaan Program Pendidikan Pasca Sarjana sedang dievaluasi terkait dengan kebutuhan dan dampaknya terhadap Perseroan.

Program pelatihan merupakan program pengembangan kompetensi yang bersifat *non-formal*, sehingga karyawan dapat melaksanakan tugas dengan kinerja yang optimal. Dalam penyelenggaraan program pelatihan *in-house*, Perseroan dapat bekerjasama dengan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia, sebagai wujud sinergi pengembangan Anak Perusahaan antar IPC Group.

Pada program magang ditargetkan untuk melaksanakan 3 (tiga) program, yang terdiri dari *Sisterport*, *Talent Exchange* BUMN, dan *Fellowship*. Dari ketiga jenis magang tersebut yang telah terlaksana pada tahun 2019 ini adalah magang *Sisterport* yang dilaksanakan di Port of Ghuangzou - China, Port of Townsville - Australia, Port of Ningbo - China, Port of Baku, Azerbaijan dengan masing-masing peserta 3 (tiga) orang, atau total 12 (dua belas) orang peserta.

Untuk program magang *Talent Exchange* BUMN dan *Fellowship* masih dalam proses pendataan calon peserta. Selain itu, Divisi Pembelajaran SDM juga menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan Forum *Human Capital* Indonesia (FHCI). Program tersebut dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2020.

Pada tahun 2019, realisasi jumlah personil yang mengikuti Program Pembelajaran sebanyak 5.085 pekerja dengan realisasi sebanyak 287 Program pembelajaran. Secara keseluruhan realisasi anggaran pelatihan tahun 2019 adalah Rp51,8 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Pengembangan Karyawan sebagai berikut:

who had completed the Study Program with Doctorate Project Management major at Manchester University, United Kingdom. As for the Domestic Postgraduate Education Program, has been completed the study in fiscal year 2019. There were 3 (three) participants who are waiting for graduation schedule and 2 (two) participants who are waiting for the final exam schedule in 2020. At present, the implementation of Post-graduate education Program is being evaluated related to the needs and impacts on the Company.

Training program is non-formal competency development programs, so that employees can carry out tasks with optimal performance. In organizing in-house training program, the Company collaborates with PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI) as a form of synergy in the development of Subsidiaries between IPC group.

The internship program is targeted to carry out 3 (three) programs, namely *Sisterport*, *SOE Talent Exchange*, and *Fellowship*. Of the three types of internships, *Sisterport* internship has been carried out in 2019, conducted at Port of Ghuangzou - China, Port of Townsville - Australia, Port of Ningbo - China, Port of Baku, Azerbaijan with each participant 3 (three) persons or a total of 12 (twelve) participants.

SOE Talent Exchange and *Fellowship* internship programs are still in the process of gathering data on prospective participants. In addition, the HC Learning Division also holds Certified Student Internship Program (PMMB) initiated by the Ministry of SOEs and the Indonesian Human Capital Forum (FHCI). The program is carried out for 6 (six) months from February to July 2020.

In 2019, the realization of the number of employees participating in the Learning Program was 5,085 employees with the realization of 287 learning programs. Total realization of the training budget in 2019 was Rp51.8 billion. The budget allocated for the Employee Development Program is as follows:



Tabel Realisasi Program Pembelajaran Tahun 2019

Table of Realization Learning Program in 2019

No	Program Pembelajaran Learning Program	Realisasi 2019 Realization in 2019	
		Jumlah Program Number of Programs	Jumlah Peserta Number of Participants
1	2	3	4
1	Pendidikan Education	1	1
2	Program Pembelajaran Training Program		
	a. Dasar Korporat Corporate Basic	4	146
	b. Wajib Korporat Corporate Mandatory	6	1.197
	c. Kepemimpinan Korporat Corporate Leadership		
	• Kepemimpinan Korporat - Pengembangan Karir Corporate Leadership – Career Development	17	407
	• Kepemimpinan Korporat - Persyaratan Karir Corporate Leadership – Career Requirement	29	671
	d. Lintas Akademi Cross-Academy	50	342
	e. Keahlian dan Wajib Sekolah School Mandatory and Skills		
	• Akademi Komersial Commercial Academy	12	227
	• Akademi Teknik Technical Academy	21	231
	• Akademi Operasi Operations Academy	48	533
	• Akademi Keuangan Finance Academy	18	310
	• Akademi Kepemimpinan dan Bisnis Pendukung Leadership and Supporting Business Academy	64	748
	• Akademi Transformasi & Pengembangan Bisnis Transformation & Business Development Academy	14	212
3	Magang Internship	3	60
Jumlah Total		287	5.085

CORPORATE UNIVERSITY

Corporate University atau populer dengan nama CorpU didefinisikan oleh Mark Allen (2002;p.9) sebagai sebuah entitas pembelajaran yang merupakan alat strategis (*strategic tools*) yang didesain untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan menumbuhkan individu maupun organisasional yang pembelajar, berpengetahuan dan bijaksana.

CORPORATE UNIVERSITY

Corporate university or popularly known as CorpU is defined by Mark Allen (2002; p.9) as a learning entity in the form of a strategic tool that is designed to help organization to achieve the goals of growing individual and organizational learning, knowledge and wisdom.

Pada tanggal 9 Agustus 2018, IPC meresmikan kembali IPC *Corporate University* di Pendulum Nusantara Hall, Kampus IPC *Corporate University*. Dengan diresmikannya IPC *Corporate University*, fungsi CorpU yang semula dilaksanakan oleh PT PMLI dikelola kembali oleh Kantor Pusat IPC melalui Divisi Pembelajaran SDM. IPC CorpU mengelola pembelajaran berdasarkan *learning value chain* dimulai dari *learning need diagnosis, design and development of learning program, learning delivery and deployment, learning evaluation and assessment*.

IPC CorpU merupakan salah satu *enabler* yang dimiliki IPC dalam rangka mendukung terwujudnya visi Perusahaan menjadi Pengelola Pelabuhan Kelas Dunia yang Unggul dalam Operasional dan Pelayanan. Upaya yang dilakukan oleh IPC CorpU untuk mendukung terwujudnya visi Perusahaan adalah dengan menyiapkan kapabilitas SDM mulai dari level pemimpin sampai dengan level operasional.

Salah satu inisiatif yang dilaksanakan oleh IPC CorpU untuk menyiapkan kapabilitas SDM sesuai dengan levelnya adalah IPC CorpU menyusun Kartu Rencana Pembelajaran Individu (KRPI) yang merujuk kepada Kurikulum Sekolah IPC berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Direksi Nomor: DI.01/29/10/I/PRB/UT/PI.II-19 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Kurikulum Pembelajaran di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). KRPI tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan Program Pembelajaran SDM pada tahun 2020, di samping terdapat data lain yang digunakan sebagai dasar perencanaan program yaitu hasil asesmen, Rencana Kerja Manajemen (RKM) dan data lain yang relevan. Melalui KRPI tersebut diharapkan program pembelajaran lebih tepat sasaran dan menjangkau seluruh insan IPC.

Lebih lanjut IPC CorpU juga mulai menyiapkan modul pembelajaran yang terstruktur terutama terkait bidang petikemas, *non* petikemas dan manajemen kesehatan keselamatan kerja lingkungan (K3L) bekerjasama dengan *expertise* di IPC. IPC juga menyiapkan materi pembelajaran singkat sebanyak 30 (tiga puluh) video dengan berbagai topik mulai dari *Good Corporate Governance* (GCG), keuangan, *employee self service* yang rencananya mulai dapat digunakan pada tahun 2020.

Untuk menghadapi situasi bisnis yang *Volatile, Uncertainty, Complexity*, dan *Ambiguity* (VUCA), IPC CorpU berperan dalam menghadapi situasi VUCA adalah menyiapkan program pembelajaran yang mampu mempertimbangkan risiko berdasarkan elemen tersebut, mengakuisisi kompetensi baru yang sejalan dengan strategi Perusahaan serta menyiapkan kompetensi yang mendukung proyek strategis nasional.

On August 09, 2018, IPC inaugurated IPC Corporate University at Pendulum Nusantara Hall, IPC Corporate University Campus. With the inauguration of IPC Corporate University, CorpU's function which was originally carried out by PT PMLI were re-managed by IPC head office through the Human Capital Learning Division. IPC CorpU manages learning based on learning value chain starting from learning need diagnosis, design and development of learning programs, learning delivery and deployment, learning evaluation and assessment.

IPC CorpU is one of the enablers owned by IPC to support the realization of the Company's vision to become a World-Class Port, excellent in operations and Services. The efforts made by IPC CorpU to support the realization of the Company's vision are to prepare Human Capital capabilities from the leader level to the operational level.

One of the initiatives carried out by IPC CorpU to prepare HC capabilities according to its level is IPC CorpU compiling an Individual Learning Plan Card (KRPI) that refers to IPC School Curriculums based on the Minutes of Board of Directors' Agreement Number: DI.01/29/10/I/PRB/UT/PI.II-19 dated October 29, 2019 concerning Learning Curriculum in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The KRPI is used as a reference to determine the HC Learning Program in 2020, in addition to other data that are used as a basis for program planning, namely the results of assessment, Management Work Plan (RKM) and other relevant data. Through the KRPI, it is hoped that the learning program will be more targeted and reach all IPC people.

Furthermore, IPC CorpU also began to prepare structured learning modules, especially related to the fields of container, non-container and environmental safety and health management (K3L) in collaboration with expertise at IPC. IPC has also prepared 30 (thirty) videos of brief learning material on various topics ranging from Good Corporate Governance (GCG), finance, employee self-service which is planned to be used by 2020.

Currently, the Company is facing a *Volatile, Uncertainty, Complexity* and *Ambiguity* VUCA business situation. IPC CorpU's role in facing VUCA situation is to prepare a learning program that is able to consider risks based on these elements, acquiring new competencies that are in line with the Company's strategy and preparing competencies that support national strategic projects.



KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KARIR

Konsep manajemen karir di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sedang dalam penyempurnaan kembali seiring dengan dinamika Perseroan seperti perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan perubahan struktur organisasi, serta regulasi yang ditetapkan.

Pada tahun 2019, terdapat beberapa program yang telah dijalankan dalam rangka pengembangan karir pekerja, diantaranya sebagai berikut:

1. *Assessment Centre*
Assessment Centre dilakukan pada 212 (dua ratus dua belas) orang level eksekutif dengan menggunakan kriteria kompetensi kementerian BUMN dan kompetensi IPC. Penilaian kompetensi pekerja dilakukan melalui *job simulation* dan dinilai oleh lebih dari satu orang *assessor* eksternal. Pihak eksternal digunakan untuk menjaga *fairness* dari penilaian. Penilaian ini dijadikan referensi dalam hal promosi dan karir manajerial;
2. *Coaching and Feedback Assessment*
Sepanjang tahun 2019, telah dilakukan *coaching* dan pemberian *feedback* dari hasil *assessment center*, sebagai bentuk umpan balik untuk membantu karyawan memahami lebih dalam mengenai area kekuatan dan pengembangan yang perlu ditingkatkan dalam diri karyawan;
3. Mutasi Pekerja
Mutasi pekerja dilakukan hampir pada seluruh level pekerja IPC guna memenuhi kebutuhan akan perubahan struktur organisasi Kantor Pusat, Cabang dan Entitas Anak serta penyeragaman di lingkungan IPC.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

PENILAIAN KINERJA SDM

Penilaian Kinerja yang digunakan di Perseroan untuk mengukur keberhasilan kinerja individu adalah penilaian Performansi Bulanan (P2B) yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Sejak Tahun 2011 sampai dengan tahun 2019, P2B digunakan sebagai salah satu dasar untuk persyaratan karier, pengembangan diri, dan kompensasi bagi pekerja. Pada tahun 2019, hasil rata-rata nilai performansi seluruh pekerja adalah dalam kategori B atau "GOOD".

Untuk menunjang visi Perseroan menuju *World Class Port 2020*, maka Perseroan melalui Direktorat SDM melakukan penyempurnaan dan penajaman penilaian kinerja individu yang semula berupa penilaian berbasis kinerja bulanan (P2B) menjadi penilaian kinerja individu berbasis *Key Performance Indicator* (KPI). Perubahan penilaian

CAREER DEVELOPMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

The career management concept in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is being refined in line with the dynamic changing within IPC, such as the new composition of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as changes in organizational structure and regulations.

In 2019, there were several programs initiated in employee career development, including:

1. *Assessment Center*
The *assessment Center* is conducted at 212 (two hundred and twelve) executive level employees using the criteria of Ministry of SOE competency and IPC competency. The employee competency assessment is done through *job simulation* and assessed by more than one external assessor. External parties are used to maintain the fairness of the valuation. This assessment is used as a reference in terms of promotion and managerial career;
2. *Coaching and Assessment Feedback*
Throughout 2019, coaching and feedback were provided from the results of assessment center, as a form of feedback to help employees to understand more about the areas of strength and development that need to be improved;
3. *Employee Transfer*
Transfers are performed at almost all levels of IPC employees to meet the needs for organizational structure changes in the head office, Branches and Subsidiaries, as well as for refreshment within IPC.

PERFORMANCE APPRAISAL POLICY AND IMPLEMENTATION

HC PERFORMANCE APPRAISAL

The performance appraisal used in the Company to measure the success of individual performance is monthly Performance appraisal (P2B), which is conducted regularly every month. Since 2011 until 2019, P2B is used as one of the bases for determining employee career, self-development, and compensation requirements. In 2019, the overall average employee performance results were in B or "GOOD" category.

To support the Company's vision towards *World Class Port by 2020*, the Company through the Directorate of Human Capital refine and sharpen the individual performance appraisal, which was originally in the form of monthly appraisal (P2B) to be a performance evaluation based on *Key Performance indicators*

kinerja individu Perseroan ini juga sebagai satu kesatuan inisiatif *Roadmap Performance Management* Perseroan yang berkaitan dengan Implementasi *Cascading* KPI Korporat tahun 2019 oleh Divisi Perencanaan Strategi Korporasi. Hal ini diwujudkan melalui Arahan BOD yaitu 'Optimalisasi *Performance Management System* Melalui Penyusunan Penurunan KPI Perseroan hingga ke Target Individu' yang disebut KPI Individu.

KEBIJAKAN REMUNERASI

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan visi untuk menjadi Pelabuhan Berkelas Dunia, berkomitmen untuk secara konsisten memberikan kesejahteraan bagi para pekerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, manajemen menerapkan kebijakan kesejahteraan Pekerja yang berlandaskan pada tiga aspek dasar yaitu: *Pay for Person*, *Pay for Position* dan *Pay for Performance* dengan memperhatikan kompetensi, posisi jabatan, masa kerja serta kinerja dari pekerja.

Selain itu, kebijakan manajemen mengenai kesejahteraan pekerja disusun dengan mempertimbangkan aspek kenaikan biaya hidup dan kemampuan keuangan Perseroan. Hal tersebut menggambarkan bahwa IPC memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan Pekerja dengan tetap memperhatikan pada asas keberlanjutan (*sustainability*).

Komitmen Perseroan pada tahun 2019 ini, dibuktikan melalui penetapan kebijakan penyesuaian penghasilan Pekerja dengan menaikkan penghasilan merit sebesar 10%, tunjangan perumahan 25% dan bantuan transport sebesar 75%. Diharapkan dengan kesejahteraan yang baik, Pekerja dapat lebih giat dan termotivasi dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan.

KESEJAHTERAAN KARYAWAN DI MASA AKTIF

IPC memberikan berbagai macam fasilitas sebagai salah satu strategi memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi pekerja IPC dalam bekerja. Adapun fasilitas-fasilitas yang diberikan yaitu:

1. Fasilitas Kesehatan;
2. Rumah Dinas Jabatan dan Rumah Dinas Operasional bagi pejabat yang mengalami mutasi;
3. Bantuan biaya sewa rumah bagi pekerja yang mengalami mutasi;
4. Fasilitas Kendaraan Dinas bagi Pejabat Tertentu;
5. Seragam Perusahaan;
6. Fasilitas Makan Siang;
7. Bantuan Biaya Pindah Sekolah;
8. Rekreasi Pekerja dan Keluarga.

(KPI). The change in the Company's individual performance appraisal is also an integral part of the Company's Performance Management Roadmap initiative relating to the 2019 Corporate KPI Cascading Implementation by the Corporate Strategy Planning Division. This is realized through the BOD Directive, namely 'Optimization of Performance Management System Through the Preparation of Corporate KPI Cascading to the Individual Targets, called Individual KPI.

REMUNERATION POLICY

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with the vision of becoming World Class Port, is committed to consistently providing welfare to its employees. in line with this, the management applies employee welfare policies based on three basic aspects, namely: *Pay for Person*, *Pay for Position* and *Pay for Performance* by paying attention to competencies, position, tenure and performance of employees.

In addition, the management policies regarding employee welfare are prepared by considering the living cost increase and financial capacity of the Company. This illustrates that IPC has a concern for employee welfare while still paying attention to the principle of sustainability.

The Company's commitment in 2019 is evidenced through the establishment of a policy for adjusting employee income by increasing merit income by 10%, housing allowance by 25% and transportation allowance by 75%. It is expected that with good welfare, employees can be more active and enthusiastic in carrying out their duties to achieve the Company's Vision and mission.

EMPLOYEE WELFARE IN ACTIVE PERIOD

IPC provides a wide range of facilities as one strategy to provide work convenience and comfort for IPC employees. The facilities provided are:

1. Health facilities;
2. Official housing and operational housing for officials undergoing job transfer;
3. Housing rental assistance for employees undergoing job transfer;
4. Official vehicle facilities for certain officials;
5. Company uniform;
6. Lunch facilities;
7. School transfer fee assistance;
8. Employee and family recreation.



Tabel Surat Keputusan Direksi Bidang Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Sumber Daya Manusia
Board of Directors Decree regarding Human Capital Remuneration Policy and Facilities

No	Nama Surat Keputusan Direksi <i>Name of Board of Directors Decree</i>	Nomor <i>Number</i>
1	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Penghasilan Bagi Karyawan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) regarding Income for Employees of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	HK.01/25/7/1/KRF/UT/PI.II-19 Tanggal 25 Juli 2019 Dated July 25, 2019
2	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Tunjangan Representatif dan Bantuan Operasional Bagi Pejabat Tertentu di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) regarding Representative Allowances and Operational Assistance for Certain Officials in the Environment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	HK.01/13/3/1/KRF/UT/PI.II-19 Tanggal 13 Maret 2019 Dated March 13, 2019
3	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Bantuan dan Fasilitas Bagi Pekerja Mutasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) regarding Assistance and Facilities for Mutated Employees in the Environment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	HK.01/7/12/1/KRF/UT/PI.II-17 Tanggal 07 Desember 2017 Dated December 07, 2017
4	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Fasilitas Makan Bagi Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) regarding Food Facilities for Employees of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	HK.568/2/5/1/PI.II-17 Tanggal 2 Mei 2017 Dated May 2, 2017
5	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Penghasilan Non Bulanan Bagi Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) regarding Non-Monthly Income for Employees of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	HK.568/20/1/2/PI.II-17 Tanggal 20 Januari 2017 Dated January 20, 2017
6	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pemeliharaan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Pekerja dan Pensiunan Beserta Keluarganya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) regarding Maintenance and Health Services for Employees and Retirees and Their Families in the Environment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	HK.56/6/1/PI.II-13 Tanggal 1 Oktober 2013 Dated October 1, 2013

KEPUASAN DAN KETERIKATAN PEKERJA

Setiap tahunnya, IPC telah melaksanakan survei kepuasan dan keterikatan pekerja. Survei dirancang untuk mengetahui tingkat kepuasan, motivasi kerja dan ketertarikan pekerja. Survei merupakan salah satu ukuran *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan. Survei dilakukan di Kantor Pusat dan 12 (dua belas) cabang pelabuhan IPC. Tahun 2018 survei seluruhnya dilaksanakan secara *offline* yaitu responden mengisi kuesioner secara bebas dan tahun 2019 survei dilaksanakan secara *offline* juga dilaksanakan secara *online* sehingga terjadi peningkatan partisipasi peserta/pekerja dalam kegiatan survei tahun 2019.

Melalui survei ini, pekerja mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mengenai kondisi atau faktor-faktor yang berhubungan dengan mereka. Survei digunakan sebagai media komunikasi dari pekerja ke Manajemen. Hasil survei yang didapat adalah input bagi Manajemen dalam menentukan kebijakan, terutama berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas pekerja serta meningkatkan kepuasan dan keterikatan pekerja.

EMPLOYEE SATISFACTION AND ENGAGEMENT

Every year, IPC has carried out an employee satisfaction and engagement survey. The survey was designed to determine the level of satisfaction, work motivation and interest of employees. The survey is one measure of the Corporate Key Performance Indicator (KPI). The survey was conducted at the head office and 12 (twelve) IPC port branches. In 2018, all surveys were carried out offline, namely respondents filled out questionnaires freely and in 2019, surveys were carried out offline and online, so that there was an increase in participants of survey activities in 2019.

Through this survey, the employees have the opportunity to express opinions regarding the conditions or factors that relate to them. The survey is used as a communication medium between employees and management. The survey results obtained become an input for the management in determining policies, particularly related to efforts to increase employee productivity and improve employee satisfaction and engagement.

TUJUAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN DAN KETERIKATAN PEKERJA

Memperoleh informasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat keterikatan pekerja yang selanjutnya berguna untuk:

1. Mendapatkan informasi terkait perubahan atau pergeseran sikap serta harapan pekerja terhadap organisasinya;
2. Mendapatkan informasi yang objektif terutama untuk hal-hal yang perlu perbaikan di periode berikutnya agar tidak memengaruhi iklim kerja dan kinerja pekerja;
3. Mengetahui area perbaikan yang harus dilakukan dengan segera oleh IPC agar pekerja dapat bekerja dengan loyal dan menciptakan lingkungan kerja yang positif.

MANFAAT PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN DAN KETERIKATAN PEKERJA

1. Dapat dijadikan sebagai alat untuk mendeteksi adanya ketidakpuasan karena lingkungan kerja, hubungan antar pekerja atau hubungan atasan dan bawahan;
2. Sebagai referensi yang bersifat proaktif terhadap tingkat keterikatan pekerja terutama untuk pekerja yang memiliki talenta kompeten dan potensial;
3. Mengetahui faktor yang menyebabkan pekerja dapat meningkatkan kontribusinya kepada Perusahaan, baik faktor yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik;
4. Mengetahui faktor yang bisa meningkatkan kepuasan dan *engagement* pekerja disertai dengan faktor prioritas untuk pendorong *engagement* pekerja.

OBJECTIVES OF EMPLOYEE SATISFACTION AND ENGAGEMENT SURVEY

The information gained directly and indirectly on the employee engagement level is subsequently useful for:

1. Obtaining information regarding behavior changes or shifts as well as employees' expectations toward their organization;
2. Obtaining objective information particularly for issues that need improvement in the next period so as not to affect working climate and employee performance;
3. Recognizing areas that need immediate improvement by IPC to ensure that employees are able to work loyally and to create a positive work environment.

BENEFITS OF EMPLOYEE SATISFACTION AND ENGAGEMENT SURVEY

1. Useful as a tool to detect any discontent due to work environment, relationships between colleagues or between supervisor and subordinate;
2. As a proactive reference for employee engagement level, particularly for employees with competent and potential talents;
3. Identifying the factors that may lead the employees to increase their contribution to the Company, both intrinsic and extrinsic factors;
4. Identifying the factors that may increase employee satisfaction and engagement as well as priority factors to boost employee engagement.

Adapun hasil survei kepuasan dan keterikatan pekerja IPC pada tahun 2016-2019 disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

IPC employee satisfaction and engagement survey results between 2016-2019 are presented in the table below:

Tabel Hasil Survei Kepuasan Pekerja IPC
IPC Employee Satisfaction Survey Results

Tahun Year	Hasil Survei Survey Result	Keterangan Remark
2019	4,51	Sangat Puas Very Satisfied
2018	4,27	Sangat Puas Very Satisfied
2017	4,16	Puas Satisfied
2016	4,13	Puas Satisfied



Tabel Hasil Survei Keterikatan Pekerja IPC
IPC Employee Engagement Survey Results

Tahun Year	Hasil Survei Survey Result	Keterangan Remark
2019	4,57	Sangat Terikat Very Engaged
2018	4,37	Sangat Terikat Very Engaged
2017	4,24	Sangat Terikat Very Engaged
2016	4,13	Terikat Engaged

KEBIJAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

Untuk dapat memayungi seluruh pekerja, IPC telah bersepakat membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat seluruh ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Pencapaian dalam hubungan industrial yang telah dilakukan oleh Direksi dan Manajemen Perseroan adalah pembaharuan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Pembaharuan tersebut dilakukan oleh Tim Perunding yang dibentuk oleh kedua belah pihak. Pada tanggal 24–26 Januari 2019, telah dilaksanakan perundingan pembaharuan perjanjian kerja bersama untuk periode 2019–2020.

KEBEBASAN BERSERIKAT

Di dalam usaha memajukan IPC, Manajemen telah menjalin hubungan industrial yang harmonis dengan serikat pekerja untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan menjalin kelangsungan kerja perusahaan.

Manajemen memandang serikat pekerja sebagai mitra strategis, sehingga kebijakan-kebijakan khususnya di bidang SDM terkait masalah kesejahteraan dapat memperoleh masukan dari serikat pekerja. Manajemen secara intens melakukan pertemuan dengan serikat pekerja minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Untuk itu, IPC telah membentuk wadah atau forum bipartit dengan serikat pekerja yang berfungsi untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang timbul maupun yang berpotensi menjadi masalah dan bertujuan sebagai wadah untuk memberikan saran kepada Manajemen dalam pengambilan keputusan di bidang ketenagakerjaan. Wadah tersebut mempermudah pekerja dalam menyampaikan aspirasi kepada Perusahaan secara berjenjang sehingga komunikasi dua arah antara IPC dan pekerja tetap terjaga.

Nama Ketua Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) adalah Dodi Nurdiana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan

INDUSTRIAL RELATIONS POLICY

COLLECTIVE LABOR AGREEMENT (PKB)

To be able to cover all employees, IPC has agreed to make a Collective Labor Agreement (PKB) which contains all provisions relating to employment. The achievement in industrial relations that has been carried out by Board of directors and management of the Company is the renewal of Collective labor agreement (PKB) between the Company and Trade union of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The renewal was done by the Negotiating Team formed by both parties. on January 24–26, 2019, negotiation on renewal of the collective labor agreement were held for the period 2019–2020.

FREEDOM OF ASSOCIATION

In an effort for IPC's growth, the management has established industrial relations in harmony with the trade union to create a conducive working atmosphere and establish the Company's business continuity.

The management views trade union as a strategic partner, hence input from the trade union is taken into consideration, specifically for HC policies related to welfare issues. The management intensively holds meeting with the trade union at least 3 (three) months.

For this reason, IPC has formed a bipartite forum or union with trade union that serves to accommodate and resolve employment problems that arise as well as those that have the potential to become a problem, and intended as a forum to provide advice to management in employment decisions. This forum makes it easier for employees to convey aspirations to the Company in stages, so that two-way communication between IPC and employees is maintained.

The Head of Trade union of Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) is Dodi Nurdiana, appointed based on minutes of central coordination

Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II No. 01/XII/SKEP/SPPI-II/18 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pengukuhan Struktur Organisasi dan Susunan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II Periode 2018-2021 dan Surat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II No. 02/XII/SK/SPPI-II/18 tanggal 10 Desember 2018 perihal pemberitahuan Perubahan Pengurus DPP SPPI II. Pada tahun 2019 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI) menyepakati Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2019-2020 nomor KP.08.03/9/4/1/HUP/LAS/PI.II-19 dan nomor : 05/IV/SKEP/SPPI-II/19 pada tanggal 9 april 2019. hal ini sebagai upaya dalam mewujudkan harmonisasi antara karyawan dan Perseroan.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENSIUN

Dalam alur sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia, terdapat tahapan dimana Pekerja akan memasuki masa Pensiun atau Pengakhiran Hubungan Kerja. IPC telah menyiapkan Kebijakan terkait hal tersebut yang dituangkan pada Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor: HK.01/31/7/1/KRF/UT/PI.II-17 tanggal 31 Juli 2017.

Melalui kebijakan tersebut dijelaskan bahwa pekerja diberhentikan atau pensiun jika mencapai batas usia pensiun, akibat pelanggaran disiplin, permintaan sendiri, atau mengikuti program *exit plan*. Selain itu, IPC fokus untuk menjamin kesejahteraan pekerja setelah memasuki masa pensiun dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Kesejahteraan Paska Kerja Bagi Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: KP.01/3/11/1/KRF/UT/PI.II-17 tanggal 3 November 2017 yang mengatur tentang program pensiun baik manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun program yang disiapkan IPC adalah sebagai berikut:

1. Program Pensiun
 - a. Program Pensiun Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 - b. Program Pensiun Iuran Pasti pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
 - c. Program Asuransi Tunjangan Hari Tua;
 - d. Program Tambahan Manfaat Purna Bakti;
 - e. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. Program Asuransi Jiwa.
2. Penghargaan Atas jasa pengabdian
 - a. Pemberian Penghargaan Masa Bakti;
 - b. Penghargaan Kenaikan Kelas Jabatan Pengabdian;
 - c. Pemberian Cenderamata.

meeting of SPPI II PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on November 27, 2018 in Bandung in accordance with SPPI II Central Executive Board Decree No. 01/XII/SKEP/SPPI-II/18 concerning the inauguration of organizational structure and composition of SPPI II Central executive Board for the Period of 2018–2021. All IPC employees are registered as members of SPPI II. In 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with the Workers Union (SPPI) agreed to a Collective Labor Agreement (PKB) for the period 2019-2020 number KP.08.03 / 9/4/1 / HUP / LAS / PI.II-19 and number: 05 / IV / SKEP / SPPI-II / 19 on 9 April 2019. This is one effort to harmonize the relation of the employees and the Company.

RETIREMENT POLICIES AND PROGRAMS

In the flow of Human Capital management system, there are stages where employees will enter a retirement or termination of employment period. IPC has prepared a Policy related to this matter as outlined in the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) concerning Termination of Employment No: HK.01/31/7/1/KRF/UT/PI.II-17 dated July 31, 2017.

This policy explains that employees are dismissed or retired if they reach the age of retirement, due to disciplinary violations, own requests, or following an exit plan program. In addition, IPC focuses on ensuring the welfare of employees after entering retirement by issuing the Decree of Board of Directors concerning Welfare for Post-Employment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No: KP.01/3/11/1/KRF/UT/PI.II-17 dated November 03, 2017, which regulates retirement plan for both short and long-term benefits. The programs prepared by IPC are as follows:

1. Pension Program
 - a. Defined Benefit Pension Plan under the Employer Pension Fund;
 - b. Defined Contribution Pension Program in the Pension Fund of a Financial Institution;
 - c. Life Insurance Allowance Program;
 - d. Supplementary Allowance for Retirement;
 - e. Labor Social Security Program by Social Security Administering Body of BPJS Employment;
 - f. Life Insurance Program.
2. Award for Service
 - a. Rewards for Years of Service;
 - b. Promotion of Years of Service;
 - c. Souvenirs.



3. Fasilitas Paska Kerja

- a. Fasilitas Kesehatan Pensiunan beserta Keluarga;
- b. Bantuan Pindah Pensiun;
- c. Bantuan Musibah Kematian;
- d. Bantuan Uang Duka dan Sumbangan Kematian.

3. Post-Employment Facilities

- a. Pension and Family Health Facilities;
- b. Pension Moving Allowance;
- c. Fatality Allowance;
- d. Mourning Money and Fatality Donation.

PELATIHAN MENJELANG PENSIUN

Pekerja yang akan memasuki pensiun diberikan pendidikan serta pelatihan purnabakti. Program tersebut, diberikan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki masa pensiun, di antaranya terkait dengan persiapan menghadapi perubahan pola hidup, manajemen keuangan, peluang usaha dan mempertahankan pola hidup sehat. Pembekalan purna bakti tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) *batch*. Pelatihan tersebut berisi tentang Program Pembelajaran Lintas Akademi.

PRE-RETIREMENT TRAINING

Employees who will enter retirement are given retirement education and training. The program is given to prepare themselves for retirement, including the preparation of changes in lifestyle, financial management, business opportunities and maintaining a healthy lifestyle. The pre-retirement training for 2019 was held in 3 (three) batches. The training contains the Cross Academic Learning Program.

Pelaksanaan Pelatihan Menjelang Pensiun Tahun 2019

Pre-Retirement Training in 2019

No	Jenis Pelatihan <i>Type of Training</i>	Level Jabatan <i>Job Level</i>	Program Pelatihan <i>Training Program</i>	Tujuan Pelatihan <i>Training Purpose</i>
1	Program Pembelajaran Lintas Akademi Cross-Academy Learning Program	BOD – 1 sampai dengan BOD - 5 BOD – 1 until BOD - 5	Program Purnabakti Retirement Program	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan pola pikir, keberanian, dan keyakinan dari peserta untuk mengelola sendiri dalam menciptakan karya, nilai tambah, dan kehidupan ekonomi setelah pensiun; • Menciptakan keterampilan dan kesadaran peserta untuk membuat dan memahami perencanaan strategis sebagai modal dalam melakukan berbagai kegiatan komersial dan non komersial setelah masa pensiun. • Preparing the mindset, courage, and confidence of participants to manage themselves in creating work, adding value, and economic life after retirement; • Creating the skills and awareness of participants to make and understand strategic planning as capital in carrying out various commercial and non-commercial activities after retirement.

KESEJAHTERAAN KARYAWAN DI MASA PENSIUN

Setelah memasuki masa pensiun, pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menerima kesejahteraan sebagai berikut:

1. Program manfaat pensiun/hari tua yang di antaranya adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4);
2. Program Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara JPKM dari PT Rumah Sakit Pelabuhan;
3. Manfaat jaminan hari tua oleh BPJS Ketenagakerjaan.

EMPLOYEE WELFARE IN RETIREMENT PERIOD

After entering retirement, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) employees receive the following welfare:

1. Retirement benefit programs which include the financial institution retirement fund (DPLK) and Port and dredging Company retirement funds (DP4);
2. Retirement health Care guarantee Program organized by the JPKM organizing agency from PT rumah Sakit Pelabuhan; and
3. Old-age insurance by BPJS employment.

Jumlah Batch Number of Batch	Jumlah Durasi Pelatihan Number of Training Duration	Total Peserta Number of Participants	Jumlah Peserta Perempuan Number of Female Participants	Jumlah Peserta Laki-Laki Number of Male Participants
3	15	BOD-1 = 10 BOD-2 = 10 BOD-3 = 12 BOD-4 = 33 BOD-5 = 12	7	70

Perusahaan memiliki peranan untuk memastikan kesejahteraan pekerja paska kerja, dengan menetapkan beberapa program kesejahteraan paska kerja sebagai berikut:

The Company has a role to ensure the welfare of postemployment employees, by establishing a number of postemployment welfare programs as follows:



Program Kesejahteraan Pasca Kerja Post-Employment Welfare Program

Jenis Kesejahteraan Type of Welfare	Keterangan Description
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Financial Institution Retirement Fund (DPLK)	Merupakan program pendanaan yang iurannya ditetapkan oleh Perusahaan untuk memperoleh manfaat dari iuran dan pengembangan dana iuran tersebut pada saat Pekerja berhenti bekerja. Perusahaan mengikutsertakan Pekerja yang diangkat terhitung mulai tanggal 1 Desember 2001. Is a funding program whose contributions are determined by the Company to benefit from the contributions and development of the contributions when the employee stops working. The Company includes employees who are appointed starting December 01, 2001.
Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Port and Dredging Company Retirement Fund (DP4)	Program Pensiun Manfaat Pasti pada DP4 merupakan program pensiun bagi Pekerja dengan iuran dan perhitungan manfaat pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan DP4. Program Pensiun Manfaat Pasti pada DP4 ini, diberlakukan bagi Pekerja yang diangkat terhitung sebelum tanggal 1 Desember 2001. The Defined Benefit Retirement Program in DP4 is a retirement program for employees with contributions and calculation of retirement benefits determined under the DP4 regulation. The Defined Benefit Retirement Program in this DP4 applies to employees appointed before December 01, 2001.
Program Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan Retirement Health Care Guarantee Program	Jaminan pelayanan kesehatan bagi para pekerja pensiun beserta keluarga yang mencakup segala tindakan pelayanan preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang disediakan oleh Perusahaan. Health care guarantee for retired employees and their families that cover all preventive, curative and rehabilitative service actions provided by the Company.

PENGELOLAAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Nilai-Nilai Perusahaan merupakan suatu pola asumsi dasar yang dimiliki oleh anggota perusahaan yang berisi nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan yang mempengaruhi pemikiran, pembicaraan, tingkah laku, dan cara kerja karyawan sehari-hari, sehingga akan bermuara pada kualitas kinerja perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan nilai-nilai perusahaan di IPC mencakup dalam 4 (empat) aspek yaitu:

1. *People*, penanaman nilai perusahaan kepada seluruh insan IPC melalui program internalisasi budaya yaitu *to know, to understand, to believe, to apply*;
2. *Practice*, penerapan nilai perusahaan pada kebijakan perusahaan yang dimasukkan ke dalam prinsip kehidupan sehari-hari di perusahaan;
3. *Place*, penguasaan tempat bekerja diperlukan guna memperkuat budaya yang diciptakan oleh suatu perusahaan;
4. *Narrative*, komunikasi budaya korporasi yang dibentuk dan dapat diceritakan kembali sebagai bagian dari nilai-nilai perusahaan yang berkelanjutan.

Berikut merupakan kegiatan pengelolaan nilai-nilai perusahaan IPC selama tahun 2019:

MONITORING PROGRAM INTERNALISASI BUDAYA PERUSAHAAN

Tujuan kegiatan:

1. Meningkatkan pemahaman kepada pekerja terkait implementasi program Internalisasi nilai-nilai Perusahaan

MANAGEMENT OF CORPORATE VALUES

Corporate culture is a pattern of basic assumptions held by members of the company that contains values, norms and habits that affect the thoughts, talks, behavior, and ways of working of employees in daily activities, that will lead to the quality of corporate performance.

In its implementation, the management of corporate culture in IPC covers 4 (four) aspects, namely:

1. People, the internalization of corporate values to all IPC people through cultural internalization programs, namely to know, to understand, to believe, to apply;
2. Practice, the application of corporate values to company policies that are incorporated into daily activities in the company;
3. Place, setting the work place as needed to strengthen the culture created by the company;
4. Narrative, corporate culture communication that is formed and can be retold as part of a sustainable corporate culture.

The following are the activities of IPC corporate culture management in 2019:

MONITORING PROGRAM OF CORPORATE CULTURE INTERNALIZATION

The objectives:

1. Increasing employees' understanding related to the implementation of Corporate Culture Internalization

dan kaitannya terhadap partisipasinya dalam mewujudkan visi, misi dan *value* perusahaan;

2. Memastikan *tools* yang diberikan dapat diimplementasikan dalam proses kerja dan dipantau pelaksanaannya setiap minggu.

Realisasi:

1. Pelaksanaan *Workshop* Internalisasi Budaya Perusahaan ke-12 cabang pelabuhan dengan *tools* 4DX (Januari–Maret 2019);
2. *Monitoring* Tahap I (Oktober–November 2019) dilakukan di seluruh cabang pelabuhan, dengan melibatkan para *Change Agent* Budaya di seluruh cabang;
3. *Monitoring* Tahap II (Desember 2019–Januari 2020) dilakukan melalui media telepon, *video conference* melalui aplikasi *Zoom* serta *update* laporan via WAG (*WhatsApp Group*) masing-masing cabang;
4. *Monitoring* Pelaksanaan *Morning Briefing* di Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan.

PENGAWASAN IMPLEMENTASI BUDAYA ENTITAS ANAK

Tujuan:

1. Media sinergitas *value* CINTA IPC dengan *value* pada Entitas Anak IPC *Group*;
2. Memberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki tata nilai perusahaan serta elemen-elemen pendukungnya yaitu definisi dari nilai perusahaan dan indikator perilaku dari nilai perusahaan;
3. Penyusunan program budaya pada Entitas Anak;
4. Meningkatkan *sense of belonging* terhadap Perseroan.

Realisasi:

1. Telah dilaksanakan *workshop* Sinkronisasi Nilai Entitas Anak IPC *Group* pada tanggal 18–19 Desember 2019 bertempat di Museum Maritim Indonesia;
2. Tiap Entitas Anak diberikan wawasan dalam mengetahui standar dan contoh penerapan terkait aspek perencanaan, implementasi dan evaluasi pengelolaan budaya perusahaan;
3. Tiap Entitas Anak diberikan sebuah tugas *action plan* untuk memenuhi *gap* implementasi budaya Perusahaan.

PENYUSUNAN ROADMAP BUDAYA PERUSAHAAN

Tujuan:

Roadmap Budaya Perusahaan dibangun agar seluruh insan IPC mampu untuk meningkatkan disiplin dan kinerjanya sebagai hakikat *value* CINTA IPC yang memenuhi kualifikasi *brain* (pengetahuan yang baik tentang perusahaan), *skill* (kemampuan

program and its relation to participation in realizing the Company's vision, mission and values;

2. Ensure the tools provided can be implemented in the work process and monitored for implementation every week.

Realization:

1. Workshop activity due to corporate culture internalization at 12 port branches with 4DX tools (January - March 2019);
2. Phase I monitoring (October–November 2019), carried out in all port branches, involving Culture Change Agents in all branches;
3. Phase II monitoring (December 2019–January 2020), carried out through telephone media, video conferencing through Zoom application and report updates via WAG (*WhatsApp Group*) of each branch;
4. Monitoring the Implementation of Morning Briefing at Head Office and Port Branches.

MONITORING THE IMPLEMENTATION OF SUBSIDIARY CULTURE

The objectives:

1. The media to synergize CINTA IPC value with the value of IPC Group subsidiary;
2. Provide an understanding of the importance of having a corporate value system and its supporting elements, namely the definition of corporate value and behavioral indicators of corporate value;
3. Preparation of cultural programs in subsidiaries;
4. Increase sense of belonging to the company.

Realization:

1. The Workshop on Synchronization of Value of IPC Group Subsidiaries was held on December 18–19, 2019 at the Indonesian Maritime Museum;
2. Each subsidiary is given insight in the standards and examples of application related to the aspects of planning, implementing and evaluating the management of corporate culture;
3. Each subsidiary is given an action plan task to meet the implementation gap of corporate culture.

PREPARATION OF THE CORPORATE CULTURE ROADMAP

The objectives :

The Corporate Culture Roadmap is developed, so that all IPC people are able to improve their discipline and performance as a true value of CINTA IPC that meets qualifications as follow brain (good knowledge of the company), (good knowledge of the



teknikal yang mumpuni, dan juga *manner* (perilaku yang menunjukkan keluhuran nilai-nilai perusahaan).

Realisasi:

1. Telah selesai penyusunan *roadmap* budaya perusahaan 2020–2024 yang disesuaikan dengan RJPP IPC 2020–2024 melalui beberapa tahapan penyusunan:
 - a. *Desk Study*: mempelajari keseluruhan data sekunder hasil implementasi budaya CINTA IPC selama ini juga dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang akan menjadi acuan penyusunan *roadmap* budaya;
 - b. *Insights Gathering*: mengumpulkan *wisdom* terkait rencana jangka Panjang organisasi dan ekspektasi terkait bagaimana budaya dapat mendukung pencapaian 2024 “IPC World Class Trade Facilitator” dan mendapat gambaran rencana kegiatan korporat selama setahun sebagai bahan penyusunan *calendar of event* internalisasi budaya;
 - c. *Data analyzing*: mengolah seluruh data dan *insights* yang masuk dan menyusun *draft* rangkaian inisiatif strategis terkait budaya yang sudah disesuaikan dengan agenda korporat;
 - d. *Final Workshop*: penyampaian hasil analisa data dan *draft roadmap* untuk disempurnakan.
2. Adanya program prioritas setiap tahun yang menggambarkan fokus kerja budaya perusahaan.

IMPLEMENTASI GAME CINTA IPC

Tujuan:

Internalisasi budaya perusahaan melalui media berbasis aplikasi *game* sehingga nilai-nilai perusahaan CINTA IPC dapat diimplementasikan dalam keseharian dengan cara yang lebih *fun*.

Realisasi:

1. Pelaksanaan *Pilot Project* Tahap II di Direktorat SDM pada bulan Maret 2019;
2. Pelaksanaan *Game CINTA IPC* di Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan kepada 1.376 pekerja dengan durasi pelaksanaan mulai bulan September 2019 hingga bulan Januari 2020. Adapun hasil dari pelaksanaan *GAME CINTA IPC* yaitu telah diselesaikan oleh 22% pekerja yang diperintahkan dengan nilai rata-rata tiap *value* (nilai maksimal 100) sebagai berikut:
 - a. *Customer Centric* = 76,78
 - b. *Integrity* = 68,41
 - c. *Nationalism* = 77,70
 - d. *Teamwork* = 71,25
 - e. *Action* = 76,82

company), skills (qualified technical abilities, and also manner (behavior that shows the nobility of the corporate values).

Realization:

1. The preparation of the corporate culture roadmap 2020–2024 has been completed in line with RJPP IPC 2020–2024 through several stages of preparation:
 - a. *Desk Study*: studying all secondary data resulting from the implementation of CINTA IPC culture up to date, as well as the Company’s Long Term Plan document which will become a reference for the preparation of culture roadmap;
 - b. *Insights Gathering*: collecting wisdom related to the organization’s long-term plan and expectations regarding how culture can support the achievement of 2024 “IPC World Class Trade Facilitator” and obtain a picture of a year-long corporate activity plan as material for preparing the calendar of cultural internalization events;
 - c. *Data analyzing*: processing all incoming data and insights and compiling a series of strategic initiatives related to culture that have been adapted to the corporate agenda;
 - d. *Final Workshop*: delivery of data analysis results and draft roadmap to be refined.
2. There are priority programs every year that illustrate the focus of corporate culture.

IMPLEMENTATION OF CINTA IPC GAME

The Objectives :

Internalization of corporate culture through application-based game media so that the corporate values of CINTA IPC can be fun implemented. on a daily basis.

Realization:

1. The implementation of Phase II Pilot Project at the HC Directorate in March 2019;
2. The implementation of CINTA IPC Game at the Head Office and Port Branches to 1,376 workers with implementation duration from September 2019 to January 2020. The results of CINTA IPC GAME implementation have been completed by 22% of assigned workers with an average score (maximum score of 100) as follows:
 - a. *Customer Centric* = 76.78
 - b. *Integrity* = 68.41
 - c. *Nationalism* = 77.70
 - d. *Teamwork* = 71.25
 - e. *Action* = 76.82

PENYUSUNAN BUKU DAN E-BOOK PANDUAN PERILAKU

Tujuan:

1. Sosialisasi *value* IPC melalui media yang lebih menarik dan mudah dipahami;
2. Insan IPC dapat memahami, menerapkan dan berperan aktif dalam proses internalisasi nilai-nilai perusahaan yang kemudian diharapkan berdampak pada peningkatan implementasi *value* CINTA IPC dan kinerja perusahaan;
3. Panduan perilaku budaya perusahaan dapat dipahami serta dilaksanakan oleh setiap insan IPC sehingga nilai-nilai perusahaan tersebut tercermin dalam segala bentuk aktivitas dan interaksi dengan seluruh Pemangku Kepentingan di dalam maupun di luar perusahaan serta untuk menumbuhkan pemahaman, meningkatkan keterlibatan dan rasa tanggung jawab serta komitmen seluruh Insan IPC terhadap panduan perilaku (*do and don't*) budaya perusahaan.

Realisasi:

Penyusunan buku dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Proses pengumpulan data-data dari *value* 5 (lima) nilai CINTA IPC (*do and don't*) baik dari operasional maupun *non* operasional;
2. Melakukan wawancara kepada internal IPC untuk mendapatkan insiden kritikal dan contoh-contoh nyata di lingkungan IPC;
3. Melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* untuk mendapatkan insiden kritikal dan contoh-contoh nyata di lingkungan IPC;
4. Mengumpulkan insiden kritikal di lingkungan IPC, perilaku konkret dan kontekstual untuk setiap *value*;
5. Mengumpulkan contoh-contoh inspiratif dari eksternal untuk setiap *value*;
6. Membuat karakter unik sesuai dengan ciri khas dari IPC (Pimpinan/*leader*, staf (*good/bad*), pihak eksternal/pelanggan);
7. Menyusun *script (story board)* dan membuat dalam bentuk komik untuk setiap *value*;
8. Penyusunan desain dari Buku Panduan Perilaku (baik *hard copy* maupun *e-book*).

PENUANSAAN BUDAYA PERUSAHAAN

Tujuan:

Aspek *place* dan *narrative* menjadi penting dalam proses komunikasi budaya perusahaan kepada seluruh insan IPC. Proses komunikasi memanfaatkan media visual dan audio dengan beragam bentuk dan memanfaatkan fasilitas publik eksisting yang berisi seputar *value* CINTA IPC dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

PREPARATION OF BEHAVIORAL GUIDANCE BOOK AND E-BOOK

Objectives:

1. IPC value socialization through media that is more interesting and easier to understand;
2. IPC People can understand, apply and play an active role in the process of internalizing corporate values which is then expected to have an impact on improving the implementation of CINTA IPC values and company performance;
3. Guidelines for corporate culture behavior can be understood and implemented by all IPC people so that the corporate values are reflected in all forms of activities and interactions with all stakeholders inside and outside the company and to foster understanding, increase involvement and a sense of responsibility and commitment of all IPC People towards corporate culture (*do and don't*) guidelines.

Realization:

The preparation of the book is carried out with the following stages:

1. The process of collecting data from 5 (five) CINTA IPC values (*do and don't*) both in terms of operational and non-operational;
2. Conduct interviews with internal IPC to get critical incidents and real examples in IPC environment;
3. Conduct Focus Group Discussion (FGD) to get critical incidents and real examples in IPC environment;
4. Collecting critical incidents in IPC environment, concrete and contextual behavior for each value;
5. Gather inspiring examples from external for each value;
6. Make a unique character in accordance with the characteristics of IPC (leaders, staff (*good/bad*), external parties/customers);
7. Compile a script (*story board*) and make the script into a comic form for each value;
8. Preparation of design of the behavioral guidance Book (both *hard copy* and *e-book*).

CORPORATE CULTURE NUANCE

The Objectives:

The place and narrative aspects are important in the process of communicating corporate culture to all IPC people. The communication process utilizes visual and audio media in various forms and utilizes existing public facilities that contain CINTA IPC values and its application in everyday life



Realisasi:

1. Telah dibuat spanduk, *banner* dan *bunting flag* setiap bulan CINTA IPC yang disesuaikan dengan kondisi terkini Perusahaan dan hari-hari besar di Republik Indonesia;
2. Telah dipasang *digital signage* berupa Kiosk di setiap lantai Kantor Pusat dan *professional display* di setiap *lift* yang menayangkan video *value* CINTA IPC, budaya operasional tiap unit kerja, serta video *corporate update*. Media ini dihadirkan untuk menggantikan *standing banner* dalam rangka digitalisasi. Rencana selanjutnya adalah setiap unit kerja yang memiliki rencana kampanye atau pengumuman dapat memanfaatkan media Kiosk dan *professional display*.

Realization:

1. Banners and bunting flags of CINTA IPC have been made every month, which is adapted to the current conditions of the Company and public holidays in the Republic of Indonesia;
2. Digital signage has been installed in the form of Kiosk on each floor of Head Office and professional displays in every elevator showing a video about CINTA IPC values, operational culture of each work unit, and corporate updates. This media is replacing the standing banner in the context of digitization. The next plan is that every work unit that has a campaign plan or announcement can utilize Kiosk media and professional displays.

IPC CULTURE FESTIVAL 2019

Tujuan:

1. Sebagai salah satu media *updating*, kreativitas, aktualisasi *value* perusahaan dan sinergitas CINTA IPC;
2. Ajang apresiasi terhadap implementasi budaya perusahaan IPC Group;
3. Meningkatkan pemahaman pentingnya *value* perusahaan bagi IPC Group dalam kelangsungan hidup korporasi.

IPC CULTURE FESTIVAL 2019

The Objectives :

1. As one of the media updating, creativity, the actualization of corporate values and the synergy of CINTA IPC;
2. An appreciation event for the implementation of IPC Group's corporate culture;
3. Increase understanding of the importance of corporate value for IPC Group in corporate survival.

Realisasi:

- a. Telah dilaksanakan *awarding* untuk implementasi *value* pada Entitas Anak dan pemilihan *Best Change Agent Culture* pada 5 Desember 2019 di Auditorium Lantai 9 Gedung Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dengan hasil *awarding* yaitu:

Realization:

- a. An awarding was held for value implementation at Subsidiaries and the selection of Best Change Agent Culture on December 5, 2019 at the 9th Floor Auditorium of Tanjung Priok Port Branch Building with the following results:

No	Award	Pemenang Winner
1.	<i>Most Implemented Culture Program</i>	PT Pelabuhan Tanjung Priok
2.	<i>Most Implemented Culture Communication</i>	PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
3.	<i>Most Implemented Culture Environment</i>	PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk
4.	<i>Most Implemented Corporate Culture</i>	PT Pelabuhan Tanjung Priok
5.	<i>Best Change Agent Culture</i>	Frida Ervina Sitorus NIPP. 275016993 Cabang Pelabuhan Palembang Frida Ervina Sitorus NIPP. 275016993 Palembang Port Branch

- b. Telah dilaksanakan parade budaya dari tiap Direktorat Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Entitas Anak pada 6 Desember 2019 bersamaan dengan HUT IPC dengan mengangkat tema kearifan masing-masing daerah Cabang Pelabuhan dan identitas *value* masing-masing Entitas Anak IPC Group.

- b. A cultural parade has been held from each Directorate of Head Office, Port Branches and Subsidiaries on December 6, 2019 in conjunction with IPC Anniversary by raising the theme of local wisdom in each of Port Branch areas and the identity values of each IPC Group subsidiary.

Sejak *Corporate University* IPC di-launching pada tahun 2018, pengelolaan IPC Muda turut menjadi salah satu program yang diemban oleh Divisi Pembelajaran SDM sebagai tindak lanjut dari program Kementerian BUMN yaitu *Spirit of Millennials*. Adapun program-program untuk pengelolaan IPC Muda selama tahun 2019 yaitu:

I'M CINTA IPC

1. Dilaksanakan pada 25 Januari 2019 di Pendulum Nusantara Hall – PT PMLI Ciawi;
2. Dihadiri oleh 750 pekerja muda IPC;
3. Mengusung tema *digital* dan *eco environment*;
4. *Re-defining* IPC Muda yang semula bernama *Young Workforce Management Program* sebagai wadah pengelolaan generasi muda di IPC;
5. Sinergitas program Kementerian BUMN dalam *Spirit of Millennials*.

I'M CINTA IPC JILID 2: GENERASI ASIK (ADAPTIF, SOLUTIF, INISIATIF, KOLABORATIF)

1. Dilaksanakan pada 5 September 2019 di Hotel Grand Mercure Kemayoran - Jakarta;
2. Dihadiri oleh 500 pekerja muda IPC;
3. Mengusung *Quadruple Helix* sebagai salah satu *framework* inovasi dan sebagai salah satu pendekatan terkini yang digadang-gadangkan dapat menjadi alternatif dalam menyiapkan Indonesia 4.0. *Quadruple Helix* yang bertajuk kolaborasi aktif dan harmonis antara pemerintah, akademisi/peneliti, industri/swasta, dan masyarakat/komunitas;
4. Tema acara adalah “Indonesia Tempoe Doeloe”;
5. Terdapat *group activity* guna menampung ide inovasi untuk improvement di IPC dengan semangat IPC Muda berkiprah bakti untuk negeri.

ASESMEN IPC MUDA

Tujuan:

Mendapatkan pemetaan kompetensi dan kepribadian IPC Muda untuk program pengembangan IPC Muda.

Realisasi:

1. Telah dilaksanakan pada bulan Desember 2019 dan *feedback* pada Januari 2020;
2. Diikuti oleh 896 pekerja dari target sejumlah 916 pekerja yang diperintahkan dengan klasifikasi pekerja muda dari kelahiran tahun 1985 dengan kelas jabatan 10–13 dan beberapa BoD-3 yang belum mengikuti asesmen.

Since IPC Corporate University was launched in 2018, the IPC MUDA management has also become one of the programs carried out by the HC Learning Division as a follow-up to the Ministry of SOE's program, *Spirit of Millennials*. The programs for the IPC MUDA management during 2019 are:

I'M CINTA IPC

1. Held on January 25, 2019 at Pendulum Nusantara Hall - PT PMLI Ciawi;
2. Attended by 750 young IPC employees;
3. Carrying the theme digital and eco environment;
4. Re-defining the IPC MUDA which was originally called the Young Workforce Management Program as a media for managing young people at IPC;
5. Synergy of the Ministry of SOE's programs in the *Spirit of Millennials*.

I'M CINTA IPC JILID 2: GENERASI ASIK (ADAPTIF, SOLUTIF, INISIATIF, KOLABORATIF)

1. Held on September 5, 2019 at Grand Mercure Hotel Kemayoran - Jakarta;
2. Attended by 500 young IPC employees;
3. Carrying the *Quadruple Helix* as one of the innovation frameworks and as one of the latest approaches that can be an alternative in preparing Indonesia 4.0. *Quadruple Helix*, titled active and harmonious collaboration between government, academics/researchers, industry/private sector, and the community;
4. The theme of the event is “Indonesia Tempoe Doeloe”;
5. There is a group activity to accommodate the idea of innovation for improvement at IPC with the spirit of IPC MUDA taking part in serving the country.

IPC MUDA ASSESSMENT

The Objectives:

Obtain a mapping of the competencies and personality of IPC MUDA for the IPC MUDA development program.

Realization:

1. Has been carried out in December 2019 and *feedback* in January 2020;
2. Followed by 896 employees from a target of 916 workers who were ordered with the classification of young employees who was born from 1985 and above, with job grade 10–13 and several BOD-3 who had not yet participated in assessment.



AKTIVITAS DALAM DAN LUAR IPC

1. Aktivitas dalam IPC yang diikuti yaitu kegiatan sosial dan lingkungan yang diinisiasi oleh CSR & PKBL;
2. Menghadiri Rapat Kerja Nasional IPC guna penyampaian update perusahaan langsung kepada para pekerja muda;
3. Forum-forum diskusi yang diinisiasi oleh BUMN lain serta para *Stakeholder* terkait.

RENCANA KE DEPAN

Strategi pengelolaan SDM 2020 mengacu pada *roadmap* Perusahaan periode tahun 2020-2024. Strategi pengelolaan dan pengembangan SDM terdiri dari tahapan *World Class Port Capabilities, Strong, Learning and Development Mechanism, Organization Realignment to Support Value Chain Expansion, Establish Digital Operating Model* dan *World Class Digital Operating Model*.

Sasaran dan Inisiatif Strategis di tahun 2020 yaitu *World Class Port Capabilities*:

1. Membangun organisasi kelas dunia.
Kajian rancangan organisasi untuk dapat mendukung aspirasi menjadi fasilitator perdagangan.
2. Membangun mekanisme pelatihan *human capital* kelas dunia.
 - a. Identifikasi program pembelajaran untuk standarisasi dan peningkatan kapabilitas seluruh organisasi untuk menjadi fasilitator perdagangan;
 - b. Mempersiapkan program pertukaran pegawai untuk meningkatkan kompetensi sebagai fasilitator perdagangan.
3. Membangun dukungan *back end* terintegrasi untuk mendukung Grup IPC.
 - a. Merancang *Shared Service Center* untuk memperbaiki efisiensi proses *back end*;
 - b. Identifikasi implikasi legal dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai aspirasi fasilitator perdagangan.

RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2020

Pada tahun 2020, Perseroan mengalokasikan anggaran sebesar Rp64 miliar untuk Program Pengembangan Karyawan. Rencana Program Pembelajaran tahun 2020 sebagai berikut:

IPC'S INTERNAL AND EXTERNAL ACTIVITIES

1. IPC internal activities, namely social and environmental activities initiated by CSR & PKBL;
2. Attended IPC National Work Meeting to deliver company updates directly to young workers;
3. Discussion forums initiated by other SOEs and related Stakeholders.

FUTURE PLAN

The HC management strategy in 2020 refers to the Company's roadmap for the period of 2020-2024. The HC management and development strategy consists of several stages, which is *World Class Port Capabilities, Strong, Learning and Development Mechanism, Organization Realignment to Support Value Chain Expansion, Establishing Digital Operating Model* and *World Class Digital Operating Model*.

Strategic Targets and Initiatives in 2020 are *World Class Port Capabilities*:

1. Building a world-class organization.
Study on organizational design to be able to support the aspirations of being a trade facilitator.
2. Building a world-class human capital training mechanism.
 - a. Identification of learning programs to standardize and enhance the capabilities of the entire organization to become a trade facilitator;
 - b. Prepare employee exchange program to improve competencies as a trade facilitator.
3. Building integrated back end support to support IPC Group.
 - a. Designing a *Shared Service Center* to improve the efficiency of back-end process;
 - b. Identify the legal implications and support needed to achieve the aspiration of trade facilitator.

COMPETENCY DEVELOPMENT PLAN FOR 2020

In 2020, the Company allocated a budget of Rp64 billion for Employee Development Program. The 2020 Learning Program Plan is as follows:

Tabel Program Pengembangan Karyawan Tahun 2019
Table of Employee Development Program in 2019

No	Program Pembelajaran <i>Learning Program</i>	Jumlah Program <i>Number of Programs</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>
I.	Pendidikan Education		
1.	Pendidikan Luar Negeri Overseas Education	1	4
II.	Pelatihan Training		
1.	Dasar Korporat Corporate Basic	3	44
2.	Wajib Korporat Corporate Mandatory	17	319
3.	Kepemimpinan Korporat Corporate Leadership		
a.	Pengembangan Karir Career Development	18	454
b.	Persyaratan Karir Career Requirement	19	482
4.	Lintas Akademi Cross-Academy	29	1268
5.	Wajib & Keahlian Sekolah School Mandatory and Skills	122	1499
III.	Magang Internship		
1.	<i>Sisterport</i> Sisterport	1	12
2.	<i>Global Apprenticeship</i> Global Apprenticeship	1	15
Jumlah Total		211	4.097

Rencana Program Pembelajaran tersebut meliputi:

1. Program Pendidikan
Ditujukan bagi karyawan yang mendapat kesempatan dari Perseroan untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang Pasca Sarjana atau Program Doktorat pada tahun 2020.
2. Program Pelatihan
Penentuan program pelatihan pada tahun 2020 adalah berdasar pada:
 - a. Hasil asesmen kompetensi;
 - b. Kebutuhan pengembangan masing-masing karyawan yang didapatkan melalui proses *Learning Need Analysis* (LNA);
 - c. Kartu Rencana Pembelajaran Individu (KRPI) yang selaras dengan pencapaian visi dan misi Perseroan;
 - d. Penugasan berdasarkan kebutuhan Perseroan.

The Learning Program Plan includes:

1. Education Program
Intended for employees who get the opportunity from the Company to continue their education at the Postgraduate or Doctoral Program level in 2020.
2. Training Program
The determination of training program in 2020 is based on:
 - a. Results of competency assessment;
 - b. The development needs of each employee are obtained through the process of Learning Need Analysis (LNA);
 - c. Individual Learning Plan Card (KRPI) that is aligned with the achievement of the Company's vision and mission;
 - d. Assignments based on company needs.



3. Magang Karyawan

Pada tahun 2020, Perseroan akan melanjutkan program magang *sisterport* dan menjalin kerjasama dengan Pelabuhan yang dapat mendukung implementasi Proyek Strategis Nasional seperti otomatisasi Pelabuhan dan pengembangan pelabuhan Kijing. Selain itu, Perseroan juga merencanakan *Apprenticeship Program* bertajuk *IPC Global Leaders Program* yang ditujukan untuk pekerja kategori *Top Talent* yang diproyeksikan menjadi pemimpin IPC di masa depan. Dalam program ini peserta mendapatkan kesempatan untuk magang di Perseroan terkemuka di dunia selama 3 (tiga) bulan. Dengan mengikuti program ini diharapkan pekerja dapat menambah wawasan dan pengalaman bekerja dalam lingkungan *multicultural*.

3. Employee Internship

In 2020, the Company will continue the *sisterport* apprenticeship program and collaborate with the Port to support the implementation of National Strategic Projects such as Port automation and the development of Kijing port. In addition, the Company is also planning an Apprenticeship Program titled *IPC Global Leaders Program* aimed at *Top Talent* employees who are projected to become IPC leaders in the future. In this program, participants get the opportunity to intern in a leading company in the world for 3 (three) months. By joining this program, it is hoped that employees can increase knowledge and experience to work in a multicultural environment.

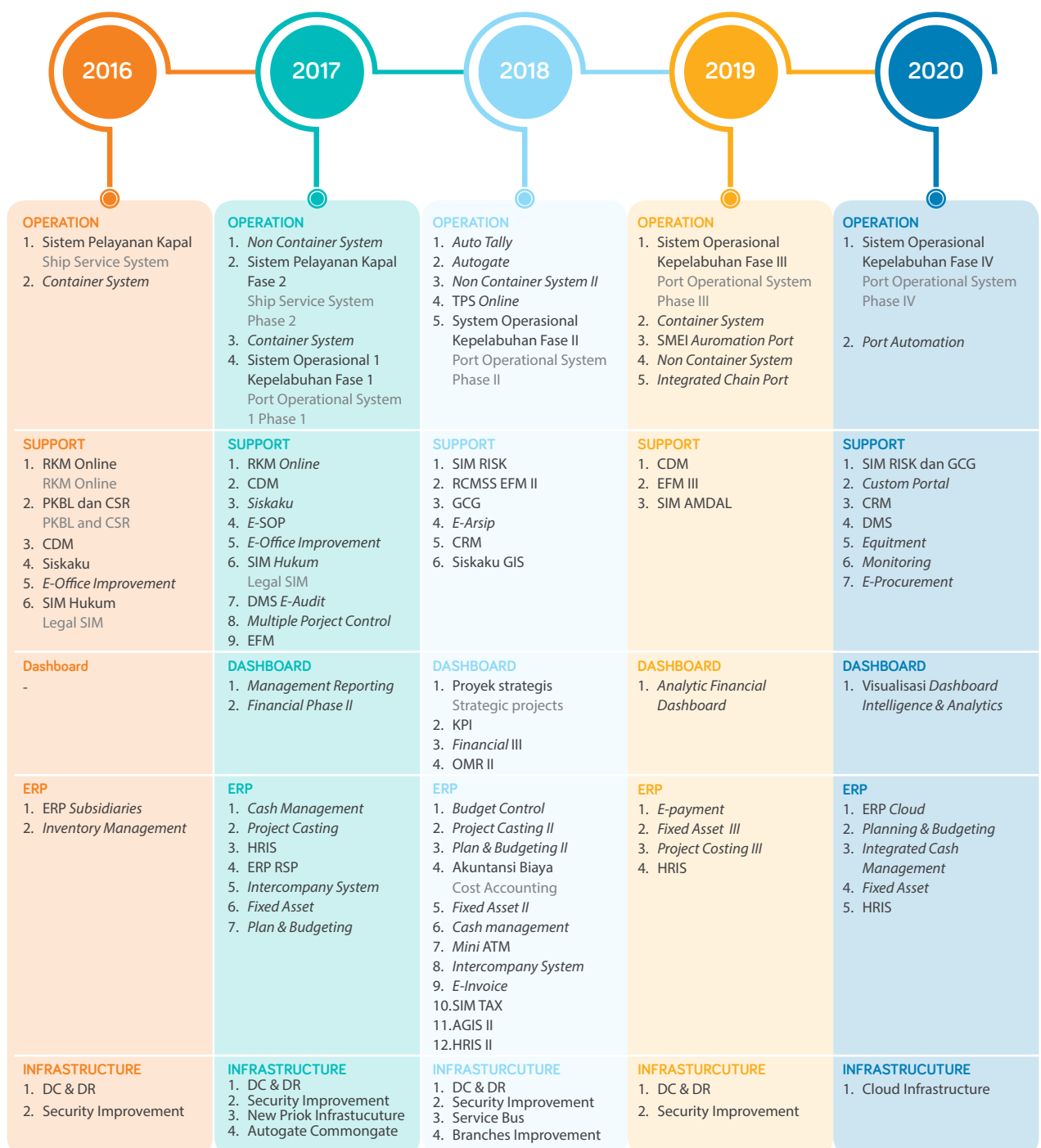
TEKNOLOGI INFORMASI INFORMATION TECHNOLOGY

ROADMAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT ROADMAP

Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi dibuat dengan mengacu kepada *Corporate Roadmap*. Adapun *Roadmap* Teknologi Informasi hingga tahun 2020 seperti pada gambar di bawah:

The information Technology development roadmap referred to the Corporate roadmap. The information Technology roadmap up to 2020 as shown below.





Secara umum *roadmap* TI 2016-2020 bertujuan memberikan arahan bagi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan IPC. Secara lebih spesifik, *roadmap* TI 2016-2020 bertujuan:

1. Menyiapkan jalan untuk mewujudkan IPC sebagai *world class port* dan layanan logistic yang unggul;
2. Mewujudkan implementasi TI yang efektif dan realistis untuk meningkatkan mutu kegiatan *non-operasional* pelabuhan;
3. Meningkatkan kapabilitas Divisi Sistem Informasi dalam mengimplementasikan teknologi baru dan memanfaatkannya untuk mendukung *core* bisnis perusahaan.

In general, the 2016-2020 IT roadmap aims to provide direction for the development of technology information and communication technology in IPC. More specifically, the 2016-2020 roadmap aims to:

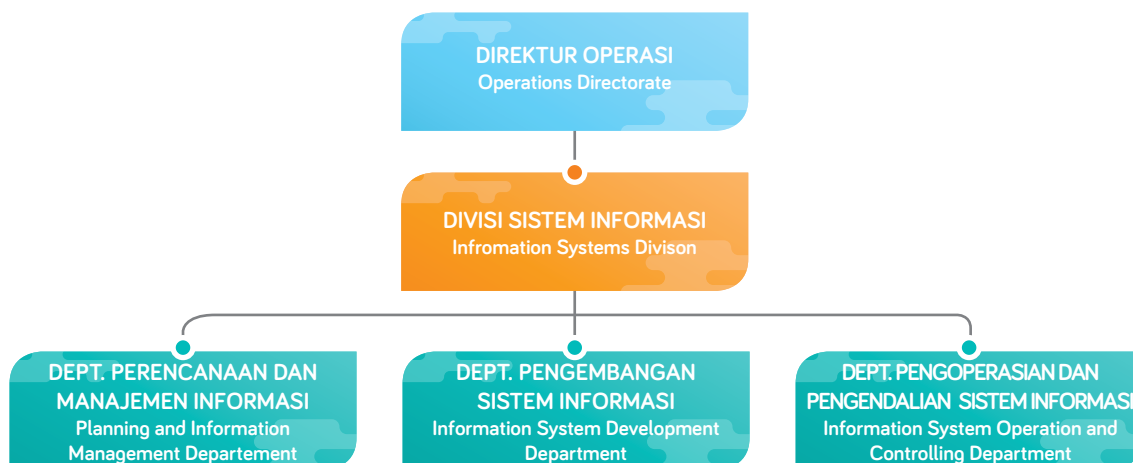
1. Prepare the path to realize IPC as a world class port and superior logistics service.
2. Realize an effective and realistic IT implementation to improve the quality of port non-operational activities.
3. Improve the capabilities of Information Systems Division in implementing new technologies and utilizing them to support the Company's core business.

STRUKTUR PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Berdasarkan SK Direksi Nomor OOT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19-20 November 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK. 568/30/8/1/PI.II-16 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen pada Direktorat SDM dan Hukum serta Direktorat Operasi dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Pengelolaan Teknologi Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dilaksanakan oleh Divisi Sistem Informasi yang berada di bawah Direktorat Operasi. Di dalam struktur organisasi Divisi Sistem Informasi terdapat 3 (tiga) departemen yang berfungsi layaknya flow process pengembangan teknologi informasi yaitu: Departemen Perencanaan dan Manajemen Informasi, Departemen Pengembangan Sistem Informasi dan Departemen Pengoperasian dan Departemen Pengoperasian dan Pengendalian Sistem Informasi.

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT STRUCTURE

Based on the Board of Directors Decree Number OOT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19-November 20, 2020 concerning amendment to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s Board of Directors Decree Number HK. 568/30/8/1/PI.II-16 dated August 30, 2016 concerning Organization and Work Procedure Management in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s HC and Legal Directorate and Operations and Information Systems Directorate. Information Technology management in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is carried out by the Information Systems division under the Operations directorate. Within the Information System division's organizational structure, there are 3 (three) departments that function as the information technology development process flow, namely: Information Planning and Management department, Information System Development Department and Operational Department and Information System Operation and Controlling Department.



PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2019

Perusahaan telah melakukan berbagai pengembangan dan implementasi teknologi informasi 2019 yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan yang tertuang dengan di dalam arsitektur bisnis dan selaras dengan arsitektur aplikasi sebagai pendukung bisnis proses perusahaan. Adapun pengembangan teknologi informasi di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi
 - a. Implementasi aplikasi *enterprise planning and controlling* pada Cabang Pelabuhan sebagai aplikasi yang berfungsi untuk melakukan pengajuan, pengawasan dan pelaporan Rencana Kerja Manajemen;
 - b. Implementasi aplikasi NPK TOS (*Non Petikemas Terminal Operating System*) pada Cabang Pelabuhan Teluk Bayur yang merupakan aplikasi manajemen terminal *non petikemas*;
 - c. *Rollout* aplikasi *e-procurement* pada 10 (sepuluh) Cabang Pelabuhan setelah sebelumnya telah diimplementasikan pada Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa;
 - d. Pemetaan data operasional, *billing* dan keuangan untuk layanan petikemas, kapal dan barang sebagai bagian dari pendukung implementasi *business intelligent* dan *Dashboard Analytics*;
 - e. Implementasi dan pengembangan aplikasi *Key Performance Indikator* (KPI) sebagai bagian peningkatan monitoring dan manajemen kinerja pegawai perusahaan;
 - f. Penerapan *Virtual Account* (VA) untuk modul *cash management*;
 - g. *Revamp/enchantment website* perusahaan sebagai bagian peningkatan layanan kepada publik dalam hal transparansi informasi Perseroan;
 - h. Implementasi aplikasi uang muka dalam rangka peningkatan *compliance* di Perseroan;
 - i. Implementasi aplikasi *tools monitoring* dan *controlling incident, problem* dan *request fulfillment* untuk seluruh layanan IT guna peningkatan level layanan IT.
2. Pengembangan Infrastruktur
 - a. Peningkatan keamanan dan layanan infrastruktur IT *Disaster Recovery Center* (DRC) sebagai bagian dari peningkatan *service level* layanan teknologi informasi dari sisi *availability* dan *integrity*;
 - b. Peningkatan layanan infrastruktur IT untuk mendukung kegiatan operasional pelabuhan pada Cabang Pelabuhan Jambi sebagai bagian program digitalisasi di Cabang Pelabuhan;

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN 2019

The Company has carried out various information technology developments and implementations in 2019 in line with the Company's business needs, as contained in the business architecture, and in line with the application architecture, as support for the Company's business processes. The information technology development in 2019 included:

1. Application Development and Implementation
 - a. Implementation of *enterprise planning and controlling* applications at the Port Branch as an application that functions to submit, monitor and report on the Management Work Plan;
 - b. Implementation of NPK TOS (*Non-Container Terminal Operating System*) application at Teluk Bayur Port Branch which is a non-container terminal management application;
 - c. Rollout *e-procurement* application in 10 (ten) Port Branches after they have been implemented at Tanjung Priok and Sunda Kelapa Port Branch;
 - d. Mapping operational, *billing* and financial data for container, ship and cargo services as part of supporting business intelligent implementation and Analytics Dashboard;
 - e. Implementation and development of *Key Performance Indicators* (KPI) application as part of improving the monitoring and management of Company's employee performance;
 - f. Implementation of *Virtual Account* (VA) for the cash management module;
 - g. *Revamp/enchantment* the Company's website as part of improving services to the public in terms of transparency of Company information;
 - h. Implementation of down payment application in order to increase compliance within the Company;
 - i. Implement tools for monitoring and controlling incidents, problems and request fulfillment for all IT services in order to increase the level of IT services.
2. Infrastructure Development
 - a. Increasing the security and infrastructure services of *IT Disaster Recovery Center* (DRC) as part of improving the service level of information technology services in terms of *availability* and *integrity*;
 - b. Improving IT infrastructure services to support port operations at Jambi Port Branch as part of the digitalization program at the Port Branch;



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> c. Implementasi <i>autogate system</i> pada Cabang Pelabuhan panjang guna meningkatkan layanan pada terminal petikemas; d. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur pada Kantor Pusat. <p>3. Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan IT <i>Master Plan</i> 2016–2020 yang merupakan dokumen <i>blueprint</i> rencana jangka panjang pengembangan dan implementasi teknologi informasi; b. Penyusunan Tata Kelola (IT <i>Governance</i>) dan Target <i>Operating Model</i> Teknologi informasi guna meningkatkan level kematangan pada organisasi teknologi informasi. | <ul style="list-style-type: none"> c. Implementation of the <i>autogate system</i> at Panjang Port Branch to improve service at container terminal; d. Improving the quality of infrastructure services at the Head Office. <p>3. Governance</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Preparation of the 2016-2020 IT Master Plan which is a blueprint document for the long-term development and implementation of information technology; b. Formulation of Governance (IT Governance) and Target Operating Model Information technology in order to increase the level of maturity in information technology organization. |
|---|--|

MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

STRATEGI MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Seiring dengan kebutuhan pengembangan perusahaan yang makin meningkat, *environment* IT terus berevolusi untuk menyesuaikan perubahan dalam perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, ditentukan arah strategi IT yang dapat merespon kebutuhan perusahaan dan sesuai dengan *roadmap* perusahaan. Strategi manajemen teknologi informasi fokus terhadap 5 (lima) domain yaitu:

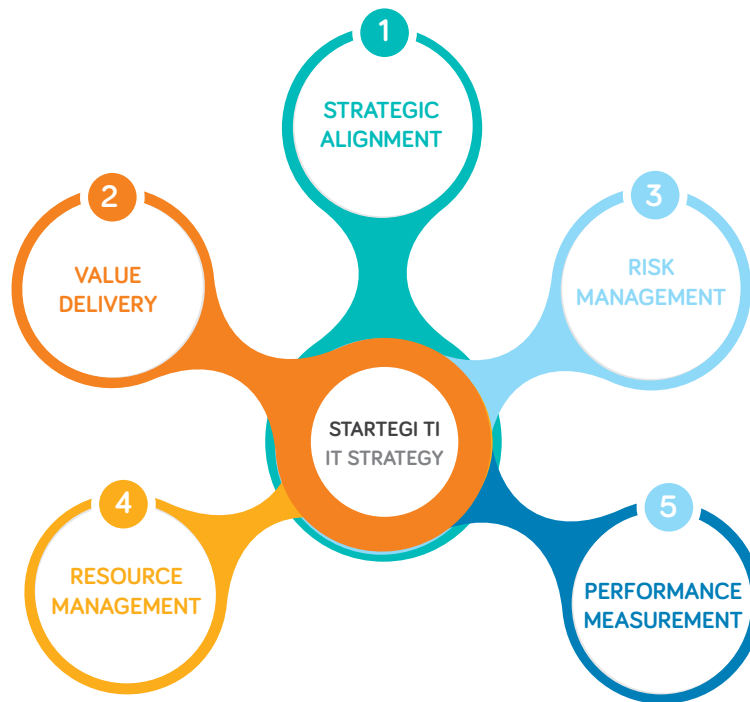
1. *Strategic alignment*
Memastikan keselarasan TI dengan strategi bisnis Perusahaan;
2. *Value Delivery*
Memastikan bahwa nilai tambah TI dapat memberikan pencapaian keuntungan yang maksimal dari segi biaya dan nilai;
3. *Risk Management*
Memastikan bahwa setiap aktivitas TI mengacu pada prinsip kehati-hatian terhadap risiko yang mungkin terjadi;
4. *Resource Management*
Memastikan bahwa pengembangan sumber daya TI baik SDM maupun *non* SDM, dilakukan dengan investasi yang optimal, bertanggungjawab dan dikelola dengan baik;
5. *Performance Measurement*
Memastikan bahwa terdapat mekanisme pengukuran kinerja yang dilakukan secara teratur dan terdokumentasi untuk setiap proses TI dan penggunaan sumber daya TI.

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT STRATEGY

As the Company's development needs increase, IT environment continues to evolve to adapt to changes in information technology development. Therefore, the direction of IT strategy that can respond to the needs of the company and in accordance with the company's roadmap needs to be determined. Information technology management strategies focus on 5 (five) domains, namely:

1. Strategic alignment
Ensure alignment of IT with the Company's business strategy.
2. Value Delivery
Ensuring that IT added value can provide maximum profitability in terms of cost and value.
3. Risk Management
Ensuring that each IT activity refers to the precautionary principle for risks that might occur.
4. Resource Management
Ensuring that the development of IT resources, both HC and non HC, is carried out with optimal investment, responsibility and well managed.
5. Performance Measurement
Ensuring that there is a performance measurement mechanism carried out regularly and documented for each IT process and the use of IT resources.



ARSITEKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Enterprise Architecture adalah *blueprint* yang bersifat konseptual dan mendefinisikan struktur dan operasi sebuah organisasi pada suatu waktu. Tujuan dari sebuah *Enterprise Architecture* adalah untuk menentukan bagaimana sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya saat ini dan di masa datang dengan cara yang paling efektif. Kebutuhan akan *Enterprise Architecture* didorong oleh perkembangan teknologi dan integrasi dan kolaborasi yang makin meningkat, dan juga perubahan yang makin cepat dan kebutuhan untuk mengelola risiko.

Terdapat 4 (empat) domain di dalam *enterprise architecture* antara lain:

INFORMATION TECHNOLOGY ARCHITECTURE

Enterprise Architecture is a conceptual blueprint that defines the structure and operation of an organization at a certain time. The purpose of enterprise architecture is to determine how an organization can achieve its goals now and in the future in the most effective way. The need for Enterprise Architecture is driven by increasingly technological developments and integration and collaboration, as well as faster changes and the need to manage risk.

There are 4 (four) domains in an enterprise architecture, including:



ARSITEKTUR BISNIS / Business Architecture

- Konsep *Blueprint* yang menggambarkan kapabilitas bisnis;
- Memberikan pandangan terhadap seluruh segmen bisnis, fungsi-fungsi utama, dan ringkasan aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing fungsi.
- The blueprint concept that describes the business capabilities.
- Provide views on all business segments, main functions, and summaries of activities carried out by each function.

ARSITEKTUR APLIKASI / Application Architecture

- Konsep *blueprint* yang menggambarkan *platform* aplikasi teknologi informasi;
- Memberikan pandangan terhadap kelompok aplikasi yang terdapat di dalam organisasi, selaras dengan *blueprint* bisnis beserta informasi.
- The blueprint concept that describes the information technology application platform.
- Provide views on the application groups within the organization, in harmony with the business and information blueprint.



ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR / Infrastructure Architecture

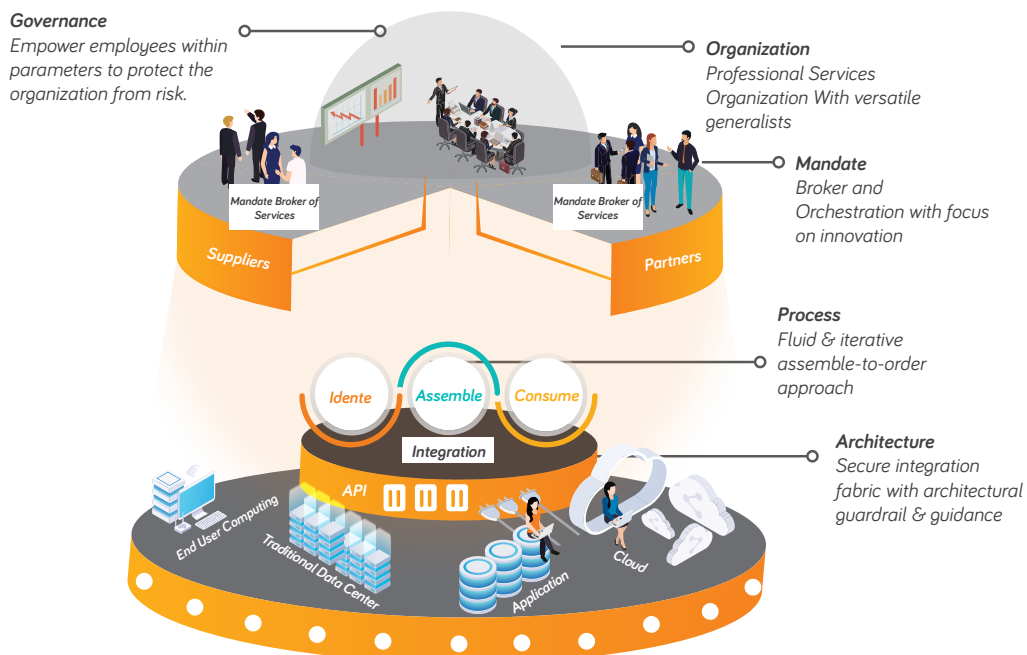
- Konsep *blueprint* yang menggambarkan infrastruktur dan perangkat keras teknologi informasi;
- Memberikan pandangan terhadap obyek informasi *platform* infrastruktur yang mendukung aplikasi yang digunakan dalam organisasi.
- The blueprint concept that describes the information technology infrastructure and hardware.
- Provide views on the infrastructure platform that supports the applications used in the organization.

ARSITEKTUR DATA / Data Architecture

- Konsep *blueprint* yang menggambarkan alur data dan informasi;
- Memberikan pandangan terhadap obyek informasi utama yang tersirkulasi dalam organisasi.
- The blueprint concept that describes the flow of data and information.
- Provide views of the main information objects circulated in the organization.

Berikut ini merupakan *enterprise architecture* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

The following shows the enterprise architecture for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), as follows:



TATA KELOLA IT

Tata Kelola IT merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Good Corporate Governance*, yang merupakan perwujudan tanggung jawab Direksi dan manajemen Perseroan yang diterapkan melalui gaya kepemimpinan, struktur organisasi, dan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa Sistem Informasi Perseroan dikelola secara optimal dalam mendukung pencapaian strategi dan tujuan Perseroan. Untuk mendukung perwujudan dan peningkatan Tata Kelola IT di lingkungan Perseroan, IPC menetapkan Pedoman Kebijakan Tata Kelola Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang dimaksudkan sebagai kerangka utama dalam pengelolaan tata kelola Sistem Informasi yang baik guna mendukung *Good Corporate Governance* secara lebih komprehensif. Tata Kelola IT ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SI.01/28/2/1/PMI/UT/PI.II-20 tentang Pedoman Kebijakan Tata Kelola Sistem Informasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Pedoman tersebut meliputi dua kebijakan tata kelola yaitu kebijakan strategis dan kebijakan operasional.

Kebijakan strategis meliputi tata kelola sebagai berikut:

- a. Penetapan Peran TI Perusahaan;
- b. Perencanaan TI;
- c. Kerangka Kerja Proses dan Organisasi TI;
- d. Pengelolaan Investasi TI;
- e. Pengelolaan Sumber Daya TI;
- f. Pengelolaan Risiko TI;
- g. Pengelolaan Proyek (*Project Management*);
- h. Penanganan Kebutuhan dan Identifikasi Solusi (*Identify Automated Solution*).

Kebijakan operasional meliputi tata kelola sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Operasi Sistem Informasi;
- b. Pengelolaan Layanan TI;
- c. Pengelolaan Sekuriti TI;
- d. Pengembangan Sistem Informasi;
- e. Serah Terima Layanan TI (*Handover*);
- f. *Post Implementation Review*;
- g. Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga;
- h. Pengelolaan Mutu;
- i. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja TI.

Sebagai suatu kebijakan umum, maka Pedoman Kebijakan Tata Kelola Sistem Informasi IPC hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, hal lain yang bersifat lebih detail diatur dalam suatu *Standard Operating Procedure (SOP)* dan/atau suatu petunjuk pelaksanaan pekerjaan tertentu.

IT GOVERNANCE

IT Governance is an inseparable part of Good Corporate Governance, which is a manifestation of the responsibilities of Board of Directors and Management of the Company that is applied through leadership style, organizational structure, and processes designed to ensure that the Company's Information System is optimally managed in supporting the achievement of the Company's strategies and objectives. To support the embodiment and improvement of IT Governance within the Company, IPC established the Information Systems Policy Guidelines for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which were intended as the main framework in managing Good Information System Governance to support more comprehensive Good Corporate Governance. IT Governance is established through Board of Directors Decree No. SI.01/28/2/1/PMI/UT/PI.II-20 concerning Information Systems Governance Policy Guidelines in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The guideline covers two governance policies, namely strategic policy and operational policy.

The strategic policies include governance as follows:

- a. Company's IT Roles.
- b. IT Planning.
- c. IT Organization and Process Framework.
- d. IT Investment Management.
- e. IT Resource Management.
- f. IT Risk Management.
- g. Project Management.
- h. Handling Needs and Identifying Solutions (*Identify Automated Solution*).

Operational policies include governance as follows:

- a. Management of Information Systems Operations.
- b. IT Service Management.
- c. IT Security Management.
- d. Information System Development.
- e. Handover of IT Services.
- f. *Post Implementation Review*.
- g. Management of Third-Party Services.
- h. Quality Management.
- i. IT Performance Monitoring and Evaluation.

As a general policy, IPC Information System Governance Policy Guidelines only regulate general matters, other things that are more detailed are regulated in a *Standard Operating Procedure (SOP)* and/or a specific working instruction.



Pedoman Kebijakan tata kelola teknologi informasi ini ditunjukkan untuk memberikan gambaran mengenai arahan manajemen perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan teknologi informasi dan membuat kebijakan-kebijakan strategis dan operasional teknologi informasi yang wajib dipenuhi dan dipatuhi dalam pengelolaan teknologi informasi perusahaan untuk menghasilkan layanan teknologi informasi sebagai berikut:

- a. Efektif, yaitu informasi yang tepat waktu, benar, konsisten, bermanfaat, relevan dan berkaitan dengan bisnis proses perusahaan;
- b. Efisien, yaitu informasi yang dihasilkan melalui penggunaan sumber daya secara optimal;
- c. Kerahasiaan, yaitu perlindungan atas informasi yang sensitif dari penyajian yang tidak terotorisasi;
- d. Integritas, yaitu perlindungan atas akurasi, validasi dan kelengkapan informasi sesuai dengan kebutuhan dan kriteria proses bisnis perusahaan;
- e. Ketersediaan, yaitu perlindungan atas ketersediaan informasi sehingga dapat tersedia pada saat dibutuhkan;
- f. Kepatuhan, yaitu pengelolaan sistem informasi yang patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan teknologi informasi;
- g. Keandalan, yaitu informasi yang dapat dipercaya dan digunakan oleh manajemen dalam rangka pengambilan keputusan.

Secara umum, tujuan dari Pedoman Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi IPC adalah:

- a. Mengembangkan suatu acuan atas langkah-langkah dan menyebutkan dengan jelas bagaimana pengelolaan teknologi informasi IPC;
- b. Menciptakan standarisasi dalam menghadapi masalah sistem informasi IPC;
- c. Mengelola organisasi sistem informasi IPC;
- d. Mengurangi tingkat ketidakpastian pada pengambilan keputusan sehari-hari yang berlaku berulang kali (rutin).

PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

Pada kebijakan operasional terdapat pengelolaan Operasi Sistem Informasi yang mengatur mengenai pengelolaan konfigurasi perangkat lunak. Perseroan melakukan inventarisasi atas informasi mengenai nama dan jenis perangkat lunak (sistem operasi, sistem aplikasi, atau sistem utilitas). Informasi lain yang harus dicakup dalam inventarisasi perangkat lunak meliputi nama pembuat atau vendor, tanggal instalasi, nomor versi dan keluaran (*release*), pemilik perangkat lunak, *setting* parameter dan *service* yang aktif, jumlah lisensi yang dimiliki, jumlah yang di-*install* dan jumlah *user*. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui SK Direksi No. HK.560/5/1/1/PI.II-16 tentang Pedoman

This information technology governance policy guideline is intended to provide an overview of the direction of the Company's management relating to the management of information technology and to make strategic and operational policies in information technology that must be fulfilled and adhered to in managing corporate information technology to produce information technology services as follows:

- a. Effective, i.e. information that is timely, correct, consistent, useful, relevant and related to the company's business processes;
- b. Efficient, i.e. information that is generated through optimal use of resources;
- c. Confidentiality, i.e. the protection of sensitive information from unauthorized presentation;
- d. Integrity, i.e. the protection for the accuracy, validation and completeness of information in accordance with the needs and criteria of the company's business processes;
- e. Availability, i.e. the protection for the availability of information hence it can be available when needed;
- f. Compliance, i.e. the management of information systems that comply with laws and regulations related to the management of information technology;
- g. Reliability, i.e. information that can be trusted and used by management in the context of decision making.

In general, the objectives of IPC Information Technology Governance Policy Guidelines are:

- a. To develop a reference for actions clearly state how IPC information technology is managed;
- b. To create a standard in dealing with IPC information system problems;
- c. To manage IPC information system organization;
- d. To reduce the level of uncertainty in repeated (routine) daily decision making.

SOFTWARE DEVELOPMENT

In the operational policies, there is an Information Systems Operations management that governs the management of software configurations. The Company conducts an inventory of information regarding names and types of software (operating systems, application systems, or utility systems). Other information that must be included in the software inventory includes the name of the manufacturer or vendor, installation date, version number and release, owner of the software, active parameter settings and services, number of licenses owned, number of installed software and number of users. The policy was stipulated through Board of Directors Decree No. HK.560/5/1/1/

Pengembangan Perangkat Lunak di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Surat Keputusan ini menetapkan Pedoman Kebijakan Pengembangan Perangkat Lunak di Lingkungan IPC. Penerapan Pedoman Pengembangan Perangkat Lunak di IPC mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dibidang Sistem dan Transaksi Elektronik. Maksud dari keputusan terkait pengembangan perangkat lunak ini adalah standarisasi pengembangan sistem informasi dalam melaksanakan pembangunan/pengembangan/perubahan dan penerapan perangkat lunak di Perseroan, sehingga mampu mendukung kelancaran kinerja seluruh unit kerja di lingkungan Perseroan.

Tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah:

- a. Agar pelaksanaan pembangunan/pengembangan/perubahan perangkat lunak tepat guna, tepat sasaran dan memberikan kemudahan dalam pengawasan guna meminimalisir risiko kegagalan pengembangan perangkat lunak sehingga sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis Perseroan, serta menjaga kualitas dan meningkatkan akuntabilitas pelaku pengembangan perangkat lunak;
- b. Standarisasi pengembangan sistem informasi dalam melaksanakan pembangunan/pengembangan/perubahan dan penerapan perangkat lunak di Perseroan, sehingga mampu mendukung kelancaran kinerja seluruh unit kerja di lingkungan IPC.

Kebijakan perangkat lunak meliputi:

- a. *Web Application*;
- b. *Mobile Application*;
- c. *Desktop Application*;
- d. *Enterprise Application*;
- e. Aplikasi Lainnya.

Pelaksanaan pengembangan perangkat lunak di Perseroan meliputi:

1. Pengembangan perangkat lunak harus mempertimbangkan komponen manajemen proyek, infrastruktur, manajemen perubahan dan migrasi data;
2. Permintaan pengembangan perangkat lunak harus berdasarkan atas kajian terhadap adanya kebutuhan pengembangan bisnis maupun adanya kebijakan/aturan yang baru, yang dibuat berdasarkan permintaan pengguna (*user*) dengan persetujuan dari Pejabat Unit Organisasi terkait;
3. Pengembangan perangkat lunak yang menghasilkan sistem baru harus mengacu pada *IT Master Plan* yang berlaku dan harus memiliki sumber pendanaan yang jelas

PI.II-16 concerning Guidelines for Software Development in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

This Decree establishes the Software Development Policy Guidelines in IPC Environment. The application of the Software Development Guidelines at IPC refers to the applicable laws and regulations in the field of Electronic Transactions and Systems. The purpose of the decision related to software development is the standardization of information system development in carrying out the construction/development/changes and application of software in the Company, so as to be able to support the smooth performance of all work units within the Company.

The objectives of this decision are:

- a. To ensure that the construction/development/changes of software is effective, right on target and provides convenience in supervision in order to minimize the risk of failure of software development and is in accordance with the needs and business processes of the Company, as well as maintaining quality and increasing the accountability of software development actors.
- b. As a standardization of information system development in carrying out the construction/development/changes and application of software in the Company, in order to be able to support the smooth performance of all work units in IPC environment.

Software policies include:

- a. *Web Application*;
- b. *Mobile Application*;
- c. *Desktop Application*;
- d. *Enterprise Application*;
- e. Other Applications.

The implementation of software development in the Company includes:

1. Software development must consider the components of project management, infrastructure, change management and data migration;
2. Request for software development must be based on a review of business development needs and new policies/rules, which are made based on the user's request with the approval of the relevant Organizational Unit Officer;
3. Software development that results in a new system must refer to the applicable IT Master Plan and must have a clear and sufficient source of funding. New request related to



dan mencukupi. Permintaan baru terkait pengembangan perangkat lunak harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Unit Organisasi terkait;

4. Inisiasi pengembangan perangkat lunak yang menghasilkan sistem baru diselenggarakan oleh unit organisasi terkait dan berkoordinasi dengan Divisi Sistem Informasi yang tertuang dalam suatu *Project Charter* dengan persetujuan dari *Project Sponsor* dan *Project Owner*;
5. Inisiasi pengembangan perangkat lunak terkait dengan perubahan terhadap sistem yang ada diselenggarakan oleh Unit Organisasi terkait dan berkoordinasi dengan Divisi Sistem Informasi yang tertuang dalam suatu *Change Request Form* dengan persetujuan dari pejabat Unit Organisasi terkait;
6. Sebagai dasar acuan pengembangan perangkat lunak harus adanya hasil analisa terhadap proses bisnis maupun perubahannya serta solusi desain fungsi dan sistem yang diusulkan baik dari segi teknis maupun fungsional dalam suatu dokumen dengan persetujuan dari pejabat Divisi Sistem Informasi dan Unit Organisasi terkait;
7. Dalam rangka memastikan program aplikasi hasil proses *development* telah sesuai dengan desain sistem yang diusulkan dan bebas dari kesalahan harus dilakukan uji coba sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:

software development must obtain approval from the relevant Organizational Unit Officer;

4. Initiation of software development that produces a new system is carried out by the relevant organizational units and coordinates with the Information Systems Division as stipulated in a Project Charter with the approval of the Project Sponsor and Project Owner.
5. Initiation of software development related to changes to the existing system is carried out by the relevant Organizational Unit and coordinates with the Information System Division as set forth in a Change Request Form with the approval of the relevant Organizational Unit official.
6. As a basis for software development, there must be an analysis of business processes and their changes and proposal of functional and system design solutions from a technical and functional point of view in a document with the approval of the relevant Information Systems Division and Organization Unit officials.
7. In order to ensure the application program that results from the development process is in accordance with the proposed system design and free from errors, a 3 (three) step trial must be carried out, namely:

Tahap I Phase I	Unit tes aplikasi yang tertuang dalam Berita Acara <i>Unit Test</i> yang ditandatangani pengembang dengan persetujuan dari pejabat Divisi Sistem Informasi. Unit test application as set forth in the Minutes of Unit Test signed by the developer with the approval of the Information Systems Division official.
Tahap II Phase II	<i>System Integration Test</i> aplikasi yang tertuang dalam Berita Acara <i>Integration Test</i> yang ditandatangani pengembang dengan persetujuan dari pejabat Divisi Sistem Informasi dan Unit Organisasi terkait. Dalam tahap II ini juga dilakukan <i>performance test</i> dan <i>security test</i> . System Integration Test application as set forth in the Minutes of Integration Test signed by the developer with the approval of the relevant Information Systems Division official and Organization Unit officials. In stage II, a performance test and security test are also carried out.
Tahap III Phase III	<i>User Acceptance Test</i> aplikasi yang tertuang dalam Berita Acara <i>User Acceptance Test</i> yang ditandatangani para pengguna akhir dengan persetujuan dari pejabat Divisi Sistem Informasi dan Unit Organisasi terkait. User Acceptance Test application as set forth in the Minutes of User Acceptance Test signed by end users with the approval of the officials of the Information Systems Division official and related Organizational Units.

8. Pelaksanaan implementasi sistem (*Go-Live*) akan dilaksanakan setelah adanya pemeriksaan terhadap kesiapan dari aplikasi, infrastruktur, proses, personil dan *scenario rollback* yang tertuang dalam (*Go-Live*) *readiness checklist*/dokumen dengan persetujuan dari pejabat Divisi Sistem Informasi dan Unit Organisasi terkait;
9. Selama pasca implementasi (*Go-Live*) harus adanya pendampingan/*support* terhadap implementasi yang baru berjalan selama periode yang disepakati untuk memastikan dan *me-review* bahwa perangkat lunak telah beroperasi dengan baik yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima dengan persetujuan dari pejabat Divisi Sistem Informasi dan Unit Organisasi terkait;

8. The implementation of system (*Go-Live*) will be carried out after an examination of the readiness of the application, infrastructure, processes, personnel and rollback scenarios contained in the (*Go-Live*) readiness checklist/document with the approval of the Information Systems Division official and related Organizational Unit.
9. During post-implementation (*Go-Live*), there must be assistance/support for the implementation that has just started form the agreed period to ensure and review that the software has been operating properly as set forth in the Handover Minutes with the approval of the System Division officials Information and related Organizational Units.

10. Setiap tahapan pengembangan sistem harus terdokumentasi dengan baik untuk menunjukkan bagaimana sistem yang ada telah beroperasi dan telah memenuhi kebutuhan Perseroan dan agar dapat ditinjau untuk evaluasi pengendalian internal, identifikasi kekuatan dan kelemahannya serta usulan perbaikannya yang mengacu pada pedoman pengembangan perangkat lunak;
11. Bentuk dan teknis operasional pengembangan perangkat lunak harus sesuai dengan kaidah *Software Development Life Cycle* (SDLC).

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KE DEPAN

Rencana pengembangan Sistem Informasi tahun 2020 adalah sesuai dengan fase *world class* pada *corporate roadmap* yaitu:

1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi
 - Implementasi dan pengembangan *Integration Operation Dashboard* (IODB) dan I-Hub (IPC Hub);
 - Pengembangan aplikasi E-Audit (AMS dan *Data Analytic*);
 - Rollout aplikasi e-katalog dan *contract management* di lingkungan IPC;
 - Pengembangan Teknologi Informasi pada Terminal Kijing Cabang Pelabuhan Pontianak;
 - Implementasi tools *Enterprise Release and Version Control* yang merupakan bagian dari peningkatan proses *Release and Deployment Management* pengembangan teknologi informasi guna meningkatkan kehandalan hasil pengembangan;
 - Pengembangan tools IT *Service Management* sebagai single portal layanan teknologi informasi (*incident, problem, request fulfillment management*);
 - Implementasi MOS (*Marine Operating System*) pada cabang pelabuhan;
 - Implementasi E-Service NPK dan NPK *Billing* pada cabang Pelabuhan Panjang;
 - Implementasi *autogate* pada terminal petikemas;
 - Implementasi NPK TOS pada cabang pelabuhan teluk bayur dan pangkal balam;
 - Pengembangan sistem *reporting* kinerja operasional;
 - Implementasi pola operasi berbasis TOS di 3 (tiga) Cabang Pelabuhan;
 - Implementasi NPKS pada cabang Pelabuhan Teluk Bayur;

10. Each stage of system development must be well documented to show how the existing system operates and meets the needs of the Company, so that can be reviewed for evaluation of internal control, identification of strengths and weaknesses and proposed improvements that refer to the software development guidelines.
11. The form and technical operations of software development must be in accordance with the rules of *Software Development Life Cycle* (SDLC).

FUTURE INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT PLAN

The Information System development plan for 2020 is in accordance with the world class phase of the corporate roadmap, namely:

1. Application Development and Implementation
 - Implementation and development of *Integration Operation Dashboard* (IODB) and I-Hub (IPC Hub);
 - Development of E-Audit applications (AMS and *Data Analytic*);
 - Rollout e-catalog application and *contract management* in IPC environment;
 - Development of Information Technology at Kijing Terminal of Pontianak Port Branch;
 - Implementation of *Enterprise Release and Version Control* tools which are part of the improvement of the *Release and Deployment Management* process for developing information technology to improve the reliability of development results;
 - Development of IT *Service Management* tools as a single portal for information technology services (*incident, problem, request fulfillment management*);
 - Implementation of MOS (*Marine Operating System*) at the port branch;
 - Implementation of NPK and NPK *Billing* E-Service at Panjang port branches;
 - Implementation of *autogate* in container terminals;
 - Implementation of NPK TOS in, Teluk Bayur and Pangkal Balam port branches;
 - Development of operational performance reporting systems;
 - Implementation of TOS-based operating patterns in 3 (three) Port Branches;
 - Implementation of NPKS at Teluk Bayur;



- Penyempurnaan *Financial Closing Consolidation* dan AGIS (seluruh cabang dan Entitas Anak);
 - *Roll Out Cash Management* pada cabang Pelabuhan Jambi, Cirebon, Sunda Kelapa, Pangkal Balam dan Tanjung Pandan;
 - Pengembangan sistem *Oracle Project Costing* tahap IV: Entitas Anak IPC;
 - Implementasi Aplikasi Manajemen Talenta dan Pengelolaan Karir melalui modul *Succession Planning*;
 - Peningkatan layanan aplikasi *Self-Service* Nota Jasa Kepelabuhanan di Area Tanjung Priok;
 - Pengembangan sistem *Knowledge management*;
 - Implementasi sistem *monitoring* dan *controlling* dokumen *account payables*;
 - Implementasi *integrated asset management system*;
 - Implementasi sistem administrasi perkantoran dan kearsipan (*E-Office*, *E-Arsip* dan *E-Agenda*).
2. Pengembangan Infrastruktur
- Pengadaan Infrastruktur *Enterprise Data Warehouse* (DWH) sebagai *tool* pendukung *Business Intelligent* dan *Dashboard Analytic*;
 - Pengadaan perangkat *server* sebagai peningkatan kapasitas infrastruktur guna mendukung implementasi digitalisasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
 - Pengembangan perangkat *remote ship management monitoring system* dan *remote crane management monitoring system*.
3. Tata Kelola
- Penyusunan *IT Master Plan 2020 – 2024* yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi yang mendukung visi misi perusahaan. *IT Master Plan* berisikan mengenai kajian strategi bisnis, inisiatif-inisiatif teknologi informasi, *IT enterprise architecture*, trend teknologi informasi, *IT Operating Model* dan tata kelola teknologi informasi;
- Completion of *Financial Closing Consolidation* and AGIS (all branches and subsidiaries);
 - *Roll Out Cash Management* in Jambi, Cirebon, Sunda Kelapa, Pangkal Balam and Tanjung Pandan port branches;
 - Development of *Oracle Project Costing* system phase IV: IPC Subsidiary;
 - Implementation of *Talent Management and Career Management Applications* through the *Succession Planning* module;
 - Improvement of *Self-Service Application* of Port Services at Tanjung Priok Area;
 - Development of *Knowledge management system*;
 - Implementation of *monitoring and controlling system* of *account payables* documents;
 - Implementation of *integrated asset management system*;
 - Implementation of *office and archives administration systems* (*E-Office*, *E-Archive* and *E-Agenda*).
2. Infrastructure Development
- Procurement of *Enterprise Data Warehouse Infrastructure* (DWH) as a support tool for *Business Intelligent* and *Dashboard Analytic*.
 - Procurement of *server equipment* as an increase in infrastructure capacity to support the implementation of digitalization within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 - Development of *remote ship management monitoring system* and *remote crane management monitoring system* devices.
3. Governance
- Preparation of the *IT Master Plan 2020-2024* as a long-term planning document in the development of information systems that support the Company's vision and mission. The *IT Master Plan* contains a study of business strategies, information technology initiatives, *IT enterprise architecture*, information technology trends, *IT Operating Models* and information technology governance;

- Penyusunan *DRP (Disaster Recovery Plan)* untuk *Data Center* dan *Data Recovery Center* untuk seluruh perangkat lunak dan perangkat keras sebagai bagian dari *Business Continuity Management* untuk layanan teknologi informasi;
 - Implementasi *Framework IT Risk Management* untuk melakukan *monitoring* dan mitigasi risiko teknologi informasi;
 - Penyusunan tata kelola *Enterprise Service Bus* dengan mengadopsi *SOA (Service Oriented Architecture)*.
- Preparation of *DRP (Disaster Recovery Plan)* for *Data Center* and *Data Recovery Centers* for all software and hardware as part of *Business Continuity Management* for information technology services;
 - Implementation of *IT Risk Management Framework* to monitor and mitigate information technology risk;
 - Compilation of *Enterprise Service Bus* governance by adopting *SOA (Service Oriented Architecture)*.



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS



Di tengah kondisi perekonomian yang masih menghadapi tantangan, pada tahun 2019 Perseroan berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp2,50 triliun, meningkat 3,01% atau Rp73,10 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp2,43 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan pendapatan konstruksi sebesar Rp761,04 miliar dan pendapatan operasi lainnya-neto sebesar Rp913,48 miliar.

In the midst of continuous challenging economic conditions, in 2019 the Company managed to record income for the year amounted to Rp2.50 trillion, an increase of 3.01% or Rp73.10 billion compared to 2018 of Rp2.43 trillion. The increase was in line with Rp761.04 billion increase in construction revenues and Rp913.48 billion increase in other operating revenues-net.



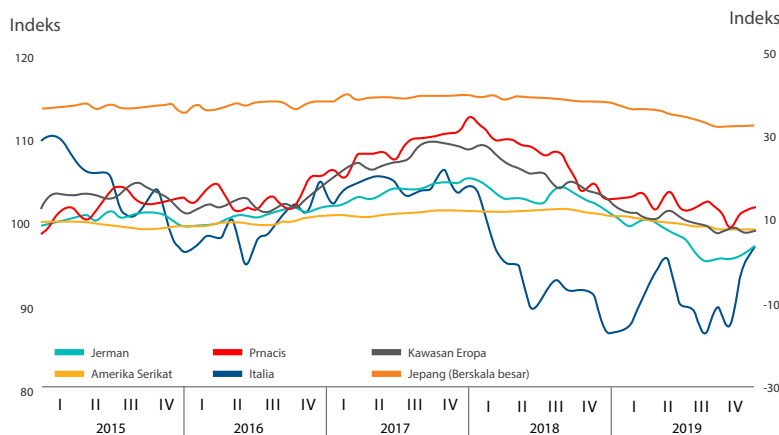


TINJAUAN PEREKONOMIAN ECONOMY REVIEW

Kebijakan ekonomi berorientasi domestik yang berlanjut di banyak negara dominan mempengaruhi dinamika perekonomian global 2019. Ketegangan hubungan perdagangan AS-Tiongkok 2019 menjadi pemicu kondisi ini. Ketegangan hubungan dagang juga meluas antara AS dengan Jepang, Perancis, Jerman, Meksiko, Australia, India, Brazil, dan Argentina, kemudian diikuti retaliasi dari masing-masing negara. Selain itu, risiko geopolitik juga silih berganti makin menambah tidak kondusifnya ekonomi global. Perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) yang terjadi secara berlarut-larut serta isu politik dan reformasi ekonomi di Meksiko, Brazil, Lebanon, dan Aljazair meningkatkan risiko geopolitik dan berpengaruh kepada kondisi ekonomi global. Aksi protes dan kerusuhan yang berkepanjangan di Hong Kong, Iran, Chili, dan Irak turut mengganggu upaya pemulihan ekonomi 2019 di berbagai wilayah Negara berkembang.

The continued domestic-oriented economic policies in many dominant countries influenced the dynamics of 2019 global economy. The tense US-China trade relation in 2019 triggered this condition. The tension of trade relation also extended between the US and Japan, France, Germany, Mexico, Australia, India, Brazil, and Argentina, then followed by retaliation from each country. In addition, geopolitical risk also turned out to increase the non-conductive conditions of global economy. Britain's ongoing exit from the European Union (Brexit) and political issues and economic reforms in Mexico, Brazil, Lebanon and Algeria have added to geopolitical risks and affected global economic conditions. Prolonged protests and riots in Hong Kong, Iran, Chile and Iraq also disrupted the 2019 economic recovery efforts in various regions of developing countries

Grafik Indeks Keyakinan Ekonomi
Graph Economic Confidence Index



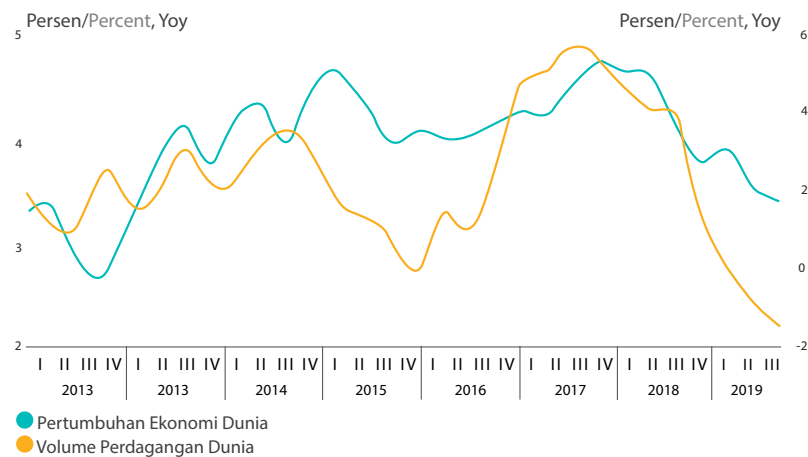
Germany IFO business dimate; France Business Confi. Manuf; Sentix EZ Economy; Italy Business Confidence; Japan OECD Confidende; US OECD Confidence

Sumber: Bloomberg, diolah
Source : Bloomberg, processed data

Kondisi global yang kurang kondusif itu menurunkan pertumbuhan ekonomi global. Ketidakpastian terhadap prospek perdagangan dunia meningkat dan mengakibatkan keyakinan pelaku ekonomi menurun di banyak negara. Kondisi ini kemudian mengakibatkan volume perdagangan dunia pada 2019 berkontraksi sebesar 0,2%, terendah sejak krisis finansial global. Perkembangan yang kurang menguntungkan tersebut selanjutnya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global melambat secara merata, baik di negara maju maupun negara berkembang. Pada 2019, ekonomi global hanya tumbuh 2,9%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 3,6%, terendah sejak krisis finansial global. Ekonomi negara maju dan negara berkembang tumbuh 1,7% dan 3,7% pada 2019, melambat dibandingkan dengan kinerja 2018 masing-masing sebesar 2,2% dan 4,5%

The unfavorable global conditions have reduced the growth of global economy. Uncertainty about the prospects of world trade increased and caused the confidence of economic actors to decline in many countries. This condition then contracted the volume of world trade in 2019 by 0.2%, the lowest since the global financial crisis. These unfavorable developments subsequently resulted in the slowing growth of global economy evenly, both in developed and developing countries. In 2019, the global economy only grew 2.9%, slowing compared to 2018 growth of 3.6%, the lowest since the global financial crisis. The economies of developed and developing countries grew 1.7% and 3.7% in 2019, slowing compared to 2018 performance of 2.2% and 4.5%, respectively.

Grafik Pertumbuhan dan Volume Perdagangan Dunia
Graph Growth and Volume of World Trade



Sumber: IMF, Consensus Forecast, CPB, diolah
Source : IMF, Consensus Forecast, CPB, processed data

Tabel Pertumbuhan Ekonomi
Table Economic Growth

Negara/Kelompok Negara Country/Country Group	2019 ¹⁾	2018	2017	2016	2015
Dunia World	2,9	3,6	3,8	3,4	3,5
Negara Maju Developed countries	1,7	2,2	2,5	1,7	2,3
Amerika Serikat United States	2,3	2,9	2,4	1,6	2,9
Eropa Europe	1,2	1,9	2,5	1,9	2,1
Jepang Japan	0,7	0,3	1,9	0,6	1,2
Negara Berkembang Developing country	3,7	4,5	4,8	4,6	4,3
Asia Asian	5,6	6,4	6,6	6,7	6,8
Tiongkok China	6,1	6,6	6,8	6,7	6,9
India ²⁾ India ²⁾	5,3	6,8	7,2	8,2	8,0
Amerika Latin Latin Amerika	0,1	1,1	1,2	(0,6)	0,3
Eropa Timur East Europe	1,8	3,1	3,9	1,8	0,8
Timur Tengah dan Asia Tengah Middle East and Central Asia	0,8	1,9	2,3	5,0	2,6
Afrika Sub Sahara Sub Saharan Africa	3,3	3,2	3,0	1,4	3,1

Sumber: World economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) Oktober 2019, WEO IMF update Januari 2019, Bloomberg

1) Berdasarkan rilis negara sampai dengan Maret 2020
2) Menggunakan Tahun Fiskal

Source: World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) October 2019, WEO IMF update January 2019, Bloomberg

1) Based on country releases until March 2020
2) Using Fiscal Year

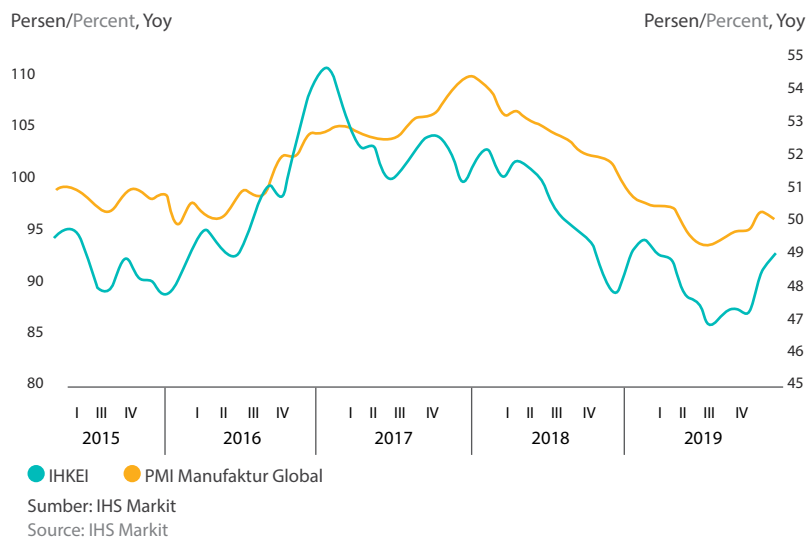


Perang dagang berdampak meluas bahkan ke sektor jasa dan tenaga kerja. Ketegangan perdagangan tidak hanya memicu pelemahan perdagangan barang dunia, namun juga sudah berdampak pada aktivitas ekonomi lainnya, yakni sektor jasa dan pasar tenaga kerja. Kondisi ini semakin mengonfirmasi pelemahan ekonomi yang meluas ke negara yang tidak hanya ditopang oleh sektor industri, namun juga ke negara yang ditopang oleh sektor jasa. Selain itu, sentimen bisnis yang memburuk dan pelemahan ekonomi mulai berdampak ke pembukaan lapangan tenaga kerja dan upah yang menurun di beberapa negara.

Trade wars have a wider impact, even on the service and labor sector. Trade tensions have not only triggered the weakening of world trade in goods, but have also impacted on other economic activities, namely the service sector and the labor market. This condition further confirmed the economic weakness that extended to countries that are not only supported by the industrial sector, but also to countries that are supported by the service sector. In addition, the deteriorating business sentiment and weakening economy have begun to impact employment opportunities and declining wages in several countries.

Grafik Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia (IHKEI) dan *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur Global

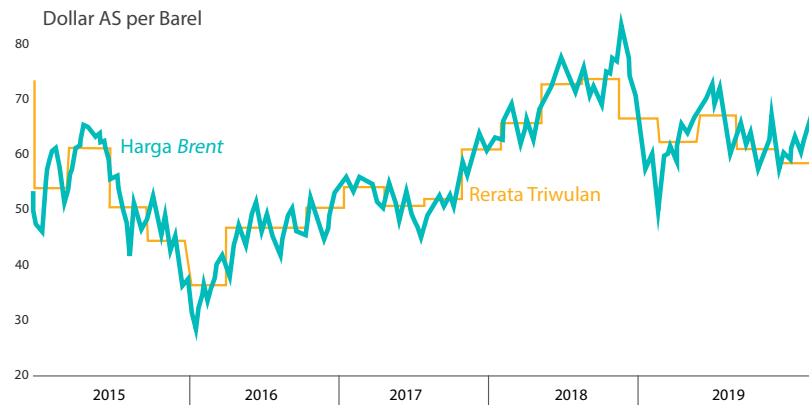
Graph Indonesian Export Commodity Price Index (IHKEI) and Global Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI)



Akibat ketegangan perdagangan, kinerja ekonomi AS dan Tiongkok memburuk sepanjang 2019 dan diikuti dengan tekanan inflasi yang lemah. Perkembangan ketegangan hubungan perdagangan menekan ekonomi AS dan Tiongkok sehingga berada pada lintasan melambat. Perlambatan AS juga terjadi akibat dari mulai berkurangnya dampak stimulus fiskal tahun 2018. Sementara itu, Tiongkok tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan kondisi satu dekade lalu sebagai konsekuensi dari kebijakan *rebalancing* ekonomi dan *deleveraging* sistem finansial. Ketegangan perdagangan pada akhirnya memukul aktivitas perdagangan serta investasi kedua negara.

As a result of trade tensions, the performance of the US and Chinese economies worsened throughout 2019 and was followed by weak inflationary pressures. The development of trade relation tensions put pressure on the US and Chinese economies to slow down. The US slowdown also occurred as a result of the reduced fiscal stimulus from 2018. Meanwhile, China grew slower than it was a decade ago as a consequence of economic rebalancing policies and deleveraging the financial system. Trade tensions eventually hit the trade and investment activities of the two countries.

Grafik Perkembangan Harga Minyak Dunia
Graph Developments in World Oil Prices

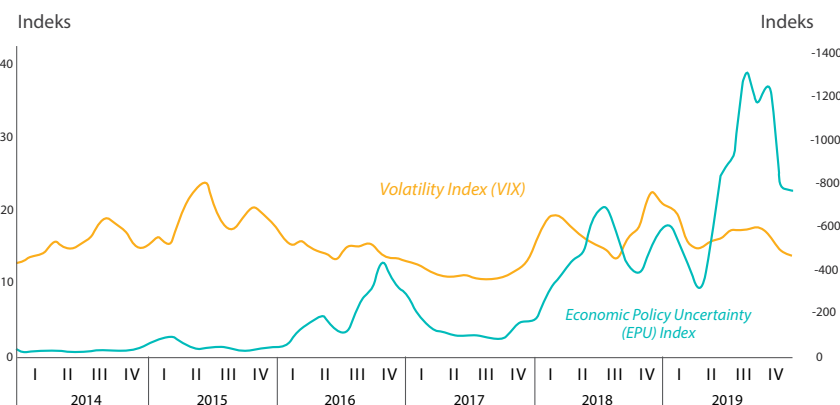


Sumber: Bloomberg, diolah
Source : Bloomberg, processed data

Volume perdagangan dunia dan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat berdampak pada menurunnya harga komoditas global. Ketegangan perdagangan berpengaruh pada lesunya investasi sehingga menekan harga logam dunia. Stimulus fiskal melalui pembangunan infrastruktur di Tiongkok yang baru diaktifkan pada semester II 2019 hanya berdampak terbatas pada harga logam dunia. Harga batu bara juga melemah, dipengaruhi oleh kampanye ekonomi hijau di beberapa negara, sehingga berisiko menurunkan permintaan batu bara dalam jangka panjang, termasuk dari Tiongkok dan Kawasan Eropa. Selain itu, harga minyak dunia juga terkoreksi tajam akibat permintaan global yang melambat di tengah pemotongan suplai minyak oleh negara-negara anggota OPEC. Rerata harga minyak dunia pada 2019 tercatat sebesar 65 dolar AS per barel, menurun dibandingkan rerata harga pada 2018 sebesar 71 dolar AS per barel.

The slowing volume of world trade and world economic growth have impacted the decline in global commodity prices. Trade tensions have an impact on sluggish investment, which has pushed down the world metal prices. Fiscal stimulus through infrastructure development in China which was only activated in the second semester of 2019 had only a limited impact on world metal prices. Coal prices also weakened, influenced by green economy campaigns in several countries, thus risking reducing coal demand in the long run, including from China and the European Region. In addition, world oil prices have also been sharply corrected due to slowing global demand amid cuts in oil supply by OPEC member countries. The average world oil price in 2019 was recorded at US \$ 65 per barrel, a decrease from the average price in 2018 of US \$ 71 per barrel.

Grafik Indikator Ketidakpastian
Graph Indicators of Uncertainty



Sumber: Bloomberg
Source : Bloomberg



Perekonomian global yang melambat telah mendorong ketidakpastian di pasar keuangan dunia tetap tinggi dan memengaruhi pola arus modal global. Ketidakpastian di pasar keuangan dunia meningkat sampai dengan Triwulan III 2019, tercermin pada beberapa indikator ketidakpastian dan risiko global, seperti *Volatility Index (VIX)* dan *Economic Policy Uncertainty (EPU) Index* yang meningkat sampai dengan 19 dan 1947. Perkembangan yang kurang menguntungkan ini kemudian memicu melambatnya aliran masuk modal asing ke negara berkembang. Perekonomian AS yang juga menguat dan imbal hasil AS yang menarik turut menurunkan aliran modal ke negara berkembang karena permintaan terhadap surat utang Pemerintah AS meningkat.

Bahkan, kondisi ini sempat memicu terjadinya fenomena inversi yield pada Triwulan III 2019. Secara keseluruhan, berbagai dinamika ini berdampak pada melambatnya arus modal asing ke negara berkembang dan memberikan tekanan kepada banyak mata uang negara berkembang.

The slowing global economy has encouraged an uncertainty on world financial market to be able to remain high and influenced the pattern of global capital flows. Uncertainty on world financial market increased until the third Quarter of 2019, reflected in several indicators of global uncertainty and risk, such as the *Volatility Index (VIX)* and the *Economic Policy Uncertainty (EPU) Index*, which increased to 19 and 1947. This unfavorable development then triggered the slowing of capital inflows to developing countries. The strength of the US economy and attractive US yields also helped to reduce capital inflows to developing countries as demand for US government debt increased.

In fact, this condition had triggered the yield inversion phenomenon in the 3rd Quarter of 2019. Overall, these dynamics have an impact on slowing the flow of foreign capital into developing countries and putting pressure on many currencies of developing countries.

Grafik Fenomena Inversi Imbal Hasil
Graph Yield Inversion Phenomenon

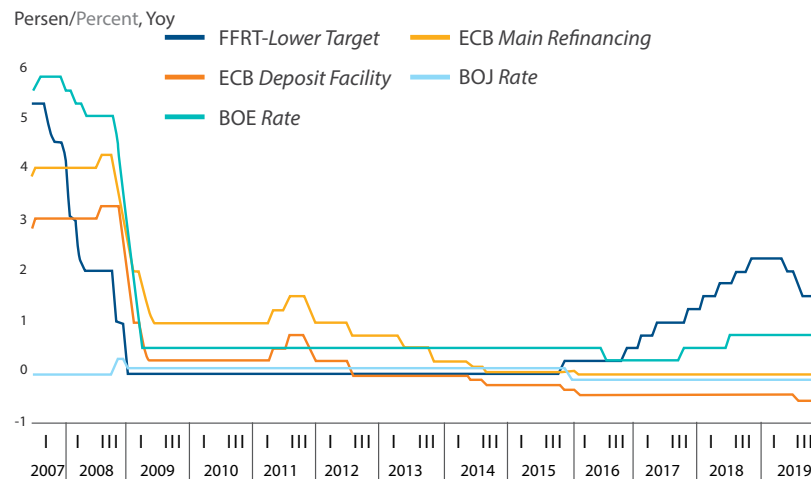


Sumber: Bloomberg
Source : Bloomberg

Banyak negara merespons risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan menempuh pelonggaran kebijakan moneter. Kebijakan moneter global akomodatif ditempuh banyak bank sentral dengan menurunkan suku bunga kebijakan. Di Negara maju, The Fed sejak Juli 2019 telah menurunkan *Fed Funds Rate (FFR)* sebanyak 3 (tiga) kali dengan total penurunan 75 basis points (bps) sehingga menjadi 1,50-1,75% pada akhir 2019. European Central Bank (ECB) menempuh kebijakan ekstra akomodatif dengan menurunkan Deposit.

Many countries responded to the risk of slowing economic growth by taking monetary policy easing. Accommodative global monetary policy has been adopted by many central banks by reducing policy rates. In developed countries, the Fed since July 2019 has reduced the *Fed Funds Rate (FFR)* 3 (three) times with a total reduction of 75 basis points (bps) to 1.50-1.75% at the end of 2019. European Central Bank (ECB) pursued extra accommodative policies by reducing Deposits.

Grafik Suku Bunga Acuan
Graph Policy Rates



Sumber: IMF, Consensus Forecast, CPB, diolah
Source : IMF, Consensus Forecast, CPB, processed data

Rate menjadi -0,5%. Pelonggaran kebijakan moneter juga dilakukan oleh banyak negara berkembang. Bank Sentra India (RBI) menurunkan suku bunga acuan sebanyak 5 (lima) kali atau sebesar 135 bps selama tahun 2019. Bank sentral Tiongkok (PBoC) menurunkan pula berbagai instrumen suku bunga, antara lain *Medium-term Lending Facility Rate* (MLF), *Loan Prime Rate* (LPR) dan *7-day Reverse Repo Rate*. Pelonggaran kebijakan moneter yang ditempuh sejumlah bank sentral turut disertai dengan kebijakan pelonggaran di sisi likuiditas, seperti melalui kebijakan *quantitative easing* (QE), *lending facility*, dan pelonggaran giro wajib minimum.

The rate became -0.5%. Easing monetary policy was also carried out by many developing countries. The Indian Central Bank (RBI) reduced the benchmark interest rate 5 (five) times or by 135 bps during 2019. The Chinese central bank (PBoC) also lowered various interest rate instruments, including the *Medium-term Lending Facility Rate* (MLF), *Loans Prime Rate* (LPR) and *7-day Reverse Repo Rate*. The easing of monetary policy pursued by a number of central banks was accompanied by a policy of easing on the liquidity side, such as through *quantitative easing* (QE) policies, *lending facilities*, and easing mandatory minimum demand deposits.

ANALISIS PEREKONOMIAN NASIONAL

Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil meskipun kondisi perekonomian global mengalami guncangan dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan stabil dalam kisaran 5%-6% dengan tren meningkat sepanjang 2015-2019. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%.

Pertumbuhan ekonomi global yang melambat berdampak pada turunnya kinerja ekspor Indonesia 2019. Ekspor 2019 berkontraksi 0,87%, berbalik arah dari kinerja 2018 yang tumbuh 6,55%. Penurunan ekspor tercatat cukup dalam pada semester I 2019, sebelum sedikit berkurang pada semester II 2019 ditopang oleh peningkatan permintaan beberapa produk ekspor, seperti *Crude Palm Oil* (CPO) dan batu bara. Perbaikan ekspor di beberapa komoditas merupakan dampak diversifikasi produk dan tujuan

NATIONAL ECONOMIC ANALYSIS

Indonesia has a fairly stable economic growth even though global economic conditions have been shaken in the last few years. Indonesia's economic growth has remained stable in the range of 5%-6% with an upward trend throughout 2015-2019. Nevertheless, Indonesia's economic growth in 2019 grew by 5.02%, lower than the achievement in 2018 at 5.17%.

Slowing global economic growth has an impact on the decline in Indonesia's export performance in 2019. 2019 exports contracted 0.87%, reversing the direction of the 2018 performance which grew 6.55%. The significant decline in exports was recorded in the first semester of 2019, before slightly reduced in the second semester of 2019, supported by an increase in demand for some export products, such as *Crude Palm Oil* (CPO) and coal. The improvement in exports in several commodities was the impact of product diversification



ekspor, serta beberapa kebijakan domestik. Diversifikasi produk ekspor didukung daya saing yang membaik sehingga menopang kinerja positif beberapa produk ekspor seperti produk besi baja, otomotif, *pulp* dan *waste paper*, emas, dan serat tekstil. Tujuan ekspor juga meluas seperti ke pasar ASEAN dan Arab Saudi, khususnya untuk produk besi baja. Sementara itu, beberapa kebijakan domestik memengaruhi perbaikan kinerja ekspor komoditas nikel dan tembaga.

Di tengah kinerja sektor eksternal yang kurang menguntungkan, permintaan domestik tetap kuat sehingga menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 tetap baik yakni 5,02%. Konsumsi swasta sedikit meningkat didukung oleh daya beli yang terpelihara sejalan dengan pendapatan yang terjaga dan inflasi yang rendah, serta keyakinan konsumen yang baik. Konsumsi swasta juga didukung oleh dampak penyelenggaraan Pemilu 2019 sehingga meningkatkan pertumbuhan konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM). Kinerja investasi tetap baik, terutama didukung investasi bangunan yang tetap tinggi didorong oleh pembangunan infrastruktur dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta kinerja konstruksi swasta yang meningkat. Sementara itu, investasi nonbangunan menurun dipengaruhi kontraksi ekspor dan permintaan domestik yang tidak sekuat tahun sebelumnya. Daya tahan perekonomian yang tetap baik juga dipengaruhi proses penyesuaian ekonomi domestik terhadap gejolak eksternal sehingga mendorong penurunan impor.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum tetap berdaya tahan, dengan capaian 5,02% pada 2019. Perkembangan ini didukung oleh penyesuaian ekonomi domestik yang berjalan baik dalam merespons gejolak eksternal. Impor yang menurun dapat menyerap gejolak global sehingga pertumbuhan secara triwulanan berada di atas 5,0% sampai dengan Triwulan III 2019, sebelum turun menjadi 4,97% pada Triwulan IV 2019. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kinerja 2018 sebesar 5,17%, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tetap baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara berkembang lain di Asia, kecuali pertumbuhan ekonomi Tiongkok, India, dan Filipina.

and export destinations, as well as several domestic policies. Diversification of export products was supported by improved competitiveness that sustained the positive performance of several export products such as steel, automotive products, pulp and waste paper, gold, and textile fibers. The export destination was also expanding as to the ASEAN and Saudi Arabia markets, especially for steel products. Meanwhile, a number of domestic policies have influenced the improvement in nickel and copper commodity export performance.

In the midst of unfavorable external sector performance, domestic demand remained strong so as to sustain Indonesia's economic growth in 2019 to remain good at 5.02%. Private consumption increased slightly supported by maintained purchasing power in line with maintained income and low inflation, and good consumer confidence. Private consumption was also supported by the impact of the holding of the 2019 General Elections, thereby increasing the consumption growth of Nonprofit Institutions Serving Households (LNPRM). Investment performance remained good, mainly supported by building investment that remained high driven by infrastructure development and the construction of the National Strategic Project (PSN), as well as improved private construction performance. Meanwhile, non-construction investment declined due to contraction in exports and domestic demand, which was not as strong as the previous year. The resilience of the economy that remained to be good was also influenced by the process of adjusting the domestic economy to external shocks, thereby driving down imports.

With these various developments, Indonesia's economic growth in general remained resilient, achieving 5.02% in 2019. This development was supported by the well adjustment of the domestic economy in response to external shocks. Declining imports were able to absorb global shocks, so that quarterly growth was above 5.0% up to the 3rd Quarter of 2019, before falling to 4.97% in Quarter IV 2019. Although lower than the 2018 performance of 5.17%, Indonesia's economic growth was better compared to the economic growth of other developing countries in Asia, except economic growth in China, India and the Philippines.

Tabel Produk Domestik Bruto (PDB) Sisi Pengeluaran (dalam %)
Table Gross Domestic Product (GDP) Expenditure Side (in%)

Komponen PDB GDP component	2019					2018	2017	2016	2015
	Total	IV	III	II	I				
Permintaan Domestik ¹⁾ Domestic Demand ¹⁾	4,76	4,16	4,44	5,34	5,18	5,62	5,13	4,39	4,94
Konsumsi Swasta Private consumption	5,16	4,93	5,06	5,40	5,27	5,14	4,98	5,04	4,84

Tabel Produk Domestik Bruto (PDB) Sisi Pengeluaran (dalam %)
Table Gross Domestic Product (GDP) Expenditure Side (in%)

Komponen PDB GDP component	2019					2018	2017	2016	2015
	Total	IV	III	II	I				
Konsumsi Rumah Tangga (RT) Household Consumption (RT)	5,04	4,97	5,01	5,18	5,02	5,05	4,94	5,01	4,96
Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) Consumption of Household Non-Profit Institution (LNPRT)	10,62	3,53	7,41	15,29	16,96	9,10	6,93	6,64	(0,62)
Konsumsi Pemerintah Government Consumption	3,25	0,48	0,98	8,23	5,22	4,80	2,12	(0,14)	5,31
Investasi Investment	2,35	0,98	2,95	1,70	3,82	8,49	5,69	4,99	3,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Formation of Gross Fixed Capital (PMTB) Building	4,45	4,06	4,21	4,55	5,03	6,64	6,15	4,47	5,01
Bangunan Buildings	5,37	5,53	5,03	5,46	5,48	5,41	6,24	5,18	6,11
Non Bangunan Non Buildings	1,80	(0,13)	1,95	1,96	3,69	10,31	5,90	2,43	1,93
Perubahan Inventori ¹⁾ Inventory Changes ¹⁾	(0,65)	(1,07)	(0,37)	(0,85)	(0,29)	0,71	(0,07)	0,23	(0,59)
Net Ekspor ²⁾ Net Export ²⁾	1,43	1,69	1,77	1,01	1,21	(0,94)	0,30	0,13	0,94
Ekspor Export	(0,87)	(0,39)	0,10	(1,73)	(1,58)	6,55	8,90	(1,66)	(2,12)
Impor Import	(7,69)	(8,05)	(8,30)	(6,84)	(7,47)	11,88	8,07	(2,41)	(6,25)
PDB GDP	5,02	4,97	5,02	5,05	5,07	5,17	5,07	5,03	4,88

¹⁾ Permintaan Domestik adalah Pengeluaran Konsumsi (Swasta + Pemerintah) dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

²⁾ Kontribusi terhadap PDB

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

¹⁾ Domestic Demand is Consumption Expenditure (Private + Government) and Formation of Gross Domestic Fixed

²⁾ Contribution to GDP

Source: Central Bureau of Statistics, processed data

Perkembangan positif pada konsumsi dan investasi bangunan secara sektoral ditopang oleh beberapa sektor tersier dan sektor konstruksi. Konsumsi yang tetap kuat mendorong kinerja sektor transportasi, pergudangan, informasi, dan komunikasi tumbuh 8,06%, lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya sekitar 7,04%. Selain itu, sektor konstruksi juga tetap kuat sejalan dengan investasi bangunan yang tetap tinggi, ditopang oleh proyek infrastruktur pemerintah. Hal berbeda diperlihatkan pertumbuhan sektor sekunder yang tercatat lebih terbatas. Pertumbuhan industri pengolahan melambat menjadi 3,80% sejalan dengan kinerja ekspor dan investasi nonbangunan

The positive developments in construction sector consumption and investment were supported by a number of tertiary sectors and construction sector. Consumption that remained strong pushed the performance of the transportation, warehousing, information and communication sectors to grow 8.06%, higher than the previous year's achievement of around 7.04%. In addition, the construction sector also remained strong in line with construction investment that remained high, supported by government infrastructure projects. Different conditions were shown by the growth of the secondary sector which was recorded more limited. The growth of the manufacturing industry slowed to 3.80% in line with declining



yang menurun. Selain itu, pertumbuhan sektor primer, terutama sektor pertambangan, juga hanya tumbuh 1,22% pada 2019, dipengaruhi oleh permintaan global yang melambat.

export performance and non-construction investment. Besides that, the growth of the primary sector, especially the mining sector, also only grew 1.22% in 2019, influenced by slowing global demand.

Tabel Pertumbuhan Ekonomi Sisi lapangan Usaha (dalam %)
Table Economic Growth Side of the Business Field (in%)

Komponen Component	2019	2019				2018	2018				2017
		IV	III	II	I		IV	III	II	I	
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan Agriculture, Animal Husbandry, Forestry, and Fisheries	3,64	4,26	3,12	5,33	1,82	3,94	3,87	3,66	4,72	3,34	3,87
Pertambangan dan Penggalian Mining and excavation	1,22	0,94	2,43	(0,71)	2,32	2,16	2,25	2,67	2,65	1,06	0,66
Industri Pengolahan Processing industry	3,80	3,66	4,14	3,54	3,85	4,27	4,25	4,35	3,88	4,60	4,29
Listrik, Gas, Air Bersih dan Pengadaan Air ¹⁾ Electricity, Gas, Clean Water and Water Supply ¹⁾	4,24	5,96	3,83	2,65	4,48	5,48	5,64	5,62	7,29	3,33	1,76
Konstruksi Construction	5,76	5,79	5,65	5,69	5,91	6,09	5,58	5,79	5,73	7,35	6,80
Perdagangan dan Penyediaan Akomodasi dan Mamin ²⁾ Commerce and Accommodation and Food and Beverage ²⁾	4,84	4,65	4,61	4,80	5,34	5,10	4,68	5,39	5,29	5,02	4,63
Transportasi, Pergudangan, Informasi dan Komunikasi ³⁾ Transportation, Warehousing, Information and Communication ³⁾	8,06	8,75	8,09	7,93	7,45	7,04	6,35	7,01	6,70	8,12	9,12
Jasa Keuangan, real Estate dan jasa Perusahaan ⁴⁾ Financial Services, Real Estate and Company services ⁴⁾	7,07	8,04	6,94	6,03	7,26	4,82	6,13	4,47	4,22	4,63	5,43

Tabel Pertumbuhan Ekonomi Sisi lapangan Usaha (dalam %)
Table Economic Growth Side of the Business Field (in%)

Komponen Component	2019	2019				2018	2018				2017
		IV	III	II	I		IV	III	II	I	
Jasa-Jasa Lainnya *****)	6,81	5,45	6,43	8,41	7,12	6,83	6,82	7,68	6,85	6,01	4,37
Other Services *****)											
PDB GDP	5,02	4,97	5,02	5,05	5,07	5,17	5,18	5,17	5,27	5,06	5,07

*) Penggabungan 2 Lapangan Usaha (i) Pengadaan Listrik dan Gas dan (ii) Pengadaan Air

***) Penggabungan 2 Lapangan Usaha (i) Pengadaan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor serta (ii) Penyediaan Akomodasi dan Mamin

*****) Penggabungan 2 Lapangan Usaha (i) Transportasi dan Pergudangan serta (ii) Informasi dan komunikasi

*****) Penggabungan 3 Lapangan Usaha (i) Jasa Keuangan, (ii) Relu Estate dan (iii) Jasa Perusahaan

*****) Penggabungan 4 Lapangan Usaha (i) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, jaminan Sosial Wajib, (ii) Jasa Pendidikan, (iii) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya dan (iv) Jasa Lainnya

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

*) Merging of 2 Business Sectors (i) Electricity and Gas and (ii) Provision of Water

*****) Merging of 2 Business Sectors (i) wholesale and retail trade, Car and Motorcycle Repair and (ii) Accommodation and Food & Beverage

*****) Merging of 2 Business Sectors (i) Transportation and Warehousing and (ii) Information and communication

*****) Merging 3 Business Sectors (i) Financial Services, (ii) Real Estate and (iii) Corporate Services

*****) Merging 4 Business Sectors (i) Government Administration, Defense, Social Security, (ii) Educational Services, (iii) Health Services and Other Activities and (iv) Other Services

Source: Central Bureau of Statistics, processed data

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi domestik yang terjaga pada 2019 berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, tercermin pada menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Daya tahan pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap baik ditopang respons banyak daerah yang mengoptimalkan perdagangan antardaerah serta meningkatkan nilai tambah produk. Secara spasial, daya tahan pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perlambatan ekonomi global ditopang oleh perdagangan antardaerah. Perdagangan antardaerah menopang konsumsi swasta domestik yang tetap kuat, termasuk melalui perdagangan produk minyak sawit terkait dengan implementasi program B20 dan kebijakan hillirisasi produk tambang. Perkembangan tersebut mendukung kenaikan pertumbuhan ekonomi di Sumatera dari 4,55% (YoY) pada 2018 menjadi 4,57% (YoY) pada 2019. Pertumbuhan ekonomi Bali- Nusa Tenggara (Balinusra) juga meningkat, menjadi 5,07% (YoY), antara lain didukung oleh perbaikan ekspor komoditas tembaga dan bijih nikel. Hal yang sama terlihat pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan, yang juga didukung oleh perbaikan ekspor komoditas primer, antara lain ekspor batu bara ke Tiongkok. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa dan Sulampua (Sulawesi-Maluku-Papua) melambat, terutama dipengaruhi oleh ekspor yang menurun, serta kendala

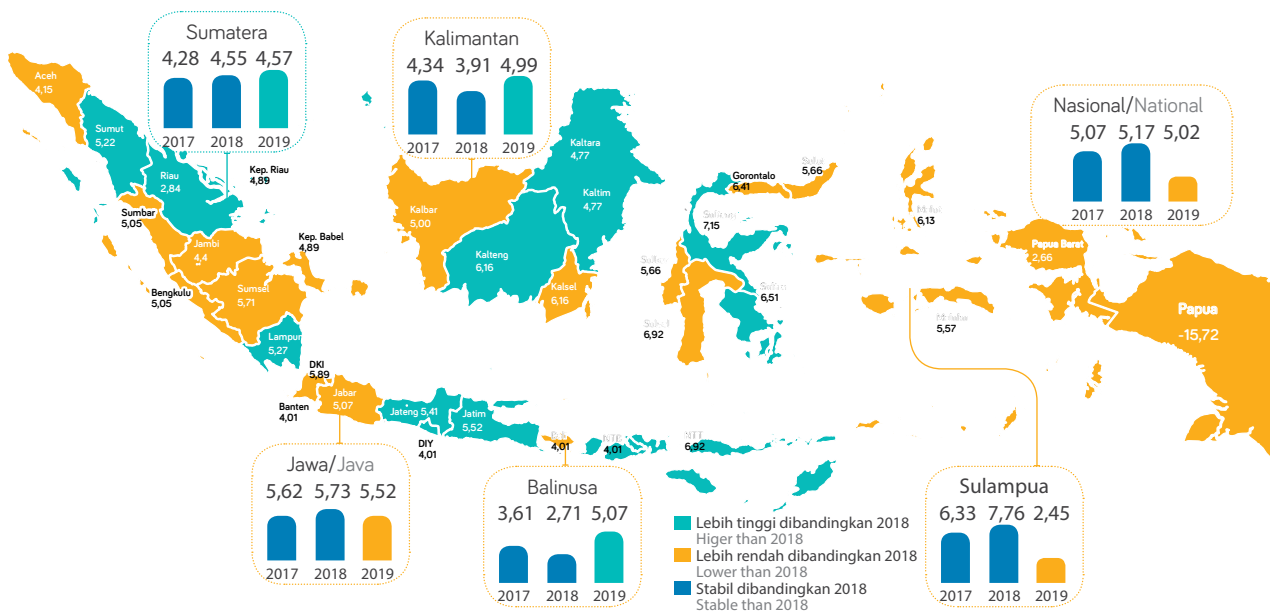
Overall, the maintained domestic economic growth in 2019 has a positive impact on the welfare of society, reflected in the reduction in poverty and unemployment. The resilience of domestic economic growth that remained good was supported by the response of many regions that optimize trade between regions and increase product added value. Spatially, the resilience of domestic economic growth amid the global economic slowdown was supported by trade between regions. Inter-regional trade supported domestic private consumption that remained strong, including through trade in palm oil products related to the implementation of the B20 program and the policy of hill productization. This development supported the increase in economic growth in Sumatra from 4.55% (YoY) in 2018 to 4.57% (YoY) in 2019. Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) economic growth also increased, to 5.07% (YoY), partly supported by improved exports of copper and nickel ore commodities. The same thing was seen in Kalimantan's economic growth, which was also supported by improvements in exports of primary commodities, including coal exports to China. Meanwhile, economic growth in the regions of Java and Sulampua (Sulawesi-Maluku-Papua) slowed, mainly influenced by declining exports, and constraints on copper production in Sulampua. Overall, in 2019 there were 14 out of 34 provinces that grew higher than the previous year's



produksi tembaga di Sulampua. Secara keseluruhan, pada 2019 terdapat 14 dari 34 provinsi yang tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap terjaga pada 2019 berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Tren penurunan tingkat kemiskinan sejak 2015 berlanjut dan tercatat 9,22% pada September 2019. Penurunan terjadi secara merata, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Ketimpangan juga menurun, tercermin dari penurunan rasio gini pada September 2019 yang mencapai 0,38, lebih rendah dibandingkan dengan kondisi September 2018. Penurunan ini didorong oleh perbaikan distribusi pengeluaran pada kelompok menengah bawah dan dampak penyaluran bansos, baik di perkotaan maupun perdesaan. Sejalan dengan itu, pengangguran terbuka 2019 juga menurun dari 5,34% pada Agustus 2018 menjadi 5,28% pada Agustus 2019. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga tumbuh 67,49%, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada 2018. Penyerapan tenaga kerja formal juga meningkat, sedangkan penyerapan tenaga kerja informal menurun.

growth. The maintained domestic economic growth in 2019 had positive impact on people's welfare. The trend of decreasing poverty rates since 2015 continued and recorded at 9.22% in September 2019. The decline occurred evenly, both in urban and rural areas. Inequality also decreased, reflected in the decline in the Gini ratio in September 2019 which reached 0.38, lower than the condition in September 2018. This decline was driven by an improvement in expenditure distribution in the lower middle class and the impact of social assistance distribution, both in urban and rural areas. Correspondingly, 2019 open unemployment also declined from 5.34% in August 2018 to 5.28% in August 2019. Meanwhile, the labor force participation rate (TPAK) also grew 67.49%, higher than the level of participation in 2018. Absorption of formal labor also increased, while absorption of informal labor declined.

Gambar Pertumbuhan Ekonomi Spasial
Figure Spatial Economic Growth



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah
Source: Central Bureau of Statistics, processed data

Perekonomian domestik yang tetap berdaya tahan mendorong kenaikan aliran masuk modal asing, menopang surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), dan memperkuat nilai tukar Rupiah. NPI 2019 tercatat surplus 4,68 miliar dolar AS, berbalik arah dari kondisi 2018 yang mengalami defisit sebesar 7,13 miliar dolar AS. Surplus NPI 2019 didukung oleh kenaikan surplus Transaksi Modal dan Finansial (TMF) sejalan terjaganya optimisme investor terhadap prospek perekonomian domestik dan tingginya daya tarik pasar keuangan domestik, serta menurunnya ketidakpastian pasar keuangan dunia pada Triwulan IV-2019. Defisit transaksi berjalan yang menurun menjadi 2,72% dari PDB juga mendukung surplus NPI 2019.

Cadangan devisa juga meningkat menjadi 129,18 miliar dolar AS atau setara dengan pembayaran 7,33 bulan impor dan ULN pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Kinerja sektor eksternal yang positif kemudian berkontribusi pada apresiasi nilai tukar Rupiah, yang secara rerata menguat 0,76% dan secara *point-to-point* (ptp) menguat 3,58% sehingga ditutup di level Rp13.883 per dolar AS pada akhir 2019. Stabilitas nilai tukar Rupiah juga didukung struktur pasar valas yang makin dalam dan efisien, termasuk pasar *Domestic Non Deliverable Forward* (DNDF) yang terus meningkat. Inflasi juga tetap rendah dan terkendali sehingga mendukung stabilitas makroekonomi. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2019 tercatat 2,72%, menurun dibandingkan dengan capaian 2018 yang mencapai 3,13%.

ANALISIS INDUSTRI PELABUHAN

Di era VUCA - *Volatile* (bergejolak), *Uncertain* (tidak pasti), *Complex* (kompleks), dan *Ambigüe* (tidak jelas) terdapat beberapa tren yang telah terjadi dalam industri kepelabuhanan dunia pada tahun 2019, diantaranya:

- Inisiatif Belt and Road & United State (US)-China Trade war*
- Relation Game Change*
- Automation and Green port*
- Penentuan *Hub Port* di Indonesia oleh Presiden

Secara detail masing-masing trend tersebut sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

INISIATIF BELT AND ROAD & US-CHINA TRADE WAR

Inisiatif Belt and Road digagas oleh Tiongkok yang akan mendorong arus dan volume transportasi kapal di Asia Tenggara. *Inisiatif 21st Century Maritime Silk Road* (MSR) merupakan bagian dari inisiatif *Belt and Road* (BRI) dari President Xi Jinping untuk mendukung kooperasi arus perdagangan laut dan meningkatkan konektivitas antar wilayah yang diprediksikan mendorong peningkatan *shipping*

The domestic economy, which has remained resilient, has pushed up foreign capital inflows, sustained Indonesia's balance of payments (NPI), and strengthened the Rupiah exchange rate. The 2019 NPI recorded a surplus of 4.68 billion US dollars, reversing the direction of the 2018 conditions which experienced a deficit of 7.13 billion US dollars. The 2019 NPI surplus was supported by an increase in the Capital and Financial Transaction (TMF) surplus in line with sustained investor optimism about the outlook for the domestic economy and the high attractiveness of the domestic financial market, as well as reduced uncertainty on world financial markets in the 4th Quarter of 2019. The current account deficit, which declined to 2.72% of GDP, also supported the 2019 surplus.

Foreign exchange reserves also increased to 129.18 billion US dollars, equivalent to the payment of 7.33 months of imports and government external debt, and were above the international adequacy standard of about three months of imports. The positive external sector performance then contributed to the appreciation of the Rupiah exchange rate, which averaged 0.76% and *point-to-point* (ptp) strengthened 3.58% to close at Rp13,883 per US dollar at the end of 2019. The stability of the Rupiah exchange rate was also supported by a deeper and more efficient foreign exchange market structure, including the increasing *Domestic Non Deliverable Forward* (DNDF) market. Inflation also remained low and under control, hence supported the macroeconomic stability. Consumer Price Index (CPI) inflation in 2019 was recorded at 2.72%, a decrease compared with 2018 achievement reaching 3.13%.

PORT INDUSTRY ANALYSIS

In the era of VUCA - *Volatile*, *Uncertain*, *Complex*, and *Ambigüe*, there are several trends that have occurred in the world port industry in 2019, including:

- Belt and Road & United State (US) -China Trade war initiative*
- Relation Game Change*
- Automation and Green port*
- Establishment of the *Hub Port* in Indonesia by the President

The followings are detailed explanation of each of these trends:

BELT & ROAD INITIATIVE AND US-CHINA TRADE WAR

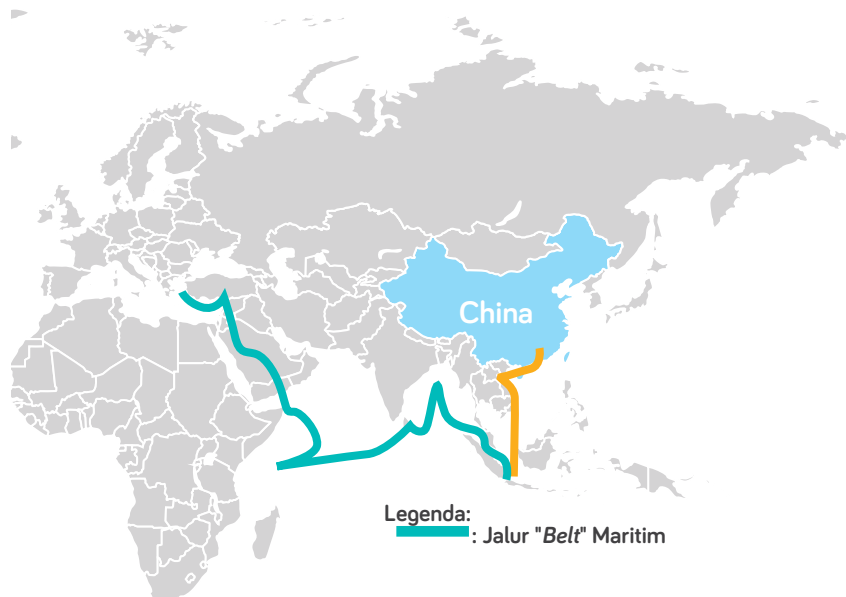
The Belt and Road initiative was initiated by China in order to drive the traffic and volume of ship transportation in Southeast Asia. The 21st Century Maritime Silk Road (MSR) initiative is part of the Belt and Road (BRI) initiative of President Xi Jinping to support the co-operation of sea trade traffic and improve connectivity between regions, which is predicted to encourage the increase



traffic. Peningkatan ukuran dan kapasitas maksimum dari kapal kontainer akan terdorong meningkat guna mencapai *economies of scale*. Terjadi pula adaptasi pada pelabuhan pada umumnya – ukuran *crane* dan pelabuhan yang dapat mengakomodir ukuran kapal yang terus bertambah. Hal ini menjadi salah satu pemacu penggabungan perusahaan pelayaran – tidak semua perusahaan mempunyai kapabilitas untuk meningkatkan kapasitas kapal.

in shipping traffic. Increased size and maximum capacity of container ships will be increase and achieve economies of scale. Adaptation will also occur to ports in general - the size of cranes and ports that can accommodate ship sizes that continue to grow. This has become one of the triggers for the merging of shipping companies - not all companies have the capability to increase ship capacity.

Gambar Jalur Belt Maritim
Figure of Maritime Belt Line



Inisiatif Belt and Road juga akan meningkatkan peran selat Sunda sebagai alur laut untuk perdagangan internasional dapat meningkatkan trafik barang dan kapal ke Tanjung Priok, yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki Pemisahan alur laut atau *Traffic Separation Scheme/TSS* (resmi berlaku penuh Juni 2020) melalui pengesahan oleh IMO dan berada di dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu TSS dan ALKI I di selat Sunda (menghubungkan laut cina selatan dan samudera hindia). Selat Sunda menjadi salah satu alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional dan berpotensi mengalihkan arus barang internasional dari PSA untuk langsung menuju pelabuhan Tanjung Priok. Selain peningkatan arus barang, kebutuhan kapal Ro-Ro di pelabuhan juga memiliki potensi kenaikan armada supaya tidak terjadi *bottleneck*. Pada akhirnya, terdapat potensi pengalihan arus barang internasional langsung menuju Tanjung Priok dengan memanfaatkan Selat Sunda.

The Belt and Road initiative will also enhance the role of the Sunda Strait as a sea channel for international trade to increase goods and ship traffic to Tanjung Priok, which can be utilized further. Indonesia as the first archipelagic country in the world to have a Traffic Separation Scheme/TSS (officially in full force in June 2020) through approval by the IMO and is in the Indonesian Archipelago Sea Channel (ALKI), namely TSS and ALKI I in the Sunda Strait (connecting the South China Sea and the Indian Ocean). The Sunda Strait is one of the sea lanes in Indonesian waters that are free to be sailed by international ships and has the potential to divert the flow of international goods from the PSA to go directly to the port of Tanjung Priok. Besides increasing the flow of goods, the need for Ro-Ro vessels at the port also has the potential to increase the fleet in order to avoid the occurrence of bottlenecks. In the end, there is the potential to divert the flow of international goods directly to Tanjung Priok by utilizing the Sunda Strait.

Gambar Potensi Pengalihan Arus Barang Internasional
Figure Potential Diversion of International Goods Flow

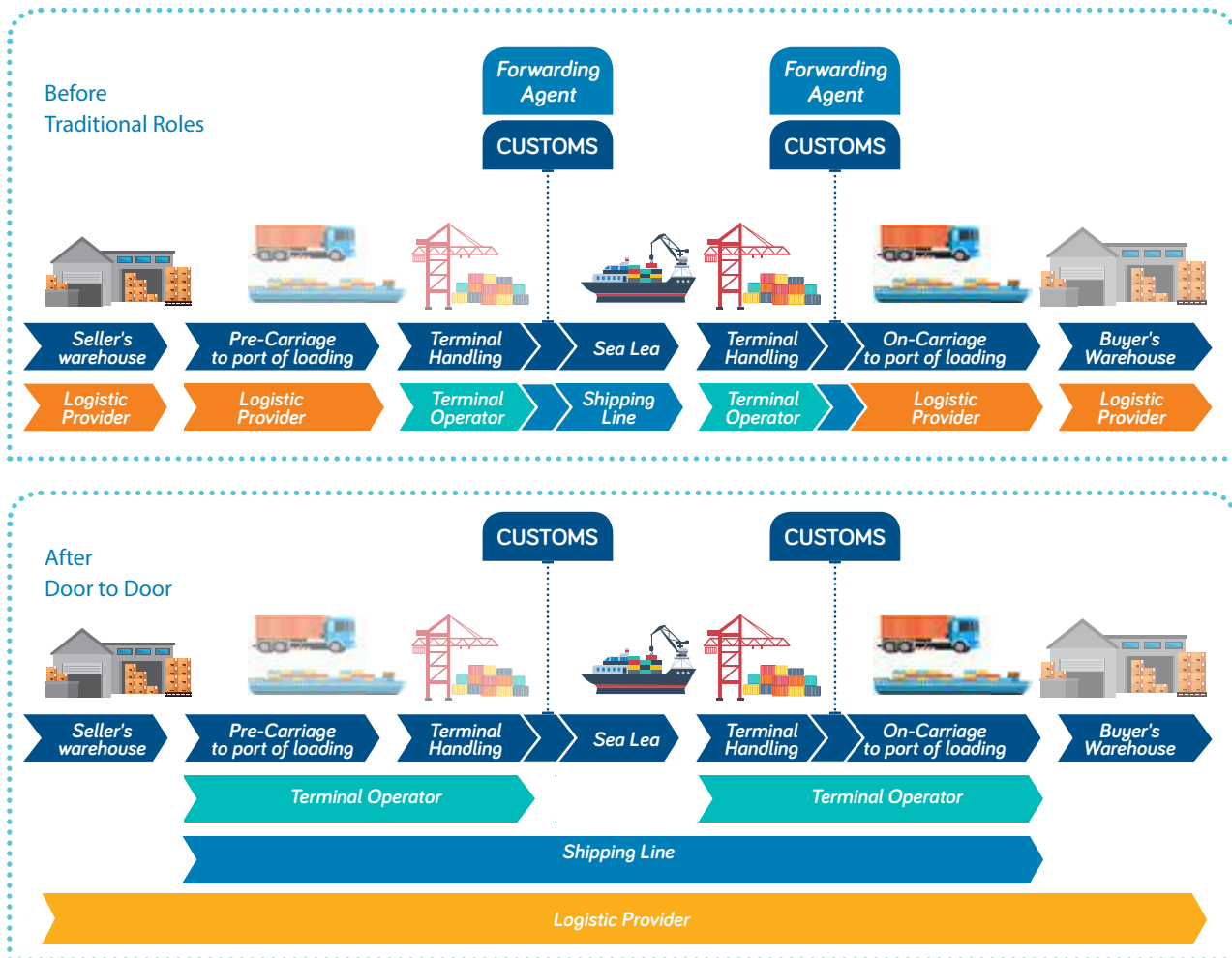


RELATION GAME CHANGE

Di tahun 2019 ini, tren layanan *door to door* semakin berkembang. Layanan dimana barang yang hendak dikirimkan akan dijemput oleh kurir ke tempat barang pelanggan berada, kemudian akan diantarkan sampai ke tangan penerima di tempat tujuan sehingga pelanggan dapat dimudahkan dengan layanan yang cepat dan transparan karena dapat di monitor melalui aplikasi terintegrasi.

RELATION GAME CHANGE

In 2019, the door to door service trend is growing. Services where the goods to be sent will be picked up by the courier to the customer's place of goods, then will be delivered to the recipient's hands at their destination so that customers can be facilitated with a fast and transparent service because can be monitored through an integrated application.



Tren *door to door* juga tengah di rambah pelabuhan sehingga peran pelabuhan saat ini telah berevolusi menjadi “*one-stop service provider*” dan “*integrator ekosistem kepelabuhanan*” yang menyebabkan revolusi operasi dan skala bisnis kepelabuhanan. Secara global, terdapat pola pengembangan pelabuhan dari pelabuhan yang terpisah-pisah menjadi kawasan yang terintegrasi dan perusahaan kepelabuhanan global sudah mulai memasuki bisnis-bisnis pendukung dan *adjacencies* yang ada di rantai nilai. Tren ini dapat mengintegrasikan pelabuhan dengan kawasan ekonomi khusus yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Perubahan peran ini dapat diamati dengan melalui 3 (tiga) tahap:

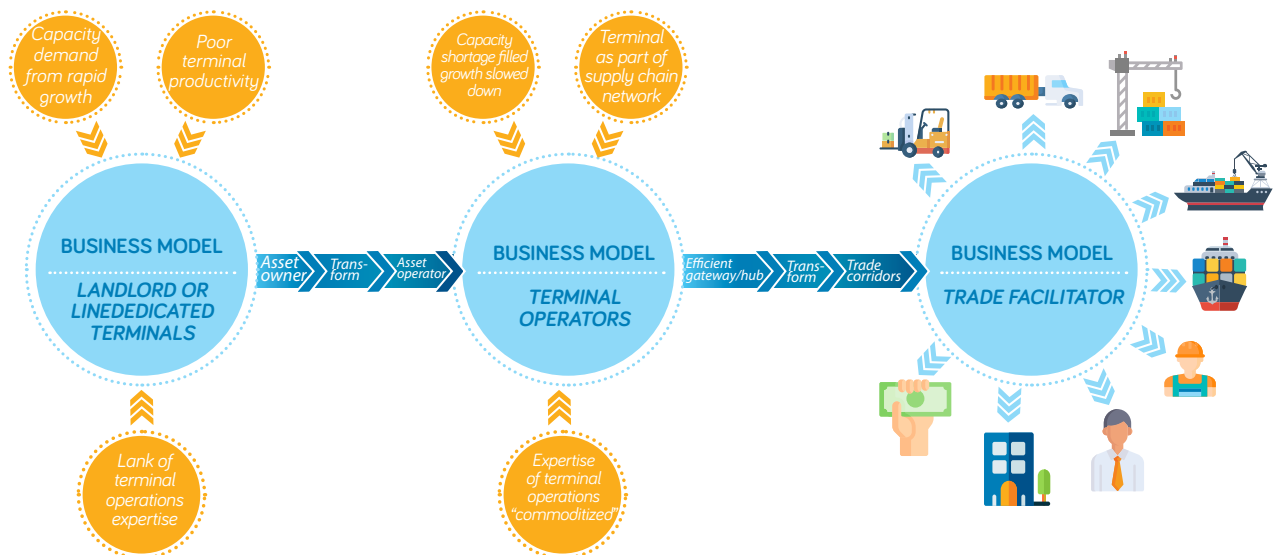
1. *Port Authority*
 - a. Perencanaan, investasi dan operasi pelabuhan dengan adanya peningkatan arus petikemas.
 - b. Efisiensi merupakan *bottleneck* dari operasi pelabuhan *Port Terminal Operators*

Door to door trend is also being penetrated by ports so that the role of ports has now evolved to become “*one-stop service provider*” and “*port ecosystem integrator*”, which has led to a revolution in the operation and scale of port business. Globally, there is a pattern of port development from separate ports to integrated zones and global port companies have begun to enter supporting businesses and adjacencies in the value chain. This trend can integrate ports with special economic zones that can support economic growth. This change in role can be observed by going through 3 (three) stages:

1. *Port Authority*
 - a. Port planning, investment and operations with an increase in container flows.
 - b. Efficiency is a bottleneck of the port operations of *Port Terminal Operators*

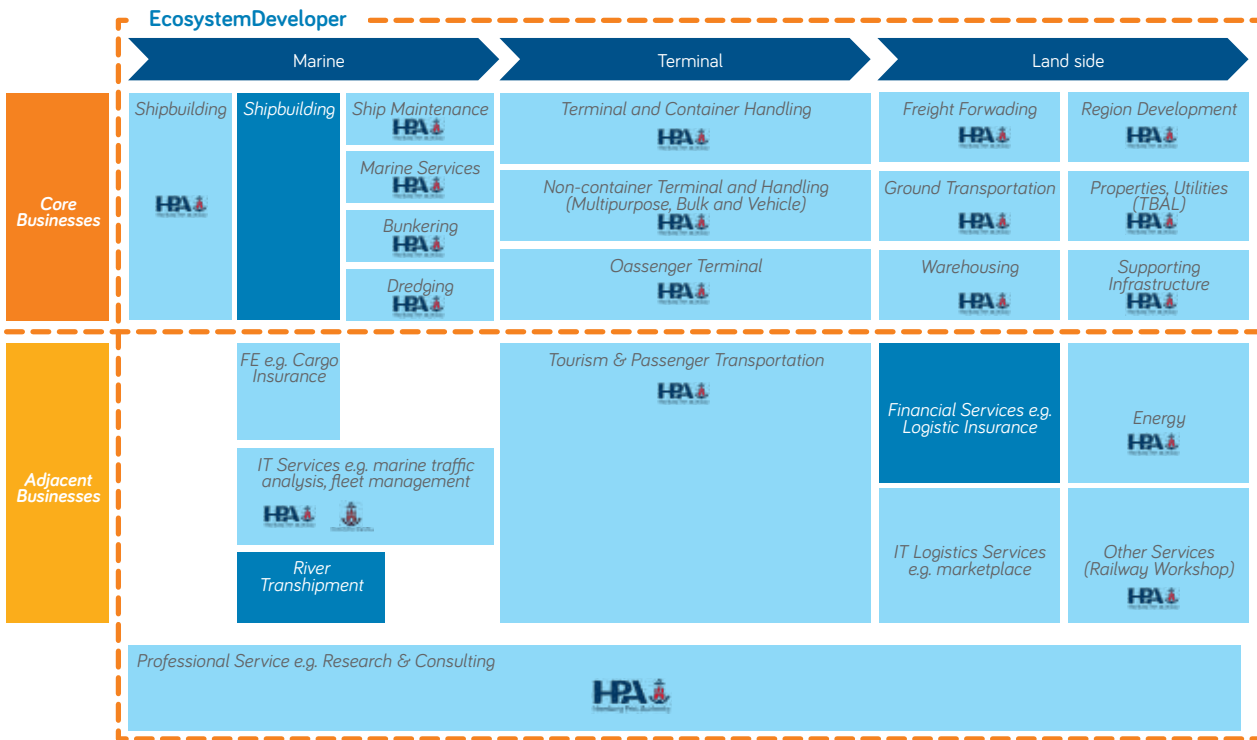
2. *Port Terminal Operators*
 - a. Operasi aset dan fasilitas yang lebih efisien.
 - b. Integrasi rantai pasokan global.
 - c. Infrastruktur dan operasi pelabuhan yang distandarisasi sehingga menguntungkan.
3. *Trade Service Providers*
 - a. Pengembangan ekosistem dan fasilitasi perdagangan.
 - b. Pengembangan *value proposition*, misal: rantai nilai terintegrasi, inovasi, ketepatan waktu dan efisiensi serta keamanan dan keandalan.

2. Port Terminal Operators
 - a. More efficient asset and facility operations.
 - b. Global supply chain integration.
 - c. Standardized port infrastructure and operations making it profitable.
3. Trade Service Providers
 - a. Ecosystem development and trade facilitation.
 - b. Development of value propositions, for example: integrated value chains, innovation, timeliness and efficiency as well as security and reliability.



Melihat pada tren pasar, beberapa perusahaan pelabuhan juga mulai berekspansi dalam rantai nilai kepelabuhanan sendiri atau *"within port boundaries"*, dari operasi pelabuhan menjadi *bisnis adjacent* seperti produk dan jasa TI, jasa investasi dan konsultansi keuangan maupun transportasi turis dan manusia. Selain itu, beberapa perusahaan pelabuhan juga mulai berekspansi ke bisnis *"beyond port boundaries"*, seperti jasa logistik, area *development* dan *warehousing*. Sebagai salah satu contoh *benchmark, port of hamburg*. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini, bahwa layanan *Port of Hamburg* sudah mencakup *beyond port* atau menjadi *trade facilitator*.

Looking at market trends, several port companies are also beginning to expand in their own port value chain, from port operations to adjacent businesses such as IT products and services, investment services and financial consultancy as well as tourist and human transportation. In addition, several port companies have also begun expanding into the *"beyond port boundaries"* business, such as logistics services, development areas and warehousing. As one example of a benchmark, the port of hamburg. As can be seen in the picture below, the Port of Hamburg service has already covered beyond the port or become a trade facilitator.



Mengacu kepada perusahaan *benchmark* di atas, ada potensi ekspansi bisnis untuk IPC di dalam atau di luar ekosistem pelabuhan. Potensi pengembangan bisnis dalam rantai nilai kepelabuhanan sangat beragam dan sudah banyak contoh perusahaan kepelabuhanan lain yang melakukan ekspansi tersebut.

Referring to the benchmark company above, there is potential for business expansion for IPC, inside or outside the port ecosystem. The potential for business development in the port value chain is very diverse and there are many examples of other port companies that are expanding.

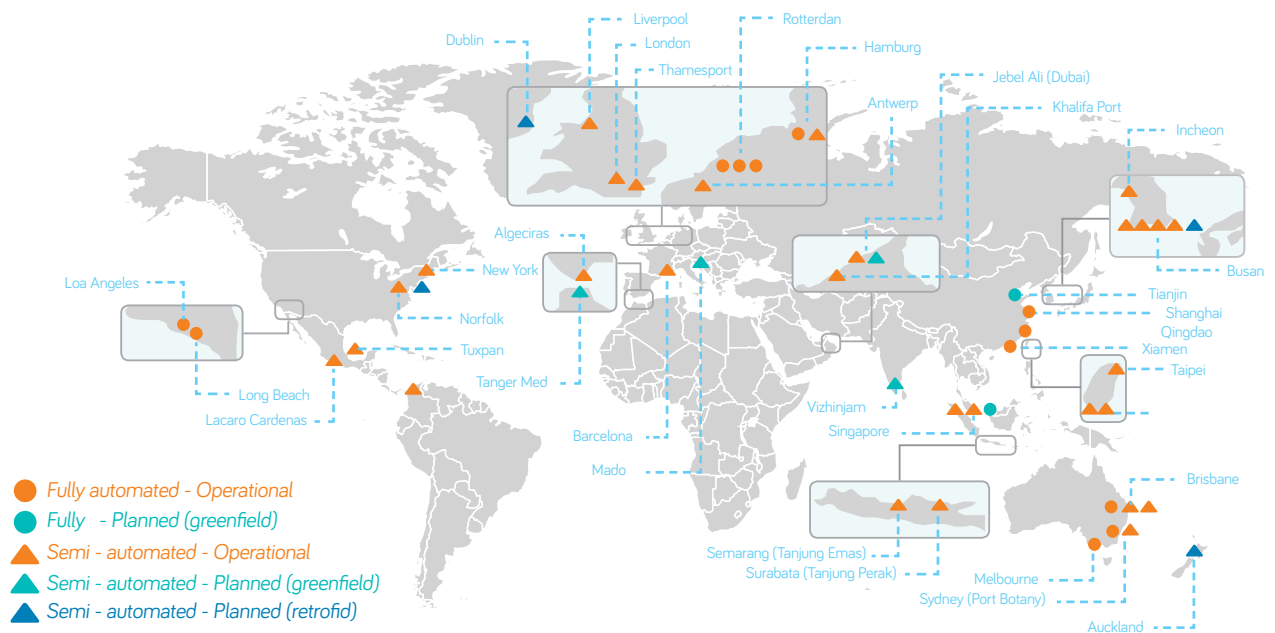
AUTOMATION AND GREEN PORT

AUTOMATION AND GREEN PORT

Tren pelabuhan hijau atau *green port* memang merupakan hal baru bagi sebagian besar pelabuhan nasional maupun pelabuhan internasional di Indonesia. Konsep pelabuhan hijau adalah bagian dari komitmen pelabuhan-pelabuhan di dunia untuk mengurangi emisi karbon. Dalam menerapkan konsep *green port*, PIANC memiliki *framework* sederhana untuk dapat menilai keberlanjutan *green port* yaitu dari aspek manajemen dan aspek teknis. PIANC sendiri merupakan badan internasional yang bertujuan sebagai penyedia jasa ahli dalam bidang ekonomi, teknis maupun lingkungan pada hal-hal terkait infrastruktur transportasi air, salah satunya pelabuhan. *Framework* ini sejalan dengan beberapa pemain global lainnya dalam menerapkan konsep *green port*. Adapun dampak yang diberikan dari penerapan *green port* selain terhadap lingkungan diantaranya adalah untuk meningkatkan tingkat tata kelola baik perusahaan (GCG Score), kepatuhan terhadap regulasi internasional, citra publik dan menurunkan biaya operasi.

Green port trend is indeed a new thing for most national and international ports in Indonesia. The concept of green port is part of the commitment of ports in the world to reduce carbon emissions. In applying the concept of green port, PIANC has a simple framework to be able to assess the sustainability of green ports, namely from the management aspect and technical aspect. PIANC itself is an international body that aims as an expert service provider in the economic, technical and environmental fields on matters related to water transportation infrastructure, one of which is the port. This framework is in line with several other global players in applying the green port concept. The impact of implementing green port in addition to the environment is to improve the level of good corporate governance (GCG Score), compliance with international regulations, public image and reduce operating costs.

Gambar Automation and Green Port
Figure of Automation and Green Port



2019 merupakan tahun akselerasi implementasi otomasi di pelabuhan. Terdapat potensi pengembangan teknologi digital yang dapat meningkatkan performa, memperkuat konektivitas dan membuka peluang bisnis bagi ekosistem pelabuhan, secara keseluruhan konsep tersebut dikenal sebagai *digital port*. Adapun beberapa peluang *digital* yang tengah berkembang adalah sebagai berikut:

- a. *Operator Port Community System*
Pelabuhan dapat memposisikan diri sebagai integrator pelabuhan Indonesia, dengan menjadi operator dan pemegang *single system Port Community System* di Indonesia.
- b. *Truck Appointment System*
Pelabuhan menawarkan perusahaan truk untuk membayar biaya berlangganan moderat untuk mengakses sistem pengangkatan truk.
- c. *Freight Benchmarking dan Market Analytics*
Data dari aktivitas kepelabuhanan dapat dimanfaatkan untuk jasa *ocean freight benchmarking* dan *market analytics* untuk memonetisasi data aktivitas pelabuhan.
- d. *Drones To Enhance Port Supporting Activities*
Dengan berkembangnya teknologi *drone*, pengembangan jasa di dalam aktivitas kepelabuhanan berpotensi untuk dikembangkan.
- e. Jaringan 5G
Ekosistem 5G akan terus berkembang dan meluas, maka akan meningkatkan level penerapan otomasi dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang sangat dibutuhkan untuk pada sisi

2019 was the year of accelerated implementation of automation at the port. There is a potential for developing digital technology that can improve performance, strengthen connectivity and open business opportunities for the port ecosystem, as a whole the concept is known as *digital port*. Several emerging digital opportunities are as follows:

- a. Port Community System Operator
The port can position itself as an Indonesian port integrator, by being the operator and holder of the single Port Community System in Indonesia.
- b. Truck Appointment System
The port offers trucking companies to pay moderate subscription fees to access the truck lift system.
- c. Freight Benchmarking and Market Analytics
Data from port activities can be used for ocean freight benchmarking and market analytics services to monetize port activity data.
- d. Drones To Enhance Port Supporting Activities
With the development of drone technology, the development of services in port activities has the potential to be developed.
- e. 5G network
The 5G ecosystem will continue to grow and expand, thus increasing the level of application of automation and artificial intelligence that is needed for the operational



operasional. Pelabuhan dan terminal akan sangat membutuhkan manfaat dari terobosan teknologi. Pelabuhan Hamburg di Jerman yang merupakan salah satu dari sepuluh terminal peti kemas terbesar di Eropa, telah mengujicobakan teknologi 5G untuk berubah menjadi dalam bahasa mereka, 'sebuah hub dari industri komunikasi mobile generasi berikutnya'. Jadi berdasarkan uji cobanya, teknologi 5G akan mengoptimalkan rencana pengembangan pelabuhan ke depan. Lalu juga meningkatkan kinerja di lapangan untuk memonitor kegiatan operasional sehari-hari untuk menjadikan pelabuhan terminal menjadi lebih 'pintar' (efektif kinerja operasionalnya). Kemudian peningkatan konektivitas dan kecepatan yang ditawarkan oleh 5G membuatnya mampu mentransfer data secara aman dalam hitungan milliseconds! Sehingga sangat berpotensi untuk melakukan disrupti berupa transformasi teknologi pada industri pelayaran peti kemas, jaringan antarpelabuhan, serta perusahaan jasa logistik untuk menjadi pondasi dari jaringan rantai pasok yang lebih 'pintar'. 5G juga akan menjadi perekat dari teknologi *Internet of Things* (IoT).

f. Teknologi Sensor

Teknologi ini akan semakin berkembang dengan dasar jaringan 5G. Teknologi yang fleksibel dan dalam jaringan besar ini akan dikembangkan tandem dengan IoT dengan jaringan seluler. IoT seluler maksudnya ialah keterhubungan antara peralatan fisik. Pada pelabuhan dan terminal dapat diimplementasikan agar peralatan pada pelabuhan mampu mentransmisikan data melalui sensor dengan lebih independent (tidak bergantung), terotomasi, dan dioperasikan dengan efisien. Mitsui O.S.K. Lines (MOL) telah menerapkan inovasi ini yang berupa *container tracking management system* yang menggunakan sensor optik untuk mendeteksi perubahan kondisi, termasuk mendeteksi bila petikemas dibuka oleh pihak yang tidak berwenang. Pada tahap akhirnya, pelabuhan dan terminal akan fokus untuk membesarkan kapasitas data yang mampu diolah oleh sensor pintar. Terutama untuk mengembangkan layanan baru dan *platform* untuk memanfaatkan informasi dengan maksimal.

g. *Internet of Vehicles*

Ketika solusi pintar bergantung pada IoT dan sudah mulai banyak diterapkan di pelabuhan dan terminal di dunia, *Internet of Vehicles* (IoV) masih dalam tahap awal pengembangan. Meskipun begitu, konsep tersebut akan lepas landas di tahun 2019 ini menjadi penting dalam

side. Ports and terminals will greatly need the benefits of technological breakthroughs. The Port of Hamburg in Germany, which is one of the ten largest container terminals in Europe, has carried out the trial of 5G technology to turn into their language, 'a hub of the next generation of mobile communications industry'. Based on trial, 5G technology will optimize the port development plan going forward. Then also improve performance in the field to monitor day-to-day operational activities to make terminal ports become more 'smarter' (effective operational performance). Afterward, the increased connectivity and speed offered by 5G enable the transfer of data securely in a matter of milliseconds! So that it has the potential to carry out disruption in the form of technological transformation in the container shipping industry, inter-port network, and logistics service companies to become the foundation of a more 'smarter' supply chain network. 5G will also be the glue of *Internet of Things* (IoT) technology.

f. Sensor Technology

This technology will further develop on the basis of the 5G network. This flexible technology and in large networks will be developed in tandem with IoT with cellular networks. Cellular IoT means the connection between physical equipment. Can be implemented at the port and terminal, so that the equipment at the port is able to transmit data through sensors more independently (not dependent), automated, and operated efficiently. Mitsui O.S.K. Lines (MOL) has implemented this innovation in the form of a container tracking management system that uses optical sensor to detect changes in conditions, including detecting when containers are opened by unauthorized parties. In the final stage, ports and terminals will focus on increasing the data capacity that can be processed by smart sensor. Especially to develop new services and platforms to make the most of information.

g. *Internet of Vehicles*

When smart solutions depend on IoT and have begun to be widely applied in ports and terminals in the world, the *Internet of Vehicles* (IoV) is still in the early stages of development. Even so, the concept will take off in 2019 and this will be important in supporting traffic management

mendukung manajemen lalu lintas di pelabuhan menjadi lebih efektif, sehingga mampu meningkatkan keamanan dan menekan risiko tabrakan. Pelabuhan Valencia di Spanyol bekerja sama dengan MSC Mediterranean Shipping Company telah bekerja sama untuk mengintegrasikan teknologi loV sebagai solusi *trucking*. Jadi truk MSC di Spanyol telah dilengkapi dengan perangkat loV untuk *track* kendaraan secara *real time* sehingga dapat membantu pelabuhan untuk memprediksi dan mempersiapkan kedatangan dan potensi kemacetan di gerbang pelabuhan.

at the port to be more effective, so as to improve security and reduce the risk of collisions. The Port of Valencia in Spain in cooperation with the MSC Mediterranean Shipping Company has worked together to integrate loV technology as a trucking solution. Therefore, MSC trucks in Spain are equipped with loV devices to track vehicles in real time so that it can help the port to predict and prepare for arrivals and potential bottlenecks at the port gates.

PENENTUAN HUB PORT DI INDONESIA OLEH PRESIDEN

ESTABLISHMENT OF THE HUB PORT IN INDONESIA BY THE PRESIDENT

Saat ini terdapat tujuh pelabuhan di Indonesia disiapkan sebagai hub internasional sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Hal ini bertujuan untuk

At present, there are seven ports in Indonesia prepared as an international hub as stated in the Presidential Regulation No. 18 of 2020 concerning the National Medium-Term Development Plan for 2020-2024. The purposes are:

1. Meningkatkan kinerja pelabuhan dengan adanya standarisasi pelabuhan utama (nilai *turn round time* maksimum 24 jam).
2. Meningkatkan efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk *loop* secara teratur menjadi 27%.
3. Sebagai penunjang kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan pelabuhan.

1. Improving port performance by standardizing the main port (maximum 24 hour turn round time).
2. Increasing efficiency of domestic shipping routes by forming loops regularly to 27%.
3. As a support for integrated economic zones with ports.

Gambar Hub Port di Indonesia
Figure of Hub Port in Indonesia





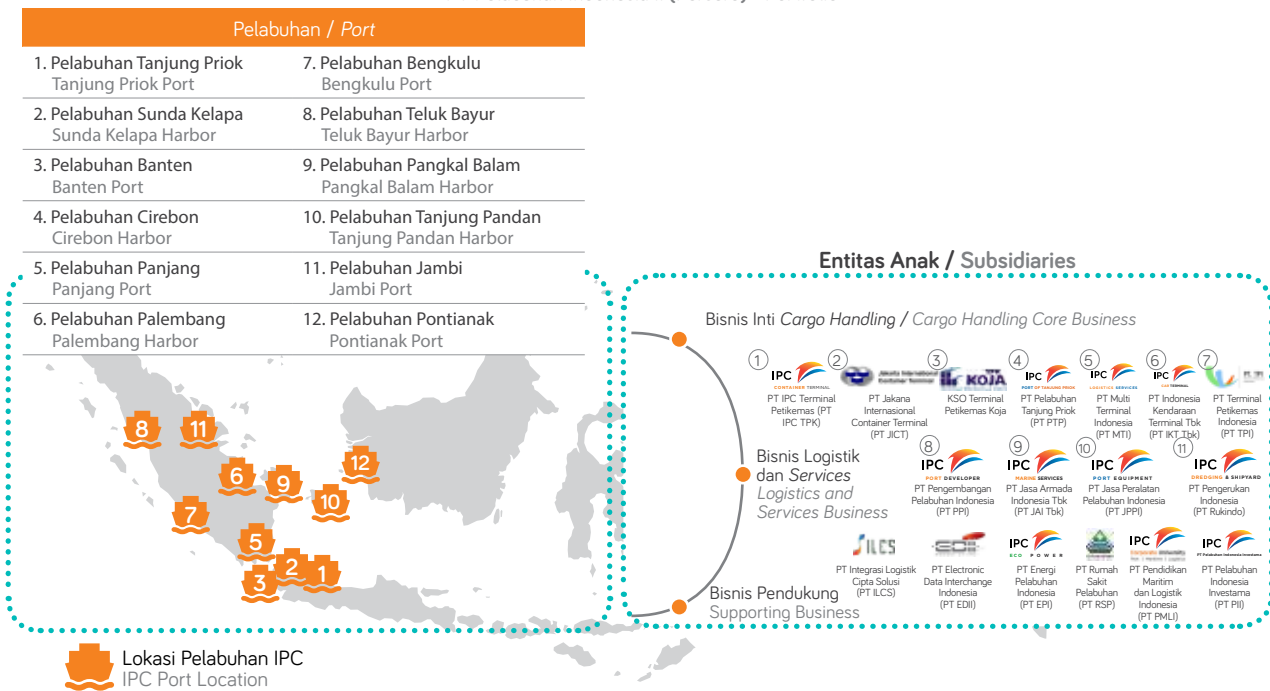
Beberapa inisiatif yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini antara lain:

1. Standardisasi infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan utama (pengembangan dermaga dan terminal peti kemas).
2. Pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, dan pembangunan *breakwater*.
3. Pengadaan kapal besar kapasitas 3000-5000 TEUs.
4. Pengembangan Kawasan Industri.

ANALISIS POSISI IPC DALAM INDUSTRI PELABUHAN

Sebagai operator pelabuhan, saat ini, IPC mengelola 12 (dua belas) pelabuhan utama dan 17 (tujuh belas) Entitas Anak, perbandingan pangsa pasar IPC dengan PT Pelabuhan Indonesia I, III, IV (Persero) dapat dilihat dalam gambar berikut:

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) - Portofolio
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) - Portfolio



Dari sisi perkembangan teknologi, saat ini IPC telah memulai upaya implementasi *digital port* yang terbagi menjadi dua yaitu inisiatif digital port yang akan mendorong efisiensi operasional dan inisiatif yang akan menjadi katalis sumber pendapatan baru untuk mendorong pertumbuhan. Gambar di bawah menunjukkan daftar inisiatif *digital port* IPC baik yang sudah terimplementasi maupun yang masih dalam rencana untuk diimplementasi

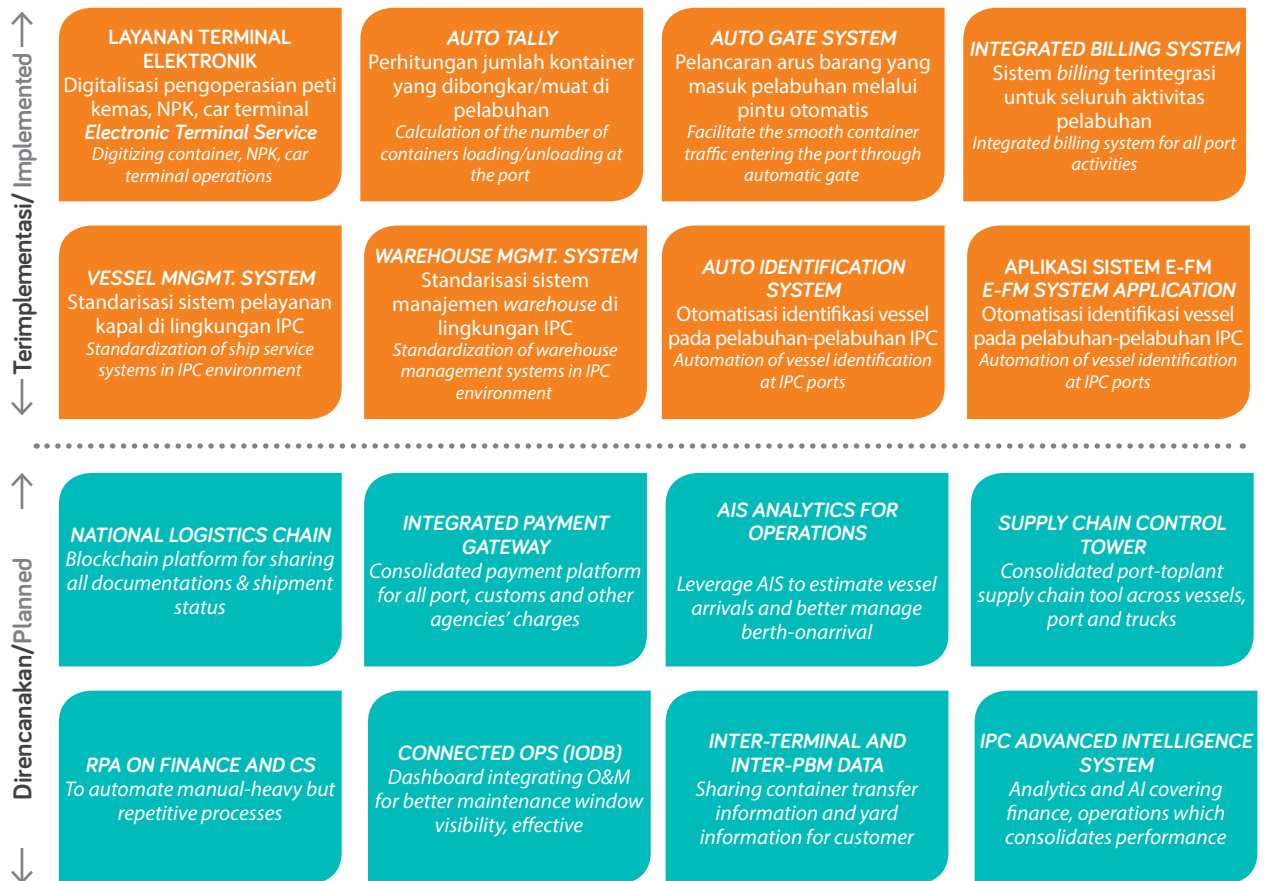
A number of initiatives that will be carried out by the government in this case include:

1. Standardization of infrastructure and superstructure of main port (development of docks and container terminals).
2. Dredging of harbor ponds and shipping lanes, and construction of breakwater.
3. Procurement of large capacity vessels of 3000-5000 TEUs.
4. Industrial Estate Development.

ANALYSIS OF IPC POSITION IN PORT INDUSTRY

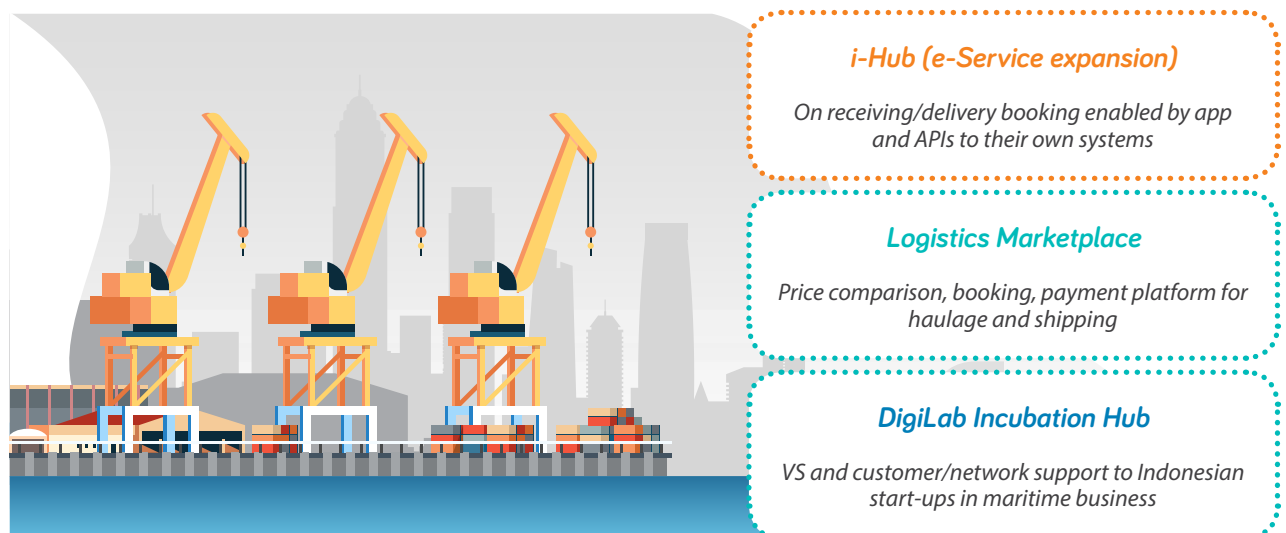
As a port operator, currently, IPC manages 12 (twelve) main ports and 17 (seventeen) subsidiary entities. The comparison of IPC market share with PT Pelabuhan Indonesia I, III, IV (Persero) can be seen in the following figure:

In terms of technological development, currently IPC has begun to implement digital ports that are divided into two, namely digital port initiative that will drive operational efficiency and initiative that will catalyze new sources of revenue to drive growth. The figure below shows a list of IPC digital port initiatives, both those that have been implemented and those that are still in the pipeline for implementation.



Selain itu IPC juga memiliki rencana untuk melakukan implementasi beberapa inisiatif *digital port* yang akan dapat menjadi katalis untuk membawa arus pendapatan baru yang akan mendorong pertumbuhan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar berikut:

In addition, the IPC also has plans to implement several digital port initiatives that will be a catalyst to bring new revenue streams and lead to growth, as can be seen in the following figure:





Tingkat maturitas digital dari suatu organisasi dapat diukur menggunakan kerangka kerja yang memperhitungkan tingkat transformasi bisnis dan nilai tambah yang dihasilkan. Kerangka kerja ini menghasilkan 5 tingkatan maturitas digital yaitu:

1. Level 1: *Localized Exploitation*
Sistem IT standar untuk membantu aktivitas bisnis secara individual (contoh: sistem akuntansi, dan lainnya);
2. Level 2: *Internal Integration*
Integrasi sistem IT lintas fungsi dan organisasi (contoh: ERP system, data warehouse);
3. Level 3: *Business Process Re-design*
Efisiensi proses bisnis dengan pengadopsian sistem IT (contoh: *Vessel Management System*);
4. Level 4: *Business Network Re-design*
Peningkatan kolaborasi antar aktor di sepanjang rantai nilai dengan sistem terintegrasi (contoh: *System Port Community System*);
5. Level 5: *Business Scope Redefinition*
Ekspansi dan pengembangan model bisnis yang menghasilkan produk baru (contoh: *Freight Marketplace*).

Dengan mengacu kepada kerangka kerja penilaian tingkat maturitas digital yang diperkenalkan di atas, tingkat maturitas digital IPC baru dapat dikategorikan pada Level 3 – *Business Process Re-design*. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hampir seluruh inisiatif digital yang diimplementasikan oleh IPC termasuk dalam kategori efisiensi operasional.

Selain itu, jika dibandingkan dengan perusahaan kepelabuhanan domestik maturitas digital IPC masih yang terdepan, akan tetapi ketika dibandingkan dengan perusahaan kepelabuhanan global, jelas terlihat ketertinggalan maturitas IPC

The digital maturity level of an organization can be measured using a framework that takes into account the level of business transformation and the resulting added value. This framework produces 5 levels of digital maturity:

1. Level 1: Localized Exploitation
Standard IT systems to help individual business activities (example: accounting system, etc.)
2. Level 2: Internal Integration
Integration of cross-functional and organizational IT systems (example: ERP system, data warehouse)
3. Level 3: Business Process Re-design
Business process efficiency by adopting IT systems (example: Vessel Management System)
4. Level 4: Business Network Re-design
Increased collaboration between actors along the value chain with integrated systems (example: System Port Community System)
5. Level 5: Business Scope Redefinition
Expansion and development of business models that produce new products (example: Freight Marketplace)

With reference to the digital maturity level assessment framework introduced above, the new IPC digital maturity level can be categorized at Level 3 - Business Process Re-design. This is based on the fact that almost all digital initiatives implemented by IPC are included in the category of operational efficiency.

In addition, when compared to domestic port companies, IPC's digital maturity is still at the forefront. Yet when compared to global port companies, IPC's maturity is clearly left behind.

Level Maturitas Maturity Level	Progres Penerapan Teknologi Technology Implementation Process
	 <ul style="list-style-type: none"> • <i>SmartPort Logistics</i>: Peningkatan efisiensi dengan teknologi digital, mengkoneksikan seluruh pemangku kepentingan ekosistem untuk dapat bertukar informasi • <i>Internet of things: augmented reality, real-time smart sensors, cloud platform</i> dan port monitor (untuk mengendalikan VTS) untuk pengambilan keputusan yang lebih baik • SmartPort Logistics – improving efficiency with digital technology, connecting all stakeholders of ecosystem to exchange information • Internet of Things – Augmented Reality, Real-time smart sensors, Cloud Platform and Port Monitor (to control TVS) for better decision making
	 <ul style="list-style-type: none"> • Pronto: aplikasi yang telah diimplementasikan untuk merencanakan, pemantauan eksekusi kegiatan kepelabuhan <i>end to end</i> • <i>Portbase</i> sebuah aplikasi <i>port community system</i> oleh <i>port of Rotterdam</i> yang membayar untuk mendapatkan akses • Pronto – application that has been implemented to plan, monitor the execution of end-to-end port activities • Portbase – paid port community system application by Port of Rotterdam to get access
	 <ul style="list-style-type: none"> • Otomasi teknologi (<i>drones</i> untuk meningkatkan keamanan, <i>hyperloop</i>) • Mulai mengaplikasikan <i>big data analytics</i> dan <i>e-commerce</i> untuk memperluas jangkauan bisnisnya • Technology automation (<i>drones</i> to improve security, <i>hyperloop</i>) • Start applying big data analytics and e-commerce to expand business network
	 <ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada <i>operational excellence, integrated billing system</i>, meningkatkan otomasi di terminal (<i>autogate, autotally</i>), serta standarisasi dan digitalisasi operasi dengan TOS peti kemas, NPK dan car terminal • Juga mengembangkan aplikasi pendukung layanan marina dan <i>landside</i> seperti <i>vessel</i> dan <i>warehouse management system</i> • Focus on operational excellence: Integrated Billing System, increase automation in terminal (Autogate, Autotally), and operational standardization and digitalization with TOS Container, NPK, and car terminal • Also develop marine and landside supporting application such as vessel and warehouse management system
	 <ul style="list-style-type: none"> • Sistematisasi atas proses manual, standarisasi layanan, dan sentralisasi system informasi • Sedang dalam proses pengembangan otomasi di terminal (teluk lamong) • Systematization of manual process, service standardization, and information system centralization • Ongoing development process of automation in terminal (Teluk Lamong)
	 <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan infrastruktur <i>system TI</i> untuk standarisasi system dan operasi • Platform untuk transaksi <i>cashless</i> dan rencana pembangunan layanan <i>platform customs declaration</i> • Optimizing IT system infrastructure for system and operational standardization • Platform for cashless transaction and plan to develop platform customs declarations service
	 <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat infrastruktur <i>TI</i> guna standarisasi dan <i>integrase system (data center, ERP, SAP)</i> • Mulai menerapkan <i>system cashless</i> dan mulai mengadopsi aplikasi <i>marketplace home terminal</i> • Strengthen IT infrastructure for system standardization and integration (data center, ERP, SAP) • Start to implement cashless system and adopt Home Terminal marketplace application

Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 : Skala Maturitas/Maturity Scale

Sumber : Analisis PwC, Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2020 - 2024
Source: PwC Analysis, Corporate Long-Term of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2020-2024



Tabel Throughput Kapal dan Kargo Pelabuhan Indonesia Tahun 2018-2019

Table of Cargo and Ship Throughput Pelabuhan Indonesia 2018-2019

Operator Pelabuhan <i>Port Operator</i>	Petikemas (juta TEUs) Container (million TEUs)	
	2019	2018
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	1,21	1,27
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	7,66	7,64
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	5,19	5,11
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	2,15	2,03

Sumber: PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero)
Keterangan:*) Ton/m³

Source: PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero)
Note: *) Ton / m³

PETA PELABUHAN DI INDONESIA

Tabel di bawah ini memperlihatkan pengelolaan pelabuhan di Indonesia oleh Badan Usaha Milik Negara.

PORT MAP IN INDONESIA

The table below shows the management of ports in Indonesia by State-Owned Enterprise.

Perusahaan Pengelola <i>Managed by</i>	Cakupan (Provinsi) <i>Coverage (Province)</i>	Pelabuhan yang Dimiliki <i>Ports Owned</i>
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Aceh, Sumatera Utara, Riau Aceh, North Sumatra, Riau	Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Lhokseumawe, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Sibolga, Tembilahan, Malahayati, Tanjung Balai Asahan, Kuala Tanjung, Sungai Pangkal Batam. Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Lhokseumawe, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Sibolga, Tembilahan, Malahayati, Tanjung Balai Asahan, Kuala Tanjung, Sungai Pangkal Batam.
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Jawa Barat. West Sumatra, Jambi, Bangka Belitung, South Sumatra, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Banten, West Kalimantan, West Java.	Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Pontianak, Cirebon, Jambi, Bengkulu, Banten, Pangkal Balam, Tanjung Pandan. Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Pontianak, Cirebon, Jambi, Bengkulu, Banten, Pangkal Balam, Tanjung Pandan.

Perusahaan Pengelola <i>Managed by</i>	Cakupan (Provinsi) <i>Coverage (Province)</i>	Pelabuhan yang Dimiliki <i>Ports Owned</i>
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.	Tanjung Perak, Tanjung Intan, Tanjung wangi, sampit, Tanjung Tembaga, Bima, Tanjung Emas, Trisakti, Benoa, Kotabaru, Kumai, Maumere, Gresik, Tenau Kupang, Lembar, Celukan Bawang, TPK Semarang, Tenau Kupang.
	Central Kalimantan, South Kalimantan, West Nusa Tenggara, Nusa Tenggara East.	Tanjung Perak, Tanjung Intan, Tanjung wangi, sampit, Tanjung Tembaga, Bima, Tanjung Emas, Trisakti, Benoa, Kotabaru, Kumai, Maumere, Gresik, Tenau Kupang, Lembar, Celukan Bawang, TPK Semarang, Tenau Kupang
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku, Papua, Papua Barat.	Makassar, Balikpapan, Samarinda, Bitung, Ambon, Sorong, Jayapura, Tarakan, Pantoloan, Ternate, Kendari, Parepare, Biak, Merauke, Manokwari, Nunukan, Fakfak, Gorontalo, Tolitoli, Manado, Parepare, Bitung.
	East Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, West Papua.	Makassar, Balikpapan, Samarinda, Bitung, Ambon, Sorong, Jayapura, Tarakan, Pantoloan, Ternate, Kendari, Parepare, Biak, Merauke, Manokwari, Nunukan, Fakfak, Gorontalo, Tolitoli, Manado, Parepare, Bitung.



TINJAUAN OPERASIONAL

OPERATIONAL REVIEW

STRATEGI PERUSAHAAN

Dalam usaha untuk mencapai visi, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) merumuskan *corporate roadmap* dan dibagi menjadi 5 (lima) tahun kedepan (2016-2020). Adapun *Corporate Roadmap* yang di maksud adalah sebagai berikut:

CORPORATE STRATEGY

In order to achieve its vision, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has formulated a corporate roadmap and is divided into 5 (five) years (2016-2020) as can be seen in the picture below:



Seperti yang dilihat pada gambar di atas bahwa terdapat 4 (empat) target kualitatif Perseroan yang hendak di capai pada tahun 2019, antara lain:

- Menjaga kinerja perusahaan yang telah dicapai dengan berbagai cara diantaranya Integrasi CSR yang saling menguntungkan, engagement prinsip GCG dan standarisasi GCG di Lingkungan IPC (entitas anak), Implementasi "customer retention", Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan/ SML (ISO 14001:2015) dan sertifikasi di bidang lainnya;
- National Connectivity Program by Implementing National Strategic Project* dengan pembangunan Pelabuhan Kijing, gedung Maritime Tower, Pengoperasian Museum Maritim dan Pengoperasian Pelabuhan Kalibaru;
- Growth Strategy - Organic and An-organic* dengan mencari peluang bisnis baru dengan bekerja sama dengan mitra strategis misal shipping line atau bunkering in western java, atau sektor maritim lain yang memungkinkan), pengembangan KEK Kijing, KEK Bengkulu, Pembangunan New Priok Eastern Access dan Pembangunan Tol Cibitung-Cilincing.

As seen in the picture above, there are 4 (four) qualitative targets of the Company to be achieved in 2019, including:

- Maintain Company performance that has been achieved in various ways, including CSR integration that is mutually beneficial, engagement with GCG principles and GCG standardization in IPC environment (subsidiaries), implementation of "customer retention", implementation of Environmental Management Systems/SML (ISO 14001: 2015) and certification in other fields;
- National Connectivity Program by implementing the National Strategic Project with the construction of Beijing Port, Maritime Tower building, the operation of Maritime Museum and the operation of Kalibaru Port;
- Growth Strategy - Organic and Inorganic by looking for new business opportunities through collaborating with strategic partners such as shipping line or bunkering in western java, or other possible maritime sectors), development of Kijing KEKZ, Bengkulu KEK, New Priok Eastern Access development and construction of Cibitung-Cilincing Toll.

4. *Initiation of global expansion* dilakukan dengan inisiasi kerja sama dengan *port operator/authority* beberapa pelabuhan (Vietnam, Australia, dan wilayah asia lainnya seperti Bangladesh) dan menindaklanjuti kerja sama dengan *port operator/authority* beberapa pelabuhan (Djibouti, Baku, Ning Bo, dan lainnya).

Untuk dapat mendukung dan mewujudkan target di paragraf sebelumnya, masing-masing Direktorat telah menyusun tema dan Rencana Kerja Manajemen prioritas, sebagai berikut:

1. Direktorat Utama: *Governance Culture*
 - a. Implementasi *IPC Brand Guideline*.
 - b. *IPC GCG Compliance* (Implementasi Roadmap GCG Fase *Sustainable*).
 - c. Implementasi *i-BOS*.
 - d. Standarisasi GCG dan *engagement* penerapan prinsip GCG di cabang dan entitas anak.
 - e. *Quality Assurance Improvement Program* (QAIP).
 - f. Peningkatan kapasitas fungsi internal audit pada level 3 (tiga).
 - g. Pengendalian internal IPC berbasis COSO.
 - h. Penyusunan *dashboard* kinerja fase 2 (lanjutan).
 - i. Implementasi *cascading* KPI.
 - j. Implementasi *Integrated Port Network* untuk mendukung *Holding*.
 - k. Implementasi *Innovate 2.0*
2. Wakil Direktur Utama : *Excellent Parenting Strategy and Procurement Process*
 - a. Implementasi *e-catalog*.
 - b. Implementasi *e-procurement*.
 - c. Implementasi merger entitas anak sejenis.
 - d. *Join marketing* entitas anak dan cabang.
 - e. Penyempurnaan tata kelola cabang dan entitas anak.
3. Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha: *Ecosystem Revenue Creativity*
 - a. Pengadaan tanah proyek strategis pembangunan pelabuhan kijing 200 Ha.
 - b. Sertifikasi: Melanjutkan sertifikasi yang sedang berjalan.
 - c. Penyusunan kajian optimalisasi aset tanah/HBU Study di 3 (tiga) Cabang Pelabuhan.
 - d. Mengusahakan *inorganic growth* dengan pengoperasian KBS.
 - e. Melakukan penyusunan strategi dan program pemasaran/ penjualan yang mengintegrasikan layanan jasa IPC, serta memasarkan proyek strategis IPC secara intensif dalam mendapatkan calon pengguna jasa/mitra.

4. *Initiation of global expansion*, which is carried out by initiating cooperation with several port operators/authorization ports (Vietnam, Australia and other Asian regions such as Bangladesh) and following up on cooperation with several port operators/ authorization ports (Djibouti, Baku, Ning Bo, and others).

To be able to support and realize the targets in the previous paragraph, each Directorate has prepared a theme and priority Management Work Plan, as follows:

1. Main Directorate: *Governance Culture*
 - a. Implementation of *IPC Brand Guideline*.
 - b. *IPC GCG Compliance* (Implementation of *Sustainable Phase of GCG Roadmap*).
 - c. *I-BOS* Implementation.
 - d. GCG standardization and engagement in the application of GCG principles in branches and subsidiaries.
 - e. *Quality Assurance Improvement Program* (QAIP).
 - f. Increased capacity of internal audit function at level 3 (three).
 - g. COSO-based IPC internal control.
 - h. Compilation of the phase 2 of performance dashboard (continued).
 - i. Implementation of KPI cascading.
 - j. Implementation of *Integrated Port Network* to support *Holding*.
 - k. Implementation of *Innovate 2.0*
2. Deputy President Director: *Excellent Parenting Strategy and Procurement Process*
 - a. Implementation of *e-catalog*.
 - b. Implementation of *e-procurement*.
 - c. Implementation of merger of similar subsidiaries.
 - d. *Join marketing* of subsidiaries and branches.
 - e. Improvement of the governance of branches and subsidiaries.
3. Directorate Commercial and Business Development: *Ecosystem Revenue Creativity*
 - a. Strategic land acquisition project for the construction of 200 Ha Kijing Port.
 - b. Certification: Continuing ongoing certification.
 - c. Compilation of studies on optimization of land assets/HBU Study in 3 (three) Port Branches.
 - d. Promote *inorganic growth* by operating KBS.
 - e. Develop marketing/sales strategies and programs that integrate IPC services, and intensively market IPC strategic projects in acquiring prospective service users/partners.



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> f. Sinkronisasi kebijakan atau regulasi pentarifan di lingkungan IPC Group. g. Implementasi desain dan segmentasi pelanggan. h. Penetapan standar pelayanan pelanggan di lingkungan IPC. i. Implementasi pelayanan pelanggan berbasis teknologi. j. Penyusunan strategi aliansi bisnis. k. Implementasi <i>gate pass</i> di cabang pelabuhan. <p>4. Direktorat Teknik: <i>Port Development and infrastructure/ equipment first class performance and green port</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Advancing sistem monitoring realisasi investasi. b. Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap I. c. Implementasi Rencana Kelola dan Pantau Lingkungan (RKLRLPL) Terminal Kalibaru Tahap Operasional. d. Perencanaan Terminal Petikemas Kalibaru Tahap 1B. e. Survei, Investigasi dan Desain (SID) relokasi Jalan Nasional Ruas Sei Duri - Mempawah, Kalimantan Barat. f. Implementasi kajian program <i>green port</i> sub bidang pengelolaan energi. g. Kajian perencanaan mekanikal dan elektrikal pengembangan <i>New Priok Eastern Access</i> (NPEA) Pelabuhan Kalibaru/<i>New Priok</i>. h. Konstruksi infrastruktur mekanikal dan elektrikal pengembangan dan pembangunan Terminal Kijing Tahap Inisial Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat . i. <i>Monitoring</i> pelaksanaan elektrifikasi alat bongkar muat di cabang pelabuhan IPC. j. Pengadaan peralatan Terminal Kijing. k. Pengembangan perangkat <i>Remote Crane Management and Monitoring System</i> (RCMMS) Tahap II. l. Perencanaan peralatan untuk Pelabuhan Patimban. m. Pengembangan perangkat <i>Remote Ship Condition and Monitoring System</i> (RSCMS). n. Perencanaan peralatan untuk pembangunan terminal dan <i>inland waterway</i> Cikarang-Bekasi-Laut (CBL) Tahap 1. o. Implementasi <i>dashboard monitoring</i> terintegrasi proyek strategis. p. Perencanaan jalan akses Timur Kalibaru. q. Perencanaan relokasi utilitas eksisting terkait pembangunan terminal dan <i>inland waterway</i> Cikarang Bekasi Laut (CBL). r. Pembuatan dokumen AMDAL untuk Pengembangan NPEA. <p>5. Direktorat Operasi: <i>Digitalized Ecosystem</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi <i>Marine Operating System</i> (MOS) di Cabang Banten. b. Implementasi MOS di Cabang Panjang dan Teluk Bayur. | <ul style="list-style-type: none"> f. Synchronize tariff policies or regulations within IPC Group. g. Implementation of customer design and segmentation. h. Setting customer service standards in IPC environment. i. Implementation of technology-based customer service. j. Formulating the business alliance strategies. k. Implementation of the <i>gate pass</i> at port branch. <p>4. Directorate of Engineering: <i>Port Development and infrastructure/ equipment first class performance and green port</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Advancing the investment realization monitoring system. b. Kalibaru Terminal Construction Phase I. c. Implementation of Kalibaru Terminal Operational and Environmental Monitoring Plan (RKLRLPL). d. Planning of Kalibaru Container Terminal Phase 1B. e. Survey, Investigation and Design (SID) on the relocation of Sei Duri - Mempawah National Road Section, West Kalimantan. f. Implementation of green port study program in energy management sub sector. g. Study of mechanical and electrical planning for the development of New Priok Eastern Access (NPEA) of Kalibaru/<i>New Priok</i> Port. h. Construction of mechanical and electrical infrastructure development and construction of Kijing Terminal Initial Phase at Mempawah Regency, West Kalimantan. i. Monitoring the implementation of electrification of loading and unloading equipment at IPC port branch. j. Procurement of Kijing Terminal equipment. k. Development of Remote Crane Management and Monitoring System (RCMMS) devices Phase II. l. Planning of Equipment for Patimban Port. m. Development of Remote Ship Condition and Monitoring System (RSCMS) devices. n. Planning of equipment for the construction of Cikarang-Bekasi-Laut (CBL) terminal and inland waterway Phase 1. o. Implementation of integrated strategic project monitoring dashboard. p. Planning of East Kalibaru access road. q. Planning of the relocation of existing utilities related to the construction of Cikarang Bekasi Laut (CBL) terminal and inland waterway. r. Making AMDAL documents for NPEA Development. <p>5. Directorate of Operations: <i>Digitalized Ecosystem</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Implementation of Marine Operating System (MOS) in Banten Branch. b. Implementation of MOS in Panjang and Teluk Bayur Branches. |
|--|---|

- c. Pembangunan aplikasi *Vessel Management System* (VMS) untuk *platform* iOS dan Android.
 - d. Implementasi *system performance monitoring* operasional kapal tunda.
 - e. Desain pola operasi rencana pembangunan *logistic center* di Tanjung Priok.
 - f. Implementasi *auto-gate system* di Terminal NPK (Cabang Panjang dan Palembang).
 - g. Implementasi dan integrasi NPK TOS Dengan VMS dan *e-service*.
 - h. Implementasi NPK-S di lingkungan IPC (Cabang Panjang, Pontianak, Palembang, dan Jambi).
 - i. Standarisasi pola operasional di terminal non petikemas untuk TCK, TMP, TCC.
 - j. Implementasi pedoman pelayanan petikemas pada cabang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 - k. Implementasi pola operasi berbasis TOS di cabang Bengkulu dan Sunda Kelapa.
 - l. Integrasi sistem pelayanan terminal dengan sistem pelayanan kapal.
 - m. Program pengembangan/penyelarasan SOP pada kegiatan operasional dengan kebijakan SMK3.
 - n. DC dan DRC *enhancement* Fase 2.
 - o. Implementasi dan *roll out* ESB Tahap II.
 - p. *IT Service Management* Fase II.
 - q. Persiapan pengoperasian pelayanan terminal petikemas Pelabuhan Kijing.
 - r. Implementasi pola operasi berbasis *autogate system* di TPK Panjang.
 - s. Implementasi pedoman standarisasi fasilitas terminal pelayanan barang dan penumpang.
6. Direktorat Keuangan: *Financial Solidity Creative Financing IPC Group*
- a. Pelaksanaan Pengembangan *Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service* (EPBCS) Tahap II.
 - b. Implementasi sistem akuntansi biaya pelayanan terminal petikemas di PT IPC Terminal Petikemas fase pertama pada area Panjang dan Palembang.
 - c. Pengembangan *Sistem Oracle Project Costing* Tahap III : Entitas Anak.
 - d. Pengembangan datamart keuangan berbasis BI Fase II.
 - e. Pengembangan IPC *Intercompany System* Fase III.
 - f. Pengembangan sistem administrasi nota jasa kepelabuhanan lain-lain.
 - g. *Roll out oracle cash management* ke Cabang-Cabang Pelabuhan.
 - h. Sosialisasi dan *monitoring* implementasi kebijakan *e-payment*.
- c. Development of *Vessel Management System* (VMS) applications for iOS and Android platforms.
 - d. Implementation of operational performance monitoring system for tugs.
 - e. Design the operational pattern of logistic center development plan in Tanjung Priok.
 - f. Implementation of *auto-gate system* in NPK Terminals (Panjang Branch and Palembang Branch).
 - g. Implementation and integration of NPK TOS with VMS and *e-service*.
 - h. Implementation of NPK-S in IPC environment (Panjang, Pontianak, Palembang, and Jambi Branch).
 - i. Standardize operational patterns in non-container terminals for TCK, TMP, TCC.
 - j. Implementation of container service guidelines at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) branch.
 - k. Implementation of TOS-based operating patterns in Bengkulu and Sunda Kelapa branch.
 - l. Integration of terminal service systems with ship service systems.
 - m. SOP development/alignment program in operational activities with OHSMS policy.
 - n. DC and DRC *enhancement* Phase 2.
 - o. ESB Phase II implementation and *roll out*.
 - p. *IT Service Management* Phase II.
 - q. Preparation for operation of Beijing Port container service terminal.
 - r. Implementation of *autogate system* based operating patterns in TPK Panjang.
 - s. Implementation of standardization guidelines for goods and passenger service terminal facilities.
6. Directorate of Finance: *Financial Solidity Creative Financing IPC Group*
- a. Implementation of Development of *Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service* (EPBCS) Phase II.
 - b. Implementation of container terminal service cost accounting system at PT IPC Terminal Petikemas first phase in Panjang and Palembang area.
 - c. Development of *Oracle Project Costing System* Phase III: Subsidiaries.
 - d. Development of BI-based financial datamart Phase II.
 - e. Development of IPC *Intercompany System* Phase III.
 - f. Development of other port services memorandum administration systems.
 - g. *Roll out of oracle cash management* to Port Branches.
 - h. Socialization and monitoring of *e-payment* policy implementation.



7. Direktorat SDM: Fully Implemented HRD System and Corporate Culture
- Aplikasi *performance management system* melalui implementasi KPI Individu.
 - Implementasi program *exit plan* pekerja.
 - Integrasi antar aplikasi sistem *human capital*.
 - Penyusunan *Strategi Shared Service Center (SSC)*.
 - Penyempurnaan sistem kebijakan dan aplikasi pola karir.
 - Penyempurnaan sistem kebijakan dan aplikasi *management talenta*.
 - Pembangunan *HR dashboard* demografi.
 - Pengembangan Sistem HR data dan *payroll*.
 - Proses percepatan penegakkan disiplin pekerja.
 - Pengembangan modul pelatihan dan konten *e-learning*.
 - Perencanaan peningkatan kompetensi pekerja dalam mendukung *holding* kemaritiman.
 - Integrasi LMS dengan sistem SDM.
 - Pengembangan *sistem knowledge management*
8. Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis: *Logistic Business Enhancement and Transformation in IPC Group*.
- Pembangunan lanjutan sistem OMR Tahap 3.
 - Review bisnis proses, penyesuaian SOP dan penetapan SLA kunci, pembuatan pedoman evaluasi kebijakan perusahaan (mereviu seluruh proses *quality control* IPC Grup).
 - Implementasi *business continuity management* berkelanjutan.
 - Kajian risiko atas proyek strategis.
 - Pemetaan potensi pengembangan bisnis anorganik.
 - Menerapkan manajemen risiko sebagai *decision making* proses di bidang komersial, operasional, teknik dan keuangan.
 - Penyusunan *blueprint* transformasi IPC sejalan dengan RJPP 2016-2020 (RJPP 2015-2019 perubahan).
 - Penyiapan *business intelligence* untuk pengembangan bisnis pelabuhan sebagai *ecosystem*.
 - Evaluasi *new development* industri pelabuhan di dunia.
 - Review business model* IPC Group secara menyeluruh.
 - Lanjutan Pembentukan Pelindo Incorporated.
 - Penyusunan strategi sinergitas entitas anak dan cabang pelabuhan untuk pengembangan bisnis.
7. Directorate of Human Capital: Fully Implemented HRD System and Corporate Culture
- Application of performance management systems through the implementation of Individual KPIs.
 - Implementation of employee exit plan program.
 - Integration between human capital system applications.
 - Formulation of Shared Service Center (SSC) Strategy.
 - Enhancement of career path policy system and application.
 - Enhancement of talent management policy system and application.
 - Development of HR demographic dashboard.
 - Development of HR data and payroll system.
 - The process of accelerating the enforcement of employee discipline.
 - Development of training modules and e-learning content.
 - Planning of employee competency development in supporting maritime holding.
 - Integration of LMS with HC systems.
 - Development of knowledge management system.
8. Directorate of Business Transformation and Development: Logistic Business Enhancement and Transformation in IPC Group.
- Advanced development of OMR system Phase 3.
 - Review business processes, adjust SOPs and establish key SLAs, develop company policy evaluation guidelines (review the entire IPC Group quality control process).
 - Implementation of sustainable business continuity management.
 - Risk assessment of strategic projects.
 - Mapping the potential for inorganic business development.
 - Apply risk management as an element of decision making processes in the commercial, operational, technical and financial fields.
 - Preparation of IPC transformation blueprint is line with RJPP 2016-2020 (RJPP 2015-2019 revised).
 - Preparing business intelligence for developing the port business as an ecosystem.
 - Evaluation of the new development of port industry in the world.
 - Overall review of IPC Group business model.
 - Continuation of Pelindo Incorporated Formation.
 - Formulation of synergy strategies for subsidiaries and port branches for business development.

ASPEK PEMASARAN

Uraian aspek pemasaran meliputi strategi pemasaran serta pangsa pasar atas produk dan jasa IPC.

STRATEGI PEMASARAN

IPC menerapkan konsep *Holistic Marketing Strategy* yang mana pemasaran tidak hanya berorientasi kepada penjualan dan iklan, tetapi lebih menitikberatkan kepada pemuasan kebutuhan pelanggan melalui penciptaan dan penyampaian nilai (*value creation and delivery*) dengan menciptakan hubungan yang erat dengan pelanggan. Dalam hal ini IPC mengedepankan pendekatan dengan pemilik barang (*cargo owner*) untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Penjelasan lebih rinci mengenai strategi pemasaran dan saluran promosi IPC di uraikan sebagai berikut.

PRICE LEADERSHIP

Strategi pemasaran dengan menggunakan pendekatan tarif atau harga dalam memasarkan produk/jasa, antara lain:

1. Menawarkan tarif yang kompetitif dibandingkan dengan pelabuhan kompetitor;
2. Memberikan potongan tarif (diskon);
3. Memberikan kompensasi (*reward*);
4. Memberikan insentif;
5. Memberikan kemudahan pembayaran dalam periode waktu tertentu;
6. Strategi lainnya yang terkait dengan pendekatan *price leadership* yang ditentukan Perseroan.

SERVICE DIFFERENTIATION

Strategi pemasaran dengan menggunakan pendekatan pelayanan dengan memasarkan produk dan jasa, antara lain:

1. Meningkatkan Standar Kinerja Pelabuhan BCH yang bertambah atau berkurangnya *turn around time* kapal;
2. Menciptakan competitive advantage dari sisi produk/layanan dengan memberikan kualitas pelayanan (*quality leadership*) yang terbaik kepada pengguna jasa dan atau calon mitra/investor sehingga terpenuhinya keinginan dan kebutuhan mereka;
3. Keandalan sistem Teknologi Informasi (TI) yang mendukung kelancaran transaksi di pelabuhan sehingga mengurangi banyaknya dokumentasi dan mampu menekan biaya logistik pengguna jasa dan atau calon mitra/investor;

MARKETING ASPECT

Description of marketing aspect includes marketing strategies and market share of IPC products and services.

MARKETING STRATEGY

IPC applies the concept of *Holistic Marketing Strategy*, where marketing is not only oriented towards sales and advertising, but focuses more on satisfying customer needs through value creation and delivery by building close relationships with customers. To that end, IPC puts forward an approach with cargo owners to be able to meet their needs.

A more detailed explanation of IPC's marketing strategy and promotion channel is described as follows.

PRICE LEADERSHIP

Marketing strategy using a tariff or price approach in products/ services marketing, including:

1. Offer competitive rate compared to competitor ports;
2. Give discount;
3. Provide compensation (*reward*);
4. Provide incentives;
5. Provide easy payment within a certain time period;
6. Other strategies related to the price leadership approach established by the Company.

SERVICE DIFFERENTIATION

Marketing strategy by using a service approach in products and services marketing, including:

1. Increase the BCH Port Performance Standards or decrease the turnaround time of ship;
2. Create competitive advantage in terms of products/services by providing the best quality of service (*quality leadership*) to service users and/or potential partners/investors so that their needs and needs are met;
3. Reliability of Information Technology (IT) systems that support smooth transactions at the port thereby reducing the amount of documentation and able to reduce logistics costs for service users and/or potential partners/investors;



4. Kepemilikan alat-alat yang baru atau yang lebih modern sehingga mempercepat kegiatan bongkar muat;
5. Memiliki jangkauan layanan pengiriman barang dari pelabuhan ke pemilik barang (*port to door*);
6. Strategi lainnya yang terkait dengan pendekatan *service differentiation* yang ditentukan Perseroan;
7. Memberikan *great positioning* IPC di pasar yang menunjukkan perbedaan besar dengan kompetitor;
8. Memiliki basis konsumen yang loyal karena layanan IPC memiliki perbedaan dengan kompetitor;
9. Memiliki nilai lebih yang membuat IPC dapat memberikan *premium price* kepada konsumen.

SALURAN PROMOSI

IPC memiliki produk/jasa yang ditawarkan kepada para pengguna jasa atau calon mitra/investor berupa Jasa Kepelabuhanan (Jasa Kapal, Jasa Barang, Jasa Rupa – Rupa). Selain produk/jasa, IPC juga menawarkan proyek pengembangan pelabuhan serta pemanfaatan aset perusahaan. Untuk itu saluran promosi yang digunakan oleh IPC adalah sebagai berikut:

1. Publikasi melalui media cetak (surat kabar, Majalah, dan lainnya) dan media elektronik (TV dan media sosial);
2. *Gathering/Bisnis forum/Forum Investor/Marketing Outlook*;
3. Eksibisi/pameran;
4. *Marketing visit* dan studi banding.

PANGSA PASAR

Secara keseluruhan pangsa pasar yang dapat dilayani oleh IPC untuk bongkar muat peti kemas pada tahun 2019 adalah sebesar 7.554.225 TEUs atau 98,61% dari total realisasi *throughput* yang melewati fasilitas dermaga IPC peti kemas sebesar 7.640.312 TEUs. Sedangkan untuk segmen *non* petikemas, pangsa pasar bongkar muat yang dilayani oleh IPC pada tahun 2019 adalah sebesar 32.781.604 Ton atau 54,60% dari total realisasi *throughput* yang melewati fasilitas dermaga IPC sebesar 60.035.441.

Dari total realisasi *throughput* tersebut, pangsa pasar petikemas IPC tahun 2019 adalah 99% dan *non* petikemas 55%, meningkat dibandingkan dengan pangsa pasar petikemas tahun 2018 yang sebesar 77% dan *non* petikemas sebesar 50%. Pangsa pasar tersebut merupakan pangsa pasar yang dibandingkan dengan kompetitor yang ada di wilayah kerja Pelabuhan IPC.

4. Ownership of new or more modern equipment so as to accelerate loading and unloading activities;
5. Has a range of goods delivery services from the port to the goods owner (*port to door*);
6. Other strategies related to the *service differentiation* approach determined by the Company;
7. Provide *great positioning* of IPC in the market, in order to show a huge difference with competitors;
8. Has a loyal customer base because IPC services are different from competitors;
9. Has added value that enable IPC to give *premium prices* to consumers.

PROMOTIONAL CHANNEL

IPC has products/services offered to service users or prospective partners/investors in the form of Port services (Ship services, Goods services, Miscellaneous services). In addition to products/services, IPC also offers port development projects and utilization of company assets. For this reason, the promotion channels used by IPC are as follows:

1. Publication through print media (newspapers, magazines and others) and electronic media (TV and social media);
2. *Gathering/Business forum/Investor forum.*;
3. Exhibition;
4. Port visit and comparative study.

MARKET SHARE

Overall market share that can be served by IPC for container loading and unloading in 2019 was 7,554,225 TEUs or 98.61% of the total realization of throughput that passed through IPC container dock facilities amounting to 7,640,312 TEUs. As for the non-container segment, the loading and unloading market share served by IPC in 2019 was 32,781,604 Tons or 54.60% of the total realization of throughput that passed through IPC dock facilities amounted to 60,035,441.

Of the total realization of throughput, IPC container market share was 99% and non-container 55% in 2019, an increase compared to container market share of 77% and non-container of 50% in 2018. This market share is the market share compared to competitors within IPC Port's working area.

Diagram Pangsa Pasar Petikemas IPC 2019
IPC Container Market Share 2019

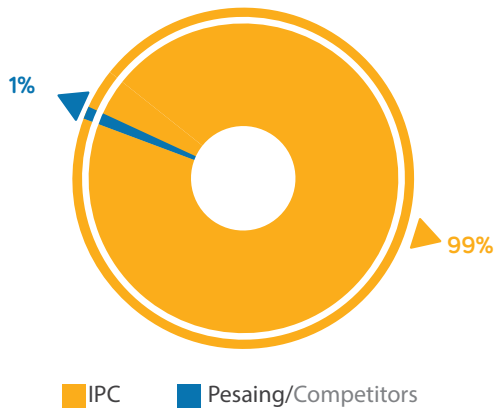


Diagram Pangsa Pasar Petikemas IPC 2018
IPC Container Market Share 2018

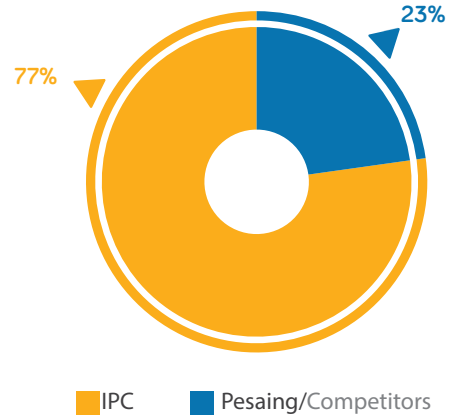


Diagram Pangsa Pasar Non Petikemas IPC 2019
IPC Non-Container Market Share 2019

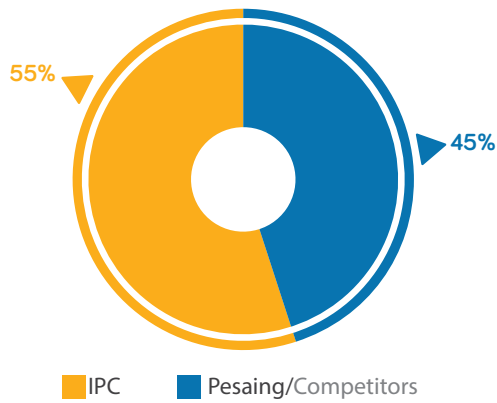
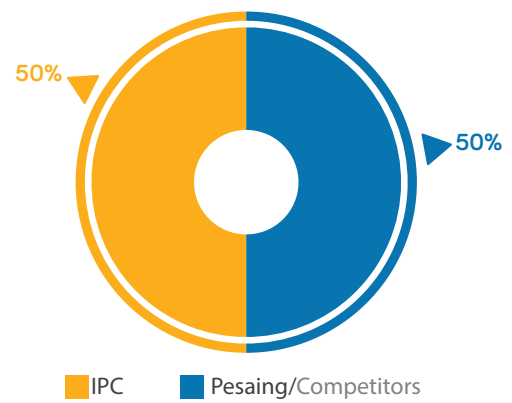


Diagram Pangsa Pasar Non Petikemas IPC 2018
IPC Non-Container Market Share 2018



Sumber: Data *traffic* Direktorat Operasi per Desember 2018 dan 2019
Source: Data of traffic of Directorate of Operations as of December 2018 dan 2019



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Segmen usaha Perseroan dikelompokkan ke dalam segmen usaha operasi dan geografis. Segmen usaha operasi meliputi Segmen Operasi Kepelabuhanan dan Segmen Jasa Lainnya. Segmen Geografis terdiri dari Tanjung Priok, Panjang, Banten, Palembang, Teluk Bayur, Pontianak, Bengkulu, Cirebon, Sunda Kelapa, Jambi, Pangkal Balam, dan Tanjung Pandan.

Penjelasan, produktivitas, pendapatan dan profitabilitas dari masing-masing segmen usaha diuraikan sebagai berikut.

SEGMENT OPERASI KEPELABUHANAN

Segmen Operasi Kepelabuhanan meliputi Pelayanan Jasa Barang, Pelayanan Terminal, Pengusahaan Alat, Pelayanan Terminal Petikemas.

PELAYANAN JASA KAPAL

Pelayanan jasa kapal merupakan pelayanan yang diberikan kepada kapal mulai masuk hingga keluar pelabuhan. Pelayanan jasa kapal meliputi:

1. Jasa Labuh
Jasa yang diberikan untuk kapal melakukan lego jangkar di area kolam pelabuhan sebelum kapal sandar;
2. Jasa Tambat
Jasa yang diberikan untuk kapal yang merapat ke dermaga untuk melakukan kegiatan bongkar muat;
3. Jasa Pandu
Jasa yang diberikan untuk kapal keluar masuk menuju dermaga melalui alur pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan;
4. Jasa Tunda
Jasa yang diberikan oleh kapal tunda untuk mendorong atau menarik kapal menuju atau keluar dermaga.

Produktivitas Pelayanan Jasa Kapal

Realisasi untuk produksi pelayanan jasa kapal tahun 2019 di lingkungan IPC dapat dilihat pada tabel berikut:

OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT

The Company's business segments are grouped into operating and geographical business segments. The operating business segment includes Port operation segment and other services segment. The geographical segment consists of Tanjung Priok, Panjang, Banten, Palembang, Teluk Bayur, Pontianak, Bengkulu, Cirebon, Sunda Kelapa, Jambi, Pangkal Balam, and Tanjung Pandan.

Explanation, productivity, revenue and profitability of each business segment are described as follows.

PORT OPERATION SEGMENT

The Port operation segment includes Goods services, Terminal services, Tool operations, Container Terminal services.

SHIP SERVICES

Ship services is ship operational services activities from the time the ships enter the port until their departure. Ship services include:

1. Anchorage
Services provided to vessels to safely await the subsequent services;
2. Berthing
Services to moore the ship to the dock;
3. Pilotage
Services to assist, providing advice, information to the ship captain on the conditions of the port, water, and local navigation channels that are crucial to ensure a safe, orderly, and smooth ship navigation for the safety of the ship and the environment;
4. Towage
Services to dock the ship to the pier using Tug Boats.

Productivity of Ship Services Segment

The realization for ship services Production in 2019 in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) can be viewed in the following table:

Tabel Produksi Jasa Pelayanan Kapal
Table of Ship Services Production

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
a. Labuh Anchorage	GT				
b. Tambatan Berthing	Gtetm	345.982.640	374.750.198	(28.767.558)	(7,68%)
c. Pemanduan Pilotage	Kplgrk	65.901	78.849	(12.948)	(16,42%)
	GT	512.262.353	558.658.947	(46.396.594)	(8,30%)
d. Penundaan Towage	Kpljam	147.483	167.550	(20.067)	(11,98%)
	GT	1.363.889.185	1.485.616.532	(121.727.347)	(8,19%)

Labuh

Realisasi produksi jasa labuh di pelabuhan umum tahun 2018 dan 2019 tidak dipungut dan dicatatkan terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Anchorage

Actual production of anchorage services in public ports in 2018 and 2019 was not collected and recorded in connection with the Minister of Transportation Regulation No. 69 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Types and Rates of Types of Non-Tax State Revenues Applicable to the Directorate General of Sea Transportation.

Tambatan

Realisasi produksi jasa tambat di pelabuhan umum tahun 2019 sebesar 345.982.640 Gtetm turun 7,68% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 374.750.198. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh tidak tercapainya produksi jasa tambat kunjungan kapal domestik dan berbendera luar negeri di pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Palembang Pontianak. Penurunan tersebut seiring dengan menurunnya kunjungan kapal luar negeri dan domestik melalui pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Palembang Pontianak Banten dan Teluk Bayur.

Berthing

Actual production of berthing services at public ports in 2019 amounted to 345,982,640 Gt-Etm, decreased by 7.68% compared to 2018 of 374,750,198. This was mainly due to the unachieved berthing production of domestic and international flag ship call services at Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Pontianak Ports. The decline was in line with the decline in international and domestic ship calls through Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Pontianak, Banten and Teluk Bayur Ports.

Pemanduan dan Penundaan

Realisasi produksi jasa pemanduan tahun 2019 dalam jumlah gerakan tercapai sebesar 65.901 Kplgrk turun 16,42% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 78.849 Kplgrk. Hal ini dipengaruhi menurunnya jumlah gerakan pemanduan seiring dengan menurunnya kunjungan kapal di Pelabuhan Umum terutama di Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Teluk Bayur dan Bengkulu.

Pilotage and Towage

Actual production of pilotage services in 2019 in the number of movements reached 65,901 Kpl-Grk, 16.42% lower compared to 2018 of 78,849 Kpl-Grk. This was influenced by the declining number of pilotage movements along with the decline in ship calls at the Public Ports, especially at Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Teluk Bayur and Bengkulu Ports.

Realisasi produksi jasa penundaan tahun 2019 sebesar 147.483 Kpl-Jam, turun 11,98% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 167.550 Kpl-Jam. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak tercapainya target jasa penundaan Pelabuhan Umum khususnya kapal dengan ukuran kelompok Grt 26001 sampai dengan 40.000 dan belum terealisasinya kerjasama di Tersus Kedawangan dan Tersus

Actual production of towage services in 2019 was 147,483 Kpl-Hours, 11.98% lower compared to 2018 of 167,550 Kpl-Hours. This was influenced by the failure to achieve the target of public port towage services, especially ships with the size group of Grt 26001 up to 40,000 and the unrealized cooperation in Tersus Kedawangan and Tersus (Exxon Mobil Cepu Limited) and DUKS



(Exxon Mobil Cepu Limited) dan DUKS tertuata di Pelabuhan Tanjung Priok, Teluk Bayur, Bengkulu dan Panjang seiring dengan penurunan jumlah kunjungan kapal regular luar negeri (*ocean going*) di pelabuhan tersebut.

Pendapatan Pelayanan Jasa Kapal

Pendapatan pelayanan jasa kapal tahun 2019 sebesar Rp1,32 triliun mengalami penurunan sebesar Rp94,39 miliar atau 6,66% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1,42 triliun. Hal ini terutama disebabkan:

1. Tidak tercapainya pendapatan pandu dan tunda di Pelabuhan umum pada beberapa cabang pelabuhan yang disebabkan penurunan kunjungan kapal luar negeri terutama pada Pelabuhan Tanjung Priok dan panjang yang merupakan pengaruh dari perlambatan ekonomi secara nasional dan global/*deficit Balance Of Trade* (BOT);
2. Adanya pembatasan ekspor karet di tahun 2019 yang disebabkan harga pasar internasional karet sangat rendah sehingga 3 (tiga) negara (Indonesia, Malaysia, Thailand) sepakat untuk membatasi ekspor karet dan kebutuhan untuk metal box juga berkurang sejalan dengan penurunan ekspor tersebut.

at Tanjung Priok, Teluk Bayur, Bengkulu and Panjang Ports, along with the decline in the number of regular international ship calls (*ocean going*) at these ports.

Ship Services Revenue

Ship services revenue in 2019 amounted to Rp1.32 trillion, a decrease of Rp94.39 billion or 6.66% compared to 2018 of Rp1.42 trillion. This was mainly due to:

1. Unachievement of pilotage and towage revenue at public ports in several port branches due to the decrease in international ship calls, especially at Tanjung Priok and Panjang Port, as affected by the national and global economic slowdown/deficit Balance of Trade (BOT).
2. Restriction on rubber exports in 2019 due to the very low international rubber market price, so that 3 (three) countries (Indonesia, Malaysia, Thailand) agreed to limit rubber exports and the need for metal boxes was also reduced in line with the decline in exports.

Tabel Pendapatan Pelayanan Jasa Kapal (dalam ribuan Rupiah)
Table of Ship Services Revenue (in thousands of rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pelayanan Jasa Kapal Ship Services	1.322.240.654	1.416.634.965	(94.394.311)	(6,66%)

PELAYANAN JASA BARANG

Merupakan pelayanan bongkar muat mulai dari kapal hingga penyerahan ke pemilik barang. Pelayanan barang meliputi:

1. Jasa Dermaga
Pelayanan yang disediakan untuk kegiatan bongkar maupun muat atau naik turun penumpang melalui dermaga.
2. Gudang dan Lapangan Penumpukan Merupakan jasa penyimpanan atau penempatan kontainer.

CARGO SERVICES

MA loading and unloading service from ship to delivery to the owner of the goods. goods service includes:

1. Dock services
Services provided for loading and unloading activities or boarding passengers through the dock.
2. Warehouse and stacking field
Container storage or placement services

Produktivitas Pelayanan Jasa Barang

Realisasi sampai dengan periode tahun 2019 untuk Produksi Pelayanan Jasa Barang di IPC dapat dilihat pada tabel berikut.

Cargo Services Productivity

The 2019 realization for cargo services in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) can be seen in the following table.

Tabel Produksi Pelayanan Jasa Barang
Table of Cargo Services Production

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
a. Dermaga Umum General Dock	Ton	49.632.970	48.585.622	1.047.348	2,16%
	M ³	5.582.922	8.162.458	(2.579.536)	(31,60%)
	Box	327.645	655.217	(327.572)	(49,99%)
	Ekor Tail	588.833	231.613	357.220	154,23%
	Unit	935.280	798.852	136.428	17,08%
b. Gudang Penumpukan Stacking Warehouse	Ton Hari Ton-Day	2.993.366	3.956.008	(962.642)	(24,33%)
	M ³ Hari M ³ -Day	475.201	580.742	(105.541)	(18,17%)
c. Lapangan Penumpukan Stacking Field	Ton Hari Ton-Day	9.935.920	10.030.135	(94.215)	(0,94%)
	M ³ Hari M ³ -Day	9.517.687	7.886.370	1.631.317	20,69%
	Ekor Hari Day Tails	287.266	198.234	89.032	44,91%
	Box Hari Box Day	5.843	558.452	(552.609)	(98,95%)
	Unit Hari Days Unit	924.370	416.189	508.181	122,10%

Dermaga Umum

Realisasi produksi pelayanan jasa dermaga untuk tahun 2019 dalam satuan Ton sebesar 49.632.970 Ton atau mengalami tren pertumbuhan naik sebesar 2,16% terhadap realisasi di tahun 2018 sebesar 48.585.622 Ton. Hal ini dipengaruhi dengan terealisasinya komoditi curah kering di Cirebon, *general cargo*, dan *sparepart* di terminal domestik dan internasional *car terminal*, *bag cargo* di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur dan Banten.

Realisasi produksi pelayanan jasa barang di dermaga umum dalam satuan M³ sebesar 5.582.922 atau mengalami tren penurunan sebesar 31,60% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 8.162.458. Hal tersebut seiring dengan menurunnya realisasi kegiatan *general cargo* di Pelabuhan Tanjung Priok

Realisasi produksi pelayanan jasa dermaga di terminal *multipurpose* dalam satuan Box sebesar 327.645 Box atau mengalami tren penurunan sebesar 49,99% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar 655.217 Box. Hal ini sejalan dengan belum terealisasinya kegiatan petikemas di Pelabuhan Cirebon dan tidak tercapainya anggaran arus petikemas melalui Pelabuhan Bengkulu, Sunda Kelapa dan Pangkal Balam.

General Dock

The realization of dock service production for 2019 in Ton unit was 49,632,970 tons or experienced an upward growth trend of 2.16% compared to the realization in 2018 of 48,585,622 tons. This was affected by the realization of dry bulk commodity in Cirebon, general cargo, and spare part in domestic and international terminals for car terminals, bag cargoes at Teluk Bayur and Banten Ports.

The realization of cargo services production at the general dock in M³ unit amounted to 5,582,922 or experienced a downward trend of 31.60% when compared to the realization of 2018 amounting to 8,162,458. This was in line with the decline in the realization of general cargo activities at Tanjung Priok Port

The dock services at the multipurpose terminal in Box unit was realized at 327,645 Boxes or experienced a downward trend of 49.99% below the realization of 2018 of 655,217 Boxes. This was in line with the unrealized container activities at Cirebon Port and the unachieved budget of container flows through Bengkulu, Sunda Kelapa and Pangkal Balam Ports.



Realisasi produksi pelayanan jasa dermaga dalam satuan ekor sebesar 588.833 ekor atau mengalami tren pertumbuhan sebesar 154,23% di atas realisasi tahun 2018 sebesar 231.613 ekor sebagaimana terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok dan Panjang seiring dengan meningkatnya kebutuhan hewan untuk kebutuhan Idul Fitri dan untuk persiapan ibadah qurban Idul Adha.

Realisasi produksi pelayanan jasa dermaga dalam satuan unit sebesar 935.280 unit atau mengalami tren pertumbuhan sebesar 17,68% di atas realisasi tahun 2018. Hal ini sejalan dengan tercapainya anggaran kendaraan (mobil) dan alat berat melalui terminal kendaraan PT IKT Tbk.

Gudang dan Lapangan Penumpukan

Realisasi produksi pelayanan jasa gudang untuk tahun 2019 dalam satuan Ton-Hari sebesar 2.993.366 Ton-Hari atau turun 24,33% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar 3.956.008 Ton-Hari. Hal ini seiring dengan menurunnya penumpukan box metal karet, kelapa di Pelabuhan Palembang dan Jambi.

Realisasi produksi pelayanan jasa penumpukan melalui gudang dalam satuan M³-Hari tahun 2019 sebesar 475.201 di bawah realisasi tahun 2018 sebesar 580.742. Hal ini dipengaruhi kecenderungan kegiatan penumpukan barang *untize* melalui gudang di Pelabuhan Tanjung Priok, Palembang, Jambi dan Cirebon karena didukung dengan adanya faktor libur panjang lebaran di Cabang Pelabuhan tersebut.

Realisasi produksi pelayanan jasa penumpukan melalui lapangan dalam satuan Ton-Hari sebesar 9.935.920 atau 0,94% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar 10.030.135. Hal tersebut dipengaruhi oleh waktu/masa penumpukan di lapangan yang tidak lama (*truck lossing* atau muat langsung) untuk komoditi *general cargo* yang ditangani yang tidak terjadi di pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa dan Pangkal Balam.

Pendapatan Pelayanan Jasa Barang

Pendapatan pelayanan jasa barang tahun 2019 sebesar Rp107,22 miliar mengalami penurunan sebesar Rp43,90 miliar atau 29,05% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp151,12 miliar. Hal ini dipengaruhi:

1. Seiringnya dengan penurunan trafik kapal secara umum pada lingkungan bisnis IPC khususnya pada beberapa pelabuhan yang besar antara lain Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Pontianak serta terjadi penurunan *handling cargo multipurpose* dan turunnya permintaan domestik untuk komoditi gypsum, klinker dan batubara;
2. Adanya larangan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) terutama pada negara Uni Eropa dengan *issue* lingkungan hidup, penurunan

The dock services in animal unit was realized at 588,833 animals or experienced a growth trend of 154.23% above the 2018 realization of 231,613 animals as occurred Tanjung Priok and Panjang Ports, along with the increasing need for animals for Eid al-Fitr and for the preparation of qurban worship of Eid al-Adha.

The realization of dock services production in unit reached 935,280 units or experienced a growth trend of 17.68% above the realization in 2018. This was in line with the achievement of the vehicle (car) and heavy equipment budget through PT IKT Tbk vehicle terminal.

Warehouse and Stacking Field

The realization of warehouse service production for 2019 in Ton-Day unit amounted to 2,993,366 Ton-Days or decreased by 24.33% lower than the realization of 2018 of 3,956,008 Ton-Days. This was in line with the decline in the stacking of rubber, coconut metal boxes in Palembang and Jambi Ports.

The warehouse stacking service production in M³-Day unit in 2019 was realized at 475,201, lower than the 2018's realization of 580,742. This was influenced by the tendency of untize goods stacking through warehouse in Tanjung Priok, Palembang, Jambi and Cirebon Ports due to Eid Al-Fitr long holidays at the Port Branches.

The realization of stacking field service in Ton-Day unit was 9,935,920 or 0.94% below the 2018's realization of 10,030,135. This was affected by the short time/period of stacking (truck lossing or direct loading) for general cargo commodities being handled, which did not occur at Tanjung Priok, Sunda Kelapa and Pangkal Balam Ports.

Cargo Services Revenue

Revenue from cargo services in 2019 amounted to Rp107.22 billion, a decrease of Rp43.90 billion or 29.05% compared to 2018 amounting to Rp151.12 billion. This was influenced by:

1. Along with the overall decline in ship traffic in IPC business environment, especially in several large ports, including Tanjung Priok, Panjang, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Pontianak Ports as well as a decline in multipurpose cargo handling and a decrease in domestic demand for gypsum, clinker and coal;
2. The existence of a ban on Crude Palm Oil (CPO) exports, especially in European Union countries with environmental

ekspor juga terjadi pada negara tujuan India dan Tiongkok.

issues, decreased exports also occurred in the destination countries of India and China.

Tabel Pendapatan Pelayanan Jasa Barang (dalam ribuan Rupiah)
Table of Cargo Services Revenue (in thousand Rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pelayanan Jasa Barang Cargo Services	107.220.693	151.122.002	(43.901.309)	(29,05%)

PELAYANAN TERMINAL

Pelayanan terminal ini, antara lain termasuk penanganan petikemas domestik, *break bulk*, *dry bulk*, curah cair dan kendaraan domestik maupun penumpang.

TERMINAL SERVICES

Terminal services include among others, the handling of domestic containers, break bulk, dry bulk, liquid bulk, and domestic and passenger vehicles.

Produktivitas Pelayanan Terminal

Realisasi sampai dengan periode tahun 2019 untuk produksi pelayanan jasa terminal di lingkungan IPC dapat dilihat pada tabel berikut:

Terminal Services Productivity

The realization up to the 2019 period for Terminal services in IPC can be viewed in the following table:

Tabel Produksi Pelayanan Terminal
Table of Terminal Services Production

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Stevedoring	Ton	34.433.553	34.940.698	(507.145)	(1,45%)
	M ³	2.450.173	2.749.800	(299.627)	(10,90%)
Cargodoring	Ton	2.784.890	3.621.006	(836.116)	(23,09%)
	M ³	2.449	-	-	-
Overbengen	TEUs	-	3.996	-	-
Receiving/delivery	Ton	275.035	221.839	53.196	23,98%
	Unit	15.141	13.452	1.689	12,56%
	Box	22.654	15.390	7.264	47,20%
Roro	Paket Package	737.830	332.819	405.011	121,69%
Supervisi Supervision					
GC, Bag, Dry Bulk, Liquid Cargo	Ton	5.126.866	6.449.296	(1.322.430)	(20,51)
Petikemas Container	Box	-	-	-	-
Hewan Ternak Livestock	Ekor Tail	-	-	-	-
Alat Berat/Kendaraan Heavy Equipment/Vehicles	Unit	-	-	-	-
Bongkar Muat Petikemas Container Loading and Unloading					
Operasi Kapal Ship Operation	Box	630.105	893.054	(262.949)	(29,44)
	Unit	68	482	(414)	(85,89)



Tabel Produksi Pelayanan Terminal
Table of Terminal Services Production

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Operasi Lapangan Field Operation	Box	1.020.561	1.407.729	(387.168)	(27,50)
Operasi Penumpukan Stacking Operation	Box-Hari Box-Day	802.474	1.994.587	(1.192.113)	(59,77)
<i>Lift On/Lift Off</i>	Box	-	1.006.545	-	-
<i>Overbregen</i>	Box	-	-	-	-
Operasi CFS CFS Operation	Box	16.904	21.549	(4.645)	(21,56)
	Ton Hari Ton-Day	-	31.686	-	-
	Ton/M ³ M3-Day	3.675	6.364	-	(42,25)
	Ton	-	-	-	-
	M ³	238.745	-	238.745	100,00
Angkutan Langsung Direct Transport	M ³ Hari	3.573	-	3.573	100,00
	Ton	-	2.538.112	-	-
Lainnya Others	Ton	1.630.040	15.218.877	(13.588.837)	(89,29)
	Unit	-	-	-	-
	Jam Hour	-	-	-	-

Realisasi produksi pelayanan terminal *stevedoring* untuk tahun 2019 dalam satuan Ton sebesar 34.433.553 Ton turun 1,45% di bawah realisasi tahun 2018 yang sebesar 34.940.698 Ton. Realisasi produksi pelayanan terminal *stevedoring* tahun 2018 dalam satuan M³ sebesar 2.450.173 M³ atau 10,90% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar 2.749.800. Penurunan tersebut seiring dengan menurunnya kegiatan CPO dan *paletize* karet.

The realization of *stevedoring* terminal services production for 2019 in Ton unit amounted to 34,433,553 Tons, down 1.45% below the realization in 2018 of 34,940,698 Tons. The realization of *stevedoring* terminal services production in M³ unit in 2019 was 2,450,173 M³ or 10.90% below the realization of 2018 amounting to 2,749,800. The decline was in line with the decline in CPO and rubber *paletize* activities.

Realisasi produksi pelayanan terminal untuk *cargodoring* satuan Ton sebesar 2.784.890 Ton atau 23,09% di bawah tahun 2018 sebesar 3.621.006 Ton. Penurunan tersebut seiring dengan menurunnya kegiatan *cargodoring* untuk ekspor karet.

The *cargodoring* terminal services production in Ton unit was realized at 2,784,890 Ton or 23.09% lower than 2018 of 3,621,006 Ton. The decline was in line with the decline in *cargodoring* activities for rubber exports.

Realisasi produksi pelayanan terminal untuk *receiving/delivery* (R/D) satuan Ton tahun 2019 sebesar 275.035 Ton atau 23,98% di atas tahun 2018 sebesar 221.839 Ton. Hal tersebut seiring dengan peningkatan R/D penumpukan *bag cargo* melalui gudang Pelabuhan Teluk Bayur, Pontianak dan Jambi.

The realization of *receiving/delivery* (R/D) terminal services production for 2019 in ton unit was in the amount of 275,035 tons or 23.98% higher than 2018 amounted to 221,839 tons. This was in line with the increase in R/D of cargo *bag* stacking through Teluk Bayur, Pontianak and Jambi Ports.

Realisasi produksi pelayanan terminal untuk bongkar muat petikemas operasi kapal di terminal konvensional sebesar 630.105 Box atau mengalami penurunan sebesar 29,44% jika dibandingkan dengan realisasi pada periode tahun 2018 sebesar 893.054 Box. Hal ini seiring dengan penurunan arus bongkar alat berat disebabkan adanya penurunan pelayanan penanganan kapal yang rata-rata muatannya adalah *truck*.

The realization of terminal services production for loading and unloading container operation at conventional terminals amounted to 630,105 Boxes or decreased by 29.44% when compared to the realization in 2018 period of 893,054 Boxes. This was in line with the decrease in heavy equipment unloading flows due to a decrease in ship handling services, and mostly handled truck loading.

Realisasi produksi jasa operasi lapangan terealisasi sebesar 1.020.561 Box atau mengalami penurunan sebesar 27,50% jika dibandingkan dengan realisasi pada periode tahun 2018 sebesar 1.407.729 Box. Hal ini dipengaruhi menurunnya kegiatan Lo-Lo karena perubahan *scope* bisnis anak perusahaan PTP yang fokus ke non petikemas serta karena pola operasi *truck lossing*.

The field operation services production was realized at 1,020,561 Boxes or decreased by 27.50% when compared to the realization in 2018 amounting to 1,407,729 Boxes. This as influenced by the decrease in Lo-Lo activities due to changes in the scope of PTP subsidiary businesses that focus on non-containers as well as due to the pattern of truck lossing operations.

Demikian juga dengan untuk realisasi produksi penumpukan petikemas di lapangan konvensional sebesar 802.474 Box-Hari atau 59,77% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar 1.994.587. Hal tersebut dipengaruhi meningkatnya waktu penumpukan seiring dengan pembatasan *truck* saat libur panjang lebaran dan tahun baru serta dipengaruhi adanya peningkatan kegiatan bongkar muat di Teluk Bayur dan Terminal Domestik Tanjung Priok.

Likewise, the realization of container stacking production in conventional fields was 802,474 Box-Days or 59.77% below the 2018's realization of 1,994,587. This was influenced by the increase in stacking time due to truck restrictions during the long Eid Al-Fitr and new year holidays and was also influenced by an increase in loading and unloading activities at Teluk Bayur and Tanjung Priok Domestic Terminal.

Pendapatan Pelayanan Jasa Terminal

Pendapatan pelayanan jasa terminal tahun 2019 sebesar Rp3,27 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp24,72 miliar atau 0,76% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp3,24 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh:

Terminal Services Revenue

Terminal services revenue in 2019 amounted to Rp3.27 trillion, an increase of Rp24.72 billion or 0.76% compared to 2018 of Rp3.24 trillion. This was influenced by:

1. Seiringnya dengan penurunan trafik kapal secara umum pada lingkungan bisnis IPC khususnya pada beberapa pelabuhan yang besar antara lain Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Pontianak serta terjadi penurunan *handling cargo multipurpose* dan turunnya permintaan domestik untuk komoditi gypsum, *klinker* dan batubara;
2. Adanya larangan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) terutama pada negara Uni Eropa dengan *issue* lingkungan hidup, penurunan ekspor juga terjadi pada negara tujuan India dan Tiongkok.

1. Along with the overall decline in ship traffic in IPC business environment, especially in several large ports, including Tanjung Priok, Panjang, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Pontianak Ports as well as a decline in multipurpose handling cargo and a decrease in domestic demand for gypsum, clinker and coal commodities;
2. The existence of a ban on Crude Palm Oil (CPO) exports, especially in European Union countries with environmental issues, decreased exports also occurred in the destination countries of India and China.

Tabel Pendapatan Pelayanan Jasa Terminal (dalam ribuan Rupiah)

Table of Terminal Services Revenue (in thousand Rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pelayanan Jasa Terminal Terminal Services Revenue	3.267.617.624	3.242.900.495	24.717.129	0,76%



PENGUSAHAAN ALAT

Jasa yang diberikan, berupa persewaan *forklift*, kran (darat, apung dan listrik), kapal tunda, motor *boat* dan alat pemadam kebakaran.

Produktivitas Pengusahaan Alat

Realisasi sampai dengan periode tahun 2019 untuk produksi pengusahaan alat di IPC dapat dilihat pada tabel berikut:

EQUIPMENT BUSINESS

Services provided are rental of forklifts, cranes (land, floating, and electrical), tugboats, motorboats, and fire extinguishers.

Equipment Business Productivity

The realization until the 2019 period for equipment business production in IPC can be viewed in the following table:

Tabel Produksi Pengusahaan Alat
Table of Equipment Business Production

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
				(satuan)	(%)
Pengusahaan Alat Equipment Business	Jam Hour	3.549	305.446	(301.897)	(98,84%)
	Ton	-	18.232.875	(18.232.875)	(100,00%)
	Box	-	9.476	(9.476)	(100,00%)

Realisasi produksi pengusahaan alat dalam satuan jam tahun 2018 sebesar 3.549 jam atau 98,84% di bawah realisasi tahun 2019 sebesar 305.446 jam. Hal ini seiring dengan menurunnya permintaan kegiatan B/M di pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Cirebon dan Tanjung Pandan.

The realization of equipment business production of 2019 in hour unit was 3,549 hours or 98.84% below the realization in 2018 of 305,446 hours. This was in line with the decline in demand for loading and unloading in Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Cirebon and Tanjung Pandan Ports.

Pendapatan Pengusahaan Alat

Pendapatan pengusahaan alat tahun 2019 sebesar Rp66,74 miliar mengalami penurunan sebesar Rp31,85 miliar atau 32,31% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp98,57 miliar. Penurunan pendapatan tersebut dipengaruhi oleh turunnya produksi di tahun 2019.

Equipment Business Revenue

The equipment business revenue in 2019 reaching Rp66.74 billion, a decrease of Rp31.85 billion or 32.31% compared to 2018 of Rp98.57 billion. The decline in revenue was due to the decline in production in 2019.

Tabel Pendapatan Pengusahaan Alat (dalam ribuan Rupiah)
Table of Equipment Business Revenue (in thousand Rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pengusahaan Alat Equipment Business	66.735.164	98.587.873	(31.852.709)	(32,31%)

TERMINAL PETIKEMAS

Merupakan terminal pengumpulan petikemas untuk selanjutnya diangkut ke tempat tujuan.

Produktivitas Terminal Petikemas

Realisasi sampai dengan periode tahun 2019 untuk produksi pelayanan jasa terminal petikemas di lingkungan IPC dapat dilihat pada tabel berikut:

CONTAINER TERMINAL

Is container collection terminal to facilitate transport to destination.

Container Terminal Productivity

The realization up to the period of 2019 for Container Terminal services in IPC can be viewed in the following table:

Tabel Produksi Pelayanan Terminal Petikemas
Table of Container Terminal Services Production

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Operasi Kapal ^{*)} Ship operation ^{*)}	Box	1.718.931	1.571.865	147.066	9,36%
	Unit	11.485	10.645	840	7,89%
Operasi Lapangan Field operation	Box	1.911.228	1.432.719	478.509	33,40%
	Box-Shift	76.524	80.322	(3.798)	(4,73%)
	Ton	-	-	-	-
	M ³	-	-	-	-
CFS	Ton-Hari Ton-Day	-	-	-	-
	M ³ -Hari M ³ -Day	-	-	-	-
	Box	-	-	-	-
Penumpukan Stacking	Box-Hari Box-Day	2.918.117	2.349.009	569.108	24,23%
	Unit Hari Days Unit	-	-	-	-
Lift On/Lift Off	Box	-	87.280	(87.280)	(100,00%)
Stripping/Stuffing	Box	-	-	-	-
Trucking/Share Handling Container	Box	-	-	-	-

^{*)} Termasuk Operasi Kapal KSO TPK Koja
^{*)} Including Ship Operation of KSO TPK Koja

Realisasi produksi pelayanan terminal untuk bongkar muat petikemas operasi kapal di terminal petikemas tahun 2019 sebesar 1.718.931 Box atau 9,36% naik dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar 1.571.865 Box. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya kegiatan B/M di Pelabuhan Teluk Bayur terutama untuk komoditi semen, *coconut milk*, gambir, kertas dan di pelabuhan Domestik Tanjung Priok untuk komoditi *general cargo*.

The realization of terminal services production for loading and unloading container operation at container terminals in 2019 was to 1,718,931 Boxes, or 9.36%, an increase compared to the realization in 2018 of 1,571,865 Boxes. This was in line with the increase in loading and unloading activities in Teluk Bayur Port, especially for cement, coconut milk, gambier, paper and in Tanjung Priok Domestic port for general cargo.

Realisasi produksi jasa operasi lapangan tahun 2019 terealisasi sebesar 1.911.228 Box atau mengalami tren positif naik 33,40% dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar 1.407.729 Box. Hal ini sebagaimana dipengaruhi adanya peningkatan kegiatan Lo-Lo di Teluk Bayur dan Terminal Domestik Tanjung Priok.

The field operation services production in 2019 was realized at 1,911,228 Boxes or experienced an upward positive trend of 33.40% compared to the realization in 2018 of 1,407,729 Boxes. This was influenced by the increase in Lo-Lo activities in Teluk Bayur and Tanjung Priok Domestic Terminal.

Realisasi produksi penumpukan petikemas tahun 2019 sebesar 2.918.117 Box meningkat sebesar 24,23% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 2.349.009 Box-Hari. Hal ini sebagaimana dipengaruhi meningkatnya waktu penumpukan seiring dengan pembatasan *truck* saat libur panjang lebaran dan tahun baru serta dipengaruhi adanya peningkatan kegiatan bongkar muat di Teluk Bayur dan Terminal Domestik Tanjung Priok.

The realization of container stacking production in 2019 amounted to 2,918,117 Boxes, an increase of 24.23% compared to the 2018's realization of 2,349,009 Box-Days. This was caused by the increasing stacking time along with truck restrictions during the long Eid Al-Fitr and new year holidays and by the increase in loading and unloading activities at Teluk Bayur and Tanjung Priok Domestic Terminal.



Tabel Kerjasama dengan Mitra Usaha

Table of Business Partnership

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Operasi Kapal: Intra Asia – Trans Ocean – Inter Island	Box	605.706	590.057	15.649	2,65%
Ship Operations: Intra Asia – Trans Ocean – Inter Island	TEUs	914.310	889.011	25.299	2,85%

Realisasi produksi operasi kapal Kerjasama dengan Mitra Usaha (KSMU) tahun 2018 dalam satuan Box sebesar 605.706 Box meningkat sebesar 2,65% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 590.057 Box-Hari. Hal tersebut seiring dengan pengaturan perbaikan berat dermaga sesuai dengan kondisi peak time kebutuhan operasional sehingga risiko besar terjadinya gangguan operasional dapat diminimalisir.

The realization of ship operation production of Business Partnership (KSMU) in 2019 in Box unit amounted to 605,706 Boxes, an increase of 2.65% compared to the realization in 2018 of 590,057 Box-Days. This was in line with the dock weight arrangement in accordance with the conditions of peak time operational needs so that the risk of operational disruption can be minimized.

Pendapatan Terminal Petikemas

Pendapatan terminal petikemas tahun 2019 sebesar Rp2,60 triliun mengalami penurunan sebesar Rp102,76 miliar atau 3,80% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp2,71 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi pendapatan dari PT IPC TPK antara lain disebabkan:

1. Area Jambi: Penurunan ekspor karet yang diakibatkan oleh harga pasar internasional karet sangat rendah sehingga 3 (tiga) negara (Indonesia, Malaysia, Thailand) sepakat untuk membatasi ekspor karet sehingga kebutuhan kemasan metal box juga berkurang sejalan dengan penurunan ekspor karet tersebut;
2. Area Palembang: PT Indonesia Fortune Lyod (PT IFL) mengalami kerusakan kapal sejak April 2019, PT Indo Container Line (ICON) *stop service* ke Palembang sejak awal tahun 2019, serta target muatan dari OKI Pulp tidak tercapai sepenuhnya akibat bongkar muat secara *ship to ship*;
3. Area Pontianak: Adanya pelayaran ICON yang pindah ke DUKS sehingga berdampak pada hilangnya *throughput* sebesar 30.000 TEUs.

Container Terminal Revenue

Revenue from container terminal in 2019 amounted to Rp2.60 trillion, a decrease of Rp102.76 billion or 3.80% compared to 2018 of Rp2.71 trillion. This was mainly influenced by the revenue from PT IPC TPK due, among others:

1. Jambi Area: The decline in rubber exports due to very low international rubber market prices, thus making 3 (three) countries (Indonesia, Malaysia, Thailand) agreed to limit rubber exports so that the demand for metal box packaging also decreased in line with the decline in rubber exports;
2. Palembang Area: PT Indonesia Fortune Lyod (PT IFL) suffered ship damage since April 2019, PT Indo Container Line (ICON) stopped service to Palembang since the beginning of 2019, and the cargo target from OKI Pulp was not fully achieved due to loading and unloading by ship to ship;
3. Pontianak Area: ICON shipping has moved to DUKS so that impacted the loss of throughput of around 30,000 TEUs.

Tabel Pendapatan Terminal Petikemas (dalam ribuan Rupiah)

Table of Container Terminal Revenue (in thousand Rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Terminal Petikemas Container Terminal	2.603.524.300	2.706.288.702	(102.764.402)	(3,80%)

SEGMENT JASA LAINNYA

Segmen Jasa Lainnya meliputi Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik dan Fasilitas Rupa-Rupa.

PENGUSAHAAN TANAH, BANGUNAN, AIR DAN LISTRIK (TBAL)

Merupakan jasa persewaan lahan, bangunan, air bersih serta energi listrik.

Produktivitas Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL)

Realisasi sampai dengan Tahun 2019 untuk produksi pengusahaan TBAL di lingkungan IPC dapat dilihat pada tabel berikut:

OTHER SERVICES SEGMENT

Other services segment includes Land, Building, Water, and Electricity Business, and Miscellaneous Facility.

LAND, BUILDING, WATER, AND ELECTRICITY BUSINESS (TBAL)

Is leasing of land, building, clean water, as well as electricity services.

Land, Building, Water, And Electricity Business (Tbal) Productivity

The realization up to 2019 for TBAL business production in IPC can be viewed in the following table:

Tabel Pengusahaan TBAL
Table of TBAL Business

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Persewaan Tanah Land Lease	M ²	12.428.681	4.427.323	8.001.358	180,73%
Persewaan Perairan Water Lease	M ²	-	-	-	-
Persewaan Bangunan Building Lease	M ²	98.509	98.509	-	-
Pengusahaan Air Water Business				-	
Air Perkantoran Office Water	Ton	48.012	204.546	(156.534)	(76,53%)
Air Kapal Ship Water	Ton	308.198	520.216	(212.018)	(40,76%)
Pengusahaan Listrik Electricity Business	KWH	2.014.009	88.172.554	(86.158.545)	(97,72%)

Persewaan Tanah

Realisasi produksi persewaan tanah tahun 2019 sebesar 12.428.681 atau mengalami tren positif naik 180,73% dibandingkan realisasi persewaan tanah di tahun 2018 sebesar 4.427.323. Hal ini dipengaruhi terealisasinya beberapa kontrak jangka panjang pengoperasian *common area* di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, lahan penumpukan di Pelabuhan Banten.

Persewaan Perairan

Realisasi produksi persewaan perairan tidak dipungut dan dicatatkan terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Land Lease

The realization of land lease production in 2019 was 12,428,681 or experienced a positive trend going up 180.73% compared to the realization of land lease in 2018 of 4,427,323. This was affected by the realization of several long-term contracts for the operation of the common area at Tanjung Priok Port Branch, the stacking field at Banten Port.

Water Lease

The realization of water lease production was not collected and recorded in accordance with the Minister of Transportation Regulation No. 69 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Types and Rates of Types of Non-Tax State Revenues Applicable to the Directorate General of Sea Transportation.



Persewaan Bangunan

Realisasi produksi persewaan bangunan tahun 2019 sebesar 98.509 atau tidak ada perbedaan dari realisasi tahun 2018 sebesar 98.509.

Pengusahaan Air

Realisasi produksi pengusahaan air perkantoran tahun 2019 sebesar 48.012 Ton atau 76,53% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar 204.546 Ton.

Demikian pula dengan realisasi produksi pengusahaan air kapal tahun 2019 sebesar 308.198 atau 40,76% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar 520.216. Hal ini dipengaruhi oleh tidak berproduksinya pengusahaan air seiring dengan gangguan distribusi supply air.

Pengusahaan Listrik

Realisasi produksi pengusahaan listrik tahun 2019 sebesar 2.014.009 KWH atau (97,72%) di bawah realisasi tahun 2018 sebesar 88.172.554 KWH. Hal ini seiring dengan realisasi elektrifikasi oleh PT EPI Entitas Anak IPC belum tercapai dan adanya faktor terkait adanya penghematan pemakaian customer seiring dengan alih teknologi menggunakan lampu LED.

Pendapatan Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL)

Pendapatan pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik tahun 2019 sebesar Rp2,85 triliun mengalami penurunan sebesar Rp20,31 miliar atau 0,71% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp2,87 triliun. Hal ini dipengaruhi belum optimalnya upaya canag-cabang melakukan optimalisasi lahan sehingga berdampak pada penurunan pendapatan tanah dan bangunan terutama di Cabang Tanjung Priok dan Panjang. Selain itu pengaruh dari nilai tukar kurs Dollar (USD) terhadap Rupiah (Rp) yang berpengaruh terhadap penerimaan *rental fee* dari PT JICT, KSO Koja dan NPCT1 (kurs realisasi tahun 2019 Rp13.901/USD sedangkan kurs realisasi tahun 2018 Rp14.481/USD)

Building Lease

The production realization of building lease in 2019 was 98.509 or there was no difference from the 2018 realization of 98.509.

Water Business

The office water business production in 2019 was realized at 48,012 tons or 76.53% below the 2018's realization of 204,546 tons.

Likewise, the ship water business production in 2019 was realized at 308,198 or 40.76% below the 2018's realization of 520,216. This was caused by the non-production of water business due to disruptions in water supply distribution.

Electricity Business

The realization of electricity production in 2019 was 2,014,009 KWH or (97.72%) lower than the realization in 2018 amounted to 88,172,554 KWH. This was in line with the realization of electrification by PT EPI, a subsidiary of IPC has not yet achieved and there were factors related to the reduction in customer usage along with technology transfer using LED lights.

Land, Building, Water and Electricity Business (Tbal) Revenue

Land, building, water and electricity business revenue in 2019 amounted to Rp2.85 trillion, a decrease of Rp20.31 billion or 0.71% compared to Rp2.87 trillion in 2018. This was influenced by the efforts made by branch offices for land optimizing that were resulting in a decrease in land and building revenue, especially in Tanjung Priok and Panjang Branches. In addition, the influence of the exchange rate of Dollar (USD) to Rupiah (Rp) that affected the receipt of rental fees from PT JICT, KSO Koja and NPCT1 (2019 realization rate of Rp13,901/USD while the 2018 realization rate of Rp14,481/USD)

Tabel Pendapatan TBAL (dalam ribuan Rupiah)
Table of TBAL Revenue (in thousand Rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pengusahaan TBAL TBAL Business	2.852.740.624	2.873.048.549	(20.307.925)	(0,71%)

FASILITAS RUPA-RUPA USAHA

Jasa rupa-rupa ini, antara lain termasuk jasa angkutan, jasa konsultan dan *surveyor* pelabuhan, jasa kesehatan, dan lain-lain.

PRODUKTIVITAS FASILITAS RUPA-RUPA USAHA

Realisasi tahun 2019 untuk produksi fasilitas rupa-rupa usaha di lingkungan IPC dapat dilihat pada tabel berikut:

MISCELLANEOUS FACILITY

Miscellaneous services include, among others, transportation services, consultant services and port surveyors, health services, and others.

MISCELLANEOUS FACILITY PRODUCTIVITY

The 2019 realization for Miscellaneous Facility production in IPC can be viewed in the following table:

Tabel Fasilitas Rupa-Rupa Usaha
Table of Miscellaneous Facility

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Pas pelabuhan Port Entry	Lembar Piece	12.428.681	13.672.540	(1.243.859)	(9,10%)
Kontribusi Mekanis/Alat Mechanical/Equipment Contribution	Lumpsum	423	19.563	(19.140)	(97,84%)
Bengkel Workshop	Unit	-	-	-	-
Pendidikan dan Latihan Education and Training	Orang Person	-	-	-	-
Kontribusi T.O. T.O. Contribution	Lumpsum	-	-	-	-
Jasa Kebersihan Cleaning Service	Ton	9.394.099	10.546.306	(1.152.207)	(10,93%)
Telepon Kantor Office Phone	Unit	-	-	-	-
Retribusi Retribution	Lembar Piece	1.410.230	12.403	1.397.827	11.270,07%
Kepil	KplJam KplHour	-	-	-	-
Lainnya Others	Ton	11.097.031	8.490.576	2.606.455	30,70%

Pas Pelabuhan

Realisasi produksi pas pelabuhan tahun 2019 sebesar 12.997.455 lembar atau 4,94% di bawah realisasi tahun 2018 yang sebesar 13.672.540 lembar namun demikian, meskipun secara produksi turun tetapi pendapatan pas pelabuhan mengalami kenaikan 32,69% salah satunya dipengaruhi penerapan e-pass gate system di Pelabuhan Tanjung Priok.

Port Entry

Realization of port entry-card production in 2019 amounted to 12,997,455 sheets or 4.94% below the realization of 2018 which was 13,672,540 sheets, however, although production decreased, the revenue from port entry-card increased by 32.69%, as the result of e-pass gate system application in Tanjung Priok Port.

Retribusi

Realisasi produksi retribusi tahun 2019 sebesar 1.410.230 lembar atau 11.270,07% di atas realisasi tahun 2018 yang sebesar 12.403 lembar sebagaimana terjadi di Panjang dan Sunda Kelapa seiring dengan meningkatnya retribusi alat bongkar muat di pelabuhan tersebut.

Retribution

The realization of retribution production for 2019 amounted to 1,410,230 pieces or 11,270.07% above the realization of 2018 which amounted to 271,339 pieces as occurred in Panjang and Sunda Kelapa in line with the increase in loading and unloading equipment retribution at these ports.



Pendapatan Fasilitas Rupa-Rupa Usaha

Pendapatan fasilitas rupa-rupa usaha tahun 2019 sebesar Rp921,67 miliar mengalami penurunan sebesar Rp26,45 miliar atau 2,79% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp948,12 miliar. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Tidak optimalnya capaian pendapatan yang dipengaruhi terlambatnya penyelesaian pembangunan dan pengoperasian RS Pelabuhan Palembang dan RS Port Medical Center yang semula diasumsikan beroperasi bulan Agustus 2019 namun di proyeksikan baru terealisasi triwulan II tahun 2020;
2. Tidak optimalnya pendapatan PT PPI yang disebabkan belum terealisasinya pembangunan CY 57 meter yang berdampak pada pengurangan pendapatan QSR sebesar 11% per tahun atau setara dengan USD6,16 juta;
3. Tidak optimalnya pendapatan PT MTI disebabkan belum beroperasinya TPS di lapangan Sulawesi pada tahun 2019 dan belum optimalnya kegiatan *freight forwarding*;
4. Tidak tercapainya pendapatan PT PII yang disebabkan kegiatan pendapatan operasi yang masih bertumpu kepada investasi Pasar Uang dan Pasar Modal (PUPM) yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal terutama oleh kondisi makro ekonomi dan pasar saat ini yang belum membaik.

Miscellaneous Facility Revenue

The revenue from miscellaneous facility in 2019 amounted to Rp921.67 billion, a decrease of Rp26.45 billion or 2.79% compared to 2018 of Rp948.12 billion. This was caused by, among others:

1. The revenue achievement was not optimal due to the late completion of the construction and operation of Palembang Port Hospital and Port Medical Center Hospital, which were initially assumed to be operational in August 2019 but are projected to be realized in the second quarter of 2020;
2. PT PPI's revenue was not optimal due to the unrealized of CY 57 meter construction, which has an impact on reducing QSR revenue by 11% per year or equivalent to USD6,16 million;
3. PT MTI's revenue was not optimal due to the unoperation of TPS in Sulawesi field in 2019 and unoptimal freight forwarding activities;
4. PT PII's revenue was not achieved due to operating income activities that still rely on Money Market and Capital Market (PUPM) investments, which are strongly influenced by external factors, especially due to the current macroeconomic and market conditions that have not yet improved.

Tabel Pendapatan Rupa-Rupa Usaha (dalam ribuan Rupiah)

Table of Miscellaneous Facility Revenue (in thousand Rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Fasilitas Rupa-Rupa Usaha Miscellaneous Facility	921.673.166	948.118.308	(26.445.142)	(2,79%)

Profitabilitas Segmen Operasi

Laba tahun berjalan segmen operasi tahun 2019 sebesar Rp2,50 triliun, meningkat 3,01% dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp2,43 triliun. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan keuangan di tahun 2019.

Profitability of Operating Segments

The current year profit of the operating segment in 2019 was IDR2.50 trillion, an increase of 3.01% compared to 2018 which was IDR2.43 trillion. This increase was partly influenced by the growth of financial revenue in 2019.

Tabel Profitabilitas Segmen Operasi Tahun 2019 (dalam ribuan Rupiah)
Table of the Profitability of Operating Segments in 2019 (in thousands of Rupiah)

Uraian Description	2019				
	Operasi Kepelabuhan Port Operations	Jasa Lainnya Other Services	Total Sebelum Eliminasi Total Before Elimination	Eliminasi Elimination	Total Total
Pendapatan operasi segmen Segment operating income					
Pendapatan operasi eksternal External operating income	10.054.866.623	1.086.885.602	11.141.752.225	-	11.141.752.225
Pendapatan operasi antar segmen Operating income between segments	3.627.525.315	27.156.463	3.654.681.779	(3.654.681.779)	-
Total pendapatan operasi segmen Total segment operating income	13.682.391.938	1.114.042.065	14.796.434.004	(3.654.681.779)	11.141.752.225
Beban operasi Operating expenses	(10.862.669.461)	(1.164.951.377)	(12.027.620.837)	3.507.263.164	(8.520.357.673)
Pendapatan operasi lainnya - neto Other operating income - net	720.320.596	51.672.366	771.992.962	(54.878.448)	717.114.514
Laba usaha Operating profit					3.338.509.066
Pendapatan keuangan Financial income	832.477.623	3.782.489	836.260.112	-	836.260.112
Beban keuangan Financial expenses	(1.196.139.389)	(17.046.345)	(1.213.185.734)	12.948.645	(1.200.237.089)
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto Share of profits of associates and jointly controlled entities - net	979.956.870	-	979.956.870	(739.388.528)	240.568.343
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Profit before final tax and corporate income tax					3.215.100.432
Beban pajak final Final tax expense	(505.944.961)	(3.747.530)	(509.692.491)	-	(509.692.491)
Laba sebelum pajak penghasilan badan Profit before corporate income tax					2.705.407.941
Pajak penghasilan badan Corporate income tax					
Kini Now	(240.416.714)	(19.500.340)	(259.917.054)	-	(259.917.054)
Tangguhan Deferred	39.603.470	18.715.991	58.319.461	-	58.319.461
Laba tahun berjalan Current year profit					2.503.810.348



Tabel Profitabilitas Segmen Operasi Tahun 2018 (dalam ribuan Rupiah)
 Table of Profitability of Operating Segments in 2018 (in thousands of Rupiah)

Uraian Description	2018				
	Operasi Kepelabuhan Port Operations	Jasa Lainnya Other Services	Total Sebelum Eliminasi Total Before Elimination	Eliminasi Elimination	Total Total
Pendapatan operasi segmen Segment operating income					
Pendapatan operasi eksternal External operating income	10.410.223.653	1.026.477.241	11.436.700.894	-	11.436.700.894
Pendapatan operasi antar segmen Operating income between segments	3.262.402.694	4.160.570	3.266.563.264	(3.266.563.264)	-
Total pendapatan operasi segmen Total segment operating income	13.672.626.347	1.030.637.811	14.703.264.158	(3.266.563.264)	11.436.700.894
Beban operasi Operating expenses	(10.193.660.949)	(959.616.637)	(11.153.277.586)	3.110.722.766	(8.042.554.820)
Pendapatan operasi lainnya - neto Other operating income - net	(214.188.922)	94.303.039	(119.885.883)	(76.474.693)	(196.360.574)
Laba usaha Operating profit					3.197.785.500
Pendapatan keuangan Financial income	681.864.210	7.050.090	688.914.300	-	688.914.300
Beban keuangan Financial expenses	(1.120.125.705)	(13.526.311)	(1.133.652.016)	2.870.000	(1.130.782.016)
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto Share of profits of associates and jointly controlled entities - net	1.677.185.749	-	1.677.185.749	(1.300.985.155)	376.200.594
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Profit before final tax and corporate income tax					3.132.118.378
Beban pajak final Final tax expenses	(344.088.410)	(13.024.812)	(357.113.222)	-	(357.113.222)
Laba sebelum pajak penghasilan badan Profit before corporate income tax					2.775.005.156
Pajak penghasilan badan Corporate income tax					
Kini Now	(344.085.965)	(9.895.803)	(353.981.768)	-	(353.981.768)
Tangguhan Deferred	(4.516.972)	14.203.439	9.686.467	-	9.686.466
Laba tahun berjalan Current year profit					2.430.709.854

Tabel Pertumbuhan Profitabilitas Segmen Operasi Tahun 2018-2019 (dalam %)
Growth Table of Profitability for Operating Segments 2018-2019 (in%)

Uraian Description	2019				
	Operasi Kepelabuhan Port Operations	Jasa Lainnya Other Services	Total Sebelum Eliminasi Total Before Elimination	Eliminasi Elimination	Total Total
Pendapatan operasi segmen Segment operating income					
Pendapatan operasi eksternal External operating income	(3,41%)	5,89%	(2,58%)	-	(2,58%)
Pendapatan operasi antar segmen Operating income between segments	11,19%	552,71%	11,88%	11,88%	-
Total pendapatan operasi segmen Total segment operating income	0,07%	8,09%	0,63%	11,88%	(2,58%)
Beban operasi Operating expenses	6,56%	21,40%	7,84%	12,75%	5,94%
Pendapatan operasi lainnya - neto Other operating income - net	(436,30%)	(45,21%)	(743,94%)	(28,24%)	(465,20%)
Laba usaha Operating profit					4,40%
Pendapatan keuangan Financial income	22,09%	(46,35%)	21,39%	-	21,39%
Beban keuangan Financial expenses	6,79%	26,02%	7,02%	351,17%	6,14%
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto Share of profits of associates and jointly controlled entities - net	(41,57%)	-	(41,57%)	(43,17%)	(36,05%)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Profit before final tax and corporate income tax					2,65%
Beban pajak final Final tax expenses	47,04%	(71,23%)	42,73%	-	42,73%
Laba sebelum pajak penghasilan badan Profit before corporate income tax					(2,51%)
Pajak penghasilan badan Corporate income tax					
Kini Now	(30,13%)	97,06%	(26,57%)	-	(26,57%)
Tangguhan Deferred	(976,77%)	31,77%	502,07%	-	502,07%
Laba tahun berjalan Current year profit					3,01%



SEGMENT USAHA – GEOGRAFIS

TANJUNG PRIOK

Cabang Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia yang terletak di pesisir Jakarta Utara. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor impor maupun barang antar pulau. Pelabuhan Tanjung Priok dibangun pada akhir abad ke-19. Ketika itu Pemerintah Kolonial Belanda memutuskan untuk membangun pelabuhan baru karena pelabuhan yang ada yakni Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa sudah tidak mampu menerima kapal-kapal besar yang datang dari berbagai belahan dunia.

Saat ini, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok melayani kapal penumpang, barang domestik dan mancanegara. Fasilitas intermoda yang lengkap di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok mampu mendistribusikan logistik ke seluruh kota di Indonesia. Letaknya yang strategis dengan *hinterland* yang merupakan kawasan dengan aktivitas perdagangan dan industri, menjadikan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama di Pulau Jawa.

Tingginya aktivitas bongkar muat tersebut didukung oleh kelengkapan fasilitas dan peralatan bongkar muat yang dimiliki Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan dukungan teknologi dan fasilitas modern, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok mampu melayani kapal-kapal generasi mutakhir dengan kapasitas di atas 4.000 TEUs, yang langsung datang dari dan menuju ke berbagai pusat perdagangan internasional.

GEOGRAPHICAL BUSINESS SEGMENT

TANJUNG PRIOK

Tanjung Priok Port Branch is the largest and busiest port in Indonesia, located on the coast of North Jakarta. This port serves as the gateway flow of import-export goods and goods between islands. Tanjung Priok Port was built in the late 19th century when the Dutch Colonial government decided to build a new port since the existing Sunda Kelapa port was not capable of receiving large ships coming from different parts of the world.

Currently, Tanjung Priok Port serves passenger ships, domestic and international goods. Complete intermode facilities at Tanjung Priok Port are capable of distributing logistics to all cities in Indonesia. The strategic location with a hinterland that is the area with trade and industry activities, making Tanjung Priok Port as the main port on the island of Java.

The high activity of loading and unloading is supported by complete facilities and loading and unloading equipment owned by Tanjung Priok Port. With the support of technology and modern amenities, Tanjung Priok is able to serve ships of the latest generation with a capacity of 4,000 TEUs, which is directly coming from and going to various international trading centers.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta

Table of Facilities of Tanjung Priok Port Branch, DKI Jakarta

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
1	Alur Channel	
	Panjang Length	17.350 m
	Lebar Width	30 s/d 350 m
	Kedalaman Depth	-7.0 s/d -16.0 m.LWS
2	Breakwater	
	Panjang Length	3.808 m
3	Kolam Basin	

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta
Table of Facilities of Tanjung Priok Port Branch, DKI Jakarta

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
	Luas Total Area	1.033.749 m ²
	Kedalaman Depth	-4.0 s.d -16 m.LW
4	Dermaga Berth	
	Kapal Niaga Commercial Ship	12.168 m
	Kapal Non Niaga Non Commercial Ship	4.548 m
	Kedalaman Depth	-4.0 s.d -16 m.LWS
5	Gudang Storage	
	Unit	6 Unit
	Luas Total Total Area	40.357 m ²
6	Lapangan Penumpukan Yard	
	Luas Lapangan Lini I (TO I) Line I Field Area (TO I)	190.601 m ²
	Luas Lapangan Lini I (TO II) Line I Field Area (TO II)	240.025 m ²
	Luas Lapangan Lini I (TO III) Line I Field Area (TO III)	221.651 m ²
	Luas Lapangan Lini II Line II Field Area	263.046 m ²

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta
Table of Recapitulation of Equipment Asset Data of Tanjung Priok Port Branch, DKI Jakarta

No	Data Peralatan Equipment	Tahun 2019 Year 2019
Alat Bongkar Muat Loading and Unloading Equipment		
1	Gantry Luffing Crane	11
2	Rubber Tyred Gantry Crane	4
3	Mobile Crane	10
4	Dump Truck	2
Jumlah Total		27
Alat Apung Floating Equipment		
1	Kapal Tunda Tugboat	12
2	Motor Pandu Pilotage	4



Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta

Table of Recapitulation of Equipment Asset Data of Tanjung Priok Port Branch, DKI Jakarta

No	Data Peralatan Equipment	Tahun 2019 Year 2019
3	Kapal Kepil Mooring Vessels	2
4	Kapal Sampah Waste Vessels	11
5	Tongkang Barge	4
Jumlah Total		35

Produktivitas Tanjung Priok

Realisasi kunjungan kapal dalam satuan unit tahun 2019 sebesar 12.650 Unit, turun 17,23% dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 15.284 unit. Dari sisi GT juga mengalami penurunan 8,29% dari 160.558.455 GT di tahun 2018 menjadi 147.243.178 GT di tahun 2019. Hal tersebut dipengaruhi siklus 5 (lima) tahunan dikarenakan faktor pesta demokrasi Indonesia.

Realisasi arus petikemas pada tahun 2019 sebesar 4.861.726 Box menurun 0,22% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 4.851.146 Box. Dari sisi TEUs petikemas juga mengalami peningkatan sebesar 1,02% dari 6.743.523 TEUs di tahun 2018 menjadi 6.812.064 TEUs di tahun 2019. Hal tersebut karena ketidaklancaran arus kegiatan bongkar muat yang disebabkan kemacetan lalu lintas area pelabuhan dan kerusakan alat bongkar muat.

Tanjung Priok Productivity

The realization of ship calls in unit for 2019 was 12,650 units, decreased by 17.23% compared to 2018 of 15,284 units. In terms of GT also decreased by 8.29% from 160,558,455 GT in 2018 to 147,243,178 GT in 2019. This was influenced by the 5 (five) yearly cycle due to Indonesia's democratic party.

The realization of container flows for 2019 amounted to 4,861,726 Boxes, decreased by 0.22% compared to 2018 of 4,851,146 Boxes. In terms of TEUs, containers were also increase by 1.02% from 6,743,523 TEUs in 2018 to 6,812,064 TEUs in 2019. This was due to the uneven flow of loading and unloading activities caused by traffic congestion in the port area and damage to loading and unloading equipment.

Tabel Produktivitas Tanjung Priok

Table of Tanjung Priok Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
1	Kapal Ship	Unit	12.650	15.284	(2.634)	(17,23%)
		Gt	147.243.178	160.558.455	(13.315.277)	(8,29%)
	General Kargo	Ton	6.689.322	6.685.499	3.823	0,06%
	Bag Cargo	Ton	461.871	644.118	(182.247)	(28,29%)
2	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	2.471.239	2.575.394	(104.155)	(4,04%)
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	2.471.239	8.038.889	(5.567.650)	(69,26%)
	Lain-Lain Others	Ton	5.906.918	8.074.852,03	(2.167.934)	(26,85%)
3	Petikemas Containers	Box	4.861.726	4.851.146	10.580	0,22%
		TEUs	6.812.064	6.743.523	68.541	1,02%

Tabel Produktivitas Tanjung Priok
Table of Tanjung Priok Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
4	Penumpang Passengers	Orang Person	524.279	231.917	292.362	126,06%

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Tanjung Priok
Table of Utilization of Tanjung Priok Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Trend
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Dermaga: Dock:				
	• BOR (Terminal Petikemas) BOR (Container Terminal)	%	32,75	38,15	85,86%
	• BOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) BOR (Multipurpose Terminal)	%	51,57	56,45	91,35%
	• BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-
	• BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk Terminal)	%	-	-	-
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	• SOR (Gudang <i>Multipurpose</i>) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	12,07	15,51	77,83%
	• SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	-
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	• YOR (Terminal Petikemas) YOR (Container Terminal)	%	39,99	43,95	91,01%
	• YOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) YOR (Multipurpose Terminal)	%	20,01	38,12	52,50%
	• YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-

Pendapatan Tanjung Priok

Pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp8.426,35 miliar atau 12,83% di bawah realisasi pendapatan usaha tahun 2018 sebesar Rp9.666,18. Hal ini disebabkan penurunan kunjungan kapal luar negeri terutama pada pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pengaruh dari perlambatan ekonomi secara nasional dan global/*deficit Balance Of Trade* (BOT).

Tanjung Priok Revenue

The revenue in 2019 was Rp8,426.35 billion or 12.83% below the realization of revenue in 2018 of Rp9,666.18. This was due to the decrease in international ship calls, especially at Tanjung Priok port, as the effect of a national and global economic slowdown/*deficit Balance of Trade* (BOT).



Tabel Pendapatan Tanjung Priok (dalam miliar Rupiah)
Table of Tanjung Priok Revenue (in billion Rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Revenue	8.426,35	9.666,18	(1.239,83)	(12,83%)

Profitabilitas Tanjung Priok

Laba bersih tahun 2019 sebesar Rp783,42 miliar mengalami penurunan sebesar Rp25,43 miliar atau 3,14% dibandingkan realisasi laba bersih tahun 2018 sebesar Rp808,85 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan beban usaha sebesar 6,11% yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan usaha sebesar 4,56% terutama Pengusahaan TBAL dan Fasilitas Rupa-Rupa Usaha sedangkan Pelayanan Jasa Kapal dan Pelayanan Terminal mengalami penurunan.

Tanjung Priok Profitability

Net profit for 2019 was Rp783.42 billion, a decrease of Rp25.43 billion or 3.14% compared to the realization of net profit in 2018 of Rp808.85 billion. This was influenced by an increase in operating expenses by 6.11%, which was higher than the increase in operating revenue by 4.56%, mainly in TBAL Business and Miscellaneous Facilities while the Ship and Terminal Services experienced a decrease.

Tabel Profitabilitas Tanjung Priok (dalam miliar Rupiah)
Table of Tanjung Priok Profitability (in billion Rupiah)

Profitabilitas Profitability	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Laba Bersih Net Profit	783,42	808,85	(25,43)	(3,14%)

PANJANG

Pada abad ke-17, Pemerintah Hindia Belanda membangun Cabang Pelabuhan Panjang dengan dermaga sepanjang 200 meter, menggunakan konstruksi *caisson* dengan kedalaman -7 m.LWS beserta satu unit gudang seluas 1.000 . Pelabuhan Panjang kemudian berkembang menjadi pelabuhan besar di Pulau Sumatera dan berperan sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung hingga saat ini.

PANJANG

In the 17th century, the Dutch Colonial Government built Panjang Port with 200-meter long pier, using the construction of caisson with a depth -7 m.LWS along with one unit warehouse with an area of 1,000 m2. Panjang Port evolved into a major port on the island of Sumatera which serves as the lifeblood of economic growth in Lampung province until today.

Berada pada titik persilangan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, Cabang Pelabuhan Panjang merupakan pelabuhan yang sangat prospektif di masa mendatang. Luas area/lahan pelabuhan masih dapat dikembangkan untuk kerja sama pembangunan berbagai terminal guna melayani kebutuhan pengguna jasa kepelabuhanan. Di samping itu lahan pertanian dan perkebunan yang membentang di Provinsi Lampung sangat subur untuk kegiatan agrobisnis. Saat ini lingkup hinterland tersebut masih menunggu para investor untuk dikembangkan secara optimal. Cabang Pelabuhan Panjang melayani kapal dengan berbagai jenis barang, seperti barang umum, barang dalam kantung, curah cair, curah kering dan petikemas. Arus petikemas terus tumbuh setiap tahunnya seiring pertumbuhan kegiatan industri, pertambangan, dan perkebunan di wilayah itu. Dengan tersedianya terminal petikemas yang dilengkapi dengan 3 (tiga) *container crane*,

Located at the transshipment node between the island of Sumatera and Java, Panjang Port Branch is a port that is highly prospective in the future. The area of the port land can still be developed for a variety of terminal development cooperation in order to serve the needs of users of port services. In addition, agricultural land and plantations that stretched in the province of Lampung is very fertile for agribusiness activities. Currently, the scope of the hinterland is still waiting for investors to be developed optimally. Panjang Port serves ships with many kinds of goods, such as general merchandise, goods in bags, liquid bulk, dry bulk and containers. The flows of container continue to grow each year as the growth in industrial, mining and plantation activities in the region. With the availability of container terminal equipped with 3 (three) container cranes, 5 (five) transtainer, and top loader and supported by specialized bulk terminal that

5 (lima) transtainer, dan *top loader* serta didukung terminal khusus curah yang ada saat ini, Cabang Pelabuhan Panjang siap memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa.

exist today, Panjang Port is ready to provide better service to service users.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Panjang, Lampung
Table of Facilities of Panjang Port Branch, Lampung

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
1	Alur Channel	
	Panjang Length	10.000 m
	Lebar Width	100 m
	Luas Total Area	1.000.000 m ²
	Kedalaman Depth	-10.0 s/d -14.0 m.LWS
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	51.042 m ²
	Kedalaman Depth	-6.0 s.d -13 mLWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	1.644 m ²
	Kedalaman Depth	-6.0 s/d -13.0 m.LWS
4	Gudang Storage	
	Unit	5 Unit
	Luas Total Total Area	15.560m ²
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	11.536 m ²
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	75.000 m ²

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Panjang, Lampung
Table of Recapitulation of Equipment Asset Data of Panjang Port Branch, Lampung

No	Data Peralatan Equipment	Tahun 2019 Year 2019
Alat Bongkar Muat Loading Unloading Equipment		
1	<i>Quay Container Crane</i>	3
2	<i>Gantry Luffing Crane</i>	2
3	<i>Gantry Jib Crane</i>	4
4	<i>Rubber Tyred Gantry Crane</i>	5



Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Panjang, Lampung
Table of Recapitulation of Equipment Asset Data of Panjang Port Branch, Lampung

No	Data Peralatan Equipment	Tahun 2019 Year 2019
5	Reach Stacker	1
6	Side Loader	1
7	Forklift Diesel	6
8	Head Truck	15
9	Chassis	15
Jumlah Total		52
Alat Apung Floating Equipment		
1	Kapal Tunda Tugboat	3
Jumlah Total		3

Produktivitas Panjang

Realisasi curah cair pada tahun 2019 sebesar 2.109.628 ton meningkat 23,27% dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 1.711.443 ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh *loading rate* pompa besar dan muatan tidak terlalu kental, serta tanki tempat penimbunan barang dekat dengan pelabuhan.

Realisasi arus petikemas pada tahun 2019 sebesar 103.719 Box meningkat 8,43% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 95.658 Box. Dari sisi TEUs petikemas juga mengalami peningkatan sebesar 7,42% dari 116.407 TEUs di tahun 2018 menjadi 125,040 TEUs di tahun 2019. Kenaikan arus petikemas karena perubahan dari pola konvensional menjadi kontainerisasi serta perubahan ukuran petikemas dari ukuran 20 menjadi 40.

Panjang Productivity

The realization of liquid bulk in 2019 amounted to 2,109,628 tons, an increase of 23.27% compared to 2018 which amounted to 1,711,443 tons. This was affected by the loading rate of large pumps and not too thick loads, and the storage tank that is near the port.

The realization of container flows in 2019 amounted to 103,719 Boxes, increasing by 8.43% compared to 2018 with 95,658 boxes. In terms of TEUs, containers also increased by 7.42% from 116,407 TEUs in 2018 to 125,040 TEUs in 2019. The increase in container flows due to changes from conventional patterns to containerisation and changes in container size from size 20 to 40.

Tabel Produktivitas Panjang
Table of Panjang Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
1	Kapal Ship	Unit	2.199	2.273	(74)	(3,26%)
		GT	23.820.341	26.299.472	(2.479.131)	(9,43%)
	General Cargo	Ton	82.066	2.533.785	2.451.719)	(96,76%)
	Bag Cargo	Ton	320.491	494.204	(173.713)	(35,15%)
2	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	2.109.628	1.711.443	398.185	23,27%
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	3.698.724	4.322.474	(623.750)	(14,43%)
	Lain-Lain Others	Ton	1.826.654	-	1.826.654	-

Tabel Produktivitas Panjang
Table of Panjang Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
3	Petikemas Containers	Box	103.719	95.658	8.061	8,43%
		TEUs	125.040	116.407	8.633	7,42%
4	Penumpang Passengers	Orang Person	4.518	8.288	(3.770)	(45,49%)

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Panjang
Table of Utilization of Panjang Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Trend
1	2	3	6	4	8=6/4
1	Dermaga: Dock:				
	• BOR (Terminal Petikemas) BOR (Container Terminal)	%	26,16	24,73	105,76%
	• BOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) BOR (Multipurpose Terminal)	%	48,82	56,51	86,39%
	• BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk Terminal)	%	62,36	-	100,00%
	• BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk Terminal)	%	4,18	-	100,00%
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	• SOR (Gudang <i>Multipurpose</i>) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	51,15	65,21	78,44%
	• SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	-
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	• YOR (Terminal Petikemas) YOR (Container Terminal)	%	17,79	16,89	105,32%
	• YOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) YOR (Multipurpose Terminal)	%	13,22	6,17	214,29%
	• YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-

Pendapatan Panjang

Pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp431,01 miliar atau 29,67% di atas realisasi pendapatan usaha tahun 2018 sebesar Rp332,39 miliar. Realisasi ini dipengaruhi oleh pengelolaan terminal petikemas terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dikerjasamakan dengan Entitas Anak yaitu PT IPC Terminal Petikemas.

Panjang Revenue

The revenue in 2019 was Rp.431.01 billion or 29.67% above the realization of revenue in 2018 amounting to Rp332.39 billion. This realization was influenced by the management of container terminal that as of January 1, 2018 was in cooperation with a subsidiary, PT IPC Terminal Petikemas.



Tabel Pendapatan Panjang (dalam miliar Rupiah)
Table of Panjang Revenue (in billion Rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Revenue	431,01	332,39	98,62	29,67%

Profitabilitas Panjang

Laba bersih tahun 2019 sebesar Rp81,43 miliar mengalami penurunan sebesar Rp3,46 miliar atau 4,08% dibandingkan realisasi laba bersih tahun 2018 sebesar Rp84,89 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan pendapatan usaha sebesar 21,79% yang terjadi hampir di seluruh segmen usaha kecuali Perusahaan TBAL dan Fasilitas Rupa-Rupa Usaha, penurunan ini disebabkan karena terjadinya peralihan perusahaan Terminal yang saat ini dikerjasamakan dengan Entitas Anak walaupun beban usaha juga mengalami penurunan sebesar 22,81%.

Panjang Profitability

Net profit for 2019 was Rp81.43 billion, a decrease of Rp3.46 billion or 4.08% compared to the realization of net profit in 2018 of Rp84.89 billion. This was influenced by a decrease in operating revenues by 21.79%, which occurred in almost all business segments except TBAL Business and Miscellaneous Facilities. This decline was due to the transition of terminal operation that is currently in cooperation with subsidiary, although operating expenses also decreased by 22.81%. beban usaha juga mengalami penurunan sebesar 22.81%.

Tabel Profitabilitas Panjang (dalam miliar Rupiah)
Table of Panjang Profitability (in billion Rupiah)

Profitabilitas Profitability	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Laba Bersih Net Profit	81,43	84,89	(3,46)	(4,08%)

PALEMBANG

Cabang Pelabuhan Palembang atau dikenal sebagai Boom Baru dibangun Pemerintahan Kolonial Belanda menggantikan Pelabuhan Sungai Rendang pada tahun 1924. Pelabuhan ini terletak di antara dua muara anak sungai Musi, yaitu sungai Lawang Kidul dan sungai Belabak. Pada masa itu, Boom Baru memiliki dermaga dengan panjang sekitar 250 meter. Selain dermaga, di tempat ini juga terdapat Kantor atau Bea Cukai yang posisinya terapung.

PALEMBANG

Palembang Port Branch otherwise known as Boom Baru was built by the Dutch Colonial Government and replaced Sungai Rendang Port in 1924. The port is situated between two estuary tributaries of the Musi river, which is Lawang Kidul River and Belabak River. At that time, Boom Baru has a dock with a length of about 250 meters. In addition to the dock, in this place there was also a Duane Office or Customs with floating position.

Saat ini, Cabang Pelabuhan Palembang menjadi pelabuhan sungai terbesar di wilayah Sumatera dan sekaligus merupakan tumpuan urat nadi pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan bongkar muat didominasi oleh barang curah kering dan petikemas, di samping juga melayani barang dengan jenis kemasan lain. Cabang Pelabuhan Palembang memiliki sub-pelabuhan yang sangat potensial dan terbuka bagi kerjasama investasi, yaitu Pelabuhan Sungai Lais, didukung oleh areal yang cukup luas untuk kegiatan industri pengolahan. Untuk mengantisipasi peningkatan arus komoditas di masa mendatang, pelabuhan ini telah memiliki terminal petikemas yang dilengkapi dengan berbagai peralatan modern yang mampu menjamin pelayanan kapal dan barang.

Today, Palembang Port is the largest river port in Sumatera and a foundation of the lifeblood of economic growth in the province of South Sumatera. Loading and unloading activities are dominated by dry bulk goods and containers, in addition to other forms of packaging. Palembang Port has a huge potential sub-port for cooperation and open investment, namely Sungai Lais port, supported by a wide area for the processing industry activities. In anticipation of the increased flow of commodities in the future, this port has had a container terminal equipped with a range of modern equipment that assist ships and goods service.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Palembang, Sumatera Selatan
Table of Facilities of Palembang Port Branch, South Sumatra

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
1	Alur Channel	
	Panjang Length	109.268 m
	Lebar Width	100 m
2	Kolam Basin	
	Kedalaman Depth	-5.0 s.d -10.0 m.LWS
	Luas Total Area	77.100 m ²
3	Dermaga Berth	
	Kedalaman Depth	-5.0 s.d -7.0 m.LWS
	Panjang Length	1.275 m
4	Gudang Storage	
	Unit	7 Unit
	Luas Total Total Area	8.937 m ²
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	30.244 m ²
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	54.328 m ²

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Palembang, Sumatera Selatan
Table of Recapitulation of Equipment Asset Data of Palembang Port Branch, South Sumatra

No	Data Peralatan Facilities	Tahun 2019 Year 2019
Alat Bongkar Muat Loading and Unloading Equipment		
1	Quay Container Crane	2
2	Gantry Jib Crane	4
3	Rail Mounted Gantry Crane	4
4	Reach Stacker	4
5	Side Loader	3
6	Forklift Diesel	21



Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Palembang, Sumatera Selatan

Table of Recapitulation of Equipment Asset Data of Palembang Port Branch, South Sumatra

No	Data Peralatan Facilities	Tahun 2019 Year 2019
7	Head Truck	2
8	Road Truck	5
9	Terminal Trucktor	11
10	Chassis	25
Jumlah Total		81
Alat Apung Buoyancy Tools		
1	Kapal Tunda Tugboat	3
2	Motor Pandu Pilotage	2
3	Tongkang Barge	2
Jumlah Total		7

Produktivitas Palembang

Kenaikan arus barang terjadi pada jenis *general cargo* sebesar 37,70% dari 183.266 Ton di tahun 2018 menjadi 252.351 Ton di tahun 2019. Hal tersebut karena kecukupan alat bantu bongkar muat yang digunakan, truk pengangkut yang melayani dalam jumlah yang memadai dan gudang penerima yang dalam keadaan siap.

Arus penumpang tahun 2019 sebesar 81,196 orang meningkat 20,87% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 67,175 orang. Peningkatan tersebut karena kenaikan trafik penumpang di Pelabuhan Palembang yang diakibatkan peralihan moda transportasi dari pesawat udara ke transportasi laut.

Palembang Productivity

The increase in the container traffic occurred in the type of general cargo by 37.70% from 183,266 tons in 2018 to 252,351 tons in 2019. This was due to the adequacy of loading and unloading equipment used, transport trucks serving in sufficient quantities and ready warehouses.

The passenger traffic in 2019 amounted to 81,196 persons, an increase of 20.87% compared to 2018 of 67,175 persons. The increase was due to an increase in passenger traffic at Palembang Port, which was caused by a shift in modes of transportation from aircraft to sea transportation.

Tabel Produktivitas Palembang

Table of Palembang Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
1	Kapal Ship	Unit	1.611	1.723	(112)	(6,50%)
		GT	3.724.138	3.969.674	(245.536)	(6,19%)

Tabel Produktivitas Palembang
Table of Palembang Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
2	General Cargo	Ton	252.351	183.266	69.085	37,70%
	Bag Cargo	Ton	367.356	470.815	(103.459)	(21,97%)
	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	964.847	1.068.425	(103.578)	(9,69%)
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	177.016	253.835	76.819)	(30,26%)
	Lain-Lain Others	Ton	-	-	-	-
3	Petikemas Containers	Box	128.782	154.710	(25.928)	(16,76%)
		TEUs	145.540	171.594	26.054)	(15,18%)
4	Penumpang Passengers	Orang Person	81.196	67.175	14.021	20,87%

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Palembang
Table of Utilization of Palembang Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Trend
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Dermaga: Dock:				
	• BOR (Terminal Petikemas) BOR (Container Terminal)	%	34,39	53,14	64,71%
	• BOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) BOR (Multipurpose Terminal)	%	51,36	58,50	87,79%
	• BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-
	• BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk Terminal)	%	-	-	-
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	• SOR (Gudang <i>Multipurpose</i>) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	15,35	20,07	76,45%
	• SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	-
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	• YOR (Terminal Petikemas) YOR (Container Terminal)	%	43,95	48,87	89,93%
	• YOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) YOR (Multipurpose Terminal)	%	28,69	35,21	81,49%
	• YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-



Pendapatan Palembang

Pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp442,34 miliar atau 56,05% di atas realisasi pendapatan usaha tahun 2018 sebesar Rp283,45 miliar. Realisasi ini dipengaruhi oleh pengelolaan terminal petikemas terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dikerjasamakan dengan Entitas Anak yaitu PT IPC Terminal Petikemas.

Palembang Revenue

The revenue in 2019 was Rp442.34 billion or 56.05% above the realization of revenue in 2018 amounting to Rp283.45 billion. This realization was influenced by the management of container terminal that as of January 1, 2018 was in cooperation with a subsidiary, PT IPC Terminal Petikemas.

Tabel Pendapatan Palembang (dalam miliar Rupiah)

Table of Palembang Revenue (in billion Rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Revenue	442,34	283,45	158,89	56,05%

Profitabilitas Palembang

Laba bersih tahun 2019 sebesar Rp44,12 miliar mengalami penurunan sebesar Rp28,41 miliar atau 39,17% dibandingkan realisasi laba bersih tahun 2018 sebesar Rp72,53 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan pendapatan usaha sebesar 10,60% yang terjadi hampir di seluruh segmen usaha kecuali Pengusahaan TBAL dan Fasilitas Rupa-Rupa Usaha, penurunan ini disebabkan karena terjadinya peralihan pengusahaan Terminal yang saat ini dikerjasamakan dengan Entitas Anak disertai dengan peningkatan beban usaha sebesar 2,85% terutama pada Beban KSMU.

Palembang Profitability

Net profit for 2019 was Rp.44.12 billion, a decrease of Rp28.41 billion or 39.17% compared to the realization of net profit in 2018 of Rp72.53 billion. This was influenced by a decrease in operating revenue of 10.60% which occurred in almost all business segments except TBAL Business and Miscellaneous Facilities. This decrease was due to the transition of terminal operation that is currently in cooperation with a subsidiary accompanied by an increase in operating expenses by 2.85%, mainly KSMU expenses

Tabel Profitabilitas Palembang (dalam miliar Rupiah)

Table of Palembang Profitability (in billion Rupiah)

Profitabilitas Profitability	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Laba Bersih Net Profit	44,12	72,53	(28,41)	(39,17)

PONTIANAK

Saat Singapura diberlakukan sebagai pelabuhan bebas internasional 1819, Pontianak menjadi poros terdepan Hindia Belanda dalam menarik sebagian perdagangan luar negeri. Pada 1834 pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Pontianak dan Sambas sebagai pelabuhan bebas. Cabang Pelabuhan Pontianak berada di tepi sungai Kapuas yang menghubungkan area seluas 146,8 ribu km di provinsi Kalimantan Barat. Pelabuhan ini menjadi urat nadi perekonomian wilayah Pontianak, Sintete, Sambas, Sintang, Sanggau, Kapuas, Hulu, Telok Air, Ketapang dan Singkawang.

PONTIANAK

When Singapore was enacted as an international free port in 1819, Pontianak became a leading of the Dutch East Indies in attracting most foreign trade. In 1834, the Dutch government made Pontianak and Sambas as a free port. Pontianak Port Branch is located on the edge of Kapuas river that connects an area of 146.8 thousand km in the province of West Kalimantan. This port is the artery of the region's economy of Pontianak, Sintete, Sambas, Sintang, Sanggau Kapuas Hulu, Telok Air, Ketapang and Singkawang.

Cabang Pelabuhan Pontianak memiliki terminal petikemas, dilengkapi dengan berbagai peralatan modern guna mendukung kegiatan bongkar muat secara optimal. Keberadaan sub-pelabuhan di sekitarnya, makin memperkuat posisi Cabang Pelabuhan Pontianak sebagai pelabuhan utama di Kalimantan Barat.

Pontianak Port has a container terminal, equipped with various modern equipment to support optimal loading and unloading activities. The presence of sub-port in the vicinity, further strengthened the position of Pontianak Port as the main port in West Kalimantan.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat
Table of Facilities of Pontianak Port Branch, West Kalimantan

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
Pontianak dan Kawasan Pontianak and Estate		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	90.000 m
	Lebar Width	60 s/d 80 m
	Kedalaman Depth	-2.0 s.d -9.0 m.LWS
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	34.104 m ²
	Kedalaman Depth	-1.0 s.d -6.0 m.LWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	1.531 m
	Kedalaman Depth	-1.0 s.d -6.0 m.LWS
4	Gudang Storage	
	Unit	6 Unit
	Luas Total Total Area	4.251 m ²
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	20.859 m ²
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	73.906 m ²
Pontianak		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	31.000 m
	Lebar Width	60 m
	Kedalaman Depth	- 3.5 S/D -5.0 m.LWS



Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat
Table of Facilities of Pontianak Port Branch, West Kalimantan

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	34.104 m ²
	Kedalaman Depth	-5.0 S/D -6.0 m.LWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	812 m
	Kedalaman Depth	-5.0 s.d -6.0 m.LWS
4	Gudang Storage	
	Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	1.750 m ²
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	17.664 m ²
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	47.794 m ²
Ketapang		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	13.000 m
	Lebar Width	60 m
	Kedalaman Depth	-2.0 s.d -6.0 m.LWS
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	-
	Kedalaman Depth	-2.0 s.d -4.0 mLWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	256 m
	Kedalaman Depth	-2.0 s.d -4.0 m.LWS
4	Gudang Storage	
	Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	600 m ²

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat
Table of Facilities of Pontianak Port Branch, West Kalimantan

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	1.095 m ²
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	-
Nipah Kuning		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	24.000 m
	Lebar Width	60 m
	Kedalaman Depth	-4,5 s.d -9.0 m.LWS
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	-
	Kedalaman Depth	-4.0 m.LWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	140 m
	Kedalaman Depth	-4.0 m.LWS
4	Gudang Storage	
	Unit	-
	Luas Total Total Area	-
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	26.112 m ²
Pemangkat		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	-
	Lebar Width	-
	Kedalaman Depth	-



Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat
Table of Facilities of Pontianak Port Branch, West Kalimantan

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	-
	Kedalaman Depth	-1.0 m.LWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	36 m
	Kedalaman Depth	-1.0 m.LWS
4	Gudang Storage	
	Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	611 m ²
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	-
Sambas		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	-
	Lebar Width	-
	Kedalaman Depth	-
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	-
	Kedalaman Depth	-1.0 m.LWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	39 m
	Kedalaman Depth	-1.0 m.LWS
4	Gudang Storage	
	Unit	-
	Luas Total Total Area	-

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat
Table of Facilities of Pontianak Port Branch, West Kalimantan

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	-
Singawang		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	-
	Lebar Width	-
	Kedalaman Depth	-
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	-
	Kedalaman Depth	-1.0 m.LWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	70 m
	Kedalaman Depth	-1.0 m.LWS
4	Gudang Storage	
	Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	480 m ²
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	-
Sintete		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	22.000 m



Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat
Table of Facilities of Pontianak Port Branch, West Kalimantan

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
	Lebar Width	80 m
	Kedalaman Depth	-2,5 s.d -8.0 m.LWS
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	-
	Kedalaman Depth	-3.0 m.LWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	140 m
	Kedalaman Depth	-3 m.LWS
4	Gudang Storage	
	Unit	2 Unit
	Luas Total Total Area	810 m ²
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	900 m ²
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	-
Telok Air		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	-
	Lebar Width	-
	Kedalaman Depth	-
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	-
	Kedalaman Depth	-3.0 m.LWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	38 m
	Kedalaman Depth	-3.0 m.LWS
4	Gudang Storage	

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat
Table of Facilities of Pontianak Port Branch, West Kalimantan

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
	Unit	-
	Luas Total Total Area	-
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	-

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat
Table of Recapitulation of Equipment Asset Data of Pontianak Port Branch, West Kalimantan

No	Data Peralatan Equipment	Tahun 2019 Year 2019
Alat Bongkar Muat Loading Unloading Equipment		
1	Quay Container Crane	3
2	Gantry Jib Crane	2
3	Rail Mounted Gantry Crane	8
4	Reach Stacker	4
5	Side Loader	3
6	Forklift Diesel	4
7	Head Truck	6
8	Road Truck	5
9	Terminal Tractor	13
10	Tronton	4
11	Chassis	21
Jumlah	Total	71
Alat Apung Floating Equipment		
1	Kapal Tunda Tugboat	2
2	Motor Pandu Pilotage	4
Jumlah	Total	6

Produktivitas Pontianak

Kunjungan kapal mengalami kenaikan dalam satuan unit sebesar 10,00% dari 2.199 unit di tahun 2018 menjadi 2.419 unit di tahun 2019. Demikian pula dengan kunjungan kapal dalam satuan GT meningkat 2,49% dari 5.760.994 GT di tahun 2018 menjadi 5.904.171 GT di tahun 2019. Hal tersebut karena meningkatnya perdagangan di sekitar pelabuhan terhadap kebutuhan masyarakat yang dibawa oleh kapal rakyat atau kapal kayu dengan ukuran kapal yang kecil.

Pontianak Productivity

Ship calls in unit increased by 10.00% from 2,199 units in 2018 to 2,419 units in 2019. Similarly, ship calls in GT unit increased by 2.49% from 5,760,994 GT in 2018 to 5,904,171 GT in 2019. This was due to increased trade around the port to the needs of the community carried by small ships or wooden vessels with small size vessels.



Selain itu curah kering tahun 2019 terealisasi sebesar 15.848 Ton, meningkat 2.135,26% dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 709 Ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh lancarnya arus kegiatan bongkar muat.

In addition, the dry bulk in 2019 was realized at 15,848 tons, an increase of 2,135.26% compared to 2018 of 709 tons. This was influenced by the smooth flow of loading and unloading activities.

Tabel Produktivitas Pontianak

Table of Pontianak Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
1	Kapal Ship	Unit	2.419	2.199	220	10,00%
		GT	5.904.171	5.760.994	143.177	2,49%
	General Cargo	Ton	1.342.311	1.412.622	(70.311)	(4,98%)
	Bag Cargo	Ton	192.617	226.639	(34.022)	(15,01%)
2	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	121.620	125141	(3.521)	(2,81%)
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	15.848	709	15.139	2,135,26%
	Lain-Lain Others	Ton	-	-	-	-
3	Petikemas Containers	Box	231.293	262.085	(30.792)	(11,75%)
		TEUs	263.891	297.318	(33.427)	(11,24%)
4	Penumpang Passengers	Orang Person	147.881	95.713	52.168	54,50%

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Pontianak

Table of Utilization of Pontianak Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Trend
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Dermaga: Dock:				
	• BOR (Terminal Petikemas) BOR (Container Terminal)	%	66,54	81,61	81,54%
	• BOR (Terminal Multipurpose) BOR (Multipurpose Terminal)	%	33,46	43,81	76,38%
	• BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-
	• BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk Terminal)	%	-	-	-
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	• SOR (Gudang Multipurpose) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	26,10	12,99	200,95%
	• SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	-

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Pontianak
Table of Utilization of Pontianak Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Trend
1	2	3	4	5	6=4/5
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	• YOR (Terminal Petikemas) YOR (Container Terminal)	%	48,03	56,28	85,34%
	• YOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) YOR (Multipurpose Terminal)	%	22,19	31,72	69,96%
	• YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-

Pendapatan Pontianak

Pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp366,08 miliar atau 94,73% di atas realisasi pendapatan usaha tahun 2018 sebesar Rp188,00 miliar. Realisasi ini dipengaruhi oleh pengelolaan terminal petikemas terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dikerjasamakan dengan Entitas Anak yaitu PT IPC Terminal Petikemas.

Pontianak Revenue

The revenue in 2019 was Rp366.08 billion or 94.73% above the realization of revenue in 2018 amounting to Rp188.00 billion. This realization was influenced by the management of container terminal that as of January 1, 2018 was in cooperation with a subsidiary, PT IPC Terminal Petikemas.

Tabel Pendapatan Pontianak (dalam miliar Rupiah)
Table of Pontianak Revenue (in billion Rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Revenue	366,08	188,00	178,08	94,73%

Profitabilitas Pontianak

Laba bersih tahun 2019 sebesar Rp69,83 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp53,97 miliar atau 340,30% dibandingkan realisasi laba bersih tahun 2018 sebesar Rp15,86 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan usaha sebesar 20,58% yang terjadi hampir di seluruh segmen usaha terutama Pelayanan Terminal sedangkan yang mengalami penurunan adalah Perusahaan TBAL dan Fasilitas Rupa-Rupa Usaha, disertai dengan penurunan beban usaha sebesar 7,35% terutama pada Beban KSMU.

Pontianak Profitability

Net profit in 2019 amounted to Rp69.83 billion, an increase of Rp53.97 billion or 340.30% compared to the realization of net profit in 2018 of Rp15.86 billion. This was influenced by an increase in operating revenue by 20.58% which occurred in almost all business segments, especially Terminal Services while those that experienced a decline were TBAL Business and Miscellaneous Facilities, accompanied by a decrease in operating expenses by 7.35%, especially in KSMU expenses.

Tabel Profitabilitas Pontianak (dalam miliar Rupiah)
Table of Pontianak Profitability (in billion Rupiah)

Profitabilitas Profitability	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Laba Bersih Net Profit	69,83	15,86	53,97	340,30%



TELUK BAYUR

Cabang Pelabuhan Teluk Bayur, sebelumnya bernama Emmahaven, dibangun sejak zaman kolonial Belanda antara tahun 1888 sampai 1893 di Kota Padang. Cabang Pelabuhan Teluk Bayur merupakan pelabuhan samudera yang terbuka untuk kegiatan perdagangan internasional di provinsi Sumatera Barat. Pelabuhan ini memiliki beberapa kawasan yang merupakan sentra kegiatan ekonomi di Sumatera Barat meliputi Muara Padang dan Air Bangis.

Cabang Pelabuhan Teluk Bayur saat ini telah memiliki standar prosedur pelayanan berdasarkan ISO 9002. Cabang Pelabuhan Teluk Bayur telah dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu menangani berbagai jenis barang antara lain barang curah seperti batubara, semen, klinker, CPO serta komoditas yang menggunakan petikemas seperti kayu manis, teh, *moulding*, furnitur dan karet, yang merupakan komoditas ekspor unggulan ke Amerika Serikat, Eropa, Asia, Australia dan Afrika.

TELUK BAYUR

Teluk Bayur Port Branch, formerly named Emmahaven, was built in the Dutch colonial era between the year of 1888 to 1893 in Padang city. Teluk Bayur Port is an open ocean port for international trade activities in the province of West Sumatera. This port has some areas that are centers of economic activity in West Sumatera include Muara Padang and Air Bangis.

Teluk Bayur Port currently has a standard service procedure based on ISO 9002. Teluk Bayur Port has been equipped with modern equipment that is capable of handling various kinds of goods among other bulk goods such as coal, cement, clinker, CPO and commodities using container such as cinnamon, tea, molding, furniture and rubber, which is the main export commodities to the United States, Europe, Asia, Australia and Africa.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Teluk Bayur
Table of Facilities of Teluk Bayur Port Branch

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
Teluk Bayur		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	1.856 m
	Lebar Width	150 m
	Kedalaman Depth	-10.0 s.d -11.0 m.LWS
2	Breakwater Breakwater	
	Panjang Length	550 m
3	Kolam Basin	
	Luas Total Area	308.900 m ²
	Kedalaman Depth	-8.0 s.d -12.0 m.LWS
4	Dermaga Berth	
	Panjang Length	1.578 m
	Kedalaman Depth	-8.0 s.d -12.0 m.LWS

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Teluk Bayur
Table of Facilities of Teluk Bayur Port Branch

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
5	Gudang Storage	
	Unit	5 Unit
	Luas Total Total Area	13.250 m ²
6	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	26.221,50 m ²
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	62.520 m ²
Muara Padang		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	1.856 m
	Lebar Width	40 m
	Kedalaman Depth	- 4.0 m.LWS
2	Kolam Basin	-
	Luas Total Area	34.043 m ²
	Kedalaman Depth	- 1.5 s.d -2.0 m.LWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	137 m
	Kedalaman Depth	-1.5 s.d -2.0 m.LWS
4	Gudang Storage	
	Unit	-
	Luas Total Total Area	-
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	3.369 m ²



Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Teluk Bayur
Table of Facilities of Teluk Bayur Port Branch

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	-
Air Bangis		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	1.856 m
	Lebar Width	40 m
	Kedalaman Depth	-2.5 m.LWS
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	15.500 m ²
	Kedalaman Depth	-1.5 s.d -2.0 m.LWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	55 m
	Kedalaman Depth	-1.5 s.d -2.0 m.LWS
4	Gudang Storage	
	Unit	-
	Luas Total Total Area	-
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	-

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Teluk Bayur
Table of Recapitulation of Equipment Asset Data of Teluk Bayur Port Branch

No	Data Peralatan Equipment	Tahun 2019 Year 2019
Alat Bongkar Muat Loading Unloading Equipment		
1	Gantry Luffing Crane	4
2	Gantry Jib Crane	3
3	Rubber Tyred Gantry Crane	3
4	Reach Stacker	3
5	Side Loader	2
6	Forklift Diesel	10
7	Wheel Loader	6

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Teluk Bayur
Table of Recapitulation of Equipment Asset Data of Teluk Bayur Port Branch

No	Data Peralatan Equipment	Tahun 2019 Year 2019
8	Excavator	3
9	Head Truck	15
10	Terminal Tractor	6
11	Dump Truck	6
12	Chassis	18
Jumlah Total		73
Alat Apung Floating Equipment		
1	Kapal Tunda Tugboat	4
2	Motor Pandu Pilotage	2
Jumlah Total		6

Produktivitas Teluk Bayur

Realisasi arus petikemas pada tahun 2018 sebesar 80.848 Box meningkat 4,79% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 77.154 Box. Dari sisi TEUs petikemas juga mengalami peningkatan sebesar 5,31% dari 84.659 TEUs di tahun 2018 menjadi 89.156 TEUs di tahun 2019, meningkatnya petikemas karena kesiapan alat bongkar muat dalam pelayaran kegiatan. Demikian pula dengan *bag cargo* dan curah kering yang meningkat masing-masing 17,58% dan 9,93%. Hal tersebut dipengaruhi karena *crane* kapal yang berfungsi dengan baik serta beberapa kapal menggunakan *full jib crane*.

Teluk Bayur Productivity

The realization of container flows in 2018 amounted to 80,848 boxes, increasing by 4.79% compared to 2018 with 77,154 boxes. In terms of TEUs, containers also increased by 5.31% from 84,659 TEUs in 2018 to 89,156 TEUs in 2019. The increase of containers due to the readiness of loading and unloading equipment in shipping activities. Likewise, bag cargo and dry bulk increased by 17.58% and 9.93%, respectively. This was affected by the well-functioning of the crane of the ship and several ships using full jib crane.

Tabel Produktivitas Teluk Bayur
Table of Teluk Bayur Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
1	Kapal Ship	Unit	1.791	1.720	71	4,13%
		GT	6.098.413	6.265.077	(166.664)	(2,66%)



Tabel Produktivitas Teluk Bayur
Table of Teluk Bayur Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
	General cargo	Ton	261.070	340.633	(79.563)	(23,36%)
	Bag Cargo	Ton	499.245	424.588	74.657	17,58%
2	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	2.239.411	2.337.936	(98.525)	(4,21%)
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	1.723.604	1.567.851	155.753	9,93%
	Lain-Lain Others	Ton	-	-	-	-
3	Petikemas Containers	Box	80.848	77.154	3.694	4,79%
		TEUs	89.156	84.659	4.497	5,31%
4	Penumpang Passengers	Orang	113.886	110.177	3.709	3,37%

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Teluk Bayur
Table of Utilization of Teluk Bayur Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Trend
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Dermaga: Dock:				
	• BOR (Terminal Petikemas) BOR (Container Terminal)	%	49,32	45,25	108,99%
	• BOR (Terminal Multipurpose) BOR (Multipurpose Terminal)	%	66,34	67,22	98,70%
	• BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-
	• BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk Terminal)	%	79,96	86,62	92,31%
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	• SOR (Gudang Multipurpose) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	-	-	-
	• SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	17,26	16,04	107,57%
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	• YOR (Terminal Petikemas) YOR (Container Terminal)	%	32,83	40,44	81,18%
	• YOR (Terminal Multipurpose) YOR (Multipurpose Terminal)	%	7,84	2,28	344,56%
	• YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-

Pendapatan Teluk Bayur

Pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp353,34 miliar atau 41,01% di atas realisasi pendapatan usaha tahun 2018 sebesar Rp250,57 miliar. Realisasi ini dipengaruhi oleh pengelolaan terminal petikemas terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dikerjasamakan dengan Entitas Anak yaitu PT IPC Terminal Petikemas.

Teluk Bayur Revenue

The revenue in 2019 amounted to Rp353.34 billion or 41.01% above the realization of revenue in 2018 of Rp250.57 billion. This realization was influenced by the management of container terminal that as of January 1, 2018 was in cooperation with a subsidiary, PT IPC Terminal Petikemas.

Tabel Pendapatan Teluk Bayur (dalam miliar Rupiah)
Table of Teluk Bayur Revenue (in billion Rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Revenue	353,34	250,57	102,77	41,01%

Profitabilitas Teluk Bayur

Laba bersih tahun 2019 sebesar Rp40,46 miliar mengalami penurunan sebesar Rp5,13 miliar atau 11,26% dibandingkan realisasi laba bersih tahun 2018 sebesar Rp45,59 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan usaha sebesar 6,44% terutama pada segmen Pendapatan Terminal dan Pengusahaan TBAL akan tetapi terdapat peningkatan beban usaha yang lebih tinggi sebesar 9,81% terutama pada Beban KSMU, Beban Administrasi dan Beban Umum.

Profitabilitas Teluk Bayur

Net profit in 2019 was Rp40.46 billion, decreased by Rp5.13 billion or 11.26% compared to the realization of net profit in 2018 amounted to Rp45.59 billion. This was influenced by an increase in operating revenue by 6.44%, especially in the Terminal and TBAL Business revenue, but there was a higher increase in operating expenses by 9.81%, mainly in KSMU expenses, Administrative Expenses and General Expenses.

Tabel Profitabilitas Teluk Bayur (dalam miliar Rupiah)
Table of Banten Profitability (in billion Rupiah)

Profitabilitas Profitability	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Laba Bersih Net Profit	40,46	45,59	(5,13)	(11,26%)

BANTEN

Cabang Pelabuhan Banten telah menjadi tempat persinggahan dan transaksi perdagangan domestik dan mancanegara selama lebih dari tiga abad. Pelabuhan yang terletak sekitar 10 kilometer dari pusat kota Serang ini pernah menjadi pelabuhan penting dalam perdagangan internasional di abad ke-15 dan disinggahi kapal-kapal asing yang berasal dari Persia, Arab, India, China, Inggris dan Portugis.

Cabang Pelabuhan Banten memiliki potensi berkembang pesat karena ditopang daerah industri yang tumbuh pesat, seperti industri pengolahan logam, mesin, kimia, dan minyak kelapa sawit. Pelabuhan Banten memiliki 3 (tiga) terminal batu bara dan dermaga

BANTEN

Banten Port Branch has facilitated domestic and foreign trade transactions for more than three centuries. The port which is located about 10 kilometers from the center of Serang city was once an important port in international trade in the 15th century and visited by international ships coming from Persian, Arabic, Indian, Chinese, English and Portuguese areas.

Banten Port has the potential to grow rapidly because it is sustained by industrial areas that are growing rapidly, such as metal processing industry, machinery, chemical, and oil palm. Banten Port has 3 (three) coal terminals and multipurpose dock



Multipurpose yang dilengkapi dengan peralatan bongkar muat petikemas. Aktivitas bongkar muat di Cabang Pelabuhan Banten didominasi pelayanan cargo curah cair dan curah kering.

equipped with loading and unloading of containers. Stevedoring activity in Banten Port is dominated by liquid bulk and dry bulk cargo.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Banten
Table of Facilities of Banten Port Branch

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
1	Alur Channel	
	Panjang Length	500 m
	Lebar Width	150 m
	Kedalaman Depth	-16.0 m.LWS
2	Breakwater	
	Panjang Length	-
3	Kolam Basin	
	Luas Total Area	118.151 m ²
	Kedalaman Depth	-2.0 s/d -16.0 m.LWS
4	Dermaga Berth	
	Panjang Length	1.274 m
	Kedalaman Depth	-2.0 s/d -16.0 m.LWS
5	Gudang Storage	
	Unit	2 Unit
	Luas Total Area	2.800 m ²
6	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	66.084 m ²
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	-

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Banten
Table of Recapitulation of Equipment Asset Data of Banten Port Branch

No	Data Peralatan Equipment	Tahun 2019 Year 2019
Alat Bongkar Muat Loading Unloading Equipment		
1	Gantry Luffing Crane	2
2	Forklift Diesel	1
3	Wheel Loader	4
4	Excavator	5
5	Head Truck	1
6	Chassis	1
Jumlah Total		14
Alat Apung Floating Equipment		
1	Kapal Tunda Tugboat	2
2	Motor Pandu Pilotage	1
Jumlah Total		3

Produktivitas Banten

Realisasi arus *general cargo* tahun 2019 meningkat 30,20% dari 1,506,935 Ton di tahun 2018 menjadi 1,961,983 Ton di tahun 2019 terutama dipengaruhi oleh kenaikan muat komoditi barang proyek seperti tiang pancang keluar dari Pelabuhan Banten dan kenaikan bongkar *sparepart* komponen mesin industri untuk kebutuhan pabrik sekitar provinsi Banten.

Realisasi arus petikemas pada tahun 2019 sebesar 0 Box turun 100,00% dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 17 Box. Dari sisi TEUs petikemas juga mengalami penurunan sebesar 100,00% dari 19 TEUs di tahun 2018 menjadi 0 TEUs di tahun 2019. Hal tersebut karena arus petikemas dalam satuan Box dan TEUs tidak dianggarkan dalam RKAP 2019.

Banten Productivity

The realization of general cargo flow in 2019 increased 30.20% from 1,506,935 tons in 2018 to 1,961,983 tons in 2019, mainly affected by an increase in loading of commodity commodity projects such as piles out of Banten Port and an increase in loading and unloading of industrial machinery component parts for factories around the province of Banten.

The realization of container flows in 2019 amounted to 0 Boxes, decreased by 100.00% compared to 2018 which amounted to 17 Boxes. In terms of TEUs, containers have also decreased by 100.00% from 19 TEUs in 2018 to 0 TEUs in 2019. This was because container flows in Box and TEU units are not budgeted in the 2019 RKAP.

Tabel Produktivitas Banten
Table of Banten Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
1	Kapal Ship	Unit	1.155	945	210	22,22%
		GT	8.479.035	7.390.835	1.088.200	14,72%



Tabel Produktivitas Banten
Table of Banten Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
2	General Cargo	Ton	1.961.983	1.506.935	455.048	30,20%
	Bag Cargo	Ton	32.551	66.541	(33.990)	(51,08%)
	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	570.718	568.820	1.898	0,33%
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	5.821.449	3.890.940	1.930.509	49,62%
	Lain-Lain Others	Ton	-	-	-	-
3	Petikemas Containers	Box	-	17	(17)	(100,00%)
		TEUs	-	19	(19)	(100,00%)
4	Penumpang Passengers	Orang	-	-	-	-

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Banten
Table of Utilization of Banten Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Trend
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Dermaga: Dock:				
	• BOR (Terminal Petikemas) BOR (Container Terminal)	%	-	-	-
	• BOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) BOR (Multipurpose Terminal)	%	56,01	49,32	113,57%
	• BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk Terminal)	%	62,19	56,96	109,18%
	• BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk Terminal)	%	29,74	21,37	139,17%
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	• SOR (Gudang <i>Multipurpose</i>) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	-	-	-
	• SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	-
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	• YOR (Terminal Petikemas) YOR (Container Terminal)	%	-	-	-
	• YOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) YOR (Multipurpose Terminal)	%	30,39	16,31	186,41%
	• YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-

Pendapatan Banten

Pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp501,51 miliar atau 54,26% di atas realisasi pendapatan usaha tahun 2018 sebesar Rp327,70 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya trafik kunjungan kapal di tahun 2019.

Banten Revenue

The revenue in 2019 was Rp501.51 billion or 54.26% higher than the realization of revenue in 2018 amounting to Rp327.70 billion. This was influenced by an increase in traffic of ship calls in 2019.

Tabel Pendapatan Banten (dalam miliar Rupiah)
Banten Profitability Table (in billions of Rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Revenue	505,51	327,70	177,81	54,26%

Profitabilitas Banten

Laba bersih tahun 2019 sebesar Rp128,02 miliar mengalami penurunan sebesar Rp332,63 miliar atau 72,21% dibandingkan realisasi laba bersih tahun 2018 sebesar Rp460,65 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh Pendapatan di Luar usaha tahun 2019 sebesar Rp48,06 miliar mengalami penurunan sebesar Rp348,00 miliar atau 87,63% dibandingkan realisasi laba bersih tahun 2018 sebesar Rp397,6 miliar akan tetapi terjadi peningkatan pendapatan usaha sebesar 1,36% disertai dengan penurunan beban usaha sebesar 2,46%.

Banten Profitability

Net profit for 2019 amounted to Rp128.02 billion, a decrease of Rp332.63 billion or 72.21% compared to the realization of 2018 net profit of Rp460.65 billion. This was influenced by Non-Operating Revenue in 2019 amounted to Rp48.06 billion, which decreased by Rp348.00 billion or 87.63% compared to the realization of net profit in 2018 of Rp397.6 billion, yet there was an increase in operating revenue of 1.36% accompanied with a decrease in operating expenses of 2.46%.

Tabel Profitabilitas Banten (dalam miliar Rupiah)
Tabel Profitabilitas Banten (dalam miliar Rupiah)

Profitabilitas Profitability	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Laba Bersih Net profit	128,02	460,65	(332,63)	(72,21%)

CIREBON

Pada 1865, pemerintahan kolonial Belanda membangun Pelabuhan Cirebon di Kota Cirebon Jawa Barat. Cabang Pelabuhan Cirebon sangat strategis sebagai pintu gerbang kegiatan usaha bagi hinterland yang luas, yaitu provinsi Jawa Barat dan sebagian provinsi Jawa Tengah. Cabang Pelabuhan Cirebon juga menjadi sangat strategis karena berada di lokasi dekat lintasan jalur jalan raya dan rel kereta api ke seluruh kota di Pulau Jawa. Cabang Pelabuhan Cirebon dilengkapi dengan fasilitas penumpukan petikemas, terminal batubara, terminal aspal curah dan tangki penampungan minyak kelapa sawit. Pelabuhan Cirebon dapat melayani barang curah kering, curah cair dan barang dalam karung.

CIREBON

In 1865, the Dutch colonial government built the Cirebon Port in Cirebon City, West Java. Cirebon Port Branch is a very strategic port as the gateway for business activities of the broad hinterland, namely West Java province and part of Central Java province. Cirebon Port has also become very strategic since it is located close to the track lane highways and railways to all cities in Java. Cirebon Port is equipped with containers stacking facility, coal terminal, asphalt bulk terminal and palm oil storage tank. Cirebon Port is able to serve dry bulk, liquid bulk and goods in sacks.



Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat
Table of Facilities of Cirebon Port Branch, West Java

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
1	Alur Channel	
	Panjang Length	2.500 m
	Lebar Width	70 m
	Kedalaman Depth	-6.0 m.LWS
2	Breakwater	
	Panjang Length	1.406 m
3	Kolam Basin	
	Luas Total Area	23.103 m ²
	Kedalaman Depth	-3.0 s.d -6.0 m.LWS
4	Dermaga Berth	
	Panjang Length	1.051 m
	Kedalaman Depth	-3.0 s.d -6.0 m.LWS
5	Gudang Storage	
	Unit	5 Unit
	Luas Total Total Area	8.662 m ²
6	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	27.908 m ²
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	5.400 m ²

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat
Table of Recapitulation of Equipment Asset Data of Cirebon Port Branch, West Java

No	Data Peralatan Equipment	Tahun 2019 Year 2019
Alat Bongkar Muat Loading Unloading Equipment		
1	Forklift Diesel	1
2	Wheel Loader	3
3	Excavator	6
4	Dump Truck	4
Jumlah Total		14

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat
Table of Recapitulation of Equipment Asset Data of Cirebon Port Branch, West Java

No	Data Peralatan Equipment	Tahun 2019 Year 2019
Alat Apung Floating Equipment		
1	Kapal Tunda Tugboat	2
2	Motor Pandu Pilotage	1
Jumlah Total		3

Produktivitas Cirebon

Realisasi arus *general cargo* mengalami kenaikan 138,33% dari 19.994 Ton di tahun 2018 menjadi 47.652 Ton di tahun 2019. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan bongkar muat barang proyek dan komponen mesin Industri melalui di Pelabuhan Cirebon.

Realisasi arus *bag cargo* mengalami penurunan 11,41% dari 86.869 Ton di tahun 2018 menjadi 76.959 Ton di tahun 2019 yang dipengaruhi oleh menurunnya bongkar pupuk di Pelabuhan Cirebon.

Realisasi arus curah cair mengalami kenaikan 3,29% dari 450.314 Ton di tahun 2018 menjadi 465.134 Ton di tahun 2019 yang dipengaruhi oleh kenaikan bongkar aspal.

Realisasi arus curah kering mengalami kenaikan 1,68% dari 3.896.799 Ton di tahun 2018 menjadi 3.962.445 Ton di tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan kunjungan kapal/ bongkar komoditi batubara.

Cirebon Productivity

The realization of general cargo flow increased by 138.33% from 19,994 tons in 2018 to 47,652 tons in 2019. This was influenced by an increase in loading and unloading of project goods and industrial machinery components through Cirebon Port.

The realization of bag cargo flows decreased by 11.41% from 86,869 tons in 2018 to 76,959 tons in 2019, which was influenced by a decrease in fertilizer loading and unloading at Cirebon Port.

The realization of liquid bulk flow experienced an increase of 3.29% from 450,314 tons in 2018 to 465,134 tons in 2019, which was affected by an increase in asphalt unloading.

The realization of dry bulk flow experienced an increase of 1.68% from 3,896,799 tons in 2018 to 3,962,445 tons in 2019, which was affected by an increase in ship calls/unloading of coal commodities.

Tabel Produktivitas Cirebon
Table of Cirebon Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
1	Kapal Ship	Unit	1.896	1.881	15	0,80%
		GT	3.134.056	2.846.737	287.319	10,09%
2	<i>General Cargo</i>	Ton	47.652	19.994	27.658	138,33%
	<i>Bag Cargo</i>	Ton	76.959	86.869	(9.910)	(11,41%)
	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	465.134	450.314	14.820	3,29%
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	3.962.445	3.896.799	65.646	1,68%
	Lain-Lain Others	Ton	-	-	-	-



Tabel Produktivitas Cirebon
Table of Cirebon Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
3	Petikemas Containers	Box	-	-	-	-
		TEUs	-	-	-	-
4	Penumpang Passengers	Orang Person	-	-	-	-

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Cirebon
Table of Utilization of Cirebon Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Trend
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Dermaga: Dock:				
	• BOR (Terminal Petikemas) BOR (Container Terminal)	%	-	-	-
	• BOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) BOR (Multipurpose Terminal)	%	73,41	60,63	121,08%
	• BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-
	• BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk Terminal)	%	-	-	-
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	• SOR (Gudang <i>Multipurpose</i>) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	39,66	44,66	88,82%
	• SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	-
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	• YOR (Terminal Petikemas) YOR (Container Terminal)	%	-	-	-
	• YOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) YOR (Multipurpose Terminal)	%	5,85	0,31	1.899,92%
	• YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-

Pendapatan Cirebon

Pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp207,85 miliar atau 105,70% di atas realisasi pendapatan usaha tahun 2018 sebesar Rp101,04 miliar. Hal ini ini dipengaruhi oleh meningkatnya trafik kunjungan kapal di tahun 2019.

Cirebon Revenue

The revenue in 2019 was Rp207.85 billion or 105.70% above the realization of revenue in 2018 amounting to Rp101.04 billion. This was influenced by an increase in traffic of ship calls in 2019.

Tabel Pendapatan Cirebon (dalam miliar Rupiah)
Table of Cirebon Revenue (in billion Rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Revenue	207,85	101,04	106,80	105,70%

Profitabilitas Cirebon

Laba bersih tahun 2019 sebesar Rp7,05 miliar mengalami penurunan sebesar Rp89,10 miliar atau 92,67% dibandingkan realisasi laba bersih tahun 2018 sebesar Rp96,15 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan pendapatan usaha sebesar 33,53% yang terjadi hampir di seluruh segmen usaha kecuali Perusahaan TBAL, Fasilitas Rupa-Rupa Usaha dan Jasa Kapal, penurunan pendapatan ini disebabkan karena terjadinya peralihan perusahaan Terminal yang saat ini dikerjasamakan dengan Entitas Anak, walaupun terdapat penurunan beban usaha sebesar 33,78%. Selain hal tersebut penurunan Laba Bersih juga dipengaruhi oleh Pendapatan di Luar usaha tahun 2019 sebesar Rp5,60 miliar mengalami penurunan sebesar Rp88,10 miliar atau 94,02% dibandingkan realisasi laba bersih tahun 2018 sebesar Rp93,70 miliar.

Cirebon Profitability

Net profit for 2019 was Rp7.05 Billion, a decrease of Rp89.10 Billion or 92.67% Compared to the realization of net profit in 2018 amounting to Rp96.15 Billion. This was influenced by a decrease in operating revenues by 33.53% Which occurred in almost all business segments except tbal business, miscellaneous facilities and ship services. The decrease in revenue was due to the transfer of terminal operation that is currently in cooperation with a subsidiary, although there was a decrease in operating expenses by 33.78%. In addition to this, the decline in net profit was also influenced by non-operating revenues in 2019 amounted to Rp5.60 Billion, experiencing a decrease of Rp88.10 Billion or 94.02% Compared to the realization of net profit in 2018 of Rp93.70 Billion.

Tabel Profitabilitas Cirebon (dalam miliar Rupiah)
Table of Cirebon Profitability (in billion Rupiah)

Profitabilitas Profitability	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Laba Bersih Net Profit	7,05	96,15	(89,10)	(92,67%)

BENGKULU

Cabang Pelabuhan Bengkulu merupakan kota pelabuhan tua yang dijadikan kota pendudukan dan perdagangan oleh Inggris pada abad ke-18 dan ke-19. Cabang Pelabuhan Bengkulu berada di Pulau Baai, sekitar 20 km dari pusat kota Bengkulu. Pelabuhan ini memiliki hinterland yang cukup luas, dengan potensi pertambangan, perkebunan dan kehutanan.

Aktivitas bongkar muat di Cabang Pelabuhan Bengkulu didominasi pelayanan barang curah kering, curah cair dan barang dalam karung dan petikemas, sementara untuk menampung kegiatan pelayanan barang curah kering, pelabuhan ini dilengkapi dengan 3 (tiga) *Belt Conveyor* pemuatan batu bara untuk percepatan pelaksanaan bongkar muat.

BENGKULU

Bengkulu Port Branch is a former port city that was transformed into an occupational and trade city by the British colony in the 18th to 19th century. Bengkulu Port is located in Baai Island, around 20 kilometers from the center of Bengkulu city. This port has a fairly extensive hinterland, with the potential for mining, agriculture, and forestry.

Stevedoring activity in Bengkulu Port Branch is mainly dominated by dry bulk, liquid bulk, and goods in sack and container services, meanwhile to accommodate dry bulk services, this port is equipped with 3 (three) coal loading conveyor belts in order to accelerate the stevedoring process.



Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Bengkulu
Table of Facilities of Bengkulu Port Branch

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
1	Alur Channel	
	Panjang Length	2.300 m
	Lebar Width	66 m
	Kedalaman Depth	-7.0 s/d -12.0 m.LWS
2	Breakwater	
	Panjang Length	1.072m
3	Kolam	
	Luas Total Area	100.000 m ²
	Kedalaman Depth	-9.0 s/d -11.0 m.LWS
4	Dermaga Berth	
	Panjang Length	499,5 m ²
	Kedalaman Depth	-9.0 s/d -11.0 m.LWS
5	Gudang Storage	
	Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	1.750 m ²
6	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	82.000 m ²
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	-

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Bengkulu
Table of Recapitulation of Equipment Asset Data of Bengkulu Port Branch

No	Data Peralatan Equipment	Tahun 2019 Year 2019
Alat Bongkar Muat		
Loading Unloading Equipment		
1	Gantry Luffing Crane	1
2	Reach Stacker	2
3	Forklift Diesel	5
4	Wheel Loader	3
5	Bulldozer	1
6	Head Truck	4
7	Chassis	6
8	Conveyor	3

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Bengkulu
Table of Recapitulation of Equipment Asset Data of Bengkulu Port Branch

No	Data Peralatan Equipment	Tahun 2019 Year 2019
Jumlah Total		25
Alat Apung Floating Equipment		
1	Kapal Tunda Tugboat	1
2	Motor Pandu Pilotage	1
Jumlah Total		2

Produktivitas Bengkulu

Kenaikan jumlah kunjungan kapal di Bengkulu dalam satuan unit mengalami penurunan 90,81% dari 1.524 unit di tahun 2018 menjadi 140 unit di tahun 2019. Hal tersebut karena penurunan kunjungan kapal luar negeri *general cargo* serta penurunan kapal dalam negeri *general cargo*, curah cair dan curah kering.

Arus barang umum *general cargo* juga mengalami penurunan 99,78% menjadi 172 Ton di tahun 2019 dari sebelumnya sebesar 76.999 Ton di tahun 2018. Hal tersebut karena trafik barang *general cargo* tidak mencapai anggaran yang dipengaruhi oleh selesainya pembangunan jalan tol dari Lampung ke Palembang sehingga truk yang memakai jasa angkutan laut beralih ke moda transportasi darat.

Realisasi arus petikemas pada tahun 2018 sebesar 26.818 Box menurun 90,93% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 26.818 Box. Dari sisi TEUs petikemas juga mengalami penurunan sebesar 90,97% dari 27.185 TEUs di tahun 2018 menjadi 2.455 TEUs di tahun 2019. Petikemas mengalami penurunan dikarenakan alat-alat konstruksi pembangunan pembangkit listrik yang memiliki bentuk dan ukuran beragam sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menempatkan *hook/belt* agar *cargo* dapat diangkat dengan aman.

Bengkulu Productivity

The number of ship calls in Bengkulu in unit decreased by 90.81% from 1,524 units in 2018 to 140 units in 2019. This was due to a decrease in international general cargo ship calls and a decrease in domestic general cargo ships, liquid bulk and dry bulk.

The flow of general cargo goods also decreased by 99.78% to 172 tons in 2019 from 76,999 tons in 2018. This was because the traffic on general cargo goods did not reach the budget, which was affected by the completion of toll road construction from Lampung to Palembang so that trucks that were previously using sea transportation services have switched to land transportation.

The realization of container flows in 2018 amounted to 26,818 boxes, down by 90.93% compared to 2018 with 26,818 boxes. In terms of TEUs, containers also decreased by 90.97% from 27,185 TEUs in 2018 to 2,455 TEUs in 2019. Containers have decreased due to construction equipment for the construction of power plant have varying shapes and sizes, hence required longer time to place a hook/belt so that the cargo can be lifted safely.

Tabel Produktivitas Bengkulu
Table of Bengkulu Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
1	Kapal Ship	Unit	140	1.524	(1.384)	(90,81%)
		GT	266.274	3.005.349	(2.739.075)	(91,14%)



Tabel Produktivitas Bengkulu
Table of Bengkulu Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
	General Cargo	Ton	172	76.999	(76.827)	(99,78%)
	Bag Cargo	Ton	3.659	158.411	(154.752)	(97,69%)
2	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	35.836	503.874	(468.038)	(92,89%)
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	346.633	2.582.958	(2.236.325)	(86,58%)
	Lain-Lain Others	Ton	-	-	-	-
3	Petikemas Containers	Box	2.432	26.818	(24.386)	(90,93%)
		TEUs	2.455	27.185	(24.730)	(90,97%)
4	Penumpang Passengers	Orang Person	3.013	14.313	(11.300)	(78,95%)

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Bengkulu
Table of Utilization of Bengkulu Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Trend	
1	2	3	4	5	6=4/5	
1	Dermaga: Dock:					
		• BOR (Terminal Petikemas) BOR (Container Terminal)	%	-	-	-
		• BOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) BOR (Multipurpose Terminal)	%	56,68	58,34	97,15%
		• BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:					
		• SOR (Gudang <i>Multipurpose</i>) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	-	-	-
		• SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	-
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:					
		• YOR (Terminal Petikemas) YOR (Container Terminal)	%	-	-	-
		• YOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) YOR (Multipurpose Terminal)	%	28,65	34,92	82,05%
	• YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-	

Pendapatan Bengkulu

Pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp79,90 miliar atau 38,65% di atas realisasi pendapatan usaha tahun 2018 sebesar Rp129,76 miliar. Realisasi ini dipengaruhi oleh pengelolaan terminal petikemas terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dikerjasamakan dengan Entitas Anak yaitu PT IPC Terminal Petikemas.

Bengkulu Revenue

The revenue in 2019 amounted to Rp79.90 billion or 38.65% higher than the realization of revenue in 2018 amounting to Rp129.76 billion. This realization was influenced by the management of container terminal that as of January 1, 2018 was in cooperation with a subsidiary, PT IPC Terminal Petikemas.

Tabel Pendapatan Bengkulu (dalam miliar Rupiah)
Table of Bengkulu Revenue (in billion Rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Revenue	179,90	129,76	50,14	38,65%

Profitabilitas Bengkulu

Laba bersih tahun 2019 sebesar Rp10,22 miliar mengalami penurunan sebesar Rp8,05 juta atau 0,08% dibandingkan realisasi laba bersih tahun 2018 sebesar Rp10,23 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan pendapatan usaha sebesar 22,30% yang terjadi hampir di seluruh segmen usaha kecuali Jasa Kapal, Pengusahaan TBAL dan Fasilitas Rupa-Rupa Usaha, penurunan ini disebabkan karena terjadinya peralihan perusahaan Terminal yang saat ini dikerjasamakan dengan Entitas Anak akan tetapi dapat diimbangi dengan penurunan beban usaha sebesar 27,39% terutama pada Beban Pegawai dan Beban Umum.

Bengkulu Profitability

Net profit in 2019 reached Rp10.22 billion, a decrease of Rp8.05 million or 0.08% compared to the realization of 2018 net profit reaching Rp10.23 billion. This was influenced by a decrease in operating revenue by 22.30% that occurred in almost all business segments except Ship Services, TBAL Business and Miscellaneous Facilities. This decrease was due to the transition of Terminal operation which is currently in cooperation with a Subsidiary, but can be offset by a decrease in operating expenses by 27.39% especially in Employee Expenses and General Expenses.

Tabel Profitabilitas Bengkulu (dalam miliar Rupiah)
Table of Bengkulu Profitability (in billion Rupiah)

Profitabilitas Profitability	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Laba Bersih Net Profit	10,22	10,23	(0,01)	(0,08%)

JAMBI

Cabang Pelabuhan Jambi awalnya terletak di kota Jambi (Boom Batu) dan mulai tahun 1996 dipindahkan ke Talang Duku, di hilir Sungai Batanghari, 10 kilometer dari kota Jambi. Sebagian besar kegiatan di Cabang Pelabuhan Jambi, adalah melayani bongkar muat barang curah, baik curah cair maupun curah kering.

JAMBI

Jambi Port Branch was originally located in the city of Jambi (Boom Batu) and since 1996 it was relocated to Talang Duku, at the downstream of Batang Hari River, 10 kilometers from the city of Jambi. Most of the activities at Jambi Port are stevedoring of bulk goods, both dry and liquid.

Hinterland Pelabuhan Jambi menghasilkan karet, kayu lapis, dan moulding, yang merupakan komoditi ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Jepang dan Korea. Pelabuhan lain dalam lingkungan Cabang Pelabuhan Jambi adalah Pelabuhan Kuala Tungkal dan Pelabuhan Muara Sabak. Pelabuhan Kuala Tungkal terletak di muara sungai Pengabuan, sekitar 10 mil dari ambang luar. Dermaga Kuala Tungkal, terbuat dari beton sepanjang 156

The hinterland of Jambi Port produces rubber, plywood and molding, which is a commodity export to the USA, Europe, Middle East, Japan and Korea. Other ports managed by Jambi Port Branch are Kuala Tungkal Port and Muara Sabak Port. Kuala Tungkal Port is located in the estuary of Pengabuan River, around 10 miles from the outer threshold. Kuala Tungkal berth, made from 156-meter long concrete, is currently primarily used to



m, saat ini lebih banyak untuk melayani kapal-kapal penumpang dengan tujuan Batam. Sedangkan Pelabuhan Muara Sabak terletak di sekitar 10 mil dari muara sungai Batanghari dan berada pada segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura (IMS), serta berdampingan dengan area lintas perdagangan Singapura, Batam dan Johor (SIBAJO). Dengan lokasinya yang strategis, Pelabuhan Muara Sabak, yang memiliki dermaga beton sepanjang 100 meter, akan berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional. Pelabuhan Muara Sabak dirancang untuk menjadi pelabuhan modern yang terintegrasi dengan kawasan industri dan perdagangan. Pelabuhan ini telah dilengkapi dengan terminal petikemas, terminal barang umum, terminal curah kering dan terminal curah cair.

Aktivitas bongkar muat di Cabang Pelabuhan Jambi didominasi pelayanan cargo curah kering, curah cair dan petikemas, terutama untuk komoditas batu bara, pupuk, CPO, BBM, dan perdagangan barang kebutuhan pokok antar pulau.

serve passenger ships heading to Batam. Muara Sabak Port is located around 10 miles from the estuary of Batanghari River, and is in the heart of the Triangle Growth of Indonesia, Malaysia and Singapore (IMS), and adjacent to the cross-trade area of Singapore, Batam and Johor (SIBAJO). With its strategic location, Muara Sabak Port, which has a 100-meter long concrete pier, is projected to have a vital role in advancing the national economic growth and trade activities. Muara Sabak Port is designed to be a modern port that will integrate with industrial and trade areas. This port is equipped with a container terminal, general cargo terminal, dry bulk terminal and liquid bulk terminal.

Stevedoring activity in Jambi Port is dominated by dry bulk, liquid bulk, and container services, particularly containing commodities of coal, fertilizer, palm oil, fuel, and inter-island traded basic goods.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Jambi
Table of Facilities of Jambi Port Branch

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
Jambi dan Kawasan Jambi and Estate		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	200.942 m
	Lebar Width	100 m
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	265.800 m ²
	Kedalaman Depth	-3.0 s.d -8.0 m.LWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	477,4 m
	Kedalaman Depth	-3.0 s.d -8.0 m.LWS
4	Gudang Storage	
	Unit Unit	2 Unit
	Luas Total Total Area	3.990 m ²

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Jambi
Table of Facilities of Jambi Port Branch

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	81.332 m ²
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	33.869 m ²
Talang Duku		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	172.236 m
	Lebar Width	100 m
	Kedalaman Depth	-4.5 s.d -9.0 m.LWS
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	76.500 m ²
	Kedalaman Depth	-5.0 s.d -8.0 m.LWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	302,4 m
	Kedalaman Depth	-5.0 s.d -8.0 m.LWS
4	Gudang Storage	
	Unit Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	2.040 m ²
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	78.332 m ²
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	33.869 m ²
Muara Sabak		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	21.298 m
	Lebar Width	100 m
	Kedalaman Depth	-5.0 s.d -8.0 m.LWS



Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Jambi
Table of Facilities of Jambi Port Branch

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	173.700 m ²
	Kedalaman Depth	-4.0 m.LWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	100 m
	Kedalaman Depth	-4.0 m.LWS
4	Gudang Storage	
	Unit Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	1.350 m ²
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	3.000 m ²
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	-
Kuala Tungkal		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	7.408 m
	Lebar Width	100 m
	Kedalaman Depth	-3.0 s.d -6.0 m.LWS
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	15.600 m ²
	Kedalaman Depth	-3.0 m.LWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	75 m
	Kedalaman Depth	-3.0 m.LWS
4	Gudang Storage	
	Unit Unit	-

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Jambi
Table of Facilities of Jambi Port Branch

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
	Luas Total Total Area	-
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	-

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Jambi
Table of Recapitulation of Equipment Asset Data of Jambi Port Branch

No	Data Peralatan Equipment	Tahun 2019 Year 2019
Alat Bongkar Muat Loading Unloading Equipment		
1	Fix Jib Crane	2
2	Rail Mounted Gantry Crane	3
3	Mobile Crane	2
4	Reach Stacker	1
5	Forklift Diesel	6
6	Wheel Loader	1
7	Excavator	1
8	Head Truck	2
9	Terminal Tractor	7
10	Chassis	12
11	Conveyor	1
Jumlah Total		39
Alat Apung Floating Equipment		
1	Motor Pandu Pilotage	1
Jumlah Total		1

Produktivitas Jambi

General cargo mengalami penurunan 54,61% dari 67.595 Ton di tahun 2018 menjadi 30.684 Ton di tahun 2019. Arus kemasan general cargo mengalami trend kenaikan untuk muatan karet, besi, dan tiang pancang untuk konstruksi. Sedangkan untuk bag kargo dan curah kering mengalami penurunan diakibatkan dermaga yang dipakai untuk bongkar muat curah cair mengalami kerusakan sehingga siklus kunjungannya terganggu.

Jambi Productivity

General cargo decreased by 54.61% from 67,595 tons in 2018 to 30,684 tons in 2019. The flow of general cargo packaging has an upward trend for cargo of rubber, iron and piles for construction. While for cargo bags and dry bulk has decreased due to the dock used for liquid bulk stevedoring has experienced a damage, so that the visiting cycle was interrupted.



Realisasi arus petikemas pada tahun 2019 sebesar 35,272 Box menurun 10,10% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 39.235 Box. Dari sisi TEUs petikemas juga mengalami penurunan sebesar 4,99% dari 48.976 TEUs di tahun 2018 menjadi 46.532 TEUs di tahun 2019. Penurunan tersebut antara lain disebabkan karena Cabang Pelabuhan Jambi tidak memiliki alat QCC.

The realization of container flows in 2019 amounted to 35,272 boxes, down 10.10% compared to 2018 with 39,235 boxes. In terms of TEUs, containers also decreased by 4.99% from 48,976 TEUs in 2018 to 46,532 TEUs in 2019. The decrease was partly due to the damage of QCC 04 loading and unloading equipment.

Tabel Produktivitas Jambi
Table of Jambi Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
1	Kapal Ship	Unit	1.245	1.141	104	9,11%
		GT	1.473.916	1.223.243	250.673	20,49%
	General Cargo	Ton	30.684	67.595	(36.911)	(54,61%)
	Bag Cargo	Ton	70.250	64.339	5.911	9,19%
2	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	228.091	201.190	26.901	13,37%
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	2.029.755	1.416.326	613.429	43,31%
	Lain-Lain Others	Ton	-	-	-	-
3	Petikemas Containers	Box	35.272	39.235	(3.963)	(10,10%)
		TEUs	46.532	48.976	(2.444)	(4,99%)
4	Penumpang Passengers	Orang Person	-	1.784	(1.784)	(100,00%)

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Jambi
Table of Utilization of Jambi Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Trend
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Dermaga: Dock:				
	• BOR (Terminal Petikemas) BOR (Container Terminal)	%	14,71	14,24	103,26%
	• BOR (Terminal Multipurpose) BOR (Multipurpose Terminal)	%	56,28	27,52	204,47%
	• BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk Terminal)	%	77,44	75,06	103,17%
	• BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk Terminal)	%	-	-	-
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	• SOR (Gudang Multipurpose) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	-	-	-

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Jambi
Table of Utilization of Jambi Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Trend
1	2	3	4	5	6=4/5
	• SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	45,34	25,51	177,75%
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	• YOR (Terminal Petikemas) YOR (Container Terminal)	%	54,66	57,99	94,25%
	• YOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) YOR (Multipurpose Terminal)	%	-	-	-
	• YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk Terminal)	%	74,89	61,49	121,79%

Pendapatan Jambi

Pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp107,48 miliar atau 91,35% di atas realisasi pendapatan usaha tahun 2018 sebesar Rp56,17 miliar. Realisasi ini dipengaruhi oleh pengelolaan terminal petikemas terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dikerjasamakan dengan Entitas Anak yaitu PT IPC Terminal Petikemas.

Jambi Revenue

The revenue in 2019 was Rp107.48 billion or 91.35% above the realization of revenue in 2018 amounting to Rp56.17 billion. This realization was influenced by the management of container terminal that as of January 1, 2018 was in cooperation with a subsidiary, PT IPC Terminal Petikemas.

Tabel Pendapatan Jambi (dalam miliar Rupiah)
Table of Jambi Revenue (in billion Rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Revenue	107,48	56,17	51,31	91,35%

Profitabilitas Jambi

Laba bersih tahun 2019 sebesar Rp6,99 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp3,39 miliar atau 94,18% dibandingkan realisasi laba bersih tahun 2018 sebesar Rp3,60 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan usaha sebesar 9,06% terutama pada segmen Perusahaan TBAL dan Fasilitas Rupa-Rupa Usaha disertai dengan penurunan beban usaha sebesar 2,73% terutama pada Beban Bahan.

Jambi Profitability

Net profit in 2019 was Rp6.99 billion, an increase of Rp3.39 billion or 94.18% compared to the realization of net profit in 2018 of Rp3.60 billion. This was influenced by an increase in operating revenue by 9.06%, especially in the segment of TBAL Business and Miscellaneous Facilities accompanied by a decrease in operating expenses by 2.73%, especially in the material expenses.

Tabel Profitabilitas Jambi (dalam miliar Rupiah)
Table of Jambi Profitability (in billion Rupiah)

Profitabilitas Profitability	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Laba Bersih Net Profit	6,99	3,60	3,39	94,18%



PANGKAL BALAM

Cabang Pelabuhan Pangkal Balam terletak di Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Cabang Pelabuhan Pangkal Balam dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti dermaga sepanjang 787 meter, fasilitas penumpukan, terminal penumpang, serta lapangan parkir. Pelabuhan Pangkal Balam melayani angkutan barang ekspor impor, perdagangan antar pulau dan angkutan penumpang dengan tujuan Jakarta dengan kapal Feri/Ro-Ro dan tujuan Tanjung Pandan dengan jetfoil/kapal cepat.

Pelabuhan lainnya adalah Pelabuhan Muntok, yang berada di pantai barat sebelah utara Pulau Bangka. Pelabuhan lainnya adalah Pelabuhan Sungai Selan di pedalaman sebelah selatan Pulau Bangka berdermaga kayu sepanjang 118 m, serta Pelabuhan Belinyu yang memiliki dermaga beton sepanjang 101 m.

PANGKAL BALAM

Pangkal Balam Port Branch is located in Bangka Island, Bangka Belitung province. Pangkal Balam Port is equipped with various facilities, including a 787m long port, stacking facilities, passenger terminal, and a parking lot. Pangkal Balam Port serves the transportation of imported and exported goods, inter-island trade, and the transportation of passengers to Jakarta by ferry boats/roll-off vessels and to Tanjung Pandan by jetfoil boats/speedboats.

One of other ports in this area is Muntok Port, located in the west beach next to the northern part of Bangka Island. Other ports are Sungai Selan Port, located deep in the southern part of Bangka Island, with a 118-m long wooden berth, and Belinyu Port, which has a 101-m long concrete berth.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Pangkal Balam, Bangka Belitung

Table of Facilities of Pangkal Balam Port Branch, Bangka Belitung

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
Pangkal Balam dan Kawasan Pangkal Balam and Estate		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	24.375 m
	Lebar Width	100 m
	Kedalaman Depth	-0.3 s.d -9.0 m.LWS
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	46.965 m ²
	Kedalaman Depth	-0.3 s.d -7.0 m.LWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	787 m
	Kedalaman Depth	-0,3 s.d -7.0 m.LWS
4	Gudang Storage	
	Unit Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	485 m ²
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Pangkal Balam, Bangka Belitung
Table of Facilities of Pangkal Balam Port Branch, Bangka Belitung

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	12.809 m ²
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	20.843 m ²
Pangkal Balam		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	3.500 m
	Lebar Width	40 m
	Kedalaman Depth	- 2,5 S/D -5.0 m.LWS
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	17.840 m ²
	Kedalaman Depth	-1.0 s.d -7.0 mLWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	506 m
	Kedalaman Depth	-1.0 s.d -7.0 mLWS
4	Gudang Storage	
	Unit Unit	-
	Luas Total Total Area	-
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	12.809 m ²
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	20.843 m ²
Belinyu		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	10.465 m
	Lebar Width	200 m
	Kedalaman Depth	-9.0 m.LWS



Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Pangkal Balam, Bangka Belitung

Table of Facilities of Pangkal Balam Port Branch, Bangka Belitung

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	3.930 m ²
	Kedalaman Depth	-7.0 m.LWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	101 m
	Kedalaman Depth	-7.0 m.LWS
4	Gudang Storage	
	Unit Unit	-
	Luas Total Total Area	-
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	-
Muntok		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	750 m
	Lebar Width	30 m
	Kedalaman Depth	-0,5 s.d -2,5 m.LWS
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	23.125 m ²
	Kedalaman Depth	-0,3 s.d -1,0 m.LWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	42 m
	Kedalaman Depth	-0,8 s.d -1,0 m.LWS
4	Gudang Storage	
	Unit Unit	1 Unit

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Pangkal Balam, Bangka Belitung
Table of Facilities of Pangkal Balam Port Branch, Bangka Belitung

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
	Luas Total Total Area	485 m ²
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	-
Sungai Selan		
1	Alur Channel	
	Panjang Length	9.660 m
	Lebar Width	10 m
	Kedalaman Depth	-1.0 s.d -2.0 mLWS
2	Kolam Basin	
	Luas Total Area	2.070 m ²
	Kedalaman Depth	-1.0 s.d -2.0 mLWS
3	Dermaga Berth	
	Panjang Length	138 m
	Kedalaman Depth	-1.0 s.d -2.0 mLWS
4	Gudang Storage	
	Unit	-
	Luas Total Total Area	-
5	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	-
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	-



Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Pangkal Balam, Bangka Belitung
 Table of Recapitulation of Equipment Asset Data of Pangkal Balam Port Branch, Bangka Belitung

No	Data Peralatan Equipment	Tahun 2019 Year 2019
Alat Bongkar Muat Loading Unloading Equipment		
1	Fix Jib Crane	1
2	Mobile Crane	1
3	Reach Stacker	1
4	Forklift Diesel	4
5	Road Truck	4
6	Chassis	4
Jumlah Total		15
Alat Apung Floating Equipment		
1	Motor Pandu Pilotage	1
Jumlah Total		1

Produktivitas Pangkal Balam

Kunjungan kapal di Pangkal Balam dalam satuan unit menurun sebesar 10,73% dari 2,815 unit di tahun 2018 menjadi 2,513 unit di tahun 2019. Dari sisi TEUs juga mengalami penurunan sebesar 14,52% dari 3.666.115 GT di tahun 2018 menjadi 3.133.781 GT di tahun 2019. Penurunan tersebut karena penurunan trafik kunjungan kapal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Arus kemasan barang *bag cargo*, curah cair, curah kering dan lainnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan menurunnya jumlah permintaan terhadap barang tersebut.

Realisasi arus petikemas pada tahun 2019 sebesar 51.945 Box menurun 6,54% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 55.580 Box. Dari sisi TEUs petikemas juga mengalami penurunan sebesar 6,47% dari 55.870 TEUs di tahun 2018 menjadi 52.258 TEUs di tahun 2019. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan kunjungan kapal di Pangkal Balam dari kapal curah cair, kapal petikemas.

Pangkal Balam Productivity

Ship calls in Pangkal Balam in unit decreased by 10.73% from 2,815 units in 2018 to 2,513 units in 2019. In terms of TEUs, also decreased by 14.52% from 3,666,115 GT in 2018 to 3,133,781 GT in 2019. The decline was due to a decrease in traffic of ship calls from abroad and within the country.

The container traffic in bag cargo, liquid bulk, dry bulk and others has decreased from the previous year due to decreased demand for these goods.

The realization of container flows in 2019 amounted to 51,945 boxes, down 6.54% compared to 2018 with 55,580 boxes. In terms of TEUs, containers also decreased by 6.47% from 55,870 TEUs in 2018 to 52,258 TEUs in 2019. The decrease was in line with the decline in ship calls at Pangkal Balam from liquid bulk vessels, container vessels.

Tabel Produktivitas Pangkal Balam
Table of Pangkal Balam Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
1	Kapal Ship	Unit	2.513	2.815	(302)	(10,73%)
		GT	3.133.781	3.666.115	(532.334)	(14,52%)
	General Cargo	Ton	149.119	126.791	22.328	17,61%
	Bag Cargo	Ton	333.726	516.225	(182.499)	(35,35%)
2	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	544.280	554.285	(10.005)	(1,81%)
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	40.383	45.549	(5.166)	(11,34%)
	Lain-Lain Others	Ton	537.822	-	537.822	100,00%
3	Petikemas Containers	Box	51.945	55.580	(3.635)	(6,54%)
		TEUs	52.258	55.870	(3.612)	(6,47%)
4	Penumpang Passengers	Orang Person	133.318	72.338	60.980	84,30%

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Pangkal Balam
Table of Utilization of Pangkal Balam Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Trend
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Dermaga: Dock:				
	• BOR (Terminal Petikemas) BOR (Container Terminal)	%	-	-	-
	• BOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) BOR (Multipurpose Terminal)	%	77,40	81,29	95,21%
	• BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-
	• BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk Terminal)	%	-	-	-
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	• SOR (Gudang <i>Multipurpose</i>) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	-	-	-
	• SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	-



Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Pangkal Balam
Table of Utilization of Pangkal Balam Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Trend
1	2	3	4	5	6=4/5
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	• YOR (Terminal Petikemas) YOR (Container Terminal)	%	-	-	
	• YOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) YOR (Multipurpose Terminal)	%	6,99	7,68	91,00%
	• YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-

Pendapatan Pangkal Balam

Pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp46,38 miliar atau 26,82% di atas realisasi pendapatan usaha tahun 2018 sebesar Rp36,57 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan persediaan barang kebutuhan Natal dan Tahun Baru serta adanya kenaikan tarif jasa penundaan.

Pangkal Balam Revenue

The revenue in 2019 was Rp46.38 billion or 26.82% above the realization of revenue in 2018 amounting to Rp36.57 billion. This was affected by an increasing demand for inventory of Christmas and New Year's needs and an increase in pilotage service tariffs.

Tabel Pendapatan Pangkal Balam (dalam miliar Rupiah)
Table of Pangkal Balam Revenue (in billion Rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Revenue	46,38	36,57	9,81	26,82%

Profitabilitas Pangkal Balam

Laba bersih tahun 2019 sebesar Rp0,65 miliar mengalami penurunan sebesar Rp2,97 miliar atau 82,01% dibandingkan realisasi laba bersih tahun 2018 sebesar Rp3,62 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan pendapatan usaha sebesar 39,54% yang terjadi hampir di seluruh segmen usaha kecuali Perusahaan TBAL, penurunan ini disebabkan karena terjadinya peralihan perusahaan Terminal yang saat ini dikerjasamakan dengan Entitas Anak akan tetapi terdapat penurunan beban usaha sebesar 31,37%.

Pangkal Balam Profitability

Net profit in 2019 was Rp. 0.65 billion, decreased by Rp. 2.97 billion, or 82.01% compared to the realization of net profit in 2018, which was Rp. 3.62 billion. This was influenced by a decrease in operating revenue by 39.54% which occurred in almost all business segments except TBAL Business, in which this decrease was due to the transition of Terminal operation that is currently in cooperation with a Subsidiary, but there was a decrease in operating expenses by 31.37%.

Tabel Profitabilitas Pangkal Balam (dalam miliar Rupiah)
Table of Pangkal Balam Profitability (in billion Rupiah)

Profitabilitas Profitability	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Laba Bersih Net Profit	0,65	3,62	(2,97)	(82,01%)

TANJUNG PANDAN

Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan berada di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Sejak 11 Juni 2011, Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan memiliki terminal penumpang yang dikenal dengan Pelabuhan Laskar Pelangi untuk mendukung kemajuan pariwisata di Pulau Belitung. Untuk mendukung kemajuan pariwisata tersebut, Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan telah direnovasi menjadi terminal modern berkapasitas 200 penumpang yang dilengkapi ruang VIP dan pertokoan.

Pelabuhan Tanjung Pandan memiliki hinterland yang meliputi 80.000 hektar, perkebunan kelapa sawit dan komoditas lain seperti kaolin, granit, dan pasir kuarsa.

TANJUNG PANDAN

Tanjung Pandan Port Branch is located in Belitung Island, Bangka Belitung province. On June 11, 2011, Tanjung Pandan Port was officially renamed to Laskar Pelangi Port in order to support the development of tourism In Belitung Island. To support the development of tourism, the passengers terminal in Tanjung Pandan Port has also been modernized to accommodate up to 200 passengers and is equipped with VIP rooms and shops.

Tanjung Pandan Port has the hinterland covering 80,000 hectares of palm oil plantation, and other commodities such as kaolin, granite, and quartz sand.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan, Bangka Belitung
Table of Facilities of Tanjung Pandan Port Branch, Bangka Belitung

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
1	Alur Channel	
	Panjang Length	6.482 m
	Lebar Width	30 m
2	Breakwater	
	Panjang Length	-
	Kedalaman Depth	-2.0 s/d -4.0 m.LWS
3	Kolam Basin	
	Luas Total Area	39.000 m ²
	Kedalaman Depth	-2.0 s/d -4.0 m.LWS
4	Dermaga Berth	
	Panjang Length	384 m
	Kedalaman Depth	-2.0 s/d -4.0 m.LWS
5	Gudang Storage	
	Unit Unit	1 Unit
	Luas Total Total Area	750 m ²
6	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	1.968 m ²



Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan, Bangka Belitung

Table of Facilities of Tanjung Pandan Port Branch, Bangka Belitung

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	5.880 m ²

Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan, Bangka Belitung

Table of Recapitulation of Equipment Asset Data of Tanjung Pandan Port Branch, Bangka Belitung

No	Data Peralatan Equipment	Tahun 2019 Year 2019
Alat Bongkar Muat Loading Unloading Equipment		
1	Forklift Diesel	2
2	Road Truck	1
3	Chassis	1
Jumlah Total		4
Alat Apung Floating Equipment		
1	Motor Pandu Pilotage	1
Jumlah Total		1

Produktivitas Tanjung Pandan

Kunjungan kapal mengalami kenaikan dalam satuan unit sebesar 14,87% dari 881 unit di tahun 2018 menjadi 1.012 unit di tahun 2019 dikarenakan kunjungan kapal yang masuk ke pelabuhan meningkat demikian pula dalam satuan GT yang meningkat sebesar 8,04% dari 438.736 GT di tahun 2018 menjadi 474.026 GT di tahun 2019.

Untuk arus kemasan *bag cargo* mengalami penurunan 2,03% dari 504,246 Ton di tahun 2018 menjadi 494.012 Ton di tahun 2019 dan curah cair juga mengalami penurunan sebesar 54,70%. Penurunan tersebut karena turunnya permintaan akan komoditi tersebut.

Realisasi arus petikemas dalam satuan Box pada tahun 2019 sebesar 12.863 Box menurun 8,51% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 14.060 Box. Dari sisi TEUs petikemas juga mengalami peningkatan sebesar 23,81% dari 11.356 TEUs di tahun 2017 menjadi 14.060 TEUs di tahun 2018. Hal ini disebabkan perubahan kontainerisasi yaitu perubahan kemasan dari *bag cargo* dan *general cargo* kepada petikemas agar barang lebih aman.

Tanjung Pandan Productivity

Ship calls in unit experienced an increase of 14.87% from 881 units in 2018 to 1,012 units in 2019, because ship calls to the port increased. Likewise in GT unit, which experienced an increase of 8.04% from 438,736 GT in 2018 to 474,026 GT in 2019.

The *bag cargo* packaging flows decreased by 2.03% from 504,246 tons in 2018 to 494,012 tons in 2019 and liquid bulk also decreased by 54.70%. The decrease was due to falling demand for those commodities.

The realization of container flows in Box unit in 2019 amounted to 12,863 boxes, down 8.51% compared to 2019 amounting to 14,060 boxes. In terms of TEUs, containers have also increased by 23.81% from 11,356 TEUs in 2017 to 14,060 TEUs in 2018. This was due to changes in containerization, namely changes in packaging from *bag cargo* and *general cargo* to containers to make the goods more safer.

Tabel Produktivitas Tanjung Pandan
Table of Tanjung Pandan Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
1	Kapal Ship	Unit	1.012	881	131	14,87%
		GT	474.026	438.736	35.290	8,04%
	General Cargo	Ton	305.076	238.323	66.753	28,01%
2	Bag Cargo	Ton	494.012	504.246	(10.234)	(2,03%)
	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	7.835	17.294	(9.459)	(54,70%)
	Curah Kering Dry Bulk	Ton	12.185	1.510	10.675	706,95%
	Lain-Lain Others	Ton	-	-	-	-
	Petikemas Containers	Box	12.863	14.060	(1.197)	(8,51%)
3		TEUs	12.863	14.060	(1.197)	(8,51%)
	Penumpang Passengers	Orang Person	89.010	92.982	(3.972)	(4,27%)

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Tanjung Pandan
Table of Utilization of Tanjung Pandan Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Trend
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Dermaga: Dock:				
	• BOR (Terminal Petikemas) BOR (Container Terminal)	%	-	-	-
	• BOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) BOR (Multipurpose Terminal)	%	94,56	90,90	104,03%
	• BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-
	• BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk Terminal)	%	-	-	-
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	• SOR (Gudang <i>Multipurpose</i>) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	80,56	95,61	84,25%
	• SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	-
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	• YOR (Terminal Petikemas) YOR (Container Terminal)	%	-	-	-
	• YOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) YOR (Multipurpose Terminal)	%	33,53	67,99	49,31%



Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Tanjung Pandan
Table of Utilization of Tanjung Pandan Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Trend
1	2	3	4	5	6=4/5
	• YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	

Pendapatan Tanjung Pandan

Pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp18,97 miliar atau 129,40% di atas realisasi pendapatan usaha tahun 2018 sebesar Rp8,27 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya trafik kunjungan kapal di tahun 2019.

Tanjung Pandan Revenue

The revenue in 2019 amounted to Rp18.97 billion or 129.40% above the realization of revenue in 2018 of Rp8.27 billion. This was influenced by increased traffic of ship calls in 2019.

Tabel Pendapatan Tanjung Pandan (dalam miliar Rupiah)
Table of Tanjung Pandan Revenue (in billion Rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Revenue	18,97	8,27	10,70	129,40%

Profitabilitas Tanjung Pandan

Laba bersih tahun 2019 sebesar Rp0,10 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp0,03 miliar atau 47,98% dibandingkan realisasi laba bersih tahun 2018 sebesar Rp0,07 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan pendapatan usaha sebesar 19,90% terutama pada segmen Jasa Barang dan Pelayanan Terminal, penurunan ini disebabkan karena terjadinya peralihan perusahaan Terminal yang saat ini dikerjasamakan dengan Entitas Anak akan tetapi terjadi penurunan beban usaha sebesar 26,46% terutama pada Beban Pegawai.

Tanjung Pandan Profitability

Net profit for 2019 amounted to Rp0.10 billion, increased by Rp0.03 billion or 47.98% compared to the realization of 2018's net profit of Rp0.07 billion. This was influenced by a decrease in operating revenues by 19.90%, especially in the Cargo and Terminal Services segment, in which this decrease was due to the transition of Terminal operation that is currently cooperated with a Subsidiary, and there was a decrease in operating expenses by 26.46% especially in Employee Expenses.

Tabel Profitabilitas Tanjung Pandan (dalam miliar Rupiah)
Table of Tanjung Pandan Profitability (in billion Rupiah)

Profitabilitas Profitability	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Laba Bersih Net Profit	0,10	0,07	0,03	47,98%

SUNDA KELAPA

Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan di Teluk Jakarta yang menjadi persinggahan pelayaran antar bangsa semasa Pemerintahan Portugis sejak 1527. Pelabuhan Sunda Kelapa mulai dikenal pada abad ke-12 sebagai pelabuhan yang disinggahi oleh kapal-kapal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan

SUNDA KELAPA

Sunda Kelapa Port Branch is located in Jakarta Bay and served as the transit point for ships between nations during the Portuguese administration since 1527. Sunda Kelapa Port became known in the 12th century as a port of transit by ships from China, Japan, South India and the Middle East that brings porcelain,

dan Timur Tengah yang membawa porselen, kopi, kain sutra, dan sebagainya untuk ditukar dengan rempah-rempah dan hasil perkebunan lainnya.

coffee, silk fabric, and others in exchange for spices and other agricultural crops.

Pelabuhan Sunda Kelapa kini merupakan pelabuhan bongkar muat barang dan petikemas. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal antar pulau dan pelayaran rakyat yang menggunakan kapal Phinisi atau Bugis Schooner dengan bentuknya yang khas. Komoditas yang diangkut selain kayu adalah bahan kebutuhan pokok, barang kelontong, dan bahan bangunan.

Nowadays, Sunda Kelapa Port is mainly utilized for local cargo stevedoring. Inter-island ships and commercial vessels, such as Phinisi or Bugis Schooner with its distinctive shape, visits this port, carrying commodities. These commodities include wood, essential supplies, haberdashery, and building materials.

Tabel Fasilitas Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa, DKI Jakarta
Table of Facilities of Sunda Kelapa Port Branch, DKI Jakarta

No	Data Fasilitas Facilities	Tahun 2019 Year 2019
1	Alur Channel	
	Panjang Length	2.212 m
	Lebar Width	60 m
2	Kedalaman Depth	-6.0 m.LWS
	Breakwater	
	Panjang Length	1.457 m
3	Kolam Basin	
	Luas Total Area	244.200 m ²
	Kedalaman Depth	-2.5 s/d -4.0 m.LWS
4	Dermaga Berth	
	Panjang Length	3.111 m
	Kedalaman Depth	-3.0 s/d -4.0 m.LWS
5	Gudang Storage	
	Unit Unit	10 Unit
	Luas Total Total Area	8.380 m ²
6	Lapangan Penumpukan Stacking Field	
	Luas Lapangan Konvensional Total Conventional Field	29.958 m ²
	Luas Lapangan Petikemas Total Container Field	12,888 m ²



Tabel Rekapitulasi Data Aset Peralatan Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa, DKI Jakarta
Table of Recapitulation of Equipment Asset Data of Sunda Kelapa Port Branch, DKI Jakarta

No	Data Peralatan Equipment	Tahun 2019 Year 2019
A.	Alat Bongkar Muat Loading Unloading Equipment	
1	Forklift Diesel	1
Jumlah Total		1

Produktivitas Sunda Kelapa

Kunjungan kapal yang mengalami penurunan 5,94% dalam satuan unit menjadi 3.184 di tahun 2018, demikian pula kapal dalam satuan GT mengalami penurunan 2,97% dari 2.873.932 GT di tahun 2018 menjadi 2.788.480 GT di tahun 2019 dikarenakan peningkatan trafik arus kunjungan kapal pelabuhan rakyat.

Untuk muatan *general cargo* mengalami peningkatan 0,99% dari 946.228 Ton di tahun 2018 menjadi 1.033.475 Ton di tahun 2019. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan dari muatan *general cargo* untuk komoditi besi, barang elektronik, kendaraan roda dua, alat-alat proyek.

Sedangkan untuk kemasan *bag cargo*, curah cair dan curah kering mengalami penurunan akibat menurunnya permintaan pupuk, semen, terigu, beras, pakan ternak, pasir dan CPO.

Realisasi arus petikemas pada tahun 2019 sebesar 86.373 Box meningkat 9,40% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 78.953 Box. Dari sisi TEUs petikemas juga mengalami peningkatan sebesar 10,31% dari 80.701 TEUs di tahun 2018 menjadi 89,018 TEUs di tahun 2019. Hal ini disebabkan karena Perubahan pola kemasan dari *bag cargo* ke petikemas terutama untuk muatan semen dan pupuk.

Sunda Kelapa Productivity

Ship calls experienced a decrease of 5.94% in unit to 3,184 in 2018, likewise ships in GT unit also decreased by 2.97% from 2,873,932 GT in 2018 to 2,788,480 GT in 2019, due to an increase in the traffic of traditional ship calls.

General cargo experienced an increase of 0.99% from 946,228 tons in 2018 to 1,033,475 tons in 2019. The increase came from the increase in general cargo for iron commodities, electronic goods, two-wheeled vehicles, project equipment.

As for bag cargo, liquid bulk and dry bulk experienced a decrease due to the decreased demand for fertilizer, cement, flour, rice, animal feed, sand and CPO.

The realization of container flows in 2019 amounted to 86,373 Boxes, an increase of 9.40% compared to 2018 of 78,953 Boxes. In terms of TEUs, containers also increased by 10.31% from 80,701 TEUs in 2018 to 89,018 TEUs in 2019. This was due to changes in packaging patterns from bag cargo to containers, especially for cement and fertilizer loads.

Tabel Produktivitas Sunda Kelapa
Table of Sunda Kelapa Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
1	Kapal Ship	Unit	3.184	3.385	(201)	(5,94%)
		GT	2.788.480	2.873.932	(85.452)	(2,97%)
	<i>General Cargo</i>	Ton	1.033.475	1.023.331	10.144	0,99%
	<i>Bag Cargo</i>	Ton	1.100.560	1.193.054	(92.494)	(7,75%)
2	Curah Cair Liquid Bulk	Ton	2.600	12.053	(9.453)	(78,43%)
	Curah Kering	Ton	648.478	716.663	(68.185)	(9,51%)
	Lain-Lain Dry Bulk	Ton	64.593	-	64.593	100,00%

Tabel Produktivitas Sunda Kelapa
Table of Sunda Kelapa Productivity

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
					(satuan) (unit)	(%)
3	Petikemas Containers	Box	86.373	78.953	7.420	9,40%
		TEUs	89.018	80.701	8.317	10,31%
4	Penumpang Passengers	Orang Person	22.876	20.244	2.632	13,00%

Tabel Utilisasi Fasilitas dan Peralatan Sunda Kelapa
Table of Utilization of Sunda Kelapa Facilities and Equipment

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Trend
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Dermaga: Dock:				
	• BOR (Terminal Petikemas) BOR (Container Terminal)	%	-	-	-
	• BOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) BOR (Multipurpose Terminal)	%	99,31	107,53	92,35%
	• BOR (Terminal Curah Kering) BOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-
	• BOR (Terminal Curah Cair) BOR (Liquid Bulk Terminal)	%	-	-	-
2	Gudang Penumpukan: Stacking Warehouse:				
	• SOR (Gudang <i>Multipurpose</i>) SOR (Multipurpose Warehouse)	%	27,13	32,92	82,40%
	• SOR (Gudang CFS) SOR (CFS Warehouse)	%	-	-	-
3	Lapangan Penumpukan: Stacking Field:				
	• YOR (Terminal Petikemas) YOR (Container Terminal)	%	-	-	-
	• YOR (Terminal <i>Multipurpose</i>) YOR (Multipurpose Terminal)	%	33,07	74,04	44,67%
	• YOR (Terminal Curah Kering) YOR (Dry Bulk Terminal)	%	-	-	-

Pendapatan Sunda Kelapa

Pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp56,55 miliar atau 0,09% di bawah realisasi pendapatan usaha tahun 2018 sebesar Rp56,61 miliar. Hal ini ini dipengaruhi oleh turunnya trafik kunjungan kapal dan arus barang.

Sunda Kelapa Revenue

The revenue in 2019 amounted to Rp56.55 billion or 0.09% lower than the realization of 2018's revenue amounted to Rp56.61 billion. This was influenced by the decline in traffic of ship calls and the container traffic.



Tabel Pendapatan Sunda Kelapa (dalam miliar Rupiah)
Table of Sunda Kelapa Revenue (in billion Rupiah)

Pendapatan Revenue	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Revenue	56,55	56,61	(0,05)	(0,09%)

Profitabilitas Sunda Kelapa

Laba bersih tahun 2019 sebesar Rp4,02 miliar mengalami penurunan sebesar Rp4,74 miliar atau 54,13% dibandingkan realisasi laba bersih tahun 2018 sebesar Rp8,76 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan pendapatan usaha sebesar 0,09% yang terutama pada segmen Perusahaan TBAL yang disertai dengan peningkatan beban usaha sebesar 10,47%.

Sunda Kelapa Profitability

Net profit in 2019 was Rp4.02 billion, a decrease of Rp4.74 billion or 54.13% compared to the realization of net profit in 2018 of Rp8.76 billion. This was influenced by a decrease in operating revenues by 0.09%, mainly in TBAL business segment which was accompanied by an increase in operating expenses by 10.47%.

Tabel Profitabilitas Sunda Kelapa (dalam miliar Rupiah)
Table of Sunda Kelapa Profitability (in billion Rupiah)

Profitabilitas Profitability	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Laba Bersih Net Profit	4,02	8,76	(4,74)	(54,13%)

LALU LINTAS PELABUHAN

PORT TRAFFIC

KUNJUNGAN KAPAL

SHIP CALLS



Secara keseluruhan kunjungan kapal pada tahun 2019 terealisasi sebesar 33.071 unit dan 209.113.340 GT. Dibandingkan dengan tahun 2018, dalam satuan unit turun 7,55% dan dalam GT turun 6,77%. Hal tersebut karena turunnya jumlah kunjungan rata-rata di beberapa wilayah kerja Perseroan terutama arus kunjungan kapal dalam dan luar negeri di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pintu gerbang perekonomian. Secara rinci, kinerja kunjungan kapal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Overall, ship calls in 2019 were realized at 33,071 units and 209,113,340 GT. Compared to 2018, in unit decreased by 7.55% and in GT decreased by 6.77%. This was due to the decrease in the average number of ship calls in several working areas of the Company, especially the flow of domestic and international ship calls at Tanjung Priok Port as the economic gateway. In details, the performance of ship calls can be described as follows:

Tabel Kunjungan Kapal
Table of Ship Calls

Uraian Table of Ship Calls	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Pelayaran Luar Negeri: International Shipping:					
Reguler	Unit	640	943	(303)	(32,13%)
Reguler	GT	11.936.402	16.261.976	(4.325.574)	(26,60%)
Non Reguler	Unit	5.126	5.380	(254)	(4,72%)
Non Reguler	GT	106.147.289	105.711.501	435.788	0,41%
Total Pelayaran Luar Negeri	Unit	5.772	6.323	(551)	(8,71%)
Total International Shipping	GT	118.092.195	121.973.477	(3.881.282)	(3,18%)
Pelayaran Dalam Negeri Domestic Shipping:					
Pelayaran Rakyat	Unit	23.939	26.218	(2.279)	(8,69%)
Pelayaran Rakyat	GT	89.695.416	100.908.199	(11.212.783)	(11,11%)
Pelayaran Perintis	Unit	3.024	2.900	124	4,28%
Pelayaran Perintis	GT	561.597	538.325	23.272	4,32%
Kapal Negara/Tamu	Unit	163	148	15	10,14%
Kapal Negara/Tamu	GT	201.916	160.684	41.232	25,66%
Kapal Negara/Tamu	Unit	184	182	2	1,10%
Kapal Negara/Tamu	GT	604.642	717.934	(113.292)	(15,78%)
Jumlah	Unit	33.071	35.771	(2.700)	(7,55%)
Total	GT	209.113.340	224.298.619	(15.185.279)	(6,77%)

KUNJUNGAN KAPAL LUAR NEGERI

Kunjungan kapal luar negeri dalam satuan unit kapal tahun 2019 mengalami penurunan 8,71% dari 6.323 unit di tahun 2018 menjadi 5.772 unit di tahun 2019. Sedangkan dalam satuan GT kapal tahun 2019 sebesar 118.092.195 GT turun 3,18% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 121.973.477 GT. Hal tersebut antara lain dipengaruhi trafik kunjungan kapal luar negeri yang secara keseluruhan dalam satuan GT mengalami penurunan pada Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Cirebon, Banten, Jambi, Bengkulu dan Pangkal Balam.

INTERNATIONAL SHIP CALLS

International ship calls for 2019 in ship unit experienced a decrease of 8.71% from 6,323 units in 2018 to 5,772 units in 2019. While in GT unit, amounted to 118,092,195 GT in 2019 or decreased by 3.18% compared to 2018 amounting to 121,973,477 GT. This was influenced by, among other things, traffic of international ship calls which, overall in GT unit experienced a decrease at Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Cirebon, Banten, Jambi, Bengkulu and Pangkal Balam Ports.



KUNJUNGAN KAPAL DALAM NEGERI

Kunjungan kapal luar negeri dalam satuan unit kapal tahun 2019 sebanyak 23.939 unit, turun 8,69% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 26.218 unit. Sedangkan dalam satuan GT kapal tahun 2019 sebesar 89.695.416 GT turun 11,15% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 100.908.199 GT. Trafik kunjungan kapal dalam negeri dalam satuan unit mengalami penurunan antara lain di Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Pontianak, Cirebon, Banten, Sunda Kelapa, Jambi, Bengkulu, Pangkal Balam dan Tanjung Pandan.

KUNJUNGAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT

Kunjungan kapal pelayaran rakyat dalam satuan unit kapal tahun 2019 sebesar 3.024 unit, meningkat 4,28% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 2.900 unit. Sedangkan dalam satuan GT kapal tahun 2019 sebesar 561.597 GT naik 4,32% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 538.325 GT. Hal tersebut karena kenaikan trafik di Pelabuhan Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Sunda Kelapa, Jambi dan Tanjung Pandan serta meningkatnya perdagangan di sekitar pelabuhan terhadap kebutuhan masyarakat yang di bawa oleh kapal rakyat atau kapal kayu dengan ukuran kapal yang kecil.

KUNJUNGAN KAPAL PELAYARAN PERINTIS

Kunjungan kapal pelayaran perintis dalam satuan unit kapal tahun 2019 sebesar 163 unit, meningkat 10,14% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 148 unit. Sedangkan dalam satuan GT kapal tahun 2019 sebesar 201.916 GT naik 25,66% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 160.684 GT.

KUNJUNGAN KAPAL NEGARA/TAMU

Kunjungan kapal negara/tamu dalam satuan unit kapal tahun 2019 sebesar 184 unit, meningkat 1,10% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 182 unit. Sedangkan dalam satuan GT kapal tahun 2019 sebesar 604.642 GT turun 15,78% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 717.934 GT. Hal tersebut karena peningkatan kunjungan kapal negara dan tamu di Cabang Tanjung Priok dan Palembang.

DOMESTIC SHIP CALLS

Domestic ship calls for 2019 in ship unit amounted to 23,939 units, down 8.69% compared to 2018 with 26,218 units. Whereas in GT unit amounted to 89,695,416 GT in 2019, down 11.15% compared to 2018 of 100,908,199 GT. Domestic ship calls in unit has decreased among others at Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Pontianak, Cirebon, Banten, Sunda Kelapa, Jambi, Bengkulu, Pangkal Balam and Tanjung Pandan Ports.

TRADITIONAL SHIP CALLS

In 2019, the number of traditional ship calls in unit was 3,024 units, an increase of 4.28% compared to 2018 of 2,900 units. Whereas in the GT unit, in 2019 amounted to 561,597 GT, an increase of 4.32% compared to 2018 amounting to 538,325 GT. This was due to an increase in traffic at Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Sunda Kelapa, Jambi and Tanjung Pandan Port, as well an increased trade around the port to the needs of the community carried by people's ships or wooden ships with small ship sizes.

PACER SHIP CALLS

In 2019, pacer ship calls in unit was 163 units, an increase of 10.14% compared to 2018 by 148 units. Whereas in GT unit, in 2019 amounted to 201,916 GT, increased by 25.66% compared to 2018 of 160,684 GT.

VISITOR/STATE SHIP CALLS

In 2019, visitor/state ship calls in unit amounted to 184 units, increased by 1.10% compared to 2018 of 182 units. Whereas in GT unit, amounted to 604,642 GT in 2019, decreased by 15.78% compared to 2018 of 717,934 GT. This was due to an increase in visitor/state ship calls in Tanjung Priok and Palembang Port Branches.

ARUS BARANG

CONTAINER TRAFFIC



Secara keseluruhan, realisasi arus barang dalam kemasan tahun 2019 untuk satuan Ton sebesar 60.035.441, sedangkan untuk kemasan petikemas dalam satuan Box, mencapai 5.616.445 dan dalam satuan TEUs sebesar 7.660.485 TEUs sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dimana permasalahan terkait *black campaign* di Eropa terhadap sawit Indonesia sehingga ekspor tersendat, terlambatnya musim panen untuk komoditi buah-buahan yang menjadi andalan ekspor khususnya Lampung, serta belum terealisasinya akuisisi PT Krakatau Bandar Samudra (KBS).

Overall, the realization of the container traffic in packaging for 2019 in Ton unit amounted to 60,035,441, while for container packaging in Box unit reaching 5,616,445 and in TEUs unit reaching 7,660,485 TEUs, decreased slightly compared to 2018. This was affected by external factors, namely the black campaigns in Europe against Indonesian palm oil have hampered the exports, the delay in the harvest season for fruit commodities that are the mainstay of exports, especially in Lampung, and the acquisition of PT Krakatau Bandar Samudra (KBS) that has not yet been realized.

Tabel Arus Barang
Table of Cargo Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
General Cargo	Ton	12.206.856	14.188.647	(1.981.791)	(13,97%)
Bag Cargo	Ton	4.032.931	4.850.049	(817.118)	(16,85%)



Tabel Arus Barang
Table of Cargo Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Curah Cair Liquid Bulk	Ton	10.159.602	10.126.169	33.433	0,33%
Curah Kering Dry Bulk	Ton	28.298.590	26.734.504	1.564.086	5,85%
Petikemas Container	Box TEUs	5.626.653 7.660.485	5.655.416 7.640.312	(28.763) 20.173	(0,51%) 0,26%
Lain-lain Others	Ton	5.338.646	6.071.882	(733.236)	(12,08%)
Jumlah Total	Ton	60.035.441	61.971.277	(1.935.836)	(3,12%)
	Box	5.616.445	5.655.416	(38.971)	(0,69%)
	TEUs	7.660.485	7.640.312	20.173	0,26%

ARUS BARANG GENERAL CARGO

Arus barang *general cargo* tahun 2019 mencapai 12.206.856 Ton, turun 13,97% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 14.188.647 Ton. Arus barang *general cargo* (umum) mengalami penurunan karena telah selesainya pembangunan jalan tol dari Lampung ke Palembang sehingga truk yang menggunakan jasa angkutan laut beralih moda ke transportasi darat.

GENERAL CARGO TRAFFIC

The general cargo traffic in 2019 reached 12,206,856 tons, decreased by 13.97% compared to 2018 of 14,188,647 tons. The general cargo traffic experienced a decrease due to the completion of toll road construction from Lampung to Palembang, so that trucks that were previously using sea transportation services have switched to land transportation modes.

ARUS BARANG DALAM KARUNG

Arus barang *bag cargo* tahun 2019 mencapai 4.032.931 Ton, turun 16,85% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 4.850.049 Ton. Arus barang *bag cargo* mengalami penurunan terutama untuk barang komoditi semen *in bag*, karet *in bag* dan pupuk *bag*. Hal ini disebabkan perubahan pola kemasan dan kontainerisasi yang lebih banyak menguntungkan baik dari segi penanganan bongkar muat dan moda transportasinya.

BAG CARGO TRAFFIC

The bag cargo traffic in 2019 reached 4,032,931 tons, a decrease of 16.85% compared to 2018 amounting to 4,850,049 tons. The bag cargo traffic experienced a decrease, especially for cement in bag, rubber in bag and bag fertilizer commodities. This was due to changes in packaging patterns and containerization, which are more beneficial both in terms of loading and unloading handling and transportation modes.

ARUS BARANG CURAH CAIR

Arus barang curah cair tahun 2019 mencapai 10.159.602 Ton, naik 0,33% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 10.126.169 Ton.

LIQUID BULK TRAFFIC

The liquid bulk traffic in 2019 reached 10,159,602 tons, up 0.33% compared to 2018 of 10,126,169 tons.

ARUS BARANG CURAH KERING

Arus barang curah kering tahun 2019 mencapai 28.298.590 Ton, naik 5,85% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 26.734.504 Ton.

DRY BULK TRAFFIC

The dry bulk traffic in 2019 reached 28,298,590 tons, up 5.85% compared to 2018 of 26,734,504 tons.

ARUS BARANG PETIKEMAS

Arus barang petikemas dalam satuan Box tahun 2019 mencapai 5.626.653 Box, turun 0,51% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5.655.416 Box. Sedangkan dalam satuan TEUs tahun

CONTAINER TRAFFIC

The container traffic in Box unit in 2019 reached 5,626,653 Boxes, a decrease of 0.51% compared to 2018 of 5,655,416 Boxes. Whereas in TEU unit, in 2019 amounted to 7,660,485 TEUs increase 0.26%

2019 sebesar 7.660.485 TEUs meningkat 0,26% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 7.640.312 TEUs. Hal tersebut antara lain karena realisasi arus barang petikemas dalam satuan box tahun 2019 berada di bawah RKAP.

compared to 2018 of 7.640.312 TEUs. This was partly because the realization of container traffic in unit boxes in 2019 was below the RKAP.

ARUS BARANG DALAM KEMASAN LAINNYA

Arus barang dalam kemasan lainnya tahun 2019 mencapai 5.338.646 Ton, turun 12,08% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 6.071.882 Ton.

OTHER CARGO TRAFFIC

The other cargo traffic in 2019 reached 5,338,646 Tons, decrease 12.08% compared to 2018 of 6,071,882 tons.

ARUS PETIKEMAS

CONTAINER TRAFFIC



Tabel Arus Petikemas
Table of Container Traffic

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan	
					(satuan) (unit)	(%)
1	Tanjung Priok					
a	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Box	2.153.762	2.116.328	37.434	1,77%
		TEUs	2.699.409	2.627.624	71.785	2,73%
b	New Priok Container Terminal I	Box	692.278	745.918	(53.640)	(7,19%)
		TEUs	1.112.636	1.169.759	(57.123)	(4,88%)
c	TPK Koja	Box	605.717	590.094	15.623	2,65%
		TEUs	914.329	889.011	25.318	2,85%
d	JICT	Box	1.409.969	1.398.806	11.163	0,80%
		TEUs	2.085.691	2.057.131	28.560	1,39%
	Total 1	Box	4.861.726	4.851.146	10.580	0,22%
		TEUs	6.812.064	6.743.523	68.541	1,02%
2	Panjang (TPK)	Box	103.719	95.658	8.061	8,43%
		TEUs	125.040	116.407	8.633	7,42%
3	Palembang (TPK)	Box	128.782	154.710	(25.928)	(16,76%)
		TEUs	145.540	171.594	(26.054)	(15,18%)



Tabel Arus Petikemas
Table of Container Traffic

No	Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan	
					(satuan) (unit)	(%)
4	Teluk Bayur (TPK)	Box	80.848	77.154	3.694	4,79%
		TEUs	89.156	84.659	4.497	5,31%
5	Pontianak (TPK)	Box	231.293	262.085	(30.792)	(11,75%)
		TEUs	263.891	297.318	(33.427)	(11,24%)
6	Banten	Box	-	17	(17)	(100,00%)
		TEUs	-	19	(19)	(100,00%)
7	Cirebon	Box	-	-	-	-
		TEUs	-	-	-	-
8	Jambi	Box	35.272	39.235	(3.963)	(10,10%)
		TEUs	46.532	48.976	(2.444)	(4,99%)
9	Bengkulu	Box	23.624	26.818	(3.194)	(11,91%)
		TEUs	24.123	27.185	(3.062)	(11,26%)
10	Sunda Kelapa	Box	86.373	78.953	7.420	9,40%
		TEUs	89.018	80.701	8.317	10,31%
11	Pangkal Balam	Box	51.945	55.580	(3.635)	(6,54%)
		TEUs	52.258	55.870	(3.612)	(6,47%)
12	Tanjung Pandan	Box	12.863	14.060	(1.197)	(8,51%)
		TEUs	12.863	14.060	(1.197)	(8,51%)
13	Sub Total Terminal Konvensional	Box	2.328.567	2.291.739	36.828	1,61%
	Sub Total Conventional Terminal	TEUs	2.877.671	2.805.459	72.212	2,57%
14	Sub Total Terminal Petikemas	Box	3.287.878	3.363.660	(75.782)	(2,25%)
	Sub Total Container Terminal	TEUs	4.782.814	4.834.854	(52.040)	(1,08%)
Jumlah Total		Box	5.626.653	5.655.416	(28.763)	(0,51%)
		TEUs	7.670.693	7.640.312	30.381	0,40%

TERMINAL KONVENSIONAL

Realisasi arus petikemas di dermaga konvensional tahun 2019 dalam satuan Box sebesar 2.328.567 Box, turun 1,61% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 2.291.739 Box. Sedangkan dalam satuan TEUs tahun 2019 sebesar 2.877.671 TEUs, turun 89,84% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 2.805.459 TEUs. Hal tersebut karena trend petikemas ekspor dan impor yang mengalami penurunan.

TERMINAL PETIKEMAS

Realisasi arus petikemas di dermaga petikemas tahun 2019 dalam satuan Box sebesar 3.287.878 Box, naik 2,57% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 3.363.660 Box. Sedangkan dalam satuan TEUs tahun 2019 sebesar 4.782.814 TEUs, turun 2,25% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 4.834.854 TEUs. Hal tersebut dipengaruhi oleh trafik petikemas di Terminal petikemas yang tidak mencapai target anggaran di beberapa wilayah kerja IPC TPK yaitu Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak dan Jambi.

CONVENTIONAL TERMINAL

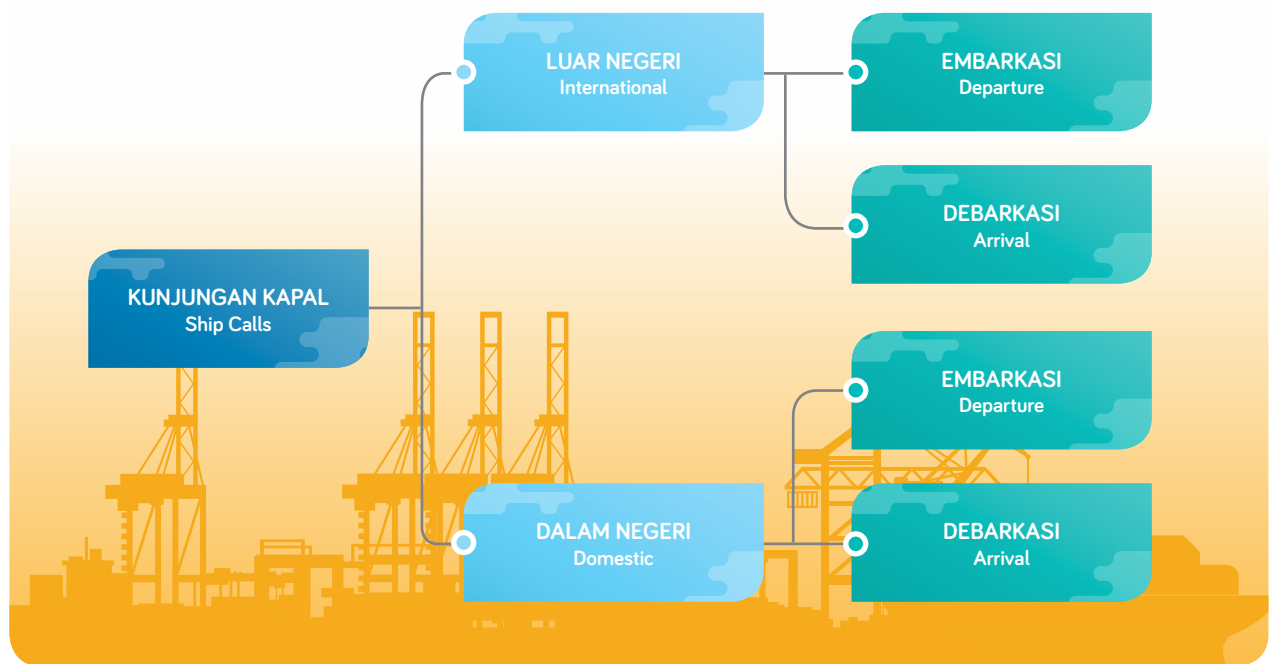
In 2019, the realization of container traffic at conventional dock in Box unit was 2,328,567 Boxes, decreased by 1.61% compared to 2018 amounting to 2,291,739 Boxes. Whereas in TEU unit for 2019 was 2,877,671 TEUs, decreased by 89.84% compared to 2018 amounting to 2,805,459 TEUs. This was due to the declining trend in export and import containers.

CONTAINER TERMINAL

In 2019, the realization of container traffic at container dock in Box unit amounted to 3,287,878 Boxes, up 2.57% compared to 2018 of 3,363,660 Boxes. Whereas in TEU unit for 2019 amounted to 4,782,814 TEUs, down 2.25% compared to 2018 of 4,834,854 TEUs. This was influenced by the failure of achieving the budget target of container traffic at Container Terminal in several TPK IPC working areas, namely Panjang, Palembang, Pontianak and Jambi Ports.

ARUS PENUMPANG

PASSENGER TRAFFIC



Realisasi arus penumpang pada tahun 2019 mencapai 1.138.179 orang meningkat 59,20% dibandingkan tahun 2018 yang sebanyak 714.931 orang. Kenaikan arus penumpang diakibatkan peralihan moda transportasi dari pesawat udara ke transportasi laut akibat tingginya harga tiket pesawat dan mudik gratis yang dilakukan oleh Direktorat Perhubungan Laut pada Hari Raya Idul Fitri untuk menggunakan kapal laut. Pelaksanaan mudik gratis ini merupakan kerjasama dengan PT Pelayaran Nasional (PELNI). Trafik penumpang yang mengalami peningkatan terdapat pada Pelabuhan Tanjung Priok, Palembang, Teluk Bayur, Pontianak, Sunda Kelapa, Pangkal Balam dan Tanjung Pandan. Adapun rinciannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

The realization of passenger traffic in 2019 reached 1,138,179 persons, an increase of 59.20% compared to 2018 reaching 714,931 persons. The increase in passenger traffic was driven by the changes of transportation mode from airplane to sea transportation due to the high price of airplane tickets and free homecoming by the Directorate of Sea Transportation on Eid al-Fitr by using ships. The free homecoming is a collaboration with PT Pelayaran Nasional (PELNI). The increased passenger traffic occurred at Tanjung Priok, Palembang, Teluk Bayur, Pontianak, Sunda Kelapa, Pangkal Balam and Tanjung Pandan Ports. The details are explained in the following table.

Tabel Arus Penumpang
Table of Passenger Container

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Luar Negeri International					
Embarkasi Departure	Orang Person	4.097	9.720	(5.623)	(57,85%)
Debarkasi Arrival	Orang Person	2.585	9.707	(7.122)	(73,37%)



Tabel Arus Penumpang
Table of Passenger Container

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Jumlah Luar Negeri Total International	Orang Person	6.682	19.427	(12.745)	(65,60%)
Dalam Negeri Domestic					
Embarkasi Departure	Orang Person	564.108	341.584	222.524	65,14%
Debarkasi Arrival	Orang Person	567.389	353.920	213.469	60,32%
Jumlah Dalam Negeri Total International	Orang Person	1.131.497	696.504	434.993	62,45%
Jumlah Total	Orang Person	1.138.179	714.931	423.248	59,20%

KINERJA ENTITAS ANAK

Sampai dengan tahun 2019, IPC memiliki 14 (empat belas) Entitas Anak, 2 (dua) Entitas Asosiasi, dan 1 (satu) Kerjasama Operasi. Penjelasan lebih lengkap mengenai Entitas Anak disajikan dalam bagian Profil dalam Laporan Tahunan ini. Adapun kinerja Entitas Anak IPC adalah sebagai berikut.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP)

SUBSIDIARY PERFORMANCE

Up to 2019, IPC has 14 (fourteen) Subsidiaries, 2 (two) Associates, and 1 (one) Joint Operation. A more complete explanation on subsidiaries is presented in the Profile section of this Annual Report. The performance of IPC subsidiaries is as follows.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP)

Tabel Kinerja Usaha (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Business Performance (in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenues	1.695.120.093	2.314.001.766	(618.881.673)	(26,75%)
Beban Usaha Operating Expenses	1.532.478.913	1.818.335.838	(285.856.925)	(15,72%)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	152.315.580	370.887.073	(218.571.493)	(58,93%)

Pendapatan Usaha Bersih

Realisasi pendapatan usaha bersih tahun 2019 sebesar Rp1,69 triliun atau 26,75% di bawah realisasi tahun 2018 yang sebesar Rp2,31 triliun. Hal ini disebabkan karena adanya pengalihan kegiatan Petikemas ke Entitas Anak PT IPC Terminal Petikemas terhitung mulai tanggal 16 Juli 2018.

Net Operating Revenues

The realization of net operating revenue in 2019 was Rp1.69 trillion or 26.75% below the realization in 2018 of Rp2.31 trillion. This was due to the shifting of container activities to a subsidiary, PT IPC Terminal Petikemas, starting on July 16, 2018.

Beban Usaha

Realisasi beban usaha tahun 2019 sebesar Rp1,53 triliun atau 15,72% di bawah realisasi tahun 2018 yang sebesar Rp1,82 triliun. Hal ini disebabkan rendahnya realisasi beban yang cukup signifikan seiring dengan dialihkannya pendapatan petikemas seperti beban KSMU Terminal Petikemas, beban atas pegawai yang dipindahtugaskan ke PT IPC Terminal Petikemas, serta beberapa beban yang terkait perubahan zonasi seperti konsesi kepada otoritas pelabuhan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sewa menyewa aset.

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2019 terealisasi sebesar Rp152,32 miliar atau 58,93% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar Rp370,89 miliar. Hal ini terutama disebabkan karena pengalihan kegiatan Petikemas Wilayah Tanjung Priok seiring dengan fokus PT PTP pada segmen bisnis terminal non petikemas.

KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA (KSO KOJA)

Operating Expenses

The realization of operating expenses in 2019 was Rp1.53 trillion or 15.72% below the 2018's realization amounted to Rp1.82 trillion. This was due to the significant lower realization of expenses in line with the shifting of container revenues such as KSMU expenses of Terminal Petikemas, employee expenses being transferred to PT IPC Terminal Petikemas, as well as several expenses related to zoning changes such as concessions to the port authority, Land and Building Tax (PBB), and asset leasing.

Net Profit (Loss)

Net profit for 2019 was realized at Rp152.32 billion or 58.93% below the realization in 2018 of Rp370.89 billion. This was mainly due to the shifting of Container activities of Tanjung Priok area in line with PT PTP's focus on the non-container terminal business segment.

KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA (KSO KOJA)

Tabel Kinerja Usaha (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Business Performance (in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenues	816.083.299	815.873.197	210.102	0,03%
Beban Usaha Operating Expenses	666.770.681	633.749.043	33.021.638	5,21%
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	137.059.607	157.438.854	(20.379.247)	(12,94%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan usaha tahun 2019 terealisasi sebesar Rp816,08 miliar atau 0,03% di atas realisasi tahun 2018 yang sebesar Rp815,87 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan volume pelayanan terminal petikemas sebagai pengganti dari 2 (dua) service yaitu AAX dan JTH yang tidak lagi bersandar di TPK Koja, dan tahun lalu TPK Koja menerima pendapatan penumpukan dan LOLO dari pemindahan penumpukan ex JICT ke TPK Koja.

Beban Usaha

Realisasi beban usaha tahun 2019 sebesar Rp666,77 miliar atau 5,21% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp633,75 miliar yang dipengaruhi oleh realisasi beban KSMU tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 antara lain disebabkan oleh faktor peningkatan pembayaran *Quarterly*

Net Operating Revenues

The operating revenues in 2019 was realized at Rp816.08 billion or 0.03% above the 2018's realization of Rp815.87 billion. This was driven by the additional volume of container terminal services in lieu of 2 (two) services, namely AAX and JTH which no longer moor at TPK Koja, and last year Koja TPK received the stacking revenue and LOLO from the transfer of stacking from ex JICT to TPK Koja.

Operating Expenses

The realization of operating expenses in 2019 was Rp.666.77 billion or 5.21% above the realization in 2018 of Rp.633.75 billion, which was influenced by the increased realization of KSMU expenses in 2019 compared to the realization in 2018, partly due to an increase in quarterly rent payments of Rp8.66



Rent sebesar Rp8,66 miliar akibat dampak selisih kurs karena realisasi kurs rata-rata yang lebih tinggi dari kurs rata-rata pada periode tahun lalu.

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2019 terealisasi sebesar Rp137,06 miliar atau 12,94% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar Rp157,44 miliar. Hal ini disebabkan karena penurunan pendapatan yang tidak diiringi dengan penurunan beban usaha.

PT JASA ARMADA INDONESIA, TBK (IPC MARINE)

billion as impacted by foreign exchange differences due to the realization of the average exchange rate which was higher than the average exchange rate in the last year period.

Net Profit (Loss)

The net profit for 2019 was realized at Rp137.06 billion or 12.94% below the 2018 realization of Rp157.44 billion. This was caused by a decrease in revenue that was not accompanied by a decrease in operating expenses.

PT JASA ARMADA INDONESIA, TBK (IPC MARINE)

Tabel Kinerja Usaha (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Business Performance (in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenues	684.206.463	727.051.393	(42.844.930)	(5,89%)
Beban Usaha Operating Expenses	566.762.389	600.900.221	(34.137.832)	(5,68%)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	90.063.919	72.807.227	17.256.692	23,70%

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan usaha tahun 2019 terealisasi sebesar Rp684,21 miliar atau 5,89% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar Rp727,05 miliar. Hal ini disebabkan pelayanan jasa kapal mengalami penurunan dikarenakan turunnya trafik kapal yang dilayani seiring dengan trend perubahan ukuran kapal menjadi lebih besar dengan GT yang lebih besar pula, serta adanya penurunan pendapatan shipping dikarenakan pola *time charter* dipengaruhi curah hujan tinggi sehingga mengganggu efektifitas kegiatan bongkar muat dan terbatasnya kapal kargo curah yang masih layak dan sesuai kebutuhan.

Beban Usaha

Beban usaha tahun 2019 terealisasi sebesar Rp566,76,63 miliar atau 5,68% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar Rp600,90 miliar. Hal ini seiring dengan penerapan strategi *cost effectiveness* di lingkungan Perusahaan.

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2019 terealisasi Rp90,06 miliar atau 23,70% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar Rp72,81 miliar. Meskipun pendapatan mengalami penurunan, penerapan strategi *cost effectiveness* di lingkungan Perusahaan mempengaruhi pencapaian laba sebelum pajak.

Net Operating Revenues

The operating revenues in 2019 was realized at Rp684.21 billion or 5.89% lower than the realization in 2018 of Rp727.05 billion. This was caused by the decline in ship services due to the decline in ship traffic served along with the trend of changes in ship size to be larger with larger GT as well, and the decrease in shipping revenue due to the time charter patterns influenced by high rainfall which disrupted the effectiveness of loading and unloading activities and the limited availability of bulk cargo ships that are feasible and according to the needs.

Operating Expenses

The operating expenses in 2019 was realized at Rp566.76.63 billion or 5.68% lower than the realization in 2018 of Rp600.90 billion. This was in line with the implementation of cost effectiveness strategy within the Company environment.

Net Profit (Loss)

The net profit in 2019 was realized at Rp90.06 billion or 23.70% lower than the realization in 2018 of Rp72.81 billion. Although revenue has decreased, the implementation of cost effectiveness strategy within the Company environment affected the achievement of profit before tax.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL (IKT)

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL (IKT)

Tabel Kinerja Usaha (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Business Performance (in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenues	523.631.681	521.835.612	1.796.069	0,34%
Beban Usaha Operating Expenses	385.691.520	330.620.825	55.070.695	16,66%
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	133.090.796	170.191.471	(37.100.675)	(21,80%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan usaha tahun 2019 terealisasi sebesar Rp523,63 miliar atau 0,34% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp521,84 miliar dikarenakan adanya kenaikan ekspor kendaraan serta adanya perpindahan layanan kapal domestik yang semula di PT PTP pindah ke PT IKT Tbk.

Net Operating Revenues

The operating revenues in 2019 was realized at Rp523.63 billion or 0.34% above the realization in 2018 of Rp521.84 billion, caused by an increase in vehicle exports and a shifting in domestic ship services from previously at PT PTP to to PT IKT Tbk.

Beban Usaha

Beban usaha tahun 2019 terealisasi sebesar Rp385,69 miliar atau 16,66% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp330,62 miliar karena adanya kenaikan beban pegawai, beban penyusutan/amortisasi, beban KSMU, dan beban umum dari tahun sebelumnya.

Operating Expenses

The operating expenses in 2019 was realized at Rp385.69 billion or 16.66% above the realization in 2018 of Rp330.62 billion, caused by an increase in employee expenses, depreciation/amortization expenses, KSMU expenses, and general expenses from the previous year.

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2019 terealisasi sebesar Rp133,09 miliar atau 21,80% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar Rp170,19 miliar karena adanya penurunan komoditas alat berat dan *spare part* (*general cargo*).

Net Profit (Loss)

The net profit in 2019 was realized at Rp133.09 billion or 21.80% below 2018 realization of Rp170.19 billion, due to a decline in heavy equipment and spare parts commodities (*general cargo*).

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PPI)

PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PPI)

Tabel Kinerja Usaha (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Business Performance (in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenues	772.359.897	857.044.645	(84.684.748)	(9,88%)
Beban Usaha Operating Expenses	465.579.314	738.976.163	(273.396.849)	(37,00%)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	242.052.517	137.053.668	104.998.849	76,61%



Pendapatan Usaha Bersih

Realisasi pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp772,36 miliar lebih rendah 9,88% dibandingkan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp857,04 miliar. Hal tersebut dikarenakan adanya pemotongan 11% dari nilai QSR per triwulan dikarenakan PT PPI belum menyerahkan CY 57m yang dikenakan sejak Januari 2019 hingga Desember 2019, sedangkan proyek Kijing tidak terealisasi sepenuhnya dikarenakan terdapat penyesuaian nilai kontrak dari anggaran yang telah direncanakan, serta terdapat beberapa pendapatan dari pekerjaan proyek manajemen strategis yang tidak terealisasi meliputi Cikarang Bekasi Laut (CBL), dan Sorong.

Beban Usaha

Beban usaha tahun 2019 terealisasi sebesar Rp465,58 miliar atau lebih rendah 37,00% dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp738,98 miliar. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh:

1. Beban Asuransi mengalami penurunan dikarenakan seiring dengan adanya realisasi beban asuransi *Directors* dan *Officers Liability* dalam USD yang dapat dinegosiasikan lebih rendah dibandingkan tahun 2018;
2. Beban KSMU mengalami penurunan karena kenaikan beban *site lease* CT 1 sesuai perjanjian;
3. Beban administrasi kantor mengalami penurunan terutama dikarenakan tidak terjadinya perkara hukum sehingga beban penanganan perkara tidak terealisasi.

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2019 terealisasi sebesar Rp242,05 miliar atau 76,61% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp137,05 miliar. Hal ini disebabkan karena terdapat kenaikan pendapatan usaha yang diiringi dengan penurunan beban usaha yang cukup signifikan.

Net Operating Revenues

The realization of operating revenues in 2019 was Rp772.36 billion, 9.88% lower than the realization in 2018 amounted to Rp857.04 billion. This was due to an 11% deduction from QSR value per quarter because PT PPI has not yet submitted the CY 57m that was imposed from January 2019 to December 2019, while the Kijing project has not yet completely realized due to an adjustment in the contract value of the planned budget, as well as some revenue from unrealized strategic management project works such as Cikarang Bekasi Laut (CBL), and Sorong.

Operating Expenses

The realization of operating expenses in 2019 was Rp465.58 billion or 37.00% lower compared to the realization in 2018 of Rp738.98 billion. This was caused by, among others:

1. Insurance expenses decreased due to the realization of Directors and Officers Liability insurance expenses in USD which can be negotiated lower than in 2018;
2. KSMU expenses decreased due to the increase in CT 1 site lease expenses according to the agreement;
3. Office administrative expenses decreased mainly due to the absence of legal cases so that the expenses of case handling were not realized.

Net Profit (Loss)

The net profit in 2019 was realized at Rp242.05 billion or 76.61% higher than the realization in 2018 of Rp137.05 billion. This was caused by the increase in operating revenues was accompanied by a significant decrease in operating expenses.

PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA (EDII)

PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA (EDII)

Tabel Kinerja Usaha (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Business Performance (in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenues	202.267.739	156.262.607	46.005.132	29,44%
Beban Usaha Operating Expenses	179.083.073	132.784.238	46.298.835	33,87%
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	15.439.277	17.913.888	(2.474.611)	(13,81%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan usaha tahun 2019 terealisasi sebesar Rp202,27 miliar atau 29,44% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp156,26 miliar. Hal tersebut terutama karena:

1. Terdapat kenaikan pendapatan di sektor kepelabuhanan yang disebabkan pendapatan baru di lingkungan IPC Group diantaranya maintenance VTS, IVO, ITSD, CRM, AP2EPI, Webhosting, e-Arsip dan e-Agenda, mobile GCG, AIS, alat sipat datar, *email service* dan *web hosting*, pemasangan CCTV, NPK Billing, *Dashboard Remote Management and Monitoring System*, Proyek Kijing, BI, *Autogate* dan kenaikan pendapatan TPS Online;
2. Penjualan produk *Invent 2* (dua) yang baru dilakukan di tahun 2019;
3. Proyek CCTV dan VMS di sektor Swasta.

Beban Usaha

Beban usaha tahun 2019 terealisasi sebesar Rp179,08 miliar atau 33,87% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp132,78 miliar. Hal tersebut karena:

1. Realisasi beban operasi tahun 2019 naik karena beban di tahun 2018 masih terdapat proyek PDE Kepabebean yang marginnya tinggi. Sedangkan mayoritas kegiatan proyek tahun 2019 adalah proyek konsultasi yang *bundling* dengan pengadaan perangkat;
2. Beban pegawai lebih tinggi dari pada realisasi tahun 2018 karena adanya pembebanan kekurangan biaya tantiem tahun 2018 yang direalisasikan di tahun 2019 serta adanya kenaikan remunerasi;
3. Beban penyusutan naik dari realisasi tahun 2018 sejalan dengan penambahan aset Perusahaan yang sebagian besar merupakan alat produksi.

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2019 terealisasi sebesar Rp15,44 miliar atau 13,81% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar Rp17,91 miliar. Persentase peningkatan beban usaha lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pendapatan usaha karena di tahun 2018 masih terdapat proyek PDE Kepabebean yang marginnya tinggi sedangkan kegiatan proyek tahun 2019 banyak proyek konsultasi *bundling* dengan pengadaan perangkat yang marginnya kecil.

Net Operating Revenues

The operating revenues in 2019 was realized at Rp202.27 billion or 29.44% above the realization in 2018 of Rp156.26 billion. This was mainly due to:

1. There was an increase in revenue in the port sector due to new revenues within IPC Group environment including maintenance of VTS, IVO, ITSD, CRM, AP2EPI, Webhosting, e-Archives and e-Agenda, mobile GCG, AIS, flat storage devices, email services and web hosting, installation of CCTV, NPK Billing, Dashboard Remote Management and Monitoring System, Kijing Project, BI, Autogate and TPS Online revenue increase;
2. Sales of Invent 2 (two) new products started in 2019;
3. CCTV and VMS projects in the Private sector.

Operating Expenses

The operating expenses in 2019 was realized at Rp179.08 billion or 33.87% above the 2018 realization of Rp132.78 billion. This was due to:

1. The realization of operating expenses in 2019 increased because there were still high-margin Customs PDE projects in 2018. Whereas the majority of project activities in 2019 were consultancy projects that are bundling with equipment procurement;
2. Employee expense was higher than the realization in 2018 due to the imposition of tantiem cost deficit in 2018 which was realized in 2019 and an increase in remuneration;
3. Depreciation expense increased from the realization in 2018 in line with the addition of the Company's assets, which were mostly production equipment.

Net Profit (Loss)

Net profit for the year 2019 was realized at Rp15.44 billion or 13.81% below the realization in 2018 of Rp17.91 billion. The percentage increase in operating expenses was higher than the increase in operating revenues because there was PDE Customs project with high margin included in 2018, while in 2019 there were many consulting-equipment procurement bundling projects with small margin.



PT MULTI TERMINAL INDONESIA (MTI)

PT MULTI TERMINAL INDONESIA (MTI)

Tabel Kinerja Usaha (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Business Performance (in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenues	492.877.736	402.745.179	90.132.557	22,38%
Beban Usaha Operating Expenses	468.344.431	393.294.918	75.049.513	19,08%
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	20.235.929	31.650.691	(11.414.762)	(36,06%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan usaha bersih tahun 2019 terealisasi sebesar Rp492,88 miliar atau 22,38% di atas realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp402,75 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya *customer* baru dan adanya kenaikan kegiatan *customs clearance* serta ditunjangnya pengelolaan moda transportasi untuk kegiatan *trucking* dan juga dikarenakan meningkatnya realisasi produksi pada *Common Area* dan limpahan PT IPC TPK.

Net Operating Revenues

The net operating revenues in 2019 was realized at Rp492.88 billion or 22.38% above the realization in 2018 of Rp402.75 billion. This was due to new customers and an increase in customs clearance activities as well as support for the management of transportation modes for trucking activities and also due to increased production realization in the Common Area and the overflow of PT IPC TPK.

Beban Usaha

Beban usaha tahun 2019 terealisasi sebesar Rp468,34 miliar atau 19,08% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp393,29 miliar. Hal ini disebabkan karena masih adanya beban pemeliharaan alat *faspel* yang seharusnya pada RKAP 2019 sudah beralih ke PT JPPI, serta peningkatan pendapatan dari kegiatan *freight forwarding* sehingga berpengaruh pada biaya Kerjasama Mitra Usaha (KSMU).

Operating Expenses

The operating expenses in 2019 was realized at Rp.468.34 billion or 19.08% above the realization in 2018 of Rp393.29 billion. This was due to the fact that there was still expenses on the maintenance of training tools that should have been transferred to PT JPPI in 2019 RKAP, as well as an increase in revenue from freight forwarding activities that affected the Cost of Business Partnership (KSMU).

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2019 terealisasi sebesar Rp20,24 miliar atau 36,06% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar Rp31,65 miliar. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya beban usaha seiring dengan kenaikan realisasi produksi pada *common area*.

Net Profit (Loss)

Net profit in 2019 was Rp20.24 billion or 36.06% below the realization in 2018 of Rp31.65 billion. This was influenced partly by the increase in operating expenses in line with the increase in production realization in the common area.

PT RUMAH SAKIT PELABUHAN (RSP)

PT RUMAH SAKIT PELABUHAN (RSP)

Tabel Kinerja Usaha (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Business Performance (in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenues	442.570.439	413.987.734	28.582.705	6,90%
Beban Usaha Operating Expenses	517.809.583	390.574.505	127.235.078	32,58%

Tabel Kinerja Usaha (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Business Performance (in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	(59.189.423)	18.540.009	(77.729.432)	419,25%

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan usaha bersih tahun 2019 terealisasi sebesar Rp442,57 miliar atau 6,90% di atas realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp413,99 miliar. Hal tersebut terutama karena:

1. Meningkatnya pendapatan laboratorium disebabkan oleh tingginya *Medical Check Up* di PT Rumah Sakit Pelabuhan cabang Jakarta, cabang Cirebon, dan RS PMC, dimana banyak menggunakan pengecekan laboratorium;
2. Pendapatan ruang perawatan *perinatology* (bayi) mengalami peningkatan sebesar 14,84%;
3. Pendapatan kamar operasi mengalami peningkatan 1,41%;
4. Pendapatan pelayanan medis untuk rawat jalan meningkat sebesar 1,73%.

Beban Usaha

Beban usaha tahun 2019 terealisasi sebesar Rp517,81 miliar atau 31,58% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp390,57 miliar. Kenaikan beban usaha tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan usaha dan seiring dengan proses pembangunan PT Rumah Sakit Pelabuhan cabang Palembang dan juga renovasi RS Port Medical Center.

Laba (Rugi) Bersih

Pada tahun 2019 PT Rumah Sakit Pelabuhan mengalami kerugian bersih Rp59,19 miliar atau 419,25% di bawah realisasi laba bersih tahun 2018 yang sebesar Rp23,41 miliar. Hal ini disebabkan kenaikan beban yang cukup signifikan, antara lain peningkatan beban pemeliharaan bangunan dari anggaran Rp1,56 miliar terealisasi Rp2,54 miliar terutama karena ada perbaikan gedung dan lainnya dalam rangka peningkatan akreditasi PT Rumah Sakit Pelabuhan.

Net Operating Revenues

The net operating revenues in 2019 was realized at Rp.442.57 billion or 6.90% above the realization in 2018 of Rp.413.99 billion. This was mainly because:

1. The increase in laboratory revenue was due to high Medical Check Up at Rumah Sakit Pelabuhan of Jakarta branch, Cirebon branch, and PMC Hospital, where many use laboratory tests;
2. Perinatology (infant) care room income increased by 14.84%;
3. Operating room income increased by 1.41%;
4. Outpatient medical services income increased by 1.73%.

Operating Expenses

The operating expenses in 2019 was realized at Rp517.81 billion or 31.58% above the realization in 2018 of Rp390.57 billion. The increase in operating expenses was in line with the increase in operating revenues and in line with the construction process of Palembang branch of PT Rumah Sakit Pelabuhan and also the renovation of RS Port Medical Center.

Net Profit (Loss)

In 2019, PT Rumah Sakit Pelabuhan suffered a net loss of Rp59.19 billion or 419.25% below the realization of net profit in 2018 of Rp23.41 billion. This was due to a significant increase in expenses, including an increase in building maintenance expenses, Rp2.54 billion was realized from the budget of Rp1.56 billion, mainly due to improvements in buildings and others in the context of increasing the accreditation of PT Rumah Sakit Pelabuhan.

PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO)

PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO)

Tabel Kinerja Usaha (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Business Performance (in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenues	156.204.514	226.913.135	(70.708.621)	(31,16%)



Tabel Kinerja Usaha (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Business Performance (in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Beban Usaha Operating Expenses	166.994.929	201.189.228	(34.194.299)	(17,00%)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	(11.408.371)	16.350.036	(27.758.407)	(169,78%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan usaha bersih tahun 2019 terealisasi Rp156,20 miliar atau 31,16% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar Rp226,91 miliar, dengan detail penjelasan sebagai berikut:

1. Penurunan pendapatan jasa pengerukan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Proyek pengerukan pendalaman Kolam Pelabuhan Tanjung Priok baru dimulai pada 23 September 2019 volume 77.000 dengan nilai Rp14 miliar dari rencana bulan Maret 2019. Tertundanya waktu pelaksanaan dikarenakan pengurusan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk (PK3) yang baru selesai bulan September 2019;
 - b. Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pulau Baai Pelabuhan Bengkulu baru mulai dikerjakan pada tanggal 07 Agustus 2019, hal ini tidak sesuai dengan schedule awal yaitu pada bulan Maret 2019. Hal ini dikarenakan pengurusan PK3 dan Ijin Pengoperasian Kapal Asing (IPKA) yang memerlukan waktu cukup lama. Dampak dari terlambat pekerjaan dimulai, terdapat penambahan volume keruk yang semula diestimasi 430 ribu m³ menjadi 563 ribu m³;
 - c. Pekerjaan pengerukan Pelabuhan Ciwandan sampai dengan akhir Triwulan IV/2019 belum dapat dikerjakan karena belum diperolehnya mitra kerja yang dapat mengerjakan pekerjaan dengan material keras dengan volume yang relatif kecil dan dikarenakan saat ini sudah memasuki musim angin barat/*monsoon* pada bulan September 2019 sampai dengan Januari 2020, dan pekerjaan direncanakan kembali pada Maret 2020;
 - d. Pelabuhan Teluk Bayur untuk lokasi kolam menggunakan kapal keruk jenis *Clamshell Dredger* sedang dalam proses pengerjaan yang dimulai pada tanggal 02 Oktober 2019, sedangkan untuk lokasi alur yang menggunakan kapal keruk jenis TSHD masih tertunda karena menunggu pembersihan/sterilisasi lokasi dari mortir/ranjau yang saat dalam proses pemilihan vendor oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
 - e. Tertundanya pendalaman Pelabuhan Panjang karena masih proses perijinan AMDAL;
 - f. Tertundanya Proyek Pelabuhan Pangkal Balam karena masih proses perijinan.

Net Operating Revenues

The net operating revenues in 2019 was realized at Rp156.20 billion or 31.16% below the realization in 2018 of Rp226.91 billion, with detailed explanations as follows:

1. Decreased dredging service revenues was caused by the following matters:
 - a. Tanjung Priok Port Pond deepening dredging project just began on September 23, 2019 with a volume of 77,000 and a value of Rp14 billion from the plan of March 2019. The delay was due to the dredging of the Dredging Work Activity Agreement (PK3) that has just been completed in September 2019;
 - b. Baai Island Seaport Dredging Work of Bengkulu Port just began to be carried out on August 7, 2019, and this was not in accordance with the initial schedule, which was in March 2019. This was due to the arrangement of PK3 and Foreign Ship Operation Permits (IPKA) which took quite a long time. The impact of late start of works was an increase in the volume of dredging which was originally estimated at 430 thousand M³ to 563 thousand m³;
 - c. Ciwandan Port dredging work until the end of the Fourth Quarter of 2019 has not been able to be carried out due to the fact that partners have not been able to do work with hard material with relatively small volume and it was already entering the monsoon season in September 2019 to January 2020, thus the work is planned to be carried out in March 2020;
 - d. Teluk Bayur Harbor for pool location using a *Clamshell Dredger* has been ongoing, started on October 2, 2019, while for channel location using TSHD type dredger was still pending due to awaiting the cleaning/sterilizing locations of mortars/mines which are currently in the process of selecting vendors by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
 - e. Delay in the deepening of Panjang Port due to AMDAL licensing process;
 - f. Delay of Pangkal Balam Port Project because still in the licensing process.

2. Pendapatan Jasa *Charter* Kapal sampai dengan Triwulan IV/2019 direalisasi Rp29,23 miliar atau 59,61% dari realisasi pada periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp49,04 miliar;
 3. Pendapatan Jasa Galangan sampai dengan Triwulan IV/2019 direalisasi sebesar Rp20,79 miliar atau menurun 36,27% dari periode yang sama pada tahun lalu yang direalisasi sebesar Rp32,62 miliar. Pendapatan sebesar Rp20,79 miliar terdiri dari pendapatan jasa pembangunan baru kapal sebesar Rp1,19 miliar, pendapatan jasa *docking repair* sebesar Rp18,59 miliar, dan *floating repair* sebesar Rp1,01 miliar. Tidak tercapainya pendapatan jasa galangan disebabkan karena tidak tercapainya produksi jasa galangan karena sebagian besar *dockspace* yang ada digunakan untuk perbaikan kapal milik sendiri, belum beroperasinya secara komersial fasilitas galangan dengan menggunakan *airbag system*;
 4. Pendapatan Rupa-Rupa Usaha direalisasi sebesar Rp3,71 miliar atau 111,73% dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3,32 miliar.
2. Revenues from Ship Charter Services up to the Fourth Quarter of 2019 was realized at Rp29.23 billion or 59.61% of the realization in the same period in 2018, amounting to Rp49.04 billion;
 3. Revenues from Shipyard Services up to the Fourth Quarter of 2019 was realized at Rp20.79 billion or decreased by 36.27% from the same period last year which was realized at Rp32.62 billion. The revenues of Rp20.79 billion consisted of revenue from new ship construction services amounting to Rp1.19 billion, revenue from docking repair services amounting to Rp18.59 billion, and floating repair amounting to Rp1.01 billion. The shipyard service revenue was not achieved due to the unachieved of shipyard service production because most of the existing dockspaces were used for repairs of self-owned vessels, and the shipyard facilities using an airbag system have not yet operating commercially;
 4. Revenue from Miscellaneous Business was realized at Rp3.71 billion or 111.73% of the realization in the same period last year of Rp3.32 billion.

Beban Usaha

Beban usaha tahun 2019 terealisasi sebesar Rp166,99 miliar atau 17,00% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar Rp201,19 miliar. Hal tersebut antara lain dikarenakan oleh:

1. Beban pegawai menurun sebesar 7,25% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 dikarenakan jumlah pekerja terutama pekerja non organik yang efisien sesuai kebutuhan Perusahaan;
2. Beban bahan mengalami penurunan sebesar 9,06% seiring dengan menurunnya aktivitas pekerjaan pengerukan dan usaha galangan dibandingkan periode yang sama tahun 2018;
3. Beban pemeliharaan menurun sebesar 17,14% dari periode yang sama tahun lalu terutama penurunan beban pemeliharaan kapal keruk dan alat bantu, penurunan beban pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, serta penurunan beban pemeliharaan sarana dan prasarana galangan;
4. Beban KSMU mengalami penurunan sebesar 35,55% terutama terkait beban subkontraktor jasa pengerukan dan subkontraktor galangan.

Laba (Rugi) Bersih

Pada tahun 2019 PT Pengerukan Indonesia mengalami kerugian bersih sebesar Rp11,41 miliar atau 169,78% di bawah realisasi laba bersih tahun 2018 yaitu sebesar Rp16,35 miliar. Hal ini disebabkan tertundanya proyek pengerukan alur pada Cabang Pelabuhan Bengkulu, Cabang Pelabuhan Banten, dan Cabang Pelabuhan Teluk Bayur yang terhambat karena faktor cuaca dan juga perijinan yang belum selesai.

Operating Expenses

Operating expenses in 2019 was realized at Rp166.99 billion or 17.00% below the realization in 2018 of Rp201.19 billion. This was partly due to:

1. Employee expenses decreased by 7.25% compared to the same period in 2018 due to the number of workers, especially efficiency of non-organic workers according to the needs of the Company;
2. Material expenses decreased by 9.06% in line with the decline in dredging and shipyard business activities compared to the same period in 2018;
3. Maintenance expenses decreased by 17.14% from the same period last year, mainly a decrease in the maintenance costs of dredgers and assistive devices, a decrease in maintenance costs for buildings and office buildings, and a decrease in shipyard infrastructure;
4. KSMU expenses decreased by 35.55% mainly related to dredging service contractor and shipbuilding subcontractors.

Net Profit (Loss)

In 2019, PT Pengerukan Indonesia suffered a net loss of Rp11.41 billion or 169.78% below the realization of net profit in 2018 of Rp16.35 billion. This was caused by the delays in the channel dredging project at Bengkulu port branch, Banten Port Branch and Teluk Bayur Port Branch due to the weather and uncompleted permits.



PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA (EPI)

PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA (EPI)

Tabel Kinerja Usaha (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Business Performance (in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenues	176.605.754	159.249.141	17.356.613	10,90%
Beban Usaha Operating Expenses	158.842.400	141.560.008	17.282.392	12,21%
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	14.260.438	15.713.473	(1.453.035)	(9,25%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan usaha bersih tahun 2019 terealisasi Rp176,61 miliar atau 10,90% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp159,25 miliar. Hal tersebut dikarenakan segmen kontraktor naik signifikan yang berasal dari realisasi investasi di beberapa Cabang Pelabuhan dan Entitas Anak dimana Perusahaan ditunjuk menjadi kontraktor untuk pekerjaan tersebut.

Net Operating Revenues

The net operating revenues in 2019 was realized at Rp176.61 billion or 10.90% above the realization in 2018 of Rp.159.25 billion. This was due to significant increase in the contractor segment from investment realization in several Ports Branches and Subsidiaries where the Company was appointed as a contractor for the work.

Beban Usaha

Beban usaha tahun 2019 terealisasi Rp158,84 miliar atau 12,21% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp141,56 miliar, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Biaya Pegawai naik sebesar 12,33% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun 2018, sejalan dengan telah dilengkapinya organ Perusahaan yaitu Dewan Komisaris dan Direktur Operasi dan Niaga pada awal semester II tahun 2019;
2. Biaya bahan naik sebesar 28,99% yang disebabkan oleh adanya peningkatan biaya bahan proyek atas pekerjaan kontraktor kelistrikan.

Operating Expenses

The operating expenses in 2019 was realized Rp158.84 billion or 12.21% above the realization in 2018 of Rp141.56 billion, with the following explanation:

1. Employee expenses increased by 12.33% compared to the realization of the same period in 2018, in line with the completion of the Company's organs, namely the Board of Commissioners and the Director of Operations and Commerce at the beginning of the second semester of 2019;
2. Material expenses increased by 28.99% due to an increase in project material costs for the work of electrical contractor.

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2019 terealisasi sebesar Rp14,26 miliar atau 9,25% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar Rp15,71 miliar. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya beban KSMU.

Net Profit (Loss)

Net income of 2019 was Rp. 14.26 billion or 9.25% below 2018 realization of Rp. 15.71 billion. This is partly influenced by the increase of KSMU expenses.

PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA (JPPI)

PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA (JPPI)

Tabel Kinerja Usaha (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Business Performance (in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenues	212.638.703	161.264.609	51.374.094	31,86%
Beban Usaha Operating Expenses	196.758.859	148.792.966	47.965.893	32,24%
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	1.497.067	5.014.287	(3.517.220)	(70,14%)

Pendapatan Usaha Bersih

Realisasi pendapatan usaha bersih tahun 2019 sebesar Rp212,64 miliar atau sebesar 31,86% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp161,26 miliar. Hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya *project* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditangani PT JPPI dan kegiatan perusahaan alat yang dimulai pada 1 Desember 2019.

Net Operating Revenues

The realization of net operating revenues in 2019 was Rp212.64 billion or 31.86% above the realization in 2018 of Rp161.26 billion. This was mainly due to the increase in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) projects handled by PT JPPI and equipment operation activities that began on December 1, 2019.

Beban Usaha

Realisasi beban usaha tahun 2019 sebesar Rp196,76 miliar atau naik 32,24% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp148,79 miliar disebabkan kenaikan beberapa jenis biaya antara lain:

Operating Expenses

The realization of operating expenses in 2019 amounted to Rp196.76 billion, up 32.24% compared to the same period in 2018 amounting to Rp148.79 billion, due to an increase in several types of expenses including:

1. Kenaikan beban bahan hal ini disebabkan besarnya kegiatan TSMC di seluruh cabang dan Entitas Anak IPC. Selain itu, realisasi beban suku cadang juga mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2019 karena adanya biaya yang timbul untuk memperoleh *progress* pendapatan *project*;
2. Beban KSMU mengalami kenaikan disebabkan oleh biaya jasa *cleaning* alat untuk beberapa cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi kewajiban PT JPPI sebagai bagian dari kontrak TSMC. Selain itu, penggunaan beban buruh tenaga kerja untuk operasional *project* juga naik cukup tinggi sebagai upaya untuk memperoleh pendapatan *project*. Sedangkan biaya KSMU lainnya khusus diperuntukkan untuk biaya SBU PT Multi Terminal Indonesia, dan juga perusahaan alat terminal 009.

1. An increase in material expenses, due to the large amount of TSMC activities in all branches and subsidiaries of IPC. In addition, the realization of spare parts expenses also increased significantly in 2019 due to costs incurred to obtain project revenue progress;
2. KSMU expenses have increased due to the cost of cleaning service equipment for several PT Pelabuhan Tanjung Priok branches which are the obligations of PT JPPI as part of TSMC contract. In addition, the use of labor costs for project operations also rose considerably in an effort to obtain project income. Meanwhile, other KSMU expenses were specifically intended for PT Multi Terminal Indonesia SBU fees, as well as the operation of 009 terminal equipment.

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1,50 miliar atau 70,14% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar Rp5,01 miliar. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh kenaikan beban usaha sebesar 32,24%.

Net Profit (Loss)

Net income of 2019 was Rp1.50 billion or 70.14% below 2018 realization of Rp5.01 billion. This was influenced by, among others, an increase in operating expenses by 32.24%.



PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA
(PMLI)

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA
(PMLI)

Tabel Kinerja Usaha (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Business Performance (in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenues	107.453.682	69.966.324	37.487.358	53,58%
Beban Usaha Operating Expenses	89.593.974	62.363.696	27.230.278	43,66%
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	10.158.891	8.189.248	1.969.643	24,05%

Pendapatan Usaha Bersih

Realisasi pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp107,45 miliar atau sebesar 53,58% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp69,97 miliar. Hal tersebut terutama karena meningkatnya permintaan penyelenggaraan berbagai pelatihan MICE dibanding periode yang sama di tahun 2018, tercatat sudah 220 kegiatan pelatihan berhasil diselenggarakan dengan peserta yang mencapai 6.538 orang.

Beban Usaha

Beban usaha tahun 2019 terealisasi Rp86,59 miliar atau 43,66% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp62,36 miliar. Hal tersebut antara lain disebabkan:

1. Adanya kenaikan pada beban KSMU 82,80% sejalan dengan peningkatan penyelenggaraan kegiatan MICE dan pelatihan *public* serta pelatihan *in-house*;
2. Adanya kenaikan pada beban pegawai sebesar 12,01% karena adanya penambahan pegawai seiring bertambahnya pengembangan unit usaha;
3. Adanya peningkatan beban umum sebesar 54,61% karena adanya pengeluaran perjalanan dinas ke Belanda sebagai konsekuensi kerjasama PT PMLI dengan STC Group Belanda.

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2019 terealisasi sebesar Rp10,16 miliar atau 24,05% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp8,19 miliar. Kenaikan laba bersih terutama karena meningkatnya pendapatan pada jasa pembelajaran atau kegiatan pelatihan.

Net Operating Revenues

The realization of operating revenues in 2019 was Rp107.45 billion or 53.58% above the realization in 2018 of Rp69.97 billion. This was mainly due to the increasing demand for MICE training compared to the same period in 2018. It has been recorded that 220 training activities have been successfully held with participants reaching 6,538 people.

Operating Expenses

The operating expenses in 2019 was realized at Rp86.59 billion or 43.66% above the realization in 2018 of Rp62.36 billion. This was partly due to:

1. An increase in KSMU expenses of 82.80% is in line with the increase in the implementation of MICE activities and public training and in-house training;
2. An increase in employee expenses of 12.01% due to the addition of employees as business units develop;
3. An increase in general expenses of 54.61% due to official travel expenses to the Netherlands as a consequence of cooperation between PT PMLI and STC Group Netherlands.

Profit (Loss)

The profit for 2019 was realized at Rp10.16 billion or 24.05% above the realization in 2018 of Rp8.19 billion. The increase in profit was mainly due to an increase in revenue from learning or training activity services.

PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA (PII)

PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA (PII)

Tabel Kinerja Usaha (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Business Performance (in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenues	8.402.097	111.746.400	(103.344.303)	(92,48%)
Beban Usaha Operating Expenses	155.364.170	47.621.216	107.742.954	226,25%
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	(179.975.630)	(2.303.979)	(177.671.651)	7.711,51%

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan usaha bersih tahun 2019 terealisasi sebesar Rp8,40 miliar, mengalami penurunan sangat signifikan dibandingkan dengan realisasi pendapatan usaha tahun 2018 sebesar Rp111,75 miliar. Hal ini dikarenakan tingginya *realized loss* atas portofolio saham.

Net Operating Revenues

The net operating revenues in 2019 was realized at Rp8.40 billion, a very significant decrease compared to the realization of operating revenues in 2018 of Rp111.75 billion. This was driven by the high realized loss of the stock portfolio.

Beban Usaha

Beban usaha tahun 2019 terealisasi sebesar Rp155,36 miliar, meningkat 226,25% jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp47,62 miliar. Hal ini terutama terjadi karena tingginya penggunaan beban KSMU, sub beban KSMU lainnya, serta beban umum dan sub beban umum lainnya. Mayoritas penggunaan beban KSMU lainnya merupakan beban untuk manajer investasi yaitu manajemen *fee*, *transaction fee* dan imbal jasa kustodian sebesar Rp14,96 miliar (1,5% untuk konsultan manajemen investasi dan 0,1% untuk imbal jasa kustodian) baik dari KPD maupun RDT.

Operating Expenses

The operating expenses in 2019 was realized at Rp155.36 billion, an increase of 226.25% when compared to 2018 of Rp47.62 billion. This was mainly due to the high use of KSMU expenses, other KSMU sub-expenses, and general and other general sub-expenses. Most of other KSMU expenses were expenses for investment manager, namely management fees, transaction fees and custodian service fees amounting to Rp14.96 billion (1.5% for investment management consultants and 0.1% for custodian service fees) both from KPD and RDT.

Laba (Rugi) Usaha

Pada tahun 2019 PII mengalami kerugian usaha sebesar Rp179,98 miliar atau 7.711,51% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar Rp2,30 miliar. Hal ini disebabkan proporsi portofolio investasi sebagian besar masih dalam instrumen investasi pasar uang dan pasar modal sehingga dampak dari kondisi pasar uang dan modal yang belum kondusif menyebabkan turun drastisnya harga pasar saham beberapa Perusahaan Afiliasi Grup IPC *listed* yang dimiliki oleh PII menghasilkan tingginya rugi.

Profit (Loss)

In 2019, PII experienced a loss of Rp179.98 billion or 7,711.51% below the 2018 realization of Rp2.30 billion. This was due to the fact that the investment portfolio proportion was still largely in money market and capital market investment instruments, so that the impact of unfavorable money and capital market conditions has caused a drastic decline in the stock market prices of several IPC listed affiliated companies owned by PII and resulting in high losses.



PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI (ILCS)

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI (ILCS)

Tabel Kinerja Usaha (alam Ribuan Rupiah)
Table of Business Performance (in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenues	205.545.691	163.696.602	41.849.089	25,57%
Beban Usaha Operating Expenses	211.469.816	159.412.572	52.057.244	32,66%
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	(26.540.445)	1.269.903	(27.810.348)	(2.189,96%)

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan usaha bersih tahun 2019 terealisasi sebesar Rp205,55 miliar atau 25,57% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp163,70 miliar. Kenaikan realisasi pendapatan usaha ILCS ini disebabkan karena terealisasinya proyek Implementasi Infra TOS OPUS DRC HA Autogate TO-3 dan Lini 2 (221X dan 223X) 10 LANE, dan proyek Lisensi dan ATS Oracle DB, WEBLOGIC Tahap 2.

Net Operating Revenues

The net operating revenues in 2019 was realized at Rp205.55 billion or 25.57% above the realization in 2018 of Rp.163.70 billion. The increase in ILCS' operating revenue realization was due to the realization of the Infra TOS OPUS DRC HA Autogate TO-3 and Line 2 (221X and 223X) 10 LANE projects, and the Oracle DB License and ATS Oracle DB project, WEBLOGIC Phase 2.

Beban Usaha

Beban usaha tahun 2019 terealisasi sebesar Rp211,47 miliar atau 32,66% di atas realisasi Triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp159,41 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan pada beban bahan sebesar 21,05% di atas realisasi 2018 seiring dengan kenaikan pendapatan pada tahun 2019 khususnya beban untuk *project system implementor* (infrastruktur, lisensi dan perangkat). Tahun 2019 Perusahaan Telah mencadangkan piutang tak tertagih, selain itu dengan Telah ditetapkannya system akuntansi biaya sehingga pencatatan biaya semakin akurat proporsional dengan pencatatan pendapatan "*matching cost against revenue*".

Operating Expenses

The operating expenses in 2019 was realized at Rp211.47 billion or 32.66% above the realization of the Fourth Quarter of 2018 amounting to Rp159.41 billion. This was mainly due to an increase in material expenses by 21.05% above the realization of 2018, in line with the increase in 2019's revenue, particularly the expenses of on project system implementors (infrastructure, licenses and equipment). In 2019 the Company has reserved uncollectible receivables, in addition to that the cost accounting system has been established so that the recording of costs was more accurate proportionally to the recording of revenue "*matching cost against revenue*".

Laba (Rugi) Usaha

Pada tahun 2019 ILCS terealisasi mencatatkan rugi sebesar Rp26,54 miliar atau 2.189,96% di bawah realisasi laba tahun 2018 yang sebesar Rp1,27 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya beban usaha di tahun 2019.

Profit (Loss)

In 2019, ILCS realized a loss of Rp26.54 billion or 2,189.96% below the realization of 2018 profit of RpRp1.27 billion. This was influenced by the increase in operating expenses in 2019.

PT IPC TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK)

PT IPC TERMINAL PETIKEMAS (IPC TPK)

Tabel Kinerja Usaha (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Business Performance (in Thousand Rupiah)

Keterangan Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenues	2.452.469.626	1.745.355.234	707.114.392	40,51%
Beban Usaha Operating Expenses	2.198.140.523	1.446.610.292	751.530.231	51,95%
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	305.547.667	358.826.340	(53.278.673)	(14,85%)

Pendapatan Usaha Bersih

Realisasi pendapatan usaha bersih tahun 2019 sebesar Rp2,45 triliun atau 40,51% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,75 triliun. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 Pengoperasian Terminal Petikemas area Tanjung Priok baru dimulai pada Triwulan IV tahun 2018 sedangkan pada tahun ini dimulai sejak 1 Januari 2019 mengkompensasikan sudah tidak dioperasikannya *Common Gate* Terminal Kalibaru oleh PT IPC Terminal Petikemas dan diserahkan kepada PT Multi Terminal Indonesia.

Beban Usaha

Realisasi beban usaha tahun 2019 sebesar Rp2,20 triliun atau 51,95% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,45 triliun. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 Pengoperasian Terminal Petikemas area Priok baru dimulai pada tahun 2018 sedangkan pada tahun ini dimulai sejak 1 Januari tahun 2019 sehingga menyebabkan keseluruhan beban naik dengan signifikan terutama beban pegawai, beban KSMU dan beban administrasi kantor

Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha terealisasi Rp305,55 miliar atau 14,85% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar Rp358,83 miliar. Hal ini terjadi karena peningkatan pendapatan lebih kecil dibandingkan peningkatan beban usaha serta akibat menurunnya serap untung entitas asosiasi (NPCT1).

PROYEK STRATEGIS 2019

Pembangunan Proyek Strategis pada tahun 2019 diantaranya adalah Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing di Kalimantan Barat, Pembangunan dan Pengembangan Terminal Cikarang-Bekasi-Laut (CBL) *Inland Waterway*, Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing, Pembangunan *Maritime Tower*, Pembangunan *Museum Maritime*, dan Pembangunan Jalan Akses Timur Kalibaru.

Net Operating Revenues

The realization of net operating revenue in 2019 was Rp2.45 trillion or 40.51% above the realization in 2018 of Rp1.75 trillion. This was due to the fact that in 2018, the operation of Tanjung Priok container terminal barely began in the fourth quarter of 2018 and in this year began on January 1, 2019, compensated for the non-operation of Kalibaru Common Gate Terminal by PT IPC Terminal Petikemas that was handed over to PT Multi Terminal Indonesia.

Operating Expenses

The realization of operating expenses in 2019 was Rp2.20 trillion or 51.95% above the realization of 2018 of Rp1.45 trillion. This was due to the fact that in 2018 the operation of new Priok Container Terminal barely began in 2018 and in this year began on January 1, 2019, hence causing overall expenses to increase significantly, especially employee expenses, KSMU expenses and office administration expenses

Profit (Loss)

The realization of profit was Rp305.55 billion or 14.85% below the 2018 realization of Rp358.83 billion. This occurred because the increase in revenue was smaller than the increase in operating expenses and because the decrease in the absorption of profit of associated entity (NPCT1).

STRATEGIC PROJECTS IN 2019

Strategic Projects in 2019 included the Construction and Development of Kijing Terminal in West Kalimantan, Construction and Development of Cikarang-Bekasi-Laut Terminal (CBL) *Inland Waterway*, Construction of Cibitung-Cilincing Toll Road, Construction of *Maritime Tower*, Construction of *Maritime Museum*, and Construction of East Kalibaru Road Access.



Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung program tol laut yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan konektivitas laut serta meningkatkan daya saing produk sumber daya alam dari Kalimantan. Terminal Kijing diproyeksikan untuk menjadi *hub port* di kawasan regional yang dirancang memiliki fasilitas terminal petikemas, curah cair, curah kering, dan *multipurpose* berstandar internasional serta memiliki kapasitas *ultimate* hingga 2 juta TEUs/tahun (petikemas), 12 juta ton/tahun (curah cair), 15 juta ton/tahun (curah kering), dan 1 juta ton/tahun (*multipurpose*).

Pembangunan dan Pengembangan Terminal Cikarang-Bekasi-Laut (CBL) Inland Waterway merupakan upaya optimalisasi alur sungai atau kanal dengan menggunakan kapal tongkang sebagai alternatif moda transportasi yang menghubungkan pelabuhan dengan *hinterland* atau kawasan industri sehingga dapat mengurangi kongesti jalan di darat serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi baik waktu maupun biaya.

Pembangunan Pelabuhan Sorong di Seget, Papua Barat yang direncanakan untuk menjadi pelabuhan hub di Indonesia Timur, sehingga arus tol laut yang ditargetkan hingga ke timur Indonesia dapat berjalan sesuai rencana. IPC berupaya untuk memulai pengembangan Pelabuhan Sorong Seget dengan menyusun kajian kelayakan pengembangan Pelabuhan Sorong Seget dengan tetap memperhatikan rencana integrasi pengembangan Pelabuhan Sorong Kota dan Arar, kajian lingkungan, dan persiapan perizinan lainnya untuk pembangunan Tahap I Pelabuhan Sorong dengan proyeksi kapasitas 500 ribu TEUs.

Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing dilaksanakan oleh afiliasi dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yaitu PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API) yang juga merupakan Entitas Anak dari PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PT PPI). PT API telah mengakuisisi 45% saham dari PT MTD CTP Expressway yang memiliki Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Cibitung-Cilincing sepanjang 34,8 kilometer. Jalan Tol Cibitung-Cilincing merupakan jalan tol yang berperan strategis sebagai salah satu jalan akses bagi Pelabuhan Tanjung Priok dari dan menuju ke *hinterland* atau kawasan industri di bagian timur Jakarta (Cibitung, Cikarang dan Karawang), dan diharapkan dapat mengurangi beban angkutan barang dan kendaraan di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek.

The Construction and Development of Kijing Terminal is one of the National Strategic Projects (PSN) to support the sea toll program that has been launched by the government to improve sea connectivity and increase the competitiveness of natural resource products from Kalimantan. Kijing Terminal is projected to become a hub port in the region that is designed to have international standard container, liquid bulk, dry bulk and multipurpose terminal facilities and has an ultimate capacity of up to 2 million TEUs/year (containers), 12 million tons/year (liquid bulk), 15 million tons/year (dry bulk), and 1 million tons/year (multipurpose).

The construction and development of Cikarang-Bekasi-Sea Terminal (CBL) Inland Waterway is an effort to optimize the flow of rivers or canals by using barges as an alternative mode of transportation that connects ports with hinterland or industrial areas so as to reduce congestion on land and is expected to improve efficiency time and cost.

The construction of Sorong Port in Seget, West Papua is planned to become a hub port in Eastern Indonesia, so that the targeted sea highway flow to the east of Indonesia can go according to plan. IPC seeks to begin the development of the Sorong Seget Port by compiling a feasibility study for the construction of Sorong Seget Port by taking into account the integration plan for the development of Sorong Kota and Arar Ports, environmental studies, and other licensing preparations for the Phase I of Sorong Port construction with a projected capacity of 500 thousand TEUs.

The construction of Cibitung-Cilincing Toll Road is carried out by an affiliate of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), namely PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API), which is also a subsidiary of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PT PPI). PT API has acquired 45% of shares in PT MTD CTP Expressway which has a 34.8 kilometer Cibitung-Cilincing Toll Road Concession Agreement (PPJT). Cibitung-Cilincing Toll Road is a toll road that plays a strategic role as one of the access roads for Tanjung Priok Port from and to the hinterland or industrial areas in the eastern part of Jakarta (Cibitung, Cikarang and Karawang), and is expected to reduce the burden of transporting goods and vehicles in Jakarta-Cikampek toll road section.

Pembangunan *Maritime Tower* di kawasan Tanjung Priok bertujuan untuk membentuk ekosistem di bidang kemaritiman dan kepelabuhanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, sekaligus sinergi antar *stakeholder* bisnis *maritime* dan kepelabuhanan. Peruntukan *Maritime Tower* tersebut 70% akan digunakan oleh perkantoran IPC Grup dan 30% dapat digunakan untuk umum namun diprioritaskan bagi perkantoran usaha terkait kemaritiman dan logistik seperti Perusahaan pelayaran, *cargo owner*, Perusahaan Bongkar Muat (PBM), *forwarding*, Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), perbankan, bea cukai, dan Perusahaan lainnya.

Pembangunan Jalan Akses Timur Kalibaru (*New Priok Eastern Access/NPEA*) bertujuan untuk menjadi akses utama dalam operasional pengembangan jangka panjang Terminal Kalibaru yang direncanakan akan membangun Terminal Petikemas (CT-2 dan CT-3) dengan kapasitas masing-masing 1,5 juta TEUs/tahun dan Terminal Produk (PT-1 dan PT-2) dengan kapasitas masing-masing 500.000 m³. Jalan akses tersebut akan terhubung langsung dengan Jalan Tol Cibitung-Cilincing sehingga dapat menghubungkan Terminal Kalibaru menuju ke *hinterland* atau kawasan industri di bagian timur Jakarta (Cibitung, Cikarang dan Karawang).

Berikut merupakan informasi umum dari Proyek Strategis tersebut yang dapat dirangkum pada tabel di bawah ini:

The construction of *Maritime Tower* in Tanjung Priok area aims to form an ecosystem in the maritime and port sector, thus expected to increase effectiveness, efficiency, as well as synergies between maritime and port business stakeholders. The 60% of *Maritime Tower* allotment will be used by IPC Group offices and 40% can be used publicly but prioritized for maritime and logistics related business offices such as shipping companies, cargo owners, loading and unloading companies (PBMs), forwarding, sea cargo shipping (EMKL), banking, customs, and other companies.

The construction of Kalibaru East Access Road (*New Priok Eastern Access/NPEA*) aims to become the main access in the operational long-term development of Kalibaru Terminal, in which the plan is to build Container Terminal (CT-2 and CT-3) with a capacity of 1.5 million TEUs/year and Terminal Product (PT-1 and PT-2) with a capacity of 500,000 m³. The access road will be connected directly to Cibitung-Cilincing Toll Road so that it can connect Kalibaru Terminal to the hinterland or industrial area in the eastern part of Jakarta (Cibitung, Cikarang and Karawang).

General information from the Strategic Project can be summarized in the table below:



Tabel Proyek Strategis
Table of Strategic Projects

No	Nama Proyek Project Name	Deskripsi Description	Jangka Waktu Time Period	Manfaat Benefits
1.	Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.	<p>Spesifikasi Teknis: Untuk Pengembangan Tahap Inisial:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Terminal Petikemas dengan kapasitas 500.000 TEUs dan Terminal <i>Multipurpose</i> dengan kapasitas 500.000 Ton; Pembangunan fasilitas di sisi laut termasuk dermaga sepanjang 1 km <i>trestle</i> sepanjang 3,5 dan Project Management Area; Pembangunan fasilitas di sisi darat termasuk Lapangan Penumpukan (<i>Container Yard</i>), lapangan penumpukan <i>multipurpose</i>, serta gedung perkantoran. <p>Untuk Pengembangan Tahap Ultimate:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Terminal Petikemas dengan kapasitas <i>ultimate</i> 1.950.000 TEUs/Tahun; Pembangunan Terminal Curah Cair dengan kapasitas <i>ultimate</i> 12.180.000 Ton/Tahun; Pembangunan Terminal Curah Kering dengan kapasitas <i>ultimate</i> 15.000.000 Ton/Tahun; Pembangunan Terminal <i>Multi Purpose</i> dengan kapasitas <i>ultimate</i> 1.000.000 Ton/Tahun; Pembangunan Fasilitas di sisi laut, yaitu dermaga sepanjang 1,572 km; Pembangunan Fasilitas di sisi darat termasuk Lapangan Penumpukan (<i>Container Yard</i>), lapangan penumpukan curah cair, lapangan penumpukan curah kering, lapangan penumpukan dan gudang penimbunan <i>multipurpose</i>, serta gedung perkantoran. 	2018-2020 (Pengembangan Tahap Inisial)	Terminal Kijing akan di kembangkan sebagai pelabuhan laut dalam yang mampu mengakomodir potensi <i>hinterland</i> dan kapal berukuran besar. Terminal Kijing diproyeksikan untuk menjadi <i>hub port</i> di kawasan regional yang dirancang berstandar internasional.
	Construction and Development of Kijing Terminal of Pontianak Port in Sungai Kunyit District, Mempawah Regency, West Kalimantan.	<p>Technical specifications: For Initial Development Phase:</p> <ul style="list-style-type: none"> Construction of Container and Multipurpose Terminal with a capacity of 500,000 TEUs; Construction of facilities on the sea side including docks and trestles; Construction of facilities on the land side including the Container Yard and office buildings <p>For the Ultimate Development Phase:</p> <ul style="list-style-type: none"> Construction of Container Terminal with an ultimate capacity of 1,950,000 Teus/Year; Construction of a Liquid Bulk Terminal with an ultimate capacity of 12,180,000 Tons/Year; Construction of Dry Bulk Terminal with an ultimate capacity of 15,000,000 Tons/Year; Construction of Multi Purpose Terminal with an ultimate capacity of 1,000,000 Tons/Year; Construction of facilities on the sea side; Construction of facilities on the land side including the Container Yard and office buildings. 	(Initial Development Phase)	Kijing Terminal will be developed as a deep-sea port that is able to accommodate the potential of hinterland and large-sized vessels. Kijing Terminal is projected to become a port hub in the regional area, designed with international standards.

Tabel Proyek Strategis
Table of Strategic Projects

No	Nama Proyek Project Name	Deskripsi Description	Jangka Waktu Time Period	Manfaat Benefits
2.	Pembangunan Inland Waterways/Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) di Jakarta Utara, DKI Jakarta dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	<p>Proyek ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus logistik jalur darat dari kawasan industri Cikarang dan Karawang menuju Pelabuhan Tanjung Priok atau sebaliknya.</p> <p>Spesifikasi Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Terminal Peti Kemas • Pengerukan dan pelebaran kanal CBL, pembangunan jalan inspeksi, saluran irigasi, bendung gerak, pembongkaran dan pembangunan jembatan, serta pembangunan jalan akses akan didukung oleh Pemerintah. 	2018-2021	<p>Proyek ini dimaksudkan untuk memberikan moda transportasi alternatif yang lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan, yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan kawasan industri di Timur Jakarta.</p>
	Development of Inland Waterways/Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) in North Jakarta, DKI Jakarta and Bekasi Regency, West Java.	<p>This project is expected to reduce the overcrowding of landline logistics flows from Cikarang and Karawang industrial areas to Tanjung Priok Port or vice versa.</p> <p>Technical specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construction of Container Terminal • Dredging and widening of CBL canals, construction of inspection roads, irrigation channels, weirs, demolition and construction of bridges, and construction of access roads will be supported by the Government. 		<p>This project is intended to provide alternative modes of transportation that are more effective, efficient and environmentally friendly, which connects Tanjung Priok Port with industrial estates in East Jakarta.</p>
3.	Pembangunan Pelabuhan Sorong di Distrik Seget Provinsi Papua Barat.	<p>Dengan terbatasnya kapasitas pelayanan dan lahan pengembangan di Pelabuhan Sorong maka PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berinisiatif untuk mengembangkan pelabuhan baru yang berfungsi sebagai regional hub Indonesia bagian timur sekaligus sebagai <i>West Pacific Hub</i>.</p>	2017-2023	<p>Menumbuhkan dan meningkatkan kegiatan industri di daerah Indonesia Timur Pengembangan Tahap I Pelabuhan Sorong diperkirakan memiliki kapasitas 500 ribu TEUs.</p>
	Construction of Sorong Port in Seget District, West Papua Province.	<p>With the limited service capacity and development land in Sorong Port, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) took the initiative to develop a new port that serves as the regional hub of eastern Indonesia as well as the West Pacific Hub.</p>		<p>Grow and improve industrial activities in the eastern part of Indonesia. The Phase I development of Sorong Port is estimated to have a capacity of 500 thousand TEUs.</p>



Tabel Proyek Strategis
Table of Strategic Projects

No	Nama Proyek Project Name	Deskripsi Description	Jangka Waktu Time Period	Manfaat Benefits
4.	Pembangunan <i>Maritime Tower</i> di Tanjung Priok, Jakarta Utara.	<p>Spesifikasi Teknis: Luas Lahan : 15.000 M² Luas Bangunan (GFA+MEP) : ± 40.000 M²</p> <p>Jumlah Lantai: Bangunan utama (<i>tower</i>) terdiri dari 24 (dua puluh empat) lantai kantor, serta bangunan podium terdiri dari 6 (enam) lantai area parkir dan 1 lantai <i>basement</i>.</p> <p>Konsep bangunan: ikon maritim nasional <i>Green Building: Gold</i></p> <p>Technical specifications: Land Area : 15,000 Building Area (GFA + MEP) : ±40,000 Number of Floors: Main building consists of 24 (twenty four) office floors and 1 (one) basement floor, and the podium building consists of 6 (six) retail area floors and parking</p> <p>Building concept: national maritime icon <i>Green Building: Gold</i></p>	2017-2020	<p>Proyek ini akan meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan terkait dan akan mempermudah komunikasi antar pihak sebagai upaya penurunan biaya logistik di Indonesia.</p> <p>This project will improve synchronization and synergy between stakeholders and will facilitate communication between parties as an effort to reduce logistics costs in Indonesia.</p>
5.	Pembangunan Jalan Tol Cibitung Cilincing.	<p>IPC melalui grup usahanya PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API) bekerja sama dengan PT Waskita Toll Road di badan usaha jalan tol PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP Tollways), berfokus menata akses menuju pelabuhan Tanjung Priok Jalan Tol Cibitung Cilincing/JTCC sepanjang 34,8 km.</p> <p>IPC through its business group, PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API) cooperates with PT Waskita Toll Road in the PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP tollways) toll road business entity focuses on 34.8 km of access to Tanjung Priok Port - Cibitung Cilincing Toll Road (JTCC).</p>	<p>Rencana Operasi 2020</p> <p>Operation Plan in 2020</p>	<p>Meningkatkan kapasitas akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok.</p> <p>Increase access capacity to Tanjung Priok Port.</p>

Tabel Proyek Strategis
Table of Strategic Projects

No	Nama Proyek Project Name	Deskripsi Description	Jangka Waktu Time Period	Manfaat Benefits
6.	Pembangunan Jalan Akses Timur Kalibaru (New Priok Eastern Access/NPEA).	Seiring dengan rencana pengembangan Terminal Kalibaru, dibutuhkan jaringan jalan akses baru guna mendukung trafik dari dan menuju kawasan Terminal Kalibaru.	2018 - 2023	Keberadaan NPEA menjadi <i>added value</i> dalam operasional Container Terminal-2 (CT-2) dan Container Terminal-3 (CT-3) Terminal Kalibaru. NPEA merupakan rute alternatif apabila terjadi <i>bottleneck</i> di jalan akses eksisting Kalibaru (New Priok Southern Access/NPSA) yang telah beroperasi saat ini.
	Construction of Eastern Kalibaru Access Road (New Priok Eastern Access/NPEA).	Along with the planned development of Kalibaru Terminal, a new access road network is needed to support traffic to and from Kalibaru Terminal area.		The existence of NPEA is an added value in the operation of Container Terminal-2 (CT-2) and Container Terminal-3 (CT-3) Kalibaru Terminal. NPEA is an alternative route if there is a bottleneck on the existing Kalibaru (New Priok Southern Access/NPSA) access road that is currently operating.

PROSPEK USAHA

IPC telah melakukan analisis terhadap lingkungan bisnis baik tataran global maupun nasional yang dapat berpengaruh pada keberlangsungan usaha terkait dengan isu perdagangan, industri pelayaran dan kepelabuhanan, teknologi dan isu lingkungan hidup. Berikut ini adalah poin-poin terpenting hasil analisis lingkungan bisnis IPC.

TREND GLOBAL

PERDAGANGAN

1. Terdapat korelasi yang tinggi antara pertumbuhan PDB global dan perdagangan via laut;
2. Ekonomi global dan Indonesia saat ini sedang menyesuaikan diri dengan tingkat pertumbuhan PDB riil yang lebih rendah;
3. Perang Dagang Amerika-China menyebabkan perpindahan produksi ke wilayah Asia Tenggara, namun tidak ke Indonesia.
4. Efek *Belt Road Initiatives* China berdampak moderat terhadap kargo *Dry Bulk*, *Tanker* dan *Gas*, berdampak kecil terhadap Petikemas;
5. Pertumbuhan *Foreign Direct Investment* di negara-negara berkembang tetap stabil meskipun FDI global mengalami penurunan;
6. Perdagangan Intra-Asia untuk Pelabuhan Indonesia akan beralih pada layanan langsung (*Direct Call*);
7. Untuk berkembang menjadi *transshipment-hub*, Pelabuhan harus mengembangkan afiliasi dengan *Shipping Line*.

BUSINESS OUTLOOK

IPC has analyzed the business environment both at global and national level that can affect its business sustainability, related to the trade issues, shipping and port industry and, technology and environmental issues. The following are the most important points from the analysis of IPC business environment.

GLOBAL TREND

TRADE

1. There is a high correlation between global GDP growth and sea trade;
2. The global economy as well as Indonesia's economy are currently adjusting to lower real GDP growth rate;
3. The American-Chinese Trade War caused the transfer of production to the Southeast Asian region, but not to Indonesia;
4. The China Belt Road Initiatives effect has a moderate effect on *Dry Bulk*, *Tanker* and *Gas* cargoes, with mild impact on containers;
5. The growth in *Foreign Direct Investment* in developing countries has remained stable despite the declining of global FDI;
6. Intra-Asian trade for the Indonesian Port will shift to direct services (*Direct Call*);
7. To develop into a *transshipment-hub*, the Port must develop an affiliation with the *Shipping Line*.



PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN

1. Konsolidasi *Shipping Line* akan berdampak pada Pelabuhan: Efisiensi Biaya Handling Terminal, Kontrak bersama aliansi, *Shipping Line* akan memperluas cakupan bisnis (misal: layanan *door to door*);
2. Terjadinya perubahan strategi *Shipping Line*, dari *Hardware (Big Ship)* ke arah *Software (Integrator Supply Chain Global)*;
3. Terjadi perubahan strategi *Port Operator*, dari *Hardware* (membangun banyak terminal/pelabuhan) ke arah *software (Global Trade Enablers)* dengan membangun jaringan pemilik barang skala global.

KOMPETISI DAN EFISIENSI

1. Operator terminal semakin aktif dalam mengembangkan operasi darat (*inland*), dan IT untuk mendukung rantai pasok, contohnya DP Wold dan CM Port mengembangkan model bisnis sebagai *trade enablers* dan *city developers*;
2. Sejumlah terminal telah beroperasi sepenuhnya otomatis, khususnya untuk operasi lapangan saja (tidak termasuk operasi sisi dermaga). Namun pada umumnya masih menerapkan operasional semi-otomatis;
3. Pemanfaatan *emerging technology* untuk mendorong efisiensi dan layanan: IoT, *Big Data Analytic*, Platform Kolaborasi, *Blockchain*, *Artificial Intelligent*, dan teknologi *supply chain* kompleks: *3D Printing*, *Circular Economy*.

LINGKUNGAN HIDUP

1. Fokus pada implementasi konvensi IMO terkait kontrol untuk menurunkan emisi karbon dan gas, sulfur, dan penanganan air limbah kapal;
2. Peningkatan perhatian pada deklarasi kargo berbahaya untuk keamanan.

TREND NASIONAL

1. Di Asia Tenggara, Indonesia memimpin penambahan kapasitas TEU's secara keseluruhan di terminal petikemas dan *multipurpose*. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I sampai dengan IV memiliki proyek perluasan kapasitas pelabuhan baik yang sedang berlangsung dan yang direncanakan. Pelabuhan-pelabuhan ini kemungkinan akan menjadi peluang investasi bagi pendatang baru mulai dari sekarang hingga lima tahun ke depan;
2. CAGR dari *throughput* Pelabuhan Tanjung Priok tercatat sebesar 4,6% dalam sepuluh tahun terakhir, merupakan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional sekitar 3,5%. Perkiraan (*forecast*) atas *throughput* kontainer Pelabuhan Tanjung Priok telah dilakukan berdasarkan faktor ekonomi makro. Pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Priok saat ini adalah sekitar 70%. Diperkirakan akan melampaui 90%

SHIPPING AND PORT

1. The Shipping Line consolidation will have an impact on the Port: Terminal Handling Cost Efficiency, Alliance joint contracts, Shipping Line will expand business coverage (eg door to door service);
2. There is a change in the Shipping Line strategy, from Hardware (Big Ship) to Software (Global Supply Chain Integrator);
3. There is a change in the Port Operator strategy, from Hardware (building many terminals/ports) to software (Global Trade Enablers) by building a global scale network of goods owners.

COMPETITION AND EFFICIENCY

1. Terminal operators are increasingly active in developing ground operations (inland), and IT to support supply chains, for example DP Wold and CM Port develop business models as trade enablers and city developers;
2. A number of terminals have been fully automated, especially for field operations only (not including dock side operations). But in general, they still implement semi-automatic operations;
3. The utilization of emerging technologies to drive efficiency and services: IoT, Big Data Analytic, Collaboration Platform, Blockchain, Artificial Intelligent, and complex supply chain technologies: 3D Printing, Circular Economy.

ENVIRONMENT

1. Focus on implementing IMO conventions related to controls to reduce carbon and gas emissions, sulfur, and ship wastewater treatment;
2. Increased attention to dangerous cargo declarations for safety.

NATIONAL TREND

1. In Southeast Asia, Indonesia is leading the overall increase in TEU's capacity at container and multipurpose terminals. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I to IV have port capacity expansion projects both ongoing and planned. These ports are likely to become investment opportunities for new arrivals from now until the next five years;
2. CAGR from Tanjung Priok Port throughput was 4.6% in the last ten years, which is a much higher growth compared to the national average of around 3.5%. The forecast regarding Tanjung Priok Port container throughput has been made based on macroeconomic factors. The utilization of Tanjung Priok Port is currently around 70% and is estimated that it will surpass 90% by 2025. However, container throughput

pada tahun 2025. Namun, pertumbuhan *throughput* kontainer cenderung moderat secara signifikan setelah peralihan modal Indonesia ke Kalimantan serta dimulainya operasi Pelabuhan Patimban dan Pelabuhan Kramatwatu;

3. Terjadi peningkatan pangsa operator terminal global/internasional, dari 18% *throughput* global pada tahun 1996 menjadi 65% pada tahun 2018. Peningkatan pangsa ini disebabkan oleh akuisisi aset terminal petikemas di seluruh dunia. Dalam lingkup nasional, sektor BUMN yang memiliki pangsa 35% kini telah berkurang menjadi 20% sedangkan sektor swasta telah turun dari 46% menjadi hanya 14% dalam periode waktu yang sama. Di sisi lain, Indonesia sedang bergerak menuju konsolidasi aset pelabuhan yang dikendalikan pemerintah di tingkat negara.

Selain *trend* global dan *trend* nasional yang di jabarkan di atas, pada awal Januari tahun 2020 terjadi *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang mulai merebak di Tiongkok. Proses pemulihan ekonomi global tertahan setelah COVID-19 merebak di Tiongkok sejak akhir Januari 2020. COVID-19 mulai tersebar di Wuhan, Tiongkok dan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Tingkat persebaran COVID-19 lebih cepat dengan masa inkubasi yang lebih panjang. Tingkat persebaran yang cepat disebabkan oleh munculnya virus tersebut jelang tahun baru Lunar, pada saat lalu lintas penumpang lebih tinggi di Tiongkok. Penyebaran COVID-19 yang cepat berdampak langsung terhadap perlambatan perekonomian Tiongkok.

COVID-19 memberikan tantangan bagi upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia menurunkan prospek pertumbuhan ekspor barang Indonesia, meskipun pada Februari 2020 meningkat didorong ekspor batu bara, CPO, dan beberapa produk manufaktur. Ekspor jasa terutama sektor pariwisata diperkirakan juga menurun akibat terhambatnya proses mobilitas antar negara sejalan dengan upaya memitigasi risiko perluasan COVID-19. Investasi nonbangunan berisiko melambat dipengaruhi menurunnya prospek ekspor barang dan jasa serta terganggunya rantai produksi. Bank Indonesia mengapresiasi langkah stimulus fiskal Pemerintah dalam meminimalkan dampak COVID-19, yang bersamaan dengan rencana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak diperkirakan dapat menopang prospek pertumbuhan ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 dari 5,0%-5,4% menjadi 4,2%-4,6%. Pasca berakhirnya COVID-19, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan kembali meningkat menjadi 5,2%-5,6%, antara lain dipengaruhi upaya Pemerintah memperbaiki

growth tends to be moderate significantly after the shift of Indonesian capital to Kalimantan and the commencement of Patimban Port and Kramatwatu Port operations;

3. An increase in the share of global/international terminal operators, from 18% of global throughput in 1996 to 65% in 2018. The increase in share was due to the acquisition of container terminal assets worldwide. In the national scope, the SOE sector which has a share of 35% has now been reduced to 20%, while the private sector has fallen from 46% to only 14% in the same time period. On the other hand, Indonesia is moving towards the consolidation of port assets controlled by the government at the state level.

In addition to the global and national trend as described above, the Corona Virus Disease (COVID-19) that began to spread in China has occurred in early January of 2020. The process of global economic recovery was halted after COVID-19 broke out in China since late January 2020. COVID-19 began to spread in Wuhan, China and has different characteristics compared to Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). The spread rate of COVID-19 is faster with a longer incubation period. The rapid spread is caused by the emergence of the virus ahead of the Lunar New Year, when passenger traffic is higher in China. The rapid spread of COVID-19 had a direct impact on the economic slowdown in China.

COVID-19 has given a challenge for efforts to drive the momentum of domestic economic growth. Slowing growth prospects for the world economy will reduce the growth prospects for Indonesia's goods exports, although in February 2020 the increase will be driven by exports of coal, CPO and some manufactured products. Exports of services, particularly the tourism sector, are also predicted to decline due to hampered inter-country mobility processes in line with efforts to mitigate the risk of expanding COVID-19. Non-construction investment risks are slowing down due to the decline in the prospects for exports of goods and services and disruption of the production chain. Bank Indonesia appreciates the Government's fiscal stimulus measures in minimizing the impact of COVID-19, which together with the planned implementation of Regional Head Election is predicted to be able to sustain economic growth prospects. With these developments, Bank Indonesia revised its forecast for Indonesia's economic growth in 2020 from 5.0%-5.4% to 4.2%-4.6%. After the end of COVID-19, economic growth in 2021 is predicted to increase to 5.2%-5.6%, partly influenced by the Government's efforts to improve the investment climate



iklim investasi melalui RUU Cipta Kerja dan Perpajakan. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan. Sumber: Tinjauan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia 20 Maret 2020 dan Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2019, Bank Indonesia, 30 Maret 2020.

Dalam menghadapi tahun 2020, IPC telah melakukan analisis secara internal untuk mengidentifikasi peluang-peluang usaha yang dapat dicapai dengan bekal keunggulan yang dimiliki oleh IPC. Secara detail peluang dan kekuatan IPC yang akan dioptimalkan di tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

PELUANG

Di tengah ketidakpastian yang ada dalam dunia kepelabuhanan, Indonesia dan IPC khususnya masih memiliki peluang untuk terus mengembangkan bisnis inti maupun *non-inti* pada pasar domestik maupun internasional. Peluang yang dimiliki IPC antara lain:

1. Akan mulai dioperasikannya salah satu Proyek Strategis Nasional yaitu Pelabuhan Tanjung Pura/Kijing di Kalimantan Barat;
2. Potensi peningkatan volume petikemas yang terus menunjukkan trend positif dan semakin meningkatnya *trend* alih kemasan dari *bulk* ke kemasan petikemas;
3. Potensi peningkatan volume komoditas inti yang menunjukkan trend positif dan *market size* yang masih besar untuk komoditas curah;
4. Rencana pemerintah dalam pengembangan industri, kawasan industri, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Jawa melalui peluang kerjasama dalam pengembangan industri dan KEK yang terintegrasi pelabuhan di luar Jawa;
5. *Holding* BUMN Layanan Pelabuhan melalui rencana sinergi antara PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) serta entitas (anak atau cucu perusahaan) yang sejenis;
6. Kerjasama perdagangan bebas Indonesia dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* yang memudahkan kerjasama perusahaan global, khususnya negara yang bermitra dengan Indonesia;
7. Kerjasama pengembangan pelabuhan dengan pemilik *cargo* (kerjasama pengembangan DUKS/TUKS baru) melalui kerjasama pengembangan dermaga/terminal dengan pemilik barang;

through the Draft of Omnibus Law. Bank Indonesia continues to strengthen coordination with the Government and OJK to closely monitor the dynamics of the spread of COVID-19 and their impact on Indonesia from time to time, as well as further policy coordination actions that need to be taken to maintain macroeconomic and financial system stability, and sustain Indonesia's economic growth to stay favorable and enduring. Source: Monetary Policy Review, Bank Indonesia March 20, 2020 and 2019 Indonesian Economic Report, Bank Indonesia, March 20, 2020.

In facing the year of 2020, IPC has conducted an internal analysis to identify business opportunities that can be achieved with a number of advantages possessed by IPC. In details, IPC's opportunities and strengths that will be optimized in 2020 are described as follows.

OPPORTUNITIES

In the midst of uncertainty in the port world, Indonesia and IPC in particular still have the opportunity to continue to develop core and non-core businesses in the domestic and international markets. Opportunities owned by IPC include:

1. One of the National Strategic Projects will commence its operation, namely Tanjung Pura Port/Kijing Terminal in West Kalimantan;
2. Potential increase in container volume that continues to show a positive trend and increasing trend of packaging shifting from bulk to container packaging;
3. Potential increase in volume of core commodities that shows a positive trend and market size for bulk commodities that remains to be large;
4. The government's plan to develop industries, industrial estates, and Special Economic Zones (KEK) outside Java through cooperation opportunities in industrial development and integrated SEZs outside Java;
5. SOE Port Service Holding through a synergy plan between PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, and IV (Persero) and similar entities (subsidiaries or subsidiaries of subsidiary);
6. Indonesian free trade cooperation and the Comprehensive Economic Partnership Agreement which facilitates the cooperation of global companies, especially countries that partner with Indonesia;
7. Cooperation in developing ports with cargo owners (cooperation in developing new DUKS/TUKS) through cooperation in developing docks/terminals with goods owners;

8. *Trend* digital yang membuka peluang bisnis baru dan perbaikan efisiensi operasional pelabuhan;
9. Visi pemerintah untuk pengembangan infrastruktur maritime yang akan berpotensi untuk mendukung ekspansi bisnis IPC.

KEKUATAN

Kekuatan yang dimiliki IPC dalam menghadapi tantangan dan prospek usaha disajikan sebagai berikut.

1. Memiliki struktur keuangan yang kuat;
2. *Corporate branding* dan *networking* yang luas dengan pelaku industri nasional dan internasional sehingga investor cenderung memilih IPC sebagai mitra pengembangan pelabuhan di Indonesia;
3. *Keunggulan* dan pemahaman yang mendalam sebagai *landlord* dan operator terminal dalam bisnis kepelabuhanan di Indonesia;
4. Pengalaman dalam pengembangan pelabuhan skala internasional dengan keberhasilan dalam pembangunan *New Priok Container Terminal 1*;
5. Portofolio bisnis anak dan cucu perusahaan yang telah terstruktur dan terdiversifikasi dengan baik dalam memberikan layanan terkait kepelabuhanan, logistik, dan layanan pendukungnya;
6. Lokasi geografis wilayah operasi Perseroan yang berada pada wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;
7. Memiliki kemampuan *handling kargo* untuk seluruh jenis kargo dengan fasilitas dan peralatan cabang-cabang pelabuhan yang dapat melayani hampir semua jenis kargo;
8. Memiliki hubungan dengan *stakeholder* pelabuhan yang baik antara lain dengan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Perguruan Tinggi, dan *Global Network*;
9. Memiliki talenta yang telah terdidik serta berwawasan kepelabuhanan dan logistik. Insan Perseroan yang berwawasan global, sarjana, dan *master* bidang kepelabuhanan dan logistik di universitas internasional.

Kondisi perekonomian tidak terlalu baik akibat meluasnya COVID-19, namun demikian IPC optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, terlebih dalam menyongsong masa depan Perseroan sebagai fasilitator perdagangan kelas dunia. Dengan kata lain, Perseroan memiliki prospek usaha yang baik. Hal tersebut juga didukung oleh kekuatan-kekuatan yang dimiliki Perseroan. Secara nasional, saat ini IPC beserta PT Pelabuhan Indonesia I, III, dan IV (Persero) telah memiliki pangsa pasar petikemas sebesar 85% dan non petikemas sebesar 10-20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perseroan masih memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan pasar terlebih untuk komoditas non-petikemas.

8. Digital trends that open up new business opportunities and improve the efficiency of port operations;
9. The government's vision for maritime infrastructure development that will have the potential to support the expansion of IPC business.

STRENGTHS

IPC's strengths in facing challenges and business outlook are follows.

1. Possess a strong financial structure;
2. Extensive corporate branding and networking with national and international industry players, hence investors tend to choose IPC as a port development partner in Indonesia;
3. Excellence and deep understanding as landlord and terminal operator in the port business in Indonesia;
4. Sufficient experience in developing international scale ports with success in the construction of New Priok Container Terminal 1;
5. Well-structured and well-diversified business portfolio of subsidiaries and subsidiaries of subsidiary in providing services related to port, logistics and supporting services;
6. The geographical location of the Company's operational areas is in areas with high economic growth;
7. Having cargo handling capabilities for all types of cargo with facilities and equipment of port branches that can serve almost all types of cargo;
8. Having a good relationship with port stakeholders, among others, with the Central and Regional Government, Universities, and the Global Network;
9. Having talents that have been educated and have port and logistics perspective. The Company's people are individuals with global vision, having bachelor and master degree in port and logistics from international universities.

The less encouraging economic conditions occurred due to the expansion of COVID-19. However, IPC is optimistic to be able to continue to improve its performance both in the short and long term, especially in welcoming the Company's future as a world-class trade facilitator. In other words, the Company has good business outlook. This is also supported by the strengths owned by the Company. At the national level, currently IPC and PT Pelabuhan Indonesia I, III, and IV (Persero) have a container market share of 85% and non-container market share of 10-20%. This shows that the Company still has huge potential to develop markets, especially for non-container commodities.



STRATEGI KE DEPAN TAHUN 2020

Pada tahun 2020 IPC akan fokus memberdayakan seluruh sumber daya dan upaya untuk mewujudkan visi sebagai Pengelola Pelabuhan Kelas Dunia yang Unggul dalam Operasional dan Pelayanan. Dalam rangka mencapai hal tersebut maka Perseroan harus mengimplementasikan beberapa *milestone* yang menjadi kunci dalam ketercapaian *roadmap* tahun 2020 yaitu:

1. *Establishment of Global foot print;*
2. *Start establishing world class terminal operator;*
3. *Start of green port & smart port initiatives;*
4. *Excellence competing subsidiaries.*

Inisiatif strategis yang telah direncanakan untuk mengimplementasikan *milestone* pada tahun 2020 tersebut secara umum terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan *corporate branding* sebagai 'World Class Port Operator';
2. Penguatan SOP, Tata Kelola, Manajemen Risiko dan HSE;
3. Penguatan perencanaan strategi Perseroan;
4. Penguatan hubungan pelanggan yang efektif untuk mengembangkan *footprint* pelabuhan;
5. Mengidentifikasi kekuatan utama untuk ekspansi *footprints* regional dan global;
6. Optimalisasi pemanfaatan aset;
7. Memaksimalkan kapabilitas operasional terminal dan jasa kapal;
8. Penyiapan operasi *smart, digital, and green port*;
9. Persiapan *Integrated port network*;
10. Optimalisasi infrastruktur dan peralatan;
11. Pengembangan kapabilitas proyek dan implementasi proyek strategis;
12. Membangun organisasi kelas dunia;
13. Membangun *mechanism* pelatihan human capital dan *knowledge platform* kelas dunia;
14. Standarisasi sistem keuangan dan Optimalisasi sistem *cash management* terintegrasi;
15. Meningkatkan kinerja keuangan (EBITDA Margin, ROIC, ROE, ROA);
16. Mempersiapkan siklus *working capital*;
17. Mempersiapkan kemitraan strategis untuk membangun kapabilitas sebagai pemain logistik yang terintegrasi;
18. Mempersiapkan kapabilitas untuk melakukan keputusan berbasis data;
19. Melakukan pengembangan bisnis untuk memperkuat posisi IPC sebagai *trade facilitator*;
20. Mempersiapkan kapabilitas *digital* untuk memfasilitasi pemain dalam ekosistem.

FUTURE STRATEGIES IN 2020

In 2020, IPC will focus on empowering all resources and efforts to realize the vision of becoming a World-Class Port Operator that excels in Operations and Services. In order to achieve this, the Company must implement several key milestones in achieving the 2020 roadmap, namely:

1. Establishment of Global foot print;
2. Start establishing world operator terminal class;
3. Start of green port & smart port initiatives;
4. Excellence competing subsidiaries.

In general, the strategic initiatives that have been planned to implement the 2020 milestone consist of:

1. increasing corporate branding as a 'World Class Port Operator';
2. Strengthening SOPs, Governance, Risk Management and HSE;
3. Strengthening the Company's strategic planning;
4. Strengthening effective customer relationships to develop port footprints;
5. Identifying key strengths for regional and global footprint expansion;
6. Optimization of asset utilization;
7. Maximizing operational capabilities of the terminal and ship services;
8. Preparation of smart, digital and green port operations;
9. Preparation of Integrated port network;
10. Optimization of infrastructure and equipment;
11. Development of project capabilities and implementation of strategic projects;
12. Building a world-class organization;
13. Building a world-class human capital training and knowledge platform mechanism;
14. Standardization of financial systems and Optimization of integrated cash management systems;
15. Improving financial performance (EBITDA Margin, ROIC, ROE, ROA);
16. Prepare a working capital cycle;
17. Prepare strategic partnerships to build capabilities as an integrated logistics player;
18. Prepare capabilities for data-based decision making;
19. Perform business development to strengthen IPC's position as a trade facilitator;
20. Prepare digital capabilities to facilitate players in the ecosystem.

Adapun strategi lain yang akan dilakukan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut

1. Terminal Petikemas
 - a. Meningkatkan produktivitas terminal petikemas melalui implementasi sistem dan peningkatan peralatan bongkar muat;
 - b. Melakukan *throughput forecast* atas petikemas di Indonesia dan identifikasi prioritas pengembangan terminal petikemas untuk memastikan peningkatan kapasitas guna memenuhi permintaan pasar;
 - c. Melakukan *re-mapping* atas *business process* dari layanan *transshipment* dalam rangka peningkatan volume layanan dan penawaran tarif kompetitif *transshipment* tersebut;
 - d. Identifikasi peluang ekspansi bisnis internasional.
2. Terminal Non Petikemas
 - a. Standarisasi tingkat pelayanan *non* petikemas di seluruh Cabang;
 - b. Meningkatkan produktivitas terminal non petikemas melalui implementasi sistem (NPKTOS);
 - c. Melakukan penjajakan pengoperasian terminal *non* petikemas di luar IPC;
 - d. Identifikasi peluang ekspansi bisnis internasional.
3. Terminal Kendaraan
 - a. Mengembangkan strategi pemasaran jasa bongkar muat kendaraan dalam rangka memperluas pangsa pasar;
 - b. Meningkatkan kapasitas pelayanan dengan perluasan lapangan di Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan 45 ha;
 - c. Memperbaharui sistem pelayanan terminal kendaraan (*Car Terminal Operating System*) berdasarkan kebutuhan bisnis;
 - d. Ikut serta dalam lelang operator Pelabuhan Patimban;
 - e. Identifikasi peluang ekspansi bisnis baik domestik maupun internasional.
4. Jasa Peralatan
 - a. Implementasi digitalisasi proses pemeliharaan peralatan terintegrasi dengan sistem pelayanan pelabuhan;
 - b. Penjajakan layanan pemeliharaan alat di terminal non IPC;
 - c. Implementasi Pelindo *Incorporated Cluster* Peralatan;
 - d. Identifikasi peluang ekspansi bisnis internasional.
5. Jasa *Utility*
 - a. Penjajakan awal bisnis jasa *utility* untuk pelabuhan dan kawasan;

Other strategies that will be carried out in 2020 are as follows

1. Container Terminal
 - a. Increase container terminal productivity through system implementation and improvement of loading and unloading equipment;
 - b. Conduct a *throughput forecast* for containers in Indonesia and identify the priority of container terminal development in order to ensure increased capacity to meet market demand;
 - c. Re-mapping the business process of *transshipment* services in the context of increasing service volume and offering competitive tariffs for *transshipment*;
 - d. Identification of opportunities for international business expansion.
2. Non Container Terminal
 - a. Standardize the level of non-container service in all Branches;
 - b. Increase non-container terminal productivity through system implementation (NPKTOS);
 - c. Exploring the operation of non-container terminals outside IPC;
 - d. Identification of opportunities for international business expansion.
3. Vehicle Terminal
 - a. Develop marketing strategies for vehicle loading and unloading services in order to expand market share;
 - b. Increase service capacity by expanding the field in Tanjung Priok Port to 45 ha;
 - c. Update the vehicle terminal service system based on business needs;
 - d. Participate in Patimban Port operator auction;
 - e. Identification of domestic and international business expansion opportunities.
4. Equipment Services
 - a. Implementation of digitalization of integrated equipment maintenance process with the port service system;
 - b. Exploring equipment maintenance services at non IPC terminals;
 - c. Implementation of Pelindo *Incorporated Cluster* Equipment;
 - d. Identification of opportunities for international business expansion.
5. Utility Services
 - a. Initial assessment of utility service business for ports and estates;



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Perencanaan awal pembentukan entitas bisnis <i>utility</i> baru. c. Implementasi pelayanan listrik "<i>shore to ship</i>"; d. Implementasi jasa kontraktor dan audit energi di lingkungan IPC; e. Penjajakan awal akuisisi perusahaan penyedia air dan pengolahan air limbah. | <ul style="list-style-type: none"> b. Initial planning for the establishment of a new utility business entity; c. Implementation of "<i>shore to ship</i>" electricity services. d. Implementation of contractor services and energy audits in IPC environment; e. Initial assessment of the acquisition of water supply and waste water treatment companies. |
| <p>6. Teknologi Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung digitalisasi pelabuhan dan implementasi pertukaran data dalam ekosistem pelabuhan; b. Membangun kemitraan dalam pengembangan solusi kepelabuhanan dan logistik. | <p>6. Information Technology</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Support port digitalization and implementation of data exchange in port ecosystems; b. Building partnerships in the development of port and logistics solutions. |
| <p>7. Jasa Pengerukan dan Pemeliharaan Kapal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan prioritas revitalisasi kapal keruk yang ada; b. Implementasi kontrak kedalaman alur IPC; c. Membangun kemitraan untuk meningkatkan kapabilitas layanan pemeliharaan kapal; d. Identifikasi peluang ekspansi bisnis internasional. | <p>7. Dredging and Ship Maintenance Services</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Establish priorities for existing dredger revitalization; b. Implementation of IPC channel depth contracts; c. Building partnerships to improve the capabilities of ship maintenance services; d. Identification of opportunities for international business expansion. |
| <p>8. Rumah Sakit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fokus layanan rumah sakit pada segmen pelanggan BPJS; b. Mencari pendanaan alternatif untuk menyelesaikan proyek pengembangan kapasitas rumah sakit; c. Implementasi sistem manajemen rumah sakit untuk meningkatkan mutu dan kecepatan layanan; d. Mendukung program <i>holding</i> rumah sakit dari Pemerintah. | <p>8. Hospital</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Focusing hospital services on BPJS customer segment; b. Look for alternative funding to complete the hospital capacity building project; c. Implementation of hospital management systems to improve quality and speed of service; d. Support hospital holding programs from the Government. |
| <p>9. Layanan Kapal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan pasar layanan pemanduan dan penundaan kapal di luar wilayah IPC; b. Meningkatkan utilisasi kapal melalui pengembangan sistem <i>ship service demand tracking</i>. | <p>9. Ship Service</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Expand the market of pilotage and towage services outside IPC area; b. Increase ship utilization through the development of ship service demand tracking system. |
| <p>10. Terminal Penumpang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan aktivitas bisnis dalam terminal penumpang berdasarkan kebutuhan pelanggan; b. Meningkatkan konektivitas terminal penumpang dengan moda transportasi di luar pelabuhan. | <p>10. Passenger Terminal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Increase business activities in the passenger terminal based on customer needs; b. Improve passenger terminal connectivity with transportation modes outside the port. |
| <p>11. Pengelolaan SDM dan Solusi Manajemen</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membangun kemitraan dengan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero) untuk mengembangkan <i>Corporate University</i>; b. Membangun <i>shared service center</i> meliputi bidang SDM, Pengadaan dan Keuangan. | <p>11. HC Management and Management Solutions</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Building partnerships with PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero) to develop the Corporate University; b. Building a shared service center covering the fields of HC, Procurement and Finance. |

- | | |
|--|--|
| <p>12. Layanan Konsultansi, Investasi dan Keuangan
Membangun kapabilitas melalui perekrutan <i>talent</i> di bidang konsultansi, investasi dan keuangan untuk mendukung program pertumbuhan anorganik IPC.</p> <p>13. Layanan Logistik
Penjajakan kemitraan dengan <i>best suite logistic player</i> untuk mengembangkan program transformasi logistik IPC.</p> <p>14. Pengembangan Kawasan;
Penjajakan kemitraan dengan <i>industrial estate player</i> untuk mengembangkan program pembangunan kawasan terintegrasi pelabuhan;</p> <p>15. Pariwisata
Penjajakan kemitraan dengan pelaku industri pariwisata untuk mengembangkan Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai <i>heritage port</i>.</p> | <p>12. Consultancy, Investment and Financial Services
Building capability through talent recruitment in the fields of consultancy, investment and finance to support IPC's inorganic growth program;</p> <p>13. Logistics Services
Exploring partnerships with the best suite logistic players to develop IPC logistics transformation program;</p> <p>14. Estate Development
Exploring partnerships with industrial estate players to develop integrated port area development programs;</p> <p>15. Tourism
Exploring partnerships with tourism industry players to develop Sunda Kelapa Port as a heritage port.</p> |
|--|--|



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro, dan Surja (*Member of Ernst and Young Global*) dan mendapat opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia II dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The financial review described below refer to the Financial Statements for years ended on December 31, 2019 and 2018 and presented in this Annual Report. The Financial Statements have been audited by Purwanto, Sungkoro, and Surja Public Accountants (Member of Ernst and Young Global) and received unqualified opinion, the consolidated financial position of PT Pelabuhan Indonesia II and its subsidiaries as of December 31, 2019 and the consolidated financial performance and cash flows for the year ended on the date in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan Perseroan terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif serta Laporan Arus Kas Konsolidasian disajikan sebagai berikut.

FINANCIAL PERFORMANCE

The Company's financial performance consists of the performance of Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Statement of Profit or Loss and Comprehensive Income and Consolidated Statement of Cash Flows and presented as follows.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Consolidated Statement of Financial Position (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ASET ASSETS				
Aset Lancar Current Assets				
Kas dan Setara Kas Cash and cash equivalents	15.603.533.329	18.018.671.479	(2.415.138.150)	(13,40%)
Investasi Jangka Pendek Short-term Investments	2.596.701.126	3.836.007.289	(1.239.306.163)	(32,31%)
Piutang Usaha – Neto Trade Receivables - Net				
Pihak Ketiga Third Parties	712.826.744	634.078.032	78.748.712	12,42%
Pihak Berelasi Related Parties	135.198.738	155.875.322	(20.676.584)	(13,26%)
Piutang Lain-Lain – Neto Other Receivables - Net				
Pihak Ketiga Third Parties	45.117.978	9.530.083	35.587.895	373,43%
Pihak Berelasi Related Parties	784.951.419	640.168.731	144.782.688	22,62%
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka Advances and Prepaid Expenses	104.181.981	120.068.178	(15.886.197)	(13,23%)

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Consolidated Statement of Financial Position (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan Masih Akan Diterima Accrued Revenues				
Pihak Ketiga Third Parties	258.865.863	256.914.263	1.951.600	0,76%
Pihak Berelasi Related Parties	46.586.491	65.953.809	(19.367.318)	(29,36%)
Persediaan Inventories	82.940.596	59.139.424	23.801.172	40,25%
Pajak Dibayar Di Muka Prepaid taxes	680.605.067	751.789.998	(71.184.931)	(9,47%)
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	10.253.126	6.139.521	4.113.605	67,00%
Total Aset Lancar Total Current Assets	21.061.762.458	24.554.336.129	(3.492.573.671)	(14,22%)
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets				
Investasi Jangka Panjang Investment in Associates	3.211.023.600	3.211.737.431	(713.831)	(0,02%)
Properti Investasi – Neto Investment Properties - Net	357.295.487	377.142.447	(19.846.960)	(5,26%)
Aset Tetap – Neto Fixed Assets - Net	13.387.155.835	12.628.997.433	758.158.402	6,00%
Aset Kerjasama Operasi – Neto Joint Operation Assets - Net	461.100.101	482.390.189	(21.290.088)	(4,41%)
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	73.873.814	47.498.765	26.375.049	55,53%
Aset Tak Berwujud – Neto Intangible Assets - Net	10.818.271.480	9.038.949.144	1.779.322.336	19,69%
Taksiran Tagihan Restitusi Pajak Estimated Claims for Tax Refund	958.917.154	841.931.567	116.985.587	13,89%
Aset Lain-Lain Other Assets	1.711.199.806	249.893.918	1.461.305.888	584,77%
Total Aset Tidak Lancar Total Non-current Assets	30.978.837.277	26.878.540.894	4.100.296.383	15,25%
Total Aset Total Assets	52.040.599.735	51.432.877.023	607.722.712	1,18%
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY				
Liabilitas Liabilities				
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities				
Pinjaman Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans	34.193.914	4.000.000	30.193.914	754,85%
Utang Usaha Trade Payables				



Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Consolidated Statement of Financial Position (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak Ketiga Third Parties	359.929.551	418.899.213	(58.969.662)	(14,08%)
Pihak Berelasi Related Parties	1.076.552.787	1.247.008.500	(170.455.713)	(13,67%)
Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Pendek Short-term Unearned Revenues	845.489.224	834.098.021	11.391.203	1,37%
Utang Pajak Taxes Payable	445.015.994	389.495.675	55.520.319	14,25%
Beban Akrual Accrued Expenses	2.274.726.626	2.290.832.616	(16.105.990)	(0,70%)
Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang Current Maturities of Long-Term Liabilities				
Utang Bank Bank Loans	12.000	-	12.000	100,00%
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya - Pihak Berelasi Other Long-term Liabilities - Related Parties	19.887.737	38.272.280	(18.384.543)	(48,04%)
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Other Current Liabilities				
Pihak Ketiga Third Parties	206.170.895	185.350.553	20.820.342	11,23%
Pihak Berelasi Related Parties	91.743.873	90.237.622	1.506.251	1,67%
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	5.353.722.601	5.498.194.480	(144.471.879)	(2,63%)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities				
Utang Obligasi Bonds Payable	21.984.178.194	22.890.166.969	(905.988.775)	(3,96%)
Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Lancar Long-term Liabilities – Net of Current Maturities				
Utang Bank Bank Loans	114.978.000	-	114.978.000	100,00%
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya Other Long-term Liabilities				
• Pihak Ketiga Third Parties	225.013.928	234.402.238	(9.388.310)	(4,01%)
• Pihak Berelasi Related Parties	10.250.000	-	10.250.000	100,00%
Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Panjang Long-term Unearned Revenues	4.005.631.257	4.290.892.916	(285.261.659)	(6,65%)
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefit Liabilities	1.966.325.908	1.776.917.294	189.408.614	10,66%

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Consolidated Statement of Financial Position (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	254.289.069	307.846.807	(53.557.738)	(17,40%)
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-current Liabilities	28.560.666.356	29.500.226.224	(939.559.868)	(3,18%)
Total Liabilitas Total Liabilities	33.914.388.957	34.998.420.704	(1.084.031.747)	(3,10%)
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY				
Ekuitas Equity				
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of Parent Entity				
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1.000.000 (Nilai Penuh) Per Saham Share Capital - Par Value of Rp1,000,000 (Full Amount) Per Share				
Modal Dasar - 4.000.000 Saham Authorized Capital - 4,000,000 Shares				
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh - 1.444.029 Saham Issued and Fully Paid Capital - 1,444,029 Shares	1.444.029.000	1.444.029.000	-	-
Modal Donasi Donated Capital	26.825.982	26.825.982	-	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	(317.597.475)	(317.597.475)	-	-
Saldo Laba Retained Earnings				
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	13.273.514.540	11.726.994.846	1.546.519.694	13,19%
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	2.455.762.802	2.379.261.695	76.501.107	3,22%
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(105.008.860)	(114.597.288)	9.588.428	(8,37%)
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk - Neto Equity Attributable to Owners of Parent Entity - Net	16.777.525.989	15.144.916.760	1.632.609.229	10,78%
Keuntungan Nonpengendali Non-controlling interests	1.348.684.789	1.289.539.559	59.145.230	4,59%
Ekuitas - Neto Equity - Net	18.126.210.778	16.434.456.319	1.691.754.459	10,29%
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	52.040.599.735	51.432.877.023	607.722.712	1,18%



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah) Consolidated Statement of Financial Position (in Thousand Rupiah)



ASET

Aset tahun 2019 mencapai Rp52,04 triliun, meningkat 1,18% atau Rp0,61 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp51,43 triliun. Peningkatan aset terutama berasal dari kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp4,10 triliun yang berasal dari peningkatan aset dan hak konsesi atas kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan serta pencatatan denda pajak atas PPH Badan sebesar Rp1,23 triliun yang diakui sebagai aset tidak lancar lainnya dengan pertimbangan proses Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI (MA RI) yang masih berjalan.

ASSET

Assets in 2019 reached Rp52.04 trillion, an increase of 1.18% or Rp0.61 trillion compared to 2018 reaching Rp51.43 trillion. The increase in assets mainly came from an increase in non current assets amounted to Rp4.10 trillion, which came from an increase in assets and concession rights for investment activities carried out by the Company as well as the recording tax penalties on Corporate Income Tax amounted to Rp1.23 trillion recognized as other non-current assets with consideration of the ongoing Review process (PK) to the Supreme Court of the Republic of Indonesia (MA RI).

Tabel Aset (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Assets (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset Lancar Current Assets	21.061.762.458	24.554.336.129	(3.492.573.671)	(14,22%)
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	30.978.837.277	26.878.540.894	4.100.296.383	15,25%
Total Aset Total Assets	52.040.599.735	51.432.877.023	607.722.712	1,18%

Aset Lancar

Aset lancar tahun 2019 mencapai Rp21,06 triliun, menurun 14,22% atau Rp3,49 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp24,55 triliun. Penurunan aset lancar terutama berasal dari turunnya kas dan setara kas sebesar Rp2,42 triliun sejalan dengan peningkatan pembayaran dividen, pembayaran denda PPh Badan serta pengeluaran kas atas investasi yang dilakukan Perseroan.

Current Assets

Current assets in 2019 reached IDR21.06 trillion, down 14.22% or IDR3.49 trillion compared to IDR24.55 trillion in 2018. The decrease in current assets mainly due to decrease in cash and cash equivalents of Rp2.42 trillion in line with increase in dividend, payment of Corporate Income Fines and cash disbursements on Company investments.

Tabel Aset Lancar (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Current Assets (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kas dan Setara Kas Cash and cash equivalents	15.603.533.329	18.018.671.479	(2.415.138.150)	(13,40%)
Investasi Jangka Pendek Short-term Investments	2.596.701.126	3.836.007.289	(1.239.306.163)	(32,31%)
Piutang Usaha – Neto Trade Receivables - Net				
Pihak Ketiga Third Parties	712.826.744	634.078.032	78.748.712	12,42%
Pihak Berelasi Related Parties	135.198.738	155.875.322	(20.676.584)	(13,26%)
Piutang Lain-Lain – Neto Other Receivables - Net				
Pihak Ketiga Third Parties	45.117.978	9.530.083	35.587.895	373,43%
Pihak Berelasi Related Parties	784.951.419	640.168.731	144.782.688	22,62%
Uang Muka dan Beban Dibayar Di Muka Advances and Prepaid Expenses	104.181.981	120.068.178	(15.886.197)	(13,23%)
Pendapatan Masih Akan Diterima Accrued Revenues				
Pihak Ketiga Third Parties	258.865.863	256.914.263	1.951.600	0,76%
Pihak Berelasi Related Parties	46.586.491	65.953.809	(19.367.318)	(29,36%)
Persediaan Inventories	82.940.596	59.139.424	23.801.172	40,25%
Pajak Dibayar Di Muka Prepaid taxes	680.605.067	751.789.998	(71.184.931)	(9,47%)
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	10.253.126	6.139.521	4.113.605	67,00%
Total Aset Lancar Total Current Assets	21.061.762.458	24.554.336.129	(3.492.573.671)	(14,22%)

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas tahun 2019 mencapai Rp15,60 triliun, menurun 13,40% atau Rp2,42 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp18,02 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan:

1. Kewajiban pembayaran dividen kepada pemegang saham atas realisasi pencapaian kinerja keuangan tahun buku 2018 sesuai Surat kepada Direktur Jenderal Anggaran Nomor: KU.02.04/17/6/2/BEN/KEU/PI.II-19 tanggal 17 September 2019 tentang Pelunasan Dividen Tahun Buku 2018 dengan *dividend payout ratio* sebesar 35%;
2. Pembayaran pajak atas putusan banding pajak PPh Badan tahun pajak 2015 sebesar Rp1,23 triliun.

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in 2019 reached Rp.15.60 trillion, a decrease of 13.40% or Rp2.42 trillion compared to 2018 which reached Rp18.02 trillion. The decrease was mainly due to:

1. Obligation to pay dividends to shareholders for the realization of the fiscal year 2018 achievement in accordance with the Letter to the Director General of Budget Number: KU.02.04/17/6/2/BEN/KEU/PI.II-19 dated September 17, 2019 concerning Repayment of Dividends of Fiscal Year 2018 with a dividend payout ratio of 35%;
2. Payment of tax on the 2015 Corporate Income Tax appeal decision of Rp1.23 trillion.



Tabel Kas dan Setara Kas (dalam ribuan Rupiah)
Table of Cash and Cash Equivalents (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kas Cash on hand	4.797.709	2.637.178	2.160.531	81,93%
Bank Cash in banks	1.169.594.929	3.399.196.648	(2.229.601.719)	(65,59%)
Deposito Berjangka Time deposits	14.429.140.691	14.616.837.653	(187.696.962)	(1,28%)
Total Kas dan Setara Kas Total cash and cash equivalents	15.603.533.329	18.018.671.479	(2.415.138.150)	(13,40%)

Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek tahun 2019 mencapai Rp2,60 triliun, menurun 32,31% atau Rp1,24 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp3,84 triliun. Hal ini terutama disebabkan pencairan deposito untuk mendukung aktivitas investasi dan pembayaran pajak atas putusan banding pajak PPh Badan tahun pajak 2015 sebesar Rp1,23 triliun.

Short Term Investment

Short-term investment in 2019 reached Rp2.60 trillion, a decrease of 32.31% or Rp1.24 trillion compared to 2018 amounted to Rp3.84 trillion. This was mainly due to the disbursement of deposits to support investment activities and tax payments on the 2015 corporate income tax appeal decision amounting to Rp1.23 trillion.

Tabel Investasi Jangka Pendek (dalam ribuan Rupiah)
Table of Short-term Investments (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Total Deposito Berjangka Total time deposits	2.259.297.400	3.544.253.994	(1.284.956.594)	(36,25%)
Efek Yang Diperdagangkan Marketable securities	337.403.726	291.753.295	45.650.431	15,65%
Total Investasi Jangka Pendek Total short-term investments	2.596.701.126	3.836.007.289	(1.239.306.163)	(32,31%)

Piutang Usaha – Neto

Piutang usaha neto tahun 2019 mencapai Rp848,03 miliar, meningkat 7,35% atau Rp58,07 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp789,95 miliar. Hal ini disebabkan nilai *Average Collection Period (ACP)* tahun 2019 selama 27 hari sedangkan tahun 2018 selama 24 hari.

Trade Receivables - Net

Net trade receivables in 2019 reached Rp848.03 billion, an increase of 7.35% or Rp58.07 billion compared to 2018 reaching Rp789.95 billion. This was due to the 2019 Average Collection Period (ACP) for 27 days, while in 2018 for 24 days.

Tabel Piutang Usaha - Neto (dalam ribuan Rupiah)
Table of Trade Receivables (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak Ketiga - Neto Third parties - net	712.826.744	634.078.032	78.748.712	12,42%
Pihak Berelasi - Neto Related parties - net	135.198.738	155.875.322	(20.676.584)	(13,26%)
Piutang Usaha - Neto Trade receivables - net	848.025.482	789.953.354	58.072.128	7,35%

Piutang Lain-Lain – Neto

Piutang lain-lain neto tahun 2019 mencapai Rp830,07 miliar, meningkat 27,76% atau Rp180,37 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp649,70 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan piutang PT JICT dan adanya piutang baru atas PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways.

Other Receivables - Net

Net other receivables in 2019 reached Rp830.07 billion, an increase of 27.76% or Rp180.37 billion compared to 2018 reaching Rp649.70 billion. The increase was due to an increase in PT JICT receivables and new receivables from PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways.

Tabel Piutang Lain-Lain - Neto (dalam ribuan Rupiah)
Table of Other Receivables (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak Ketiga - Neto Third parties - net	45.117.978	9.530.083	35.587.895	373,43%
Pihak Berelasi - Neto Related parties - net	784.951.419	640.168.731	144.782.688	22,62%
Piutang Usaha - Neto Trade receivables - net	830.069.397	649.698.814	180.370.583	27,76%

Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka

Uang muka dan beban dibayar dimuka tahun 2019 mencapai Rp104,18 miliar, menurun 13,23% atau Rp15,89 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp120,07 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan pertanggungjawaban uang muka dan amortisasi beban dibayar di muka.

Advances And Prepaid Expenses

Advances and prepaid expenses in 2019 amounted to Rp104.18 billion, a decrease of 13.23% or Rp15.89 billion compared to 2018 amounted to Rp120.07 billion. This was mainly due to liabilities of advances and amortization of prepaid expenses.



Tabel Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka (dalam ribuan Rupiah)
Table of Advances and Prepaid Expenses (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Uang Muka Advances				
Operasional Operational	7.033.421	8.921.964	(12.973.150)	(64,84%)
Lain-Lain Others	892.674	13.268.042	(1.290.761)	(59,12%)
Subtotal Subtotal	7.926.095	22.190.006	(14.263.911)	(64,28%)
Beban Dibayar Di Muka Prepaid expenses				
Pegawai Employee	47.700.658	41.911.549	5.789.109	13,81%
Asuransi Insurance	9.782.442	12.918.214	(3.135.772)	(24,27%)
Sewa Rental	5.102.500	7.063.765	(1.961.265)	(27,77%)
Umum General	5.510.554	17.783.362	(12.272.808)	(69,01%)
Lain-Lain Others	28.159.732	18.201.282	9.958.450	54,71%
Subtotal Subtotal	96.255.886	97.878.172	(1.622.286)	(1,66%)
Jumlah Total	104.181.981	120.068.178	(15.886.197)	(13,23%)

Pendapatan Masih Akan Diterima

Pendapatan masih akan diterima tahun 2018 mencapai Rp305,45 miliar, menurun 5,39% atau Rp17,42 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp322,87 miliar. Hal ini terutama disebabkan realisasi pendapatan masih akan diterima periode sebelumnya serta pendapatan dari kegiatan jasa kepelabuhanan yang mendekati waktu selesainya pemberian jasa kepelabuhanan kepada pengguna jasa/pelanggan.

Accrued Revenues

Accrued revenues in 2019 amounted to Rp305.45 billion, down by 5.39% or Rp17.42 billion compared to 2018 of Rp322.87 billion. This was mainly due to the realization of accrued revenues in the previous period as well as revenues from port service activities that were nearing the time of port service delivery to service users/customers.

Tabel Pendapatan Yang Masih Akan Diterima (dalam ribuan Rupiah)
Table Of Accrued Revenues (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak Ketiga - Neto Third parties - net	258.865.863	256.914.263	(47.000.482)	(15,37%)
Pihak Berelasi - Neto Related parties - net	46.586.491	65.953.809	29.584.764	174,01%
Jumlah Total	305.452.354	322.868.072	(17.415.718)	(5,39%)

Persediaan

Persediaan tahun 2019 mencapai Rp82,94 miliar, meningkat 40,25% atau Rp23,80 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp59,14 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan persediaan suku cadang sebesar Rp4,10 miliar.

Inventories

Inventories in 2019 were recorded at Rp82.94 billion, an increase of 40.25% or Rp23.80 billion compared to 2018 at Rp59.14 billion. The increase came from an increase in inventory of stationeries and printings by Rp4.10 billion.

Tabel Persediaan (dalam ribuan Rupiah)
Table of Inventories (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Suku Cadang Spare Parts	50.398.366	46.300.884	4.097.482	8,85%
Bahan Bakar Fuels	16.203.938	1.866.460	14.337.478	768,16%
Obat, Bahan, dan Alat Medis Medicines, materials, and medical devices	10.924.650	13.236.622	(2.311.972)	(17,47%)
Alat Tulis dan Barang Cetak Stationeries and printings	1.009.483	1.706.454	(696.971)	(40,84%)
Lain-Lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar) Others (each less than Rp1 billion)	8.580.437	949.230	7.631.207	803,94%
Jumlah Total	87.116.874	64.059.650	23.057.224	35,99%
Dikurangi: Less:				
Penyisihan Persediaan Usang Allowance for inventory obsolescence	(4.176.278)	(4.920.226)	743.948	(15,12%)
Neto Net	82.940.596	59.139.424	23.801.172	40,25%

Pajak Dibayar di Muka

Pajak dibayar dimuka tahun 2019 mencapai Rp680,61 miliar, menurun 9,47% atau Rp71,18 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp751,79 miliar. Penurunan tersebut karena menurunnya pajak pertambahan nilai perusahaan dan Entitas Anak masing-masing sebesar Rp38,10 miliar dan Rp63,70 miliar.

Prepaid Taxes

Prepaid taxes in 2019 were Rp680.61 billion, decreased by 9.47% or Rp71.18 billion compared to 2018 of Rp751.79 billion. The decrease was due to a decrease in the value added tax of the Company and its subsidiaries respectively by Rp38.10 billion and Rp63.70 billion.

Tabel Pajak Dibayar Dimuka (dalam ribuan Rupiah)
Table of Prepaid Taxes (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan The Company				
Pajak Pertambahan Nilai Value Added Tax	197.084.038	235.183.098	(38.099.060)	(16,20%)



Tabel Pajak Dibayar Dimuka (dalam ribuan Rupiah)
Table of Prepaid Taxes (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pajak Penghasilan Pasal 19 - Penilaian Kembali Aktiva Tetap Income Tax Article 19 - Revaluation of fixed assets	-	32.438.878	(5.205.944)	(16,05%)
Pajak Penghasilan Lainnya Other Income Taxes	27.232.934	8.436.907	(8.436.907)	(100,00%)
Subtotal Subtotal	224.316.972	276.058.883	(51.741.911)	(18,74%)
Entitas Anak Subsidiaries				
Pajak Pertambahan Nilai Value Added Tax	107.873.791	171.572.101	(63.698.310)	(37,13%)
Pajak Penghasilan Lainnya Other Income Taxes	348.414.304	304.159.014	44.255.290	14,55%
Subtotal Subtotal	456.288.095	475.731.115	(19.443.020)	(4,09%)
Jumlah Total	680.605.067	751.789.998	(71.184.931)	(9,47%)

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar tahun 2019 mencapai Rp30,98 triliun, meningkat 15,25% atau Rp4,10 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp26,88 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan:

1. Penyelesaian pekerjaan aset tetap tahun 2019 sebesar Rp13,39 triliun atau meningkat 6,00% dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp12,63 triliun;
2. Penyelesaian pekerjaan investasi aset tidak berwujud tahun 2019 sebesar Rp10,82 triliun atau meningkat 19,69% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp9,04 triliun;
3. Penambahan aset lain-lain dan taksiran tagihan restitusi pajak tahun 2019 sebesar Rp2,67 triliun atau meningkat 144,56% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,09 triliun sejalan dengan peningkatan aset dan hak konsensi atas kegiatan investasi yang dilakukan Perseroan serta pencatatan denda pajak atas PPH badan sebesar Rp1,23 triliun yang diakui sebagai aset tidak lancar lainnya dengan pertimbangan proses Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI (MA RI) yang masih berjalan.

Non-Current Assets

Non-current assets in 2019 reached Rp30.98 trillion, an increase of 15.25% or Rp4.10 trillion compared to 2018 reaching Rp26.88 trillion. The increase was mainly due to:

1. Completion of the work of fixed assets in 2019 amounting to Rp13.39 trillion, an increase of 6.00% compared to the realization in 2018 of Rp12.63 trillion;
2. Completion of the work of intangible assets investment in 2019 amounting to Rp10.82 trillion, an increase of 19.69% compared to the realization of 2018 of Rp9.04 trillion;
3. The addition of other assets and estimated tax restitution for 2019 is Rp2.67 trillion or an increase of 144.56% compared to 2018 realization of Rp1.09 trillion, in line with the increase in assets and concession rights for Company investment activities and recording of tax fines from corporate income tax of Rp1.23 trillion which was recognized as other non-current assets with consideration of ongoing review process (PK) to the Indonesian Supreme Court (MA RI).

Tabel Aset Tidak Lancar (dalam ribuan Rupiah)
Table of Non-current Assets (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Investasi Jangka Panjang Investment in Associates	3.211.023.600	3.211.737.431	(713.831)	(0,02%)
Properti Investasi – Neto Investment Properties - Net	357.295.487	377.142.447	(19.846.960)	(5,26%)
Aset Tetap – Neto Fixed Assets - Net	13.387.155.835	12.628.997.433	758.158.402	6,00%
Aset Kerjasama Operasi – Neto Joint Operation Assets - Net	461.100.101	482.390.189	(21.290.088)	(4,41%)
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	73.873.814	47.498.765	26.375.049	55,53%
Aset Tak Berwujud – Neto Intangible Assets - Net	10.818.271.480	9.038.949.144	1.779.322.336	19,69%
Taksiran Tagihan Restitusi Pajak Estimated Claims for Tax Refund	958.917.154	841.931.567	116.985.587	13,89%
Aset Lain-Lain Other Assets	1.711.199.806	249.893.918	1.461.305.888	584,77%
Total Aset Tidak Lancar Total Non-current Assets	30.978.837.277	26.878.540.894	4.100.296.383	15,25%

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang tahun 2019 mencapai Rp3,21 triliun, menurun 0,02% atau Rp0,73 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp3,21 triliun. Penurunan tersebut berasal dari turunnya investasi pada penyertaan saham sebesar Rp473,46 miliar atau 90,29%

Long-Term Investment

Long-term investment in 2019 reached Rp3.21 trillion, down 0.02% or Rp0.73 trillion compared to 2018 reaching Rp3.21 trillion. The decrease was derived from a decrease in investment in equity participation amounted to Rp.473.46 billion or 90.29%

Tabel Investasi Jangka Panjang (dalam ribuan Rupiah)
Table of Long-term Investment (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Investasi Pada Entitas Asosiasi Investment in Associates	2.757.291.330	2.362.825.278	394.466.052	16,69%
Investasi Pada Penyertaan Saham Investment in Equity Participation	50.906.100	524.362.036	(473.455.936)	(90,29%)
Investasi Pada Surat Utang Investment in Debt Securities	402.826.170	324.550.117	78.276.053	24,12%
Investasi Jangka Panjang Long-term Investment	3.211.023.600	3.211.737.431	(713.831)	(0,02%)

Properti Investasi – Neto

Properti investasi tahun 2019 mencapai Rp357,30 miliar, menurun 5,26% atau Rp19,85 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp377,14 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penambahan akumulasi penyusutan atas properti investasi kategori bangunan fasilitas pelabuhan dan jalan dan bangunan.

Investment Properties - Net

Investment property in 2019 reached Rp357.30 billion, down 5.26% or Rp19.85 billion compared to Rp377.14 billion in 2018. The decrease was due to the addition of accumulated depreciation on investment properties, in the port facilities building category and the road and building category.



Tabel Properti Investasi (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Investment Properties (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Harga Perolehan Acquisition costs				
Tanah Land	45.002.857	45.011.598	(8.741)	(0,02%)
Bangunan Fasilitas Pelabuhan Port buildings	644.034.633	652.779.657	(8.745.024)	(1,34%)
Jalan dan Bangunan Roads and buildings	21.545.378	12.799.354	8.746.024	68,33%
Jumlah Total	710.582.868	710.590.609	(7.741)	0,00%
Akumulasi Penyusutan Accumulated depreciation				
Bangunan Fasilitas Pelabuhan Port buildings	(346.002.520)	(326.645.743)	(19.356.777)	5,93%
Jalan dan Bangunan Roads and buildings	(7.284.861)	(6.802.419)	(482.442)	7,09%
Jumlah Total	(353.287.381)	(333.448.162)	(19.839.219)	5,95%
Nilai Buku Neto Net book value	357.295.487	377.142.447	(19.846.960)	(5,26%)

Aset Tetap – Neto

Aset tetap neto tahun 2018 mencapai Rp13,39 triliun, meningkat 6,00% atau Rp0,76 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp12,63 triliun. Peningkatan tersebut karena penambahan alat fasilitas pelabuhan dan bangunan fasilitas pelabuhan serta kenaikan aset tetap antara lain dari:

1. Induk Perusahaan seperti di Cabang Tanjung Priok sebesar Rp36,93 miliar, Panjang sebesar Rp86,43 miliar dan Banten sebesar Rp88,30 miliar;
2. Peningkatan di Entitas Anak seperti di PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP) sebesar Rp145,74 miliar, PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) sebesar Rp103,44 miliar, dan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) sebesar Rp155,98 miliar, PT Jasa Armada Indonesia (JAI) sebesar Rp119,10 miliar, PT IPC Terminal Peti Kemas (IPC TPK) sebesar Rp38,67 miliar dan PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) sebesar Rp11,62 miliar.

Fixed Assets - Net

Net fixed assets in 2019 amounted to Rp13.39 trillion, an increase of 6.00% or Rp0.76 trillion compared to 2018 amounting to Rp12.63 trillion. The increase was due to the addition of port equipment and port buildings as well as the increase in fixed assets including:

1. Parent entity such as in Tanjung Priok Branch amounting to Rp36.93 billion, Panjang amounting to Rp86.43 billion and Banten amounting to Rp88.30 billion;
2. Increase in subsidiaries such as PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP) by Rp145.74 billion, PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) by Rp103.44 billion, and PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) by Rp155.98 billion, PT Jasa Armada Indonesia (JAI) by Rp119.10 billion, PT IPC Terminal Peti Kemas (IPC TPK) by Rp38.67 billion and PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) by Rp11.62 billion.

Tabel Aset Tetap (dalam ribuan Rupiah)
Table of Fixed Assets (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Harga Perolehan Acquisition costs				
Tanah Land	2.340.910.460	2.253.903.307	87.007.153	3,86%
Bangunan Fasilitas Pelabuhan Port buildings	5.775.710.200	5.666.729.950	108.980.250	1,92%
Kapal Vessels	1.740.326.484	1.694.204.431	46.122.053	2,72%
Alat Fasilitas Pelabuhan Port equipment	2.755.485.620	2.611.900.537	143.585.083	5,50%
Instalasi Fasilitas Pelabuhan Port installation	1.032.093.284	966.492.385	65.600.899	6,79%
Jalan dan Bangunan Roads and buildings	2.085.483.546	1.990.567.548	94.915.998	4,77%
Peralatan Equipment	683.795.880	597.516.344	86.279.536	14,44%
Kendaraan Vehicles	64.460.475	65.026.632	(566.157)	(0,87%)
Emplasemen Emplacement	43.745.952	40.000.139	3.745.813	9,36%
Subtotal Subtotal	16.522.011.901	15.886.341.273	635.670.628	4,00%
Aset Dalam Penyelesaian Construction in progress	1.824.102.142	1.272.325.406	551.776.736	43,37%
Jumlah Total	18.346.114.043	17.158.666.679	1.187.447.364	6,92%
Akumulasi Penyusutan Accumulated depreciation	(4.932.127.216)	(4.501.766.262)	(430.360.954)	9,56%
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Less: Allowance for impairment	(26.830.992)	(27.902.984)	1.071.992	(3,84%)
Nilai Buku Neto Net book value	13.387.155.835	12.628.997.433	758.158.402	6,00%

Aset Kerjasama Operasi – Neto

Aset kerjasama operasi – neto tahun 2019 mencapai Rp461,10 miliar, menurun 4,41% atau Rp21,29 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp482,39 miliar. Penurunan tersebut karena adanya reklasifikasi di tahun 2019.

Joint Operation Assets - Net

Net joint operations assets in 2019 reached Rp461.10 billion, decreased by 4.41% or Rp21.29 billion compared to 2018 reaching Rp482.39 billion. The decrease was due to the reclassification in 2019.



Tabel Aset Kerjasama Operasi (dalam ribuan Rupiah)
Table of Joint Operation Assets (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Harga Perolehan Acquisition costs				
Bangunan Fasilitas Pelabuhan Port buildings	772.669.489	764.725.479	7.944.010	1,04%
Alat Fasilitas Pelabuhan Port equipment	86.424.760	86.424.760	-	0,00%
Instalasi Fasilitas Pelabuhan Port installation	10.504.447	10.504.447	-	0,00%
Jalan dan Bangunan Roads and buildings	602.861	602.861	-	0,00%
Peralatan Equipment	609.224	609.224	-	0,00%
Emplasemen Emplacement	4.530.520	4.530.520	-	0,00%
Jumlah Total	875.341.301	867.397.291	7.944.010	0,92%
Akumulasi Penyusutan Accumulated depreciation	(414.241.200)	(385.007.102)	(29.234.098)	7,59%
Nilai Buku Neto Net book value	461.100.101	482.390.189	(21.290.088)	(4,41%)

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan tahun 2019 mencapai Rp73,87 miliar, meningkat 55,53% atau Rp26,38 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp47,50 miliar. Peningkatan tersebut karena kenaikan aset pajak tangguhan dari Entitas Anak.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets in 2019 amounted to Rp73.87 billion, increased by 55.53% or Rp26.38 billion compared to 2018 amounted to Rp47.50 billion. The increase was due to an increase in deferred tax assets of subsidiaries.

Tabel Aset Pajak Tangguhan (dalam ribuan Rupiah)
Table of Deferred Tax Assets (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets				
Entitas Anak Subsidiaries	73.873.814	47.498.765	26.375.049	55,53%

Aset Takberwujud – Neto

Aset takberwujud tahun 2019 mencapai Rp10,82 triliun, meningkat 19,69% atau Rp1,78 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp9,04 triliun. Peningkatan tersebut terutama atas terealisasinya aktivitas investasi pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat Tahap I sebesar Rp1,46 triliun.

Intangible Assets - Net

Intangible assets in 2019 amounted to Rp10.82 trillion, an increase of 19.69% or Rp1.78 trillion compared to 2018 of Rp9.04 trillion. The increase was mainly due to the realization of investment activities in the development of Phase I of Kijing Port, West Kalimantan amounting to Rp1.46 trillion.

Tabel Aset Takberwujud (dalam ribuan Rupiah)
Table of Intangible Assets (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset Hak Konsesi Concession rights assets	11.073.294.718	9.150.801.841	1.922.492.877	21,01%
Piranti Lunak Software application	369.777.904	284.412.704	85.365.200	30,01%
Aset Takberwujud Lainnya Other intangible assets	25.103.155	25.828.087	(724.932)	-2,81%
Subtotal Subtotal	11.468.175.777	9.461.042.632	2.007.133.145	21,21%
Akumulasi Amortisasi dan Penyisihan Penurunan Nilai Accumulated amortization and allowance for impairment	(649.904.297)	(422.093.488)	(227.810.809)	53,97%
Neto Net	10.818.271.480	9.038.949.144	1.779.322.336	19,69%

Taksiran Tagihan Restitusi Pajak

Taksiran tagihan restitusi pajak tahun 2019 mencapai Rp958,92 miliar, meningkat 13,89% atau Rp116,99 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp841,93 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan restitusi pajak dari Entitas Anak sebesar Rp128,11 miliar.

Estimated Claims For Tax Refund

Estimated claims for tax refund for 2019 reached Rp958.92 billion, an increase of 13.89% or Rp116.99 billion compared to 2018 reaching Rp841.93 billion. The increase came from an increase in tax refunds from subsidiaries amounting to Rp128.11 billion.

Tabel Taksiran Tagihan Restitusi Pajak (dalam ribuan Rupiah)
Table of Estimated Claims for Tax Refund (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan The Company	705.782.779	716.911.819	(11.129.040)	(1,55%)
Entitas Anak Subsidiaries	253.134.375	125.019.748	128.114.627	102,48%
Jumlah Total	958.917.154	841.931.567	116.985.587	13,89%

Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset tidak lancar lainnya tahun 2018 mencapai Rp1,71 triliun, meningkat 584,77% atau Rp1,46 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp0,25 triliun. Hal ini disebabkan terutama karena pencatatan denda pajak atas PPh badan sebesar Rp1,23 triliun yang diakui sebagai aset tidak lancar lainnya dengan pertimbangan proses banding pajak yang saat ini masih berjalan.

Other Non-Current Assets

Other non-current assets in 2019 reached Rp1.71 trillion, an increase of 584.77% or Rp1.46 trillion compared to 2018 reaching Rp0.25 trillion. This was mainly due to the recording of tax penalties for corporate income tax amounting to Rp1.23 trillion which was recognized as other non-current assets, taking into consideration the current tax appeal process.



Tabel Aset Tidak Lancar Lainnya (dalam ribuan Rupiah)
Table of Other Non-Current Assets (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Uang Muka Aset Tetap Fixed assets advances	13.287.219	60.439.650	(47.152.431)	(78,02%)
Pajak Final Dibayar Dimuka Prepaid final tax	1.230.024.963	-	1.230.024.963	100,00%
Piutang Pemulihan Investasi Investment recovery receivables	269.245.974	30.145.691	239.100.283	793,15%
Uang Jaminan Security deposits	45.012.519	47.922.193	(2.909.674)	(6,07%)
Jaminan Pelaksanaan Performance bond	37.082.900	37.000.000	82.900	0,22%
Aset Lain-Lain - Neto Other assets - net	116.546.231	74.386.384	42.159.847	56,68%
Jumlah Total	1.711.199.806	249.893.918	1.461.305.888	584,77%

LIABILITAS

Liabilitas tahun 2019 mencapai Rp33,91 triliun, menurun 3,10% atau Rp1,08 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp35,00 triliun. Hal ini diakibatkan karena penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp0,94 triliun.

LIABILITIES

Liabilities in 2019 amounted to Rp33.91 trillion, decreased by 3.10% or Rp1.08 trillion compared to 2018 of Rp35.00 trillion. This was caused by a decrease in long-term liabilities of Rp0.94 trillion.

Tabel Liabilitas (dalam ribuan Rupiah)
Table of Liabilities (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	5.353.722.601	5.498.194.480	(144.471.879)	(2,63%)
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	28.560.666.356	29.500.226.224	(939.559.868)	(3,18%)
Total Liabilitas Total Liabilities	33.914.388.957	34.998.420.704	(1.084.031.747)	(3,10%)

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas jangka pendek tahun 2019 mencapai Rp5,35 triliun, menurun 2,63% atau Rp144,47 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp5,50 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh:

- Utang usaha pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1,44 triliun atau 13,77% dibawah realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,67 triliun;
- Beban akrual pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp2,27 triliun atau 0,70% dibawah realisasi tahun 2018 sebesar Rp2,29 triliun.

CURRENT LIABILITIES

Current liabilities in 2019 reached Rp5.35 trillion, decreased by 2.63% or Rp144.47 billion compared to 2018 reaching Rp5.50 trillion. This was mainly due to:

- Trade payables in 2019 was realized at Rp1.44 trillion or 13.77% below the 2018 realization of Rp1.67 trillion;
- Accrued expenses in 2019 was realized at Rp2.27 trillion or 0.70% below the realization in 2018 of Rp2.29 trillion.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek (dalam ribuan Rupiah)
Table of Current Liabilities (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pinjaman Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans	34.193.914	4.000.000	30.193.914	754,85%
Utang Usaha Trade payables				
Pihak Ketiga Third Parties	359.929.551	418.899.213	(58.969.662)	(14,08%)
Pihak Berelasi Related Parties	1.076.552.787	1.247.008.500	(170.455.713)	(13,67%)
Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Pendek Short-term Unearned Revenues	845.489.224	834.098.021	11.391.203	1,37%
Utang Pajak Taxes Payable	445.015.994	389.495.675	55.520.319	14,25%
Beban Akrual Accrued Expenses	2.274.726.626	2.290.832.616	(16.105.990)	(0,70%)
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang Current Maturities of Long-Term Liabilities				
Utang Bank Bank Loans	12.000	-	12.000	100,00%
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya - Pihak Berelasi Other Long-Term Liabilities - Related Parties	19.887.737	38.272.280	(18.384.543)	(48,04%)
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Other Current Liabilities				
Pihak Ketiga Third Parties	206.170.895	185.350.553	20.820.342	11,23%
Pihak Berelasi Related Parties	91.743.873	90.237.622	1.506.251	1,67%
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	5.353.722.601	5.498.194.480	(144.471.879)	(2,63%)

Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pinjaman bank jangka pendek tahun 2019 mencapai Rp34,19 miliar, meningkat 754,85% atau Rp30,19 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp4,0 miliar. Hal ini karena adanya pinjaman pihak ketiga dari PT Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp6,00 miliar dan pinjaman pihak berelasi dari PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp28,19 miliar di tahun 2019.

Short-Term Loan Banks

Short-term bank loans in 2019 were Rp34.19 billion, an increase of 754.85% or Rp30.19 billion compared to 2018 of Rp4.0 billion. This was due to a third party loan from PT Bank OCBC NISP Tbk in the amount of Rp6.00 billion and a related party loan from PT Bank Syariah Mandiri in the amount of Rp28.19 billion in 2019.



Tabel Pinjaman Bank Jangka Pendek (dalam ribuan Rupiah)
Table of Short-term Bank Loans (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak Ketiga Third Parties				
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.000.000	-	6.000.000	100,00%
Pihak Berelasi Related Parties				
PT Bank Syariah Mandiri	28.193.914	-	28.193.914	100,00%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	4.000.000	(4.000.000)	(100,00%)
Pinjaman Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans	34.193.914	4.000.000	30.193.914	754,85%

Utang Usaha

Utang usaha tahun 2019 mencapai Rp1,43 triliun, menurun 13,77% atau Rp229,43 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp1,67 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari turunnya utang usaha dari Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp170,46 miliar.

Trade Payables

Trade payables in 2019 reached Rp1.43 trillion, down 13.77% or Rp229.43 billion compared to 2018 of Rp1.67 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in trade payables from State-Owned Enterprises amounting to Rp170.46 billion.

Tabel Utang Usaha Berdasarkan Pemasok (dalam ribuan Rupiah)
Table of Trade Payables by Suppliers (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak Ketiga Third Parties				
Swasta Private	359.929.551	418.899.213	(58.969.662)	(14,08%)
Pihak Berelasi Related Parties				
Badan Usaha Milik Negara State-Owned Enterprises	1.076.552.787	1.247.008.500	(170.455.713)	(13,67%)
Jumlah Total	1.436.482.338	1.665.907.713	(229.425.375)	(13,77%)

Pendapatan Diterima di Muka Jangka Pendek

Pendapatan diterima dimuka jangka pendek tahun 2019 mencapai Rp845,49 miliar, meningkat 1,37% atau Rp11,39 miliar dibandingkan dengan 2018 mencapai Rp834,10 miliar. Saldo ini terutama atas pembayaran *quarterly rent* PT JICT dan KSO Koja.

Short-Term Unearned Revenues

Short-term unearned revenues in 2019 reached Rp845.49 billion, an increase of 1.37% or Rp11.39 billion compared to 2018 reaching Rp834.10 billion. This balance was mainly due to quarterly rent payments of PT JICT and KSO Koja.

Tabel Pendapatan Diterima di Muka Jangka Pendek (dalam ribuan Rupiah)
Table of Short-term Unearned Revenues (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Uang Untuk Diperhitungkan Advances from customers				
Swasta Private	10.697.990	16.658.521	(5.960.531)	(35,78%)
Pihak Berelasi Related Parties	950.251	1.028.107	(77.856)	(7,57%)
Lain-Lain Others	7.132.428	11.283.684	(4.151.256)	(36,79%)
Subtotal Subtotal	18.780.669	28.970.312	(10.189.643)	(35,17%)
Sewa Kuartalan Quarterly rent	520.544.218	555.358.299	(34.814.081)	(6,27%)
Pelayanan Jasa Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik Land, building, water and electricity services	156.088.555	101.043.778	55.044.777	54,48%
Lain-Lain Others	3.078.074	1.727.923	1.350.151	78,14%
Subtotal Subtotal	679.710.847	658.130.000	21.580.847	3,28%
Bagian Lancar Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Panjang Current portion of long-term unearned revenues	146.997.708	146.997.709	(1)	0,00%
Jumlah Total	845.489.224	834.098.021	11.391.203	1,37%

Utang Pajak

Utang pajak tahun 2019 mencapai Rp445,02 miliar, meningkat 14,25% atau Rp55,52 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp389,50 miliar. Hal ini terutama disebabkan atas pembayaran pajak beban pegawai (pph 21), pph 23 atas pekerjaan pemeliharaan, Kerjasama dengan Mitra Usaha (KSMU) dan pajak yang timbul atas pekerjaan investasi pada Perseroan.

Tax Payable

Tax payable in 2019 was Rp445.02 billion, an increase of 14.25% or Rp55.52 billion compared to 2018 amounted to Rp389.50 billion. This was mainly due to tax payments on employee expenses (income tax 21), income tax 23 for maintenance work, Business Partnership (KSMU) and taxes arising from investment work at the Company.

Tabel Utang Pajak (dalam ribuan Rupiah)
Table of Tax Payable (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan The Company	283.276.808	206.429.435	76.847.373	37,23%
Entitas Anak Subsidiaries	161.739.186	183.066.240	(21.327.054)	(11,65%)
Jumlah Total	445.015.994	389.495.675	55.520.319	14,25%



Beban Akruai

Beban akrual tahun 2019 mencapai Rp2,27 triliun, menurun 0,70% atau Rp16,11 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp2,29 triliun. Hal tersebut disebabkan realisasi investasi yang tidak tercapai serta adanya kegiatan *cost effectiveness* oleh Perseroan.

Accrued Expenses

Accrued expenses in 2019 reached Rp2.27 trillion, decreased by 0.70% or Rp16.11 billion compared to 2018 reaching Rp2.29 trillion. This was due to the unachieved realization of investments as well as the cost effectiveness activities by the Company.

Tabel Beban Akruai (dalam ribuan Rupiah)
Table of Accrued Expenses (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Umum General	897.590.232	843.328.993	54.261.239	6,43%
Pegawai Employee	537.340.813	623.923.785	(86.582.972)	(13,88%)
Kerjasama Mitra Usaha Business Partnership	264.259.150	248.805.652	(8.938.097)	(3,27%)
Bunga Interest	159.205.064	163.363.780	(4.158.716)	(2,55%)
Bahan Bakar dan Bahan Habis Pakai Fuels and supplies	103.074.299	80.085.854	22.988.445	28,70%
Pemeliharaan Maintenance	72.828.363	77.873.897	(5.045.534)	(6,48%)
Provisi Atas Pembangunan Aset Pemda DKI Provision for construction of DKI Regional Government assets	39.089.633	39.089.633	-	0,00%
Biaya Konsesi Concession fee	32.077.764	41.676.724	(9.598.960)	(23,03%)
Lain-Lain Others	169.261.308	176.684.298	(7.422.990)	(4,20%)
Jumlah Total	2.274.726.626	2.290.832.616	(16.105.990)	(0,70%)

Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang

Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang tahun 2019 mencapai Rp19,90 miliar, menurun 48,00% atau Rp18,37 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp38,27 miliar. Hal tersebut karena menurunnya liabilitas jangka panjang lainnya pihak berelasi sebesar Rp18,38 miliar.

Current Maturities Of Non-Current Liabilities

Current maturities of of non-current liabilities in 2019 amounted to Rp19.90 billion, a decrease of 48.00% or Rp18.37 billion compared to 2018 amounting to Rp38.27 billion. That was due to the decrease in other non-current liabilities of related parties amounting to Rp18.38 billion.

Tabel Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang (dalam ribuan Rupiah)
Table of Current Maturities of Non-Current Liabilities (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Utang Bank Bank Loans	12.000	-	12.000	100,00%

Tabel Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang (dalam ribuan Rupiah)
Table of Current Maturities of Non-Current Liabilities (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya – Pihak Berelasi Other Non-Current Liabilities - Related Parties	19.887.737	38.272.280	(18.384.543)	(48,04%)
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang Current Maturities of Non-Current Liabilities	19.899.737	38.272.280	(18.372.543)	(48,00%)

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Liabilitas jangka pendek lainnya tahun 2019 mencapai Rp297,92 miliar, meningkat 8,10% atau Rp22,33 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp275,59 miliar. Peningkatan tersebut karena adanya peningkatan liabilitas jangka pendek lainnya dari pihak ketiga sebesar Rp20,82 miliar.

Other Current Liabilities

Other current liabilities in 2019 amounted to Rp297.92 billion, an increase of 8.10% or Rp22.33 billion compared to 2018 amounting to Rp275.59 billion. The increase was due to an increase in other current liabilities from third parties amounting to Rp20.82 billion.

Tabel Liabilitas jangka Pendek Lainnya (dalam ribuan Rupiah)
Table of Other Current Liabilities (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak Ketiga Third Parties	206.170.895	185.350.553	20.820.342	11,23%
Pihak Berelasi Related Parties	91.743.873	90.237.622	1.506.251	1,67%
Jumlah Total	297.914.768	275.588.175	22.326.593	8,10%

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang tahun 2019 mencapai Rp28,56 triliun, menurun 3,18% atau Rp0,94 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp29,50 triliun. Hal ini antara lain disebabkan oleh

1. Utang obligasi tahun 2019 sebesar Rp21,98 triliun atau menurun 3,96% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp22,89 triliun terutama disebabkan penguatan nilai tukar Rupiah terhadap USD;
2. Pendapatan diterima di muka tahun 2019 sebesar Rp4,01 triliun atau menurun 6,65% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp4,29 triliun;
3. Liabilitas pajak tangguhan tahun 2019 sebesar Rp254,29 miliar atau menurun 17,40% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp307,85 miliar.

NON-CURRENT LIABILITIES

Non-current liabilities in 2019 reached Rp28.56 trillion, decreased by 3.18% or Rp0.94 trillion compared to 2018 reaching Rp29.50 trillion. This was due to among others:

1. Bonds payable in 2019 amounted to Rp21.98 trillion or decreased by 3.96% compared to the realization in 2018 of Rp22.89 trillion, mainly due to the strengthening of Rupiah against USD;
2. Unearned revenues in 2019 amounted to Rp4.01 trillion or decreased by 6.65% compared to the realization in 2018 of Rp4.29 trillion;
3. Deferred tax liabilities in 2019 amounted to Rp254.29 billion or decreased by 17.40% compared to the realization in 2018 of Rp307.85 billion.



Tabel Liabilitas Jangka Panjang (dalam ribuan Rupiah)
Table of Non-current Liabilities (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Utang Obligasi Bonds payable	21.984.178.194	22.890.166.969	(905.988.775)	(3,96%)
Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Lancar Non-current Liabilities – Net of Current Maturities				
Utang Bank Bank Loans	114.978.000	-	114.978.000	100,00%
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya Other Non-current Liabilities				
Pihak Ketiga Third Parties	225.013.928	234.402.238	(9.388.310)	(4,01%)
Pihak Berelasi Related Parties	10.250.000	-	10.250.000	100,00%
Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Panjang Long-term Unearned Revenues	4.005.631.257	4.290.892.916	(285.261.659)	(6,65%)
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefit Liabilities	1.966.325.908	1.776.917.294	189.408.614	10,66%
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	254.289.069	307.846.807	(53.557.738)	(17,40%)
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-current Liabilities	28.560.666.356	29.500.226.224	(939.559.868)	(3,18%)

Utang Obligasi

Utang obligasi tahun 2019 mencapai Rp21,98 triliun, menurun 3,96% atau Rp0,91 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp22,89 triliun. Hal ini terutama disebabkan penguatan nilai tukar Rupiah terhadap USD.

Bonds Payable

Bonds payable in 2019 was Rp21.98 trillion, down 3.96% or IDR0.91 trillion compared to 2018 of IDR22.89 trillion. This was mainly due to the strengthening of Rupiah against USD.

Tabel Utang Obligasi (dalam ribuan Rupiah)
Table of Bonds Payable (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015 Senior Notes issued in 2015				
USD1.100.000.000 USD 1,100,000,000	15.291.100.000	15.929.100.000	(638.000.000)	(4,01%)
USD500.000.000 USD500,000,000	6.950.500.000	7.240.500.000	(290.000.000)	(4,01%)
Dikurangi: Less:				
Diskonto Yang Belum Diamortisasi Unamortized discount	(194.965.370)	(210.621.288)	15.655.918	(7,43%)

Tabel Utang Obligasi (dalam ribuan Rupiah)
Table of Bonds Payable (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Biaya Transaksi Yang Belum Diamortisasi Unamortized transaction costs	(62.456.436)	(68.811.743)	6.355.307	(9,24%)
Utang Obligasi - Neto Bonds payable - Net	21.984.178.194	22.890.166.969	(905.988.775)	(3,96%)

Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Lancar
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar tahun 2019 mencapai Rp235,26 miliar, meningkat 0,37% atau Rp0,86 miliar dibandingkan dengan 2018 mencapai Rp234,40 miliar. Hal tersebut karena peningkatan bagian lancar di tahun 2019.

Non-Current Liabilities – Net Of Current Maturities
Non-current liabilities – net of current maturities in 2019 reached Rp235.26 billion, an increase of 0.37% or Rp0.86 billion compared to 2018 reaching Rp234.40 billion. This was due to an increase in current maturities in 2019.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang-Setelah Dikurangi Bagian Lancar (dalam ribuan Rupiah)
Table of Long-term Liabilities – Net of Current Maturities (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak Ketiga Third parties				
Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura	225.013.928	234.402.238	(9.388.310)	(4,01%)
Pihak Berelasi Related parties				
PT Pelabuhan Indonesia III	27.137.737	29.349.280	(2.211.543)	(7,54%)
PT Pelabuhan Indonesia IV	3.000.000	8.923.000	(5.923.000)	(66,38%)
Subtotal Subtotal	30.137.737	38.272.280	(8.134.543)	(21,25%)
Jumlah Total	255.151.665	272.674.518	(17.522.853)	(6,43%)
Bagian Lancar Current portion	(19.887.737)	(38.272.280)	18.384.543	(48,04%)
Bagian Jangka Panjang Non-Current Portion	235.263.928	234.402.238	861.690	0,37%

Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang
Pendapatan diterima dimuka jangka panjang tahun 2019 mencapai Rp4,01 triliun, menurun 6,65% atau Rp285,26 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp4,29 triliun. Hal tersebut diakibatkan karena turunnya sewa tanah dan/atau bangunan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Long-Term Unearned Revenues
Long-term unearned revenues in 2019 amounted to Rp4.01 trillion, a decrease of 6.65% or Rp285.26 billion compared to 2018 amounted to Rp4.29 trillion. This was due to the decrease in land and/or building lease from PT Indofood Sukses Makmur Tbk.



Tabel Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang (dalam ribuan Rupiah)
Table of Long-term Unearned Revenues (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Premium JICT JICT Premium	2.325.614.688	2.444.876.979	(119.262.291)	(4,88%)
Sewa Diterima Di Muka -NPCT1 Advance rental fee - NPCT1	771.175.595	809.528.380	(38.352.785)	(4,74%)
Premium TPK Koja TPK Koja Premium	540.840.625	568.576.042	(27.735.417)	(4,88%)
Sewa tanah dan/atau bangunan Land and/or building rental				
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	276.168.033	517.584.342	(241.416.309)	(46,64%)
PT Jakarta Tank Terminal	34.634.861	34.634.861	-	0,00%
PT Tunas Baru Lampung	23.378.016	23.378.016	-	0,00%
PT Bogasari Sentra Flour Mills	5.978.898	5.978.898	-	0,00%
PT Wilmar Nabati Indonesia	4.488.750	4.488.750	-	0,00%
PT Intiboga Sejahtera	3.772.473	3.772.473	-	0,00%
PT Dok Duasatu Nusantara	3.723.693	3.723.693	-	0,00%
PT Indokarya Internusa	3.467.415	3.467.415	-	0,00%
Lain-Lain Others	159.385.918	17.880.776	141.505.142	791,38%
Jumlah Total	4.152.628.965	4.437.890.625	(285.261.660)	(6,43%)
Bagian Lancar Current portion	(146.997.708)	(146.997.709)	1	0,00%
Total Bagian Jangka Panjang Total non-current portion	4.005.631.257	4.290.892.916	(285.261.659)	(6,65%)

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja tahun 2019 mencapai Rp1,97 triliun, meningkat 10,66% atau Rp189,41 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp1,78 triliun. Hal ini diakibatkan karena pertumbuhan liabilitas imbalan kerja pada perusahaan sebesar Rp123,67 miliar.

Employee Benefit Liabilities

Employee benefit liabilities in 2019 reached Rp1.97 trillion, an increase of 10.66% or Rp189.41 billion compared to 2018 reaching Rp1.78 trillion. This was caused by the growth of employee benefits liabilities at the Company amounting to Rp123.67 billion.

Tabel Liabilitas Imbalan Kerja (dalam ribuan Rupiah)
Table of Employee Benefit Liabilities (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan The Company				
Program Pensiun Pension program	174.365.283	164.769.363	9.595.920	5,82%
Program Penghargaan Masa Bhakti Service Period Award Program	750.788.445	653.641.759	97.146.686	14,86%

Tabel Liabilitas Imbalan Kerja (dalam ribuan Rupiah)
Table of Employee Benefit Liabilities (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Program Kesehatan Pensiunan Pension Health Program	646.466.873	634.268.491	12.198.382	1,92%
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya Other Long-term Employee Benefits	29.042.101	24.291.771	4.750.330	19,56%
Subtotal Sub-Total	1.600.642.702	1.476.971.384	123.671.318	8,37%
Entitas Anak Subsidiaries				
Program Pensiun, Penghargaan Masa Bhakti dan Imbalan Pasca-Kerja Lainnya Pension Program, Masa Bhaktif Award and Other Post-Employee Benefits	365.683.206	299.945.910	65.737.296	21,92%
Jumlah Total	1.966.325.908	1.776.917.294	189.408.614	10,66%

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan tahun 2019 mencapai Rp254,29 miliar, menurun 17,40% atau Rp53,56 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp307,85 miliar. Penurunan tersebut berasal dari penurunan penyisihan imbalan kerja karyawan sebesar Rp30,92 miliar.

Deferred Tax Liabilities

Deferred tax liabilities in 2019 amounted to Rp254.29 billion, a decrease of 17.40% or Rp53.56 billion compared to 2018 amounting to Rp307.85 billion. The decrease was derived from a reduction in provision for employee benefits by Rp30.92 billion.

Tabel Liabilitas Pajak Tangguhan (dalam ribuan Rupiah)
Table of Deferred Tax Liabilities (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan The Company				
Penyusutan Depreciation	(717.067.728)	(687.207.680)	(29.860.048)	4,35%
Amortisasi Amortization	37.017.200	(18.595.544)	55.612.744	(299,06%)
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Provision for impairment of receivables	62.187.817	60.653.106	1.534.711	2,53%
Penyisihan Imbalan Kerja Karyawan Provision for employee benefits	400.160.676	369.242.847	30.917.829	8,37%
Subtotal Subtotal	(217.702.035)	(275.907.271)	58.205.236	(21,10%)
Entitas Anak Subsidiaries	(36.587.034)	(31.939.536)	(4.647.498)	14,55%
Jumlah Total	(254.289.069)	(307.846.807)	53.557.738	(17,40%)



EKUITAS

Ekuitas tahun 2019 mencapai Rp18,13 triliun, meningkat 10,29% atau Rp1,69 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp16,43 triliun. Hal ini terutama akumulasi saldo laba tahun 2019 terealisasi sebesar Rp15,73 triliun (meningkat sebesar Rp1,63 triliun atau 11,77% dibandingkan saldo laba tahun 2018) yang dipengaruhi atas pengakuan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk tahun 2019 sebesar 2,45 triliun serta dikurangi atas pembayaran dividen kepada negara atas laporan keuangan tahun 2018 sesuai Surat kepada Direktur Jenderal Anggaran Nomor: KU.02.04/17/6/2/BEN/KEU/PI.II-19 tanggal 17 September 2019 tentang Pelunasan Dividen Tahun buku 2018 sebesar Rp832,74 miliar dengan dividen *payout ratio* sebesar 35%.

EQUITY

In 2019, equity reached Rp18.13 trillion, an increase of 10.29% or Rp1.69 trillion compared to 2018 reaching Rp16.43 trillion. This was mainly due to the accumulation of 2019 realized profit balances of Rp15.73 trillion (an increase of Rp1.63 trillion or 11.77% compared to the 2018 retained earnings), which was influenced by the recognition of current profit attributable to parent entity in 2019 of 2.45 trillion and deducted from dividend payments to the state on the 2018 financial statements in accordance with the Letter to the Director General of Budget Number: KU.02.04/17/6/2/BEN/KEU/PI.II-19 dated September 17, 2019 concerning Repayment of Dividend of Fiscal Year 2018 amounted to Rp832.74 billion with a dividend payout ratio of 35%.

Tabel Ekuitas (dalam ribuan Rupiah)
Table of Equity (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of Parent Entity				
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1,000,000 (Nilai Penuh) Per Saham Share Capital - Par Value of Rp1,000,000 (Full Amount) Per Share				
Modal Dasar - 4,000,000 Saham Authorized Capital - 4,000,000 Shares				
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh - 1,444,029 Saham Issued and Fully Paid Capital - 1,444,029 Shares	1.444.029.000	1.444.029.000	-	-
Modal Donasi Donated Capital	26.825.982	26.825.982	-	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	(317.597.475)	(317.597.475)	-	-
Saldo Laba Retained Earnings				
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	13.273.514.540	11.726.994.846	1.546.519.694	13,19%
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	2.455.762.802	2.379.261.695	76.501.107	3,22%
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(105.008.860)	(114.597.288)	9.588.428	(8,37%)
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk - Neto Equity Attributable to Owners of Parent Entity - Net	16.777.525.989	15.144.916.760	1.632.609.229	10,78%

Tabel Ekuitas (dalam ribuan Rupiah)
Table of Equity (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interests	1.348.684.789	1.289.539.559	59.145.230	4,59%
Ekuitas – Neto Equity - Net	18.126.210.778	16.434.456.319	1.691.754.459	10,29%

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Table of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan Operasi Operating Revenues	11.141.752.225	11.436.700.894	(294.948.669)	(2,58%)
Pendapatan Konstruksi Construction Revenues	1.542.697.617	781.658.834	761.038.783	97,36%
Beban Operasi Operating Expenses	(8.520.357.673)	(8.042.554.820)	(477.802.853)	5,94%
Beban Konstruksi Construction Expenses	(1.542.697.617)	(781.658.834)	(761.038.783)	97,36%
Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya - Neto Other Operating Income (expenses) - Net	717.114.514	(196.360.574)	913.475.088	(465,20%)
Labanya Usaha Income From Operations	3.338.509.066	3.197.785.500	140.723.566	4,40%
Pendapatan Keuangan Finance Income	836.260.112	688.914.300	147.345.812	21,39%
Beban Keuangan Finance Expenses	(1.200.237.089)	(1.130.782.016)	(69.455.073)	6,14%
Bagian Laba Entitas Asosiasi Equity in Income of Associates	240.568.343	376.200.594	(135.632.251)	(36,05%)
Labanya Sebelum Pajak Final dan Pajak Income Before Final Tax and Corporate Income Tax Penghasilan Badan	3.215.100.432	3.132.118.378	82.982.054	2,65%
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(509.692.491)	(357.113.222)	(152.579.269)	42,73%
Labanya Sebelum Pajak Penghasilan Badan Income Before Corporate Income Tax	2.705.407.941	2.775.005.156	(69.597.215)	(2,51%)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax Benefits (Expenses)				
Kini Current	(259.917.054)	(353.981.768)	94.064.714	(26,57%)
Tangguhan Deferred	58.319.461	9.686.466	48.632.995	502,07%

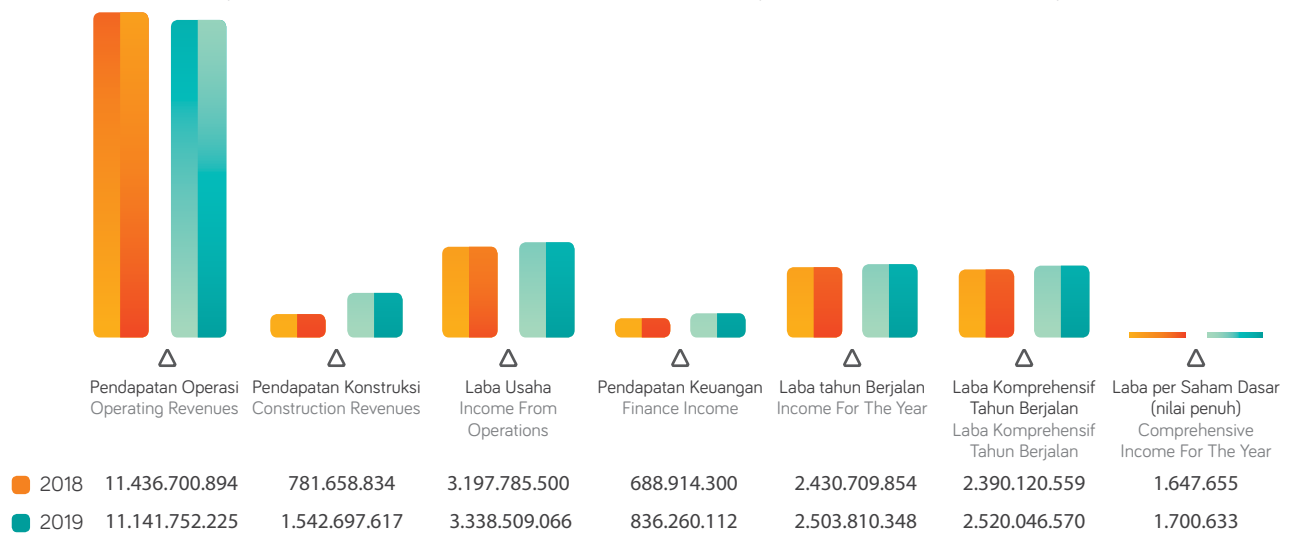


Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)

Table of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Labanya Tahun Berjalan Income For The Year	2.503.810.348	2.430.709.854	73.100.494	3,01%
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Items that will not be reclassified to profit or loss				
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Remeasurement of Defined Benefit Plan	(68.567.665)	32.019.693	(100.587.358)	(314,14%)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Items that will be reclassified to profit or loss				
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Exchange Differences due to Financial Statements Translation	254.857.849	(18.329.765)	273.187.614	(1.490,40%)
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual Changes in Fair Value of Available-for-Sale Financial Assets	(170.053.962)	(54.279.223)	(115.774.739)	213,29%
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income For The Year	2.520.046.570	2.390.120.559	129.926.011	5,44%
Labanya Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Income For The Year Attributable To:				
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	2.455.762.801	2.379.261.695	76.501.106	3,22%
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	48.047.547	51.448.159	(3.400.612)	(6,61%)
Labanya Tahun Berjalan Income For The Year	2.503.810.348	2.430.709.854	73.100.494	3,01%
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Comprehensive Income For The Year Attributable To:				
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	2.473.310.918	2.337.030.239	136.280.679	5,83%
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	46.735.652	53.090.320	(6.354.668)	(11,97%)
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income For The Year	2.520.046.570	2.390.120.559	129.926.011	5,44%
Labanya Per Saham Dasar (Nilai Penuh) Basic Earnings Per Share (Full Amount)	1.700.633	1.647.655	52.978	3,22%

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Graph of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in thousand Rupiah)



PENDAPATAN OPERASI

Pendapatan operasi tahun 2019 mencapai Rp11,14 triliun, menurun 2,58% atau Rp294,95 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp11,44 triliun. Hal tersebut disebabkan:

1. Pendapatan kapal terealisasi Rp1,32 triliun atau turun sebesar 6,66% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,41 triliun terutama disebabkan penurunan kunjungan kapal luar negeri terutama akibat perlambatan ekonomi secara nasional serta dan adanya global/*deficit balance of trade*;
2. Pendapatan barang dan terminal pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp3,37 triliun atau 0,57% dibawah realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3,39 triliun terutama disebabkan penurunan *handling cargo multipurpose* dan turunnya permintaan domestik untuk komoditi gypsum, *klinker* dan batubara. Hal ini sejalan dengan penurunan trafik kapal secara umum pada lingkungan bisnis Perseroan;
3. Pendapatan terminal petikemas terealisasi sebesar Rp2,60 triliun atau menurun sebesar 3,80% dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp2,70 triliun terutama disebabkan perlambatan ekonomi yang dipengaruhi oleh global/*deficit balance of trade* serta adanya perpindahan pelayaran ICON dari terminal petikemas ke DUKS sehingga berdampak pada hilangnya *throughput* petikemas sebesar 30.000 TEUs;
4. Pendapatan TBAL tahun 2019 terealisasi sebesar Rp2,85 triliun atau 0,71% dibawah realisasi tahun 2018 sebesar Rp2,87 triliun terutama disebabkan penurunan pendapatan air kapal 23,89% akibat menurunnya trafik kapal yang berkunjung di pelabuhan Perseroan, dan belum optimalnya penggunaan lahan khususnya pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2019 were recorded at Rp11.14 trillion, an decrease of 2.58% or Rp294.95 billion compared to 2018 at Rp11.44 trillion. This was due to:

1. Ship revenues were realized at Rp1.32 trillion or decreased by 6.66% from 2018 realization of Rp1.41 trillion, mainly driven by a decrease in international ship calls due to to the national economic slowdown and the global/*deficit balance of trade*;
2. Cargo and terminal revenues in 2019 were realized at Rp3.37 trillion or 0.57% below the previous year's realization of Rp3.39 trillion, mainly due to a decrease in multipurpose handling cargo and a decrease in domestic demand for gypsum, clinker and coal commodities. This was in line with the general decline in ship traffic in the Company's business environment;
3. Container terminal revenues were realized at Rp2.60 trillion or decreased by 3.80% compared to 2018 realization of Rp2.70 trillion, mainly due to the economic slowdown which was affected by the global/*deficit balance of trade* and ICON shipping movement from container terminals to DUKS that was resulting in the loss of container throughput of 30,000 TEUs;
4. TBAL revenues in 2019 were realized at Rp2.85 trillion or 0.71% below the realization in 2018 of Rp2.87 trillion, mainly due to a decrease in vessel water revenues of 23.89% due to the decline in vessel traffic visiting the Company's ports, unoptimal use of land specifically Tanjung Priok port and Panjang port, and the strengthening of Rupiah exchange



Panjang serta penguatan kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (2019: Rp13.901/USD; 2018: Rp14.481 /USD) yang berdampak pada penerimaan *rental fee* dari JICT, KSO TPK KOJA, dan NPCT1.

rate against US Dollar (2019: Rp13,901/USD; 2018: Rp14,481/USD), which has an impact on the rental fees from JICT, KSO TPK KOJA, and NPCT1.

Tabel Pendapatan Operasi (dalam ribuan Rupiah)
Table of Operating Revenues (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pelayanan Jasa Terminal Terminal services	3.267.617.624	3.242.900.495	24.717.129	0,76%
Pelayanan Terminal Petikemas Container services	2.603.524.300	2.706.288.702	(102.764.402)	(3,80%)
Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik Land, building, water and electricity business	2.852.740.624	2.873.048.549	(20.307.925)	(0,71%)
Pelayanan Jasa Kapal Vessel services	1.322.240.654	1.416.634.965	(94.394.311)	(6,66%)
Jasa Logistik Logistic services	385.563.738	314.494.106	71.069.632	22,60%
Pelayanan Kesehatan Medical services	271.456.635	264.847.834	6.608.801	2,50%
Pelayanan Jaringan dan Konsultasi Sistem Informasi Network services and information system consulting	126.790.040	137.146.663	(10.356.623)	(7,55%)
Pendapatan Pas Pelabuhan Port entry fee	109.219.182	86.651.881	22.567.301	26,04%
Pelayanan Jasa Barang Cargo services	107.220.693	151.122.002	(43.901.309)	(29,05%)
Pengusahaan Peralatan Equipment services	66.735.164	98.587.873	(31.852.709)	(32,31%)
Pendapatan Kebersihan Cleaning services	8.817.006	12.403.493	(3.586.487)	(28,92%)
Jasa Keuangan Financial services	6.387.167	111.746.400	(105.359.233)	(94,28%)
Lain-Lain Others	13.439.398	20.827.931	(7.388.533)	(35,47%)
Jumlah Total	11.141.752.225	11.436.700.894	(294.948.669)	(2,58%)

PENDAPATAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi tahun 2018 mencapai Rp1,54 triliun, meningkat 97,36% atau Rp761,04 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp781,66 miliar. Peningkatan tersebut karena adanya pembangunan Terminal Kalibaru dan Pelabuhan Kijing.

CONSTRUCTION REVENUES

Construction revenues in 2019 reached Rp1.54 trillion, an increase of 97.36% or Rp761.04 billion compared to 2018 reaching Rp781.66 billion. The increase was due to the construction of Kalibaru Terminals and Kijing Port.

Tabel Pendapatan Konstruksi (dalam ribuan Rupiah)
Table of Construction Revenues (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan Konstruksi Construction Revenue	1.542.697.617	781.658.834	761.038.783	97,36%

BEBAN OPERASI

Beban operasi tahun 2019 mencapai Rp8,52 triliun, meningkat 5,94% atau Rp477,80 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp8,04 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan:

1. Beban pegawai terealisasi sebesar Rp2,64 triliun atau 12,06% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp2,36 triliun terutama disebabkan penyesuaian penghasilan merit dan pajak penghasilan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019. Sebagai Informasi, pada tahun 2019 terdapat rekrutmen pegawai baru di lingkungan Perseroan, yaitu 66 orang alih daya dari pegawai *non-organik* menjadi pegawai organik, 44 orang dari program *fresh graduate*, serta 18 orang pandu;
2. Beban asuransi terealisasi sebesar Rp64,90 miliar atau 22,85% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp52,83 miliar terutama disebabkan atas pembayaran kenaikan premi asuransi aset tetap kapal JAI sekitar 30% dan kapal milik Rukindo SB 101 dan TK RKD 1001 serta asuransi tenaga kerja yang ditugaskan di Entitas Anak;
3. Beban administrasi kantor terealisasi sebesar Rp104,29 miliar atau 5,42% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp98,93 miliar terutama dipengaruhi peningkatan penggunaan ruangan dan peralatan rapat;
4. Beban umum terealisasi sebesar Rp1,21 triliun atau 15,38% di atas realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,05 triliun terutama disebabkan realisasi beban konsultan lebih tinggi 15,29% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sejalan dengan serapan investasi yang lebih tinggi di tahun 2019.

OPERATING EXPENSES

Operating expenses in 2019 amounted to Rp8.52 trillion, an increase of 5.94% or Rp477.80 billion compared to 2018 amounted to Rp8.04 trillion. The increase was mainly due to:

1. Employee expenses were realized at Rp2.64 trillion or 12.06% above 2018 realization of Rp2.36 trillion, mainly due to adjustments in merit income and income tax starting from January 1, 2019. As an information, in 2019 there was recruitment of new employees in the Company's environment, namely 66 outsourced employees from non-organic employees to organic employees, 44 persons from fresh graduate program, and 18 pilotage;
2. Insurance expenses were realized at Rp64.90 billion or 22.85% above the realization in 2018 of Rp52.83 billion, mainly due to payment of an increase in insurance premiums for JAI vessel of around 30% and vessel owned by Rukindo SB 101 and TK RKD 1001 and insurance for employees assigned to a subsidiary;
3. Office administrative expenses were realized at Rp104.29 billion or 5.42% above the realization in 2018 of Rp98.93 billion, mainly due to the increased use of meeting rooms and equipment;
4. General expenses were realized at Rp1.21 trillion or 15.38% above the realization of 2018 amounting to Rp1.05 trillion, mainly due to the 15.29% higher realization of consultant expenses compared to the realization in 2018, in line with higher investment absorption in 2019.

Tabel Beban Operasi (dalam ribuan Rupiah)
Table of Operating Expenses (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pegawai Employee	2.639.837.009	2.355.638.314	284.198.695	12,06%



Tabel Beban Operasi (dalam ribuan Rupiah)
Table of Operating Expenses (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kerja Sama Mitra Usaha Partnership	2.568.723.277	2.561.594.144	7.129.133	0,28%
Umum General	1.211.702.460	1.050.157.293	161.545.167	15,38%
Bahan Bakar dan Bahan Habis Pakai Fuels and supplies	897.934.623	884.189.512	13.745.111	1,55%
Penyusutan dan Amortisasi Depreciation and amortization	863.705.620	773.359.280	90.346.340	11,68%
Pemeliharaan Maintenance	168.627.849	265.089.798	(96.461.949)	(36,39%)
Administrasi Kantor Office administration	104.292.888	98.934.022	5.358.866	5,42%
Asuransi Insurance	64.907.607	52.834.385	12.073.222	22,85%
Lain-Lain Others	626.340	758.072	(131.732)	(17,38%)
Jumlah Total	8.520.357.673	8.042.554.820	477.802.853	5,94%

BEBAN KONSTRUKSI

Beban konstruksi tahun 2019 mencapai Rp1,54 triliun, meningkat 97,36% atau Rp761,04 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp781,66 miliar. Peningkatan beban sejalan dengan adanya aktivitas konstruksi dalam pembangunan Terminal Kalibaru dan Pelabuhan Kijing.

CONSTRUCTION EXPENSES

In 2019, construction expenses were Rp1.54 trillion, increased by 97.36% or Rp761.04 billion compared to 2018 of Rp781.66 billion. The increase in expenses was in line with the construction activities in Kalibaru Terminals and Kijing Port construction.

Tabel Beban Konstruksi (dalam ribuan Rupiah)
Table of Construction Expenses (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban Konstruksi Construction Expenses	(1.542.697.617)	(781.658.834)	(761.038.783)	97,36%

PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA - NETO

Pendapatan operasi lainnya tahun 2018 mencapai Rp717,11 miliar, menurun 465,20% atau Rp913,48 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai (Rp196,36) miliar. Hal tersebut karena biaya operasi lainnya konsolidasian terealisasi sebesar Rp302,38 miliar atau 35,43% dibawah realisasi tahun 2019 sebesar Rp468,28 miliar.

OTHER OPERATING REVENUES (EXPENSES) - NET

Other operating revenues in 2019 reached Rp717.11 billion, decreased by 465.20% or Rp913.48 billion compared to 2018 reaching (Rp196.36) billion. This was because other consolidated operating expenses were realized at Rp302.38 billion or 35.43% below the realization in 2019 of Rp468.28 billion.

Tabel Pendapatan Operasi Lainnya (dalam ribuan Rupiah)
Table of Other Operating Revenues (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Neto Gain (loss) on foreign exchange - net	322.213.993	(672.041.473)	994.255.466	(147,95%)
Amortisasi Premium Amortization of premium	146.997.708	146.997.708	-	0,00%
Pendapatan Atas Pengalihan Aset Income from assets transfer	67.101.548	535.961.600	(468.860.052)	(87,48%)
Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap Gain (loss) on sale of fixed assets	45.882.184	6.546.554	39.335.630	600,86%
Pendapatan Denda Income from penalties	20.716.447	58.039.661	(37.323.214)	(64,31%)
Beban Pajak Penghasilan Final Final income tax expense	(144.760.388)	(121.554.898)	(23.205.490)	19,09%
Beban Denda Expenses from penalties	(105.916.793)	(219.167.681)	113.250.888	(51,67%)
Lain-Lain - Neto Others - net	364.879.815	68.857.955	296.021.860	429,90%
Jumlah Total	717.114.514	(196.360.574)	913.475.088	(465,20%)

LABA USAHA

Laba usaha tahun 2019 mencapai Rp3,34 triliun, meningkat 4,40% atau Rp140,72 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp3,20 triliun. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan pendapatan konstruksi sebesar Rp761,04 miliar dan pendapatan operasi lainnya-neto sebesar Rp913,48 miliar.

INCOME FROM OPERATIONS

In 2019, income from operations was recorded at Rp3.34 trillion, an increase of 4.40% or Rp140.72 billion compared to 2018 at Rp3.20 trillion. This was caused by the growth in construction revenues of Rp761.04 billion and other operating revenues-net of Rp913.48 billion.

Tabel Laba Usaha (dalam ribuan Rupiah)
Table of Income from Operations (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan Operasi Operating Revenues	11.141.752.225	11.436.700.894	(294.948.669)	(2,58%)
Pendapatan Konstruksi Construction Revenues	1.542.697.617	781.658.834	761.038.783	97,36%
Beban Operasi Operating Expenses	(8.520.357.673)	(8.042.554.820)	(477.802.853)	5,94%
Beban Konstruksi Construction Expenses	(1.542.697.617)	(781.658.834)	(761.038.783)	97,36%
Pendapatan Operasi Lainnya - Neto Other Operating Income - Net	717.114.514	(196.360.574)	913.475.088	(465,20%)
Labanya Usaha Income from Operations	3.338.509.066	3.197.785.500	140.723.566	4,40%



PENDAPATAN KEUANGAN

Pendapatan keuangan tahun 2019 mencapai Rp836,26 miliar, meningkat 21,39% atau Rp147,35 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp688,91 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan pengelolaan atas penempatan dana deposito oleh kantor pusat maupun oleh Entitas Anak.

FINANCE INCOME

Finance income in 2019 reached Rp836.26 billion, an increase of 21.39% or Rp147.35 billion compared to 2018 reaching Rp688.91 billion. The increase was mainly due to the management of the placement of deposit funds by the head office and subsidiaries.

Tabel Pendapatan Keuangan (dalam ribuan Rupiah)

Table of Finance Income (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan Bunga Deposito Interest income from deposits	771.045.247	580.413.469	190.631.778	32,84%
Pendapatan Jasa Giro Interest income on current account	65.214.865	108.500.831	(43.285.966)	(39,89%)
Jumlah Total	836.260.112	688.914.300	147.345.812	21,39%

BEBAN KEUANGAN

Beban keuangan tahun 2019 mencapai Rp1,20 triliun, meningkat 6,14% atau Rp69,46 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp1,13 triliun triliun. Hal ini disebabkan rendahnya serapan investasi, yaitu sebesar Rp3,43 triliun dari yang dianggarkan pada RKAP tahun 2019 sebesar Rp11,99 triliun sehingga beban bunga yang dapat dikapitalisasi lebih rendah dari yang dianggarkan dan pada akhirnya beban keuangan menjadi lebih tinggi. Di samping itu, tidak terealisasinya *hedging* juga menjadi penyebab tingginya beban keuangan.

FINANCE EXPENSES

Finance expenses in 2019 were Rp1.20 trillion, an increase of 6.14% or Rp69.46 billion compared to 2018 of Rp1.13 trillion trillion. This was due to the low investment absorption, in the amount of Rp3.43 trillion from the budgeted RKAP in 2019 of Rp11.99 trillion, hence the interest expense that can be capitalized was lower than budgeted and ultimately the finance expenses became higher. In addition, the unrealized hedging was also a cause of high finance expenses.

Tabel Beban Keuangan (dalam ribuan Rupiah)

Table of Finance Expenses (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban Bunga dan Amortisasi Diskonto dan Biaya Transaksi Interest expenses and amortization of discount and transaction cost	1.197.098.875	1.128.468.251	68.630.624	6,08%
Beban Administrasi Administration expenses	3.138.214	2.313.765	824.449	35,63%
Jumlah Total	1.200.237.089	1.130.782.016	69.455.073	6,14%

BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI

Bagian laba entitas asosiasi tahun 2019 mencapai Rp240,57 miliar, menurun 36,05% atau Rp135,63 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp376,20 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari turunnya bagian laba entitas asosiasi NPCT1 sebesar Rp70,94 miliar.

EQUITY IN INCOME OF ASSOCIATES

Equity in income of associates in 2019 was recorded at Rp240.57 billion, decreased by 36.05% or Rp135.63 billion compared to 2018 of Rp376.20 billion. The decrease was mainly due to a decrease in equity in income of associate NPCT1 by Rp70.94 billion.

Tabel Bagian Laba Entitas Asosiasi (dalam ribuan Rupiah)
Table of Equity in Income of Associates (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
JICT	138.210.596	202.616.584	(64.405.988)	(31,79%)
NPCT1	101.023.133	171.964.086	(70.940.953)	(41,25%)
CTP (dahulu MTDX) CTP (previously MTDX)	1.894.058	2.857.275	(963.217)	(33,71%)
TPI	(559.444)	(1.237.352)	677.908	(54,79%)
Jumlah Total	240.568.343	376.200.593	(135.632.250)	(36,05%)

LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan tahun 2019 mencapai Rp3,22 triliun, meningkat 2,65% atau Rp82,98 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp3,13 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan laba usaha sebesar Rp140,72 miliar dan pendapatan keuangan sebesar Rp147,35 miliar.

INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX

Income before final tax and corporate income tax in 2019 reached Rp3.22 trillion, an increase of 2.65% or Rp82.98 billion compared to 2018 reaching Rp3.13 trillion. The increase came from an increase in income from operations of Rp140.72 billion and finance revenues of Rp147.35 billion.

Tabel Laba Sebelum pajak Final dan Pajak Penghasilan (dalam ribuan Rupiah)
Table of Income before Final Tax and Corporate Income Tax (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba Usaha Income from Operations	3.338.509.066	3.197.785.500	140.723.566	4,40%
Pendapatan Keuangan Finance Revenues	836.260.112	688.914.300	147.345.812	21,39%
Beban Keuangan Finance Expenses	(1.200.237.089)	(1.130.782.016)	(69.455.073)	6,14%
Bagian Laba Entitas Asosiasi Equity in Income of Associates	240.568.343	376.200.594	(135.632.251)	(36,05%)
Jumlah Total	3.215.100.432	3.132.118.378	82.982.054	2,65%



LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN

Laba sebelum pajak penghasilan badan tahun 2019 mencapai Rp2,71 triliun, menurun 2,51% atau Rp69,60 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp2,78 triliun. Hal tersebut karena kenaikan beban pajak final sebesar Rp152,58 miliar.

INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX

Income before corporate income tax in 2019 reached Rp2.71 trillion, down 2.51% or Rp69.60 billion compared to 2018 reaching Rp2.78 trillion. This was due to an increase in the final tax expenses of Rp152.58 billion.

Tabel Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan (dalam ribuan Rupiah)

Table of Income before Corporate Income Tax (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan Income Before Final Tax and Corporate Income Tax	3.215.100.432	3.132.118.378	82.982.054	2,65%
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	(509.692.491)	(357.113.222)	(152.579.269)	42,73%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Income before Corporate Income Tax	2.705.407.941	2.775.005.156	(69.597.215)	(2,51%)

LABA TAHUN BERJALAN

Laba tahun berjalan pada tahun 2019 mencapai Rp2,50 triliun, meningkat 3,01% atau Rp73,10 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp2,43 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan pendapatan konstruksi sebesar Rp761,04 miliar dan pendapatan operasi lainnya-neto sebesar Rp913,48 miliar.

INCOME FOR THE YEAR

Income for the year 2019 reached Rp2.50 trillion, an increase of 3.01% or Rp73.10 billion compared to 2018 of Rp2.43 trillion. The increase was in line with the increase in construction revenues by Rp761.04 billion and other operating income-net by Rp913.48 billion.

Tabel Laba Tahun Berjalan (dalam ribuan Rupiah)

Table of Income for the Year (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Income Before Corporate Income Tax	2.705.407.941	2.775.005.156	(69.597.215)	(2,51%)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax Benefits (Expenses)				
Kini Current	(259.917.054)	(353.981.768)	94.064.714	(26,57%)
Tangguhan Deferred	58.319.461	9.686.466	48.632.995	502,07%
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	2.503.810.348	2.430.709.854	73.100.494	3,01%

Adapun laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2019 mencapai Rp2,46 triliun, meningkat 3,22% atau Rp76,50 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp2,38 triliun. Sedangkan laba tahun

Profit for the year 2019 attributable to the owners of parent entity amounted to Rp2.46 trillion, an increase of 3.22% or Rp76.50 billion compared to 2018 amounted to Rp2.38 trillion. While profit for the year 2019 attributable to the non-controlling

berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali pada tahun 2019 mencapai Rp48,05 miliar, menurun 6,61% atau Rp3,40 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp51,45 miliar.

interests amounted to Rp48.05 billion, a decrease of 6.61% or Rp3.40 billion compared to 2018 amounted to Rp51.45 billion.

Tabel Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan (dalam ribuan Rupiah)
Table of Attributable Income for the Year (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pemilik entitas induk Owners of parent entity	2.455.762.801	2.379.261.695	76.501.106	3,22%
Kepentingan nonpengendali Non-controlling interests	48.047.547	51.448.159	(3.400.612)	(6,61%)
Labanya Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Attributable Income for the Year	2.503.810.348	2.430.709.854	73.100.494	3,01%

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Penghasilan komprehensif lain tahun 2019 mencapai Rp16,24 miliar, menurun 140,00% dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai (Rp40,59) miliar. Penurunan tersebut berasal dari turunnya pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dari pengukuran kembali program imbalan pasti.

OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Other comprehensive income in 2019 was Rp16.24 billion, down 140.00% compared to 2018 of (Rp40.59) billion. The decrease was derived from the decrease in items that will not be reclassified to profit or loss from the remeasurement of defined benefit plan.

Tabel Penghasilan Komprehensif Lain (dalam ribuan Rupiah)
Table of Other Comprehensive Income (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Items that will not be reclassified to profit or loss				
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Remeasurement of Defined Benefit Plans	(68.567.665)	32.019.693	(100.587.358)	(314,14%)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Items that will be reclassified to profit or loss				
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Exchange Difference due to Financial Statements Translation	254.857.849	(18.329.765)	273.187.614	(1.490,40%)
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual Changes in Fair Value of Available-for-sale Financial Assets	(170.053.962)	(54.279.223)	(115.774.739)	213,29%
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	16.236.222	(40.589.295)	56.825.517	(140,00%)



LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Laba komprehensif tahun berjalan tahun 2019 mencapai Rp2,52 triliun, meningkat 5,44% atau Rp129,93 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp2,39 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan laba tahun berjalan sebesar 3,01%

COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Comprehensive income for the year 2019 reached Rp2.52 trillion, an increase of 5.44% or Rp129.93 billion compared to 2018 reaching Rp2.39 trillion. This increase was in line with the increase in profit for the year of 3.01%.

Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan (dalam ribuan Rupiah)
Table of Comprehensive Income for the Year (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	2.503.810.348	2.430.709.854	73.100.494	3,01%
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	16.236.222	(40.589.295)	56.825.517	(140,00%)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	2.520.046.570	2.390.120.559	129.926.011	5,44%

Adapun laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2019 mencapai Rp2,47 triliun, meningkat 5,83% atau Rp136,28 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp2,34 triliun. Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali pada tahun 2019 mencapai Rp46,74 miliar, menurun 11,97% atau Rp6,35 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp53,09 miliar.

Comprehensive income for the year attributable to the owners of parent entity in 2019 amounted to Rp2.47 trillion, increased by 5.83% or Rp136.28 billion compared to 2018 of Rp2.34 trillion. While comprehensive income for the year attributable to the non-controlling interests in 2019 amounted to Rp46.74 billion, decreased by 11.97% atau Rp6.35 billion compared to 2018 of Rp53.09 billion.

Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan Yang Diatribusikan (dalam ribuan Rupiah)
Table of Attributable Comprehensive Income for the Year (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	2.473.310.918	2.337.030.239	136.280.679	5,83%
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	46.735.652	53.090.320	(6.354.668)	(11,97%)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Yang Diatribusikan Attributable Comprehensive Income for the Year	2.520.046.570	2.390.120.559	129.926.011	5,44%

LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun berjalan. Laba bersih per saham dasar tahun 2019 mencapai Rp1.700.633

BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share are calculated based on the weighted average number of shares outstanding during the year. Basic earnings per share in 2019 reached Rp1,700,633, an increase

meningkat 3,22% atau Rp52.978 dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp1.647.655. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan laba tahun berjalan.

of 3.22% or Rp52,978 compared to 2018 reaching Rp1,647,655. This increase was in line with the increase in profit for the year.

Tabel Laba Per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)
Table of Basic Earnings Per Share (in full Rupiah)

Uraian Description	2018	2017	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba Per Saham Dasar Basic Earnings per Share	1.700.633	1.647.655	52.978	3,22%

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

Dengan arus kas operasi yang kuat, Perseroan memiliki posisi solid untuk tumbuh di masa depan. Hal tersebut tercermin dalam pengungkapan dalam arus kas sebagai berikut.

With strong operational cash flows, the Company has a solid position for future growth. This is reflected in the following disclosures of cash flows.

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Table of Consolidated Statement of Cash Flows (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Cash Flows From Operating Activities				
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Receipt from Customers	11.677.175.952	10.414.180.403	1.262.995.549	12,13%
Pembayaran Kepada Kontraktor, Pemasok dan Lainnya Payment to Contractors, Suppliers and Others	(5.642.396.334)	(4.849.497.861)	(792.898.473)	16,35%
Pembayaran Kepada Karyawan Payment to Employees	(2.609.390.364)	(2.324.087.858)	(285.302.506)	12,28%
Pembayaran Pajak Penghasilan Payment for Income Tax	(1.995.196.071)	(541.932.045)	(1.453.264.026)	268,16%
Penghasilan Bunga Interests received	719.435.193	604.025.265	115.409.928	19,11%
Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan Lainnya Payment of Interest and Other Financial Charges	(1.025.736.701)	(1.064.789.688)	39.052.987	(3,67%)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	1.123.891.675	2.237.898.216	(1.114.006.541)	(49,78%)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Cash Flows From Investing Activities				
Penerimaan Dividen Receipt of Dividend	281.858.622	272.747.364	9.111.258	3,34%
Laba Penjualan Aset Tetap Profit of Fixed Asset Sales	80.629.851	5.442.459	75.187.392	1381,50%
Perolehan Aset Tetap dan Aset Takberwujud Acquisition of Fixed Assets and Intangible Assets	(3.312.163.703)	(1.984.667.658)	(1.327.496.045)	66,89%



Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Table of Consolidated Statement of Cash Flows (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penerimaan Investasi Jangka Pendek Receipt of Short-term Investments	1.239.306.163	3.163.075.409	(1.923.769.246)	(60,82%)
Penerimaan Sewa Di Muka Receipt of Advance Rental Fee	124.255.688	318.174.500	(193.918.812)	(60,95%)
Penempatan Investasi Saham Placement of Investment in Shares	(787.067.050)	(327.615.532)	(459.451.518)	140,24%
Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Investasi Net Cash (Used in) Provided by Investing Activities	(2.373.180.429)	1.447.156.542	(3.820.336.971)	(263,99%)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows From Financing Activities				
Pembayaran Pinjaman Bank Keuangan Lainnya Payment of Bank Loans and Other Financial Institution	145.183.914	2.139.397	143.044.517	6.686,21%
Pembayaran Dividen Payment of Dividend	(832.742.000)	(653.968.052)	(178.773.948)	27,34%
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Used in Financing Activities	(687.558.086)	(651.828.655)	(35.729.431)	5,48%
Dampak Perubahan Selisih Kurs Terhadap Kas Dan Setara Kas Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	(478.291.310)	778.115.044	(1.256.406.354)	(161,47%)
Penurunan Neto Kas Dan Setara Kas NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	(2.415.138.150)	3.811.341.147	(6.226.479.297)	(163,37%)
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR	18.018.671.479	14.207.330.332	3.811.341.147	26,83%
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR	15.603.533.329	18.018.671.479	(2.415.138.150)	(13,40%)

Grafik Laporan Arus Kas Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Graph of Consolidated Statement of Cash Flows (in thousand Rupiah)



ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2019 mencapai Rp1,12 triliun, menurun sebesar Rp1,11 triliun atau 49,78% dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp2,24 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Peningkatan pembayaran kepada pihak ketiga sejalan dengan kenaikan beban operasi terutama beban KSMU (di luar beban pegawai dan penyusutan);
2. Peningkatan pembayaran pajak seiring dengan meningkatnya kegiatan investasi dan pengadaan barang/jasa di Induk dan Entitas Anak, serta kenaikan remunerasi pegawai terkait dengan pembayaran pokok dan denda administrasi PPH badan tahun 2015 sebesar Rp1,23 triliun;
3. Peningkatan pembayaran kepada pegawai sejalan dengan kenaikan remunerasi pegawai.

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

In 2019, net cash provided by operating activities amounted to Rp1.12 trillion, decreased by Rp1.11 trillion or 49.78% compared to 2018 of Rp2.24 trillion. This was caused by:

1. Increased payments to third parties, which were in line with the increase in operating expenses, especially KSMU expenses (excluding employee expenses and depreciation);
2. Increased tax payments, which were in line with an increase in investment activities and procurement of goods/services in the Parent Company and Subsidiaries, as well as an increase in employee remuneration related to principal payments and administrative penalties for the 2015 corporate income tax amounting to Rp1.23 trillion;
3. Increased payments to employees, which were in line with an increase in employee remuneration.



ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2019 mencapai Rp2,37 triliun, turun sebesar Rp3,82 triliun atau 263,99% dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp1,44 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Pengeluaran untuk pemerolehan aset tetap dan aset takberwujud tahun 2019 sebesar Rp3,31 triliun atau 66,89% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018. Hal tersebut sejalan dengan terealisasinya investasi Pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat, investasi pembangunan Pelabuhan Kalibaru dan investasi-investasi lain di Cabang dan Entitas Anak lebih besar dibandingkan realisasi investasi tahun 2018. Hal lainnya disebabkan menurunnya penempatan deposito tahun 2019 sejalan dengan kebutuhan aktivitas investasi;
2. Penerimaan (penempatan) investasi jangka pendek terealisasi sebesar Rp1,24 triliun atau 60,82% lebih rendah dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp3,16 triliun;
3. Penerimaan (penempatan) investasi saham terealisasi sebesar (Rp787,07) miliar atau 140,24% di bawah realisasi tahun 2018 sebesar Rp327,62 miliar.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2019 mencapai Rp687,56 miliar meningkat sebesar Rp35,73 miliar atau 5,48% dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp651,83 miliar. Realisasi tersebut diantaranya disebabkan oleh pembayaran dividen tahun 2019 sebesar Rp832,74 miliar atas laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2018 sebesar Rp2,38 triliun atau 27,34% lebih tinggi dari pembayaran dividen tahun 2018 sebesar Rp653,97 miliar. Hal ini disebabkan meningkatnya Dividen Payout Ratio menjadi 35% dari periode tahun sebelumnya yang hanya sebesar 30%.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi hak-hak kreditor dengan melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunganya secara tepat waktu. Kemampuan IPC dalam memenuhi kewajibannya dapat dilihat dari sejumlah indikator, misalnya: kondisi keuangan jangka pendek, kondisi keuangan jangka panjang, rasio aktivitas dan rasio hasil usaha.

Indikator-indikator tersebut hingga tahun 2019 masih sangat memadai. Misalnya, *current* ratio yang merupakan perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek masih 446,59%.

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Net cash used in investing activities in 2019 reached Rp2.37 trillion, decreased by Rp3.82 trillion or 263.99% compared to 2018 reaching Rp1.44 trillion. This was caused by:

1. Expenses for acquiring fixed assets and intangible assets in 2019 amounted to Rp3.31 trillion or 66.89% higher compared to 2018. This was in line with higher realization of investment in the development of Kijing Port, West Kalimantan, investment in the development of Kalibaru Port and other investments in Branches and subsidiaries than the realization of investment in 2018. Other cause was the decrease in placement of deposits in 2019 in line with the needs of investment activities;
2. Receipt (placement) of short-term investments was realized at Rp1.24 trillion or 60.82% lower than the realization in 2018 of Rp3.16 trillion;
3. Receipt (placement) of investment in shares was realized at (Rp787.07) billion or 140.24% below the realization of 2018 of Rp327.62 billion.

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Net cash used for funding activities in 2019 reached Rp687.56 billion, an increase of Rp35.73 billion or 5.48% compared to Rp651.83 billion in 2018. The realization was due to the payment of dividends in 2019 of Rp832.74 billion over the current year's profits attributable to owners of Parent Entity 2018 of Rp2.38 trillion or 27.34% higher than 2018 dividend payments of Rp653.97 billion. This is due to the increase in Dividend Payout Ratio to 35% from the previous period which was only 30%.

ABILITY TO PAY DEBT AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY

ABILITY TO PAY DEBT

The Company is always committed to fulfilling the creditors' rights by paying the loan principal and interest in a timely manner. IPC's ability to meet its liabilities can be seen from a number of indicators, for example: short-term financial conditions, long-term financial conditions, activity ratios and performance ratios.

Until 2019, these indicators were still very adequate. For example, the current ratio, which is a comparison between current assets and current liabilities was still at 446.59%. Likewise with a cash

Begitu juga dengan cash ratio yang sebesar 341,28%. Walaupun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2018, indikator tersebut menunjukkan bahwa kemampuan IPC dalam memenuhi kewajiban jangka pendek masih sangat kuat.

Kemampuan membayar hutang jangka pendek tercermin dari rasio likuiditas sedangkan kemampuan membayar hutang jangka panjang tercermin dari rasio solvabilitas. Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagai berikut.

ratio of 341.28%. Although slightly lower than 2018, these indicators show that IPC's ability to meet its short-term liabilities remained to be very strong.

The ability to pay short-term liabilities is reflected in the liquidity ratio, while the ability to pay long-term liabilities is reflected in the solvency ratio. The liquidity ratio and solvency ratio are presented as follows.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK (LIKUIDITAS)

Rasio likuiditas 2019 baik diukur dengan menggunakan Rasio Kas (*Cash Ratio*) dan Rasio Lancar (*Current Ratio*) dengan pencapaian secara berurutan antara lain: 341,11%, dan 394,74%. Berdasarkan besarnya rasio lancar, bahwa kemampuan Perseroan dalam membayar utang di 2019 masih relatif baik.

ABILITY TO PAY SHORT-TERM LIABILITY (LIQUIDITY)

The 2019 liquidity ratio, measured using Cash Ratios and Current Ratios was 341,11% and 394,74%. Based on the current ratio, the Company's ability to repay debts in 2019 remained to be relatively good.

Tabel Likuiditas (dalam %)
Table of Liquidity (in %)

Likuiditas <i>Liquidity</i>	2019	2018	Perubahan <i>Change</i>
<i>Cash Ratio</i>	341,11%	397,49%	(56,38%)
<i>Current Ratio</i>	394,74%	446,59%	(51,85%)

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PANJANG (SOLVABILITAS)

Rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membayar kewajiban-kewajibannya khususnya kewajiban jangka panjang. Nilai solvabilitas Perseroan cenderung stabil jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dilihat dari tingkat solvabilitas Perseroan relatif baik yaitu lebih dari 2,00. Uraian mengenai rasio solvabilitas dijabarkan sebagai berikut.

ABILITY TO PAY LONG-TERM LIABILITIES (SOLVENCY)

Solvency ratio shows the Company's ability to pay its liabilities, especially long-term liabilities. The Company's solvency ratio tends to be stable when compared to the previous year. The Company's solvency level was relatively good, which is more than 2.00. The solvency ratio is described as follows.

Tabel Solvabilitas (dalam %)
Table of Solvency (in %)

Solvabilitas <i>Solvency</i>	2019	2018	Perubahan <i>Change</i>
<i>Return on Assets (ROA)</i>	4,81%	4,73%	0,08%
<i>Return on Equity (ROE)</i>	15,72%	17,31%	(1,59%)
<i>Return on Investment (ROI)</i>	13,37%	11,15%	2,22%
<i>Debt to Equity (DER)</i>	1,22%	1,50%	(0,28%)
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	2,18%	3,84%	(1,66%)



KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DARI EFEK YANG DITERBITKAN

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat obligasi, Obligasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan obligasi yang diterbitkan. Obligasi ini tercatat di Bursa Efek Singapura dan telah meraih peringkat internasional dari berbagai lembaga pemeringkat yaitu Standar and Poor's (S&P), Moody's dan Fitch.

ABILITY TO PAY DEBT FROM SECURITIES ISSUED

The ability to pay debts can also be reflected based on bond ratings, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bonds are routinely assessed by rating agencies to support the feasibility of bonds issued. These bonds are listed on the Singapore Stock Exchange and have obtained international rating from various rating agencies, namely Standard and Poor's (S & P), Moody's and Fitch.

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Obligasi Global
Table of Ability to Pay Debts from Global Bonds

Uraian Description	Peringkat Rating			
	2019		2018	
Obligasi Global Global Bonds	• S&P	: BBB (Outlook: Stable)	• S&P	: BBB- (Outlook: Stable)
	• Moody's	: Baa2 (Outlook: Stable)	• Moody's	: Baa2 (Outlook: Stable)
	• Fitch	: BBB (Outlook: Stable)	• Fitch	: BBB (Outlook: Stable)

Adapun definisi dari setiap peringkat obligasi yang diberikan adalah sebagai berikut.

The definition of each bond rating given is as follows.

Tabel Definisi Peringkat Obligasi Global
Table of Definition of Global Bond Rating

Pemeringkat Rating Agency	Peringkat Rating	Definisi Definition
Standar and Poor's (S&P)	BBB	Termasuk kedalam kategori peringkat investasi kualitas menengah - risiko menengah yang saat ini dalam kondisi memuaskan. Included in the category of medium quality investment - medium risk, which is currently in satisfactory condition.
Moody's	Baa3 Baa2	Obligasi dengan risiko moderat dan oleh karenanya memiliki karakteristik spekulatif. Bonds with moderate risk and therefore have speculative characteristics.
Fitch	BBB	Termasuk kedalam kategori peringkat investasi kualitas menengah - resiko menengah yang saat ini dalam kondisi memuaskan. Included in the category of medium quality investment - medium risk, which is currently in satisfactory condition.
Outlook		
Stable	Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil peringkat akan stabil. Indicating a stable prospect, hence the rating results will be stable.	
Positive	Prospek yang berpotensi untuk menaikkan peringkat. Prospect that has the potential to increase rating.	
Tanda tambah (+) Plus sign (+)	Pada peringkat tertentu menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif kuat dalam masing-masing kategori peringkat. At certain rating indicates that the rating is relatively strong in each rating category.	
Tanda minus (-) Minus sign (-)	Pada peringkat tertentu menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif lemah dalam masing-masing kategori peringkat. At certain rating indicates that the rating is relatively weak in each rating category.	

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Rasio perputaran piutang mengalami peningkatan dari 28 (dua puluh delapan) hari di tahun 2019 menjadi 26 (dua puluh enam) hari di tahun 2018, atau mengalami perubahan selama 2 hari. Namun demikian, tingkat kolektibilitas Perseroan masih dalam kategori lancar yaitu kurang dari 1 (satu) bulan.

RECEIVABLES COLLECTIBILITY

The accounts receivable turnover ratio has increased from 28 (twenty eight) days in 2019 to 26 (twenty six) days in 2018, or has changed for 2 days. However, the Company's collectibility level was still in the current category, which is less than 1 (one) month.

Tabel Kolektibilitas Piutang
Table of Receivables Collectibility

Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	Perubahan Change	
Average Collection Period (ACP)	365/(Pendapatan Operasi/ Rata-Rata Piutang) 365/(Operating Revenues/Receivables in Average)	Hari Day	28	26	2

Analisis umur piutang Perseroan tahun 2019 yang belum jatuh tempo sebesar Rp255,12 miliar lebih besar dibandingkan dengan jumlah piutang yang lewat jatuh tempo 31-60 hari sebesar Rp111,82 miliar maupun piutang yang lewat jatuh tempo 61-150 hari sebesar Rp102,44 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kolektibilitas piutang Perseroan masih dalam kategori baik sehingga dapat mendukung kegiatan Perseroan.

The analysis of Company's receivables in 2019; receivables which were not yet due is Rp255.12 billion, greater than the value of receivables past due in 31-60 days which is Rp111.82 billion and receivables past due in 61-150 days which is Rp102.44 billion. This shows that the collectibility of receivables is still in good category to support company's activities.

Analisis Umur Piutang Usaha Analysis of the Aging of Receivables	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Belum jatuh tempo Not yet due	255.115.082	186.544.320	68.570.762	36,76%
Lewat jatuh tempo Past due				
1-30 hari 1-30 days	255.538.660	185.984.771	69.553.889	37,40%
31-60 hari 31-60 days	111.820.153	147.141.362	(35.321.209)	(24,00%)
61-150 hari 61-150 days	102.438.411	71.231.027	31.207.384	43,81%
Lebih dari 150 hari More than 150 days	535.679.269	569.962.854	(34.283.585)	(6,02%)
Saldo awal Beginning balance	1.260.591.575	1.160.864.334	99.727.241	8,59%
Penyisihan penurunan nilai Allowance for depreciation	(412.566.093)	(370.910.980)	(41.655.113)	11,23%
Neto Net	848.025.482	789.953.354	58.072.128	7,35%



STRUKTUR MODAL

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Komposisi struktur modal di 2019 yang dimiliki oleh Perseroan adalah 65,17% berasal dari liabilitas dan 34,83% berupa ekuitas, komposisi ini mengalami perubahan jika dibandingkan dengan 2018 dengan liabilitas sebesar 68,05% dan ekuitas sebesar 31,95%. Komposisi struktur modal yang berasal dari liabilitas mengalami penurunan 3,10% sedangkan ekuitas meningkat 10,29%.

Tabel Rincian Struktur Modal (dalam ribuan Rupiah)
Table of Details of Capital Structure (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019		2018		Pertumbuhan Growth	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Liabilitas Jangka Pendek Current liabilities	5.353.722.601	10,29%	5.498.194.480	10,69%	(144.471.879)	(2,63%)
Liabilitas Jangka Panjang (utang berbasis bunga) Non-current Liabilities	28.560.666.356	54,88%	29.500.226.224	57,36%	(939.559.868)	(3,18%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	33.914.388.957	65,17%	34.998.420.704	68,05%	(1.084.031.747)	(3,10%)
Jumlah Ekuitas Total Equity	18.126.210.778	34,83%	16.434.456.319	31,95%	1.691.754.459	10,29%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	52.040.599.735	100,00%	51.432.877.023	100,00%	607.722.712	1,18%

Struktur modal terkait dengan struktur modal kerja jangka pendek (likuiditas) telah disajikan pada bagian kemampuan membayar hutang dalam Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

IPC memiliki kebijakan untuk menitikberatkan penggunaan liabilitas jangka panjang sebagai sumber modalnya. Hal ini dilaksanakan dengan menerbitkan obligasi untuk rencana ekspansi Perseroan.

DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

IPC menyusun Rencana Permodalan berdasarkan telaah dan penilaian atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Rencana Struktur modal tersebut disusun oleh Direksi sebagai bagian dari Rencana Bisnis IPC dan disetujui oleh Dewan Komisaris, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN), dan Menteri Negara BUMN.

CAPITAL STRUCTURE

DETAILS OF CAPITAL STRUCTURE

In 2019, the composition of capital structure owned by the Company was 65.17% derived from Liabilities and 34.83% from Equity, this composition underwent changes compared to 2018, with liabilities amounted to 68.05% and equity amounted to 31.95%. The composition of capital structure derived from Liabilities decreased by 3.10% while Equity increased by 10.29%.

The capital structure related to the structure of short-term working capital (liquidity) has been presented in the ability to pay debts in this Annual Report.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

IPC has a policy to emphasize the use of non-current liabilities as a source of capital. Accordingly, IPC issues bonds to fund its expansion plans.

BASIS OF MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

IPC compiled a Capital Plan based on a review and assessment of the required capital adequacy requirements, combined with a review of the latest economic developments. The capital structure plan was prepared by the Board of Directors as part of IPC Business Plan and approved by the Board of Commissioners, the Coordinating Minister for the Economy as the Chairman of Foreign Commercial Loans Team (PKLN), and the Minister of SOE.

IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

IPC melakukan ikatan material untuk investasi barang modal yang disajikan sebagai berikut.

IPC carries out material agreement for capital goods investment which is presented as follows.

Tabel Ikatan Material Investasi Barang Modal
Table of Material Commitment for Capital Goods Investment

NO	Jenis Ikatan Type of Commitment	Nama Pihak (Vendor) Pelaksana Program Name of Program Executor (Vendor)	Mata Uang yang menjadi Denominasi Denomination Currency
1.	Pembangunan Pelabuhan Kijing, KalBar Phase 1 Construction of Kijing Port Phase 1 in West Borneo	PT Wijaya Karya	Rupiah
2.	Jalan Tol Cilincing Cibitung (JTCC) & Eastern Acces Construction of Cibitung-Cilincing Highway and Kalibaru Eastern Access	PT Waskita Karya	Rupiah
3.	Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I Construction of Kalibaru Terminal Phase I	PT PP (Persero)	Rupiah dan USD IDR and USD
4.	Maritim Tower Construction of Maritime Tower	PT PP	Rupiah
5.	Pengadaan 4 unit Kapal Tunda Procurement of 4 tugboats units	PT Citra Shipyard, PT Golden Sunrise dan BKI	Rupiah
6.	Konstruksi Bangunan dan Supervisi Tahap I Pembangunan RS Pelabuhan Palembang Construction of Port Hospital in Palembang	PT Wijaya Karya	Rupiah
7.	Pembangunan Dermaga Beton 01 di Pelabuhan Kawasan Ketapang Cabang Pelabuhan Pontianak Construction of concrete quay no 01 in Ketapang sub-Port, Port of Pontianak	PT Pratama Godean Jaya	Rupiah
8.	Pelebaran Dermaga C1 Pelabuhan Panjang Widening of C1 Quay in Port of Panjang	PT Brantas Abhipraya	Rupiah
9.	Perbaikan Berat dan Perkuatan Dermaga TPK Koja dan Perkuatan Dermaga Heavy repair and strengthening of the quay in Koja Container Terminal	PT Hajar Aswad Konstruksindo	Rupiah
10.	Pengadaan 2 (dua) unit Reach Stacker Kap. 45 ton Procurement of 2 (two) Reach Stacker Units with a capacity of 45 Tons each	PT Indo Traktor Utama	Rupiah

TUJUAN IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

Selama tahun 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melakukan ikatan material untuk investasi barang dan modal dengan tujuan peningkatan kapasitas, produktivitas dan pelayanan untuk membangun dermaga, lapangan penumpukan, serta melengkapi alat bongkar/muat dan pengerukan.

PURPOSES OF MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS

During 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) made material commitment for investment in goods and capital with the purpose of increasing capacity, productivity and services to build docks, stacking yard, and complementing loading/unloading and dredging equipment.

SUMBER DANA

Sumber pendanaan atas belanja modal berasal dari dana internal IPC dan penerbitan global bond dengan nilai total USD1,6 miliar. Seri pertama global bond bernilai USD1,1 miliar dan seri kedua bernilai USD500 juta.

SOURCE OF FUNDS

The source of funding for capital expenditure was originated from IPC internal funds and the issuance of global bonds with a total value of USD 1.6 billion. The first series global bonds worth USD1.1 billion and the second series worth USD500 million.



Sumber dana global bond dipergunakan untuk mengembangkan proyek pelabuhan dan fasilitas pendukung yang terangkum dalam proyek-proyek strategis Perseroan.

The global bonds funds are used to develop port projects and supporting facilities as listed in the Company's strategic projects.

LANGKAH PERLINDUNGAN RISIKO MATA UANG

Dalam ikatan yang terjadi pada tahun 2019, tidak terdapat ikatan dalam mata uang asing sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia terkait dengan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) disusun dalam mata uang Rupiah, sedangkan transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

THE PROTECTION CURRENCY RISKS

In the commitments that occurred in 2019, there were no foreign currency commitments in accordance with Bank Indonesia regulation related to the obligation to use Rupiah in every transaction within the territory of the Republic of Indonesia. In addition, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Financial Statements are prepared in Rupiah, while transactions in foreign currencies are translated into Rupiah using the exchange rates at the date of the transaction.

Laba atau Rugi yang timbul dari penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing dicatat dan diakui dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif pada tahun berjalan. Posisi keuangan dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Laporan Keuangan dengan menggunakan kurs laporan akhir tahun, sebagai berikut:

Gains or losses arising from the translation of assets and liabilities in foreign currencies are recorded and recognized in the Comprehensive Income Statement for the current year. Financial positions in foreign currencies are translated into Financial Reports using the year-end report rate, as follows:

Tabel Nilai Kurs
Table of Exchange Rate

Mata Uang Currency	31 Desember 2019 December 31, 2019	31 Desember 2018 December 31, 2018
Dolar Amerika Serikat (USD) 1 United States Dollar (USD) 1	13.901	14.481
Euro Eropa (EUR) 1 European Euro (EUR) 1	15.589	16.560
Dolar Singapura (SGD) 1 Singaporean Dollar (SGD) 1	10.321	10.603

Saat ini risiko keuangan yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko mata uang. Perseroan berupaya untuk meminimalkan risiko mata uang melalui pendekatan manajemen risiko. Paparan risiko ini terjadi akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing di pasar. Fluktuasi tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap posisi keuangan Perseroan. IPC mengelola risiko dengan menerapkan *natural hedging*. Saat ini Perseroan sedang mengkaji dan menyusun kebijakan penerapan transaksi *hedging*.

Currently the financial risk faced by the Company is currency risk. The Company strives to minimize currency risk through a risk management approach. This risk exposure occurs due to the fluctuations in foreign exchange rates in the market. These fluctuations may bring a negative impact on the Company's financial position. IPC manages this risk by applying natural hedging. The Company is currently reviewing and formulating hedging transaction implementation policies.

INVESTASI BARANG MODAL

Investasi berupa Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

CAPITAL GOODS INVESTMENT

Investment in the form of Capital Goods (*Capital Expenditure*) is an activity of spending funds used to purchase a number of fixed assets or increase the value of fixed assets, which are expected to provide benefits in the future.

JENIS DAN NILAI INVESTASI

Investasi barang modal dan penyertaan modal yang terealisasi pada tahun 2019 sebesar Rp3,44 triliun, Adapun rincian per jenis terkait nilai investasi barang modal dan penyertaan modal diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TYPE AND VALUE OF INVESTMENT

The realization of capital goods investment and equity participation in 2019 amounted to Rp3,44 trillion. The details of each type on the investment value of capital goods and equity participation are described in the table as follows:

Tabel Jenis dan Nilai Investasi (dalam miliar Rupiah)
Table of Type and Values of Investment (in thousand Rupiah)

Jenis Type	Nilai Tahun 2019 Value in 2019	Nilai Tahun 2018 Value in 2018
Perusahaan Induk Parent Company		
Bangunan Fasilitas Pelabuhan Port Buildings	1.879,75	1.234,08
Kapal Vessels	3,64	28,07
Alat Fasilitas Pelabuhan Port Equipment	56,44	86,06
Instalasi Fasilitas Pelabuhan Port Installation	49,56	56,25
Tanah Land	13,89	7,09
Jalan dan Bangunan Roads and Buildings	94,02	111,86
Peralatan Equipment	81,32	40,12
Kendaraan Vehicle	2,23	-
Emplasemen Emplacement	18,56	2,46
Investasi Non Fisik Non-physical Investment	115,46	82,75
Kapitalisasi Bunga Interest Capitalization	193,86	63,57
Investasi Perusahaan Induk Parent Company's Investment	2.508,73	1.712,32
Investasi Entitas Anak Subsidiaries' Investment	934,83	1.100,51
Total Investasi Konsolidasi Total Consolidated Investment	3.443,56	2.812,83
Penyertaan Modal Perusahaan Induk Equity Participation of Parent Company	-	200,00
Total Investasi + Penyertaan Modal Total Investment + Equity Participation	3.443,56	3.012,83

BANGUNAN FASILITAS PELABUHAN

Realisasi investasi bangunan fasilitas pelabuhan adalah sebesar Rp1,88 triliun atau 52,42% dari anggaran. Serapan terbesar terdapat pada Pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat Phase I sebesar Rp 1,462 triliun. Progres konstruksi telah mencapai 43,66% pada akhir tahun 2019.

PORT BUILDINGS

The realization of investment in port buildings amounted to Rp1.88 trillion or 52.42% of the budget. The biggest absorption was found in the Development of Phase I of Kijing Port, West Kalimantan, amounting to Rp 1,462 trillion. The construction progress has reached 43.66% at the end of 2019.



Berikut adalah dokumentasi progress pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2019.

Following is the documentation of the work progress in 2019.



KAPAL

Realisasi investasi kapal adalah sebesar Rp3.638,21 miliar atau 156,80% dari anggaran. Penyerapan tersebut terutama berasal dari Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Sampah yang Telah selesai dan beroperasi di Cabang Pelabuhan Panjang.

VESSELS

The realization of vessels investment was Rp3,638.21 billion or 156.80% of the budget. The absorption mainly originated from the Procurement of 1 (one) unit of Garbage Ship that has been completed and operating in Panjang Port Branch.

ALAT FASILITAS PELABUHAN

Realisasi investasi alat fasilitas pelabuhan adalah sebesar Rp56,44 miliar atau 38,26% dari anggaran. Realisasi terbesar terdapat pada investasi elektrifikasi alat bongkar muat di Cabang Palembang.

PORT EQUIPMENT

The realization of port equipment investment was Rp56.44 billion or 38.26% of the budget. The biggest realization was in the electrification of loading and unloading equipment in Palembang Branch.

INSTALASI FASILITAS PELABUHAN

Realisasi investasi instalasi fasilitas pelabuhan adalah sebesar Rp49,56 miliar atau 61,20% dari anggaran. Realisasi terbesar berupa investasi penataan jaringan listrik di cabang Pontianak.

PORT INSTALLATION

The realization of port installation investment was Rp49.56 billion or 61.20% of the budget. The biggest realization was in the form of investment in the management of electricity network in Pontianak branch.

TANAH

Realisasi investasi tanah adalah sebesar Rp13,89 miliar atau 49,45% dari anggaran. Realisasi tersebut diantaranya berupa sertifikasi lahan HPL Tahap III di Pelabuhan Tanjung Priok.

LAND

The realization of land investment amounted to Rp13.89 billion or 49.45% of the budget. The realization included certification of Phase III HPL land at Tanjung Priok Port.

JALAN DAN BANGUNAN

Realisasi investasi Jalan dan Bangunan adalah sebesar Rp94,02 miliar atau 23,03% dari anggaran. Realisasi terbesar berupa Penimbunan Jalan Akses Sebelah Utara dan Selatan Pelabuhan

ROADS AND BUILDINGS

The realization of investment in roads and buildings was Rp94.02 billion or 23.03% of the budget. The biggest realization was in the form of piling up the North and South Access Road of Muara

Muara Sabak Jambi dan Renovasi berat Gedung Cabang sebagai Gallery IPC Cabang Tanjung Priok (Museum Maritim).

PERALATAN

Realisasi investasi Peralatan adalah sebesar Rp81,32 miliar atau 60,33% dari anggaran. Realisasi terbesar terdapat pada Pengembangan Infrastruktur Layanan Terpadu ICT untuk pekerjaan:

1. Implementasi *Enterprise Service Bus* (ESB);
2. Peningkatan Keamanan dan Layanan Infrastruktur IT *Disaster Recovery Center* (DRC);
3. Peningkatan Keamanan *Data Center*

EMPLASEMEN

Realisasi investasi Emplasemen adalah sebesar Rp18,56 miliar atau 371,21% dari anggaran. Realisasi tersebut berupa penataan dan perkuatan Lahan ex Sumatraco di Cabang banten dan penataan dan perkuatan lahan ex Indorama.

INVESTASI NON FISIK

Realisasi Investasi Non Fisik adalah sebesar Rp115,46 miliar atau 47,41% dari anggaran. Realisasi tersebut diantaranya berupa pekerjaan:

1. Pengadaan Lisensi Perangkat Lunak Sistem Informasi;
2. Pengembangan dan Implementasi ERP untuk Bidang Keuangan dan Personalia;
3. Pengembangan dan Support untuk Layanan ICT.

PENYERTAAN MODAL

Pada tahun 2019 Perseroan tidak melakukan penyertaan modal, namun pada tahun 2018 realisasi penyertaan modal Perseroan adalah sebesar Rp200 miliar yang diberikan kepada PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PT PPI).

TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Dari arahan strategi dan juga inisiatif strategis yang telah disusun untuk tahun 2020, IPC harus melakukan kegiatan investasi guna menutup kesenjangan kapasitas dan kapabilitas IPC antara kondisi eksisting dengan aspirasi yang ingin dicapai IPC. Besaran investasi yang dibutuhkan terdiri dari tiga macam investasi yaitu investasi terkait inisiatif strategis, investasi rutin (*business as usual*), dan investasi proyek strategis Perseroan. Investasi rutin bertujuan memenuhi *minimal requirement*, meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja, serta mendukung tujuan administratif.

Sabak Port in Jambi and heavy renovation of Branch Building as IPC Gallery of Tanjung Priok Branch (Maritime Museum).

EQUIPMENT

The realization of equipment investment was Rp81.32 billion or 60.33% of the budget. The biggest realization was in the Development of Integrated Services Infrastructure for ICT for the following:

1. Implementation of Enterprise Service Bus (ESB);
2. Improvement of Security and Infrastructure Services for IT Disaster Recovery Center (DRC);
3. Enhancement of Data Center Security.

EMPLACEMENT

The realization of emplacement investment amounted to Rp18.56 billion or 371.21% of the budget. The realization was in the form of structuring and strengthening the ex Sumatraco land in Banten branch and the arrangement and strengthening of ex Indorama land.

NON PHYSICAL INVESTMENT

The realization of Non-Physical Investment was Rp115.46 billion or 47.41% of the budget. The realization included the following:

1. Procurement of Information Systems Software License;
2. ERP Development and Implementation for Finance and Personnel;
3. Development and Support for ICT Services.

EQUITY PARTICIPATION

In 2019, the Company did not enter into an equity participation, but in 2018 the realization of the Company's equity participation amounted to Rp200 billion, which was given to PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PT PPI).

PURPOSES OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

From the strategic directives and strategic initiatives that have been prepared for 2020, IPC has to carry out investment activities to fill the gap of IPC's capacity and capability between the existing conditions and the aspirations that IPC wants to achieve. The amount of investment needed consists of three types of investments, namely investments related to strategic initiatives, routine investments (*business as usual*), and investments in strategic projects of the Company. Routine investments aim to meet the minimum requirements, improve work security and safety, and support administrative objectives.



IPC akan terus melanjutkan program investasi yang sudah berjalan, seperti pembangunan terminal. Investasi yang ada juga akan diprioritaskan pada pembangunan Proyek Strategis Perseroan yang meliputi Pembangunan Terminal Kalibaru/Newpriok, Terminal Tanjungpura/Kijing, Pembangunan Jalan Akses Timur Kalibaru, Pembangunan Cikarang Bekasi Laut Waterway, Pembangunan Terminal Sorong, Penyertaan Modal untuk Pengoperasian Pelabuhan Patimban, dan Rekonfigurasi Cabang Pelabuhan.

IPC will continue the investment programs that are already running, such as the construction of terminal. Existing investments will also be prioritized on the development of the Company's Strategic Projects which include the Construction of Kalibaru/Newpriok Terminal, Tanjungpura/Kijing Terminal, East Kalibaru Access Road, Cikarang Bekasi Sea Waterway Development, Sorong Terminal, Equity Participation for Patimban Port Operations, and Reconfiguration of Port Branch.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, AND DEBT AND CAPITAL RESTRUCTURING

INVESTASI

INVESTMENT

IPC melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan. Informasi mengenai investasi jangka pendek dan jangka panjang IPC disajikan sebagai berikut.

IPC carries out short-term and long-term investments to improve the Company's profitability and financial performance. Information about IPC's short-term and long-term investments is presented as follows.

Tabel Investasi (dalam ribuan Rupiah)
Table of Investment (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018
Investasi Jangka Pendek Short-term Investment		
Deposito berjangka Time deposits		
Rupiah Rupiah		
Pihak ketiga Third parties		
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga	-	17.000.000
PT Bank Panin Syariah	-	2.000.000
Pihak berelasi Related parties		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	104.642.400	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	372.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	-	50.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		203.053.994
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		4.000.000
Dolar AS: US Dollar		
Pihak berelasi Related Parties		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.154.655.000	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	2.099.745.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	796.455.000

Tabel Investasi (dalam ribuan Rupiah)
Table of Investment (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2019	2018
Total deposito berjangka Total time deposits	2.259.297.400	3.544.253.994
Efek yang diperdagangkan Securities traded	337.403.726	291.753.295
Total investasi jangka pendek Total Short-term Investments	2.596.701.126	3.836.007.289
Investasi Jangka Panjang Long-term Investment		
Investasi pada entitas asosiasi Investment in associates	2.757.291.330	2.362.825.278
Investasi pada penyertaan saham Investment in equity participation	50.906.100	524.362.036
Investasi pada surat utang Investment in debt securities	402.826.170	324.550.117
Total Invesasi Jangka Panjang Total Long-term Investments	3.211.023.600	3.211.737.431

EKSPANSI

Selama tahun 2019, IPC tidak melakukan kegiatan ekspansi.

DIVESTASI

Selama tahun 2019, IPC tidak melakukan kegiatan divestasi.

AKUISISI

Selama tahun 2019, IPC tidak melakukan kegiatan akuisisi.

RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

Selama tahun 2019, IPC tidak melakukan kegiatan restrukturisasi hutang dan modal.

EXPANSION

In 2019, IPC did not carry out any expansion activities.

DIVESTMENT

In 2019, IPC did not conduct any divestment activities.

ACQUISITION

In 2019, IPC did not conduct any acquisition activities.

DEBT AND CAPITAL RESTRUCTURING

In 2019, IPC did not carry out any debt and capital restructuring activities.

PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET KE DEPAN

PENCAPAIAN TARGET

Perbandingan target dan realisasi laporan posisi Keuangan konsolidasian, laporan laba rugi konsolidasian, pemasaran, produksi dan sumber daya manusia diuraikan sebagai berikut.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Uraian atas realisasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tahun 2019 adalah sebagai berikut.

TARGET ACHIEVEMENT AND FUTURE TARGET

TARGET ACHIEVEMENT

The comparison of target and realization of the consolidated statement of financial position, the consolidated statement of profit or loss, marketing, production and human capital are described as follows.

COMPARISON OF TARGET AND REALIZATION OF CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

The realization of the 2019 Consolidated Statement of Financial Position is as follows.



Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Comparison of Target and Realization of Consolidated Statement of Financial Position (in Thousand Rupiah)

Uraian <i>Description</i>	RKAP 2019 <i>2019 RKAP</i>	Realisasi 2019 <i>2019 Realization</i>	Pencapaian <i>Achievement</i>
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100%
ASET			
ASSETS			
ASET LANCAR			
CURRENT ASSETS			
Kas dan Setara Kas <i>Cash and Cash Equivalents</i>	10.346.942.577	15.603.533.329	150,80%
Investasi Jangka Pendek <i>Short-term Investments</i>	4.045.454.205	2.596.701.126	64,19%
Piutang Usaha – Neto <i>Trade Receivables - Net</i>	888.174.380	848.025.482	95,48%
Piutang Lain-Lain – Neto <i>Other Receivables - Net</i>	1.025.787.074	830.069.397	80,92%
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka <i>Advances and Prepaid Expenses</i>	143.080.380	104.181.981	72,81%
Pendapatan Yang Masih Akan Diterima <i>Accrued Revenues</i>	410.811.251	305.452.354	74,35%
Persediaan <i>Inventories</i>	72.565.193	82.940.596	114,30%
Pajak Dibayar Di Muka <i>Prepaid Taxes</i>	853.252.953	680.605.067	79,77%
Aset Lancar Lain-lain <i>Other Current Assets</i>	-	10.253.126	-
Jumlah Aset Lancar <i>Total Current Assets</i>	17.786.068.014	21.061.762.458	118,42%
ASET TIDAK LANCAR			
NON-CURRENT ASSETS			
Investasi Jangka Panjang <i>Long-term Investment</i>	6.445.590.196	3.211.023.600	49,82%
Properti Investasi – Neto <i>Investment Properties - Net</i>	354.643.022	357.295.487	100,75%
Aset Tetap – Neto <i>Fixed Assets - Net</i>	14.186.968.812	13.387.155.835	94,36%
Aset Kerjasama Operasi – Neto <i>Joint Operation Assets - Net</i>	510.465.923	461.100.101	90,33%
Aset Pajak Tangguhan <i>Deferred Tax Assets</i>	43.316.202	73.873.814	170,55%
Aset Tidak Berwujud – Neto <i>Intangible Assets - Net</i>	13.250.501.341	10.818.271.480	81,64%
Taksiran Tagihan Restitusi Pajak <i>Estimated Claims for Tax Refund</i>	1.587.491.511	958.917.154	60,40%
Aset Tidak Lainnya <i>Other Assets</i>	-	1.711.199.806	-
Jumlah Aset Tidak Lancar <i>Total Non-current Assets</i>	36.378.977.008	30.978.837.277	85,16%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Comparison of Target and Realization of Consolidated Statement of Financial Position (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2019 2019 RKAP	Realisasi 2019 2019 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100%
Jumlah Aset Total Assets	54.165.045.021	52.040.599.735	96,08%
LIABILITAS LIABILITIES			
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES			
Pinjaman Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans	-	34.193.914	-
Utang Usaha Trade Payables	2.025.609.364	1.436.482.338	70,92%
Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Pendek Short-term Unearned Revenues	1.542.107.299	845.489.224	54,83%
Utang Pajak Taxes Payable	459.375.839	445.015.994	96,87%
Beban Akruwal Accrued Expenses	2.825.289.647	2.274.726.625	80,51%
Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang Current Maturities of Long-term Liabilities	54.405.122	19.899.737	36,58%
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Other Current Liabilities	223.135.830	297.914.768	133,51%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	7.129.923.101	5.353.722.601	75,09%
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES			
Utang Obligasi Bonds Payable	22.939.011.556	21.984.178.194	95,84%
Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Lancar Long-term Liabilities - Net of Current Maturities	325.617.105	350.241.928	107,56%
Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Panjang Long-term Unearned Revenues	3.979.214.285	4.005.631.257	100,66%
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefit Liabilities	1.871.526.550	1.966.325.908	105,07%
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	429.963.034	254.289.069	59,14%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-current Liabilities	29.545.332.530	28.560.666.356	96,67%
Total Liabilitas Total Liabilities	36.675.255.631	33.914.388.957	92,47%
EKUITAS EQUITY			
Modal Dasar – 4,000,000 Saham Authorized Capital - 4,000,000 Shares			



Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Ribuan Rupiah)
 Table of Comparison of Target and Realization of Consolidated Statement of Financial Position (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2019 2019 RKAP	Realisasi 2019 2019 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 1,444,029 Saham Issued and Fully Paid Capital - 1,444,029 Shares	1.444.029.000	1.444.029.000	100,00%
Modal Donasi Donated Capital	26.825.982	26.825.982	100,00%
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	(317.597.475)	(317.597.475)	100,00%
Saldo Laba Retained Earnings			
Ditetukan Penggunaannya Appropriated	13.215.103.513	13.273.514.540	100,44%
Belum Ditetukan Penggunaannya Unappropriated	2.507.991.620	2.455.762.802	97,92%
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(193.167.373)	(105.008.860)	54,36%
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of Parent Entity	16.683.185.268	16.777.525.989	100,57%
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	806.604.122	1.348.684.789	167,21%
Jumlah Ekuitas Total Equity	17.489.789.390	18.126.210.778	103,64%
Jumlah Liabilitas Kepentingan Non Pengendali, dan Ekuitas Total Liabilities of Non-Controlling Interests, and Equity	54.165.045.021	52.040.599.735	96,08%

Berdasarkan rincian data pada tabel di atas pencapaian total aset mencapai 96,08%, sedikit berada di bawah target RKAP demikian pula dengan pencapaian liabilitas yang mencapai 92,47%. Meskipun demikian, ekuitas tahun 2019 berhasil melampaui target sebesar 103,64%, hal ini terutama karena peningkatan akumulasi saldo laba di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Based on the detailed data in the table above, the achievement of total assets reached 96.08%, slightly below the RKAP target. Likewise the achievement of liabilities that reached 92.47%. Nevertheless, equity in 2019 succeeded in exceeding the target of 103.64%, mainly due to an increase in accumulated retained earnings in 2019 compared to the previous year

Kedepannya, IPC akan senantiasa melakukan pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, sehingga kinerja IPC di masa yang akan datang akan senantiasa mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

Going forward, IPC will always implement the strategies that have been set, so that IPC's performance in the future will continue to improve continuously.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

COMPARISON OF TARGET AND REALIZATION OF CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Uraian atas realisasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian tahun 2019 adalah sebagai berikut.

The realization of the 2019 Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income is as follows.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam Ribuan Rupiah)

Table of Comparison of Target and Realization of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in thousand Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2019 2019 RKAP	Realisasi 2019 2019 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100%
Pendapatan Operasi Operating Revenues	13.503.396.813	11.141.752.225	82,51%
Pendapatan Konstruksi Construction Revenues	3.100.000.000	1.542.697.617	49,76%
Beban Operasi Operating Expenses	(9.192.912.630)	(8.520.357.673)	92,68%
Beban Konstruksi Construction Expenses	(3.100.000.000)	(1.542.697.617)	49,76%
Pendapatan (Beban) Operasi lainnya – neto Other operating income – net	(282.627.784)	717.114.514	(253,73%)
Laba Usaha Income From Operations	4.027.856.399	3.338.509.066	82,89%
Pendapatan Keuangan Finance Income	205.263.438	836.260.112	407,41%
Beban Keuangan Finance Expenses	(1.083.511.253)	(1.200.237.089)	110,77%
Bagian Laba Entitas Asosiasi Equity in Income of Associates	430.529.964	240.568.343	55,88%
Laba Sebelum Pajak Final Income Before Final Tax	3.580.138.548	3.215.100.432	89,80%
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	-	(509.692.491)	-
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan Income Before Final Tax and Corporate Income Tax	3.580.138.548	2.705.407.941	75,57%
Manfaat (beban) pajak penghasilan badan Manfaat (beban) pajak penghasilan badan	(969.645.283)	(509.692.491)	52,56%
Laba Periode Berjalan Income For The Year	2.610.493.265	2.503.810.348	95,91%
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasikan Ke Laba Rugi Other Comprehensive Income Items That Will Not Be Reclassified To Profit Or Loss			
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Remeasurement of Defined Benefit Plans	-	(68.567.665)	-
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain Pos-Pos Yang Akan Direklasifikasikan Ke Laba Rugi Other Comprehensive Income Items That Will Be Reclassified to Profit or Loss			
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Anak Exchange Differences due to Financial Statements Translation	(12.820.162)	254.857.849	(1.987,95%)



**Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam Ribuan Rupiah)**

Table of Comparison of Target and Realization of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in thousand Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2019 2019 RKAP	Realisasi 2019 2019 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100%
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual Change in Fair Value of Available-for-Sale Financial Assets	(1.675.338)	(170.053.962)	10.150,43%
Total Laba Komprehensif Periode Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	2.595.997.766	2.520.046.570	97,07%
Labanya Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Income For The Year Attributable to:			
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	2.507.991.620	2.455.762.801	97,92%
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	102.501.645	48.047.547	46,87%
Labanya Periode Tahun Berjalan Income For The Year	2.610.493.265	2.503.810.348	95,91%
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:			
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	2.493.496.120	2.473.310.918	99,19%
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	102.501.645	46.735.652	45,60%
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	2.595.997.766	2.520.046.570	97,07%

Berdasarkan rincian data pada tabel di atas, pencapaian target IPC secara keseluruhan masih menghadapi tantangan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RKAP tahun 2019. Pencapaian laba tahun berjalan tahun 2019 sebesar 95,91% sedikit berada di bawah target, hal tersebut sejalan juga dengan pencapaian target pendapatan operasi yang sebesar 82,51%. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya pendapatan pandu dan tunda di Pelabuhan Umum pada beberapa Cabang pelabuhan yang disebabkan penurunan kunjungan kapal luar negeri terutama pada pelabuhan Tanjung Priok dan panjang yang merupakan pengaruh dari perlambatan ekonomi secara nasional dan global/deficit Balance Of Trade (BOT) dan juga dipengaruhi belum terealisasinya kegiatan *ship to ship* oleh PT Jasa Armada Indonesia;

Based on the detailed data in the table above, overall achievement of IPC targets was still dealing with challenges compared to the targets that have been previously set in the 2019 RKAP. The achievement of profit for the year 2019 was 95.91%, slightly below the target and this was also in line with the achievement of operating revenues of 82.51%. This was driven by, among others, the following matters:

1. Failure to achieve pilotage and towage revenues at general docs at several port branches due to the decrease in international ship calls, especially at Tanjung Priok and Panjang Ports, as the effect of the national and global economic slowdown/deficit Balance of Trade (BOT) and was also due to the unrealized realization ship to ship activities by PT Jasa Armada Indonesia;

2. Adanya pembatasan ekspor karet di tahun 2019;
3. Belum dapat diakuisisinya pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS) oleh PT pelabuhan Indonesia II (Persero);
4. Penurunan trafik kapal secara umum pada beberapa Pelabuhan yang besar antara lain Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Teluk Bayur, Palembang, Banten;
5. Adanya larangan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) terutama pada negara Uni Eropa dengan issue lingkungan hidup, penurunan ekspor juga terjadi pada negara tujuan India dan Tiongkok;
6. Adanya pembatasan ekspor karet di tahun 2019 disebabkan harga pasar internasional karet sangat rendah sehingga 3 (tiga) negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand sepakat untuk membatasi ekspor karet dan kebutuhan untuk *metal box* juga berkurang sejalan dengan penurunan ekspor tersebut;
7. Tidak tercapainya pendapatan petikemas yang dipengaruhi berkurangnya kegiatan *ocean going* terutama pada Pelabuhan Tanjung Priok.

Meskipun demikian pendapatan keuangan berhasil melampaui target sebesar 407,41 % dengan realisasi di tahun 2019 sebesar Rp.836,26 miliar di atas RKAP tahun 2019 yang sebesar Rp205,26 miliar. Hal tersebut terutama pengelolaan *cash pooling* dan *cash dropping* untuk pembayaran terjadwal sehingga penempatan dana deposito oleh Kantor Pusat dapat terkelola dengan baik sebagai antisipasi atas penggunaan kas yang belum optimal untuk investasi atas aset.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PEMASARAN

Perhitungan pertumbuhan *market share* yaitu arus petikemas tahun berjalan (TEUs) dibagi dengan arus petikemas tahun sebelumnya (TEUs). Realisasi *market share* tahun 2019 mencapai 100,00% tidak melampaui target yang ditetapkan RKAP yang sebesar 106,15%. Hal tersebut karena tidak tercapainya pendapatan petikemas yang dipengaruhi berkurangnya kegiatan *ocean going* terutama pada area PT IPC TPK diantaranya cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Palembang dan Panjang.

Nonetheless, revenues exceeded the target of 407.41% with the realization in 2019 of Rp.836.26 billion, above the 2019 RKAP of Rp205.26 billion. This is mainly due to the management of cash pooling and cash dropping for scheduled payments so that the placement of time deposit funds by Head Office can be well managed in anticipation of the use of cash that has not been optimal for investment in assets.

COMPARISON OF MARKETING TARGET AND REALIZATION

The calculation of market share growth is current year's container traffic (TEUs) divided by previous year's container traffic (TEUs). The realization of market share in 2019 reached 100.00%, not exceeding the target set by the RKAP at 106.15%. That was caused by the failure to achieve container revenue due to reduced ocean going activities, especially in the area of PT IPC TPK including Tanjung Priok, Palembang and Panjang Port Branch.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran
Table of Comparison of Marketing Target and Realization

Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2019 2019 RKAP	Realisasi 2019 2019 RKAP	Keterangan Remark
Market Share	%	106,18	100,00	Tidak Memenuhi Unfulfilled

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PRODUKSI

Uraian atas perbandingan target dan realisasi produksi tahun 2019 adalah sebagai berikut.

COMPARISON OF PRODUCTION TARGET AND REALIZATION

The description of comparison of production target and realization of in 2019 is as follows.



Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Produksi

Table Comparison Production Targets and Achievements

Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2019 2019 RKAP	Realisasi 2019 2019 RKAP	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100%
Pelayanan Jasa Kapal Ship Services				
Pelabuhan Umum General Dock				
a. Labuh Anchorage	GT	-		
b. Tambatan Berthing	Gtetm	358.583.172	345.982.640	96,49%
c. Pemanduan Pilotage	Kplgrk	72.019	65.901	91,51%
	GT	550.608.082	512.262.353	93,04%
d. Penundaan Towage	Kpljam Kplhour	171.465	147.483	86,01%
	GT	1.590.405.492	1.363.889.185	85,76%
Pelayanan Jasa Barang Cargo Services				
Dermaga Pelabuhan Umum General Dock				
a. Dermaga Umum General Dock	Ton	45.537.855	49.632.970	108,99%
	M ³	4.574.752	5.582.922	122,04%
	Box	606.658	327.645	54,01%
	Ekor Animal	173.989	588.833	338,43%
	Unit	826.527	935.280	113,16%
b. Gudang Penumpukan Stacking Warehouse	Ton Hari Ton-Day	3.920.763	2.993.366	76,35%
	M ³ Hari	343.249	475.201	138,44%
	Ton Hari	10.030.755	9.935.920	99,05%
	M ³ Hari M ³ -Day	9.965.270	9.517.687	95,51%
c. Lapangan Penumpukan Stacking Field	Ekor Hari Ton-Day	209.760	287.266	136,95%
	Box Hari Box-Day	1.369.218	5.843	0,43%
	Unit Hari	676.117	924.370	136,72%
	Unit-Day			
Pelayanan Terminal Terminal Services				
Stevedoring	Ton	32.782.426	34.433.553	105,04%
	M ³	2.539.604	2.450.173	96,48%
Cargodoring	Ton	2.456.324	2.784.890	113,38%
	M ³	-	2.449	-
Overbrengen	TEUs	-	-	-
Receiving/Delivery	Ton	261.284	275.035	105,26%
	Unit	16.675	15.141	90,80%
	Box	12.500	22.654	181,23%
Ro-Ro	Paket Package	318.819	737.830	231,43%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Produksi
Table Comparison Production Targets and Achievements

Uraian <i>Description</i>	Satuan <i>Unit</i>	RKAP 2019 <i>2019 RKAP</i>	Realisasi 2019 <i>2019 RKAP</i>	Pencapaian <i>Achievement</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100%
Bongkar Muat Petikemas Container Loading and Unloading				
Operasi Kapal <i>Ship Operation</i>	Box Unit	1.702.668 2.267	1.718.931 11.485	100,96% 506,62%
Operasi lapangan: <i>Field operation</i>	Box BoxShift	1.847.424 72.531	1.911.228 76.524	103,45%
Operasi Penumpukan: <i>Lift On/Lift Off</i>	Box-Hari Box-Day	1.751.306	2.918.117	166,63%
<i>Overbregen</i>	Box	-	-	-
	Box	-	-	-
	Ton Hari Ton-Day	-	-	-
Operasi CFS: <i>CFS Operation</i>	Ton/M ³ Ton M ³ M ³ Hari M ³ -Day	- - - -	- - - -	- - - -
Pengusahaan Alat Equipment Business				
Pengusahaan Alat-alat <i>Equipment Business</i>	Jam Hour Ton	595.675 9.151.066	3.549 -	0,60% (100,00%)
Terminal Petikemas Container Terminal				
Operasi Kapal ¹⁾ <i>Ship operation *)</i>	Box Unit	1.702.668 2.267	1.718.931 11.485	100,96% 506,62%
Operasi Lapangan <i>Field operation</i>	Box Box-Shif Ton M ³	1.847.424 72.531 - -	1.911.228 76.524 - -	103,45% 105,51% - -
CFS	Ton-Hari Ton-Day M ³ -Hari M3-Day	- - - -	- - - -	- - - -
Penumpukan	Box Box-Hari Box-Day Unit Hari Unit-Day	- 1.751.306 - -	- 2.918.117 - -	- 166,63% - -
<i>Lift On/Lift Off</i>	Box	-	-	-
<i>Stripping/Stuffing</i>	Box	-	-	-
<i>Trucking/Share Handling Container</i>	Box	-	-	-
Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL) Land, Building, Water, and Electricity Business (TBAL)				
Persewaan Tanah <i>Land Lease</i>		12.151.376	12.428.681	102,28%



Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Produksi

Table Comparison Production Targets and Achievements

Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2019 2019 RKAP	Realisasi 2019 2019 RKAP	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100%
Persewaan Bangunan Building Lease		90.036	98.508	109,41%
Pengusahaan Air Water Business		11.000	-	-
a. Air perkantoran Office Water	Ton	127.740	48.012	37,59%
b. Air kapal Ship Water	Ton	135.564	308.198	227,35%
Pengusahaan Listrik Electricity Business	kWh	84.411.744	2.014.009	2,39%
Fasilitas Rupa-Rupa Usaha Miscellaneous Facility				
Pas Pelabuhan Port Entry	Lembar Sheet	10.999.736	12.428.681	112,99%
Kontribusi Mekanis/Alat Mechanical/Equipment Contribution	Lumpsum Lumpsum	1.708	423	24,77%
Jasa Kebersihan Cleaning Service	Lembar Sheet	5.591.030	9.394.099	168,02%
Retribusi Retribution	Ton	23.826	1.410.230	5.918,87%
Lainnya Others	Orang Person	5.251.789	11.097.031	211,30%

Secara umum pencapaian target produksi tahun 2019 menunjukkan hasil yang baik. Pencapaian pelayanan jasa barang dari dermaga umum dalam satuan Ton dan m³ masing-masing mencapai 108,99% dan 122,04% berada di atas target RKAP 2019. Hal ini antara lain dipengaruhi terealisasinya komoditi curah kering di Cirebon, *general cargo* dan *sparepart* di terminal Domestik dan Internasional *car terminal*, *bag cargo* di Cabang pelabuhan Teluk Bayur dan Banten.

Demikian pula dengan pelayanan terminal dari *stevedoring* dalam satuan Ton yang mencapai 105,04%, hal tersebut seiring dengan meningkatnya kegiatan B/M Komoditi curah kering batu bara di Pelabuhan Jambi dan Cirebon, *general cargo fan bag cargo* di *car terminal* Banten dan Teluk Bayur. Sedangkan pelayanan terminal dari *cargoring* dalam satuan Ton mencapai dan 113,38% yang dipengaruhi peningkatan kegiatan *handling* komoditi *bag cargo*, bungkil, pupuk dan kelapa yang terdapat di Cabang Teluk Bayur dan Jambi.

Pengusahaan TBAL dari persewaan tanah melampaui dari target yang di ditetapkan yaitu sebesar 102,28%. Hal ini dipengaruhi terealisasinya beberapa kontrak jangka panjang *pengoperasian common area* di Cabang Tanjung Priok, lahan penumpukan di Pelabuhan Banten. Pengusahaan TBAL dari persewaan

In general, the achievement of the 2019 production target showed favorable results. The achievement of cargo services from the general dock in Ton and m³ unit reached 108.99% and 122.04%, respectively, above the 2019 RKAP target. This was influenced by the realization of dry bulk commodity in Cirebon, general cargo and spare parts at the terminal Domestic and International car terminal, bag cargoes at Teluk Bayur and Banten Port branches.

Likewise, terminal services from stevedoring in Ton unit reached 105.04%, in line with the increase in stevedoring activities of dry bulk coal commodity in Jambi and Cirebon Ports, general cargo fan bag cargo in the car terminal of Banten and Teluk Bayur. While the terminal services of cargoring in Ton unit reached 113.38%, affected by the increase in commodity handling activities for bag cargo, cake, fertilizer and coconut which were found in Teluk Bayur and Jambi Branches.

TBAL business from land lease exceeded the set target of 102.28%, influenced by the realization of several long-term contracts in the operation of common area at Tanjung Priok Branch, the stacking field in Banten Port. TBAL business from building lease also exceeded the RKAP target of 109.41%, due to

bangunan juga melampaui dari target RKAP yaitu sebesar 109,41%, hal tersebut karena realisasi produksi persewaan bangunan sebesar 98.508m² atau 9,41% di atas anggaran sebesar 90.036m² sebagaimana terjadi di Cabang Tanjung Priok, Teluk Bayur, Panjang, Palembang, Pontianak, Cirebon, Pangkal balam, Tanjung Pandan seiring penyewaan ruang dan bangunan untuk perkantoran.

the realization of building lease production of 98,508m² or 9.41% above the budget of 90,036m² as can be seen in Tanjung Priok, Teluk Bayur, Panjang, Palembang, Pontianak, Cirebon, Pangkal Balam, Tanjung Pandan branches along with room and building lease for offices.

Pencapaian target fasilitas rupa-rupa dari retribusi melampaui target yang sangat signifikan sebesar 5.918,87%. Hal tersebut karena realisasi produksi retribusi sebesar 1.386.404 lembar di atas anggaran sebagaimana terjadi di Panjang dan Sunda Kelapa seiring dengan meningkatnya retribusi alat bongkar muat di pelabuhan tersebut.

The target achievement of miscellaneous facilities from the retribution exceeded the target very significantly at 5,918.87%, due to the realization of retribution production of 1,386,404 pieces above the budget as occurred in Panjang and Sunda Kelapa in line with the increase in the loading and unloading equipment retribution at these ports.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI SUMBER DAYA MANUSIA

Posisi realisasi kekuatan Sumber Daya Manusia pada PT Pelabuhan Indonesia II Persero dan Entitas Anak tahun 2019 adalah 11.813 orang, lebih rendah 198 orang dari RKAP tahun 2019.

COMPARISON OF HUMAN CAPITAL TARGET AND REALIZATION

The realization of Human Capital at PT Pelabuhan Indonesia II Persero and its Subsidiaries in 2019 was 11,813 persons, 198 persons lower than the 2019 RKAP.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Sumber Daya Manusia (dalam satuan Orang)
Table of Comparison of Human Capital Target and Realization of (in Persons)

No	Perusahaan Company	RKAP 2019 2019 RKAP	Realisasi 2019 2019 Realization	Trend	Pencapaian Achievement
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)-(2)	(5)=(3)/(2)*100%
1	Posisi Organik Organic Position				
	Induk Perusahaan (a) Parent Company (a)	1.564	1.496	68	95,65%
	Induk – dalam penugasan ke Entitas Anak (b) Parent - in assignment to a Subsidiary (b)	1.067	1.169	102	109,56%
	Sub Total Organik Induk Perusahaan Sub Total Organic of Parent Company	2.631	2.665	34	101,29%
	Organik Entitas Anak (c) Organic of Subsidiaries (c)	2.179	1.975	(204)	90,64%
	Total Pegawai Organik Total Organic Employees	4.810	4.640	(170)	96,47%
2	Posisi Non Organik Non-Organic Position				
	Induk Perusahaan (g) Parent Company (g)	1.302	975	(327)	74884,79%
	Entitas Anak (e) = (e1) + (e2) + (e3) Subsidiaries (e) = (e1) + (e2) + (e3)	5.899	6.194	295	105,00%
	Non Organik (e1) Non-Organic (e1)	5.879	6.173	294	105,00%
	Organik Pemegang Saham Lainnya (e2) Other Organic Shareholders (e2)	6	4	(2)	66,67%



Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Sumber Daya Manusia (dalam satuan Orang)

Table of Comparison of Human Capital Target and Realization of (in Persons)

No	Perusahaan Company	RKAP 2019 2019 RKAP	Realisasi 2019 2019 Realization	Trend	Pencapaian Achievement
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)-(2)	(5)=(3)/(2)*100%
	BOD Non IPC (e3) Non IPC BOD (e3)	14	17	3	121,43%
	Jumlah Pegawai Non Organik (d) + (e) Number of Non-Organic Employees (d) + (e)	7.201	7.169	(32)	99,56%
3	Jumlah Induk Perusahaan Number of Parent Company	3.933	3.640	(293)	92,55%
4	Jumlah Entitas Anak Number of Subsidiaries	8.078	8.169	91	101,13%
5	Total (3) + (4) Total (3) + (4)	12.011	11.813	(198)	98,35%

Keterangan:

Pegawai organik Entitas Anak pada poin c merupakan rekrutmen internal oleh Entitas Anak serta data tersebut di atas tidak memperhitungkan pegawai organik PT JICT dan PT TPI yang disesuaikan dengan pencatatan keuangan.

Information:

The subsidiary's organic employees in point c are internal recruitments by the subsidiary and the data above does not take into account the organic employees of PT JICT and PT TPI which are adjusted to the financial records.

Pegawai Organik

Induk Perusahaan

Realisasi jumlah pegawai organik Induk Perusahaan yang ditugaskan di Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Entitas Anak pada tahun 2019 sebanyak 2.665 orang, lebih tinggi sebanyak 34 orang dari RKAP tahun 2019 dan lebih tinggi 62 orang dari realisasi tahun 2018. Hal ini dikarenakan rekrutmen tahun 2019 merupakan hasil dari pelaksanaan rekrutmen 2018 dan 2019 yaitu pandu 18 orang, *fresh graduate* 44 orang dan alih daya 66 orang.

Entitas Anak (Rekrutmen Internal Entitas Anak)

Realisasi jumlah pegawai organik Entitas Anak tahun 2019 yang berasal dari rekrutmen internal Entitas Anak sejumlah 1.975 orang lebih rendah sebanyak 204 orang dibandingkan dengan RKAP Tahun 2019 dan lebih rendah 24 orang dari realisasi tahun 2018. Hal ini dikarenakan masih dilaksanakan proses rekrutmen internal Entitas Anak.

Pegawai Non Organik, Organik, Pemegang Saham Lainnya dan BOD Non IPC

Realisasi jumlah pegawai *non* organik tahun 2019 pada induk Perusahaan sebanyak 975 orang atau lebih rendah 327 orang dibandingkan dengan RKAP tahun 2019, dan lebih rendah 280 orang jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Sementara realisasi jumlah pegawai *non* organik tahun 2019 pada Entitas Anak sebanyak 6.194 atau lebih tinggi 295 orang dibandingkan dengan RKAP tahun 2019 dan lebih tinggi 882 orang jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya perpindahan karyawan *non* organik dari Cabang Pelabuhan ke Entitas Anak dikarenakan *spin off* PT pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) dan PT IPC Terminal Petikemas (PT IPC TPK).

Organic Employee

Parent Company

The realization of the number of organic employees of the Parent Company assigned to Head Office, Port Branches and Subsidiaries in 2019 was 2,665 persons, 34 persons higher than the 2019 RKAP and 62 persons higher than the realization in 2018. This was because the recruitment in 2019 was the results of the 2018 and 2019 recruitments in the amount of 18 pilotage employees, 44 fresh graduate employees and 66 outsource employees.

Subsidiaries (Internal Recruitment Of Subsidiaries)

The realization of the number of organic employees in 2019 from internal recruitment of subsidiaries was 1,975 persons, 2014 persons lower compared to the 2019 RKAP and 24 persons lower than the realization in 2018. This was because the internal recruitment process of subsidiaries was still carried out.

Non Organic, Organic Employees, Other Shareholders and Non IPC BOD

The realization of the number of non-organic employees in 2019 at the parent company was 975 persons or 327 persons lower than the 2019 RKAP and 280 persons lower than the realization in 2018. While the realization of the number of non-organic employees in 2019 in subsidiaries was 6,194 persons or 295 persons higher compared to the 2019 RKAP and 882 persons higher compared to the realization in 2018. This was due to the transfer of non-organic employees from Port Branches to subsidiaries due to the spin off of PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) and PT IPC Terminal Petikemas (PT ITPK).

Program Pembelajaran

Pada tahun 2019 realisasi jumlah personil yang mengikuti program pembelajaran sebanyak 5.085 pekerja dengan realisasi sebanyak 287 program pembelajaran, dengan rincian sebagai berikut.

Learning Program

In 2019, the realization of the number of personnel participating in the learning program was 5,085 employees with the realization of 287 learning programs, with the following details.

Tabel program pembelajaran tahun 2019 (dalam orang)
2019 Learning Program (in person)

No	Program Pembelajaran <i>Learning Program</i>	RKAP 2019		Realisasi 2019		Penyerapan	
		Jumlah Program <i>Number of Programs</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>	Jumlah Program <i>Number of Programs</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>	Jumlah Program <i>Number of Programs</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>
1	Pendidikan Education	2	8	1	1	50%	13,0%
2	Program Pembelajaran Training Program						
	a. Dasar Korporat Corporate Basic	2	149	4	146	200%	98%
	b. Wajib Korporat Corporate Mandatory	4	664	6	1,197	150%	180%
	c. Kepemimpinan Korporat Corporate Leadership						
	• Kepemimpinan Korporat – Pengembangan Karir Corporate Leadership – Career Development	11	388	17	407	155%	105%
	• Kepemimpinan Korporat – Persyaratan Karir Corporate Leadership – Career Requirement	28	756	29	671	104%	89%
	d. Lintas Akademi Cross-Academy	16	248	50	342	313%	138%
	e. Keahlian dan Wajib Sekolah School Mandatory and Skills						
	• Akademi Komersial Commercial Academy	18	307	12	227	67%	74%
	• Akademi Teknik Technical Academy	29	335	21	231	72%	69%
	• Akademi Operasi Operations Academy	55	824	48	533	87%	65%
	• Akademi Keuangan Finance Academy	26	245	18	310	69%	127%
	• Akademi Kepemimpinan dan Bisnis Pendukung Leadership and Supporting Business Academy	75	782	64	748	85%	96%
	• Akademi Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation & Business Development Academy	17	282	14	212	82%	75%
3	Magang Internship	3	35	3	60	100%	171%
Jumlah Total		286	5.023	287	5.085	100,3%	101,2%



Pencapaian tahun 2019 terhadap RKAP mencapai 100,3% untuk jumlah program dan 101,2% untuk jumlah peserta. Pencapaian tersebut disebabkan kebijakan pengembangan SDM di tahun 2018 berdasarkan Surat Menteri BUMN No:S-564/MBU/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk penyusunan RKAP Tahun 2019. Arahan umum tersebut menyebutkan bahwa seluruh BUMN wajib membangun *Integrated Talent Management System* (ITMS) dan mengirimkan talenta Perseroan ke dalam *talent pool* di Kementerian BUMN yang terdiri dari minimal 20% dari seluruh pejabat satu level di bawah Direksi dan kandidat calon Direksi minimal 3 (tiga) orang suksesor per posisi Direksi. Anggaran untuk pengembangan *Human Capital/SDM* agar dialokasikan dalam RKAP minimal 5% dari total biaya *Human Capital/SDM* dalam 1 (satu) tahun. Adapun ringkasan pencapaian program pembelajaran tahun 2019 adalah sebagai berikut.

The achievements in 2019 of the RKAP reached 100.3% for the number of programs and 101.2% for the number of participants. This achievement was due to the Human Capital development policy in 2018 based on the Minister of SOE Letter No: S-564/MBU/08/2018 dated August 21, 2018 regarding the Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the preparation of the 2019 RKAP. This general directive stated that all SOEs must develop Integrated Talent Management System (ITMS) and sending the Company's talents into the talent pool at the Ministry of SOEs consisting of a minimum of 20% of all officials one level below Board of Directors and candidates for Board of Directors of at least 3 (three) successors per Director position. The budget for the development of Human Capital/HC should be allocated in the RKAP at least 5% of the total cost of Human Capital/HC in 1 (one) year. The summary of the learning program achievement in 2019 is as follows.

Tabel pencapaian Program Pembelajaran Tahun 2019
Table of Achievement of 2019 Learning Program

No	Jenis Type (1)	RKAP 2019 2019 RKAP (2)	Realisasi 2019 2019 Realization (3)	Pencapaian 2019 Achievement (4)=(3)/(2)*100%
1	Jumlah Program Number of Programs	286	287	100,3%
2	Jumlah Peserta Number of Participants	5.023	5.085	101,2%

PENCAPAIAN ASPIRASI PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham IPC adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan 100%. Menteri Badan Usaha Milik Negara telah menyampaikan surat edaran kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas BUMN Nomor: S-574/MBU/08/2019 pada tanggal 30 Agustus 2019 perihal Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020.

Untuk realisasi tahun 2019, kinerja IPC telah memenuhi aspirasi pemegang saham. Bahkan pencapaiannya lebih baik dari tahun sebelumnya dan lebih tinggi dari rata-rata industri. Rinciannya di sampaikan dalam tabel di bawah ini:

ACHIEVEMENT OF SHAREHOLDER ASPIRATION

The shareholder of IPC is the Government of the Republic of Indonesia with 100% ownership. The Minister of State-Owned Enterprises has submitted the Circular Letter to the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs No. S-547/MBU/08/2019 dated August 30, 2019 regarding the Submission of Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the Preparation of the Company's 2020 Work Plan and Budget.

For the 2019 realization, the performance of IPC has fulfilled the shareholder aspirations. Even exceeding the achievement in the previous year and higher than the industry average. The details are presented in the following table:

Tabel Shareholder Aspiration (SHA)

No	Sasaran Keuangan Financial Targets	Satuan Unit	Aspirasi Pemegang Saham Shareholder Aspiration				Keterangan Remark	
			Kriteria Criteria	Uraian Description	RKAP 2019 2019 RKAP	Realisasi 2019 2019 Realization		
A. Absolute Target*)								
1	Total Aset Total Assets	Rp (triliun) Rp (trillion)			54,17	52,04	Memenuhi Fulfilled	
2	Laba tahun berjalan Income for the Year	Rp (triliun) Rp (trillion)			2,61	2,50	Memenuhi Fulfilled	
3	Total Ekuitas Total Equity	Rp (triliun) Rp (trillion)			17,49	18,13	Memenuhi Fulfilled	
4	Capital Expenditure	Rp (triliun) Rp (trillion)			11,98	3,43	Memenuhi Fulfilled	
5	Dividen Dividend	Rp (miliar) Rp (billion)			757,76	832,74	Memenuhi Fulfilled	
B. Main Target								
1.	Sales to Average Asset	%			33,19	25,50	21,17	Tidak Memenuhi Not Fulfilled
2.	Debt to Equity Ratio (DER)	x			0,99	1,33	1,22	Memenuhi Fulfilled
3.	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	%	Target harus lebih baik dari pencapaian tahun sebelumnya dan/atau lebih tinggi dari RKAP 2019		4,58	4,92	2,18	Tidak Memenuhi Not Fulfilled
4.	EBTIDA Margin	%			41,23	38,37	31,82	Tidak Memenuhi Not Fulfilled
5.	Net Income Margin	%			19,28	19,33	22,86	Memenuhi Fulfilled
6.	Return on Equity (ROE)	%			18,21	18,40	15,72	Tidak Memenuhi Not Fulfilled
7.	Return on Asset (ROA)	%	The target must be better than the previous year achievement and / or higher than 2019 RKAP		5,83	4,82	4,81	Memenuhi Fulfilled
8.	Market Share	%			103,71	106,18	100,00	Tidak Memenuhi Not Fulfilled
9.	Current Ratio	x			2,11	2,49	3,98	Memenuhi Fulfilled
10	Operating Cash flow Sales	%			0,16	0,17	11,34	Memenuhi Fulfilled
11	Cash Flow to Debt Ratio	x			0,09	0,05	0,04	Tidak Memenuhi Not Fulfilled
C. Specific Target								
1	Seaport Capacity Utilization Rate (SCUR)	%			48,13	45,97	40,20	Memenuhi Fulfilled
2	Number of Customer served (Ships)	GT			149.337.598	235.008.755	209.121.201	Tidak Memenuhi Not Fulfilled
3	Berth Occupancy Revenue (BOR) Per TEU	Rp / TEUs			1.486.250	2.281.542	1.1643.133.64	Memenuhi Fulfilled

*) Absolute target harus sesuai dengan rencana strategis kementerian BUMN 2015 – 2019 (di dalam rencana strategis kementerian BUMN 2015 – 2019 tidak menyebutkan nilai nominal baik total aset, laba, total ekuitas, belanja modal dan dividen)

*) Absolute target must be in line with the SOE Ministry's strategic plan 2015 - 2019 (in the SOE Ministry's strategic plan 2015 – 2019, the nominal value of total assets, profits, total equity, capital expenditure and dividends are not mentioned)



PROYEKSI (TARGET KE DEPAN)

Perseroan mengajukan RKAP tahun 2019 berdasarkan taksasi tahun 2019 yang berdasar pada Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020 dari Kementerian BUMN Nomor: S-574/MBU/08/2019 pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan asumsi sebagai berikut.

PROJECTION (FUTURE TARGET)

The Company proposed the 2019 RKAP based on the 2019 estimation based on the Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the Preparation of the 2020 Corporate Work Plan and Budget from the Ministry of SOEs Number: S-574/MBU/08/2019 on August 30, 2019 with the following assumptions .

Tabel Asumsi Dasar Makro
Table of Macro Basic Assumptions

Indikator <i>Indicators</i>	Asumsi Makro Ekonomi 2020 <i>Macroeconomic Assumptions 2020</i>
Pertumbuhan Ekonomi Economic growth	5,3%
Tingkat Inflasi Inflation rate	3,1%
Kurs Rupiah per USD Exchange rate of Rupiah per USD	Rp14.400
Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 (tiga) Bulan State Treasury Bills (SPN) 3 (three) months	5,4%
Harga Minyak Mentah Crude Oil Prices	65 USD/barel

Sumber:

- Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Agustus 2019
- Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2019, Badan Pusat Statistik 2018
- Badan Pusat Statistik (BPS), *website* melalui <https://www.bps.go.id/site/resultTab>
- Kementerian Keuangan, *website* melalui <https://www.kememkeu.go.id/apbn2019>, [https://www.kememkeu.go.id/publikasi/berita/DPR setujuji asumsi dasar ekonomi makro-rapbn tahun 2020](https://www.kememkeu.go.id/publikasi/berita/DPR%20setujui%20asumsi%20dasar%20ekonomi%20makro-rapbn%20tahun%2020)
- Surat Menteri BUMN RI No Nomor: S-574/MBU/08/2019 pada tanggal 30 Agustus 2019 perihal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020
- Rakortas Pelindo I-IV (Persero)

Source:

- 2019 Indonesia Economic Report, Central Bureau of Statistics August 2019
- 2019 Indonesian Economic Report, Central Bureau of Statistics 2018
- Central Bureau of Statistics (BPS), *website* through <https://www.bps.go.id/site/resultTab>
- Ministry of Finance, *website* through <https://www.kememkeu.go.id/apbn2019>, [https://www.kememkeu.go.id/publikasi/berita/DPR agreed to the basic macro economic assumptions-rapbn in 2020](https://www.kememkeu.go.id/publikasi/berita/DPR%20agreed%20to%20the%20basic%20macro%20economic%20assumptions-rapbn%20in%2020)
- Letter of RI Minister of SOE Number: S-574/MBU/08/2019 on August 30, 2019 concerning the Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the Preparation of the 2020 Corporate Work Plan and Budget
- Rakortas Pelindo I-IV (Persero)

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, Perseroan menyusun proyeksi untuk tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

Based on the above assumptions, the Company prepared the following 2020 projections.

PROYEKSI LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Uraian proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

PROJECTION OF CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

The projection of 2020 Consolidated Statement of Financial Position is as follows.

Tabel Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Projections of Consolidated Statement of Financial Position (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	Proyeksi 2020 2020 Projections
(1)	(2)
ASET	
ASSET	
ASET LANCAR	
CURRENT ASSETS	
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	16.373.420.976
Investasi Jangka Pendek Short-term Investments	2.282.424.337
Piutang Usaha – Neto Trade Receivables - Net	890.904.128
Piutang Lain-Lain – Neto Other Receivables - Net	580.228.499
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka Advances and Prepaid Expenses	121.849.143
Pendapatan Yang Masih Akan Diterima Accrued Revenues	401.325.013
Persediaan Inventories	72.565.193
Pajak Dibayar Di Muka Prepaid Taxes	2.562.218.004
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	23.284.935.294
ASET TIDAK LANCAR	
NON-CURRENT ASSETS	
Investasi Pada Entitas Asosiasi Investment in Associates	6.458.867.297
Properti Investasi – Neto Investment Properties - Net	290.819.883
Aset Tetap – Neto Fixed Assets - Net	15.843.172.835
Aset Pengelolaan Bersama – Neto Joint Operation Assets - Net	450.330.538
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	46.085.509
Aset Tidak Berwujud – Neto Intangible Assets - Net	11.482.232.512
Aset lain-lain dan Taksiran tagihan restitusi pajak Other Assets and Estimated Claims for Tax Refund	1.320.197.429
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-current Assets	35.891.706.003
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	59.176.641.296
LIABILITAS	
LIABILITIES	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
CURRENT LIABILITIES	
Utang Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans	5.000.000



Tabel Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Ribuan Rupiah)
 Table of Projections of Consolidated Statement of Financial Position (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	Proyeksi 2020 2020 Projections
(1)	(2)
Utang Usaha Trade Payables	2.899.446.165
Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Pendek Short-term Unearned Revenues	1.597.498.534
Utang Pajak Taxes Payable	459.375.839
Beban Akrua Accrued Expenses	2.985.331.420
Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang Current Maturities of Long-term Liabilities	54.405.122
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Other Current Liabilities	237.168.078
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	8.238.225.158
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES	
Utang Bank Jangka Panjang Long-term Bank Loans	1.002.013.889
Utang Obligasi Bonds Payable	22.802.635.907
Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Lancar Long-term Liabilities - Net of Current Maturities	120.782.063
Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Panjang Long-term Unearned Revenues	3.880.316.546
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefit Liabilities	2.067.512.879
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	489.162.958
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-current Liabilities	30.362.424.242
TOTAL LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	38.600.649.400
EKUITAS EQUITY	
Modal Dasar – 4,000,000 Saham Authorized Capital - 4,000,000 Shares	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 1,444,029 Saham Issued and Fully Paid Capital - 1,444,029 Shares	1.444.029.000
Modal Donasi Donated Capital	26.825.982
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	(317.597.455)
Saldo Laba Retained Earnings	

Tabel Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Projections of Consolidated Statement of Financial Position (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	Proyeksi 2020 2020 Projections
(1)	(2)
Ditetapkan Penggunaannya Appropriated	15.073.989.446
Belum Ditetapkan Penggunaannya Unappropriated	3.017.192.705
Pendapatan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(101.314.871)
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of Parent Entity	19.143.124.788
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	1.432.867.109
JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY	20.575.991.897
JUMLAH LIABILITAS KEPENTINGAN NON PENGENDALI, DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES OF NON-CONTROLLING INTERESTS AND EQUITY	59.176.641.296

PROYEKSI LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Uraian proyeksi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

PROJECTION OF CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

The projection of 2020 Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income is as follows.

Tabel Proyeksi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam Ribuan Rupiah)
Table of Projection of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	Proyeksi 2020 2020 Projection
(1)	(2)
Pendapatan Operasi Operating Revenues	13.500.794.725
Pendapatan Konstruksi Construction Revenues	1.564.000.000
Beban Operasi Operating Expenses	(9.285.766.005)
Beban Konstruksi Construction Expenses	(1.564.000.000)
Pendapatan Operasi lainnya – neto Other operating income – net	393.665.421
Beban operasi lainnya Other Operating Expenses	(246.078.318)
Laba Usaha Income From Operations	4.362.615.823
Pendapatan Keuangan Finance Income	449.588.587



Tabel Proyeksi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam Ribuan Rupiah)

Table of Projection of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in Thousand Rupiah)

Uraian Description	Proyeksi 2020 2020 Projection
(1)	(2)
Beban Keuangan Finance Expenses	(1.123.812.124)
Bagian Laba Entitas Asosiasi Equity in Income of Associates	398.045.902
Laba Sebelum Pajak Final Dan Pajak Penghasilan Badan Income Before Final Tax And Corporate Income Tax	4.086.438.189
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	-
Laba Sebelum Pajak Income Before Tax	4.086.438.189
Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax	(980.745.165)
Laba Periode Berjalan Income For The Year	3.105.693.023
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasikan Ke Laba Rugi Other Comprehensive Income (Expenses) Items That Will Not Be Reclassified To Profit Or Loss	
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Remeasurement of Defined Benefit Plans	-
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain Pos-Pos Yang Akan Direklasifikasikan Ke Laba Rugi Other Comprehensive Income (Expenses) Items That Will Be Reclassified To Profit Or Loss	
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Anak Exchange Differences due to Financial Statements Translatio	
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual Change in Fair Value of Available-for-Sale Financial Assets	149.589.631
Total Laba Komprehensif Periode Tahun Berjalan Total Comprehensive Income For The Year	3.255.282.654
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Income For The Year Attributable To:	
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	3.017.192.705
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	88.500.318
Laba Periode Tahun Berjalan Income For The Year	3.105.693.023
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Comprehensive Income For The Year Attributable To:	
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	3.166.782.336
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	88.500.318
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income For The Year	3.255.282.654

PROYEKSI PEMASARAN

Uraian proyeksi pemasaran tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

MARKETING PROJECTION

The marketing projection for 2020 is presented as follows.

Tabel Proyeksi Pemasaran
Table of Marketing Projection

Uraian Description (1)	Proyeksi 2020 2020 Projection (2)
Market Share	94,48%

PROYEKSI PRODUKSI

Uraian proyeksi produksi tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

PRODUCTION PROJECTION

The production projection for 2020 is presented as follows.

Tabel Proyeksi Produksi
Table of Production Projection

Uraian Description (1)	Satuan Unit (2)	Proyeksi 2020 2020 Projection (3)
Pelayanan Jasa Kapal Ship Services		
Pelabuhan Umum General Dock		
a. Labuh Anchorage	GT	-
b. Tambatan Berthing	Gtetm	370.023.834
c. Pemanduan Pilotage	Kplgrk	78.336
	GT	648.734.059
d. Penundaan Towage	Kpljam Kplhour	142.764
	GT	1.348.477.426
Pelayanan Jasa Barang Cargo Services		
Dermaga Pelabuhan Umum General Dock		
	Ton	50.571.882
	M ³	6.804.295
a. Dermaga Umum General Dock	Box	300.871
	Ekor Animal	519.163
	Unit	578.581
b. Gudang Penumpukan Stacking Warehouse	Ton Hari Ton-Day	3.038.224
	M ³ Hari M ³ -Day	497.938



Tabel Proyeksi Produksi
Table of Production Projection

Uraian Description	Satuan Unit	Proyeksi 2020 2020 Projection
(1)	(2)	(3)
	Ton Hari Ton-Day	9.812.480
	M ³ Hari M ³ -Day	8.378.127
c. Lapangan Penumpukan Stacking Field	Ekor Hari Animal-Day	274.067
	Box Hari Box-Day	137.788
	Unit Hari Unit-Day	245.398
Pelayanan Terminal Terminal Services		
Stevedoring	Ton	34.049.595
	M ³	1.418.843
Cargodoring	Ton	2.811.834
	M ³	-
Overbengen	TEUs	-
	Ton	169.610
Receiving/Delivery	Unit	13.002
	Box	11.182
	Jam Hour	26.096
Pengusahaan Alat Equipment Business	Ton	-
	Box	14.072
Ro-Ro	Paket Package	318.819
Supervisi Supervision		
a. GC, Bag, Dry Bulk, Liquid Cargo	Ton	7.180.345
b. Petikemas Containers	Box	-
c. Hewan Ternak Animal Husbandry	Ekor Animal	-
d. Alat Berat/Kendaraan Heavy Equipment/Vehicles	Unit	-
Bongkar Muat Petikemas Container Loading and Unloading		
Operasi Kapal Ship Operation	Box	1.225.955
	Unit	898
Operasi lapangan: Field operation	Box	1.148.787
Operasi Penumpukan: Stacking Operation	Box-Hari Box-Day	1.726.662

Tabel Proyeksi Produksi
Table of Production Projection

Uraian Description	Satuan Unit	Proyeksi 2020 2020 Projection
(1)	(2)	(3)
Lift On/Lift Off	Box	1.130.193
Overbregen	Box	-
	Box	10.451
	Ton Hari Ton-Day	3.530
Operasi CFS: CFS Operation	Ton/M ³	-
	Ton	-
	M ³	-
	M ³ Hari M ³ -Day	-
Angkutan Langsung Direct Transport	Ton	-
	M ³	-
	Ton	3.831.713
Lainnya Others	Unit	-
	Jam Hour	-
Terminal Kendaraan – PT IKT Vehicle Terminal – PT IKT		
Kegiatan B/M Mobil Vehicle Loading Unloading Activity	Unit	526.356
<i>General Cargo</i>		
Alat Berat Heavy Equipment	Unit	72.107
	M ³	3.506.181
Spare Part	PKGS	16.562
	M ³	68.941
Unitized Cargo (Empty Can)	M ³	-
Operasional Non Terminal – PT MTI Non Terminal Operations – PT MTI		
a. Freight Forwarding		15.802
b. Trucking		11.474
c. Warehousing		313.432
d. Lapangan		174.020
Pengusahaan Alat Equipment Business		
Pengusahaan Alat-alat Equipment Business	Jam	595.675
	Ton	9.151.066
Terminal Petikemas		
Operasi Kapal ¹⁾ Ship operation *)	Box	1.924.987
	Unit	41.309
Operasi Lapangan Field operation	Box	2.157.911
	Box-Shif	69.839



Tabel Proyeksi Produksi
Table of Production Projection

Uraian Description	Satuan Unit	Proyeksi 2020 2020 Projection
(1)	(2)	(3)
	Ton	-
	M ³	-
CFS	Ton-Hari Ton-Day	-
	M ³ -Hari M3-Day	-
	Box	-
	Box-Hari Box-Day	1.472.056
Penumpukan Stacking	Unit Hari Unit-Day	-
Lift On/Lift Off	Box	7.171.58
Stripping/Stuffing	Box	-
Trucking/Share Handling Container	Box	-
Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air Dan Listrik (TBAL) Land, Building, Water, and Electricity Business (TBAL)		
Persewaan Tanah Land Lease		12.151.376
Persewaan Bangunan Building Lease		98.509
Pengusahaan Air Water Business		-
a. Air perkantoran Office Water	Ton	180.066
b. Air kapal Ship Water	Ton	284.458
Pengusahaan Listrik Electricity Business	kWh	106.465.607
Fasilitas Rupa-Rupa Usaha Miscellaneous Facility		
Pas Pelabuhan Port Entry	Lembar Piece	16.159.889
Kontribusi Mekanis/Alat Mechanical/Equipment Contribution	Lumpsum Lumpsum	1.707
Jasa Kebersihan Cleaning Service	Lembar Piece	10.386.618
Retribusi Retribution	Ton	29.664
Lainnya Others	Orang Person	11.222.427

PROYEKSI PENGEMBANGAN SDM

Uraian proyeksi pengembangan SDM tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PROJECTION

The Human Capital development projection for 2020 is presented as follows.

Tabel Proyeksi Sumber Daya Manusia (dalam satuan Orang)
Table of Human Capital Projection (in person)

No	Perusahaan Company	Proyeksi RKAP 2020 Projection of 2020 RKAP
1	Posisi Organik Organic Position	
	Induk Perusahaan (a) Parent Company (a)	1.488
	Induk – dalam penugasan ke Entitas Anak (b) Parent - in assignment to a Subsidiary (b)	1.226
	Sub Total Organik Induk Perusahaan (a) + (b) Sub Total Organic of Parent Company (a) + (b)	2.714
	Jumlah Pegawai Organik Number of Organic Employees	2.066
2	Posisi Non Organik Non-Organic Position	4.780
	Induk Perusahaan (g) Parent Company (g)	1.034
	Entitas Anak (e) = (e1) + (e2) + (e3) Parent Company (g)	6.172
	Non Organik (e1) Non-Organic (e1)	6.108
	Organik Pemegang Saham Lainnya (e2) Other Organic Shareholders (e2)	49
	BOD Non IPC (e3) Non IPC BOD (e3)	15
	Jumlah Pegawai Non Organik (d) + (e) Number of Non-Organic Employees (d) + (e)	7.206
3	Jumlah Induk Perusahaan Number of Parent Company	3.748
4	Jumlah Entitas Anak Number of Subsidiaries	8.238
5	Total (3) + (4) Total (3) + (4)	11.409

Tabel Proyeksi Program Pembelajaran (dalam orang)
Table of Learning Program Projection (in person)

No	Program Pembelajaran Learning Program	RKAP 2020 2020 RKAP	
		Jumlah Program Number of Programs	Jumlah Peserta Number of Participants
1	Pendidikan Education	1	1
2	Program Pembelajaran Training Program		
	a. Dasar Korporat Corporate Basic	1	48
	b. Wajib Korporat Corporate Mandatory	4	1.223
	Kepemimpinan Korporat Corporate Leadership		
	c. Kepemimpinan Korporat – Pengembangan Karir Corporate Leadership – Career Development	5	138



Tabel Proyeksi Program Pembelajaran (dalam orang)
Table of Learning Program Projection (in person)

No	Program Pembelajaran <i>Learning Program</i>	RKAP 2020 <i>2020 RKAP</i>	
		Jumlah Program <i>Number of Programs</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>
	d. Kepemimpinan Korporat – Persyaratan Karir <i>Corporate Leadership – Career Requirement</i>	22	590
	e. Lintas Akademi <i>Cross-Academy</i>	13	175
	Keahlian dan Wajib Sekolah <i>School Mandatory and Skills</i>		
	f. Akademi Komersial <i>Commercial Academy</i>	15	204
	g. Akademi Teknik <i>Technical Academy</i>	23	221
	h. Akademi Operasi <i>Operations Academy</i>	38	545
	i. Akademi Keuangan <i>Finance Academy</i>	20	181
	j. Akademi Kepemimpinan dan Bisnis Pendukung <i>Leadership and Supporting Business Academy</i>	53	536
	k. Akademi Transformasi dan Pengembangan Bisnis <i>Transformation & Business Development Academy</i>	13	184
3	Magang <i>Internship</i>	3	33
Jumlah Total		211	4.079

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

INFORMASI MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Uraian informasi material setelah tanggal laporan keuangan disajikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn No.14 tanggal 26 Maret 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan diantaranya menetapkan perubahan nomenklatur serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

INFORMATION AND MATERIAL FACTS SUBSEQUENT TO THE DATE OF ACCOUNTANT REPORT

MATERIAL INFORMATION SUBSEQUENT TO THE DATE OF FINANCIAL STATEMENTS

Material information subsequent to the date of financial statements is presented as follows:

1. Based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-69/MBU/03/2020 stated in Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn No.14 dated March 26, 2020, the Minister of State-Owned Enterprises (SOE) as the General Meeting of Shareholders (RUPS) of the Company among others stipulated the changes to the nomenclature and composition of Board of Commissioners and Board of Directors to become as follows:

Tabel Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Table of Composition of Board of Commissioners and Board of Directors

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	
Komisaris Utama/Independen <i>President Commissioner/Independent Commissioner</i>	Moermahadi Soerja Djanegara

Tabel Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Table of Composition of Board of Commissioners and Board of Directors

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	
Komisaris Independen Independent Commissioner	Suaidi Marasabessy
Komisaris Commissioner	Kushari Suprianto
Komisaris Commissioner	Montty Giriana
Komisaris Commissioner	D. Andhi Nirwanto
Komisaris Commissioner	Djadmiko
Komisaris Commissioner	R. Agus H. Purnomo
Direksi <i>Board of Directors</i>	
Direktur Utama President Director	Arif Suhartono
Wakil Direktur Utama Vice President Director	Hambra
Direktur Komersial Commercial Director	Rima Novianti
Direktur Teknik Technical Director	Dani Rusli Utama
Direktur Operasi Operations Director	Muarip
Direktur Keuangan Finance Director	Yon Irawan
Direktur SDM dan Umum HC and General Affairs Director	Ihsanuddin Usman
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Business Development Director	Ogi Rulino

- Setelah tanggal pelaporan, terdapat ketidakpastian terhadap kondisi makro ekonomi baik di Indonesia maupun global yang terutama disebabkan oleh virus Covid-19. Kegiatan operasional Perseroan telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19 yang dimulai di Cina dan kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Kondisi ini berdampak pada penurunan yang signifikan pada kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Dampak yang akan terjadi dari penyebaran virus Covid-19 terhadap Indonesia dan Perseroan masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan Perseroan;
- After the reporting date, there is an uncertainty about macroeconomic conditions both in Indonesia and globally, which is mainly caused by the Covid-19 virus. The Company's operational activities have been and may continue to be affected by the spread of the Covid-19 virus which began in China and then spread to other countries including Indonesia. This condition had a significant impact on the Company's operational and financial performance. The impact that will occur from the spread of the Covid-19 virus to Indonesia and the Company still cannot be determined at this time. A significant increase in the number of Covid-19 infections or prolonged spread can affect Indonesia and the Company;



3. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN DAN DAMPAKNYA

IPC tidak memiliki uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

INFORMASI KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Selama tahun 2019, IPC tidak memiliki informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN

Selama tahun 2019, IPC tidak terkena dampak yang signifikan terhadap perubahan harga penjualan atau pendapatan bersih Perseroan.

KOMPONEN-KOMPONEN SUBSTANSI DARI PENDAPATAN DAN BEBAN LAINNYA

Selama tahun 2019, tidak terdapat komponen-komponen dari pendapatan dan beban lainnya yang nilainya sama atau lebih 20% dari total nilai pendapatan dan beban lainnya.

PENINGKATAN/PENURUNAN MATERIAL DARI PENJUALAN/PENDAPATAN BERSIH

Selama tahun 2019, tidak terdapat peningkatan/penurunan material dari penjualan/pendapatan bersih.

3. On March 31, 2020, the Government issued a Government Regulation in lieu of the Republic of Indonesia Law No. 1 of 2020 which stipulated, among other things, a reduction in the tax rate of domestic corporate taxpayers and permanent business from 25% to 22% for the 2020 and 2021 tax year and 20% for the tax year 2022 onwards, and a further reduction of the tax rate of 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements.

INFORMATION AND MATERIAL FACT SUBSEQUENT TO THE DATE OF ACCOUNTANT REPORT AND ITS IMPACT

IPC did not have a description of important events after the date of accountant report including its impact on future performance and business risk.

REPORTED FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

In 2019, IPC did not have any reported financial information that are containing extraordinary and rare events.

IMPACT OF PRICE CHANGES ON SALES OR NET INCOME OF THE COMPANY

In 2019, IPC was not significantly affected by price changes on the Company's sales or net income.

SUBSTANTIAL COMPONENTS OF INCOME AND OTHER EXPENSES

During 2019, there are no components of income and other expenses that are equal to or more than 20% of total income and other expenses.

MATERIAL INCREASED / DECREASED FROM NET SALES / INCOME

During 2019, there was no material increase / decrease in net sales / income.

KEBIJAKAN, PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

KEBIJAKAN DIVIDEN

IPC melaksanakan pembayaran dividen setiap tahun berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Sesuai dengan PMK No. 05/ PMK,02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari dividen, pembayaran dividen dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dividen ditetapkan oleh Pemegang Saham, Jumlah dividen yang ditetapkan adalah sebesar persentase tertentu dari laba bersih (setelah pajak) IPC yang diatribusikan kepada Pemegang Saham. Kebijakan dividen yang didasarkan pada pemenuhan kepentingan Pemegang Saham serta rencana pengembangan usaha IPC.

PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 April 2019 menetapkan penyetoran dividen sebesar Rp832.742.000.000 untuk kinerja keuangan tahun buku 2018. Pembayaran dividen tahun buku 2018 dilakukan pada tanggal 27 Mei 2019, adapun untuk kinerja keuangan tahun buku 2019 akan diputuskan pada RUPS tahun 2020.

DIVIDEND POLICY, ANNOUNCEMENT AND PAYMENT

DIVIDEND POLICY

IPC carries out dividend payment every year based on the resolution of General Meeting of Shareholders (GMS), In accordance with PMK No. 05/PMK,02/2013 concerning Procedures for Depositing Non-Tax State Revenues from dividend. Dividend payment is made no later than 1 (one) month after dividend is determined by Shareholders. The amount of dividend determined is equal to a certain percentage of IPC's net income (after tax) attributable to Shareholders. The dividend policy is based on the efforts to fulfill the interests of Shareholders and the business development plan of IPC.

DIVIDEND ANNOUNCEMENT AND PAYMENT

Based on the resolution of the General Meeting of Shareholders on April 29, 2019, established the payment of dividend amounting to Rp832,742,000,000 for the 2018 fiscal year financial performance. The payment for the 2018 fiscal year dividend was made on May 27, 2019. As for the financial performance of the 2019 fiscal year, will be decided at the 2020 GMS.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen
Table of Dividend Announcement and Payment

Uraian Description	Tahun Buku 2018 Fiscal Year 2018	Tahun Buku 2017 Fiscal Year 2017	Tahun Buku 2016 Fiscal Year 2016
Laba Bersih setelah Pajak (dalam Rupiah penuh) Net Income after Tax (in Thousand Rupiah)	2.379.261.695.356	2.179.893.506.000	1.511.459.775.000
Jumlah Dividen (dalam Rupiah penuh) Amount of Dividend (in full Rupiah)	832.742.000.000	653.968.051.800	453.438.000.000
Rasio Dividen (Payout Ratio) Dividend Ratio (Payout Ratio)	35%	30%	30%
Jumlah saham (dalam lembar) Amount of shares (in shares)	1.444.029.000	1.444.029.000	1.444.029.000
Dividen per Saham (dalam Rupiah Penuh) Dividend per Share (in full Rupiah)	577	453	314
Tanggal Pengumuman Dividen Date of Dividend Announcement	29 April 2019 April 29, 2019	03 April 2018 April 03, 2018	08 Mei 2017 May 08, 2017
Tanggal Pembayaran Dividen Date of Dividend Payment	27 Mei 2019 May 27, 2019	30 April 2018 April 30, 2018	06 Juni 2017 June 06, 2017

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 02 tanggal 3 April 2018 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

Based on the the Company's General Meeting of Shareholders that has been notarized in the Minutes of the Company's General Meeting of Shareholders No. 02 dated April 3, 2018 by Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., the Company's shareholders agreed on, among others:



- Penggunaan laba neto konsolidasian Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut:
 - Pembagian dividen tunai sebesar 30% dari laba neto atau sebesar Rp653.968.052;
 - Penetapan cadangan sebesar 70% dari laba neto atau sebesar Rp1.525.925.454.

Perseroan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 30 April 2018.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 13 tanggal 29 April 2019 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

- Penggunaan laba neto konsolidasian Perseroan tahun buku 2018 sebagai berikut:
 - Pembagian dividen tunai sebesar 35% dari laba neto atau sebesar Rp832.742.000.000;
 - Penetapan cadangan sebesar 65% dari laba neto atau sebesar RpRp1.546.519.695.000.

Perseroan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 27 Mei 2019.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Per 31 Desember 2019, sesuai dengan karakteristik IPC yang 100% dimiliki oleh Pemerintah maka tidak ada program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Perseroan (ESOP/MSOP) di IPC. Dengan demikian tidak terdapat informasi program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Perseroan (ESOP/MSOP) seperti jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak dan harga *exercise*.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak melakukan penerbitan saham untuk publik sehingga informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tidak dapat disajikan dalam laporan tahunan ini.

Meskipun demikian, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menerbitkan dua seri *global bond* dengan nilai total USD1,6

- The use of the Company's consolidated net income for the fiscal year 2017 as follows:

- Distribution of cash dividend amounting to 30% of net income or Rp653,968,052;
- Determination of reserves amounting to 70% of net income or Rp1,525,925,454.

The Company has carried out the payment of dividend as mentioned above on April 30, 2018.

Based on the Company's General Meeting of Shareholders that has been notarized in the Minutes of the Company's General Meeting of Shareholders No. 13 dated April 29, 2019 by Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., the Company's shareholders agreed on, among others:

- The use of the Company's consolidated net income for the fiscal year 2018 as follows:
 - Distribution of cash dividend amounting to 35% of net income or Rp832,742,000,000;
 - Determination of reserves amounting to 65% of net profit or Rp1,546,519,695,000

The Company has carried out the payment of dividend as mentioned above on May 27, 2019.

EMPLOYEE AND MANAGEMENT STOCK OPTION PLAN (ESOP/MSOP)

As of December 31, 2019, according to the characteristics of IPC which is 100% owned by the Government, there was no employee and/or management stock option plan (ESOP/MSOP) carried out by the Company in IPC. As such, there is no information regarding employee and/or management stock option plan (ESOP/MSOP) by the Company such as the number of ESOP/MSOP shares and their realization, time period, employee requirements and/or eligible management and exercise prices.

REALIZATION OF THE USE OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has not issued its shares for the public, hence information about the realization of the use of proceeds from public offering is not available for disclosure in this annual report.

However, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has issued two series of global bonds with a total value of USD1.6 billion. The

miliar. Seri pertama *global bond* tersebut bernilai USD1,1 miliar yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 10 tahun atau pada tahun 2025, dengan bunga 4,250% dan *yield* 4,375%. Sementara seri kedua bernilai USD500 juta dengan jangka waktu 30 tahun atau jatuh tempo pada tahun 2045, dengan bunga 5,375 % dan *yield* 5,500%.

Berdasarkan *Bond Indenture* baik untuk obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2025 dan 2045, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak disyaratkan untuk melaporkan penggunaan dana tersebut.

Realisasi penggunaan dana obligasi yang diperoleh digunakan untuk pelunasan utang sindikasi 7 (tujuh) bank, rencana kegiatan ekspansi Perseroan dan untuk modal kerja IPC. Rencana kegiatan ekspansi perusahaan yang sedang dilaksanakan seperti keperluan proyek strategis (Proyek Terminal Petikemas Kalibaru (New Priok), Proyek Pelabuhan Kijing) sebagaimana yang telah disebutkan pada *offering circular*. Selain itu, dana tersebut juga dimanfaatkan untuk Proyek Cikarang Bekasi Laut *Waterway* serta untuk capital expenditure lainnya.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan ketentuan Bapepam LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang dimaksud Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud.

Sampai dengan akhir tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori benturan kepentingan.

TRANSAKSI AFILIASI

Afiliasi, adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.
2. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perusahaan tersebut;

first global bond series was worth USD1.1 billion that will mature in 10 years or in 2025, with an interest rate of 4.250% and yield rate of 4.375%. The other series is worth USD500 million that will mature in 30 years or in 2045, with an interest rate of 5.375% and a yielding rate of 5.500%.

Based on the Bond Indenture for the bonds maturing in 2025 and 2045, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is not required to report the use of these funds.

The funds from the Bonds was used to repay the syndicated debt of 7 (seven) banks, plan the Company's expansion and for IPC working capital. The planned company expansion that are being carried out such as strategic project requirements (Kalibaru Container Terminal Project (New Priok), Kijing Port Project) as mentioned in the offering circular. In addition, the funds were also used for Cikarang Bekasi Laut Waterway Project and for other capital expenditures.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS

Based on the provisions of Bapepam LK No.IX.E.1 regarding Affiliated Transactions and Conflicts of Interest of Specific Transactions, Conflict of Interest is defined as the difference between the Company's economic interests and the personal economic interests of members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, or major shareholders that may harm the Company.

Until the end of 2019, there were no transactions that met the category of conflict of interest.

AFFILIATED TRANSACTIONS

Affiliates are:

1. Family relationships due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically;
2. Relationship between the Party and employees, directors or commissioners of that Party;
3. Relationship between 2 (two) companies, where there are one or more members of the same Board of Directors or Board of Commissioners.
4. relationship between the Company and the Party, both directly and indirectly, either controls or is controlled by the Company;



5. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Berdasarkan ketentuan Bapepam LK No.IX.E.1 yang dimaksud Transaksi Afiliasi adalah transaksi tertentu yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan.

Sampai dengan akhir tahun 2019, tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi dengan pihak terafiliasi.

TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengendalian dengan Perseroan.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perseroan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

NAMA PIHAK DAN SIFAT HUBUNGAN BERELASI

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

5. Relationship between 2 (two) companies that are controlled, directly or indirectly, by the same Party; or
6. Relationship between the Company and Major Shareholders.

Based on the provisions of Bapepam LK No.IX.E.1, Affiliated Transactions are defined as certain transactions conducted by the Company or Controlled Company with Affiliates of the Company or Affiliates of members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, or major shareholders of the Company.

Until the end of 2019, there were no transactions that met the category of transactions with affiliated parties.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

In normal business activities, the Company enters into transactions with related parties. The entity is considered to be related if the entity, among others, either directly or indirectly, can control or jointly control, or has a significant influence on the Company in financial and operational decision making. The entity is also considered to be related if the entity is under common control with the Company.

The Government of the Republic of Indonesia is the Company's shareholder. All entities owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and entities where the Government of the Republic of Indonesia has significant influence are related parties.

NAME OF RELATED PARTIES AND NATURE OF RELATIONSHIP

A summary of the nature of relationship and significant transactions with related parties are as follows:

Tabel Transaksi Pihak Berelasi
Table of Related Party Transactions

Sifat Relasi <i>Nature of Relationship</i>	Nama Pihak Berelasi <i>Name of Related Parties</i>	Jenis Transaksi <i>Type of Transaction</i>
Pemegang Saham Shareholder	Negara Republik Indonesia The Republic of Indonesia	Jasa Konsesi Concession Services

Tabel Transaksi Pihak Berelasi
Table of Related Party Transactions

Sifat Relasi <i>Nature of Relationship</i>	Nama Pihak Berelasi <i>Name of Related Parties</i>	Jenis Transaksi <i>Type of Transaction</i>
Entitas Berelasi dengan Pemerintah Entity having relationship with the Government	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa Perbankan dan Pinjaman Banking Services and Loans
	PT Bank Syariah Mandiri	Jasa Perbankan dan Pinjaman Banking Services and Loans
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa Perbankan Banking Services
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa Perbankan Banking Services
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa Perbankan Banking Services
	PT Bank BNI Syariah	Jasa Perbankan Banking Services
	PT BRI Agroniaga Tbk	Jasa Perbankan Banking Services
	PT Perusahaan listrik Negara (Persero)	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales of Operational Services and Activities
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales of Operational Services and Activities
	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales of Operational Services and Activities
	Koperasi Pegawai Maritim	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales of Operational Services and Activities
	PT Multimedia Nusantara	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales of Operational Services and Activities
	PT Nusantara Regas	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales of Operational Services and Activities
	PT Pertamina Patra Niaga	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales of Operational Services and Activities
	Koperasi Karyawan TPK KOJA	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales of Operational Services and Activities
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Semen Padang	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Dharma Lautan Nusantara	Penjualan jasa Sales of Services
	Tentara Nasional Indonesia	Penjualan jasa Sales of Services
	Instansi Pemerintah	Penjualan jasa Sales of Services
	BPJS Kesehatan	Penjualan jasa Sales of Services



Tabel Transaksi Pihak Berelasi
Table of Related Party Transactions

Sifat Relasi <i>Nature of Relationship</i>	Nama Pihak Berelasi <i>Name of Related Parties</i>	Jenis Transaksi <i>Type of Transaction</i>
	PT Pupuk Indonesia Logistik	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Graha Sarana Duta	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)	Penjualan jasa Sales of Services
	PT BNI Life Insurance	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Pertamina Trans Kontinental (Persero)	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Bukit Asam Tbk	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Perkebunan Nusantara VII	Penjualan jasa Sales of Services
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa pembangunan Construction Services
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa pembangunan Construction Services
	PT Utama Karya (Persero)	Jasa pembangunan Construction Services
	PT Wijaya Karya (Persero)	Jasa pembangunan Construction Services
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan (DP4)	Jasa pension Pension Services
	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Pinjaman Loans
	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Pinjaman Loans
	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Pinjaman Loans
	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Pinjaman Loans
Entitas Asosiasi Associates	JICT	Sewa dan Royalti Rental and Royalty
	NPCT1	Investasi Investment
Operasi Bersama Joint Operations	TPK Koja	Sewa dan Royalti Rental and Royalty

KEWAJARAN TRANSAKSI

Transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara wajar sesuai dengan kepentingan Perseroan (*Arm's Length Transaction*). Transaksi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bebas dari konflik kepentingan.

FAIRNESS OF TRANSACTION

Transactions with related parties have been conducted fairly in accordance with the interests of the Company (*Arm's Length Transaction*). Transactions have been carried out in accordance with statutory regulations and are free from conflicts of interest.

ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilaksanakan atas dasar alasan kebutuhan usaha Perseroan serta ditujukan untuk meningkatkan kinerja Perseroan.

REASONS OF TRANSACTION

All transactions with related parties are carried out on the grounds of the Company's business needs and are intended to improve the Company's performance.

REALISASI TRANSAKSI

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut.

REALIZATION OF TRANSACTIONS

Details of significant account with related parties (government, government entities or otherwise stated) are as follows.

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi (dalam ribuan Rupiah)
Table of Realization of Related Party Transaction (in thousand Rupiah)

Uraian Description	31 Desember 2019 December 31, 2019		31 Desember 2018 December 31, 2018	
	Total	Persentase Percentage (%)	Total	Persentase Percentage (%)
Kas dan Setara Kas Cash and cash equivalents				
Bank Bank				
Rupiah	698.369.522	1,34%	2.486.847.153	4,88%
Dolar AS US dollar	254.243.344	0,49%	63.895.201	0,13%
Euro	44	0,00%	320.652	0,00%
Deposito Berjangka Time Deposit				
Rupiah	2.631.242.274	5,03%	2.378.010.277	4,62%
Dolar AS US dollar	11.118.801.515	21,23%	8.705.884.489	16,92%
Dolar Singapura Singapore Dollar	-	-	471.954.525	0,92%
Investasi Jangka Pendek Short-term Investment				
Deposito berjangka Time Deposit	2.259.297.400	4,31%	3.103.253.994	6,03%
Piutang Usaha Trade Receivables	135.198.738	0,24%	155.875.322	0,62
Piutang Lain-lain Other Receivables	784.951.419	1,49%	640.168.731	1,23%
Pendapatan Masih Akan Diterima Accrued Revenues	46.586.491	0,08%	65.953.809	0,11
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	28.193.914	0,08%	4.000.000	0,00
Utang Usaha Trade Payables	1.076.552.787	3,17%	1.247.008.500	3,55
Uang untuk diperhitungkan Advances from customers	950.251	0,00%	1.028.107	0,00%
Uang titipan pelanggan Deposits from customers	18.382.047	0,04%	14.748.481	0,04%
Liabilitas jangka pendek lainnya dan Liabilitas jangka panjang lainnya Other short-term liabilities and other long-term liabilities	30.137.737	0,10%	38.272.280	0,11%



Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi (dalam ribuan Rupiah)
Table of Realization of Related Party Transaction (in thousand Rupiah)

Uraian Description	31 Desember 2019 December 31, 2019		31 Desember 2018 December 31, 2018	
	Total	Persentase Percentage (%)	Total	Persentase Percentage (%)
Utang bank Jangka Panjang Long-term bank loans	114.990.000	0,00%	-	0,00%

Rincian pihak-pihak berelasi untuk tiap-tiap transaksi pihak berelasi telah disajikan secara rinci dalam Laporan Keuangan tahun buku 2019.

Details of related parties for each related party transaction have been presented in details in the Financial Statements for the fiscal year 2019.

KEBIJAKAN MEKANISME REVIU TRANSAKSI

Setiap transaksi dengan pihak berelasi harus melalui mekanisme reviu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, dilakukan dengan syarat normal dan wajar.

POLICY ON TRANSACTION REVIEW MECHANISM

Every transaction with a related party must go through a review mechanism in accordance with what has been determined by the Company. All transactions and significant balances with related parties are carried out on normal and reasonable terms.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transactions with related parties are carried out based on terms agreed by both parties, wherein the requirements may not be the same as transactions with unrelated parties.

Persyaratan dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi secara umum dilakukan sebagaimana dengan pihak ketiga yang di reviu oleh Komite Audit serta wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

The terms and conditions of transactions with related parties are generally carried out as with third parties, which are reviewed by the Audit Committee and must obtain approval from the Board of Commissioners.

PEMENUHAN PERATURAN TERKAIT

Selama tahun 2019, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi.

FULFILLMENT OF RELATED REGULATIONS

In 2019, there was no violation of laws and regulations related to transactions with related parties.

ASPEK PERPAJAKAN

PUBLIKASI PEMBAYARAN PAJAK

IPC dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya, dimana hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TAXATION ASPECT

TAX PAYMENT PUBLICATION

In its operational activities, IPC has implemented good corporate governance in a transparent and accountable manner, especially in managing its tax rights and obligations, where its tax rights and obligations are carried out in accordance with applicable regulations.

PEMBAYARAN PAJAK

Total Pembayaran Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak periode Januari sampai dengan Desember 2019, sebagai berikut:

TAX PAYMENT

Total tax payments and non-tax state revenues for the period of January to December 2019 are as follows:

Tabel Pembayaran Pajak dan PNBP (dalam miliar Rupiah)
Table of Tax and PNBP Payment (in full Rupiah)

Uraian Pajak Tax Description	Tahun 2019 Year 2019	Tahun 2018 Year 2018
Kontribusi Pajak Tax Contribution		
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Deposit of Income Tax Article 25 and Article 29	116,12	126,00
Penyetoran PPN + PPN Impor + PPN WAPU Deposit of VAT + Import VAT + WAPU VAT	520,70	623,35
Penyetoran PPh 21, PPh 23, PPh Pasal 4 (2), PPh 26 Deposit of Income Tax 21, Income Tax 23, Income Tax Article 4 (2), Income Tax 26	491,43	371,10
Penyetoran Pajak Lainnya (termasuk PBB) Deposit of Other Taxes (including United Nations)	43,67	43,67
Total Kontribusi Pajak Total Tax Contribution	1.172,06	1.164,12
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non-Tax State Revenues (PNBP)		
Pandu dan Tunda Pilotage and Towage	43,33	41,85
Konsesi Concession	223,07	221,99
Total PNBP Total PNPB	266,40	263,85
Jumlah Total	2.271,20	2.081,94

Pembayaran PPN, PPN Import dan PPN WAPU untuk realisasi tahun 2019 sebesar 520,70 miliar lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp623,35 miliar. Penurunan tersebut disebabkan PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran, sejalan dengan meningkatnya pengadaan jasa, barang, dan investasi dalam negeri tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

Pembayaran PPh untuk realisasi tahun 2019 sebesar Rp491,43 miliar lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp371,10 miliar, sejalan dengan meningkatnya PPh Pasal 21 yang dikarenakan adanya penyesuaian remunerasi dan pembayaran bonus pegawai serta meningkatnya PPh 26 yang diakibatkan adanya penambahan setengah dari pembayaran pajak atas bunga global bond tahun 2018.

Penerapan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan merupakan penyetoran periode Triwulan IV tahun 2018 sampai dengan Triwulan III tahun 2019. Untuk penyajian periode tahun 2018 merupakan penyetoran periode Triwulan IV tahun 2017 sampai dengan Triwulan III tahun 2018.

The payment of VAT, Import VAT, and WAPU VAT for the realization of 2019 was 520.70 billion, lower than the realization in 2018 of Rp623.35 billion. The decline was due to input VAT was higher than output VAT, in line with the increased procurement of services, goods, and domestic investment in 2019 compared to 2018.

Income tax payment for the realization of 2019 amounted to Rp491.43 billion, higher than the realization in 2018 of Rp371.10 billion, in line with the increase in Article 21 Income Tax due to adjustments to employee remuneration and bonus payments and an increase in Income Tax 26 resulting from the addition of half of tax payments on the global bond interest in 2018.

The application of Government Regulation Number: 11 of 2015 concerning the types and rates of PNBP applicable to the Ministry of Transportation constitutes deposits for the period of 4th Quarter of 2018 to 3rd Quarter of 2019. For the presentation of the 2018 period is the deposit for the period of 4th Quarter of 2017 to 3rd Quarter of 2018.



Pembayaran konsesi untuk realisasi tahun 2019 merupakan pembayaran atas beban konsesi periode Triwulan IV tahun 2018 sampai dengan Triwulan III tahun 2019. Untuk penyajian periode tahun 2018 merupakan penyetoran periode Triwulan IV Tahun 2017 sampai dengan Triwulan III tahun 2018.

The payment of concession for the realization of 2019 is the payment of the concession expenses for the 4th quarter of 2018 until the 3rd quarter of 2019. For the presentation of the 2018 period is the deposit for the period of 4th Quarter of 2017 to 3rd Quarter of 2018.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA

REGULATORY CHANGES AND THE IMPACT

Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap IPC beserta dampak Perubahan dan Informasi penyesuaian yang dilakukan IPC terhadap perubahan tersebut selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Regulatory changes that affected IPC along with the impact of Changes and Information on adjustments made by IPC to these changes during 2019 are as follows.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan
Table of Regulatory Changes

Peraturan Perundang-Undangan <i>Regulatory</i>	Pokok Pengaturan <i>Main Points</i>	Dampak Terhadap IPC <i>Impact on IPC</i>	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan IPC <i>Information on Adjustment Made by IPC</i>
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-08/MSU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara.	Dampaknya adalah adanya perubahan terhadap beberapa ketentuan dan mekanisme dalam proses serta tata cara pengadaan barang dan jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 Tanggal 1 Maret 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah direview dan sedang dalam proses penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-08/MSU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara.
Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-08/MSU/12/2019 regarding General Guidelines for the Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises	Implementation of Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises.	The impact is changes in some of the provisions and mechanisms in the process and procedures for procurement of goods and services in the environment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number: HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 March 1, 2019 concerning Guidelines for Procurement of Goods/ Services in the Environment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has been reviewed and is in the process of adjusting the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-08/MSU/12/2019 concerning General Guidelines for the Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BARU

APPLICATION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS

ALASAN PENERAPAN

Penerapan standar akuntansi keuangan dilakukan untuk mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) dan Interpretasi

REASONS OF APPLICATION

The application of financial accounting standards is carried out to comply with the Statement of Accounting Standards (PSAK)

Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku dalam tahun berjalan. IPC telah menerapkan sejumlah amandemen/PSAK baru yang relevan dengan operasinya.

PERUBAHAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN DAMPAKNYA

Efektif tanggal 1 Januari 2019, IPC menerapkan beberapa standar akuntansi baru yang relevan terhadap IPC berikut ini:

1. Amandemen PSAK 24 (2018) – Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program;
2. Penyesuaian 2018 PSAK 22 – Kombinasi Bisnis;
3. Penyesuaian 2018 PSAK 26 – Biaya Pinjaman;
4. Penyesuaian 2018 PSAK 46 – Pajak Penghasilan;
5. Penyesuaian 2018 PSAK 66 – Pengaturan Bersama;
6. ISAK 33 - Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka;
7. ISAK 34 – Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan;
8. Amandemen PSAK 15 - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

Penerapan ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan Keuangan konsolidasian.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA

Selama tahun 2019, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi sehingga tidak terdapat dampak atas perubahan kebijakan akuntansi.

TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara terdapat tiga aspek penilaian yaitu aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. Untuk indikator aspek keuangan dan aspek administrasi indikatornya sudah ditentukan di dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, sedangkan untuk aspek operasional disesuaikan dengan bisnis Perseroan. Untuk aspek operasional, manajemen Perseroan menggunakan indikator-indikator berdasarkan Berita Acara Pembahasan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) No. SEKTAP/KPI/03/21/03/PI.II.III&IV/2019 tanggal 21 Maret 2019 sebagai berikut:

1. *Waiting time for pilot*;
2. Tingkat efektivitas tambahan petikemas;
3. Produktifitas B/M petikemas;
4. *Yard occupancy ratio* petikemas.

and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) that apply in the current year. IPC has implemented a number of new amendments/PSAK that are relevant to its operations.

CHANGES IN NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS AND THE IMPACT

Effective since January 1, 2019, IPC applied a number of new accounting standards that are relevant to IPC as follows:

1. Amendment to PSAK 24 (2018) – Employee Benefits regarding Amendments, Curtailment, or Program Completions;
2. Adjustment 2018 PSAK 22 – Business Combinations;
3. Adjustment 2018 PSAK 26 – Borrowing Costs;
4. Adjustment 2018 PSAK 46 – Income Tax;
5. Adjustment 2018 PSAK 66 – Joint Arrangements;
6. ISAK 33 – Foreign Exchange Transactions and Rewards in Advance;
7. ISAK 34 – Uncertainty in the Treatment of Income Taxes;
8. Amendment to PSAK 15 – Investment in Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures.

These applications did not have significant impact on financial reporting and disclosures in the consolidated financial statements.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND THE IMPACT

In 2019, there were no changes in accounting policies, hence no impact on changes in accounting policies is available.

THE COMPANY'S SOUNDNESS LEVEL

Pursuant to the Minister of SOE Decree No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 on the assessment of soundness level of State-Owned Enterprises, there are 3 (three) assessment aspects: financial, operational and administrative aspects. For financial and administrative aspects, the indicators are determined in the Minister of SOE Decree No. KEP-100/MBU/2002, while for operational aspect is adjusted with the Company's business. For operational aspect, the Company's management uses the indicators based on the Minutes of Discussion of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero) No. SEKTAP/KPI/03/21/03/PI.II.III&IV/2019 dated March 21, 2019, as follows:

1. *Waiting time for pilot*;
2. Container Mooring Effectiveness level;
3. Container Loading/Unloading Productivity;
4. Container Yard Occupancy Ratio,



Berikut adalah tabel indikator Tingkat Kesehatan tahun 2019. The following are table of indicators Soundness Level in 2019.

Tabel Realisasi Tingkat Kesehatan Perseroan Tahun 2019

Table of Realization of the Company's Soundness Level in 2019

No.	Indikator Indicators	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Bobot Weight	
I.	Aspek Keuangan Financial Aspect				
a.	Return on Equity (ROE)	%	1	15	
b.	Return on Investment (ROI)	%	1	10	
c.	Rasio Kas Cash Ratio	%	1	3	
d.	Rasio Lancar Current Ratio	%	1	4	
e.	Collection Period	Hari days	-1	4	
f.	Perputaran Persediaan Inventory Turnover	Hari days	-1	4	
g.	Perputaran Total Aset Total Assets Turnover	%	-1	4	
h.	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset Equity to Total Assets Ratio	%	1	6	
	Skor untuk Aspek Keuangan Financial Aspect Score				
II.	Aspek Operasional Operational Aspect				
a.	Waiting Time For Pilot	Jam	-1	9	
b.	Tingkat Efektivitas Tambatan Petikemas Container Mooring Effectiveness	%	1	9	
c.	Produktivitas B/M Petikemas Container Loading/Unloading Productivity	B/S/H	1	8	
d.	Yard Occupancy Ratio Petikemas Container Yard Occupancy Ratio	%	-1	9	
e.	Produktivitas B/M Curah Kering Productivity B/M of Dry Bulk	%	1	-	
	Skor untuk Aspek Operasional Score for Operational Aspect				35.00
III.	Aspek Administratif Administrative Aspect				
a.	Laporan Perhitungan Tahunan Annual Calculation Report	Hari days	-1	3	
b.	Rancangan RKAP RKAP Draft	Hari days	-1	3	
c.	Laporan Periodik Periodic Report	Tanggal Date	-1	3	
d.	Efektivitas Penyaluran Dana Fund Distribution Effectiveness	%	1	3	
e.	Kolektabilitas Pengembalian Pinjaman Loan Collectibility Rate	%	1	3	
	Skor untuk Aspek Administratif Administrative Aspect Score				15.00
	Total Skor Total Score				100.00

	Audited 2019		RKAP 2019		Audited 2018	
	Nilai Value	Skor Score	Nilai Value	Skor Score	Nilai Value	Skor Score
	15.72%	15.00	18.40%	15.00	17.31%	15.00
	13.37%	8.00	15.43%	9.00	11.15%	6.00
	340.02%	3.00	201.86%	3.00	397.49%	3.00
	396.32%	4.00	249.46%	4.00	446.59%	4.00
	28.00	4.00	25.00	4.00	26.00	4.00
	3.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00
	33.34%	2.50	38.93%	2.00	27.32%	1.00
	34.83%	6.00	30.80%	6.00	31.95%	6.00
	BS (0.30)	9.00	BS (0.5)	9.00	BS (0.26)	7.00
	BS (73,15)	9.00	BS (70.26)	9.00	BS (68.65)	7.00
	BS (51,01)	8.00	BS (45.11)	8.00	BS (48.73)	7.00
	BS (40,20)	9.00	BS (45.97)	9.00	BS (44.07)	7.00
	-	-	-	-	BS (299,15)	7.00
		35.00		35.00		35.00
	< 4	3	< 4	3	< 4	3
	< 2	3	< 2	3	< 2	3
	≤ 0	3	≤ 0	3	≤ 0	3
	0.00%	0	100.00%	3	2.89%	0
	0.00%	1	40.47%	2	26.78%	1
		10.00		14.00		10.00
		91.50		96.00		88.00



Tabel Realisasi Tingkat Kesehatan Perseroan Tahun 2019

Table of Realization of the Company's Soundness Level in 2019

No.	Indikator Indicators	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Bobot Weight	
Keterangan Remark					

*Pada tahun 2018, Produktivitas B/M Curah kering diperhitungkan. Akan tetapi pada 2019 tidak diberlakukan lagi.

**Laporan Perhitungan Tahunan Audited 2019 diasumsikan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2020

Skor kinerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk realisasi tahun 2019 berjumlah 91,50 sehingga kesehatan berada dalam kategori SEHAT (AA).

The performance score of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for the realization of 2019 was 91.50, hence the soundness level of the Company is in HEALTHY (AA) category.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Terdapat ketidakpastian terhadap kondisi makro ekonomi baik di Indonesia maupun global yang terutama disebabkan oleh virus Covid-19. Operasi Perseroan telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19 yang dimulai di Cina dan kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Kondisi ini berdampak pada menurunnya secara signifikan operasi dan kondisi keuangan Perseroan. Efek masa depan dari merebaknya virus Covid-19 terhadap Indonesia dan Perseroan masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan Perseroan.

Selain itu, secara domestik terdapat risiko yang akan mempengaruhi kelangsungan bisnis pelabuhan, yaitu terkait dengan pemberlakuan regulasi anti-monopoli di sektor jasa kepelabuhanan dengan dua isu utama:

1. Pemberlakuan Regulasi Anti-monopoli untuk Bisnis Kepelabuhanan sebagaimana dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. "Pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan";
3. Kemudahan Pemberian Surat Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan
4. Sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan, yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

POTENTIALLY INFLUENCING MATTERS OF BUSINESS CONTINUITY

There is an uncertainty about macroeconomic conditions both in Indonesia and globally that are mainly caused by the Covid-19 virus. The Company's operations have been and may continue to be affected by the spread of the Covid-19 virus which began in China and then spread to other countries including Indonesia. This condition resulted in a significant decline in the Company's operational and financial conditions. The future effects of the outbreak of the Covid-19 virus on Indonesia and the Company still cannot be determined at this time. A significant increase in the number of Covid-19 infections or prolonged spread can affect Indonesia and the Company.

In addition, in domestic level, there is a risk that will affect the continuity of the port business, which is related to the implementation of anti-monopoly regulation in the port services sector with two main issues:

1. The enactment of Anti-monopoly Regulation for Port Business as in Law No. 17 of 2008 concerning Shipping;
2. "The arrangement for the port sector that contains provisions concerning the abolition of monopolies in the operation of ports, the separation between the functions of regulators and operators as well as providing regional and private government participation proportionally in port operations";
3. The Ease of Granting Port Business Entity Business Permit;
4. As regulated in several regulations, namely:
 - a. Government Regulation Number 61 Year 2009 concerning Ports;
 - b. Regulation of the Minister of Transportation Number 71 Year 2016 concerning Special Terminals and Terminals for Self-interest,

	Audited 2019		RKAP 2019		Audited 2018	
	Nilai Value	Skor Score	Nilai Value	Skor Score	Nilai Value	Skor Score
	AA (SEHAT) AA (HEALTHY)		AA (SEHAT) AA (HEALTHY)		AA (SEHAT) AA (HEALTHY)	

* In 2018, the productivity of loading and unloading of Dry Bulk is recognized. However, in 2019 it is no longer applies.

** The 2019 Audited Annual Calculation Report is assumed to be submitted no later than 30 April 2020

Implikasi atau potensi ancaman dari regulasi ini adalah kemudahan pesaing (contoh: TUKS/Tersus) dalam memasuki bisnis kepelabuhanan yang dapat menyebabkan:

1. Berkurangnya *market share* IPC di cabang pelabuhan dan meningkatnya fragmentasi pasar;
2. Dominansi pemain lainnya di cabang (contoh: kerja sama langsung kompetitor dengan pemilik kargo untuk bisnis komoditas di cabang).

Namun dengan kekuatan dan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh IPC, perubahan kondisi di industri kepelabuhanan tersebut dapat diakomodir dengan baik oleh IPC dengan melakukan berbagai inisiatif strategi yang tepat, sehingga kelangsungan usaha IPC dapat terjaga dengan baik.

ASESMEN MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen IPC telah melakukan penilaian atas kemampuan IPC untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa IPC memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen IPC tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan IPC untuk melanjutkan usahanya.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN UNTUK MELAKUKAN ASESMEN

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan asesmen terhadap kelangsungan usaha adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan sumber daya IPC yang unggul untuk berkompetisi dalam industri pelabuhan;
2. Posisi IPC dalam industri yang baik dalam kancah regional, yang dapat memberikan kontribusi besar dalam perekonomian negara.

The implication or potential threat of these regulations is the ease for competitors (for example: TUKS/Tersus) to enter the port business, which can cause:

1. Reduced market share of IPC in port branches and increased market fragmentation;
2. The dominance of other players in the branch (for example: direct cooperation of competitors with cargo owners for the commodity business in the branch).

However, with the strength and competitive advantage possessed by IPC, changes in the conditions of port industry can be well accommodated by IPC, by carrying out a variety of strategic initiatives, so that the business continuity of IPC can be maintained properly.

MANAGEMENT ASSESSMENT ON POTENTIALLY INFLUENCING MATTERS ON BUSINESS CONTINUITY

IPC management has assessed IPC's ability to continue as a going concern and believes that IPC has the resources for business continuity in the future. In addition, IPC management does not see any material uncertainty that can raise significant doubts about IPC's ability to continue its business.

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT FOR THE ASSESSMENT

Some of the factors considered by management in conducting an assessment of business continuity are as follows:

1. Superior resource capabilities owned by IPC to compete in the port industry;
2. Good position possessed by IPC in the industry and in the regional scope, which enable IPC to provide a major contribution to the country's economy.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCES



IPC memandang bahwa penerapan GCG bukan sekadar mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator. Oleh karena itu, IPC telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG. Hal ini dibuktikan dengan Capaian *assessment* penerapan GCG IPC pada Tahun Buku 2019 mencapai 98,550 yang meningkat dari Tahun Buku sebelumnya dengan skor 98,303. Kenaikan ini secara umum dikarenakan adanya peningkatan wujud komitmen IPC dalam penerapan GCG.

IPC's view is that the application of GCG is not merely to comply with the provisions set by the Regulator. Therefore, IPC has committed to implementing GCG principles, and this effort was evidenced by IPC's GCG in 2019 being assessed with a score of 98.550, an increase from 98.303 the previous year. This increase was generally due to the increase in IPC's commitment in implementing GCG.



PENCAPAIAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

ACHIEVEMENTS IN CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION



Anugerah BUMN 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Sebagai *Big Corporate* Kategori Tata Kelola Terbaik.

SOE Award 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as the Best Big Corporate Governance Category.



Indonesia Good Corporate Governance Award 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as *Trusted Company Based On Corporate Governance Perception Index (CGPI)*.

Indonesia Good Corporate Governance Award 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as *Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)*.



TOP GRC Awards 2019, Elvyn G. Masassya sebagai *The Most Committed GRC Leader 2019*.

TOP GRC Awards 2019, Elvyn G. Masassya as *The Most Committed GRC Leader 2019*



98,550 

Capaian *Assessment* penerapan GCG Perusahaan pada tahun buku 2019 mencapai 98,550 atau mengalami kenaikan skor sebesar 0,24 poin dari pencapaian di tahun sebelumnya sebesar 98,303.

The Company's GCG implementation in 2019 achieved the score of 98,550 or an increase of 0.24 points compared to the previous year's score of 98,303.

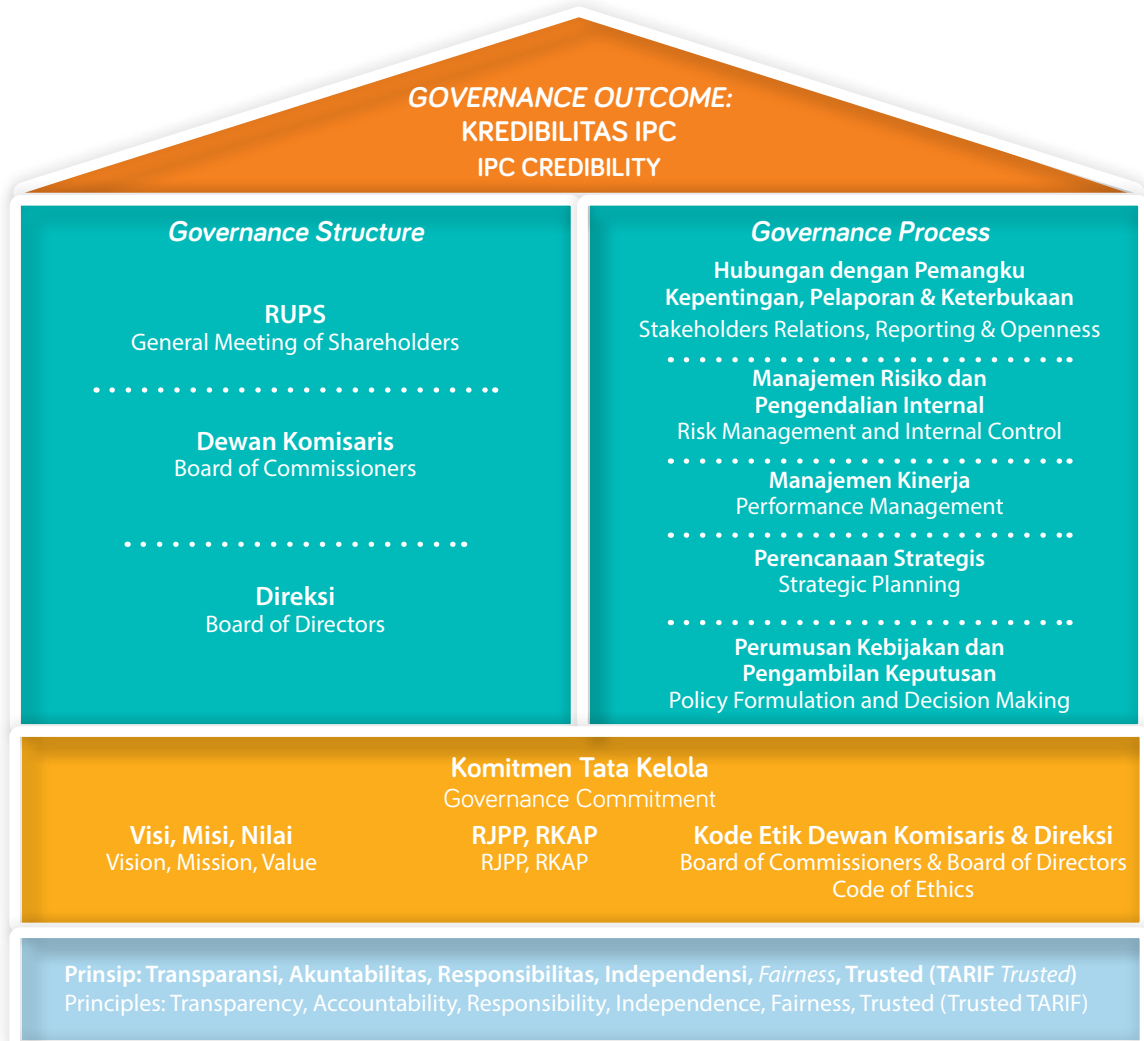


Annual Report Award 2018, Peringkat 1 BUMN Non Keuangan Non Listed Penghargaan Laporan Tahunan 2018.

Annual Report Award 2018, 1st Rank Non-Financial Non Listed SOE 2018 Annual Report Award



KERANGKA PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN FRAMEWORK OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION



Kerangka kerja tata kelola IPC memuat lima elemen pokok:

1. *Governance Principles* yaitu prinsip-prinsip yang melandasi pelaksanaan tata kelola di IPC;
2. *Governance Commitment* yakni wujud komitmen Dewan Komisaris dan Direksi (*board*) dan satuan kerja untuk menerapkan dan menegakkan Tata Kelola IPC yang termuat dalam visi, misi, *values*, *code of ethics* dan menjadi rujukan dalam menyusun RJPP dan RKAP;
3. *Governance Structure* yakni organ internal dan eksternal IPC yang berwenang menjalankan mandat pelaksanaan tugas IPC dan pengawasan terhadap IPC;
4. *Governance Process* yakni serangkaian standar dan prosedur yang digunakan oleh organ dan satuan kerja untuk memastikan penerapan dan penegakan Tata Kelola IPC dilaksanakan secara terencana, konsekuen, dan berkelanjutan;
5. *Governance Outcome* yakni manifestasi dari penerapan dan penegakan GCG IPC terhadap *Stakeholders* yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai (*value creation*) dan keberlangsungan bisnis (*sustainability*).

The IPC governance framework contains five key elements:

1. *Governance Principles*, the principles underlying the governance implementation in Pelindo II,
2. *Governance Commitment*, the Board of Commissioners, Board of Directors and work units commitment to implement and enforce Pelindo II Governance as contained in the vision, mission, values, code of ethics and as a reference to developing RJPP and RKAP.
3. *Governance Structure*, Pelindo II's internal and external bodies authorized to carry out the mandate to implement Pelindo II's duties, and to supervise Pelindo II,
4. *Governance Process*, series of standards and procedures used by the bodies and work units to ensure Pelindo II's Governance implementation and enforcement is conducted in a planned, consequential, and sustainable manner.
5. *Governance Outcome*, results of Pelindo II's GCG implementation and enforcement for Stakeholders having a positive impact on value creation and business continuity



DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

BASIS FOR CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan IPC mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
4. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) Tahun 2006;
5. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.568/17/3/1/PI.II-17 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penetapan *Roadmap Good Corporate Governance* (GCG) 2017–2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
6. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor SK.01.02/23/1/1/KPP/UT/PI.II-18 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penetapan *Roadmap Good Corporate Governance* (GCG) 2017-2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
7. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor SK.01.01/2/1/1/KPP/UT/PI.II-19 tentang Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
8. Surat Keputusan Direksi Nomor OT.02.03/6/5/1/BDP/UT/PI.II-19 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pembentukan *Change Agent* Budaya Perusahaan dan *Good Corporate Governance* (GCG) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
9. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor SK.01.02/2/1/1/KPP/UT/PI.II-19 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

For applying corporate governance IPC refers to:

1. Republic of Indonesia Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies (PT);
2. Republic of Indonesia Law No. 19 of 2003 on State- Owned Enterprises (SOEs);
3. Ministry of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 regarding Good Corporate Governance for State-Owned Enterprises (SOEs), as amended by Ministry of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012;
4. Indonesia's General GCG Guidelines issued by the National Committee of Governance Policy (KNKG) Year 2006;
5. Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Decree Number HK.568/17/3/1/PI.II-17 dated March 17, 2017 concerning Establishment of 2017–2020 Roadmap of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Good Corporate Governance (GCG);
6. Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Decree Number SK.01.02/23/1/1/KPP/UT/PI.II-18 dated March 17, 2017 concerning Establishment of 2017-2020 Roadmap of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Good Corporate Governance (GCG);
7. Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Decree Number SK.01.01/2/1/1/KPP/UT/PI.II-19 concerning the Guidelines of Whistleblowing System of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
8. Board of Directors Decree Number OT.02.03/6/5/1/BDP/UT/PI.II-19 dated May 6, 2019 concerning the Establishment of Change Agent of Corporate Culture and Good Corporate Governance (GCG) in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
9. Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Decree Number SK.01.02/2/1/1/KPP/UT/PI.II-19 concerning Guidelines for Good Corporate Governance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE OBJECTIVES

IPC memandang bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bukan sekadar mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator. Lebih dari itu, ada sejumlah tujuan penting dalam implementasi GCG.

1. Memaksimalkan kinerja dan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham melalui pelaksanaan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran agar Perusahaan memiliki daya saing yang tinggi;
2. Meningkatkan pengelolaan IPC secara profesional, transparan, efisien, serta mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi;
3. Menjadi acuan pengelolaan IPC dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan tanggung jawab sosial IPC terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dan kelestarian lingkungan di sekitar IPC;
4. Meningkatkan *stakeholders value* dengan memperhatikan *Stakeholders* lainnya;
5. Meningkatkan daya saing IPC secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

IPC sees GCG as more than a tool to comply with all regulations by the authorities, as it also helps the Company to achieve many other objectives.

1. To leverage the Company's performance and values for the sake of stakeholders through transparency, independency, accountability, responsibility, and fairness principles so that the Company has a strong competitive edge;
2. To improve IPC management professionally, transparently, and efficiently, and encourage the functional empowerment and independency of General Meetings of Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors;
3. To serve as references for IPC management in making decisions and taking actions based on high moral standards and legal compliance and awareness as well as IPC'S social corporate responsibility for all stakeholders and environmental preservation in the vicinity of IPC;
4. To improve Stakeholder value by paying attention to Stakeholders;
5. To enhance IPC's competitive edge on a national and international scale, in order to improve market trust that can later boost investment flows and sustainable national economic growth.



ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP



Roadmap GCG ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.568/17/3/1/PI.II-17 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan *Roadmap Good Corporate Governance (GCG) 2017-2020* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Selaras dengan Rencana Strategis Perusahaan, *roadmap* GCG disusun untuk jangka panjang. Penyusunan *roadmap* GCG IPC 2017-2020 ini dilakukan untuk menentukan arah dan capaian jangka panjang dalam aspek tata kelola yang dapat mendukung pencapaian kinerja bisnis dan menciptakan manfaat bersama dengan *Stakeholder (shared value)*.

Roadmap GCG dengan seluruh kelengkapannya harus menjadi rujukan seluruh Insan IPC dalam menjalankan bisnis. *Roadmap* GCG ini juga bisa memberikan kesadaran kepada seluruh *Stakeholder*, baik internal maupun eksternal tentang pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dengan adanya *roadmap* GCG ini, *Stakeholder* dapat memahami komitmen serta posisi IPC dalam menegakkan bisnis yang beretika.

Sejak disahkan, *roadmap* GCG ini berjalan dengan baik. Sebagian hasil dari pelaksanaan *roadmap* GCG 2017-2020 sudah dapat dirasakan sebagai sebuah capaian jangka pendek (*quick win*), di antaranya struktur *governance* dan infrastruktur GCG (pedoman-pedoman dan *roadmap* penyempurnaan GCG), meningkatnya nilai *assessment* GCG berdasarkan aturan Kementerian BUMN, dan diperolehnya penghargaan tingkat nasional di bidang GCG.

The above Roadmap was approved by Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) through Decision No. HK.568/17/3/1/PI.II-17 dated March 17, 2017 concerning PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) GCG Roadmap 2017-2020.

Consistent with the Company's Strategic Plan, the GCG Roadmap is designed for long-term accomplishments. The IPC 2014-2020 GCG Roadmap provides guidance for long-term governance achievements that can support business performance and create shared values with Stakeholders.







Given its grounded approach, the GCG Roadmap is a key reference for all IPC employees in running the business. The GCG Roadmap also creates awareness on the part of Stakeholders, both internal and external, of the importance of Good Corporate Governance. This GCG roadmap will help Stakeholders to evaluate IPC's corporate status and its commitment towards ethical business practices.

Since it was ratified, the GCG Roadmap has functioned well and as expected. Some of the GCG 2017-2020 Roadmap results are considered to be a quick win, including governance structure and GCG infrastructure (guidelines and Roadmap for GCG improvements), which have increased the GCG assessment scores based on the Ministry of SOEs regulations, and has earned GCG awards at national level.

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

Sejalan dengan Surat Keputusan Penetapan *roadmap*, IPC juga telah menetapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam pengelolaan perusahaan berbasis GCG. Adapun prinsip-prinsip GCG IPC adalah sebagai berikut:

At the same time the Circular Letter for Roadmap composition was issued, IPC also stipulated that GCG principles are the foundation for a GCG-based business management. IPC GCG principles are as follows:

 <p>Transparansi <i>Transparency</i></p>	<p>Keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang material dan relevan. Transparency in every decision-making process and in disclosing material and relevant information</p>
 <p>Akuntabilitas <i>Accountability</i></p>	<p>Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari organ hingga setiap unit IPC. Clarity of function, implementation and accountability of all IPC organs and units</p>
 <p>Responsibilitas <i>Responsibility</i></p>	<p>Kesesuaian pengelolaan IPC terhadap peraturan dan perundang-undangan serta SOP yang berlaku. Compliance of IPC's Management to all applicable laws and regulations, as well as SOPs.</p>
 <p>Independensi <i>Independency</i></p>	<p>Pengelolaan yang profesional yang bebas dari benturan kepentingan atau tekanan dan pengaruh pihak lain. Professional management that is free from conflict of interest or pressure and influence of others.</p>
 <p>Fairness <i>Fairness</i></p>	<p>Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan. Fairness and equity in fulfilling the rights of Stakeholders.</p>
 <p>Terpercaya <i>Trusted</i></p>	<p>Mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh Pemangku Kepentingan. Earning the trust and full support of all Stakeholders.</p>



PENCAPAIAN ROADMAP 2019

2019 ROADMAP ACHIEVEMENT

No	Kegiatan Activity	Pencapaian Achievement
1.	Assessment GCG Tahun Buku 2019	Assessment GCG Tahun Buku 2019 dilaksanakan oleh Auditor Eksternal, PT Multi Utama Indojasa. Capaian Assessment penerapan GCG Perusahaan pada tahun buku 2019 mencapai 98,550 atau mengalami kenaikan skor sebesar 0,24 poin dari pencapaian di tahun sebelumnya sebesar 98,303. Kenaikan ini secara umum dikarenakan adanya peningkatan komitmen GCG.
	2019 GCG Assessment	The 2019 GCG Assessment was carried out by an External Auditor, PT Multi Utama Indojasa. Achievement of 2019 GCG Assessment reached 98.550 or increase 0.24 points from 98.303 in previous year. This increase is generally due to an increase in GCG commitment.
2.	Optimalisasi Implementasi GCG dan Pemenuhan Area of Improvement (Aoi) GCG 2018	Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan <i>assessment</i> GCG pada poin 1 (satu) di atas, Divisi Sekretariat Perusahaan mensosialisasikan hasil <i>assessment</i> GCG tersebut kepada seluruh Divisi terkait, serta terdapat rekomendasi dari <i>assessment</i> GCG tahun buku 2018 sebagai acuan perbaikan. Adapun untuk rekomendasi pada <i>assessment</i> GCG tahun buku 2017 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) rekomendasi.
	Optimization of GCG Implementation and Fulfillment of 2018 GCG Area of Improvement (Aoi)	As a follow up on the GCG assessment in point 1 (one) above, the Corporate Secretariat Division disseminates the results of GCG assessment to all relevant Divisions, as well as recommendations from the 2018 GCG assessment as a reference for improvement. As for the recommendations in the 2018 GCG assessment, there were 17 (seventeen) recommendations.
3.	Gamification Survey GCG	Divisi Sekretariat Perusahaan telah melakukan kolaborasi dengan Divisi Pembelajaran SDM terkait pembuatan <i>gamification survey</i> . Sebagian soal yang terdapat di <i>Game Cinta IPC</i> adalah perwujudan dari implementasi GCG.
	GCG Survey Gamification	The Corporate Secretariat Division has collaborated with Human Capital Learning Division on making survey gamification. Some of questions contained in <i>Cinta IPC Game</i> are a manifestation of GCG implementation.
4.	Kode Etik Bisnis dan Pakta Integritas	Seluruh Karyawan IPC termasuk Dewan Komisaris dan Direksi yang berada di wilayah Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan telah dihimbau menandatangani Janji Kode Etik Perusahaan dan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama atas kepatuhan kepada asas-asas GCG. Hingga akhir tahun 2019 persentase penandatanganan pakta yang dilakukan melalui sistem <i>I-Good</i> mencapai 100%.
	Code of Conduct & Integrity Pact	All IPC employees including Board of Commissioners and Board of Directors, in the Head Office, Port Branches and Subsidiaries were encouraged to sign the Company's Code of Conduct and Integrity Pact as a form of joint commitment to GCG principles. By the end of 2019, 100% of IPC employees had signed the Pact.

No	Kegiatan Activity	Pencapaian Achievement
5.	Pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> (WBS)	<p>a. Proses pelaksanaan pengadaan <i>vendor</i> untuk pengelolaan WBS IPC Bersih periode 2019 - 2022 telah dilaksanakan pada bulan September 2019 dan dikelola oleh PT Integrity Indonesia;</p> <p>b. Telah dilakukan pengkinian SK Komite IPC Bersih;</p> <p>c. Telah dilakukan <i>update</i> saluran <i>Whistleblowing System</i> (WBS), yaitu: Web Online : https://ipcbersih.whistleblowing.link/ Telepon : +62 21 2782 2345 Faksimile : +62 21 2782 3456 SMS/WhatsApp : +62 811 933 2345 Email : ipcbersih@whistleblowing.link Pos : IPC Bersih PO Box 1074 JKS 12010</p>
	Whistleblowing System (WBS) Implementation	<p>a. The vendor procurement process for management of WBS IPC Bersih for 2019 - 2022 period was carried out in September 2019 and managed by PT Integrity Indonesia;</p> <p>b. Updated the Decree of IPC Bersih Committee;</p> <p>c. The Whistleblowing System (WBS) channel has been updated, namely: Web Online : https://ipcbersih.whistleblowing.link/ Phone : +62 21 2782 2345 Facsimile : +62 21 2782 3456 SMS/WhatsApp : +62 811 933 2345 Email : ipcbersih@whistleblowing.link Mail : IPC Bersih PO Box 1074 JKS 12010</p>
6	Pengendalian Gratifikasi	<p>a. Telah disampaikan surat himbauan larangan penerimaan gratifikasi pada hari raya keagamaan dan tahun baru untuk seluruh pegawai baik di Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan;</p> <p>b. Telah dilakukan penyampaian surat penerimaan gratifikasi terkait hari raya keagamaan kepada KPK nomor SK.01.01/18/6/1/KPP/SDM/PI.II-19 tanggal 18 Juni 2019 terkait laporan penyampain barang kedaluwarsa sebanyak 14 (empat belas) bungkusan.</p>
	Gratification Control	<p>a. A letter of appeal has been issued forbidding acceptance of gratification on religious holidays and new year for all employees both at Head Office, Port Branches and Subsidiaries;</p> <p>b. Gratification receipt letter related to religious holidays has been submitted to KPK number SK.01.01/18/6/1/KPP/SDM/PI.II-19 dated June 18, 2019 regarding the delivery report of expired goods totaling 14 (fourteen) parcels.</p>
7.	Review Pedoman GCG	<p>a. Pedoman GCG telah dilakukan <i>update</i>/perbaikan dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor SK.01.02/2/1/1/KPP/UT/PI.II-19 tentang Pedoman <i>Good Corporate Governance</i> PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);</p> <p>b. Pedoman WBS IPC telah dilakukan <i>update</i>/perbaikan dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor SK.01.01/2/1/1/KPP/UT/PI.II-19 tentang Pedoman <i>Whistleblowing System</i> PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).</p>
	Review of GCG Guidelines	<p>a. The GCG Guidelines have been updated/amended and have been ratified by Board of Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number SK.01.02/2/1/1/KPP/UT/PI.II-19 concerning Guidelines for Good Corporate Governance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);</p> <p>b. The IPC WBS Guidelines have been updated/corrected and have been ratified by Board of Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number SK.01.01/2/1/1/KPP/UT/PI.II-19 concerning the Guidelines for Whistleblowing System of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).</p>



No	Kegiatan Activity	Pencapaian Achievement
8.	<p>Penyusunan dan Pencetakan <i>Annual Report</i> dan <i>Sustainability Report</i> IPC Tahun 2018</p> <p>Formulation and Printing of IPC 2018 Annual Report and Sustainability Report</p>	<p>a. Penyusunan, pencetakan dan pendistribusian <i>Annual Report</i> dan <i>Sustainability Report</i> IPC Tahun 2018 telah dilakukan. Pendistribusian dilakukan di Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan;</p> <p>b. <i>Annual Report</i> IPC Tahun 2018, juga dibuat dalam bentuk digital dan dapat diakses pada link http://ar.indonesiaport.co.id/;</p> <p>c. <i>Annual Report</i> dan <i>Sustainability Report</i> IPC Tahun 2018 ikut serta dalam ajang perlombaan <i>Annual Report Award</i> (ARA) Tahun 2018.</p> <p>a. The preparation, printing and distribution of IPC's Annual Report and Sustainability Report for 2018 have been carried out. Distribution is carried out at Head Office, Port Branches and Subsidiaries;</p> <p>b. IPC 2018 Annual Report, also made in digital form and can be accessed on the link http://ar.indonesiaport.co.id/;</p> <p>c. IPC's 2018 Annual Report and Sustainability Report participated in 2018 Annual Report Award (ARA) competition.</p>
9.	<p>Penghargaan dalam bidang GCG Tahun 2019</p> <p>2019 GCG Awards</p>	<p>Sepanjang tahun 2019, IPC berhasil mendapatkan penghargaan di bidang GCG sebagai berikut:</p> <p>a. Anugerah BUMN 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Sebagai <i>Big Corporate</i> Kategori Tata Kelola Terbaik;</p> <p>b. TOP GRC Awards 2019, Elvyn G. Masassya sebagai <i>The Most Committed GRC Leader</i> 2019;</p> <p>c. <i>Annual Report Award</i> 2018, Peringkat 1 BUMN Non Keuangan Non Listed Penghargaan Laporan Tahunan 2018;</p> <p>d. <i>Indonesia Good Corporate Governance Award</i> 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as <i>Trusted Company Based On Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI).</p> <p>Throughout 2019, IPC has won CGC Awards as follows:</p> <p>a. SOE Award 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) As the Best Big Corporate Governance Category;</p> <p>b. TOP GRC Awards 2019, Elvyn G. Masassya as The Most Committed GRC Leader 2019;</p> <p>c. 2018 Annual Report Award, Rank 1 Non-Financial SOE Non Listed 2018 Annual Report Award;</p> <p>d. Indonesia Good Corporate Governance Award 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as Trusted Company Based on the Corporate Governance Perception Index (CGPI).</p>
10.	<p>Standardisasi GCG dan <i>Engagement</i> Penerapan Prinsip GCG di Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan</p> <p>GCG Standardization and Engagement Implementation of GCG Principles in the Port Branches and Subsidiaries</p>	<p>a. Sosialisasi Pemahaman GCG, Kode Etik Bisnis, Gratifikasi dan <i>Whistle Blowing System</i></p> <p>Pelaksanaan sosialisasi pemahaman GCG, Kode Etik Bisnis, Gratifikasi dan <i>Whistle Blowing System</i> telah dilakukan di Cabang Pelabuhan Pontianak, Cabang Pelabuhan Palembang, Cabang Pelabuhan Bengkulu dan Cabang Pelabuhan Cirebon.</p> <p>Sementara untuk sosialisasi di Anak Perusahaan telah dilakukan di PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI), PT IPC Terminal Petikemas (PT IPC TPK) , PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (PT ILCS), dan PT Rumah Sakit Pelabuhan</p> <p>Sementara untuk Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan lainnya sosialisasi tetap dilakukan melalui sistem <i>I-Good</i>.</p> <p>a. Socialization of GCG Understanding, Code of Conduct, Gratification and Whistle Blowing System</p> <p>The socialization of GCG understanding, Code of Conduct, Gratification and Whistle Blowing System has been carried out at Pontianak Port Branch, Palembang Port Branch, Bengkulu Port Branch and Cirebon Port Branch.</p> <p>Meanwhile, socialization at the Subsidiary has been carried out at PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI), PT IPC Terminal Petikemas (PT IPC TPK), PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (PT ILCS), and PT Rumah Sakit Pelabuhan.</p> <p>While for other Port Branches and Subsidiaries, socialization will continue to be done through I-Good system.</p>

No	Kegiatan Activity	Pencapaian Achievement
		<p>b. <i>Survey Pemahaman GCG Tahun 2019</i> Survey pemahaman GCG dilakukan melalui sistem <i>I-Good</i> terhadap seluruh pegawai IPC baik di Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan.</p> <p>Dari hasil <i>survey</i> pemahaman GCG IPC Tahun 2019 didapatkan nilai rata – rata pemahaman GCG dari Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 94,61%, dan Pekerja IPC di Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan sebesar 85,75%. Dengan masing-masing berpredikat “SANGAT BAIK”</p>
		<p>b. <i>2019 GCG Understanding Survey</i> <i>The GCG understanding survey was conducted through I-Good system for all IPC employees both at Head Office, Port Branches and Subsidiaries.</i></p> <p><i>From the survey results of IPC GCG understanding in 2019, the average value of GCG understanding from Board of Directors and Board of Commissioners was 94.61%, and IPC Employees at Head Office, Port Branches and Subsidiaries were 85.75%. With each obtaining the predicate of "VERY GOOD".</i></p>
		<p>c. <i>Penetapan standardisasi GCG di Anak Perusahaan</i> Penetapan standardisasi GCG kepada Anak Perusahaan telah disampaikan melalui Surat Dinas Nomor SK.01.01/24/9/1/KPP/SDM/PI.II-19 tanggal 24 September 2019, di mana untuk Anak Perusahaan yang termasuk dalam <i>Non Listed Company</i> standarisasi mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Mekanisme pelaporan termasuk temuan Aol (<i>Area of Improvement</i>), score GCG 2 (dua) tahun buku dan target skor GCG tahun berikutnya. Pelaporan dilakukan setiap akhir Juni dan Desember.</p> <p>Sementara untuk Anak Perusahaan yang termasuk dalam <i>Listed Company</i> (TBK), selain mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012, juga menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2014 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.</p>
		<p>c. <i>Determination of GCG standardization in Subsidiaries</i> Determination of GCG standardization for Subsidiaries has been submitted through an Official Letter Number SK.01.01/24/9/1/KPP/SDM/PI.II-19 dated September 24, 2019, where for Subsidiaries included in Non Listed Company standardization refers to the Secretary of Ministry of SOE Decree No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Evaluation and Assessment of Good Corporate Governance (GCG) Implementation. Reporting mechanisms include the findings of AOI (Area of Improvement), GCG score of 2 (two) fiscal years and the target of next year's GCG score. Reporting is done every end of June and December.</p> <p>While for Subsidiaries included in the Listed Company (TBK), besides referring to the Secretary of Ministry of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012, also applies the Financial Services Authority Regulation No.21/POJK.04/2014 concerning the Implementation of Guidelines for Public Company Governance.</p>



No	Kegiatan Activity	Pencapaian Achievement
		<p>d. Penetapan standarisasi GCG di Cabang Pelabuhan</p> <p>Penetapan standarisasi GCG kepada Cabang Pelabuhan telah disampaikan melalui Surat Dinas Nomor SK.01.01/8/10/KPP/SDM/DIT.SDM-19 tanggal 8 Oktober 2019.</p> <p>Disampaikan bahwa penerapan prinsip GCG di Cabang Pelabuhan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis (15) <ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis untuk seluruh pegawai yang memiliki NIPP (10) - Pengisian <i>survey</i> pemahaman GCG untuk seluruh pegawai yang memiliki NIPP (5) • Penerapan Sanksi dan Disiplin Ringan (5) <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kehadiran karyawan tepat waktu (5) • Tindak Lanjut (50) <ul style="list-style-type: none"> - Temuan SPI (10) - AMI (Audit Mutu Internal) (10) - MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>) (10) - SOP yang harus dimiliki (10) - Kasus Hukum (10) • Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan (30) <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan waktu penyampaian <i>Business Performance Review</i> (10): <ul style="list-style-type: none"> » Aspek Keuangan » Aspek Operasi » Aspek realisasi SDM » Aspek Investasi » Aspek Permasalahan Strategis » Aspek Realisasi KPI » Aspek Realisasi RKM Strategis • Laporan PKBL (10) • Laporan LHKPN (10) <p>TOTAL (100)</p> <p>Pelaporan dilakukan setiap akhir Juni dan Desember.</p>
		<p>d. Determination of GCG standardization in the Port Branch</p> <p>Determination of GCG standardization to Port Branch has been submitted through an Official Letter Number SK.01.01/8/10/KPP/SDM/DIT.SDM-19 dated October 8, 2019.</p> <p>It was stated that the application of GCG principles at Port Branch was as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signing of the Integrity and Compliance Pact of Code of Conduct (15) <ul style="list-style-type: none"> - Signing of the Integrity and Compliance Pact of Code of Conduct for all employees who have NIPP (10) - Completing the GCG understanding survey for all employees who have NIPP (5) • Application of Sanctions and Mild Discipline (5) <ul style="list-style-type: none"> - Timely employee attendance (5) • Follow Up (50) <ul style="list-style-type: none"> - SPI Findings (10) - AMI (Internal Quality Audit) (10) - MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>) (10) - Must-have SOPs (10) - Legal Case (10) • Timeliness of Report Submission (30) <ul style="list-style-type: none"> - Timeliness of Submitting Business Performance Review (10): <ul style="list-style-type: none"> » Financial aspect » Operational aspect » HC realization aspects » Investment aspect » Strategic Issues aspect » KPI Realization aspect » Strategic RKM Realization aspect • PKBL Report (10) • LHKPN Report (10) <p>TOTAL (100)</p> <p>Reporting is done every end of June and December.</p>

No	Kegiatan Activity	Pencapaian Achievement
11.	<p>IPC GCG Compliance (Implementasi Roadmap GCG Fase Sustainable)</p> <p>IPC GCG Compliance (the Implementation of GCG Roadmap Sustainable Phase)</p>	<p>a. <i>Expose</i> pencapaian GCG IPC ke Mitra Bisnis dan <i>Stakeholder</i> Skala Nasional Pencapaian GCG IPC telah disampaikan kepada Mitra Bisnis dan <i>Stakeholder</i> IPC pada acara <i>Stakeholder Gathering</i> IPC yang diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2019. Pencapaian GCG juga dilakukan dalam media majalah internal dan media sosial.</p> <p>a. Expose IPC GCG achievements to National Scale Business Partners and Stakeholders The achievement of IPC GCG was presented to IPC Business Partners and Stakeholders at the IPC Stakeholder Gathering event held on February 20, 2019 The achievement of GCG was also presented in internal magazine media and social media.</p> <p>b. Perbaikan Kualitas dan Intensitas Update Media Komunikasi Eksternal terutama <i>Website</i>, Media Sosial dan Media Cetak (Majalah/Tabloid) Telah dilakukan perbaikan kualitas tampilan dan informasi pada <i>website</i> bekerjasama dengan Departemen Komunikasi Korporasi. Konten dalam <i>website</i> telah memenuhi persyaratan dalam kriteria <i>Annual Report Award</i> (ARA) dan Keputusan Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang indikator/parameter GCG.</p> <p>b. Improving Quality and Intensity of External Communication Media Updates, especially Website, Social Media and Print Media (Magazines/Tabloids) Improved display and information quality on the website in collaboration with Corporate Communications Department. Contents on the website meets requirements in Annual Report Award (ARA) criteria and the Minister of SOE Decree SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 regarding GCG indicators/parameters.</p> <p>c. Pelaksanaan Forum GCG 2019 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 27-29 Juni 2019 di Kota Bandung yang dihadiri oleh perwakilan Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan IPC Group.</p> <p>c. The GCG Forum 2019 was held on June 27-29, 2019 in Bandung, which was attended by representatives of IPC Group's Port Branch and Subsidiaries.</p> <p>d. Penerapan IPC GCG <i>Compliance</i> pada Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan Telah dilakukan <i>monitoring</i> penerapan GCG pada Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan termasuk dengan melihat pencapaian skor GCG di masing-masing anak perusahaan.</p> <p>d. Implementation of IPC GCG Compliance at Head Office, Port Branch and Subsidiaries Monitoring on GCG implementation at Port Branch and Subsidiaries has been carried out including by observing the achievement of GCG score in each subsidiary.</p>



STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

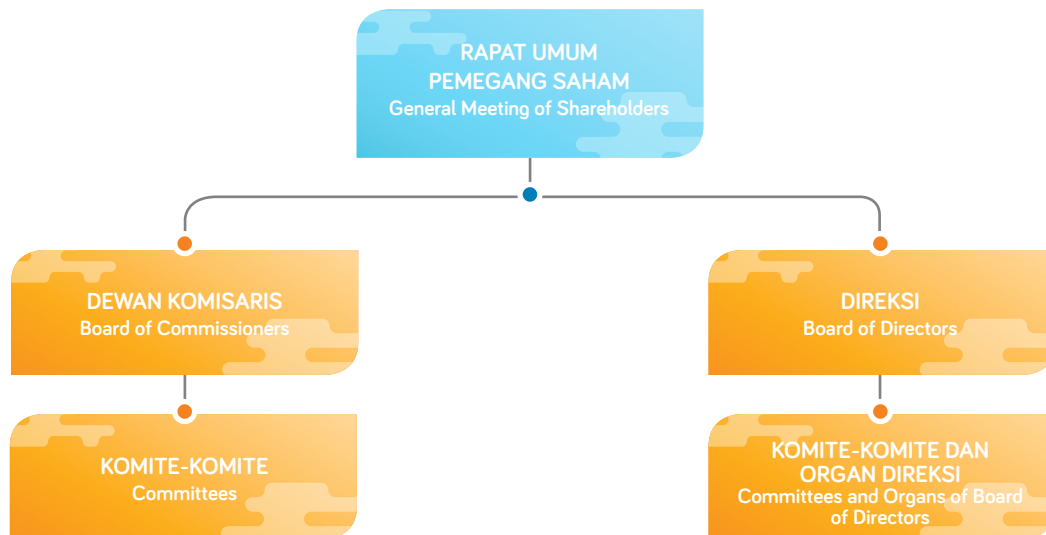
GCG STRUCTURE AND MECHANISM

Struktur tata kelola IPC mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Organ perusahaan terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris sebagai pengawas jalannya pengelolaan perusahaan dan Direksi sebagai pengelola perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

The GCG structure of IPC refers to Law No 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which states that there should be at least 3 (three) organs; General Meeting of Shareholders (GMS) as the highest decision making forum for the Shareholders, a Board of Commissioners as the highest supervisory body and a Board of Directors as the caretaker of business. Board of Commissioners and Board of Directors hold respectively certain authorities and responsibilities based on Articles of Association and all applicable laws and regulations.

STRUKTUR ORGAN PERUSAHAAN

CORPORATE STRUCTURE



GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

Dalam melaksanakan kegiatan Perseroan, IPC memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan *governance soft structure*. *Governance soft structure* yang dimiliki IPC antara lain sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar;
2. *Board Manual* Dewan Komisaris;
3. *Board Manual* Direksi;
4. *Charter* Komite Audit;
5. *Charter* Komite Komite Pemantau Manajemen Risiko;
6. *Charter* Komite Nominasi dan Remunerasi;
7. Kode Etik Bisnis;
8. Pedoman Pelaksanaan GCG Perusahaan;
9. Kebijakan *Whistleblowing System*;
10. Kebijakan Gratifikasi;
11. *Roadmap* GCG;
12. Piagam Satuan Pengawasan Internal;
13. Kebijakan Sistem Manajemen Mutu;
14. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
15. Kebijakan Manajemen Risiko.

GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

In carrying out the Company's activities, IPC has a variety of policies/guidelines in carrying out its functions and tasks which are called governance soft structures. The IPC governance soft structure is as follows:

1. Articles of Association;
2. Board of Commissioners Board Manual;
3. Board of Directors' Board Manual;
4. Audit Committee Charter;
5. Risk Management Monitoring Committee Charter;
6. Nomination and Remuneration Committee Charter;
7. Code of Conduct;
8. Guidelines for GCG Implementation;
9. Whistleblowing System Policy;
10. Gratification Policy;
11. GCG Roadmap;
12. Internal Audit Unit Charter;
13. Quality Management System Policy;
14. Internal Control System Policy;
15. Risk Management Policy.

MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham yaitu Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B. Saham Seri A Dwiwarna hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia dan saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

HAK PEMEGANG SAHAM

Hak Pemegang Saham yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
2. Persetujuan perubahan permodalan;
3. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
5. Permintaan dan pengaksesan data dan dokumen;
6. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
8. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan presentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
9. Persetujuan penggunaan laba;
10. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
11. Pengusulan agenda RUPS;
12. Pengusulan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

GOOD CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

SHAREHOLDERS

Shareholders, namely Dwiwarna Series A and Series B shareholders. Dwiwarna Series A shares can only be owned by the Republic of Indonesia and Series B shares can be owned by the Republic of Indonesia and/or public.

SHAREHOLDERS RIGHTS

Shareholders' rights stipulated in the Company's Articles of Association are the rights to approve at the GMS regarding the following matters:

1. Approval of amendments to Articles of Association;
2. Approval of capital changes;
3. Approval of appointment and dismissal of members of Board of Directors and Board of Commissioners;
4. Approval related to merger, consolidation, expropriation, separation and dissolution;
5. Request and access data and documents;
6. Approval of remuneration for members of Board of Directors and Board of Commissioners;
7. Approval for assets transfer based on Articles of Association requires approval of the GMS;
8. Approval regarding participation and reduction of the percentage of equity participation in other companies which based on Articles of Association requires approval of the GMS;
9. Approval for use of profit;
10. Approval for long-term investment and financing based on Articles of Association requires approval of the GMS;
11. Proposal of GMS agenda;
12. Proposal of prospective members of Board of Directors and Board of Commissioners.

INFORMATION ON MAJOR/CONTROLLING SHAREHOLDERS





IPC per 31 Desember 2019 merupakan Perusahaan BUMN *Non Listed* yang sahamnya 100% dimiliki oleh Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi Pemegang Saham utama maupun saham pengendali individu di IPC.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga tertinggi IPC dan wadah bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan RUPS melalui proses pengumuman dan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejak diterbitkannya pengumuman dan surat pemanggilan pelaksanaan rapat tersebut, seluruh bahan yang akan dibahas dalam RUPS telah tersedia di kantor IPC. Dengan demikian, para Pemangku Kepentingan yang menjadi peserta rapat dapat mengambil bahan tersebut.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilakukan IPC setiap tahun, yang meliputi RUPS Tahunan tentang Laporan Tahunan IPC dan RUPS Tahunan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP), sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan IPC. Pelaksanaan RUPS didahului dengan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

PROSES PENYELENGGARAAN RUPS

Dalam Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan RUPS. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

As of December 31, 2019, IPC is a Non Listed SOE company whose shares are 100% owned by the Minister of SOEs as Shareholders of the Republic of Indonesia. Therefore, there is no information regarding individual major or controlling shareholders in IPC.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest institutional body in IPC and is a forum where shareholders gather to make important decisions where the authority is not given to Boards of Directors and Board of Commissioners as stipulated in IPC's Articles of Association and all applicable laws.

GMS is held through a process of announcing and summon of the GMS in accordance with applicable regulations. After the announcement and summon letter for the meeting, all materials to be discussed at the GMS are available at IPC office, so that the Stakeholders who will be participants in the meeting can take the material.

GMS consists of Annual GMS (AGMS) and Extraordinary GMS (EGMS). AGMS is held annually by IPC, and includes AGMS for IPC Annual Report and AGMS for the Company's Work Plan and Budget (RKAP GMS), while the EGMS can be held at any time based on the needs and for the benefit of IPC. The GMS starts with a GMS summon, in accordance with applicable regulations.

GMS HOLDING PROCESS

The Company's Articles of Association stipulates that the GMS is held at the Company's place of domicile or where the Company conducts its main business activities. The GMS summon is carried out 15 (fifteen) days before the GMS Holding. The GMS can be held if at least 51% (fifty one percent) of total shareholders with voting rights are present or represented.

PELAKSANAAN RUPS RKAP TAHUN 2019 DAN REALISASINYA

2019 RKAP GMS AND ITS REALIZATION

Tahapan pelaksanaan RUPS RKAP Tahun 2019 tergambar dalam tabel berikut:

The stages of 2019 RKAP GMS are shown in the following table:

Tabel Pelaksanaan RUPS RKAP Tahun 2019
2019 RKAP GMS Implementation

Undangan Invitation	Pelaksanaan Implementation	Hasil RUPS GMS Result
Diumumkan pada tanggal 21 Desember 2018 Nomor Undangan SK.03/21/12/1/TUD/UT/Pl.11-18 perihal Undangan RUPS RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019.	Dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 pukul 14.00 – 15.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 6, Kementerian BUMN RI.	Hasil RUPS dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2019 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn.
Announced on December 21, 2018 Invitation Number SK.02/19/1/1/TUD/UT/Pl.II-18 concerning 2018 RKAP GMS Invitation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Held on Monday, January 7, 2019 at 14.00-15.00 WIB in the 6th Floor Meeting Room, Ministry of SOE.	The GMS results were recorded in PT Pelabuhan Indonesia II 2019 RKAP AGMS Minutes of Meeting made by Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS RKAP Tahun 2019

2019 RKAP GMS ATTENDANCE

RUPS RKAP Tahun 2019 yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

The 2019 RKAP GMS was attended by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS RKAP Tahun 2019
2019 RKAP GMS Attendance Recapitulation

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
1.	Tumpak H. Panggabean	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present	
2.	Djadmiko	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present	
3.	Montty Girianna	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present	
4.	Suaidi Marasabessy	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present	
5.	Raden Agus Haryoto Purnomo	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present	
6.	Kushari Suprianto	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present	
7.	Djaman Andhi Nirwanto	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present	
8.	Elvyn Gani Masassya	Direksi Director	Hadir Present	
9.	Saptono Rahayu Irianto	Direksi Director	Hadir Present	
10.	Widyaka Nusapati	Direksi Director	Hadir Present	
11.	Dani Rusli Utama	Direksi Director	Hadir Present	



Tabel Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS RKAP Tahun 2019
2019 RKAP GMS Attendance Recapitulation

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
12.	Prasetyadi	Direksi Director	Hadir Present	
13.	Rizal Ariansyah	Direksi Director	Hadir Present	

Keputusan RUPS RKAP Tahun 2019

2019 RKAP GMS Resolution

Agenda Pertama First Agenda

Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2019.

Ratification of the 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and Corporate Partnership and Community Development Program (PKBL) Work Plan and Budget in 2019.

Keputusan

Menyetujui/mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Decision

To approve/ratify the Company's 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and Corporate Partnership and Community Development Program (PKBL) Work Plan and Budget of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), with the following main points:

1. Laporan Laba (Rugi) Konsolidasi

1. Consolidated Income Statements

Uraian Description	Jumlah (ribu) Total (thousand)
Pendapatan Usaha Operating Income	Rp13.503.396.813
Laba Setelah Pajak Profit After Tax	Rp2.610.493.265

2. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi

2. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi

Uraian Description	Jumlah (ribu) Total (thousand)
Total Aset Total Assets	Rp54.165.045.021
Liabilitas Liabilities	Rp36.675.255.631
Ekuitas Equity	Rp17.489.789.390

3. Investasi

3. Investments

• Rencana Investasi tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagai berikut:

• Investment plan of 2019 (two thousand and nineteen) as follows:

Uraian Description	Jumlah (ribu) Total (thousand)
Investasi Perusahaan Induk Holding Company's Investments	Rp4.851.410.099
Investasi Anak Perusahaan Subidiaries' Investments	Rp2.191.636.600
Penyertaan Modal Perusahaan Induk Parent Company's Equity Participation	Rp4.942.691.130
Total Investasi Total Investments	Rp11.985.738.729

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
GCG STRUCTURE AND MECHANISM

- Pengeluaran investasi agar dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, sesuai standar prosedur operasi, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kewajaran harganya.
- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program/item investasi, sepanjang tidak merubah program/item investasi dan tidak melebihi total nilai investasi.

- Investment expenditure is based on priority, according to standard operating procedures, transparency and accountability of price fairness.
- Delegate authority to Board of Commissioners to give approval if there are actions that result in changes in the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program/item, as long as it does not change the investment program/item and does not exceed total investment value.

4. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

4. Partnership and Community Development Program

	Kemitraan (ribu) Partnership (thousand)	Bina Lingkungan (ribu) Community Development (thousand)
Dana Tersedia Available Funds	Rp68.699.858	Rp27.844.689
Penggunaan Dana Funds Disbursement	Rp68.699.858	Rp27.844.689
Sisa Dana Remaining Funds	-	-

- Rencana penyaluran dana Program Kemitraan sebesar Rp68.699.858.000,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh lima puluh delapan ribu Rupiah) yang bersumber dari saldo dana Program Kemitraan, penerimaan dari angsuran pinjaman serta penerimaan jasa administrasi dan bunga.
- Rencana penyaluran dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp27.844.689.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) yang bersumber dari tambahan alokasi dana Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan dari laba perusahaan sebesar Rp27.844.689.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah), atau diperhitungkan setara/equivalen 1,15% (satu koma satu lima persen) dari proyeksi laba tahun 2018 (dua ribu delapan belas)

- Partnership program distribution plan was for the allocation of funds in the amount of Rp.68,699,858,000 (sixty eight billion six hundred ninety nine million eight hundred fifty eight thousand Rupiah) sourced from the Partnership Program fund balance receipts from loan installments as well as receiving administrative services and interest.
- The Community Development program distribution plan was for the allocation of funds in the amount of Rp27,844,689,000.00 (twenty seven billion eight hundred forty four million six hundred eighty nine thousand Rupiah) originating from the additional allocation of Community Development funds originating from allowance for company profit in the amount of Rp.27,844,689,000.00 (twenty seven billion eight hundred forty four million six hundred eighty nine thousand Rupiah), or equivalent to 1.15% (one point one five percent) of the 2018 (two thousand eighteen) profit projection

Status: Terealisasi

Status: Realized

	Agenda Kedua Second Agenda
Penetapan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019.	Determination of Board of Directors and Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) in 2019.
Keputusan Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (Indikator Kinerja Utama) Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen yang ditandatangani oleh Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	Decision Established Key Performance Indicators in 2019 (two thousand and nineteen) contained in the Management Contract signed by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners.

Status: Terealisasi

Status: Realized



Agenda Ketiga Third Agenda

Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Determination of Operational Aspect Indicators for Calculation of Company's Soundness Level in 2019 (two thousand and nineteen).

Keputusan

Menetapkan Indikator Aspek Operasional PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), sebagai berikut:

Decision

Determined PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Operational Aspect Indicators for calculating the Soundness Level for 2019 (two thousand and nineteen), as follows:

No.	Indikator Indicator	Bobot Weight
1.	Waiting Time for Pilot (Jam) Waiting Time for Pilot (Hour)	9%
2.	Tingkat Efektivitas Tambatan Petikemas (%) Extra Containers Effectivity Level (%)	9%
3.	Produktivitas Bongkat Muat Petikemas (B/S/H) Container Cargo loading and unloading (B/H/S)	8%
4.	Yard Occupancy Ratio Petikemas (%) Container Yard Occupancy Ratio (%)	9%
Jumlah Bobot Total Weight		35%

Status: Terealisasi

Status: Realized

Arahan RUPS RKAP Tahun 2019 dan Tindaklanjutnya

Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2019, Dewan Komisaris dan Direksi diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

2019 RKAP AGMS Directives and Follow Up

In implementing the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) as well as the 2019 Partnership and Community Development Program (RKA PKBL) Work Plan and Budget, Board of Commissioners and Board of Directors are required to pay attention to the following matters:

No.	Arahan Directives	Tindak Lanjut Follow Up
1.	RKAP Tahun 2019 yang telah disahkan agar dirinci menjadi target per bulan dan <i>cascading</i> ke seluruh jajaran perusahaan. Dewan Komisaris agar melaporkan hasil rincian dan <i>cascading</i> dimaksud kepada Pemegang Saham dalam triwulan I tahun 2019. The 2019 RKAP has been ratified with specific targets per month cascading to all levels of the Company. Board of Commissioners must report the results of cascading to Shareholders in the first quarter of 2019 (two thousand and nineteen).	Telah terealisasi Has been realized
2.	Mengupayakan peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya (<i>cost reduction program</i>) di semua lini usaha guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien, dan laba bersih merupakan target minimal yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen perusahaan. The income increase and cost reduction programs in all business lines to realize a more effective and efficient corporate management, and net income to reach at least the minimum target must be achieved by all levels of company management.	Telah terealisasi Has been realized
3.	Menindaklanjuti kerja sama dan sinergi yang telah dicanangkan dengan BUMN Pelabuhan maupun BUMN lainnya dalam hal pengembangan usaha kepelabuhanan, pemanfaatan aset, pengembangan SDM, <i>joint procurement</i> , serta pemanfaatan dan pengembangan IT. Following up on the cooperation and synergy that has been announced with Port SOEs and other SOEs in terms of port business development, asset utilization, HC development, joint procurement, and IT utilization and development.	Telah terealisasi Has been realized

No.	Arahan Directives	Tindak Lanjut Follow Up
4.	<p>Senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja anak perusahaan maupun perusahaan patungan, terutama yang memberikan kontribusi signifikansi terhadap kinerja perusahaan secara konsolidasi.</p> <p>Always provide guidance and supervision of the performance of subsidiaries and joint ventures, especially those that contribute significantly to the Company's performance on a consolidated basis.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
5.	<p>Mempersiapkan langkah-langkah pembentukan <i>holding maritime</i> dan melaksanakan tahapan pembentukan Pelindo <i>Incorporated</i>, dimulai dengan mengimplementasikan kesepakatan program <i>quick win</i> pada bulan April 2019.</p> <p>Preparing steps for establishing a maritime holding and carrying out the stages of forming Pelindo Incorporated, starting with implementing a quick win program agreement in April 2019.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
6.	<p>Memastikan program pengelolaan dan pengembangan SDM dilakukan secara komprehensif oleh semua fungsi <i>Corporate Human Capital Development</i> (CHCD). Implementasi kebijakan pengembangan SDM, jenjang karier dan <i>talent management</i> untuk mendukung pencapaian target-target perusahaan baik dalam jangka pendek atau jangka panjang agar ditingkatkan, serta dilakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan SDM agar senantiasa sesuai dengan <i>best practice</i>.</p> <p>Ensuring that HC management and development programs are carried out comprehensively by all Corporate Human Capital Development (CHCD) functions. Implementation of HC development policies, career path and talent management to support the achievement of company targets both in the short and long term to be improved, as well as an evaluation of HC policies to always be in accordance with best practice.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
7.	<p>Terkait PKBL diminta untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Merealisasikan penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebesar dana tersedia. Mengupayakan pengembalian piutang mitra binaan secara optimal dengan melibatkan pihak-pihak terkait (baik internal maupun eksternal). Dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN, maka Direksi diminta untuk menetapkan SOP Pelaksanaan PKBL yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN dimaksud. Menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu secara elektronik sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 jo. PER-03/MBU/12/2016 jo PER-02/MBU/07/2018 tanggal 05-07-2018 tentang PKBL BUMN dan PER-18/MBU/2014 tanggal 16-10-2014 tentang Penyampaian Data, Laporan dan Dokumen BUMN secara Elektronik melalui Portal PKBL (http://pkbl.bumn.go.id). <p>Regarding PKBL, requested to:</p> <ol style="list-style-type: none"> Managing the distribution of Partnership and Community Development Program in the amount of available funds. Seek to return receivables of fostered partners optimally by involving relevant parties (both internal and external). With the issuance of SOE Ministerial Regulation Number PER-02/MBU/07/2017 concerning the Second Amendment to SOE Ministerial Regulation Number PER-09/MBU/07/2015 concerning SOE PKBL, Board of Directors are asked to set SOPs for the Implementation of PKBL that have been adjusted to ministerial regulations SOE referred to. Submit periodic reports in a timely manner electronically as stipulated in RI Government Regulation Number 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision and Disbanding of SOEs, SOE Ministerial Regulation Number PER-09/MBU/07/2015 jo. PER-03/MBU/12/2016 jo PER-02/MBU/07/2018 dated July 05, 2018 against SOE PKBL and PER-18/MBU/2014 dated October 16, 2014 concerning the submission of SOE Data, Reports and Documents Electronically through PKBL Portal (http://pkbl.bumn.go.id). 	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>



No.	Arahan Directives	Tindak Lanjut Follow Up
8.	<p>Pengeluaran investasi agar dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, sesuai standar prosedur operasi, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kewajaran harganya. Investasi tersebut juga memperhitungkan pelaksanaan sinergi dengan BUMN, khususnya PT Pertamina (Persero).</p> <p>Investment expenditures should be carried out based on priority scale, according to standard operating procedures, transparent and can be accounted for with reasonable price. The investment also takes into account the implementation of synergies with SOEs, especially PT Pertamina (Persero).</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
9.	<p>Direksi agar memperhatikan temuan dan rekomendasi BPK, Auditor Independen dan Satuan Pengawasan Intern perusahaan yang belum dapat terselesaikan hingga tahun 2018 dan menjadikan hal tersebut sebagai target untuk dilakukan penyelesaiannya pada tahun 2019.</p> <p>Board of Directors must pay attention to the findings and recommendations of BPK, independent auditors and the Company's Internal Audit Unit that have not been resolved until 2018 and make this a target for completion in 2019.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
10.	<p>BUKU RKAP, RKA PKBL, RKA Dewan Komisaris dan KPI (<i>Key Performance Indicators</i>) Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2019 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.</p> <p>The RKAP, RKA, PKBL, Board of Commissioners RKA and Board of Directors and Board of Commissioners KPI (Key Performance Indicator) for 2019 that have been approved and ratified by the General Meeting of Shareholders (GMS), and form an integral part of the GMS Resolution Minutes, are a guideline for Board of Directors to implement the work programs and performance targets in 2019 as well as a guideline for Board of Commissioners to monitor and supervise.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>

PELAKSANAAN RUPS PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2018 DAN REALISASINYA

Tahapan pelaksanaan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 tergambar dalam tabel berikut:

2018 ANNUAL REPORT ENDORSEMENT GMS AND REALIZATION

The stages of 2018 Annual Report Endorsement GMS are shown in the following table.

Tabel Pelaksanaan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018
2018 Annual Report Endorsement GMS

Undangan Invitation	Pelaksanaan Implementation	Hasil RUPS GMS Results
Nomor Undangan KU.04.02/15/4/1/TUD/UT/PI.II-19 tanggal 15 April 2019 perihal Undangan RUPS Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun Buku 2018	Dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 pukul 11.00 sampai dengan 12.00 WIB di Kantor Kementerian BUMN RI Lt.7	Hasil RUPS dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 Nomor 13 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn
Invitation Number KU.04.02/15/4/1/TUD/UT/PI.II-19 dated April 15, 2019 regarding Invitation to the 2018 Annual GMS of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Held on Monday April 29, 2019 at 11.00-12.00 WIB in the 7th Floor Meeting Room, Ministry of SOE.	The GMS results were recorded in PT Pelabuhan Indonesia II 2018 Annual Report Endorsement GMS Minutes of Meeting number 13 made by Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018

RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

2018 Annual Report Endorsement GMS Attendance Recapitulation

The 2018 Annual Report Endorsement GMS was attended by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018
2018 Annual Report Endorsement GMS Attendance Recapitulation

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
1.	Tumpak Hatorangan Panggabean	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present	
2.	Djadmiko	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present	
3.	Montty Girianna	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Tidak Hadir Not Present	Mendapat tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Received an assignment from the Coordinating Ministry of Economy
4.	Suaidi Marasabessy	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present	
5.	Raden Agus Haryoto Purnomo	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present	
6.	Kushari Suprianto	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Tidak Hadir Not Present	Mendapat tugas dari Kementerian Keuangan Got an assignment from the Ministry of Finance
7.	Djaman Andhi Nirwanto	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present	
8.	Elvyn Gani Masassya	Direksi Director	Hadir Present	
9.	Arief Suhartono	Direksi Director	Hadir Present	
10.	Widyaka Nusapati	Direksi Director	Hadir Present	
11.	Dani Rusli Utama	Direksi Director	Hadir Present	
12.	Prasetyadi	Direksi Director	Hadir Present	
13.	Rizal Ariansyah	Direksi Director	Hadir Present	
14.	Ogi Rulino	Direksi Director	Hadir Present	



Keputusan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018

2018 Annual Report Endorsement GMS Decisions

Agenda Pertama First Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisari dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun Buku yang Berakhir 31 Desember 2018

The approval of the Company's Annual Report for the 2018 fiscal year including the Supervisory Duty Report of Board of Commissioners and Ratification of Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2018

Keputusan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisari untuk Tahun Buku yang berakhir 31-12-2018, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sunkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana Laporan Auditor Independen nomor No, 00029/2.1032/JL.0/06/0240-2/1/III/2019 tanggal 15-03-2019.

Decision :

1. Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Duty Report carried out by Board of Commissioners for fiscal year ending 31-12-2018, and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for fiscal year ended on 31-12-2018, which were audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwanto, Sunkoro & Surja with unqualified opinion in Independent Auditor's Report Number 00029/2.1032/JL.0/06/0240-2/1/III/2019 dated 15-03-2019.

a. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

a. Consolidated Financial Position Statements

	31 Desember 2018 <i>(dalam juta rupiah)</i> December 31, 2018 <i>(In Million Rupiah)</i>
Aset Assets	
Aset Lancar Current Assets	24.554.336
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	26.878.541
Total Aset Total Assets	51.432.877
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	5.498.194
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	29.500.226
Ekuitas Equity	16.434.457
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	51.432.877

b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian

b. Financial Position, Income Statements and Other Consolidated Comprehensive Income

	31 Desember 2018 <i>(dalam juta rupiah)</i> December 31, 2018 <i>(In Million Rupiah)</i>
Pendapatan Operasi Operating Income	11.436.701
Beban Operasi Operating Expenses	8.042.555
Pendapatan Non Usaha (Net) Non-business income (Net)	-196.361
Laba (Rugi) Usaha Business Profit (Loss)	3.197.785
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pre-Tax Profit (Loss)	2.775.005
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	2.430.709
Laba yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Profit Attributable to Owner of the Parent Entity	2.379.262
Laba Kepentingan Non Pengendali Profit Attributable to Non-controlling interests	51.448

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan Auditor Independen.

2. Ratified the Partnership Program and Community Development Program Financial Report for the fiscal year 2018 (two thousand and eighteen) ending on December 31, 2018 (thirty-first of December two thousand and eighteen) audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja in accordance with the Independent Auditor's Report.

a. Laporan Posisi Keuangan PKBL

a. PKBL Financial Position Statements

	Tahun 2018 2018 Year
Aset Assets	
Aset Lancar Current Assets	63.296.779
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	14.119.646
Total Aset Total Assets	77.416.425
Liabilitas dan Aset Neto Net Liabilities and Assets	
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	6.639.931
Aset Bersih Net Assets	70.776.493
Total Liabilitas dan Aset Neto Total Net Liabilities and Assets	77.416.425



b. Laporan Aktivitas PKBL

b. PKBL Activity Report

	Tahun 2018 2018 Year
Alokasi dana dari BUMN Pembina Allocation from State-Owned Trustees	
Pendapatan Income	11.697.196
Penyaluran, Beban & Pengeluaran Distribution, Charges and Expenses	24.774.650
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Increase (Decrease) in Net Assets	(13.047.454)
Aset Bersih Awal Tahun Net Assets at Beginning of Year	83.823.947
Aset Bersih Akhir Tahun Net Assets at End of Year	70.776.493

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

3. With the approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Duty Report carried out by Board of Commissioners and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year to December 31, 2018 and the Program Partnership and Community Development Financial Statements for the fiscal year on December 31, 2018, the GMS provided full release and discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners for the Company's management and supervision actions carried out during the fiscal year to December 31, 2018, insofar as such actions were not criminal actions and were reflected in the Annual Report, the Company's Consolidated Financial Statements and Partnership and Community Development Program Financial Statements for the fiscal year to December 31, 2018.

Status: Terealisasi

Status: Realized

Agenda Kedua Second Agenda	
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas)	Determination of the Net Profit Use for the 2018 (two thousand and eighteen) Fiscal Year.
Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasi Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp2.379.261.695.356,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) sebagai berikut:	Decision Determined the consolidated net profit of 2018 (two thousand and eighteen) in the amount of Rp2,379,261,695,356 (two trillion three hundred seventy nine billion two hundred sixty one million six hundred ninety five thousand three hundred fifty six rupiah) as described below:
1. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp832.742.000.000 (delapan ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) ditetapkan sebagai dividen.	1. 35% (thirty five percent) of net profit or Rp832,742,000,000 (eight hundred thirty two billion seven hundred forty two million rupiah) was to be distributed as dividends.
2. Sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp1.546.519.695.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditetapkan sebagai cadangan.	2. 65% (sixty five percent) of net profit or Rp1,546,519,695,000 (one trillion five hundred forty six billion five hundred nineteen million six hundred ninety five thousand rupiah) was to be posted as reserves.

Status: Terealisasi

Status: Realized

Agenda Ketiga Third Agenda	
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas)	Determination of the Public Accounting Firm to Audit the Company's Consolidated Financial Statements for 2019 (two thousand and nineteen) Fiscal Year and the Partnership and Community Development Program Financial Report for 2019 (two thousand and nineteen).
Keputusan	Decision
1. Menetapkan kembali KAP Purwantono Sunkoro dan Surja sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).	1. Reassigned the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sunkoro & Surja as auditors to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Partnership and Community Development Program Financial Statements for 2019 (two thousand and nineteen).
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.	2. Gave authority to Board of Commissioners to determine the amount of audit fees and other appointment requirements that are reasonable for the KAP.
Status: Terealisasi	Status: Realized

Agenda Keempat Fourth Agenda	
Penetapan Tantiem Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisari untuk Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas)	Determination of the 2018 (two thousand and eighteen) Fiscal Year Tantiem, Salary, Honorarium and Benefits and Other Facilities for Members of Board of Directors and Board of Commissioners for 2019 (two thousand and nineteen)
Keputusan	Decision
Tantiem Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisari untuk Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ditetapkan dalam keputusan tersendiri.	Tantiem for fiscal year 2018 (two thousand and eighteen), and the Salary, Honorarium, allowances and other facilities for members of the Boards of Directors and Commissioners for 2019 (two thousand and nineteen) was determined in a separate decision.
Status: Terealisasi	Status: Realized

Arahan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dan Tindaklanjutnya

2018 Annual Report GMS Endorsement Directives and Follow Up

No.	Arahan Directive	Tindak Lanjut Follow Up
1.	Direksi diminta untuk menindaklanjuti temuan-temuan, saran-saran auditor eksternal yakni BPK RI dan/atau KAP maupun auditor eksternal (SPI) tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan tahun-tahun sebelumnya, serta menyelesaikannya secara tuntas sehingga di masa mendatang temuan auditor atas masalah yang sama tidak terjadi lagi dan dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor eksternal agar dilaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham.	Telah terealisasi
	Board of Directors was asked to follow up on the findings, suggestions from external auditors, namely BPK RI and/or KAP or auditor external (SPI) for 2018 (two thousand and eighteen) and previous years, and resolve them thoroughly in order to avoid the re-occurrence of the same auditor's findings in the future and discuss comprehensively with Board of Commissioners. Follow up on the resolution of findings/suggestions of external auditors to be reported in writing to the Shareholders.	Has been realized
2.	Direksi harus terus berupaya melakukan <i>cost effectiveness</i> serta mengoptimalkan kinerja manajemen korporasi guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).	Telah terealisasi
	Board of Directors must strive to implement cost effectiveness and optimize corporate management performance to realize a more effective and efficient corporate management in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).	Has been realized



No.	Arahan Directive	Tindak Lanjut Follow Up
3.	<p>Direksi diminta untuk meningkatkan <i>monitoring</i>, pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja kantor cabang dan anak perusahaan sehingga dapat meningkatkan kontribusi pendapatan kepada induk perusahaan dan tidak ada lagi cabang/anak perusahaan yang merugi, serta menjamin keselarasan strategi induk dan anak perusahaan anata lain dengan melakukan <i>review</i> bisnis anak dan afiliasi perusahaan yang berurusan.</p> <p>Board of Directors was asked to improve monitoring and guidance for the branch offices and subsidiaries performance so that they can increase revenue contributions to the parent company and and there are no more loss experienced by branches/subsidiaries, and guarantee the alignment of the parent and subsidiary strategies, among others by conducting business reviews of related subsidiary and affiliated companies.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
4.	<p>Mengingat relisasi penyerapan investasi relatif rendah, Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk melakukan perencanaan investasi lebih realistis untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha.</p> <p>Considering the relatively low investment absorption, Board of Directors with the supervision of Board of Commissioners was asked to make more realistic investment planning to support increased productivity and business development.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
5.	<p>Direksi agar melakukan inventarisasi aset dan IP4T (Inventarisasi Pemilikan, Pemanfaatan, Penggunaan dan Penguasaan Tanah) untuk mengantisipasi permasalahan aset yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari sekaligus untuk optimalisasi aset.</p> <p>Board of Directors should conduct an inventory of assets and IP4T (Inventory of Ownership, Utilization, Use and Control of Land) to anticipate asset problems that are likely to arise in the future as well as to optimize assets.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
6.	<p>Setoran dividen agar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan.</p> <p>Dividend payments must be carried out in accordance with Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 190/PMK.02/017 concerning Procedures for Paying Non-Tax State Revenues from Separated State Assets Management Results.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
7.	<p>Terkait kegiatan PKBL, Direksi diminta untuk menindaklanjuti arahan sebagaimana Risalah Rapat Pembahasan Laporan Tahunan PKBL tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor RIS-39/D7.MBU.3.4.2019 tanggal 8 April 2019.</p> <p>Regarding PKBL activities, Board of Directors is requested to follow up on directives as the Minutes of PKBL Annual Report Discussion Meeting 2018 (two thousand and eighteen) Number RIS-39/D7.MBU.3.4.2019 dated April 8, 2019.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
8.	<p>Direksi dengan Pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk mengoptimalkan penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional yang menjadi tanggung jawab perusahaan.</p> <p>Board of Directors with Supervision of Board of Commissioners are required to optimize the completion of construction of the National Strategic Projects which are responsibility of the Company.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
9.	<p>Direksi dengan Pengawasan Dewan Komisaris diminta terus untuk meningkatkan <i>compliance</i>/pemenuhan pengisian dan pemutakhiran data pada Portal Aset, Portal Sistem Laporan Berkala (Silaba), Portal SDM, Portal PKBL, dan Portal publik. Sehubungan dengan peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan Perseroan kami minta agar pemutakhiran data, ketepatan dan kelengkapan pengisian protal tersebut menjadi perhatian utama Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen.</p> <p>Board of Directors with supervision of Board of Commissioners was asked to continue to improve compliance/ fulfillment of the asset portal data filling and updating, including the Periodic Report System (Silaba) portal, HC portal, PKBL portal, and Public portal. In connection with improving the quality of supervision and guidance of the Company, we request that data updates, accuracy and completeness of filling out the portals be the main concern of Board of Commissioners, Board of Directors and Management.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
10.	<p>Dieksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan dalam RUPS.</p> <p>Board of Directors must pay attention to and follow up on the advice and recommendations of Board of Commissioners presented at this GMS.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>

No.	Arahan Directive	Tindak Lanjut Follow Up
11.	Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan PKBL, Laporan Evaluasi Kinerja, laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Laporan Penilaian <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan tanggapan Dewan Komisari adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Rapat ini. The Financial Statements, PKBL Implementation Report, Performance Evaluation Report, Legislation and Internal Control Compliance Report, Key Performance Indicators (KPI) Assessment Report that have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) and Board of Commissioners' responses are an integral part of the minutes this meeting.	Telah terealisasi Has been realized

PELAKSANAAN RUPS RKAP TAHUN 2018 DAN REALISASINYA

2018 RKAP GMS AND ITS REALIZATION

Tahapan pelaksanaan RUPS RKAP Tahun 2018 tergambar dalam tabel berikut:

The stages of 2018 RKAP GMS are illustrated in the following table

Tabel Pelaksanaan RUPS RKAP Tahun 2018
2018 RKAP GMS Implementation

Undangan Invitation	Pelaksanaan Implementation	Hasil RUPS GMS Results
Diumumkan pada tanggal 19 Januari 2018 Nomor Undangan SK.02/19/1/1/TUD/UT/PI.II-18 perihal Undangan RUPS RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2018. Announced on January 19, 2018 Invitation Number SK.02/19/1/1/TUD/UT/PI.II-18 concerning Invitation to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2018 RKAP GMS.	Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 pukul 13.00-14.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 6, Kementerian BUMN RI. Conducted on Tuesday January 23, 2018 at 13.00 – 14.00 WIB in the 6th Floor Meeting Room, Ministry of SOE.	Hasil RUPS dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2018 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn. The GMS results were recorded in PT Pelabuhan Indonesia II 2018 RKAP GMS Minutes of Meeting made by Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS RKAP Tahun 2018

2018 RKAP GMS Attendance Recapitulation

RUPS RKAP Tahun 2018 yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

The 2018 RKAP GMS was attended by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS RKAP Tahun 2018
2018 RKAP GMS Attendance Recapitulation

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1.	Elvyn Gani Masassya	Direksi Director	Hadir Present
2.	Saptono Rahayu Irianto	Direksi Director	Hadir Present
3.	Iman Rachman	Direksi Director	Hadir Present
4.	Dani Rusli Utama	Direksi Director	Hadir Present
5.	Riry Syeried Jetta	Direksi Director	Hadir Present
6.	Prasetyadi	Direksi Director	Hadir Present



Tabel Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS RKAP Tahun 2018
2018 RKAP GMS Attendance Recapitulation

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
7.	Rizal Ariansyah	Direksi Director	Hadir Present
8.	Tumpak Hatorangan Panggabean	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present
9.	Djadmiko	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present
10.	Montty Girianna	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present
11.	Suaidi Marasabessy	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present
12.	Raden Agus Haryoto Purnomo	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present
13.	Kushari Suprianto	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present
14.	Djaman Andhi Nirwanto	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present

Keputusan RUPS RKAP Tahun 2018

2018 RKAP GMS Decisions

Agenda Pertama First Agenda

Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2018.

Ratification of the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and Work Plan and Budget of Partnership and Community Development Program (PKBL) for 2018.

Keputusan:

Decision:

Menyetujui/mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut:

To approve/ratify the 2018 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), and work plan and budget plan of Partnership and Community Development Program of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with the following main points:

- Laporan Laba (Rugi) Konsolidasi dan Penghasilan Komprehensif Lain:

- Consolidated Income Statements and Other Comprehensive Income

Uraian Description	Jumlah (juta) Total (million)
Pendapatan Usaha Operating Income	Rp11.684.763
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp2.054.237
Distribusikan Kepada: Profit for the Year Attributable to	
a. Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	Rp2.021.497
b. Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	Rp32.740

2. Posisi Keuangan Konsolidasi:

Uraian <i>Description</i>	Jumlah (juta) <i>Total (million)</i>
Total Aset Total Assets	Rp48.726.786
Liabilitas Liabilities	Rp34.003.378
Ekuitas Equity	Rp14.723.408

2. Consolidated Financial Position

3. Investasi:

a. Rencana Investasi tahun 2018 sebagai berikut:

Uraian <i>Description</i>	Jumlah (juta) <i>Total (million)</i>
Jumlah Investasi Perusahaan Induk Total Investments in Parent Company	Rp8.529.606
Jumlah Investasi Anak Perusahaan Total Investments in Subsidiaries	Rp1.574.274
Jumlah Investasi Konsolidasi Total Consolidated Investments	Rp10.103.880
Penyertaan Modal Perusahaan Induk Parent Company's Equity Participation	Rp1.579.013
Total Investasi & Penyertaan Modal Total Investments & Equity Participation	Rp11.682.893

3. Investment:

a. Investment Plan in 2018, as follows:

- b. Pengeluaran investasi agar dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, sesuai standar prosedur operasi, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kewajaran harganya.
- c. Pelaksanaan penyertaan modal kepada Anak Perusahaan agar berdasarkan Kajian Studi Kelayakan dan diusulkan secara tersendiri kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan.

- b. Expenditure for investments is made based on priority, in accordance with standard operating procedures, transparent, and at accountably fair prices.
- c. The implementation of equity participation to Subsidiaries is based on a feasibility study and proposed separately to the Shareholder for approval.

4. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan:

Uraian <i>Description</i>	Kemitraan (juta) <i>Partnership (million)</i>	Bina Lingkungan (juta) <i>Community Development (million)</i>
Dana Tersedia Available Funds	Rp62.743	Rp34.600
Penggunaan Dana Funds to be Allocated	Rp62.743	Rp34.600
Sisa Dana Funds Balance	-	-

4. Partnership and Community Development program:



- | | |
|--|--|
| <p>a. Rencana penyaluran dana Kemitraan sebesar dana tersedia yaitu Rp62.743.287.000,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) bersumber dari saldo dana Program Kemitraan (termasuk pendapatan dari sumber lainnya) dengan tidak mengalokasikan tambahan dana untuk Program Kemitraan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang berasal dari beban perusahaan tahun 2018 (dua ribu delapan belas);</p> <p>b. Rencana penyaluran Bina Lingkungan bersumber dari alokasi dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp34.599.669.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang dibebankan pada perusahaan atau diperhitungkan setara/<i>equivalen</i> 2,00% (dua koma nol nol persen) dari proyeksi laba tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan mempertimbangkan alokasi dana dapat mencukupi program tahun 2018 (dua ribu delapan belas).</p> | <p>a. The distribution plan of Partnership funds were available at Rp62,743,287,000.00 (sixty two billion seven hundred forty three million two hundred eighty seven thousand Rupiah) sourced from the balance of the Partnership Program funds (including income from other sources) but IPC did not allocate additional funds for the 2018 Partnership Program (two thousand and eighteen) from the Company's expenses in 2018 (two thousand and eighteen);</p> <p>b. The distribution plan of Community Development funds originating from the allocation of funds of the Community Development Program in the amount of Rp34,599,669,000.00 (thirty four billion five hundred ninety nine million six hundred sixty nine thousand Rupiah) which is charged to the Company or calculated as equivalent 2.00% (two point zero zero percent) of the 2017 (two thousand seventeen) profit projection by considering the allocation of funds to be sufficient for the 2018 (two thousand eighteen) program.</p> |
|--|--|

Status: Terealisasi

Status: Realized

Agenda Kedua
Second Agenda

Penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018.

The Determination of 2018 Key Performance Indicators for Boards of Directors and Boards of Commissioners

Keputusan:

Decision:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan <i>Key Performance Indicator</i> (Indikator Kinerja Kunci) tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen yang ditandatangani oleh Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). • Kontrak Manajemen dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. | <ul style="list-style-type: none"> • Establish Key Performance Indicators in 2018 (two thousand and eighteen) as stipulated in the Management Contract signed by the Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). • The management contract referred to is an inseparable part of this decision. |
|--|---|

Status: Terealisasi

Status: Realized

Agenda Ketiga
Third Agenda

Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2018.

The determination of Operational Indicators for the Measurement of Company's Soundness Level for 2018

Keputusan:

Decision:

- | | |
|--|---|
| <p>Menetapkan Indikator Aspek Operasional PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), sebagai berikut:</p> | <p>Establish Operational Indicators of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for the measurement of Company's Soundness Level Calculation 2018 (two thousand and eighteen), as follows:</p> |
|--|---|

Indikator Indicator	Bobot Weight
Waiting Time for Pilot (Jam) Waiting Time for Pilot (hour)	7%
Tingkat Efektivitas Tambahan Peti Kemas (%) Extra Containers Effectivity Level (%)	7%
Produktivitas Bongkar Muat Peti Kemas (B/H/S) Container Loading/unloading Productivity (B/C/H)	7%
Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering (T/G/J) Dry Bulk loading and unloading Productivity (T/G/H)	7%
Yard Occupancy Ratio Peti Kemas (%) Container Yard Occupancy Ratio (%)	7%
Jumlah Bobot Total Weight	35%

Status: Terealisasi

Status: Realized

Agenda Keempat
Fourth Agenda

Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk Memberikan Persetujuan Apabila Terdapat Tindakan-Tindakan yang Mengakibatkan Perubahan Alokasi Anggaran Investasi dengan Nilai Maksimum 10% (sepuluh persen) dari Total Nilai Investasi Termasuk Perubahan Item Investasi RKAP Tahun 2018.

Delegation of Authority to Board of Commissioners to Give Approval If There Are Actions That Result in Changes in the Allocation of Investment Budget with a Maximum Value of 10% (ten percent) of Total Investment Value Including Changes in 2018 RKAP Investment Item.

Keputusan:

Keputusan:

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan Alokasi Anggaran Investasi dengan nilai maksimum 10,00% (sepuluh persen koma nol nol) dari Total Nilai Investasi termasuk perubahan Item Investasi RKAP Tahun 2018 (dua ribu delapan belas).

Approved delegation of authority to Board of Commissioners to approve if there are actions that result in changes in the Investment Budget Allocation with a maximum value of 10.00% (ten percent point zero zero) of Total Investment Value including changes in the 2018 (two thousand and eighteen) RKAP Investment Item.

Status: Terealisasi

Status: Realized

Arahan RUPS RKAP Tahun 2018 dan Tindakanjuttunya

2018 RKAP GMS Directives and Follow Up

No.	Arahan Directive	Tindak Lanjut Follow Up
1.	RKAP Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah disahkan agar dirinci menjadi target per bulan dan <i>cascading</i> ke seluruh jajaran perusahaan. Dewan Komisaris agar melaporkan hasil rincian dan <i>cascading</i> dimaksud kepada Pemegang Saham dalam triwulan I tahun 2018 (dua ribu delapan belas).	Telah terealisasi
	The 2018 (two thousand and eighteen) Work Plan and Budget was ratified and further translated into monthly targets and cascaded throughout the Company. Board of Commissioners shall report the details and cascading results to the Shareholder in the first quarter of 2018 (two thousand and eighteen).	Has been realized
2.	Mengupayakan peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya (<i>cost reduction program</i>) di semua lini usaha guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien, dan laba bersih merupakan target minimal yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen perusahaan.	Telah terealisasi
	Work to increase revenue and improve cost control in all business lines (<i>cost reduction program</i>) in order to realize a more effective and efficient management of the Company, and net profit as the minimum target that must be achieved by the entire management	Has been realized



No.	Arahan Directive	Tindak Lanjut Follow Up
3.	<p>Memonitor dan meningkatkan implementasi standarisasi <i>Terminal Operating System</i> (TOS) pada terminal peti kemas di seluruh Cabang Pelabuhan.</p> <p>Monitor and improve the implementation of Terminal Operating System (TOS) standardization at container terminals in all Port Branches.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
4.	<p>Seluruh layanan kepelabuhanan sudah harus menerapkan ICT (<i>Information and Communication Technology</i>) dalam rangka memenuhi SLA/SLG yang telah disepakati. Dewan Komisaris agar melakukan pengawasan atas hal tersebut dan melakukan hasil <i>review</i> secara berkala kepada Pemegang Saham.</p> <p>All port services have to apply ICT (Information and Communication Technology) in order to meet the agreed SLA/SLG. Board of Commissioners shall supervise all matters as a result of this initiative and make periodic reviews of the results to the Shareholders</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
5.	<p>Melakukan penjajagan dan menindaklanjuti dengan kerjasama dan sinergi dengan BUMN Pelabuhan maupun BUMN lainnya dalam hal pengembangan usaha kepelabuhanan, pemanfaatan <i>asset</i>, pengembangan SDM, <i>joint procurement</i>, serta pemanfaatan dan pengembangan IT.</p> <p>Conduct explorations and follow up with cooperation and synergy with Port SOEs and other SOEs in terms of port business development, asset utilization, HC development, joint procurement, and IT utilization and development.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
6.	<p>Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, segera menyelesaikan Paket Kebijakan Ekonomi terkait Kepelabuhanan dan melaporkan secara periodik kepada Kementerian BUMN. Khusus untuk kebijakan Pemerintah tentang logistik, Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) agar saling berkoordinasi untuk segera menentukan <i>pricing management system</i>.</p> <p>Board of Directors under supervision of Board of Commissioners, immediately complete the Economic Policy Package related to Ports and report periodically to the Ministry of SOEs. Specifically for the Government's policy on logistics, Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) to coordinate with each other to immediately determine the pricing management system.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
7.	<p>Direksi agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Anak Perusahaan maupun Perusahaan Patungan, terutama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja perusahaan secara konsolidasi.</p> <p>Board of Directors should improve the guidance and supervision of the performance of Subsidiaries and Joint Ventures, especially those that make a significant contribution to the Company's performance on a consolidated basis.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
8.	<p>Direksi agar memastikan Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM dilakukan secara komprehensif oleh semua fungsi <i>Corporate Human Capital Development</i> (CHCD). Implementasi kebijakan pengembangan SDM, jenjang karir dan <i>talent management</i> untuk mendukung pencapaian target-target perusahaan baik dalam jangka pendek atau jangka panjang agar ditingkatkan, serta dilakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan SDM agar senantiasa sesuai dengan <i>best practice</i>.</p> <p>Board of Directors should ensure that the HC Management and Development Program is carried out comprehensively by all Corporate Human Capital Development (CHCD) functions. Implementation of HC development policies, career path and talent management to support the achievement of company targets both in the short and long term should be improved, as well as an evaluation of HC policies to always be in accordance with best practice.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>

No.	Arahan Directive	Tindak Lanjut Follow Up
9.	<p>Dalam rangka pengelolaan fungsi-fungsi <i>talent management</i> dengan sistematika yang lebih baik, serta memastikan ketersediaan dan kesiapan <i>talent</i> untuk <i>Sustainable Growth</i> dari BUMN, diminta kepada Direksi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan <i>talent management system</i> sekaligus menyiapkan <i>talent</i> perusahaan menjadi <i>talent pool</i> di Kementerian BUMN. Menyediakan <i>talent pool</i> di setiap minimal sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen). Menyiapkan kandidat calon Direksi dari BOD-1 sejumlah 3 (tiga) suksesor per posisi BOD. <p>In order to better manage systematic talent management function, and ensure the availability and readiness of talent for Sustainable Growth from SOEs, Board of Directors are requested to:</p> <ol style="list-style-type: none"> Organizing a talent management system while preparing company talent to become a talent pool at the Ministry of SOEs. Providing talent pool in every minimum of 20.00% (twenty point zero zero percent). Preparing candidates for Board of Directors from BOD-1 to be 3 (three) successors per BOD position. 	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
10.	<p>Terkait PKBL diminta untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03-07-2015 (tiga Juli dua ribu lima belas) tentang PKBL BUMN melalui Portal PKBL dengan alamat http://pkbl.bumn.go.id. Dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN, maka Direksi diminta untuk menetapkan SOP pelaksanaan PKBL yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN dimaksud. <p>Related to PKBL, asked to:</p> <ol style="list-style-type: none"> Submit periodic report in a timely manner as stipulated in Minister of SOEs Regulation No.PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 (the third of July two thousand and fifteen) on PKBL at SOEs through PKBL portal with address http://pkbl.bumn.go.id With the issuance of SOE Ministerial Regulation Number PER-02/MBU/07/2017 concerning the Second Amendment to SOE Ministerial Regulation Number PER-09/MBU/07/2015 concerning SOE PKBL, Directors are asked to set SOPs for the implementation of PKBL that have been adjusted to the Regulations of Minister of SOE referred to. 	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
11.	<p>Direksi agar memperhatikan temuan dan rekomendasi BPK, Auditor Independen dan Satuan Pengawasan Intern perusahaan yang belum dapat terselesaikan hingga tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan menjadikan hal tersebut sebagai target untuk dilakukan penyelesaian pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas).</p> <p>Board of Directors should pay attention to the findings and recommendations of BPK, Independent Auditors and the Company's Internal Audit Unit that cannot be resolved until 2017 (two thousand and seventeen) and make this a target for completion in 2018 (two thousand and eighteen).</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
12.	<p>Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan RKAP Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor 02/DK/PI.II/I-2018 tanggal 3 Januari 2018 (tiga Januari dua ribu delapan belas).</p> <p>Board of Directors to pay attention and follow up on the advice and recommendations of Board of Commissioners in the implementation of 2018 RKAP (two thousand and eighteen) as conveyed through letter Number 02/DK/PI.II/I-2018 dated January 3, 2018 (the three of January two thousand and eighteen).</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>
13.	<p>Buku RKAP, RKA, PKBL, RKA Dewan Komisaris dan KPI (<i>Key Performance Indicator</i>) Dewan Komisaris Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.</p> <p>The RKAP, RKA, PKBL, Board of Commissioners RKA and Board of Commissioners KPI (Key Performance Indicator) for 2018 (two thousand and eighteen) that have been approved and ratified by the General Meeting of Shareholders (GMS), are an integral part of the GMS Decision Minutes and become guidelines for Board of Directors to implement the work programs and performance targets in 2018 (two thousand and eighteen) as well as guidelines for Board of Commissioners to monitor and supervise.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been realized</p>



PELAKSANAAN RUPS PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 DAN REALISASINYA

Tahapan pelaksanaan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 tergambar dalam tabel berikut:

2017 ANNUAL REPORT ENDORSEMENT GMS AND REALIZATION

The stages of 2017 Annual Report Endorsement GMS are shown in the following table:

Tabel Pelaksanaan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017
2017 Annual Report Endorsement GMS

Undangan <i>Invitation</i>	Pelaksanaan <i>Implementation</i>	Hasil RUPS <i>GMS Results</i>
Diumumkan pada tanggal 19 Maret 2018 Nomor Undangan SK.03/19/3/1/TUD/UT/PI.II-18 perihal Undangan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2017.	Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 pukul 10.00-11.00 WIB di Kementerian BUMN RI Lt. 21.	Hasil RUPS dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn.
Announced on March 19, 2018 Invitation Number SK.03/19/3/1/TUD/UT/PI.II-18 concerning Invitation to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2017 Annual Report Endorsement GMS.	Held on Tuesday April 3, 2018 at 10.00-11.00 WIB in the 21st Floor Meeting Room, Ministry of SOE.	The GMS results were recorded in PT Pelabuhan Indonesia II 2017 Annual Report Endorsement GMS Minutes of Meeting made by Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017

RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

2017 Annual Report Endorsement GMS Attendance Recapitulation

The 2017 Annual Report Endorsement GMS was attended by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017
2017 Annual Report Endorsement GMS Attendance Recapitulation

No.	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>
1.	Elvyn Gani Masassya	Direksi Director	Hadir Present
2.	Saptono Rahayu Irianto	Direksi Director	Hadir Present
3.	Iman Rachman	Direksi Director	Hadir Present
4.	Dani Rusli Utama	Direksi Director	Hadir Present
5.	Riry Syeried Jetta	Direksi Director	Hadir Present
6.	Prasetyadi	Direksi Director	Hadir Present
7.	Rizal Ariansyah	Direksi Director	Hadir Present
8.	Tumpak Hatorangan Panggabean	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present
9.	Djadmiko	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present
10.	Montty Girianna	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present
11.	Suaidi Marasabessy	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present

Tabel Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017
2017 Annual Report Endorsement GMS Attendance Recapitulation

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
12.	Raden Agus Haryoto Purnomo	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present
13.	Kushari Suprianto	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present
14.	Djaman Andhi Nirwanto	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir Present

Keputusan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017

2017 Annual Report Endorsement GMS Decisions

Agenda Pertama
First Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017.

The approval of the Company's Annual Report for the 2017 fiscal year includes the Supervisory Duty Report of Board of Commissioners and Ratification of Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2017 and the approval of the Partnership and Community Development Program Report for the Fiscal Year 2017.

Keputusan:

Decision:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkono & Surja dengan pendapat "WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL" sebagaimana Laporan Auditor Independen Nomor RPC-5826/PSS/2018 tanggal 21-02-2018 (dua puluh satu Februari dua ribu delapan belas).

- Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report carried out by Board of Commissioners for the fiscal year ending 31-12-2017 (thirty-first of December two thousand and seventeen), and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended on 31-12-2017 (thirty-first of December two thousand and seventeen), which were audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkono & Surja with the opinion "UNQUALIFIED" in the Independent Auditor's Report Number RPC- 5826/PSS/2018 dated 21-02-2018 (twenty-first of February two thousand and eighteen).

- Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

- Consolidated Financial Position Statements

	31 Desember 2017 (dalam juta rupiah) December 31, 2017 (In Million Rupiah)
Aset Assets	
Aset Lancar Current Assets	23,781,639
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	23,438,449
Total Aset Total Assets	47,220,088
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	5.072.948
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	28,199,222
Ekuitas Equity	13,947,918
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	47,220,088



b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian

b. Financial Position, Income Statements and Other Consolidated Comprehensive Income

	31 Desember 2017 (dalam juta rupiah) December 31, 2017 (In Million Rupiah)
Pendapatan Operasi Operating Income	10,913,967
Pendapatan Konstruksi Construction Income	319,744
Beban Operasi Operating Expenses	(7,656,307)
Beban Konstruksi Construction Expenses	(319,744)
Pendapatan Operasi Lainnya Netto Other Operating Income Net	11,410
Laba (Rugi) Usaha Business Profit (Loss)	3,269,071
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pre-Tax Profit (Loss)	2,473,582
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	2,205,727
Laba yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Profit Attributable to Owner of the Parent Entity	2,179,894
Laba Kepentingan Non Pengendali Profit Attributable to Non-controlling interests	25,834

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan Auditor Independen.

2. Ratified the Partnership Program and Community Development Program Financial Statements for the fiscal year 2017 (two thousand and seventeen) ending on 31-12-2017 (thirty-first of December two thousand and seventeen) audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja in accordance with the Independent Auditor's Report.

a. Laporan Posisi Keuangan PKBL

a. PKBL Financial Position Statements

	Tahun 2017 (dalam ribu rupiah) 2017 (In thousand Rupiah)
Aset Assets	
Aset Lancar Current Assets	69,529,391
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	19,486,486
Total Aset Total Assets	89,015,877
Liabilitas dan Aset Bersih Net Liabilities and Assets	
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	5,191,930
Aset Bersih Net Assets	83,823,947
Total Liabilitas dan Aset Bersih Total Net Liabilities and Assets	89,015,877

b. Laporan Aktivitas PKBL

b. PKBL Activity Report

	Tahun 2017 (dalam ribu rupiah) 2017 (In thousand Rupiah)
Alokasi dan dari BUMN Pembina Allocation from State-Owned Trustees	-
Pendapatan Income	5,379,447
Penyaluran, Beban dan Pengeluaran Distribution, Charges and Expenses	16,617,107
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Increase (Decrease) in Net Assets	(11,237,661)
Aset Bersih Awal Tahun Net Assets at Beginning of Year	95,061,608
Aset Bersih Akhir Tahun Net Assets at End of Year	83,823,947

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) serta Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).

3. With the approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report carried out by Board of Commissioners and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year to 31-12-2017 (thirty-first of December two thousand and seventeen) and the Program Partnership and Community Development Financial Statements for the fiscal year on 31-12-2017 (thirty-first of December two thousand and seventeen), the GMS provided full release and discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners for the Company's management and supervision actions carried out during the fiscal year to 31-12-2017 (thirty-first of December two thousand and seventeen), insofar as such actions were not criminal actions and were reflected in the Annual Report, the Company's Consolidated Financial Statements and Partnership and Community Development Program Financial Statements for the fiscal year to 31-12-2017 (thirty-first of December two thousand and seventeen).

Status: Terealisasi

Status: Realized

Agenda Kedua
Second Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2017.

Determination of the Use of Net Profit for the 2017 Fiscal Year

Keputusan:

Decision :

Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasi tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp2.179.893.506.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam ribu rupiah) sebagai berikut:

Determined the consolidated net profit of 2017 (two thousand and seventeen) in the amount of Rp2,179,893,506,000 (two trillion one hundred seventy nine billion eight hundred ninety three million five hundred and six thousand rupiah) as described below:

1. Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih atau sebesar Rp653.968.051.800,00 (enam ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ditetapkan sebagai dividen.
2. Sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari laba bersih atau sebesar Rp1.525.925.454.200,00 (satu triliun lima ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) ditetapkan sebagai cadangan.

1. 30% (thirty percent) of net profit or Rp653,968,051,800 (six hundred fifty three billion nine hundred sixty eight million five hundred thousand eight hundred Rupiah) was to be distributed as dividends.
2. 70% (seventy percent) of net profit or Rp1,525,925,454,200 (one trillion five hundred twenty five billion nine hundred twenty five million four hundred fifty four thousand two hundred Rupiah) was to be posted as reserves.

Status: Terealisasi

Status: Realized



Agenda Ketiga Third Agenda

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.

Determination of the Public Accounting Firm to Audit the Company's Consolidated Financial Statements for 2018 Fiscal Year and the Partnership and Community Development Program Financial Statements for 2018 Fiscal Year.

Keputusan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).

Decision :

1. Established the Public Accounting Firm (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Partnership and Community Development Program Financial Statements for 2018 (two thousand and eighteen) Fiscal Year.
2. Gave authority to Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm (KAP), as well as to establish a substitute Public Accounting Firm(KAP) in the case Purwanto, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm for any reason were unable to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Partnership and Community Development Program Financial Statements for the Fiscal Year 2018 (two thousand and eighteen).

Status: Terealisasi

Status: Realized

Agenda Keempat Fourth Agenda

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2017, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2018.

Determination of the 2017 Fiscal Year Tantiem, Salary, Honorarium and Benefits and Other Facilities for Members of Board of Directors and Board of Commissioners for 2018.

Keputusan:

Tantiem tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas) ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Decision:

Tantiem for fiscal year 2017 (two thousand and seventeen), and the Salary, Honorarium, allowances and other facilities for members of Boards of Directors and Board of Commissioners for 2018 (two thousand and eighteen) was determined in a separate decision.

Status: Terealisasi

Status: Realized

ARAHAN RUPS PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 DAN TINDAKLANJUTNYA

2017 ANNUAL REPORT ENDORSEMENT GMS DIRECTIVES AND FOLLOW UP

No.	Arahan Directive	Tindak Lanjut Follow Up
1.	Direksi diminta untuk menindaklanjuti temuan-temuan, saran-saran auditor eksternal yakni BPK RI dan/ atau KAP maupun auditor eksternal (SPI) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan tahun-tahun sebelumnya, serta menyelesaikannya secara tuntas sehingga di masa mendatang temuan auditor atas masalah yang sama tidak terjadi lagi.	Telah terealisasi
	Board of Directors was asked to follow up on the findings, suggestions from external auditors, namely BPK RI and/or KAP or external auditor (SPI) of 2017 (two thousand and seventeen) and previous years, and resolve them thoroughly in order to avoid the re-occurrence of the auditor's findings in the future.	Has been Realized

No.	Arahan Directive	Tindak Lanjut Follow Up
2.	<p>Direksi harus terus berupaya melaksanakan pengendalian biaya serta mengoptimalkan kinerja manajemen korporasi guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).</p> <p>Board of Directors must strive to implement cost control and optimize corporate management performance to realize a more effective and efficient corporate management in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been Realized</p>
3.	<p>Direksi diminta untuk meningkatkan <i>monitoring</i> dan pembinaan terhadap kinerja kantor cabang dan anak perusahaan sehingga dapat meningkatkan kontribusi pendapatan kepada induk perusahaan.</p> <p>Board of Directors was asked to improve monitoring and guidance for the branch offices and subsidiaries performance so that they can increase revenue contributions to the parent company.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been Realized</p>
4.	<p>Direksi agar segera menyelesaikan permasalahan lahan dan meningkatkan penataan administrasi <i>asset</i> untuk mengantisipasi permasalahan <i>asset</i> yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari.</p> <p>Board of Directors must immediately resolve land issues and improve asset administration arrangements to anticipate asset problems that might arise later.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been Realized</p>
5.	<p>Terkait kegiatan PKBL, Direksi diminta:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan penagihan pengambilan pinjaman/piutang mitra binaan, sehingga kolektabilitas PK dapat ditingkatkan. Mengupayakan pengelolaan PKBL tahun 2018 agar lebih optimal dan lebih tepat sasaran. Menyalurkan dana PK sesuai dengan dana tersedia yang telah direncanakan. <p>Regarding PKBL activities, Board of Directors are asked to:</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimize billing of loan/receivables collection from fostered partners, so that PK collectability can be increased. Strive for PKBL management in 2018 to be more optimal and more targeted. Distribute PK funds in accordance with the planned available funds. 	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been Realized</p>
6.	<p>Direksi dengan Pengawasan Dewan Komisaris diminta terus meningkatkan <i>compliance</i>/pemenuhan pengisian dan pemutakhiran data portal aset, portal <i>financial information system</i> (FIS), portal SDM, portal PKBL, dan portal Publik. Sehubungan dengan peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan Perseroan kami minta agar pemutakhiran data, ketepatan dan kelengkapan pengisian portal tersebut menjadi perhatian utama Dewan Komisaris, Direksi, dan Manajemen.</p> <p>Board of Directors with the supervision of Board of Commissioners was asked to continue to improve compliance/fulfillment of the asset portal data filling and updating, including the financial information system (FIS) portal, HC portal, PKBL portal, and Public portal. In connection with improving the quality of supervision and guidance of the Company, we request that data updates, the accuracy and completeness of filling out the portals be the main concern of Board of Commissioners, Board of Directors and Management.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been Realized</p>
7.	<p>Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan dalam RUPS ini.</p> <p>Board of Directors must pay attention to and follow up on the advice and recommendations of Board of Commissioners presented at this GMS</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been Realized</p>
8.	<p>Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan PKBL, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Laporan Penilaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan tanggapan Dewan Komisaris adalah bagian yang tidak terpisahkan dari risalah rapat ini.</p> <p>The Financial Statements, PKBL Implementation Report, Performance Evaluation Report, Legislation and Internal Control Compliance Report, Key Performance Indicators (KPI) Assessment Report that have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) and Board of Commissioners' responses are an integral part of the minutes this meeting.</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been Realized</p>



No.	Arahan Directive	Tindak Lanjut Follow Up
9.	<p>Menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya akhir Februari 2019 (dua ribu sembilan belas).</p> <p>Submit the Company's Annual Report including the Financial Statements of the fiscal year 2018 (two thousand and eighteen) that have been audited by the Public Accounting Firm no later than the end of February 2019 (two thousand and nineteen).</p>	<p>Telah terealisasi</p> <p>Has been Realized</p>

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ IPC yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai IPC maupun usaha IPC, dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan IPC, sesuai dengan maksud dan tujuan IPC. Acuan utama Dewan Komisaris adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung Dewan Komisaris, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas Dewan Komisaris

Secara umum tugas Dewan Komisaris telah diatur dalam pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun tugas dan lingkup tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan IPC dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
4. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut;

BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is IPC's organ that is in charge of overseeing the management policies, the general management of IPC, and IPC's business, and advising Board of Directors on behalf of IPC, in accordance with the intent and purpose of IPC. The key reference of the Board is Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies and Law No. 19/2003 on State-Owned Enterprises. In performing its duties, the Board is assisted by supporting organs that include the Secretary of Board of Commissioners, the Audit Committee, the Risk Management Monitoring Committee and the Nomination and Remuneration Committee.

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES, AUTHORITY, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

Board of Commissioners Duties

Board of Commissioners duties are regulated by the Board Manual for Board of Directors and Board of Commissioners. Board of Commissioners duties and scope of responsibilities includes:

1. To supervise the policies and the Company's management by Board of Directors and to provide advice to Board of Directors, covering the Company's development plans, the annual Work Plans and Budget, the implementation of the Articles of Association, and GMS decisions, and the prevailing laws and regulations for the benefit of IPC and in accordance with the purposes and objectives of the Company;
2. To carry out duties, authorities and responsibilities in accordance with the provisions of the Articles of Association and decisions of the GMS and prevailing laws and regulations;
3. To carry out the interests of the Company with due regard to the interests of the Shareholders and be responsible to the GMS;
4. To examine and review the Annual Reports prepared by Board of Directors and to sign the reports;

5. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.

Dalam menjalankan tugas, setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Dewan Komisaris. Tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut apabila dapat membuktikan:

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;
3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen IPC, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, memeriksa surat berharga serta kekayaan IPC;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh IPC;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan IPC;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar IPC;
8. Membentuk Komite-Komite selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan IPC;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban IPC, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan IPC dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

5. To approve transactions or actions within the scope of Board of Commissioners or the GMS authority.

In performing its duties, each Commissioner shall be personally liable for the Company's losses if the person is guilty or negligent in performing their duties as a member of Board of Commissioners. This responsibility shall apply jointly to each member of Board of Commissioners. Members of Board of Commissioners cannot be held responsible for losses if they can prove:

1. They have conducted supervision with good faith and prudence in the interest of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company;
2. They had no direct or indirect personal interest in Board of Directors' management actions resulting in losses;
3. They had given advice to Board of Directors to prevent the occurrence or continuation of losses.

Board of Commissioners Authorities

In conducting its supervisory duties, Board of Commissioners is authorized to :

1. Inspect IPC's books, letters, and documents, examine cash for purposes of verification and others, examine IPC's securities and assets;
2. Enter IPC's yards, buildings, and offices;
3. Request an explanation from Board of Directors and/or other officials regarding any issues related to IPC's management;
4. Acknowledge about all policies and actions that have been and will be carried out by Board of Directors;
5. Request Board of Directors and/or other officials under Board of Directors with the knowledge of Board of Directors to attend Board of Commissioners meeting;
6. Appoint and dismiss the Secretary of Board of Commissioners if deemed necessary;
7. Temporarily suspend members of Board of Directors in accordance with the provisions of IPC's Articles of Association;
8. Establish Committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by observing IPC's capabilities;
9. Use experts for certain matters and within a certain period of time at IPC's expense, if deemed necessary;
10. Carry out IPC's management actions in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association;
11. Attend Board of Directors meetings and providing views on the matters discussed;



12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Kewajiban Dewan Komisaris

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris berkewajiban:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan IPC;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang ditetapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar IPC;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP IPC dan RKAP IPC mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP IPC;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan IPC, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan IPC;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja IPC;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP IPC;
9. Membentuk Komite Audit. Keanggotaan komite tersebut, terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS yang disertai dengan alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbalance jasa yang akan diberikan untuk auditor eksternal;
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
12. Melaporkan kepada IPC mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada IPC dan Perusahaan lain;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dikeluarkan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS;

12. Carry out other supervisory authority to the extent that it is not contrary to law, regulation, the Articles of Association and/or the GMS decision.

Board of Commissioners Obligations

In relation to the execution of Board of Commissioners duties, the Board is obliged to:

1. Advise Board of Directors in conducting the management of IPC;
2. Examine, review and sign the RJPP and RKAP stipulated by Board of Directors, in accordance with the provisions of IPC's Articles of Association;
3. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the Company's RJPP and RKAP regarding the reasons Board of Commissioners signed IPC's RJPP and RKAP;
4. Follow the development of IPC's activities, provide opinions and suggestions to the GMS on any issues deemed important to IPC's management;
5. Report immediately to the GMS in the event of any symptoms of declining performance in IPC;
6. Study and review periodic reports and annual reports prepared by Board of Directors and sign the annual reports;
7. Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS on the annual report, if requested;
8. Prepare an annual work program incorporated in IPC's RKAP;
9. Establish an Audit Committee, the membership of which to consist of one or more members of Board of Commissioners and is responsible to Board of Commissioners;
10. Propose a Public Accountant to the GMS accompanied by the reasons for nominations and the amount of honorarium/fee to be provided for the external auditor;
11. Take minutes of meetings of Board of Commissioners and keep copies thereof;
12. Report to IPC regarding their own and/or their families share ownership in IPC and other Companies;
13. Provide reports on supervisory duties issued during the past fiscal year to the GMS;
14. Carry out other obligations in the context of supervisory and advisory tasks, as long as they are not contrary to statutory regulations, statutes, and/or decisions of the GMS.

Board of Commissioners Responsibilities

Within the context of its duties, Board of Commissioners has the following responsibilities:

1. In performing its duties, Board of Commissioners is responsible to the GMS;

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi; 4. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya; 5. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Board of Commissioners shall supervise the management policies, the general management of IPC and its business and provide advice to Board of Directors; 3. Each Commissioners shall act in good faith, be prudent and be responsible in carrying out their supervisory and advisory roles to Board of Directors; 4. Each Commissioner shall be personally liable for the losses IPC bears if they fail to carry out their duties as referred to in point 3 (three); 5. In the event that Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members, the responsibilities referred to in number 4 (four) shall be borne jointly by each member of Board of Commissioners. |
|---|--|

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris
Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 16, yaitu sebagai berikut:

1. Segala Keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris;
2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh Anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan;
3. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/*dissenting opinion* Anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan;
4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada poin 3 ditandatangani oleh ketua Rapat dan seluruh Anggota Dewan Komisaris yang hadir;
5. Asli risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya;
6. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila disahkan di tempat kedudukan IPC atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia;
7. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi;
8. Dewan komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dan jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan;

DECISIONS THAT NEED APPROVAL FROM BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners Decision-Making Principles
Board of Commissioners decision making principles for their supervisory and advisory duties to Board of Directors refer to the Articles of Association No. 16 as follows:

1. All Board of Commissioners decisions are taken in Board of Commissioners meeting;
2. Decisions may also be taken outside of Board of Commissioners meetings as long as all Board of Commissioners members agree on the method and decision;
3. At each Board of Commissioners meeting, Minutes of meetings are made on the matters discussed (including any dissenting opinions by members of Board of Commissioners, if any) and matters decided;
4. The Minutes of meeting referred to in paragraph 3 are signed by the Meeting Chairman and all Commissioners present at the meeting;
5. The original Board of Commissioners Minutes of meetings are submitted to Board of Directors to be kept and maintained, while Board of Commissioners keeps a copy;
6. Board of Commissioners Meetings are valid if held at IPC's domicile or elsewhere within the territory of the Indonesian Republic;
7. Board of Commissioners holds meetings at least once every month, in which Board of Commissioners may invite Board of Directors;
8. Board of Commissioners may hold meetings at any time upon request of one or more members of Board of Commissioners, the request of Board of Directors, or, by law, at the written request of one or more Shareholders representing at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with voting rights, By mentioning the matters to be discussed;



9. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 10. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada poin 9 harus mencantumkan area, tanggal, waktu dan tempat rapat;
 11. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua Dewan Komisaris hadir dalam rapat;
 12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ Jumlah Anggota Dewan Komisaris;
 13. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua Anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat;
 14. Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu;
 15. Seorang Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya;
 16. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama;
 17. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama;
 18. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris;
 19. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 18 ini yang tertua usia bertindak sebagai pimpinan rapat;
 20. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat;
 21. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa;
 22. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk Anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya;
 23. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana
9. Board of Commissioners meetings call is submitted in writing by President Commissioner or a member of Board of Commissioners appointed by President Commissioner and notified within three days before the meeting or in a shorter time if urgent, excluding the call date and the meeting date;
 10. The call referred to in paragraph 9 shall include the event, date, time and place of the meeting;
 11. A meeting call is not required if all Commissioners are present at the meeting;
 12. Board of Commissioner meetings are valid and entitled to make binding decisions when attended or represented by more than ½ (one-half) of the total members of Board of Commissioners;
 13. During ad hoc topics at Board of Commissioner meetings, decisions will be valid only if all Commissioners or their proxies are present and approve the addition to the agenda;
 14. A Commissioner may be represented in a meeting only by another Commissioner by written authority granted exclusively for that purpose;
 15. A member of Board of Commissioners may only represent one other member of Board of Commissioners;
 16. All meetings of Board of Commissioners are chaired by President Commissioner;
 17. In the event that President Commissioner is absent, Board of Commissioners meeting is chaired by another Commissioner appointed by President Commissioner;
 18. In the event that President Commissioner does not appoint, the longest serving member of Board of Commissioners shall serve as chairman of Board of Commissioners meeting;
 19. In the event that more than one Commissioner is the longest serving, then the Commissioners referred to in paragraph 18 will be the oldest to serve as chairman of Board of Commissioners meeting;
 20. All decisions in a Board of Commissioners Meeting are taken by deliberation for consensus;
 21. If through deliberation a consensus is not reached, then the decision of Board of Commissioners meeting is taken through a majority vote;
 22. Each Commissioner is entitled to one vote plus one vote for the Commissioner he represents, if any;
 23. If the number of votes agreeing and disagreeing is the same, then the decision of the meeting shall be the same as the opinion of the Chairman of the meeting, keeping in mind the provisions on accountability as referred to in Article 15

dimaksud pada pasal 15 ayat 4, 5 dan 6 Anggaran Dasar IPC, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemulihan secara tertutup;

24. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat;
25. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari Jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemulihan ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari Jumlah suara yang dikeluarkan;
26. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

paragraph 4, 5 and 6, except on the person, the decision of the meeting shall be conducted by election in private;

24. A blank vote (*abstain*) is considered to approve the result of the meeting decision;
25. In the case of proposals with more than two alternatives and the result of voting does not choose an alternative with a vote of more than 1/2 (one per two) of the total votes cast, then the proposal with the most votes will be the one to receive over 1/2 (one-half) of the total votes cast;
26. Unauthorized votes are considered absent and not counted in determining the number of votes cast in the meeting.

Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris terdiri atas:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/ BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*), dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pembagian kewenangan sesuai keputusan RUPS adalah sebagai berikut:

Board of Directors Actions That Require Board of Commissioners Written Approval

Board of Directors' actions that must obtain written approval from Board of Commissioners consist of:

1. Applying fixed assets for short-term credit withdrawals;
2. Collaborating with business entities or other parties in the form of licensing cooperations, management contacts, leasing assets, Operational Cooperations (BOC), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO), and other partnerships with a certain value or time period determined by the General Meeting of Shareholders. The division of authority according to the GMS decision is as follows:

Pihak Party	Kewenangan Authority	
	Nilai Value	Jangka Waktu Period
Direksi Board of Directors	Sampai dengan Rp25 Miliar Up to Rp25 Billion	Sampai dengan 5 Tahun Up to 5 Years
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Di atas Rp25 Miliar sampai dengan Rp100 Miliar Above Rp25 Billion up to Rp100 Billion	Di atas 5 Tahun sampai dengan 10 Tahun Above 5 Years Up to 10 Years
RUPS GMS	Di atas Rp100 Miliar Above Rp100 Billion	Di atas 10 Tahun More than 10 Years

Dengan ketentuan apabila dalam kerja sama tersebut baik secara besaran (nilai) atau jangka waktu kerja sama salah satu kriteria (nilai atau jangka waktu) ada yang lebih tinggi maka digunakan kriteria yang tertinggi.

With the provision that if the cooperation is either a significant value, or if the cooperation period as one of the criteria is higher, then the highest criteria is used.



- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris; 4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati; 5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; 6. Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Receiving or providing medium/long-term loans, except loans (payables or receivables) arising from business transactions, and loans given to the Company's subsidiaries with the loan terms reported to Board of Commissioners; 4. Writing of bad debts and goods inventory; 5. Releasing movable fixed assets of an economic age that is generally applicable in the industry in general up to 5 (five) years; 6. Establishing the organizational structure up to 1 (one) level below Board of Directors. |
|--|--|

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusannya.

Within 30 (thirty) days of receiving the application or explanation and the complete documentation from Board of Directors, Board of Commissioners must give its decision.

Perbuatan Direksi yang Memerlukan Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris dan Persetujuan dari RUPS

Board of Directors Actions That Require A Written Response from Board of Commissioners and Agreement from the GMS

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS, terdiri atas:

Board of Directors actions that must obtain a written response from Board of Commissioners and approval from the GMS, include:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang; 2. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain; 3. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan; 4. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan; 5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan; 6. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (<i>borg</i> atau <i>avalist</i>); 7. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (<i>Build Operate Transfer/BOT</i>), Bangun Milik Serah (<i>Build Own Transfer/BOwT</i>), Bangun Serah Guna (<i>Build Transfer Operate/BTO</i>), dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu melebihi jangka penetapan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; 8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan; 9. Melepaskan dan menghapusbukukan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; 10. Menetapkan <i>blue print</i> organisasi Perseroan; 11. Menetapkan dan merubah logo Perseroan; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Applying fixed assets for medium/long term loans; 2. Conducting capital participation in other companies; 3. Establishing a subsidiary and/or joint venture company; 4. Releasing capital participation in subsidiaries and/or joint ventures; 5. Performing mergers, consolidations, acquisitions, separations, and dissolution of subsidiaries and/or joint ventures; 6. Binding the Company as guarantor (<i>borg</i> or <i>avalist</i>); 7. Organizing cooperations with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, asset leasing, Operational Cooperation (BOC), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOwT), Build Transfer Operate (BTO), and other cooperation with a value or a certain period of time exceeding the stipulation period by the General Meeting of Shareholders; 8. Ceasing collection of bad debts that have been written off; 9. Releasing and writing off the fixed assets of the Company, except for movable fixed assets with an economic life that is generally applicable in the industry in general up to 5 (five) years; 10. Establishing the blue print for the Company's organization; 11. Establishing and changing the Company's logo; |
|---|--|

12. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud pada tindakan yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris yang belum ditetapkan dalam RKAP;
13. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan;
14. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;
15. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan/data tambahan dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris mencakup persyaratan formal yang merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, persyaratan material serta persyaratan lainnya yang merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan. Adapun kriteria anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Formal
Yang dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris adalah perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu IPC atau Perum dinyatakan pailit; atau

12. Performing other actions as referred to in actions that require written approval from Board of Commissioners that have not been specified in the RKAP;
13. Forming foundations, organizations and/or associations that are directly or indirectly related to the Company that can affect the Company;
14. Charging permanent and routine Personnel costs for the activities of the organization's foundation and/or association both directly or indirectly related to the Company;
15. Proposing Company representatives to become candidates as members of Board of Directors and Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries that make a significant contribution to the Company and/or strategic value determined by the GMS.

If within 30 (thirty) days of receiving the application or explanation and the complete documentation from Board of Directors, and Board of Commissioners has not provided a written response, the GMS may make a decision without a written response from Board of Commissioners.

BOARD OF COMMISSIONERS TERM OF OFFICE

The term of office for members of Board of Commissioners is set at 5 (five) years without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders. Board of Commissioners can be terminated at any time. After the term of office ends, members of Board of Commissioners can be reappointed for 1 (one) term of office by the General Meeting of Shareholders.

REQUIREMENTS FOR BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS

The requirements to become a member of Board of Commissioners includes formal requirements which are the basic requirements determined by the Articles of Association, applicable laws and regulations, material requirements and other requirements which are requirements that are adjusted to the needs and nature of the Company's business. The criteria for members of Board of Commissioners are as follows:

1. Formal Requirements
Those who can be appointed to Board of Commissioners are individuals who are capable of carrying out legal actions, except for those who within 5 (five) years before their appointment:
 - a. Have been declared bankrupt;
 - b. Were a member of a Board of Directors or a member of a Board of Commissioners or a member of a Supervisory Board that was found guilty of causing IPC or a Public Company to be declared bankrupt; or



- | | |
|---|---|
| <p>c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.</p> <p>2. Persyaratan Material</p> <p>a. Memiliki integritas, dedikasi dan moral. Artinya calon anggota Dewan Komisaris tidak pernah baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam praktik-praktik yang menyimpang, cedera janji dan perbuatan lainnya yang merugikan Perseroan baik pada saat bekerja maupun pernah bekerja pada perusahaan lain;</p> <p>b. Memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;</p> <p>c. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang Perseroan;</p> <p>d. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.</p> <p>3. Persyaratan Lainnya</p> <p>a. Bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;</p> <p>b. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;</p> <p>c. Tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lainnya, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri pada jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lainnya jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan;</p> <p>d. Tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Swasta atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris, atau jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri pada salah satu jabatan tersebut jika dipilih sebagai anggota Dewan Komisaris;</p> <p>e. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perseroan selama 2 (dua) periode berturut-turut;</p> <p>f. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris;</p> <p>g. Memiliki kriteria independensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>c. Has been sentenced for committing a criminal offense that was detrimental to the country's finances and/or related to the financial sector.</p> <p>2. Material Requirements</p> <p>a. Has integrity, dedication and morals. This means that prospective members of Board of Commissioners have never been directly or indirectly involved in practices that deviate, breach promises, and other actions that affected the Company they worked at or other companies;</p> <p>b. Must understand the Company's management issues relating to one of the management functions;</p> <p>c. Have sufficient knowledge in the Company's business area;</p> <p>d. Can provide sufficient time to carry out their duties and obligations.</p> <p>3. Other Requirements</p> <p>a. Cannot be administrators of political parties and/or legislative candidates and/or legislators.</p> <p>b. Cannot be a Regional Head/Deputy Head candidate and/or a Regional Head/Deputy Head.</p> <p>c. Cannot currently be serving as a member of Board of Commissioners and/or the Supervisory Board in other SOEs/Companies, except by signing a statement of willingness to resign from their other position if elected as a member of the Company's Board of Commissioners.</p> <p>d. Cannot hold a position as a member of Board of Directors in another SOE, Private Owned Business Entity, or hold a position prohibited by laws and regulations on holding concurrent positions as a Member of Board of Commissioners, or a position that has the potential to cause a conflict of interest except by signing a statement of willingness to resign from one of these positions if elected as a member of Board of Commissioners;</p> <p>e. Has not served as a member of Board of Commissioners of the Company for 2 (two) consecutive periods;</p> <p>f. Is physically and mentally healthy (not suffering from an illness) that could hinder their duties as a member of Board of Commissioners;</p> <p>g. Has the independence criteria in accordance with applicable laws and regulations.</p> |
|---|---|

PROSES NOMINASI DAN PEMILIHAN DEWAN KOMISARIS

Sumber Bakal Calon Dewan Komisaris

Sumber bakal calon Dewan Komisaris berasal dari:

1. Mantan Direksi BUMN;

BOARD OF COMMISSIONERS NOMINATION AND SELECTION PROCESS

Prospective Candidates for Board of Commissioners

The prospective members for Board of Commissioners come from:

1. Former SOE Directors;

2. Dewan Komisaris BUMN;
3. Pejabat struktural dan pejabat fungsional Pemerintah;
4. Sumber lain.

Penjaringan

1. Menteri BUMN, Sekretaris Kementerian BUMN, Deputy Kementerian BUMN mencari bakal calon dari berbagai sumber;
2. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputy Kementerian BUMN yang membidangi pengelolaan data dan informasi Dewan Komisaris BUMN (Deputi).

Penilaian

1. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan formal, persyaratan materiil, dan persyaratan lain;
2. Evaluasi pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lain dilakukan oleh Deputi. Dalam hal Deputi tidak memiliki data dan/atau informasi yang cukup, pembuktian dapat dilakukan dengan menandatangani pernyataan pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lain oleh bakal calon yang bersangkutan;
3. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan Menteri BUMN memproses pernyataan yang tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penilaian pemenuhan persyaratan materiil, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri;
5. Penilaian pemenuhan persyaratan materiil dilakukan dengan cara:
 - a. Menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung;
 - b. Khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan;
 - c. Wawancara.
6. Hasil penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria "Disarankan" atau "Tidak Disarankan".
7. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak dilakukan apabila bakal calon merupakan pejabat *ex officio* dan pejabat Pemerintah yang diangkat dengan Keputusan Presiden.
8. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang sama, dilakukan berdasarkan penilaian Deputi Teknis dan Sekretaris Kementerian BUMN atas kemampuan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya. Penyajian hasil penilaian dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif.

2. SOE Commissioners;
3. Structural officials and functional government officials;
4. Other sources.

Network

1. Ministry of SOE, Secretary to the Ministry of SOE, Deputy Minister of SOEs will look for candidates from various sources;
2. All candidates will be administered by the Deputy Ministry of SOEs in charge of managing the data and information of SOE Board of Commissioners (Deputy).

Assessment

1. Candidates nominated as candidates for membership of Board of Commissioners are those who have been declared to meet formal requirements, material requirements, and other requirements;
2. Compliance evaluations for formal requirements and other requirements are carried out by the deputy. In the event that the Deputy does not have sufficient data and/or information, proof can be by a signed statement by the prospective candidate regarding fulfillment of the formal requirements and other requirements;
3. If in the future it turns out that the statement referred to in number 2 has been proven to be incorrect, then the person concerned is disrespectfully discharged from their position on the Board of the Commissioner, and the Ministry of SOEs will handle the incorrect statement in accordance with the applicable provisions;
4. The assessment of material requirements fulfillment will be carried out by a Team formed by the Minister;
5. The assessment for fulfillment of material requirements is carried out by:
 - a. Assessing the curriculum vitae and supporting documents;
 - b. Specifically for assessing integrity, by a written statement from the candidate concerned;
 - c. By interview.
6. The assessment results will be presented in the form of qualitative narratives with "Recommended" or "Not Recommended" criteria;
7. The assessment referred to in number 5 is not carried out if the prospective candidate is an *ex officio* official and a Government official appointed by a Presidential Decree;
8. Reappointment for Board of Commissioners members in the same SOE, is carried out based on an evaluation by the Technical Deputy and Secretary of the Ministry of SOE on the ability of the concerned person in carrying out their duties during their term of office. The results of the study will be presented in the form of qualitative narratives.



TATA LAKSANA KERJA - DEWAN KOMISARIS (*BOARD MANUAL*)

Secara lebih rinci, pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris diatur dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) yang antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, serta dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perseroan.

Adapun isi dari Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dijelaskan secara khusus dalam Bab III, yang mencakup:

1. Fungsi Dewan Komisaris;
2. Persyaratan, Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris;
3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas;
4. Etika Jabatan Dewan Komisaris dan Benturan Kepentingan;
5. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
6. Ketentuan Umum Jabatan Anggota Dewan Komisaris;
7. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris;
8. Organ Pendukung Dewan Komisaris.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan *Board Manual* yaitu:

1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) anggota atau lebih;
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama;
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi;
4. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS;
5. Sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris harus berasal dari kalangan di luar Perseroan (Komisaris Independen).

Selama tahun 2019, Komposisi anggota Dewan Komisaris IPC mengalami perubahan sebagaimana penjelasan berikut:

Periode 1 Januari 2019 – 20 Desember 2019

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris IPC berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 5 (lima) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC.

BOARD OF COMMISSIONERS BOARD MANUAL

In more details, Board of Commissioners guidelines and work rules are specified in the Board Manual which outlines the Work Procedures that cover guidelines for Board of Commissioners describing the stages of activities in a structured, systematic, easy to comprehend and consistent manner as a reference for Board of Commissioners in discharging their respective duties to achieve IPC's vision and mission.

Board of Commissioners Board Manual is specifically explained in Chapter III, which includes:

1. Board of Commissioners Function;
2. Board of Commissioners Criteria, Composition and Terms of Office;
3. Introduction and Capability Improvement Programs;
4. Board of Commissioners Ethics and Conflict of Interest;
5. Board of Commissioners Duties, Authorities, and Responsibilities;
6. Board of Commissioners Members General Provisions;
7. Board of Commissioners Performance Appraisal;
8. Board of Commissioners Supporting Organs.

BOARD OF COMMISSIONER COMPOSITION AND APPOINTMENT BASIS

The composition of Board of Commissioners is in accordance with the Board Manual, namely:

1. Board of Commissioners consists of 1 (one) member or more;
2. In the event that Board of Commissioners consists of more than 1 (one) member, one member of Board of Commissioners shall be appointed as President Commissioner;
3. The appointment of members of Board of Commissioners does not coincide with the appointment of members of Board of Directors;
4. The appointment and dismissal of members of Board of Commissioners is carried out by the GMS;
5. At least 20% (twenty percent) of the members of Board of Commissioners must come from outside the Company (Independent Commissioners).

During 2019, the composition of members of IPC Board of Commissioners underwent changes as explained below.

Period of January 1, 2019 – December 20, 2019

The number and membership composition of IPC's Board of Commissioners amounted to 7 (seven) persons consisting of 1 (one) President Commissioner and Independent Commissioner, 1 (one) Independent Commissioner and 5 (five) Commissioners. All Board of Commissioners members were domiciled in the working area of IPC Head Office.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
GCG STRUCTURE AND MECHANISM

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Appointed by	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Tumpak H. Panggabean	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen	Kementerian BUMN	SK Menteri BUMN No. SK-79/MBU/06/2015 Tanggal 03 Juni 2015 dan SK Komisaris Independen No. SK-40/MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016	3 Juni 2015
	President Commissioner and Independent Commissioner	Ministry of SOEs	Minister of SOE Decree No. SK-79/MBU/06/2015 dated June 3, 2015 and Independent Commissioner Decree No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	June 3, 2015
Montty Girianna	Komisaris	Kementerian BUMN	SK Menteri BUMN No. SK-40/MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016	1 Maret 2016
	Commissioner	Ministry of SOEs	Minister of SOE Decree No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	March 1, 2016
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen	Kementerian BUMN	SK Menteri BUMN No. SK-40/MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016	1 Maret 2016
	Independent Commissioner	Ministry of SOEs	Minister of SOE Decree No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	March 1, 2016
Djadmiko	Komisaris	Kementerian BUMN	SK Menteri BUMN No. SK-40/MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016	1 Maret 2016
	Commissioner	Ministry of SOEs	Minister of SOE Decree No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016	March 1, 2016
Kushari Suprianto	Komisaris	Kementerian BUMN	SK Menteri BUMN No. SK-133/MBU/07/2017 Tanggal 14 Juli 2017	14 Juli 2017
	Commissioner	Ministry of SOEs	Minister of SOE Decree No. SK-133/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	July 14, 2017
D. Andhi Nirwanto	Komisaris	Kementerian BUMN	SK Menteri BUMN No. SK-215/MBU/10/2017 Tanggal 04 Oktober 2017	4 Oktober 2017
	Commissioner	Ministry of SOEs	Minister of SOE Decree No. SK-215/MBU/10/2017 dated Oktober 04, 2017	Oktober 4, 2017
R. Agus H. Purnomo	Komisaris	Kementerian BUMN	SK Menteri BUMN No. SK-26/MBU/01/2018 Tanggal 22 Januari 2018	22 Januari 2018
	Commissioner	Kementerian BUMN	Minister of SOE Decree No. SK-26/MBU/10/2018 dated January 22, 2018	January 22, 2018

Periode 20 Desember - 31 Desember 2019

Pada tanggal 20 Desember 2019, Bapak Tumpak H. Panggabean diangkat sebagai Dewan Pengawas KPK sehingga beliau berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor SK-68/MBU/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama IPC. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris IPC Periode 20 Desember – 31 Desember 2019 berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 5 (lima)

Period December 20 – December 31, 2019

On December 20, 2019, Tumpak H. Panggabean was appointed as the Supervisory Board of KPK so he stopped serving as President Commissioner and Independent Commissioner according with the Minister of SOE Letter No. SK-68/MBU/2020 concerning the Dismissal of Appointment of IPC's President Commissioner. The number and composition of Board of Commissioners of IPC for the period of December 20 – December 31, 2019 amounted to 6 (six) persons consisting of 1 (one) Independent Commissioner



orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC.

and 5 (five) Commissioners. All Board of Commissioners members were domiciled in the working area of IPC Head Office.

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Appointed by	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Montty Girianna	Komisaris	Kementerian BUMN	SK Menteri BUMN No. SK-40/MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016	1 Maret 2016
	Commissioner	Ministry of SOEs	Minister of SOE Decree No. SK-40/ MBU/03/2016 dated March 1, 2016	March 1, 2016
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen	Kementerian BUMN	SK Menteri BUMN No. SK-40/MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016	1 Maret 2016
	Independent Commissioner	Ministry of SOEs	Minister of SOE Decree No. SK-40/ MBU/03/2016 dated March 1, 2016	March 1, 2016
Djadmiko	Komisaris	Kementerian BUMN	SK Menteri BUMN No. SK-40/MBU/03/2016 Tanggal 01 Maret 2016	1 Maret 2016
	Commissioner	Ministry of SOEs	Minister of SOE Decree No. SK-40/ MBU/03/2016 dated March 1, 2016	March 1, 2016
Kushari Suprianto	Komisaris	Kementerian BUMN	SK Menteri BUMN No. SK-133/ MBU/07/2017 Tanggal 14 Juli 2017	14 Juli 2017
	Commissioner	Ministry of SOEs	Minister of SOE Decree No. SK-133/ MBU/07/2017 dated July 14, 2017	July 14, 2017
D. Andhi Nirwanto	Komisaris	Kementerian BUMN	SK Menteri BUMN No. SK-215/ MBU/10/2017 Tanggal 04 Oktober 2017	4 Oktober 2017
	Commissioner	Ministry of SOEs	Minister of SOE Decree No. SK-215/ MBU/10/2017 dated Oktober 04, 2017	October 4, 2017
R. Agus H. Purnomo	Komisaris	Kementerian BUMN	SK Menteri BUMN No SK-26/MBU/01/2018 Tanggal 22 Januari 2018	22 Januari 2018
	Commissioner	Ministry of SOEs	Minister of SOE Decree No. SK-26/ MBU/10/2018 dated January 22, 2018	January 22, 2018

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Dalam rangka pengembangan kompetensi dan pengenalan IPC kepada Komisaris, IPC memiliki dan menjalankan program pengenalan bagi Anggota Komisaris baru. Tujuan program memberikan gambaran tentang profil perusahaan yang berisi: materi tentang kondisi umum perusahaan, kondisi keuangan, strategi yang sedang dijalankan, aktivitas bisnis, RJPP, Tata Kelola Perusahaan serta tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diberikan oleh IPC karena latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang merupakan representasi dari beberapa Pemegang Saham. Tujuan program pengenalan adalah agar para Anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif. Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi IPC secara umum;

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

In competency development and introduction of IPC to Commissioner, IPC has an introduction program for new Commissioners that aims to give an overview of the Company profile such as Company's condition in general, financial condition, business activity, Long-term Plans, Governance and the duties and responsibilities of Board of Commissioners.

IPC provides the introduction program due to the diverse background of members of Board of Commissioners as representatives of the Shareholder. The program aims to let members of Board of Commissioners get to know each other so they can work together as a solid, comprehensive and effective team. The following outline the introduction program:

1. For newly appointed members of Board of Commissioners, an introduction program should be conducted to give a general overview of IPC's condition;

2. Penanggung jawab program pengenalan adalah Sekretaris Perusahaan atau pejabat yang Menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan;
 3. Program Pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Perseroan;
 - b. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan;
 - c. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, Kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - d. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.
 4. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas IPC, kunjungan ke kantor-kantor cabang, pengkajian dokumen IPC atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.
2. The person in charge of the introduction program is the Corporate Secretary or a competent official appointed specifically for the task;
 3. The Introduction Program must cover:
 - a. Implementation of Good Corporate Governance principles at IPC;
 - b. Information about the duties and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors and matters unlawful for them;
 - c. An overview of IPC in relation to its objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short and long term business plans, risks, internal controls and other strategic issues;
 - d. An overview related to delegation of authority, internal and external audits, internal control systems and policies and the Audit Committee.
 4. This introduction program may be given as presentations, meetings, visit to IPC's facilities, visits to Branches, reviews of IPC documents or other programs that serve the purpose.

Selama tahun 2019 tidak terdapat Dewan Komisari baru, sehingga tidak terdapat pelaksanaan orientasi bagi Komisaris baru.

During 2019 there were no new Board of Commissioners, so there was no orientation for new Commissioner.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Adapun pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS SUPERVISORY DUTIES

Board of Commissioners' job descriptions are as follows.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris
Board of Commissioners Job Descriptions

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Area
Tumpak H. Panggabean*	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Koordinator Umum dan GCG. Koordinator Umum dan GCG.
Montty Girianna	Komisaris Commissioner	Bidang Teknik, Manajemen Risiko dan sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko. Engineering, Risk Management and as Risk Management Monitoring Committee Chairman.
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang Sosial, PKBL, CSR dan Masyarakat. Social Affairs, PKBL, CSR and Community.
Djadmiko	Komisaris Commissioner	Bidang Operasional dan Sistem Informasi. Operations and Information Systems.
Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner	Bidang Audit, Keuangan dan Ketua Komite Audit. Audit, Finance and as Audit Committee Chairman.



Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris
Board of Commissioners Job Descriptions

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Area
D. Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	Bidang Sumber Daya, Remunerasi, Hukum dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Resources, Remuneration, Law and as Nomination and Remuneration Committee Chairman.
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	Bidang Komersial, Pengembangan Usaha dan Fungsi Pembinaan Anak Perusahaan. Commercial, Business Development and Subsidiaries Guidance Functions.

*Berhenti menjabat sejak tanggal 20 Desember 2019

*Ended service since December 20, 2019

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau dengan Pemegang Saham atau hubungan lainnya dengan IPC yang dapat mempengaruhi independensinya.

BOARD OF COMMISSIONERS AFFILIATIONS

Members of Board of Commissioners have no financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of Board of Commissioners and/or Shareholder or any other relationship with IPC that may affect their independence.

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Affiliations

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris Board of Commissioners Financial, Family and Management Affiliations				
		Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship with				
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	
Tumpak H. Panggabean*	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner		✓		✓	
Montty Girianna	Komisaris Commissioner		✓		✓	
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner		✓		✓	
Djadmiko	Komisaris Commissioner		✓		✓	
Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner		✓		✓	
D. Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner		✓		✓	
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner		✓		✓	

*Berhenti menjabat sejak tanggal 20 Desember 2019

*Ended service since December 20, 2019

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
GCG STRUCTURE AND MECHANISM

		Hubungan Keluarga Dengan <i>Family Relationship with</i>						Hubungan Kepengurusan <i>Relationship Management</i>	
Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholder</i>		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>		Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholder</i>			
Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>
	✓		✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓	✓	
	✓		✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓		✓



KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Pasal 14 ayat 32, anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD maupun Badan Usaha Milik Swasta;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
4. Anggota Dewan Komisaris dan atau Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain.

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan yang dilarang dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

BOARD OF COMMISSIONERS CONCURRENT POSITIONS POLICY

In accordance with the Company's Articles of Association, Article 14 paragraph 32, members of Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:

1. Members of Board of Directors in SOE, ROE and Privately Owned Enterprises;
2. Other positions in accordance with the provisions of legislation, administrators of political parties and/or candidates/legislative members and/or candidates for Regional Heads/Deputy Regional Heads;
3. Other positions that may cause conflicts of interest;
4. Members of Board of Commissioners and or the Supervisory Board of other SOE/Companies.

During 2019, Board of Commissioners has no concurrent positions that are prohibited in the Company's Articles of Association.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Concurrent Positions

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain Position in Other Companies/ Agencies	Nama Perusahaan/ Instansi Lain Name of Other Companies/ Agencies
Tumpak H. Panggabean*	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	-	-
Montty Girianna	Komisaris Commissioner	Deputi Menteri Koordinator Bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Deputy of Coordinating Minister for the Management of Energy, Natural Resources and Environment	Kementerian Koordinator Perekonomian Coordinating Ministry for Economic Affairs
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain. Does not have concurrent positions in other companies or institutions.	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain. Does not have concurrent positions in other companies or institutions.
Djadmiko	Komisaris Commissioner	Kepala Satuan Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP-INSW) Head of Indonesia National Single Window Portal (PP-INSW) Management Unit	Kementerian Keuangan Ministry of Finance

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Concurrent Positions

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain Position in Other Companies/ Agencies	Nama Perusahaan/ <i>Instansi Lain</i> Name of Other Companies/ <i>Agencies</i>
Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner	Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai Director of Customs Audit	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
D. Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain. Does not have concurrent positions in other companies or institutions.	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain. Does not have concurrent positions in other companies or institutions.
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	Dirjen Perhubungan Laut Director General of Sea Transportation	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation

*Berhenti menjabat sejak tanggal 20 Desember 2019

*Ended service since December 20, 2019

PENGLOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris IPC telah diatur dalam *Board Manual*. Dewan Komisaris hendaknya senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan, antara lain dengan:

1. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas;
2. Mengisi Daftar Khusus yang berisikan informasi kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaharuan dan wajib memberitahukan Perseroan bila ada perubahan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak-pihak tertentu termasuk dan tidak terbatas pada pejabat/pegawai dilingkungan instansi pemerintah dan partai politik yang berkaitan dengan permintaan sumbangan, termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Perseroan sepanjang hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan;
4. Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
5. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.

BOARD OF COMMISSIONERS MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST

Management of Board of Commissioners' conflict of interest in IPC is covered in the Board Manual. Board of Commissioners should always avoid conflicts of interest, including:

1. Any activity that can affect their independence in carrying out their duties;
2. Completing the Special Register containing information on their and/or their families share ownership in other Companies, including if they do not have any share ownership, to be periodically update at the end of each year and notifying the Company if there is a change in data in accordance with the applicable legislation;
3. Not responding to requests from any party and for any reason, both for requests directly from certain parties including and not limited to officials/employees within government agencies and political parties relating to requests for donations, including those relating to the procurement of goods and services in the Company insofar as this can affect decision making;
4. Guided not to use their position for personal interests or for the benefit of other people or parties involved that are contrary to the interests of the Company;
5. Disclosures in the event of a conflict of interest and the member of Board of Commissioners concerned who may not be involved in the Company's decision-making process relating to this matter.



Setiap awal tahun, semua anggota Dewan Komisaris menandatangani Pakta Integritas, Kepatuhan Kode Etik Bisnis, Daftar Kepemilikan Saham dan Benturan Kepentingan. Anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya termasuk apabila terdapat perubahan kepemilikan saham baik pribadi ataupun keluarga di IPC dan/atau perusahaan lain. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Tiap anggota Dewan Komisaris dituntut untuk bertindak secara independen, tanpa adanya benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan dengan pihak manapun yang berkaitan dengan Perseroan maupun hubungan dengan Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris IPC bertindak independen dan bebas dari intervensi pihak manapun. Dalam setiap surat rekomendasi dan persetujuan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, selalui dilengkapi dengan pernyataan bebas benturan kepentingan, sehingga dapat menghindari adanya *conflict of interest* anggota Dewan Komisaris dalam setiap keputusan yang diambil.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris IPC telah melaporkan kepemilikan saham yang dimiliki. Dewan Komisaris tidak memiliki saham baik di IPC maupun pada perusahaan lain.

At the beginning of each year, all members of Board of Commissioners sign an Integrity Pact, Business Code of Conduct Compliance, List of Share Ownership and Conflict of Interest. Members of Board of Commissioners are also obliged to report if there is a change in status that affects their independence, including if there is a change in share ownership both personally and familial in IPC and/or other companies. The Secretary of Board of Commissioners is tasked with ensuring this practice is carried out in accordance with the GCG principles.

Each member of Board of Commissioners is required to act independently, without any conflict of interest that could interfere with their ability to carry out their tasks independently and critically, both in relation to any party related to the Company and relations with Board of Directors.

All IPC Board of Commissioners members act independently and are free from any intervention from any party. In each recommendation and approval letter from Board of Commissioners, there is a statement of free from conflict of interest, to avoid any conflict of interest of members of Board of Commissioners in every decision taken.

BOARD OF COMMISSIONERS SHARE OWNERSHIP

All members of IPC Board of Commissioners have reported their share ownership. Board of Commissioners does not have any shares in either IPC or other companies.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Board of Commissioners Share Ownership

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Kepemilikan Saham <i>Share Ownership</i>	
		IPC	Perusahaan Lain <i>Other Company</i>
Tumpak H. Panggabean*	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen <i>President Commissioner and Independent Commissioner</i>	Nihil Nil	Nihil Nil
Montty Girianna	Komisaris <i>Commissioner</i>	Nihil Nil	Nihil Nil
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Nihil Nil	Nihil Nil
Djadmiko	Komisaris <i>Commissioner</i>	Nihil Nil	Nihil Nil
Kushari Suprianto	Komisaris <i>Commissioner</i>	Nihil Nil	Nihil Nil
D. Andhi Nirwanto	Komisaris <i>Commissioner</i>	Nihil Nil	Nihil Nil
R. Agus H. Purnomo	Komisaris <i>Commissioner</i>	Nihil Nil	Nihil Nil

*Berhenti menjabat sejak tanggal 20 Desember 2019

*Ended service since December 20, 2019

KOMISARIS INDEPENDEN

Jumlah anggota Dewan Komisaris IPC per 31 Desember 2019 adalah 6 (enam) orang dengan Komisaris Independen berjumlah 1 (satu) orang atau 16,67% dari jumlah Dewan Komisaris.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, Komisaris Independen IPC telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pernyataan Komisaris Independen

INDEPENDENT COMMISSIONER

IPC's Board of Commissioners as of December 31, 2019 has 6 (six) members with 1 (one) Independent Commissioners or 16.67% from total Board of Commissioners.

Independent Commissioner's Determination Criteria

In accordance with the Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011, IPC Independent Commissioners have met the criteria as none of the members has financial relationship, management, share ownership and/or familial relationships with fellow members of BOC, members of BOD, nor Controlling Shareholders of related SOEs, which may keep them from acting independently.

Independent Commissioner's Statement

Kriteria Komisaris Independen <i>Independent Commissioners Criteria</i>	Komisaris Independen <i>Independent Commissioners</i>	
	Tumpak H. Panggabean*	Suaidi Marasabessy
Tidak memiliki hubungan keuangan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. <i>Does not have a financial relationship, which can affect his/her ability to act independently.</i>	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. <i>Does not have a management relationship, which can affect his/her ability to act independently.</i>	✓	✓
Tidak memiliki kepemilikan saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. <i>Do not have share ownership that can affect his/her ability to act independently.</i>	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. <i>Has no family relations with other members of Board of Commissioners, which can affect his/her ability to act independently.</i>	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. <i>Does not have family relations with members of Board of Directors, which can affect his/her ability to act independently.</i>	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. <i>Has no family relations with the Controlling Shareholders, which can affect his/her ability to act independently.</i>	✓	✓
Tidak memiliki hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. <i>Does not have a relationship with the relevant SOE, which can affect his/her ability to act independently.</i>	✓	✓

*Berhenti menjabat sejak tanggal 20 Desember 2019

*Ended service since December 20, 2019



RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* IPC.

Jadwal Rapat

Rapat Internal Dewan Komisaris pada tahun 2019 direalisasikan 1 (satu) kali dalam satu minggu, walaupun dalam ketentuan perundang-undangan maupun *Board Manual* ditetapkan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan. Sementara Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi direalisasikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sewaktu-waktu, jika dianggap perlu oleh:

1. Seorang atau lebih Dewan Komisaris;
2. Permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris;
3. Rapat Dewan Komisaris ini merupakan rapat yang bersifat segera dan/atau strategis.

Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha IPC atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

Peserta Rapat Dewan Komisaris

Peserta rapat Dewan Komisaris terdiri dari semua Anggota Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris menganggap perlu, pihak lainnya dapat dihadiri dalam rapat Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan yang diperlukan.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

Board of commissioners meeting are governed in IPC's Articles of Association and Board Manual.

Meeting Schedule

Internal Meeting of Board of Commissioners in 2019 was realized for 1 (one) time in one week, even though the provisions of the legislation or Board Manual are set at least 1 (one) time in one month. While the Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors was realized for 1 (one) time in 1 (one) month.

Board of Commissioners meetings can be held at any time, if deemed necessary by:

1. One or more Board of Commissioners;
2. Written request from one or more Members of Board of Commissioners;
3. This Board of Commissioners Meeting is an immediate and/or strategic meeting.

Meeting Location

Meetings of Board of Commissioners can be held at the domicile or at the place of IPC business activity or at other places within the territory of the Republic of Indonesia.

Board of Commissioners Meeting Participants

Participants in Board of Commissioners meeting consist of all members of Board of Commissioners. If Board of Commissioners considers it necessary, other parties may be attended at Board of Commissioners meeting to provide the necessary explanation.

Undangan Rapat

Panggilan rapat diatur sebagai berikut:

1. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama (atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama) dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak;
2. Panggilan rapat dan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat didelegasikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris, kecuali diatur lain menurut rapat Dewan Komisaris;
3. Panggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
4. Panggilan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui sarana elektronik (SMS, *email*, dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan, tanpa mengesampingkan ketentuan Anggaran Dasar mengenai tata cara panggilan rapat secara tertulis.

Panggilan rapat tidak diperlukan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.

Kuorum Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. Keterwakilan anggota Dewan Komisaris dalam rapat hanya dapat dilakukan dengan mewakilkan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya secara tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut dan dengan ketentuan bahwa 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris lainnya.

Pimpinan Rapat

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris, atau apabila terdapat lebih dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam jabatan, maka yang tertua usia bertindak sebagai pimpinan rapat.

Meeting Summons

Meeting summons are arranged as follows:

1. Summons for Board of Commissioners' Meeting shall be made in writing by President Commissioner (or a member of Board of Commissioners appointed by President Commissioner) and delivered within a minimum of 3 (three) working days before the meeting is held, or in a shorter time if in a situation urgent;
2. Summons of meetings and holding of meetings of Board of Commissioners can be delegated to Secretary of Board of Commissioners, unless otherwise stipulated in a meeting of Board of Commissioners;
3. Summons for Board of Commissioners meeting must state the agenda, date, time and place of the meeting;
4. Summons for Board of Commissioners meeting can be made via electronic means (SMS, e-mail, and other electronic means) so that notice of the meeting agenda can be delivered more quickly, without prejudice to the provisions of the Articles of Association regarding the procedure for meeting summons in writing.

Meeting summons is not required if all members of Board of Commissioners are present at the meeting.

Board of Commissioners Meeting Quorum

Board of Commissioners meetings are legal and have the right to make binding decisions, if attended by more than 1/2 (one half) of Board of Commissioners members. Representation of members of Board of Commissioners in a meeting can only be done by representing other members of Board of Commissioners in writing specifically given for this purpose and with the condition that 1 (one) member of Board of Commissioners can only represent 1 (one) other member of Board of Commissioners.

Chairman of the Meeting

Board of Commissioners meeting is chaired by President Commissioner. In the event that President Commissioner is not present or absent, the meeting will be chaired by another member of Board of Commissioners appointed by President Commissioner.

In the event that President Commissioner does not appoint, Board of Commissioners who is the longest serving as a member of Board of Commissioners acts as the chairman of Board of Commissioners' meeting, or if there are more than 2 (two) members of Board of Commissioners who are the oldest in the position, then the oldest age acts as chairman of the meeting.



Risalah Rapat

Setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Risalah asli rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya

Pencatatan/Notulis Rapat Dewan Komisaris

Pencatatan/Notulis Rapat Dewan Komisaris adalah Sekretaris Dewan Komisaris.

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris (Dengan Mengundang Komite)

Minutes of Meetings

Each meeting of Board of Commissioners must be made minutes of meeting. Minutes of meeting were signed by the Chairman of Meeting and by all members of Board of Commissioners present at the meeting.

Minutes of meetings are made and administered by the Secretary of Board of Commissioners or other officials appointed by Board of Commissioners. The original minutes of Board of Commissioners' meeting are submitted to Board of Directors for safekeeping and maintenance, while Board of Commissioners keeps a copy

Recording/Minutes of Meeting of Board of Commissioners

Recording/Minutes of Meeting of Board of Commissioners is done by the Secretary of Board of Commissioners

Board of Commissioners Internal Meeting Plan (Inviting The Committees)

No	Minggu Week	Agenda Agenda
1	Minggu #01 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Pembahasan realisasi KPI Dewan Komisaris Tahun 2018; Pembahasan realisasi KPI individu Dewan Komisaris Tahun 2018; Pembahasan realisasi rencana kerja dan laporan kegiatan Komite Dewan Komisaris Tahun 2018; Lain-lain.
	Week #01 January 2019	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results; Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; Discussion on the realization of KPI for Board of Commissioners in 2018; Discussion of the realization of individual KPIs for Board of Commissioners in 2018; Discussion on the work plan realization and report on the activities of Board of Commissioners of 2018; Others.
2	Minggu #02 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan; Lain-lain.
	Week #02 January 2019	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results; Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; Discussion of Board of Commissioners Concept for the Company Management Evaluation and Directives; Policies; Others.
3	Minggu #03 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Persiapan Rapat Komisaris dan Direksi; Lain-lain.
	Week #03 January 2019	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results; Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; Preparation for Board of Commissioners and Board of Directors Meetings; Others.

No	Minggu Week	Agenda Agenda
4	Minggu #01 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Pembahasan progres audit tahun buku 2018; Lain-lain.
	Week #01 February 2019	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results; Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; Discussion of the audit progress for the 2018 fiscal year; Others.
5	Minggu #02 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan; Lain-lain.
	Week #02 February 2019	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results; Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; Discussion of Board of Commissioners Concept for the Company Management Evaluation and Directives Policies; Others.
6	Minggu #03 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Pembahasan atas hasil audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018; Persiapan Rapat Komisaris dan Direksi; Lain-lain.
	Week #03 February 2019	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results; Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; Discussion of the 2018 Financial Statements Audit Results; Preparation for Board of Commissioners and Board of Directors Meetings; Others.
7	Minggu #01 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Pembahasan Laporan Tahunan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018; Lain-lain.
	Week #01 March 2019	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results; Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; Discussion of Board of Commissioners 2018 Annual Report; Others.
8	Minggu #02 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan; Lain-lain.
	Week #02 March 2019	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results; Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; Discussion of Board of Commissioners Concept for the Company Management Evaluation and Directives Policies; Others.



No	Minggu Week	Agenda Agenda
9	Minggu #03 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan bahan Rapat Komisaris dan Direksi; 4. Lain-lain.
	Week #03 March 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Board of Commissioners and Board of Directors Meetings Materials Discussion; 4. Others.
10	Minggu #01 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan; 4. Lain-lain.
	Week #01 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of Board of Commissioners Concept for the Company Management Evaluation and Directives Policies; 4. Others.
11	Minggu #02 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan KPI Dewan Komisaris Triwulan I/2019; 4. Pembahasan realisasi rencana kerja dan laporan kegiatan Komite Dewan Komisaris Triwulan I/2019; 5. Lain-lain.
	Week #02 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of Quarter I/2019 KPI Decree; 4. Discussion of Board of Commissioners Work Plan and Activity Realization Reports for the Quarter I/2019; 5. Others.
12	Minggu #03 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan kinerja perusahaan Triwulan I/2019; 4. Pembahasan bahan Rapat Komisaris dan Direksi; 5. Lain-lain.
	Week #03 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of the Company's performance in the 1st quarter of 2019; 4. Board of Commissioners and Board of Directors Meetings Materials Discussion; 5. Others.
13	Minggu #01 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan I/2019; 3. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 4. Lain-lain.
	Week #01 May 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of Responses to the 1st quarter of 2019 Management Report; 3. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 4. Others.

No	Minggu Week	Agenda Agenda
14	Minggu #02 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan; Lain-lain.
	Week #02 May 2019	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results; Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; Discussion of Board of Commissioners Concept for the Company Management Evaluation and Directives Policies; Others.
15	Minggu #03 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Persiapan Rapat Komisaris dan Direksi; Lain-lain.
	Week #03 May 2019	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results; Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; Preparation for Board of Commissioners and Board of Directors Meetings; Others.
16	Minggu #01 Juni 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan; Lain-lain.
	Week #01 June 2019	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results; Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; Discussion of Board of Commissioners Concept for the Company Management Evaluation and Directives Policies; Others.
17	Minggu #02 Juni 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Lain-lain.
	Week #02 June 2019	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results; Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; Others.
18	Minggu #03 Juni 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Pembahasan bahan Rapat Komisaris dan Direksi; Lain-lain.
	Week #03 June 2019	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results; Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; Board of Commissioners and Board of Directors Meetings Materials Discussion; Others.
19	Minggu #01 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan; Lain-lain.
	Week #01 July 2019	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results; Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; Discussion of Board of Commissioners Concept for the Company Management Evaluation and Directives Policies; Others.



No	Minggu Week	Agenda Agenda
20	Minggu #02 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan konsep Laporan Pengawasan dan KPI Dewan Komisaris Semester I/2019; 4. Pembahasan realisasi rencana kerja dan laporan kegiatan Komite Dewan Komisaris Semester I/2019; 5. Lain-lain.
	Week #02 July 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of Board of Commissioners of Supervision and KPI Report Concept for the 1st Semester of 2019; 4. Discussion on Board of Commissioners Work Plan and Activity Realization Report for the 1st Semester of 2019; 5. Others.
21	Minggu #03 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan kinerja perusahaan Semester II/2019; 4. Persiapan Rapat Komisaris dan Direksi; 5. Lain-lain.
	Week #03 July 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of company performance in the 2nd Semester of 2019; 4. Board of Commissioners and Board of Directors Meetings Materials Discussion; 5. Others.
22	Minggu #01 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan tanggapan atas Laporan Manajemen Semester I/2019; 4. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan; 5. Lain-lain.
	Week #01 August 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of Responses to Management Reports for the 1st Semester of 2019; 4. Discussion of Board of Commissioners Concept for the Company Management Evaluation and Directives Policies; 5. Others.
23	Minggu #02 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Lain-lain.
	Week #02 August 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Others.
24	Minggu #03 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan bahan Rapat Komisaris dan Direksi; 4. Lain-lain.
	Week #03 August 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Board of Commissioners and Board of Directors Meetings Materials Discussion; 4. Others.

No	Minggu Week	Agenda Agenda
25	Minggu #01 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan; 4. Lain-lain.
	Week #01 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of Board of Commissioners Concept for the Company Management Evaluation and Directives Policies; 4. Others.
26	Minggu #02 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan persiapan audit laporan keuangan tahun buku 2019; 4. Lain-lain.
	Week #02 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion on Preparation of Financial Report Audit for Fiscal Year 2019; 4. Others.
27	Minggu #03 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan bahan Rapat Komisaris dan Direksi; 4. Lain-lain.
	Week #03 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Board of Commissioners and Board of Directors Meetings Materials Discussion; 4. Others.
28	Minggu #01 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan; 4. Pembahasan Laporan Pengawasan dan KPI Dewan Komisaris Triwulan III/2019; 5. Pembahasan realisasi rencana kerja dan laporan kegiatan Komite Dewan Komisaris Triwulan III/2019; 6. Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Dewan Komisaris Tahun Buku 2020; 7. Lain-lain.
	Week #01 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of Board of Commissioners Concept for the Company Management Evaluation and Directives Policies; 4. Discussion of the Supervision and KPI Report for the 3rd Quarter III of 2019; 5. Discussion of Board of Commissioners Work Plan and Activity Realization Reports for the 3rd Quarter III of 2019; 6. Discussion of Board of Commissioners Work Plan and Budget for 2020; 7. Others.
29	Minggu #02 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan usulan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020; 4. Lain-lain.
	Week #02 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of the 2020 Corporate Work Plan and Budget Proposal; 4. Others.



No	Minggu Week	Agenda Agenda
30	Minggu #03 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan kinerja perusahaan Triwulan III/2019; 4. Persiapan Rapat Komisaris dan Direksi; 5. Lain-lain.
	Week #03 October 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of company performance in the 3rd Quarter of 2019; 4. Board of Commissioners and Board of Directors Meetings Materials Discussion; 5. Others.
31	Minggu #01 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan III/2019; 4. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan; 5. Lain-lain.
	Week #01 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of Responses to the 3rd Quarter of 2019 Management Report; 4. Discussion of Board of Commissioners Concept for the Company Management Evaluation and Directives Policies; 5. Others.
32	Minggu #02 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Lain-lain.
	Week #02 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Others.
33	Minggu #03 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Persiapan Rapat Komisaris dan Direksi; 4. Lain-lain.
	Week #03 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Board of Commissioners and Board of Directors Meetings Materials Discussion; 4. Others.
34	Minggu #01 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan; 4. Pembahasan atas konsep tanggapan Dewan Komisaris atas usulan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020; 5. Lain-lain.
	Week #01 December 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Previous Meeting Results; 2. Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of Board of Commissioners Concept for the Company Management Evaluation and Directives Policies; 4. Discussion of Board of Commissioners Response to the 2020 Corporate Work Plan and Budget Proposal Concept; 5. Others.

No	Minggu Week	Agenda Agenda
35	Minggu #02 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Lain-lain.
	Week #02 December 2019	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results; Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; Others.
36	Minggu #03 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Persiapan Rapat Komisaris dan Direksi; Lain-lain.
	Week #03 December 2019	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of Previous Meeting Results; Discussion of matters that need approval/response from Board of Commissioners; Preparation for Board of Commissioners and Board of Directors Coordination Meeting; Others.

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meetings Agenda, Dates and Participants

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meetings

Sepanjang tahun 2019, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

For 2019, Board of Commissioners Meeting agenda, dates and participants were as follows.

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
1.	2 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Konsep Surat Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan Penghapusbukuan Aset Tetap; Pembahasan Konsep Surat Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan kerjasama Aset dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok; Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean	Tidak Hadir Absent	Sedang diluar negeri Overseas
			Montty Girianna	Hadir Present	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
	January 2, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Concept of Board of Commissioners' Response Letter to proposed fixed asset write-offs; Discussion on the Concept of Board of Commissioners' Response Letter to the Proposed Asset collaboration with PT Pelabuhan Tanjung Priok; Other strategic matters. 	Djadmiko	Hadir Present	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	



Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
2.	9 Januari 2019	1. Rencana IPO PT Pelabuhan Tanjung Priok; 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. PT Pelabuhan Tanjung Priok IPO plan; 2. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
	January 9, 2019		Monttty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
	R. Agus H. Purnomo		Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	
3.	16 Januari 2019	1. Permasalahan kepegawaian di PT JICT; 2. Tuntutan masyarakat Koja Utara; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Staffing issues at PT JICT; 2. North Koja community demands; 3. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
	January 16, 2019		Monttty Girianna	Hadir Present	
			Suaidi Marasabessy	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
	R. Agus H. Purnomo		Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	
4.	23 Januari 2019	1. Usulan Perubahan Anggaran Dasar; 2. Usulan Penyaluran Dana Program Kemitraan melalui BUMN Khusus; 3. Masukan atas PKPT; 4. Hal-hal strategis lainnya. 1. Proposed Amendment to Articles of Association; 2. Proposed Partnership Program Fund Distribution through a Special SOE; 3. Input on PKPT; 4. Other strategic matters.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
	January 23, 2019		Monttty Girianna	Hadir Present	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
	R. Agus H. Purnomo		Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
5.	30 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Progres Audit Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun Buku 2019; Usulan Perubahan Anggaran Dasar; Persiapan Rakomdir tanggal 30 Januari 2019; Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Hadir Present	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
	January 30, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Audit Progress of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Financial Statements for 2019 Fiscal Year; Proposed Amendment to Articles of Association; Preparation for Board of Commissioners and Board of Directors Coordination Meeting on January 30, 2019; Other strategic matters 	Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
6.	6 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
	February 6, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Matters that need approval/recommendation from Board of Commissioners; Other strategic matters. 	Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency



Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
7.	13 Februari 2019	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
	February 13, 2019	1. Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; 2. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	
8.	20 Februari 2019	1. Pembahasan hasil audit laporan keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun Buku 2018; 2. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 3. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
	February 20, 2019	1. Discussion on audit results of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Fiscal Year 2018; 2. Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; 3. Other strategic matters.	Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
9.	27 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> <i>Closing Meeting</i> Hasil Audit Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 27 Februari 2019; Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Hadir Present	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
	February 27, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Closing Meeting of the Audit Results of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Financial Statements; Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; Preparation for Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors on February 27, 2019; Other strategic matters. 	D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	
10.	6 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Hadir Present	
	March 6, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; Other strategic matters. 	Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
	R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency		



Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence			
11.	13 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; Pembahasan Evaluasi penerapan manajemen risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2018; Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present				
			Montty Girianna	Hadir Present				
			Suaidi Marasabessy	Hadir Present				
	March 13, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; Discussion on risk management implementation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2018; Other strategic matters. 	Djadmiko	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency			
			Kushari Suprianto	Hadir Present				
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present				
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency			
			12.	20 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Triwulan IV Tahun 2018 Komite Audit dengan Satuan Pengawasan Internal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
						Montty Girianna	Hadir Present	
Suaidi Marasabessy	Hadir Present							
March 20, 2019	<ol style="list-style-type: none"> 4th Quarter of 2018 Coordination Meeting Audit Committee with PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Internal Audit Unit; Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; Other strategic matters. 	Djadmiko		Hadir Present				
		Kushari Suprianto		Hadir Present				
		D. Andhi Nirwanto		Hadir Present				
		R. Agus H. Purnomo		Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency			

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
13.	27 Maret 2019	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
	March 27, 2019	1. Matters that need approval/recommendation from Board of Commissioners; 2. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Tidak Hadir Absent	Sedang diluar kota Outside the City
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
14.	2 April 2019	1. Pembahasan Usulan Pemberian LTI; 2. Pembahasan Usulan Penyertaan Modal pada PT KBS; 3. Pembahasan konsep SK Direksi tentang Penugasan kepada Anak Perusahaan dalam pelaksanaan Proyek Strategis; 4. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
	April 2, 2019	1. Discussion on Proposed Provision of LTI; 2. Discussion on Proposed Capital Participation at PT KBS; 3. Discussion of the draft of the Decree of Board of Directors regarding Assignments to Subsidiaries in the implementation of Strategic Projects; 4. Other strategic matters.	Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency



Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence	
15.	10 April 2019	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present		
			Montty Girianna	Hadir Present		
	April 10, 2019	1. Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; 2. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Tidak Hadir Absent		Mengikuti kegiatan lain Was in another activity
			Djadmiko	Hadir Present		
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent		Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present		
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present		
16.	24 April 2019	1. Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 24 April 2019; 2. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 3. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present		
			Montty Girianna	Hadir Present		
			Suaidi Marasabessy	Hadir Present		
	April 24, 2019	1. Preparation for Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors on April 24, 2019; 2. Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; 3. Other strategic matters.	Djadmiko	Tidak Hadir Tidak Hadir		Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Kushari Suprianto	Hadir Present		
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present		
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present		
17.	8 Mei 2019	1. Konsep Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2019; 2. Konsep Laporan Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2019; 3. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 4. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present		
			Montty Girianna	Hadir Present		
			Suaidi Marasabessy	Hadir Present		
			Djadmiko	Hadir Present		
	May 8, 2019	1. Board of Commissioners' Responses Concepts to 1 st quarter of 2019 Management Report; 2. Draft Report of Board of Commissioners of the 1 st quarter of 2019; 3. Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; 4. Other strategic matters.	Kushari Suprianto	Hadir Present		
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present		
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent		Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence	
18.	15 Mei 2019	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present		
			Montty Girianna	Hadir Present		
	May 15, 2019	1. Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; 2. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Tidak Hadir Absent		Sedang di luar kota Outside the City
			Djadmiko	Hadir Present		
			Kushari Suprianto	Hadir Present		
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present		
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present		
19.	22 Mei 2019	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present		
			Montty Girianna	Hadir Present		
	May 22, 2019	1. Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; 2. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Hadir Present		
			Djadmiko	Hadir Present		
			Kushari Suprianto	Hadir Present		
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present		
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent		Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
20.	28 Mei 2019	1. Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 28 Mei 2019; 2. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 3. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present		
			Montty Girianna	Hadir Present		
			Suaidi Marasabessy	Hadir Present		
	May 28, 2019	1. Preparation for Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors on May 28, 2019; 2. Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; 3. Other strategic matters.	Djadmiko	Hadir Present		
			Kushari Suprianto	Hadir Present		
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present		
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present		



Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
21.	13 Juni 2019	1. Draft SK Direksi tentang Penugasan kepada Anak Perusahaan dalam Pelaksanaan Proyek Strategis di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Hadir Present	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
	June 13, 2019	1. Draft of Board of Directors Decree on Assignments to Subsidiaries in the Implementation of Strategic Projects in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Other strategic matters.	Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
22.	20 Juni 2019	1. Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Juni 2019; 2. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 3. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
	June 20, 2019	1. Preparation for Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors on June 20, 2019; 2. Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; 3. Other strategic matters.	Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
23.	3 Juli 2019	1. Rencana Addendum IV Perjanjian Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok; 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Tidak Hadir Absent	Sedang di luar Negeri Overseas
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	
	July 3, 2019	1. Addendum IV Plan to the North Kalibaru Container Terminal Development Agreement Phase I Tanjung Priok Port; 2. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
24.	10 Juli 2019	1. Tindak lanjut Rencana Addendum IV Perjanjian Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok; 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Hadir Present	
	July 10, 2019	1. Follow-up to Addendum IV Plan for the North Kalibaru Container Terminal Development Agreement Phase I Tanjung Priok Port; 2. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
25.	17 Juli 2019	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Hadir Present	
	July 17, 2019	1. Matters that need approval/recommendation from Board of Commissioners; 2. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Tidak Hadir Absent	Sedang di luar Negeri Overseas
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency



Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
26.	24 Juli 2019	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	
	July 24, 2019	1. Matters that need approval/recommendation from Board of Commissioners; 2. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	
27.	31 Juli 2019	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Montty Girianna	Hadir Present	
	July 31, 2019	1. Matters that need approval/recommendation from Board of Commissioners; 2. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	
28.	7 Agustus 2019	1. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Semester I Tahun 2019; 2. Laporan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Triwulan II Tahun 2019; 3. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Montty Girianna	Hadir Present	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
	August 7, 2019	1. Board of Commissioners response to the 1 st semester of 2019 management report; 2. Report of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2 nd Quarter of 2019; 3. Other strategic matters.	Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence	
29.	14 Agustus 2019	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present		
			Montty Girianna	Hadir Present		
	August 14, 2019	1. Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; 2. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Hadir Present		
			Djadmiko	Hadir Present		
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent		Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present		
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present		
30.	20 Agustus 2019	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present		
			Montty Girianna	Hadir Present		
	August 20, 2019	1. Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; 2. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Hadir Present		
			Djadmiko	Hadir Present		
			Kushari Suprianto	Hadir Present		
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present		
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present		
31.	28 Agustus 2019	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present		
			Montty Girianna	Hadir Present		
	August 28, 2019	1. Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; 2. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Hadir Present		
			Djadmiko	Hadir Present		
			Kushari Suprianto	Hadir Present		
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present		
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent		Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency



Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
32.	4 September 2019	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	
	September 4, 2019	1. Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; 2. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	
33.	11 September 2019	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Montty Girianna	Hadir Present	
	September 11, 2019	1. Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; 2. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
34.	18 September 2019	1. Tanggapan Dewan Komisaris atas surat Kementerian BUMN perihal Laporan Manajemen Semester I Tahun 2019 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Tanggapan atas usulan Pejabat Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 3. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Hadir Present	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
	September 18, 2019	1. Board of Commissioners' response to Ministry of SOE's letter regarding the 2019 First Semester Management Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Responses to the proposal of Commissioners and Board of Directors of Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 3. Other strategic matters.	Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
35.	25 September 2019	1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris; 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Hadir Present	
	September 25, 2019	1. Matters that need approval/ recommendation from Board of Commissioners; 2. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Tidak Hadir Absent	Cuti keagamaan (Umroh) Conducting Umrah
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency



Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
36.	2 Oktober 2019	1. Laporan Kunjungan ke Cabang Pelabuhan Cirebon; 2. Penetapan KPI Individual Dewan Komisaris Tahun 2019; 3. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Hadir Present	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
	October 2, 2019	1. Site Visit Report to Cirebon Port Branch; 2. Determination of Board of Commissioners' Individual KPI in 2019; 3. Other strategic matters.	Djadmiko	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	
37.	9 Oktober 2019	1. RJPP Tahun 2020-2024 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020; 3. Rencana Kunjungan ke Cabang-Cabang Pelabuhan; 4. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Hadir Present	
			Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
	October 9, 2019	1. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2020-2024 RJPP; 2. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2020 RKAP; 3. Plan to visit port branches; 4. Other strategic matters.	Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
38.	16 Oktober 2019	1. RJPP Tahun 2020 – 2024 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Laporan Kunjungan ke Cabang Pelabuhan Pangkal Balam; 3. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
	October 16, 2019	1. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2020-2024 RJPP; 2. Visit Report of Pangkal Balam Port Branch; 3. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
		D. Andhi Nirwanto	Hadir Present		
		R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	
39.	22 Oktober 2019	1. Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 22 Oktober 2019; 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Hadir Present	
	October 22, 2019	1. Preparation for Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors on October 22, 2019; 2. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
		R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	



Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
40.	30 Oktober 2019	1. Pendayagunaan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) oleh PT MMI;	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
		2. Rencana Kerjasama Pemanfaatan Lahan dengan PT Styrimdo Mono Indonesia;	Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	
		3. Kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Pertamina di Jalan Jampea dan Jalan Digul;	Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
		4. RJPP 2020-2024 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);	Kushari Suprianto	Hadir Present	
		5. Usulan RKAP Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);	D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
	6. Hal-hal strategis lainnya.	R. Agus H. Purnomo	Hadir Present		
	October 30, 2019	1. Utilization of Fixed Assets of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) by PT MMI;			
		2. Planned Collaboration on Land Utilization with PT Styrimdo Mono Indonesia;			
		3. Collaboration on the Utilization of Fixed Assets of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tanjung Priok Port Branch with PT Pertamina on Jampea Road and Digul Road;			
		4. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2020-2024 RJPP;			
		5. Proposed PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2020 RKAP;			
6. Other strategic matters.					
41.	6 November 2019	1. Laporan Hasil Kunjungan ke Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa;	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
		2. Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2019 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);	Montty Girianna	Hadir Present	
		3. Hal-hal strategis lainnya.	Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
	November 6, 2019	1. Visit Results Report on Sunda Kelapa Port Branch;	Djadmiko	Hadir Present	
		2. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 3 rd quarter of 2019 Management Report;	Kushari Suprianto	Hadir Present	
		3. Other strategic matters.	D. Andhi Nirwanto	Present Hadir	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
42.	13 November 2019	1. Perubahan RKAP Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Hadir Present	
	November 13, 2019	1. Amendments to the 2020 RKAP of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
43.	20 November 2019	1. Laporan Hasil Kunjungan ke Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Hadir Present	
	November 20, 2019	1. Visit Results Report on the Port Branches of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Other strategic matters	Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	
44.	27 November 2019	1. Laporan Hasil Kunjungan ke Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Pembahasan persiapan Rakernas tanggal 28-29 November 2019; 3. Hal-hal strategis lainnya.	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present	
			Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
	November 27, 2019	1. Visit Results Report on the Port Branches of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 2. Discussion on preparation of the National Working Meeting on November 28-29, 2019; 3. Other strategic matters.	Suaidi Marasabessy	Hadir Present	
			Djadmiko	Hadir Present	
			Kushari Suprianto	Hadir Present	
			D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency



Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence	
45.	4 Desember 2019	1. Laporan Hasil Kunjungan ke Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present		
		2. Pembahasan Pemaparan hasil evaluasi atas biaya KSMU;	Montty Girianna	Hadir Present		
		3. Hal-hal Strategis lainnya.	Suaidi Marasabessy	Tidak Hadir Absent	Sedang di luar kota Outside the City	
	December 4, 2019		1. Visit Results Report on the Port Branches of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);	Djadmiko	Hadir Present	
			2. Discussion on presentation of evaluation results on KSMU costs;	Kushari Suprianto	Hadir Present	
			3. Other strategic matters.	D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
				R. Agus H. Purnomo	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency
46.	11 Desember 2019	1. Pembahasan pemaparan hasil evaluasi atas biaya KSMU;	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present		
		2. Pembahasan Penghapusan Aset Tetap di Cabang – Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);	Montty Girianna	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	
		3. Hal-hal strategis lainnya.	Suaidi Marasabessy	Hadir Present		
	December 11, 2019		1. Discussion on presentation of evaluation results on KSMU costs;	Djadmiko	Hadir Present	
			2. Discussion on the Elimination of Fixed Assets in the Port Branches of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Port;	Kushari Suprianto	Hadir Present	
			3. Other strategic matters.	D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
				R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	
47.	18 Desember 2019	1. Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 November 2019;	Tumpak H. Panggabean	Hadir Present		
		2. Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan November 2019;	Montty Girianna	Hadir Present		
		3. Laporan masing-masing Direktur Bidang;	Suaidi Marasabessy	Hadir Present		
		4. Hal-hal strategis lainnya.	Djadmiko	Hadir Present		
	December 18, 2019		1. Follow up of Coordination Meeting result on November 20, 2019;	Kushari Suprianto	Hadir Present	
			2. Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until November 2019;	D. Andhi Nirwanto	Hadir Present	
			3. Report of each Division Director;	R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	
	4. Other strategic matters.					

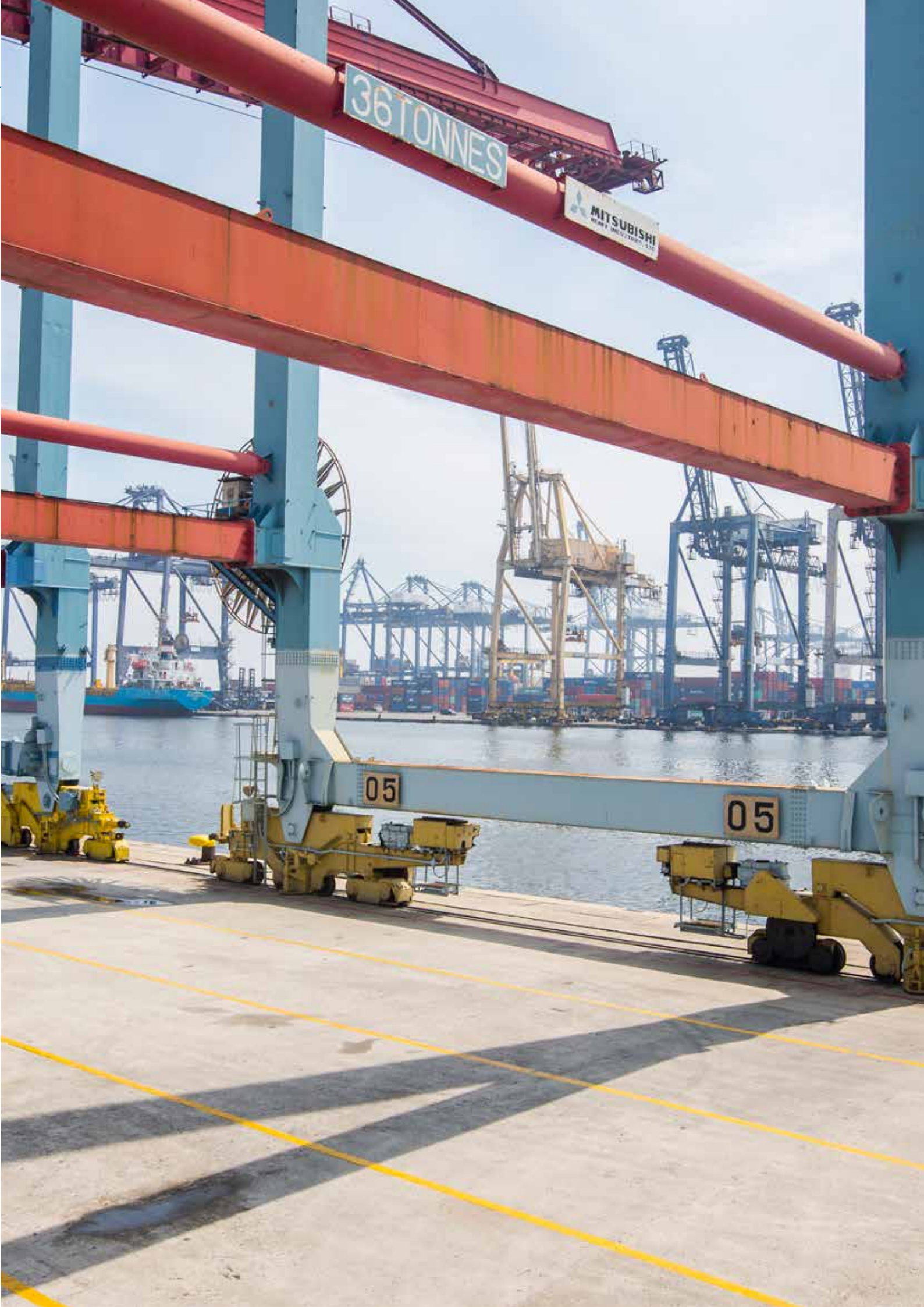
Rencana Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi
Board of Commissioners Meeting With Board of Directors Plan

No.	Bulan Month	Agenda Agenda	Agenda Agenda
1	Januari 2019 January 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan kinerja <i>unaudited</i> tahun 2018; Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; Pembahasan Rencana Implementasi RKAP 2019; Pembahasan hal-hal strategis lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of on previous meeting results; Discussion on unaudited performance in 2018; Report on performance progress in each directorate; Discussion on 2019 RKAP Implementation Plan; Discussion of other strategic matters.
2	Februari 2019 February 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan kinerja bulan Januari 2019; Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; Pembahasan Hasil Audit Tahun Buku 2018; Pembahasan Hasil Asesmen GCG Tahun Buku 2018; Pembahasan hal-hal strategis lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion on previous meeting results; Discussion on performance in January 2019; Report on on performance progress in each directorate; Discussion of 2018 Audit Year Results; Discussion on 2018 GCG Assessment Results; Discussion on other strategic matters.
3	Maret 2019 March 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan kinerja bulan Februari 2019; Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; Pembahasan hasil temuan audit dan tindak lanjutnya; Pembahasan Rencana Penunjukan Auditor Eksternal (KAP) Tahun Buku 2019; Pembahasan Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan 2018; Pembahasan hal-hal strategis lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion on previous meeting results; Discussion on performance in February 2019; Report on performance progress in each directorate; Discussion on audit findings and follow-up results; Discussion on Plan for External Auditors (KAP) Appointment for 2019 Fiscal Year; Discussion on Annual GMS Preparation for Ratification of 2018 Annual Report; Discussion on other strategic matters.
4	April 2019 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan I/2019; Pembahasan hasil RUPS Pengesahan Laporan Tahunan 2018; Pembahasan hal-hal strategis lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion on previous meeting results; Report on performance progress in each directorate; Discussion on 1st quarter of 2019 Management Reports; Discussion on Annual GMS Ratification Result of 2018 Annual Report; Discussion on other strategic matters.
5	Mei 2019 May 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan kinerja bulan April 2019; Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; Pembahasan hal-hal strategis lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion on previous meeting results; Discussion on performance in April 2019; Report on performance progress in each directorate; Discussion on other strategic matters.
6	Juni 2019 June 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan kinerja bulan Mei 2019; Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; Pembahasan hal-hal strategis lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion on previous meeting results; Discussion on performance in May 2019; Report on performance progress in each directorate; Discussion on other strategic matters.
7	Juli 2019 July 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan Laporan Manajemen Semester I/2019; Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; Telaah atas pelaksanaan RKAP 2019; Pembahasan hal-hal strategis lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion on previous meeting results; Discussion on 1st Semester Management Report; Report on performance progress in each directorate; Review on 2019 RKAP; Discussion on other strategic matters.



Rencana Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi
Board of Commissioners Meeting With Board of Directors Plan

No.	Bulan Month	Agenda Agenda	
8	Agustus 2019 August 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan kinerja bulan Juli 2019; 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; 4. Pembahasan hal-hal strategis lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on previous meeting results; 2. Discussion on performance in July 2019; 3. Report on performance progress in each directorate; 4. Discussion on other strategic matters.
9	September 2019 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan kinerja bulan Agustus 2019; 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; 4. Pembahasan Usulan RKAP 2020; 5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on previous meeting results; 2. Discussion on performance in August 2019; 3. Report on performance progress in each directorate; 4. Discussion on 2019 RKAP Proposal; 5. Discussion on other strategic matters.
10	Oktober 2019 October 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan III/2019; 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; 4. Pembahasan Usulan RKAP 2020; 5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on previous meeting results; 2. Discussion on 3rd quarter of 2019 Management Reports; 3. Report on performance progress in each directorate; 4. Discussion on 2020 RKAP Proposal; 5. Discussion on other strategic matters.
11	November 2019 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan kinerja bulan Oktober 2019; 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; 4. Persiapan RUPS Pengesahan RKAP 2020; 5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on previous meeting results; 2. Discussion on performance in October 2019; 3. Report on performance progress in each directorate; 4. Discussion on Annual GMS Preparation for 2020 RKAP Approval; 5. Discussion on other strategic matters.
12	Desember 2019 December 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan kinerja bulan November 2019; 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; 4. Pembahasan hal-hal strategis lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on previous meeting results; 2. Discussion on performance in November 2019; 3. Report on performance progress in each directorate; 4. Discussion on other strategic matters.



36 TONNES

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, LTD.

05

05



Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Sepanjang tahun 2019, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings Throughout 2019, Joint Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors agenda, dates and participants were as follows.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris BOC Participants
1.	30 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 19 Desember 2017; Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) <i>Unaudited</i> Tahun 2018; Laporan masing-masing Direktur Bidang; Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean Montty Girianna Suaidi Marasabessy
	January 30, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Follow up on Coordination Meeting results on December 19, 2017; Unaudited PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Consolidation Report 2018; Report of each Director; Other strategic matters. 	Djadmiko Kushari Suprianto D. Andhi Nirwanto R. Agus H. Purnomo
2.	27 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 30 Januari 2019; Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); Laporan masing-masing Direktur Bidang; Hal-hal strategi lainnya. 	Tumpak H. Panggabean Montty Girianna Suaidi Marasabessy
	February 27, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Follow up on Coordination Meeting results on January 30, 2019; Audit Results of Financial Statements for Fiscal Year 2018 of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); Report of each Director; Other strategic matters. 	Djadmiko Kushari Suprianto D. Andhi Nirwanto R. Agus H. Purnomo
3.	20 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 27 Februari 2019; Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan Februari 2019; Laporan masing-masing Direktur Bidang; Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean Montty Girianna Suaidi Marasabessy
	March 20, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Follow up on Coordination Meeting results on February 27, 2019; PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Consolidation Report up to February 2019; Report of each Director; Other strategic matters. 	Djadmiko Kushari Suprianto D. Andhi Nirwanto R. Agus H. Purnomo

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
GCG STRUCTURE AND MECHANISM

	Kehadiran <i>Attendance</i>	Keterangan <i>Explanation</i>	Peserta Rapat - Direks <i>BOD Participants</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>	Keterangan <i>Explanation</i>
	Hadir Present		Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
	Hadir Present		Saptono R. Irianto	Hadir Present	
	Hadir Present		Dani Rusli Utama	Hadir Present	
	Hadir Present		Prasetyadi	Hadir Present	
	Hadir Present		Widyaka Nusapati	Hadir Present	
	Hadir Present		Rizal Ariansyah	Hadir Present	
	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency			
	Hadir Present		Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
	Hadir Present		Saptono R. Irianto	Hadir Present	
	Hadir Present		Dani Rusli Utama	Hadir Present	
	Hadir Present		Prasetyadi	Hadir Present	
	Hadir Present		Widyaka Nusapati	Hadir Present	
	Hadir Present		Rizal Ariansyah	Hadir Present	
	Hadir Present				
	Hadir Present		Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
	Hadir Present		Dani Rusli Utama	Hadir Present	
	Hadir Present		Prasetyadi	Hadir Present	
	Hadir Present		Widyaka Nusapati	Hadir Present	
	Hadir Present		Rizal Ariansyah	Hadir Present	
	Hadir Present				
	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency			



Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris BOC Participants
4.	24 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 Maret 2019; Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan Maret 2019; Laporan masing-masing Direktur Bidang; Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean Montty Girianna Suaidi Marasabessy
	April 24, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Follow up on Coordination Meeting results on March 20, 2019; PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Consolidation Report up to March 2019; Report of each Director; Other strategic matters. 	Djadmiko Kushari Suprianto D. Andhi Nirwanto R. Agus H. Purnomo
5.	28 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 24 April 2019; Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan April 2019; Laporan masing-masing Direktur Bidang; Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean Montty Girianna Suaidi Marasabessy
	May 28, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Follow up on Coordination Meeting results on April 24, 2019; PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Consolidation Report up to April 2019; Report of each Director; Other strategic matters. 	Djadmiko Kushari Suprianto D. Andhi Nirwanto R. Agus H. Purnomo
6.	20 Juni 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 28 Mei 2019; Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan Mei 2019; Laporan masing-masing Direktur Bidang; Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean Montty Girianna Suaidi Marasabessy
	June 20, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Follow up on Coordination Meeting results on May 28, 2019; PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Consolidation Report up to May 2019; Report of each Director; Other strategic matters. 	Djadmiko Kushari Suprianto D. Andhi Nirwanto R. Agus H. Purnomo

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
GCG STRUCTURE AND MECHANISM

Kehadiran <i>Attendance</i>	Keterangan <i>Explanation</i>	Peserta Rapat - Direks <i>BOD Participants</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>	Keterangan <i>Explanation</i>
Hadir Present		Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
Hadir Present		Arif Suhartono	Hadir Present	
Hadir Present		Dani Rusli Utama	Hadir Present	
Tidak Hadir Absent	Sedang di luar negeri Overseas	Prasetyadi	Hadir Present	
Hadir Present		Widyaka Nusapati	Hadir Present	
Hadir Present		Rizal Ariansyah	Hadir Present	
Hadir Present		Ogi Rulino	Hadir Present	
Hadir Present		Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
Hadir Present		Arif Suhartono	Hadir Present	
Hadir Present		Dani Rusli Utama	Hadir Present	
Hadir Present		Prasetyadi	Hadir Present	
Hadir Present		Widyaka Nusapati	Tidak Hadir Absent	Rapat dengan Kementerian BUMN Meeting with SOE Ministry
Hadir Present		Rizal Ariansyah	Hadir Present	
Hadir Present		Ogi Rulino	Hadir Present	
Hadir Present		Elvyn G. Masassya	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan <i>non deal road show</i> Conducting non deal road show
Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Arif Suhartono	Hadir Present	
Hadir Present		Dani Rusli Utama	Hadir Present	
Hadir Present		Prasetyadi	Hadir Present	
Hadir Present		Widyaka Nusapati	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan <i>non deal road show</i> Conducting non deal road show
Hadir Present		Rizal Ariansyah	Tidak Hadir Absent	Sakit Sick
Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Ogi Rulino	Hadir Present	



Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris BOC Participants
7.	24 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 Juni 2019; Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan Juni 2019; Laporan masing-masing Direktur Bidang; Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean Montty Girianna Suaidi Marasabessy
	July 24, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Follow up on Coordination Meeting results on June 20, 2019; IPC Consolidation Report up to June 2019; Report of each Director; Other strategic matters. 	Djadmiko Kushari Suprianto D. Andhi Nirwanto R. Agus H. Purnomo
8.	20 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 24 Juli 2019; Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan Juli 2019; Laporan masing-masing Direktur Bidang; Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean Montty Girianna Suaidi Marasabessy
	August 20, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Follow up on Coordination Meeting results on July 24, 2019; IPC Consolidation Report up to July 2019; Report of each Director; Other strategic matters. 	Djadmiko Kushari Suprianto D. Andhi Nirwanto R. Agus H. Purnomo
9.	25 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 Agustus 2019; Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2019; Laporan masing-masing Direktur Bidang; Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean Montty Girianna Suaidi Marasabessy
	September 25, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Follow up on Coordination Meeting results on August 20, 2019; IPC Consolidation Report up to August 2019; Report of each Director; Other strategic matters. 	Djadmiko Kushari Suprianto D. Andhi Nirwanto R. Agus H. Purnomo

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
GCG STRUCTURE AND MECHANISM

Kehadiran <i>Attendance</i>	Keterangan <i>Explanation</i>	Peserta Rapat - Direks <i>BOD Participants</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>	Keterangan <i>Explanation</i>
Hadir Present		Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Arif Suhartono	Hadir Present	
Hadir Present		Dani Rusli Utama	Hadir Present	
Hadir Present		Prasetyadi	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan rapat dengan Komisi V DPR RI Attended meeting with Commission V DPR RI
Hadir Present		Widyaka Nusapati	Hadir Present	
Hadir Present		Rizal Ariansyah	Tidak Hadir Absent	Masa Cuti On leave
Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Ogi Rulino	Tidak Hadir Absent	
Hadir Present		Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
Hadir Present		Arif Suhartono	Hadir Present	
Hadir Present		Dani Rusli Utama	Hadir Present	
Hadir Present		Prasetyadi	Hadir Present	
Hadir Present		Widyaka Nusapati	Hadir Present	
Hadir Present		Rizal Ariansyah	Hadir Present	
Hadir Present		Ogi Rulino	Hadir Present	
Hadir Present		Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
Hadir Present		Arif Suhartono	Hadir Present	
Hadir Present		Dani Rusli Utama	Tidak Hadir Absent	
Hadir Present		Prasetyadi	Hadir Present	
Hadir Present		Widyaka Nusapati	Hadir Present	
Tidak Hadir Absent	Sedang cuti keagamaan (Umroh) Conducting Umrah	Rizal Ariansyah	Hadir Present	
Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Ogi Rulino	Hadir Present	



Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat – Dewan Komisaris BOC Participants
10.	22 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 Agustus 2019; Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2019; Laporan masing-masing Direktur Bidang; Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean Montty Girianna Suaidi Marasabessy
	October 22, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Follow up on Coordination Meeting results on September 25, 2019; IPC Consolidation Report up to September 2019; Report of each Director; Other strategic matters. 	Djadmiko Kushari Suprianto D. Andhi Nirwanto R. Agus H. Purnomo
11.	20 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 22 Oktober 2019; Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2019; Laporan masing-masing Direktur Bidang; Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean Montty Girianna Suaidi Marasabessy
	November 20, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Follow up on Coordination Meeting results on October 22, 2019; IPC Consolidation Report up to October 2019; Report of each Director; Other strategic matters. 	Djadmiko Kushari Suprianto D. Andhi Nirwanto R. Agus H. Purnomo
12	18 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 November 2019; Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan November 2019; Laporan masing-masing Direktur Bidang; Hal-hal strategis lainnya. 	Tumpak H. Panggabean Montty Girianna Suaidi Marasabessy
	December 18, 2019	<ol style="list-style-type: none"> Follow up on Coordination Meeting results on November 20, 2019; IPC Consolidation Report up to November 2019; Report of each Director; Other strategic matters. 	Djadmiko Kushari Suprianto D. Andhi Nirwanto R. Agus H. Purnomo

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
GCG STRUCTURE AND MECHANISM

	Kehadiran <i>Attendance</i>	Keterangan <i>Explanation</i>	Peserta Rapat - Direks <i>BOD Participants</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>	Keterangan <i>Explanation</i>
	Hadir Present		Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
	Hadir Present		Arif Suhartono	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan pelatihan di luar negeri Attended overseas training
	Hadir Present		Dani Rusli Utama	Hadir Present	
	Hadir Present		Prasetyadi	Hadir Present	
	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Widyaka Nusapati	Hadir Present	
	Hadir Present		Rizal Ariansyah	Hadir Present	
	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan penugasan di instansi asal Carry out assignment in origin agency	Ogi Rulino	Hadir Present	
	Hadir Present		Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
	Hadir Present		Hambra	Hadir Present	
	Hadir Present		Arif Suhartono	Hadir Present	
	Hadir Present		Dani Rusli Utama	Hadir Present	
	Hadir Present		Prasetyadi	Hadir Present	
	Hadir Present		Widyaka Nusapati	Hadir Present	
	Hadir Present		Rizal Ariansyah	Hadir Present	
			Ogi Rulino	Hadir Present	
	Hadir Present		Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
	Hadir Present		Hambra	Hadir Present	
	Hadir Present		Arif Suhartono	Tidak Hadir Absent	Alasan pribadi Personal matters
	Hadir Present		Dani Rusli Utama	Hadir Present	
	Hadir Present		Prasetyadi	Hadir Present	
	Hadir Present		Widyaka Nusapati	Hadir Present	
	Hadir Present		Rizal Ariansyah	Hadir Present	
			Ogi Rulino	Hadir Present	



Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners 'Meetings Frequency and Attendance

During 2019, Board of Commissioners held 47 (forty seven) Board of Commissioners internal meetings, and 12 (twelve) joint meetings with Board of Directors. The frequency and attendance for each Board of Commissioners meeting is as follows:

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting Frequency and Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Meetings	Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Meetings	Persentase Percentage
Tumpak H. Panggabean*	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	47	45	96%	12	12	100%
Montty Girianna	Komisaris Commissioner	47	32	69%	12	10	84%
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner	47	41	88%	12	12	100%
Djadmiko	Komisaris Commissioner	47	42	90%	12	11	92%
Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner	47	37	79%	12	11	92%
D. Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	47	46	98%	12	11	92%
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	47	16	35%	12	6	50%
Rata-rata Persentase Kehadiran Average Percentage of Attendance				79%		87%	

*Berhenti menjabat sejak tanggal 20 Desember 2019

*Stop serving since December 20, 2019

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab Profil Sub Bab Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

BOARD OF COMMISSIONERS COMPETENCY DEVELOPMENT

Board of Commissioners competency development can be seen in Board of Commissioners Profile Chapter, Competency Development Sub-Chapter in this Annual Report.

KEPUTUSAN, REKOMENDASI DAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Keputusan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

BOARD OF COMMISSIONERS DECISIONS, RECOMMENDATIONS AND DUTIES

Board of Commissioners Decisions and Recommendations

No.	Tanggal dan Nomor Agenda Date and Agenda Numbers	Perihal Subjects
Januari / January		
1	2 Januari 2019 01/DK/PI.II/I-2019 January 2, 2019 01/ DK/PI.II/I-2019	Persetujuan/Rekomendasi atas Usulan Penghapusbukuan Aktiva Tetap di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur Approval/Recommendation for Proposed Write-Off of Fixed Assets at Teluk Bayur Port Branch
2	2 Januari 2019 02/DK/PI.II/I-2019 January 2, 2019 02/ DK/PI.II/I-2019	Persetujuan atas Usulan Penghapusbukuan Aktiva Tetap di PT Industri Kendaraan Terminal, Tbk (PT IKT) Approval of Proposed Permanent Write-off at PT Industri Kendaraan Terminal, Tbk (PT IKT)
3	2 Januari 2019 03/DK/PI.II/I-2019 January 2, 2019 03/ DK/PI.II/I-2019	Rekomendasi atas Rencana Kerja Sama Optimalisasi Aset antara Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Recommendations on the Asset Optimization Cooperation Plan between the Tanjung Priok Port Branch and PT Pelabuhan Tanjung Priok
4	7 Januari 2019 04/DK/PI.II/I-2019 January 7, 2019 04/ DK/PI.II/I-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, mengundang Direktur Keuangan pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 pukul 15.00 wib pembahasan (1) Rencana IPO PT. PTP, (2) Hal-hal Strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners, inviting Finance Director on Wednesday, January 9, 2019 at 3:00 pm discussion (1) PT PTP IPO Plan, (2) Other Strategic Matters.
5	9 Januari 2019 05/DK/PI.II/I-2019 January 9, 2019 05/ DK/PI.II/I-2019	Tanggapan atas rencana IPO PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) Responses to PT Pelabuhan Tanjung Priok's IPO (PT PTP)
6	15 Januari 2019 06/DK/PI.II/I-2019 January 15, 2019 06/ DK/PI.II/I-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, mengundang Direktur SDM pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 pukul 15.00 WIB pembahasan (1) permasalahan kepegawaian di PT JICT. (2) Tuntutan masyarakat Koja Utara. (3) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners, inviting HC Director on Wednesday, January 16, 2019 at 3:00 pm discussion (1) staffing issues at PT JICT, (2) Demands of Koja Utara community. (3) Other strategic matters.
7	22 Januari 2019 07/DK/PI.II/I-2019 January 22, 2019 07/ DK/PI.II/I-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) Usulan Perubahan Anggaran Dasar. (2) Usulan Penyaluran Dana Program Kemitraan melalui BUMN Khusus. (3) Masukan atas PKPT. (4) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners, on Wednesday, January 23, 2019 at 4:00 pm discussion (1) Proposed Amendment to the Articles of Association. (2) Proposed Fund Distribution of Partnership Program through a Special SOE. (3) Input on PKPT. (4) Other strategic matters.
8	23 Januari 2019 08/DK/PI.II/I-2019 January 23, 2019 08/ DK/PI.II/I-2019	Evaluasi PKPT SPI Tahun 2019 PKPT SPI Evaluation in 2019



No.	Tanggal dan Nomor Agenda <i>Date and Agenda Numbers</i>	Perihal <i>Subjects</i>
9	23 Januari 2019 09/DK/PI.II/I-2019 January 23, 2019 09/ DK/PI.II/I-2019	Tanggapan atas Usulan Penyaluran Dana Program Kemitraan Melalui BUMN Khusus Response to Proposed Partnership Program Funds Distribution Through Special SOEs
10	28 Januari 2019 10/DK/PI.II/I-2019 January 28, 2019 10/ DK/PI.II/I-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris dan Komite, mengundang KAP & Direktur SDM pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 pukul 13.00 WIB pembahasan (1) Progres Audit Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun Buku 2019. (2) Usulan Perubahan Anggaran Dasar. (3) Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 30 Januari 2019. (4) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners and Committees, inviting KAP & HC Director on Wednesday, January 30, 2019 at 13.00 WIB discussion (1) Audit Progress of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2019 Fiscal Year. (2) Proposed Amendment to Articles of Association. (3) Preparation of Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors on January 30, 2019. (4) Other Strategic Matters.
11	28 Januari 2019 11/DK/PI.II/I-2019 January 28, 2019 11/ DK/PI.II/I-2019	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 19 Desember 2017. (2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) unaudited Tahun 2018. (3) Laporan masing-masing Direktur Bidang. (4) Hal-hal strategis lainnya. Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors on Wednesday, January 30, 2019 at 16.00 WIB discussion (1) Follow-up on the results of Coordination Meeting on December 19, 2017. (2) 2018 unaudited Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (3) Report from each Director. (4) Other strategic matters.
Februari / February		
12	4 Februari 2019 12/DK/PI.II/II-2019 February 4, 2019 12/ DK/PI.II/II-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris. (2) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners on Wednesday February 6, 2019 at 16.00 WIB discussion (1) Matters that need approval/recommendation from Board of Commissioners (2) Other strategis matters.
13	7 Februari 2019 15/DK/PI.II/II-2019 February 7, 2019 15/ DK/PI.II/II-2019	Tanggapan Atas Usulan Perubahan Anggaran Dasar Responses to Proposed Amendment to the Articles of Association
14	12 Februari 2019 17/DK/PI.II/II-2019 February 12, 2019 17/ DK/PI.II/II-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris dan Komite, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris. (2) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners and Committees, on Wednesday, February 13, 2019 at 16.00 WIB discussion (1) Matters that need approval/recommendation from Board of Commissioners. (2) Other strategic matters.
15	14 Februari 2019 18/DK/PI.II/II-2019 February 14, 2019 18/ DK/PI.II/II-2019	Tanggapan atas Usulan Pejabat Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan Responses to Directors and Commissioners of Subsidiaries Proposal
16	14 Februari 2019 19/DK/PI.II/II-2019 February 14, 2019 19/ DK/PI.II/II-2019	Persetujuan atas Usulan Penghapusbukuan Aktiva Tetap di Cabang Pelabuhan Palembang Approval of the Proposed Wrecking of Fixed Assets at Palembang Port Branch

No.	Tanggal dan Nomor Agenda Date and Agenda Numbers	Perihal Subjects
17	19 Februari 2019 20/DK/PI.II/II-2019 February 19, 2019 20/DK/PI.II/II-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris dan Komite dengan KAP, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) hasil audit laporan keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun Buku 2018. (2) Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris. (3) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners and Committese with KAP, on Wednesday, February 20, 2019 at 16.00 WIB discussion (1) Audit result of financial statements of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) of 2018 Fiscal Year. (2) Matters that need approval/recommendations from Board of Commissioners. (3) Other strategic matters.
18	19 Februari 2019 21/DK/PI.II/II-2019 February 19, 2019 19/ DK/PI.II/II-2019	Permintaan Pendaftaran dan Penerbitan SPPD Komisaris mengikuti Seminar "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi di BUMN (pada tanggal 21 -22 Maret 2019 di Bali atas nama Tumpak, Djadmiko, Andhi) Request for Registration and Issuance of SPPD Commissioners following the Seminar "Law Enforcement of Corporate Crimes in SOEs (on March 21-22, 2019 in Bali on behalf of Tumpak, Djadmiko, Andhi)
19	20 Februari 2019 22/DK/PI.II/II-2019 February 20, 2019 22/ DK/PI.II/II-2019	Persetujuan atas Usulan Penghapusbukuan Aktiva tetap di Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa Approval of Proposed Wrecking of Fixed Assets at Sunda Kelapa Port Branch
20	25 Februari 2019 23/DK/PI.II/II-2019 February 25, 2019 23/ DK/PI.II/II-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris dan Komite dengan KAP, pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 pukul 13.00 WIB pembahasan (1) <i>Closing Meeting</i> Hasil Audit Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris. (3) Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 27 Februari 2019 (4) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners and Committee with KAP, on Wednesday, February 27, 2019 at 13.00 WIB discussion (1) Closing Meeting of Audit Reports on Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Matters that require approval/recommendation from Board of Commissioners. (3) Preparation of Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors on February 27, 2019 (4) Other Strategic Matters.
21	25 Februari 2019 24/DK/PI.II/II-2019 February 25, 2019 24/ DK/PI.II/II-2019	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 30 Januari 2019. (2) Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (3) Laporan masing-masing Direktur Bidang. (4) Hal-hal strategis lainnya. Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors on Wednesday, February 27, 2019 at 16.00 WIB discussion (1) Follow-up on Coordination Meeting results on January 30, 2019. (2) Audit Results of Financial Statements for 2018 Fiscal Year of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (3) Report of each Director. (4) Other strategic matters.
Maret / March		
22	5 Maret 2019 27/DK/PI.II/III-2019 March 5, 2019 27/DK/ PI.II/III-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris. (2) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners, on Wednesday, March 6, 2019 at 16.00 WIB discussion (1) Matters that require approval/recommendation from Board of Commissioners. (2) Other strategic matters.
23	12 Maret 2019 29/DK/PI.II/III-2019 March 12, 2019 29/ DK/PI.II/III-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris. (2) Pembahasan Evaluasi penerapan manajemen risiko PT Pelindo II (Persero) tahun 2018 (3) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners, on Wednesday, March 13, 2019 at 16.00 WIB discussion (1) Matters that require approval/recommendation of Board of Commissioners. (2) Discussion on risk management implementation of PT Pelindo II (Persero) in 2018 (3) Other Strategic Matters.
24	13 Maret 2019 30/DK/PI.II/III-2019 March 13, 2019 30/ DK/PI.II/III-2019	Berakhirnya Masa Jabatan Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia II (persero) The end of term of office for Commercial Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)



No.	Tanggal dan Nomor Agenda Date and Agenda Numbers	Perihal Subjects
25	13 Maret 2019 31/DK/PI.II/III-2019 March 13, 2019 31/ DK/PI.II/III-2019	Persetujuan atas rencana Kerja Sama Pemanfaatan Lapangan dan Gudang 222X (Ex MKT) Cabang Pelabuhan Tanjung Priok Approval of the 222X (Ex MKT) Collaboration Plan for Tanjung Priok Port Branch
26	13 Maret 2019 32/DK/PI.II/III-2019 March 13, 2019 32/ DK/PI.II/III-2019	Penjelasan atas rencana kerjasama optimalisasi penanganan <i>cargo multipurpose</i> di Cabang Pelabuhan Jambi dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Explanation of the planned cooperation in optimizing handling of multipurpose cargo at Jambi Port Branch with PT Pelabuhan Tanjung Priok
27	18 Maret 2019 33/DK/PI.II/III-2019 March 18, 2019 33/ DK/PI.II/III-2019	Rapat SPI dengan Dewan Komisaris dan Komite, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 pukul 13.00 WIB pembahasan (1) Rapat Koordinasi Triwulan IV Tahun 2018 Komite Audit dengan SPI PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris. (3) Hal-hal strategis lainnya. SPI Meeting with Board of Commissioners and Committees, on Wednesday, 20 March 2019 at 13.00 WIB discussion (1) 4 th quarter of 2019 Audit Committee Coordination Meeting with SPI PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Matters that require approval/recommendation from Board of Commissioners. (3) Other strategic matters.
28	19 Maret 2019 34/DK/PI.II/III-2019 March 19, 2019 34/ DK/PI.II/III-2019	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 27 Februari 2019. (2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan Februari 2019. (3) Laporan masing-masing Direktur Bidang. (4) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors on Wednesday, March 20, 2019 at 16.00 WIB discussion (1) Follow-up on Coordination Meeting results on 27 February 2019. (2) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) up to February 2019. (3) Report of each Director. (4) Other strategic matters.
29	26 Maret 2019 35/DK/PI.II/III-2019 March 26, 2019 30/ DK/PI.II/III-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris. (2) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners, on Wednesday, March 27, 2019 at 16.00 WIB discussion (1) Matters that require approval/recommendation from Board of Commissioners. (2) Other strategic matters.
April / April		
30	1 April 2019 36/DK/PI.II/IV-2019 April 1, 2019 36/DK/ PI.II/III-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) Usulan Pemberian LTI. (2) Pembahasan Usulan Penyertaan Modal pada PT KBS. (3) Pembahasan konsep SK Direksi tentang Penugasan kepada Anak Perusahaan dalam pelaksanaan Proyek strategis. (4) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners, on Tuesday, April 2, 2019 at 16.00 WIB discussion (1) Proposal for Provision of LTI. (2) Discussion of Proposed Equity Participation at PT KBS. (3) Discussion of the draft of Board of Directors Decree regarding Assignments to Subsidiaries in implementation of Strategic Projects. (4) Other strategic matters.
31	2 April 2019 37/DK/PI.II/IV-2019 April 2, 2019 37/DK/ PI.II/IV-2019	Penghargaan Jangka Panjang Long Term Incentive (LTI)
32	2 April 2019 38/DK/PI.II/IV-2019 April 2, 2019 38/DK/ PI.II/IV-2019	Tanggapan atas Draft SK Direksi tentang Pedoman Penugasan kepada Anak Perusahaan dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Guidelines for Assignment to Subsidiaries in the Implementation of Strategic Projects
33	2 April 2019 39/DK/PI.II/IV-2019 April 2, 2019 39/DK/ PI.II/IV-2019	Rencana Jual Beli 49% Saham Milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk pada PT Krakatau Bandar Samudera Plans to Buy and Sell 49% shares of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk to PT Krakatau Bandar Samudera

No.	Tanggal dan Nomor Agenda Date and Agenda Numbers	Perihal Subjects
34	9 April 2019 40/DK/Pl.II/IV-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris. (2) Hal-hal strategis lainnya.
	April 9, 2019 40/DK/Pl.II/IV-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners, on Wednesday, April 10, 2019 at 16.00 WIB discussion (1) Matters that require approval/recommendation from Board of Commissioners. (2) Other strategic matters.
35	10 April 2019 41/DK/Pl.II/IV-2019	Tanggapan atas Usulan Pejabat Komisaris Anak Perusahaan
	April 10, 2019 41/DK/Pl.II/IV-2019	Responses to the Proposed Commissioner of Subsidiaries
36	12 April 2019 42/DK/Pl.II/IV-2019	Laporan Dewan Komisaris Tahun 2018 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
	April 12, 2019 42/DK/Pl.II/IV-2019	2018 Report of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
37	23 April 2019 43/DK/Pl.II/IV-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 pukul 14.00 WIB pembahasan (1) Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 24 April 2019, (2) Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris. (3) Hal-hal strategis lainnya.
	April 23, 2019 43/DK/Pl.II/IV-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners, on Wednesday, April 24, 2019 at 14.00 WIB discussion (1) Preparation of Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors on April 24, 2019, (2) Matters that require approval/recommendation from Board of Commissioners. (3) Other strategic matters.
38	23 April 2019 44/DK/Pl.II/IV-2019	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 Maret 2019. (2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan Maret 2019. (3) Laporan masing-masing Direktur Bidang. (4) Hal-hal strategis lainnya.
	April 23, 2019 44/DK/Pl.II/IV-2019	Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors on Wednesday, April 24, 2019 at 16.00 WIB discussion (1) Follow-up on The Coordination Meeting results on March 20, 2019. (2) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) up to March 2019. (3) Report of each Director. (4) Other strategic matters.
39	24 April 2019 47/DK/Pl.II/IV-2019	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan <i>Audited</i> PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun Buku 2018
	April 24, 2019 47/DK/Pl.II/IV-2019	Board of Commissioners' response to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2018 Audited Report
Mei / May		
40	7 Mei 2019 48/DK/Pl.II/V-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 pukul 13.00 WIB pembahasan (1) Konsep Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2019. (2) Konsep Laporan Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2019. (3) Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris. (4) Hal-hal strategis lainnya.
	May 7, 2019 48/DK/Pl.II/V-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners, on Wednesday, May 8, 2019 at 1:00 pm discussion (1) The Concept of Board of Commissioners' Responses to Management Report for the first Quarter of 2019. (2) The concept of Board of Commissioners' Report for the first Quarter of 2019. (3) Matters which that need approval/recommendation from Board of Commissioners. (4) Other strategic matters.
41	8 Mei 2019 49/DK/Pl.II/V-2019	Laporan Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2019 PT pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun Buku 2018
	May 8, 2019 49/DK/Pl.II/V-2019	The first quarter of 2019 Board of Commissioners' Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Fiscal Year 2018
42	8 Mei 2019 50/DK/Pl.II/V-2019	Persetujuan atas Usulan Penghapusbukuan Aktiva Tetap di Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa
	May 8, 2019 50/DK/Pl.II/V-2019	Approval of the Proposal for Permanent Write-off at Sunda Kelapa Port Branch



No.	Tanggal dan Nomor Agenda <i>Date and Agenda Numbers</i>	Perihal <i>Subjects</i>
43	8 Mei 2019 51/DK/PI.II/V-2019 May 8, 2019 51/DK/PI.II/V-2019	Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2019 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Responses to the 1 st quarter Management Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
44	14 Mei 2019 52/DK/PI.II/V-2019 May 14, 2019 52/DK/PI.II/V-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 pukul 13.00 WIB pembahasan (1) Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris. (2) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners, on Wednesday, May 15, 2019 at 13.00 WIB discussion (1) Matters that require approval/recommendation from Board of Commissioners. (2) Other strategic matters.
45	15 Mei 2019 53/DK/PI.II/V-2019 May 15, 2019 53/DK/PI.II/V-2019	Persetujuan Addendum Perjanjian Optimalisasi Terminal Petikemas di Pelabuhan Jambi dengan PT IPC Terminal Petikemas Approval of the Addendum Agreement on the Optimization of Container Terminal at Jambi Port with PT IPC Terminal Petikemas
46	21 Mei 2019 54/DK/PI.II/V-2019 May 21, 2019 54/DK/PI.II/V-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 pukul 13.00 WIB pembahasan (1) Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris. (2) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners, on Wednesday, May 22, 2019 at 13.00 WIB discussion (1) Matters that require approval/recommendation from Board of Commissioners. (2) Other strategic matters.
47	22 Mei 2019 56/DK/PI.II/V-2019 May 22, 2019 56/DK/PI.II/V-2019	Tanggapan atas Usulan Pejabat Komisaris Anak Perusahaan Responses to Commissioner of Subsidiaries Proposal
48	27 Mei 2019 58/DK/PI.II/V-2019 May 27, 2019 58/DK/PI.II/V-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 pukul 13.00 WIB pembahasan (1) Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 28 Mei 2019, (2) Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris. (3) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners, on Tuesday, May 28, 2019 at 13.00 WIB discussion (1) Preparation of Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors on May 28, 2019, (2) Matters that require approval/recommendation from Board of Commissioners. (3) Other strategic matters.
49	27 Mei 2019 59/DK/PI.II/V-2019 May 27, 2019 59/DK/PI.II/V-2019	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 pukul 14.00 WIB pembahasan (1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 24 April 2019. (2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan April 2019. (3) Laporan masing-masing Direktur Bidang. (4) Hal-hal strategis lainnya. Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors on Tuesday, May 28, 2019 at 14.00 WIB discussion (1) Follow-up on The Coordination Meeting results on April 24, 2019. (2) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) up to April 2019. (3) Report of each Director. (4) Other strategic matters.
50	28 Mei 2019 60/DK/PI.II/V-2019 May 28, 2019 60/DK/PI.II/V-2019	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Appointment of Public Accounting Firm
51	28 Mei 2019 61/DK/PI.II/V-2019 May 28, 2019 61/DK/PI.II/V-2019	Tanggapan atas Usulan Pejabat Komisaris Anak Perusahaan Responses to the Proposed Commissioner of Subsidiaries

No.	Tanggal dan Nomor Agenda Date and Agenda Numbers	Perihal Subjects
Juni / June		
52	12 Juni 2019 62/DK/Pl.II/VI-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris mengundang Direktur Komersial, Direktur SDM & Direktur Teknik pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 pukul 13.00 WIB pembahasan (1) Draft SK Direksi tentang Penugasan kepada Anak Perusahaan dalam Pelaksanaan Proyek Strategis di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Hal-hal strategis lainnya.
	June 12, 2019 62/DK/Pl.II/VI-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners invited Commercial Director, HC Director & Technical Director on Thursday, June 13, 2019 at 13.00 WIB discussion (1) Draft Decree of Board of Directors on Assignment to Subsidiaries in Strategic Projects Implementation in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Other strategic matters.
53	13 Juni 2019 63/DK/Pl.II/VI-2019	Surat Kuasa Khusus dari Komisaris Utama ke Pak Djadmiko Untuk: a. Mengikuti dan bertindak mewakili Komisaris Utama sebagai pimpinan Rapat-Rapat Internal Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Pesero); b. Mengikuti dan bertindak mewakili Komisaris Utama sebagai pimpinan Rapat-Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Pesero); c. Mengikuti dan mewakili Komisaris Utama pada rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris; d. Menandatangani surat dan dokumen yang diperlukan atas nama Komisaris Utama.
	June 13, 2019 63/DK/Pl.II/VI-2019	Special Power of Attorney from President Commissioner to Djadmiko For: a. Following and acting on behalf of President Commissioner as chairman of Internal Meeting of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Pesero); b. Following and acting on behalf of President Commissioner as chairman of Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Pesero); c. Attending and representing President Commissioner at meetings and other activities related to duties and functions of Board of Commissioners; d. Sign the letters and documents required on behalf of President Commissioner.
54	18 Juni 2019 64/DK/Pl.II/VI-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 pukul 14.00 WIB pembahasan (1) Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Juni 2019, (2) Hal-hal yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris. (3) Hal-hal strategis lainnya.
	June 18, 2019 64/DK/Pl.II/VI-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners, on Thursday, June 20, 2019 at 14.00 WIB discussion (1) Preparation of Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors on June 20, 2019, (2) Matters that require the approval/recommendation from Board of Commissioners. (3) Other strategic matters.
55	18 Juni 2019 65/DK/Pl.II/VI-2019	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 28 Mei 2019. (2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan Mei 2019. (3) Laporan masing-masing Direktur Bidang. (4) Hal-hal strategis lainnya.
	June 18, 2019 64/DK/Pl.II/VI-2019	Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors on Thursday, June 20, 2019 at 16.00 WIB discussion (1) Follow-up on the results of Coordination Meeting on May 28, 2019. (2) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until May 2019. (3) Report of each Director. (4) Other strategic matters.
56	20 Juni 2019 67/DK/Pl.II/VI-2019	Tanggapan atas Draft SK Direksi tentang Pedoman Penugasan kepada Anak Perusahaan dalam Pelaksanaan Proyek strategis.
	June 20, 2019 67/DK/Pl.II/VI-2019	Responses to the Draft Decree of Board of Directors regarding Guidelines for Assignment to Subsidiaries in the Implementation of Strategic Projects.



No.	Tanggal dan Nomor Agenda Date and Agenda Numbers	Perihal Subjects
Juli / July		
57	2 Juli 2019 69/DK/PI.II/VII-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) Rencana Addendum IV Perjanjian Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok. (2) Hal-hal strategis lainnya.
	July 2, 2019 69/DK/PI.II/VII-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners, on Wednesday, July 3, 2019 at 16.00 WIB discussion (1) Plans of Addendum IV of the North Kalibaru Container Terminal Development Agreement Phase I Tanjung Priok Port. (2) Other strategic matters
58	4 Juli 2019 71/DK/PI.II/VII-2019	Persetujuan/Rekomendasi atas Usulan Penghapusbukuan Aktiva Tetap di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan Panjang
	July 4, 2019 71/DK/PI.II/VII-2019	Approval/Recommendation for Proposed Write Off of Fixed Assets in Tanjung Priok and Panjang Port Branches
59	9 Juli 2019 72/DK/PI.II/VII-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) Tindak lanjut Rencana Addendum IV Perjanjian Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok. (2) Hal-hal Strategis lainnya.
	July 9, 2019 72/DK/PI.II/VII-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners, on Wednesday, July 10, 2019 at 16:00 WIB discussion (1) Follow-up on the Plan of Addendum IV of the North Kalibaru Container Terminal Development Agreement Phase I Tanjung Priok Port. (2) Other strategic matters.
60	10 Juli 2019 73/DK/PI.II/VII-2019	Nasihat atas Rencana Addendum IV Kontrak Perjanjian Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru
	July 10, 2019 73/DK/PI.II/VII-2019	Advice on Plan Addendum IV of the Contract for the Construction of Kalibaru Container Terminal
61	10 Juli 2019 74/DK/PI.II/VII-2019	Tanggapan atas Rencana Kerja Sama Pemanfaatan Lahan dengan PT Styrindo Mono Indonesia
	July 10, 2019 74/DK/PI.II/VII-2019	Responses to the Planned Use of Land with PT Styrindo Mono Indonesia
62	16 Juli 2019 75/DK/PI.II/VII-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) Tindak lanjut temuan SPI yang tidak dapat ditindaklanjuti. (2) Hal-hal strategis lainnya.
	July 16, 2019 75/DK/PI.II/VII-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners, on Wednesday, July 17, 2019 at 16:00 WIB discussion (1) Follow-up on SPI findings that cannot be followed up. (2) Other strategic matters.
63	17 Juli 2019 76/DK/PI.II/VII-2019	Temuan Pemeriksaan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD)
	July 17, 2019 76/DK/PI.II/VII-2019	Audit Findings that Cannot Be Followed (TPTD)
64	23 Juli 2019 78/DK/PI.II/VII-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 pukul 14.00 WIB pembahasan (1) Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 24 Juli 2019, (2) Hal-hal strategis lainnya.
	July 23, 2019 78/DK/PI.II/VII-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners, on Wednesday, 24 July 2019 at 14.00 WIB discussion (1) Preparation of Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors on 24 July 2019, (2) Other Strategic Matters.
65	23 Juli 2019 79/DK/PI.II/VII-2019	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 Juni 2019. (2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan Juni 2019. (3) Laporan masing-masing Direktur Bidang. (4) Hal-hal strategis lainnya.
	July 23, 2019 79/DK/PI.II/VII-2019	Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors on Wednesday, July 24, 2019 at 16.00 WIB discussion (1) Follow-up on the results of Coordination Meeting on June 20, 2019. (2) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until June 2019. (3) Report of each Division Director. (4) Other strategic matters.

No.	Tanggal dan Nomor Agenda Date and Agenda Numbers	Perihal Subjects
66	25 Juli 2019 80/DK/Pl.II/VII-2019	Rapat Dewan Komisaris pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 pukul 16.00 WIB pembahasan (1) <i>Roadmap</i> Pengembangan Kinerja dan Restrukturisasi Anak Perusahaan (2) Hal-hal strategis lainnya.
	July 25, 2019 80/DK/Pl.II/VII-2019	Board of Commissioners Meeting on Wednesday, 31 July 2019 at 16.00 WIB discussion (1) Roadmap for Performance Development and Restructuring of Subsidiaries (2) Other strategic Matters.
Agustus / August		
67	1 Agustus 2019 82/DK/Pl.II/VII-2019 August 1, 2019 82/DK/Pl.II/VIII-2019	Laporan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Triwulan II Tahun 2019 Report of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for the second quarter of 2019
68	6 Agustus 2019 81/DK/Pl.II/VIII-2019 August 6, 2019 81/DK/Pl.II/VIII-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 pukul 13.00 WIB. Pembahasan (1) Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Semester I Tahun 2019, (2) Laporan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Triwulan II Tahun 2019. (3) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners, on Wednesday, August 7, 2019 at 13.00 WIB. Discussion (1) Board of Commissioners' Response to the 2019 First Semester Management Report, (2) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Commissioners' Report for Second Quarter 2019. (3) Other strategic Issues.
69	7 Agustus 2019 83/DK/Pl.II/VII-2019 August 7, 2019 83/DK/Pl.II/VIII-2019	Tanggapan atas Laporan Manajemen Semester I Tahun 2019 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Responses to the 2019 First Semester Management Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
70	7 Agustus 2019 84/DK/Pl.II/VII-2019 August 7, 2019 84/DK/Pl.II/VIII-2019	Tanggapan atas usulan perpanjangan Kerjasama Pendayagunaan Aset tetap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Pertamina (Persero) Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Pertamina (Persero) di Jalan Jamepa dan Jalan Digul Responses to the proposed extension of the Fixed Asset Utilization Cooperation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tanjung Priok Port Branch with PT Pertamina (Persero) Tanjung Priok Port Branch with PT Pertamina (Persero) on Jamepa Road and Digul Road
71	13 Agustus 2019 85/DK/Pl.II/VIII-2019 August 13, 2019 85/DK/Pl.II/VIII-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB Pembahasan (1) RKA Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020. (2) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners, on Wednesday, August 14, 2019 at 16.00 WIB Discussion (1) RKA Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2020. (2) Other strategic matters..
72	14 Agustus 2019 87/DK/Pl.II/VIII-2019 August 14, 2019 87/DK/Pl.II/VIII-2019	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB pembahasan (1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 24 Juli 2019. (2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan Juli 2019. (3) Laporan masing-masing Direktur Bidang. (4) Hal-hal strategis lainnya. Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors on Tuesday, August 20, 2019 at 10:00 am discussion (1) Follow-up on the results of Coordination Meeting on July 24, 2019. (2) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until July 2019. (3) Report of each Director. (4) Other strategic matters.
73	14 Agustus 2019 88/DK/Pl.II/VIII-2019 August 14, 2019 88/DK/Pl.II/VIII-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris mengundang Direktur SDM pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 pukul 13.00 WIB Pembahasan (1) Penyampaian Perkembangan Permasalahan tentang Hukum di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) oleh Direktur SDM. (2) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners invited Human Capital Director on Tuesday, August 20, 2019 at 13.00 WIB Discussion (1) Submission of Development of Legal Issues in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) by HC Director. (2) Other strategic matters.



No.	Tanggal dan Nomor Agenda <i>Date and Agenda Numbers</i>	Perihal <i>Subjects</i>
74	26 Agustus 2019 91/DK/PI.II/VIII-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB Pembahasan (1) Usulan Pejabat Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Hal-hal strategis lainnya.
	August 26, 2019 91/ DK/PI.II/VIII-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners on Wednesday, August 28, 2019 at 16.00 WIB Discussion (1) Proposed Directors and Commissioners of Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Other strategic matters.
75	28 Agustus 2019 92/DK/PI.II/VIII-2019	Tanggapan atas Usulan Pejabat Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan.
	August 28, 2019 92/ DK/PI.II/VIII-2019	Responses to Directors and Commissioners of Subsidiaries Proposal.
76	30 Agustus 2019 93/DK/PI.II/VIII-2019	Surat Kuasa Khusus "Pembahasan Relas Panggilan Sidang kepada Tergugat"
	August 30, 2019 93/ DK/PI.II/VIII-2019	Special Power of Attorney "Discussion of the Reluctance of Court Calls to Defendants"
September / September		
77	03 September 2019 95/DK/PI.II/IX-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris mengundang Direktur SDM pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 pukul 16.00 WIB Pembahasan (1) Penyampaian Perkembangan Permasalahan tentang Hukum di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) oleh Direktur SDM. (2) Hal-hal strategis lainnya.
	September 3, 2019 95/ DK/PI.II/IX-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners invited HC Director on Wednesday, September 4, 2019 at 16.00 WIB Discussion (1) Submission of Development of Legal Issues in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) by HC Director. (2) Other strategic matters.
78	10 September 2019 97/DK/PI.II/IX-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 pukul 16.00 WIB Pembahasan (1) Laporan Kunjungan ke Cabang Pelabuhan Banten dan Panjang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Hal-hal strategis lainnya.
	September 10, 2019 97/DK/PI.II/IX-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners on Wednesday, September 11, 2019 at 4:00 pm Discussion (1) Visit Report to Banten and Panjang Port Branch of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Other strategic matters.
79	17 September 2019 98/DK/PI.II/IX-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 pukul 14.00 WIB Pembahasan (1) Tanggapan Dewan Komisaris atas surat Kementerian BUMN perihal Laporan Manajemen Semester I Tahun 2019 PT Pelindo II (Persero). (2) Tanggapan atas usulan Pejabat Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PT Pelindo II (Persero). (3) Hal-hal strategis lainnya.
	September 17, 2019 98/DK/PI.II/IX-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners on Wednesday, September 18, 2019 at 2:00 pm Discussion (1) Board of Commissioners' response to the Ministry of SOE's letter regarding First Semester of 2019 Management Report of PT Pelindo II (Persero). (2) Responses to the proposal of Commissioners and Directors of Subsidiaries of PT Pelindo II (Persero). (3) Other strategic matters.
80	18 September 2019 99/DK/PI.II/IX-2019	Tanggapan atas Usulan Pejabat Komisaris dan Direksi PT IKT, PT JICT, PT PTP dan PT PII
	September 18, 2019 99/DK/PI.II/IX-2019	Responses to the Proposed Commissioners and Directors of PT IKT, PT JICT, PT PTP and PT PII
81	19 September 2019 101/DK/PI.II/IX-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 pukul 14.00 WIB Pembahasan (1) Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 25 September 2019. (2) Hal-hal strategis lainnya.
	September 19, 2019 101/DK/PI.II/IX-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners on Wednesday, September 25, 2019 at 2:00 pm Discussion (1) Preparation of Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors on September 25, 2019. (2) Other Strategic Matters.

No.	Tanggal dan Nomor Agenda Date and Agenda Numbers	Perihal Subjects
82	19 September 2019 102/DK/PI.II/IX-2019	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 pukul 15.00 WIB pembahasan (1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 Agustus 2019. (2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2019. (3) Laporan masing-masing Direktur Bidang. (4) Hal-hal strategis lainnya.
	September 19, 2019 102/DK/PI.II/IX-2019	Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors on Wednesday, September 25, 2019 at 3:00 pm discussion (1) Follow-up on the results of Coordination Meeting on August 20, 2019. (2) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until August 2019. (3) Report of each Director. (4) Other strategic matters.
83	25 September 2019 103/DK/PI.II/IX-2019	Penilaian Kinerja Sekretaris dan Staf Dewan Komisaris tahun 2018.
	September 25, 2019 103/DK/PI.II/IX-2019	Performance Assessment of Board of Commissioners' Secretaries and Staffs in 2018.
Oktober / October		
84	1 Oktober 2019 104/DK/PI.II/X-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB Pembahasan (1) Laporan Kunjungan ke Cabang Pelabuhan Cirebon. (2) Penetapan KPI Individual Dewan Komisaris Tahun 2019 (3) Hal-hal strategis lainnya.
	October 1, 2019 104/DK/PI.II/X-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners on Wednesday, October 2, 2019 at 2:00 pm Discussion (1) Visit Report of Cirebon Port Branch. (2) Determination of Board of Commissioners' Individual KPI in 2019 (3) Other strategic matters.
85	8 Oktober 2019 105/DK/PI.II/X-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB Pembahasan (1) RJPP Tahun 2020 – 2024 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020. (3) Rencana Kunjungan ke Cabang-Cabang Pelabuhan. (4) Hal-hal strategis lainnya.
	October 8, 2019 105/DK/PI.II/X-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners on Wednesday, October 9, 2019 at 2:00 pm Discussion (1) 2020 - 2024 RJPP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) 2020 RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (3) Planned Visit to Port Branches. (4) Other strategic matters.
86	15 Oktober 2019 108/DK/PI.II/X-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB Pembahasan <i>Draft</i> (1) RJPP Tahun 2020 – 2024 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Laporan Kunjungan ke Cabang Pelabuhan Pangkal Balam. (3) Hal-hal strategis lainnya.
	October 15, 2019 108/DK/PI.II/X-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners on Wednesday, October 16, 2019 at 2:00 pm Discussion on Draft (1) 2020 - 2024 RJPP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Visit Report of Pangkal Balam Port Branch. (3) Other strategic matters.
87	16 Oktober 2019 109/DK/PI.II/X-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB Pembahasan (1) Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 22 Oktober 2019. (2) Hal-hal strategis lainnya.
	October 16, 2019 109/DK/PI.II/X-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners on Tuesday, October 22, 2019 at 1:00 pm Discussion (1) Preparation of Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors on October 22, 2019, (2) Other strategic matters.
88	16 Oktober 2019 110/DK/PI.II/X-2019	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB pembahasan (1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 25 September 2019. (2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2019. (3) Laporan masing-masing Direktur Bidang. (4) Hal-hal strategis lainnya.
	October 16, 2019 110/DK/PI.II/X-2019	Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors on Tuesday, October 22, 2019 at 3:00 pm discussion (1) Follow-up on the results of Coordination Meeting on September 25, 2019. (2) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until August 2019. (3) Report of each Director. (4) Other strategic matters.
89	23 Oktober 2019 111/DK/PI.II/X-2019	Persetujuan Kerja Sama Optimalisasi Penanganan <i>Multipurpose</i> Antara Cabang Pelabuhan Bengkulu dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
	October 23, 2019 111/DK/PI.II/X-2019	Agreement on the Optimization of Multipurpose Handling Cooperation Between Bengkulu Port Branch and PT Pelabuhan Tanjung Priok.



No.	Tanggal dan Nomor Agenda <i>Date and Agenda Numbers</i>	Perihal <i>Subjects</i>
90	23 Oktober 2019 112/DK/PI.II/X-2019 October 23, 2019 112/ DK/PI.II/X-2019	Tanggapan atas Usulan Pejabat Komisaris dan Direksi PT IPC TPK, PT Rukindo, PT PPI, dan PT ILCS. Response to the Proposed from Commissioners and Directors of PT IPC TPK, PT Rukindo, PT PPI, and PT ILCS.
91	29 Oktober 2019 113/DK/PI.II/X-2019 October 29, 2019 113/ DK/PI.II/X-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB Pembahasan (1) Pendayagunaan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) oleh PT MMI. (2) Rencana Kerjasama Pemanfaatan Lahan dengan PT Styrimdo Mono Indonesia. (3) Kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Pertamina di Jalan Jampea dan Jalan Digul. (4) RJPP 2020-2024 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (5) Usulan RKAP Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (6) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners on Wednesday, October 30, 2019 at 2:00 pm Discussion (1) Utilization of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 's Fixed Assets by PT MMI. (2) Plans for Collaboration on Land Utilization with PT Styrimdo Mono Indonesia. (3) Cooperation in Utilization of Fixed Assets of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tanjung Priok Port Branch with PT Pertamina on Jampea Road and Digul Road . (4) 2020-2024 RJPP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (5) Proposed 2020 RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (6) Other strategic matters.
92	29 Oktober 2019 114/DK/PI.II/X-2019 October 29, 2019 114/ DK/PI.II/X-2019	Penyampaian Rencana kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020. Submission of 2020 Work Plan and Budget of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
93	30 Oktober 2019 115/DK/PI.II/X-2019 October 30, 2019 115/ DK/PI.II/X-2019	Persetujuan Kerjasama Pendayagunaan Aset tetap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Pertamina (Persero) di Jl. Jampea dan Jl. Digul, Jakarta Utara. Agreement on the Utilization of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tanjung Priok Port Branch and PT Pertamina (Persero) Fixed Asset Cooperation Agreement on Jampea Road and Digul Road, North Jakarta.
94	30 Oktober 2019 116/DK/PI.II/X-2019 October 30, 2019 116/ DK/PI.II/X-2019	Tanggapan atas Kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Jl. Yos Sudarso No.9 Jakarta Utara oleh PT Menara Maritim Indonesia. Responses to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Fixed Asset Utilization Cooperation on Jl. Yos Sudarso no.9 North Jakarta by PT Menara Maritim Indonesia.
95	30 Oktober 2019 117/DK/PI.II/X-2019 Oktober 30, 2019 117/DK/PI.II/X-2019	Tanggapan Tertulis Rencana Kerja Sama Pemanfaatan Lahan dengan PT Styrimdo Mono Indonesia. Written Response on the Plan of Land Use Collaboration with PT Styrimdo Mono Indonesia.
96	30 Oktober 2019 118/DK/PI.II/X-2019 October 30, 2019 118/ DK/PI.II/X-2019	Tanggapan Tertulis atas Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2020-2024 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Written Response to the Company's Long Term Plan for 2020-2024 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
97	30 Oktober 2019 119/DK/PI.II/X-2019 October 30, 2019 119/ DK/PI.II/X-2019	Tanggapan atas Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2020. Responses to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2020 Company Work Plan and Budget (RKAP).
November / November		
98	5 November 2019 123/DK/PI.II/XI-2019 November 5, 2019 123/DK/PI.II/XI-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 pukul 14.00 WIB Pembahasan (1) Laporan Hasil Kunjungan ke Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa. (2) Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2019 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (3) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners on Wednesday, November 6, 2019 at 2:00 pm Discussion (1) Visit Report Results of Sunda Kelapa Port Branch. (2) 3rd quarter of 2019 Management Report PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (3) Other strategic matters.

No.	Tanggal dan Nomor Agenda Date and Agenda Numbers	Perihal Subjects
99	6 November 2019 124/DK/PI.II/XI-2019 November 6, 2019 124/DK/PI.II/XI-2019	Laporan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Triwulan III Tahun 2019. Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Third Quarter of 2019 Report.
100	6 November 2019 125/DK/PI.II/XI-2019 November 6, 2019 125/DK/PI.II/XI-2019	Tanggapan atas Penyampaian Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2019 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Response to Submitting Management Reports for Third Quarter of 2019 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
101	12 November 2019 126/DK/PI.II/XI-2019 November 12, 2019 126/DK/PI.II/XI-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 pukul 16.00 WIB Pembahasan (1) Perubahan RKAP Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners on Wednesday, November 13, 2019 at 4:00 pm Discussion (1) Amendments to 2020 RKAP PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Other strategic matters.
102	15 November 2019 130/DK/PI.II/XI-2019 November 15, 2019 130/DK/PI.II/XI-2019	Penilaian Pelaksanaan GCG PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019. 2019 GCG Assessment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
103	19 November 2019 131/DK/PI.II/XI-2019 November 19, 2019 131/DK/PI.II/XI-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 pukul 14.00 WIB Pembahasan (1) Laporan Hasil Kunjungan ke Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners on Wednesday, November 20, 2019 at 2:00 pm Discussion (1) Visit Report Results to Port Branches of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Other strategic matters.
104	19 November 2019 132/DK/PI.II/XI-2019 November 19, 2019 132/DK/PI.II/XI-2019	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 pukul 15.00 WIB pembahasan (1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 22 Oktober 2019. (2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2019. (3) Laporan masing-masing Direktur Bidang. (4) Hal-hal strategis lainnya. Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors on Wednesday, November 20, 2019 at 3:00 pm discussion (1) Follow-up on the results of Coordination Meeting on October 22, 2019. (2) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until August 2019. (3) Report of each Director. (4) Other strategic matters.
105	19 November 2019 133/DK/PI.II/XI-2019 November 19, 2019 133/DK/PI.II/XI-2019	Penetapan KPI Individual Dewan Komisaris. The individual KPI Board of Commissioners.
106	26 November 2019 135/DK/PI.II/XI-2019 November 26, 2019 135/DK/PI.II/XI-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 pukul 14.00 WIB Pembahasan (1) Laporan Hasil Kunjungan ke Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Pembahasan persiapan Rakernas tanggal 28-29 November 2019. (3) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners on Wednesday, November 27, 2019 at 2:00 pm Discussion (1) Visit Report Results to Port Branch of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Discussion on preparation of National Working Meeting on November 28-29, 2019. (3) Other strategic matters.
Desember / December		
107	3 Desember 2019 138/DK/PI.II/XII-2019 December 3, 2019 138/DK/PI.II/XII-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 pukul 14.00 WIB Pembahasan (1) Laporan Hasil Kunjungan ke Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Pembahasan Pemaparan hasil evaluasi atas biaya KSMU. (3) Hal-hal strategis lainnya. Internal Meeting of Board of Commissioners on Wednesday, December 4, 2019 at 2:00 pm Discussion (1) Visit Report Results to Port Branch of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Discussion on presentation of evaluation results on KSMU costs. (3) Other strategic matters.



No.	Tanggal dan Nomor Agenda <i>Date and Agenda Numbers</i>	Perihal <i>Subjects</i>
108	4 Desember 2019 139/DK/Pl.II/XII-2019 December 4, 2019 139/DK/Pl.II/XII-2019	<p>Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).</p> <p>Approval of Change in Organizational Structure PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).</p>
109	4 Desember 2019 140/DK/Pl.II/XII-2019 December 4, 2019 140/DK/Pl.II/XII-2019	<p>Hasil Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).</p> <p>Results of Board of Commissioners' Visit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Branches.</p>
110	10 Desember 2019 141/DK/Pl.II/XII-2019 December 10, 2019 141/DK/Pl.II/XII-2019	<p>Rapat Internal Dewan Komisaris pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 pukul 14.00 WIB Pembahasan (1) Pemaparan hasil evaluasi atas biaya KSMU. (2) Penghapusan Aset Tetap di Cabang - Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (3) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>Internal Meeting of Board of Commissioners on Wednesday, December 4, 2019 at 2:00 pm Discussion (1) Presentation of evaluation results on KSMU costs. (2) Elimination of Fixed Assets in Port Branch Offices of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (3) Other strategic matters.</p>
111	11 Desember 2019 142/DK/Pl.II/XII-2019 December 11, 2019 142/DK/Pl.II/XII-2019	<p>Persetujuan/Rekomendasi atas Usulan Penghapusbukuan Aktiva Tetap di Cabang Pelabuhan Bengkulu, Palembang, Sunda Kelapa, dan Pontianak.</p> <p>Approval/Recommendation on Provision of Write Off of Fixed Assets in Ports Branches of Bengkulu, Palembang, Sunda Kelapa and Pontianak.</p>
112	12 Desember 2019 143/DK/Pl.II/XII-2019 December 12, 2019 143/DK/Pl.II/XII-2019	<p>Rapat Internal Dewan Komisaris pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 pukul 14.00 WIB Pembahasan (1) Draf SK Direksi Pedoman Kerjasama Khusus dengan Anak Perusahaan atau Perusahaan Terafiliasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi tanggal 18 Desember 2019. (3) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>Internal Meeting of Board of Commissioners on Wednesday, December 4, 2019 at 2:00 pm Discussion (1) Draft of the Decree of Board of Directors Guidelines for Special Cooperation with Subsidiaries or Affiliated Companies within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Preparation for Coordination Meeting between Board of Commissioners and Board of Directors on December 18, 2019. (3) Other Strategic Matters</p>
113	12 Desember 2019 144/DK/Pl.II/XII-2019 December 12, 2019 144/DK/Pl.II/XII-2019	<p>Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 pukul 15.00 WIB pembahasan (1) Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 November 2019. (2) Laporan Konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan bulan November 2019. (3) Laporan masing-masing Direktur Bidang. (4) Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors on Wednesday, November 20, 2019 at 3:00 pm discussion (1) Follow-up on the results of Coordination Meeting on November 20, 2019. (2) Consolidated Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) until November 2019. (3) Report of each Director. (4) Other strategic matters.</p>
114	12 Desember 2019 145/DK/Pl.II/XII-2019 December 12, 2019 145/DK/Pl.II/XII-2019	<p>Surat Kuasa Khusus dari Komisaris Utama ke Pak Djadmiko Untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikuti dan bertindak mewakili Komisaris Utama sebagai pimpinan Rapat-Rapat Internal Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); Mengikuti dan bertindak mewakili Komisaris Utama sebagai pimpinan Rapat-Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); Mengikuti dan mewakili Komisaris Utama pada rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris; Menandatangani surat dan dokumen yang diperlukan atas nama Komisaris Utama. <p>Special Power of Attorney from President Commissioner to Djadmiko For:</p> <ol style="list-style-type: none"> Follow and act on behalf of President Commissioner as chairman of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s Board of Commissioners Internal Meetings; Follow and act on behalf of President Commissioner as chairman of Coordination Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); Attending and representing President Commissioner at meetings and other activities related to the duties and functions of Board of Commissioners; Sign the letters and documents required on behalf of President Commissioner.

No.	Tanggal dan Nomor Agenda Date and Agenda Numbers	Perihal Subjects
115	18 Desember 2019 148/DK/PI.II/XII-2019	Tanggapan atas <i>Draft</i> SK Direksi tentang Pedoman Penugasan Kerja Sama Khusus dengan Anak Perusahaan atau Perusahaan terafiliasi di lingkungan Pelabuhan Indonesia II (Persero).
	December 18, 2019 148/DK/PI.II/XII-2019	Response to the Draft Decree of Board of Directors regarding the Guidelines for Assigning Special Cooperation with Subsidiaries or Affiliated Companies within Pelabuhan Indonesia II (Persero).
116	19 Desember 2019 149/DK/PI.II/XII-2019	Tanggapan atas Usulan Revisi RKA Investasi Tahun 2019 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
	December 19, 2019 149/DK/PI.II/XII-2019	Response to the Proposed Revision of 2019 Investment RKA PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
117	30 Desember 2019 154/DK/PI.II/XII-2019	Rapat Internal Dewan Komisaris pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2020 pukul 14.00 WIB Pembahasan (1) Penetapan Plh. Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Pembahasan Usulan Persetujuan Pejabat Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (3) Hal-hal strategis lainnya.
	December 30, 2019 154/DK/PI.II/XII-2019	Internal Meeting of Board of Commissioners on Wednesday, January 2, 2020 at 2:00 pm Discussion (1) Determination of Acting President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2) Discussion on Proposal of Approval of Commissioners and Directors of Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (3) Other strategic matters.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali;
2. Memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal;
3. Mengawasi pelaksanaan audit eksternal dan mengajukan usulan auditor eksternal;
4. Mengevaluasi usulan/rekomendasi kepada RUPS tentang calon anggota Direksi, serta Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan;
5. Mengevaluasi pelaksanaan RKAP Tahun 2019;
6. Menyusun Tanggapan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2018;
7. Mengawasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
8. Mengevaluasi kinerja Direksi;
9. Memberikan tanggapan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
10. Mengawasi Kepatuhan Direksi terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
11. Mengevaluasi dan menyampaikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, teknologi informasi, kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir pekerja, kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai PSAK, pengadaan dan pelaksanaan, dan kebijakan mutu pelayanan dan pelaksanaan Perseroan;

Board of Commissioners Duties

Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities in accordance with a predetermined work program. The implementation of duties of Board of Commissioners during 2019 include the following:

1. Held 47 (forty seven) internal meetings of Board of Commissioners and 12 (twelve) joint meetings with Board of Directors;
2. Monitor follow-up of the results of external auditor's examination;
3. Oversee the implementation of external audit and propose an external auditor;
4. Evaluate proposals/recommendations to the GMS regarding prospective members of Board of Directors, as well as Directors and Commissioners of Subsidiaries;
5. Evaluating 2019 RKAP Implementation;
6. Compiling Responses to Financial Statements for 2018 Fiscal Year;
7. Oversee the application of principles of good corporate governance;
8. Evaluate the performance of Board of Directors;
9. Provide responses to remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors;
10. Overseeing the Compliance of Board of Directors with laws and regulations;
11. Evaluate and deliver directions on strengthening internal control systems, risk management, information technology, policies and implementation of employee career development, accounting policies and preparation of Financial Statements in accordance with PSAK, procurement and implementation, and policies on service quality and company management;



12. Memberikan tanggapan terhadap hal-hal terkait dengan Tupoksi Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan;
13. Melakukan kunjungan kerja ke cabang-cabang.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang kemudian dievaluasi secara periodik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris;
2. Dewan Komisaris menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja yang disahkan RUPS setiap tahun;
3. Dewan Komisaris atau organ Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris, menuangkan hasilnya dalam risalah rapat Dewan Komisaris serta mencantumkan dalam Laporan Pelaksana Tugas Dewan Komisaris;
4. RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris yang merupakan ukuran penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris, dan menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasinya kepada Pemegang Saham/Menteri BUMN;
5. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan sistem *self assessment*;
6. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris akan dimuat dalam laporan tahunan dan diinformasikan kepada RUPS dengan data/bukti pendukung;
7. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan KPI yang ditetapkan;
8. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab menyiapkan data yang diperlukan untuk melakukan evaluasi dan mengusulkan capaiannya berdasarkan data dan masukan dari setiap komite penunjang Dewan Komisaris dan mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk dirapatkan di tingkat Dewan Komisaris.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kinerja Perseroan yang dituangkan dalam pengesahan Laporan Keuangan Perseroan oleh RUPS. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam RUPS tercermin dari keputusan RUPS yang memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perseroan untuk tahun buku yang lalu.

12. Provide responses to matters relating to the duties of Board of Commissioners in managing the Company;
13. Conducting work visits to branches.

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT

Board of Commissioners performance assessment is based on a Board of Commissioners' Decree that is evaluated periodically under the following conditions:

1. Board of Commissioners has a policy regarding Board of Commissioners performance measurement and assessment;
2. Board of Commissioners sets out the Indicators for Performance Achievement that is approved by the GMS every year;
3. Board of Commissioners or organs of Board of Commissioners evaluates Board of Commissioners performance, and submits the results in minutes to Board of Commissioners meeting and includes them in Board of Commissioners' Report;
4. The GMS must establish Key Performance Indicators for Board of Commissioners to measure the success of their duties and responsibilities based on proposals from Board of Commissioners, and submit quarterly reports on the realization development to the Shareholders/Minister of SOE;
5. Board of Commissioners performance assessments are carried out using a self assessment method;
6. Board of Commissioners performance assessment results will be included in the annual report and informed to the GMS with supporting data/evidence;
7. Board of Commissioners performance assessment is determined based on the established KPI;
8. The Nomination and Remuneration Committee is responsible for preparing the data needed for evaluating and proposing the achievements based on data and input from each Board of Commissioners' supporting committee and propose them to Board of Commissioners to be discussed at Commissioner level.

Board of Commissioners Performance Assessment Procedure

Board of Commissioners performance is evaluated by the Shareholders in the GMS based on the Company's performance as set forth in the ratification of the Company's Financial Statements by the GMS. The assessment of the performance of Board of Commissioners in the GMS is reflected in the resolutions of the GMS that grant approval and ratification of the Financial Statements including the Report of Board of Commissioners concerning the Company's supervisory duties for the past fiscal year.

Penilaian Dewan Komisaris dilakukan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Dewan Komisaris telah menyampaikan Usulan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan surat Nomor 104/DK/PI.II/X-2019 tanggal 1 Oktober 2019 dan telah ditetapkan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2019.

Selain itu, Dewan Komisaris juga telah menetapkan KPI Individual Anggota-Anggata Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 133/DK/PI.II/XI-2019 tanggal 19 November 2019 tentang Penetapan *Key Performance Indicators* Individual Dewan Komisaris.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap capaian kinerja Perseroan;
2. Ketepatan waktu penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris;
3. Kontribusi terhadap penerapan GCG;
4. Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
5. Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan Perseroan;
6. Efektivitas kegiatan penunjang Dewan Komisaris.

Key Performance Indicators (KPI) Individual sebagai berikut:

1. KPI Umum
 - a. Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Keikutsertaan dalam program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris;
 - c. Kunjungan kerja Dewan Komisaris.
2. KPI Khusus
KPI Khusus ditetapkan berdasarkan pembagian tugas dan fungsi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

The assessment refers to Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/2012 on Amendment to Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Board of Commissioners has submitted the Proposal for Performance Indicators for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Commissioners in letter number 195/DK/PI.II/X/II-2017 dated October 3, 2017 and have been established by the Shareholders together with the RKAP Ratification in the 2018 AGMS.

In addition, Board of Commissioners also determined the Individual KPI for Board of Commissioners based on Board of Commissioners' Decree Number 05/KEP-DK/PI.II/X-2018 dated October 24, 2018 concerning the Determination of Key Performance Indicators for Individual Members of PT Pelabuhan Indonesia II's Board of Commissioners in 2018.

Board of Commissioners Performance Assessment Criteria

Board of Commissioners' *Key Performance Indicators* (KPI) are as follows:

1. Contribution to the Company's Performance Achievement;
2. Timeliness of Delivery of Mandatory Board of Commissioners' Opinions and Advice;
3. Contribution to GCG implementation;
4. Attendance record of Member of Board of Commissioners/ Supervisory Board;
5. Supervision and directives to Board of Directors on the Company's plans and policies;
6. Effectiveness of Supporting Activities of Board of Commissioners.

Individual *Key Performance Indicators* (KPI) include:

1. General KPI
 - a. Level of attendance at Board of Commissioners Meeting;
 - b. Participation in Board of Commissioners' competency development program;
 - c. Board of Commissioners working visits.
2. Special KPI
Special KPI are determined based on the division of duties and functions of each member of Board of Commissioners.



Kategori penilaian KPI Individual Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. "Sangat Baik" apabila pencapaian KPI 100%–120%;
2. "Baik" apabila pencapaian KPI 85%–99%;
3. "Kurang Baik" apabila pencapaian KPI 60%–84%;
4. "Tidak Baik" apabila pencapaian KPI kurang dari 60%.

Pihak yang Melakukan Assessment

Dalam melaksanakan fungsi pokoknya, Dewan Komisaris juga dapat melakukan sendiri penilaian atas kinerjanya, yang antara lain mencakup ketajaman pengawasan, kehadiran dalam rapat, pengetahuan bisnis, identifikasi risiko usaha dan implementasi GCG.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2019 dilakukan secara *self assessment* dan bersifat kolegial yang merupakan bagian dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas telah direncanakan setiap awal tahun dalam suatu Program Kerja yang tercantum dalam RKAP. Pada akhir tahun, Dewan Komisaris menyusun Laporan Tugas Pengawasan yang disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk dievaluasi dan disahkan.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam RUPS juga tercermin dari keputusan RUPS untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris atas aktivitas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris Kolegial sebagai berikut:

No	Indikator Pencapaian Kinerja <i>Key Performance Indicators</i>	Satuan <i>Unit</i>	Bobot <i>Weight</i>	Target <i>Target</i>	Realisasi <i>Realization</i>	Capaian <i>Achievement</i>	Skor Capaian <i>Achievement Score</i>
1	Kontribusi terhadap capaian kinerja perusahaan <i>Contribution to achievement realization</i>		10,00				9,03
	Kontribusi terhadap realisasi capaian KPI Direksi <i>Contribution to BOD's' KPI achievement</i>	Poin Point	10,00	100	90,31	90%	9,03
2	Ketepatan waktu penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <i>Time Accuracy of Delivery of Mandatory Board of Commissioner's Opinions and Advice</i>		20,00				24,00

Individual KPI assessment categories for Board of Commissioners are as follows:

1. "Very good" when achieving KPI of 100%–120%;
2. "Good" when achieving KPI of 85%–99%;
3. "Poor" when achieving KPI of 60%–84%;
4. "Very Poor" when achieving KPI of less than 60%.

Parties Conducting Assessment

In carrying out its main functions, Board of Commissioners may conduct its own performance assessment, which includes supervisory acumen, meeting attendance, business knowledge, business risk identification and GCG implementation.

Board of Commissioners performance assessment in 2019 was conducted in a self-assessment and collegial manner as part of the BOC's Supervisory Task Report. Implementation of duties and responsibilities has been planned at the beginning of each year in the Company's Work Plan and Budget/RKAP. At the end of the year, Board of Commissioners prepares a Supervisory Task Report submitted to the Shareholder at the AGMS for evaluation and approval.

Performance Assessment of Board of Commissioners in the AGMS is also reflected in the resolution of the AGMS to grant a full release and discharge (*volledig acquit et decharge*) to Board of Commissioners for supervisory activities carried out during the past Fiscal Year, provided that such action is neither a criminal act nor a violation of the provisions and applicable legal procedures.

Board of Commissioners Performance Assessment Results

Board of Commissioners' Collegial Performance Assessment Results are as follows:

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
GCG STRUCTURE AND MECHANISM

No	Indikator Pencapaian Kinerja <i>Key Performance Indicators</i>	Satuan <i>Unit</i>	Bobot <i>Weight</i>	Target <i>Target</i>	Realisasi <i>Realization</i>	Capaian <i>Achievement</i>	Skor Capaian <i>Achievement Score</i>
a	Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP 2020, Laporan Triwulanan 2019, dan Laporan Tahunan 2018 Board of Commissioners Opinions and suggestions on 2020 RKAP, 2019 Quarterly Report, and 2018 Annual Report	Hari Days	5,00	30	4	120%	6,00
b	Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS/Menteri Response to Board of Directors actions that must be approved by the GMS/Minister	Hari Days	5,00	14	11	120%	6,00
c	Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Response to Board of Directors actions that must be approved by Board of Commissioners	Hari Days	5,00	14	13	120%	6,00
d	Laporan Dewan Komisaris triwulanan dan Tahunan Quarterly and Annual Report of Board of Commissioners	Hari Days	5,00	30	9	120%	6,00
3	Kontribusi terhadap penerapan GCG Contribution to GCG implementation		10,00				9,68
a	Kontribusi kualitas penerapan GCG Contribution to the quality of GCG Implementation	Poin Point	5,00	31,5	34,836	111%	5,53
b	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil <i>Assessment</i> GCG - Dewan Komisaris Dewan Komisaris Following-up recommendation from GCG assessment – BOC	%	5,00	100	83	83%	4,15
4	Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Attendance Rate of Member of Board of Commissioners/Supervisory Board		18,00				20,40
a	Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris BOC Internal Meeting	Jumlah Total	6,00	12	47	120%	7,20
b	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi BOC and BOD Meeting	Jumlah Total	6,00	12	12	100%	6,00
c	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang BOC Work Visit to Branch	%	6,00	7	13	120%	7,20



No	Indikator Pencapaian Kinerja Key Performance Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
5	Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan perusahaan Supervision and directives to Board of Directors on company plans and policies	Jumlah Total	14,00	7	7	100%	14,00
6	Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris Effectiveness of Supporting Activities of Board of Commissioners		28,00				29,80
a	Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Competency Improvement of BOC						
	Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris Competency development of BOC	Pelaksanaan Implementation	10,00	4	4	100%	10,00
b	Efektivitas Organ Pendukung Effectiveness of Supporting Organs						
1.	Komite Audit Audit Committee						
	» Pelaksanaan Rapat Internal Komite Audit Implementation of Internal Audit Committee Meetings	Jumlah Total	3,00	12	19	120%	3,60
	» Laporan Penugasan Komite Audit Audit Committee Assignment Report	Laporan Reports	3,00	4	4	100%	3,00
2.	Komite Pemantau Manajemen Risiko Risk Management Monitoring Committee						
	» Pelaksanaan Rapat Internal Komite PMR Implementation of Internal RMC Committee Meeting	Jumlah Total	3,00	12	15	120%	3,60
	» Laporan Penugasan Komite PMR RMC Committee Assignment Report	Laporan Reports	3,00	4	4	100%	3,00
3.	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee						
	» Pelaksanaan Rapat Internal Komite NR Implementation of Internal NRC Meeting	Jumlah Total	3,00	12	20	120%	3,60
	» Laporan Penugasan Komite NR NRC Assignment Report	Laporan Reports	3,00	4	4	100%	3,00
Jumlah Total			100,00				106,91

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Komisaris dibantu oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang terdiri atas 3 (tiga) Komite. Komite-komite tersebut antara lain:

1. Komite Audit;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi;
3. Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan IPC sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Selama tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dasar pertimbangannya adalah bahwa, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dan telah melaksanakan tugas antara lain:

1. Evaluasi kinerja KAP dan proses penunjukkan KAP yang akan mengaudit laporan keuangan tahun buku 2019;
2. *Monitoring* dan evaluasi tindak lanjut temuan auditor eksternal dan internal;
3. Evaluasi kinerja SPI;
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi ke cabang-cabang pelabuhan.

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memberikan dukungan bagi Dewan Komisaris dalam mengawasi implementasi kebijakan Nominasi dan Remunerasi Direksi, Tim Manajemen dan karyawan. Selama tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dasar pertimbangannya adalah bahwa, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dan telah melaksanakan tugas antara lain:

1. Melakukan evaluasi atas usulan calon Direksi Perusahaan dan Anak Perusahaan;
2. Melakukan evaluasi atas usulan remunerasi;
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi ke cabang-cabang pelabuhan.

Komite Pemantau Manajemen Risiko dibentuk untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dalam risiko manajemen Perusahaan *Enterprise Risk Management* (ERM). Selama tahun 2019, Pemantau

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS AND ASSESSMENT BASIS

Board of Commissioners are assisted by committees under Board of Commissioners consisting of 3 (three) Committees. These committees include:

1. Audit Committee;
2. Nomination and Remuneration Committee;
3. Risk Management Monitoring Committee.

During 2019, Board of Commissioners considered that committees under Board of Commissioners have carried out their duties and responsibilities well.

The Audit Committee is a committee formed to assist Board of Commissioners in supervising IPC management in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). During 2019, Audit Committee has carried out its duties well. The basis of consideration is that, Audit Committee has held 33 (thirty-three) meetings and has carried out tasks such as:

1. Evaluate KAP performance and KAP appointment process that will audit financial statements for 2019 fiscal year;
2. Monitoring and evaluation of follow-up findings of external and internal auditors;
3. Evaluation of SPI performance;
4. Monitoring and evaluating the port branches.

The Nomination and Remuneration Committee is a committee formed to assist Board of Commissioners in providing support to Board of Commissioners in overseeing the implementation of Nomination and Remuneration policy of Board of Directors, Management Teams and employees. During 2019, Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties well. The basic consideration is Nomination and Remuneration Committee has held 12 (twelve) meetings and has carried out tasks such as:

1. Evaluate the proposed candidates for Board of Directors of the Company and Subsidiaries;
2. Evaluate the proposed remuneration;
3. Monitoring and evaluating port branches.

The Risk Management Monitoring Committee is formed to improve the quality of supervision and provide advice from Board of Commissioners on enterprise risk management (ERM). During 2019, Risk Management Monitoring has carried out its



Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dasar pertimbangannya adalah bahwa, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dan telah melaksanakan tugas antara lain:

1. Memastikan terlaksananya implementasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMRISK) Fase 3 di IPC Group;
2. Memastikan terlaksananya pelatihan manajemen risiko secara terstruktur;
3. Memonitor implementasi *Risk and Control Self Assessment (RCSA)* dan *Assessment terhadap Corporate Initiative*;
4. Memastikan terimplementasinya *Business Continuity Management* berkelanjutan;
5. Melakukan *monitoring* dan evaluasi cabang pelabuhan.

Penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris merupakan bagian dari KPI Dewan Komisaris, dengan kriteria yaitu jumlah rapat Komite serta jumlah laporan Komite. Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana KPI tersebut di atas, seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris dapat mencapai target yang ditetapkan pada KPI. Seluruh komite telah melaksanakan tugas dengan pencapaian 100% dan melaksanakan rapat dengan pencapaian 120%.

MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dijelaskan sebagai berikut:

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Sewaktu-Waktu Oleh RUPS

RUPS dapat memberhentikan jabatan Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, dengan memberitahukan rencana pemberhentian tersebut kepada Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris tersebut dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, antara lain:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatuhan yang seharusnya dihormati sebagaimana Anggota Dewan Komisaris BUMN;
5. Dinyatakan bersalah dengan purusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Mengundurkan diri;

duties well. The basic consideration is that, Risk Management Monitoring Committee has held 12 (twelve) meetings and has carried out tasks such as:

1. Ensuring the implementation of Risk Management Information System (SIMRISK) Phase 3 at IPC Group;
2. Ensuring the implementation of structured risk management training;
3. Monitor the implementation of Risk and Control Self Assessment (RCSA) and Assessment of Corporate Initiative;
4. Ensuring the implementation of sustainable Business Management;
5. Conduct monitoring and evaluation of the port branches.

Performance evaluation of Committees under Board of Commissioners is part of Board of Commissioners' KPI, in which the criteria is the number of Committee meetings and the number of Committee reports. Based on performance measurements as mentioned above, all Committees under Board of Commissioners were able to achieve the targets set by KPI. All committees have carried out tasks with 100% achievement and held meetings with 120% achievements.

BOARD OF COMMISSIONERS MECHANISM FOR DISMISSAL AND RESIGNATION

The mechanism for dismissal and resignation of Board of Commissioners is stipulated in Board of Commissioners and Board of Directors Board Manual as follows.

Dismissal of Board of Commissioners At Any Time by the GMS

The GMS can dismiss Board of Commissioners at any time by stating the reasons, notifying the plan of termination to the Member of Board of Commissioners concerned, both verbally and in writing. Dismissal of Board of Commissioners members is carried out based on the following:

1. Unable to carry out their duties properly;
2. Not implementing the statutory provisions and/or provisions of the Articles of Association;
3. Engaging in actions that harm the Company and/or the State.
4. Conducting actions that violate ethics and/or compliance that should be respected as a SOE Board of Commissioners Member;
5. Have been declared guilty by a court ruling that has a permanent legal force;
6. Has resigned;

7. Memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris;
8. Berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan diri diterima (dalam hal tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri), tidak terdapat keputusan RUPS, maka permohonan pengunduran diri tersebut diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

DIREKSI

Direksi merupakan Organ Perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan IPC seperti Strategi Perusahaan, Pengawasan Internal, Kegiatan Sekretaris Perusahaan, Komersial dan Pengembangan Usaha, Teknik dan Manajemen Risiko, Operasi dan Sistem Informasi, Keuangan, SDM dan Hukum, Pengelolaan Anak Perusahaan berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai prinsip-prinsip GCG. Direksi juga merupakan representasi dari Perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Direksi senantiasa melaksanakan pengelolaan usaha sekaligus pengelolaan dan perlindungan kekayaan perusahaan, pengelolaan, strategi, dan rencana anggaran secara teratur.

Secara khusus, Direksi terus melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan *Corporate Roadmap*. Direksi juga memastikan agar seluruh komponen IPC bekerja dalam koridor nilai-nilai perusahaan secara konsisten.

7. Has family relations up to the third degree, both according to straight lines and side lines, including relationships arising marriages between Members of Board of Directors and Members of Board of Commissioners;
8. Based on other reasons that are appropriately valued by the GMS for the interests and objectives of the Company.

Board of Commissioner Resignation

Board of Commissioners have the right to resign as follows:

1. Notify in writing about their intention to the Shareholders with copies to other Members of Board of Commissioners and Board of Directors at least 30 (thirty) days prior to the date of resignation;
2. If up to the date requested by the member of Board of Commissioners concerned or within 30 (thirty) days from the date the letter of application is received (in the case of not mentioning the effective date of resignation), and there is no GMS decision, then the application for resignation will be accepted without the approval of the GMS.

BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors is the Corporate organ with the responsibility to manage all IPC activities, such as Corporate Strategy, Internal Control, Corporate Secretary, Commercial and Business Development, Technical and Risk Management, Operations and Information System, Finance, Human Capital and Legal Affairs, Subsidiary Management, operational efficiency and effectiveness all in accordance with GCG principles. Board of Directors is also the Company's representative both internally and externally. Board of Directors conducts business management as well as the management and protection of corporate assets, management, strategies, and budget plans on a regular basis.

Specifically, Board of Directors implements the established strategies to achieve the Company's vision, mission, values and Corporate Roadmap. Board of Directors also ensures that all components of the Company consistently work within the corporate values.



TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan IPC untuk kepentingan IPC dan sesuai dengan maksud dan tujuan IPC serta mewakili IPC baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Setiap Direktur wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha IPC. Direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan IPC dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar IPC dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Wewenang Direksi

Direksi memiliki kewenangan untuk:

1. Menetapkan kebijakan pengurusan IPC;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang Anggota Direksi untuk mengambil keputusan dan atas nama Direksi atau mewakili IPC di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja IPC baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili IPC di dalam dan di luar pengadilan;
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian IPC termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja IPC berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja IPC berdasarkan peraturan kepegawaian IPC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan IPC, mengikat IPC dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan IPC serta mewakili IPC di dalam dan di luar pengadilan tentang segala

BOARD OF DIRECTORS DUTIES, AUTHORITIES, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

Board of Directors Duties

Board of Directors is responsible for carrying out all actions relating to IPC management for and in the best interest of IPC and in accordance with the intents and purposes of IPC, and to represent IPC inside and outside court on all matters and events except for matters considered unlawful by legislation and GMS Decisions for the Board to do so.

Each Director shall in good faith and full responsibility carry out the duties for the interests and business of IPC. Board of Directors is fully responsible for performing its duties for the benefit of IPC in achieving its goals and objectives.

In discharging its duties, Board of Directors complies with IPC's Articles of Associations and all applicable regulations and implements the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability and fairness.

Board of Directors Authorities

Board of Directors has the authority to:

1. Stipulate the Company's management policy;
2. Arrange the transfer of Board of Directors power to one or more members of Board of Directors to take decisions for and on behalf of Board of Directors or to represent the Company in and out of court;
3. Arrange the submission of the power of Board of Directors to a person or several employees of the Company individually or jointly or to others, to represent the Company in and out of court;
4. Arrange provisions concerning the employment of the Company including the determination of salaries, pensions or old-age pensions and other income for the Company's workers under applicable laws and regulations, with the provision that salaries, pension or old age benefits and other income for workers exceeding the obligations stipulated by law and regulations must obtain prior approval from the GMS;
5. Appoint and dismiss Company employees in accordance with the Company's employment regulations and applicable laws and regulations;
6. Appoint and dismiss the Corporate Secretary;
7. Conduct all other actions and acts concerning the administration or ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company and representing the Company in and out of court of all matters

hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Kewajiban Direksi

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban untuk:

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan IPC sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IPC;
- b. Menyiapkan pada waktunya RJPP, RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- c. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP;
- d. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi;
- e. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan IPC, serta dokumen keuangan IPC sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
- f. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
- g. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak IPC yang tidak tercatat dalam pembukuan sebagai akibat penghapusan piutang;
- h. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
- i. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM;
- k. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan IPC serta dokumen IPC lainnya sebagaimana dijelaskan dalam huruf (d) dan (e) di atas;
- l. Menyimpan di tempat kedudukan IPC : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan IPC serta dokumen IPC lainnya sebagaimana dijelaskan pada huruf (k) di atas;
- m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

and events, with limitations as stipulated in legislation, the Articles of Association and/or GMS decisions.

Board of Directors Obligations

In carrying out its main duties, Board of Directors is obliged to:

- a. Undertake and ensure implementation of IPC business and activities in accordance with the purposes and objectives and business activities of IPC;
- b. Prepare in due course the RJPP, RKAP, and any changes and submit to Board of Commissioners and Shareholders to obtain ratification of the GMS;
- c. Provide explanation to the GMS regarding the RJPP and RKAP;
- d. Prepare lists of Shareholders, Special Register, minutes of the GMS and minutes of Board of Directors meetings;
- e. Prepare the Annual Report as a form of accountability of IPC management, as well as the IPC financial documents as referred to in the law on Company Documents;
- f. Prepare Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submit to Public Accountants to be audited;
- g. Submit Annual Reports including Financial Statements to the GMS for approval and ratification, as well as reports on IPC rights that are not recorded in the books as a result of the write-off of accounts receivable;
- h. Provide an explanation to the GMS on the Annual Report;
- i. Deliver the balance sheet and Income Statement already ratified by the GMS to the Ministry in charge of law and human rights in accordance with the provisions of the Laws and Regulations;
- j. Convey reports on changes in the composition of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry in charge of law and human rights;
- k. Maintain lists of Shareholders, Special Register, minutes of meeting, minutes of Board of Commissioners meetings and minutes of meetings of Board of Directors, IPC Annual Report and financial documents and other IPC documents as described in points (4) and (5) above;
- l. Retain at the Company domicile: the Shareholder Register, Special Register, briefing of shareholders, minutes of Board of Commissioners meetings, minutes of Board of Directors meetings, Annual Reports and financial documents and other IPC documents as described in the above points (k);
- m. Develop an accounting system in accordance with the financial accounting standards and based on the principles of internal control, especially the functions for handling, recording, storage, and supervision;



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> n. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta Pemegang Saham dengan ditembuskan ke Dewan Komisaris; o. Menyiapkan susunan organisasi IPC lengkap dengan perincian tugasnya; p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham; q. Menyusun dan menetapkan <i>blue print</i> organisasi IPC; r. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan. | <ul style="list-style-type: none"> n. Provide periodic reports in a manner and time in accordance with the applicable provisions and other reports each time requested by the Shareholder forwarded to Board of Commissioners; o. Prepare the IPC organizational structure complete with details of duties; p. Provide an explanation of all matters asked or requested by members of Board of Commissioners and the Shareholders; q. Prepare and establish the blueprint of IPC organization; r. Carry out other obligations in accordance with the provisions set forth in the Articles of Association and which are stipulated by the GMS based on legislation. |
|--|---|

Tanggung Jawab Direksi

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggungjawab kepada RUPS;
2. Dalam hal IPC menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, Direksi harus segera melaporkan kepada RUPS, dengan disertai usulan mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan IPC.

Board of Directors Responsibilities

1. In executing its duties, Board of Directors is responsible to the GMS;
2. In the event that IPC shows any symptoms of a setback, Board of Directors must immediately report to the GMS, accompanied by a proposal on corrective measures to be taken;
3. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding important management issues for IPC.

TUGAS DAN KEWENANGAN DIREKSI

Terkait Dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Direksi bertanggungjawab untuk menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan:

1. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS;
2. Pemanggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/ atau usul-usul itu harus disediakan di kantor IPC sebelum RUPS diselenggarakan;
3. RUPS dilaksanakan secara tepat waktu sesuai ketentuan.

BOARD OF DIRECTORS DUTIES AND AUTHORITIES

Related to the General Meeting of Shareholders (GMS)

Board of Directors is responsible for organizing the GMS in accordance with the procedures set forth in IPC's Articles of Association and all applicable laws and regulations:

1. The summon for every GMS is announced no later than 14 (fourteen) days prior to the date of the GMS;
2. The summon for every GMS shall include information on each agenda items to be discussed, including proposals planned by Board of Directors to be submitted to the GMS, provided that if such information is not available at the time the summon is announced, then they must be made available at IPC's office before the GMS begins;
3. The GMS will begin on time in accordance with all prevailing provisions.

Terkait Dengan Strategi dan Rencana Kerja

Penyusunan dan Penyampaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

Direksi wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tepat pada waktunya dan menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS untuk disahkan.

1. Susunan Materi RJPP
RJPP merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan IPC yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Format RJPP merujuk pada ketentuan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dari Kementerian Negara BUMN:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang yang baru lalu;
 - c. Posisi Perseroan saat ini;
 - d. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
 - e. Tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya.
2. Penyampaian RJPP kepada RUPS
Tata laksana penyampaian RJPP kepada RUPS diatur sebagai berikut:
 - a. Rancangan RJPP yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan;
 - b. Pengesahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP dalam RUPS;
 - c. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari belum disahkan, maka Rancangan RJPP tersebut dianggap telah mendapat persetujuan;
 - d. Sebelum waktu 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya RJPP, Direksi wajib menyampaikan rancangan RJPP periode berikutnya.
3. Perubahan RJPP
Dalam hal perubahan RJPP perlu dilakukan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perubahan RJPP hanya dapat dilakukan bila terdapat perubahan materiil yang berada di luar kendali Direksi;
 - b. Perubahan materiil tersebut adalah perubahan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian lebih dari 20%;
 - c. Perubahan RJPP harus ditandatangani Dewan Komisaris dan Direksi untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

Related to Strategy and Work Plan

Preparation and Delivery of Corporate Long Term Plan (RJPP)

Board of Directors prepares the Company's Long Term Plan (RJPP) on time and submits the RJPP draft to the GMS for approval.

1. RJPP Material
The RJPP is a strategic plan that contains IPC goals and objectives to be achieved within a period of 5 (five) years. The RJPP format referred to the preparation of the Company's Long-Term Plan as issued by from the Ministry of State-Owned Enterprises:
 - a. Introduction;
 - b. Evaluation of the new Long Term Plan;
 - c. The Company's current situation;
 - d. All assumptions used in preparing the Long Term Plan;
 - e. Goals, targets and strategies used to achieve them.
2. Submission of RJPP to the GMS
The order that the RJPP is submitted in to the GMS is regulated as follows:
 - a. The draft RJPP signed by Board of Commissioners is submitted to the GMS for approval;
 - b. The RJPP ratification will be given no later than 60 (sixty) days after the draft is approved by the GMS;
 - c. If within 60 (sixty) days such ratification has not been issued then the RJPP Draft is considered to have been ratified;
 - d. Prior to 60 (sixty) days before the end of the current RJPP, Board of Directors shall propose the draft RJPP for the following period.
3. Changes in RJPP
In case change in the RJPP is necessary, the following provisions apply:
 - a. Changes to RJPP can only be made when there are significant changes over which Board of Directors has no control;
 - b. The referred changes are changes that result in a more than 20% (twenty percent) downward deviation in terms of achievement;
 - c. Any changes made in RJPP must be signed by Board of Commissioners and Board of Directors to be further submitted to the GMS for ratification.



Penyusunan, Penyampaian dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan adalah penjabaran dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Format RKAP merujuk pada ketentuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dari Kementerian Negara BUMN dan/atau berdasarkan Keputusan RUPS yang berisikan sekurang-kurangnya:

1. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
2. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
3. Proyeksi keuangan perusahaan dan Anak Perusahaannya; dan
4. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk setiap tahun buku yang selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

Tata Laksana penyampaian RKAP kepada RUPS diatur sebagai berikut:

1. Rancangan RKAP yang ditandatangani oleh Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham;
2. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi, disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru mulai berlaku untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
3. Pengesahan RKAP tahun buku berikutnya diadakan selambat-lambatnya hari ke-30 (tiga puluh) bulan pertama setelah tahun buku dimulai;
4. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud, maka RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan.

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan perubahan RKAP adalah sebagai berikut:

1. Perubahan asumsi yang signifikan diluar kendali Direksi;
2. Terdapat tambahan rencana sesuai kebutuhan IPC;
3. Berdasarkan penugasan/kebijakan Pemegang Saham dan/atau Pemerintah.

Perubahan RKAP memerlukan persetujuan RUPS apabila memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Terdapat tambahan rencana yang belum ditetapkan dalam RKAP;
2. Adanya penugasan/kebijakan Pemegang Saham dan/atau Pemerintah yang belum ditetapkan dalam RKAP.

Preparation, Delivery and Change of Corporate Work Plan and Budget (RKAP)

The Company's Work Plan and Budget is an elaboration of the Company's Long Term Plan. The RKAP format refers to the Corporate Work Plan and Budget issued by the State Ministry of State-Owned Enterprises and/or is based on the GMS Decision and contains at least:

1. Mission, business goals, business strategy, company policy and work program/activity;
2. The Company's` budgets that are presented in details for each work/activity program budget;
3. Company and its Subsidiaries Financial projections; and
4. Other matters that require GMS decisions.

Board of Directors prepares the RKAP for each fiscal year to be ratified and made official by an AGMS.

The order in which the RKAP is submitted to GMS is shown below:

1. The draft RKAP signed by Board of Directors will be submitted to Board of Commissioners to be reviewed and signed before it is submitted to the Shareholders;
2. The draft RKAP signed by Board of Commissioners and Board of Directors will be submitted by Board of Directors to the Shareholders no later than 60 (sixty) days prior to the beginning of new fiscal year for approval by the GMS;
3. The RKAP ratification for the following fiscal year will be given no later than the 30th (thirtieth) day of the first month after the fiscal year begins;
4. In the event that the draft RKAP has not been submitted by Board of Directors and/or in the case the RKAP has not been approved in the period as referred to in point (3), then what automatically applies is the previous year's RKAP;

Conditions that may cause changes to be necessary to the RKAP are as follows:

1. A significant change in assumptions over which Board of Directors has no control; and/or
2. When there are additional plans based on IPC's needs; and/or
3. A mandatory assignment/policy from the Shareholders and/or the Government.

Any change in the RKAP requires approval from the GMS if it meets any of the following criteria:

1. There are one or more plans that have not been covered in the RKAP; and/or
2. There are one or more assignments/policies from the Shareholders and/or the Government not covered in the RKAP.

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Manajemen

Direksi wajib menyampaikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Laporan berkala tersebut adalah Laporan Manajemen Perusahaan yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan meliputi Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan, Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Laporan Tahunan atau *Annual Report*.

Selain Laporan Manajemen Perusahaan, bagi BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara terpisah yang pedoman penyusunan dan penyampaiannya diatur melalui ketentuan tersendiri.

Format Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan merujuk pada ketentuan penyusunan laporan manajemen dari Kementerian BUMN.

1. Laporan Manajemen Triwulanan
Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir. Khusus untuk Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan IV, digabungkan menjadi Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan.
2. Laporan Manajemen Tahunan
Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan yang telah ditandatangani oleh seluruh Direksi dan seluruh Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku kepada Pemegang Saham. Direksi wajib menyampaikan Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa oleh Auditor paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku kepada Pemegang Saham. Apabila terdapat perbedaan antara Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham dengan Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa oleh Auditor Eksternal, maka Direksi harus melakukan revisi terhadap Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dimaksud untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Persetujuan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan yang telah diperiksa Auditor Eksternal dilakukan oleh RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahunan

Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pengurusan IPC. Format Laporan Tahunan merujuk pada Anggaran Dasar IPC dan

Preparation and Submission of Periodic Reports

Board of Directors shall submit periodic reports in a manner and time that is in accordance with applicable regulations and this also applies to other reports whenever requested by Board of Commissioners and/or Shareholders. A periodic report is a Company Management Report that contains the implementation of the Company's Work Plan and Budget and covers Quarterly Management Reports, Annual Management Reports and Annual Reports.

In addition to the Management Reports, a SOE that runs the Partnership and Community Development Program shall submit a separate accountability report whose guidelines for preparation and submission are stipulated in a separate provision.

The format of Quarterly Management Reports and Annual Management Reports refer to the preparation of management reports issued by the Ministry of SOEs.

1. Quarterly Management Report
Board of Directors shall submit the Quarterly Management Report signed by President Director and President Commissioner no later than 1 (one) month after the end of the quarter for which the report is made. The quarterly Management Report for Q4 shall be attached to the Annual Management Report.
2. Annual Management Report
Board of Directors shall submit an Annual Management Report signed by all Directors and Board of Commissioners to the Shareholders no later than 2 (two) months after the end of the fiscal year. Board of Directors shall submit the Annual Financial Statements that have been audited by internal Auditors to the shareholders no later than 5 (five) months after the end of the fiscal year. Should there be any discrepancy between the Annual Management Report submitted to the Shareholders and the Annual Financial Statements that have been audited by an External Auditors, Board of Directors shall first make revisions to the former and then submit them to the General Meeting of Shareholders for approval and ratification. Approval for the Annual Management Report and Ratification of Financial Statements that have been audited by an External Auditors shall be given by GMS no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year.

Preparation and Submission of Annual Reports

Board of Directors shall prepare and submit the Annual Report as a form of accountability for the management of IPC and the Annual Report format refers to IPC's Articles of Associations and



mencakup pula Laporan Keuangan, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan diserahkan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diaudit.

Penyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS

Tata Laksana penyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS diatur sebagai berikut:

1. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku IPC berakhir dan/atau dalam bulan Mei setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan;
2. Rancangan Laporan Tahunan, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal, yang telah ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham;
3. Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham;
4. Laporan Tahunan tersebut harus disediakan di kantor IPC sejak tanggal panggilan RUPS sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS atau dikirim untuk diperiksa oleh Pemegang Saham.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tidak Menandatangani Laporan Tahunan

Dalam hal terdapat Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka:

1. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan;
2. Apabila Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris tersebut tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.

Terkait dengan Manajemen Risiko

Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG, dengan cara:

1. Identifikasi Risiko, yaitu proses menemukan dan mengenali kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menjadi kendala pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan;
2. Analisis Risiko, yaitu proses mengukur tingkat risiko berdasarkan besaran nilai dampak dan kemungkinannya untuk menentukan peringkat risiko sebagai dasar prioritas tindakan penanganan risiko;

includes Financial Statements that have been prepared based on the Financial Accounting Standards and audited by a Public Accountant appointed by the General Meeting of Shareholders.

Submission of Annual Report to the GMS

The procedural steps for the submission of Annual Report to GMS are described below:

1. Board of Directors submits the Annual Report to the GMS after it is reviewed by Board of Commissioners no later than 5 (five) months after IPC's fiscal year ends and/or in May following the close of the fiscal year concerned;
2. The draft of Annual Report, including the audited financial statements by an External Auditor and signed by all members of Board of Directors is submitted to Board of Commissioners to be reviewed and signed before its submitted to the Shareholders;
3. The Annual Report signed by all members of Board of Directors and Board of Commissioners is submitted by Board of Directors to the Shareholders;
4. The Annual Report must be made available at IPC's office from the date on which a GMS call is announced to the date the GMS is held, or sent for a prior review by the Shareholders.

Members of Board of Directors and Board of Commissioners who do not sign the Annual Report

If there is one or more members of the Boards of Directors or Board of Commissioners who has not signed the Annual Report, then:

1. The referred members of Board of Directors and Board of Commissioners shall state the reason for not signing in writing; or such statement can be made by Board of Directors or Board of Commissioners in a letter that is attached to the Annual Report;
2. If one or more members of Board of Directors or Board of Commissioners decides not to sign the Annual Report without giving their reason in writing, then they are considered to have approved the contents of the Annual Report.

Related to Risk Management

Board of Directors shall develop and implement an integrated corporate risk management program that is part of the GCG program with:

1. Risk Identification, a process of finding and recognizing the possibilities of an event that can be a constraint to the achievement of the Company's goals and objectives;
2. Risk Analysis, a process of measuring risk levels based on the magnitude of the impact value and the possibility to determine risk rating as the priority basis for risk management measures;

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Evaluasi Risiko, yaitu proses membandingkan hasil analisis risiko dengan batas toleransi risiko guna menentukan apakah suatu risiko dapat diterima atau tidak; 4. Perlakuan Risiko, yaitu proses tindak lanjut terhadap risiko yang dalam proses evaluasi risiko sebelumnya merupakan risiko yang tidak diterima berdasarkan toleransi Perusahaan; 5. Pemantauan dan Peninjauan Risiko, yaitu proses memantau realisasi kinerja manajemen risiko berdasarkan rencana awal dan pengukuran ulang tingkat risiko; 6. Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses melaporkan pelaksanaan sistem manajemen risiko beserta pengungkapan risiko kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Risk Evaluation, a process of comparing the results of risk analysis with risk tolerance limits to determine whether or not a risk is acceptable; 4. Risk treatment, a follow-up process on a certain risk that based on previous evaluation was not unacceptable based on Company's tolerance; 5. Risk Monitoring and Review, a process of monitoring the realization of risk management performance based on the initial plan and re-measurement of risk levels; 6. Reporting and Disclosure, a process of reporting the implementation of the risk management system and risk disclosure to related parties in accordance with applicable provisions. |
|--|--|

Direksi memiliki unit kerja Manajemen Risiko yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi risiko Perusahaan dan berkewajiban memiliki Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sebagai bagian dari sistem manajemen risiko dan memiliki kaitan erat dengan Pedoman Komite Manajemen Risiko.

Board of Directors has a Risk Management Unit responsible for monitoring and evaluating the Company's risks where it is made mandatory to work with a Risk Management Unit Charter as a part of the risk management system that is closely related to Risk Management Committee Charter.

Terkait dengan Teknologi Informasi

1. Menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris;
3. Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di IPC.

Related to Information Technology

1. Establish effective information technology governance;
2. Submit periodic reports on the implementation of information technology governance to Board of Commissioners;
3. Maintain and evaluate the quality of information technology governance functions at IPC.

Terkait Dengan Sumber Daya Manusia

1. Menyiapkan susunan organisasi IPC lengkap dengan uraian tugasnya;
2. Menyusun dan melaksanakan pedoman pengelolaan Sumber Daya Manusia yang meliputi sistem perencanaan Sumber Daya Manusia, rekrutmen, seleksi, penempatan Pekerja dan jabatan dalam struktur organisasi IPC, promosi dan demosi serta mutasi;
3. Memastikan penempatan Pekerja sesuai dengan kriteria jabatan dalam struktur organisasi IPC;
4. Meminta persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
5. Meminta persetujuan Dewan Komisaris terkait dengan pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Sekretaris Perusahaan;
6. Memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada Pekerja sesuai dengan kompetensi jabatan;
7. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja untuk satuan kerja dan jabatan dalam organisasi secara obyektif dan transparan;
8. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian IPC termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS;

Related to Human Capitals

1. Prepare the organizational structure of IPC complete with job descriptions;
2. Develop and implement Human Capital management guidelines that covers Planning, Recruitment, Selection, Placement of Workers and Positions across IPC's organizational structure, promotion and demotion and mutation;
3. Ensure that workers are assigned according to the criteria for positions in IPC's organizational structure;
4. Request approval from Board of Commissioners for the organizational structure up to 1 (one) level under Board of Directors;
5. Request approval from Board of Commissioners on the appointments of the Head of Internal Audit Unit and Corporate Secretary;
6. Ensure that education and training to Workers is given in accordance with competencies needed for each position;
7. Conduct performance evaluations and assessments on work units and positions in the organization in an objective and transparent manner;
8. Make provisions on employment including salary determination, pension or post-retirement benefits and other income for workers in compliance with applicable laws and regulations and resolutions made by GMS;



9. Mengangkat dan memberhentikan Pekerja berdasarkan peraturan kepegawaian IPC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait Dengan Etika Bisnis dan Anti Korupsi

1. Mengembangkan dan memimpin penerapan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
2. Menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan (*Whistleblowing System*) pada IPC;
3. Tidak memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada dan/atau dari pejabat pemerintah dan/atau pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Pedoman Gratifikasi IPC;
4. Memastikan seluruh kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada lembaga Pemerintah yang berwenang dipatuhi oleh semua wajib lapor yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi dalam lingkungan IPC.

Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal

Direksi harus menetapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk menjamin keyakinan yang memadai atas kehandalan laporan keuangan, pengamanan terhadap aset, tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, dan mendorong dipatuhinya kebijakan dan Peraturan Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur;
2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menilai pengelolaan risiko yang relevan;
3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan;
4. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan;
5. *Monitoring*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

9. Hire and dismiss workers following IPC personnel regulations and all other laws that apply in employment.

Related to Business Ethics and Anti-Corruption

1. Develop and lead the implementation of Good Corporate Governance Guidelines (GCG);
2. Establish all provisions to govern reporting the mechanism for alleged violations (Whistleblowing system) at IPC;
3. Refrain from practices of offering or receiving either directly or indirectly any gift of high worth to and/or from any public servant and/or other parties that may affect objectivity or lead to the need to return such favor that is common in such practice and from other actions unlawful by fiat of bylaws and IPC's Gratification Guidelines;
4. Ensure that all obligations for entitled high rank officials at IPC as specified in the Decision of IPC's BOD to submit report of wealth of public servants (LHKPN) to the authorized government agency are fulfilled.

Related to Internal Control System

Board of Directors must establish an effective Internal Control System policy to ensure confidence in the reliability of financial statements, protection of assets, efficient and effective operations, and encourage compliance with internal policies and regulations.

The Internal Control System includes the following:

1. Internal structured corporate control environment carried out in a disciplined manner;
2. Assessment of business risk management as a process for identifying, analyzing, assessing the management of relevant risks;
3. Control activities as actions taken in a process control of Company activities at each level and unit within the Company's organizational structure, including authority, authorization, verification, reconciliation, performance appraisal, division of duties, and security of Company assets;
4. Information and communication systems as a process of presenting reports on operational, financial, and compliance activities and compliance with the provisions of laws and Company regulations;
5. Monitoring of the internal control system quality assessment process, including the internal audit function at each level and unit within the organizational structure of the Company, so that control can be implemented optimally.

Direksi memiliki kewajiban untuk menyusun Piagam Satuan Pengawasan Internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal dan memiliki kaitan yang erat dengan Piagam Komite Audit.

Board of Directors has the obligation to develop an Internal Audit Unit Charter as part of the internal control system that is closely linked to the Audit Committee Charter.

Terkait Dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

Direksi wajib menyediakan Informasi Publik yang meliputi:

1. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
2. Nama lengkap Pemegang Saham, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris IPC;
3. Laporan Tahunan, laporan keuangan, neraca dan laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
4. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
5. Sistem dan alokasi dana remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Mekanisme penetapan Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Kasus hukum yang berdasarkan undang-undang terbuka sebagai Informasi Publik;
8. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat hutang (obligasi);
9. Penggantian akuntan yang mengaudit;
10. Perubahan tahun fiskal IPC;
11. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau pelayanan umum atau subsidi;
12. Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan
13. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara.

Related to Information Disclosure and Confidentiality

Board of Directors must provide the public with information that includes:

1. Name and domicile, intent, purpose and type of business activity, time of establishment and capital, as stated in IPC's Articles of Association;
2. Full names of Shareholders, Directors, and Commissioners of IPC;
3. Annual report, financial report, balance sheet and income statement, and corporate social responsibility report that have been audited;
4. Results of audits by external auditors, assessment by credit and other rating agencies;
5. Remuneration system and allocation for Commissioners and Directors;
6. Mechanism to determine Directors and Commissioners;
7. Legal cases and bylaws open to the Public;
8. Announcement of issuance of debt securities (bonds);
9. Replacement of accountants that audit IPC;
10. Changes in the IPC fiscal year;
11. Activities and/or public services or subsidies assigned to IPC by government assignment;
12. Mechanism for procurement of goods and services; and
13. Other information that bylaw is mandatory for IPC to disclose as a State-Owned Enterprise.

Terkait Dengan Penerapan *Good Corporate Governance*

1. Melakukan pengukuran terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam bentuk:
 - a. Penilaian (*assessment*) GCG di IPC melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di IPC yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
 - b. Evaluasi (*review*) dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada butir a., yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan (*self assessment*).
2. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan;
3. Menunjuk salah seorang anggota Direksi sebagai penanggungjawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di IPC melalui mekanisme rapat Direksi;

Related to Good Corporate Governance

1. Measure Good Corporate Governance (GCG) in terms of:
 - a. GCG Assessment through a measurement on GCG applications conducted once every 2 (two) years;
 - b. Review and implementation of GCG at SOEs conducted in the year following the assessment as provided for in point a., which covers an evaluation of assessment results and follow-up actions on recommended improvements (self assessment);
2. The assessment and evaluation results are reported to the same GMS in which IPC's annual report is submitted;
3. Appointing a Director as the person in charge for monitoring GCG at IPC at Board of Directors meetings;



4. Terkait dengan pengawasan kepatuhan IPC, dijalankan secara bersama oleh fungsi-fungsi terkait di dalam IPC.

Terkait Hubungan dengan Stakeholders

Direksi mengembangkan hubungan dengan Stakeholders IPC berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Menghormati hak-hak Stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan Stakeholders;
2. Memastikan Perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya. Salah satu pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan adalah melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja;
4. Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk Karyawan, Perusahaan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
5. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan.

Terkait Sistem Akuntansi dan Pembukuan

1. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
2. Menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menyerahkan kepada akuntan publik untuk diaudit;
3. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi IPC untuk menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya yang efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh, penyajian laporan dan analisa keuangan tepat waktu dan akurat serta prinsip-prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu IPC.

Terkait Respon Terhadap Peluang Bisnis dan Perubahan Lingkungan Bisnis

1. Mekanisme untuk merespon peluang bisnis dan merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis melalui langkah:
 - a. Usulan peluang bisnis dapat berasal dari manajemen di bawah Direksi/Anggota Direksi/Dewan Komisaris;

4. Related to monitoring IPC compliance, it is exercised jointly by related functions within IPC.

Related to Relationships With Stakeholders

Board of Directors develops relationships with IPC Stakeholders based on the following principles:

1. Respect of Stakeholder rights that are regulated by applicable regulations and/or become due under agreements made by the Company and the Stakeholders;
2. Ensuring that the Company carries out its social responsibility. One form being the Partnership and Community Development Program in accordance with prevailing laws and regulations;
3. Ensuring that the Company assets and premises and other facilities are in compliance with applicable laws and regulations when it comes to environmental conservation, and work health and safety;
4. In recruiting, setting base salary, training, establishing career paths, and determining other employment requirements for its employees, the Company does not discriminate based on ethnic background, religious belief, gender, age, and disability of a person nor is discriminative in other specific circumstances as detailed by laws and regulations;
5. Provides a work environment that is free from all forms of pressure.

Related to Accounting and Bookkeeping System

1. Develops an accounting system based on the principles of internal control, specifically the necessary separation of functions of management, entry, filing and supervision;
2. Prepares financial statements based on financial accounting standards and hand them over to public accountants for auditing purpose;
3. Maintains and manages IPC's bookkeeping and administration to provide neatly ordered bookkeeping, efficient working capital adequacy, a sound and robust balance sheet structure, timely and accurate presentation of reports and financial analysis and other principles in accordance with all prevailing norms that are applicable to IPC.

Related to Response to Business Opportunities and Changes In Environment

1. The mechanism used to respond to business opportunities and respond to current external issues in business environment includes the following steps:
 - a. Business opportunities proposed by the executives under Board of Directors or Boards of Directors and Commissioners;

- b. Direksi mengidentifikasi peluang bisnis dan/atau perubahan lingkungan bisnis yang berdampak besar pada Perseroan secara intensif, termasuk di dalamnya analisa risiko atas peluang dan atau perubahan kondisi tersebut tersebut;
 - c. Direksi mengambil keputusan atas usulan tersebut;
 - d. Atas usulan peluang bisnis yang disetujui dan termasuk dalam kewenangan Dewan Komisaris dan/atau RUPS, Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris usulan peluang disertai dengan studi kelayakan dan membahas dengan Dewan Komisaris.
2. Pembahasan isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan dimaksudkan untuk menangkap peluang bisnis atau yang berakibat menjadi permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha dan kinerja perusahaan;
 3. Direksi harus segera merespon informasi yang diterima pada setiap terjadinya perubahan lingkungan yang berpengaruh signifikan pada kinerja IPC dan segera melaporkan kepada Dewan Komisaris.

Terkait Dengan Tugas dan Kewajiban Lain

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau yang ditetapkan oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan.

MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh RUPS.

PERSYARATAN DIREKSI

Persyaratan anggota Direksi yang diatur dalam *Board Manual* yaitu:

1. Persyaratan formal
Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan pailit;
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara/BUMN, Perseroan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Persyaratan lain sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan.

- b. Board of Directors identifies business opportunities and environmental changes that may have a major impact on the Company via, among other measures, analysis of risk within opportunities and possible changes in those conditions;
 - c. Board of Directors makes a decision on any proposal;
 - d. Based on an approved proposal for a business opportunity, if the task to approve is within the scope of authority of Board of Commissioners and/or AGMS, then Board of Directors submits it and/or discusses the proposal with Board of Commissioners for further study.
2. Discussions on current issues concerning changes in business environment and issues that may or do have a major impact on the Company's business and performance are held to capture business opportunities or overcome issues that may otherwise develop into major constraints;
 3. All information on changes in the business will be responded to quickly by Board of Directors who then reports this immediately to Board of Commissioners.

Related to Other Tasks and Obligations

Fulfil other obligations in accordance with the provisions set forth in IPC's Articles of Association or made by the GMS and contained in all applicable laws.

BOARD OF DIRECTORS TERM OF OFFICE

The term of office for members of Board of Directors is 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of Board of Directors at any time. After the term of office ends, members of Board of Directors may be reappointed for 1 (one) term of office by the GMS.

BOARD OF DIRECTORS REQUIREMENTS

Requirements for members of Board of Directors are set out in the Board Manual, including:

1. Formal requirements
Those who can be appointed to Board of Directors are individuals who are capable of carrying out legal actions, except for those who within 5 (five) years before their appointment:
 - a. Have been declared bankrupt;
 - b. Were a member of a Board of Directors or a member of a Board of Commissioners declared bankrupt;
 - c. Has been sentenced for committing a criminal offense that was detrimental to the State/SOE, the Company and/or relating to the financial sector.
2. Other requirements as determined by the Articles of Association and statutory regulations.



TATA LAKSANA KERJA - DIREKSI (BOARD MANUAL)

Secara lebih rinci, pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur dalam tentang Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) antara lain berisi tentang petunjuk Tata Laksana kerja Direksi menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, serta dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi IPC. Dengan adanya *Board Manual*, diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Pedoman tata tertib kerja Direksi dalam *Board Manual* IPC dijelaskan secara khusus dalam Bab II, yang mencakup:

1. Kebijakan Umum;
2. Persyaratan dan Komposisi, Keanggotaan dan Masa Jabatan Direksi;
3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas;
4. Independensi (Kemandirian) Direksi;
5. Etika Jabatan dan Keanggotaan Direksi;
6. Tugas dan Wewenang Direksi;
7. Kewajiban Direksi;
8. Tanggung Jawab Direksi;
9. Prinsip-prinsip Pengambilan Keputusan Direksi;
10. Organ Pendukung Direksi;
11. Penilaian Kinerja Direksi;
12. Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi;
13. Hubungan IPC dengan Anak Perusahaan.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dengan susunan, persyaratan, nominasi dan pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi selama periode tahun 2019 di jabarkan sebagai berikut.

Periode 1 Januari - 4 Januari 2019

Komposisi Direksi periode 1 Januari – 4 Januari 2019 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direktur berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

BOARD OF DIRECTORS BOARD MANUAL

In more details, Board of Directors guidelines and work rules are stipulated in the Board Manual that regulates Board of Directors and Board of Commissioners Working Procedures, that contains instructions to Board of Directors on their work procedures, elaborating the stages of activities in a structured, systematic, easy to understand and consistent manner. It can, therefore, be a reference for Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the vision and mission of IPC. With the Board Manual, it is expected they achieve high standards of work in line with GCG principles.

Board of Directors Code of Conduct in the IPC Board Manual is explained specifically in Chapter II, which includes:

1. General Policy;
2. Board of Directors Requirements and Composition, Membership and Term of Office;
3. Introduction and Capacity Improvement Program;
4. Board of Directors Independence;
5. Board of Directors Ethics of Position/Membership;
6. Board of Directors Duties and Authorities;
7. Board of Directors Obligations;
8. Board of Directors Responsibilities;
9. Board of Directors Decision-Making Principles;
10. Board of Directors Organs/Committees;
11. Board of Directors Performance Assessment;
12. Board of Directors Evaluation Criteria;
13. IPC Relationships with Subsidiaries.

Board of Directors Composition and Basis of Appointment

The Company is managed and led by the Board of Directors consisting of a Director or more with the composition, requirements, nominations and appointment of Members of Board of Directors determined by the GMS in accordance with the provisions of the Articles of Association and the applicable laws and regulations. The composition and basis for appointment of Board of Directors during 2019 were as follows.

Period of January 1 – January 1, 2019

The composition of IPC Board of Directors for period of January 1 – January 4, 2019 consisted of 7 (seven) persons including 1 (one) President Director and 6 (six) Directors. All members of Board of Directors reside in the working area of IPC Head Office. The composition and basis for appointment of Board of Directors can be seen in the table below:

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Pelaksana <i>Appointed by</i>	Dasar Pengangkatan <i>Appointment Basis</i>	Tanggal Efektif <i>Effective Date</i>
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016 SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016	22 April 2016 April 22, 2016

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
GCG STRUCTURE AND MECHANISM

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Appointed by	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Saptono R. Irianto	Direktur Komersial Commercial Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-48/MBU/03/2014 tanggal 11 Maret 2014 SK-48/MBU/03/2014 dated March 11, 2014	11 Maret 2014 March 11, 2014
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik Technical Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2019
Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan Finance Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-295/MBU/11/2018 tanggal 26 November 2018 SK-295/MBU/11/2018 dated November 26, 2018	26 November 2018 November 26, 2018
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Human Capital Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 July 14, 2017
Riry Syeried Jetta	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Business Development Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016

Periode 4 Januari – 10 Maret 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan Nomor SK-04/MBU/01/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II menyatakan dalam rangka penataan anggota Direksi Perseroan, maka RUPS memutuskan pemberhentian Bapak Riry Syeried Jetta sebagai Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis. Sehingga Komposisi Direksi periode 4 Januari – 10 Maret 2019 sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur. Seluruh anggota Direktur berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Period of January 4 – March 10, 2019

Based on the Minister of SOEs Decree as the Company's GMS Number SK-04/MBU/01/2019 dated January 4, 2019 concerning the Dismissal of Members of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) stating that in the restructuring OF members of Board of Directors, the GMS decided dismissal of Riry Syeried Jetta as Director of Business Transformation and Development. So that the composition of Board of Directors for period of January 4 to March 10, 2019 will be 6 (six) persons consisting of 1 (one) President Director and 5 (five) Directors. All members of Board of Director reside in the working area of IPC Head Office. The composition and basis for appointment of Board of Directors can be seen in the table below.

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Appointed by	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016 SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016	22 April 2016 April 22, 2016
Saptono R. Irianto	Direktur Komersial Commercial Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-48/MBU/03/2014 tanggal 11 Maret 2014 SK-48/MBU/03/2014 dated March 11, 2014	11 Maret 2014 March 11, 2014
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik Technical Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan Finance Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-295/MBU/11/2018 tanggal 26 November 2018 SK-295/MBU/11/2018 dated November 26, 2018	26 November 2018 November 26, 2018
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Human Capital Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 July 14, 2017



Periode 11 Maret – 7 April 2019

Pada tanggal 11 Maret 2019 masa jabatan Bapak Saptono R. Irianto berakhir sebagai Direktur Komersial. Sehingga Komposisi Direksi periode 11 Maret – 7 April 2019 sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur. Seluruh anggota Direktur berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Pelaksana <i>Appointed by</i>	Dasar Pengangkatan <i>Appointment Basis</i>	Tanggal Efektif <i>Effective Date</i>
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016 SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016	22 April 2016 April 22, 2016
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik Technical Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan Finance Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-295/MBU/11/2018 tanggal 26 November 2018 SK-295/MBU/11/2018 dated November 26, 2018	26 November 2018 November 26, 2018
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Human Capital Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 July 14, 2017

Period of March 11 – April 7, 2019

On March 11, 2019, Saptono R. Irianto's tenure ended as Commercial Director. So that the composition of Board of Directors for the period of March 11 - April 7, 2019 totaled 5 (five) persons consisting of 1 (one) President Director and 4 (four) Directors. All members of Board of Director reside in the working area of IPC Head Office. The composition and basis for appointment of Board of Directors can be seen in the table below.

Periode 8 April 2019 – 17 November 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-80/MBU/04/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perseroan tanggal 8 April 2019 yang menyatakan mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak Saptono R. Irianto sebagai Direktur Komersial Perseroan terhitung sejak tanggal 11 Maret 2019 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan serta mengangkat Bapak Ogi Rulino sebagai Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis dan Bapak Arif Suhartono sebagai Direktur Komersial.

Sehingga Komposisi Direksi periode 8 April – 17 November 2019 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direktur berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Period of April 8 – November 17, 2019

Based on SOE Ministerial Decree Number SK-80/MBU/04/2019 concerning Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors of the Company dated April 8, 2019 which confirmed the dismissal of Saptono R. Irianto as Commercial Director of the Company as of March 11, 2019 with highest gratitude for all contributions of energy and thoughts during his tenure and the appointment of Ogi Rulino as Director of Business Transformation and Development and Arif Suhartono as Commercial Director.

So that the composition of Board of Directors for the period of April 8 - November 17, 2019 is 7 (seven) persons consisting of 1 (one) President Director and 6 (six) Directors. All members of Board of Director reside in the working area of IPC Head Office. The composition and basis for appointment of Board of Directors can be seen in the table below.

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Pelaksana <i>Appointed by</i>	Dasar Pengangkatan <i>Appointment Basis</i>	Tanggal Efektif <i>Effective Date</i>
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016 SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016	22 April 2016 April 22, 2016
Arif Suhartono	Direktur Komersial Commercial Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-80/MBU/40/2019 tanggal 8 April 2019 SK-80/MBU/40/2019 dated April 8, 2019	8 April 2019 April 8, 2019
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik Technical Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
GCG STRUCTURE AND MECHANISM

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Appointed by	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan Finance Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-295/MBU/11/2018 tanggal 26 November 2018 SK-295/MBU/11/2018 dated November 26, 2018	26 November 2018 November 26, 2018
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Human Capital Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 July 14, 2017
Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Business Development Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-80/MBU/40/2019 tanggal 8 April 2019 SK-80/MBU/40/2019 dated April 8, 2019	8 April 2019 April 8, 2019

Periode 18 November – 31 Desember 2019

Sesuai Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-272/MBU/11/2019 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Utama Perseroan tanggal 18 November 2019 yang menyatakan mengangkat Bapak Hambra sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan. Sehingga Komposisi Direksi periode 18 November – 31 Desember 2019 sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direktur berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat IPC. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Period of November 18 – December 31, 2019

In accordance with the Minister of SOE Decree Number SK-272/MBU/11/2019 concerning the Appointment of Vice President Director of the Company on November 18, 2019 which stated to appoint Hambra as Vice President Director of the Company. Therefore, Board of Directors Composition for the period of November 18 - December 31, 2019 totaling 8 (eight) persons consisting of 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director and 6 (six) Directors. All members of Board of Director reside in the working area of IPC Head Office. The composition and basis for appointment of Board of Directors can be seen in the table below.

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Appointed by	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016 SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016	22 April 2016 April 22, 2016
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-272/MBU/11/2019 tanggal 18 November 2019 SK-272/MBU/11/2019 dated November 18, 2019	18 November 2019 November 18, 2019
Arif Suhartono	Direktur Komersial Commercial Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-80/MBU/40/2019 tanggal 8 April 2019 SK-80/MBU/40/2019 dated April 8, 2019	8 April 2019 April 8, 2019
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik Technical Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016	16 Mei 2016 May 16, 2016
Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan Finance Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-295/MBU/11/2018 tanggal 26 November 2018 SK-295/MBU/11/2018 dated November 26, 2018	26 November 2018 November 26, 2018
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Human Capital Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017	14 Juli 2017 July 14, 2017



Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Appointed by	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Business Development Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK-80/MBU/40/2019 tanggal 8 April 2019 SK-80/MBU/40/2019 dated April 8, 2019	8 April 2019 April 8, 2019

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Anggota Direksi yang baru diangkat, wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum;
2. Penanggung jawab program pengenalan adalah Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan;
3. Program pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Perseroan;
 - b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkungan kegiatanm kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka Panjang, posisi kompetitif, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - c. Keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor cabang/unit operasi/unit bisnis/fasilitas Perseroan, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka pengembangan kompetensi dan pengenalan perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki dan menjalankan program pengenalan bagi anggota Direksi baru yang bertujuan memberikan gambaran aktivitas bisnis, strategi, rencana jangka panjang perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab Direksi.

Program orientasi bagi Direksi baru disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Divisi SDM dan Divisi terkait lainnya, disampaikan dalam bentuk presentasi, pemberian dokumen laporan tahunan/*annual report*, dokumen terkait GCG, *product knowledge*.

Pada tahun 2019 Direksi yang mengikuti program pengenalan Direksi Baru adalah Arif Suhartono, Direktur Komersial dan Ogi Rulino, Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis pada tanggal 9 April 2020 bertempat pada Kantor Pusat IPC dan

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS

Provisions regarding the orientation program include the following:

1. For newly appointed members of Board of Directors, an orientation program must be provided regarding the condition of the Company in general;
2. The person in charge of the orientation program is the Corporate Secretary or anyone who can function as a Corporate Secretary;
3. The orientation program includes:
 - a. Implementation of Good Corporate Governance principles at the Company;
 - b. An overview of the Company in relation to its objectives, nature, and financial and operating performance activities, strategies, short and long-term business plans, competitive position, risks, internal controls and other strategic issues;
 - c. Information regarding obligations, duties, responsibilities and rights of Board of Commissioners and Board of Directors.
4. This orientation program may be given as presentations, meetings, visits to the Company's Branch office/operating unit/business unit/facilities, reviews of Company documents or other programs that serve the purpose.

In the framework of competency development and introduction of the company, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has an orientation program for new members of Board of Directors that aims to provide an overview of business activities, strategies, long-term plans of the Company, and duties and responsibilities of Board of Directors.

The orientation program for new Directors is prepared by Corporate Secretary in collaboration with HC Division and other related divisions, delivered in the form of presentations, annual report documents, documents related to GCG, *product knowledge*.

In 2019, Directors who took part in the introduction of New Directors program were Arif Suhartono, Commercial Director and Ogi Rulino, Transformation and Business Development Director on April 9, 2020 at IPC Head office as well as the introduction of

program pengenalan Direksi baru Hambra, Wakil Direktur Utama pada tanggal 20 November 2019 bertempat di Kantor Pusat IPC.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibagi atas bidang tugas sebagai berikut.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 tanggal 20 November 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengurusan perusahaan dengan memimpin perusahaan. Direktur Utama menyelenggarakan sebagian pengurusan Perusahaan dibidang Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal dan Perencanaan Strategi Korporasi. Tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing Divisi yang dipimpin oleh Direktur Utama adalah sebagai berikut:

1. Divisi Sekretariat Perusahaan
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait komunikasi perusahaan, penerapan tata kelola korporasi, protokoler dan tata usaha Direksi, hubungan lembaga dan pelayanan masyarakat;
2. Divisi Satuan Pengawasan Internal
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perencanaan pengawasan internal, pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian pengawasan internal;
3. Divisi Perencanaan Strategi Korporasi
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perencanaan strategis, pengendalian implementasi strategi dan inovasi, *project management office* dan pengendalian kinerja.

Wakil Direktur Utama

Wakil Direktur Utama mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perseroan di bidang pengadaan barang/jasa serta Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang. Tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing Divisi yang dipimpin oleh Wakil Direktur Utama adalah sebagai berikut:

1. Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI)

new director program for Hambra as Vice President Director on November 20, 2019 located at IPC Head Office.

BOARD OF DIRECTORS SUPERVISORY ASSIGNMENTS

In carrying out its duties, Board of Directors are divided into the following task areas.

Based on PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s Board of Directors Decree No. OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 dated November 20, 2019 concerning Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

President Director

The President Director has the main task of managing the Company by leading the Company. President Director carries out part of the management of the Company in the fields of Corporate Secretariat, Internal Audit Unit and Corporate Strategy Planning. The main duties and responsibilities of each Division led by President Director are as follows:

1. Corporate Secretariat Division
Formulate policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to corporate communication, implementation of corporate governance, protocols and administration of Board of Directors, institutional relations and community development;
2. Internal Audit Unit Division
Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to planning of internal audit, implementation of internal audit and internal audit controls;
3. Corporate Strategy Planning Division
Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main tasks and responsibilities related to strategic planning, controlling strategy implementation and innovation, project management office and controlling performance.

Vice President Director

The Vice President Director has the main task of carrying out some of the management tasks of the Company in the field of goods/services procurement and Management of Subsidiaries and Branches. The main duties and responsibilities of each Division led by Vice President Director are as follows:

1. Subsidiary and Branch Management Division
Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection



sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait pengelolaan anak perusahaan dan pengelolaan cabang;

2. Divisi Pengadaan
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait dengan pengadaan teknik, pengadaan non teknik dan administrasi dan dokumen pengadaan.

Direktur Komersial

Direktur Komersial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perseroan di bidang Manajemen Aset, Pemasaran, Aliansi Bisnis dan Pengelolaan Hubungan Pengelolaan. Tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing Divisi yang dipimpin oleh Direktur Komersial adalah sebagai berikut:

1. Divisi Pemasaran
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait strategi pemasaran, penentuan dan kerjasama usaha;
2. Divisi Aliansi Bisnis dan Hubungan Pelanggan
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait aliansi bisnis, hubungan pelanggan petikemas dan hubungan pelanggan *non*-petikemas;
3. Divisi Manajemen Aset
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait portofolio aset dan penyelesaian aset bermasalah.

Direktur Teknik

Direktur Teknik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perusahaan dibidang Konstruksi Sipil, Peralatan dan Manajemen Proyek Strategis. Tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing Divisi yang dipimpin oleh Direktur Teknik adalah sebagai berikut:

1. Divisi Konstruksi Sipil
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perencanaan sipil, survei dan lingkungan, konstruksi dan pemeliharaan fasilitas;
2. Divisi Peralatan
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI)

with their main tasks and responsibilities related to subsidiary management and branch management;

2. Procurement Division
Prepare policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to technical procurement, non-technical and administrative procurement and procurement documents.

Commercial Director

The Commercial Director has the main task of carrying out some of the Company's management tasks in the areas of Asset Management, Marketing, Business Alliance and Management Relations Management. The main duties and responsibilities of each Division led by Commercial Director are as follows:

1. Marketing Division
Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to marketing strategies, pricing and business cooperation;
2. Business Alliance and Customer Relations Division
Formulate policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to business alliances, container customer relations and non-container customer relations;
3. Asset Management Division
Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to portfolio assets and solving problem assets.

Technical Director

The Technical Director has the main task of carrying out some of the Company's management tasks in the field of Civil Construction, Equipment and Strategic Project Management. The main duties and responsibilities of each Division led by Technical Director are as follows:

1. Civil Construction Division
Prepare policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to civil planning, surveying and the environment, construction and maintenance of facilities;
2. Equipment Division
Prepare policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in

sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait teknik mesin dan listrik, alat apung dan alat bongkat muat;

3. Divisi Manajemen Proyek Strategis
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perencanaan proyek strategis dan pengendalian proyek strategis.

Direktur Operasi

Direktur Operasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perusahaan dibidang pelayanan kapal, pelayanan terminal dan sistem informasi. Tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing Divisi yang dipimpin oleh Direktur Operasi adalah sebagai berikut:

1. Divisi Pelayanan Kapal
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait pemanduan dan penundaan serta sarana dan prasarana pelayanan kapal;
2. Divisi Pelayanan Terminal
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait pelayanan petikemas, pelayanan *non*-petikemas, dan manajemen K3L (Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan);
3. Divisi Sistem Informasi
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perencanaan dan manajemen informasi, pengembangan sistem informasi dan pengoperasian dan pengendalian sistem informasi.

Direktur Keuangan

Direktur Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perseroan di bidang perencanaan dan pengendalian keuangan, pengelolaan keuangan, layanan keuangan. Tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing Divisi yang dipimpin oleh Direktur Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI)

connection with their main duties and responsibilities related to mechanical and electrical engineering, floating tools and loading and unloading equipment;

3. Strategic Project Management Division
Develop policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main tasks and responsibilities related to strategic project planning and strategic project control.

Operations Director

The Operations Director has the main task of carrying out some of the Company's management tasks in the field of ship services, terminal services and information systems. The main duties and responsibilities of each Division led by Operations Director are as follows:

1. Ship Service Division
Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in relation to their main duties and responsibilities related to scouting and delays as well as facilities and infrastructure for ship services;
2. Terminal Services Division
Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in relation to their main duties and responsibilities related to container service, non-container service, and K3L (Health, Safety and Environment) management;
3. Information Systems Division
Develop policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to planning and management of information, development of information systems and operation and control of information systems.

Finance Director

The Finance Director has the main task of carrying out some of the management tasks of the Company in the areas of financial planning and control, financial management, financial services. The main duties and responsibilities of each Division led by Finance Director are as follows:

1. Financial Planning and Control Division
Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection



sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perencanaan keuangan, pengendalian keuangan dan penganggaran investasi;

2. Divisi Pengelolaan Keuangan
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perbendaharaan keuangan korporasi dan pencatatan aset;
3. Divisi Layanan Keuangan
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait akuntansi umum dan sistem keuangan, pajak, pusat layanan keuangan dan pelanggan.

Direktur Sumber Daya Manusia

Direktur Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perusahaan dibidang strategi SDM, pembelajaran SDM, layanan SDM dan hukum. Tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing Divisi yang dipimpin oleh Direktur SDM adalah sebagai berikut:

1. Divisi Hukum
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait dukungan hukum, litigasi dan pemeriksaan kepatuhan pada Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan;
2. Divisi Strategi Sumber Daya manusia
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perencanaan strategi SDM dan organisasi, manajemen talenta, dan kebijakan remunerasi dan fasilitas SDM;
3. Divisi Pembelajaran Sumber Daya manusia
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran dan budaya korporasi;
4. Divisi Layanan Sumber Daya manusia
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait hubungan pekerja, kearsipan, layanan administrasi SDM, umum dan rumah tangga, pada Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan.

with their main duties and responsibilities related to financial planning, financial control and investment budgeting;

2. Financial Management Division
Prepare policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to corporate financial treasury and asset recording;
3. Financial Services Division;
Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to general accounting and financial systems, taxes, financial service centers and customers.

Human Capital Director

The Human Capitals Director has the main task of carrying out some of the tasks of managing the Company in the areas of HC strategy, HC learning, HC services and law. The main duties and responsibilities of each Division led by HC Director are as follows:

1. Legal Division
Prepare policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to legal support, litigation and compliance checks on the Parent Company and Subsidiaries;
2. Human Capitals Strategy Division
Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to HC strategy planning and organizational, talent management, remuneration policies and HC facilities;
3. Human Capitals Learning Division
Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to learning planning, organizing learning and corporate culture;
4. Human Capitals Services Division
Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to employee relations, filing, HC administration services, general and household, at the Parent Company and Subsidiaries.

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perseroan di bidang transformasi dan pengembangan bisnis, manajemen risiko dan kendali mutu. Tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing Divisi yang dipimpin oleh Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis adalah sebagai berikut:

1. Divisi Transformasi dan Pengembangan Bisnis
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait portofolio bisnis, pengembangan bisnis inti dan pengembangan bisnis pendukung;
2. Divisi Manajemen Risiko
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait risiko operasional dan non operasional;
3. Divisi Kendali Mutu
Menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait kendali mutu korporasi, dan standa prosedur operasi.

PENDELEGASIAN WEWENANG

Direksi yang berhalangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk sementara waktu membutuhkan adanya Pelaksana Harian sebagai wujud pendelegasian wewenang untuk menjalankan tugas rutin sehari-hari.

Penunjukan Pelaksana Harian bagi Direksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila Direktur Utama berhalangan maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama;
2. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka Direktur yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama;
3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direktur yang terlama dalam jabatan, maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan tertua dalam usia berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama;
4. Dalam hal salah seorang Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, maka anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas Direksi yang berhalangan;

Transformation and Business Development Director

The Transformation and Business Development Director has the main task of carrying out some of the Company's management tasks in the areas of business transformation and development, risk management and quality control. The main duties and responsibilities of each Division led by Transformation and Business Development Director are as follows:

1. Business Transformation and Development Division
Develop policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to business portfolios, core business development and supporting business development;
2. Risk Management Division
Prepare policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to operational and non-operational risks;
3. Quality Control Division
Compile policies, Standard Operating Procedures (SPO), Work Programs and Key Performance Indicators (KPI) in connection with their main duties and responsibilities related to corporate quality control, and standard operating procedures.

DELEGATION OF AUTHORITY

Board of Directors who are unable to carry out their duties and obligations temporarily require the existence of Daily Executors as a form of delegation of authority to carry out daily routine tasks.

Appointment of Daily Implementers for Board of Directors is carried out with the following conditions:

1. If President Director is Absent, then one of Directors appointed in writing by President Director has the authority to act for and on behalf of Board of Directors and carry out the duties of President Director;
2. In the event that President Director does not appoint, the Director who is the longest in position has the authority to act for and on behalf of Board of Directors and carry out the duties of President Director;
3. In the event that there is more than 1 (one) Director who is the longest in office, the Director who is the longest in office and the oldest in his age has the authority to act for and on behalf of the Directors and carry out the duties of President Director;
4. In the event that one of Directors other than President Director is unable due to any reason, then another member of Board of Directors appoints a member of Board of Directors to carry out the duties of Directors who are unable to attend;



5. Prioritas penunjukan Pelaksana Harian anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.566/19/5/1/PI.II-16 tanggal 19 Mei 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Harian bagi Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

5. Priority for the appointment of Daily Implementers of members of Board of Directors as stated in Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Decree Number HK.566/19/5/1/PI.II-16 dated May 19, 2016 concerning the Appointment of Daily Implementers for Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Antar anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BOARD OF DIRECTORS AFFILIATIONS

Members of Board of Directors do not have financial relationship and familial relationships to the third degree both through a straight line or side lines, including relationships arising from marriage.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Board of Directors Affiliate Relationships

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi <i>Board of Directors Financial, Family and Management Affiliations</i>				
		Hubungan Keuangan Dengan <i>Financial Relationship with</i>				
		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>		
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director		✓		✓	
Hambra*	Wakil Direktur Utama Vice President Director		✓		✓	
Saptono R. Irianto**	Direktur Komersial Commercial Director		✓		✓	
Arif Suhartono***	Direktur Komersial Commercial Director		✓		✓	
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik Technical Director		✓		✓	
Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director		✓		✓	
Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan Finance Director		✓		✓	
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Human Capital Director		✓		✓	
Riry Syeried Jetta****	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Business Development Director		✓		✓	
Ogi Rulino***	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Business Development Director		✓		✓	

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
GCG STRUCTURE AND MECHANISM

		Hubungan Keluarga Dengan <i>Family Relationship with</i>						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain <i>Management Relationship with Other companies</i>	
		Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholder</i>		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>		Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholder</i>	
		Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>
			✓		✓		✓		✓
			✓		✓		✓		✓
			✓		✓		✓		✓
			✓		✓		✓		✓
			✓		✓		✓		✓
			✓		✓		✓		✓
			✓		✓		✓		✓
			✓		✓		✓		✓
			✓		✓		✓		✓
			✓		✓		✓		✓
			✓		✓		✓		✓



Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Board of Directors Affiliate Relationships

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi Board of Directors Financial, Family and Management Affiliations			
		Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship with			
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No

* Mulai menjabat sejak tanggal 18 November 2019
 ** Berhenti menjabat sejak tanggal 11 Maret 2019
 *** Mulai menjabat sejak tanggal 8 April 2019
 **** Berhenti menjabat sejak tanggal 4 Januari 2019

*Started Serving on November 18, 2019
 ** Ended Serving since March 11, 2019
 *** Started Serving on April 8, 2019
 **** Ended Serving since January 4, 2019

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Pasal 10 ayat 34, anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai berikut:

1. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan atau Daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Selama tahun 2019, tidak terdapat pelanggaran rangkap jabatan Direksi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

BOARD OF DIRECTORS CONCURRENT POSITIONS POLICY

In accordance with the Articles of Association, Article 10 paragraph 34, members of Board of Directors may not hold another position as follows:

1. Members of Board of Directors in SOE, Regional SOE and Privately Owned Enterprises;
2. Member of Board of Commissioners/Supervisory Board in SOE;
3. Other structural and functional positions in the Central and or Regional Government Agencies/Institutions;
4. Other positions in accordance with the provisions of legislation, administrators of political parties and/or candidates/legislative members and/or candidates for Regional Heads/Deputy Regional Heads;
5. Other positions that may cause conflicts of interest.

During 2019, there were no violations of the concurrent positions of Board of Directors stipulated in the Company's Articles of Association.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi
Board of Directors Concurrent Positions

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain Position in Other Companies/Agencies	Nama Perusahaan/Instansi Lain Name of Other Companies/Agencies
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT Pelabuhan Tanjung Priok
		Komisaris Utama President Commissioner	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
		Komisaris Utama President Commissioner	PT IPC Terminal Petikemas

		Hubungan Keluarga Dengan <i>Family Relationship with</i>						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain <i>Management Relationship with Other companies</i>		
	Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholder</i>	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>		Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholder</i>				
	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>

Tabel Rangkap Jabatan Direksi
Board of Directors Concurrent Positions

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain <i>Position in Other Companies/Agencies</i>	Nama Perusahaan/Instansi Lain <i>Name of Other Companies/Agencies</i>
Hambra*	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT Pendidikan Maritim Logistik Indonesia
		Komisaris Utama President Commissioner	PT Rumah Sakit Pelabuhan
Saptono R. Irianto**	Direktur Komersial Commercial Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT IPC Terminal Petikemas
		Komisaris Utama President Commissioner	PT Multi Terminal Indonesia
Arif Suhartono***	Direktur Komersial Commercial Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik Technical Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT EDI Indonesia
		Komisaris Utama President Commissioner	PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT Pengerukan Indonesia
		Ketua Dewan Pengawas Chairperson of Supervisory Board	Pengawas KSO Terminal Petikemas Koja KSO Terminal Petikemas Koja Supervisor
Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan Finance Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT Energi Pelabuhan Indonesia
		Komisaris Utama President Commissioner	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Human Capital Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT Rumah Sakit Pelabuhan
		Vice President Commissioner Vice President Commissioner	PT Jakarta International Container Terminal (JICT)
		Komisaris Utama President Commissioner	PT Pelabuhan Indonesia Investama



Tabel Rangkap Jabatan Direksi
Board of Directors Concurrent Positions

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain Position in Other Companies/Agencies	Nama Perusahaan/Instansi Lain Name of Other Companies/Agencies
Riry Syeried Jetta****	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Business Development Director	-	-
Ogi Rulino***	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Business Development Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT Multi Terminal Indonesia
		Komisaris Utama President Commissioner	PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

* Mulai menjabat sejak tanggal 18 November 2019

** Berhenti menjabat sejak tanggal 11 Maret 2019

*** Mulai menjabat sejak tanggal 8 April 2019

**** Berhenti menjabat sejak tanggal 4 Januari 2019

*Started Serving on November 18, 2019

**Ended Serving since March 11, 2019

***Started Serving on April 8, 2019

****Ended Serving since January 4, 2019

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

1. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
3. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
4. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

Setiap tahun Direksi juga menandatangani Pernyataan Independensi yang tercermin dalam naskah Pakta Integritas, Kepatuhan Kode Etik Bisnis, Daftar Khusus serta Pernyataan Benturan Kepentingan. Karena itulah, IPC menjamin independensi seluruh anggota Direksi dalam mengelola perusahaan.

BOARD OF DIRECTORS MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST

Members of Board of Directors who have a conflict of interest are not authorized to represent the Company if:

1. A case occurs before a court between the Company and members of Board of Directors concerned;
2. The member of Board of Directors concerned has a conflict of interest with the Company;
3. In the event that there is a situation referred to above, the person entitled to represent the Company is:
 - a. Another member of Board of Directors who have no conflict of interest with the Company;
 - b. Board of Commissioners in the event that all members of Board of Directors have a conflict of interest with the Company;
 - c. Other parties appointed by the GMS in the event that all members of Board of Directors or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.
4. In the event that all members of Board of Directors have a conflict of interest with the Company and there are no members of Board of Commissioners, the Company is represented by another party appointed by the GMS.

Each year Board of Directors signs a statement of Independence reflected in the text of the Integrity Pact, Compliance with Business Ethics, Special Lists and Conflict of Interest Statements. For this reason, IPC guarantees the independence of all members of Board of Directors in managing the Company.

Kepemilikan Saham Direksi

Seluruh Direksi telah melaporkan kepada Perseroan terkait kepemilikan saham yang dimiliki baik di IPC maupun di perusahaan lainnya. Kepemilikan saham masing-masing Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Board of Directors Share Ownership

All Directors have reported to the Company regarding the ownership of shares owned both at IPC and in other companies. Share ownership of each Director can be seen in the table below.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi
Board of Directors Share Ownership

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership	
		IPC	Perusahaan Lain Other Company
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Hambra*	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Saptono R. Irianto**	Direktur Komersial Commercial Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Arif Suhartono***	Direktur Komersial Commercial Director	Nihil Nil	VICO: 125 lembar saham VICO: 125 shares
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik Technical Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan Finance Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Human Capital Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Riry Syeried Jetta****	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Business Development Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Ogi Rulino***	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Business Development Director	Nihil Nil	ADRO: 40.000 lembar saham DGIK: 1.557.900 lembar saham SMBR: 25.000 lembar saham ADRO: 40,000 shares DGIK: 1,557,900 shares SMBR: 25,000 shares

* Mulai menjabat sejak tanggal 18 November 2019

** Berhenti menjabat sejak tanggal 11 Maret 2019

*** Mulai menjabat sejak tanggal 8 April 2019

**** Berhenti menjabat sejak tanggal 4 Januari 2019

*Started Serving on November 18, 2019

**Ended Serving since March 11, 2019

***Started Serving on April 8, 2019

****Ended Serving since January 4, 2019

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi diadakan setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan Direksi. Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

A Board of Directors meeting is held whenever it is deemed necessary, but at least once in 1 (one) month. Board of Directors' meeting can be held at the Company's place of domicile or at its place of business or elsewhere within the territory of the Republic of Indonesia as determined by Board of Directors. Board of Directors meetings can be held through teleconferencing, video conferences or other electronic means that allow all participants at Board of Directors meeting to see each other and hear directly and participate in the meeting.



Jadwal Rapat

Rapat Direksi pada tahun 2019 telah direalisasikan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. Sementara Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan satu kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Direksi juga dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh:

1. Seorang atau lebih anggota Direksi;
2. Permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
3. Permintaan tertulis seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan;
4. Rapat Direksi ini merupakan rapat yang bersifat segera dan strategis, dengan agenda hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan level Direksi.

Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan IPC atau di tempat kegiatan usaha IPC atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan Direksi.

Peserta Rapat Direksi

Peserta rapat Direksi terdiri dari semua anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan sebagai Notulen. Selain itu, Direksi memiliki wadah komunikasi dengan jajaran manajemen di bawahnya yaitu dalam Rapat Kerja Direksi (Rakerdir) yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 1 (satu) tahun.

Undangan Rapat Direksi

Panggilan rapat diatur sebagai berikut:

1. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak;
2. Panggilan rapat dan penyelenggaraan rapat Direksi dapat didelegasikan kepada Sekretaris Perusahaan, kecuali diatur lain oleh Rapat Direksi;
3. Panggilan rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat serta menyertakan agenda dan materi rapat tersebut;
4. Panggilan rapat Direksi dapat dilakukan melalui sarana elektronik (SMS, *email*, dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan, tanpa mengesampingkan ketentuan Anggaran Dasar mengenai tata cara panggilan rapat secara tertulis.

Meeting Schedule

Board of Directors' meetings in 2019 were held 1 (one) time in 1 (one) week. Joint meetings of Board of Directors and Board of Commissioners were held once in 1 (one) month. Meetings of Board of Directors may also be held outside the regular schedule, if deemed necessary by:

1. One or more Director;
2. Written request from one or more Commissioner;
3. A written request of, by law, the Shareholders with the largest number of shares by mentioning matters to be discussed;
4. That this Board of Directors meeting is an immediate and strategic meeting, with an agenda that requires decision-making at Board of Directors level.

Meeting Venue

Board of Directors Meetings may be held at the domicile of IPC or at the operational business location of IPC or elsewhere in the territory of the Republic of Indonesia as determined by Board of Directors.

Board of Directors Meetings Participants

The participants of Board of Directors meetings consist of all members of Board of Directors and the Corporate Secretary as minute takers of the meeting. In addition, Board of Directors has a communication forum with their subordinates in the Working Meetings of Board of Directors held every 3 (three) months per 1 (one) year.

Call for Board of Directors Meetings

The meeting call is set as follows:

1. The call for Board of Directors meetings is in writing by a member of Board of Directors entitled to represent the Company and delivered within a period of at least 3 (three) days before the meeting, or in a shorter time for urgent matters;
2. The call and implementation of Board of Directors meetings may be delegated to the Corporate Secretary, unless arranged otherwise by a meeting of Board of Directors;
3. A call for a meeting of Board of Directors will include the event, date, time and venue, as well as agenda and material;
4. The call for Board of Directors meeting may be conducted through electronic means (SMS, email and other electronic means) so that the notices of the meeting agenda may be delivered more quickly, by following the procedures outlined in the Articles of Association concerning the formatting of written notices.

Kuorum Rapat

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota Direksi atau wakilnya. Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang Anggota Direksi lainnya. Dalam hal Anggota Direksi tidak hadir dalam rapat rutin, maka Anggota Direksi tersebut dapat mewakilkan kepada Anggota Direksi lainnya dengan memberikan Surat Kuasa kehadiran dengan mencantumkan pernyataan persetujuan atau penolakan atas agenda rapat, dengan alasan-alasannya

Pimpinan Rapat

Pimpinan rapat Direksi diatur sebagai berikut:

1. Seluruh rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;
2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka rapat Direksi dipimpin oleh Pelaksana Harian Direktur Utama/Direksi yang ditunjuk atau diberikan kuasa oleh Direktur Utama;
3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan sebagaimana dijelaskan dalam butir (c) di atas, maka:
 - a. Salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan ditunjuk sebagai pimpinan rapat Direksi;
 - b. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama menjabat dan tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.

Risalah Rapat

Setiap rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh Anggota Direksi yang hadir. Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi.

Pencatatan/Notulis Rapat Direksi

Pencatatan/Notulis Rapat Direksi adalah EVP Sekretariat Perusahaan.

Rencana Rapat Direksi

Rencana Rapat Direksi telah tertuang pada Nota Dinas Direksi Nomor SK.02/21/1/15/TUD/SPR/UT-19 tanggal 21 Januari 2019 perihal Usulan Agenda BOD Meeting tahun 2019.

Quorum Meeting

Meetings of Board of Directors are valid and titled to make legally binding decisions, when attended by more than 1/2 (one-half) the number of Members of Board of Directors or their representatives. A Member of Board of Directors may be represented in a meeting only by one other Director by virtue of a written authority granted exclusively for that purpose. A Member of Board of Directors may only represent one other Member of Board of Directors. In the event that a Member of Board of Directors is not present at a routine meeting, a Member of Board of Directors may represent the other Member of Board of Directors by providing a Power of Attorney with a statement of consent or rejection of the meeting agenda stipulating their reasons

Meeting Chairman

Board of Directors' Chairman's Meeting is stipulated as follows:

1. All meetings of Board of Directors are chaired by President Director;
2. In the event that President Director is Absent, Board of Directors' meeting shall be chaired by an Acting President Director/ Director appointed or authorized by President Director;
3. In the event that President Director does not make the appointment as described in point (c) above, then:
 - a. One of the longest-serving Directors in the office is appointed as chairman of Board of Directors' meeting;
 - b. In the event that the longest serving directors are more than 1 (one) person, then the longest serving Director and the oldest by age will act as the Chairman of Board of Directors' meeting.

Minutes of Meetings

Each Board of Directors meeting shall have minutes of meetings. The minutes of the meeting shall be signed by the meeting Chairman and all Directors who are present. Minutes of meetings shall be made and administered by the Corporate Secretary or other officers appointed by Board of Directors.

Minute Taker for Board of Director Meetings

The Minute Taker for Board of Directors Meetings is the EVP Corporate Secretary.

Board of Directors Meeting Plan

Board of Directors Meeting Plan has been stated in Board of Directors' Service Note Number SK.02/21/1/15/TUD/SPR/UT-19 dated January 21, 2019 regarding the Proposed BOD Meeting Agenda in 2019.



Tabel Rencana Rapat Direksi Tahun 2019

Board of Directors meeting plans for 2019

bulan Month	Agenda Rapat Meeting Agenda	Pelaksanaan Rapat Meeting Implementation
Januari January	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres Direktorat Komersial; 3. Laporan Dirbina; 4. Laporan Komite Investasi dan Manajemen Risiko; 5. Progres Pembangunan Matirime Tower; 6. Progres pembangunan dan pengembangan Terminal Kijing; 7. Optimalisasi penggunaan <i>second office</i>; 8. Tindak lanjut program <i>transshipment port/cargo consolidation by Regulation</i> dan peningkatan <i>cargo</i>; 9. Penyertaan modal rukindo, PPI dan PMLI, JPPI, IPC TPK; 10. Lain-lain. 	Minggu ke-2
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decisions & Pending Matters and Progress Reports of the Commercial Directorate; 3. Dirbina Report; 4. Investment and Risk Management Committee Report; 5. Matirime Tower Development Progress; 6. Progress of the construction and development of Kijing Terminal; 7. Optimizing the use of second office; 8. Follow up on the port/Cargo consolidation by Regulation transshipment program and cargo improvement; 9. Rukindo, PPI and PMLI, JPPI, IPC TPK capital investments; 10. Others. 	2 nd week
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Reviu Keputusan & <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres Direktorat Teknik; 3. <i>Progress</i> tindak lanjut audit; 4. Laporan Rutin RKM; 5. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2018; 6. Operator Terminal Kijing; 7. Rencana Pengerukan 2019; 8. <i>Creative Financing Approach</i>; 9. Standarisasi Banner Seluruh Cabang; 10. Implementasi Capex tahun 2018 area Kantor Pusat, Cabang dan Anak Perusahaan; 11. Pembahasan Materi Rapat Komisaris dan Direksi; 12. Lain-lain. 	Minggu ke-3
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decision & Pending Matters and Progress Report of Engineering Directorate; 3. Audit follow-up progress; 4. RKM Routine Report; 5. Financial Performance Achievements in 2018; 6. Kijing Terminal Operators; 7. The 2019 Dredging Plan; 8. Creative Financing Approach; 9. Standardization of All Branch Banners; 10. Implementation of 2018 Capex for Head Office, Branches and Subsidiaries; 11. Discussion of Material Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors; 12. Others. 	3 rd week

Tabel Rencana Rapat Direksi Tahun 2019
Board of Directors meeting plans for 2019

bulan Month	Agenda Rapat Meeting Agenda	Pelaksanaan Rapat Meeting Implementation
Februari	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Reviu Keputusan & Pending Matters dan Laporan Progres Direktorat Operasi; 3. Laporan Dirbina; 4. Laporan Progres PKB; 5. Laporan Progres Pengadaan; 6. Progres Proyek Strategis Nasional; 7. Kebijakan pelayanan kesehatan karyawan dengan BPJS Kesehatan; 8. Penyiapan SOP baru terkait Kebijakan Tata Naskah; 9. Lain-lain. 	Minggu ke-1
February	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decisions & Pending Matters and Progress Report of Operations Directorate; 3. Dirbina Report; 4. PKB Progress Report; 5. Procurement Progress Report; 6. National Strategic Projects progress; 7. Employee health service policy with Healthcare BPJS; 8. Preparation of new SOPs related to Manuscript Policy; 9. Others. 	1 st week
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Reviu Keputusan & Pending Matters dan Laporan Progres Direktorat Keuangan; 3. Blue print transformasi IPC sejalan dengan RJPP 2016-2021; 4. Pelindo Incorporated; 5. Desain Optimalisasi Aset; 6. Seleksi Operator PT 1 dan PT 2; 7. Implementasi digital port di cabang-cabang; 8. Implementasi Quality Control System, E-Service; 9. Pembangunan Kantin Karyawan; 10. Pembahasan Materi Rapat Komisaris dan Direksi; 11. Lain-lain. 	Minggu ke-3
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decision & Pending Matters and Progress Report of Finance Directorate; 3. The blueprint for the transformation of IPC is in line with 2016-2021 RJPP; 4. Pelindo Incorporated; 5. Asset Optimization Design; 6. PT 1 and PT 2 Operator Selection; 7. Digital port implementation in branches; 8. Implementation of Quality Control System, E-Service; 9. Construction of Employee Canteen; 10. Discussion of Material Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors; 11. Others. 	3 rd Week



Tabel Rencana Rapat Direksi Tahun 2019

Board of Directors meeting plans for 2019

bulan Month	Agenda Rapat Meeting Agenda	Pelaksanaan Rapat Meeting Implementation
Maret	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Reviu Keputusan & Pending Matters dan Laporan Progres Direktorat SDM; 3. Laporan Direktur Pembina Cabang Pelabuhan; 4. Tindak lanjut akuisisi/kerjasama pemanfaatan UPT; 5. Pembahasan Permasalahan Strategis Perusahaan; 6. Persiapan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2018; 7. Reviu SOP; 8. Progres Standarisasi Premises Tahun 2019; 9. Desain <i>Global Performance Excellence</i> untuk IPC; 10. Progres Restrukturisasi Anak Perusahaan; 11. Pembahasan Materi Rapat Komisaris dan Direksi; 12. Lain-lain. 	Minggu ke-1
March	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decision & Pending Matters and HC Directorate Progress Report; 3. Report of Port Branch Coaching Director; 4. Follow-up on acquisition/cooperation in utilization of UPT; 5. Discussion of the Company's Strategic Issues; 6. Preparation of GMS Annual Report for 2018 Fiscal Year; 7. Review SOP; 8. Premises Standardization Progress in 2019; 9. Design Global Performance Excellence for IPC; 10. Progress of Restructuring of Subsidiaries; 11. Discussion of Material Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors; 12. Others. 	1 st week
April	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Reviu Keputusan & Pending Matters dan Laporan Progres Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis; 3. Laporan Direktur Pembina Cabang Pelabuhan; 4. Capaian Kinerja Keuangan Triwulan I dan Rencana Kerja Triwulan II; 5. Laporan Rutin RKM; 6. Progres <i>Integrated Network Port Program</i>; 7. Penyelesaian Isu Strategis di Anak Perusahaan; 8. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Perusahaan Triwulan I; 9. Laporan Audit GCG Seluruh Anak Perusahaan; 10. <i>Grand Launching</i> dan program pengelolaan museum maritime; 11. Penyelesaian hutang piutang IPC Group; 12. Restrukturisasi Dana Pensiun DP4; 13. Pembahasan Materi Rapat Komisaris dan Direksi; 14. Lain-lain. 	Minggu ke-1
April	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decision & Pending Matters and Progress Report of Transformation and Business Development Directorate; 3. Report of Port Branch Coaching Director; 4. 1st Quarter Financial Results and 2nd Quarter Work Plan; 5. RKM Routine Report; 6. <i>Integrated Network Port Program</i> Progress; 7. Resolving Strategic Issues in Subsidiaries; 8. Report on the Activities of Corporate Secretary of First Quarter; 9. GCG Audit Report of All Subsidiaries; 10. <i>Grand Launching</i> and maritime museum management program; 11. Settlement of accounts payable to IPC Group; 12. Pension Funds DP4 Restructuring; 13. Discussion of Material Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors; 14. Others. 	1 st week

Tabel Rencana Rapat Direksi Tahun 2019
Board of Directors meeting plans for 2019

bulan Month	Agenda Rapat Meeting Agenda	Pelaksanaan Rapat Meeting Implementation
Mei	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Reviu Keputusan & Pending Matters dan Laporan Progres Direktorat Komersial; 3. Laporan Direktur Pembina Cabang Pelabuhan; 4. Tindak lanjut akuisisi KBS; 5. Progres jalan tol Cilincing/API dan pengembangannya; 6. Rencana Pengembangan Infrastruktur Cabang; 7. Persiapan penanganan arus barang dan penumpang terkait Idul Fitri; 8. Buffer Trucking di Pelabuhan Tanjung Priok; 9. Progres Monostatus Karyawan; 10. Mereviu seluruh proses quality control IPC Group; 11. Laporan Top List Risiko dan Mitigasinya; 12. Pembahasan Materi Rapat Komisaris dan Direksi; 13. Lain-lain. 	Minggu ke-2
May	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decision & Pending Matters and Commercial Directorate Progress Report; 3. Report of Port Branch Coaching Director; 4. Follow-up to the acquisition of KBS; 5. Cilincing/API toll road progress and development; 6. Branch Infrastructure Development Plan; 7. Preparation for handling the flow of goods and passengers related to Eid Fitri; 8. Buffer Trucking at Tanjung Priok Port; 9. Employee Monostatus Progress; 10. Review all IPC Group quality control processes; 11. Report on the Top List of Risks and Mitigation; 12. Discussion of Material Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors; 13. Others. 	2 nd week
Juni	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Reviu Keputusan & Pending Matters dan Laporan Progres Direktorat Teknik; 3. Laporan Direktur Pembina Cabang Pelabuhan; 4. Tindak lanjut komersialisasi Bojonegoro; 5. Ground breaking Maritime Tower; 6. Evaluasi Operasional Cabang dan Anak Perusahaan; 7. Tindak lanjut proses hedging; 8. Pembahasan Usulan Program SDM dan Kepegawaian; 9. Program golden handshake di tahun 2019; 10. Pengkajian bisnis development organic dan unorganic di Kantor Pusat, cabang dan Anak Perusahaan; 11. Pembahasan Materi Rapat Komisaris dan Direksi; 12. Lain-lain. 	Minggu ke-3
June	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decision & Pending Matters and Engineering Directorate Progress Report; 3. Report of Port Branch Coaching Director; 4. Follow up on Bojonegoro's commercialization; 5. Maritime Tower ground breaking; 6. Evaluation of Branch and Subsidiary Operations; 7. Follow up on the hedging process; 8. Discussion on HC and Staff Program Proposals; 9. The golden handshake program in 2019; 10. Assessment of organic and inorganic business development at Head Office, Branches and Subsidiaries; 11. Discussion of Material Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors; 12. Others. 	3 rd week



Tabel Rencana Rapat Direksi Tahun 2019

Board of Directors meeting plans for 2019

bulan Month	Agenda Rapat Meeting Agenda	Pelaksanaan Rapat Meeting Implementation
Juli July	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Reviu Keputusan & Pending Matters dan Laporan Progres Direktorat Operasi; 3. Laporan Direktur Pembina Cabang Pelabuhan; 4. Laporan Rutin RKM; 5. Capaian Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2019; 6. Komersialisasi Bojonegara; 7. Program Dweling Time; 8. Laporan Rencana Kerja Manajemen Semester I Tahun 2019; 9. Reviu Penanganan Arus Barang dan Penumpang setelah Idul Fitri; 10. Lain-lain. 	Minggu ke-1
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decision & Pending Matters and Operations Directorate Progress Report; 3. Report of Port Branch Coaching Director; 4. RKM Routine Report; 5. First Half of 2019 Financial Performance Achievements; 6. Bojonegara commercialization; 7. Dweling Time Program; 8. Report on the 2019 First Semester Management Work Plan; 9. Review of Handling Goods and Passenger Flow after Eid Fitri; 10. Others. 	1 st week
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Reviu Keputusan & Pending Matters dan Laporan Progres Direktorat Keuangan; 3. Progres Digital Port Project; 4. Progress KSMU Cabang dan Anak Perusahaan; 5. Perpres dan Pembangunan Pelabuhan Tg Carat, Tg Api-api dan KEK; 6. Pengelolaan Big Data Aktivitas Pelabuhan; 7. Tindak lanjut investment company/PT Pelabuhan Indonesia Investama; 8. Persiapan Kegiatan 17 Agustus 2019; 9. Program indeks kepuasan pegawai dan produktifitas; 10. Pembahasan materi Rapat Komisaris dan Direksi; 11. Lain-lain. 	Minggu ke-3
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decision & Pending Matters and Finance Directorate Progress Report; 3. Digital Port Project Progress; 4. Progress of KSMU Branch and Subsidiaries; 5. Presidential Regulation and Tg Carat, Tg Api-api Port Development and KEK; 6. Management of Big Data Port Activity; 7. Follow-up investment company/PT Pelabuhan Indonesia Investama; 8. Preparation for Independence Day August 17, 2019; 9. Employee satisfaction and productivity index program; 10. Discussion of Material Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors; 11. Others. 	3 rd week

Tabel Rencana Rapat Direksi Tahun 2019
Board of Directors meeting plans for 2019

bulan Month	Agenda Rapat Meeting Agenda	Pelaksanaan Rapat Meeting Implementation
Agustus	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Reviu Keputusan & Pending Matters dan Laporan Progres Direktorat SDM; 3. Pembahasan Permasalahan Strategis Perusahaan; 4. Laporan Progres Investasi Semester I 2019; 5. Seleksi Operator CT2 dan CT3; 6. Standardisasi Policy terkait mekanisme kerja BOC/BOD Anak Perusahaan; 7. Implementasi merger PT EDII dan PT ILCS; 8. Penyelesaian Masalah Hukum; 9. Mereviu seluruh proses quality control IPC Group; 10. Pembahasan Materi Rapat Komisaris dan Direksi; 11. Lain-lain. 	Minggu ke-1
August	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decision & Pending Matters and HC Directorate Progress Report; 3. Discussion of the Company's Strategic Issues; 4. 2019 First Semester Investment Progress Report; 5. CT2 and CT3 Operator Selection; 6. Policy standardization related to BoC/BoD work mechanism of Subsidiaries; 7. Implementation of PT EDII and PT ILCS mergers; 8. Legal Issues Resolution; 9. Review all IPC Group quality control processes; 10. Discussion of Material Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors; 11. Others. 	1 st week
September	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Reviu Keputusan & Pending Matters dan Laporan Progres Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis; 3. Laporan Dirbina; 4. Laporan Pembangunan dan Pengelolaan Common Gate; 5. Laporan Proyek Strategis Perusahaan; 6. Laporan Program Sister Port; 7. Reviu Program transformasi di seluruh direktorat; 8. Pembahasan Materi Rapat Komisaris dan Direksi; 9. Lain-lain. 	Minggu ke-1
September	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decision & Pending Matters and Transformation and Business Development Directorate Progress Report; 3. Report of Port Branch Coaching Director; 4. Common Gate Development and Management Report; 5. The Company's Strategic Project Report; 6. Sister Port Program Report; 7. Review of Transformation Program in all directorates; 8. Discussion of Material Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors; 9. Others. 	1 st week



Tabel Rencana Rapat Direksi Tahun 2019

Board of Directors meeting plans for 2019

bulan Month	Agenda Rapat Meeting Agenda	Pelaksanaan Rapat Meeting Implementation
Oktober	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Reviu Keputusan & Pending Matters dan Laporan Progres Direktorat Komersial; 3. Laporan Direktur Pembina Cabang Pelabuhan; 4. Laporan Rutin RKM; 5. Capaian Kinerja Keuangan Triwulan III dan Rencana kerja Triwulan IV; 6. Laporan Rencana Kerja manajemen sampai dengan Triwulan III 2019; 7. Implementasi Sistem Informasi Keuangan/dashboard IPC Group; 8. Implementasi IBS Sistem Seluruh Indonesia; 9. Progres dan reviu implelementasi E-payment di IPC Group; 10. Reviu bisnis model IPC Group secara menyeluruh; 11. Pembahasan Materi Rapat Komisaris dan Direksi; 12. Lain-lain. 	Minggu ke-1
October	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decision & Pending Matters and Commercial Directorate Progress Report; 3. Report of Port Branch Coaching Director; 4. RKM Routine Report; 5. Milestones in Financial Performance in the Third Quarter and Work Plan for the Fourth Quarter; 6. Management Work Plan Report until the Third Quarter of 2019; 7. Implementation of IPC Group Financial Information System/dash board; 8. Implementation of iBS System throughout Indonesia; 9. Progress and review of e-Payment implementation in IPC Group; 10. Overall review of IPC Group business model; 11. Discussion of Material Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors; 12. Others. 	1 st week

Tabel Rencana Rapat Direksi Tahun 2019
Board of Directors meeting plans for 2019

bulan Month	Agenda Rapat Meeting Agenda	Pelaksanaan Rapat Meeting Implementation
November	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Reviu Keputusan & Pending Matters dan Laporan Progres Direktorat Teknik; 3. Progres Proyek Strategis; 4. Laporan <i>Global Performance Excellence</i> untuk IPC; 5. Pembahasan Finalisasi Usulan RKAP Tahun 2020; 6. Persiapan Hari Ulang Tahun IPC; 7. Tindak lanjut pengelolaan PKBL; 8. Pembahasan Persiapan RUPS RKAP Tahun 2019; 9. Pembahasan Materi Rapat Komisaris dan Direksi; 10. Lain-lain. 	Minggu ke-1
November	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decision & Pending Matters and Engineering Directorate Progress Report; 3. Strategic Project Progress; 4. The Global Performance Excellence Report for IPC; 5. Discussion on the Finalization of the Proposed 2020 RKAP; 6. IPC Anniversary Preparation; 7. Follow up management of PKBL; 8. Discussion on the Preparation of 2019 RKAP GMS; 9. Discussion of Material Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors; 10. Others. 	1 st week
Desember December	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Reviu Keputusan & Pending Matters dan Laporan Progres Direktorat Operasi; 3. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; 4. Persiapan Penanganan Arus Barang dan Penumpang terkait Natal dan Tahun Baru; 5. Sertifikasi asset perusahaan; 6. Progres pembangunan pelabuhan Sorong, Tanjung Carat, Tanjung Api-Api dan KEK; 7. Lain-lain. 	Minggu ke-1
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decision & Pending Matters and Operations Directorate Progress Report; 3. Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration; 4. Preparation for Handling Goods and Passenger Flow related to Christmas and New Year; 5. Company asset certification; 6. Progress of construction of Sorong, Tanjung Carat, Tanjung Api-Api and KEK ports; 7. Others. 	1 st week
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Reviu Keputusan & Pending Matters dan Laporan Progres Direktorat Keuangan; 3. Capaian Kinerja Tahun 2019; 4. Progres Implementasi Capex tahun 2019; 5. Laporan Rencana Kerja Manajemen tahun 2020; 6. Progres RKM Strategis; 7. Pembahasan Materi Rakomdir; 8. Lain-lain. 	Minggu ke-3
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Review of Decision & Pending Matters and Finance Directorate Progress Report; 3. 2019 Performance Results; 4. Capex Implementation Progress in 2019; 5. Management Work Plan Report 2020; 6. Strategic RKM Progress; 7. Discussion on BoC - BoD Meeting Materials; 8. Others. 	3 rd week



Realisasi Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2019, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Board of Directors Meeting Realization

For 2019, Board of Directors Meeting agenda, dates and participants were as follows

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
1.	8 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Laporan Komite Investasi dan manajemen Risiko terkait Investasi diatas Rp50 Miliar; Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga Kalibaru oleh BPKP; Progress Pembangunan Maritime Tower; Pemaparan Progres Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing; Tindak Lanjut Program <i>Transshipment Port/Cargo Consolidation by Regulation</i> dan Peningkatan Cargo; Penyertaan Modal Rukindo, PPI dan PMLI, JPPI, IPC TPK; Optimalisasi Penggunaan <i>Second Office</i>. 	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
			Saptono R. Irianto	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Hadir Present	
			Prasetyadi	Hadir Present	
			Widyaka Nusapati	Hadir Present	
			Rizal Ariansyah	Hadir Present	
	January 8, 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Investment and Risk Management Committee Reports related to Investment above Rp 50 billion; Audit Report on Adjustment of Kalibaru Prices by BPKP; Progress of Maritime Tower Construction; Presentation of Progress and Development of Kijing Terminal; Follow up of the Port/Cargo Transshipment Consolidation by Regulation and Cargo Enhancement Program; Rukindo, PPI and PMLI, JPPI, IPC TPK capital investments; Optimizing the Use of Second Office. 			
2.	15 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Operator Terminal Kijing; Lain-lain. 	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
			Saptono R. Irianto	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Hadir Present	
			Prasetyadi	Hadir Present	
			Widyaka Nusapati	Hadir Present	
	January 15, 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Kijing Terminal Operators; Others. 	Rizal Ariansyah	Tidak Hadir Absent	Menghadiri rapat dengan Kementerian BUMN Attended meeting with Ministry of SOE

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
3.	24 Januari 2019	1. CEO Direction; 2. Rencana Pengerukan 2019; 3. Rencana Pelaksanaan Investasi KSO Koja; 4. Plan Program Publisitas/Wawancara BOD.	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
	January 24, 2019	1. CEO Direction; 2. Dredging Plan 2019; 3. Koja KSO Investment Implementation Plan; 4. Publicity Program Plan/BoD Interview.	Saptono R. Irianto	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Hadir Present	
			Prasetyadi	Tidak Hadir Absent	Menghadiri rapat dengan Kementerian BUMN Attended meeting with Ministry of SOE
			Widyaka Nusapati	Hadir Present	
			Rizal Ariansyah	Tidak Hadir Absent	Menghadiri rapat dengan Kementerian BUMN Attended meeting with Ministry of SOE
4.	30 Januari 2019	1. CEO Direction; 2. Pembahasan Materi BOD - BOC Meeting; 3. Standarisasi Banner untuk Visi/Roadmap/Culture di seluruh cabang; 4. Laporan Progres Perjanjian Kerja Bersama; 5. Laporan Progres Pengadaan; 6. Lain-lain.	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
	January 30, 2019	1. CEO Direction; 2. Discussion on BoD - BoC Meeting Material; 3. Standardization of Banners for Vision/Roadmap/Culture in all branches; 4. Collective Labour Agreement Progress Report; 5. Procurement Progress Report; 6. Others.	Saptono R. Irianto	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Hadir Present	
			Prasetyadi	Hadir Present	
			Widyaka Nusapati	Hadir Present	
			Rizal Ariansyah	Hadir Present	



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
5.	20–21 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Reviu Keputusan dan Pending Matters masing-masing Direktorat; Laporan Direktur Pembina Cabang Pelabuhan; Progres Penyelesaian Aset Bermasalah IPC; Format Optimalisasi Aset atau Revenue Creativity per Cabang; Langkah Tindak Lanjut MoU antara IPC dengan Pemerintah Daerah; New Model Project Cikarang Bekasi Laut berdasarkan Perpres Nomor 55 tahun 2018; Finalisasi Implementasi Capex tahun 2019; Laporan Progres Hasil Kesepakatan Bersama Direktur Teknik Pelindo I, II, III, IV; Inisiatif Usulan Pemanfaatan Visit VIP Boat; Digitalisasi Cabang Tahun 2019; Kepemilikan Saham di PT TPI; Lain-lain. 	Elvyn G. Masassya Saptono R. Irianto Dani Rusli Utama Prasetyadi Widhyaka Nusapati Rizal Ariansyah	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
	February 20–21, 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Decision of Review and Pending Matters of each Directorate; Report of Port Branch Coaching Director; IPC Problem Asset Settlement Progress; Format for Optimizing Assets or Revenue Creativity per Branch; Follow-up Steps to the MoU between IPC and Regional Government; New Model Cikarang Bekasi Laut Project based on Presidential Decree Number 55 of 2018; Finalization of Capex Implementation in 2019; Progress Report on Joint Agreement Results for Pelindo I, II, III, IV Technical Director; Proposed Initiative on the Use of Visit VIP Boat; Digitizing Branches in 2019; Share Ownership in PT TPI; Others. 			
6.	27 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Pembahasan Materi Rapat Komisaris dan Direksi Februari 2019; Progres dan Persetujuan Financial Issue PKB; Lain-lain. 	Elvyn G. Masassya Saptono R. Irianto Dani Rusli Utama	Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
	February 27, 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Discussion of Material Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors on February 2019; Progress and Approval of PKB Financial Issue; Others. 	Prasetyadi Widhyaka Nusapati Rizal Ariansyah	Hadir Present Hadir Present Hadir Present	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
7.	12 Maret 2019	1. <i>CEO Direction;</i> 2. Remunerasi GM Cabang, EVP/SVP/VP; 3. Tindak Lanjut Akuisisi KBS; 4. Penyelesaian Temuan BPK; 5. Rencana Kerja Sama Penanganan Barang <i>Smelter Grade Alumina Refinery</i> di Pelabuhan Kijing); 6. Restrukturisasi & Transformasi PT PII, PT PPI, PT JPPI, PT EDII, PT EPI & PT PMLI; 7. Program <i>Buy Back Global Bond</i> .	Elvyn G. Masassya Dani Rusli Utama Prasetyadi Widyaka Nusapati	Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
	March 12, 2019	1. CEO Direction; 2. Remuneration for GM Branch, EVP/SVP/VP; 3. Follow-Up to KBS Acquisition; 4. Settlement of BPK Findings; 5. Project for the Handling of Smelter Grade Alumina Refinery Goods in Kijing Port; 6. Restructuring & Transformation of PT PII, PT PPI, PT JPPI, PT EDII, PT EPI & PT PMLI; 7. Global Bond Buy Back Program.	Rizal Ariansyah	Hadir Present	
8.	19 Maret 2019	1. <i>CEO Direction;</i> 2. Pembangunan Jalan Akses Kalibaru (<i>Eastern Access</i>); 3. <i>Progress</i> Jalan Tol Cilincing - Cibitung termasuk Rencana Pengembangan TOD (Aspek <i>Financing</i> , dan lain-lain); 4. Pengelolaan <i>Security System</i> di Lingkungan Pelabuhan (Jadwal pada masing-masing Cabang); 5. Restrukturisasi & Transformasi PT PII, PT PPI, PT JPPI, PT EDII, PT EPI & PT PMLI; 6. Penyelesaian Masalah Pajak; 7. Standarisasi Premises (<i>timeline</i> implementasi pada seluruh cabang serta hal-hal yang akan dilakukan); 8. Tindak Lanjut Audit SDM; 9. Update Rencana <i>Share Service</i> Pengadaan; 10. <i>Progress</i> Pelindo <i>Incorporated</i> ; 11. Tindak Lanjut Rencana Pengembangan Kawasan Pelabuhan di Sumatera dengan JTTS; 12. Lain-lain.	Elvyn G. Masassya Dani Rusli Utama Prasetyadi Widyaka Nusapati Rizal Ariansyah	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
	March 19, 2019	1. CEO Direction; 2. Construction of Kalibaru Access Road (Eastern Access); 3. Progress of Cilincing - Cibitung Toll Road including TOD Development Plan (Financing Aspect, etc.); 4. Security System Management in the Port Environment (Schedule for each Branch); 5. Restructuring and Transformation of PT PII, PT PPI, PT JPPI, PT EDII, PT EPI & PT PMLI; 6. Tax Issue Resolution; 7. Standardization of Premises (implementation timeline for all branches and things to be done); 8. HC Audit Follow Up; 9. Update on Procurement Share Service Plans; 10. Pelindo Incorporated Progress; 11. Follow-up to the Port Area Development Plan in Sumatra with JTTS; 12. Others.			



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence	
9.	20 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>CEO Direction;</i> 2. <i>Pembahasan Materi Rapat Komisaris dan Direksi;</i> 3. <i>Lain-lain.</i> 	Elvyn G. Masassya	Hadir Present		
	March 20, 2019		Dani Rusli Utama	Hadir Present		
			Prasetyadi	Hadir Present		
			Widyaka Nusapati	Hadir Present		
			Rizal Ariansyah	Hadir Present		
10.	4 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>CEO Direction;</i> 2. <i>Progress Physical presence/Appearance diseluruh Cabang pada BOD Meeting;</i> 3. <i>Mekanisme Akuisisi KBS termasuk timeline- nya;</i> 4. <i>Standarisasi Premises Linkage dengan Physical Appearance;</i> 5. <i>Modul Manajemen Talenta, Modul Kompetensi dan Pengelolaan Karir;</i> 6. <i>Update Progress Pelindo Incorporated dan Holding Maritim;</i> 7. <i>Lain-lain (Scanner X-Ray);</i> 8. <i>Bonus Karyawan.</i> 	Elvyn G. Masassya	Hadir Present		
	April 4, 2019		Dani Rusli Utama	Hadir Present		
			Prasetyadi	Hadir Present		
			Widyaka Nusapati	Hadir Present		
			Rizal Ariansyah	Hadir Present		

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
11.	9 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Program Pengenalan Perusahaan bagi Direksi Baru; Tindak Lanjut Laporan PDTT BPK; Pembangunan Terminal Kijing (<i>timeline action</i> Pembangunan Terminal Kijing dan KEK); Perpres CBL dikaitkan dengan Perpres No. 55 tahun 2018 (Elaborasi berbagai Opsi); Perpres dan Pembangunan Pelabuhan Tg Carat (Rencana Teknik); Progress dan Plan Transshipment; Lain-lain. 	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
			Arif Suhartono	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Hadir Present	
			Prasetyadi	Hadir Present	
			Widyaka Nusapati	Hadir Present	
			Rizal Ariansyah	Hadir Present	
	April 9, 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Company Introduction Program for New Directors; Follow-up to BPK PDTT Report; Construction of Kijing Terminal (timeline for construction of Kijing Terminal and KEK); CBL Presidential decree is associated with Presidential decree No.55 in 2018 (Elaboration of various options); Presidential decree and Tg Carat Port Development (Engineering Plan); Progress and Transshipment Plan; Others. 	Ogi Rulino	Hadir Present	



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
12.	16 April 2019	1. <i>CEO Direction</i> ;	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
		2. <i>Progress</i> Pengelolaan Data Manajemen Aset IPC;	Arif Suhartono	Hadir Present	
		3. <i>Progress</i> Program <i>Un-Organic Growth</i> Komersial;	Dani Rusli Utama	Hadir Present	
		4. <i>Reviu</i> KSMU per Cabang/Terminal/ Anak Perusahaan;	Prasetyadi	Hadir Present	
		5. <i>Template</i> Perangkat Analisis Komersial;	Widyaka Nusapati	Hadir Present	
		6. <i>Konsep</i> <i>Green Port</i> ;	Rizal Ariansyah	Hadir Present	
		7. <i>Progress</i> Pengelolaan Peralatan IPC;	Ogi Rulino	Hadir Present	
		8. <i>Program</i> <i>Cyber Security</i> IPC;			
		9. <i>Tinjauan</i> Manajemen Implementasi ISO 14001:2015;			
		10. <i>Penyelesaian</i> Hutang Piutang Afiliasi IPC Group;			
		11. <i>Penggunaan</i> Proceed IPO JAI dan IKT;			
		12. <i>Laporan</i> Rekrutmen <i>Fresh Graduate</i> , Pandu dan TNO;			
		13. <i>Disiplin</i> Jam Kerja Karyawan;			
		14. <i>Reviu</i> SOP IPC Group;			
		15. <i>Risk Management Report</i> Triwulan I 2019;			
		16. <i>Lain-lain</i> .			
	April 16, 2019	1. <i>CEO Direction</i> ; 2. <i>IPC Asset Management Data Management Progress</i> ; 3. <i>Commercial Un-Organic Growth Program Progress</i> ; 4. <i>KSMU Review</i> per Branch/Terminal/Subsidiary; 5. <i>Commercial Analysis Tool Template</i> ; 6. <i>Green Port Concept</i> ; 7. <i>IPC Equipment Management Progress</i> ; 8. <i>IPC Cyber Security Program</i> ; 9. <i>Management Review of ISO 14001:2015 Implementation</i> ; 10. <i>IPC Group Affiliated Accounts Payable Settlement</i> ; 11. <i>Use of JAI and IKT IPO Proceed</i> ; 12. <i>Fresh Graduate, Pilotage and TNO Recruitment Reports</i> ; 13. <i>Discipline of Employee Working Hours</i> ; 14. <i>Review IPC Group SOP</i> ; 15. <i>1st quarter of 2019 Risk Management Report</i> ; 16. <i>Others</i> .			

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
13.	23 April 2019	1. <i>CEO Direction</i> ; 2. Pembahasan Materi Rakomdir; 3. Realisasi Capex IPC, Anak Perusahaan dan Cabang per Triwulan I 2019; 4. <i>Progress Digital Port</i> per Cabang; 5. Persiapan Mudik Lebaran; 6. Hasil Reviu Sesdekam Anak Perusahaan; 7. <i>Progress</i> Pembangunan Kantin, Ruang Musik, dan Seragam Baru IPC; 8. <i>Progress</i> Pembenahan Kantor Pusat IPC; 9. Program Restrukturisasi DP4; 10. Penyedia <i>Container Scanner</i> ; 11. Lain-lain.	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
	April 23, 2019	1. CEO Direction; 2. Discussion on BoD - BoC Meeting Material; 3. Realization of Capex IPC, Subsidiaries and Branches as of First Quarter of 2019; 4. Digital Port Progress per Branch; 5. Preparation for Eid Mubarak; 6. Results of Secretary of Board of Commissioners of Subsidiary Review; 7. Progress of IPC Canteen, Music Room and New Uniform Development; 8. Progress of Improving IPC Head Office; 9. DP4 Restructuring Program; 10. Container Scanner Provider; 11. Others.	Arif Suhartono Dani Rusli Utama Prasetyadi Widyaka Nusapati Rizal Ariansyah Ogi Rulino	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
14.	3-4 Mei 2019	1. <i>CEO Direction</i> ; 2. Reviu Keputusan dan <i>Pending Matters</i> dan Laporan Progres Direktorat; 3. <i>Progress</i> RKM Triwulan I/ 2019; 4. <i>Draft RJPP 2020-2024</i> ; 5. <i>Area for Improvement</i> GCG, KPKU.	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
	May 3-4 2019	1. CEO Direction; 2. Review of Decision and Pending Matters and Directorate Progress Report; 3. RKM Progress in First Quarter of 2019; 4. 2020-2024 RJPP draft; 5. Area for Improvement of GCG, KPKU.	Arif Suhartono Dani Rusli Utama Prasetyadi Widyaka Nusapati Rizal Ariansyah Ogi Rulino	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
15.	14 Mei 2019	1. <i>CEO Direction;</i> 2. <i>Restrukturisasi/Transformasi Anak Perusahaan (In-Detail);</i> 3. <i>Program Creative Financing;</i> 4. <i>Non Operating Income Stream;</i> 5. <i>Progress Penyelesaian Hutang Piutang Anak Perusahaan (Per Perusahaan dengan IPC);</i> 6. <i>Progress Addendum Proyek Kalibaru.</i>	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
			Arif Suhartono	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Hadir Present	
			Prasetyadi	Hadir Present	
			Widyaka Nusapati	Hadir Present	
			Rizal Ariansyah	Hadir Present	
	May 14, 2019	1. <i>CEO Direction;</i> 2. <i>Restructuring/Transforming Subsidiaries (In-Detail);</i> 3. <i>Creative Financing Program;</i> 4. <i>Non Operating Income Stream;</i> 5. <i>Progress of Subsidiary Debt Settlement (Per Company with IPC);</i> 6. <i>Kalibaru Project Addendum Progress.</i>	Ogi Rulino	Hadir Present	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
16.	21 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Action Plan Revenue Creativity; 3. Progress dan Rekomendasi Penyelesaian Aset Bermasalah; 4. Progress Next Step Akuisisi KBS; 5. Progress Pending Matters Komersial Anak Perusahaan dengan IPC; 6. Action Plan Heritage Port; 7. Tindak Lanjut Hasil Pembahasan Piutang Afiliasi PT PPI dengan IPC atas Biaya Konsultan Periode 1 Januari 2014 sampai dengan Juni 2018; 8. Progress Elektrifikasi Peralatan; 9. Action Plan Next Steps Proyek Kalibaru dan Eastern Access; 10. Action Plan/ Sinkronisasi Antar Direktorat Terkait Proyek Kijing, Tg Carat, Sorong, CBL; 11. Dashboard Information System; 12. Persiapan Mudik Cabang Pelabuhan; 13. Laporan keuangan Konsolidasi IPC s.d April 2019; 14. Action Plan Creative Financing; 15. Action Plan Reformat Balance Sheet Structure; 16. Progress Penyelesaian Utang Piutang Anak Perusahaan (Per Perusahaan) dengan IPC; 17. Progress Divestasi PT TPI; 18. Progress Pending Matters Kebijakan SDM; 19. Progress Program Mono Status dan Golden Shake Hand; 20. Progress Peminjaman Mobile Crane; 21. Lain-lain. 	<p>Elvyn G. Masassya</p> <hr/> <p>Arif Suhartono</p> <hr/> <p>Dani Rusli Utama</p> <hr/> <p>Prasetyadi</p> <hr/> <p>Widyaka Nusapati</p> <hr/> <p>Rizal Ariansyah</p> <hr/> <p>Ogi Rulino</p>	<p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p>	
	May 21, 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Action Plan Revenue Creativity; 3. Progress and Recommendations for Troubled Asset Settlement; 4. Progress Next Step Acquisition of KBS; 5. Progress Pending Commercial Matters A subsidiary of IPC; 6. Heritage Port Action Plan; 7. Follow-Up Results of Discussion on PT PPI Affiliated Receivables with IPC for Consultant Fees for January 1, 2014 to June 2018 Period; 8. Electrification Equipment Progress; 9. Action Plan Next Steps for Kalibaru and Eastern Access Projects; 10. Action Plan/Synchronization among Directorates Related to Kijing Project, Tg Carat, Sorong, CBL; 11. Information System Dashboard; 12. Preparation of Eid Mubarak of Port Branch; 13. IPC Consolidated financial statements until April 2019; 14. Creative Financing Action Plan; 15. Action Plan Reformat Balance Sheet Structure; 16. Progress of Debt Settlement of Subsidiary Debt (Per Company) with IPC; 17. PT TPI Divestment Progress; 18. Pending Matters on HC Policy Progress; 19. Mono Status and Golden Shake Hand Program Progress; 20. Mobile Crane Loan Progress; 21. Others. 			



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
17.	28 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>CEO Direction;</i> 2. Pembahasan Materi Rapat Komisaris dan Direksi; 3. <i>Progress Pending Matters</i> Kebijakan SDM. 	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
	May 28, 2019		Arif Suhartono	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Hadir Present	
			Prasetyadi	Hadir Present	
			Widyaka Nusapati	Hadir Present	
			Rizal Ariansyah	Hadir Present	
	Ogi Rulino		Hadir Present		
18.	31 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>CEO Direction;</i> 2. <i>Action Plan Revenue Creativity;</i> 3. <i>Action Plan Heritage Port;</i> 4. Tindak Lanjut Patimban Port; 5. Inisiasi Baru dibidang Operasional; 6. <i>Progress Restrukturisasi Anak Perusahaan;</i> 7. <i>Program Creative Financing;</i> 8. <i>Progress Increasing Non Operating Income Stream;</i> 9. <i>Progress Penyelesaian Hutang Piutang Anak Perusahaan Anak Perusahaan (per Perusahaan) dengan IPC;</i> 10. Program Kerja MMI dan API; 11. Persetujuan Desain Studio Musik; 12. Pembahasan Jaminan Pelaksanaan PT PP untuk Proyek Kalibaru; 13. <i>Progress Addendum Perjanjian Kalibaru;</i> 14. Reviu Seluruh VP; 15. Laporan PKBL Periodik; 16. Program Sekretariat Tetap Pelindo. 	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
	May 31, 2019		Arif Suhartono	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Hadir Present	
			Prasetyadi	Hadir Present	
			Widyaka Nusapati	Hadir Present	
			Rizal Ariansyah	Hadir Present	
			Ogi Rulino	Tidak Hadir Absent	
			Ogi Rulino	Tidak Hadir Absent	
			Ogi Rulino	Tidak Hadir Absent	
			Ogi Rulino	Tidak Hadir Absent	
			Ogi Rulino	Tidak Hadir Absent	
			Ogi Rulino	Tidak Hadir Absent	
			Ogi Rulino	Tidak Hadir Absent	
			Ogi Rulino	Tidak Hadir Absent	
			Ogi Rulino	Tidak Hadir Absent	
			Ogi Rulino	Tidak Hadir Absent	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
19.	11 Juni 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Action Plan Revenue Creativity; Progress dan Rekomendasi Penyelesaian Aset Bermasalah; Progress Pending Matters Komersial Anak Perusahaan dengan IPC; Tindak Lanjut Kerja Sama IPC - PPI - NPCT1; Finalisasi Kerja Sama JICT; Restrukturisasi PT JPPI; Progress Increasing Non Operating Income Stream; Action Plan Divestasi TPI; SOP Pengembangan Bisnis Baru; Progress Sinergi BUMN; Progress Pelindo Incorporated; Lain-lain. 	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
			Arif Suhartono	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Hadir Present	
			Prasetyadi	Tidak Hadir Absent	Menghadiri sidang IMO- MSC di luar negeri Attended IMO- MSC court overseas
			Widyaka Nusapati	Hadir Present	
	June 11, 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Action Plan Revenue Creativity; Progress and Recommendations for Troubled Asset Settlement; Progress of Pending Commercial Matters of Subsidiaries with IPC; Follow up on IPC-PPI-NPCT1 Cooperation; Finalization of JICT Cooperation; PT JPPI Restructuring; Progress of Increasing Non Operating Income Stream; TPI Divestment Action Plan; SOP for New Business Development; SOE Synergy Progress; Pelindo Incorporated Progress; Others. 	Rizal Ariansyah	Hadir Present	
			Ogi Rulino	Hadir Present	



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
20.	25 Juni 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Executive Update BI & Analytics; 3. Hasil Kajian Konsultan Aktuaris atas Kinerja DP4; 4. Potensi sumber-sumber Pendapatan Non Operasi; 5. Progress Manajemen Aset; 6. Action Plan/Sinkronisasi Kijing Port dengan KEK Kijing; 7. Action Plan Heritage Port; 8. Program Zero Congestion, Physical Appearance (port bersih dan steril); 9. Road Map Digital Port Ecosystem IPC (Tahap Inisiasi); 10. Implementasi E-Service untuk pelayanan non petikemas/6 elemen (e-registration, e-booking, e-tracing, e-payment, e-billing,e-care); 11. Standarisasi Kebijakan Tata Naskah IPC Group (Sms I); 12. Kebijakan Pelayanan Kesehatan Karyawan dengan BPJS Kesehatan; 13. Penggunaan Dana Zakat, Infak & Sedekah; 14. Opsi Kendaraan Dinas Direksi; 15. Mekanisme Pengelolaan PT1 dan PT2; 16. Usulan Pengembangan KEK Bengkulu, Tg Carat, Tg Lesung, dan Kijing; 17. Pengkajian Bisnis Development Organic dan Unorganic di Kantor Pusat, Cabang dan Anak Perusahaan. 	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
			Arif Suhartono	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Tidak Hadir Absent	Cuti On leave
			Prasetyadi	Hadir Present	
			Widyaka Nusapati	Hadir Present	
			Rizal Ariansyah	Hadir Present	
			Ogi Rulino	Hadir Present	
	June 25, 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. BI & Analytics Executive Update; 3. Results of Actuary Consultant Study on DP4 Performance; 4. Potential sources of non-operating income; 5. Asset Management Progress; 6. Action Plan/Synchronization of Kijing Port with KEK Kijing; 7. Heritage Port Action Plan; 8. Zero Congestion Program, Physical Appearance (clean and sterile port); 9. IPC Digital Port Ecosystem Road Map (Initiation Phase); 10. Implementation of E-Service for non-container services/6 elements (e-registration, e-booking, e-tracing, e-payment, e-billing, e-care); 11. Standardization of IPC Group Manuscript Policy (Sms I); 12. Employee Health Service Policy with Healthcare BPJS; 13. Use of Zakat, Infak & Sedekah Funds; 14. Directed Service Vehicle Options; 15. PT1 and PT2 Management Mechanisms; 16. Proposed Development of Bengkulu SEZ, Tg Carat, Tg Lesung, and Kijing; 17. Study of Organic and Inorganic Business Development at Head Office, Branches and Subsidiaries; 			

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
21.	2 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Plan dan Timeline Lelang CT2-3; Finalisasi JICT; Pemetaan Secara final Potensi Aset yang dapat menjadi Pendapatan <i>Non Recurring</i> di 12 Cabang; Usulan Pola Operasi Curah Kering di Pelabuhan Banten; Dividen <i>Pay Out Ratio</i> dan Tantiem Anak Perusahaan Organisasi Cabang Pasca <i>Spin Off</i>; Plan Town Hall Meeting; Penyegaran BOD-2; Hasil Kajian Standarisasi Premises; Lain-lain. 	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
			Arif Suhartono	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Tidak Hadir Absent	Cuti On leave
			Prasetyadi	Hadir Present	
			Widyaka Nusapati	Tidak Hadir Absent	Sakit Sick
			Rizal Ariansyah	Hadir Present	
	July 2, 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; CT2-3 Auction Plan and Timeline; Finalization of JICT; Final Mapping of Potential Assets that can become Non Recurring Revenues in 12 Branches; Proposed Pattern of Dry Bulk Operation in the Port of Banten; Dividend Pay Out Ratio and Subsidiary Tantiem; Post Spin Off Branch Organization; Plan Town Hall Meeting; 2nd Refreshment of BoD; Premises Standardization Study Results; Others. 	Ogi Rulino	Tidak Hadir Absent	Pelatihan Training



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
22.	9 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Tindak Lanjut Pengelolaan Batam; 3. Komersialisasi <i>Buffer Trucking ex Pacific Paint</i>; 4. Tindak Lanjut Penumpukan Kontainer <i>Long Stay</i> milik PT Djakarta Llyod dan rencana Optimalisasi Pelabuhan Nipah Kuning; 5. Target Optimalisasi <i>Idle</i> Aset per Cabang 2019; 6. Perpres dan Pembangunan CBL; 7. Kerja Sama dengan Puslitbang PUPR tentang Kajian Coastal dan Sedimentasi Bengkulu; 8. <i>Progress</i> Relokasi Jalan Proyek Kijing; 9. <i>Progress</i> Penyertaan Modal di Anak Perusahaan; 10. Proyeksi Laporan Keuangan IPC, Cabang dan Anak Perusahaan Per Juni 2019; 11. <i>Progress Merger</i> PT EDII & PT ILCS; 12. <i>Dividen Pay Out Ratio</i> dan <i>Tantiem</i> Anak Perusahaan; 13. <i>SOP Pooling Fund IPC Group</i> di PII; 14. <i>Plan Capex</i> dan Sumber Pembiayaannya 2020-2024. 	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
			Arif Suhartono	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Hadir Present	
			Prasetyadi	Hadir Present	
			Widyaka Nusapati	Hadir Present	
			Rizal Ariansyah	Tidak Hadir Absent	Sakit Sick
			Ogi Rulino	Hadir Present	
	July 9, 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Follow-up Management of Batam port; 3. Commercialization of <i>ex Pacific Paint Buffer Trucking</i>; 4. Follow up of PT Djakarta Llyod Long Stay Container Stacking and Optimization of Nipah Kuning Port; 5. Target Optimization of Asset Idle per Branch 2019; 6. Presidential Decree and CBL Development; 7. Collaboration with PUPR Research and Development Center for Bengkulu Coastal and Sedimentation Studies; 8. Progress Relocation of Kijing Road Project; 9. Progress of Equity Participation in Subsidiaries; 10. Projection of IPC, Branch and Subsidiary Financial Statements as of June 2019; 11. Progress of Merger PT EDII & PT ILCS; 12. Dividend Pay Out Ratio and Tantiem Anak Perusahaan; 13. IPC Group Pooling Fund SOP in PII; 14. Capex Plan and Financing Sources 2020-2024. 			

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
23.	17 Juli 2019 July 17, 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Progress Penyertaan Modal di Anak Perusahaan; 3. Persetujuan Akuisisi Port Related Business (Whale Project) PT PII; 4. Tindaklanjut Rekomendasi BPK; 5. Tindaklanjut Rekomendasi SPI; 6. Pembangunan CBL; 7. Ganti Rugi Lahan Jalan Tol Priok; 8. Action Plan Optimalisasi Lahan Per Cabang; 9. Port Bisnis Kijing; 10. Plan Penyesuaian tarif Per Cabang; 11. Progress Pengakuan Aset Komersial; 12. Persiapan operatorship dan peralatan kijing; 13. Usulan Revisi RKA Investasi Perusahaan Tahun 2019; 14. Progress Capex Cabang dan Anak Perusahaan sampai dengan Juni 2019; 15. Usulan Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan di Kantor Pusat; 16. Progress Pembangunan Menara Maritim; 17. Action Plan Green Port; 18. Progress Kalibaru dan Eastern Access; 19. Kerja Sama dengan Puslitbang PUPR tentang kajian Coastal dan Sedimentasi Bengkulu; 20. Plan Operasionalisasi JICT2; 21. Laporan Potensi Pendapatan dari Digitalisasi Cabang; 22. Progress IBS Pelindo; 23. Laporan Progress Kerja Sama Batu Ampar Batam. 	<p>Elvyn G. Masassya</p> <p>Arif Suhartono</p> <p>Dani Rusli Utama</p> <p>Prasetyadi</p> <p>Widyaka Nusapati</p> <p>Rizal Ariansyah</p> <p>Ogi Rulino</p>	<p>Tidak Hadir Absent</p> <p>Hadir Present</p> <p>Hadir Present</p> <p>Hadir Present</p> <p>Hadir Present</p> <p>Hadir Present</p> <p>Hadir Present</p> <p>Hadir Present</p>	<p>Menghadiri penugasan lain Attended other assignment</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. Progress of Equity Participation in Subsidiaries; 3. Approval of PT PII's Port Related Business (Whale Project) Acquisition; 4. Follow up on BPK's recommendations; 5. Follow up on SPI's Recommendations; 6. CBL Development; 7. Indemnity of Priok Toll Road; 8. Action Plan for Optimizing Land Per Branch; 9. Kijing Business Port; 10. Tariff Adjustment Plan Per Branch; 11. Progress of Recognition of Commercial Assets; 12. Preparation of Kijing's operatorship and equipment; 13. Proposed Revision of the Company's Investment RKA in 2019; 14. Progress of Capex Branch and Subsidiaries until June 2019; 15. Proposed Construction of Vehicle Parking Lots at Head Office; 16. Progress of Construction of Maritime Tower; 17. Green Port Action Plan; 18. Progress of Kalibaru and Eastern Access; 19. Collaboration with PUPR Research and Development Center for the Study of Coastal and Sedimentation in Bengkulu; 20. JICT Operationalization Plan2; 21. Report of Potential Revenues from Branch Digitalization; 22. Pelindo IBS Progress; 23. Batu Ampar Batam Cooperation Progress Report. 			



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
		24. Reform JAI; 25. <i>Action Plan Program Creative Financing</i> ; 26. Perhitungan <i>Cash Flow</i> IPC sampai dengan 2025; 27. <i>Plan</i> Capex dan Sumber Pembiayaannya 2020-2024; 28. Penyelesaian Pengadilan Pajak; 29. Kelengkapan Organisasi IPC; 30. Audit yayasan barunawati; 31. Penyesuaian Remunerasi <i>Senior Management</i> IPC; 32. <i>Progress</i> Pembangunan Kantin dan Studio Musik; 33. Penyerahan lahan nelayang Bengkulu; 34. Penyelesaian lahan bermasalah Sunda Kelapa; 35. Implementasi <i>Corporate Culture</i> Per Cabang dan Anak Perusahaan; 36. Reviu Kebijakan SDM; 37. <i>Progress Make Up</i> Kantor Pusat; 38. <i>Plan</i> Kegiatan Idul Adha; 39. <i>Plan</i> Kegiatan 17 Agustus; 40. Perubahan AD/ART IPC dan Anak Perusahaan; 41. Reviu <i>Quality Control</i> IPC Group; 42. Menyiapkan desain global <i>Performance Excellence</i> untuk IPC; 43. <i>Plan</i> pengembangan Logistik per Cabang; 44. Usulan pengembangan KEK Kijing dan Bengkulu; 45. <i>Plan</i> Pengembangan Logistik MTI; 46. <i>Plan</i> Pengembangan Bisnis EPI; 47. <i>Progress</i> Penyesuaian SOP IPC dan Anak Perusahaan; 48. Lain-lain.			
		24. Reform JAI; 25. Creative Financing Program Action Plan; 26. Calculation of IPC Cash Flow up to 2025; 27. Capex Plan and Financing Sources 2020-2024; 28. Settlement of Tax Courts; 29. Completeness of IPC Organization; 30. Audit of Barunawati Foundation; 31. Adjustment of IPC Senior Management Remuneration; 32. Progress of Canteen and Music Studio Development; 33. Handover of Bengkulu floating land; 34. Settlement of problematic areas with Sunda Kelapa; 35. Implementation of Corporate Culture Per Branch and Subsidiaries; 36. Review of HC Policy; 37. Progress Make Up of Head Office; 38. Eid al-Adha Activity Plan; 39. August 17 Activity Plan; 40. Changes to AD/ART of IPC and Subsidiaries; 41. Review Quality Control of IPC Group; 42. Prepare Performance Excellence global design for IPC; 43. Logistics Development Plan per Branch; 44. Proposed KEK Kijing and Bengkulu development; 45. MTI Logistics Development Plan; 46. EPI Business Development Plan; 47. Progress of Adjustment of IPC SOP and Subsidiaries; 48. Others.			

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
24.	18 – 19 Juli 2019	1. CEO Direction; 2. Reviu Keputusan dan Pending Matters serta Laporan Progress Direktorat; 3. Lain-lain.	Elvyn G. Masassya Arif Suhartono	Hadir Present Hadir Present	
	July 18-19, 2019	1. CEO Direction; 2. Review of Decision and Pending Matters and Directorate Progress Report; 3. Others.	Dani Rusli Utama Prasetyadi Widyaka Nusapati Rizal Ariansyah Ogi Rulino	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
25.	23 Juli 2019	1. CEO Direction; 2. Persetujuan Akuisisi Port Related Business (Whale Project PT PII); 3. Program Golden Handshake 2019; 4. Remunerasi BOD-1; 5. Pembahasan Materi Rapat Komisaris dan Direksi 24 Juli 2019; 6. Penyelesaian Pengadilan Pajak.	Elvyn G. Masassya Arif Suhartono Dani Rusli Utama Prasetyadi	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
	July 23, 2019	1. CEO Direction; 2. Approval of Acquisition of Port Related Business (PT PII Whale Project); 3. The 2019 Golden Handshake Program; 4. 1 st Remuneration of BoD; 5. Discussion of Material Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors; 6. Tax Court Settlement.	Widyaka Nusapati Rizal Ariansyah Ogi Rulino	Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
26.	6 Agustus 2019	1. CEO Direction; 2. Persiapan RJPP 2020 sampai dengan 2024; 3. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK; 4. Reviu Kebijakan SDM; 5. Lain-lain.	Elvyn G. Masassya Arif Suhartono Dani Rusli Utama	Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
	August 6, 2019	1. CEO Direction; 2. Preparation of RJPP 2020 to 2024; 3. Follow up on BPK's recommendations; 4. Review HC Policy; 5. Others.	Prasetyadi Widyaka Nusapati Rizal Ariansyah Ogi Rulino	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
27.	13 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; FS Akuisisi Saham Pelindo 1, 3, 4 di PT TPI; Laporan Komite Investasi per Cabang dan Anak perusahaan; Reviu Kerja Sama dengan PBM; Progress Utilisasi Aset IPC per Cabang; Pembangunan Terminal Kijing secara Komprehensif; Rencana Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Bongkar Muat di Pelabuhan Kijing; Analisa dan Usulan Pengadaan <i>Container Scanner</i> Kalibaru; Usulan Desain VIP <i>Visitor Boat</i>; Laporan Potensi Pendapatan dari Digitalisasi Cabang; Laporan Hasil Audit Operasional untuk Pelayanan Bongkar Muat Petikemas dan <i>Billing System</i>; Sewa lantai MMI untuk Kantor Pusat IPC; Lain-lain. 	Elvyn G. Masassya Arif Suhartono Dani Rusli Utama Prasetyadi Widyaka Nusapati Rizal Ariansyah Ogi Rulino	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
	August 13, 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; FS Acquired Pelindo 1,3,4 Shares in PT TPI; Investment Committee Reports per Branch and Subsidiaries; Review of Collaboration with PBM; IPC Asset Utilization Progress per Branch; Comprehensive Development of Kijing Terminal; Planned Implementation of Procurement of Unloading Equipment at Kijing Port; Analysis and Proposal for Procurement of Kalibaru Container Scanner; Proposed VIP Visitor Boat Design; Potential Revenue Reports from Branch Digitalization; Operational Audit Results report for Container Load and Unloading Services and Billing System; Rent MMI Floors for IPC Head Office; Others. 			

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
28.	19 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. FS Akuisisi Saham Pelindo 1,3,4 di PT TPI; 3. Laporan Komite Investasi per Cabang dan Anak perusahaan; 	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
	August 19, 2019	<ol style="list-style-type: none"> 4. Reviu Kerja Sama dengan Perusahaan Bongkar Muat; 5. Progress Utilisasi Aset IPC per Cabang; 6. Pembangunan Terminal Kijing secara Komprehensif; 7. Rencana Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Bongkar Muat di Pelabuhan Kijing; 8. Analisa dan Usulan Pengadaan Container Scanner Kalibaru; 9. Usulan Desain VIP Visitor Boat; 10. Laporan Potensi Pendapatan dari Digitalisasi Cabang; 11. Laporan Hasil Audit Operasional untuk Pelayanan Bongkar Muat Petikemas dan Billing System; 12. Sewa lantai MMI untuk Kantor Pusat IPC; 13. Lain-lain. 	Arif Suhartono	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Hadir Present	
			Prasetyadi	Hadir Present	
			Widyaka Nusapati	Hadir Present	
			Rizal Ariansyah	Hadir Present	
			Ogi Rulino	Hadir Present	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction; 2. FS Acquired Pelindo 1,3,4 Shares in PT TPI; 3. Investment Committee Reports per Branch and Subsidiaries; 4. Review on Cooperation with Stevedoring Company; 5. IPC Asset Utilization Progress per Branch; 6. Comprehensive Development of Kijing Terminal; 7. Planned Implementation of Procurement of Unloading Equipment at Kijing Port; 8. Analysis and Proposal for Procurement of Kalibaru Container Scanner; 9. Proposed VIP Visitor Boat Design; 10. Potential Revenue Reports from Branch Digitalization; 11. Operational Audit Results report for Container Load and Unloading Services and Billing System; 12. Rent MMI Floors for IPC Head Office; 13. Others. 			



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
29.	3 September 2019	1. <i>CEO Direction;</i>	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
		2. <i>FS Akuisisi Saham Pelindo 1,3,4 di PT TPI;</i>			
		3. <i>Laporan Komite Investasi per Cabang dan Anak perusahaan;</i>	Arif Suhartono	Hadir Present	
		4. <i>Reviu Kerja Sama dengan Perusahaan Bongkar Muat;</i>			
		5. <i>Progress Utilisasi Aset IPC per Cabang;</i>	Dani Rusli Utama	Hadir Present	
		6. <i>Pembangunan Terminal Kijing secara Komprehensif;</i>			
		7. <i>Rencana Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Bongkar Muat di Pelabuhan Kijing;</i>	Prasetyadi	Hadir Present	
		8. <i>Analisa dan Usulan Pengadaan Container Scanner Kalibaru;</i>	Widyaka Nusapati	Hadir Present	
		9. <i>Usulan Desain VIP Visitor Boat;</i>	Rizal Ariansyah	Hadir Present	
		10. <i>Laporan Potensi Pendapatan dari Digitalisasi Cabang</i>			
		11. <i>Laporan Hasil Audit Operasional untuk Pelayanan Bongkar Muat Petikemas dan Billing System;</i>	Ogi Rulino	Hadir Present	
		12. <i>Sewa Lantai MMI untuk Kantor Pusat IPC;</i>			
		13. <i>Lain-lain.</i>			
	3, September 2019	1. <i>CEO Direction;</i>			
		2. <i>FS Acquired Pelindo 1,3,4 Shares in PT TPI;</i>			
		3. <i>Investment Committee Reports per Branch and Subsidiaries;</i>			
		4. <i>Review on Cooperation with Stevedoring Company;</i>			
		5. <i>IPC Asset Utilization Progress per Branch;</i>			
		6. <i>Comprehensive Development of Kijing Terminal;</i>			
		7. <i>Planned Implementation of Procurement of Unloading Equipment at Kijing Port;</i>			
		8. <i>Analysis and Proposal for Procurement of Kalibaru Container Scanner;</i>			
		9. <i>Proposed VIP Visitor Boat Design;</i>			
		10. <i>Potential Revenue Reports from Branch Digitalization;</i>			
		11. <i>Operational Audit Results report for Container Load and Unloading Services and Billing System;</i>			
		12. <i>Rent MMI Floors for IPC Head Office;</i>			
		13. <i>Others.</i>			

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
30.	10 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; FS Akuisisi Saham Pelindo 1,3,4 di PT TPI; Laporan Komite Investasi per Cabang dan Anak perusahaan; Reviu Kerja Sama dengan Perusahaan Bongkar Muat; Progress Utilisasi Aset IPC per Cabang; Pembangunan Terminal Kijing secara Komprehensif; Rencana Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Bongkar Muat di Pelabuhan Kijing; Analisa dan Usulan Pengadaan <i>Container Scanner</i> Kalibaru; Usulan Desain VIP <i>Visitor Boat</i>; Laporan Potensi Pendapatan dari Digitalisasi Cabang; Laporan Hasil Audit Operasional untuk Pelayanan Bongkar Muat Petikemas dan <i>Billing System</i>; Sewa Lantai MMI untuk Kantor Pusat IPC; Lain-lain. 	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
			Arif Suhartono	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Hadir Present	
			Prasetyadi	Tidak Hadir Absent	Pelatihan Training
			Widyaka Nusapati	Hadir Present	
			Rizal Ariansyah	Hadir Present	
			Ogi Rulino	Hadir Present	
	September 10, 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; FS Acquired Pelindo 1,3,4 Shares in PT TPI; Investment Committee Reports per Branch and Subsidiaries; Review on Cooperation with Stevedoring Company; IPC Asset Utilization Progress per Branch; Comprehensive Development of Kijing Terminal; Planned Implementation of Procurement of Unloading Equipment at Kijing Port; Analysis and Proposal for Procurement of Kalibaru Container Scanner; Proposed VIP Visitor Boat Design; Potential Revenue Reports from Branch Digitalization; Operational Audit Results report for Container Load and Unloading Services and Billing System; Rent MMI Floors for IPC Head Office; Others. 			



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
31.	18 September 2018	1. <i>CEO Direction;</i>	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
		2. FS Akuisisi Saham Pelindo 1,3,4 di PT TPI;			
		3. Laporan Komite Investasi per Cabang dan Anak perusahaan;	Arif Suhartono	Hadir Present	
		4. Reviu Kerja Sama dengan Perusahaan Bongkar Muat;			
		5. <i>Progress</i> Utilisasi Aset IPC per Cabang;	Dani Rusli Utama	Hadir Present	
		6. Pembangunan Terminal Kijing secara Komprehensif;			
		7. Rencana Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Bongkar Muat di Pelabuhan Kijing;	Prasetyadi	Hadir Present	
		8. Analisa dan Usulan Pengadaan <i>Container Scanner</i> Kalibaru;	Widyaka Nusapati	Hadir Present	
		9. Usulan Desain VIP <i>Visitor Boat</i> ;			
		10. Laporan Potensi Pendapatan dari Digitalisasi Cabang;	Rizal Ariansyah	Tidak Hadir Absent	Pelatihan Training
		11. Laporan Hasil Audit Operasional untuk Pelayanan Bongkar Muat Petikemas dan <i>Billing System</i> ;	Ogi Rulino	Hadir Present	
		12. Sewa Lantai MMI untuk Kantor Pusat IPC;			
		13. Lain-lain.			
	September 18, 2018	1. CEO Direction; 2. FS Acquired Pelindo 1,3,4 Shares in PT TPI; 3. Investment Committee Reports per Branch and Subsidiaries; 4. Review on Cooperation with Stevedoring Company; 5. IPC Asset Utilization Progress per Branch; 6. Comprehensive Development of Kijing Terminal; 7. Planned Implementation of Procurement of Unloading Equipment at Kijing Port; 8. Analysis and Proposal for Procurement of Kalibaru Container Scanner; 9. Proposed VIP Visitor Boat Design; 10. Potential Revenue Reports from Branch Digitalization; 11. Operational Audit Results report for Container Load and Unloading Services and Billing System; 12. Rent MMI Floors for IPC Head Office; 13. Others.			
32.	25 September 2019	1. <i>CEO Directon;</i>	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
		2. Pembahasan Materi Rakomdir;			
		3. Draft Final RJPP 2020-2024;	Arif Suhartono	Hadir Present	
		4. <i>Progress</i> Akuisisi TPI.			
	September 25, 2018	1. CEO of Directon;	Dani Rusli Utama	Tidak Hadir Absent	Pelatihan Training
		2. Discussion on BoC-BoD Meeting Material;			
		3. 2020-2024 RJPP Final Draft;	Prasetyadi	Hadir Present	
		4. TPI Acquisition Progress.			
			Widyaka Nusapati	Hadir Present	
			Rizal Ariansyah	Hadir Present	
	Ogi Rulino	Hadir Present			

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
33.	2 Oktober 2019	1. <i>CEO Direction;</i> 2. <i>Progres Kajian Pengembangan Logistic Center di Tanjung Priok;</i> 3. <i>Roadmap Budaya Perusahaan dan Roadmap Knowledge Management;</i> 4. <i>Pemaparan Pelaksanaan Drill BCM (Business Continuity Management);</i> 5. <i>Progress Kompensasi Pengerukan Alur;</i> 6. <i>Progress Pengerukan di 12 Cabang;</i> 7. <i>Sinkronisasi Implementasi Gate Pass, TID, dan Physical Appearance;</i> 8. <i>Update Pembentukan Sub Holding Petikemas (Holding Maritim);</i> 9. <i>Lain - lain.</i>	Elvyn G. Masassya Arif Suhartono Dani Rusli Utama Prasetyadi Widyaka Nusapati Rizal Ariansyah	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Tidak Hadir Absent	Rapat dengan Kementerian BUMN Meeting with Ministry of SOEs
	October 2, 2019	1. <i>CEO Direction;</i> 2. <i>Progress of Study on Development of Logistics Center in Tanjung Priok;</i> 3. <i>Corporate Culture Roadmap and Knowledge Management Roadmap;</i> 4. <i>Presentation on Business Continuity Management (BCM) Drill;</i> 5. <i>Flow Dredging Compensation Progress;</i> 6. <i>Dredging Progress in 12 Branches;</i> 7. <i>Synchronization of Gate Pass, TID, and Physical Appearance Implementation;</i> 8. <i>Update on Container Holding (Maritime Holding)</i> 9. <i>Others.</i>	Ogi Rulino	Hadir Present	



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
34.	16 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>CEO Directon;</i> 2. <i>Restrukturisasi DP4;</i> 3. <i>Progress Plan Patimban;</i> 4. <i>Progress Restrukturisasi Perjanjian NPCT1 dengan IPC;</i> 5. <i>Laporan dan Progress Kontrak-kontrak Komersial Jatuh Tempo;</i> 6. <i>Progress Asset Management System;</i> 7. <i>Kerja Sama Cabang dengan PTP;</i> 8. <i>Progress Perpanjangan Kontrak JICT;</i> 9. <i>Desain Rekonfigurasi/Relayout Cabang Pelabuhan;</i> 10. <i>Analisa dan Usulan Pengadaan Container Scanner Kalibaru;</i> 11. <i>Penyelesaian Asset Bermasalah;</i> 12. <i>SOP Decision Making Process;</i> 13. <i>Program Kompetisi Corporate Culture;</i> 14. <i>Progress Program Shared Services;</i> 15. <i>Program Monostatus di Anak Perusahaan;</i> 16. <i>Progress Standarisasi Premises IPC;</i> 17. <i>Progress Update Holding subcluster Petikemas.</i> 	<p>Elvyn G. Masassya</p> <hr/> <p>Arif Suhartono</p> <hr/> <p>Dani Rusli Utama</p> <hr/> <p>Prasetyadi</p> <hr/> <p>Widyaka Nusapati</p> <hr/> <p>Rizal Ariansyah</p> <hr/> <p>Ogi Rulino</p>	<p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p>	
	October 16, 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO of Directon; 2. DP4 restructuring; 3. Patimban Progress Plan; 4. Progress Restructuring the NPCT1 Agreement with IPC; 5. Reports and Progress on Maturity Commercial Contracts; 6. Progress Asset Management System; 7. Branch Cooperation with PTP; 8. Progress of JICT Contract Extension; 9. Port Branch Reconfiguration/Relayout Design; 10. Analysis and Proposal for Procurement of Kalibaru Container Scanner; 11. Troubled Asset Settlement; 12. SOP Decision Making Process; 13. Corporate Culture Competition Program; 14. Shared Services Progress Program; 15. Monostatus Program in Subsidiaries; 16. Progress of IPC Premises Standardization; 17. Updating Holding subcluster Container Progress. 			

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
35.	22 Oktober 2019	1. CEO Directon;	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
		2. Pembahasan Materi Rakomdir;			
		3. Hasil Kajian <i>Integrated Subsidiary Governance</i> Tahap 1 (<i>Parenting Model, Level of GCG Maturity & Roadmap</i> dan Rekomendasi);	Arif Suhartono	Tidak Hadir Absent	Pelatihan Training
		4. <i>Program Quality Control</i> di 12 Cabang dan Anak Perusahaan;	Dani Rusli Utama	Hadir Present	
		5. Laporan Pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar, Batam.	Prasetyadi	Hadir Present	
	October 22, 2019	1. CEO of Directon;	Widyaka Nusapati	Hadir Present	
		2. Discussion on BoC-BoD Meeting Material;			
		3. Results of Phase 1 <i>Integrated Subsidiary Governance Study (Parenting Model, Level of GCG Maturity & Roadmap and Recommendations)</i> ;	Rizal Ariansyah	Hadir Present	
		4. <i>Quality Control Program</i> in 12 Branches and Subsidiaries;	Ogi Rulino	Hadir Present	
		5. Management Report of Batu Ampar Port, Batam.			
36.	29 Oktober 2019	1. CEO Direction;	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
		2. Integrasi Sistem SDM;			
		3. Desain Rekonfigurasi Terminal Penumpang;	Arif Suhartono	Hadir Present	
		4. Progress Implementasi Digital Port di 12 Cabang, Anak Perusahaan dan Kantor Pusat;	Dani Rusli Utama	Hadir Present	
		5. Inbreng JPPI;			
	October 29, 2019	6. Perhitungan <i>Cost Control</i> (Dampak <i>Cost Saving</i> dan Opsi-opsi lain);	Prasetyadi	Hadir Present	
		7. Laporan Aset yang diasuransikan IPC;			
		8. Kebijakan Pengelolaan Kas di IPC dan Cabang;	Widyaka Nusapati	Hadir Present	
		9. Progress Standardisasi Premises IPC;	Rizal Ariansyah	Hadir Present	
		10. Pembahasan SLA Pelayanan Utama Divisi Kantor Pusat.	Ogi Rulino	Hadir Present	
1. CEO Direction;					
2. HC System Integration;					
3. Passenger Terminal Reconfiguration Design;					
4. Progress of Digital Port Implementation in 12 Branches, Subsidiaries and Head Office;					
5. JPPI Inbreng;					
6. Calculation of <i>Cost Control</i> (Impact of <i>Cost Saving</i> and Other Options);					
7. IPC insured assets report;					
8. Cash Management Policy at IPC and Branch;					
9. Progress of IPC Premises Standardization;					
10. Discussion of Main Services SLA Head Office Division.					



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
37.	6 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Kajian Komprehensif Penyelesaian Kalibaru; Denda Keterlambatan Pembayaran Konsesi; Progress Restrukturisasi Perjanjian NPCT1 dengan IPC; Model Kerja Sama IPC dengan BP Batam; Tindak Lanjut Action Plan Penyelesaian Kalibaru; Tindak Lanjut Peralatan Kijing; Tindak Lanjut Inbreg Aset ke JPPI; Timeline Heritage Port; Lain-lain. 	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
	November 6, 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Comprehensive Study on Completion of Kalibaru; Late Payment Fee for Concession; Progress Restructuring NPCT1 Agreement with IPC; The IPC Cooperation Model with BP Batam; Follow-up Action Plan for Completion of Kalibaru; Follow-up of Gravestone Equipment; Follow-Up Inbreg Asset to JPPI; Heritage Port Timeline; Others. 	Arif Suhartono	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Hadir Present	
			Prasetyadi	Hadir Present	
			Widyaka Nusapati	Hadir Present	
			Rizal Ariansyah	Tidak Hadir Absent	Asesmen BUMN SOEs Assessment
			Ogi Rulino	Hadir Present	
38.	7 – 8 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Reviu Keputusan dan Pending Matters serta Laporan Progress Direktorat. 	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
	November 7 – 8, 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO of Directon; Review of Decision and Pending Matters and Directorate Progress Report. 	Arif Suhartono	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Hadir Present	
			Prasetyadi	Hadir Present	
			Widyaka Nusapati	Hadir Present	
			Rizal Ariansyah	Hadir Present	
			Ogi Rulino	Hadir Present	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
39.	14 November 2019	1. CEO Direction; 2. Global Leader Program; 3. Laporan Dirbina; 4. Perjanjian Induk BP Batam; 5. Lain-lain.	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
			Arif Suhartono	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Hadir Present	
			Prasetyadi	Hadir Present	
			Widyaka Nusapati	Tidak Hadir Absent	Menghadiri FGD Rencana Jangka Panjang BUMN Attending FGD on SOE's Long Term Plan
			Rizal Ariansyah	Hadir Present	
			Ogi Rulino	Tidak Hadir Absent	Melaksanakan Asesmen Conducting Assessment
	November 14, 2019	1. CEO Direction; 2. Global Leader Program; 3. Dirbina Report; 4. Induk BP Batam Agreement; 5. Others.	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
			Hambra	Hadir Present	
			Arif Suhartono	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Hadir Present	
			Prasetyadi	Hadir Present	
			Widyaka Nusapati	Hadir Present	
			Rizal Ariansyah	Hadir Present	
40.	20 November 2019 November 20, 2019	Pembahasan Materi Rapat Komisaris dan Direksi. Discussion of Material Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors.	Elvyn G. Masassya	Hadir Present	
			Hambra	Hadir Present	
			Arif Suhartono	Hadir Present	
			Dani Rusli Utama	Hadir Present	
			Prasetyadi	Hadir Present	
			Widyaka Nusapati	Hadir Present	
			Rizal Ariansyah	Hadir Present	
Ogi Rulino	Hadir Present				



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
41.	3 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Laporan dan Persetujuan Hasil Rapat RKAP 2020; Penyesuaian Tantiem JAI dan JICT; Update Merger EDII dan ILCS; Progress Implementasi Penyertaan Modal di Anak Perusahaan; Progress Akuisisi PT TPI; Progress Kelanjutan Pekerjaan Lapangan untuk Terminal Kalibaru; Progress Akuisisi PT Krakatau Bandar Samudera; Tindak Lanjut Partisipasi Patimban; Action Plan Pencapaian Revenue (Monitoring per 2 Minggu); Progress Penyelesaian JICT; Progress Penyelesaian Kontrak Bermasalah; Lelang CT2 dan CT3, PT1 dan PT2; Tindak Lanjut Peralatan Kijing Requirement Physical Appearance; Progress Pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar, Batam; Mobil Dinas Direksi; Reviu Transformasi Direktorat. 	<p>Elvyn G. Masassya</p> <hr/> <p>Hambra</p> <hr/> <p>Arif Suhartono</p> <hr/> <p>Dani Rusli Utama</p> <hr/> <p>Prasetyadi</p> <hr/> <p>Widyaka Nusapati</p> <hr/> <p>Rizal Ariansyah</p> <hr/> <p>Ogi Rulino</p>	<p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p>	
	December 3, 2019	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction; Report and Approval on the Results of 2020 RKAP Meeting; Adjustment of JAI and JICT Tantiem; Update on EDII Mergers and ILCS; Progress of Implementation of Equity Participation in Subsidiaries; Progress of Acquisition of PT TPI; Progress Continuation of Field Work for Kalibaru Terminal; PT Krakatau Bandar Samudera Acquisition Progress; Follow Up Patimban Participation; Revenue Achievement Action Plan (Monitoring per 2 Weeks); JICT Completion Progress; Problematic Contract Settlement Progress; CT2 and CT3 auctions, PT1 and PT2; Follow-up Equipment Kijing Requirement Physical Appearance; Progress of Management of Batu Ampar Port, Batam; Board of Directors' Official Car; Review Directorate Transformation. 			

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
42.	9 Desember 2019	1. CEO Direction; 2. Finalisasi Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan Terintegrasi; 3. Desain Pengembangan Bisnis Organik dan Anorganik serta Sintergitas Cabang dan Anak Perusahaan; 4. Pembahasan RKAP 2020; 5. Progress Kelanjutan Pekerjaan Lapangan untuk Terminal Kalibaru; 6. Rencana Eksekusi Pengoperasian dan Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar Batam; 7. Progress RIP Tanjung Priok; 8. Reviu Pemetaan Kawasan CBL; 9. Lain-lain.	Elvyn G. Masassya Hambra Arif Suhartono Dani Rusli Utama Prasetyadi	Hadir Present Hadir Present Tidak Hadir Absent Hadir Present Hadir Present	Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Overseas Business Trip
	December 9, 2019	1. CEO Direction; 2. Finalization of Integrated Subsidiary Management Policies; 3. Design of Organic and Inorganic Business Development and Synergy of Branches and Subsidiaries; 4. Discussion on RKAP 2020; 5. Progress Continuation of Field Work for Kalibaru Terminal; 6. Execution Plan for Operation and Development of Batam's Batu Ampar Port; 7. Tanjung Priok RIP progress; 8. CBL Area Mapping Review; 9. Others.	Widyaka Nusapati Rizal Ariansyah Ogi Rulino	Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
43.	17 Desember 2019	1. CEO Direction; 2. Pembahasan Materi Rapat Komisaris dan Direksi; 3. Progress Rencana Induk Pelabuhan Sunda Kelapa; 4. Rekonfigurasi Terminal dan Pelabuhan; 5. Laporan Persiapan Angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020; 6. Kebijakan SDM Mengenai Penyelesaian Remunerasi, Implementasi KPI, Career Point System; 7. Progress Pembentukan IPC Institute; 8. Design IPC Creative Center; 9. Progress Rencana Pengembangan Ekosistem Pelabuhan; 10. Progress Rencana Program Ekosistem terkait KEK; 11. Lain - lain.	Elvyn G. Masassya Hambra Arif Suhartono Dani Rusli Utama Prasetyadi Widyaka Nusapati Rizal Ariansyah Ogi Rulino	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
	December 17, 2019	1. CEO Direction; 2. Discussion on BoC-BoD Meeting Material; 3. Progress of Sunda Kelapa Port Master Plan; 4. Reconfigure Terminals and Ports; 5. Report on the Preparation of Christmas Transport in 2019 and the New Year 2020; 6. HC Policy Regarding Remuneration Settlement, KPI Implementation, Career Point System; 7. Progress on the Establishment of IPC Institute; 8. Design IPC Creative Center; 9. Progress of the Port Ecosystem Development Plan; 10. Progress Plan for Ecosystem Programs related to SEZs; 11. Others.			



Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

The agenda and participants of the joint meeting of Board of Commissioners and Board of Directors have been presented in Board of Commissioners Meeting Corporate Governance Chapter on this Annual Report.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Selama tahun 2019, Direksi telah melaksanakan rapat Direksi sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing Direksi adalah sebagai berikut.

Meeting Frequency and Attendance

During 2019, Board of Directors held 44 (fourty-four) Board of Directors meetings and 12 (twelve) joint meetings of Board of Commissioners and Board of Directors. The frequency and attendance of the meetings of each of Directors is as follows.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi
Board of Directors Meetings Frequency and Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi Board of Directors Meetings			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris Joint Meetings of Board of Directors and Board of Commissioners		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama President Director	43	42	98%	12	12	100%
Hambra*	Wakil Direktur Utama Vice President Director	4	4	100%	2	2	100%
Saptono R. Irianto**	Direktur Komersial Commercial Director	6	6	100%	2	2	100%
Arif Suhartono***	Direktur Komersial Commercial Director	34	31	91%	9	7	78%
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik Technical Director	43	40	93%	12	11	92%
Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director	43	40	93%	12	11	92%
Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan Finance Director	43	39	91%	12	10	83%
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Human Capital Director	43	36	84%	12	10	83%
Riry Syeried Jetta****	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Business Development Director	-	-	-	-	-	-
Ogi Rulino***	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Transformation and Business Development Director	34	31	91%	9	8	89%

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi
Board of Directors Meetings Frequency and Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi Board of Directors Meetings			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris Joint Meetings of Board of Directors and Board of Commissioners		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Rata-rata Kehadiran Average Percentage of Attendance				93%			91%

* Mulai menjabat sejak tanggal 18 November 2019
** Berhenti menjabat sejak tanggal 11 Maret 2019
*** Mulai menjabat sejak tanggal 8 April 2019
**** Berhenti menjabat sejak tanggal 4 Januari 2019

*Started Serving on November 18, 2019
**Ended Serving since March 11, 2019
***Started Serving on April 8, 2019
****Ended Serving since January 4, 2019

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Pengembangan kompetensi Direksi dapat dilihat pada Bab Profil Sub Bab Pengembangan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

BOARD OF DIRECTORS COMPETENCY DEVELOPMENT

Board of Directors competency development can be seen in Board of Directors Profile Chapter, Competency Development Sub-Chapter in this Annual Report.

KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS DECISIONS AND DUTIES

Keputusan Direksi

Board of Directors Decisions

No	No Regulasi Regulation Number	Judul Subject
1	Akta Nomor 02 Tanggal 2 Desember 2019 Deed No. 02 dated December 2, 2019	Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-272/MBU/11/2019 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Statement of Minister of SOE Decree as the Company's GMS of PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-272/MBU/11/2019 concerning Appointment of the Vice President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
2	09 Tanggal 21 Agustus 2019 09 Date August 21, 2019	Perubahan Anggaran Dasar PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Amendment to the Articles of Association of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
3	PU.01.02/12/8/1/PBP/UT/PI.II-19	Pedoman Pengembangan Bisnis Baru di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Guidelines for Developing New Businesses within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
4	OT.02.03/6/5/1/BDP/UT/PI.II-19	Pembentukan <i>Change Agent</i> Budaya Perusahaan dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) The Establishment of a Corporate Culture Change Agent and Good Corporate Governance (GCG) within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)



No	No Regulasi Regulation Number	Judul Subject
5	HK.01/10/12/1/KPP/UT/PI.II-19	Tugas dan Tanggungjawab Komite IPC Bersih Dalam Pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Duties and Responsibilities of IPC Bersih Committee in Implementing of Whistleblowing System of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
6	SK.01.02/2/1/1/KPP/UT/PI.II-19	Pedoman <i>Good Corporate Governance</i> PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Good Corporate Governance Guidelines
7	SK.01.01/2/1/1/KPP/UT/PI.II-19	Pedoman <i>Whistleblowing System</i> PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Whistleblowing System Guidelines
8	HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Guidelines for Procurement of Goods/Services within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
9	DL.01/18/4/1/PRB/UT/PI.II-19	Struktur, Kurikulum dan Silabus Pembelajaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Structure, Curriculum and Syllabus of Learning within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
10	HK.03/7/2/1/THP/UT/PI.II-19	Penetapan Direktur Pembina Pada Cabang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019 Determination of Managing Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Branch in 2019
11	DL.01/15/4/1/PRB/UT/PI.II-19	Pembelajaran Karyawan Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Employee Learning within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
12	OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19	Susunan Organisasi Dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
13	OT.02.03/6/5/1/BDP/UT/PI.II-19	Pembentukan <i>Change Agent</i> Budaya Perusahaan dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) The Establishment of a Corporate Culture Change Agent and Good Corporate Governance (GCG) within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
14	HK.01/10/12/1/KPP/UT/PI.II-19	Tugas dan Tanggung Jawab Komite IPC Bersih Dalam Pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Duties and Responsibilities of IPC Bersih Committee in Implementing of Whistleblowing System of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
15	SK.01.02/2/1/1/KPP/UT/PI.II-19	Pedoman <i>Good Corporate Governance</i> PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Good Corporate Governance Guidelines
16	SK.01.01/2/1/1/KPP/UT/PI.II-19	Pedoman <i>Whistleblowing System</i> PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Whistleblowing System Guidelines
17	PU.01.02/12/8/1/PBP/UT/PI.II-19	Pedoman Pengembangan Bisnis Baru di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Guidelines for Developing New Businesses in the Environment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
18	Akta Nomor 02 Tanggal 2 Desember 2019 Deed No. 02 dated December 2, 2019	Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-272/MBU/11/2019 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Statement of Minister of SOE Decree as the Company's General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II Number: SK-272/MBU/11/2019 concerning Appointment of the Company Vice President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Pelaksanaan Tugas Direksi

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2019 Direksi telah menjalankan tugasnya untuk pengurusan Perseroan. Adapun tugas yang telah dilakukan oleh Direksi antara lain:

1. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2019;
2. Menyusun *roadmap* perusahaan tahun 2020-2024;
3. Menggelar rapat Direksi yang pada tahun 2019 telah terselenggara sebanyak 44 (empat puluh empat) kali;
4. Menyusun RAKP dan RKM Perseroan Tahun 2019;
5. Membuat Pakta Integritas dalam rangka penerapan GCG, Kepatuhan Kode Etik Bisnis, Surat Pernyataan Benturan Kepentingan, Daftar Khusus Kepemilikan Saham;
6. Menghadiri rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi yang telah dilakukan sebanyak 12 (dua belas);
7. Melakukan kunjungan kerja ke Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan;
8. Melakukan rapat kerja nasional yang dihadiri oleh seluruh Direksi, seluruh Manajerial Kantor Pusat, *General Manager* Cabang Pelabuhan dan Direksi Anak Perusahaan;
9. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
10. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham terkait Pengesahan RKAP 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 7 Januari 2019 dan Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2019;
11. Melakukan hapus buku piutang pokok macet, bunga, denda, dan/atau ongkos yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Pemegang Saham;
12. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam berbagai bidang mencakup bisnis, operasional dan *support*;
13. Melaksanakan kegiatan edukasi dalam rangka peningkatan pemahaman mengenai dunia kepelabuhanan;
14. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha;
15. Mewakili Perseroan di dalam dan luar Pengadilan yang mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan;
16. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk gaji, pensiun, promosi, pelatihan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dll;

Implementation of Board of Directors Duties

In accordance with its duties and responsibilities, during 2019 Board of Directors has carried out its duties for the management of the Company. The tasks that have been carried out by Board of Directors include:

1. Prepare Annual Report and Sustainability Report for 2019 Fiscal Year;
2. Develop the Corporate roadmap for 2020-2024;
3. Holding Board of Directors meetings, which in 2019 had been held 44 (forty four) times;
4. Prepare the Company's RAKP and RKM in 2019;
5. Making an Integrity Pact in the context of implementing GCG, Compliance with the Code of Conduct, Declaration of Conflict of Interest, Special Register of Share Ownership;
6. Attended Board of Commissioners meetings inviting Board of Directors that had been held for 12 (twelve) times;
7. Conducting work visits to the Port Branch and Subsidiaries;
8. Held national work meetings attended by all Directors, all Head Office Managers, Port Branch General Managers and Directors of Subsidiaries;
9. Prepare the organizational structure of the Company complete with details of its tasks;
10. Holding a General Meeting of Shareholders related to Ratification of the 2019 RKAP held on January 7, 2019 and a General Meeting of Shareholders related to the Annual Report held on April 29, 2019;
11. Write off books on bad debt, interest, fines and/or fees which are subsequently reported to Board of Commissioners and obtain Shareholder approval;
12. Collaborating with third parties in various fields including business, operations and support;
13. Carry out educational activities in order to increase understanding of the port business;
14. Implementation of Good Corporate Governance in every business activity;
15. Representing the Company inside and outside the Court that binds the Company with other parties and/or other parties with the Company;
16. Regulates provisions regarding the Company's staffing including salaries, pensions, promotions, training, old age insurance, health insurance, etc;



17. Melaksanakan kegiatan CSR, selama tahun 2019 telah tersalur dana CSR untuk kegiatan sosial kemasyarakatan maupun lingkungan;
18. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan;
19. Menetapkan kebijakan lainnya untuk Perusahaan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Kinerja Direksi dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS secara kolegal berdasarkan kinerja perusahaan yang dituangkan dalam persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan oleh RUPS. Pada setiap awal tahun, Direksi wajib menyusun *Key Performance Indicator* (KPI) yang merupakan penjabaran dari RKAP yang disahkan RUPS dan dituangkan dalam kontrak manajemen. Penyusunan KPI mengacu pada Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tentang Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Kinerja Unggul pada BUMN. Berita Acara Kesepakatan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) Tahun 2017 No. SEKTAP.52/12/PI.I,II,III, dan IV/2017.

Hasil kinerja Direksi secara kolegal dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS di dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS secara kolegal berdasarkan kinerja perusahaan yang dituangkan dalam persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan oleh RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria evaluasi kinerja Direksi diajukan oleh Direksi yang ditetapkan dalam RUPS yaitu:

1. Keuangan dan pasar;
2. Fokus pelanggan;
3. Efektivitas produk dan layanan;
4. Fokus tenaga kerja;
5. Kepemimpinan tata kelola dan tanggung jawab kemasyarakatan;
6. Agen pembangunan.

17. Carry out CSR activities, during 2019 CSR funds have been channeled for social and environmental activities;
18. Performing other tasks related to the management of the Company;
19. Establish other policies for the Company in accordance with statutory provisions.

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

Board of Directors Performance Assessment Procedure

The collective performance of Board of Directors is evaluated by the Shareholders in the GMS based on the Company's performance as set forth in the approval and ratification of the Company's Annual Report by the GMS. At the beginning of each year, Board of Directors prepares Key Performance Indicators (KPIs) as an elaboration of the RKAP approved by the GMS and set forth in the management contract. The compilation of KPIs refers to the Ministry of SOEs. Letter No. S-08/S.MBU/2013 on Guidelines for Determination of KPIs and Criteria of Superior Performance in SOEs. Minutes of Agreement of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, and IV (Persero) 2017 No. SEKTAP.52/12/PI.I, II, III, and IV/2017.

The results of collegial Board of Directors' performance assessment are reported by Board of Commissioners to the GMS in the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report. The performance of Board of Directors is evaluated by the Shareholders in the GMS collegially based on the Company's performance as outlined in the approval and ratification of the Company's Annual Report by the GMS.

Board of Directors Performance Assessment Criteria

Board of Directors performance assessment criteria is submitted by Board of Directors to be determined in the GMS, namely:

1. Finance and markets;
2. Customer focus;
3. Effectiveness of products and services;
4. Workforce focus;
5. Leadership in governance and community responsibility;
6. Development agency.

Pihak yang Melakukan Assessment

Penilaian kinerja Direksi tahun 2019 dilihat dari pencapaian KPI yang telah ditetapkan sebelumnya dan diaudit setiap tahunnya oleh KAP. Penilaian tersebut bersifat kolegial yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Direksi. Pelaksanaan tugas telah direncanakan setiap awal tahun dalam suatu Program Kerja yang tercantum dalam RKAP dan pada akhir tahun, Direksi menyusun Laporan Kinerja Direksi yang disampaikan kepada Direksi yang selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk dievaluasi dan disahkan.

Parties Conducting the Assessment

The performance assessment of Board of Directors in 2019 is seen from the achievement of KPIs that have been previously determined and audited annually by KAP. The assessment is of collegial nature that is part of Board of Directors Performance Report. Implementation of duties had been planned at the beginning of the year in a Work Program drafted in the RKAP and at the end of the year, Board of Directors prepares a Performance Report of Board of Directors submitted to Shareholder at the GMS to be evaluated and ratified.



Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Board of Directors' Performance Assessment Results

No	Key Performance Indicator	Satuan Unit	Skor KPI TW.4 2018 KPI Score TW.4 2018	Bobot Weight	
				Tahunan Annual	TW 4 Q4
I	Keuangan dan Pasar Financial and Market		23.68	22	22
1	Sales to Operating Asset Sales to Operating Asset	%	-	6	6
2	Pertumbuhan Pendapatan Usaha Revenue Growth	%	-	6	6
3	Capaian Pangsa Pasar Petikemas Container Market Shares	%	8.09	5	5
4	Penyerapan Investasi (CAPEX) Investment Absorbtion (CAPEX)	%	2.94	5	5
II	Fokus Pelanggan Customer Focus		22.64	20	20
5	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	Skala Likert Likert Scale	7.35	9	9
6	Efektivitas Kerjasama Mitra Strategis BUMN SOE Strategic Partners' Cooperation Effectiveness	%	7.29	11	11
III	Efektivitas Produk dan Proses Product and Process Effectiveness		22.64	18	18
7	Implementasi Pelindo Incorporated Implementation of Pelindo Incorporated	%	-	8	8
8	Produktivitas B/M Terminal Petikemas Container Terminal Loading/ Unloading Productivity	B/S/H	4.2	5	5
9	Throughput Pelabuhan Port Throughput				
a.	Number of Ships Number of Ships	GT	4.14	3	3
b.	Direct Export Direct Export	%	-	2	2
IV	Fokus Tenaga Kerja Employee Focus		17.42	15	15
10	Indeks Kepuasan Pegawai Employee Satisfaction Index	Skala Likert Likert Scale	9.02	8	8
11	Produktivitas Pegawai Employee Productivity	Ribu Rp/Orang Thousand Rp/Person	8.40	7	7
V	Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan Leadership, Governance, and Social Responsibility		16.34	15	15

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
GCG STRUCTURE AND MECHANISM

	Target 2019 Target 2019		Pencapaian KPI TW 4 2019 KPI Achievement Q4 2019		
	Tahunan Annual	TW 4 Q4	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor KPI Achievement Score
					10.82
	58.15%	58.15%	21.41%	36.82%	2.21
	16.38%	16.38%	-2.58	0.00%	0.00
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	5.00
	87.50%	87.50%	63.22%	72.26%	3.61
					21.00
	4.38	4.38	4.67	106.62%	9.45
	2.50%	2.50%	17.60%	704.08%	11.55
					15.92
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	8.00
	45.11	45.11	51.01	113.08%	5.25
	235,008,754	235,008,754	209,121,201	88.98%	2.67
	4.00%	4.00%	-3.72%	0.00%	0.00
					12.74
	4.28	4.28	4.51	105.37%	8.40
	357,924,45	357,924,45	221,982.77	62.02%	4.34
					15.75



No	Key Performance Indicator	Satuan Unit	Skor KPI TW.4 2018 KPI Score TW.4 2018	Bobot Weight	
				Tahunan Annual	TW 4 Q4
12	PKBL PKBL	Skor Score	-	4	4
13	Skor GCG GCG Score	Skor Score	4.2	6	6
14	Tindak Lanjut Temuan Audit Internal Follow Up of Internal Audit's Findings	%	-	5	5
VI	Agen Pembangunan Development Agent		10.5	10	10
15	Sinergi BUMN SOE Sinergy	Ribu Rp Thousand Rp	5	5	5
16	Kemandirian Keuangandan Penciptaan Nilai Financial Independence and Value Creation	Skor Score	5	5	5
Jumlah Total			101.26	100.00	100.00

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI, UNIT INTERNAL AUDIT DAN UNIT MANAJEMEN RISIKO BESERTA DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh komite-komite di bawah Direksi yang terdiri atas 2 (dua) Komite. Komite-komite tersebut antara lain:

1. Komite Investasi dan Manajemen Risiko;
2. Komite IPC Bersih.

Selama tahun 2019, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Komite Investasi dan Manajemen Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengelolaan investasi dan risiko Perseroan. Selama tahun 2019, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite IPC Bersih merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam memastikan efektivitas penerapan *Whistleblowing Sytem* di IPC. Selama tahun 2019, Komite IPC Bersih telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Penilaian kinerja Unit audit internal merupakan bagian dari KPI Perusahaan, dengan kriteria hasil Temuan Audit yang telah selesai ditindaklanjuti. Penilaian tersebut didasari oleh kontrak kinerja

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS, INTERNAL AUDIT UNIT AND RISK MANAGEMENT UNIT AS WELL AS BASIS OF ASSESSMENT

In carrying out its management tasks, Board of Directors is assisted by committees under Board of Directors consisting of 2 (two) Committees. These committees include:

1. Investment and Risk Management Committee;
2. IPC Bersih Committee.

During 2019, Board of Directors considered that committees under Board of Directors have carried out their duties and responsibilities well.

The Investment and Risk Management Committee is a committee formed to assist Board of Directors in managing the Company's investments and risks. During 2019, Investment and Risk Management Committee has carried out its duties well.

IPC Bersih Committee is a committee formed to assist Board of Directors in ensuring the effectiveness of Whistleblowing System at IPC. During 2019, IPC Bersih Committee has carried out its duties well.

Performance evaluation of internal audit unit is part of the Company's KPI, with the criteria for Audit Findings that have been followed up. The assessment is based on a performance contract

	Target 2019 Target 2019		Pencapaian KPI TW 4 2019 KPI Achievement Q4 2019		
	Tahunan Annual	TW 4 Q4	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor KPI Achievement Score
	2	2.0	3.34	167.00%	4.20
	89.00	89.00	98.55	110.73%	6.30
	100.00%	100.00%	110.35%	110.35%	5.25
					10.25
	72,201,450.00	72,201,450.00	244,987,470	393.31%	5.25
	4.00	4.00	4.00	100.00%	5.00
					86.48

yang di tandatangani oleh EVP Satuan Pengawas Internal dan Direktur Utama. Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana KPI tersebut di atas, Divisi Audit Internal telah dapat mencapai target yang ditetapkan pada KPI.

signed by EVP Internal Audit Unit and President Director. Based on performance measurements as mentioned above, Internal Audit Division has been able to achieve the targets set on KPI.

Penilaian kinerja Unit Manajemen Risiko merupakan bagian dari KPI Perusahaan, dengan kriteria *risk maturity* level. Penilaian tersebut didasari oleh kontrak kinerja yang di tandatangani oleh VP Manajemen Risiko dan Direktur Teknik dan Manajemen Risiko yang diketahui oleh Direktur Utama. Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana KPI tersebut di atas, Divisi Manajemen Risiko telah dapat mencapai target yang ditetapkan pada KPI.

Performance evaluation of Risk Management Unit is part of the Company's KPI, with risk maturity level criteria. The assessment is based on a performance contract signed by Risk Management VP and Technical and Risk Management Director known by President Director. Based on performance measurements as mentioned above, Risk Management Division has been able to achieve the targets set on KPI.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Direksi terdapat di Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10, yaitu:

MECHANISM FOR DISMISSAL AND RESIGNATION OF BOARD OF DIRECTORS

The mechanism for dismissal and resignation of Board of Directors is found in Article 10 of the Company's Articles of Association, namely:

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat umum Pemegang Saham.

Members of Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan

The General Meeting of Shareholders' decision regarding the appointment and dismissal of the members of Board of Directors also stipulates when it takes force and when the appointment



pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan.

Pemberhentian Direksi diatur di Anggaran Dasar Pasal 10 ayat 13 - 22:

Ayat 13: Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

Ayat 14: Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:

- a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
- e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau keputusan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- f. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. Mengundurkan diri.

Ayat 15: Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a sampai dengan g pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Ayat 16: Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a, b, c, d, e dan ayat 15 pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

and dismissal begins. In the event that the General Meeting of Shareholders does not stipulate, the appointment and dismissal of members of Board of Directors shall take effect from the closing of the General Meeting of Shareholders.

In the event that the appointment and dismissal of the members of Board of Directors is carried out through a Shareholder's decision outside the General Meeting of Shareholders, then the date it comes into force will be contained in the Shareholder's decision. In the event that the Shareholders' decision outside the General Meeting of Shareholders does not stipulate, the appointment and dismissal of the members of Board of Directors, it becomes effective from the decision of the Shareholders.

Dismissal of Board of Directors is regulated in the Articles of Association Article 10 clause 13-22:

Clause 13: The General Meeting of Shareholders may terminate the members of Board of Directors at any time by stating the reasons.

Clause 14: The reason for dismissal of the members of Board of Directors as referred to in clause 13 of this article is carried out based on the following:

- a. Unable to fulfill obligations agreed upon in the management contract;
- b. Unable to carry out their duties properly;
- c. Has not followed the statutory provisions and/or provisions of the Articles of Association;
- d. Has engaged in actions that harm the Company and/or the State;
- e. Has taken actions that violate ethics and/or decisions that should be respected as a member of a State Owned Board of Directors;
- f. Has been declared guilty of a ruling court that has a permanent legal force;
- g. Has resigned.

Clause 15: In addition to the reason for terminating members of Board of Directors as referred to in clause 14 letters a to g of this article, Board of Directors may be dismissed by the General Meeting of Shareholders for the interests and objectives of the Company.

Clause 16: Decision on dismissal as referred to in clause 14 letters a, b, c, d, e and clause 15 of this article are taken after the person concerned has been given the chance of self-defense.

Ayat 17: Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 pasal ini diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.

Ayat 18: Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 16 pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 pasal ini.

Ayat 19: Dalam hal anggota Direksi diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dianggap telah terpenuhi.

Ayat 20: Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 16 pasal ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 18 pasal ini.

Ayat 21: Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 17 pasal ini masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya

Ayat 22: Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf d dan f pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengunduran Diri Direksi diatur di Anggaran Dasar Pasal 10 ayat 28 -32:

Ayat 28: Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.

Ayat 29: Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta

Clause 17: The termination of the members of Board of Directors as referred to in paragraph 13 of this article is notified to the members of Board of Directors concerned verbally or in writing by the Shareholders.

Clause 18: In the event that the dismissal is carried out outside the General Meeting of Shareholders, then the defense as referred to in clause 16 of this article shall be submitted in writing to the Shareholders within 14 (fourteen) days by the member of Board of Directors notified as referred to in paragraph 17 of this article.

Clause 19: In the event that a member of Board of Directors is dismissed after defending themselves, or stated that they has no objection to the planned dismissal when notified, then the provisions of the time referred to in clause 18 are considered to have been fulfilled.

Clause 20: In the event that a dismissal is made at the General Meeting of Shareholders, then the defense as referred to in clause 16 of this article shall be carried out at the General Meeting of Shareholders ignoring the provisions of the time limit referred to in clause 18 of this article.

Clause 21: As long as the plan for dismissal as referred to in clause 17 of this article is still in process, the member of Board of Directors concerned must carry out their duties.

Clause 22: Dismissal due to the reasons referred to in clause 14 letter d and f of this article constitutes dismissal with disrespect.

Resignation of Board of Directors is regulated in the Articles of Association Article 10 Clause 28-32:

Clause 28: A member of Board of Directors has the right to resign from their position by notifying in writing the purpose to the Company with copies to the Shareholders, Board of Commissioners and other Directors of the Company no later than 30 (thirty) days before the date of their resignation. If the resignation letter states that the effective date is less than 30 (thirty) days from the date the letter was received, it is deemed not to mention the effective date of resignation.

Clause 29: If up to the date requested by the relevant member of Board of Directors or within 30 (thirty) days from the date the application for resignation in the case does not mention the effective date of resignation, there is no decision from the General Meeting of Shareholders. it ceases on the date requested above or with the passing of 30 (thirty) days from the date the



tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Ayat 30: Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir;
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

Ayat 31: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 30 huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri

Ayat 32: Bagi Anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggung jawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung jawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris diangkat untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

letter of resignation request received without the approval of the General Meeting of Shareholders.

Clause 30: The position of members of Board of Directors ends if:

- a. They pass away;
- b. Their term of office ends;
- c. They are dismissed based on a decision by the General Meeting of Shareholders;
- d. They no longer fulfill the requirements as a member of Board of Directors based on the provisions of the Articles of Association and Legislation.

Clause 31: Provisions as referred to in paragraph 30 letter d includes but are not limited to concurrent positions which are prohibited and resignation

Clause 32: For members of Board of Directors who stop before or after their position expires, unless they stop due to death, then the person concerned must submit responsibility for their actions that have not yet been accepted by the General Meeting of Shareholders.

ORGANS AND COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS

The Secretary of Board of Commissioners is appointed to assist the smooth functioning of Board of Commissioners. Secretary to the Board of Commissioner's function is to provide administrative and secretarial support to Board of Commissioners to facilitate the implementation of their duties.

Secretary of Board of Commissioners Duties and Responsibilities

The Secretary of Board of Commissioners carries out the following tasks:

1. Preparing meetings, including Board of Commissioners briefing sheet;
2. Taking minutes of meetings of Board of Commissioners;
3. Administering documents of Board of Commissioners, such as incoming mail, outgoing mail, minutes of meetings or other documents;
4. Drafting Work Plan and Budget of Board of Commissioners;
5. Preparing the draft report of Board of Commissioners;
6. Carrying out other duties tasked by Board of Commissioners.

Sekretaris Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

The Secretary of Board of Commissioners also performs other duties such as:

1. Ensuring that Board of Commissioners comply with laws and regulations and apply GCG principles;
2. Providing information required by Board of Commissioners on a regular basis and/or at any time if requested;
3. Coordinating the members of the Committee, if necessary, to facilitate the duties of Board of Commissioners;
4. Acting as liaison officer of Board of Commissioners with other parties.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of Board of Commissioners Profile



RIZQI KURNIANTO
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioners

Tempat dan tanggal lahir Date and Place of Birth:	Jakarta, 22 Maret 1985	Jakarta, March 22, 1985
Usia Age	: 34 tahun	34 years
Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia	Indonesian
Riwayat Pendidikan Educational Background	: <ul style="list-style-type: none"> • Diploma III bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 2006 • Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 2009 • Master Manajemen dari Universitas Indonesia Tahun 2014. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diploma III in Accounting from the State College of Accountancy in 2006 • Bachelor of Economics from the University of Indonesia in 2009 • Master of Management from the University of Indonesia in 2014.
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor 06/KEP-DK/PI.II/VIII-2019 tanggal 1 Agustus 2019.	Decree of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number 06/KEP-DK/PI.II/VIII-2019 dated August 1, 2019.
Riwayat Jabatan Job History	: <ul style="list-style-type: none"> • Plt Kepala Subbidang Usaha Perkebunan IIb (Mei 2014-Oktober 2015) • Plt Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ia2 (Oktober 2015-Oktober 2016) • Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ia2 (Oktober 2016- Juli 2017) • Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat (Juli 2017-sekarang). • Staf Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2008) • Staf Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) (2008-2011) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) (2011-2016) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2016-2019). 	<ul style="list-style-type: none"> • Acting Head of Plantation Business Subdivision IIb (May 2014-October 2015) • Acting Head of Ia2 Agro and Pharmaceutical Industry Business Subdivision (October 2015-October 2016) • Head of Ia2 Agro and Pharmaceutical Industry Business Subdivision (October 2016- July 2017) • Head of Relations between Institutions and Society Subsection (July 2017-present). • Staff of Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2008) • Staff of Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) (2008-2011) • Secretary of Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) (2011-2016) • Secretary of Board of Commissioners of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2016-2019).



Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of Board of Commissioners Competency Development

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Date
1	Penerapan PSAK 71, 72, dan 73 Implementation of PSAK 71, 72, and 73	12 – 13 September 2019 September 12 - 13, 2019
2	Manajemen Risiko Risk Management	25 September 2019 September 25, 2019

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of Board of Commissioners Duties and Responsibilities

Selama tahun 2019, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas antara lain:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
2. Menyusun laporan triwulanan dan tahunan Dewan Komisaris;
3. Menyusun konsep-konsep surat/keputusan Dewan Komisaris;
4. Melakukan pemantauan penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
5. Mendokumentasikan surat masuk, surat keluar, dan arsip lainnya;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris;
7. Menghadiri dan menyusun risalah rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi;
8. Berkoordinasi dengan pihak lain, baik internal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) maupun pihak eksternal, terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
9. Melakukan tugas lain terkait dengan kesekretariatan Dewan Komisaris.

During 2019, Secretary of Board of Commissioners carried out tasks including:

1. Prepare Work Plan and Budget of Board of Commissioners;
2. Prepare quarterly and annual reports of Board of Commissioners;
3. Develop draft concepts/decisions of Board of Commissioners;
4. Monitor good corporate governance implementation;
5. Documenting incoming letters, outgoing letters, and other records;
6. Coordinate Board of Commissioners' activities implementation;
7. Attend and prepare minutes of internal meetings of Board of Commissioners and Coordination Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors;
8. Coordinate with other parties, both internal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and external parties, related to Board of Commissioners duties implementation;
9. Perform other tasks related to secretariat of Board of Commissioners.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris. Komite ini dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan IPC sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is a supporting organ under Board of Commissioners. This committee is established to assist Board of Commissioners to oversee the management of the Company as in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Audit Committee members are appointed and dismissed by Board of Commissioners and reported to the GMS.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit mengacu pada Undang- Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 70 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi sebagai pengawas perusahaan, serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara yang diperbarui dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Audit Committee Establishment Basis

The establishment of Audit Committee refers to Law No. 19/2003 on State-Owned Enterprises Article 70 paragraph 1 stating that Board of Commissioners is required to form Audit Committees that work collectively and function as corporate supervisors, as well as the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-05/MBU/2006 Dated December 20, 2006 concerning the Audit Committee for State-Owned Enterprises amended by Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on the supporting organs of Board of Commissioners/ Supervisory Board of BUMN.

Komite Audit IPC telah terbentuk sejak tahun 2002 dengan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris No. 17/DK/PI.II/I-2002 tanggal 23 Januari 2002.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Pelaksanaan tugas Komite Audit IPC mengacu pada Piagam Komite Audit sebagai berikut:

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
2. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
3. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI);
4. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor KAP;
5. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern serta pelaksanaannya;
6. Komite Audit memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
7. Komite Audit melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris;
8. Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor KAP Laporan Keuangan Tahunan disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbalance jasa yang diusulkan untuk auditor KAP tersebut;
9. Tugas Khusus dari Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terakhir ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dalam Piagam tersebut memuat ketentuan yang harus dipatuhi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit agar dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam tersebut ditata dalam susunan bagian sebagai berikut:

The Company's Audit Committee has been established since 2002 with Board of Commissioners Decision Letter (SK) No. 17/DK/PI.II/I-2002 dated January 23, 2002.

Audit Committee Duties and Responsibilities

The implementation of IPC Audit Committee's duties refers to the Audit Committee Charter as follows:

1. Audit Committee works collectively in carrying out its duties to assist Board of Commissioners;
2. Audit Committee is independent in the performance of its duties as well as in the report and is accountable to Board of Commissioners;
3. Audit Committee assists Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the auditor's performance of the Public Accounting Firm (KAP) and the Internal Audit Unit (IAU);
4. Audit Committee assesses the implementation of activities and audit results conducted by IAU as well as KAP auditors;
5. Audit Committee provides recommendations on the improvement of the internal control system and its implementation;
6. Audit Committee ensures that there is a satisfactory review procedure for any information issued by the Company;
7. Audit Committee identifies matters requiring the attention of Board of Commissioners and other duties granted by Board of Commissioners;
8. Audit Committee proposes to Board of Commissioners the candidate auditor of the Annual Financial Reporting along with the reasons for nomination and the amount of fee proposed for the said KAP auditor;
9. Special Duty from Board of Commissioners.

Audit Committee Charter

In performing its duties and responsibilities, Audit Committee is guided by Board of Commissioners Decision No. 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 dated July 14, 2017 concerning the Update/Stipulation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Charters for Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee. The Charter contains provisions that must be complied with in forming and implementing the activities of Audit Committee in order to be able to work independently, objectively, independently, transparently and responsibly. The charter is organized in the following section:



1. Landasan Hukum;
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota;
3. Tugas;
4. Kewenangan;
5. Persyaratan Keanggotaan;
6. Tanggung Jawab;
7. Rapat;
8. Laporan;
9. Akses Kerahasiaan Informasi;
10. Rencana Kerja dan Anggaran;
11. Penghasilan Anggota;
12. Pendidikan dan Tenaga Penunjang;
13. Penilaian Kinerja;
14. Lain-Lain;
15. Penutup.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berwenang:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharaga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Perseroan.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketua dan Anggota. Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan.

Struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Legal Basis;
2. Appointment and Dismissal of Members;
3. Duty;
4. Authority;
5. Membership Requirements;
6. Responsibility;
7. Meeting;
8. Report;
9. Access to Information Confidentiality;
10. Work Plan and Budget;
11. Members Income;
12. Education and Supporting Personnel;
13. Performance Appraisal;
14. Others;
15. Closing.

Audit Committee Authorities

In performing its duties the Audit Committee is authorized:

1. To look at the books, letters, and other documents, check cash for verification purposes and other promissory notes and check the Company's assets;
2. To enter the yards of buildings and offices used by the Company;
3. To request explanations from Board of Directors and/or other officials regarding all matters related to the Company's management;
4. To understand all policies and actions that have been and will be carried out by the Company.

Audit Committee Structure, Membership and Expertise

Board of Commissioners must establish an Audit Committee consisting of a Chairperson and Members. The Audit Committee Chairman and members are appointed and dismissed by Board of Commissioners. The Audit Committee Chairman is a member of Board of Commissioners who is Independent or a Member of Board of Commissioners who can act independently. The Audit Committee members can come from members of Board of Commissioners or from outside the Company.

The Audit Committee structure, membership and expertise are shown in the table below:

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit
Audit Committee Structure, Membership and Expertise

Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Legal Basis of Appointment	Keahlian Expertise	Keterangan Information	Bidang Tugas Area
Kushari Suprianto	Ketua	11 Oktober 2017 16/KEP-DK/PI.II/X-2017	Keuangan, Audit, Manajemen SDM	Komisaris	Pelaksanaan tugas dalam bidang Audit dan Keuangan
	Chairman	October 11, 2017 16/KEP-DK/PI.II/X-2017	Finance, Audit, HC Management	Commissioner	Execution of duties in Audit and Finance sector
Rakhmat Adi Santosa	Anggota	06 Maret 2017 03/KEP-DK/PI.II/III-2017	Keuangan, Audit	Pihak Independen	Membantu Ketua Komite Audit untuk mendukung kelancaran tugas mencari tambahan informasi, analisis dan memberi masukan dalam perumusan tanggapan atau rekomendasi dalam Bidang Audit dan Keuangan
	Member	March 6, 2017 03/KEP-DK/PI.II/III-2017	Finance, Audit	Independent Party	Assist the Audit Committee Chairman by finding additional information, analysis and providing input for formulating responses or recommendations in the Audit and Finance Sector
Muhdi Al Fajar	Anggota	17 Maret 2016 (KNR) 08/KEP-DK/PI.II/III- 2016 01 Februari 2018 (KA) 01/KEP-DK/PI.II/I-2018	Keuangan, Audit	Pihak Independen	Membantu Ketua Komite Audit untuk mendukung kelancaran tugas mencari tambahan informasi, analisis dan memberi masukan dalam perumusan tanggapan atau rekomendasi dalam Bidang Audit dan Keuangan
	Member	March 17, 2016 (KNR) 08/KEP-DK/PI.II/III-2016 February 1, 2018 (KA) 01/KEP-DK/PI.II/I-2018	Finance, Audit	Independent Party	Assist the Audit Committee Chairman by finding additional information, analysis and providing input for formulating responses or recommendations in the Audit and Finance Sector

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Audit Committee Profile

Audit Committee profiles as of December 31, 2019 are as follows.



KUSHARI SUPRIANTO
Ketua Komite Audit
Head of Audit Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris
Periode jabatan sebagai Komite Audit sama dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.

The profile can be seen in Board of Commissioners Profile section
Term of office as Audit Committee is the same as term of office as Board of Commissioners.



RAKHMAT ADI SANTOSA
 Anggota Komite Audit
 Audit Committee Member

Tempat dan tanggal lahir Date and Place of Birth:	Banyumas, 20 November 1969	Banyumas, November 20, 1969
Usia Age	: 50 tahun	50 years
Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia	Indonesian
Riwayat Pendidikan Education History	: <ul style="list-style-type: none"> Diploma III di bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1991). Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (1997). Magister Akuntansi di bidang Manajemen Strategic & Finance dari Universitas Indonesia (2005). 	<ul style="list-style-type: none"> Diploma III in Accounting from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1991). Accounting degree from Universitas Indonesia (1997). Master degree in Strategic & Finance Management from Universitas Indonesia (2005).
Tanggal Pengangkatan Appointment Date	: 6 Maret 2017	March 6, 2017
Riwayat Jabatan Employment History	: Beliau menduduki berbagai jabatan penting sebelum bergabung di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), antara lain sebagai: <ul style="list-style-type: none"> Senior Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Negara (BPKP) (1991-2000). Financial Due Diligence dan Internal Control Reviewer di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (2000-2002). Senior Consultant di Pusat Pengembangan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2002-2003). Manager Riset dan Standar Akuntansi Keuangan di IAI (2003-2004). Audit Manager di AAJ Associates (Public Accounting Firm). Audit Committee di PT Perkebunan Nusantara-XIII (Persero) (2004-2009). Dosen Tetap Fakultas Ekonomi di Universitas Al-Azhar Indonesia (2005-sekarang). Partner di KAP Zainal Juhana dan Rekan (2006-2015). Partner di KAP Sohibul, Kaslani, Komarianto Santosa (2016-sekarang). Managing Partner di PT Cipta Inspirasi Pratama (2011-sekarang). 	Held various positions before joining PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), including: <ul style="list-style-type: none"> Senior Auditor at State Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) (1991-2000). Financial Due Diligence and Internal Control Reviewer at National Bank Restructuring Agency (BPPN) (2000-2002). Senior Consultant at Accounting Development Center, Faculty of Economy at University of Indonesia (2002-2003). Research and Financial Accounting Standards Manager at IAI (2003-2004). Audit Manager at AAJ Associates (Public Accounting Firm). Audit Committee at PT Perkebunan Nusantara-XIII (Persero) (2004-2009). Permanent Lecturer at the Faculty of Economics at Al-Azhar Indonesia University (2005-present). Partner at KAP Zainal Juhana dan Rekan (2006-2015). Partner at KAP Sohibul, Kaslani, Komarianto Santosa (2016-present). Managing Partner at PT Cipta Inspirasi Pratama (2011-present).
Periode Jabatan Position Period	: 6 Maret 2017 – 6 Maret 2020	March 6, 2017 – March 6, 2020



MUHDI AL FAJAR
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Tempat dan tanggal lahir Date and Place of Birth:	: Wonogiri, 20 Juni 1968	Wonogiri, June 20, 1968
Usia Age	: 51 tahun	51 years
Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia	Indonesian
Riwayat Pendidikan Education History	: • Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (1998). • Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia (2013).	• Bachelor degree in Accounting from Gadjah Mada University (1998). • Master degree from University of Indonesia (2013).
Tanggal Pengangkatan Appointment Date	: 1 Februari 2018	February 1, 2018
Riwayat Jabatan Employment History	: Beliau menduduki berbagai jabatan penting sebelum bergabung di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), antara lain sebagai: • <i>Accounting Staff</i> di PT Rika Surya Purnama (1998). • <i>Accounting Staff</i> di PT Hadico Persada (1999-2000). • Auditor dan Konsultan Akuntansi di Kantor Akuntan Publik Tasnim Ali Widjanarko & Rekan (2000-2003). • <i>Special Audit</i> di PT Brantas Abipraya (Persero) (2004). • Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Manajemen Risiko di PT Wijaya Karya (Persero) (2003-2007). • Anggota Komite Audit di PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) (2005-2008). • Auditor Supervisor di PT Timah (Persero) (2009-2010). • <i>Special Audit</i> di PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) (2011). • Anggota Komite Audit di PT Sucofindo (Persero) (2010-2013). • Anggota Komite Audit di PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (2010-sekarang). • <i>General Manager of Finance and Accounting</i> di PT Kappa Carrageenan Nusantara (2010-sekarang).	Held various positions before joining PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), including: • Accounting Staff at PT Rika Surya Purnama (1998). • Accounting Staff at PT Hadico Persada (1999-2000). • Auditor and Accountancy Consultant at Public Accounting Firm Tasnim Ali Widjanarko & Rekan (2000-2003). • Special Audit at PT Brantas Abipraya (Persero) (2004). • Member of Audit Committee and Member of Risk Management Committee at PT Wijaya Karya (Persero) (2003-2007). • Member of Audit Committee at PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) (2005-2008). • Auditor Supervisor at PT Timah (Persero) (2009-2010). • Special Audit at PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) (2011). • Member of Audit Committee at PT Sucofindo (Persero) (2010-2013). • Member of Audit Committee at PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (2010-present). • General Manager of Finance and Accounting at PT Kappa Carrageenan Nusantara (2010-present).
Periode Jabatan Position Period	: 1 Februari 2019 – 1 Februari 2021	February 1, 2019 - February 1, 2021



Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan dalam perusahaan;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
5. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
6. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis Perseroan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Audit Committee Educational Qualification and Work Experience

Audit Committee membership requirements are as follows:

1. Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/audit;
2. Do not have personal interests/relationships that can cause negative impacts and conflicts of interest within the company;
3. Able to communicate effectively;
4. Can provide sufficient time to complete the task;
5. One of members of Audit Committee must have an educational background or expertise in accounting and finance;
6. One of members of Audit Committee has the ability and understanding of the Company's business scope.

The educational qualifications and work experience of Audit Committee Chairman and Members are as follows.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit
Audit Committee Educational Qualifications and Work Experience

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Kushari Suprianto	Ketua Chairman	Akuntansi, Ekonomi, Manajemen SDM Accounting, Economics, HC Management	Kepabeanan Customs
Rakhmat Adi Santosa	Anggota	Akuntansi/Ekonomis	<ul style="list-style-type: none"> • Partner Kantor Akuntan Publik (KAP) • <i>Managing Partner</i> • Dosen tetap • Konsultan
	Member	Accounting/Economics	<ul style="list-style-type: none"> • Public Accounting Firm Partner • Managing Partner • Permanent Lecturer • Consultant
Muhdi Al Fajar	Anggota	Sarjana Akuntansi/Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Auditor dan konsultan di Kantor Akuntan Publik (KAP) • <i>GM of finance and accounting</i> • Anggota Komite Audit di beberapa BUMN
	Member	Bachelor of Accounting/Economics	<ul style="list-style-type: none"> • Public Accounting Firm Auditor and consultant • GM of finance and accounting • Audit Committee member in several SOE

Independensi Komite Audit

Sejalan dengan Piagam Komite Audit, Komite menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan, proses audit Internal dan eksternal serta praktik *Good Corporate Governance* berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

Audit Committee Independence

In accordance with the Charter of Audit Committee, the Committee performs its duties and responsibilities professionally and independently. The Committee supports Board of Commissioners in conducting evaluations and oversight of the financial reporting process, internal and external audit processes and Good Corporate Governance practices well and in accordance with procedures.

Tabel Independensi Komite Audit
Audit Committee Independence

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	Kushari Suprianto	Rakhmat Adi Santosa	Muhdi Al Fajar
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Having no management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Having no ownership relationship in the Company	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Having no family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or any other member of Audit Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Not serving as political party manager, official and government	✓	✓	✓

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Komite Audit dapat mengundang pihak manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan SPI sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Rapat Internal Komite Audit

Sepanjang tahun 2019, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Audit Committee Meetings

The Audit Committee holds meeting in the amount of at least the same as the minimum provisions of Board of Commissioners' meeting stipulated in the Company's Articles of Association. The Audit Committee may invite the management related to the meeting material to attend the Audit Committee meeting.

Each Audit Committee meeting is documented in the minutes of meeting signed by all members of Audit Committee present. Audit Committee holds a coordination meeting with SPI at least once in 3 (three) months.

Audit Committee Internal Meetings

During 2019, the Audit Committee meeting dates, agenda and participants were as follows.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat <i>Meeting Date</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
1.	8 Januari 2019 January 8, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
2.	15 Januari 2019 January 15, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
3.	12 Februari 2019 February 12, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar



Tabel Agenda Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
4.	26 Februari 2019 February 26, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
5.	12 Maret 2019 March 12, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
6.	9 April 2019 April 9, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
7.	23 April 2019 April 23, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
8.	2 Juli 2019 July 2, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
9.	23 Juli 2019 July 23, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
10.	30 Juli 2019 July 30, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
11.	6 Agustus 2019 August 6, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
12.	13 Agustus 2019 August 13, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
13.	20 Agustus 2019 August 20, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
14.	3 September 2019 September 3, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
15.	10 September 2019 September 10, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
16.	21 Oktober 2019 October 21, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
17.	29 Oktober 2019 October 29, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
18.	5 November 2019 November 5, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
19.	12 November 2019 November 12, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
20.	3 Desember 2019 December 3, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar

Tabel Agenda Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
21.	10 Desember 2019 Desember 10, 2019	Rapat Internal Internal Meeting	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar

Rapat Komite Audit Mengundang Komite Lain dengan Manajemen

Pelaksanaan Rapat Komite Audit mengundang Komite lain dengan Manajemen selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Audit Committee Meeting Inviting Other Committees and Management

The Audit Committee Meetings inviting other Committees and Management during 2019 is as follows.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit
Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal Rapat Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
1.	19 Februari 2019 February 19, 2019	Pembahasan Tindaklanjut Laporan Tim <i>Counterpart</i> atas Pemantauan Pelaksanaan Audit Umum oleh KAP Tahun Buku 2018. Discussion regarding Counterpart Team Report on Monitoring of General Audit Implementation by KAP 2018 Fiscal Year	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
2.	13 Maret 2019 March 13, 2019	Pemaparan Capaian RKPP 2015-2019. Presentation of 2015-2019 RJPP Achievements	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
3.	20 Maret 2019 March 20, 2019	Pembahasan Rapat Koordinasi Triwulan IV Tahun 2018 Komite Audit dengan Satuan Pengawasan Internal dan hal-hal strategis lainnya. Discussion of the 2018 Quarterly Coordination Meeting of Audit Committee with the Internal Audit Unit and other strategic matters.	Kushari Suprianto Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
4.	13 Agustus 2019 August 13, 2019	Pembahasan Konfirmasi Permintaan Data SPPD IPC. Discussion regarding confirmation of request for SPPD Data	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
5.	14 Agustus 2019 August 14, 2019	Pembahasan Tindaklanjut Konfirmasi Permintaan Data SPPD IPC. Discussion regarding Follow-up Confirmation of request for SPPD Data	Muhdi Al Fajar
6.	17 September 2019 September 17, 2019	Pembahasan jadwal wawancara dalam rangka Pekerjaan <i>Assessment Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)</i> . Discussion regarding Interview Schedule within the Framework of Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) Work	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
7.	26 September 2019 September 26, 2019	Pembahasan Diskusi Mengenai Pengembangan IT di IPC. Discussion regarding IT development in IPC	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
8.	15 Oktober 2019 October 15, 2019	Pembahasan <i>Draft</i> RJPP 2020-2024 Discussion regarding RJPP Draft 2020 – 2024	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
9.	30 Oktober 2019 October 30, 2019	Pembahasan proses pengolahan dan penyelesaian <i>Assessment GCG</i> . Discussion regarding Review of GCG Assessment	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
10.	5 November 2019 November 5, 2019	Pembahasan Finalisasi Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2019. Discussion regarding Finalization of Management Report for 3rd Quarter of 2019	Rakhmat Adi Santosa
11.	3 Desember 2019 December 3, 2019	Pembahasan tindaklanjut pembahasan biaya KSMU. Follow-up discussion of KSMU costs	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar
12.	20 Desember 2019 December 20, 2019	Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja SPI dan Manajemen Risiko Triwulan III tahun 2019 Coordination meeting on performance of SPI and Risk Management in third quarter of 2019	Rakhmat Adi Santosa Muhdi Al Fajar



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan rapat Komite Audit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) kali rapat internal Komite Audit dan 12 (dua belas) kali rapat Komite Audit mengundang Komite lain dengan Manajemen. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Audit Committee Meeting Frequency and Attendance Level

In 2019, the Audit Committee held 33 (thirty-three) Audit Committee meetings consisting of 21 (twenty-one) Audit Committee internal meetings and 12 (twelve) Audit Committee meetings inviting other Committees with Management. Meetings frequency and attendance level of each Audit Committee member are as follows.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit
Audit Committee Meetings Attendance Level

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Rapat Komite Audit <i>Audit Committee Meetings</i>		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran <i>Number and Percentage of Attendance</i>		
		Jumlah Rapat <i>Number of Meetings</i>	Jumlah Kehadiran <i>Number of Attendance</i>	Persentase <i>Percentage</i>
Kushari Suprianto	Ketua Chairman	33	22	67%
Rakhmat Adi Santosa	Anggota Member	33	32	97%
Muhdi Al Fajar	Anggota Member	33	32	97%

Penghasilan Komite Audit

Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan. Honorarium Anggota Komite Audit maksimal 20% dari gaji Direktur Utama Perseroan dengan ketentuan pajak ditanggung oleh Perseroan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Sedangkan Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

Audit Committee Income

The Audit Committee Members income is determined by Board of Commissioners after considering the Company's ability. The Honorarium for Audit Committee Members is a maximum of 20% of President Director's salary with tax borne by the Company, and they do not receive any other income apart from the honorarium. Commissioners who sit as Audit Committee Head/Members do not receive additional income above their Commissioners' income.

Komite Audit <i>Audit Committee</i>	Gaji Salary	20% x Gaji Direktur Utama 20% x President Director's salary	46.000.000,00
--	----------------	--	---------------

Pencapaian Key Performance Indicator Komite Audit

Audit Committee Key Performance Indicator Achievements

Indikator Pencapaian Kinerja <i>Key Performance Indicators</i>	Satuan <i>Unit</i>	Bobot <i>Weight</i>	Target <i>Target</i>	Realisasi <i>Realization</i>	Capaian <i>Achievement</i>	Skor Capaian <i>Achievement Score</i>
Pelaksanaan Rapat Internal Komite Audit Implementation of Internal Audit Committee Meetings	Jumlah Total	3.00	12	19	120%	3.60
Laporan Penugasan Komite Audit Audit Committee Assignment Report	Laporan Reports	3.00	4	4	100%	3.00

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit IPC telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring audit keuangan oleh KAP;
2. Mengevaluasi kinerja KAP;
3. Mengevaluasi laporan audit keuangan (*audited*) tahun 2018;
4. Terlibat dalam pemilihan KAP audit keuangan tahun 2020;
5. Melakukan kunjungan kerja untuk evaluasi kinerja cabang dan cek fisik aset yang diusulkan penghapusan;
6. Mengevaluasi kinerja Satuan Pengawasan Internal (SPI);
7. Mengevaluasi serta memberikan saran kepada Dewan Komisaris atas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI;
8. Rapat koordinasi triwulanan dengan SPI terkait dengan evaluasi laporan hasil analisis, pemutakhiran data serta tindak lanjutnya;
9. Mengevaluasi laporan keuangan tahun buku 2018;
10. Mengevaluasi laporan manajemen triwulanan;
11. Terlibat dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020;
12. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar IPC;
13. Menyusun rekomendasi/tanggapan Dewan Komisaris antara lain mengenai:
 - a. Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap perusahaan yang sudah rusak/tidak digunakan;
 - b. Tindak lanjut temuan BPK RI.
14. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar IPC.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) sebagai organ pendukung Dewan Komisaris berperan membantu Dewan Komisaris dalam memberikan dukungan bagi Dewan Komisaris dalam mengawasi implementasi kebijakan Nominasi dan Remunerasi Direksi, Tim Manajemen dan karyawan.

Dasar Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Dasar hukum kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi IPC adalah:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

Brief Report on Audit Committee Activities in 2019

Throughout 2019, IPC Audit Committee has carried out the following activities:

1. Monitoring financial audits by KAP;
2. Evaluating KAP performance;
3. Evaluate the audited financial audit report for 2018;
4. Involved in the election of financial audit KAP in 2020;
5. Conduct work visit to evaluate branch performance and physical check on proposed assets written off;
6. Evaluating the performance of Internal Audit Unit (SPI);
7. Evaluate and provide advice to Board of Commissioners on the SPI Annual Supervision Work Program (PKPT);
8. Quarterly coordination meeting with SPI related to the evaluation of analysis report, data update and its follow-up actions;
9. Evaluating the financial statements of the 2018 fiscal year.
10. Evaluating quarterly management reports;
11. Involved in discussing the 2020 Corporate Work Plan and Budget (RKAP);
12. Hold a meeting at least the same as the minimum provisions of Board of Commissioners meeting stipulated in the IPC Statutes;
13. Prepare recommendations/responses from Board of Commissioners regarding:
 - a. Write-off and transfer of company fixed assets that have been damaged/not used;
 - b. Follow up on BPK RI findings.
14. Holding meetings at least the same as the minimum provisions of Board of Commissioners meeting stipulated in the Articles of Association of the IPC.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) as a supporting organ of Board of Commissioners assists Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is to provide support to Board of Commissioners in overseeing the implementation of nomination and remuneration policies of Board of Directors, Management Teams and employees.

Nomination and Remuneration Committee Establishment Basis

The legal basis for IPC Nomination and Remuneration Committee are:

1. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Minister of State-Owned Enterprises Decree Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;



3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
4. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Akte Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 1 Tanggal 1 Desember 1992 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH Nomor 2 Tanggal 15 Agustus 2008);
5. Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
3. Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs for Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
4. PT Pelabuhan Indonesia II Articles of Association (Notary Deed Imas Fatimah, SH number: 1 dated December 1, 1992 which has been amended several times with Notary Deed Agus Sudiono Kuntjoro, SH number: 2 dated August 15, 2008);
5. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Commissioners Decision No. 09/KEP-DK/ PI.II/VII-2017 concerning the Update/Stipulation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Charters for Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berpedoman pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Piagam tersebut ditata dalam bentuk bagian sebagai berikut:

1. Landasan Hukum;
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota;
3. Tugas;
4. Kewenangan;
5. Persyaratan Keanggotaan;
6. Tanggung Jawab;
7. Rapat;
8. Laporan;
9. Akses Kerahasiaan Informasi;
10. Rencana Kerja dan Anggaran;
11. Penghasilan Anggota;
12. Pendidikan dan Tenaga Penunjang;
13. Penilaian Kinerja;
14. Lain-Lain;
15. Penutup.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee Charter

In performing its duties and responsibilities, Nomination and Remuneration Committee is guided by the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomination and Remuneration Committee Charter as stipulated by Board of Commissioners Decision No. 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 dated July 14 2017 concerning the Update/Stipulation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Charters for Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee, as follows:

1. Legal Basis;
2. Appointment and Dismissal of Members;
3. Duty;
4. Authority;
5. Membership Requirements;
6. Responsibility;
7. Meeting;
8. Report;
9. Access to Information Confidentiality;
10. Work Plan and Budget;
11. Members Income;
12. Education and Supporting Personnel;
13. Performance Appraisal;
14. Others;
15. Closing.

Nomination and Remuneration Committee Duties And Responsibilities

Duties of Nomination and Remuneration Committee are based on Board of Commissioners Decree No. 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 dated July 14, 2017 concerning the Update/Stipulation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Charters for Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee, as follows:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi Anak perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 3. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untk disampaikan kepada Direksi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. To provide recommendations on candidate members for the Company's subsidiary of Board of Directors to Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders; 2. To prepare and provide recommendations on the system and procedure for the selection and/or replacement of Board of Commissioners and Board of Directors members to Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders; 3. To evaluate remuneration policy; 4. To provide recommendations to Board of Commissioners, regarding: <ol style="list-style-type: none"> a. Remuneration policy for Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders; b. Remuneration policy for employees as a whole to be submitted to Board of Directors. |
|--|--|

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain:

1. Mereview, memeriksa, melakukan Analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya;
2. Mencari dan mendapatkan informasi (akses yang tidak terbatas) yang relevan dari Sistem Informasi Manajemen (SIM), laporan-laporan, maupun dari setiap anggota Direksi, karyawan atau individu atau narasumber terkait;
3. Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat komite.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang terdiri dari Ketua dan anggota. Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Komisaris.

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan anggota Dewan Komisaris Independen atau anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan.

Nomination and Remuneration Committee Authorities

The Nomination and Remuneration Committee authorities include:

1. Reviewing, examining, analyzing and providing opinions and recommendations within the scope of their duties;
2. Searching for and receiving relevant information (unlimited access) from the Management Information System (MIS), reports, or from all members of Board of Directors, employees or individuals or related sources;
3. Inviting management to attend committee meetings.

Nomination and Remuneration Committee Structure, Membership and Expertise

Board of Commissioners may form a Nomination and Remuneration Committee consisting of a Chairman and members. The Chairman and members of Nomination and Remuneration Committee are appointed and dismissed by President Commissioner.

The Chairman of Nomination and Remuneration Committee is a member of Board of Commissioners who is an Independent Commissioner or a member who can act independently. Members of Nomination and Remuneration Committee can originate from members of Board of Commissioners or from outside the Company.



Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Structure, Membership and Expertise

Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Legal Basis of Appointment	Keterangan Information	Keahlian Expertise	Tugas Tasks
D. Andhi Nirwanto	Ketua	11 Oktober 2017 18/KEP-DK/PI.II/X-2017	Komisaris	Hukum, Manajemen	Pelaksanaan tugas dalam Bidang Sumber Daya Manusia dan Remunerasi
	Chairman	October 11, 2017 18/KEP-DK/PI.II/X-2017	Commissioner	Law, Management	Implementation of duties in Human Capital and Remuneration
Aries Fikiran	Anggota	01 Februari 2018 01/KEP-DK/PI.II/II-2018	Pihak Independen	SDM, Manajemen Keuangan	Membantu Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mendukung kelancaran tugas mencari tambahan informasi, analisis dan memberi masukan dalam perumusan tanggapan atau rekomendasi dalam Bidang Sumber Daya Manusia dan Remunerasi
	Member	February 01, 2018 01/KEP-DK/PI.II/II-2018	Independent Party	Human Capital, Financial Management	Assisting Nomination and Remuneration Committee Head in the smooth running of duties by finding additional information, analyzing and providing input for the formulation of responses or recommendations related to Human Capital and Remuneration

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Nomination and Remuneration Committee Profiles

The Nomination and Remuneration Committee profiles as of December 31, 2019 were as follows.



D. ANDHI NIRWANTO
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Head of Nomination and Remuneration Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris Periode jabatan sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi sama dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
The profile has been presented in Board of Commissioners' Profile The term of office as a Nomination and Remuneration Committee is the same as term of office as a Board of Commissioners



ARIES FIKRMAN

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration Committee

Tempat dan tanggal lahir Date and Place of Birth:	: Sukabumi, 21 Maret 1964	Sukabumi, March 21, 1964
Usia Age	: 55 tahun	55 Years
Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia	Indonesian
Riwayat Pendidikan Education History	: • Diploma III di bidang Postal dan Ilmu Akademis Umum dari Pusdiklatpos Perum Pos dan Giro (1986). • Sarjana di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Pusdiklatpos bekerjasama dengan Universitas Terbuka dalam Program Pendidikan Tinggi Pos Lanjutan (1993). • Magister Manajemen di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Padjadjaran (2005).	• Diploma III in Postal and General Academic Studies from Pusdiklatpos Perum Pos dan Giro (1986). • Bachelor's degree in Economics and Development Studies from Pusdiklatpos in cooperation with Universitas Terbuka in Advanced Post Higher Education Program (1993). • Master degree in Financial Management from Padjadjaran University (2005).
Tanggal Pengangkatan Appointment Date	: 1 Februari 2018	February 1, 2018
Riwayat Jabatan Position History	: • Sekretaris Dewan Komisaris di Sekretariat Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (2009-2014). • Staf Ahli Direktur Utama di Sekretariat Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (2011). • Manajer Kinerja Unit Bisnis di Kantor Pusat Pos Properti (2014). • Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Bisnis Syariah dan Pasar dan Pejabat Sementara Kepala Proyek Pengembangan Bisnis Syariah di Proyek Pengembangan Bisnis Syariah PT Pos Indonesia (Persero) (2017).	• Secretary of Board of Commissioners at Board of Commissioners Sekretariat at PT Pos Indonesia (Persero) (2009-2014). • Expert Staff to President Director Board of Commissioners Sekretariat at PT Pos Indonesia (Persero) (2011). • Business Unit Performance Manager at Pos Properti Head Office (2014). • Head of Planning, Sharia Business and Market Development, and Acting Head of Sharia Business Development Project at PT Pos Indonesia (Persero) (2017).
Periode Jabatan Position Period	: 1 Februari 2018 – 1 Februari 2020	February 1 2018 – February 1 2020

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Persyaratan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain:

1. Para anggota secara bersama-sama memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai bisnis secara umum dan perusahaan secara khusus;
2. Anggota Komite harus bersifat dan bersikap independen, objektif dan profesional baik dalam penampilan (*in appearance*) maupun dalam kenyataan (*in fact*);

Qualification regarding Education and Work Experience of Nomination and Remuneration Committee

The requirements of Nomination and Remuneration Committee members are among others:

1. Altogether, members have a balance between expertise and experience with a background of broad understanding of business in general and the company in particular;
2. Committee members must be independent, objective and professional, both in appearance and in fact;



3. Anggota Komite harus memiliki integritas, dedikasi dan komitmen serta memiliki pengetahuan, pengalaman dan pemahaman yang baik tentang peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan, di bidang ketenagakerjaan dan perundang-undangan terkait lainnya.

3. Committee members must have integrity, dedication and commitment and have good knowledge, experience and understanding in laws and regulations regarding the company's business, employment and other related legislation.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut.

The qualifications of education and work experience of the Chairman and Members of Nomination and Remuneration Committee are as follows.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Remuneration and Nomination Committee Educational Qualifications and Work Experience

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Pendidikan <i>Education</i>	Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>
D. Andhi Nirwanto	Ketua Chairman	Hukum, Manajemen Internasional Law, International Management	Aparat Penegak Hukum Law Enforcement Official
Aries Fikirman	Anggota Member	Ekonomi, Manajemen Keuangan Economics, Financial Management	Berbagai jabatan di PT Pos Indonesia, Sekretaris Dewan Komisaris PT Pos Indonesia Various positions at PT Pos Indonesia, Secretary of Board of Commissioners of PT Pos Indonesia

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination And Remuneration Committee Independence

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Independence

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	D. Andhi Nirwanto	Aries Fikirman
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Having no management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Having no ownership relationship in the Company	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Having no family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or any other member of Nomination and Remuneration Committee	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Not serving as political party manager, official and government	✓	✓

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang pihak manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.

Nomination and Remuneration Committee Meetings

The Nomination and Remuneration Committee holds meeting in the amount of at least the same as the minimum provisions of Board of Commissioners' meeting stipulated in the Company's Articles of Association. Nomination and Remuneration Committee may invite the management related to the meeting material to attend the Nomination and Remuneration Committee meeting.

Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat koordinasi dengan *structural* SDM sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Each Nomination and Remuneration Committee meeting is documented in the minutes of meeting signed by all members of nomination and Remuneration Committee present. The Nomination and Remuneration Committee holds a coordination meeting with structural HC at least once in 3 (three) months.

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1.	16 Januari 2019 January 16, 2019	Pembahasan Somasi ke 2 (dua) tentang Pemutusan Perjanjian/Kontrak dan Pelunasan Sisa Pembayaran berikut dengan tuntutan pembayaran ganti rugi. Discussion on the second subpoena concerning Termination of Agreement/Contract and Settlement of Remaining Payments along with demands for payment of compensation.	Aries Fikiranman
2.	22 Januari 2019 January 22, 2019	Tindak lanjut pembahasan somasi ke 2 (dua) tentang Pemutusan Perjanjian/Kontrak dan Pelunasan Sisa Pembayaran berikut dengan tuntutan pembayaran ganti rugi. Follow-up of discussion on the second subpoena concerning Termination of Agreement/Contract and Payment of Remaining Payments, along with demands for compensation payment.	Aries Fikiranman
3.	22 Januari 2019 January 22, 2019	Usulan Perubahan Anggaran Dasar IPC. Proposed changes to the Articles of Association of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	Aries Fikiranman
4.	29 Januari 2019 January 29, 2019	Laporan Manajemen Unaudited tahun 2018. 2018 Unaudited Management Report.	Aries Fikiranman
5.	13 Februari 2019 February 13, 2019	Usulan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan IPC. Proposed Directors and Commissioners of IPC Subsidiaries.	Aries Fikiranman
6.	13 Februari 2019 February 13, 2019	Usulan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan IPC. Proposed Subsidiaries' Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	D. Andhi Nirwanto Aries Fikiranman
7.	13 Maret 2019 March 13, 2019	Pemaparan Capaian RJPP 2015-2019. Presentation of 2015-2019 RJPP Achievements.	Aries Fikiranman
8.	26 Maret 2019 March 26, 2019	Konfirmasi Surat Usulan Direksi tentang <i>Long Term Incentive</i> (LTI). Confirmation of Board of Directors' Proposal Letter on Long Term Incentive (LTI).	Aries Fikiranman
9.	26 Maret 2019 March 26, 2019	Laporan <i>Audited</i> dan Kinerja Keuangan Tahun 2018. Audited and Financial Performance Report in 2018.	Aries Fikiranman
10.	2 April 2019 April 2, 2019	<i>Draft</i> SK Direksi Penugasan kepada Anak Perusahaan dalam pelaksanaan proyek strategis di lingkungan IPC. Draft of Board of Directors Decree on Assignment to Subsidiary in implementing strategic projects within IPC.	Aries Fikiranman
11.	9 April 2019 April 9, 2019	Permintaan Kelengkapan data terkait Surat Direksi perihal usulan kenaikan gaji Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2019 dan Tantiem tahun 2018. Requests for Completeness of data related to Board of Directors' Letters regarding the proposed salary increase for Directors and Commissioners in 2019 and Tantiem in 2018.	Aries Fikiranman
12.	10 April 2019 April 10, 2019	Membahas SM_05_RHS tentang Surat dari Direktur Utama Nomor KP.06.20/29/3/1/MTA/UT/PI.II-19 tertanggal 29 Maret 2019 perihal Usulan Pejabat Komisaris Anak Perusahaan. Discussion on SM_05_RHS regarding the President Director Letter Number KP.06.20/29/3/1/MTA/UT/PI.II-19 dated March 29, 2019 concerning the Proposed Acting Commissioner of Subsidiaries.	Aries Fikiranman



Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
13.	23 April 2019 April 23, 2019	Penyempurnaan kajian pedoman tata kelola/SOP hubungan Induk dan Anak Perusahaan. Completion of the review of governance guidelines/SOP of the Parent and Subsidiary Relations.	Aries Fikiranman
14.	24 April 2019 April 24, 2019	Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2019. Discussion of the 1 st Quarterly Management Report of 2019.	Aries Fikiranman
15.	22 Mei 2019 May 22, 2019	Pembahasan SM_06_RHS tentang Surat dari Direktur Utama Nomor KP.06.02/9/5/1/MTA/UT/PI.II-19 tertanggal 9 Mei 2019 perihal Usulan Pejabat Komisaris Anak Perusahaan IPC. Discussion on SM_06_RHS regarding the President Director Letter Number KP.06.02/9/5/1/MTA/UT/PI.II-19 dated May 9, 2019 concerning the Proposed Acting Commissioner of IPC Subsidiaries.	D. Andhi Nirwanto Aries Fikiranman
16.	24 Juni 2019 June 24, 2019	Perpanjangan Kontrak SMI. SMI Contract Extension.	Aries Fikiranman
17.	26 Juni 2019 June 26, 2019	Perpanjangan Kontrak SMI. SMI Contract Extension.	Aries Fikiranman
18.	9 Juli 2019 July 9, 2019	Pembahasan Usulan Persetujuan Temuan Pemeriksaan tidak dapat di tindaklanjuti. Discussion on Proposed Approval of Audit Findings that cannot be followed up.	Aries Fikiranman
19.	17 Juli 2019 July 17, 2019	Pembahasan penjelasan atas pemberitaan media tentang Pemogokan Pemandu Kapal Pelabuhan Tanjung Priok. Explanation of news regarding the Strikes of Tanjung Priok Port Boat Guides.	Aries Fikiranman
20.	17 Juli 2019 July 17, 2019	Persiapan Materi Rapat Koordinasi Komite dengan Manajemen terkait Divisi SDM dan Hukum. Discussion on preparation of the Committee's Coordination Meeting with Management related to HC and Legal Division.	Aries Fikiranman
21.	17 Juli 2019 July 17, 2019	Penjelasan atas pemeritaan media tentang pemogokan pemandu kapal pelabuhan tanjung priok dan Persiapan Materi Rapat Koordinasi Komite dengan Manajemen terkait Divisi SDM dan Hukum. Explanation regarding media coverage of Tanjung Priok Port Ship Guides Strike and Preparation for Committee Coordinating Meeting with Management related to the HC and Legal Division.	D. Andhi Nirwanto Aries Fikiranman
22.	23 Juli 2019 July 23, 2019	Pembahasan Laporan Manajemen Semester I Tahun 2019. Discussion of Semester I Management Report of 2019.	Aries Fikiranman
23.	27 Agustus 2019 August 27, 2019	Pertanyaan dan permintaan penjelasan atas surat Direksi perihal usulan pejabat Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan IPC. Questions and requests for clarification of Board of Directors' letter regarding the Proposed Subsidiaries' Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelindo II (Persero).	Aries Fikiranman
24.	28 Agustus 2019 August 28, 2019	Relaas Panggilan sidang kepada tergugat. Discussion on Session's Call to Defendant.	Aries Fikiranman
25.	28 Agustus 2019 August 28, 2019	Pertanyaan dan permintaan penjelasan atas surat Direksi perihal usulan pejabat Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan IPC dan Relas Panggilan sidang kepada tergugat. Question and Demand for explanation of Board of Directors' letter regarding the Proposed Subsidiaries' Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelindo II (Persero).	D. Andhi Nirwanto Aries Fikiranman
26.	4 September 2019 September 4, 2019	Pembahasan perkembangan permasalahan tentang hukum di IPC dan hal-hal lain strategis. Development of legal issues at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and other matters.	D. Andhi Nirwanto Aries Fikiranman

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
27.	10 September 2019 September 10, 2019	Pembahasan mekanisme usulan Pejabat Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan IPC. Discussion regarding mechanism on the responses of proposed Directors and Commissioners of Subsidiaries.	Aries Fikirman
28.	11 September 2019 September 11, 2019	Pembahasan Laporan hasil kunjungan kerja ke Cabang Pelabuhan Panjang IPC. Report on the results of working visit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s Panjang Port Branch.	D. Andhi Nirwanto Aries Fikirman
29.	18 September 2019 September 18, 2019	Pembahasan tindak lanjut atas tanggapan usulan pejabat Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan dan Usulan Pejabat Komisaris dan Direksi PT IKT Tbk, PT JICT, PT PTP dan PT PII. Discussion on follow up actions on the responses of proposed Directors and Commissioners of Subsidiaries and Proposed Acting Commissioners and Directors of PT IKT Tbk, PT JICT, PT PTP and PT PII.	D. Andhi Nirwanto Aries Fikirman
30.	26 September 2019 September 26 2019	Diskusi mengenai Pengembangan IT di IPC. Discussion on IT Development at IPC.	Aries Fikirman
31.	9 Oktober 2019 October 9, 2019	Pembahasan laporan ringkasan perkara mimbar Tjahyono, dkk dan Forum Komunikasi Ex Pegawai IPC. Discussion of the summary report on the case of Tjahyono, et al and IPC Ex Employees Communication Forum.	D. Andhi Nirwanto Aries Fikirman
32.	16 Oktober 2019 October 16, 2019	Pembahasan Usulan Pejabat Komisaris dan Direksi PT IPC TPK, PT Rukindo, PT PPI dan PT ILCS. Proposed Board of Commissioners and Board of Directors of PT IPC TPK, PT Rukindo, PT PPI, and PT ILCS.	D. Andhi Nirwanto Aries Fikirman
33.	21 Oktober 2019 October 21, 2019	Pembahasan Usulan Pejabat Komisaris dan Direksi PT IPC TPK, PT Rukindo, PT PPI dan PT ILCS. Discussion on the Proposed Acting Commissioners and Directors of PT IPC TPK, PT Rukindo, PT PPI and PT ILCS.	Aries Fikirman
34.	21 Oktober 2019 October 21, 2019	Pembahasan lanjutan RJPP Tahun 2020-2024 IPC. Further discussion on IPC RJPP 2020-2024.	Aries Fikirman
35.	22 Oktober 2019 October 22, 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan kerjasama usaha optimalisasi penanganan <i>multipurpose</i> antara cabang pelabuhan Bengkulu dengan Pelabuhan Tanjung Priok; • Pembahasan rencana kerjasama pemanfaatan lahan; • Pembahasan pendayagunaan Aset tetap IPC oleh PT MMI. <ul style="list-style-type: none"> • Discussion on business cooperation on optimizing the multipurpose handling between Bengkulu Port and Tanjung Priok Port branch; • Discussion on land use cooperation plan; • Discussion on the utilization of IPC fixed assets by PT MMI. 	Aries Fikirman
36.	28 Oktober 2019 October 28, 2019	Usulan RKAP 2020 IPC. Proposed RKAP 2020 IPC.	Aries Fikirman
37.	29 Oktober 2019 October 29, 2019	Usulan RKAP 2020 IPC. Proposed RKAP 2020 IPC.	Aries Fikirman
38.	30 Oktober 2019 October 30, 2019	Proses Pengolahan dan Penyelesaian <i>Assessment</i> GCG. Processing and Completion of GCG Assessment.	Aries Fikirman
39.	5 November 2019 November 5, 2019	Finalisasi Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2019. Finalization of 3 rd Quarter Management Report of 2019.	Aries Fikirman
40.	6 November 2019 November 6, 2019	Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Triwulan III Tahun 2019. Report on Activities of Nomination and Remuneration Committee for third quarter of 2019.	D. Andhi Nirwanto Aries Fikirman
41.	25 November 2019 November 25, 2019	Biaya Kerjasama dengan Mitra Usaha (KSMU). Business Partnership Costs.	Aries Fikirman



Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
42.	3 Desember 2019 December 3, 2019	Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke Cabang IPC. Results of Board of Commissioners' Visit to IPC Branches.	D. Andhi Nirwanto Aries Fikirman
43.	4 Desember 2019 December 4, 2019	Pembahasan Perubahan Struktur Organisasi IPC. Change in Organizational Structure of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	D. Andhi Nirwanto Aries Fikirman
44.	11 Desember 2019 December 11, 2019	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan lanjutan RJPP tahun 2020-2024. Usulan Pejabat Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan. <ul style="list-style-type: none"> Further discussion on IPC RJPP 2020-2024. Directors and Commissioners of Subsidiaries proposal. 	D. Andhi Nirwanto Aries Fikirman
45.	18 Desember 2019 December 18, 2019	Perkembangan Audit tahun buku 2019. Audit Development for Fiscal Year 2019.	Aries Fikirman
46.	20 Desember 2019 December 20, 2019	Rapat Koordinasi Evaluasi kinerja SPI dan Manajemen Risiko Triwulan II tahun 2019. Coordination Meeting on Evaluation of SPI performance and Risk Management in 2 nd Quarter of 2019.	Aries Fikirman

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 46 (empat puluh enam) kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee Meeting Frequency and Attendance

During 2019, Nomination and Remuneration Committee held 46 (forty six) meetings. The frequency and level of attendance of each member of Nomination and Remuneration Committee is as follows:

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Meeting Attendance Level

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Meetings		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Amount and Percentage Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
D. Andhi Nirwanto	Ketua Chairman	46	13	28%
Aries Fikirman	Anggota Member	46	46	100%

Penghasilan Komite Nominasi dan Remunerasi

Penghasilan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan. Honorarium Anggota Komite Audit maksimal 20% dari gaji Direktur Utama Perseroan dengan ketentuan pajak ditanggung oleh Perseroan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Sedangkan Anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua/anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

Nomination and Remuneration Committee Income

The Nomination and Remuneration Committee Members income is determined by Board of Commissioners after considering the Company's ability. The Honorarium for Audit Committee Members is a maximum of 20% of President Director's salary with tax borne by the Company, and they do not receive any other income apart from the honorarium. Commissioners who sit as the Nomination and Remuneration Committee Head/Members do not receive additional income above their Commissioners' income.

Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee</i>	Gaji Salary	20% x Gaji Direktur Utama 20% of President Director's Salary	46.000.000,00
--	-------------	---	---------------

Pencapaian *Key Performance Indicator* Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee *Key Performance Indicators* Achievement

Indikator Pencapaian Kinerja <i>Key Performance Indicators</i>	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
Pelaksanaan Rapat Internal Komite NR Committee Internal Meetings	Jumlah Total	3.00	12	20	120%	3.60
Laporan Penugasan Komite NR NR Committee Assignment Reports	Laporan Reports	3.00	4	4	100%	3.00

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2019

Beberapa kegiatan utama Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2019, antara lain:

1. Melakukan evaluasi atas usulan calon Direksi Perusahaan dan Anak Perusahaan;
2. Melakukan evaluasi atas usulan remunerasi;
3. Melakukan koordinasi secara berkala dengan Direktorat SDM;
4. Bersama dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko serta Komite Audit menyusun kajian pemanfaatan lahan;
5. Melakukan *monitoring* dan evaluasi ke cabang-cabang pelabuhan;
6. Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi;
7. Menyusun rencana kerja dan laporan pelaksanaan tugas secara berkala;
8. Mengikuti rapat internal komite, rapat dengan komite lain/manajemen, dan rapat dengan Dewan Komisaris.
9. Menyusun kajian dan konsep surat Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Usulan atas perubahan anggaran Dasar;
 - b. Usulan bakal calon anggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
 - c. Usulan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
 - d. Usulan Tantiem 2018 dan Gaji Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019;
 - e. Persetujuan perubahan struktur organisasi Perusahaan;
 - f. Penyampaian arahan Dewan Komisaris berdasarkan hasil kajian mengenai pemanfaatan lahan.

Brief Report on Nomination and Remuneration Committee Activities In 2019

The Nomination and Remuneration Committee's main activities in 2019 included:

1. Evaluating the proposals for prospective company and subsidiary Directors;
2. Evaluating proposed remuneration;
3. Periodically coordinating with Directorate of HC;
4. Together with Risk Management Monitoring Committee and Audit Committee compiling a land use study;
5. Monitoring and evaluating port branches;
6. Following competency enhancement activities;
7. Preparing work plans and periodic reports on the execution of tasks;
8. Attending Committee's internal meetings, meetings with other committees/management, and meetings with Board of Commissioners;
9. Preparing studies and concepts for Board of Commissioners' letters regarding:
 - a. Proposal for amendments to the Articles of Association;
 - b. Proposals for prospective Board of Directors members at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
 - c. Proposals for appointment of Subsidiaries' Board of Directors and Board of Commissioners;
 - d. Proposals for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Board of Directors 2018 Tantiem and 2019 Salaries;
 - e. Approvals for changes in the Company's organizational structure;
 - f. Submission of directives from Board of Commissioners based on the results of studies.



Kebijakan Suksesi Direksi

Salah satu tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi IPC dan Direksi Anak IPC kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, di mana prosesnya akan mengikuti Kebijakan Suksesi Direksi.

Kebijakan tentang pencalonan Direksi kepada Pemegang Saham telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 13/KEP-DK/PI.II/VIII-2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Penetapan *Standard Operating Procedure* (SOP) Proses Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Beberapa pokok kebijakan tersebut adalah:

1. Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham yang berasal dari Perusahaan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku;
2. Dewan Komisaris meminta akses *database personel* satu tingkat di bawah Direksi dan Direksi Anak Perusahaan, yang memuat:
 - a. *Curriculum Vitae*;
 - b. Hasil penilaian kinerja pegawai;
 - c. Laporan harta kekayaan.
3. Dewan Komisaris menetapkan kriteria calon dari *database personel* yang diterima dari Direksi untuk selanjutnya ditetapkan bakal calon-calon yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan;
4. Dewan Komisaris menunjuk lembaga profesional yang dalam keputusan Kementerian BUMN untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan, selanjutnya menetapkan calon yang memperoleh nilai "Disarankan" dan "Disarankan dengan Pengembangan" untuk mengikuti wawancara dengan Dewan Komisaris sebagai calon yang akan diusulkan;
6. Dewan Komisaris berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan serta wawancara menetapkan calon-calon Direksi yang akan diusulkan kepada RUPS;
7. Dewan Komisaris dalam melakukan proses pelaksanaan pencalonan Direksi menggunakan perangkat Dewan Komisaris Komite Nominasi dan Remunerasi.

Board of Directors Succession Policy

One of Nomination and Remuneration Committee task is to provide recommendations regarding prospective members of Board of Directors of IPC and IPC's Subsidiaries to Board of Commissioners to be submitted to General Meeting of Shareholders, where the process will follow Board of Directors' Succession Policy.

The policy regarding the nomination of Board of Directors to Shareholders has been determined based on Board of Commissioners Degree No. 13/KEP-DK/PI.II/VIII-2017 dated August 4, 2017 concerning the Establishment of Standard Operating Procedure (SOP) for the Implementation of Duties and Functions of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Some of the key points of policy are:

1. Board of Commissioners proposes prospective members of Board of Directors to Shareholders from the Company in accordance with applicable guidelines;
2. Board of Commissioners requests access to a database of personnel one level below Board of Directors and Subsidiaries' Board of Directors, which contains:
 - a. *Curriculum Vitae*;
 - b. Employee performance appraisal results;
 - c. Property report.
3. Board of Commissioners determines the criteria for candidates from personnel database received from Board of Directors to further determine candidates who will take the fit and proper test;
4. Board of Commissioners appoints a professional institution which in Ministry of SOEs Degree to conduct a fit and proper test in accordance with applicable regulations;
5. Board of Commissioners evaluates the results of fit and proper test, then determines candidates who get "Recommended" and "Recommended with Development" to follow the interview with Board of Commissioners as candidate to be proposed;
6. Board of Commissioners based on the results of fit and proper test and interviews determine candidates for Board of Directors to be proposed to the GMS;
7. Board of Commissioners conducts the nomination process of Board of Directors using Board of Commissioners' Nomination and Remuneration Committee.

Program Peningkatan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Program peningkatan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Nomination and Remuneration Committee Competency Development Program

The Nomination and Remuneration Committee competency development program has been presented in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) dibentuk untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dalam risiko manajemen perusahaan *Enterprise Risk Management* (ERM). Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 421A/DK/PI.II/XII-2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pedoman Komite Pemantau Manajemen Risiko.

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

The Risk Management Monitoring Committee (RMMC) was established to improve the quality of supervision and advice by Board of Commissioners in Enterprise Risk Management (ERM), based on Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Decision No. 421A/DK/PI.II/XII-2012 dated December 10, 2012 regarding Guidelines of Risk Management Monitoring Committee.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko mengacu pada Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembar Negara Nomor 4297, serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara di antaranya menyangkut pembentukan organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk pembentukan Komite Manajemen Risiko.

Risk Management Monitoring Committee Establishment Basis

The establishment of Risk Management Monitoring Committee refers to Law No. 19 of 2003 on SOEs (State Gazette Year 2003 No. 70, Supplement to State Gazette No. 4297, and Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, including the establishment of a Supporting Board of Board of Commissioners/Board of Supervisory for the establishment of Risk Management Committee.

Komite Pemantau Manajemen Risiko IPC telah terbentuk sejak tahun 2012 dengan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris NO.421A/DK/PI.II/XII-2012 tanggal 10 Desember 2012.

IPC's Risk Management Monitoring Committee has been established since 2012 through Board of Commissioners Decision Letter (SK) No. 421A/DK/PI.II/XII-2012 dated December 10, 2012.

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Manajemen Risiko berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Piagam tersebut ditata dalam bentuk bagian sebagai berikut:

Risk Management Monitoring Committee Charter

In performing its duties and responsibilities, the Risk Management Monitoring Committee is entrusted with the Charter of Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) by Board of Commissioners Decision No. 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 dated July 14 2017 concerning the Update/Stipulation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Charters for the Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee, as follows:

1. Landasan Hukum;
 2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota;
 3. Tugas;
 4. Kewenangan;
 5. Persyaratan Keanggotaan;
 6. Tanggung Jawab;
 7. Rapat;
 8. Laporan;
1. Legal Basis;
 2. Appointment and Dismissal of Members;
 3. Duty;
 4. Authority;
 5. Membership Requirements;
 6. Responsibility;
 7. Meeting;
 8. Report;



9. Akses Kerahasiaan Informasi;
10. Rencana Kerja dan Anggaran;
11. Penghasilan Anggota;
12. Pendidikan dan Tenaga Penunjang;
13. Penilaian Kinerja;
14. Lain-Lain;
15. Penutup.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko

Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Manajemen Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
2. Komite Pemantau Manajemen Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
3. Komite Pemantau Manajemen Risiko memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem Manajemen Risiko serta pelaksanaannya;
4. Komite Pemantau Manajemen Risiko memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
5. Komite Pemantau Manajemen Risiko melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris;
6. Tugas Khusus dari Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Pemantau Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Manajemen Risiko berwenang:

1. Mengakses catatan atau informasi tentang *asset* dan sumber daya lainnya dan memasuki pekarangan, Gedung, serta kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
2. Berhak mendapat dan meminta setiap hasil kajian risiko yang dilakukan baik oleh para *risk owner*, para pejabat struktural terkait, *risk champion*, Satuan Pengawasan Intern maupun Direksi Perseroan
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Dalam melaksanakan kewenangannya, Komite bekerjasama dengan unit kerja terkait, dalam hal ini para *risk owner*, pejabat struktural terkait kendali mutu dan manajemen risiko serta Satuan Pengawasan Internal Perseroan.

9. Access to Information Confidentiality;
10. Work Plan and Budget;
11. Members Income;
12. Education and Supporting Personnel;
13. Performance Appraisal;
14. Others;
15. Closing.

Risk Management Monitoring Committee Duties and Responsibilities

The Risk Management Monitoring Committee Duties are based on Board of Commissioners Decision No. 09/KEP-DK/PI.II/VII-2017 dated July 14, 2017 concerning the Update/Stipulation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Charter for Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee, as follows:

1. Risk Management Monitoring Committee works collectively in performing its duties to assist Board of Commissioners;
2. Risk Management Monitoring Committee is independent in its performance of duties as well as in reports and reports to Board of Commissioners;
3. Risk Management Monitoring Committee provides recommendations on improvements to risk management system and its implementation;
4. Risk Management Monitoring Committee ensures that there is a satisfactory review procedure for any information issued by the Company;
5. Risk Management Monitoring Committee identifies matters requiring the attention of Board of Commissioners and other duties granted by Board of Commissioners;
6. Special Duty from Board of Commissioners.

Risk Management Monitoring Committee Authorities

In carrying out its duties Risk Management Monitoring Committee is authorized to:

1. Access records or information regarding assets and other resources and enter the yards, buildings, and offices used by the Company;
2. Have the right to obtain and request any risk assessment results carried out by the risk owners, related structural officials, risk champions, Internal Audit Unit and Board of Directors of the Company;
3. Request an explanation from Board of Directors and/or other officials regarding all matters relating to management of the Company;
4. In carrying out its authority, the Committee cooperates with related work units, in this case the risk owners, structural officials related to quality control and risk management as well as the Company's Internal Audit Unit.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite pemantau Manajemen Risiko terdiri dari Ketua dan Anggota. Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar perusahaan.

Risk Management Monitoring Committee Structure, Membership and Expertise

The Risk Management monitoring committee consists of a Chairman and Members. Chairman and Members of Risk Management Monitoring Committee are appointed and dismissed by Board of Commissioners. The Chairman of Risk Management Monitoring Committee is a member of Board of Commissioners who can act independently. Members of Risk Management Monitoring Committee can originate from members of Board of Commissioners or from outside the company.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Manajemen Risiko
Risk Management Monitoring Committee Structure, Membership and Expertise


Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Legal Basis of Appointment	Keterangan Information	Keahlian Expertise	Tugas Duty
Montty Giriana	Ketua	11 Oktober 2017 17/KEP-DK/PI.II/IX-2017	Komisaris	Teknik Sipil, Manajemen Transportasi	Pelaksanaan tugas dalam Bidang Manajemen
	Ketua	October 11, 2017 17/KEP-DK/PI.II/IX-2017	Commissioner	Civil Engineering, Transportation Management	Implementation of duties in Management sector
Pionir Harapan	Anggota	17 Maret 2016 07/KEP-DK/PI.II/III-2016	Pihak Independen	Manajemen Risiko, Keuangan	Membantu Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko untuk mendukung kelancaran tugas mencari tambahan informasi, analisis dan memberi masukan dalam perumusan tanggapan atau rekomendasi dalam Bidang Manajemen
	Member	March 17, 2016 07/KEP-DK/PI.II/III-2016	Independent Party	Risk Management, Finance	Assisting Risk Management Monitoring Committee Head in the smooth running of duties by finding additional information, analyzing and providing input for the formulation of responses or recommendations related to Management
R. Nurhidayat	Anggota	31 Mei 2017 08/KEP-DK/PI.II/V-2017	Pihak Independen	Manajemen Risiko, Keuangan	Membantu Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko untuk mendukung kelancaran tugas mencari tambahan informasi, analisis dan memberi masukan dalam perumusan tanggapan atau rekomendasi dalam Bidang Manajemen
	Member	May 31, 2017 08/KEP-DK/PI.II/V-2017	Independent Party	Risk Management, Finance	Assisting Risk Management Monitoring Committee Head in the smooth running of duties by finding additional information, analyzing and providing input for the formulation of responses or recommendations related to Management

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Risk Management Monitoring Committee Profile

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

MONTTY GIRIANA
Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko
Head of Risk Management Monitoring Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris
The profile has been presented in Board of Commissioners' Profile



PIONIR HARAPAN
Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko
Member of Risk Management Monitoring Committee

Tempat dan tanggal lahir Date and Place of Birth:	: Bandung, 9 Juli 1956	Bandung, July 9, 1956
Usia Age	: 63 tahun	63 years
Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia	Indonesian
Riwayat Pendidikan Education History	: • <i>Post Graduate of Economic</i> di bidang Akuntansi dari Universitas Padjadjaran (1984). • <i>Magister Manajemen Keuangan</i> dari IPWI Jakarta (2002).	• <i>Post Graduate of Economic in Accountancy</i> from Padjadjaran University (1984). • <i>Master degree in Financial Management</i> from IPWI Jakarta (2002).
Tanggal Pengangkatan Appointment Date	: 17 Maret 2016	March 17, 2016
Riwayat Jabatan Employment History	: Beliau menduduki berbagai jabatan penting sebelum bergabung di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), antara lain sebagai: • <i>Excutive Project Manager Enterprise Risk Management</i> di PT Garuda Indonesia (2008-2009). • <i>Member of GCG & Risk Management Committee</i> di PT Garuda Maintenance Facility – Aero Asia (2009-2010). • <i>Member of Risk Management Committee</i> di PT Angkasa Pura II (2010-2014). • <i>Member of Risk Management Committee</i> di PT Dirgantara Indonesia (2014-2016).	Held various positions before joining PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), including: • <i>Excutive Project Manager Enterprise Risk Management</i> at PT Garuda Indonesia (2008-2009). • <i>Member of GCG & Risk Management Committee</i> at PT Garuda Maintenance Facility – Aero Asia (2009-2010). • <i>Member of Risk Management Committee</i> at PT Angkasa Pura II (2010-2014). • <i>Member of Risk Management Committee</i> at PT Dirgantara Indonesia (2014-2016).



R. NURHIDAYAT

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko
Member of Risk Management Monitoring Committee

Tempat dan tanggal lahir Date and Place of Birth:	: Pekalongan, 2 Maret 1973	Pekalongan, March 2, 1973
Usia Age	: 46 tahun	46 years
Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia	Indonesian
Riwayat Pendidikan Education History	: <ul style="list-style-type: none"> Diploma III di bidang Anggaran dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1994). Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (2000). Diploma IV di bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2004). Magister Ekonomi Pembangunan di bidang Penilaian Aset dan Properti/Bisnis dari Universitas Gajah Mada (2012). 	<ul style="list-style-type: none"> Diploma III in Budgeting from State Accounting College (1994). Bachelor degree in Accounting from Institute of Economic Science (2000). Diploma IV in Accountancy from State Accounting College (2004). Master's degree in Economic Development and Asset and Property/Business Valuation from Gajah Mada University (2012).
Tanggal Pengangkatan Appointment Date	: 31 Mei 2017	May 31, 2017
Riwayat Jabatan Employment History	: Beliau menduduki berbagai jabatan penting sebelum bergabung di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), antara lain sebagai: <ul style="list-style-type: none"> Aktif pada Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PPAK-STAN) (2002-2005). Delegasi APEC Meeting di Cairns Queensland, Australia (2007). Delegasi ACMF (ASEAN Capital Markets Forum) di Kuala Lumpur (2008). Delegasi Working Committee on Financial Services Liberalization-AFAS di Hanoi, Vietnam (2009). Pengajar di Sekolah Tinggi Manajemen-IMMI dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2014-2015). Peneliti bidang Ekonomi dan Keuangan di Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan (2006-sekarang) Peneliti tentang Efektivitas Kredit Usaha Rakyat, Kredit Peternakan Sapi, Efektivitas Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD-Nias dan Pengembangan Kredit Mikro melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (2015-2016). 	Held various positions before joining PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), including: <ul style="list-style-type: none"> Active in the Accounting and Finance Development Center at State Accounting College (PPAK-STAN) (2002-2005). APEC Meeting Delegation at Cairns Queensland, Australia (2007). ACMF (ASEAN Capital Markets Forum) Delegation at Kuala Lumpur (2008). Working Committee on Financial Services Liberalization-AFAS Delegation at Hanoi, Vietnam (2009). Teacher at College of Management-IMMI and State Accounting College (2014-2015). Researcher in Economics and Finance at Fiscal Policy Agency-Ministry of Finance (2006-present) Researcher on the Effectiveness of People's Business Loans, Cattle Farm Loans, Entrepreneur Empowerment Loan Effectiveness for NAD-Nias and Development of Micro Credit through Non-Bank Financial Institutions (2015-2016).



Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko

Persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan dalam perusahaan;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
5. Salah seorang dari Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko harus memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang Manajemen Risiko;
6. Salah seorang dari anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis Perseroan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Risk Management Monitoring Committee Educational Qualifications and Work Experience

The requirements for membership of Risk Management Monitoring Committee are as follows:

1. Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/audit;
2. Do not have personal interests/relationships that can cause negative impacts and conflicts of interest within the company;
3. Able to communicate effectively;
4. Can provide sufficient time to complete the task;
5. One of members of Risk Management Monitoring Committee must have an educational background or expertise in the field of Risk Management;
6. One of members of Risk Management Monitoring Committee has the ability and understanding of the Company's scope of business.

The Risk Management Monitoring Committee Head and Members' educational qualifications and work experience were as follows:

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko
Risk Management Monitoring Committee Education Qualifications and Work Experience

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Montty Giriana	Ketua	Teknik Sipil, Sistem Transportasi, Perencanaan Kota, Keuangan	Peneliti dan Birokrat
	Chairman	Civil Engineering, Transportation Systems, Urban Planning, Finance	Researcher and Bureaucrat
Pionir Harapan	Anggota	Akuntansi, Manajemen Keuangan	BPKP, berbagai jabatan di PT Garuda Indonesia, Komite Manajemen Risiko di beberapa BUMN
	Member	Accounting, Financial Management	BPKP, various positions at PT Garuda Indonesia, Risk Management Committee in several SOE
R. Nurhidayat	Anggota	Akuntansi, Penilaian Properti/Bisnis	Peneliti dan Birokrat
	Member	Accounting, Property/Business Valuation	Researcher and Bureaucrat

Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Risk Management Monitoring Committee Independence

Tabel Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko
Risk Management Monitoring Committee Independence

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	Montty Giriana	Pionir Harapan	R. Nurhidayat
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Having no management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Having no ownership relationship in the Company	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Having no family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or any other member of Risk Management Monitoring Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Not serving as political party manager, official and government	✓	✓	✓

Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat mengundang pihak manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Setiap rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang hadir. Komite Pemantau Manajemen Risiko mengadakan rapat koordinasi dengan Struktural Manajemen Risiko sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Risk Management Monitoring Committee Meetings

The Risk Management Monitoring Committee holds meeting in the amount of at least the same as the minimum provisions of Board of Commissioners meeting stipulated in the Company's Articles of Association. Risk Management Monitoring Committee may invite the management related to the meeting material to attend the Risk Management Monitoring Committee meeting.

Each Risk Management Monitoring Committee meeting is documented in the minutes of meeting signed by all members of Risk Management Monitoring Committee present. The Risk Management Monitoring Committee holds a coordination meeting with Structural Risk Management at least once in 3 (three) months.



Agenda Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2019, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko, sebagai berikut:

Risk Management Monitoring Committee Meeting Agenda

During 2019, Risk Management Monitoring Committee meeting dates, meeting agenda and participants were as follows.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Risk Management Monitoring Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	2 Januari 2019 January 2, 2019	Tindak lanjut permohonan tanggapan tertulis tentang rencana IPO PT PTP. Follow-up request for written response regarding PT PTP's IPO plan.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
2	14 Januari 2019 January 14, 2019	Rencana Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) Tahun 2019. Risk Management Monitoring Committee Work Plan for 2019.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
3	25 Februari 2019 February 25, 2019	Perpanjangan Kerja Sama Usaha (KSU) Cabang Pontianak dengan IPC TPK. Extension of Business Cooperation (KSU) Pontianak Branch with PT IPC TPK.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
4	27 Februari 2019 February 27 2019	Persetujuan perpanjangan kerjasama pengoperasian terminal peti kemas di pelabuhan Pontianak antara cabang pelabuhan Pontianak dengan PT IPC TPK. Approval of the extension of container terminal joint operation at Pontianak port between Pontianak port branch and PT IPC TPK.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
5	11 Maret 2019 March 11, 2019	Evaluasi <i>Monitoring</i> Laporan Manajemen Risiko TW IV tahun 2018, Surat Direksi KS.01/6/3/1/KRJ/UT/PI.II-19 perihal hasil <i>review</i> atas permohonan usulan rencana kerjasama pemanfaatan lapangan dan gudang 222X (Ex MKT) Cabang Tanjung Priok. Evaluation of Monitoring of Risk Management Report for the fourth Quarter of 2018, Board of Directors Letter KS.01/6/3/1/KRJ/UT/PI.II-19 regarding the review result of the proposed proposal for a joint utilization plan of the 222X (Ex MKT) Tanjung Priok Branch.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
6	13 Maret 2019 March 13, 2019	Review atas Permohonan Persetujuan Usulan Rencana Kerjasama Pemanfaatan Lapangan dan Gudang 222X (Ex MKT) Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan permohonan tanggapan tertulis rencana kerjasama optimalisasi penanganan kargo <i>multi-purpose</i> di cabang Pelabuhan Jambi dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP). Review of Approval Requests for the proposed 222X (Ex MKT) Tanjung Priok Port Branch and Warehouse Utilization Collaboration Requests and requests for written responses to the cooperation plan for optimizing multi-purpose cargo handling at Jambi Port branch with PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP).	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
7	25 Maret 2019 March 25, 2019	Surat Direksi Nomor KS.01/22/3/2/KRJ/UT/PI.II-19 tanggal 22 Maret 2019 perihal Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris terkait dengan Aksi Korporasi yang akan dilakukan atas Rencana Jual Beli 49% Saham Milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk pada PT Krakatau Bandar Samudra. Board of Directors' Letter Number KS.01/22/3/2/KRJ/UT/PI.II-19 dated March 22, 2019 regarding the Application for Approval of Board of Commissioners related to Corporate Action to be carried out on the Sale and Purchase of 49% Shares Owned by PT Krakatau Steel (Persero) Tbk in PT Krakatau Bandar Samudra.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko
Risk Management Monitoring Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
8	2 April 2019 April 2, 2019	Surat dari Direksi tentang SOP penugasan dan surat dari dari direksi mengenai tanggapan atas akuisisi 49% saham PT KS yang ada pada PT KBS. Letter from Board of Directors regarding the assignment SOP and a letter from Board of Directors regarding the response to acquisition of 49% of PT KS shares in PT KBS.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
9	22 Oktober 2019 October 22, 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja Sama Usaha Optimalisasi Penanganan <i>Multipurpose</i> antara Cabang Pelabuhan Bengkulu dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok; • Pembahasan Rencana Kerja Sama Pemanfaatan Lahan dengan PT Styrindo Mono Indonesia; • Pendayagunaan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Oleh PT MMI. <ul style="list-style-type: none"> • Business Cooperation on Optimizing Multipurpose Handling between Bengkulu Port Branch and PT Pelabuhan Tanjung Priok; • Discussion on Land Use Collaboration Plan with PT Styrindo Mono Indonesia; • Utilization of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Fixed Assets By PT MMI. 	Pionir Harapan R. Nurhidayat
10	29 Oktober 2019 October 29, 2019	Tanggapan Tertulis Rencana Kerja Sama Pemanfaatan Lahan dengan PT Styrindo Mono Indonesia. Written Response on the Plan of Land Use Collaboration with PT Styrindo Mono Indonesia.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
11	13 November 2019 November 13, 2019	Laporan Kunjungan Kerja ke Cabang. Report of Work Visit to the Branch.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat
12	11 Desember 2019 December 11, 2019	Rencana Rakortas Komite dengan SPI dan Manajemen Risiko. The National Coordinating Committee's Plan with SPI and Risk Management.	Montty Giriana Pionir Harapan R. Nurhidayat

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Selama tahun 2019, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Risk Management Monitoring Committee Meeting Frequency and Attendance Level

During 2019, Risk Management Monitoring Committee held 12 (twelve) meetings. The frequency and level of attendance of each member of Risk Monitoring Committee is as follows.



Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko
Risk Management Monitoring Committee Meeting Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko Risk Management Monitoring Committee Meetings		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Montty Girianna	Ketua Chairman	12	11	92
Pionir Harapan	Anggota Member	12	12	100
R. Nurhidayat	Anggota Member	12	12	100

Penghasilan Komite Pemantau Manajemen Risiko

Penghasilan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan. Honorarium Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko maksimal 20% dari gaji Direktur Utama Perseroan dengan ketentuan pajak ditanggung oleh Perseroan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Sedangkan Anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua/anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

Risk Management Monitoring Committee Income

The Risk Management Monitoring Committee Members income is determined by Board of Commissioners after considering the Company's ability. The Honorarium for Audit Committee Members is a maximum of 20% of President Director's salary with tax borne by the Company, and they do not receive any other income apart from the honorarium. Commissioners who sit as Risk Management Monitoring Committee Head/Members do not receive additional income above their Commissioners' income.

Komite Pemantau Manajemen Risiko Risk Management Monitoring Committee	Gaji Salary	20% x Gaji Direktur Utama 20% of President Director's salary	46.000.000,00
--	----------------	---	---------------

Pencapaian Key Performance Indicator Komite Pemantau Manajemen Risiko

Risk Management Monitoring Committee Key Performance Indicators Achievement

Indikator Pencapaian Kinerja Key Performance Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
Pelaksanaan Rapat Internal Komite PMR Implementation of the PMR Committee Internal Meetings	Jumlah Total	3.00	12	15	120%	3.60
Laporan Penugasan Komite PMR PMR Committee Assignment Reports	Laporan Reports	3.00	4	4	100%	3.00

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2019

Selama tahun 2019, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

1. Memastikan terlaksananya implementasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMRISK) Fase 3 di IPC Group;
2. Memastikan terlaksananya pelatihan manajemen risiko secara terstruktur;

Brief Report on Risk Management Monitoring Committee Activities in 2019

During 2019, Risk Management Monitoring Committee has carried out its duties and responsibilities including:

1. Ensuring the implementation of Risk Management Information System (SIMRISK) Phase 3 at IPC Group;
2. Ensuring the implementation of structured risk management training;

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Memonitor implementasi <i>Risk and Control Self Assessment</i> (RCSA) dan <i>Assessment</i> terhadap <i>Corporate Initiative</i>; 4. Memastikan terimplementasinya <i>Business Contingency Management</i> berkelanjutan; 5. Memastikan pengkinian Sistem Manajemen Risiko berbasis ISO 31000: 2018 di <i>IPC Group</i>; 6. Mengevaluasi Laporan Divisi Manajemen Risiko terkait proyek strategis; 7. Evaluasi Laporan <i>Risk Maturity Level Assessment</i>; 8. Melakukan Koordinasi dengan Komite Audit dan SPI (Internal Audit) dalam penerapan <i>Risk Based Audit</i>; 9. Melakukan kunjungan ke cabang-cabang dalam rangka memastikan pelaksanaan penerapan manajemen risiko; 10. Mengikuti <i>workshop/seminar</i> terkait dengan risiko (<i>Capacity Building</i>); 11. Evaluasi risiko atas laporan triwulanan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); 12. Mengikuti rapat internal Komite, rapat dengan komite lain/ manajemen, dan rapat dengan Dewan Komisaris; 13. Menyusun kajian dan konsep surat Dewan Komisaris mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Usulan sewa-menyewa antar cabang; b. Evaluasi optimalisasi asset antar cabang; c. Reviu atas Kerjasama pemanfaatan lapangan dan gudang 222X (Ex MKT) Cabang Tanjung Priok; d. Evaluasi atas Permohonan persetujuan kerjasama pengoperasian terminal petikemas di Cabang Pelabuhan Pontianak tahun 2019; e. Evaluasi rencana perpanjangan kerjasama pengoperasian Terminal Petikemas di Cabang Pelabuhan Pontianak; f. Evaluasi rencana aksi korporasi akuisisi. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Monitor the implementation of <i>Risk and Control Self Assessment</i> (RCSA) and <i>Assessment</i> of <i>Corporate Initiative</i>; 4. Ensuring the implementation of sustainable <i>Business Management</i>; 5. Ensuring the updating of an ISO 31000: 2018-based <i>Risk Management System</i> at <i>IPC Group</i>; 6. Evaluate the <i>Risk Management Division Report</i> related to strategic projects; 7. Evaluate the <i>Risk Maturity Level Assessment Report</i>; 8. Coordinating with <i>Audit Committee</i> and <i>SPI</i> (Internal Audit) in implementing <i>Risk Based Audit</i>; 9. Conduct visits to branches in order to ensure the implementation of <i>risk management</i>; 10. Following <i>workshops/seminars</i> related to <i>risk</i> (<i>Capacity Building</i>). 11. <i>Risk evaluation</i> of the quarterly report of <i>PT Pelabuhan Indonesia II</i> (Persero); 12. Following <i>Committee's</i> internal meetings, meetings with other committees/management, and meetings with <i>Board of Commissioners</i>; 13. Develop studies and concepts of <i>Board of Commissioners' letter</i> regarding: <ol style="list-style-type: none"> a. Proposed leases between branches; b. Evaluation of asset optimization between branches; c. Review of 222x (Ex MKT) <i>Tanjung Priok Branch Collaboration</i> on field and warehouse utilization; d. Evaluation of Request for Agreement on the Cooperation of Container Operations in <i>Pontianak Port Branch</i> in 2019; e. Evaluate the plan to extend the <i>Container Terminal operation cooperation</i> at <i>Pontianak Port Branch</i>; f. Evaluation of corporate acquisition action plans. |
|--|---|

Program Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Program peningkatan kompetensi Komite Pemantau Manajemen Risiko telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Risk Management Monitoring Committee Competency Development Program

The competency development program for Risk Management Monitoring Committee has been presented in the Company Profile Chapter in this Annual Report.



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Sekretariat Perusahaan merupakan organ tata kelola perusahaan yang memegang peran signifikan sebagai *Compliance Officer* yang membantu Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi ketentuan terhadap praktik GCG. *Executive Vice President* Sekretariat Perusahaan IPC bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bertugas mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui program komunikasi yang efektif kepada segenap *stakeholders*.

Dasar Pengangkatan Sekretariat Perusahaan

Sekretariat Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan Nomor KP 420/29/3/PI.II-17 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

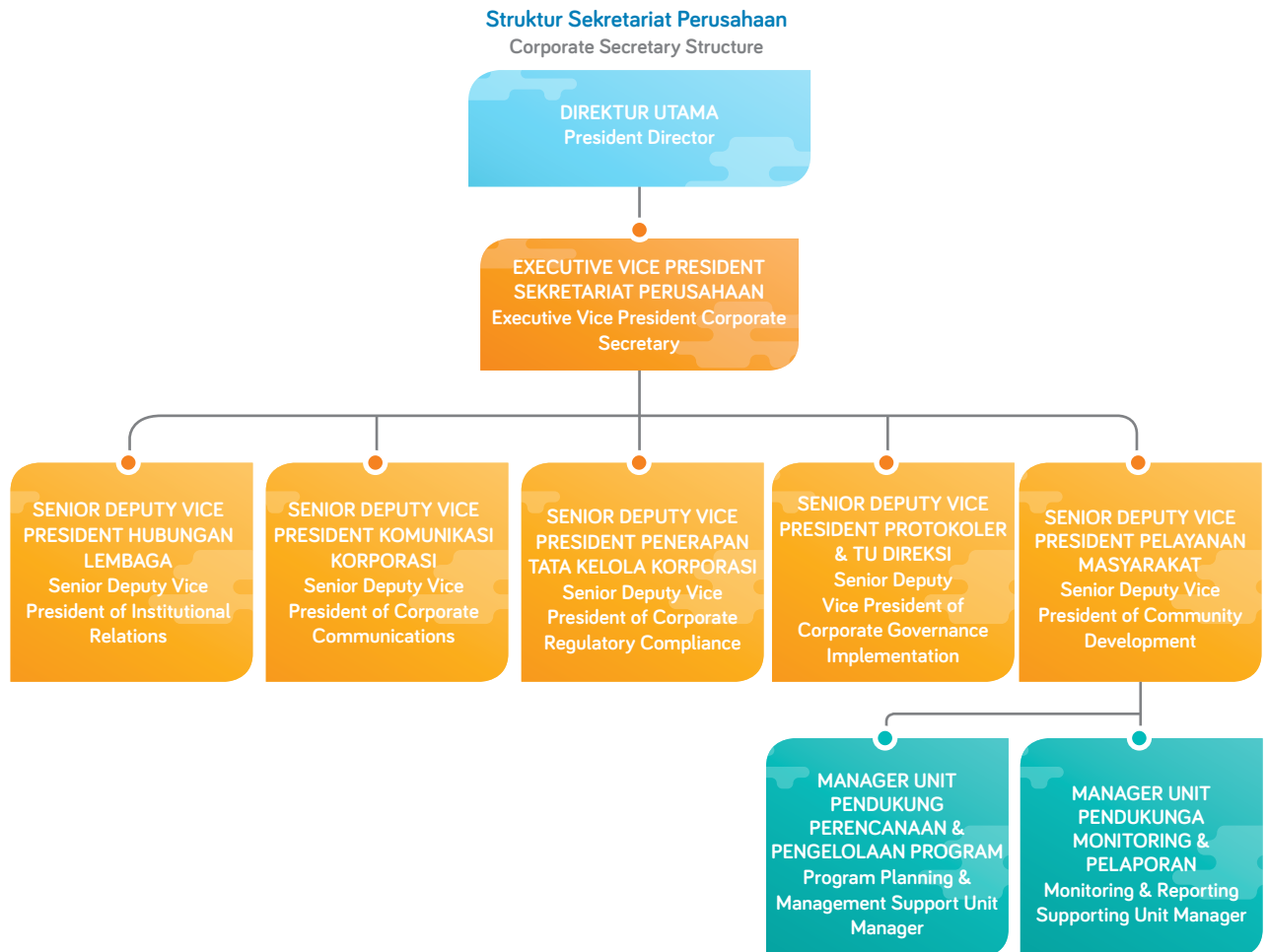
ORGANS AND COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is a corporate governance organ that holds a significant role as the Compliance Officer who assists Board of Directors in implementing GCG principles, and fulfilling GCG practices requirements. The IPC Executive Vice President Corporate Secretary is responsible directly to President Director, and is tasked with developing a mission to support the creation of a consistent and sustainable good corporate image, by managing effective communication programs with all stakeholders.

Corporate Secretary Establishment Basis

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by President Director based on the Company's internal mechanisms with Board of Commissioners approval. This is in accordance with Minister of State Regulation No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The Corporate Secretary Appointment Letter was stipulated by Board of Directors Decision No. KP420/29/3/PI.II-17 dated March 29, 2017 and submitted to Board of Commissioners regarding Appointment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Corporate Secretary.



Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Perusahaan

Secara umum, Sekretariat Perusahaan memiliki fungsi membantu Direksi dalam pengelolaan program kerja bidang komunikasi korporasi, hubungan lembaga, penerapan tata kelola korporasi, protokoler dan tata usaha Direksi, serta kegiatan pelayanan masyarakat Perseroan. Adapun fungsi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu:

1. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Sebagai penghubung (*liaison officer*);

Functions, Duties and Responsibilities of the Corporate Secretariat

In general, the Corporate Secretariat has the function of assisting the Board of Directors in managing work programs in the field of corporate communications, institutional relations, implementing corporate governance, protocols and administration of the Directors, as well as the Company's community development activities. The Corporate Secretary's function is in accordance with SOE Ministerial Regulation Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance, namely:

1. Ensuring that the Company complies with the regulations regarding disclosure requirements in line with the application of GCG principles;
2. Providing information needed by Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board periodically and/or at any time when requested;
3. Acting as a liaison officer;



4. Menatausahakan dan menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, Daftar Pemegang Saham, serta Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris maupun RUPS.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 tanggal 20 November 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), tugas Sekretariat Perusahaan adalah:

1. Memastikan ketaatan dalam mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan informasi sejalan dengan penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan, termasuk dalam mengikuti *Annual Report Award* (ARA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Sebagai penghubung (*liason officer*) untuk membina hubungan dengan lembaga/instansi Pemerintah dan/atau *non* Pemerintah pada skala nasional;
5. Menyelenggarakan rapat Direksi, pengadaan bahan rapat Direksi dan penyusunan risalah rapat Direksi;
6. Menatausahakan serta menyimpan dokumen yang meliputi daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan risalah RUPS Perseroan;
7. Melakukan program pengenalan Perusahaan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat;
8. Pembentukan citra perusahaan yang baik internal maupun eksternal;
9. Mengimplementasikan pedoman GCG, Pedoman hubungan Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) dan Kode Etik Perusahaan;
10. Pengelolaan program kegiatan sosial kemasyarakatan, baik melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) maupun Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/*Corporate Social Responsibility* (CSR);
11. Pengelolaan tata usaha Direksi dan Dewan Komisaris;
12. Pengelolaan hubungan lembaga dengan instansi pemerintah dan/atau *non* Pemerintah Nasional, termasuk memfasilitasi komunikasi dengan calon mitra/investor;
13. Pemenuhan dan pemutakhiran atas setiap perizinan korporasi yang meliputi Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dan perizinan korporasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dari Satuan Pengawasan Internal.

4. Administering and storing Company documents, including but not limited to Special Lists, Shareholders List, and Minutes of Board of Directors Meetings, Board of Commissioners' Meetings and the GMS.

Based on PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s Board of Directors Decree Number OT.01.03/20/11/1/PSO/UT/PI.II-19 dated November 20, 2019 concerning the Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Corporate Secretary duties include:

1. Ensure compliance with regulations regarding information disclosure requirements in line with implementation of Good Corporate Governance Principles;
2. Provide information needed by Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
3. Coordinate preparation of Quarterly and Annual Management Reports, including participating in Annual Report Award (ARA) in accordance with applicable regulations;
4. As a liaison (*liason officer*) to foster relationships with government and/or non-government institutions/agencies on a national scale;
5. Holding Board of Directors meetings, procurement of Board meeting materials and preparation of Board of Directors minutes;
6. Administer and store documents which include the list of shareholders, special lists and minutes of Board of Directors 'meetings, Board of Commissioners' meetings and minutes of the Company's General Meeting of Shareholders;
7. Conduct a Company introduction program for newly appointed members of Board of Directors and Board of Commissioners;
8. Establishment of corporate image both internally and externally;
9. Implement the GCG guidelines, Board of Directors and Board of Commissioners relationship guidelines (*Board Manual*) and the Company Code of Conduct;
10. Management of social activities programs, both through Partnership and Community Development Program (PKBL) and Corporate Social Responsibility (CSR);
11. Administrative management of Board of Directors and Board of Commissioners;
12. Management of institutional relations with government agencies and/or non-National Governments, including facilitating communication with potential partners/investors;
13. Compliance and updating of every corporate license which includes Company Registration, Business License (SIUP) and other corporate licenses in accordance with applicable regulations;
14. Following up on recommendations on findings from Internal Audit Unit.

Profil Sekretariat Perusahaan

Corporate Secretary Profile



SHANTI PURUHITA

Executive Vice President Sekretariat Perusahaan
Executive Vice President Corporate Secretary

Tempat Tanggal Lahir Date and place of birth	Surabaya, 12 Mei 1977	Surabaya, May 12, 1977
Usia Age	: 42 tahun	42 years
Domisili Domicile	: Jakarta	
Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia	Indonesian
Riwayat Pendidikan Education History	: <ul style="list-style-type: none"> Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1999 Magister dari Kuhne Logistics University, Hamburg, Jerman pada tahun 2014. 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Law from Airlangga University Surabaya in 1999 Master from Kuhne Logistics University, Hamburg, Germany in 2014.
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 10 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan No. 428/10/3/1/PI.II-17.	Basis of Appointment: Appointed as Corporate Secretary since March 10, 2017 based on Decree No. 428/10/3/1/PI.II-17.
Riwayat Pekerjaan Job History	: Karir beliau di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dimulai dari: <ul style="list-style-type: none"> Staf Hukum Junior 2000-2006 Staf Hukum Senior 2006 – 2007 Spv. Hukum 2007 – 2008 Advisor Manajemen K3 dan Manajemen Risiko 2008 – 2009 Advisor Pengadaan bidang Adm. & Hukum Cabang Pelabuhan Tanjung Priok 2009 – 2010 AKB.SP. Bidang Restrukturisasi & Manajemen Perubahan Kantor Pusat 2010 – 20112 Pjs. SM. Layanan SDM & Umum Kantor Pusat 2012 – 2013 Pj. SM. Layanan SDM & Umum Kantor Pusat merangkap PJ SM Kesejahteraan 2013 – 2014 SM. Layanan SDM & Umum Kantor Pusat merangkap SM Kesejahteraan 2014 – 2015 Direktur Komersial PT Pengembang Pelabuhan Indonesia 2015 – 2016 VP Hubungan Lembaga Kantor Pusat 2016 – 2017 EVP Sekretaris Perusahaan Kantor Pusat 2017 - sekarang. 	Pursuing career at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with the following positions: <ul style="list-style-type: none"> Junior Legal Staff 2000-2006 Senior Legal Staff 2006 - 2007 Legal Supervisor 2007 - 2008 K3 Management and Risk Management Advisor 2008 - 2009 Procurement Advisor in Administration & Legal at Tanjung Priok Port Branch 2009 - 2010 AKB.SP. Restructuring & Change Management Division of Head Office 2010 - 20112 Acting SM Administration & HC Services of Head Office 2012 - 2013 Acting SM Administration & HC Services of Head Office and concurrently as Acting SM Welfare 2013 - 2014 SM Administration & HC Services of Head Office and concurrently as SM Welfare 2014-2015 Commercial Director of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia 2015 - 2016 VP Institutional Relations of Head Office 2016 - 2017 EVP Corporate Secretary of Head Office 2017 - present.



Program Peningkatan Kompetensi Sekretariat Perusahaan

Program peningkatan kompetensi Sekretariat Perusahaan telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Corporate Secretary Competency Development Program

The Corporate Secretary competency development program can be found in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

Pelaksanaan Tugas Sekretariat Perusahaan Tahun 2019

Pelaksanaan tugas Sekretariat Perusahaan IPC selama tahun 2019, antara lain:

Corporate Secretary Duties In 2019

IPC Corporate Secretary duties during 2019 included:

1. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terjadi di tahun 2019, yaitu:
 - a. RUPS RKAP Tahun 2019 yang diselenggarakan pada 7 Januari 2019;
 - b. RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 yang diselenggarakan pada 29 April 2019.
 2. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Direksi pada tahun 2019 sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali, serta Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris pada tahun 2019 sebanyak 12 (dua belas) kali;
 3. Pembuatan notulen hasil rapat Direksi;
 4. Pendokumentasian notulen Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris;
 5. Menerbitkan Majalah Internal IPC News sebanyak 10 (sepuluh) kali edisi;
 6. Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Acara Korporasi, baik acara internal maupun eksternal, seperti Rakernas Semester I 2019, *Media Port Visit*, *Field Trip*, Buka Puasa Bersama Media, Perayaan Kemerdekaan, *CEO Talk*, Lomba Foto dan Karya Tulis Jurnalistik IPC, *IPC Goes to Campus*, Perayaan HUT IPC dan lainnya;
 8. Menyampaikan CEO Letter yang merupakan informasi dari Direktur Utama kepada seluruh karyawan/insan IPC yang dilakukan setiap akhir bulan, baik melalui email *corporate*, majalah IPC News maupun *E-Office*;
 9. Portal Intranet (*Pop Up* sejumlah 20 (dua puluh), Materi Intranet 75 (tujuh puluh lima));
 10. Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Informasi, Data dan Dokumentasi Perusahaan (PPID), Pedoman Media Komunikasi;
 11. Melakukan *monitoring Website* sehingga dapat meningkatkan kemudahan bagi *stakeholder* dalam mengakses informasi dengan selalu menyediakan informasi yang *up to date* dan akurat pada *Website*;
 12. Mengkoordinasikan wawancara Direksi dengan media;
 13. Melakukan *Press Release* sebanyak 60 (enam puluh) kali selama tahun 2019;
 14. Melakukan kerja sama baik media cetak, media elektronik serta media *online*;
 15. Melakukan dan mereviu media *monitoring* Perseroan;
 16. Pengelolaan media komunikasi digital Perusahaan (*Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Website*, Portal BUMN dan *Youtube*);
1. Organizing and documenting the Annual General Meetings of Shareholders in 2019, namely:
 - a. RKAP AGMS 2019 held on January 7, 2019;
 - b. GMS Ratification of Company's Annual Report 2018 held on April 29, 2019.
 2. Organizing and attending Board of Directors Meetings in 2019 44 (fourty four) times, as well as Joint Meetings of Board of Directors and Board of Commissioners in 2019 12 times;
 3. Keeping minutes of Board of Directors meeting results;
 4. Documenting minutes of Board of Directors' Meetings and joint Meetings of Board of Directors and Board of Commissioners;
 5. Publishing 10 (ten) internal editions of IPC News Magazine;
 6. Conducting information disclosure in accordance with applicable regulations;
 7. Coordinating the implementation of both internal and external Corporate Events, including the 2019 National 1st Semester Meeting, Media Port Visits, Field Trips, Breaking Fast with Media, Independence Celebrations, CEO Talks, IPC Journalistic Photo and Writing Competition, IPC Goes to Campus, IPC and other anniversary celebrations;
 8. Submitting CEO Letters containing information from President Director to all IPC employees at the end of each month, either through corporate e-mail, IPC News and E-Office magazines;
 9. Intranet Portal (20 (twenty) Pop Ups, 75 (seventy five) Intranet Materials);
 10. Disseminating Guidelines for Management of Company Information, Data and Documentation (PPID), Communication Media Guidelines;
 11. Monitoring the Website to increase stakeholder access to information by always providing up to date and accurate information;
 12. Coordinating Board of Directors' interviews with media;
 13. Preparing 60 (sixty) Press Releases during 2019;
 14. Working together in both print media, electronic media and online media;
 15. Conducting and reviewing the Company's media monitoring;
 16. Managing the Company's digital communication media (Facebook, Instagram, Twitter, Website, BUMN Portal and Youtube);

17. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2018 serta menyampaikannya kepada Regulator terkait secara tepat waktu;
 18. GCG Awareness untuk Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pegawai Perseroan;
 19. Melakukan *review* terhadap pedoman GCG, *Board Manual*, Kode Etik Bisnis, Gratifikasi, *Whistleblowing System*;
 20. Melakukan *monitoring* pelanggaran gratifikasi termasuk dengan pelaksanaan sosialisasinya;
 21. *Monitoring* dan memastikan seluruh Insan IPC melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis Perusahaan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris;
 22. Melakukan *monitoring* pelaksanaan *Whistleblowing System*;
 23. Penyaluran Kemitraan dengan Sinergi BUMN, Bina Lingkungan, dan CSR;
 24. Pelaksanaan kegiatan program-program Cinta IPC, seperti Cinta Ramadhan, Idul Adha, Idul Fitri dan Perayaan Natal;
 25. Penyusunan RKAP PKBL 2019 dan Laporan Audit PKBL 2018;
 26. Penyelenggaraan *Stakeholder Gathering* di Museum Maritim pada tanggal 20 Februari 2019 dengan mengangkat topik *Sustainable Sinergi*, Bekerja Nyata untuk Negeri yang dihadiri oleh Pemegang Saham, Kementerian Terkait, Instansi Pemerintahan, Asosiasi, Pengguna Jasa Perbankan, *General Manager* Cabang Pelabuhan dan Direksi Anak Perusahaan;
 27. Mengkoordinasikan penandatanganan MoU dengan:
 - a. Dirjen Hubla (Kementerian Perhubungan) pada tanggal 13 September 2019;
 - b. Kementerian Perdagangan pada tanggal 17 Oktober 2019;
 - c. BPPT pada tanggal 11 November 2019; dan
 - d. *Support* beberapa kerja sama *sisterport* dengan pelabuhan internasional.
17. Preparing the 2018 Annual Report and Financial Sustainability Report and submitting them to the relevant Regulators in a timely manner;
 18. GCG Awareness for Board of Directors, Board of Commissioners and all employees of the Company;
 19. Reviewing GCG guidelines, Board Manual, Code of Conduct, Gratification, Whistleblowing System;
 20. Monitoring gratification violations and the implementation of its socialization;
 21. Monitoring and ensuring all IPC Personnel sign the Integrity and Compliance Pact for the Company's Code of Conduct including Board of Directors and Board of Commissioners;
 22. Monitoring the execution of Whistleblowing System;
 23. Distributing Partnerships with BUMN Synergy, Community Development, and CSR;
 24. Executing IPC Cinta program activities, including Cinta Ramadhan, Eid Al-Adha, Eid Al-Fitr and Christmas Celebration;
 25. Preparing 2019 PKBL RKAP and 2018 PKBL Audit Report;
 26. Held Stakeholder Gathering at the Maritime Museum on February 20, 2019 with the topic of Sustainable Synergy, Real Work for the Country attended by Shareholders, Related Ministries, Government Agencies, Associations, Banking Service Users, Port Branch General Managers and Directors of Subsidiaries;
 27. Coordinated the signing of MoU with:
 - a. Director General of Ministry of Transportation on September 13, 2019;
 - b. Ministry of Trade on October 17, 2019;
 - c. BPPT on November 11, 2019; and
 - d. Support several sister port collaborations with international ports.

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

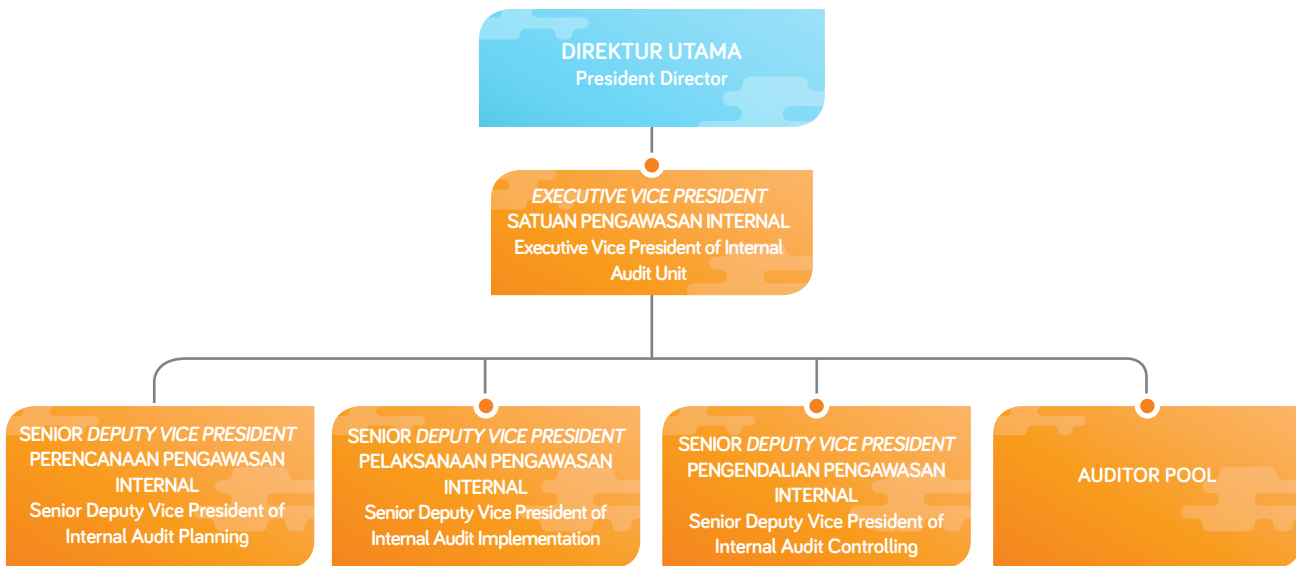
Unit Satuan Pengawasan Internal merupakan salah satu unit kerja Perusahaan yang menjalankan fungsi internal audit atau pengawasan internal sesuai amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER.01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, yang telah diperbarui oleh Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

INTERNAL AUDIT UNIT

Internal Audit Unit is the Company's work unit that performs internal audits, as mandated by Law No. 11 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, and Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER.01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as renewed by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises.



Struktur Organisasi dan Ketua Satuan Pengawasan Internal Organizational Structure and Head of Internal Audit



Kedudukan Satuan Pengawasan Internal Dalam Struktur Organisasi

Kedudukan Satuan Pengawasan Internal dalam struktur organisasi Perseroan berada di bawah langsung Direktur Utama. Dalam Hal ini *Executive Vice President* sebagai pemimpin Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Satuan Pengawas Internal melaporkan hasil pengawasan internal Perusahaan langsung kepada Direktur Utama.

Position of Internal Audit Unit in Organizational Structure

Internal Audit Unit position within the Company's organizational structure is directly below the President Director. The Executive Vice President as Head of Internal Audit Unit is directly responsible to President Director. The Internal Audit Unit reports the Company's internal audit results directly to President Director.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Internal

Head of Internal Audit Profile



Tempat Tanggal Lahir Date and place of birth	: Semarang, 28 September 1969	Semarang, September 28, 1969
Usia Age	: 51 Tahun	51 years old
Domisili Domicile	: Jakarta	Jakarta
Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia	Indonesian

Riwayat Pendidikan Education History	: • Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1993 • Magister Manajemen dari STIE Budi Luhur Jakarta pada tahun 2001, gelar Magister Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2005 • Master di Bidang <i>Shipping & Transport</i> dari Netherland Maritime University, Rotterdam pada tahun 2013	• Bachelor degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB) in 1993 • Master degree in Management from STIE Budi Luhur Jakarta in 2001, Master degree in Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB) in 2005 • Master degree in Shipping & Transport from Netherland Maritime University, Rotterdam in 2013
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: Diangkat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal IPC sejak 1 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor KP.428/31/8/1/PI.II-16.	Appointed as Head of IPC Internal Audit Unit since September 1, 2016 based on Decision Letter Number KP.428/31/8/1/PI.II-16.
Riwayat Jabatan Job History	: Bergabung dengan IPC sejak 1 Januari 1996. Pernah menempati berbagai posisi di IPC, di antaranya: • Staf Evaluasi & Penyusunan Rencana Perusahaan (1997) • Staf Analisa dan Evaluasi Program Dana Desain Sarana (1999) • Staf Analisa dan Evaluasi Pengendalian Proyek (2000) • Asisten Manajer Teknik Sipil (2000) • Staf Koordinator Pengadaan Barang Teknik (2006-2008) • Manager Teknik (2009) • Staf Madya SDM & Umum Senior Kantor Pusat, SM Perencanaan Teknik Kantor Pusat (2013) • Kepala Biro Pengadaan Kantor Pusat (Juni 2016) • EVP Satuan Pengawasan Internal (September 2016)	He joined IPC since January 1, 1996 and held various positions at IPC, including: • Staff Evaluation & Preparation of Corporate Plan (1997) • Analysis and Evaluation Staff of Dana Desain Sarana Program (1999) • Project Control and Evaluation Staff (2000) • Assistant Manager of Civil Engineering (2000) • Staff Coordinator of Procurement of Engineering Goods (2006-2008) • Engineering Manager (2009) • Senior Human Capital & General Affairs at Head Office, Pj. SM Technical Planning Head Office (2013) • Head of Procurement Bureau at Head Office (2016) • EVP Internal Audit Unit (September 2016)
Sertifikasi Certification	: <i>Qualified Internal Auditor</i> dari Dewan Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> (DS – QIA) tahun 2016.	Qualified Internal Auditor from the Qualified Internal Auditor Certification Board (DS - QIA) in 2016.

Program Peningkatan Kompetensi Satuan Pengawasan Internal

Program peningkatan kompetensi Satuan Pengawasan Internal telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Internal Audit Unit Competency Development Program

The Internal Audit Unit's competency development program has been presented in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

Pihak Yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawas Internal dipimpin seorang *Executive Vice President* (EVP). Satuan Pengawas Internal dapat melaporkan hasil pengawasan internal Perusahaan langsung kepada Direktur Utama. EVP Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Parties That Appoint and Dismiss Head Of Internal Audit

The Internal Audit Unit is led by an Executive Vice President (EVP). The Internal Audit Unit reports the Company's internal audit results directly to President Director. The IAU EVP is appointed and dismissed by President Director with the approval of Board of Commissioners.

Piagam Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawas Internal telah memiliki Piagam (*Audit Charter*) yang diterbitkan pada 13 Oktober tahun 2016. Adapun Piagam Satuan Pengawasan Internal (SPI) tersebut merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab

Internal Audit Charter

Internal Audit has an Audit Charter, which was issued on October 13, 2016. The Internal Audit Charter is a formal document stating the purpose, authorities, and responsibilities of internal audit activities by Internal Audit within the Company. The Charter



kegiatan audit intern oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) di perusahaan. Piagam ini berisi pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan atas fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) di perusahaan.

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Visi, Misi, Tata Nilai Strategis
- Bab III : Kode Etik Bisnis
- Bab IV : Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Kewenangan dan Akuntabilitas
- Bab V : Organisasi
- Bab VI : Program Kerja Pengawasan Tahunan
- Bab VII : Pelaporan dan *Monitoring*
- Bab VIII: Komunikasi Satuan Pengawasan Internal
- Bab IX : Evaluasi Piagam Satuan Pengawasan Internal
- Bab X : Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Internal

Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Internal adalah:

1. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola Perusahaan;
2. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan berbasis risiko (*risk-based* audit) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Cq. Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran;
3. Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Program Kerja dimaksud dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Cq. Komite Audit;
4. Menjaga profesionalitas auditor dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup, serta sertifikasi yang diperlukan;
5. Memberikan rekomendasi dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua unit kerja di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
6. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
7. Memonitor, menganalisis dan melaporkan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi audit;
8. Melakukan audit investigasi atau audit khusus atas aktivitas yang terindikasi pidana dan melaporkan hasil investigasi tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
9. Melakukan rapat koordinasi secara periodik dengan Komite Audit;
10. Membuat program penilaian untuk mengevaluasi mutu pelaksanaan audit yang dilakukan;
11. Berkoordinasi dengan audit eksternal;
12. Melaksanakan *Probity Audit* terhadap objek-objek tertentu atas perintah Direktur Utama;

contains recognition of the presence and commitment of the head on the functions of Internal Audit Unit (IAU) in the Company.

- Chapter I : Introduction
- Chapter II : Vision, Mission, Strategic Values
- Chapter III : Code of Conduct
- Chapter IV : Functions, Duties, Responsibilities, Authority and Accountability
- Chapter V : Organization
- Chapter VI : Annual Audit Work Program
- Chapter VII : Reporting and Monitoring
- Chapter VIII: Communication of Internal Audit Unit
- Chapter IX : Evaluation of Internal Audit Unit Charter
- Chapter X : Closing

Internal Audit Duties and Responsibilities

The Internal Audit duties and responsibilities include:

1. Evaluating the adequacy and effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance;
2. Preparing a risk-based audit program and submitting it to Board of Commissioners, also to Audit Committee for consideration and suggestions;
3. Implementing the Annual Audit Work Program approved by President Director and Work Program to be communicated to Board of Directors and Board of Commissioners, also to Audit Committee;
4. Maintaining auditor professionalism by providing sufficient knowledge, skills and experience, as well as the necessary certifications;
5. Providing recommendations and information about the activities examined on all work units within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
6. Reporting the Audit results to President Director and Board of Commissioners;
7. Monitoring, analyzing and reporting the audit recommendations follow-up results;
8. Conducting special investigations or audits of criminal-induced activities, and reporting the results of such investigations to President Director and Board of Commissioners;
9. Conducting coordination meetings periodically with the Audit Committee;
10. Creating an assessment program to evaluate the quality of audit performed;
11. Coordinating with external audit;
12. Implementing *Probity Audit* of certain objects on the orders of President Director;

13. Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan hasil audit oleh auditor internal maupun eksternal dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris Cq. Komite Audit.

Kewenangan Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawasan Internal berwenang untuk:

1. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit;
2. Memiliki akses tak terbatas ke seluruh Direktorat/Divisi/Unit/ Satuan Kerja terhadap dokumen (*hard copy* dan elektronik), properti, dan personil yang terkait dengan penugasan audit;
3. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi pemeriksaan, memilih objek pemeriksaan, menemukan ruang lingkup pemeriksaan, serta menetapkan teknik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan;
4. Meminta bantuan yang diperlukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan kepada audit dan tenaga ahli lainnya, yang berasal dari pihak internal maupun eksternal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
5. Memiliki akses untuk berkomunikasi secara langsung dengan Direktur Utama;
6. Terhadap adanya hambatan yang membatasi wewenang dan mempersulit pelaksanaan pemeriksaan, Satuan Pengawasan Internal wajib melaporkan hal tersebut kepada Direktur Utama.

Satuan Pengawasan Internal tidak mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang diaudit, antar lain:

1. Menjalankan fungsi operasional secara langsung untuk PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) maupun entitas anak perusahaan;
2. Memulai dan menyetujui transaksi yang tidak berkaitan dengan Satuan Pengawasan Internal;
3. Memberikan pengarahan/perintah secara langsung kepada karyawan di luar personil Satuan Pengawasan Internal, kecuali karyawan tersebut diperbantukan di Satuan Pengawasan Internal;
4. Bertanggung jawab langsung terhadap personil, departemen atau aktivitas yang menjadi obyek pemeriksaan;
5. Memberhentikan karyawan atau membubarkan departemen terkait dengan temuan audit;
6. Menyusun dan menjalankan prosedur, sistem atau aktivitas operasional yang menjadi milik obyek pemeriksaan.

13. Conducting follow-up monitoring of audit findings by internal and external auditors and reporting results to President Director with copies submitted to Board of Commissioners, particularly Audit Committee.

Internal Audit Authorities

The Internal Audit Unit is authorized to:

1. Arrange, change and implement internal audit policies including determining the audit procedures and scope of implementation;
2. Have unlimited access to all directorates/divisions/units/work units documents (hard copy and electronics), property, and personnel related to audit assignments;
3. Allocate resources, determine the frequency of examination, select examination objects, examination scope, and determine the examination techniques needed to achieve the examination objectives;
4. Request assistance needed during the audit from the auditee and other experts, from PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) internal and external parties;
5. Have direct communication access to President Director;
6. Report any obstacles that limit the Internal Audit Unit authority and make it difficult to carry out the audit, to President Director.

The Internal Audit Unit does not have the authority to carry out, or the responsibility for the activities audited, including:

1. Conducting operational functions directly for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and its subsidiaries;
2. Starting and approving transactions that are not related to the Internal Audit Unit;
3. Providing directives/orders directly to employees outside the Internal Audit Unit, unless the employee is seconded to the Internal Audit Unit;
4. Being directly responsible for personnel, departments or activities that are the object of examination;
5. Dismissing employees or dissolving the department related to audit findings;
6. Arranging and implementing procedures, systems or operational activities that belong to the inspection object.



Komposisi Personil Satuan Pengawasan Internal

Komposisi Satuan Pengawasan Internal berjumlah 26 (dua puluh enam) personil dan telah memiliki sertifikasi profesi. Rincian komposisi dan sertifikasi profesi personil Satuan Pengawasan Internal adalah sebagai berikut:

Jabatan <i>Position</i>	Jumlah Personil SPI <i>Number of SPI Personnel</i>
EVP. SPI EVP. IAU	1
Senior Deputy Vice President (SDVP)	3
Auditor Utama Main Auditor	0
Senior Auditor	8
Junior Auditor	5
Asisten Auditor Assistant Auditor	6
Senior officer	2
Senior Assistant Officer	1
Jumlah Total	26

Internal Audit Unit Personnel Composition

The Internal Audit Unit comprises 26 (twenty six) professionally certified personnels. The Internal Audit Unit composition and professional certification is as follows.

Sertifikasi Profesi Personil Satuan Pengawasan Internal

Internal Audit Unit Personnel Professional Certification

Sertifikasi Profesi <i>Professional Certification</i>	Jumlah Personil SPI <i>Number of SPI Personnel</i>
QIA	23
CIA	1
CPA	1

Kode Etik Auditor

Auditor Code of Conduct

Independensi dan Obyektivitas

- Seluruh auditor di Satuan Pengawasan internal dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), anak perusahaan, perusahaan afiliasi, dan kerja sama operasi yang dapat mengganggu independensi Satuan Pengawasan Internal;
- Seluruh auditor di Satuan Pengawasan Internal dilarang merangkap jabatan dari kegiatan operasional di lingkungan perusahaan baik induk maupun entitas anak perusahaan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);
- Seluruh auditor di Satuan Pengawasan Internal harus memiliki sikap mental yang obyektif dan independen, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

Independence and Objectivity

- All auditors in Internal Audit Unit are prohibited from being involved in decisions and operational activities of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), subsidiaries, affiliated companies, and operational cooperation that could disrupt the independence of Internal Audit Unit;
- All auditors in Internal Audit Unit are prohibited from concurrently holding positions in operational activities within the parent company or subsidiaries that could lead to a conflict of interest;
- All auditors in Internal Audit Unit must have an objective and independent mental attitude, be impartial and avoid the possibility of conflicts of interest.

Prinsip Dasar

Seluruh auditor di Satuan Pengawasan Internal diharapkan dan menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Integritas
Dapat membangun kepercayaan sehingga menghasilkan keputusan (*judgement*) yang handal;
2. Objektivitas
Dapat membuat penilaian yang seimbang di setiap keadaan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan diri sendiri atau pun orang lain dalam membuat penilaian;
3. Kerahasiaan
Menjaga nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dengan tidak mengungkapkannya tanpa izin otoritas yang berwenang, kecuali ada ketentuan perundang-undangan/hukum atau kewajiban profesional untuk melakukannya;
4. Kompetensi
Dapat menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Standar Perilaku

1. Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif, profesional dan cermat dalam melaksanakan tugas, serta memenuhi tanggung jawab profesinya;
2. Memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap profesi, perusahaan dan unit kerja Satuan Pengawasan Internal, namun tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum;
3. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang dapat merugikan profesi dan perusahaan;
4. Mematuhi sepenuhnya Standar Profesi Internal Audit, kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan perusahaan;
6. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi sikap profesionalisme dan objektivitas pelaksanaan audit;
7. Melaporkan semua hasil pemeriksaan yang bersifat material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan perusahaan atau menjadi permasalahan hukum;
8. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau yang dapat meragukan kemampuannya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab secara objektif;
9. Melakukan tugas sesuai kompetensi profesional yang dimilikinya;

Basic Principles

All auditors in Internal Audit Unit are expected to conform to the following principles:

1. Integrity
Build trust so that it produces reliable judgment;
2. Objectivity
Make balanced judgments in every situation and not be influenced by self-interests or other people in making judgments;
3. Confidentiality
Maintain the value and ownership of information received by not disclosing it without the permission of a competent authority, unless there are statutory/legal provisions or professional obligations to do so;
4. Competence
Apply the knowledge, skills, and experience needed in the implementation of their tasks and responsibilities.

Standards of Behavior

1. Behave and be honest, objective, professional and careful in carrying out their duties, and fulfill their professional responsibilities;
2. Have high integrity and loyalty towards the profession, company, and Internal Audit Unit, and not consciously engage in activities that are deviant or illegal;
3. Avoid activities or actions that can harm the profession and company;
4. Comply fully with Internal Audit Professional Standards, management policies and applicable laws and regulations;
5. Not use information obtained for personal or group interests that can harm the Company;
6. Not accept gifts in any form and from anyone, directly or indirectly, which could affect the professionalism and objectivity of the audit;
7. Report all results of material examinations truthfully, based on the facts and not hide anything that could harm the Company or become a legal issue;
8. Refrain from activities that could cause a conflict of interest or bring doubt on their ability to objectively carry out their tasks and responsibilities;
9. Perform tasks based on the professional competency they have;



10. Meningkatkan kompetensi, efektifitas dan kualitas tugasnya;
11. Menandatangani Pakta Integritas setiap awal tahun.

Kaidah Acuan

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Satuan Pengawasan Internal harus mematuhi dan mengacu pada:

1. Piagam Satuan Pengawasan Internal;
2. Standar Profesi Audit Internal yang berlaku, yaitu IPPF (*International Professional Practices Framework of Internal Auditing*), termasuk *practical guide* dan *practice advisory*;
3. Peraturan-peraturan pengawasan internal lainnya yang berlaku di Perusahaan;
4. Peraturan-peraturan internal lainnya yang terkait yang berlaku di Perusahaan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2019

Selama tahun 2019, Satuan Pengawasan Internal telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Rencana Kerja Manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun pelaksanaan kegiatan audit tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan audit rutin Kantor Pusat dan Cabang;
2. Melakukan Audit khusus pembangunan dan pengembangan Terminal Kijing;
3. Membuat Laporan *Quality Assurance Improvement Program* (QAIP);
4. *Monitoring* tindaklanjut rekomendasi audit menggunakan *e-Audit*;
5. Peningkatan kapasitas fungsi Internal Audit pada level 3;
6. Sinergi IPC Group di bidang pengawasan;
7. Peningkatan komunikasi dengan para *stakeholder* (khususnya Direktur Utama/Komisaris);
8. Penyusunan *Audit Universe* berdasarkan *review risk profile* dari Manajemen Risiko tahun 2020;
9. Penyusunan program kerja pengawasan tahunan tahun 2020;
10. *Monitoring* tindaklanjut rekomendasi audit;
11. Peningkatan kompetensi Auditor;
12. Pengembangan pengetahuan dalam pengelolaan Internal Audit;
13. Optimalisasi aplikasi data *analytic*;
14. Optimalisasi implementasi *e-Audit*.

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Selama tahun 2019, SPI telah melaksanakan 19 (Sembilan belas) penugasan audit rutin Cabang Pelabuhan dan Kantor Pusat, 13 (tiga belas) audit performansi Anak Perusahaan IPC dan 1 (satu) audit khusus pembangunan dan pengembangan Terminal Kijing.

10. Improve their competency, effectiveness and quality of work;
11. Sign the Integrity Pact at the beginning of the year.

Rules For Reference

In carrying out their duties the Internal Audit Unit must comply with and refer to:

1. Internal Audit Unit Charter;
2. Applicable Internal Audit Professional Standards, namely IPPF (*International Professional Practices Framework of Internal Auditing*), including a practical guide and practice advisory;
3. Other internal audit regulations that apply to the Company;
4. Other related internal regulations that apply in the Company.

Brief Report on Internal Audit Activities In 2019

During 2019, Internal Audit Unit has carried out its duties in accordance with the predetermined Management Work Plan. The 2019 audit activities are as follows:

1. Perform routine audits of Head Office and Branches;
2. Conduct a special audit of construction and development of Kijing Terminal;
3. Making a *Quality Assurance Improvement Program* (QAIP) report;
4. Monitoring follow-up on audit recommendations using *e-Audit*;
5. Increasing the capacity of Internal Audit function at level 3;
6. IPC Group Synergy in supervision;
7. Improved communication with stakeholders (especially President Director/Board of Commissioner);
8. Compilation of *Universe Audit* based on a risk profile review from the 2020 Risk Management;
9. Compilation of an annual audit work program in 2020;
10. Monitoring follow-up on audit recommendations;
11. Increased competence of auditors;
12. Development of knowledge in managing Internal Audit;
13. Optimization of analytic data applications;
14. Optimization of *e-Audit* implementation.

Findings and Follow-Up of Audit Results

During 2019, SPI has conducted 19 (nineteen) routine audit assignments for Port Branch and Head Office, 13 (thirteen) performance audits of IPC Subsidiaries and 1 (one) special audit for construction and development of Terminal Kijing.

Hasil pelaksanaan audit tahun 2019, secara keseluruhan menghasilkan 369 temuan. Selanjutnya, terhadap temuan atau rekomendasi tersebut akan dilakukan *monitoring* progres tindak lanjut penyelesaiannya.

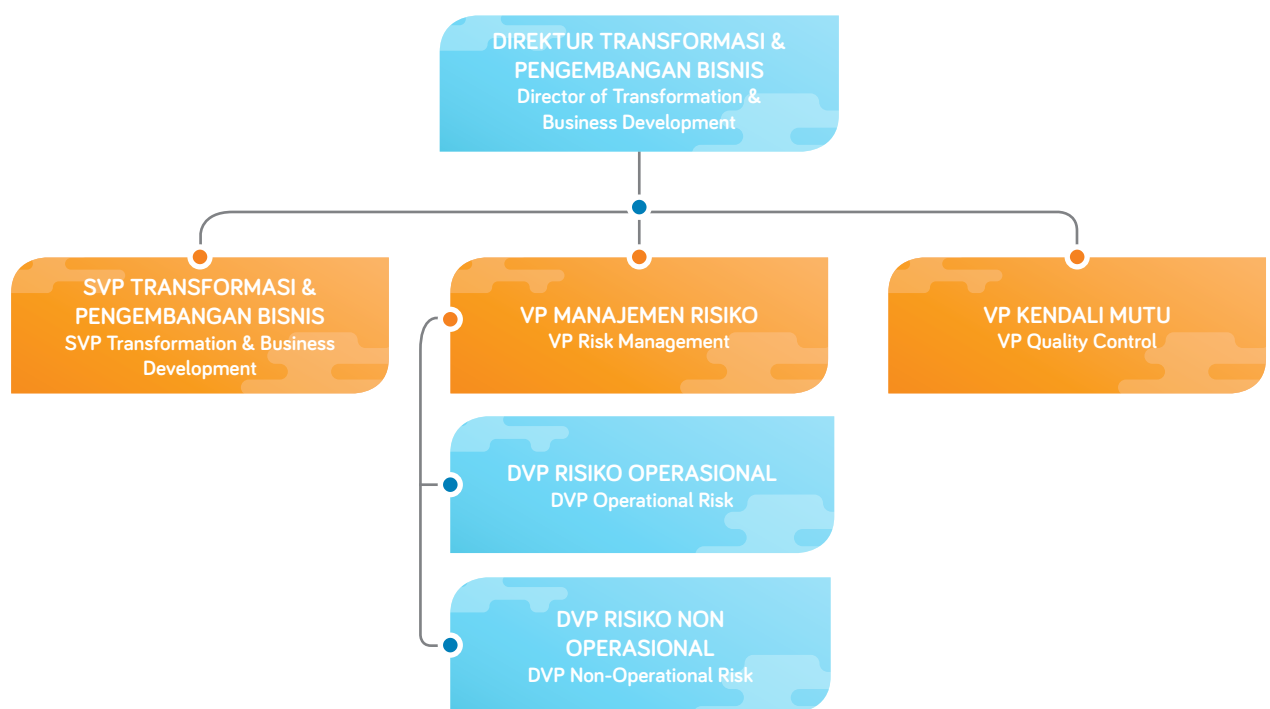
The 2019 audit results carried out in overall resulted 369 findings. Furthermore, the findings or recommendations will be monitored on the progress of follow up.

UNIT MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT UNIT

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Risk Management Organizational Structure



Divisi Manajemen Risiko berada di bawah Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis. Unit kerja ini dipimpin oleh *Vice President* (VP) Manajemen Risiko. Divisi Manajemen Risiko terdiri dari dua departemen yaitu Departemen Risiko Operasional yang dipimpin oleh *Deputy Vice President* (DVP) Risiko Operasional dan Departemen Risiko Non Operasional yang dipimpin oleh *Deputy Vice President* (DVP) Risiko Non Operasional.

Risk Management Division is under Director of Transformation & Business Development. This work unit is led by Vice President Risk Management (VP). Risk Management Division consists of two departments namely Operational Risk Department led by Deputy Vice President (DVP) of Operational Risk and Non-Operational Risk Department led by Deputy Vice President (DVP) of Non-Operational Risk.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko

Risk Management Division Duties and Responsibilities

1. Melakukan reviu terhadap:
 - a. Hasil analisa *risk objective*, *risk appetite* dan *risk tolerance* perusahaan;
 - b. Usulan strategi pengendalian/mitigasi risiko operasional dan non operasional yang signifikan terhadap keberlangsungan perusahaan;
 - c. Usulan pengembangan metodologi *Enterprise Risk Management* (ERM).

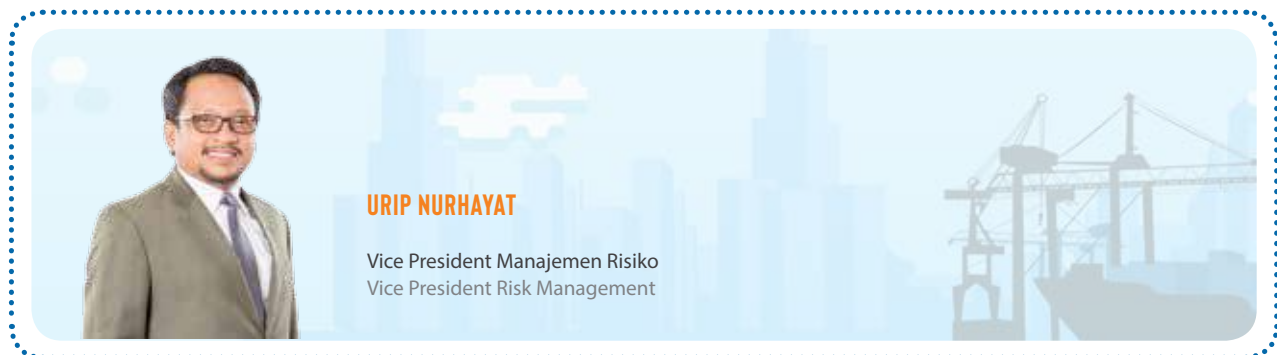
1. Reviewing:
 - a. The Company's risk objective analysis, risk appetite and risk tolerance results;
 - b. Proposed operational and non-operational risk control/mitigation strategies that are significant to the sustainability of the Company;
 - c. Proposed Enterprise Risk Management (ERM) methodology development.



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Merekomendasikan usulan terkait kebijakan manajemen dan penanganan risiko operasional dan risiko non operasional di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang signifikan dan memerlukan perhatian segera; 3. Melakukan <i>monitoring</i> terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. Implementasi kebijakan dan/atau peraturan perusahaan terkait risiko operasional dan risiko non operasional di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); b. Tindak lanjut pengendalian risiko terhadap risiko yang signifikan secara periodik. 4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan <i>Risk & Control Self Assessment</i> (RCSA) secara berkala di masing-masing bagian untuk memastikan pencapaian target perusahaan, penyelesaian proyek yang tepat waktu dengan kualitas yang sesuai dengan kepala Divisi dan Bidang Kantor Pusat, <i>General Manager</i> dan Direktur Anak Perusahaan; 5. Membangun lingkungan sadar risiko di perusahaan dengan menerapkan tata kelola yang baik. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Recommended proposals related to significant PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) management policies and operational and non-operational risks that require immediate attention; 3. Monitoring: <ol style="list-style-type: none"> a. Implementation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) policies and/or company regulations related to operational and non-operational risks; b. Periodic risk control follow-up for significant risks. 4. Coordinating periodic Risk & Control Self Assessments (RCSA) in all areas to ensure the achievement of company's targets, and timely project completion in accordance with Head Office Division Heads, General Managers and Director of Subsidiaries quality requirements; 5. Building a risk culture environment in the Company by implementing good governance. |
|---|---|

Profil Kepala Divisi Manajemen Risiko

Risk Management Division Head Profile



URIP NURHAYAT

Vice President Manajemen Risiko
Vice President Risk Management

Usia Age	: 50 tahun	50 years
Domisili Domicile	: Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education History	: • S1 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara • MBA (<i>Logistic & Leadership</i>), Kühne Logistic University, Hamburg	• Bachelor Degree in Accounting from State Accounting College • MBA (<i>Logistic & Leadership</i>), Kühne Logistic University, Hamburg
Riwayat Jabatan Position History	: • VP <i>Risk Management</i> PT Pelabuhan Indonesia II (2019-sekarang) • SVP <i>Procurement</i> PT Pelabuhan Indonesia II (2016-2017) • <i>Head of Internal Audit</i> PT Pelabuhan Indonesia II (2012-2016) • <i>Freelance Tax Consultant</i> (1994-2009) • <i>Taxation Head of</i> PT Tidar Kerinci Agung (2004-2009) • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP/ <i>The Financial and Development Supervisory Board</i>) (1990-sekarang)	• VP Risk Management of PT Pelabuhan Indonesia II (2019-present) • SVP Procurement of PT Pelabuhan Indonesia II (2016-2017) • Head of Internal Audit of PT Pelabuhan Indonesia II (2012-2016) • Freelance Tax Consultant (1994-2009) • Taxation Head of PT Tidar Kerinci Agung (2004-2009) • Financial and Development Supervisory Board (BPKP/ <i>The Financial and Development Supervisory Board</i>) (1990-present)

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai penyelenggara uji kompetensi bidang Manajemen Risiko dalam rangka membangun sumber daya insani yang mumpuni untuk mendukung implementasi GRC yang efektif di organisasi. Adapun pelatihan Manajemen Risiko Bersertifikasi yang diikuti antara lain:

1. *Qualified Risk Governance Professional (QRGP)*
Sertifikasi QRGP diperuntukan bagi manajemen puncak (Para anggota Direksi di seluruh direktorat) yang berfungsi sebagai *Risk Owner* di tingkatan strategis, serta pihak pengawas (Para Komisaris) yang mengemban tugas pemantauan efektivitas proses manajemen risiko yang dijalankan oleh organisasi, termasuk di dalamnya adalah anggota komite yang berperan sebagai *Risk Adviser* bagi pihak pengawas organisasi;
2. *Qualified Chief Risk Officer (QCRO)*
Sertifikasi QCRO diperuntukan bagi manajemen senior di seluruh direktorat yang berfungsi sebagai *Risk Owner* di tingkatan strategis dan mengemban tugas pemastian efektivitas proses manajemen risiko yang dijalankan oleh unit-unit kerja di bawah koordinasinya, termasuk di dalamnya adalah anggota manajemen puncak yang membidangi penerapan manajemen risiko yang berperan sebagai *Risk Adviser* bagi anggota manajemen puncak organisasi;
3. *Qualified Risk Management Professional (QRMP)*
Sertifikasi QRMP diperuntukan bagi Pimpinan Unit Kerja/ Para manajer di seluruh unit kerja, yang berfungsi sebagai *Risk Owner* di tingkatan operasional dan mengemban tugas memastikan proses manajemen risiko yang dijalankan oleh unit kerjanya, termasuk di dalamnya adalah manajer Unit Manajemen Risiko yang berperan sebagai *Risk Consultant* bagi organisasi;
4. *Qualified Risk Management Analyst (QRMA)*
Sertifikasi QRMA diperuntukan bagi para staf di seluruh unit kerja, staf penyelia, serta para asisten manajer, yang berfungsi sebagai *Risk Officer* tingkat madya/*Risk Champion/ Risk Taking Unit* dan mengemban tugas pelaksanaan proses manajemen risiko yang dijalankan oleh unit kerjanya, termasuk di dalamnya adalah para staf Unit Manajemen Risiko tingkat madya yang berperan sebagai *Risk Analyst* bagi organisasi;
5. *Qualified Risk Management Officer (QRMO)*
Sertifikasi QRMO diperuntukan bagi para *entry level* atau staf di seluruh unit kerja yang berfungsi sebagai *Risk Officer* tingkat mula dan mengemban tugas administratif pendukung proses manajemen risiko yang dijalankan oleh unit kerjanya, termasuk di dalamnya adalah para staf Unit Manajemen Risiko tingkat mula yang berperan sebagai *Risk Facilitator* bagi organisasi.

Risk Management Competency Development

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) cooperates with Professional Certification Institute (LSP) as the organizer of competency test in Risk Management in order to build qualified human capital to support effective implementation of GRC in the organization. The Certified Risk Management training that was attended are:

1. *Qualified Risk Governance Professional (QRGP)*
QRGP certification is intended for top management (members of Board of Directors in all directorates) who function as Risk Owners at the strategic level, as well as supervisors (Commissioners) who monitor the organization's risk management process effectiveness, including committee members acting as Risk Advisers for the organization;
2. *Qualified Chief Risk Officer (QCRO)*
QCRO certification is intended for senior management throughout the directorates who function as Risk Owners at the strategic level, and ensure Risk Management process effectiveness in the units under their coordination, and includes top management with risk management roles as Risk Advisers for the organization's top management;
3. *Qualified Risk Management Professional (QRMP)*
QRMP Certification is intended for Work Unit Managers/ Heads in all work units, who function as Risk Owners at the operational level, and who ensure Risk Management process is carried out by work unit, and includes Risk Management Unit managers who act as a Risk Consultants within the organization;
4. *Qualified Risk Management Analyst (QRMA)*
QRMA certification is intended for staff in all work units, supervisory staff, and assistant managers, who function as middle level Risk Officers/Risk Champions/Risk Taking Unit and carry out the task of implementing Risk Management process carried out by the work unit, including staff at the middle level Risk Management Units who act as Risk Analysts for the organization;
5. *Qualified Risk Management Officer (QRMO)*
QRMO Certification is intended for entry level or staff in all work units functioning as the initial Risk Officers, and who carry out administrative duties to support Risk Management process carried out by work units, including the initial level Risk Management Unit staff who act as Risk Facilitators for the organization.



Sertifikasi Manajemen Risiko

Berikut adalah rekapitulasi jumlah pekerja IPC yang telah memperoleh sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

The Risk Management certification owned by employees of IPC is shown below

Tabel Sertifikasi Manajemen Risiko
Risk Management Certification

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Kompeten Number of Participants
1.	QRGP	Direksi Board of Directors	1 Orang 1 Person
2.	QCRO	Kepala Divisi & Departemen Manajemen Risiko Division & Risk Management Department Heads	3 Orang 3 Persons
3.	QRMP	Kepala Divisi & <i>General Manager</i> Division & General Manager Heads	23 Orang 23 Persons
4.	QRMA	Kepala Departemen & Kepala Bagian Department & Section Heads	95 Orang 95 Persons
5.	QRMO	Staff & ADGM Manajemen Risiko Cabang Staff & ADGM Branch Risk Management	17 Orang 17 Persons

Selain pelatihan manajemen risiko bersertifikasi, berikut adalah pelatihan-pelatihan manajemen risiko lainnya yang diikuti oleh pekerja IPC dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang manajemen risiko.

In addition to certified risk management training, the following shows Risk Management training attended by IPC as part of risk management competency improvements.

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Level Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Kompeten Number of Participants
1.	<i>Risk Assessment Technique</i>	Kepala Departemen, Kepala Bagian dan ADGM Management Risiko Department Head, Section Head and ADGM Risk Management	102 Orang 102 Persons
2.	<i>Project Risk Management</i>	Kepala Divisi & Kepala Departemen Division Head & Department Head	20 Orang 20 Persons
3.	<i>Business Continuity Management</i>	Kepala Divisi & Kepala Departemen Terkait Division Head & Related Department Head	20 Orang 20 Persons
4.	<i>Risk Based Budgeting</i>	Kepala Divisi, Kepala Departemen dan Staff Terkait Head of Division, Head of Department, and Related Staff	11 Orang 11 Persons
5.	<i>Fundamental Risk Management</i>	Staff Staff	75 Orang 75 Persons
Jumlah Total			228 Orang 228 Persons

Program Kerja Manajemen Risiko Tahun 2019

Program Kerja Strategis Manajemen Risiko pada tahun 2019 antara lain:

1. *Business Continuity Management (BCM)*
Business Continuity Management (BCM) adalah proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk menjamin kegiatan operasional perusahaan tetap dapat berfungsi walaupun terdapat gangguan/bencana guna melindungi kepentingan para *stakeholder*.

IPC telah menyusun kebijakan dan Pedoman *Business Continuity Management (BCM)* yang tertuang dalam Surat

Risk Management Work Program In 2019

The Risk Management Work Program In 2019 included:

1. *Business Continuity Management (BCM)*
Business Continuity Management (BCM) is an integrated and comprehensive management process to ensure the Company's operational activities can continue to function despite disruptions/disasters to protect the interests of stakeholders.

IPC has compiled policies and *Business Continuity Management (BCM)* guidelines contained in Board of

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.01/23/12/1/RNO/UT/PI.II-19 tanggal 23 Desember 2019. Dokumen *Business Continuity Management* (BCM) mencakup:

- a. *Business Impact Analysis* (BIA);
- b. *Risk Assessment* (RA);
- c. *Threat Assessment*;
- d. *Business Continuity Strategy* (BCS);
- e. *Procedur drill/Exercise*.

Telah dilakukan *drill* BCM pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2019 di Lingkungan Blok Kantor Pusat (Cabang Tanjung Priok dan Anak Perusahaan), Pelabuhan Teluk Bayur, Bengkulu, Panjang, dan Banten.

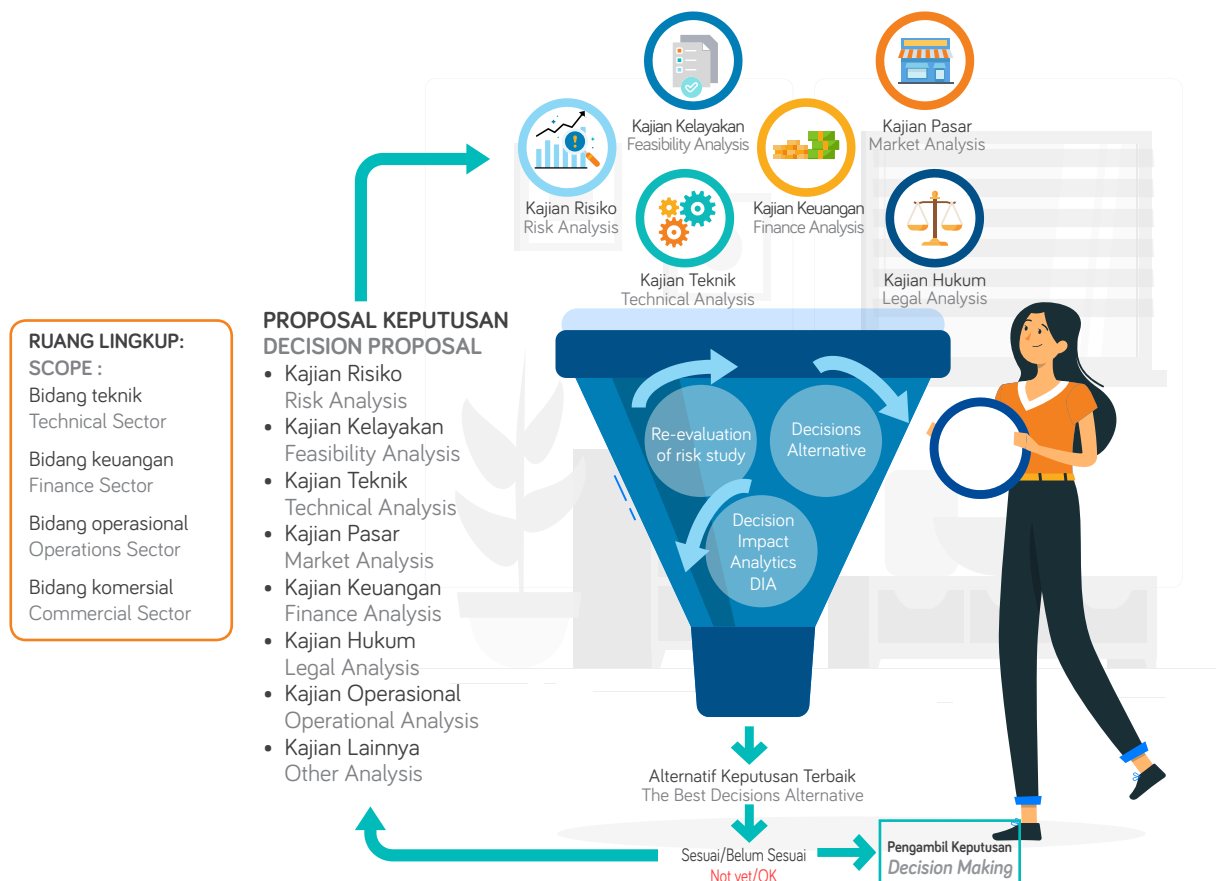
2. Menerapkan manajemen risiko sebagai unsur *decision making process* di bidang komersial, operasional, teknik dan keuangan. Pengambilan Keputusan Berbasis Risiko/*Risk Based Decision Making* (RBDM) adalah proses pengambilan keputusan di tingkat Direksi terkait bidang Teknik, Operasional, Komersial, dan Keuangan yang bersifat strategis, signifikan dan/atau memerlukan persetujuan Pemegang Saham dengan didasarkan pada analisa risiko cermat.

Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number HK.01/23/12/1/RNO/ UT/PI.II-19 dated December 23, 2019. The Business Continuity Management (BCM) document covers:

- a. Business Impact Analysis (BIA);
- b. Risk Assessment (RA);
- c. Threat Assessment;
- d. Business Continuity Strategy (BCS);
- e. Procedure drill/Exercise.

BCM drills have been conducted in August to October 2019 in the Block Head Offices Environment (Tanjung Priok Branch and Subsidiaries), Teluk Bayur Port Branch, Bengkulu, Panjang, and Banten.

2. Implement risk management as an element of decision making process in commercial, operational, technical and financial sectors. Risk Based Decision Making (RBDM) is a decision making process at Board of Directors level related to Technical, Operations, Commercial, and Finance that is strategic, significant and/or requires Shareholder approval based on careful risk analysis.





Penerapan Pedoman Pengambilan Keputusan Berbasis Risiko/*Risk Based Decision Making* (RBDM) IPC tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.01/23/12/2/RNO/UT/PI.II-19 tanggal 23 Desember 2019.

The Implementation of IPC Risk-Based Decision Making Guidelines (RBDM) contained in the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number HK.01/23/12/2/RNO/UT/PI.II-19 dated December 23, 2019.



3. Manajemen Risiko Proyek

Dalam upaya peningkatan kapasitas IPC pada saat ini Perseroan memiliki rencana untuk membangun beberapa infrastruktur yang sangat berpengaruh untuk perkembangan nilai perusahaan.

Dalam kajian risiko yang akan dibuat dalam proyek ini adalah kajian terhadap 2 (dua) pekerjaan sebagai berikut:

a. Pembangunan *New Priok Eastern Access* (NPEA) di Tanjung Priok Jakarta Utara

Merupakan upaya peningkatan kapasitas pelabuhan di Tanjung Priok. IPC pada saat ini telah memiliki terminal baru yang berlokasi di sebelah utara pelabuhan Tanjung Priok eksisting. Terminal baru ini dikenal dengan nama Terminal Kalibaru yang kemudian setelah selesainya Tahap I dan diresmikan oleh Presiden RI menjadi *New Priok Container Terminal I* (NPCT1).

Dalam perencanaannya, kapasitas Terminal Kalibaru didesain secara bertahap untuk dapat melayani total lalu lintas petikemas sebanyak 12,5 Juta TEUS/Tahun (*container terminal*) dan 1,3 Juta Ton/Tahun (*product terminal*).

3. Project Risk Management

In an effort to increase IPC capacity at this time the Company has plans to build several infrastructures that are very influential for the development of company's value.

In risk assessment that will be made in this project is a review of 2 (two) jobs as follows:

a. Development of *New Priok Eastern Access* (NPEA) in Tanjung Priok, North Jakarta

An effort to increase port capacity in Tanjung Priok. IPC currently has a new terminal located to the north of existing Tanjung Priok port. This new terminal is known as the Kalibaru Terminal which was later after the completion of Phase I and was inaugurated by the President of Indonesia to become *New Priok Container Terminal I* (NPCT1).

In its planning, the capacity of Kalibaru Terminal was designed in stages to be able to serve total container traffic of 12.5 Million TEUs/Year (container terminal) and 1.3 Million Tons/Year (product terminal).



- b. Pembangunan Terminal Kijing di Kalimantan Barat
Terminal Kijing dibangun dengan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017. Terminal Kijing merupakan pengembangan dari Pelabuhan Pontianak sebagai solusi atas keterbatasan lahan dan tingginya tingkat sedimentasi sungai yang menyebabkan kapal besar sulit bersandar.

Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan. Keberadaan terminal ini akan memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus mendekati cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Dengan adanya Terminal Kijing akan mendorong pertumbuhan arus barang dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta pengembangan industri perkebunan dan pertambangan di Kalimantan. Selain itu, Terminal Kijing mempunyai draf -15 mLws, kapal-kapal besar dapat bersandar dan melakukan kegiatan bongkar-muat untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat.

- b. Development of Kijing Terminal in West Kalimantan
Kijing Terminal was built based on the Republic of Indonesia's Presidential Regulation No. 43 of 2017. The Kijing Terminal is a development of Pontianak Port as a solution to land limitations and high levels of river sedimentation which make it difficult for large vessels to lean.

As one of the national strategic projects, Pontianak Port Kijing Terminal will become the largest international standard port in Kalimantan. The existence of this terminal will strengthen inter-island connectivity as well as bring Indonesia's ideals closer to being the world's maritime axis.

The existence of Kijing Terminal will encourage the growth of goods flow and have an impact on economic growth and the development of plantation and mining industry in Kalimantan. In addition, Kijing Terminal has a draft of -15 mLws, large vessels can lean and carry out loading and unloading activities to maximize potential of Kalimantan's natural resources, especially West Kalimantan.



Agar pencapaian sasaran dari proyek *New Priok Eastern Access* (NPEA) dan Terminal Kijing dapat tercapai dengan baik, proyek pembangunan ini menerapkan ISO 21500 untuk mendukung profesionalitas perusahaan dan dilaksanakan dengan memanfaatkan manajemen risiko ISO 31000:2018, sehingga sasaran pembangunan proyek dapat dicapai secara efektif dan efisien. Untuk lebih mendalam maka perlu disusun manajemen risiko proyek *Project Risk Management* (PRM) yang dapat dijadikan pedoman agar risiko-risiko yang teridentifikasi dapat dikelola dengan baik.

In order to achieve the objectives of *New Priok Eastern Access* (NPEA) and Kijing Terminal projects, this development project applies ISO 21500 to support the professionalism of the Company and is implemented by utilizing ISO 31000: 2018 risk management, so that project development targets can be achieved effectively and efficient. To be more in depth, it is necessary to develop *Project Risk Management* (PRM) which can be used as a guideline so that the identified risks can be managed properly.

4. Tingkat Maturitas Manajemen Risiko

Enterprise Risk Management merupakan sebuah proses yang diterapkan dalam penentuan strategi perusahaan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mungkin mempengaruhi perusahaan, dan mengelola risiko – risiko dan kecenderungan risiko yang mungkin terjadi, untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian tujuan perusahaan. Proses manajemen risiko sebaiknya juga didukung dengan penetapan tujuan organisasi yang mempertimbangkan dimensi risiko, komunikasi dan aliran informasi yang dinamis, serta pemantauan yang berkelanjutan terhadap seluruh komponen kerangka manajemen risiko. Adapun untuk mengetahui apakah suatu perusahaan telah menerapkan ERM yang efektif, perlu dilakukan pengukuran tingkat kematangan implementasi manajemen risiko, yang dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam pencapaian peningkatan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, Divisi Manajemen Risiko IPC memandang perlu melakukan asesmen terhadap tingkat maturitas implementasi manajemen risiko saat ini, dan

4. Risk Maturity Level

Enterprise Risk Management is a process that is implemented in determining the Company's strategy, designed to identify potential events that might affect the Company, and manage the risks and potential risk that may occur, to provide reasonable guarantees regarding the achievement of company goals. The risk management process should also be supported by setting organizational goals that consider the dimensions of risk, communication and dynamic information flow, and ongoing monitoring of all components of Risk Management framework. As for knowing whether a company has implemented an effective ERM, it is necessary to measure the maturity level of risk management implementation, which can identify strengths and weaknesses of the Company in achieving improved corporate governance and risk management.

Based on this, the IPC Risk Management Division deems it necessary to assess the current level of risk management implementation maturity, and make improvements in areas

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
GCG STRUCTURE AND MECHANISM

melakukan peningkatan/perbaikan pada area yang dianggap perlu untuk mencapai tingkat maturitas yang lebih baik, serta mencapai tujuan perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan adaptabilitas terhadap dinamika bisnis dan kompetisi, dan meminimalkan risiko kegagalan atas pencapaian target bisnis.

Pengukuran tingkat maturitas dan analisis terhadap penerapan Manajemen Risiko mengacu pada Kerangka Kerja Kematangan Risiko yang terdiri dari 3 (tiga) *category* dan 9 (sembilan) *building block*.

deemed necessary to achieve a better level of maturity, and achieve the Company's goals in maintaining and increasing adaptability to dynamics business and competition, and minimize the risk of failure for achieving business targets.

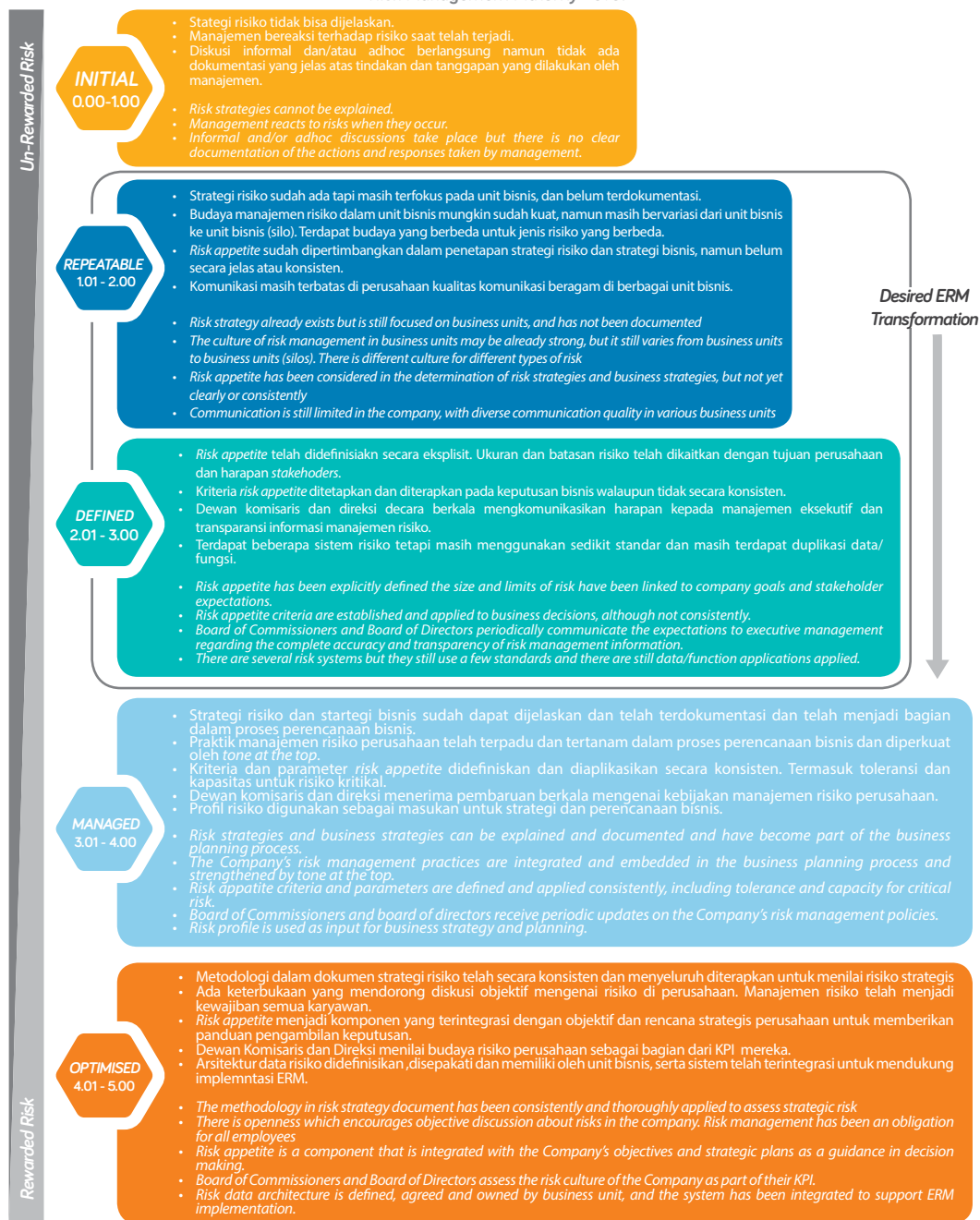
Measurement of maturity level and analysis of the application of Risk Management refers to the Risk Maturity framework which consists of 3 (three) categories and 9 (nine) building blocks.

Kerangka Kerja Kematangan Risiko
Risk Maturity Framework





Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Risk Management Maturity Level



Keterangan :

- Pengukuran tingkat maturitas manajemen risiko telah dilaksanakan pada lingkungan IPC Group pada tahun 2019 yang mencakup 24 Divisi pada Kantor Pusat, 7 Cabang (*sampling*) dan 16 Anak Perusahaan dengan hasil nilai rata-rata Induk Perusahaan (IPC) 2,92, Kantor Cabang 2,57, dan Anak Perusahaan 2,36 dari skala 5,0.
- Pada saat ini nilai maturitas manajemen risiko IPC pada nilai 2,92 yakni berada pada tahap **DEFINED**.
- Pengukuran tingkat maturitas manajemen risiko dibantu oleh pihak konsultan PricewaterhouseCoopers (PwC) dengan metode Pemeriksaan Dokumen, *Focus Group Discussion* (FGD), Wawancara dengan VP/Direksi/*General Manager*, *Workshop* dan Kuesioner.

Note:

- The measurement of risk management maturity level was carried out in IPC Group environment in 2019, which included 24 Divisions at the Head Office, 7 Branches (*sampling*) and 16 Subsidiaries with an average score of Parent Company (IPC) 2.92, Branch Office 2.57, and Subsidiaries 2.36 on a 5.0 scale.
- At present, IPC risk management maturity level is 2.92 which is at the **DEFINED** stage.
- The measurement of risk management maturity level is assisted by PricewaterhouseCoopers (PwC) consultant with the Document Check, Focus Group Discussion (FGD), Interviews with VP/Directors/General Managers, Workshop and Questionnaire methods.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung peningkatan performansi dan transformasi bisnis, serta meningkatkan aspek tata kelola perusahaan yang baik proses pengambilan keputusan Direksi terkait dengan pengelolaan investasi dan risiko Perseroan dalam pelaksanaan tugas Direksi, Direksi membentuk Komite Investasi dan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan No. HK.01/21/7/1/STR/UT/PI.II-17 tanggal 21 Juli 2017.

Struktur dan Keanggotaan Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko terdiri dari 1 (satu) Ketua dan 3 (tiga) Anggota sebagai berikut:

1. Direktur Komersial sebagai Ketua;
2. Direkur Keuangan sebagai Anggota;
3. Direktur Teknik sebagai Anggota;
4. Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis sebagai Anggota.

Seiring dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), maka pada akhir tahun 2019 Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang diketuai oleh Direktur Komersial bersepakat untuk melakukan perubahan struktur tim dan revisi ruang lingkup Komite Investasi dan Manajemen Risiko. Perubahan struktur tersebut meliputi penambahan Anggota Komite dengan menambahkan Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis serta perubahan susunan Kelompok Kerja menjadi 13 (tiga belas) orang dari yang semula hanya 11 (sebelas) orang. Adapun perubahan ruang lingkup yang terjadi adalah penambahan proses evaluasi untuk pra-kajian/kajian kelayakan pengembangan bisnis baru.

Profil Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Nama Name	Jabatan Position	Posisi Position	Riwayat Pendidikan Education History	Riwayat Pekerjaan Employment History
Urip Nurhayat	VP Manajemen Risiko	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> S1 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara MBA (<i>Logistic & Leadership</i>), Kuhne Logistic University, Hamburg 	<ul style="list-style-type: none"> VP Manajemen Risiko Kantor Pusat (2019 - sekarang) SVP Pengadaan Kantor Pusat (2016) Kepala Satuan Pengawasan Intern Kantor Pusat (2014)
	VP Risk Management	Secretary	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor Degree in Accounting from State Accounting College MBA (<i>Logistic & Leadership</i>), Kuhne Logistic University, Hamburg 	<ul style="list-style-type: none"> VP Risk Management in Head Office (2019 - present) SVP Procurement in Head Office (2016) Head of Internal Audit Unit in Head Office (2014)

COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS

Investment and Risk Management Committee

To support business performance and transformation, as well as to improve good corporate governance aspect and Board of Directors decision-making process related to managing the Company's investments and risks in Board of Directors duties implementation, an Investment and Risk Management Committee has been formed based on Decree No. HK.01/21/7/1/STR/UT/PI.II-17 dated July 21, 2017.

Investment and Risk Management Committee Structure and Membership

The Investment and Risk Management Committee Membership consists of 1 (one) Chairman and 3 (three) Members as follows:

1. Director of Commercial as Chairman;
2. Director of Finance as Member;
3. Director of Technical as Member;
4. Director of Transformation & Business Development as Member.

In line with changes in organizational structure within Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), at the end of 2019 the Investment and Risk Management Committee members chaired by Commercial Director agreed to make changes to the team structure and revise the scope of Investment and Risk Management Committee. Changes in the structure include the addition of Committee Members by adding Director of Transformation & Business Development as well as the change in the composition of Working Group to 13 (thirteen) persons from initially only 11 (eleven) persons. The change in scope that occurred is the addition of evaluation process to pre-study/study the feasibility of developing a new business.

Investment and Risk Management Committee Profile



Nama Name	Jabatan Position	Posisi Position	Riwayat Pendidikan Education History	Riwayat Pekerjaan Employment History
Rio T.N Lasse	EVP Perencanaan Strategi Korporasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1997) S2 <i>Engineering Science</i>, The University New South Wales (1999) 	<ul style="list-style-type: none"> EVP Perencanaan Strategi Korporasi Kantor Pusat (2019 – sekarang) EVP Biro Strategi Perusahaan Kantor Pusat (2016) Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2014)
	EVP Corporate Strategic Planning	Member	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Civil Engineering, Bandung Institute of Technology (1997) Master of Engineering Science, The University of New South Wales (1999) 	<ul style="list-style-type: none"> EVP Corporate Strategic Planning in Head Office (2019 - present) EVP Corporate Strategy Bureau in Head Office (2016) Director of Commercial & Business Development of PT. Pengembang Pelabuhan Indonesia (2014)
Arif Rusman Yulianto	SVP Pemasaran	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> D3 Teknik Listrik/Elektronika, Universitas Brawijaya (1997) S1 Teknik Listrik/Elektronika, Universitas Krisnadwipayana (2002) S2 <i>Business Administration</i>, Kuhne Logistics Univeristy (2014) 	<ul style="list-style-type: none"> SVP Pemasaran Kantor Pusat (2019) Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis PT IPC Terminal Peti Kemas (2017 - 2019) VP Hubungan Pelanggan Kantor Pusat (2016)
	SVP Marketing	Member	<ul style="list-style-type: none"> Diploma of Electrical/Electronic Engineering, Brawijaya University (1997) Bachelor of Electrical/Electronic Engineering, Krisnadwipayana University (2002) Master of Business Administration, Kuhne Logistics University (2014) 	<ul style="list-style-type: none"> SVP Marketing in Head Office (2019) Director of Commercial & Business Development of PT IPC Terminal Peti Kemas (2017 - 2019) VP Customer Relations in Head Office (2016)
Udin Mahmudin	SVP Konstruksi Sipil	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Teknik Sipil, Universitas 11 Maret (1993) S2 Manajemen, STIE Budi Luhur (2002) 	<ul style="list-style-type: none"> SVP Konstruksi Sipil Kantor Pusat (Desember 2019) <i>General Manager</i> Cabang Pelabuhan Cirebon (Januari 2019) <i>General Manager</i> Terminal 2 PT Pelabuhan Tanjung Priok (2014)
	SVP Civil Construction	Member	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Civil Engineering, 11 Maret University (1993) Bachelor of Management, STIE Budi Luhur (2002) 	<ul style="list-style-type: none"> SVP Civil Construction in Head Office (December 2019) General Manager of Cirebon Port Branch (January 2019) General Manager of Terminal 2 PT Pelabuhan Tanjung Priok (2014)
Kartiko Yuwono	VP Peralatan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Teknik Mesin, Universitas Gadjah Mada (1994) S2 <i>Port Management</i>, World Maritime University (2000) 	<ul style="list-style-type: none"> VP Peralatan Kantor Pusat (2019) <i>General Manager</i> Cabang Pelabuhan Jambi (2018) <i>General Manager</i> Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa (2017)
	VP Equipment	Member	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Mechanical Engineering, Gadjah Mada University (1994) Master of Port Management, World Maritime University (2000) 	<ul style="list-style-type: none"> VP Equipment in Head Office (2019) General Manager of Jambi Port Branch (2018) General Manager of Sunda Kelapa Port Branch (2017)

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
GCG STRUCTURE AND MECHANISM

Nama Name	Jabatan Position	Posisi Position	Riwayat Pendidikan Education History	Riwayat Pekerjaan Employment History
Imam Rahmiyadi	SVP Pelayanan Terminal	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 STIP (2000) S2 <i>Maritime Affairs in Shipping and Port Management</i>, World Maritime University (2012) 	<ul style="list-style-type: none"> SVP Pelayanan Terminal Kantor Pusat (2019) DVP Pelayanan Non Petikemas Kantor Pusat (Januari 2019) DVP Pelayanan Barang & Penumpang Kantor Pusat (2016)
	SVP Terminal Services	Member	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of STIP (2000) Bachelor of Maritime Affairs in Shipping and Port Management, World Maritime University (2012) 	<ul style="list-style-type: none"> SVP Terminal Services in Head Office (2019) DVP Non-Container Services in Head Office (January 2019) DVP Goods & Passenger Services in Head Office (2016)
Ikhwanoel	SVP Perencanaan dan Pengendalian Keuangan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> D3 Ekonomi Akuntansi, Politeknik ITB (1999) S1 Ekonomi Akuntansi, Universitas Persada Indonesia (2004) 	<ul style="list-style-type: none"> SVP Perencanaan & Pengendalian Keuangan Kantor Pusat (Desember 2019) VP Layanan Keuangan Kantor Pusat (2018) DVP Akuntansi Umum & Sistem Keuangan Kantor Pusat (2017)
	SVP Financial Planning & Control	Member	<ul style="list-style-type: none"> Diploma of Accounting Economics, ITB Polytechnic (1999) Bachelor of Accounting Economics, Persada Indonesia University (2004) 	<ul style="list-style-type: none"> SVP Financial Planning & Control in Head Office (December 2019) VP Financial Services in Head Office (2018) DVP General Accounting & Financial System in Head Office (2017)
Usman Saroni	SVP Pengelolaan Keuangan Perusahaan & Cabang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> D4 Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (2000) S2 <i>Maritime Affairs In Shipping And Port Management/ Maritime Affair</i>, World Maritime University (2015) 	<ul style="list-style-type: none"> VP Pengelolaan Anak Perusahaan & Cabang Kantor Pusat (2019) VP Kendali Mutu Kantor Pusat (2016) Koord. PMO Project Controlling Kantor Pusat (2016)
	VP Company & Branches Financial Management	Member	<ul style="list-style-type: none"> Diploma 4 of Education and Training of Seafarers and Sea Port Management (2000) Bachelor of Maritime Affairs in Shipping and Port Management/Maritime Affairs, World Maritime University (2015) 	<ul style="list-style-type: none"> VP Subsidiaries & Branches Management in Head Office (2019) VP Quality Control in Head Office (2016) PMO Project Controlling Coordinator in Head Office (2016)
Kurnia Jaya	SVP Hukum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada (1999) S2 Hukum Maritim, Queensland University (2006) S2 <i>MBA in Leadership & Logistic</i>, Kuhne Logistic University (2017) 	<ul style="list-style-type: none"> SVP Hukum Kantor Pusat (2016) Kepala Biro Hukum Kantor Pusat (2015) Manager Pengadaan PT. Pelabuhan Tanjung Priok (2014)
	SVP Legal	Member	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Law, Gadjah Mada University (1999) Master of Maritime Law, Queensland University (2006) MBA of Leadership & Logistics, Kuhne Logistic University (2017) 	<ul style="list-style-type: none"> SVP Legal in Head Office (2016) Head of Legal Bureau in Head Office (2015) Procurement Manager of PT. Pelabuhan Tanjung Priok (2014)



Nama Name	Jabatan Position	Posisi Position	Riwayat Pendidikan Education History	Riwayat Pekerjaan Employment History
Retno Soelistianti	SVP Transformasi & Pengembangan Bisnis	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Arsitektur, Universitas Trisakti (1996) S2 <i>Engineering</i>, IHE Delft (2002) 	<ul style="list-style-type: none"> SVP Transformasi & Pengembangan Bisnis Kantor Pusat (2019) Koordinator Satuan Kerja Proyek Strategis Kantor Pusat (2016) Direktur Utama PT. Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015)
	SVP Business Transformation & Development	Member	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Architecture, Trisakti University (1996) Master of Engineering, IHE Delft (2002) 	<ul style="list-style-type: none"> SVP Business Transformation & Development in Head Office (2019) Strategic Project Work Unit Coordinator in Head Office (2016) President Director of PT. Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015)
M. Hadi Syafitri Noor	VP Manajemen Aset	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Teknik Sipil, Universitas Tanjungpura (1996) S2 UNESCO IHE Water Science and Engineering/Coastal Engineering & Port Dev (2011) 	<ul style="list-style-type: none"> VP Manajemen Aset Kantor Pusat (2019) Direktur Utama PT Pengerukan Indonesia (2017) Direktur Komersial dan Teknik PT Pengerukan Indonesia (2014)
	VP Asset Management	Member	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Civil Engineering, Tanjungpura University (1996) Bachelor of Unesco IHE Water Science and Engineering/ Coastal Engineering & Port Dev (2011) 	<ul style="list-style-type: none"> VP Asset Management in Head Office (2019) President Director of PT Pengerukan Indonesia (2017) Commercial and Technical Director of PT Pengerukan Indonesia (2014)
Nunu Husnul Khitam	SVP Sistem Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> D3 Indonesia Amerika Institut Komputer/Informatika (1993) S1 Manajemen Informatika, STIMIK Perbanas Jakarta (2003) S2 <i>Business Administration/ Leader Ship & Logistics</i>, Kuhne Logistics University (2015) 	<ul style="list-style-type: none"> SVP Sistem Informasi Kantor Pusat (2017) DVP Pelayanan Petikemas Kantor Pusat (2016) Analyst Bid. <i>ICT Development</i> Sr. Kantor Pusat (2014)
	SVP Information System	Member	<ul style="list-style-type: none"> Diploma of Indonesia American Computer/ Informatics Institute (1993) Bachelor of Information Management, STIMIK Perbanas Jakarta (2003) Master of Business Administration/Leader Ship & Logistics, Kuhne Logistics University (2015) 	<ul style="list-style-type: none"> SVP Information System in Head Office (2017) DVP Container Service in Head Office (2016) Sr. <i>ICT Development</i> Analyst in Head Office (2014)
Zuhri Iryansyah	SVP Manajemen Proyek Strategis SVP Strategic Project Management	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 Teknik Sipil, Universitas Trisakti (1993) S2 UNESCO IHE Water Science and Engineering/Coastal Engineering (2011) 	<ul style="list-style-type: none"> SVP Manajemen Proyek Strategis Kantor Pusat (2019) Koordinator Satuan Kerja Proyek Strategis Kantor Pusat (2017) Direktur Konstruksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015)
		Member	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Civil Engineering, Trisakti University (1993) Master of Unesco IHE Water Science and Engineering/ Coastal Engineering (2011) 	<ul style="list-style-type: none"> SVP Strategic Project Management in Head Office (2019) Strategic Project Work Unit Coordinator in Head Office (2017) Construction Director of PT. Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015)

Tugas dan Wewenang Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Komite Investasi dan Manajemen Risiko memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan asesmen dan reviu terhadap pra kajian kelayakan dan/atau keujian kelayakan pengembangan bisnis baru;
2. Menganalisis, mengevaluasi serta memberikan rekomendasi atas usulan program investasi perusahaan dan strategi manajemen risikonya, berdasarkan hasil studi kelayakan terkait program kerja/proyek dan investasi Perseroan;
3. Mengevaluasi atas kelayakan dan/atau usulan investasi Perseroan yang telah dianggarkan dalam RKAP di tahun berjalan, baik atas permintaan Direktorat Teknis Terkait atau inisiatif Komite Investasi;
4. Mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan terkait rencana investasi atas pengembangan pelabuhan dan strategi pengimplementasiannya;
5. Dapat meminta bantuan dan melakukan penunjukan konsultan atau ahli independen dalam analisis dan evaluasi atas investasi tertentu.

Ruang lingkup tugas dan wewenang Komite Investasi dan Manajemen Risiko adalah meliputi:

1. Investasi dalam ruang lingkup fungsi Komite Investasi dan Manajemen Risiko yaitu untuk Investasi Perseroan atas suatu program kerja/proyek dengan nilai investasi lebih dari Rp50 Miliar;
2. Pra Kajian Kelayakan dan Kajian Kelayakan yang merupakan pengembangan bisnis baru;
3. Pengkualifikasian Proyek Strategis untuk proyek-proyek tertentu yang memenuhi minimal salah satu dari kriteria sebagai berikut:
 - a. Dikategorikan merupakan Investasi Strategis karena merupakan proyek investasi lebih dari Rp500 Miliar;
 - b. Proyek investasi yang melibatkan koordinasi dan kerjasama dengan banyak instansi pemerintahan;
 - c. Proyek investasi yang oleh dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Direksi sebagai investasi strategis;
 - d. Proyek strategis nasional dan/atau percepatan pembangunan nasional yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Perseroan.

Pelaksanaan Tugas Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi, Komite Investasi dan Manajemen Risiko akan melakukan tugasnya saat permintaan *review* usulan investasi datang dari Direktur Keuangan dengan usulan investasi tersebut sebelumnya telah diterima dan dinyatakan lengkap dari Pengusul Investasi dalam rangka penganggaran program kerja. *Review* terkait usulan investasi yang merupakan pengembangan bisnis eksisting akan dilaksanakan oleh Direktorat Komersial, sedangkan usulan

Investment and Risk Management Committee Duties and Authority

Investment and Risk Management Committee has the following duties and authorities:

1. Assess and review the results of pre-feasibility study and/or feasibility study related to new business development;
2. Re-analyzing the Company's feasibility studies and/or proposed investments that have been budgeted in the RKAP in the current year, either at the request of Related Technical Directorate or Investment Committee;
3. Evaluate the Company's feasibility studies and/or proposed investments that have been budgeted in the RKAP in the current year, either at the request of Related Technical Directorate or Investment Committee;
4. Evaluating and recommending policies related to investment plans for port development and implementation strategies;
5. Requesting assistance and appointing consultants or independent experts for the analysis and evaluation of certain investments.

The Investment and Risk Management Committee duties and authorities include:

1. Investments within the Investment and Risk Management Committee scope, namely for the Company's Investment in work programs/projects with an investment value of more than Rp50 billion;
2. Pre-feasibility study and feasibility study of new business development;
3. Strategic Project Qualification for certain projects that meet at least one of the following criteria:
 - a. Categorized as a Strategic Investment as it is an investment project worth more than Rp500 billion.
 - b. Investment projects that involve coordination and cooperation with multiple government agencies;
 - c. Investment projects that are considered and determined by Board of Directors as a strategic investment;
 - d. National strategic projects and/or accelerated national development assigned by Government to the Company.

Investment and Risk Management Committee Duties

As stipulated in Board of Directors Decree, Investment and Risk Management Committee will carry out its duties when request for a review of investment proposals comes from Finance Director with investment proposal previously received and declared complete from Investment Proposer in the framework of work program budgeting. Review related to investment proposals which constitute the existing business development will be carried out by Commercial Directorate, while investment



investasi yang merupakan pengembangan bisnis baru akan dilaksanakan oleh Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis. Hasil *review* kemudian dibahas dalam Rapat Komite untuk disimpulkan dan kemudian dilaporkan dalam Rapat Direksi untuk mendapat keputusan akhir.

Sepanjang tahun 2019 telah masuk beberapa usulan investasi yang masuk ke Komite Investasi dan Manajemen Risiko dengan nilai investasi \geq Rp 50 Miliar berasal dari Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan di lingkungan IPC Group.

Komite IPC Bersih

Dalam rangka pelaksanaan GCG di IPC dan sejalan dengan program BUMN Bersih yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN, IPC menerapkan *Whistleblowing System* (WBS). Untuk efektivitas penerapan WBS di IPC Direksi membentuk Komite IPC Bersih berdasarkan Surat Keputusan No. HK.01/10/12/1/KPP/UT/PI.II-19 tanggal 10 Desember 2019.

Struktur dan Keanggotaan Komite IPC Bersih

Jabatan dalam Tim <i>Team Posisi</i>	Unit Kerja <i>Work Unit</i>
Ketua Chairman	EVP Sekretariat Perusahaan EVP Corporate Secretary
Wakil Deputy	SVP Hukum SVP Legal
Anggota Member	EVP Satuan Pengawas Internal EVP Internal Audit Unit
Anggota Member	VP Manajemen Risiko VP Risk Management
Anggota Member	VP Layanan SDM VP of HC Services
Sekretaris Secretary	SDVP Penerapan Tata Kelola Korporasi SDVP Implementation of Corporate Governance

proposals which constitute new business development will be carried out by Directorate of Business Transformation and Development. The results of review are then discussed at Committee Meeting to be concluded and then reported at Board of Directors' Meeting for a final decision.

Throughout 2019 several investment proposals were submitted to Investment and Risk Management Committee with an investment of \geq Rp 50 billion originating from Port Branch and Subsidiaries within the IPC Group.

IPC Bersih Committee

In the context of implementing GCG in IPC and in line with BUMN Bersih program launched by the Ministry of SOE, IPC has implemented a *Whistleblowing System* (WBS). For the effectiveness of WBS in IPC, Board of Directors established IPC Bersih Committee based on Decree No. HK.01/10/12/1/KPP/UT/PI.II-19 dated Desember 10, 2019.

IPC Bersih Committee Structure and Membership

Profil Komite IPC Bersih

IPC Bersih Committee Profile

Nama Name	Jabatan Position	Riwayat Pendidikan Education History	Riwayat Pekerjaan Employment History
Shanti Puruhita	EVP Sekretariat Perusahaan EVP Corporate Secretary	Riwayat Pendidikan beliau dapat dilihat pada bagian Profil Sekretariat Perusahaan. Education history can be seen in the Profile section of Corporate Secretariat.	Riwayat Pekerjaan beliau dapat dilihat pada bagian Profil Sekretariat Perusahaan. Employment history can be seen in the Profile section of Corporate Secretariat
Kurnia Jaya	SVP Hukum	<ul style="list-style-type: none"> S1 Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada (1999); S2 Hukum Maritim, Queensland University (2006); S2 MBA in Leadership & Logistic, Kuhne Logistic University (2017). 	<ul style="list-style-type: none"> SVP Hukum Kantor Pusat (2016); Kepala Biro Hukum Kantor Pusat (2015); Manager Pengadaan PT Pelabuhan Tanjung Priok (2014).
	SVP Legal	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Legal Studies, Gajah Mada University (1999); Master of Maritime Law, Queensland University (2006); MBA in Leadership & Logistics, Kuhne Logistic University (2017). 	<ul style="list-style-type: none"> SVP Legal in Head Office (2016) Head of Legal Bureau in Head Office (2015) Procurement Manager of PT. Pelabuhan Tanjung Priok (2014)
Nurkholis Lukman	VP Layanan SDM	S1 Sistem Informasi Universitas Bina Darma (2009).	<ul style="list-style-type: none"> VP Layanan Sumber Daya Manusia Kantor Pusat (Desember 2019); General Manager Cabang Pelabuhan Bengkulu (Januari 2019); General Manager Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan (2018).
	VP HC Services	Bachelor of Information Systems, University of Bina Darma (2009).	<ul style="list-style-type: none"> VP Human Capital Services in Head Office (December 2019); General Manager of Bengkulu Port Branch (January 2019); General Manager of Tanjung Pandan Port Branch (2018).
Urip Nurhayat	VP Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> S1 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara MBA (Logistic & Leadership), Kuhne Logistic University, Hamburg 	<ul style="list-style-type: none"> VP Manajemen Risiko Kantor Pusat (2019 - sekarang); SVP Pengadaan Kantor Pusat (2016); Kepala Satuan Pengawasan Intern Kantor Pusat (2014).
	VP Risk Management	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor Degree in Accounting from State Accounting College MBA (Logistic & Leadership), Kuhne Logistic University, Hamburg 	<ul style="list-style-type: none"> VP Risk Management in Head Office (2019 - present); SVP Procurement in Head Office (2016); Head of Internal Audit Unit in Head Office (2014),



Nama Name	Jabatan Position	Riwayat Pendidikan Education History	Riwayat Pekerjaan Employment History
Widodo	EVP Satuan Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1993); S2 Manajemen, STIE Budi Luhur (2001); S2 Teknik, Institut Teknologi Bandung (2005); S2 <i>Shipping and Transportation</i>, Netherlands Maritime University (2013). 	<ul style="list-style-type: none"> EVP Satuan Pengawasan Internal Kantor Pusat (Januari 2019); Kepala Biro Pengadaan Kantor Pusat (2014); SM. Perencanaan Teknik Kantor Pusat (2013).
	EVP Internal Audit Unit	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Civil Engineering, Bandung Institute of Technology (1993); Master of Management, STIE Budi Luhur (2001); Master of Engineering, Bandung Institute of Technology (2005); Master of Shipping and Transportation, Netherlands Maritime University (2013). 	<ul style="list-style-type: none"> EVP Internal Audit Unit in Head Office (January 2019); Head of Procurement Bureau in Head Office (2014); SM. Engineering Planning in Head Office (2013).
Raden Rachmadi Gustrian	SDVP Penerapan Tata Kelola Korporasi	S2 Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya (2009).	<ul style="list-style-type: none"> SDVP Penerapan Tata Kelola Korporasi Kantor Pusat (2019); SVP Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia Investama (2018); DVP Risiko Non Operasional Kantor Pusat (2016).
	SDVP Corporate Governance Implementation	Master of Management, Prasetiya Mulya College of Management (2009).	<ul style="list-style-type: none"> SDVP Implementation of Corporate Governance in Head Office (2019); SVP Risk Management of PT Pelabuhan Indonesia Investama (2018); DVP Non-Operational Risk in Head Office (2016).

Tugas dan Wewenang Komite IPC Bersih

Komite IPC Bersih bertugas untuk:

- Membahas dan memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran yang masuk dalam saluran WBS;
- Melakukan rapat Internal Komite IPC Bersih minimal satu kali dalam setiap 3 (tiga) bulan dan/atau setiap terdapat laporan dugaan pelanggaran melalui WBS;
- Melakukan pengawasan terhadap independensi dan efektivitas pelaksanaan WBS Perseroan.

Pelaksanaan Tugas Komite IPC Bersih

Selama tahun 2019, Komite IPC Bersih telah melaksanakan tugasnya melalui rapat Komite IPC Bersih membahas antara lain tindak lanjut atas laporan WBS yang telah masuk di IPC yang seluruhnya terdapat 13 (tiga belas) laporan masuk dengan *progress* tindak lanjut 80% yang diuraikan dengan 11 (sebelas) laporan pelanggaran tertutup/selesai dan 2 (dua) laporan pelanggaran dalam proses. Pada tahun 2019 melakukan pengkinian Surat Keputusan Direksi IPC Bersih. Selain itu dilakukan *update* saluran *Whistleblowing System* (WBS).

IPC Bersih Committee Duties And Authorities

IPC Bersih Committee duties include:

- Discuss and provide recommendations for follow-up on reports of alleged violations through in the WBS channel;
- Conducting Internal Meetings of IPC Bersih Committee at least (3) month and/or every report of alleged violations through the WBS;
- Supervise the independence and effectiveness of the implementation of the Company's WBS.

IPC Bersih Committee Duties Implementation

During 2019, IPC Bersih Committee has carried out its duties through IPC Bersih Committee meetings, which discussed, among others, the follow-up to WBS reports that have been submitted to IPC, namely 13 (thirteen) incoming reports with 80% follow-up progress, consisted of 11 (eleven) closed/completed reports and 2 (two) reports are in the process. In 2019, the Decree of Board of Directors regarding IPC Bersih was also updated. Besides that, the Whistleblowing System (WBS) channel was updated.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Formulasi penetapan remunerasi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha dalam Surat Kementerian BUMN Nomor S-502/MBU/D2/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2019.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berawal dari tahap pengusulan yang diajukan oleh pihak Direksi. Direksi meminta pihak ketiga (konsultan) untuk melakukan *review* remunerasi Direktur Utama. Hasil *review* dari konsultan tersebut diajukan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan rekomendasi. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan telaah dan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi. Rekomendasi Dewan Komisaris tersebut disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS.

INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan Penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat inflasi dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan penghasilan berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor lain yang relevan.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION POLICY

The remuneration determination formulation refers to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-04/MBU/2014 regarding the Guidelines for Determining the Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises as amended last by the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/05/2019 dated May 31, 2019 concerning the Fourth Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-04/MBU/2014 regarding the Guidelines for Determining the Income of Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of Business Entities in the Ministry of SOEs Letter No. S-502/MBU/D2/05/2019 dated May 31, 2019 concerning Submission of Income Determination of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2019.

REMUNERATION DETERMINATION PROCEDURE

The procedures for determining the remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors starts with a proposal from Board of Directors. Board of Directors requests a third party (consultant) to perform a review of the remuneration of President Director. The results of consultant's review are submitted to Board of Commissioners for recommendation. Board of Commissioners, assisted by Nomination and Remuneration Committee, reviews and evaluates the remuneration policy. Board of Commissioners recommendations are submitted to Shareholder for approval in the GMS.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION DETERMINATION INDICATORS

Income in the form of salary/honorarium, allowances and facilities are set by taking into account factors such as revenue, assets, financial conditions and ability of the Company, rate of inflation and other relevant factors, and should not conflict with legislation.

Determination of variable income in the form of allowances and tantiem is conducted by considering the factors such as target achievement, the level of soundness and financial ability and other relevant factors.



STRUKTUR DAN JUMLAH NOMINAL/KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION STRUCTURE AND NOMINAL/REMUNERATION COMPONENTS

Adapun struktur penetapan remunerasi Dewan Komisaris sebagai berikut.

The structure for determining Board of Commissioners remuneration is as follows:

Jabatan Position	Remunerasi Remuneration	Jumlah Total	Nominal Nominal	
Komisaris Utama President Commissioner	Honorarium	Honorarium Komisaris Utama ditetapkan dengan faktor jabatan 45% dari Direktur Utama sedangkan Honorarium anggota Komisaris ditetapkan dengan faktor pejabat 90% dari Komisaris Utama.	103.500.000,00	
	Honorarium	President Commissioner's Honorarium is determined as a factor of 45% from President Director while the other Commissioners' Honorarium is determined as a factor of 90% of President Commissioner.		
Tunjangan Allowance				
	Hari Raya led Mubarak	1 kali honorarium 1x honorarium	103.500.000,00	
	Transportasi Transportation	20% x honorarium per bulan 20% x honorarium per month	20.700.000,00	
	Asuransi Purna Jabatan Pension Insurance	Maksimal premi 25% x gaji dalam 1 (satu) tahun Maximum premium of 25% x annual salary	310.500.000,00	
Anggota Dewan Komisaris Board of Commissioner Member	Honorarium	Gaji anggota Dewan Komisaris ditetapkan dengan faktor jabatan 90% dari Komisaris Utama.	93.150.000,00	
	Honorarium	Salary for members of Board of Commissioners is determined by a factor of 90% from President Commissioner		
	Tunjangan Allowance			
		Hari Raya led Mubarak	1 kali honorarium 1x honorarium	93.150.000,00
		Transportasi Transportation	20% x honorarium per bulan 20% x honorarium per month	18.630.000,00
	Asuransi Purna Jabatan Pension Insurance	Maksimal premi 25% x gaji dalam 1 (satu) tahun Maximum premium of 25% x annual salary	279.450.000,00	

Jabatan Position	Remunerasi Remuneration	Jumlah Total	Nominal Nominal
Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris President Commissioner And Board of Commissioner Member	Fasilitas Facilities		
	Kesehatan	Setiap Dewan Komisaris berhak atas fasilitas kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan, dengan rincian sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-01/MBU/05/2019 serta Surat Keputusan Direksi Nomor HK.01/7/8/1/TUD/UT/PI.II-19 tanggal 7 Agustus 2019 tentang penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019.	Biaya pengobatan/Asuransi kesehatan.
	Healthcare	Each member of Board of Commissioners is entitled to healthcare service facilities provided in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses, with details stipulated in Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 Concerning Guidelines for Stipulation of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/05/2019 and Board of Directors Decree No. HK.01/7/8/1/TUD/UT/PI.II-19 dated August 7, 2019 concerning income for Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2019.	Medical expenses/Health insurance.
	Bantuan Hukum	Setiap Dewan Komisaris berhak atas fasilitas hukum dengan rincian sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-01/MBU/05/2019.	Pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi tersangka dan terdakwa di lembaga pengadilan. Namun jika terbukti bersalah dan dihukum menjadi beban yang bersangkutan.
	Legal Assistance	Each Board of Commissioners is entitled to a legal assistance with details as stipulated in Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 Concerning Guidelines for Stipulation of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/05/2019.	Funding of attorney's office/legal consultant services to include examination process as a witness of the suspect and the defendant in the court. However, if convicted and punished, the funding become the person's burden.
	Tantiem	Surat Keputusan Direksi Nomor HK.01/7/8/1/TUD/UT/PI.II-19 tanggal 7 Agustus 2019 tentang penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019.	Pada Pasal 9 Surat Keputusan Direksi Nomor HK.01/7/8/1/TUD/UT/PI.II-19, Direksi dan Dewan Komisaris diberikan Tantiem berdasarkan penetapan dari RUPS/Menteri BUMN dalam pengesahan laporan tahunan Perusahaan.
	Tantiem	Board of Directors Decree No. HK.01/7/8/1/TUD/UT/PI.II-19 dated August 7, 2019 concerning income for Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2019.	In Article 9 of Board of Directors Decree No. HK.01/7/8/1/TUD/UT/PI.II-19, Board of Directors and Board of Commissioners are given Tantiem based on the determination of the GMS/Minister of SOE in the ratification of the Company's annual report.



Remunerasi Dewan Komisaris dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Board of Commissioners remuneration for one year is grouped in a range of income levels as follows.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Remuneration by Group

Jumlah Remunerasi Total Remuneration	Jumlah Komisaris Number of Commissioners
Di atas Rp2 miliar Above Rp2 billion	
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar Above Rp1 billion - Rp2 billion	7 orang 7 persons
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar Above Rp500 million - Rp1 billion	
Rp500 juta ke bawah Below Rp500 million	

*) sebelum memperhitungkan tantiem
*) before calculating tantiem

Struktur dan Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Direksi

Board of Directors Remuneration Structure and Nominal/Remuneration Components

Jabatan Position	Remunerasi Remuneration	Jumlah Total	Nominal Nominal
Direktur Utama President Director	Gaji Salary	Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp230.000.000/bulan Salary of President Director is set at Rp 230,000,000/month	230.000.000,00
	Tunjangan Allowance		
	Hari Raya led Mubarak	1 kali gaji 1 time salary	230.000.000,00
	Perumahan Housing	27.500.000 perbulan 27.500.000 per month	27.500.000,00
	Asuransi Purna Jabatan Pension Insurance	Maksimal premi 25% x gaji dalam 1(satu) tahun Maximal premium of 25% x annual salary	690.000.000,00
Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia Director in charge in Human Capital	Honorarium Honorarium	Gaji anggota Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia ditetapkan dengan faktor jabatan 90% dari Direktur Utama Salary for Director in charge of Human Capital is determined by a factor of 90% from President Director	207.000.000,00
	Tunjangan Allowance		
	Hari Raya led Mubarak	1 kali gaji 1 time salary	207.000.000,00
	Perumahan Housing	27.500.000 perbulan 27.500.000 per month	27.500.000,00
	Asuransi Purna Jabatan Pension Insurance	Maksimal premi 25% x gaji dalam 1(satu) tahun Maximal premium of 25% x annual salary	621.000.000,00

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
GCG STRUCTURE AND MECHANISM

Jabatan Position	Remunerasi Remuneration	Jumlah Total	Nominal Nominal
Direktur Director	Honorarium Honorarium	Gaji anggota Direksi ditetapkan dengan faktor jabatan 85% dari Direktur Utama Salary for members of Board of Directors is determined by a position factor of 85% from President Director	195.500.000,00
	Tunjangan Allowance		
	Hari Raya led Mubarak	1 kali gaji 1 time salary	195.500.000,00
	Perumahan Housing	27.500.000 perbulan 27.500.000 per month	27.500.000,00
	Asuransi Purna Jabatan Pension Insurance	Maksimal premi 25% x gaji dalam 1(satu) tahun Maximal premium of 25% x annual salary	586.500.000,00
Direktur Utama dan Direktur President Director and Director	Fasilitas Facilities		
	Kendaraan Dinas	Setiap anggota Direksi berhak atas 1 (satu) fasilitas kendaraan dari perusahaan, termasuk didalamnya biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-06/MBU/06/2018 serta Surat Keputusan Direksi Nomor HK.01/7/8/1/TUD/UT/PI.II-19 tanggal 7 Agustus 2019 tentang penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019.	Fasilitas Kendaraan Dinas
	Vehicle	Each Director is entitled to 1 (one) vehicle facility of the Company, including maintenance and operational costs provided with due consideration to the Company's financial condition and is guided by the Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 Concerning Guidelines for Stipulation of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of SOEs. PER-06/MBU/06/2018 and Board of Directors Decree No. HK.01/7/8/1/TUD/UT/PI.II-19 dated August 7, 2019 concerning income for Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2019.	Official Car facility



Jabatan Position	Remunerasi Remuneration	Jumlah Total	Nominal Nominal
Direktur Utama dan Direktur President Director and Director	Kesehatan	Setiap anggota Direksi berhak atas fasilitas kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan, dengan rincian sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-06/MBU/06/2018 serta Surat Keputusan Direksi Nomor HK.01/7/8/1/TUD/UT/PI.II-19 tanggal 7 Agustus 2019 tentang penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019	Biaya pengobatan/Asuransi kesehatan
	Healthcare	Each member of Board of Directors is entitled to a health facility provided in the form of medical insurance or reimbursement of medical expenses, with details in accordance with the Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 Concerning Guidelines for Stipulation of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of SOEs. PER-06/MBU/06/2018 and Board of Directors Decree No. HK.01/7/8/1/TUD/UT/PI.II-19 dated August 7, 2019 concerning income for Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2019.	Medical Expenses/Health insurance
	Bantuan Hukum	Setiap anggota Direksi berhak atas fasilitas hukum dengan rincian sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-06/MBU/06/2018	Pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi tersangka dan terdakwa di lembaga pengadilan. Namun jika terbukti bersalah dan dihukum menjadi beban yang bersangkutan
	Legal Assistance	Each member of Board of Directors is entitled to a legal assistance with details as stipulated in Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 Concerning Guidelines for Stipulation of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of SOEs. PER-06/MBU/06/2018	Payment disbursement of attorney's office/legal consultant services includes the process of examination as a witness of the suspect and the defendant in the court. However, if convicted and punished, this become the person' burden.
	Tantien	Surat Keputusan Direksi Nomor HK.01/7/8/1/TUD/UT/PI.II-19 tanggal 7 Agustus 2019 tentang penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019.	
Tantien	Decree of Board of Directors Number HK.01/7/8/1/TUD/UT/PI.II-19 dated August 7, 2019 concerning income for Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2019.		

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Remuneration for one year is grouped in a range of income levels as follows.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi
Remuneration by Group

Jumlah Remunerasi Total Remuneration	Jumlah Komisaris Number of Commissioners
Di atas Rp2 Milyar Above Rp2 billion	8 orang 8 persons
Di atas Rp1 Milyar - Rp2 Milyar Above Rp1 billion - Rp2 billion	
Di atas Rp500 juta - Rp1 Milyar Above Rp500 million - Rp1 billion	-
Rp500 juta kebawah Below Rp500 million	

AKUNTAN PUBLIK

Dalam menjalankan tugasnya, Akuntan Publik melaksanakan standar *auditing* yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dalam standar tersebut, akuntan publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Audit yang dilakukan meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh dan independen.

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 No. 13 Tanggal 29 April 2019. Salah satu agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.

Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019

PUBLIC ACCOUNTANT

In carrying out its duties, Public Accountant performs auditing standards established and endorsed by Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) in Professional Standards of Certified Public Accountants (SPAP). In such standards, public accountants are required to plan and conduct an audit in order to obtain reasonable assurance that the financial statements are free of material misstatement. The audits include examination on basis of testing, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit also includes an assessment of accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an assessment of the presentation of comprehensive and independent financial statements.

APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTANT

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Annual General Meeting of Shareholders Minutes concerning Ratification of the Financial Statements for Fiscal Year 2018 dated April 29, 2019. One of the agendas at Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is the Establishment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2019 and the Financial Statements of Partnership and Community Development Program Fiscal Year 2019.

In the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) regarding the Ratification of Financial Statements for 2018 Fiscal Year, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) to audit the Financial Statements of Implementation of Partnership and Community Development Program 2019 and authorize Board



dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain bagi KAP tersebut serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut, Komite Audit menyusun *draft* kerangka acuan kerja beserta rencana anggaran biaya untuk dapat disetujui oleh Dewan Komisaris. Setelah terdapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Manajemen melakukan proses pengadaan melalui mekanisme Pengadaan Langsung dan selama proses pengadaan berlangsung Manajemen memberikan laporan progress rutin kepada Komite Audit sampai dengan terbitnya perjanjian audit dengan Nomor Perjanjian PD.02/1/8/1/ADP/KEU/PI.II-19.

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal ditandatangani Berita Acara Mulai Pekerjaan sampai dengan 30 April 2020, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit Laporan Keuangan terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan selambat-lambatnya sampai tanggal 31 Maret 2020;
2. Pelaksanaan audit Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) dimulai pada tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan penerbitan laporan yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2020.

of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the KAP as well as set a substitute KAP in the case of KAP Purwantono, Sungkoro & Surja for any reason unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements for the Implementation of Partnership and Community Development Program for 2019 Fiscal Year .

Based on the GMS Resolution, Audit Committee prepared a draft framework of work along with a budget plan for approval by Board of Commissioners. After approval from Board of Commissioners, Management conducts the procurement process through the Direct Procurement mechanism and during the procurement process Management provides regular progress reports to Audit Committee until the issuance of audit agreement with Agreement Number PD.02/1/8/1/ADP/KEU/PI.II-19.

Duration of Work Execution

The time period for the execution of works is starting from the date of Minutes of Beginning of Works is signed until April 30, 2020, with the following details:

1. Execution of audit of Financial Statements starting from the Minutes of Beginning of Works is no later than March 31, 2020;
2. The audit of KPPK starting from March 1, 2020 until the publication of the report, which is no later than April 30, 2020.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Periode 5 Tahun Terakhir

Public Accounting Firm, Accountants Names, and Fee for Last 5 Year Periods

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Fee dan Izin KAP Periode 5 Tahun Terakhir
Public Accounting Firm, Accountants Names, And Fee For Last 5 Year Periods

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Periode KAP KAP Period	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) Name of Accountant (Responsible Partner)	Periode Akuntan Publik Public Account Period	Fee Jasa Audit Audit Services Fee	Izin AP AP License
2019	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) (Member of Ernst & Young Global Limited Firm)	Periode Ke 6 6 th Period	Muhammad Kurniawan		Rp 3.874.519.000,-	AP.0240
2018	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) (Member of Ernst & Young Global Limited Firm)		Muhammad Kurniawan	Periode ke 3 3 rd Period	Rp 3.882.714.000,-	AP.0240
2017	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) (Member of Ernst & Young Global Limited Firm)		Muhammad Kurniawan		Rp 3.945.700.000,-	AP.0240
2016	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) (Member of Ernst & Young Global Limited Firm)		Moch. Dadang Syachruna		Rp 3.991.020.000,-	AP.0697
2015	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) (Member of Ernst & Young Global Limited Firm)		Moch. Dadang Syachruna	Periode ke 3 3 rd Period	Rp 3.748.360.000,-	AP.0697
2014	KAP Purwantono, Suherman & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) (Member of Ernst & Young Global Limited Firm)		Moch. Dadang Syachruna		Rp 3.106.719.000,-	AP.0697

MANAJEMEN RISIKO

Filosofi Manajemen Risiko

Filosofi Manajemen Risiko Perusahaan saat ini adalah “kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk melindungi seluruh sumber daya yang dimiliki Perusahaan, menjaga kelangsungan kegiatan operasional dan usaha saat ini dengan menerapkan manajemen risiko secara komprehensif untuk mendukung upaya Perusahaan dalam meningkatkan nilai Perusahaan bagi para pemegang saham dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia”.

RISK MANAGEMENT

Risk Management Philosophy

The Company's Risk Management Philosophy is “a high awareness and commitment to protect all of the Company's resources, to maintain the continuity of current operational and business activities, by following comprehensive risk management in support of increasing the Company's value to shareholders, and to encouraging Indonesia's economic growth”.



Visi Manajemen Risiko

Visi Manajemen Risiko adalah “membuat seluruh elemen Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan adanya risiko yang melekat pada kegiatan operasional yang dijalankan dan mampu mengelola dan mengendalikan risiko-risiko tersebut, serta meningkatkan kepercayaan *stakeholders* melalui proses bisnis yang dilaksanakan dengan prinsip *Good Corporate Governance*”.

Misi Manajemen Risiko

Misi Manajemen Risiko adalah menjaga dan meningkatkan kinerja Perusahaan dan Anak Perusahaan dengan cara mengidentifikasi dan meminimalisir berbagai potensi ancaman dan risiko yang timbul dengan cara:

1. Menumbuhkan prinsip kehati-hatian dan selalu melakukan perbandingan antara risiko dan hasil dalam setiap pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan;
2. Mendorong terciptanya budaya risiko disetiap elemen Perusahaan dan Anak Perusahaan guna meningkatkan kesadaran akan risiko;
3. Meningkatkan proses Manajemen Risiko yang dapat berjalan secara berkala dan konsisten sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan;
4. Memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada *Stakeholders* bahwa seluruh risiko perusahaan telah diidentifikasi dan dikelola secara tepat;
5. Melakukan upaya perbaikan dalam setiap kegiatan operasional yang dilakukan oleh seluruh elemen Perusahaan dan Anak Perusahaan;
6. Melakukan upaya perbaikan atas proses Manajemen Risiko yang telah ada berdasarkan hasil *monitoring* dan kaji ulang;
7. Melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan reputasi tinggi dibidang Manajemen Risiko.

Target Manajemen Risiko

Target Manajemen Risiko adalah:

1. Memastikan langkah yang diambil berdasarkan proses manajemen risiko dan mentaati semua ketentuan yang berlaku;
2. Melindungi seluruh aset dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan;
3. Mencegah terjadinya hal-hal tidak terduga yang dapat merugikan Perusahaan;
4. Mengintegrasikan Manajemen Risiko dalam organisasi dan dalam proses pengambilan keputusan.

Sistem Manajemen Risiko

Sistem Manajemen Risiko IPC mengacu pada standar ISO 3100 tahun 2018. ISO 31000 adalah panduan penerapan risiko yang terdiri atas tiga elemen: prinsip (*principle*), kerangka kerja

Risk Management Vision

The Risk Management Vision is “to ensure all elements of the Company and Subsidiaries have a high level of awareness of risks inherent in the operational activities carried out, and able to manage and control these risks, as well as increase stakeholders’ trust through business processes that are conducted with the Good Corporate Governance principles”.

Risk Management Mission

The Risk Management Mission is to maintain and improve the Company and Subsidiaries performance by identifying and minimizing potential threats and risks that arise by:

1. Building the principle of prudence and making comparisons between risks and results when allocating resources owned by the Company and its Subsidiaries;
2. Encouraging the creation of a risk culture in all parts of the Company and Subsidiaries to increase risk awareness;
3. Improving Risk Management process so it runs periodically and consistently and facilitates the decision making process;
4. Providing confidence and trust to stakeholders that all company risks have been identified and managed appropriately;
5. Making improvements in all operational activities carried out throughout the Company and Subsidiaries;
6. Improving the existing Risk Management process based on monitoring and review results;
7. Consulting with parties with a high competence and reputation in Risk Management.

Risk Management Targets

The Risk Management Targets include:

1. Ensure the steps taken are based on risk management process and in compliance with all applicable provisions;
2. Protecting all Company assets and resources;
3. Preventing unexpected events that could harm the Company;
4. Integrating Risk Management into the organization and into the decision making process.

Risk Management System

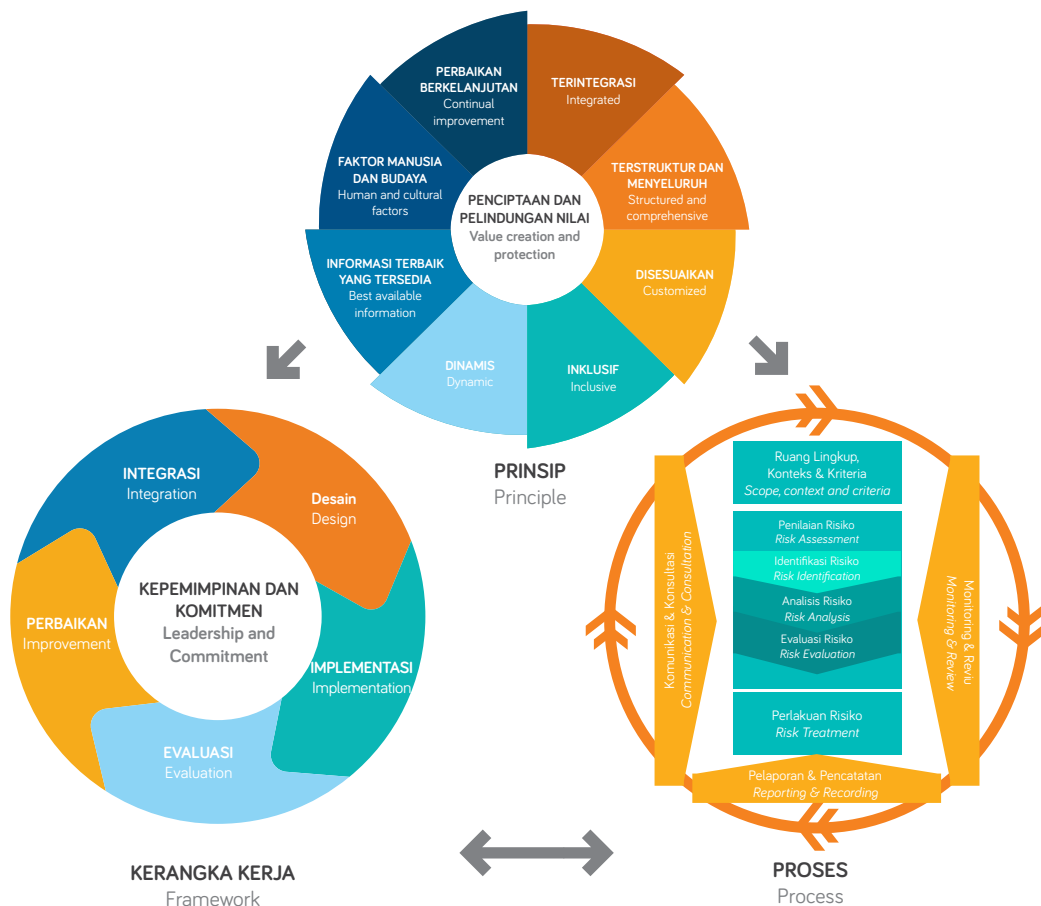
IPC Risk Management System refers to ISO 3100 standard of 2018. ISO 31000 is a risk implementation guide that consists of three elements: principle, framework, and process. The principle

(*framework*), dan proses (*process*). Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktik atau filosofi manajemen risiko. Kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Proses adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait.

of risk management is the basis of risk management practice or philosophy. The framework is a structured and systematic arrangement of risk management systems throughout the organization. Process is a risk management activity that is sequential and interrelated.

Secara umum, ISO 31000:2018 menyederhanakan versi 2009. Diagram yang menggambarkan hubungan prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen proses pun berubah. Pada versi 2009, prinsip, kerangka kerja, dan proses digambarkan sebagai rangkaian unsur yang berurutan, sedangkan pada versi 2018 ketiga bagian ini digambarkan sebagai sistem terbuka yang saling berkaitan.

In general, ISO 31000:2018 simplifies the 2009 version. Diagrams that illustrate the relationship of principles, frameworks, and process management processes also change. In the 2009 version, principles, frameworks and processes are described as sequential sets of elements, while in 2018 the three sections are described as interrelated open systems.



PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Tujuan dari manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai. Manajemen risiko meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran.

RISK MANAGEMENT PRINCIPLES

The purpose of risk management is to create and protect value. Risk management enhances performance, encourages innovation, and supports the achievement of goals.



Prinsip-prinsip ini memberikan panduan mengenai bagaimana karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien, juga menyampaikan nilai-nilai yang dikandungnya dan menjelaskan maksud serta tujuannya. Prinsip-prinsip yang digambarkan seyogianya membuat organisasi mampu untuk mengelola dampak ketidakpastian dalam pencapaian sasaran.

These principles provide guidance on how to characterize effective and efficient risk management, also convey the values they contain and explain their intentions and objectives. The principles described should enable the organization to be able to manage the impact of uncertainty in achieving goals.

Manajemen risiko yang efektif memerlukan elemen-elemen sebagai berikut:

Effective risk management requires the following elements:

1. Terintegrasi;
2. Terstruktur dan Menyeluruh;
3. Disesuaikan dengan Kebutuhan Penggunanya;
4. Inklusif;
5. Dinamis;
6. Informasi Terbaik yang Tersedia;
7. Faktor Budaya dan Manusia;
8. Perbaikan Berkelanjutan.

1. Integrated;
2. Structured and Comprehensive;
3. Customized to the Needs of Users;
4. Inclusive;
5. Dynamic;
6. Best available Information;
7. Human and Cultural Factors;
8. Continual improvement.



Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Peran dan tujuan dari kerangka kerja manajemen risiko adalah membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh fungsi dan kegiatan organisasi. Efektivitas manajemen risiko akan tergantung dari seberapa jauh manajemen risiko berhasil diintegrasikan ke dalam tata kelola organisasi (*governance*), kegiatan organisasi dan proses pengambilan keputusan pada setiap tingkatan organisasi. Untuk itu, dukungan dari para pemangku kepentingan internal organisasi, khususnya pimpinan puncak sangat diperlukan.

Risk Management Framework

The role and purpose of Risk Management framework is to assist the organization in integrating risk management into all functions and activities of organization. The effectiveness of risk management will depend on the extent to which risk management has been successfully integrated into organizational governance (*governance*), organizational activities and decision-making processes at every level of organization. For this reason, the support of organization's internal stakeholders, especially the top leadership, is needed.



- | | |
|--|---|
| <p>1. Kepemimpinan dan Komitmen
Direksi dan Dewan Komisaris, harus memastikan bahwa manajemen risiko telah terintegrasi ke dalam seluruh kegiatan organisasi dan harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya, antara lain dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyesuaikan dan menerapkan semua komponen dari kerangka kerja; b. Membuat pernyataan atau kebijakan yang menetapkan pendekatan manajemen risiko, rencana atau arah penerapan manajemen risiko; c. Memastikan bahwa semua kebutuhan sumber daya untuk mengelola risiko akan dialokasikan; d. Menetapkan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas pengelolaan risiko pada tingkatan organisasi yang sesuai. | <p>1. Leadership and Commitment
Board of Directors and Board of Commissioners, must ensure that risk management is integrated into all organizational activities and must demonstrate leadership and commitment, among others by:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Customize and apply all components of the framework; b. Make a statement or policy that sets a risk management approach, plan or direction for implementing risk management; c. Ensure that all resource requirements for managing risk will be allocated; d. Establish the authority, responsibility and accountability of risk management at the appropriate organizational level. |
| <p>2. Integrasi
Pengintegrasian manajemen risiko sangat bergantung pada pemahaman terhadap struktur organisasi dan konteks organisasi. Struktur setiap organisasi berbeda-beda sesuai dengan tujuan, sasaran dan kompleksitas yang dihadapinya. Risiko harus dikelola pada setiap bagian dari struktur organisasi tersebut mempunyai tanggung jawab untuk mengelola risiko yang dihadapinya.</p> | <p>2. Integration
Integrating risk management is very dependent on understanding the organizational structure and organizational context. The structure of each organization varies according to goals, objectives and complexity it faces. Risks must be managed in each part of organizational structure that has responsibility to manage the risks it faces.</p> |
| <p>3. Desain Kerangka Kerja
Ketika merencanakan kerangka kerja manajemen risiko, organisasi harus memeriksa dan memahami konteks internal dan eksternal organisasi.</p> | <p>3. Framework Design
When planning a risk management framework, organizations must examine and understand the internal and external contexts of organization.</p> |



4. Implementasi

IPC menerapkan kerangka kerja manajemen risiko dengan:

- a. Menyusun suatu rencana penerapan, termasuk jadwal dan kebutuhan sumber daya.
- b. Melakukan identifikasi dimana, kapan dan bagaimana berbagai macam keputusan penerapan diambil pada tiap-tiap bagian organisasi dan siapa yang dapat mengambil keputusan tersebut.
- c. Melakukan penyesuaian proses pengambilan keputusan yang diterapkan bilamana diperlukan.
- d. Memastikan bahwa pengaturan organisasi untuk mengelola risiko telah dipahami dengan baik dan diterapkan.

5. Evaluasi

Guna memastikan keefektifan kerangka kerja manajemen risiko, IPC melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Mengukur secara berkala kinerja kerangka kerja manajemen risiko, apakah sesuai dengan tujuan pembuatan, rencana penerapan, capaian indikator-indikator yang ditetapkan dan juga perilaku pekerja terkait dengan penerapan manajemen risiko;
- b. Menetapkan apakah kerangka kerja manajemen risiko masih tetap mampu untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan atau tidak.

6. Perbaikan

IPC senantiasa memantau dan menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal, dengan melakukan hal tersebut maka organisasi dapat meningkatkan nilai. Ketika kesenjangan dan kesempatan perbaikan telah diidentifikasi maka perusahaan harus mengembangkan rencana perbaikan dan penugasan pelaksanaannya kepada yang mempunyai akuntabilitas terhadap penerapannya sehingga perbaikan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan manajemen risiko.

Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko mencakup penerapan yang sistematis dari kebijakan, prosedur dan berbagai pendekatan untuk menjalankan komunikasi dan konsultasi, membangun konteks dan menilai risiko, memberi perlakuan, memantau, meninjau ulang, mencatat dan melaporkan kepada para pihak yang berkepentingan.

4. Implementation

IPC applies a risk management framework by:

- a. Develop an implementation plan, including schedule and resource requirements.
- b. Identify where, when and how various implementation decisions are taken in each part of the organization and who can make those decisions.
- c. Make adjustments to the decision making process that is applied when needed.
- d. Ensure that organizational arrangements for managing risk are well understood and applied.

5. Evaluation

To ensure the effectiveness of risk management framework, IPC does the following:

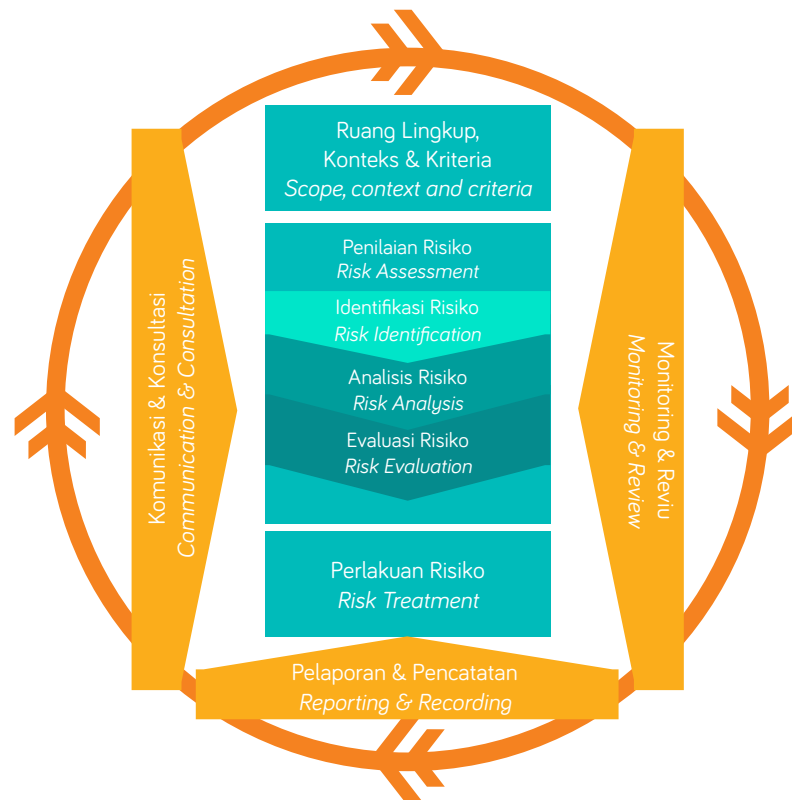
- a. Measuring periodically the performance of risk management framework, whether it is in line with the objectives of making, implementation plan, the achievement of specified indicators and also the behavior of workers related to the application of risk management;
- b. Determine whether Risk Management framework is still able to support the achievement of company targets or not.

6. Improvements

IPC constantly monitors and adjusts Risk Management framework with changes in the external and internal environment, by doing so the organization can increase value. When gaps and opportunities for improvement have been identified, companies must develop plans for improvement and assign implementation to those who have accountability for their implementation so that these improvements contribute to improving risk management.

Risk Management Process

The risk management process includes the systematic application of policies, procedures and various approaches to carrying out communication and consultation, establishing the context and assessing risks, providing treatment, monitoring, reviewing, recording and reporting to interested parties.



1. Komunikasi dan Konsultasi
Komunikasi dan konsultasi bertujuan untuk membantu *stakeholders* dalam memahami risiko, sebagai hal yang mendasari pengambilan keputusan dan alasan mengapa tindakan-tindakan tertentu dilakukan. Komunikasi dilakukan untuk membangun kesadaran dan pemahaman terhadap risiko sementara konsultasi untuk mendapatkan umpan balik dan informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan. Koordinasi yang erat antara komunikasi dengan konsultasi dijalankan untuk menunjang pertukaran informasi yang faktual, tepat waktu, relevan, akurat, dan dapat dipahami, integritas dan keandalan informasi, dan juga hak-hak privasi dari setiap individu yang terlibat.
1. Communication and Consultation
Communication and consultation aim to help stakeholders understand risk, as the basis for decision making and the reasons why certain actions are taken. Communication is carried out to build awareness and understanding of risk while consulting to obtain feedback and information needed for decision making. Close coordination between communication and consultation is carried out to support factual, timely, relevant, accurate and understandable exchange of information, the integrity and reliability of information, as well as the privacy rights of each individual involved.
2. Ruang Lingkup, Konteks dan Kriteria
Menentukan lingkup, konteks dan kriteria bertujuan untuk merancang proses manajemen risiko yang khas sesuai dengan kebutuhan penggunanya untuk menunjang asesmen risiko yang efektif dan perlakuan risiko yang tepat. Lingkup, konteks dan kriteria meliputi penentuan lingkup proses dan pemahaman konteks internal dan eksternal perusahaan, serta kriteria untuk menilai tingkat risiko.
2. Scope, Context and Criteria
Determining the scope, context and criteria aims to design a specific risk management process according to the needs of its users to support effective risk assessment and appropriate risk treatment. The scope, context and criteria include determining the scope of process and understanding the Company's internal and external contexts, as well as the criteria for assessing the level of risk.



3. Penilaian Risiko

Keseluruhan proses dari identifikasi risiko, analisa risiko hingga evaluasi risiko. Asesmen risiko harus menggunakan data dan informasi terbaik yang tersedia dan jika diperlukan dapat dilengkapi dengan kajian yang lebih mendalam.

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko bertujuan untuk menemukan, menerima dan menjabarkan risiko yang dapat menunjang atau menghambat pencapaian sasaran organisasi. Informasi yang relevan, memadai dan mutakhir merupakan hal penting dalam mengidentifikasi risiko;

b. Analisis Risiko

Memahami sifat dan perilaku risiko, bila perlu termasuk peringkat risiko. Analisis risiko meliputi pertimbangan detail terkait dengan ketidakpastian, sumber risiko, dampak, kemungkinan, peristiwa risiko, skenario, pengendalian risiko dan keefektifannya;

c. Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko membantu proses pengambilan keputusan dan meliputi proses membandingkan hasil analisis dari masing-masing risiko terhadap kriteria risiko yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah suatu tindakan lebih lanjut terhadap risiko tersebut diperlukan. Kondisi ini akan mengerah pada keputusan untuk:

- Tidak melakukan apa-apa;
- Mempertimbangkan opsi perlakuan risiko;
- Melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami risiko lebih baik;
- Mempertahankan pengendalian risiko yang ada;
- Mempertimbangkan ulang sasaran proses.

4. Perlakuan Risiko

Perlakuan risiko bertujuan untuk menyeleksi dan mengimplementasikan opsi-opsi untuk menghadapi risiko. Perlakuan terhadap suatu risiko dapat berupa salah satu dari empat perlakuan berikut:

a. Menerima Risiko (*Accept*): mempertahankan risiko pada tingkat risiko saat ini dengan tidak mengambil tindakan lanjutan. Pilihan ini dapat dilakukan untuk risiko yang dianggap tidak signifikan atau memiliki tingkat kepentingan yang rendah bagi Perseroan;

b. Memindahkan Risiko (*Transfer*): memindahkan/menggeser risiko yang ada kepada pihak ketiga yang independen dan memiliki kemampuan finansial yang kuat (seperti: perusahaan asuransi) dengan biaya yang sewajarnya dan pada umumnya didasarkan pada perjanjian yang bermuatan hukum.

3. Risk Assessment

The whole process from risk identification, risk analysis to risk evaluation. Risk assessments must use the best available data and information and, if necessary, can be supplemented by a more in-depth study.

a. Risk Identification

Risk Identification aims to identify, accept and describe risks that can support or hinder the achievement of organizational goals. Relevant, adequate and up-to-date information is important in identifying risks;

b. Risk analysis

Understand the nature and behavior of risk, if necessary including risk rating. Risk analysis includes detailed considerations related to uncertainty, sources of risk, impacts, likelihood, risk events, scenarios, risk control and their effectiveness;

c. Risk Evaluation

Risk evaluation helps the decision making process and includes the process of comparing the analysis result of each risk against predetermined risk criteria, to determine whether a further action on the risk is needed. This condition will lead to the decision to:

- Do nothing;
- Consider risk treatment options;
- Conduct further analysis to understand risk better;
- Maintain control of existing risks;
- Reconsider the process objectives.

4. Risk Treatment

The risk treatment aims to select and implement options for dealing with risks. The treatment of a risk can be one of the following four treatments:

a. Accepting Risk: Accept risk at current level of risk by not taking further action. This choice can be made for risks that are considered insignificant or have a low level of importance for the Company;

b. Transfer Risk (Transfer): Transfer/shift existing risks to an independent third party and have strong financial capabilities (such as insurance companies) with reasonable costs and are generally based on agreements with legal content.

- c. Menghindari Risiko (*Avoid*): menghindari eksposur terhadap kemungkinan terjadinya suatu risiko yang berpotensi terjadi (seperti: menghentikan kegiatan/aktivitas yang dapat menimbulkan risiko tersebut). Tindakan ini dapat dipilih sebagai perlakuan terhadap risiko yang memiliki tingkat risiko yang tidak dapat ditoleransi ataupun diterima oleh Perusahaan karena memiliki dampak yang signifikan;
 - d. Mengurangi Risiko (*Reduce*): Strategi untuk mengambil tindakan mengurangi tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima dengan memfokuskan pada penurunan kemungkinan dan dampak risiko (seperti: mengurangi tingkat risiko dengan menempatkan pengendalian tambahan atau menguatkan pengendalian dan proses yang sudah ada).
5. Pemantauan dan Peninjauan
Untuk menjamin dan memperbaiki kualitas dan keefektifan rencana pelaksanaan proses manajemen risiko, implementasi dan hasil akhir yang diharapkan. Pemantauan secara rutin (*ongoing monitoring*) dan kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko dan hasil akhir harus menjadi bagian dari proses manajemen risiko, dengan penetapan penanggung jawab yang jelas. Pelaksanaan *monitoring* dan reviu dilakukan oleh tiga pihak:
 - a. Pemantauan mandiri yang dilakukan oleh Pemangku Risiko dan Divisi Manajemen Risiko;
 - b. Pemantauan oleh atasan yang dilakukan oleh Manajemen Puncak di Perusahaan;
 - c. Pemantauan oleh pihak ketiga yaitu Pengawasan dan Kaji Ulang terhadap proses Manajemen Risiko dilakukan oleh pihak yang independen dan tidak terkait di dalam proses penerapannya.
6. Pelaporan dan Pencatatan
Proses manajemen risiko dan berbagai keluarannya (*outcomes*) harus didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang tepat. Pelaporan dan pencatatan bertujuan untuk:
 - a. Mengkomunikasikan berbagai aktivitas proses manajemen risiko dan keluarannya melintasi seluruh area perusahaan;
 - b. Menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan;
 - c. Memperbaiki aktivitas proses manajemen risiko;
 - d. Membantu interaksi dengan *stakeholders*, termasuk mereka yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap aktivitas pengelolaan risiko.
- c. Avoiding Risk (*Avoid*): Avoiding exposure to the possibility of occurrence of a risk that has the potential to occur (such as: stopping activities that can cause the risk). This action can be chosen as a treatment of risks that have a level of risk that cannot be tolerated or accepted by the Company because it has a significant impact;
 - d. Reducing risk (*Reduce*): Strategies to take action to reduce the level of risk to an acceptable level by focusing on reducing the likelihood and impact of risks (such as: reducing the level of risk by placing additional controls or strengthening existing controls and processes).
5. Monitoring and Review
To guarantee and improve the quality and planned implementation effectiveness of risk management process, implementation and expected outcomes. Regular monitoring (*ongoing monitoring*) and periodic reviews of Risk Management process and the final results must be part of Risk Management process, with clear assignments of responsibilities. The monitoring and review is carried out by three parties:
 - a. Independent monitoring carried out by Risk Stakeholder and Risk Management Division;
 - b. Supervision by supervisors conducted by Top Management in the Company;
 - c. Monitoring by a third party, namely Supervision and Review of Risk Management process, is carried out by an independent party and is not involved in the implementation process.
6. Reporting and Recording
The risk management process and its various outputs (*outcomes*) must be documented and reported through appropriate mechanisms. Reporting and recording aims to:
 - a. Communicating various risk management process activities and their output across all areas of the Company;
 - b. Provides information for decision making;
 - c. Improve the activities of risk management process;
 - d. Assist interaction with stakeholders, including those who have responsibility and accountability for risk management activities.



Pertahanan 3 (Tiga) Lapis

Pengelolaan Risiko di Perseroan dijalankan dengan penuh perhitungan melalui konsep Pertahanan 3 (tiga) Lapis. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan seluruh internal organisasi Perseroan terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Dalam model Pertahanan tiga lapis tersebut, fungsi dan tanggung jawab setiap lapis pertahanan adalah sebagai berikut:

Pertahanan Lapis Pertama.

Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh Pemangku risiko yang melakukan aktivitas operasional Perseroan sehari-hari, dengan tugas antara lain:

1. Memastikan adanya lingkungan pengendalian internal yang kondusif di Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan IPC;
2. Menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan manajemen puncak dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya;
3. Dengan penuh kesadaran mempertimbangkan faktor risiko dalam mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukan;
4. Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di Divisi atau Departemen masing-masing dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektivitas pengendalian internal;

Pertahanan Lapis Kedua

Pertahanan lapis kedua dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko dan dibantu oleh *Risk Officer*. Dalam hal ini Divisi Manajemen Risiko harus terpisah dengan bagian operasional maupun bisnis agar terdapat independensi dalam membuat kebijakan. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam membuat suatu kebijakan terhadap limit dan toleransi risiko tersebut. Seluruh limit dan toleransi risiko yang dapat diterima Perseroan harus disetujui oleh Direksi. Sebagai pertahanan lapis kedua, Divisi Manajemen Risiko memiliki tugas diantaranya:

1. Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi Manajemen Risiko Perseroan secara keseluruhan;
2. Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan Manajemen Risiko dan prosedur-prosedur standar operasionalnya yang telah ditetapkan oleh Perseroan;
3. Memantau dan melaporkan risiko-risiko Perseroan secara menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di Perseroan;

Three Lines of Defense

Defense for Risk Management in the Company is conducted using the concept of Three Lines of Defense. The concept aims to improve the durability of whole internal organization of the Company against various risks that may be faced. In three lines of defense model, functions and responsibilities of each layer are as follows.

First Line of Defense

This first line of defense is carried out by risk stakeholders conducting day-to-day Company operations, with the following tasks:

1. Ensure a conducive internal control environment at Head Office and Port Branches of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
2. Applying the Risk Management Policy established by top management in carrying out its roles and responsibilities;
3. Consciously considering the risk factors in making decisions and actions taken;
4. Be able to demonstrate effective internal controls in their respective Divisions or Departments and also monitoring and transparency of the effectiveness of internal controls.

Second Line of Defense.

The second layer of defense is carried out by the Risk Management Division and is assisted by Risk Officer. In this case, the Risk Management Division must be separate from the operational and business section, so that there is an independence in making policies. The Risk Management Division is responsible for making policy towards these limits and risk tolerance. All limits and risk tolerances that the Company can accept must be approved by the Board of Directors. As a second line of defense, the Risk Management Division has the following tasks:

1. Responsible for developing and monitoring the implementation of the overall Risk Management of the Company;
2. Monitor how business functions are carried out within the corridor of Risk Management policy and standard operating procedures established by the Company;
3. Monitor and report the Company risks thoroughly to the highest accountable organs in the Company;

4. Melakukan pengembangan, sosialisasi, serta distribusi atas kebijakan Manajemen Risiko ke seluruh pegawai, termasuk melakukan revisi atau pengkinian. Sedangkan *Risk Officer* memiliki tanggung jawab antara lain:
 - a. Membantu unit Manajemen Risiko dalam melakukan pengembangan, sosialisasi, serta distribusi atas Pedoman Manajemen Risiko ke seluruh pegawai;
 - b. Memastikan Kebijakan tersebut dijalankan dengan benar di area kerjanya.
4. Conduct development, dissemination and distribution of Risk Management policy to all employees, including revision or updating. Meanwhile, the Risk Officer has responsibilities, among others:
 - a. Assist Risk Management unit in conducting the development, dissemination and distribution of Risk Management Guidelines to all employees;
 - b. Ensure the policy is properly implemented in its work area.

Pertahanan Lapis Ketiga

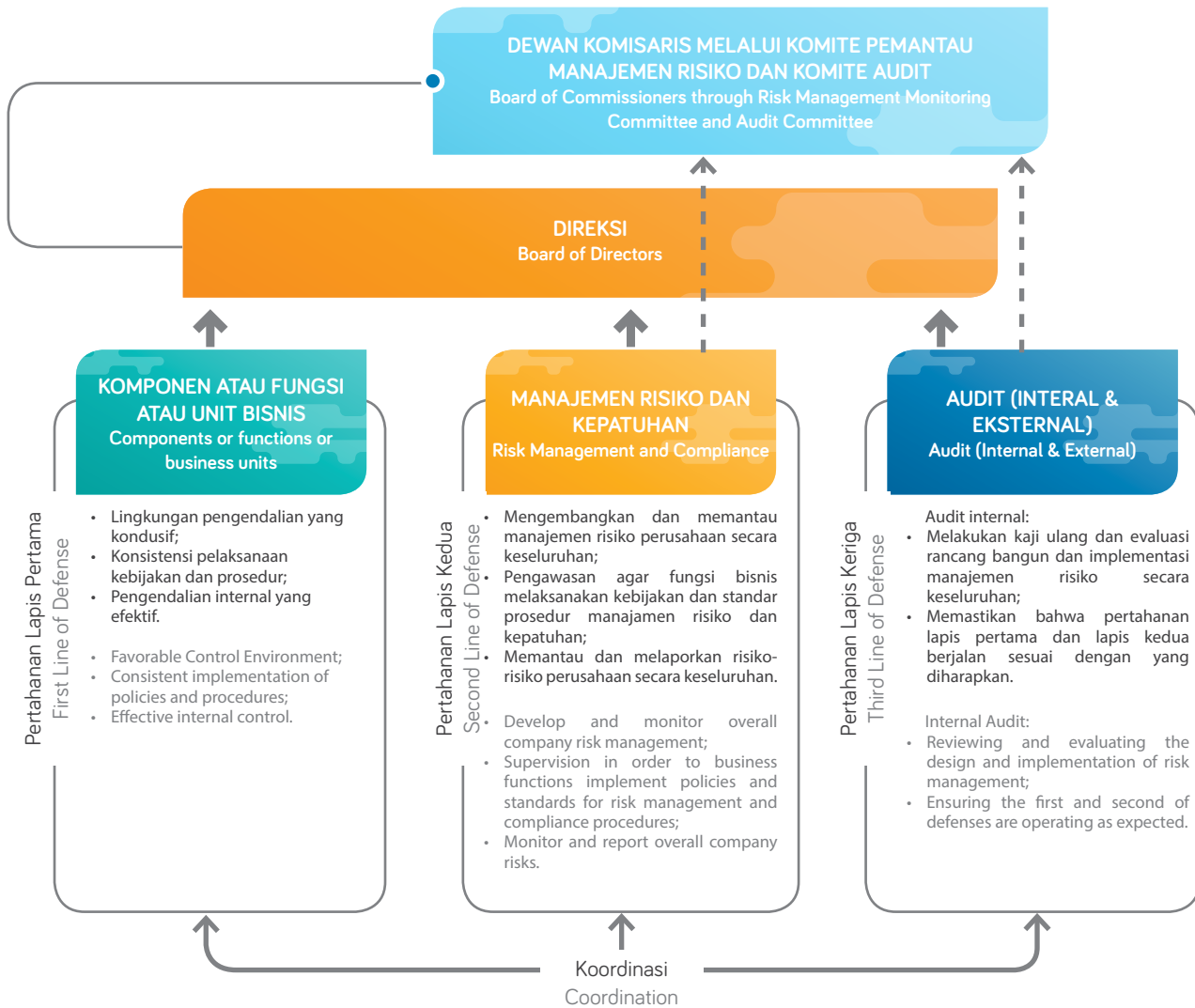
Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor baik Auditor Internal maupun auditor eksternal. Peran Auditor Internal jauh lebih intens dalam model Pertahanan 3 (tiga) Lapis ini karena merupakan bagian Internal Perseroan yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi lainnya. Dalam hal ini, Auditor Internal bertugas untuk:

1. Melakukan Kaji ulang dan evaluasi terhadap kerangka dan implementasi Manajemen Risiko secara keseluruhan; dan
2. Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Third Line of Defense.

The third line of defense is carried out by auditors of both Internal Audit and the external auditor. The Internal Auditor role is much more intense in the 3 (three) Lines of Defense model as it is an internal part of the Company but which is independent of other functions. In this case, Internal Audit is tasked with:

1. Reviewing and evaluating the overall framework and implementation of Risk Management; and
2. Ensuring that the first and second lines of defense run as expected



Upaya Pengelolaan Risiko

Sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Kerangka Kerja Manajemen Risiko, IPC beberapa jenis bentuk pengelolaan risiko. Ada 4 (empat) jenis bentuk pengelolaan risiko, yaitu:

1. Menerima Risiko (*Accept Risk*): mempertahankan risiko pada tingkat risiko saat ini dengan tidak mengambil tindakan lanjutan. Pilihan ini dapat dilakukan untuk risiko yang dianggap tidak signifikan atau memiliki tingkat kepentingan yang rendah bagi Perusahaan;

Risk Management Efforts

In accordance with Risk Management Policy and Risk Management Framework Policy, IPC has several types of risk management. There are 4 (four) types of risk management forms, namely:

1. Accepting Risk (*Accept Risk*): Accept risk at the current level of risk by not taking further action. This choice can be made for risks that are considered insignificant or have a low level of importance for the Company;

2. Memindahkan Risiko (*Transfer Risk*): memindahkan/menggeser risiko yang ada kepada pihak ketiga yang independen dan memiliki kemampuan finansial yang kuat (seperti: perusahaan asuransi) dengan biaya yang sewajarnya dan pada umumnya didasarkan pada perjanjian yang bermuatan hukum;
3. Menghindari Risiko (*Avoid Risk*): menghindari eksposur terhadap kemungkinan terjadinya suatu risiko yang berpotensi terjadi (contoh: menghentikan kegiatan/aktivitas yang dapat menimbulkan risiko tersebut). Tindakan ini dapat dipilih sebagai perlakuan terhadap risiko yang memiliki tingkat risiko yang tidak dapat ditoleransi ataupun diterima oleh Perusahaan karena memiliki dampak yang signifikan;
4. Mengurangi Risiko (*Reduce Risk*): Strategi untuk mengambil tindakan mengurangi tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima dengan memfokuskan pada penurunan kemungkinan dan dampak risiko (contoh: mengurangi tingkat risiko dengan menempatkan pengendalian tambahan atau menguatkan pengendalian dan proses yang sudah ada).

Dalam mengelola risiko-risiko perusahaan, IPC menurunkan rencana penanganan risiko tersebut dalam beberapa hal, di antaranya adalah:

1. Pedoman, Prosedur dan Instruksi Kerja
Pedoman, prosedur dan instruksi kerja termasuk dalam penanganan risiko yang sudah dilakukan atau biasa disebut sebagai aktivitas kontrol. Adanya efektivitas kontrol dapat menurunkan tingkat risiko residual. Apabila dengan adanya aktivitas kontrol ini tingkat risiko menjadi rendah atau sangat rendah, maka tidak perlu lagi adanya rencana penanganan lanjutan, cukup dengan melakukan *monitoring* terkait dengan aktivitas kontrol tersebut;
2. Rencana Kerja Manajemen (RKM)
Setiap unit kerja mempunyai risikonya masing-masing, selain risiko rutin ada juga risiko yang sifatnya strategis sesuai dengan visi IPC menuju *world class port*. Risiko ini di mitigasi melalui program kerja atau rencana kerja manajemen. Adanya program kerja atau rencana kerja manajemen ini outputnya diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko;
3. Investasi
Sesuai visi misi IPC menuju *world class port*, IPC dituntut untuk mengembangkan infrastruktur modern. Merencanakan investasi pembangunan pelabuhan adalah salah satu cara untuk menjawab tantangan atau risiko untuk menuju *world class port*.

2. Transfer Risk (Transfer Risk): Transfer/shift existing risks to an independent third party and have strong financial capabilities (such as insurance companies) with reasonable costs and are generally based on agreements with legal content;
3. Avoiding Risk (Avoid Risk): Avoiding exposure to the possibility of occurrence of a risk that has the potential to occur (such as: stopping activities that can cause the risk). This action can be chosen as a treatment of risks that have a level of risk that cannot be tolerated or accepted by the Company because it has a significant impact;
4. Reducing Risk (Reduce Risk): Strategies to take action to reduce the level of risk to an acceptable level by focusing on reducing the likelihood and impact of risks (such as: reducing the level of risk by placing additional controls or strengthening existing controls and processes.

In managing the Company risks, IPC has lowered Risk Management plan in several areas, including:

1. Guidelines, Work Procedures and Instructions
Guidelines, procedures and work instructions are used for handling risks and are commonly referred to as control activities. The effectiveness of controls can reduce the level of residual risk. If with this control activity the risk level becomes low or very low, then there is no need for further management plans, just monitoring related to the control activity;
2. Management Work Plan (RKM)
Each work unit has its own risks, in addition to routine risks there is also risks that are strategic to IPC achieving its vision to be a world class port. These risks are mitigated through a work program or management work plan, the output of which is expected to reduce the risk level;
3. Investment
In accordance with IPC's vision to be a world class port, IPC needs to develop a modern infrastructure. Planning a port development investment is one way to answer the challenges or risks to become a world class port.



PROFIL, PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO

Sesuai dengan *Corporate Roadmap* IPC, tema tahun 2019 adalah "Sustainable". Tema Perseroan serta target-target Perseroan yang tercantum dalam RJPP dan RKAP menjadi sasaran dalam menetapkan konteks risiko tahun 2019. Selain sasaran Perseroan, kondisi internal dan eksternal Perseroan serta aspirasi dari *stakeholder* menjadi bagian dari konteks risiko tahun 2019.

Proses manajemen risiko (identifikasi, analisis dan evaluasi) dilakukan berdasarkan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan *Top-Down*, pendekatan *Bottom-Up* dan berdasarkan *Loss Event Management* (LEM). Risiko-risiko yang diperoleh/diidentifikasi melalui pendekatan *Top-Down* adalah risiko yang diidentifikasi melalui penilaian terhadap pencapaian tujuan organisasi secara korporat, dan risiko-risiko yang diperoleh/diidentifikasi melalui pendekatan *Bottom-Up* adalah yaitu risiko-risiko yang teridentifikasi oleh *Risk Owner* berdasarkan aktifitas sedangkan risiko-risiko yang diperoleh/diidentifikasi melalui pendekatan *Loss Event Management* (LEM) yaitu risiko-risiko berdasarkan data kejadian di tahun lalu dan kemungkinan risiko tersebut masih bisa terjadi di tahun ini.

Berdasarkan tiga pendekatan tersebut, dengan menggunakan *Risk & Control Self Assessment* (RCSA) diperoleh risiko-risiko korporat yang meliputi risiko Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Anak Perseroan. Dari risiko-risiko tersebut dipilih 10 (sepuluh) risiko signifikan Perusahaan atau Korporat yaitu:

RISK PROFILE, ASSESSMENT AND MANAGEMENT

In accordance with IPC's *Corporate Roadmap*, the 2019 theme is "Sustainable". The Company's theme as well as the Company's targets listed in RJPP and RKAP are targets in determining the 2019 risk context. In addition to the Company's goals, the Company's internal and external conditions and stakeholder aspirations are part of the 2019 risk context.

The risk management process (identification, analysis and evaluation) is carried out based on three methods of approach namely the *Top-Down* approach, *Bottom-Up* approach and based on *Loss Event Management* (LEM). Risks obtained/identified through the *Top-Down* approach are risks that are identified through an assessment of the achievement of corporate objectives corporately, and risks obtained/identified through the *Bottom-Up* approach are those risks identified by Risk Owners based on activities while the risks obtained/identified through the *Loss Event Management* (LEM) approach are risks based on data from events in the past year and the possibility of these risks can still occur this year.

Based on these three approaches, by using *Risk & Control Self Assessment* (RCSA) corporate risks include the risks of Head Office, Port Branch and Subsidiaries. From these risks, 10 (ten) significant risks of the Company or Corporate are chosen, namely:

No.	Nama Risiko <i>Type of Risk</i>	Tingkat Risiko <i>Risk Level</i>
1.	Tidak tercapainya target pendapatan Un-achieved revenue targets	Sangat Tinggi Very high
2.	Tingginya ACP High ACP	Sangat Tinggi Very high
3.	Rendahnya penyerapan Investasi Low investment absorption	Sangat Tinggi Very high
4.	Tidak optimalnya pemanfaatan aset pelabuhan Un-optimal utilization of port assets	Sangat Tinggi Very high
5.	Kegagalan penyesuaian tarif Failure of tariff adjustment	Sangat Tinggi Very high
6.	Tuntutan hukum Lawsuits	Sangat Tinggi Very high
7.	Hilangnya pangsa pasar Loss of market share	Tinggi High
8.	Pendangkalan Kolan/Alur Siltation of Ponds/Grooves	Tinggi High
9.	Ketidaksiapan Dermaga Unprepared Pier	Tinggi High
10.	Mitra kerja sama usaha tidak memenuhi kesepakatan dalam kontrak Business partners do not fulfill the agreement in contract	Tinggi High

Pengelolaan Risiko Tahun 2019

Penanganan risiko atau mitigasi risiko bisa berupa pembuatan Pedoman, Prosedur dan Instruksi Kerja, program kerja (Rencana Kerja Manajemen) dan investasi. Berikut adalah penanganan atau mitigasi risiko yang dilakukan, khususnya pada risiko-risiko signifikan perusahaan:

Risk Management in 2019

Risk management or risk mitigation can be in the form of preparation of Guidelines, Work Procedures and Instructions, work programs (Management Work Plans) and investments. The following is the handling or mitigation of risks carried out, especially on the Company's significant risks:

No.	Nama Risiko <i>Risk Name</i>	Penanganan Risiko <i>Risk Management</i>
1	Tidak tercapainya target pendapatan Not achieving revenue targets	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuisisi PT KBS; 2. Mempercepat pengoperasian ex. JICT 2; 3. Mempercepat proses penyelesaian CY 57 NPCT1. <ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisition of PT KBS; 2. Acceleration of ex. JICT 2 operations; 3. Acceleration of CY 57 NPCT1 completion process.
2	Tingginya ACP High ACP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diusulkan hapus buku tetapi tidak hapus tagih; 2. Penundaan pelayanan kepada <i>customer</i> yang masih memiliki tunggakan; 3. Mengupayakan penagihan dengan melibatkan JPN; 4. Meningkatkan efektifitas penerapan CMS dan Uper. <ol style="list-style-type: none"> 1. Write off but not hair cut is proposed; 2. Postponement of service to customers who still have arrears; 3. Seek to carry out the collection by involving JPN; 4. Increase the effectiveness of CMS and Uper implementation.
3	Rendahnya penyerapan Investasi Low absorption of investment	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar melengkapi dokumen yang diperlukan seperti FS dan perizinan sebelum pengajuan anggaran investasi; 2. Proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan awal tahun (sebelum pengesahan RKAP 2020), dimana pada proses pengadaan dinyatakan dengan jelas dalam pengumuman atau undangan bahwa status pemilihan penyedia tidak mengikat serta menjelaskannya kepada peserta/calon penyedia dalam rapat pemberian penjelasan (<i>aanwijzing</i>). <ol style="list-style-type: none"> 1. To complete the required documents such as FS and permits before submitting an investment budget; 2. The process of procurement of goods/services can be carried out at beginning of the year (before the approval of 2020 RKAP), in which the procurement process is clearly stated in announcement or invitation, that the supplier selection status is not binding and this statement is explained to participants/prospective suppliers in a clarification meeting (<i>aanwijzing</i>).
4	Tidak optimalnya pemanfaatan aset pelabuhan Not optimal utilization of port assets	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan fungsi SISKAKU; 2. Melakukan pematangan penataan lahan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimize SISKAKU function; 2. Make better arrangement of land use.
5	Kegagalan penyesuaian tarif Failure of tariff adjustment	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan; 2. Mengefektifkan komunikasi dengan Regulator dan <i>Stakeholder</i> lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 3. Improve service quality; 4. Improve communication effectiveness with other Regulators and Stakeholders.
6	Tuntutan hukum Lawsuits	Menyusun strategi penanganan permasalahan hukum. Develop strategies to handle legal issues.



No.	Nama Risiko Risk Name	Penanganan Risiko Risk Management
7	Hilangnya pangsa pasar Loss of market share	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan <i>awereness</i> kepada seluruh insan IPC bahwa IPC tidak lagi memiliki hak monopoli terhadap bisnis kepelabuhanan; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan; 3. Meningkatkan fungsi pemasaran; 4. Merubah model bisnis sehingga IPC tidak sepenuhnya bergantung pada <i>agent/broker</i>. <ol style="list-style-type: none"> 1. Increase awareness of all IPC employees that IPC no longer has a monopoly right to the port business; 2. Improve service quality; 3. Improve the marketing function; 4. Change the business model so that IPC does not fully depend on agents/brokers.
8	Pendangkalan Kolam/Alur Siltation of Ponds/Grooves	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan metode <i>sand bypassing</i> untuk Cabang Pelabuhan Bengkulu; 2. Merencanakan jadwal pengerukan sesuai dengan laju sedimentasi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Apply the sand bypassing method for Bengkulu Port Branch; 2. Plan the dredging schedule in accordance with sedimentation rate.
9	Ketidaksiapan Dermaga Unprepared Pier	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perbaikan dermaga disesuaikan dengan waktu <i>low season</i>; 2. Melakukan perencanaan kapal dengan benar. <ol style="list-style-type: none"> 1. Doing dock repairs adjusted to the low season time; 2. Do ship planning correctly.
10	Mitra kerja sama usaha tidak memenuhi kesepakatan dalam kontrak Business partners do not fulfill the agreement in contract	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu prosedur pemilihan mitra kerjasama; 2. Klausul dan materi perjanjian harus melindungi seluruh kepentingan perusahaan; 3. Melakukan <i>monitoring</i> terus menerus untuk memastikan perjanjian dilaksanakan sesuai dengan kontrak. <ol style="list-style-type: none"> 1. Review procedures for selecting cooperative partners; 2. Agreement clauses and material must protect all company interests; 3. Carry out continuous monitoring to ensure the agreement is carried out in accordance with the contract.

EVALUASI PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

IPC khususnya Divisi Manajemen Risiko senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan agar implementasi manajemen risiko di perusahaan dapat dilakukan dengan efektif. Dalam rangka menuju *World Class Port*, tingkat kematangan manajemen risiko (*risk maturity*) harus ditingkatkan. Pada tahun 2019 dilakukan pengukuran tingkat kematangan manajemen risiko (*risk maturity level*) di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Berdasarkan pengukuran tingkat kematangan implementasi manajemen risiko, ada beberapa evaluasi yang harus diperhatikan dalam pengembangan implementasi manajemen risiko IPC kedepannya. Berikut adalah evaluasi atau analisis kesenjangan implementasi manajemen risiko tahun 2019 yang dikelompokan menjadi 3 (tiga) *category* dan 9 (sembilan) *building block* yaitu:

RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION EVALUATION

IPC in particular Risk Management Division constantly evaluates and repairs so that the implementation of risk management in the Company can be carried out effectively. In order to reach *World Class Port*, risk management maturity level must be increased. In 2019 a risk management maturity level was measured at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Based on the measurement of maturity level of risk management implementation, there are several evaluations that must be considered in the development of IPC risk management implementation going forward. The following is an evaluation or analysis of the gap in implementation of risk management in 2019 which is grouped into 3 (three) categories and 9 (nine) building blocks, namely:

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
GCG STRUCTURE AND MECHANISM

Kategori Category	Building Block	Parameter Parameters
Strategi bisnis Business Strategy	Strategi risiko Risk strategy	<ul style="list-style-type: none"> • Pola pikir Mind Set • Definisi risiko Definition of Risk • Proses pengambilan keputusan Decision Making Process
	Appetite risiko Risk appetite	<ul style="list-style-type: none"> • Sinyal peringatan dini Early Warning Signal • Metodologi appetite risiko Risk Appetite Methodology
	Profil risiko Risk profile	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan peristiwa risiko Reporting of Risk Event • Profil risiko Risk Profile • Mitigasi risiko Risk Mitigation
Manajemen bisnis Business Management	Struktur pemerintahan Governance structure	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggung jawab manajemen risiko Roles and Responsibility • Model Tata Kelola Perusahaan Governance Model • Tanggung jawab manajemen risiko Risk Management Responsibility
	Kebijakan risiko Risk policies	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi dan visibilitas kebijakan risiko Transparency and Visibility Into Risk Policies • Kebijakan risiko Risk Policies
	Pemantauan & pelaporan Monitoring & reporting	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan & Pelaporan Monitoring & Reporting • Kesadaran akan pelajaran yang dipetik Awareness of Lesson Learnt • Komunikasi dan kesadaran Communication and Awareness • Tindak lanjut Follow Up Actions
	Pemodelan & analisis Modelling & analysis	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen pengetahuan Knowledge Management • Penilaian risiko Risk Scoring • Pemodelan risiko Risk Modelling • Teknik analisis risiko Risk Analysis Techniques
Platform bisnis Business Platform	Budaya risiko Risk culture	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian budaya risiko Assessment of Risk Culture • Tone untuk mengelola risiko dan budaya kesadaran risiko Tone for Managing Risk and the Culture of Risk Awareness • Menanggapi risiko Respond to Risks • Nilai dan kepercayaan Values and Beliefs • Pelaporan peristiwa risiko Reporting of Risk Event
	Teknologi risiko Risk technology	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem dan teknologi Systems Technology



Dari hasil evaluasi implementasi manajemen risiko ini, disusunlah rencana-rencana perbaikan yang akan dituangkan dalam program kerja atau Rencana Kerja Manajemen (RKM) Divisi Manajemen Risiko tahun 2020 di antaranya adalah:

1. Peningkatan *Risk Culture & Awareness*;
2. Meningkatkan peran Divisi Manajemen Risiko sebagai risk advisor dalam penciptaan nilai (*value creation*) bidang komersial dan operasional;
3. Implementasi *Key Risk Indicator* (KRI) dan *Early Warning System* (EWS);
4. Penyusunan *Business Continuity Management*;
5. Implementasi Manajemen Risiko sebagai unsur *Decision Making Process*.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

IPC memiliki Pedoman umum Sistem Pengendalian Internal yang disusun berdasarkan pada *COSO Framework Principles* dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 56/6/19/PI.II-2013 Tanggal 10 Desember 2013.

TUJUAN PENGENDALIAN

Tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas operasional
Dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya Perseroan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan;
2. Keandalan pelaporan keuangan
Dimaksudkan untuk menjamin laporan yang wajar, tepat waktu, dan relevan, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lebih terjamin dengan adanya pengendalian intern yang efektif pada sistem pengelolaan data akuntansi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa seluruh data yang diolah adalah transaksi yang sah dan telah mendapat otorisasi, serta seluruh transaksi telah dicatat pada tanggal terjadinya dengan nilai yang akurat;

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak berwenang lainnya, maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan.

From the evaluation results of implementation of this risk management, plans for improvement will be formulated in the work program or Management Work Plan (RKM) for Risk Management Division in 2020 including:

1. Increased Risk Culture & Awareness;
2. Increasing the role of Risk Management Division as a risk advisor in value creation in commercial and operational fields;
3. Implementation of Key Risk Indicator (KRI) and Early Warning System (EWS);
4. Preparation of Business Continuity Management;
5. Implementation of Risk Management as an element of the Decision Making Process.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

IPC's General Guidelines for its Internal Control Systems is based on the *COSO Framework Principles* as determined by Board of Directors Decree No. 56/6/19/PI.II-2013 dated December 10, 2013.

CONTROL OBJECTIVES

The internal control objectives include:

1. Operational efficiency and effectiveness
Intended to increase the effectiveness and efficiency in managing the Company's resources to achieve the Company's objectives.
2. Reliability of financial reporting
Intended to guarantee that reports are reasonable, timely, and relevant, as a basis for making appropriate and accountable decisions.

The financial statements presentation and information disclosure is more assured with effective internal controls on the accounting data management system. This is intended to provide assurances that all data refers to legitimate authorized transactions, and that the transactions have been recorded on the date they happened for the true amount;

3. Compliance with laws and regulations
Intended to ensure that all Company activities are carried out in accordance with applicable laws and regulations, issued by the government or other authorities, as well as the Company's established policies, provisions, and procedures.

PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Intern yang efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Perusahaan, yaitu:

1. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh dalam mendesain serta mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang efektif. Pernyataan komitmennya terhadap perlunya pengendalian intern yang merupakan *"tone at the top"* yang akan mendorong integritas dan etika dalam membentuk lingkungan yang positif bagi sistem pengendalian internal.

Direksi memberikan arah dan mendelegasikan kewenangan kepada para pejabat senior atau *second layer management* (GM, EVP/SVP/VP) serta menilai cara mereka menjalankan aktivitas fungsi dan peran masing-masing. Selanjutnya para pejabat senior ini bertanggung jawab untuk mendisain kebijakan sistem pengendalian dan prosedur yang lebih spesifik sesuai dengan fungsi dan peran mereka;

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab memastikan adanya tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) melakukan pengawasan terhadap penerapannya dan memastikan pengendalian intern yang berjalan secara efektif.

Pengawasan yang efektif oleh Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern, dapat mendeteksi risiko lebih dini sehingga dapat mencegah permasalahan menjadi lebih besar;

3. Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawasan Internal, sebagaimana Auditor Eksternal sangat berkepentingan dengan keberadaan Sistem Pengendalian Intern yang efektif. Hal ini terkait dengan luasnya ruang lingkup dan kedalaman audit yang harus dilakukan. Semakin efektif sistem pengendalian internal Perusahaan, pekerjaan auditor akan semakin mudah.

Sebagai *third line of defence*, Satuan Pengawasan Internal harus melakukan evaluasi untuk menentukan apakah sistem pengendalian internal telah di desain dengan tepat, diimplementasikan secara konsisten, serta berjalan dengan baik. Hal ini juga dilakukan terhadap sistem pengendalian intern pada pengelolaan teknologi informasi.

Auditor harus dapat memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan adanya kelemahan baik dalam di desain, penerapan, maupun fungsinya;

INTERNAL CONTROL SYSTEM INTERESTED PARTIES

All parties in the Company's organization are responsible for running an effective Internal Control System, including:

1. Board of Directors

Board of Directors is fully responsible for designing and implementing an effective internal control system. Their commitment statement - "tone at the top" - encourages integrity and ethics in forming a positive environment for the internal control system.

Board of Directors provides direction and delegates authority to senior or second level management officials (GM, EVP/SVP/VP) and assesses the way they carry out their respective functions and roles. In addition, these senior officials are responsible for designing more specific control system policies and procedures in accordance with their functions and roles;

2. Board of Commissioners

Board of Commissioners is responsible for good corporate governance, and supervises the effective implementation of internal control.

Board of Commissioners' effective supervision of the internal control system implementation can detect risks early to prevent problems becoming larger;

3. Internal Audit Unit

As the external auditor, the Internal Audit Unit relies on an effective Internal Control System, as it affects the extent of the scope and depth of their audits. The more effective the Company's internal control system, the easier the auditor's work will be.

As a third line of defense, Internal Audit Unit conduct evaluations to determine whether internal control system has been properly designed, consistently implemented, and runs well. This is also conducted on internal control system in information technology management.

Auditors must provide improvement recommendations if they find weaknesses in the design, implementation or function;



4. Pegawai

Setiap individu *front liner* yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari (*first line of defence*) wajib memahami dan melaksanakan sistem dan prosedur yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal. Lingkungan pengendalian yang baik akan meningkatkan tanggung jawab semua individu untuk memiliki sistem deteksi dini sehingga memudahkan identifikasi dan segera mengetahui jika kinerja tidak sesuai standar dan target, terjadinya penyimpangan, ataupun kelemahan sistem;

5. Pihak-pihak Eksternal

Pihak-pihak Eksternal Perusahaan antara lain pemegang saham, regulator, pelanggan, serta pihak-pihak eksternal lainnya berkepentingan terhadap keberadaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan yang efektif karena akan mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERSEROAN

Komponen utama sistem pengendalian internal Perusahaan menurut COSO terdiri dari lima unsur utama yang saling berkaitan, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), serta Pemantauan (*Monitoring*).

Uraian mengenai masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan pondasi bagi semua komponen pengendalian yang lain. Kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern dan mencerminkan komitmen, perilaku, dan kesadaran Komisaris dan Direksi dalam menerapkan sistem pengendalian internal.

Lingkungan pengendalian yang merupakan prinsip sistem pengendalian internal yang efektif:

1. Integritas dan Etika

Seluruh insan Perusahaan dari Dewan Komisaris dan Direksi hingga para individu *front liner* harus memiliki integritas dan etika dalam melaksanakan peran dan fungsinya terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan. Perusahaan harus memiliki kode etik tertulis yang mengatur perilaku semua insan Perusahaan.

Dalam meningkatkan integritas dan etika kerja seluruh insan Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi harus mendorong penciptaan perilaku dan budaya yang menyadari akan pentingnya pengendalian internal. Untuk mendukung

4. Employees

Every front liner in charge of carrying out day-to-day activities must understand and implement systems and procedures as part of internal control system. A good control environment will increase the responsibility of all individuals as an early detection system to help immediately identify and find out if performance does not match the standards and targets, and the occurrence of irregularities, or system weaknesses;

5. External parties

External parties to the Company include shareholders, regulators, customers, and other external parties. They have an interest in the Company's Internal Control System as it encourages the application of good corporate governance principles.

COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

The main component of the Company's internal control system, based on COSO, consists of five main interrelated elements, namely the Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring.

A description of each component follows:

Control Environment

The control environment is foundation for all other control components. Environmental conditions greatly influence the internal controls effectiveness, and reflects the commitment, behavior and awareness of Board of Commissioners and Board of Directors in implementing an internal control system.

The control environment constitutes the principle of an effective internal control system:

1. Integrity and Ethics

All Company personnel from Board of Commissioners and Board of Directors to the front liners must have integrity and ethics in carrying out their roles and functions related to the Company's operational activities. The Company must have a written Code of Conduct that regulates the behavior of all Company personnel.

In improving the integrity and work ethics of all Company personnel, Board of Commissioners and Board of Directors must encourage the creation of a behavior and culture that is aware of the importance of internal control. To support

tercapainya tujuan tersebut, dapat ditempuh cara-cara sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan kode etik (aturan perilaku);
- b. Dewan Komisaris dan Direksi harus memberikan keteladanan (*role model*) dalam penerapan aturan perilaku dimaksud;
- c. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan kebijakan dan prosedur, maupun pelanggaran terhadap aturan perilaku;
- d. Memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban dalam hal adanya tindakan yang tidak mengikuti kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Untuk mendukung budaya pengendalian tersebut maka seluruh kebijakan, standar dan prosedur operasional, baik kegiatan utama (*core business*) maupun kegiatan pendukung (*supporting activity*) harus didokumentasikan secara tertulis, disosialisasikan, dipahami, diterapkan dan diawasi penerapannya.

2. Komitmen terhadap Kompetensi
 - a. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing posisi dalam Perusahaan;
 - b. Spesifik dalam menetapkan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan tertentu dan dituangkan dalam persyaratan (*job requirement*) yang diperlukan;
 - c. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu para pekerja mempertahankan dan meningkatkan kompetensi;
 - d. Mengangkat pejabat yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis;
 - e. Mengelola sumber daya manusia, termasuk dalam proses pengangkatan dan penempatan pekerja yang sesuai dengan ketrampilan, pengetahuan dan perilakunya.
3. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia
 - a. Kebijakan terkait perekrutan dan *training* SDM yang kompeten;
 - b. Melakukan perbaikan yang sesuai;
 - c. Kebijakan Promosi;
 - d. Kebijakan pegawai untuk ketaatan terhadap standar etika dan moral.
4. Struktur Organisasi
 - a. Struktur organisasi disusun dengan memperhatikan dan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan dalam RJPP, yang memberikan kerangka kerja untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan memonitor operasi;

the achievement of these objectives, the following methods are taken:

- a. Arrange and set a Code of Conduct (rules of behavior);
- b. Board of Commissioners and Board of Directors must be role models in the application of the intended rules of behavior;
- c. Enforce appropriate disciplinary actions for irregularities in policies and procedures, as well as violations of rules of behavior;
- d. Provide explanation and accountability in the event of any action that does not follow applicable policies and procedures.

To support the control culture, all policies, standards and operational procedures, both core business and supporting activities, must be documented in writing, socialized, understood, applied and monitored.

2. Commitment to Competence
 - a. Identify and determine the activities needed to complete the tasks and functions of each position in the Company;
 - b. Specify the competencies needed for each particular activity and set down in the requirements needed;
 - c. Organize training and mentoring to help workers maintain and improve their competencies;
 - d. Appoint officials with managerial skills and technical experience;
 - e. Manage Human Capitals, including the process of appointing and placing workers in accordance with their skills, knowledge and behavior.
3. Human Capital policies and practices
 - a. Policy on recruitment and training competent Human Capitals;
 - b. Make appropriate improvements;
 - c. Promotion Policy;
 - d. Employee policies for compliance with ethical and moral standards.
4. Organizational structure
 - a. The organization is structured by taking into account and in accordance with the strategy stipulated in the RJPP, which provides a framework for planning, implementing, controlling and monitoring operations;



- b. Setiap pegawai harus memahami peran dan fungsinya masing-masing dalam sistem pengendalian internal.
 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat harus dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Wewenang diberikan kepada bawahan sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam pencapaian tujuan perusahaan;
 - b. Pekerja yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait peran dan fungsi mereka;
 - c. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab memperhatikan aspek penerapan sistem pengendalian internal.
 6. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit
 - a. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah organ utama perusahaan dengan tugas dan tanggung jawab secara aktif dan efektif berperan penting untuk efektivitas pengendalian intern dan mengawasi pengelolaan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris selalu berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Buku Panduan Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Etika Dewan Komisaris yang telah disepakati.
 - b. Komite Audit
Komite Audit sebagai organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris bertugas membantu tugas Dewan Komisaris dalam menilai kecukupan sistem pengendalian intern dan ketaatan dalam penerapannya, kecukupan pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan.
 7. Filosofi dan gaya operasi manajemen
Filosofi dan gaya operasi manajemen sangat berpengaruh terhadap bentuk sistem pengendalian internal Perusahaan. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa profil risiko sangat mempengaruhi bentuk pengendalian internal suatu perusahaan. Hal ini berarti lingkungan pengendalian yang dibentuk oleh manajemen konservatif yang cenderung menghindari risiko akan sangat berbeda dengan lingkungan pengendalian yang dibentuk oleh manajemen yang agresif.
- b. Every employee must understand their respective roles and functions in internal control system.
 5. Delegation of authority and responsibility
Appropriate delegation of authority and responsibility must be carried out with due regard to the following matters:
 - a. Authority is given to subordinates in accordance with their level of responsibility in achieving company goals;
 - b. Workers who are authorized must understand that the authority and responsibility given is related to their roles and functions;
 - c. Employees who are authorized must understand that the authority and responsibility takes into account aspects of the implementation of internal control system.
 6. Participation of Board of Commissioners and Audit Committee
 - a. Board of Commissioners
Board of Commissioners is the main Corporate body whose duties and responsibilities includes actively and effectively playing an important role in the effectiveness of internal control, and supervises the Company's management and provides advice to Board of Directors. Board of Commissioners is responsible for ensuring that Board of Directors under any conditions has the ability to carry out its duties. In carrying out its duties, Board of Commissioners always adheres to applicable legislation, the Company's Articles of Association, Board of Commissioners and Board of Directors Board Manual, and the agreed Board of Commissioners Ethics.
 - b. Audit Committee
The Audit Committee is formed by Board of Commissioners with the task of assisting them in assessing internal control system adequacy and compliance, and the adequacy of its reporting and disclosure of financial statements.
 7. Management's philosophy and operating style
The management philosophy and style has an influence on the form of the Company's internal control system. As explained earlier, the risk profile greatly influences the form of internal control of a company, meaning that a control environment formed by a conservative management tends to avoid risk, which will be very different from a control environment formed by an aggressive management.

Demikian pula halnya antara manajemen yang menganut filosofi sentralisasi dan desentralisasi juga akan melahirkan lingkungan pengendalian dan bentuk sistem pengendalian internal yang sangat berbeda. Selain itu sifat dan intensitas komunikasi antar tingkatan manajemen, kebijakan manajemen, target keuangan maupun target operasi lainnya, juga berpengaruh terhadap bentuk dan sifat lingkungan pengendalian.

Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan komponen yang mengawasi proses pengendalian intern secara keseluruhan. Komponen ini juga sangat menentukan bentuk disain sistem pengendalian bahkan menentukan apakah suatu pengendalian diperlukan atau tidak.

1. Seperti diuraikan pada bagian awal, tujuan Sistem Pengendalian Intern adalah memberikan keyakinan bahwa manajemen dapat mewujudkan visi, menjalankan misi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
2. Sementara risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menggagalkan ataupun menghambat perusahaan dalam mencapai tujuan. Ketika risiko-risiko ini telah diidentifikasi dan dinilai, pada saat itu manajemen mengetahui bentuk disain sistem pengendalian internal yang dibutuhkan oleh Perusahaan;
3. Ketika tujuan perusahaan yang telah dikomunikasikan dan didelegasikan ke semua level dan unit kerja, sampai dengan individu, pada saat itu mereka harus memahami dan dapat mengidentifikasi risiko atas masing-masing tujuan, serta merumuskan bentuk disain pengendalian spesifik yang mereka butuhkan;
4. Risiko timbul dan berubah sesuai dengan perkembangan perusahaan demikian halnya dengan bentuk sistem pengendalian internal yang dibutuhkan. Dengan demikian untuk terciptanya Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif, Perusahaan secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko;
5. Secara berkala pengendalian intern perlu harus dikaji secara tepat dalam hal terdapat risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun risiko yang baru muncul. Pelaksanaan pengkajian tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap lingkungan dan kondisi serta tampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian internal dalam kegiatan operasi dan organisasi Perusahaan;
6. Hal utama yang dalam penilaian risiko adalah kesadaran (*awareness*) seluruh pegawai dan Pimpinan Manajemen bahwa setiap kegiatan aktivitas pengelolaan Perusahaan, memiliki risiko yang harus dikelola.

Likewise, the management using centralized and decentralized philosophies will also give birth to very different control environments and internal control systems. In addition, the nature and intensity of communication between management levels, management policies, financial targets and other operating targets also impacts shape and nature of control environment.

Risk Assessment

Risk assessment is a component at the start of overall internal control process, and determines the shape of control system design and even determines whether control is needed or not.

1. As previously described, the purpose of internal control system is to provide confidence that management can realize its vision, carry out its mission, and achieve its intended goals;
2. While risk is the possibility of an event that can prevent or hinder the Company in achieving its goals, these risks have been identified and assessed, so that management understood the form of internal control system design needed by the Company;
3. At that time the Company's goals were communicated and delegated to all levels and work units and individuals, they must be able to understand and identify the risks of each goal, and formulate the specific control design needed;
4. Risks arise and change according to the Company's development and form internal control systems needed. Therefore the Company continuously identifies and assesses risks to ensure a reliable and effective Internal Control System;
5. Internal control needs to be periodically reviewed in the event there are risks that are not being controlled, both for risks that previously existed and for emerging risks. The review includes, conducting a continuous evaluation regarding the influence of every environment and condition, as well as the achievement of targets, or effectiveness of internal controls, in the Company's operations and organization;
6. Risk assessment involves awareness by all employees and Management Leaders that all Company management activities have risks that must be managed.



Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian diperlukan untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa risiko, ataupun aktivitas yang harus dilakukan jika suatu peristiwa risiko terjadi. Aktivitas pengendalian ini dituangkan dalam dokumen tertulis berupa kebijakan dan prosedur yang harus ditaati dalam melaksanakan arahan manajemen.

Aktivitas pengendalian harus melibatkan semua tingkatan manajemen mulai Direksi sampai dengan individu yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Aktivitas pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian, serta proses verifikasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut telah dipatuhi secara konsisten sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap peran dan fungsi atau kegiatan operasional sehari-hari.

Sesuai dengan tujuan sistem pengendalian internal, aktivitas pengendalian mencakup operasional, pelaporan operasional, pelaporan keuangan, ketaatan, yang terdiri dari lima kategori yaitu:

1. Pemisahan fungsi yang memadai;
2. Otorisasi terhadap transaksi dan aktivitas;
3. Dokumentasi dan catatan yang memadai;
4. Pengendalian fisik atas aktiva dan pencatatannya;
5. Penilaian yang Independen atas kinerja.

Aktiva pengendalian yang harus ditetapkan pada semua tingkatan manajemen terdiri dari:

1. *Reviu Manajemen (Top Level Reviews)*
Berdasarkan laporan rutin maupun informasi lain yang diterima, Direksi melakukan *reviu* untuk menilai pencapaian kinerja perusahaan untuk dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun dengan target/standar yang telah ditetapkan. Jika terdapat deviasi negatif atau adanya kinerja yang tidak mencapai target, harus diketahui penyebabnya sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.
2. Fungsi langsung dari Manajemen Kegiatan
Kajian lebih dalam dilaksanakan oleh SPI, yaitu:
 - a. Melakukan *reviu* terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Jaminan Mutu;
 - b. Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data operasional dan keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi;
 - c. Melakukan *reviu* terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna:
 - Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan;
 - Menetapkan untuk tindakan perbaikan (*corrective actions*).

Control Activities

Control activities are needed to prevent the occurrence of a risk event, or activities that must be carried out if a risk event occurs. These control activities are stated in the policies and procedures that must be adhered to in carrying out management directives.

Control activities must involve all levels of management from Board of Directors to individuals tasked with carrying out daily operations. Control activities include the establishment of control policies and procedures, and the verification processes to ensure that these policies and procedures have been consistently adhered to, as these activities are inseparable from everyday roles and functions or operational activities.

In accordance with the internal control system objectives, control activities include operational, operational reporting, financial reporting, compliance, which includes five categories:

- a. Adequate separation of functions;
- b. Authorization of transactions and activities;
- c. Adequate documentation and records;
- d. Physical control of assets and records;
- e. Independent performance assessment.

Asset controls that must be applied at all levels of management consists of:

1. *Top Level Reviews*
Based on routine reports and other information received, Board of Directors' review assesses the Company's performance achievement compared to the previous period against the set targets/standards. If there is a negative deviation or a performance that does not reach its target, the cause must be known so that the necessary corrective action can be immediately taken.
2. *Direct functional of Activity Management*
A deeper review is carried out by IAU, namely:
 - a. Reviewing the risk profile report produced by Risk Management and Quality Assurance Division;
 - b. Analyzing operational data, both risk-related data and operational and financial data, to verify details and transaction activities;
 - c. Reviewing the work plans and budgets implementation realization, in order to:
 - Identify the causes of significant irregularities;
 - Establish corrective actions.

3. Pengendalian Sistem Informasi
 - a. Perusahaan melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan data transaksi dan melaksanakan prosedur otoritas, sesuai prosedur standar;
 - b. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
 - Pengendalian umum meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan internal-eksternal;
 - Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan dalam mengelola transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.
4. Pengendalian Aset Fisik (*Physical Controls*)
 - a. Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin adanya pengamanan fisik terhadap aset Perusahaan;
 - b. Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap program komputer dan *file data*, serta membandingkan nilai aktiva dan pasiva Perusahaan dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aktiva secara berkala.

Informasi dan Komunikasi

Terjaminnya kepastian bahwa Perusahaan beroperasi secara efektif dan efisien, handal dalam pelaporan keuangan, serta taat terhadap peraturan yang berlaku, komponen informasi dan komunikasi menjadi bagian yang vital dalam sistem pengendalian intern Perseroan secara keseluruhan.

Dalam sistem pengendalian intern, informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu diperlukan oleh semua lini manajemen hingga individu yang berada di posisi *first line of defense*. Demikian halnya dengan komunikasi yang menjamin bahwa semua insan mendapatkan akses terhadap informasi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam perusahaan. Informasi yang berkualitas tidak ada maknanya jika tidak dapat diakses dengan baik pada saat diperlukan.

Informasi terkait visi, misi, strategi, dan tujuan Perusahaan harus dapat dikomunikasikan (*cascaded*) dengan baik oleh Direksi kepada para GM, EVP/SVP/VP selaku *second layer* sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama. Hal ini penting

3. Information System Control
 - a. The Company verifies the accuracy and completeness of transaction data and implements authority procedures, according to standard procedures;
 - b. Information system control activities can be classified into two criteria, namely general control and application control.
 - General control includes control of data center operations, software procurement and maintenance systems, security access, and the development and maintenance of application systems. This general control is applied to the mainframes, servers, and user workstations, as well as internal-external networks;
 - Application control is applied to the programs used for managing transactions and to ensure that all transactions are correct, accurate and properly authorized. In addition, application control must ensure the availability of an effective audit process and check the correctness of audit process.
4. Physical Asset Controls
 - a. Physical asset control is carried out to ensure the physical security of Company assets;
 - b. This activity includes asset security, records and limited access to computer programs and data files, and comparisons of the Company assets and liabilities with the values recorded in the controlling records, specifically checking asset value regularly.

Information and Communication

The information and communication component is a vital part of the Company's overall internal control system, ensuring certainty that the Company operates effectively and efficiently, is reliable in its financial reporting, and adheres to applicable regulations.

In the internal control system, relevant, accurate and timely information is needed by all lines of management, and individuals in the position of first line of defense. Similarly to communication ensures that all people have access to information in accordance with their roles and responsibilities in the Company. Quality information has no meaning if it is not properly accessed when needed.

Information regarding the Company's vision, mission, strategy, and objectives must be cascaded properly by Board of Directors to GM, EVP/SVP/VP at the second level, so they have the same understanding. This is important as they, with their respective



karena mereka dengan fungsi dan perannya masing-masing bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap terwujudnya visi, terlaksananya misi, diterapkannya strategi, dan tercapainya tujuan perusahaan.

Berdasarkan informasi yang diterima, para *second layer management* ini merancang sistem, prosedur dan kebijakan untuk memastikan bahwa mandat yang mereka terima dari Direksi dapat dikomunikasikan (*cascaded*) kepada bawahannya untuk dilaksanakan, serta dapat dikendalikan dan informasinya dapat dikomunikasikan kepada Direksi sebagai *feedback*.

Pemantauan

Manajemen sangat menyadari bahwa pemantauan terhadap efektivitas sistem pengendalian intern merupakan komponen yang sangat penting dalam keseluruhan sistem pengendalian intern Perseroan.

Pemantauan, baik yang dilakukan secara rutin (*on going basis*) oleh *first line of defence* dan atasannya, maupun evaluasi terpisah oleh Direksi, Komisaris, maupun Auditor Internal/Eksternal, dimaksud untuk memastikan bahwa sistem pengendalian tetap berjalan dengan efektif.

Sistem pengendalian intern yang baik harus dapat memonitor dirinya sendiri. Hal ini berarti, pemantauan yang baik adalah pemantauan yang terus menerus oleh para *first line of defence* yang setiap hari melakukan kegiatan operasional.

Pemantauan yang dilakukan secara teratur lebih memudahkan dalam mengidentifikasi kelemahan sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Selain itu, sistem pengendalian internal Perusahaan akan lebih siap setiap saat, dalam hal pelaksanaan evaluasi dan penilaian oleh pihak independen.

Hal yang sangat penting dalam pemantauan adalah dapat mengetahui kelemahan sistem dan prosedur dalam rangka memperbaiki proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Tindakan perbaikan ini menjadikan aktivitas pemantauan sangat penting karena memberikan nilai tambah atas keberadaan sistem pengendalian internal dalam Perseroan, tidak hanya sebagai alat untuk pencegahan penyimpangan (*fraud*) tetapi lebih ke arah perbaikan sistem prosedur, penyempurnaan bisnis model, dan peningkatan kinerja.

functions and roles, are responsible for contributing to vision's realization, mission's implementation, strategies' implementation, and the achievement of Company's goals.

Based on the information received, these second level management designed systems, procedures and policies ensure that the mandates received from Board of Directors can be cascaded down to their subordinates to be implemented, and can be controlled, and the information communicated to Board of Directors as feedback.

Monitoring

Management is very aware that monitoring the internal control system's effectiveness is a very important component in the overall Company internal control system.

Monitoring, whether carried out on an going basis by the first line of defense and above, as well as through separate evaluations by Board of Directors, Board of Commissioners, and Internal/ External Auditors, is intended to ensure that the control system runs effectively.

A good internal control system must be able to monitor itself, meaning that good monitoring is continuous monitoring by the first line of defense that carry out operational activities every day.

Regular monitoring makes it easier to identify weaknesses so that corrective actions can be taken immediately. In addition, the Company's internal control system will be better prepared at all times, in terms of conducting evaluations and assessments by independent parties.

The most important thing in monitoring is knowing the systems and procedures weaknesses so that business processes improvements can be more effective and efficient. Monitoring activities become very important as they provide added value to the Company's internal control system, not only as a tool for prevention of fraud, but more towards improving system procedures, improving business models, and improving performance.

KESESUAIAN DENGAN COSO

Hasil evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal perusahaan menunjukkan tingkat penerapan 17 (tujuh belas) prinsip COSO pada masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pedoman perilaku (*Code of Conduct*) telah disampaikan ke setiap insan IPC. Di samping itu, dapat pula diakses melalui *website* IPC, sehingga tidak hanya Insan IPC tetapi *stakeholder* lainnya seperti pelanggan, pemasok, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dapat mengetahui serta memahami aturan dan perilaku tersebut. Untuk mendorong ditaatinya pedoman ini, manajemen menerapkan *whistleblowing system* dengan menunjuk PT Integrity Asia sebagai pihak independen yang menerima dan mengelola pelaporan atas pelanggaran kode etik;
2. Independensi Dewan Komisaris terhadap manajemen ditunjukkan ketika harus memberikan rekomendasi atas usulan bisnis dari Direksi. Semua usulan tidak mendapat rekomendasi tanpa melalui kajian dari Komite Audit maupun Komite Pemantau Manajemen Risiko. Melalui rapat koordinasi rutin dengan SPI, Komisaris melalui Komite Audit meminta laporan pelaksanaan fungsi pengawasan SPI termasuk perkembangan penerapan atas pengembangan pedoman umum Sistem Pengendalian Internal IPC;
3. Sejalan dengan transformasi IPC, struktur organisasi mengalami penyempurnaan dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan dan strategi IPC dengan tetap memperhatikan prinsip pendelegasian wewenang tanggung jawab dan garis pelaporan yang jelas;
4. Visi *"...creating an exciting enterprises for our people..."* telah menjadi daya tarik bagi para tenaga muda maupun profesional untuk bergabung dan menjadi bagian dari sumber daya IPC. Selain itu, manajemen memiliki kepedulian tinggi untuk memiliki SDM yang andal dan berkualitas melalui program pendidikan pasca sarjana baik di dalam maupun luar negeri, *accelerated development* program untuk mempersiapkan pemimpin masa depan sampai dengan perbaikan paket remunerasi untuk menjamin kesejahteraan yang lebih baik;
5. Dengan SDM yang berkualitas dan andal, Manajemen lebih yakin dalam mendelegasikan wewenang dan tanggung jawabnya kepada *second layer*. Termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab terhadap berfungsinya Sistem Pengendalian Internal dalam unit dan aktivitasnya.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

IPC secara rutin mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai reliabilitas Sistem Pengendalian Internal IPC serta konsistensi implementasinya. Jika hasil evaluasi menyatakan adanya prosedur yang memiliki kecenderungan untuk dapat menghambat kelancaran kualitas pelayanan, maka IPC akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki sistem ini.

CONFORMITY WITH COSO

The results of the Company's internal control system evaluation shows the application level of 17 (seventeen) COSO principles on each component as follows:

1. The Code of Conduct has been submitted to everyone in IPC. In addition, it can also be accessed through the IPC website, so that not only IPC employees but other stakeholders such as customers, suppliers, and other interested parties can identify and understand the rules and behavior. To encourage compliance with these guidelines, management implements a whistleblowing system by appointing PT Integrity Asia as an independent party that receives and manages reporting for violations of the Code of Conduct;
2. Board of Commissioners independence on management is demonstrated by providing recommendations on business proposals to Board of Directors. All proposals undergo a review from Audit Committee or Risk Management Monitoring Committee. Through regular coordination meetings with the IAU, Board of Commissioners through Audit Committee requests reports on the implementation of IAU supervisory functions including the development of internal guidelines development of IPC's Internal Control System;
3. In line with IPC's transformation, the organizational structure underwent improvements by adjusting to IPC's needs and strategies in line with the principle of clear delegation of authority and clear lines of reporting;
4. The vision of *"... creating an exciting enterprise for our people ..."* has attracted young and professional workers to join and become part of IPC. In addition, management has a high awareness to having reliable and qualified Human Capitals through post-graduate education programs both at home and abroad, accelerated development programs to prepare future leaders to remuneration package improvements to ensure better welfare;
5. With qualified and reliable Human Capitals, management is more confident in delegating authority and responsibility to the second level. This includes responsibility for the internal control system within the unit and its activities.

Internal Control System Effectiveness Evaluation

IPC routinely evaluates the Internal Control System's effectiveness. This evaluation aims to assess the reliability of IPC's internal control system as well as its consistency of implementation. If the evaluation results indicate a procedure that has a tendency to hinder the smoothness of service quality, then IPC will take the necessary action to improve this system.



Pemeriksaan khusus tidak hanya dilakukan terhadap Kantor Pusat, namun juga dilakukan pada sejumlah Cabang Pelabuhan. IPC juga menindaklanjuti temuan dari sejumlah auditor seperti BPKP, KAP, dan SPI, serta terus memonitor tindak lanjut pelaksanaan rekomendasinya, baik di Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan, maupun Anak Perusahaan.

Selama 2019, seluruh Sistem Pengendalian Internal IPC terbukti dapat berjalan cukup efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa IPC telah mematuhi elemen-elemen pengendalian internal yang telah disusun.

PERKARA PENTING

Sepanjang tahun 2019, jumlah perkara penting yang dihadapi Perseroan baik perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut.

Special inspections are not only done at Head Office, but also at a number of Port Branches. IPC also follows-up the findings of a number of auditors such as BPKP, PAF, and IAU, and continues to monitor the follow-up of its recommendations, both at Head Office, Port Branches, and Subsidiaries.

Throughout 2019, the entire IPC Internal Control System has proven itself to be quite effective. This shows that IPC has complied with internal control elements that have been prepared.

LEGAL ISSUES

During 2019, the number of civil and legal issues that have been completed (which have permanent legal force), and those still in the process of being resolved are shown in the following table.

Tabel Perkara Penting
Table of Legal Issues

No.	Perkara Penting <i>Legal Issues</i>	Jumlah <i>Number</i>		
		Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>	Hubungan Industrial <i>Industrial Relations</i>
1.	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Completed (has permanent legal force)	6	0	1
2.	Dalam proses penyelesaian In the process of completion	6	2	0
Jumlah Total		12	2	1

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN LEGAL ISSUES FACING THE COMPANY

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan
Table of Legal Issues Facing the Company

No	Pokok Perkara/Gugatan Principal Case/Claim	Nilai Nominal Tuntutan dan Status <i>Penyelesaian</i> Demand Nominal Value and Status Settlement	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan Influence on the Company	Sanksi Administrasi Administrative Sanctions
Hukum Pidana Criminal law				
1.	Kantor Pusat Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan 10 (sepuluh) unit <i>mobile crane</i> tahun 2011.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tipikor: Kalah dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan dengan Rp50 juta). • Pengadilan Tinggi Tipikor: Kalah (menguatkan putusan Pengadilan Tipikor). • Mahkamah Agung: Kalah (menguatkan putusan PN dan Putusan Banding dihukum pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan denda Rp500.000.000,- <i>subside</i> 8 (delapan) bulan kurungan). • Saat ini Perseroan sedang mengajukan Upaya Luar Biasa Peninjauan Kembali menggunakan Kuasa Hukum Akmalsyah & Co. • Memori Kembali Peninjauan telah disampaikan oleh Kuasa Hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 20 Desember 2019. 	Tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.	Tidak ada
	Head Office Case of alleged corruption in the procurement of 10 (ten) mobile cranes in 2011.	<ul style="list-style-type: none"> • Corruption Court: defeated was found guilty and sentenced to prison term of 1 year 4 months and a fine of 50 million rupiah). • The Corruption Court High Court: defeated (upheld the Corruption Court decision). • Supreme Court: defeated (upheld the District Court and Appellate Decisions sentenced to 9 (nine) years in prison and a fine of Rp. 500,000,000, - <i>subside</i> 8 (eight) months in prison). • The Company is currently proposing an Extraordinary Effort to Review Again using Akmalsyah & Co.'s Legal Counsel. • Reconsideration of the Review was submitted by Legal Counsel to Central Jakarta District Court on December 20, 2019. 	Did not affect the Company's financial condition	None



Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Table of Legal Issues Facing the Company

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Principal Case/Claim</i>	Nilai Nominal Tuntutan dan Status <i>Penyelesaian</i> <i>Demand Nominal Value and Status Settlement</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan <i>Influence on the Company</i>	Sanksi Administrasi <i>Administrative Sanctions</i>
2.	<p>Panjang</p> <p>Tindak pidana lingkungan kenaikan ambang baku mutu air laut di perairan Teluk Lampung akibat pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Panjang.</p> <p>Environmental crimes of increasing sea water quality threshold in the waters of Gulf of Lampung due to the dredging of Panjang shipping line.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Negeri: Kalah (Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp2 miliar). Ditangani oleh <i>Lawfirm</i> FAMS Lawyers. • Pengadilan Tinggi: Kalah (Terdakwa dinyatakan bersalah namun dengan pengurangan masa tahanan menjadi 1 (satu) tahun dan denda yang harus dibayar menjadi Rp1 miliar). Ditangani oleh <i>Lawfirm</i> A. Hakim Nusantara, Harman & Partners. • Mahkamah Agung: Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp1 miliar <i>subsider</i> 3 (tiga) bulan. Ditangani oleh <i>Lawfirm</i> A. Hakim Nusantara, Harman & Partners. • Saat ini Perusahaan sedang mengajukan Upaya luar biasa Peninjauan Kembali menggunakan Kuasa Hukum Andyka Andlan Tama Law Firm & Partner. • Konsultan Hukum Andyka Andlan Tama Law Firm & Partner sebagai Kuasa dari Terdakwa telah menyerahkan Memori Peninjauan Kembali (PK) dengan nomor Akta 3/Akta.Pid.PK/2019/PN Tjk. Tanggal 10 Oktober 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Bandar Lampung. • District Court: defeated (Defendant was found guilty and sentenced to imprisonment for 2 years and a fine of Rp2 billion). Handled by <i>Lawfirm</i> FAMS Lawyers. • High Court: defeated (Defendant was found guilty but with a reduction in detention period to 1 year and a fine to be paid of Rp1 billion). Handled by <i>Lawfirm</i> A. Hakim Nusantara, Harman & Partners. • Supreme Court: Defendant was found guilty and sentenced to imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp1 billion <i>subsider</i> 3 (three) months. Handled by <i>Lawfirm</i> A. Hakim Nusantara, Harman & Partners. • Currently, the Company is proposing an extraordinary review effort using Andyka Andlan's Attorney Tama Law Firm & Partner. • Legal Consultant Andyka Andlan Tama Law Firm & Partner as the Attorney of Defendant has submitted a Reconsideration Memory (PK) with Deed number 3/Akta.Pid.PK/2019/PN Tjk. October 10, 2019 at the Registrar of Tanjungkarang District Court in Bandar Lampung. 	<p>Tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.</p> <p>Did not affect the Company's financial condition</p>	<p>Tidak ada</p> <p>None</p>

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan
Table of Legal Issues Facing the Company

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Principal Case/Claim</i>	Nilai Nominal Tuntutan dan Status <i>Penyelesaian</i> <i>Demand Nominal Value and Status Settlement</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan <i>Influence on the Company</i>	Sanksi Administrasi <i>Administrative Sanctions</i>
Hukum Perdata Land Civil Law in Court				
1.	Teluk Bayur Gugatan terkait ganti rugi atas pemutus kontrak penggunaan lahan di Jalan by Pass Padang seluas 5.000 dan 10.000 m ² antara Cabang Pelabuhan Teluk Bayur dengan Pukoppolda Sumatera Barat yang telah diklaim telah menimbulkan kerugian kepada penggugat.	<ul style="list-style-type: none"> Pengadilan Negeri: Menguatkan Perseroan (Perkara <i>nebis in idem</i>). Pengadilan Tinggi: Kalah (memerintahkan agar perkara diperiksa kembali di PN). Pengadilan Negeri: Menang (gugatan Bakri Abdullah ditolak, gugatan rekonsensi IPC dikabulkan sehingga pengadilan memerintahkan Bakri Abdullah membayar Rp16,5 miliar). Pengadilan Tinggi: Menang (perkara <i>nebis in idem</i>). Kasasi: Permohonan kasasi Bakri Abdullah dan permohonan kasasi PT Pelindo II (Persero) ditolak. Telah diterbitkan SKK Litigasi kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk proses di Pengadilan Kelas I A Padang guna eksekusi dan pengambil alihan lahan. 	Perseroan kehilangan potensi pendapatan atas pemanfaatan lahan seluas 10.000m ² apabila belum dieksekusi lahan tersebut	Tidak ada
	Lawsuit related to compensation for the termination of land use contract on Padang By Pass Road covering an area of 5,000 and 10,000 m ² between Teluk Bayur Port Branch and West Sumatera Puskoppolda which claimed to have caused losses to the plaintiff.	<ul style="list-style-type: none"> District Court: Strengthened the Company (case of <i>nebis in idem</i>). High Court: Loses (orders that cases be re-examined in PN). District Court: Won (Bakri Abdullah's claim was rejected, PT Pelindo II's claim for reconciliation was granted so that the Court ordered Bakri Abdullah to pay Rp. 16.5 billion). High Court: Won (case of <i>nebis in idem</i>). Cassation: Bakri Abdullah's cassation application and appeal request from PT Pelindo II (Persero) rejected. SKK Litigation has been issued to the State Attorney at the West Sumatera High Prosecutor's Office for proceedings in the Padang Class I A Court for the execution and takeover of land. 	The Company loses potential revenue for the use of 10,000m ² of land if it has not been executed on the land.	None



Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Table of Legal Issues Facing the Company

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Principal Case/Claim</i>	Nilai Nominal Tuntutan dan Status <i>Penyelesaian</i> <i>Demand Nominal Value and Status Settlement</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan <i>Influence on the Company</i>	Sanksi Administrasi <i>Administrative Sanctions</i>
2.	<p>Tanjung Priok Permasalahan sewa menyewa lahan yang timbul karena CV Sinar Mas menjual bangunan milik Badan Pengusahaan Pelabuhan Tanjung Priok kepada PT Indonesia Oriental Lines yang kemudian dijual kepada PT Bumi Jasa Internasional (PT BJI) tanpa sepengetahuan dan seijin PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).</p> <p>The land leasing problem arises because CV Sinar Mas sold buildings belonging to the Tanjung Priok Port Concession Agency to PT Indonesia Oriental Lines which were then sold to PT Bumi Jasa International (PT BJI) without the knowledge and permission of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cabang Pelabuhan Tanjung Priok telah menunjuk Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai kuasa. Telah ada Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 294/PDT/2018/PT.DKI. PT BJI telah menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2018. <p>The Tanjung Priok Port Branch has appointed the North Jakarta District Attorney General's Attorney as the attorney.</p> <ul style="list-style-type: none"> There has been a Notice of Relation for the Contents of the Appeal Decision from the DKI Jakarta High Court No.294/PDT/2018 / PT.DKI. PT BJI has taken legal action to appeal to the Supreme Court where the Tanjung Priok Port Branch has submitted a Counter Memory of Cassation on October 19, 2018. 	<p>Perseroan kehilangan potensi pendapatan atas pemanfaatan lahan apabila belum dieksekusi lahan tersebut.</p> <p>The Company loses potential revenue for the use of land if it has not been executed on the land.</p>	Tidak ada
3.	<p>Sunda Kelapa Gugatan atas Wanprestasi terhadap perjanjian penyerahan Penggunaan tanah HPL Pemberian Nomor bagian dengan HGB HK.566/1/S/C-Pska-93 di Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa.</p> <p>Lawsuit for the default on agreement to surrender the use of HPL land with the granting of HGB Number: HK.566/1/S/C-Pska-93 in Sunda Kelapa Port Branch.</p>	<p>Perkara 294: Pengadilan Negeri: Menang. Dimungkinkan pihak lawan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.</p> <p>Case 294: District Court: Won. It is possible for the opposing party to appeal to DKI Jakarta High Court.</p>	<p>Perseroan berpotensi mendapatkan <i>revenue</i> dari pemanfaatan lahan dimaksud apabila lahan telah dikuasai secara fisik.</p> <p>The Company has potential to receive revenue from the intended use if the land has been physically controlled.</p>	Tidak ada

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan
Table of Legal Issues Facing the Company

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Principal Case/Claim</i>	Nilai Nominal Tuntutan dan Status <i>Penyelesaian</i> <i>Demand Nominal Value and Status Settlement</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan <i>Influence on the Company</i>	Sanksi Administrasi <i>Administrative Sanctions</i>
4.	Palembang Gugatan terkait pembatalan Sertifikat HPL No. 91/Sungai Selincah atas nama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diklaim tumpang tindih dengan sertifikat HGB No. 100/Sei Selincah dan HGB atas nama PT Susel Prima Permai yang telah berakhir jangka waktunya.	<p>Perkara Lama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Negeri: Kalah. • Pengadilan Tinggi: Kalah. • Mahkamah Agung: Menang. • Pihak lawan sedang menempuh upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. • Permasalahan selesai. <p>Tahap Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ditangani oleh Kantor Advokat Widjojanto Sonhadji & Associates.</p> <p>Tahap Kasasi di Mahkamah Agung ditangani oleh Kantor Advokat Rahmad Irwan & Partners.</p> <p>Perkara Baru: Ditangani oleh Kantor Advokat Widjojanto Sonhadji & Associates.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Negeri: kalah. • Pengadilan Tinggi: kalah • Mahkamah Agung: sedang proses 	<p>Perseroan berpotensi mendapatkan <i>revenue</i> dari pemanfaatan lahan dimaksud apabila lahan telah dikuasai secara fisik.</p>	Tidak ada
	Lawsuit related to cancellation of HPL No.91/Selincah River Certificate on behalf of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which claimed to overlap with HGB No.100/Sei Selincah Certificate and HGB No.101/Sei Selincah on behalf of PT Susel Prima Permai which has expired.	<p>Old Case:</p> <ul style="list-style-type: none"> • District Court: loses. • High Court: loses. • Supreme Court: win. • The opposing party is taking extraordinary remedies. • Settle case. <p>The stages of District Court and High Court were handled by Advocate Office Widjojanto Sonhadji & Associates.</p> <p>The Cassation Stage at Supreme Court was handled by Advocate Office Rahmad Irwan & Partners.</p> <p>New Case: Treated by Advocate Office Widjojanto Sonhadji & Associates.</p> <ul style="list-style-type: none"> • District Court: loses. • High Court: loses • Supreme Court: in process. 	The Company has potential to receive revenue from the intended use if the land has been physically controlled.	None



Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Table of Legal Issues Facing the Company

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Principal Case/Claim</i>	Nilai Nominal Tuntutan dan Status <i>Penyelesaian</i> <i>Demand Nominal Value and Status Settlement</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan <i>Influence on the Company</i>	Sanksi Administrasi <i>Administrative Sanctions</i>
5.	<p>Banten Gugatan terkait tumpang tindih hak kepemilikan dengan HPL atas nama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Pelabuhan Bojonegara. Perkara sudah diputus dalam tingkat Kasasi (<i>inkracht</i>) yang pada pokoknya alas hak kepemilikan para penggugat dinyatakan sah sedangkan HPL No 1 dan 2 atas nama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga melemahkan posisi hukum Perseroan dan berpotensi kehilangan bagian HPL seluas 22 Ha.</p> <p>Lawsuit related to overlapping ownership rights with HPL on behalf of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in Bojonegara Port. The case has been decided at the Cassation (<i>inkracht</i>) level, which in principle means the plaintiffs ownership rights are declared valid while HPL No. 1 and 2 on behalf of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) do not have binding legal force, thus weakening the legal position of the Company and potentially losing the HPL portion covering 22 hectares.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Negeri: kalah. • Pengadilan Tinggi: kalah. • Mahkamah Agung: kalah. • Peninjauan Kembali: kalah. <p>Permasalahan Selesai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • District Court: defeated. • High Court: defeated. • Supreme Court: defeated. • Judicial Review: defeated. <p>Settle Case.</p>	<p>Perseroan berpotensi kehilangan aset tanah seluas 22Ha.</p> <p>The Company has potential to lose 22 hectares of land assets.</p>	<p>Tidak ada</p> <p>None</p>
6.	<p>Banten Gugatan Perdata terkait dengan sengketa tanah HPL No. 2/91.</p> <p>Civil Lawsuit related to HPL land dispute No. 2/91.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Negeri: menang. • Pengadilan Tinggi: Pihak lawan mengajukan Banding dan saat ini dalam menunggu Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Banten. <ul style="list-style-type: none"> • District Court: wins. • High Court: The opposing party submits an Appeal and is currently awaiting the Decision Appeal at Banten High Court. 	<p>Perseroan berpotensi kehilangan aset tanah apabila kalah.</p> <p>The Company has potential to lose land assets if lose.</p>	<p>Tidak ada</p> <p>None</p>

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan
Table of Legal Issues Facing the Company

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Principal Case/Claim</i>	Nilai Nominal Tuntutan dan Status <i>Penyelesaian</i> <i>Demand Nominal Value and Status Settlement</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan <i>Influence on the Company</i>	Sanksi Administrasi <i>Administrative Sanctions</i>
7.	<p>Kantor Pusat SP PT JICT menggugat pembatalan perpanjangan perjanjian kerjasama antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT JICT di Pelabuhan Tanjung Priok karena dianggap merugikan para pekerja PT JICT.</p> <p>Head Office SP PT JICT sued for the cancellation of the cooperation agreement extension between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT JICT at the Tanjung Priok Port as it was considered detrimental to PT JICT workers.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Negeri: menang. • Pengadilan Negeri pada tanggal 1 Maret 2018 telah menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara karena perkara merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. • Pemberitahuan pernyataan banding dari SP PT JICT telah diterima pada tanggal 12 Juli 2018. • Penanganan perkara di tingkat banding sedang dilakukan. 	<p>Perpanjangan Perjanjian Kerja sama antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT JICT di Pelabuhan Tanjung Priok berpotensi dibatalkan Perseroan.</p> <p>The extension of Cooperation Agreement between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT JICT at Tanjung Priok Port might be canceled.</p>	Tidak ada
8.	<p>Kantor Pusat Perkara di Pengadilan Pajak Jakarta dalam perkara Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01067/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan.</p> <p>Head Office Jakarta Tax Court case at the Appeal stage based on the Director General of Tax Decree No. KEP-01067/KEB/WPJ.19/2017 dated December 22, 2017 concerning Taxpayer Objection for Paying Income Tax Underpayments.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Putusan Pengadilan sudah dibacakan tanggal 9 Juli 2019 dan Permohonan Banding ditolak. (Salinan Putusan Resmi sudah diterima). • Perusahaan menempuh upaya Peninjauan kembali dengan menunjuk Konsultan Hukum Kantor Advokat Imanuddin, Ghazali & Partners. • Memori Peninjauan Kembali telah disampaikan kepada Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Oktober 2019. 	<p>Perseroan membayar pajak sebesar Rp1,2 triliun.</p> <p>The Company paid tax of Rp1.2 trillion.</p>	Tidak ada



Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Table of Legal Issues Facing the Company

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Principal Case/Claim</i>	Nilai Nominal Tuntutan dan Status <i>Penyelesaian</i> <i>Demand Nominal Value and Status Settlement</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan <i>Influence on the Company</i>	Sanksi Administrasi <i>Administrative Sanctions</i>
9.	<p>Kantor Pusat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh (Pensiunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)) tahun 2012.</p> <p>Head Office Lawsuit Against the Law filed by (Retired of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)) in 2012.</p>	<p>Pengadilan Negeri: Menang namun Salinan putusan belum diterima.</p> <p>Permasalahan selesai.</p> <p>District Court : Wins but a copy of the decision has not been received.</p> <p>Settle Case.</p>	<p>Tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.</p> <p>Did not affect the Company's financial condition.</p>	<p>Tidak ada</p> <p>None</p>
10.	<p>Sunda Kelapa Terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tjen Fattah Effendy di atas HPL No. 7/Ancol karena rekomendasi palsu.</p> <p>The issuance of the Right to Building Certificate in the name of General Fattah Effendy on HPL No. 7/Ancol because of false recommendations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa telah dilakukan pembatalan Hak Guna Bangunan Nomor 2912/Ancol luas 3.776 M2 atas nama Tjen Fattah Effendi oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sebagaimana SK Kakanwil BPN DKI Jakarta, sehingga status kepemilikan terhadap tanah dimaksud murni hak Pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanpa hak-hak lain di atasnya berdasarkan sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 7/Ancol. Bahwa telah melakukan pemasangan plang terhadap tanah yang dikuasasi oleh Ahli Waris alm. Tjen Fattah Effendi. <p>Permasalahan selesai.</p> <p>The cancellation of Building Use Number 2912/ Ancol area of 3,776 M2 has been carried out in the name of Tjen Fattah Effendi by DKI Jakarta Provincial BPN Regional Office as stated in DKI Jakarta BPN Regional Office Decree, so that the ownership status of the said land is purely the right of the management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) without other rights thereon based on certificate of Management Right Number 7/Ancol.</p> <ul style="list-style-type: none"> The plank was installed on the land which was controlled by the late heir. Tjen Fattah Effendi. <p>Settle Case.</p>	<p>Perseroan berpotensi mendapatkan <i>revenue</i> dari pemanfaatan lahan dimaksud apabila lahan telah dikuasai fisik secara.</p> <p>The Company has potential to receive revenue from the intended use if the land has been physically controlled.</p>	<p>Tidak ada</p> <p>None</p>

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan
Table of Legal Issues Facing the Company

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Principal Case/Claim</i>	Nilai Nominal Tuntutan dan Status <i>Penyelesaian</i> <i>Demand Nominal Value and Status Settlement</i>	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan <i>Influence on the Company</i>	Sanksi Administrasi <i>Administrative Sanctions</i>
11.	Sunda Kelapa Penggunaan bagian tanah HPL No. 2/ Penjaringan oleh PT Tripindo Perkasa yang perjanjian telah berakhir pada tanggal 30 September 2015.	Telah dilakukan penguasaan lahan oleh Perseroan dan pembongkaran bangunan berupa gudang oleh pihak ketiga yang memiliki perikatan dengan PT Tripindo. Permasalahan selesai.	Perseroan berpotensi mendapatkan <i>revenue</i> dari pemanfaatan lahan dimaksud apabila lahan telah dikuasai secara fisik.	Tidak ada
	Use of soil part HPL No. 2/Penjaringan by PT Tripindo Perkasa whose agreement expired on September 30, 2015	Land control has been carried out by the Company and demolition of buildings in the form of warehouses by parties when they have an agreement with PT Tripindo. Settle Case.	The Company has potential to receive revenue from the intended use if the land has been physically controlled.	None
12.	Sunda Kelapa Bagian tanah HPK No. 2/Penjaringan yang dikerjasamakan dengan PT Karya Utama (PT KTU) tidak dioptimalkan.	<ul style="list-style-type: none"> Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa telah menyampaikan Peringatan II Kepada PT KTU pada tanggal 7 Mei 2018. PT KTU melalui Kantor Hukum Waldus Situmorang & Rekan selaku kuasa hukumnya telah menyampaikan tanggapan pada tanggal 21 Mei 2018 yang intinya meminta pengembalian uang yang telah diinvestasikan oleh PT KTU. Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa dan Divisi Hukum akan meminta bantuan Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan permasalahan dengan PT KTU. 	Perseroan berpotensi mendapatkan <i>revenue</i> dari pemanfaatan lahan dimaksud apabila lahan telah dikuasai secara fisik.	Tidak ada
	Sunda Kelapa Part of land HPK No. 2/Penjaringan in cooperation with PT Karya Utama (PT KTU) was not optimized.	<ul style="list-style-type: none"> Sunda Kelapa Port Branch delivered 2nd Warning to PT KTU on May 7, 2018. PT KTU through the Legal Office of Waldus Situmorang & Partners as its attorney has submitted a response on May 21, 2018 which essentially asks for the return of money invested by PT KTU. Sunda Kelapa Port Branch and Legal Division will ask for assistance from the State Attorney in handling problems with PT KTU. 	The Company has potential to receive revenue from the intended use if the land has been physically controlled.	None

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Selama tahun 2019, tidak terdapat perkara penting yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

LEGAL ISSUES FACED BY BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN OFFICE

During 2019, there were no legal issues faced by the Board of Commissioners and Board of Directors in office.



PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN

Tidak terdapat perkara penting yang sedang dihadapi oleh Anak Perusahaan.

LEGAL ISSUES FACED BY SUBSIDIARIES

There are no legal issues faced by the Subsidiaries.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL

Biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas bina lingkungan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian Description	Nominal (Rp) Nominal (Rp)
Bencana Alam Natural disasters	69,092,600
Pendidikan dan/atau Pelatihan Education and/or Training	5,172,077,591
Peningkatan Kesehatan Health Improvement	1,630,266,926
Pengembangan prasarana dan sarana umum Development of public infrastructure and facilities	5,171,414,954
Sarana Ibadah Places of worship	4,588,499,013
Pelestarian Alam Nature Conservation	2,992,171,128
Pengentasan Kemiskinan Poverty Alleviation	4,642,658,067
BUMN Peduli SOE Care	-
BUMN Peduli Pulau-Pulau Terbatas SOE Care for the Islands	-
Uang Muka Bina Lingkungan Environmental Development Advances	-
Jumlah Program Bina Lingkungan Total Community Development Programs	24,266,180,279

SOCIAL AND/OR POLITICAL FUNDING

SOCIAL ACTIVITIES FUNDING

Costs incurred for community development activities during 2019 were as follows:

PEMBERIAN DANA KEGIATAN POLITIK

IPC memiliki kebijakan terkait dengan pemberian dana kegiatan politik yang tertuang dalam Pedoman Kode Etik Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC. IPC tidak diperkenankan untuk mendukung dan memberikan donasi untuk kepentingan politik.

POLITICAL FUNDING

IPC has policies related to the provision of funds for political activities in the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC Code of Conduct. IPC is not permitted to support and donate for political purposes.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

IPC menjamin adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan menyampaikan informasi material dan relevan mengenai IPC yang mudah diakses oleh

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

IPC guarantees transparency in implementing decision-making processes and conveying materials and relevant information on IPC that are accessible to Stakeholders in accordance with

Pemangku Kepentingan sesuai dengan haknya. IPC percaya bahwa penyebaran informasi kepada seluruh Pemangku Kepentingan merupakan bagian penting dari perwujudan prinsip transparansi informasi secara internal dan eksternal, yang diharapkan membantu, menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi positif dari para Pemangku Kepentingan terhadap kebijakan dan kegiatan IPC.

Untuk itu, IPC membuka akses seluas-luasnya kepada publik terhadap perolehan informasi mengenai identitas dan rekam jejak, perkembangan usaha, produk dan jasa yang ditawarkan, serta berita-berita terbaru terkait bidang usaha IPC melalui:

1. *Website*: www.indonesiaport.co.id
Website Perseroan disajikan dalam Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris.
2. Media Sosial:
 - a. Twitter : @indonesiaport
 - b. Facebook : IndonesiaPort
 - c. Youtube : Pelabuhan Indonesia II/IPC
 - d. Instagram : @indonesiaportcorp
3. Portal BUMN : <http://bumn.go.id/pelindo2/application>

Khusus untuk pegawai IPC, informasi mengenai Perusahaan dapat diakses pada portal internal yaitu *e-office* IPC dan majalah IPC *News*. Perusahaan juga memberikan *CEO Letter*, yaitu penyampaian informasi dari Direktur Utama kepada seluruh pegawai melalui *email corporate* masing-masing pegawai. *CEO Letter* disebarakan kepada seluruh pegawai 1 (satu) bulan sekali.

Selain itu, publik dapat mengirimkan informasi secara tertulis kepada:

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Jl. Pasoso No. 1 Tanjung Priok. Jakarta Utara 14310
Tel. : (021) 4301080
Fax. : (021) 4351225
email : corp_sec@indonesiaport.co.id

their rights. IPC believes that the dissemination of information to all Stakeholders is an essential part of the realization of the internal and external information transparency principles, which are expected to assist, maintain and enhance the stakeholders' knowledge, understanding and positive perceptions of IPC policies and activities.

To that end, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) provides the widest access to the public on the acquisition of information regarding identity and track record, business development, products and services offered, and latest news related to IPC business through:

1. *Website* : www.indonesiaport.co.id
The Company's website is presented in Indonesian & English.
2. Social Media:
 - a. Twitter : @indonesiaport
 - b. Facebook : IndonesiaPort
 - c. Youtube : Pelabuhan Indonesia II/IPC
 - d. Instagram : @indonesiaportcorp
3. SOE's Portal : <http://bumn.go.id/pelindo2/application>

Especially for IPC employees, information about the Company can be accessed on the internal portal of IPC *e-office* and IPC *News* magazine. The Company also provides a *CEO Letter*, which is the delivery of information from President Director to all employees through corporate email of each employee. A *CEO Letter* is distributed to all employees once a month.

In addition, the public may send written information to:

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Jl. Pasoso No. 1 Tanjung Priok. North Jakarta 14310
Tel. : (021) 4301080
Fax. : (021) 4351225
email : corp_sec@indonesiaport.co.id

SIARAN PERS

PRESS RELEASES

No	Tanggal Date	Judul Press Releases
1.	1 Januari 2019 January 1, 2019	IPC Dorong <i>Stakeholder</i> Manfaatkan <i>Platform</i> Layanan Berbasis Digital IPC Encourages Stakeholders to Take Advantage of Digital-Based Service Platforms
2.	11 Januari 2019 January 11, 2019	Membuka 2019, IPC Lakukan Pengalihan Tugas dan Serah Terima Jabatan IPC Group Opening 2019, IPC Undertakes Task Transfer and Handover of IPC Group Positions
3.	25 Januari 2019 January 25, 2019	Elvyn Kerahkan 750 <i>Millennials</i> IPC Group, Ikut Majukan Dunia Kepelabuhanan Elvyn Deploys 750 Millennials IPC Group, Participates in advancing the World Port
4.	12 Februari 2019 February 12, 2019	Genjot Layanan di Pelabuhan Tanjung Priok, IPC Kolaborasi dengan Dirjen Bea dan Cukai Boosts Services at Tanjung Priok Port, IPC Collaborates with Director General of Customs and Excise



No	Tanggal Date	Judul Press Releases
5.	17 Februari 2019 February 17, 2019	Wakil Presiden Apresiasi Rencana Pengembangan dan Penataan Pelabuhan Bengkulu Vice President's Appreciation on Bengkulu Port Development and Structuring Plan
6.	20 Februari 2019 February 20, 2019	Perkuat Sinergi, IPC Gelar <i>Stakeholder Gathering</i> Strengthening Synergy, IPC Holds Stakeholder Gathering
7.	25 Februari 2019 February 25, 2019	Dukung Penataan Kampung Nelayan, IPC Resmi Lepaskan Lahan 12,18 HA Supporting the Structuring of Fishing Villages, IPC Officially Relinquishes Land for 12.18 HA
8.	03 Maret 2019 March 3, 2019	IPC Mantapkan Realisasi KEK Pulau Baai Bengkulu IPC Strengthens Realization of KEK in Baai Island Bengkulu
9.	04 Maret 2019 March 4, 2019	Gelar Rapat Kerja Nasional 2019, IPC Sambut Era Baru Pelabuhan Indonesia Holds 2019 National Working Meeting, IPC Welcomes the New Era of Indonesian Ports
10.	15 Maret 2019 March 15, 2019	Teken 3 MOU, IPC Dorong Pengembangan dan Optimalisasi Pelabuhan di Provinsi Sumatera Selatan Signing 3 MOU, IPC Encourages Development and Optimization of Ports in South Sumatra Province
11.	17 Maret 2019 March 17, 2019	Wujudkan <i>Zero Accident</i> , IPC Dukung Deklarasi Pengemudi Truk Pelopor Keselamatan Realizing Zero Accident, IPC Supports Declaration of Safety Pioneer Truck Drivers
12.	18 Maret 2019 March 18, 2019	Akhiri Masa Tugas, IPC Apresiasi Dedikasi Direktur Komersial End of Term, IPC Appreciates the Dedication of Commercial Director
13.	18 Maret 2019 March 18, 2019	Era Baru Pelabuhan, IPC Menuju <i>Trade Facilitator</i> New Era of Ports, IPC Towards Trade Facilitator
14.	26 Maret 2019 March 26, 2019	Dorong Tumbuhnya Peluang Usaha, IPC Gelar Kelas Kreatif di Pontianak Encouraging the Growth of Business Opportunities, IPC Holds Creative Classes in Pontianak
15.	02 April 2019 April 2, 2019	Rayakan HUT Kementerian BUMN, IPC Berbagi Dengan 1500 Warga Ciamis Celebrate the SOE Ministry's Anniversary, IPC Shares with 1500 Ciamis Community
16.	08 April 2019 April 2, 2019	IPC Memiliki Dua Direksi Baru IPC Has Two New Directors
17.	15 April 2019 April 15, 2019	IPC Siap Berkolaborasi dengan Jajaran Dewan Komisaris IPC Group dalam Menciptakan Perusahaan yang <i>Solid</i> IPC Is Ready to Collaborate with Board of Commissioners of IPC Group in Creating a Solid Company
18.	22 April 2019 April 22, 2019	Bangkitkan Semangat Kartini, IPC Gelar <i>Fieldtrip</i> Ke Musesum Maritim Awakening Kartini's Spirit, IPC Holds Fieldtrip to Maritime Musesum
19.	30 April 2019 April 30, 2019	IPC Ditunjuk Jadi Koordinator Posko BUMN Peduli Bencana di Bengkulu IPC Appointed as Coordinator of Disaster SOE Care Post in Bengkulu
20.	07 Mei 2019 May 7, 2019	Berbagi Cinta Di Bulan Ramadhan, IPC Buka Bersama Anak Yatim Sharing Love in Ramadan, IPC breaking the fast with Orphans
21.	08 Mei 2019 May 8, 2019	Trafik Perdagangan Global Meningkat, IPC Perkuat Kerjasama dengan Pelabuhan Guangzhou Global Trade Traffic Increases, IPC Strengthens Collaboration with Guangzhou Port
22.	10 Mei 2019 May 10, 2019	IPC Fasilitasi Mudik Gratis Untuk 22 Ribu Pemudik Tujuan Jawa & Sumatera IPC Facilitates Free Homecoming for 22 Thousand Travelers to Java & Sumatra
23.	16 Mei 2019 May 16, 2019	Trilogi Maritim Akan Turunkan Biaya Logistik Nasional Maritime Trilogy Will Reduce National Logistics Costs
24.	21 Mei 2019 May 21, 2019	Dukung Program BUMN, IPC Gelar Program 3.000 Pangan Murah Ramadhan Bagi Warga Cinere Supporting the SOE Program, IPC Holds 3,000 Cheap Ramadan Food Program for Cinere Residents
25.	25 Mei 2019 May 25, 2019	IPC Serahkan Beasiswa untuk Anak-anak Berkebutuhan Khusus di Palembang IPC Hands Over Scholarships for Children with Special Needs in Palembang
26.	26 Mei 2019 May 26, 2019	Mudik Gratis dengan Kapal Laut, IPC Berangkatkan Ribuan Pemudik Tujuan Batam Free Homecoming by Ship, IPC Departs Thousands of travelers to Batam
27.	27 Mei 2019 May 27, 2019	Mendekati Lebaran, IPC Gelar Pasar Murah untuk Warga Approaching Eid Al-Fitr, IPC Holds a Cheap Market for Residents
28.	29 Mei 2019 May 29, 2019	IPC Lepas 22 Ribu Peserta Mudik Gratis Tujuan 16 Kota di Jawa dan Sumatera IPC Released 22 Thousand Free Homecoming Participants in 16 Cities in Java and Sumatra
29.	26 Juni 2019 June 26, 2019	Dirut IPC Lakukan Penyegaran Pejabat Struktural IPC Group IPC President Director Refreshes IPC Group Structural Officials

No	Tanggal Date	Judul Press Releases
30	11 Juli 2019 July 11, 2019	IPC Percepat Pembangunan Terminal Kijing IPC Accelerates Construction of Kijing Terminal
31	19 Juli 2019 July 19, 2019	IPC, Pelindo 1 dan PT Pengusaha Daerah Industri Pulau Batam (Persero) Sinergi Kelola Pelabuhan Batu Ampar IPC, Pelindo 1 and PT Pengusaha Industri Industri Batam Island (Persero) Synergy to Manage Batu Ampar Port
32	26 Juli 2019 July 26, 2019	Laba Bersih IPC Naik 25 Persen di Semester I 2019 IPC Net Profit Increases by 25 Percent in 1 st Semester of 2019
33	02 Agustus 2019 August 2, 2019	Pasca Gempa, Operasional Seluruh Pelabuhan IPC Berjalan Normal After Earthquake, Operations of All IPC Ports Running Normal
34	04 Agustus 2019 August 4, 2019	Layanan Operasional Pelabuhan Tetap Berjalan Saat Listrik Padam (<i>Blackout</i>) Port Operational Services Keep Running When Power Outages (<i>Blackout</i>)
35	10 Agustus 2019 August 10, 2019	Jelang Idul Adha, IPC Serahkan Ratusan Hewan Qurban Ahead of Eid Al-Adha, IPC Hands Over Hundreds of Sacrificial Animals
36	14 Agustus 2019 August 14, 2019	Program Siswa Mengenal Nusantara, IPC Fasilitas Kunjungan 23 Siswa Asal Kalimantan Tengah ke Sumatera Selatan Student Program Getting to Know the Nusantara, IPC Facilitates the Visit of 23 Students from Central Kalimantan to South Sumatra
37	17 Agustus 2019 August 17, 2019	Sambut Hari Kemerdekaan, IPC Peduli Gelar CSR di Palembang Welcoming Independence Day, IPC Cares about CSR Program in Palembang
38	17 Agustus 2019 August 17, 2019	Tebar Semangat Nasionalisme, IPC Hadirkan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI di Sumatera Selatan Spreading the Spirit of Nationalism, IPC Presents the 74th Anniversary of Indonesian Independence in South Sumatra
39	22 Agustus 2019 August 22, 2019	Ajak Peserta SMN Kunjungi Kantor Kementerian BUMN, IPC Tutup Program Siswa Mengenal Nusantara 2019 Inviting SMN Participants to Visit the Ministry of SOEs Office, IPC Closes 2019 Students Getting to Know the Nusantara Program
40	29 Agustus 2019 August 29, 2019	Perluas Kemitraan, IPC Jalin Kerjasama dengan 2 Pelabuhan di Sabah Expanding Partnership, IPC Collaborates with 2 Ports in Sabah
41	05 September 2019 September 5, 2019	Milenial IPC Siap Berkolaborasi Memajukan Dunia Kepelabuhanan IPC Millennial Ready to Collaborate to Advance the World Port
42	09 September 2019 September 9, 2019	IPC Siap Jadi Tuan Rumah Kompetisi APA Sports Meet ke-13 di Yogyakarta PC is Ready to Host the 13 th APA Sports Meet Competition in Yogyakarta
43	13 September 2019 September 13, 2019	Tingkatkan Solidaritas Antar Pelabuhan Se-ASEAN, APA Sports Meet 2019 Siap Dihelat Increasing Solidarity Between Seaports in ASEAN, APA Sports Meet 2019 Ready to be Held
44	16 September 2019 September 16, 2019	Pelindo Beri Sambutan Hangat Tamu Negara Peserta ASEAN Port Association Meet 2019 di Yogyakarta Pelindo Gives Warm Greetings from 2019 ASEAN Port Association Meet Participants in Yogyakarta
45	17 September 2019 September 17, 2019	Pelindo Gelar Meriah Upacara Pembukaan 13 th APA Sports Meet di Yogyakarta Pelindo Holds a Festive Opening Ceremony for the 13 th APA Sports Meet in Yogyakarta
46	18 September 2019 September 18, 2019	Gelaran Kompetisi Olahraga ASEAN Port Association (APA) Sports Meet 2019 Dimulai ASEAN Port Association (APA) Sports Meet 2019 Sports Meet Begins
47	20 September 2019 September 20, 2019	5 Fakta Menarik Penyelenggaraan 13 th APA Sports Meet di Yogyakarta 5 Interesting Facts about the 13 th APA Sports Meet in Yogyakarta
48	20 September 2019 September 20, 2019	Gerak Cepat IPC Jadi World Class Port IPC Fast Moving Becomes a World Class Port
49	20 September 2019 September 20, 2019	Pamer Kekayaan Budaya Indonesia, Pelindo Tutup Rangkaian 13 th APA Sports Meet 2019 Showing off Indonesian Cultural Wealth, Pelindo Closes the 13 th APA Sports Meet Series 2019
50	10 Oktober 2019 October 10, 2019	Progres 60% Lebih, IPC Optimis JTCC Beroperasi Tahun 2020 More than 60% Progress, IPC Optimistic JTCC Operates in 2020
51	17 Oktober 2019 October 17, 2019	Komite Keamanan Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Apel Siaga Pastikan Keamanan dan Ketertiban di Pelabuhan Tanjung Priok Port Security Committee Holds Apple Standby to Ensure Security and Order at the Port
52	30 Oktober 2019 October 30, 2019	IPC Gandeng Pertamina, Jamin Kelancaran Pasokan BBM di Pelabuhan IPC Partners with Pertamina, Guaranteeing Smooth Supply of Fuel at the Port
53	11 November 2019 November 11, 2019	CSR IPC Libatkan Warga Lakukan Aksi Peduli Lingkungan di Sekitar Pelabuhan CSR IPC Involves Residents to Take Action to Care for the Environment Around the Port



No	Tanggal Date	Judul Press Releases
54	14 November 2019 November 14, 2019	IPC Raih Juara 1 Penghargaan <i>Annual Report Award</i> 2018 IPC Wins 1st Place in the 2018 Annual Report Award
55	19 November 2019 November 19, 2019	IPC Memiliki Wakil Direktur Utama IPC Has a Vice President Director
56	20 November 2019 November 20, 2019	Hingga Kuartal III 2019, IPC Catat Laba Rp2,21 Triliun Until the Third Quarter of 2019, IPC Record Profit of Rp. 2.21 Trillion
57	21 November 2019 November 21, 2019	ESR IPC Kembali Lakukan Aksi Peduli Lingkungan di Sekitar Pelabuhan ESR IPC once again carries out Environmental Care Action Around the Port
58	27 November 2019 November 27, 2019	5.000 Anak Dapat Layanan Pemeriksaan Mata Gratis dari IPC 5,000 Children Get Free Eye Examination Services from IPC
59	05 Desember 2019 December 5, 2019	IPC Layani <i>Shorebase</i> Pengeboran Minyak Lepas Pantai Pertamina Hulu Energi IPC Serves Shorebase Offshore Pertamina Upstream Oil Drilling
60	13 Desember 2019 December 13, 2019	Bersiap Jadi <i>World Class Port</i> , IPC Bangun Kemitraan Strategis dengan Pelabuhan Los Angeles Preparing to Become World Class Port, IPC Builds Strategic Partnership with Los Angeles Port
61	16 Desember 2019 December 16, 2019	Cinta <i>Difable</i> , IPC Dukung Pemerintah Wujudkan Indonesia Inklusi <i>Difable</i> Unggul Cinta Difable, IPC Supports the Government to Achieve Indonesia Superior Difable Inclusion
62	20 Desember 2019 December 20, 2019	Peringati Natal & Tahun Baru, IPC Serahkan Santunan untuk 500 Anak Panti Asuhan di Sulawesi Utara Commemorating Christmas & New Year, IPC Gives Compensation to 500 Orphanage Children in North Sulawesi

BULETIN

Selama tahun 2019, IPC telah menerbitkan buletin *IPC News* sebanyak 10 (sepuluh) kali ke Kantor Pusat, Cabang, Anak Perusahaan serta Pengguna Jasa. Adapun daftar buletin yang telah diterbitkan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BULLETINS

During 2019, IPC published 10 (ten) *IPC News* bulletins copies distributed to Head Office, Branches, Subsidiaries and Service Users. The bulletins published during 2019 were as follows:

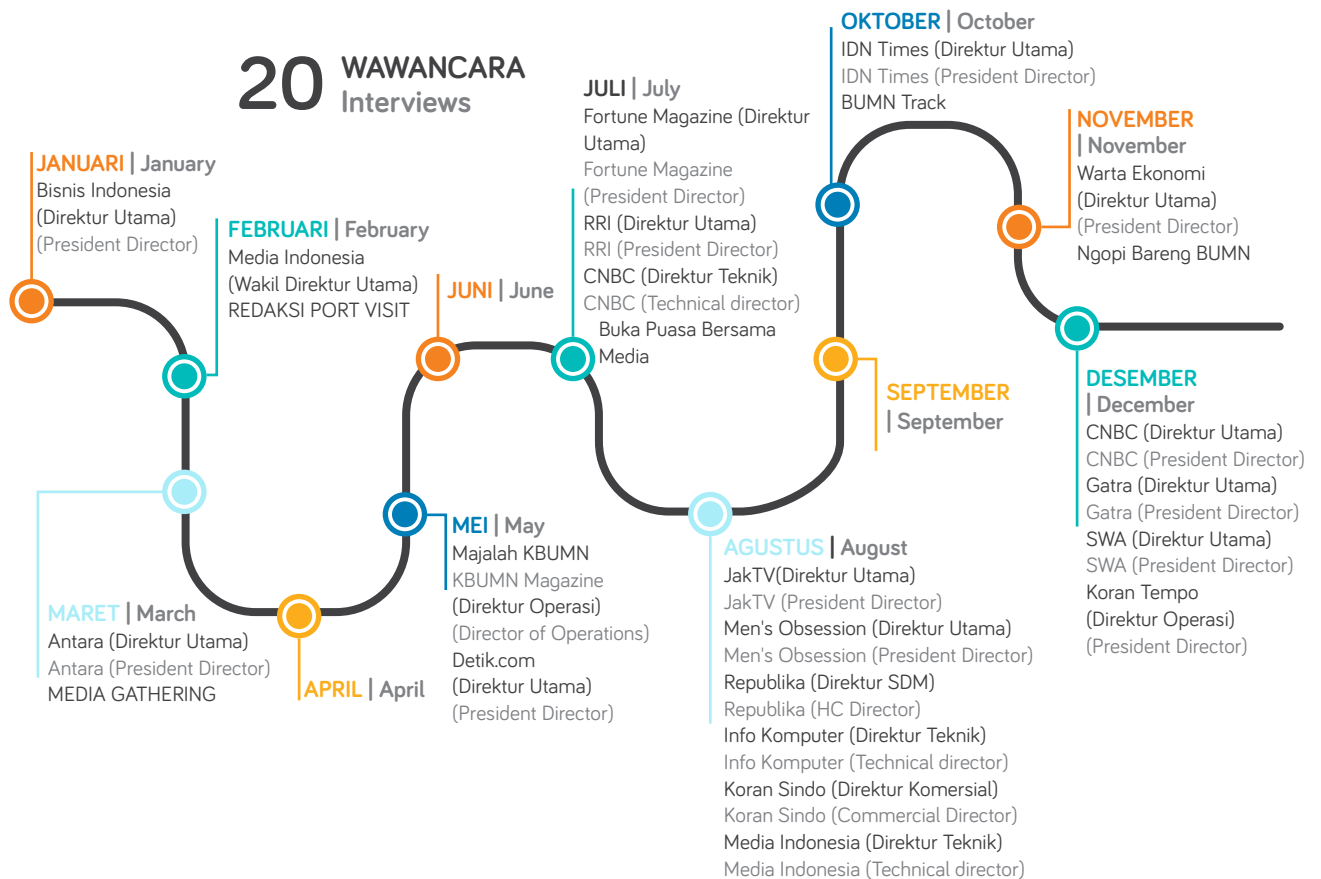
Tabel Daftar Buletin IPC News tahun 2019

List of IPC News Bulletin for 2019

No.	Bulan Terbit Month Publication	Tema Theme
1.	Januari January	<i>Great Millennials at Work</i>
2.	Februari February	Menggenggam Seluruh Benua Grabbing the Entire Continent
3.	Maret March	Masa Depan Indonesia Indonesia's future
4.	April April	<i>Spirit of Millennials</i>
5.	Mei May	Berbagi di Bulan Suci Share on Ramadhan
6.	Juni-Juli June – July	Ekspansi Korporasi ke Penjuru Negeri Corporate Expansion to the Nation
7.	Agustus August	Tumbuhkan Empati dan Nasionalisme Cultivate Empathy and Nationalism
8.	September – Oktober September – October	Indonesia Pamer Prestasi Indonesia Showing Off Achievement
9.	November November	Potret Sejarah Kemaritiman dan Pelabuhan Indonesia Historical Portrait of the Maritime and Indonesian Ports
10.	Desember December	Bakti Nyata untuk Indonesia Maju Real Service for Advanced Indonesia

LIPUTAN MEDIA

MEDIA COVERAGE



IKLAN

Selama tahun 2019, IPC telah menerbitkan iklan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali.

ADVERTISEMENTS

During 2019, IPC has published 37 advertisements (thirty seven) times.

Daftar Iklan 2019
List of Advertisements in 2019

No	Waktu Time	Judul Title	Media Media
1.	18 Januari 2019 January 18, 2019	Pengumuman Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa Announcement of Registration of Goods/Services Provider	Media Indonesia
2.	19 Februari 2019 February 19, 2019	Perpanjangan Pengumuman Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa Extension of Announcement of Registration of Goods/Services Provider	Media Indonesia
3.	1 Maret 2019 March 1, 2019	Kerjasama Publikasi 1 Tahun 1 year Publication Cooperation	Maritimnews
4.	18 Maret 2019 March 18, 2019	Iklan Laporan Keuangan Audited & Financial Highlight Advertisement of Audited Financial Report & Financial Highlight	Kompas
5.	18 Maret 2019 March 18, 2019	Iklan Laporan Keuangan Audited & Financial Highlight Advertisement of Audited Financial Report & Financial Highlight	Bisnis Indonesia
6.	1 April 2019 April 1, 2019	Kerjasama Publikasi 1 Tahun 1 year Publication Cooperation	Indonesia Shipping Line



Daftar Iklan 2019
List of Advertisements in 2019

No	Waktu Time	Judul Title	Media Media
7.	13 April 2019 April 13, 2019	Iklan HUT Kementerian BUMN Ke-21 Advertisement for 21 st SOE Ministry Anniversary	Koperasi Prabunara
8.	Mei 2019 May 2019	Iklan Majalah KBUMN KBUMN Magazine Advertisement	FH BUMN
9.	Mei 2019 May 2019	Iklan Greeting Video 20 Detik 20 Second Video Greeting Advertisement	Detik.com
10.	27 Mei 2019 May 27, 2019	Larangan Penerimaan Gratifikasi Prohibition of Acceptance of Gratuity	Kompas
11.	27 Mei 2019 May 27, 2019	Larangan Penerimaan Gratifikasi Prohibition of Acceptance of Gratuity	Tempo
12.	4 Juni 2019 June 4, 2019	Ucapan Hari Raya Idul Fitri 1440 H Eid al-Fitr 1440 H greetings	Kompas
13.	10 Juni 2019 June 10, 2019	Ucapan Hari Raya Idul Fitri 1440 H Eid al-Fitr 1440 H greetings	Bisnis Indonesia
14.	Juni 2019 June 2019	Publikasi Hari Raya Idul Fitri & Mudik Gratis IPC Publication of Eid al-Fitr & IPC Free Homecoming	Metro TV
15.	Juni 2019 June 2019	Publikasi TVC Hari Raya Idul Fitri Eid Al-Fitr TVC Publication	TV One
16.	Juli 2019 July 2019	Iklan 1/2 hal pada Buku Kemenko Maritim Half page advertisement in Corodinating Ministry of Maritime Book	Kemenko Maritim
17.	Juli 2019 July 2019	Iklan 1/2 hal pada Buku Tol Laut Half page advertisement in Sea Toll Book	Dir Hubla
18.	Agustus 2019 August 2019	Publikasi Adv Sindonews Adv Sindonews publication	Sindonews
19.	Agustus 2019 August 2019	Iklan 1 halaman pada Buku JBD KADIN 1 page advertisement in JBD KADIN Book	Kadin
20.	Agustus 2019 August 2019	Publikasi Majalah Mens Obsession Mens Obsession Magazine Publication	Majalah Mens Obsession
21.	9 Agustus 2019 August 9, 2019	Ucapan Hari Raya Idul Fitri Adha 1/4 hal 1/4 page of Eid al-Adha greetings	Jawa Pos
22.	9 Agustus 2019 August 9, 2019	Ucapan Hari Raya Idul Fitri Adha 1/4 hal 1/4 page of Eid al-Adha greetings	Kompas
23.	16 Agustus 2019 August 16, 2019	Iklan HUT RI ke-74 (Paket) RI 74 th Anniversary advertisement (Package)	Tempo Grup
24.	September 2019 September 2019	Publikasi Majalah TrustNews TrustNews Magazine Publication	Majalah Trust News
25.	19 September 2019 September 19, 2019	Iklan Pengumuman Pendaftaran Pelaku Usaha sebagai Calon Penyedia Jasa/Barang (1/4 hal) Advertisement for Announcement of Registration as Prospective Service/Goods Provider (1/4 page)	Kompas
26.	19 September 2019 September 19, 2019	Iklan Pengumuman Pendaftaran Pelaku Usaha sebagai Calon Penyedia Jasa/Barang (1/4 hal) Advertisement for Announcement of Registration as Prospective Service/Goods Provider (1/4 page)	Bisnis Indonesia
27.	20 Oktober 2019 October 20, 2019	Iklan Ucapan Selamat Pelantikan Presiden & Wapres RI Advertisement of Congratulations for the Inauguration of the President & Vice President of RI	Metro TV & TV One
28.	28 Oktober 2019 October 28, 2019	Iklan Bersama Ucapan Selamat & Sukses Pengurus BP Batam Joint Advertisement of Congratulations & Success for BP Batam Management	Bisnis Indonesia

Daftar Iklan 2019
List of Advertisements in 2019

No	Waktu Time	Judul Title	Media Media
29.	28 Oktober 2019 October 28, 2019	Iklan Bersama APBMI APBMI Joint Advertisement	Bisnis Indonesia
30.	12 November 2019 November 12, 2019	Publikasi Majalah Mens Obsession Edisi Eksklusif Publication of Mens Obsession Magazine Exclusive Edition	Majalah Mens Obsession
31.	25 November 2019 November 25, 2019	Iklan IPC Raih Juara 1 ARA 2018 Advertisement of IPC Won 1 st Place in 2018 ARA	Bisnis Indonesia
32.	23 Desember 2019 December 23, 2019	Iklan Lapsus Lapsus advertisement	Bisnis Indonesia
33.	19 Desember 2019 December 19, 2019	Larangan Penerimaan Gratifikasi Prohibition of Acceptance of Gratuity	Jawa Pos
34.	19 Desember 2019 December 19, 2019	Larangan Penerimaan Gratifikasi Prohibition of Acceptance of Gratuity	Koran Sindo
35.	23 Desember 2019 December 23, 2019	Iklan Ucapan Selamat Natal 2019 & Tahun Baru 2020 Merry Christmas 2019 & New Year 2020 Greetings	Kompas
36.	23 Desember 2019 December 23, 2019	Iklan Ucapan Selamat Natal 2019 & Tahun Baru 2020 Merry Christmas 2019 & New Year 2020 Greetings	Republika
37.	31 Desember 2019 December 31, 2019	Iklan Ucapan Selamat Natal 2019 & Tahun Baru 2020 Merry Christmas 2019 & New Year 2020 Greetings	Tempo English

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan Perseroan telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui antara lain Media Massa, *Website* Perusahaan, Paparan Publik, Sarana Pelaporan Elektronik, dll. Selain itu, juga memberikan laporan secara berkala kepada Kementerian BUMN diantara nya sebagai berikut:

TRANSPARENCY FOR REPORT SUBMISSIONS

During 2019, Corporate Secretary provided information for the public through Mass Media, Company Website, Public Expose, Electronic Reporting Facilities, etc. In addition, it also delivered periodic reports to the Ministry of SOEs as follows:

Jenis Laporan Report Type	Tujuan Purpose	Periode Laporan Report Period	Jumlah Total
Laporan Tahunan Annual Report	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Tahunan Annual	1
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan The Company's Consolidated Financial Statements	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Tahunan Annual	1
Laporan Pelaksanaan <i>Assessment</i> GCG GCG Assessment Report	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Tahunan Annual	1
Laporan Manajemen Perseroan Company Management Report	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Triwulan Quarterly	1

PROGRAM ANTI KORUPSI

Program Anti Korupsi Perseroan diatur dalam kode etik, pedoman *Whistleblowing System* serta pedoman gratifikasi Perseroan. IPC berkomitmen menciptakan praktik bisnis yang bersih dan menjauhi segala bentuk kecurangan (*Fraud*). Komitmen Perseroan diperkuat dengan dibentuknya sistem *Whistleblowing System* yaitu sistem yang disediakan oleh IPC bagi seluruh *stakeholders*

ANTI CORRUPTION PROGRAM

The Company's Anti Corruption Program is regulated by a Code of Conduct, guidelines for the Whistleblowing System and guidelines for the Company's gratification. IPC is committed to creating clean business practices and avoiding all forms of fraud. The Company's commitment is strengthened by the establishment of a Whistleblowing System, a system provided



yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan IPC dan Anak Perusahaan.

KODE ETIK

Kode Etik Bisnis merupakan panduan berisi prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan (IPC). Kode Etik ini diharapkan menjadi aspirasi bagi Insan IPC untuk mencapai visi dan misi IPC.

Kode Etik Bisnis IPC dibangun atas fondasi yang kuat dari visi, misi, tata nilai serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan kegiatan usaha IPC. Kode Etik Bisnis ini berlaku bagi seluruh Insan IPC yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan IPC.

Kode Etik Bisnis ini akan membantu IPC dalam mengatasi isu-isu seputar etika atau dilema yang berpotensi dihadapi dalam bekerja. Sesuai visi IPC, "Menjadi Pengelola Pelabuhan Kelas Dunia yang Unggul dalam Operasional dan Pelayanan", diharapkan dapat dicapai dengan penerapan Kode Etik Bisnis ini, terlepas dari peran, fungsi, atau lokasi geografisnya. Pedoman Kode Etik Perseroan telah dilakukan pemutakhiran dan disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama pada 13 November 2017.

Maksud dan Tujuan

Maksud penerapan Kode Etik Bisnis bagi IPC dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap Insan IPC memahami bahwa segala aktivitas IPC berlandaskan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Mendorong seluruh Insan IPC untuk berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan;
3. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan;
4. Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan dan dapat membangun reputasi Perusahaan lebih baik.

Tujuan penerapan Kode Etik Bisnis bagi IPC adalah sebagai berikut:

1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi IPC secara profesional dan beretika dalam melakukan usaha;
2. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan IPC yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas bisnis;
3. Sebagai pedoman untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan segala aktivitas bisnis;
4. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Insan IPC dan *stakeholders* lainnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan beretika, agar menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi.

by IPC for all stakeholders who have information and want to report an act indicated of violations committed by IPC and Subsidiaries Personnel.

CODE OF CONDUCT

The Code of Business Conduct is a guide to the principles governing behavior in applying corporate values (IPC). This Code of Conduct is expected to be an aspiration for the IPC employees to achieve the vision and mission of IPC.

The Code of Business Conduct of IPC is built on a strong foundation of vision, mission, values and good governance principles in running the IPC business activities. This Code of Conduct applies to all IPC employees, Board of Commissioners, Board of Directors and all IPC employees.

This Code of Business Conduct will assist IPC employees in addressing ethical issues or potential dilemmas encountered in work. In accordance with the IPC vision, "Being a Superior World Class Port Manager in Operations and Services", it is expected to be achieved with the application of this Code of Conduct, regardless of its role, function, or geographic location. This manual has been updated and approved by President Director and President Commissioner on November 13, 2017.

Purpose and Objectives

The objective of applying the Code of Business Conduct in IPC can be explained as follows:

1. Each IPC employee understands that all IPC activities are based on good corporate governance principles;
2. Encourage all IPC employees to behave well in carrying out all Company activities;
3. Create a healthy and comfortable working environment within the Company;
4. Minimize opportunities for deviations and build a better Company reputation.

The purpose of applying the Code of Business Conduct for IPC is as follows:

1. As a joint commitment to realize the vision and carry out IPC mission in a professional and ethical way to conduct business;
2. As a behavioral guide for all IPC employees to be obeyed in carrying out all business activities;
3. As a guide to avoid conflict of interest in carrying out all business activities;
4. Developing a harmonious, synergic and mutually beneficial relationship between IPC employees and other stakeholders based on sound and ethical corporate principles, in order to become a highly competitive company.

Penerapan Kode Etik Bisnis ini oleh Insan IPC secara konsisten dan menyeluruh diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

Perseroan

1. Mendorong kegiatan operasional IPC agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pelanggan, masyarakat, pemerintah dan *stakeholders* lainnya harus didasari dengan standar etika;
2. Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada *Stakeholders* dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan bisnis dalam jangka panjang.

Pemegang Saham

Menambah keyakinan bahwa IPC dikelola secara bertanggung jawab, hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.

Insan IPC

1. Memberikan pedoman kepada setiap Insan IPC tentang tingkah laku yang diinginkan atau yang dilarang oleh Perusahaan;
2. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga meningkatkan kinerja dan produktifitas setiap Insan IPC secara menyeluruh.

Masyarakat dan pihak lain yang terkait

Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan *Stakeholders*, yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.

Pokok-Pokok Kode Etik

Kode Etik Bisnis mencerminkan tindakan dan nilai-nilai yang menjadi panduan Insan IPC dalam berinteraksi dengan semua Pemangku Kepentingan (Karyawan, Pelanggan, Pemerintah, Vendor, dan Komunitas) untuk membangun hubungan jangka panjang yang bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman serta cara untuk melaporkan setiap pelanggaran atau ketidakjelasan terkait dengan etika profesional dan etika kerja. Kode etik Bisnis Perseroan mengatur terkait Etika Profesional dan Etika Kerja.

The implementation of this Code of Business Conduct by IPC individuals consistently and comprehensively is expected to provide benefits for:

Company

1. Encouraging IPC operations to be more efficient and effective as relationships with customers, communities, governments and other stakeholders must be based on ethical standards;
2. Increasing the value of the Company by providing assurance and protection to Stakeholders in dealing with the Company resulting in a good reputation, which ultimately realizes the long-term success of the business.

Shareholder

Increase awareness that IPC is managed responsibly, prudently, efficiently, transparently, accountably and fairly to achieve the level of profitability expected by the Shareholder while taking into account the interests of the Company.

IPC Employees

1. Provide guidance to every IPC employee about the behavior desired or prohibited by the Company;
2. Creating a work environment that upholds the values of honesty, ethics and openness so as to improve the performance and productivity of every IPC employee.

Society and other related parties

Creating harmonious and mutually beneficial relationships with stakeholders, ultimately creating socio-economic welfare for communities and other concerned parties.

Code of Conduct

The Code of Conduct reflects the actions and values that guide IPC Personnel when interacting with all Stakeholders (Employees, Customers, Government, Vendors, and Communities) to build long-term relationships aimed at providing information, understanding and ways to report any violations or obscurity related to professional ethics and work ethics. The Company's Code of Conduct regulates professional ethics and work ethics.



Etika Profesional

Etika Profesional yaitu etika yang berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk memastikan kualitas dan proses yang dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah dalam profesi serta sebagai acuan untuk berhubungan dengan *Stakeholders*. Dalam etika profesional mengatur mengenai:

1. Insan IPC;
2. Pelanggan Kami;
3. Vendor Kami;
4. Kompetitor Kami;
5. Komunitas dan Lingkungan Kami;
6. Institusi Pemerintah;
7. Aktivitas Politik;
8. Anak Perusahaan;
9. Penghormatan Perusahaan Terhadap Hak Intelektual (HAKI).

Etika Kerja

Etika Kerja yaitu sistem nilai atau norma yang digunakan dalam bekerja didasarkan pada kerja keras dan ketekunan yang diharapkan dapat meningkatkan karakter moral Insan IPC seperti kejujuran, keterbukaan, ketulusan dan loyalitas.

Dalam etika kerja mengatur mengenai:

1. Pendokumentasian dan Pencatatan Perusahaan;
2. Pengelolaan Arsip;
3. Kontrol Internal;
4. Perjalanan Dinas;
5. Kerahasiaan Data dan/atau Informasi;
6. Menghadapi Konflik Kepentingan;
7. Anti Penyuapan;
8. Media Komunikasi dan Penyebaran Informasi;
9. Etika Kerja Atasan terhadap Bawahan;
10. Etika Kerja Bawahan terhadap Atasan;
11. Etika Sesama Rekan Kerja;
12. Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Lainnya;
13. Gratifikasi/Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Cinderamata, Jamuan, Hiburan dan Donasi;
14. Kesempatan yang sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi;
15. Aktivitas Politik dan Sosial;
16. Pelanggan;
17. Pemangku Kepentingan Lain;
18. Pencurian dan Penyelewangan Sejenisnya;
19. Pencucian Uang.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Kode Etik Bisnis ini berlaku bagi seluruh Insan IPC yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Karyawan IPC. Setiap tahun seluruh Insan IPC menandatangani Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis.

Professional Ethics

Professional Ethics is ethics related to the field of work to ensure quality and process undertaken in accordance with the rules in the profession as well as a reference for dealing with Stakeholders. The professional ethics governing:

1. IPC Employees;
2. Our Customers;
3. Our Vendors;
4. Our Competitors;
5. Our Community and Environment;
6. Government institution;
7. Political Activity;
8. Subsidiary;
9. Corporate Respect for Intellectual Property (IPR).

Work Ethics

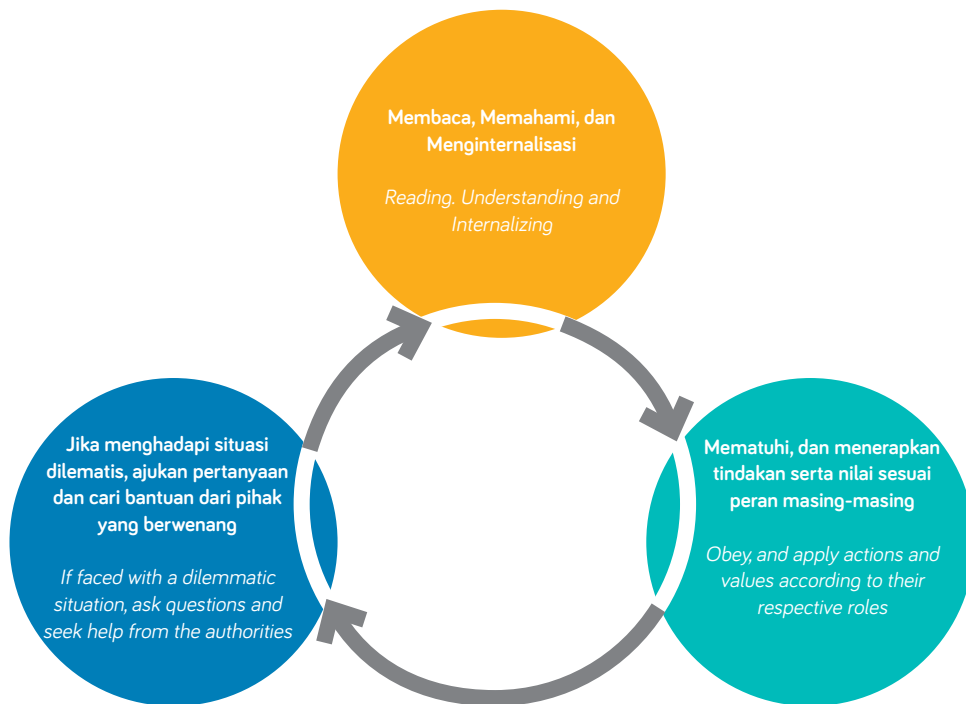
Work Ethics is a system of values or norms used in employment that based on hard work and persistence is expected to improve the moral character of IPC Personnel such as honesty, openness, sincerity and loyalty.

The work ethics governing:

1. Documenting and Listing of Companies;
2. Archive Management;
3. Internal Control;
4. Official travel;
5. Data and/or Confidentiality Information;
6. Confronting Conflict of Interest;
7. Anti Bribery;
8. Media Communications and Information Dissemination;
9. Work Ethics Superiors against Subordinates;
10. Work Ethics Subordinate to Superiors;
11. Ethics of Fellow Colleagues;
12. Compliance with Laws, Legislation and Other Terms;
13. Gratification/Reception and Giving Present/Souvenirs, Dinner, Entertainment and Donation;
14. Equal Opportunities for Getting Jobs and Promotions;
15. Political and Social Activity;
16. Customers;
17. Other Stakeholders;
18. Theft and Similar Dissolution;
19. Money Laundering.

Code of Conduct Compliance

This Code of Conduct applies to all IPC Personnel, namely Board of Commissioners, Board of Directors and all IPC Employees. Every year all IPC Personnel sign the Integrity Pact and Code of Conduct Compliance.



Penyebarluasan Kode Etik

Hingga berakhirnya tahun buku 2019, IPC telah menyebarkan Kode Etik Perusahaan:

1. Telah dilakukan sosialisasi kode etik bisnis kepada pegawai IPC di Kantor Pusat dan seluruh Cabang Pelabuhan;
2. Melakukan sosialisasi dalam bentuk media cetak dan sosial media penerapan pedoman kode etik bisnis Perusahaan;
3. Pembaharuan pedoman kode etik bisnis telah didistribusikan kepada seluruh Insan IPC baik di Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan.

Code of Conduct Dissemination

By the end of 2019 fiscal year, IPC successfully disseminated the Company Code of Conduct.

1. Socialization of the Code of Conduct and business conduct was conducted to IPC employees at Head Office and all Port Branches;
2. Socialization was in the form of print media and social media of the application of Code of Conduct and business conduct guidelines of the Company;
3. Renewal of the Code of Conduct and business conduct has been distributed to all IPC personnel in both Head Office and Port Branches.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Pelaksanaan Kode Etik Bisnis merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Insan IPC. Apabila terjadi dugaan pelanggaran atau dugaan penyimpangan maka Insan IPC wajib melaporkan dugaan pelanggaran tersebut melalui:

1. *Whistleblowing system*;
2. Pimpinan Cabang/Unit/Anak Perusahaan;
3. Atasan Langsung (satu tingkat di atas yang bersangkutan);
4. Atasan tidak langsung (atasan dari pada atasan langsung/ atasan dua tingkat di atas yang bersangkutan);
5. Pimpinan Unit Pengelola SDM.

Efforts To Implement and Enforce the Code of Conduct

Implementation of the Code of Conduct and Business Conduct is the commitment and responsibility of all IPC employees. In case of alleged violation or alleged irregularities, IPC employees shall report the alleged violation through:

1. Whistle Blowing System;
2. Branch Manager/Unit/Subsidiary;
3. Direct supervisor (one level above the concerned);
4. Indirect supervisor (superior from the direct supervisor/two levels above the concerned);
5. Head of Human Capital Management Unit.



Pelaporan dugaan pelanggaran harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu kepentingan/keluhan pribadi atas suatu kebijakan tertentu dalam Perusahaan ataupun didasari kehendak buruk/fitnah. Segenap Insan IPC dan pihak eksternal Perseroan (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) dapat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Bisnis yang dilakukan oleh oknum Insan IPC. Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perseroan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi, korupsi dan lain sebagainya.

Penyampaian laporan dugaan pelanggaran secara anonim (tanpa memberikan data diri) diperbolehkan. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan dugaan pelanggaran, pelapor diharapkan memberikan informasi mengenai data diri dan penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor. IPC wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

PELAPORAN DAN KEPATUHAN

Insan IPC akan mengimplementasikan budaya transparan, komunikasi yang terbuka dan jujur dalam setiap tindakan terkait kode etik bisnis. Komitmen IPC terhadap integritas dan etika tidak dapat dijalankan apabila Insan IPC tidak berkomunikasi, berbagi informasi serta berkolaborasi terkait isu-isu seputar etika. Insan IPC dihimbau untuk berbicara kapanpun mereka melihat adanya pelanggaran etika atau kepatuhan yang terjadi.

Kapanpun Insan IPC menghadapi dilema, kebingungan, ketidakjelasan, atau pertanyaan, Insan IPC dapat segera menghubungi salah satu dari pihak-pihak berikut:

1. Atasan langsung (satu tingkat di atas yang bersangkutan);
2. Atasan tidak langsung (atasan dari pada atasan langsung/atasan dua tingkat di atas yang bersangkutan);
3. Pimpinan Unit Pengelola SDM. Sedangkan untuk permasalahan/pertanyaan yang belum dapat diselesaikan agar dilaporkan kepada Direksi.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Kode Etik Perusahaan erat kaitannya dalam pembentukan budaya Perusahaan yang dilakukan dengan penanaman dan aktualisasi nilai-nilai Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Proses penanaman dan aktualisasi ini dilakukan kepada seluruh Pekerja IPC, baik di Kantor Pusat maupun cabang pelabuhan secara berkesinambungan melalui media-media internal Perusahaan (intranet, majalah Perusahaan, poster dan *banner*) dan juga melalui pertemuan-pertemuan langsung antara manajemen dan pekerja. Selain kepada internal Perusahaan, nilai-nilai Perusahaan juga diperkenalkan kepada pihak eksternal melalui *website* dan

Reporting of alleged offenses must be done in good faith and not a personal interest/complaint over a particular policy in the Company (grievance) or based on bad will/defamation. All IPC employees and Company external persons (Customers, Business Partners and Communities) may report alleged violations of the Code of Conduct and Business Conduct conducted by IPC employees. The Company is obliged to follow up reporting which is potentially harmfully material and may damage the Company's image, among others, caused by irregularities, manipulations, corruption and so on.

Submission of reports of alleged violations anonymously (without providing personal data) is allowed. To accelerate and facilitate the follow-up process of reporting alleged violations, the reporter is expected to provide information on the self data and the recipient of the report shall keep the identity of the reporter. IPC shall follow up any reports received pursuant to applicable procedures and mechanisms.

REPORTING AND COMPLIANCE

IPC personnel should follow a transparent, open and honest communication culture in all actions related to the business Code of Conduct. IPC's commitment to integrity and ethics cannot be carried out if IPC personnel do not communicate, share information and collaborate on issues surrounding ethics. IPC personnel are encouraged to speak whenever they see an ethical or compliance violation.

Whenever IPC personnel face any dilemmas, confusion, obscurity, or questions, they can immediately contact one of the following parties:

1. Their direct supervisor (one level above);
2. Their indirect supervisor (supervisor above direct supervisor/supervisor two levels above);
3. Head of HC Management Unit. For unresolved problems/questions to be reported to Board of Directors.

CORPORATE VALUES

The Company's Code of Conduct is closely related to the Company's culture that follows the values of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The process of conveying the culture to all IPC Employees, both at Head Office and port branches, is through the Company's internal media (intranet, Company magazine, posters and banners) and also through direct meetings between management and employees. As well as internally in the Company, the Company's values are explained to external parties through its website and also during visits to IPC. IPC Corporate Values are summarized in CINTA acronym, namely

juga pada saat kunjungan-kunjungan ke IPC. Adapun Nilai-nilai Perusahaan IPC terangkum dalam akronim CINTA IPC yaitu *Customer Centric, Integrity, Nationalism, Teamwork* dan *Action* yang tergambar dalam logo berikut:

Customer Centric, Integrity, Nationalism, Teamwork and Action, which are illustrated in the following logo:



Informasi lebih lanjut mengenai nilai-nilai Perusahaan IPC dapat dilihat dalam bab Profil Laporan Tahunan ini.

Further information about IPC's corporate values can be seen in the Profile chapter of this Annual Report.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Setiap Insan IPC yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Bisnis ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan di mana salah satunya adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II), sebagai berikut:

Code of Conduct Violations Sanctions

Any IPC employee proven to be in violation of this Code of Conduct and Business Conduct will be sanctioned in accordance with the rules and regulations applicable in the Company, one of which is the Collective Work Agreement (PKB) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II), as follows:

Tingkat Sanksi Sanction Level	Jenis Sanksi Type of Sanction
Disiplin Ringan	<ul style="list-style-type: none"> Teguran Secara Tertulis dari Atasan Langsung; Pernyataan Tidak Puas dari Pengusaha; Pemberian Bonus Tahunan sebesar 70%.
Low Sanction	<ul style="list-style-type: none"> Written Reprimand from Direct Superior; Unsatisfied Statement from Employer; Annual Bonus is given at 70%.
Disiplin Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Denda sebesar 10% dari Penghasilan Sebulan selama 3 (tiga) bulan, sesuai peraturan yang berlaku; Denda sebesar 20% dari Penghasilan Sebulan selama 2 (dua) bulan, sesuai peraturan yang berlaku; Pemberian Bonus Tahunan sebesar 40%.
Medium Sanction	<ul style="list-style-type: none"> Fine of 10% of monthly income for 3 (three) months, in accordance with applicable regulations; Fine of 20% of monthly income for 2 (two) months, in accordance with applicable regulations; Annual Bonus is given at 40%.



Tingkat Sanksi Sanction Level	Jenis Sanksi Type of Sanction
Disiplin Berat	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan Jabatan dan atau Kelas Jabatan 1 (satu) Tingkat Lebih Rendah dari Jabatan dan atau Kelas Jabatan Semula; • Penurunan Jabatan dan atau Kelas Jabatan 2 (dua) Tingkat Lebih Rendah dari Jabatan dan atau Kelas Jabatan Semula; • Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri; • Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Hormat; • Tidak Diberikan Bonus Tahunan.
Severe Sanction	<ul style="list-style-type: none"> • Demotion of Position and/or Grade of 1 (one) Level Lower from Current Position and/or Grade; • Demotion of Position and/or Grade of 2 (two) Levels Lower from the Current Position and/or Grade; • Honorable Termination of Employment (PHK), not on Own Request; • Honorable Termination of Employment (PHK); • Annual Bonus is not given.

Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat rekomendasi dari Tim Indisipliner.

Sanctions for the offending Employee are stipulated by Board of Directors upon receipt of recommendation from the Disciplinary Team.

1. Dewan Komisaris dan/atau Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi indisipliner dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan unit kerja masing-masing/ mekanisme indisipliner;
2. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham;
3. Bila mitra kerja atau *stakeholders* lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan ketentuan lain yang mengatur hal tersebut. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

1. Board of Commissioners and/or Board of Directors decide on the provision of guidance, disciplinary and/or other measures and prevention to be carried out by direct supervisor in the environment of the respective work unit/disciplinary mechanism;
2. Sanctions for Board of Directors and Board of Commissioners committing the violation are decided by the Shareholder;
3. If the partners or other stakeholders committed the violation, will be subject to the provisions as contained in the contract and other governing provisions. If related to a crime can be forwarded to the authorities.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi Yang Diberikan

Selama tahun 2019, terdapat 26 (dua puluh enam) pelanggaran atas kode etik. Adapun sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:

Number of Violation Sanctions Given

During 2019, there were 26 (twenty six) violations of the Code of Conduct. The sanctions given are as follows.

Tingkat Sanksi Sanction Level	Jumlah Pelanggaran Number of Sanctions
Disiplin Ringan Low Sanction	10
Disiplin Sedang Medium Sanction	-
Disiplin Berat Severe Sanction	16

KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI

IPC telah memiliki pedoman pengendalian gratifikasi yang telah disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama IPC pada 3 November 2017. Selain itu Perseroan juga mengeluarkan himbuan atas larangan penerimaan gratifikasi yang tertuang pada Pengumuman Nomor SL.01.01/23/12/2/KPP/SDM/PI.II-19

ANTI-GRATIFICATION POLICY

IPC already has guidelines for gratification control that has been approved by the President Director and President Commissioner of IPC on November 3, 2017. In addition, the Company also issued an appeal for prohibition on receiving gratification as stated in Announcement Number SL.01.01/23/12/2/KPP/SDMPI.II-19 dated

tertanggal 23 Desember 2019 perihal Larangan Pungutan Liar dan Penerimaan Gratifikasi Pada Perayaan Hari Besar dan Tahun Baru serta Pengumuman Nomor SK.01.01/16/5/2/KPP/UT/PI.II-19 tertanggal 16 Mei 2019 perihal Pengumuman Larangan Pungutan Liar dan Penerimaan Gratifikasi pada Perayaan Hari Besar. Sebagai perusahaan yang profesional, independen, berintegritas dan berkelanjutan isu anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi prioritas bagi manajemen Perusahaan. Dalam semangat tersebut, Manajemen IPC terus melakukan upaya-upaya untuk membersihkan diri dari praktik KKN, termasuk upaya pengendalian praktik Gratifikasi.

IPC menyadari bahwa dalam menjalin hubungan kerja dengan pihak ketiga, seringkali bersinggungan dengan praktik gratifikasi, sehingga dibutuhkan sebuah pedoman untuk mengendalikan praktik tersebut. Hal ini dilakukan agar seluruh Insan IPC memiliki pemahaman yang sama tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta membantu Insan IPC untuk tidak terjerat dalam praktik gratifikasi yang termasuk tindak pidana suap.

Pengertian Gratifikasi menurut Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 pasal 12B adalah Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang diberikan atau diterima oleh Insan IPC yang terjadi karena berkaitan dengan jabatan/wewenangnya di Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mempengaruhi independensinya dalam bekerja serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

December 23, 2019 concerning the Prohibition of Illegal Levies and Acceptance of Gratification in Celebration of Holidays and New Years and Announcement Number SK.01.01/16/5/2/KPP/UT/PI.II-19 dated May 16, 2019 regarding the Announcement of the Prohibition of Illegal Levies and Acceptance of Gratification at the Celebration of Holidays. As a professional, independent, integrated and sustainable company, the issue of anti-corruption, collusion and nepotism (KKN) is a priority for the Company's management. In this spirit, IPC Management continues to make efforts to be free from KKN practices, including efforts to control Gratification practices.

IPC recognizes that in establishing working relationships with third parties, it often deals with gratification practices, so a guide is needed to control the practice. This matter is done so that all IPC employees have the same understanding about the treatment of gratification and help IPC employees not to get entangled in the practice of gratification that include criminal acts of bribery.

Understanding of Gratification according to Law No. 20 Year 2001 Article 12B is a grant in the broad sense that includes giving and/or acceptance of gifts/souvenirs and entertainment, whether received domestically or abroad, which is done by using electronic means or without electronic means given or received by IPC employees that occurred because it relates to the position/authority in the Company that may cause a conflict of interest and/or affect its independence in work and against its obligations or duties.

BUMN
Hadir untuk negeri

IPC
PT Pelabuhan Indonesia II Persero

KOMITMEN IPC GROUP TENTANG LARANGAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Dalam rangka mewujudkan komitmen sebagai perusahaan yang menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), IPC Group telah menetapkan bahwa seluruh individu IPC **dilarang** meminta/menerima gratifikasi (hadiah, bingkisan, parcel, dll.) dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dari *stakeholder* dan pihak-pihak lainnya, termasuk pada **Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 H.**

Kami memerlukan dukungan dari seluruh *stakeholder* dan pihak-pihak terkait lainnya untuk tidak memberikan hadiah, bingkisan dan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada individu IPC. Apabila ditemukan indikasi individu IPC yang mengatasnamakan pribadi maupun perusahaan meminta/menerima hadiah, bingkisan dan gratifikasi dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, mohon melaporkan kepada **Saluran IPC Bersih melalui telepon di nomor (021) 1500 969, SMS di nomor 0812 90 060606, email ke ipcbersih@tipoffs.asia** dengan mencantumkan identitas yang bersangkutan.

Kami mengucapkan terima kasih atas pengertian dan dukungan semua pihak untuk mewujudkan komitmen ini.

Jakarta, Mei 2019
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Direksi



PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam kondisi tertentu, saat insan IPC tidak dapat menghindari untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dengan pemberian tersebut di luar ketentuan atau pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada/melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan IPC, maka yang bersangkutan wajib melaporkan baik secara langsung kepada KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sesuai mekanisme yang telah diatur.

Pengelola Pelaporan Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah unit yang dibentuk berdasarkan SK Direksi IPC No. SK.01.01/7/91/KPP/UT/PI-II-17 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada pelaksanaan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang berfungsi sebagai pengendali gratifikasi di lingkungan IPC. UPG bersifat *ad-hock*, dan terdiri dari:

Ketua Chairperson	:	EVP Sekretariat Perusahaan EVP Corporate Secretary
Wakil Ketua Deputy Chair	:	EVP Satuan Pengawasan Internal EVP Internal Audit Unit
Sekretaris Secretary	:	SDVP Penerapan Tata Kelola Korporasi SDVP Implementation of Corporate Governance
Anggota Members	:	SVP Hukum, dan VP Layanan SDM SVP Law, and VP HC Services

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
2. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
3. Mereview dan memperbaharui kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dan Menerima laporan, merekap dan melaporkan gratifikasi dari pihak internal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

MANAGEMENT OF GRATIFICATION CONTROL

Under certain conditions, when an IPC personnel cannot avoid receiving a gift from a Third Party in which the gift is against the regulation or the gift already exists in a place that is entrusted to/through another person without the knowledge of the concerned IPC Personnel, then the personnel must report either directly to KPK or through the Gratification Control Unit (UPG) in accordance with the regulated mechanism.

Gratification Reporting Management

The Gratification Control Unit (UPG) is a unit formed based on IPC Board of Directors Decree No. SK.01.01/7/91/KPP/UT/PI-II-17 concerning Formation of Gratification Control Unit (UPG) Team for Gratification Prevention and Counter measures System in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), to function as a gratification controller in IPC. UPG is *ad-hoc*, and consists of:

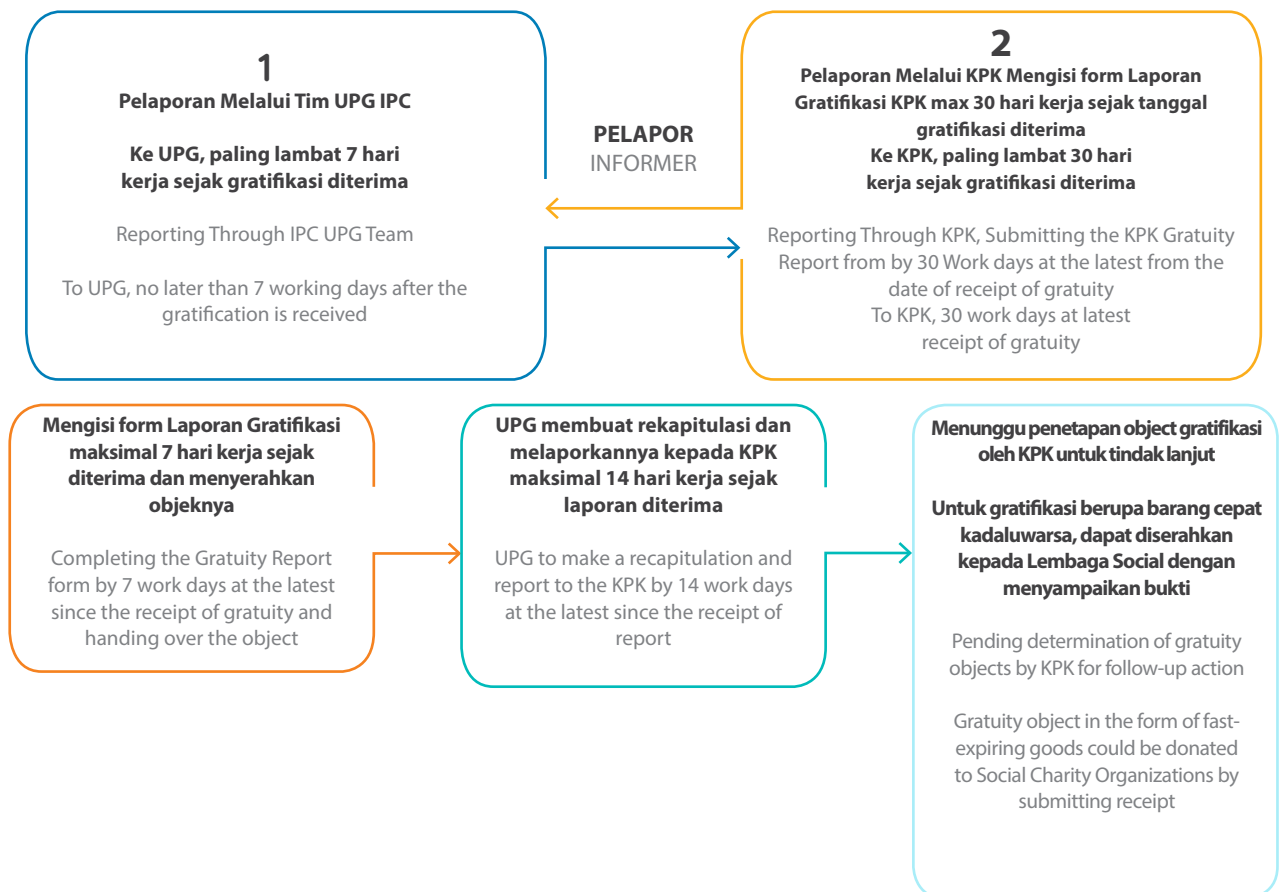
Gratification Control Unit Duties and Responsibilities

The Gratification Control Unit duties and responsibilities include

1. Disseminating gratification control within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
2. Coordinating with units or sections related to the effectiveness of gratification control;
3. Reviewing and updating management policies, establishing an anti-gratification and corruption prevention environment in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), and Receiving reports, recapitulating and reporting gratification from internal parties of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for the Corruption Eradication Commission.

Mekanisme Pelaporan

Reporting Mechanism



1. Apabila terdapat gratifikasi sebagaimana yang sudah diatur Perusahaan, maka Insan IPC wajib melaporkan baik melalui Tim UPG IPC atau KPK dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pelaporan Melalui KPK
Mengisi *form* Laporan Gratifikasi KPK yang dapat di unduh pada tautan: www.kpk.go.id/layanan-publik/gratifikasi/formulir-gratifikasi. Laporan Gratifikasi wajib disampaikan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di <https://gol.kpk.go.id>;
 - b. Pelaporan Melalui Tim UPG IPC
Mengisi *form* Laporan Gratifikasi UPG IPC sebagaimana terlampir, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima dengan menyerahkan objek gratifikasi yan diterima.
1. If there is gratification as stipulated by the Company, the IPC Personnel must report either through the UPG IPC Team or KPK through the following procedure:
 - a. Reporting Through KPK
Completing KPK Gratification Report form that can be downloaded from www.kpk.go.id/layanan-publik/gratifikasi/formulir-gratifikasi. The Gratification Report must be submitted to KPK no later than 30 working days from the date the gratification was received by the recipient. For more detailed information, please see <https://gol.kpk.go.id>;
 - b. Reporting Through the UPG IPC Team
Completing the UPG IPC Gratification Report form, no later than 7 (seven) working days from the date the gratification is received by submitting the object of gratification received.



2. UPG membuat rekapitulasi Laporan Gratifikasi serta melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi diterima oleh Tim UPG IPC untuk selanjutnya mendapat penetapan status objek gratifikasi oleh KPK;
 3. Untuk penerimaan gratifikasi yang merupakan barang yang cepat kadaluarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampikan bukti tanda serah terima kepada Tim UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;
 4. Untuk penerimaan gratifikasi yang merupakan barang seperti cinderamata/uang/makanan yang tidak cepat kadaluarsa, dan sebagainya menunggu penetapan objek gratifikasi oleh KPK untuk tindak lanjut.
2. The UPG recapitulates the Gratification Report and reports to KPK no later than 14 (fourteen) working days after the Gratification Report is received by UPG IPC Team to obtain the status of gratification object by KPK;
 3. For receipt of gratification that have expired (for example: food and drink), they can be sent to the Social Institution, by submitting the receipt to the UPG Team no later than 7 (seven) days after the date of receipt of gratification as provided in the Guidelines;
 4. For receipt of gratification such as souvenirs/money/food that does not expire quickly, awaits the determination of gratification object by KPK for follow-up.

SOSIALISASI KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan program, IPC senantiasa melakukan sosialisasi kebijakan gratifikasi secara khusus serta kebijakan penerapan GCG secara umum, kepada Insan IPC pada setiap tingkatan/jenjang organisasi. Sosialisasi dilakukan melalui pembagian buku pedoman, *website* internal, promosi melalui media cetak terkait "IPC Bersih" dan larangan gratifikasi, serta melalui kegiatan dan media lainnya yang dimiliki IPC. Sosialisasi dilakukan di Kantor Pusat, seluruh Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan.

Sosialisasi telah dilakukan baik melalui tatap muka di seluruh Departemen Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan, sementara sosialisasi lainnya dalam bentuk media promosi seperti *banner* dan poster. Setiap tahun IPC juga mengiklankan larangan penerimaan gratifikasi untuk Insan IPC di media massa, tahun 2019 di koran Tempo dan Jawa Post sebelum pelaksanaan hari besar keagamaan. Setiap tahun juga Direksi IPC mengeluarkan surat pengumuman kepada seluruh Insan IPC di Kantor Pusat dan Cabang Perusahaan terkait larangan penerimaan bingkisan/parsel pada pelaksanaan hari besar keagamaan. Serta memberikan surat larangan penerimaan bingkisan/parsel pada pelaksanaan hari besar keagamaan ke EVP/SVP/VP Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan.

ANTI-GRATIFICATION POLICY SOCIALIZATION

In an effort to support the success of the program, IPC continues to socialize the specific gratification policy and general GCG policy to IPC employees at every level of the organization. Socialization is done through the sharing of manuals, internal websites, promotion through print media related to "IPC Bersih" and the prohibition of gratification, as well as through activities and other media owned by IPC. Socialization is done in Head Office, all Port Branches. and Subsidiaries.

The socialization is carried out both through face-to-face meetings at all Head Office Departements, Port Branches and Subsidiaries, and through promotional media such as banners and posters. Every year IPC also advertises a ban on the acceptance of gratification to IPC personnel in the mass media, in 2019 the Tempo and Jawa Post newspapers before the religious holidays. Every year the IPC Board of Directors issue an announcement letter to all IPC Staff at Head Office and Branches regarding prohibiting receipt of gifts/parcels on religious holidays. The same letter is also sent to EVP/SVP/VP Head Office, Port Branch and Subsidiaries.

Laporan Gratifikasi Tahun 2019

Selama tahun 2019 terdapat 14 laporan gratifikasi dan telah ditindaklanjuti. Adapun rincian gratifikasi yang diterima oleh Perseoran adalah sebagai berikut.

Gratification Reports in 2019

During 2019 there were 14 reports of gratification and have been followed up. The details of gratification received by the Company are as follows.

No	Tanggal Penyerahan <i>Delivery Date</i>	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Nama Pengirim - Jabatan - Alamat <i>Sender Name - Position - Address</i>	Jenis Barang <i>Types of Goods</i>	Yayasan Penerima <i>Recipient Foundation</i>
1.	22 Mei 2019	Elvyn G Massasya	Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Manajemen PT Agung Raya Jl. Cut Mutia No 14 Menteng. Jakarta	Parsel Makanan Ringan	Panti Asuhan Anak PSAA Wijaya Kusuma
	May 22, 2019		President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)		Snack Parcel	PSAA Children's Orphanage Wijaya Kusuma
2.	22 Mei 2019	Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Manajemen PT Agung Raya Jl. Cut Mutia No 14 Menteng. Jakarta	Parsel Makanan Ringan	Panti Asuhan Anak PSAA Wijaya Kusuma
	May 22, 2019		Finance Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)		Snack Parcel	PSAA Children's Orphanage Wijaya Kusuma
3.	22 Mei 2019	Rizal Ariansyah	Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Manajemen PT Agung Raya Jl. Cut Mutia No 14 Menteng. Jakarta	Parsel Makanan Ringan	PPA Yatim Dhuafa, Baitul Quran Assa'adah Cibinong Bogor
	May 22, 2019		HC Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)		Snack Parcel	PPA Yatim Dhuafa, Baitul Quran Assa'adah Cibinong Bogor
4.	22 Mei 2019	Arif Suhartono	Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Manajemen PT Agung Raya Jl. Cut Mutia No 14 Menteng. Jakarta	Parsel Makanan Ringan	PPA Yatim Dhuafa, Baitul Quran Assa'adah Cibinong Bogor
	May 22, 2019		Commercial Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)		Snack Parcel	PPA Yatim Dhuafa, Baitul Quran Assa'adah Cibinong Bogor
5.	22 Mei 2019	Prasetyadi	Direktur Operasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Manajemen PT Agung Raya Jl. Cut Mutia No 14 Menteng. Jakarta	Parsel Makanan Ringan	Yayasan Tjut Nya Dien
	May 22, 2019		Operations Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)		Snack Parcel	Cut Nyak Dien Foundation
6.	22 Mei 2019	Mulyadi	General Manager Cabang Pelabuhan Tanjung Priok	Manajemen PT Agung Raya Jl. Cut Mutia No 14 Menteng. Jakarta	Parsel Makanan Ringan	Yayasan Tjut Nya Dien
	May 22, 2019		General Manager of Tanjung Priok Port Branch		Snack Parcel	Cut Nyak Dien Foundation



No	Tanggal Penyerahan Delivery Date	Nama Name	Jabatan Position	Nama Pengirim - Jabatan - Alamat Sender Name - Position - Address	Jenis Barang Types of Goods	Yayasan Penerima Recipient Foundation
7.	22 Mei 2019	Budi Waluyo	Deputi General Manager Komersial Cabang Pelabuhan Tanjung Priok	Manajemen PT Agung Raya Jl. Cut Mutia No 14 Menteng, Jakarta	Parsel Makanan Ringan	Yayasan Nuruz Zahroh
	May 22, 2019		Deputy Commercial Manager of the Tanjung Priok Port Branch		Snack Parcel	Nuruz Zahroh Foundation
8.	22 Mei 2019	Budi Utoyo	Deputi General Manager Operasional Cabang Pelabuhan Tanjung Priok	Manajemen PT Agung Raya Jl. Cut Mutia No 14 Menteng, Jakarta	Parsel Makanan Ringan	Yayasan Nuruz Zahroh
	May 22, 2019		Deputy General Manager of Operations Tanjung Priok Port Branch		Snack Parcel	Nuruz Zahroh Foundation
9.	22 Mei 2019	Randy Pangalila	Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Investama	Manajemen PT Agung Raya Jl. Cut Mutia No 14 Menteng, Jakarta	Parsel Makanan Ringan	Panti Asuhan Putri Muhammadiyah
	May 22, 2019		President Director of PT Pelabuhan Indonesia Investama		Snack Parcel	Muhammadiyah Girls Orphanage
10.	22 Mei 2019	Jeffry Hariyadi	Direktur Investasi PT Pelabuhan Indonesia Investasma	Manajemen PT Agung Raya Jl. Cut Mutia No 14 Menteng, Jakarta	Parsel Makanan Ringan	Panti Asuhan Al-Hidayah Bekasi
	May 22, 2019		Investment Director of PT Pelabuhan Indonesia Investasma		Snack Parcel	Al-Hidayah Orphanage Bekasi
11.	22 Mei 2019	Denis Fitriansyah	Staf PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Manajemen PT Agung Raya Jl. Cut Mutia No 14 Menteng, Jakarta	Parsel Makanan Ringan	Difabel Jakarta Utara dan Jakarta Timur
	May 22, 2019		PT Jasa Pelabuhan Indonesia Staff		Snack Parcel	Difabel North Jakarta and East Jakarta
12.	22 Mei 2019	Kurnia Wulandari	Staf PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Manajemen PT Agung Raya Jl. Cut Mutia No 14 Menteng, Jakarta	Parsel Makanan Ringan	Difabel Jakarta Utara dan Jakarta Timur
	May 22, 2019		PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Staff		Snack Parcel	Difabel North Jakarta and East Jakarta
13.	22 Mei 2019	Rahmawati	Staf PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Manajemen PT Agung Raya Jl. Cut Mutia No 14 Menteng, Jakarta	Parsel Makanan Ringan	Yayasan Indonesia Hijau
	May 22, 2019		PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Staff		Snack Parcel	Indonesia Hijau Foundation
14.	22 Mei 2019	Yulianti	Staf PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Manajemen PT Agung Raya Jl. Cut Mutia No 14 Menteng, Jakarta	Parsel Makanan Ringan	Yayasan Indonesia Hijau
	May 22, 2019		PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Staff		Snack Parcel	Indonesia Hijau Foundation

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system (WBS) atau yang disebut IPC Bersih diperkenalkan untuk memperkuat penerapan dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh Insan IPC dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik.

IPC bersih merupakan sebuah program nyata dari Manajemen IPC untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan.

PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran

Laporan terkait WBS dapat disampaikan dengan saluran yang telah disediakan sebagai berikut:

Web Online	: https://ipcbersih.whistleblowing.link/
Telepon	: +62 21 2782 2345
Faksimile	: +62 21 2782 3456
SMS/Whatsapp	: +62 811 933 2345
Email	: ipcbersih@whistleblowing.link
Pos	: IPC Bersih, PO Box 1074, JKS 12010

Perlindungan Bagi Whistleblower

Pengelolaan dan penerapan WBS di IPC dibantu oleh mitra atau pihak ketiga yaitu PT Integrity Indonesia. Dalam sistem pelaporan, pemilih bebas untuk menyampaikan identitas atau tidak. Pelapor memilih tidak menyebutkan namanya maka Tim pengelola WBS atau Tim "IPC Bersih" tidak mengetahui identitas pelapor.

Melalui sistem ini Insan IPC atau *Stakeholders* yang melaporkan akan diberikan perlindungan baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si terlapor. IPC memandang laporan yang masuk akan sangat membantu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk berinteraksi dan bertransaksi serta membantu IPC meminimalisir tindakan kecurangan, korupsi, pencurian, pelanggaran kebijakan dan peraturan Perusahaan, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi, penggelapan, penipuan, pemerasan.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Kategori Pelanggaran yang dapat dilaporkan pada *Whistleblowing System* adalah:

1. Tindakan Kecurangan
Adalah tindakan yang dilakukan oleh Insan IPC dengan

WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Whistle Blowing System (WBS) or IPC Bersih, was introduced to strengthen the implementation in order to provide an opportunity for all IPC employees and other stakeholders to be able to submit reports on indications of violation of applicable ethical values, based on reliable and well-informed evidences.

IPC Bersih is a tangible program of IPC Management to create a clean workplace away from fraud, corruption and extortion.

WHISTLEBLOWING SYSTEM MANAGEMENT

Submission of Alleged Violation Report

WBS related reports can be submitted through the channels provided as follows:

Web Online	: https://ipcbersih.whistleblowing.link/
Telephone	: +62 21 2782 2345
Fax	: +62 21 2782 3456
SMS/WA	: +62 811 933 2345
Email	: ipcbersih@whistleblowing.link
Letter	: "IPC Bersih" Po Box 1074 JKP 12010

Whistleblower Protection System

The management and application of WBS in IPC is assisted by partners or third party, namely PT Integrity Indonesia. In the reporting system, the rapporteur is free to reveal the identity or not. If the rapporteur chooses not to mention his or her name then WBS management team or "IPC Bersih" Team does not know the identity of the complainant.

Through this system IPC employees or stakeholders who report will be given protection both in terms of identity confidentiality or the possibility of countermeasures by the reported party. IPC views that the incoming reports will greatly help create a favorable working environment for interaction and transactions as well as to help IPC to minimize fraud, corruption, theft, violation of Company policies and regulations, conflict of interests, bribery/gratification, embezzlement, fraud, and extortion.

Types of Violations That Can Be Reported

The violation categories that can be reported on the Whistleblowing System are:

1. Fraudulent Actions
It is an act committed by an IPC individual for personal



maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ataupun menggerakkan orang lain untuk memberikan keuntungan kepadanya dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum.

Contoh:

- a. Menyetujui pemberian order kepada *supplier* yang memiliki hubungan istimewa;
- b. Merekrut staf yang memiliki "hubungan istimewa" dengannya sementara terdapat kandidat yang memiliki kualifikasi yang lebih baik.

2. Korupsi

Adalah tindakan insan IPC, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya orang-orang yang memiliki "hubungan istimewa" dengannya, dengan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.

Contoh:

- a. Menggunakan anggaran, harta, jasa pelayanan dan informasi perusahaan serta anak perusahaan untuk aktivitas di luar kedinasan guna memperkaya diri sendiri;
- b. Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

3. Pencurian

Adalah kegiatan/tindakan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Contoh:

- a. Menyalahgunakan/mengambil tanpa alasan hak uang/barang/data/dokumen milik perusahaan di lingkungan kerja;
- b. Menggunakan identitas diri orang lain untuk mendapatkan barang dan pelayanan.

4. Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan

Adalah kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh Insan IPC baik disengaja maupun terencana yang bertentangan dengan kebijakan dan peraturan internal Perusahaan.

Contoh:

- a. Membocorkan informasi perusahaan, seperti: mengenai anggaran, penawaran dari pemasok, strategi bisnis dan lain sebagainya kepada orang-orang yang tidak berhak;
- b. Pemberian fasilitas kredit dan perpanjangan waktu pembayaran kewajiban kepada pelanggan atau vendor/*supplier* yang terindikasi melanggar ketentuan dan berpotensi merugikan Perusahaan dan Anak Perusahaan secara ekonomis.

benefit or others by using false identity or false dignity by trickery or lies or moving others to benefit him or her in prohibited and unlawful ways.

Example:

- a. Approved an order to supplier with special relationship;
- b. Recruit staff that has a "special relationship" with them while there are candidates with better qualifications.

2. Corruption

It is an IPC employee action which improperly and illegally enriches or enriches those who have a "special relationship", by abusing positions and powers

Example:

- a. Using budgets, assets, services and information of companies and subsidiaries for activities outside the service for personal enrichment;
- b. Abusing power for personal or group interests

3. Theft

It is the activity/action to take a good, wholly or partly belongs to another person, with the intent to possess unlawfully

Example:

- a. Abusing/taking without reason in the form of money/goods/data/documents owned by the Company in the workplace;
- b. Using the identity of others to get goods and services.

4. Violations of Company Policies and Regulations

It is an activity/action intentional performed or planned by IPC employees that is contrary to Company's internal policies and regulations.

Example:

- a. Leaking corporate information, such as: about the budget, supply from suppliers, business strategies and so on to unauthorized people;
- b. Provision of credit facilities and extension of obligation payments to customers or vendors/suppliers indicated to violate the provisions and potentially harm the Company and Subsidiaries in an economic manner.

5. Benturan Kepentingan

Sebuah situasi di mana Insan IPC atau Pemegang Saham utama karena kedudukan atau jabatan di Perusahaan memiliki wewenang yang berpotensi disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomi Perseroan.

Contoh:

- a. Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa, di mana insan IPC tersebut mempunyai kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut;
- b. Menerima hadiah dalam bentuk uang atau hiburan dari vendor atau *supplier*.

6. Penyuaipan/Gratifikasi

Suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Contoh:

- a. Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam tertentu dari pihak manapun yang terkait dengan suatu transaksi bisnis perusahaannya;
- b. Menerima keuntungan-keuntungan dalam bentuk apapun yang mempengaruhi penilaian atau keputusan bisnis yang akan diambil.

7. Penggelapan

Kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang saat ini ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Contoh:

- a. Melakukan tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain;
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik Perusahaan yang dalam kekuasaannya baik karena jabatannya maupun bukan karena jabatannya.

5. Conflict of Interest

A situation in which IPC employees or the Shareholder due to the position of the Company has the authority that is potentially misused either intentionally or unintentionally for his or her personal interest, resulting in a conflict between personal interests and/or groups and/or families with the economic interests of the Company.

Example:

- a. Provision of decisions on the appointment of certain parties as providers of goods/services, where the IPC employee has an economic interest to the appointed party;
- b. Receive prizes in the form of money or entertainment from vendors or suppliers.

6. Bribery/Gratification

A deliberate and conscious act of accepting something or a promise, while he or she knows or can reasonably expect that the giving of something or a promise is meant for he or she to do something or to do anything in his or her duties, which is contrary to his or her authority or obligation in the public interest.

Example:

- a. Receive direct or indirect benefits from any parties related to a business transaction of his or her company;
- b. Receive benefits in any form that affect the assessment or business decisions to be taken.

7. Embezzlement

Activities deliberately and consciously violate the law to own a thing that wholly or partially belong to another person, who is currently in his or her power not out of a crime.

Example:

- a. Carry out dishonest acts by hiding the goods/property of the Company without the knowledge of the Company for the purpose of owning, controlling, or being used for other purposes;
- b. Intentionally and unlawfully possessing an object that wholly or partly belongs to the Company which is in his or her power either because of his or her position or not because of his or her position.



8. Penipuan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Contoh:

- a. Suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain menandatangani kontrak tersebut, padahal tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan;
- b. Bekerja sendiri ataupun bekerjasama dengan pihak lain untuk menipu atasan atau Perusahaan dengan menggunakan tanda tangan palsu atau faktur palsu.

9. Pemerasan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Contoh:

- a. Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada calon *supplier* sebagai pengganti untuk sebuah pekerjaan;
- b. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan pihak lainnya.

Pengelola Laporan Pelanggaran

IPC bersama PT Integrity Indonesia selaku mitra dalam penerapan sistem WBS telah menerima dan memonitor pengaduan baik internal dan eksternal serta membuat laporan bulanan kepada Tim IPC Bersih sebagai counterpart yang diatur dalam SK Direksi No HK.01/10/12/1/KPP/UT/PI.II-19 tentang Tugas dan Tanggungjawab Komite IPC Bersih dalam Pelaksanaan *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diketuai oleh EVP Sekretariat Perusahaan, wakil ketua SVP Hukum, Sekretaris SDVP Penerapan Tata Kelola Korporasi dan beranggotakan EVP Satuan Pengawas Internal, VP Layanan SDM, VP Manajemen Risiko.

8. Fraud

Activities intentionally and consciously intended to benefit themselves or others unlawfully, using false identity or false dignity, with tricks, or lies, moving others to surrender something to them, or to give debt or write off accounts receivable.

Example:

- a. A trick used by one of the parties to cause the other party to sign the contract, whereas without such tricks the other party will not sign the contract in question;
- b. Work alone or cooperate with other parties to deceive superiors or Company by using false signatures or fake invoices.

9. Extortion

Activities/actions committed with the intent to benefit themselves or others unlawfully, compel a person with violence or the threat of force to provide something, wholly or partially belonging to that person or other person, or in order to make debt or to waive the receivable.

Example:

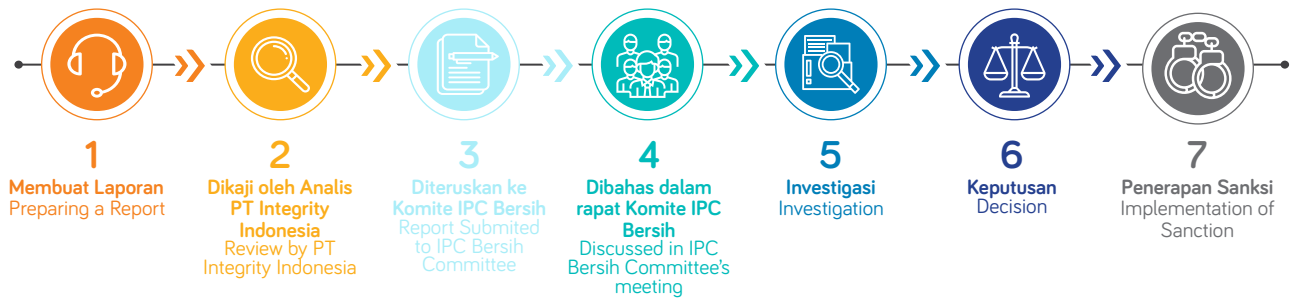
- a. Requesting a sum of money or gifts to prospective suppliers as a substitute for a job;
- b. Perform any unlawful levies of any kind in the performance of their duties for the benefit of the private/other parties.

Violation Report Management

IPC with PT Integrity Indonesia as a partner in WBS system implementation has received and monitored Internal and external complaints and made monthly reports to IPC Bersih Team as the counterpart, as stipulated in Board of Directors Decree No. HK.01/10/12/1/KPP/UT/PI.II-19 concerning the Duties and Responsibilities of IPC Bersih Committee in the Implementation of *Whistleblowing System* of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which is chaired by EVP Corporate Secretariat, deputy chairman of SVP Legal, Secretary of SDVP Corporate Governance Implementation with members consist of EVP Internal Audit Unit, VP HC Services, VP Risk Management.

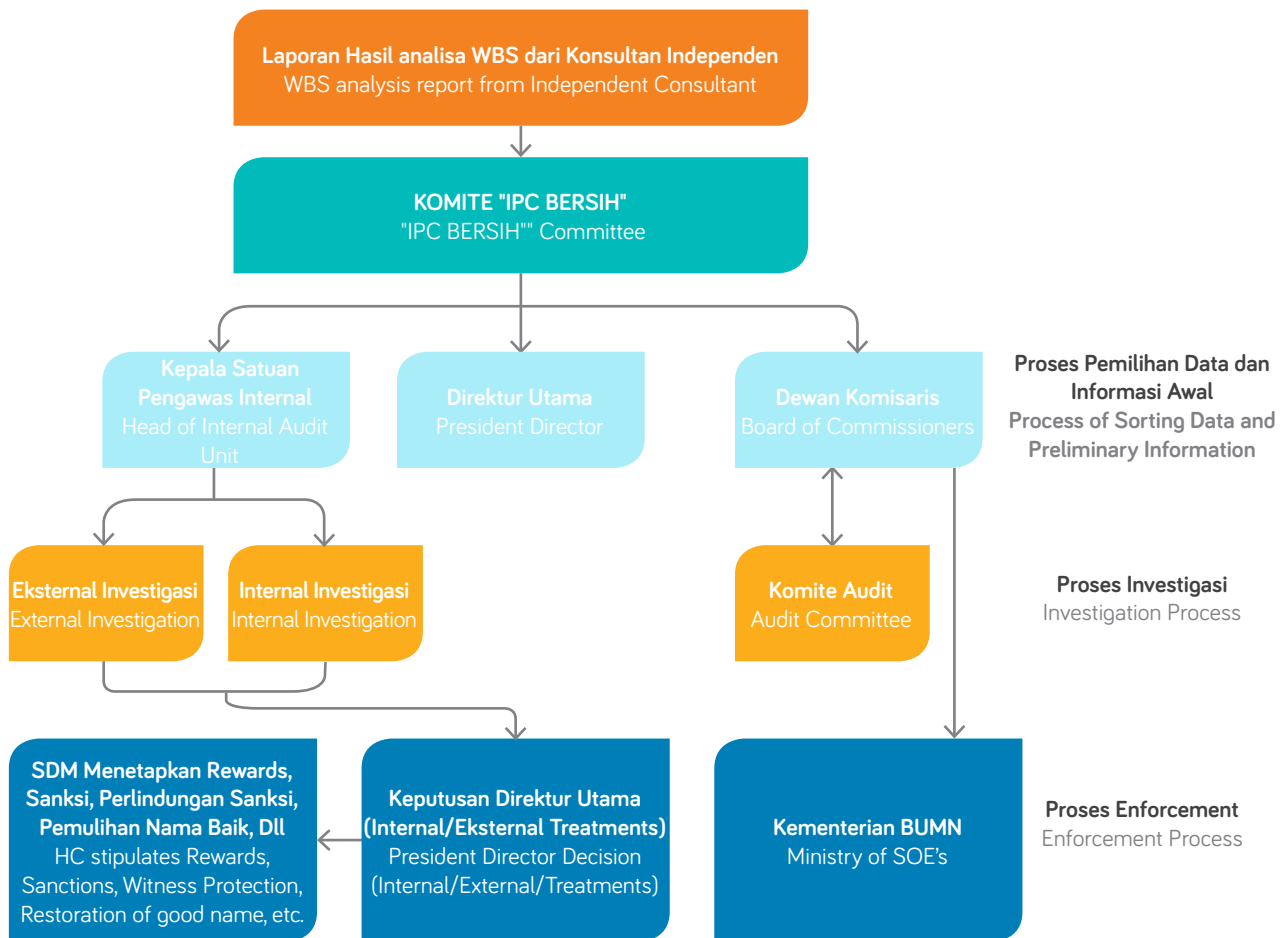
Bagan Alur Penyampaian Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran

Whistleblowing System Process Channel



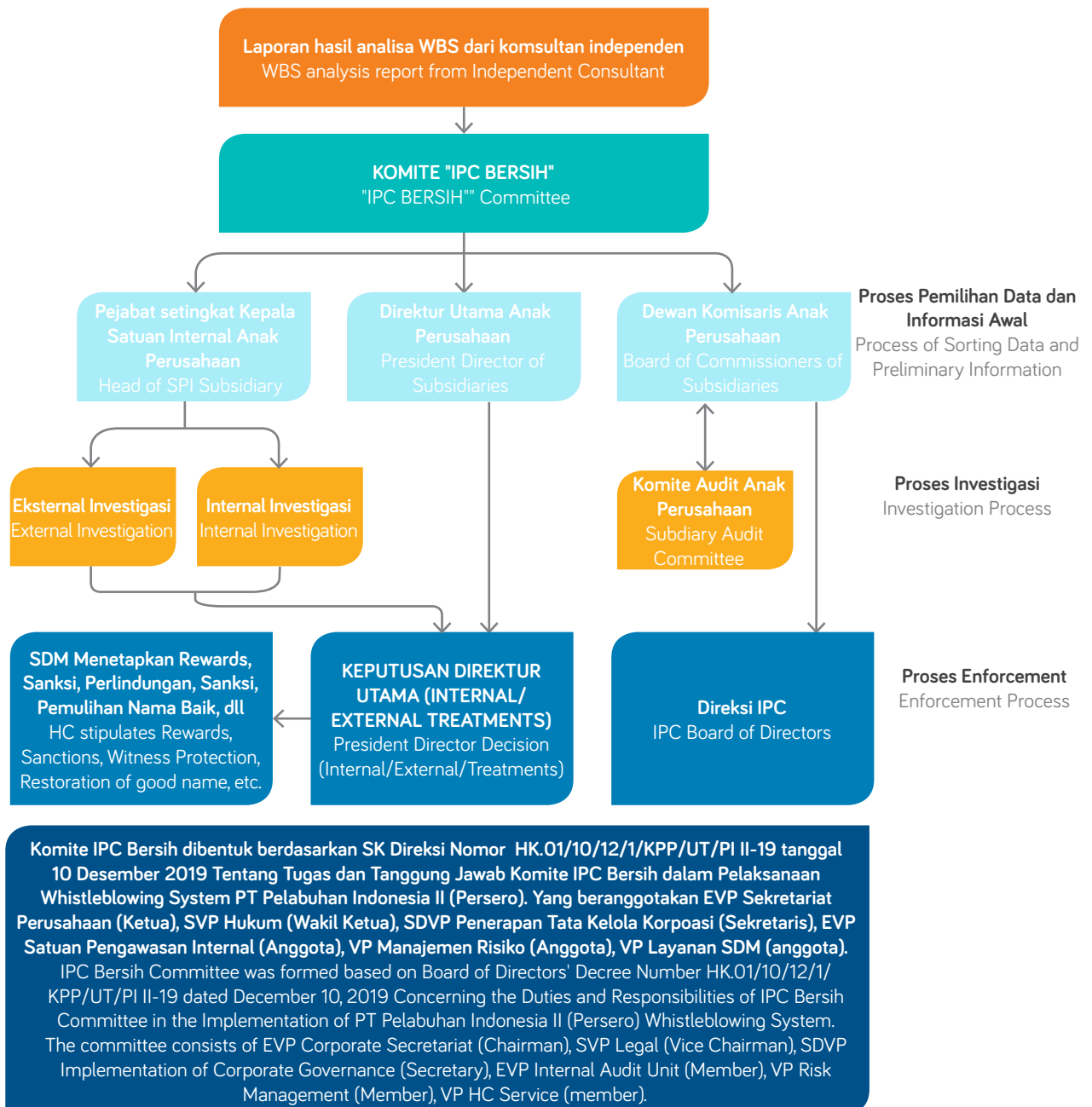


Flow Tindak Lanjut Laporan di Kantor Pusat
Flow of Follow Up Reports at Head Office



Komite IPC Bersih dibentuk berdasarkan SK Direksi Nomor HK.01/10/12/1/KPP/UT/PI II-19 tanggal 10 Desember 2019 Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komite IPC Bersih dalam Pelaksanaan Whistleblowing System PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Yang beranggotakan EVP Sekretariat Perusahaan (Ketua), SVP Hukum (Wakil Ketua), SDVP Penerapan Tata Kelola Korporasi (Sekretaris), EVP Satuan Pengawasan Internal (Anggota), VP Manajemen Risiko (Anggota), VP Layanan SDM (anggota).
IPC Bersih Committee was formed based on Board of Directors' Decree Number HK.01/10/12/1/KPP/UT/PI II-19 dated December 10, 2019 Concerning the Duties and Responsibilities of IPC Bersih Committee in the Implementation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Whistleblowing System. The committee consists of EVP Corporate Secretariat (Chairman), SVP Legal (Vice Chairman), SDVP Implementation of Corporate Governance (Secretary), EVP Internal Audit Unit (Member), VP Risk Management (Member), VP HC Service (member).

Flow Tindak Lanjut Laporan untuk Anak Perusahaan
WBS Analysis Report from Independent Consultant



SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sosialisasi atas WBS dilaksanakan bersama dengan sosialisasi pengendalian gratifikasi.

WHISTLEBLOWING SYSTEM SOCIALIZATION

The WBS socialization was conducted together with the gratification control socialization



JUMLAH PENGADUAN

NUMBER OF COMPLAINTS

No	Kategori Pengungkapan <i>Categories of Disclosure</i>	Jumlah Pelaporan Masuk <i>Number of Reports</i>	Tindak Lanjut <i>Follow-up</i>		Persentase <i>Percentage</i>
			Laporan Pelanggaran Selesai/Tertutup <i>Report violation complete/closed</i>	Laporan Pelanggaran Dalam Proses/Terbuka <i>New/open violation report</i>	
1.	Indikasi Tindak Kecurangan <i>Indication of Fraud</i>	0	0	0	0
2.	Indikasi Korupsi <i>Indication of Corruption</i>	0	0	0	0
3.	Indikasi Pencurian <i>Indication of Theft</i>	0	0	0	0
4.	Indikasi Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan <i>Indication of Violations of Company Policies and Regulations</i>	8	7	1	88
5.	Indikasi Benturan Kepentingan <i>Indication of Conflicts of Interest</i>	0	0	0	0
6.	Indikasi Penyuapan/Gratifikasi <i>Indication of Bribery/Gratuities</i>	0	0	0	0
7.	Indikasi Penggelapan <i>Indication of Embezzlement</i>	0	0	0	0
8.	Indikasi Penipuan <i>Indication of Fraud</i>	0	0	0	0
9.	Indikasi Pemerasan <i>Indications of Extortion</i>	1	0	1	50
10.	<i>Out of Scope</i> <i>Out of Scope</i>	4	4	0	100
Jumlah Total		13	11	2	80

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN DI TAHUN 2019

IPC telah menetapkan standar prosedur operasional terkait dengan pelaporan WBS. Setiap laporan yang masuk, setelah sesuai dengan kriteria yang ada, akan ditindaklanjuti oleh Komite IPC Bersih. Dalam pelaksanaannya, Komite dibantu oleh Satuan Pengawasan Internal dan Tim Indisipliner Kantor Pusat untuk melakukan investigasi pengaduan yang masuk. Dari temuan yang didapat, kemudian dianalisis untuk dikeluarkan rekomendasi yang disampaikan dalam hasil kajian terhadap pengaduan yang ditindaklanjuti. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan kepada Direktur Utama atau kepada pejabat lebih tinggi yang akan menetapkan keputusan atas temuan dan rekomendasi tersebut untuk pemberian sanksi yang sesuai dengan aturan Perseroan.

SANCTIONS/FOLLOW UP OF REPORTS IN 2019

IPC has established standard operating procedures related to WBS reporting. Every incoming report, after complying with the existing criteria, will be followed up by the iPC Bersih Committee. In its implementation, the Committee is assisted by the Internal Audit Unit and the Head Office Indisciplinary Team to investigate the incoming complaints. The findings obtained, then analyzed to issue recommendations submitted in the results of complaint review that are followed up. Subsequently, the report is submitted to the President Director or to higher officials who will decide on the findings and recommendations for sanctions in accordance with Company regulations.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi IPC diatur dalam Pedoman *Good Corporate Governance* yang mengatur bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen serta memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan. Dalam penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan senantiasa berupaya agar komposisi Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keberagaman. Keberagaman komposisi menyesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas IPC sehingga diharapkan dalam pengembangan maupun penyelesaian terhadap suatu permasalahan dapat dipertimbangkan dari berbagai perspektif pendidikan, kompetensi serta pengalaman yang dimiliki. Perseroan juga tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan dengan adanya kebutuhan keberagaman Direksi tersebut.

KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN PENERAPANNYA

Dapat disampaikan keberagaman Dewan Komisaris IPC adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris terdiri dari 5 (lima) orang Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen;
2. Dari sisi usia, usia anggota Dewan Komisaris memiliki rentang yang cukup panjang, dari yang termuda berusia 53 (lima puluh tiga) tahun dan usia tertinggi adalah 76 (tujuh puluh enam);
3. Latar belakang pendidikan anggota Dewan Komisaris cukup beragam, antara lain dari bidang studi ekonomi, manajemen, hukum, teknik, dan militer, yang berasal baik dari institusi pendidikan dalam negeri maupun luar negeri;
4. Dari sisi latar belakang pengalaman pekerjaan, terdapat anggota Dewan Komisaris baik yang masih aktif maupun yang telah purna tugas di bidang Regulator Perhubungan, Militer, Penegak Hukum, Kepabeanan, dan Keuangan.

Keanekaragaman usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pekerjaan tersebut menjadikan Dewan Komisaris memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap pengelolaan Perseroan, serta menjadi nilai tambah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Pada periode 2019, keberagaman komposisi Dewan Komisaris yang tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

THE DIVERSITY OF COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The policy regarding the diversity of IPC's Board of Commissioners and Board of Directors composition is regulated in the Code of Good Corporate Governance which regulates that the appointment of members of Board of Commissioners and Board of Directors is carried out by considering integrity, dedication, understanding upon Company's management issues related to one of the management functions and adequate knowledge in the field of Company business. In determining the members of Board of Commissioners and Board of Directors, the Company always strives for the composition of Board of Commissioners and Board of Directors to have diversity. The diversity of composition adjusts to the needs and complexity of IPC, so that it is expected that the development and resolution of a problem can be considered from various perspectives on education, competencies and experiences. The Company also continues to pay attention to effectiveness in decision making with the diversity needs of Board of Directors.

DIVERSITY OF BOARD OF COMMISSIONERS AND ITS IMPLEMENTATION

The diversity of IPC Board of Commissioners can be conveyed as follows:

1. Board of Commissioners consists of 5 (five) Commissioners and 2 (two) Independent Commissioners;
2. In terms of age, the age of members of Board of Commissioners has a fairly long range, of the youngest being 53 (fifty three) years and the highest age is 76 (seventy six) years;
3. The educational backgrounds of members of Board of Commissioners are quite diverse, including in the fields of economic, management, law, engineering and military studies, both from domestic and foreign educational institutions;
4. In terms of background work experience, there are members of Board of Commissioners who is both active and retired in the fields of Transportation Regulatory, Military, Law Enforcement, Customs, and Finance.

The diversity of age, educational background, and work experience enriches Board of Commissioners' perspectives so to have a comprehensive understanding of the management of the Company, as well as the added value for the execution of duties and functions of Board of Commissioners. In 2019, Board of Commissioners composition diversity was reflected in education, work experience, age and genders shown in the table below:



Tabel Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Composition Diversity Policy

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Tumpak H. Panggabean*	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen	76 tahun	Laki-Laki	Hukum	Aparat Penegak Hukum	Hukum
	President Commissioner and Independent Commissioner	76 years	Male	Law	Enforcement Official	Law
Montty Girianna	Komisaris	56 tahun	Laki-Laki	Teknik Sipil, Sistem Transportasi, Perencanaan Kota, Keuangan	Peneliti dan Birokrat	Teknik Sipil, manajemen transportasi
	Commissioner	56 years	Male	Civil Engineering, Transportation Systems, Urban Planning, Finance	Researcher and Bureaucrat	Civil Engineering, transportation management
Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner	72 tahun 72 years	Laki-Laki Male	Ilmu politik, Militer Political science, military	Militer Military	Kepemimpinan Leadership
Djadmiko	Komisaris	64 tahun	Laki-Laki	Administrasi Negara, Keuangan	Birokrat	Administrasi dan manajemen
	Commissioner	64 years	Male	State Administration, Finance	Bureaucrat	Administration and management
Kushari Suprianto	Komisaris	53 tahun	Laki-Laki	Akuntansi, Ekonomi, Manajemen SDM	Kepabeanan	Akuntansi dan SDM
	Commissioner	53 years	Male	Accounting, Economics, HC Management	Customs	Accounting and Human Capital
D. Andhi Nirwanto	Komisaris	63 tahun	Laki-Laki	Hukum, Manajemen Internasional	Aparat Penegak Hukum	Hukum, Manajemen
	Commissioner	63 years	Male	Law, International Management	Law Enforcement Official	Law, Management
R. Agus H. Purnomo	Komisaris	58 tahun	Laki-Laki	Teknik Mesin, Manajemen	CEO BUMN, Birokrat	Manajemen, transportasi
	Commissioner	58 years	Male	Mechanical Engineering, Management	CEO of SOE, Bureaucrat	Management, transportation

*Berhenti menjabat sejak tanggal 20 Desember 2019

*Stop serving since December 20, 2019

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DIREKSI DAN PENERAPANNYA

Masing-masing telah mengenyam pendidikan yang mumpuni, telah memiliki pengalaman kerja yang beragam untuk menunjang pelaksanaan tugas di Perseroan, memiliki sertifikasi dan penghargaan yang telah diraih serta telah menjalani peningkatan kompetensi yang memadai. Secara lebih terperinci, keberagaman tersebut dapat terlihat pada profil masing-masing Direktur.

BOARD OF DIRECTORS DIVERSITY POLICY AND ITS IMPLEMENTATION

Each Director has graduated from qualified educations, has had diverse work experience to support the implementation of duties in the Company, has achieved certification and awards and has undergone adequate competency enhancement. In more detail, this diversity can be seen in the profile of each Director.

Keanekaragaman usia, latar belakang pendidikan dan pengalaman pekerjaan serta keahlian tersebut menjadikan Direksi memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap pengelolaan perusahaan, serta menjadi nilai tambah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Keragaman dari masing-masing anggota Direksi serta aspek strategis yang diharapkan, dapat digambarkan sebagai berikut:

The age, educational background and work experience and expertise diversity reveals that Board of Directors has a comprehensive understanding of the management of the Company, and can added value when conducting Board of Directors duties and functions. The diversity of each member of Board of Directors and the expected strategic aspects are shown as follows:

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi
Board Of Directors Diversity

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Elvyn G. Masassya	Direktur Utama	52 tahun	Laki-laki	Magister Keuangan	Industri Keuangan	Ekonomi dan Keuangan
	President Director	52 years	Male	Master's degree in Finance	Financial Industry	Economics and Finance
Hambra*	Wakil Direktur Utama	51 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum Bisnis	Industri Keuangan dan Asuransi	Hukum
	Vice President Director	51 years	Male	Bachelor of Industrial Business Law	Finance and Insurance	Law
Saptono R. Irianto**	Direktur Komersial	62 tahun	Laki-laki	Master bidang <i>Hydraulic Engineering</i>	Industri Kepelabuhan	Teknik Sipil
	Commercial Director	62 years	Male	Master's degree in Hydraulic Engineering	Port Industry	Civil Engineering
Arif Suhartono***	Direktur Komersial	49 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Sipil	Industri Kepelabuhan	Teknik Sipil
	Commercial Director	49 years	Male	Civil Engineering	Port Industry	Civil Engineering
Dani Rusli Utama	Direktur Teknik	48 tahun	Laki-laki	Magister Manajemen Bidang Infrastruktur	Industri Kepelabuhan	Teknik Sipil
	Technical Director	48 years	Male	Master's degree in Infrastructure Management	Port Industry	Civil Engineering
Prasetyadi	Direktur Operasi	50 tahun	Laki-laki	Magister bidang Manajemen	Industri Keuangan	Teknik Mesin
	Operations Director	50 years	Male	Master's degree in Management	Financial Industry	Mechanical Engineering
Widyaka Nusapati	Direktur Keuangan	52 tahun	Laki-laki	Master in <i>Business Administration (MBA) Bidang Financial Management/Quantitative Analysis</i>	Industri Keuangan	Keuangan
	Finance Director	52 years	Male	MBA in Financial Management/Quantitative Analysis	Financial Industry	Finance
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Human Capital Director	45 tahun 45 years	Laki-laki Male	Master bidang hukum Master's degree in Law	Hukum Law	Hukum Law



Tabel Keberagaman Komposisi Direksi
Board Of Directors Diversity

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Riry Syeried Jetta****	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	50 tahun	Laki-laki	Master bidang Keuangan	Industri Kepelabuhan	Industri Kepelabuhan
	Transformation and Business Development Director	50 years	Male	Master's degree in Finance	Port Industry	Port Industry
Ogi Rulino***	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	51 tahun	Laki-laki	Master bidang Teknik Mesin	Industri Kepelabuhan	Industri Kepelabuhan
	Transformation and Business Development Director	51 years	Male	Master's degree in Mechanical Engineering	Port Industry	Port Industry

* Mulai menjabat sejak tanggal 18 November 2019

** Berhenti menjabat sejak tanggal 11 Maret 2019

*** Mulai menjabat sejak tanggal 8 April 2019

**** Berhenti menjabat sejak tanggal 4 Januari 2019

* Served since November 18, 2019

** Ended service since Maret 11, 2019

*** Served since April 8, 2019

**** Ended service since Januari 4, 2019

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

KEBIJAKAN PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LHKPN

IPC memiliki kebijakan mengenai Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan SK Direksi No. HK.566/16/3/1/PI.II-17 tanggal 16 Maret 2017 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang merupakan pemutakhiran dari SK Direksi No. HK.56/1/7/3/PI.II-14 tanggal 1 Juli 2014. Kebijakan ini mengatur tata cara penyampaian, pengelolaan LHKPN, Pegawai yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN dan sanksi bagi pegawai terkait yang tidak melaporkan LHKPN. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

WAJIB LAPOR LHKPN

Berdasarkan Kebijakan Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Wajib Laporan LHKPN di lingkungan IPC adalah:

1. Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
2. Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditugaskan sebagai Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan;

MANAGEMENT OF STATE ADMINISTRATOR ASSETS REPORT (LHKPN)

LHKPN DELIVERY AND MANAGEMENT POLICY

IPC has a policy regarding Submission and Management of State Official Assets Reports (LHKPN) based on Board of Directors Decree No. HK.566/16/3/1/PI.II-17 dated March 16, 2017 concerning Obligations to Report Assets of Board of Directors, Board of Commissioners and Structural Officials at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), an update to Board of Directors Decree No. HK.56/1/7/3/PI.II-14 dated July 1, 2014. This policy regulates the procedures for submitting, managing LHKPN, employees who are required to submit LHKPN, and sanctions for employees who do not report LHKPN. This policy refers to KPK Regulation Number 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Assets.

MANDATORY LHKPN REPORT

Based on Submission Policy and Management of State Official Assets Report. Mandatory Reporting of LHKPN in IPC includes:

1. Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
2. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) employees assigned as Board of Directors or Board of Commissioners of Subsidiaries;

3. Pejabat Struktural, pejabat yang menduduki satu tingkat di bawah Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Pengelola LHKPN

Koordinator Pengelolaan LHKPN di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah VP Layanan SDM pada Divisi SDM. Dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal:
 - a. *Monitoring* dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam pelaporan dan mengumumkan harta kekayaannya;
 - b. Pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
 - c. Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN.
2. Melakukan Verifikasi terhadap data yang disampaikan oleh KPK mengenai kepatuhan Wajib Laporan LHKPN dan menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada KPK;
3. Menyampaikan data kepada KPK mengenai data kepegawaian dan data setiap adanya perubahan jabatan Wajib Laporan LHKPN paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
4. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam aplikasi e-LHKPN;
5. Mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
6. Berkoordinasi dengan Koordinator LHKPN pada Kementerian BUMN mengenai pengelolaan LHKPN dan kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK.

LAPORAN LHKPN TAHUN 2019

IPC memiliki total wajib lapor berjumlah 94 dengan 84 orang sudah lapor dan 10 orang belum lapor per tanggal 13 April 2020. Sehubungan dengan perkembangan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Perpanjangan Pelaporan LHKPN Periodik tahun pelaporan 2019 secara *online* sampai dengan 30 April 2020 mengacu pada Surat Edaran Pimpinan KPK No. 100 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Penyampaian LHKPN Tahunan (Periodik) Tahun Laporan 2019.

ASESMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN

IPC melakukan asesmen pelaksanaan Praktek GCG dengan tujuan mengukur tingkat implementasi praktek GCG sekaligus mendapatkan umpan balik bagi perbaikannya di masa mendatang. Metode penilaian terhadap penerapan GCG IPC di tahun 2019 mengacu pada alat ukur (*score card*) yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

3. Structural Officers, officials who occupy one level below Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

LHKPN Management

LHKPN Management Coordinator at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is the VP of HC Services in the HC Division. With details as follows:

1. Coordinate with KPK in terms of:
 - a. Monitoring and evaluating the mandatory compliance of LHKPN in reporting and announcing its assets;
 - b. Utilization of e-LHKPN Application through www.elhkpn.kpk.go.id;
 - c. Provision of LHKPN obligation socialization and technical guidance on how to complete LHKPN.
2. Verify the data submitted by KPK regarding the compulsory compliance of LHKPN Report and submit results of verification to KPK;
3. Submitting data to KPK regarding staffing data and data for any changes in the position of LHKPN compulsory report no later than December 15 each year;
4. Updating the data referred to in e-LHKPN application;
5. Remind LHKPN Obligations to obey the LHKPN submission and announcement obligations;
6. Coordinate with LHKPN Coordinator at Ministry of SOEs regarding LHKPN management and the LHKPN Obligatory compliance in submitting LHKPN to KPK.

LHKPN REPORT IN 2019

IPC has 94 total mandatory reports, with 84 already reported and 10 not yet reported as of April 13, 2020. In connection with the development of preventing the spread of Corona Virus Disease in 2019 (Covid-19), the extension of Periodic LHKPN Reporting for the 2019 online reporting year up to April 30, 2020 refers to the Circular Letter of Head of KPK No. 100 of 2020 concerning Extension of the Period of Submission of Annual LHKPN (Periodic) for 2019 Report Year.

GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT

IPC conducts assessments on GCG Practices with the objective to measure GCG and to obtain feedback for future improvements. The appraisal method of GCG in 2019 refers to the scorecard as stated in the Ministry of SOEs Secretary Letter No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on Indicators for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance at State-Owned Enterprises.



Prosedur pelaksanaan penilaian GCG IPC mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Surat Edaran Kementerian Negara BUMN No. SE14/MBU/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Program *Assessment* dan *Review* Pelaksanaan GCG;
6. Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2019;
7. Praktek *best practice* yang berkembang Perusahaan juga telah menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait perencanaan dan pelaksanaan penilaian GCG, yaitu SOP Perencanaan Penilaian GCG, SOP Pelaksanaan Penilaian GCG dan SOP Evaluasi dan *Monitoring* Pelaksanaan GCG; dan
8. Parameter ASEAN CG Scorecard.

KRITERIA PENILAIAN

Pelaksanaan GCG *assessment* tersebut berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Indikator yang digunakan dalam *assessment* GCG tersebut meliputi:

1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan informasi dan transparansi; dan
6. Aspek lainnya.

The implementation procedure for IPC GCG assessment refers to several regulations as follows:

1. Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
2. Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Minister of SOEs Regulation Amendment No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
3. Minister of SOEs Decision No. KEP-117/M-MBU/2002 dated 1 August 2002 on Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises;
4. Secretary of Ministry of SOEs. Decision No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on Indicators/Parameters of Evaluation and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises;
5. Ministry of State Owned Enterprise Circular Letter No. SE-14/MBU/2010 dated 11 November 2010 on GCG and Review Program;
6. Guidelines for Good Corporate Governance Implementation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Year 2019;
7. The best practice practices that the Company has developed have also been established related to planning and implementation of GCG assessment, namely SOP of GCG Assessment Plan, SOP of GCG Assessment and SOP of GCG Implementation Evaluation & Monitoring; and
8. Parameter ASEAN CG Scorecard.

ASSESSMENT CRITERIA

The GCG assessment refers to Secretary of Ministry of SOE Decree Number: SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessing and Evaluating Good Corporate Governance in BUMNs. The indicators used in GCG assessment include:

1. Commitment to implementing good corporate governance in a sustainable manner;
2. Shareholders and GMS/Capital Owners;
3. Board of Commissioners/Supervisory Board;
4. Board of Directors;
5. Information disclosure and transparency; and
6. Other aspects.

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Pihak yang melakukan penilaian implementasi GCG di tahun buku 2019 adalah PT Multi Utama Indojasa.

ASSESSOR

The assessor of GCG implementation in 2019 was PT Multi Utama Indojasa.

SKOR PENILAIAN

Skor penilaian GCG Perseroan selama tahun 2013 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut.

ASSESSMENT SCORE

The Company's GCG assessment score from 2013 to 2019 are as follows.

Tabel Hasil GCG Assessment
GCG Assessment Score

Tahun Buku Assessment GCG Fiscal Year GCG Assessment	Skor Assessment GCG GCG Assessment Score	Kategori Category	Pelaksana Executor
2019	98,55	(Sangat Baik) (Very good)	PT Multi Utama Indojasa
2018	98,30	(Sangat Baik) (Very good)	PT Multi Utama Indojasa
2017	96,37	(Sangat Baik) (Very good)	PT Multi Utama Indojasa
2016	93,32	(Sangat Baik) (Very good)	PT Multi Utama Indojasa
2015	83,21	(Baik) (Good)	BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) BPKP (Financial and Development Supervisory Agency)
2014	83,48	(Baik) (Good)	Self Assessment
2013	78,12	(Baik) (Good)	BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) BPKP (Financial and Development Supervisory Agency)

Hasil GCG *assessment* IPC pada tahun buku 2018 dan 2019 sebagai berikut: IPC GCG assessment results in 2018 and 2019 were as follows:

Hasil Penilaian Tahun Buku 2018 dan 2019
2018 and 2019 Fiscal Year Assessment Results

No.	Apek Penilaian Assessment Aspect	Bobot Weight	Capaian Tahun 2018 Achievement 2018		Capaian Tahun 2019 Achievement 2019		Keterangan Description
			Skor Score	%	Skor Score	%	
1.	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan Continous Commitment to GCG	7,00	6,962	99,456	6,924	98,912	Sangat Baik Very good
2.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholder and GMS/principal owner	9,00	8,611	95,674	8,629	95,874	Sangat Baik Very good
3.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	34,836	99,531	34,452	98,433	Sangat Baik Very good
4.	Direksi Board of Directors	35,00	34,621	98,917	34,546	98,704	Sangat Baik Very good



Hasil Penilaian Tahun Buku 2018 dan 2019 2018 and 2019 Fiscal Year Assessment Results

No.	Apek Penilaian Assessment Aspect	Bobot Weight	Capaian Tahun 2018 Achievement 2018		Capaian Tahun 2019 Achievement 2019		Keterangan Description
			Skor Score	%	Skor Score	%	
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	8,274	91,933	9,000	100,000	Sangat Baik Very good
6.	Aspek lainnya Other Aspects	5,00	5,000	100,000	5,000	100,000	Sangat Baik Very good
Jumlah Total		100,00	98,303	98,303	98,550	98,550	Sangat Baik Very Good

REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUTNYA

Dari hasil penilaian GCG untuk tahun buku 2019, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi IPC untuk segera ditindaklanjuti agar pelaksanaan GCG di IPC semakin baik. Adapun *area of improvement* untuk tahun buku 2019 adalah sebagai berikut:

RECOMMENDATION AND FOLLOW-UP

From the results of GCG assessment for the 2019 fiscal year, there are a number of issues that need to be considered for IPC to be immediately followed up in order to improve the implementation of GCG in IPC. The areas of improvement for the 2019 fiscal year are as follows:

Area of Improvement

Menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (Terdapat 95 wajib lapor LHKPN IPC dan berdasarkan rekapitulasi penyampaian LHKPN 2019 per 20 Maret 2020 masih ada 22 wajib lapor LHKPN yang belum menyampaikan laporannya).

Prepare LHKPN in a timely manner in accordance with applicable laws and regulations. (There are 95 LHKPN mandatory reports in IPC and based on the recapitulation of submission of 2019 LHKPN as of March 20, 2020, there are still 22 LHKPN mandatory reports that have not been submitted).

Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan
Continuous Commitment to GCG aspect

Menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat waktu. (Terdapat 95 wajib lapor LHKPN IPC dan berdasarkan rekapitulasi penyampaian LHKPN 2019 per 20 Maret 2020 masih ada 22 wajib lapor LHKPN yang belum menyampaikan laporannya).

Submit LHKPN according to the applicable provisions in a timely manner. (There are 95 LHKPN mandatory reports in IPC and based on the recapitulation of submission of 2019 LHKPN as of March 20, 2020, there are still 22 LHKPN mandatory reports that have not been submitted).

Menyampaikan pelaporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK. (Terdapat 95 wajib lapor LHKPN IPC dan berdasarkan rekapitulasi penyampaian LHKPN 2019 per 20 Maret 2020 masih ada 22 wajib lapor LHKPN yang belum menyampaikan laporannya).

Submit periodic reports on the development of fulfilling the obligation to submit LHKPN to KPK. (There are 95 LHKPN mandatory reports in IPC and based on the recapitulation of submission of 2019 LHKPN as of March 20, 2020, there are still 22 LHKPN mandatory reports that have not been submitted).

	<p>Pemegang Saham menetapkan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir.</p> <p>Shareholders determine the definitive members of Board of Directors by the GMS no later than 30 (thirty) days after the end of term of office.</p>
	<p>Pemegang Saham menetapkan pemberhentian anggota Dewan Komisaris melalui keputusan Menteri BUMN selaku RUPS. Shareholders determine the dismissal of members of Board of Commissioners through the decision of the Minister of SOEs as a GMS.</p>
	<p>RUPS mengesahkan rancangan RJPP Perusahaan 2015-2019 sesuai ketentuan yang berlaku. The GMS endorses the Company's RJPP 2015-2019 draft in accordance with applicable regulations.</p>
<p>Aspek RUPS GMS aspect</p>	<p>RUPS mengesahkan RJPP secara tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan.</p> <p>The GMS endorses the RJPP in a timely manner, which is no later than 60 (sixty) days after the receipt of complete RJPP draft or before the starting of next RJPP period.</p> <p>Risalah RUPS Tahunan mencantumkan uraian penilaian kinerja Direksi secara individu. Minutes of the Annual GMS include descriptions of individual Directors' performance evaluations.</p> <p>Risalah RUPS <i>Audited</i> Tahun Buku 2018 tanggal 29 April 2019 tidak mencantumkan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara spesifik</p> <p>The minutes of Audited GMS for Fiscal Year 2018 dated April 29, 2019 did not include a specific evaluation of the performance of Board of Commissioners</p>
<p>Aspek Dewan Komisaris Board of Commissioners aspect</p>	<p>Program Kerja Dewan Komisaris memuat rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.</p> <p>Board of Commissioners' Work Program contains a plan for discussing the policies and implementation of the management of subsidiaries/joint ventures.</p> <p>Menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dengan memuat realisasi KPI Masing-masing Direksi. Submit the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report with the realization of KPI of each Director.</p> <p>Menyusun dan melengkapi Risalah rapat Dewan Komisaris dengan memuat evaluasi pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Prepare and complete the Minutes of Board of Commissioners meeting by evaluating the performance achievements of each Member of Board of Commissioners.</p> <p>Meningkatkan kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris. (Terdapat 2 anggota Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat di bawah 85%).</p> <p>Increase the presence of members of Board of Commissioners in the Board of Commissioners meeting. (There are 2 members of Board of Commissioners with the percentage of attendance in meetings below 85%).</p> <p>Melengkapi dokumentasi surat kuasa Dewan Komisaris apabila terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam setiap rapat Direksi dan Dewan Komisaris. (Belum diperoleh surat kuasa atas nama Sdr. R. Agus H. Purnomo sebagai bentuk ketidakhadiran dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris 24 Juli 2019).</p> <p>Complete documentation of the power of attorney for Board of Commissioners if there are members of Board of Commissioners who are not present at every meeting of Board of Directors and Board of Commissioners. (No power of attorney on behalf of R. Agus H. Purnomo as a form of his absence in the meeting of Board of Directors and Board of Commissioners on July 24, 2019).</p> <p>Menyusun dan menetapkan Program Kerja Komite yang memuat <i>self assessment</i> kinerja Komite. Develop and determine Committee's Work Program that includes a self-assessment of the Committee's performance.</p>



Aspek Direksi
Board of Directors
aspect

Mengesahkan *Draft IT Master Plan 2016-2020*.

Ratify the 2016-2020 IT Master Plan Draft.

Memenuhi seluruh target kinerja Direksi secara kolegal dalam KPI Perusahaan Tahunan (Capaian KPI Perusahaan tahun 2019 *unaudited* sebesar 89,18).

Meeting all Board of Directors' performance targets collegially in the Company's Annual KPI (Unaudited Company's KPI 2019 achievements of 89.18).

Mengesahkan *Draft Standar Mutu Layanan Pelabuhan*.

Ratify the Draft of Port Quality Standards.

Memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapaian target-target yang telah disepakati dalam KPI Perusahaan setiap tahun. (Terdapat KPI Perusahaan, Tingkat Kesehatan Perusahaan dan *Shareholder's Aspiration* (SHA) Tahun 2019 yang belum tercapai).

Meeting the expectations of shareholders through achieving the targets agreed in the Company's KPI every year. (There are Corporate KPIs, Company's Soundness Level and Shareholder's Aspiration (SHA) in 2019 that have not been achieved).

Meningkatkan Kinerja Perusahaan (sesuai KPI yang ditetapkan) dari tahun-tahun sebelumnya). (Realisasi KPI Perusahaan tahun 2019 sebesar 89,18 turun dibandingkan realisasi KPI Perusahaan tahun 2018 sebesar 100,64).

Improve Company Performance (in accordance with the established KPI) from previous years). (The realization of Corporate KPI in 2019 was 89.18, decreased compared to the realization of Corporate KPI in 2018 of 100.64.

Melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil sesuai dengan yang direncanakan dalam RKAP. (Realisasi penyaluran dana Program Kemitraan tahun 2019 sebesar 30 miliar dari target 68,38 miliar).

Carry out partnership programs with small businesses as planned in the RKAP. (Actual distribution of Partnership Program funds in 2019 amounted to 30 billion from the target of 68.38 billion).

Meningkatkan kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi maupun pada rapat gabungan bersama Dewan Komisaris. Increase the attendance of members of Board of Directors in Board of Directors meetings and joint meetings with Board of Commissioners.

Melaksanakan RUPS pengesahan RJPP secara tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan.

Carry out the GMS of RJPP ratification in a timely manner, which is no later than 60 (sixty) days after the receipt of complete RJPP draft or before the start of next RJPP period.

Rekomendasi Hasil Penilaian Tahun Buku 2018 dan Tindaklanjutnya

Recommendations of 2018 Fiscal Year Assessment and Follow-Up

Bab	Aspek Pengujian GCG Asesmen GCG Assessment Aspect	Jumlah Aol Asesmen Tahun Buku 2018 Number of Aol of 2018 Fiscal Year Assessment
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Continous Commitment to GCG	3
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholder and GMS/principal owner	6
III	Dewan Komisaris Board of Commissioners	2
IV	Direksi Board of Directors	5
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	1
Total Rekomendasi Total Recommendations		17

Penjelasan rinci dari rekomendasi-rekomendasi dan tindak lanjut hasil asesmen tahun buku 2018 atas penilaian penerapan GCG, dijelaskan di bawah ini:

Detailed explanation of the recommendations and follow-up to the results of 2018 fiscal year GCG assessment, is explained below:

Area of Improvement <i>Area of Improvement</i>	Tindak Lanjut <i>Follow-Up</i>
Mendorong seluruh pejabat wajib lapor LHKPN mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu.	Perseroan telah mendorong seluruh pejabat wajib lapor LHKPN mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu.
Encourage all LHKPN mandatory officials to prepare LHKPN in a timely manner.	The Company has encouraged all LHKPN mandatory officials to prepare LHKPN in a timely manner.
Mendorong seluruh pejabat wajib lapor LHKPN mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN kepada KPK secara tepat waktu.	Seluruh pejabat wajib lapor LHKPN telah mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN kepada KPK secara tepat waktu.
Encourage all LHKPN mandatory officials to comply with the obligation to submit LHKPN to KPK in a timely manner.	All LHKPN mandatory officials have complied with the obligation to submit LHKPN to KPK in a timely manner.
Mendokumentasikan laporan tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK secara berkala.	Perseroan telah Mendokumentasikan laporan tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK secara berkala.
Documenting report on the development in fulfilling the obligation to submit LHKPN to KPK periodically	The Company has documented report on the progress of fulfilling the obligation to submit LHKPN to KPK periodically.
Penetapan anggota Direksi oleh RUPS tidak melebihi 30 hari sejak masa jabatan berakhir.	Telah dikoordinasikan dengan Kementerian BUMN.
The appointment of members of Board of Directors by the GMS does not exceed 30 days from the end of term of office.	Has coordinated with the Ministry of SOEs.
Pemegang Saham memberikan pengesahan terhadap rancangan RJPP PT Pelindo II (Persero)	Telah dikoordinasikan dengan Kementerian BUMN.
Shareholders ratify the draft of PT Pelindo II (Persero) RJPP	Has coordinated with the Ministry of SOEs.
Pengesahan terhadap rancangan RJPP dan revisi RJPP oleh pemegang saham dilakukan tepat waktu yaitu tidak melebihi 60 hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap.	Telah dikoordinasikan dengan Kementerian BUMN.
Ratification of RJPP draft and revision of RJPP by the shareholders is carried out on time, which is not more than 60 days after the receipt of complete RJPP draft	Has coordinated with the Ministry of SOEs.
RUPS/Pemegang Saham menetapkan dan mengesahkan Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja individu Direksi.	Telah dikoordinasikan dengan Kementerian BUMN.
GMS/Shareholders stipulate and ratify the Management Contract which contains the individual Directors' performance targets.	Has coordinated with the Ministry of SOEs.
RUPS/Pemegang Saham memberikan penilaian Kinerja anggota Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi dengan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Direksi.	Telah dikoordinasikan dengan Kementerian BUMN.
GMS/Shareholders assess the performance of individual Directors based on Board of Directors' performance report by considering the Board of Commissioners' response over the Board of Directors' performance.	Has coordinated with the Ministry of SOEs.



Area of Improvement <i>Area of Improvement</i>	Tindak Lanjut <i>Follow-Up</i>
RUPS memberikan penilaian Kinerja Dewan Komisaris secara spesifik. GMS provides a specific evaluation of Board of Commissioners' Performance.	Telah dikoordinasikan dengan Kementerian BUMN. Has coordinated with the Ministry of SOEs.
Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris. Members of Board of Commissioners attend Board of Commissioners meetings.	Dewan Komisaris telah menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris. Board of Commissioners has attended Board of Commissioners meetings.
Mendokumentasikan surat kuasa yang dibuat oleh anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat Dewan Komisaris.	Perseroan telah mendokumentasikan surat kuasa yang dibuat oleh anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
Documenting power of attorney made by members of Board of Commissioners who are unable to attend Board of Commissioners meeting.	The Company has documented power of attorney made by members of Board of Commissioners who were unable to attend Board of Commissioners' meeting.
Meningkatkan pencapaian target kinerja Direksi dalam Kontrak Manajemen setiap tahun untuk seluruh aspek, termasuk indikator KPI (Ebitda) dan penyerapan investasi.	Perseroan telah meningkatkan pencapaian target kinerja Direksi dalam Kontrak Manajemen setiap tahun untuk seluruh aspek, termasuk indikator KPI (Ebitda) dan penyerapan investasi.
Increase the achievement of Directors' performance targets in Management Contract every year for all aspects, including KPI indicators (Ebitda) and investment absorption.	The Company has increased the achievement of Directors' performance targets in Management Contract every year for all aspects, including KPI (Ebitda) indicators and investment absorption.
Menyelesaikan tindak lanjut hasil audit dalam Profil Rekap Temuan Audit Tahun 2018 terkait fokus audit proses pengadaan dan implementasi kontrak maupun perjanjian IPC dengan anak Perusahaan.	Perseroan telah menindaklanjuti hasil audit dalam Profil Rekap Temuan Audit Tahun 2018 terkait fokus audit proses pengadaan dan implementasi kontrak maupun perjanjian IPC dengan anak Perusahaan.
Complete the follow-up of audit results in the 2018 Audit Finding Recap Profile related to the audit focus of procurement process and implementation of IPC's contracts and agreements with subsidiaries.	The Company has followed up on the audit results in the 2018 Audit Findings Recap Profile regarding the audit focus of procurement process and implementation of IPC's contracts and agreements with subsidiaries.
Memastikan pelaksanaan dan penyaluran anggaran kegiatan tanggung jawab sosial termasuk program Bina Lingkungan sesuai dengan rencana program dan anggaran yang ditetapkan dalam RKAP.	Perseroan telah melaksanakan dan menyalurkan anggaran kegiatan tanggung jawab sosial termasuk program Bina Lingkungan sesuai dengan rencana program dan anggaran yang ditetapkan dalam RKAP.
Ensure the implementation and distribution of social responsibility activities budget including the Community Development program in accordance with the program plan and budget specified in the RKAP.	The Company has carried out and distributed social responsibility activities budget including the Community Development program in accordance with the program plan and budget stipulated in the RKAP.
Memenuhi tingkat kehadiran masing-masing Direksi paling sedikit mencapai 85 % pada Rapat Direksi maupun pada rapat gabungan bersama Dewan Komisaris.	Tingkat kehadiran masing-masing Direksi pada tahun 2019 telah mencapai paling sedikit 85% pada Rapat Direksi maupun pada rapat gabungan bersama Dewan Komisaris.
Meet the attendance level of each Director at least 85% at Board of Directors' Meeting or at joint meeting with Board of Commissioners.	The level of attendance of each Director in 2019 has reached at least 85% at Board of Directors' Meeting and at joint meeting with Board of Commissioners.
RUPS mengesahkan/menyetujui RJPP dalam waktu kurang dari 60 hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berjalan.	RUPS telah mengesahkan/menyetujui RJPP dalam waktu kurang dari 60 hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berjalan.
GMS endorses/approves the RJPP in less than 60 days after the receipt of complete RJPP draft or before the start of next RJPP period.	The GMS has endorsed/approved the RJPP in less than 60 days after the receipt of complete RJPP draft or before the start of next RJPP period.
Menyempurnakan muatan dan kualitas <i>Annual Report</i> sehingga dapat meraih juara.	Pada tahun 2019, Perseroan telah memperoleh Juara 1 <i>Annual Report Award</i> Kategori BUMN Non Keuangan <i>Non-Listed</i> .
Improve the content and quality of the Annual Report in order to win the 1 st place.	In 2019, the Company won 1 st Place in the Annual Report Award for Non-Listed Non-Financial SOE category.

GCG ASSESSMENT BERDASARKAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD (ACGS)

IPC juga melakukan *assessment* terkait dengan implementasi GCG berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard yang merupakan parameter pengukuran praktik tata kelola yang disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF).

KRITERIA PENILAIAN

Komponen penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard adalah sebagai berikut:

1. Hak-Hak Pemegang Saham
2. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham
3. Peran Pemangku Kepentingan
4. Pengungkapan dan Transparansi
5. Tanggung Jawab Dewan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Pihak yang melakukan penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard tahun buku 2019 yaitu PT Multi Utama Indojasa (MUC Consulting Group).

SKOR PENILAIAN

Adapun pencapaian hasil GCG IPC berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard tahun buku 2019 adalah sebagai berikut.

GCG ASSESSMENT BASED ON ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD (ACGS)

IPC also conducted an assessment related to the implementation of GCG based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard which is a measurement parameter for governance practices agreed by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF).

ASSESSMENT CRITERIA

The components of ASEAN Corporate Governance Scorecard assessment are as follows:

1. Shareholder Rights
2. Equal Treatment of Shareholders
3. Role of Stakeholders
4. Disclosure and Transparency
5. Board Responsibilities

PARTIES THAT CONDUCT THE ASSESSMENT

The party conducting ASEAN Corporate Governance Scorecard assessment for 2019 fiscal year is PT Multi Utama Indojasa (MUC Consulting Group).

ASSESSMENT SCORE

The achievement of IPC GCG results based on the 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard is as follows.

Tabel Hasil Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard
Table - The Results of ASEAN Corporate Governance Scorecard Assessment

Komponen Penilaian <i>Components of Assessment</i>	Bobot Penilaian <i>Weight of Scoring</i>	Skor Penilaian <i>Assessment Score</i>
Level 1		
Hak-hak Pemegang Saham Shareholder Rights	10,00	9,05
Perlakuan setara terhadap Pemegang Saham Equal Treatment of Shareholders	15,00	11,79
Peran Pemangku Kepentingan Role of Stakeholders	15,00	13,85
Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	20,00	20,00
Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners	40,00	31,88
Total Level 1 Total Level 1	100,00	86,55
Level 2		
Bonus Bonus	26,00	8,00
Pinaliti Penalty	(57,00)	(5,00)



Tabel Hasil Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard
Table - The Results of ASEAN Corporate Governance Scorecard Assessment

Komponen Penilaian <i>Components of Assessment</i>	Bobot Penilaian <i>Weight of Scoring</i>	Skor Penilaian <i>Assessment Score</i>
Total Level 2 Total Level 2	26,00	3,00
Total Skor Total Score	126,00	89,74

REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUTNYA

Dari hasil penilaian GCG berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard untuk tahun buku 2019, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian bagi IPC untuk ditindaklanjuti agar pelaksanaan GCG di IPC semakin baik. Adapun *area of improvement* untuk tahun buku 2019 adalah sebagai berikut:

RECOMMENDATIONS AND FOLLOW-UP

From GCG assessment result that is based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2019, there are several things that must be followed up so that the implementation of GCG in the IPC is getting better. The areas of improvement for 2019 are as follows:

No.	Rekomendasi <i>Recommendations</i>
1	Undangan RUPS mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan (dalam rangka <i>full comply ASEAN CG Scorecard</i>). Invitation to the GMS includes the name of the appointed Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements (to be in full compliance with the ASEAN CG Scorecard).
2	Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur terkait pinjaman kepada Direksi/Dewan Komisaris baik melarang praktik ini atau memastikan bahwa transaksi telah dilakukan secara wajar dan dengan harga pasar (dalam rangka <i>full comply ASEAN CG Scorecard</i>). The company has policies which governs the loans to the Board of Directors / Board of Commissioners, either prohibiting this practice or ensuring that transactions have been carried out fairly and at market prices (to be in full compliance with the ASEAN CG Scorecard).
3	Perusahaan memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi atas kinerja perusahaan yang dihitung berdasarkan ukuran kinerja jangka pendek (dalam rangka <i>full comply ASEAN CG Scorecard</i>). The company has a policy of rewards / compensation for company performance which is calculated based on short-term performance measures (to be in full compliance with ASEAN CG Scorecard)
4	Website Perusahaan memuat Pemberitahuan RUPS dan/atau RUPSLB (dalam rangka <i>full comply ASEAN CG Scorecard</i>) Company's website contains the GMS and / or EGMS Notification (to be in full compliance with the ASEAN CG Scorecard)
5	Website Perusahaan mengungkapkan Anggaran Dasar Perusahaan (dalam rangka <i>full comply ASEAN CG Scorecard</i>). Company's website discloses Company's Articles of Association (to be in full compliance with the ASEAN CG Scorecard).
6	Komposisi Direktur/ Komisaris Independen memenuhi setidaknya 50% dari total Direksi/ Dewan Komisaris (dalam rangka <i>full comply ASEAN CG Scorecard</i>). The composition of Directors / Independent Commissioners fulfills at least 50% of the total Directors / Board of Commissioners (to be in full compliance with ASEAN CG Scorecard).
7	Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi sebagian besar terdiri dari Komisaris Independen (dalam rangka <i>full comply ASEAN CG Scorecard</i>). The composition of the Nomination and Remuneration Committee consists mainly of Independent Commissioners (to be in full compliance with the ASEAN CG Scorecard).
8	Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Seorang Komisaris Independen (dalam rangka <i>full comply ASEAN CG Scorecard</i>). The Nomination and Remuneration Committee is chaired by an Independent Commissioner (to be in full compliance with the ASEAN CG Scorecard).
9	Komite Audit dipimpin oleh Seorang Komisaris Independen (dalam rangka <i>full comply ASEAN CG Scorecard</i>). The Audit Committee is led by an Independent Commissioner (to be in full compliance with the ASEAN CG Scorecard).

No.	Rekomendasi Recommendations
10	<p>Anggota Komite yang berasal dari unsur Komisaris Independen memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi (dalam rangka <i>full comply</i> ASEAN CG Scorecard).</p> <p>Committee members who come from the elements of Independent Commissioners have an educational background and experience in accounting (to be in full compliance with the ASEAN CG Scorecard).</p>
11	<p>Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris menghadiri paling sedikit 75% dari total rapat Direksi dan Dewan Komisaris dalam setahun (dalam rangka <i>full comply</i> ASEAN CG Scorecard).</p> <p>All members of the Board of Directors and Board of Commissioners attend at least 75% of the total meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners in a year (to be in full compliance with the ASEAN CG Scorecard).</p>
12	<p>Sekretaris perusahaan diberikan pelatihan mengenai hukum (legal), akuntansi atau pelaksanaan kesekretariatan perusahaan (dalam rangka <i>full comply</i> ASEAN CG Scorecard).</p> <p>The corporate secretary is given legal training, accounting or corporate secretarial aspects (to be in full compliance with the ASEAN CG Scorecard).</p>
13	<p>Perusahaan memiliki standar yang terukur untuk menyelaraskan pengupahan basis kinerja dari Direktur Eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti pencadangan kembali dan bonus yang ditangguhkan (dalam rangka <i>full comply</i> ASEAN CG Scorecard).</p> <p>The company has measurable standards to align the performance base salary of Executive Directors and senior executives with company's long-term interests, such as reserve and deferred bonuses (to be in full compliance with ASEAN CG Scorecard).</p>
14	<p>Laporan Tahunan memuat pernyataan dari Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Audit terkait kecukupan pengendalian internal perusahaan/sistem manajemen risiko dalam laporan tahunan (dalam rangka <i>full comply</i> ASEAN CG Scorecard).</p> <p>The Annual Report contains statements from the Directors and the Board of Commissioners or the Audit Committee regarding the adequacy of company's internal control / risk management system (to be in full compliance with the ASEAN CG Scorecard).</p>
15	<p>Mengungkapkan tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama secara rinci (dalam rangka <i>full comply</i> ASEAN CG Scorecard).</p> <p>Disclose the duties and responsibilities of the President Commissioner in detail (to be in full compliance with the ASEAN CG Scorecard).</p>
16	<p>Perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara individu (dalam rangka <i>full comply</i> ASEAN CG Scorecard).</p> <p>The company discloses the criteria used in assessing the performance of the Board of Commissioners and Directors individually (to be in full compliance with the ASEAN CG Scorecard).</p>
17	<p>Melengkapi Anggaran Dasar dengan ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat (dalam rangka <i>full comply</i> ASEAN CG Scorecard).</p> <p>Completing the Articles of Association with provisions regarding the implementation of GMS that can be done through teleconferencing media, video conferences, or other electronic media facilities that allow all GMS participants to see and hear directly and participate in meetings (to be in full compliance with the ASEAN CG Scorecard).</p>
18	<p>Menerbitkan pemanggilan RUPS (dengan rincian agenda dan surat edaran yang jelas) yang diumumkan pada otoritas bursa, paling lambat 28 hari sebelum tanggal rapat dilakukan (dalam rangka <i>full comply</i> ASEAN CG Scorecard).</p> <p>Issue summons to the GMS (with detailed agenda and clear circular) announced to the stock exchange authority, no later than 28 days before the date of the meeting (to be in full compliance with ASEAN CG Scorecard).</p>
19	<p>Merilis atau menerbitkan laporan keuangan tahunan audited dalam waktu 60 hari sejak tahun buku berakhir (dalam rangka <i>full comply</i> ASEAN CG Scorecard).</p> <p>Release or publish audited annual financial statements within 60 days from the end of the financial year (to be in full full compliance with the ASEAN CG Scorecard).</p>
20	<p>Mempertimbangkan komposisi Dewan Komisaris dengan setidaknya satu orang Komisaris Independen yang berasal dari perempuan dan Direksi dengan setidaknya satu orang Direksi perempuan (dalam rangka <i>full comply</i> ASEAN CG Scorecard).</p> <p>Consider the composition of the Board with at least one woman as an Independent Commissioner and one woman as a Director (to be in full compliance with the ASEAN CG Scorecard).</p>
21	<p>Melengkapi pengungkapan dalam Laporan Tahunan terkait aspek kebijakan keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris serta perkembangan atas pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan keberagaman tersebut (dalam rangka <i>full comply</i> ASEAN CG Scorecard).</p> <p>Completing the members of Nomination and Remuneration and Risk Committee from Independent Commissioners (to be in full compliance with the ASEAN CG Scorecard).</p>
22	<p>Melengkapi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Risiko yang berasal dari Komisaris Independen (dalam rangka <i>full comply</i> ASEAN CG Scorecard).</p> <p>Furnish Committee members Nominations and Remuneration and Risks derived from Independent Commissioner (in order full comply ASEAN CG Scorecard).</p>



No.	Rekomendasi Recommendations
23	Memastikan proses identifikasi kandidat Direktur yang dilakukan oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko sejalan dengan arahan strategi Perusahaan yang ditetapkan (dalam rangka <i>full comply</i> ASEAN CG Scorecard). Ensure the process of identifying candidates for Directors carried out by the Nomination, Remuneration and Risk Committee in line with the direction of Company strategy (to be in full compliance with ASEAN CG Scorecard).
24	Perusahaan menggunakan jasa profesional dalam mencari kandidat Direksi/Dewan Komisaris (berdasarkan database Direksi maupun dari usulan pemegang saham) (dalam rangka <i>full comply</i> ASEAN CG Scorecard). The company uses professional services in finding candidates for Directors / Board of Commissioners (based on the database of Directors and from proposed shareholders) (to be in full compliance with ASEAN CG Scorecard).
25	Memenuhi jumlah Komisaris Independen lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah Komisaris (dalam rangka <i>full comply</i> ASEAN CG Scorecard). Meeting the number of Independent Commissioners more than 50% of the total number of Commissioners (to be in full compliance with the ASEAN CG Scorecard).
26	Tidak terdapat pelanggaran hukum yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. There are no violations of law relating to environmental issues.
27	Perusahaan tidak merevisi laporan keuangan tahun lalu dan alasan perubahan kebijakan akuntansi Company did not revise last year's financial statements and the reasons for changes of accounting policies

ASESMEN KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL

IPC telah melaksanakan evaluasi kinerja perusahaan berdasarkan pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN. Evaluasi ini mengacu pada standar Kriteria Penilaian Kinerja unggul (KPKU) BUMN yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui posisi IPC dalam mencapai perusahaan kelas dunia sekaligus mendapatkan skor KPKU yang merupakan salah satu indikator kinerja yang terdapat dalam KPI Direksi.

KPKU diadopsi dan diadaptasi dari *Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence* (MBCFPE), mengingat MBCFPE telah terbukti sebagai sistem pengelolaan kinerja perusahaan paling komprehensif yang dapat membuat sebuah perusahaan menjadi unggul.

Kriteria Penilaian Kinerja unggul (KPKU) merupakan landasan dan referensi dalam pengelolaan BUMN menuju pencapaian kinerja unggul. KPKU juga dapat dijadikan sebagai alat untuk pelaksanaan *self-assessment* pengelolaan BUMN dan pemberian umpan balik kepada masing-masing BUMN.

Selain itu, KPKU memiliki 3 (tiga) peran penting dalam memperkuat daya saing BUMN:

1. Membantu memperbaiki kapabilitas dan kinerja BUMN, baik finansial maupun non finansial;
2. Memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi mengenai praktik-praktik terbaik;
3. Berfungsi sebagai alat kerja untuk memahami dan mengelola kinerja dan untuk memandu perencanaan serta pembelajaran organisasi.

ASSESSMENT CRITERIA FOR EXCELLENCE PERFORMANCE ASSESSMENT

IPC has evaluated company performance based on SOE's Excellence Performance Assessment Criteria (KPKU). This evaluation refers to SOE standard Excellence Performance Evaluation Criteria (KPKU) issued by the Ministry of SOE No. S-08 / S.MBU / 2013 dated January 16, 2013. The evaluation was conducted to see the IPC position in becoming world-class companies and to get KPKU score as one of performance indicators in the Directors KPI.

KPKU was adopted and adapted from Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCFPE), as the MBCFPE has been proven to be the most comprehensive performance management system that is capable to make a company excel.

Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) is the basis and reference in managing SOEs to achieve excellent performance. The KPKU can also be used by SOE management as tool for self-assessment and providing feedback.

In addition, KPKU has 3 (three) important roles in strengthening SOE competitiveness:

1. Help improve the capabilities and performance of SOEs, both financial and non-financial;
2. Facilitating communication and sharing information about best practices;
3. Serves as tool to understand and manage performance and guide organizational planning and learning.

Pelaksanaan Asesmen KPKU dilakukan selama 5 (lima) hari kerja dimana agenda pelaksanaan asesmen sebagai berikut:

1. *On Desk* Asesmen;
2. *Opening Meeting* bersama Direksi dan pegawai IPC;
3. *Site Visit* dengan melakukan wawancara dengan Direksi, pemilik proses, serta *site visit* ke Cabang Palembang dalam rangka meninjau langsung implementasi dan *improvement* kinerja perusahaan dan operasional baik di kantor pusat dan cabang;
4. *Closing Meeting* bersama Direksi dan pegawai IPC.

KRITERIA PENILAIAN

Kriteria Kinerja unggul BUMN terdiri atas 7 (tujuh) kategori, yaitu:

1. Kepemimpinan;
2. Strategi;
3. Pelanggan;
4. Pengukuran, Analisis, dan Manajemen Pengetahuan;
5. Tenaga Kerja;
6. Operasional;
7. Hasil.

Evaluasi kinerja ini berdasarkan pada 2 (dua) dimensi penilaian, proses dan hasil. Faktor-faktor penilaian untuk masing-masing dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penilaian Proses

Faktor yang digunakan untuk menilai proses adalah Metode/ Sistem (*Approach*), Penerapan (*Deployment*), Pembelajaran (*Learning*), dan Integrasi (*Integration*) atau disingkat ADLI.

- a. "Metode/Sistem (*Approach*)" adalah metode/sistem yang didesain untuk melaksanakan pekerjaan. Penilaian mengacu pada: (1) Kesesuaian metode/sistem dengan persyaratan dalam KPKU BUMN dan lingkungan operasi perusahaan, (2) Efektivitas dari penggunaan metode/ sistem tersebut, (3) Sejauh mana metode/sistem dilakukan secara berulang (*repeatable*) dan didasarkan pada data dan informasi yang *reliable* (misalnya, terstruktur dan sistematis);
- b. "Penerapan (*Deployment*)" mengacu pada sejauh mana: (1) Metode/Sistem diterapkan sesuai dengan desainnya, (2) Metode/Sistem diterapkan secara konsisten, (3) Metode/ Sistem dilaksanakan oleh seluruh fungsi/unit kerja yang relevan sesuai dengan desainnya;

The KPKU Assessment is carried out for 5 (five) working days with the following agenda:

1. On Desk Assessment;
2. Opening Meeting with Board of Directors and employees of IPC;
3. Site Visit by interviewing Board of Directors and process owners; and site visit to Palembang Branch to directly observe the implementation and improvement of operational performance both at head office and branches;
4. Closing Meeting with Board of Directors and employees of IPC.

ASSESSMENT CRITERIA

The criteria for excellent performance of SOE consist of 7 (seven) categories:

1. Leadership;
2. Strategy;
3. Customers;
4. Measurement, Analysis, and Knowledge Management;
5. Labor;
6. Operational;
7. Results.

Performance evaluation is based on 2 (two) dimensions, process and results. The assessment factors for each dimensions are as follows:

1. Process Assessment Factors

The factors used are the Method / System (*Approach*), Implementation (*Deployment*), Learning (*Learning*), and Integration (*Integration*) or abbreviated as ADLI.

- a. "Method / System (*Approach*)" is a method / system designed to carry out the work. Assessment refers to: (1) The suitability of the method / system with the requirements of SOE KPKU and company's operating environment, (2) The effectiveness of the use of the method / system, (3) The extent to which the method / system is repeated (*repeatable*) and is based on reliable data and information (for example, structured and systematic); "Deployment" refers to the extent to which: (1) Method/System is applied according to its design, (2) Method/System is applied consistently, (3) Method/System is implemented by all function/work unit relevant according to design;
- b. "Deployment" refers to the extent to which: (1) Method / System is implemented in accordance with its design, (2) Method / System is applied consistently, (3) Method / System is implemented by all functions / work units that are relevant according to the design;



- c. "Pembelajaran (*Learning*)" mengacu pada: (1) Penyempurnaan Metode/sistem melalui siklus evaluasi dan perbaikan (*improvement*), (2) Inovasi metode/sistem untuk mendorong perubahan yang bersifat terobosan (*breakthrough*), (3) Berbagi hasil penyempurnaan dan inovasi terhadap metode/sistem kepada unit-unit kerja lain dan pemilik proses lainnya yang relevan dalam perusahaan;
 - d. "Integrasi (*Integration*)" mengacu pada: (1) Keselarasan sistem/metode dengan kebutuhan perusahaan. (2) Ukuran, informasi dan sistem perbaikan telah saling melengkapi/saling bersesuaian pada lintas unit kerja dan lintas proses. (3) Program kerja, proses, hasil, analisis, pembelajaran, dan tindakan, diharmonisasikan di lintas proses dan lintas unit kerja untuk mendukung tercapainya sasaran perusahaan.
2. Faktor Penilaian hasil-hasil faktor yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil perusahaan adalah *Level*, *Trend*, *Comparison* dan *Integration* (LETICI).
 - a. "Level" mengacu pada: tingkat pencapaian kinerja saat ini dibandingkan dengan target tahun ini maupun realisasi pencapaian tahun sebelumnya;
 - b. "Trend" mengacu pada: (1) Tingkat peningkatan kinerja atau kemampuan mempertahankan kinerja yang sudah baik (yakni, kecuraman data trend) dari waktu ke waktu (minimum dalam 3 (tiga) tahun terakhir), (2) Keluasan (tingkat penerapan) dari hasil hasil kinerja;
 - c. "Comparison" mengacu pada: (1) Perbandingan kinerja perusahaan relatif terhadap perbandingan yang sesuai misalnya, pesaing atau perusahaan dalam industri sejenis, (2) Perbandingan kinerja perusahaan relatif terhadap *benchmarks* atau pemimpin industrinya, atau dengan perusahaan kelas dunia;
 - d. "Integration" mengacu pada: (1) ukuran hasil-hasil yang terkait persyaratan kinerja pelanggan, produk, pasar, proses, dan program kerja utama. (2) hasil-hasil yang meliputi indikator yang valid tentang kinerja mendatang. (3) hasil-hasil diharmonisasikan secara lintas proses dan lintas unit untuk mendukung sasaran perusahaan.
2. Result Rating Factors. the factors used to evaluate company results are Level, Trend, Comparison and Integration (LETICI).
 - a. "Level" refers to: the current level of performance compared to this year's target and previous year's realization;
 - b. "Trend" refers to: (1) The level of improvement in performance or ability to maintain good performance (ie, steepness of trend data) over time (minimum in the last 3 (three) years), (2) The Extent (level of application) of performance results;
 - c. "Comparison" refers to: (1) Comparison of company performance relative to an appropriate comparison for example, competitors or companies in similar industries, (2) Comparison of company performance relative to benchmarks or industry leaders, or with world-class companies;
 - d. "Integration" refers to: (1) measurement of results related to the performance requirements of customers, products, markets, processes and key work programs. (2) results which include valid indicators of future performance. (3) the results are harmonized across processes and units to support the company's goals.

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Sesuai dengan Surat Forum Ekselen BUMN (FEB) Nomor FEB-068.ASS.KPKU.II.2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Ketentuan Asesmen KPKU BUMN Tahun 2019 pelaksanaan Asesmen KPKU di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dilaksanakan pada tanggal 15–22 Juni 2019. Adapun pihak yang menjadi Asesor sesuai dengan Surat Forum Ekselen BUMN (FEB) Nomor

PARTIES CONDUCTING THE ASSESSMENT

Pursuant to the Letter of Forum Ekselen BUMN (FEB) Number FEB-068.ASS.KPKU.II.2019 dated February 19, 2019 concerning Provisions for BUMN KPKU Assessment in 2019, the implementation of KPKU Assessment in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was carried out on June 15-22, 2019. The assessors are in accordance with Forum Ekselen BUMN (FEB) Letter Number

FEB-250.BA.V.2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal penugasan Asesor KPKU BUMN 2019 adalah sebagai berikut:

FEB-250.BA.V.2019 dated May 24, 2019 regarding the assignment of 2019 BUMN KPKU Assessors as follows:

No.	Nama Name	Instansi Agency	Posisi Position	Dasar Penugasan Basic Assignment
1	Wedy Hidayat	PT Telkom Indonesia - Purnabakti	Lead Asesor Lead Asessor	Surat Forum Ekselen BUMN (FEB) Nomor: FEB-250.BA.V.2019 tanggal 24 Mei 2019 Letter of SOE Excellence Forum (FEB) Number: FEB-250.BA.V.2019 dated May 24, 2019
2	Wartono	PT Telkom Indonesia - Purnabakti	CO-Lead	Surat Forum Ekselen BUMN (FEB) Nomor: FEB-250.BA.V.2019 tanggal 24 Mei 2019 Letter of SOE Excellence Forum (FEB) Number: FEB-250.BA.V.2019 dated May 24, 2019
3	Andri Rohim	PT Nindya Karya (Persero)	Member Team	Surat Keluar PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: PW.06.01/31/5/2/KIN/REN/PI.II-19 tanggal 31 Mei 2019 Outgoing Letter of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number: PW.06.01/31/5/2/KIN/REN/PI.II-19 dated May 31, 2019
4	Tanti Hadianti	PT Angkasa Pura II (Persero)	Member Team	Surat Keluar PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: PW.06.01/11/6/1/KIN/REN/PI.II-19 tanggal 11 Juni 2019 Outgoing Letter of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number: PW.06.01/11/6/1/KIN/REN/PI.II-19 dated June 11, 2019
5	Asfia Ruslan	PT ANTAM, Tbk	Member Team	Surat Keluar PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: PW.06.01/31/5/1/KIN/REN/PI.II-19 tanggal 31 Mei 2019 Outgoing Letter of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number: PW.06.01/31/5/1/KIN/REN/PI.II-19 dated May 31, 2019

SKOR PENILAIAN

Berdasarkan hasil asesmen oleh Asesor, di tahun 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memperoleh skor 616,75 (*Emerging Industry Leader*) dimana nilai tersebut lebih tinggi dari target 2019 yaitu 610.

ASSESSMENT SCORE

Based on the examinations results by the Assessor, in 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) obtained a score of 616.75 (*Emerging Industry Leader*) which was higher than the 2019 target of 610.

Skor KPKU KPKU Score	2019		2018		2017	2016	2015
	616,75	Emerging Leader	593,5	Emerging Leader	553,5	Good Performance	532,25
							479,25
							Good Performance

REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUTNYA

Dari *feedback report* KPKU tahun 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mendapat 58 *Opportunity For Improvement* (OFI) yang perlu ditindaklanjuti di tahun 2020. *Action For Improvement* untuk menindaklanjuti OFI tersebut saat telah dituangkan kedalam RKM tahun 2020. Adapun pada tahun 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) juga telah menindaklanjuti 71 OFI yang diperoleh dari hasil asesmen KPKU tahun 2018.

RECOMMENDATIONS AND FOLLOW-UP

From KPKU 2019 *feedback report*, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) received 58 *Opportunity For Improvement* (OFI) to be followed up in 2020. The *Action for Improvement* to follow up the OFI has been stipulated in the 2020 RKM. As for 2019, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has also followed up 71 OFIs from the results of 2018 KPKU assessment.



TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERSEROAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



Sebagai salah satu upaya IPC menuju *Green Port*, Perseroan mengeluarkan Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan No. IPC/SMK3L/M-01 pada tanggal 24 April 2019. Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan ini menguraikan penerapan persyaratan standar Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015.

Pada tahun 2019, Cabang Pelabuhan Bengkulu dan Pelabuhan Sunda Kelapa memperoleh penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

As one of IPC's efforts towards Green Port, the Company issued Environmental Management System Guidelines No. IPC/SMK3L/M-01 on April 24, 2019. This Environmental Management System Guidelines described the application of ISO 14001: 2015 Environmental Management System standard requirements.

In 2019, Bengkulu and Sunda Kelapa Port Branch received the Occupational Safety and Health Management System award given by the Ministry of Manpower.



TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

Sebagai sebuah BUMN yang harus memberikan kontribusi positif bagi negeri, IPC memandang keberlanjutan dalam bisnis kepelabuhanan sebagai segenap upaya untuk menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan yang sejalan dengan kerangka pertumbuhan ekonomi nasional. Perseroan memfasilitasi kegiatan yang menciptakan peluang kerja dan berusaha bagi banyak orang, melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, mencegah pencemaran dan melakukan perlindungan lingkungan serta terlibat dalam upaya pengembangan masyarakat di sekitar wilayah kerja Perseroan.

KOMITMEN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa keberlanjutan usaha sangat bergantung pada terciptanya hubungan saling menguntungkan antara seluruh pemangku kepentingan, baik eksternal maupun internal termasuk masyarakat di sekitar wilayah beroperasi melalui perilaku transparan dan etis. Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada para Pemangku Kepentingan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dimiliki berbagai kebijakan Perseroan dalam pembangunan berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

1. Surat Keputusan Direksi IPC Nomor: HK.568/30/12/7/PI.II-16 tentang Pengembangan Karyawan di Lingkungan IPC;
2. Surat Keputusan Direksi IPC Nomor: HK.56/6/1/PI.II-13 tentang Pemeliharaan dan Pelayanan Kesehatan bagi Karyawan dan Pensiunan Beserta Keluarganya di Lingkungan IPC;
3. Surat Keputusan Direksi IPC Nomor: KP.07.02/24/4/1/KRF/UT/PI.II-18 tentang Penghasilan bagi Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
4. Surat Keputusan Direksi IPC Nomor MB.01/2/12/1/LMS/UT/PI.II-19 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan, dan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); dan
5. Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.568/19/1/2/PI.II-17 Tanggal 19 Januari 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Pelanggan.

As an SOE that must contribute positively to the country, IPC looks at sustainability in the port business as all efforts to become a world-class port manager that excels in operations and services in line with the national economic growth framework. The Company facilitates activities that create employment and business opportunities for many people, protects human health and safety, prevents pollution and carries out environmental protection and is involved in efforts to develop communities around the Company's work area.

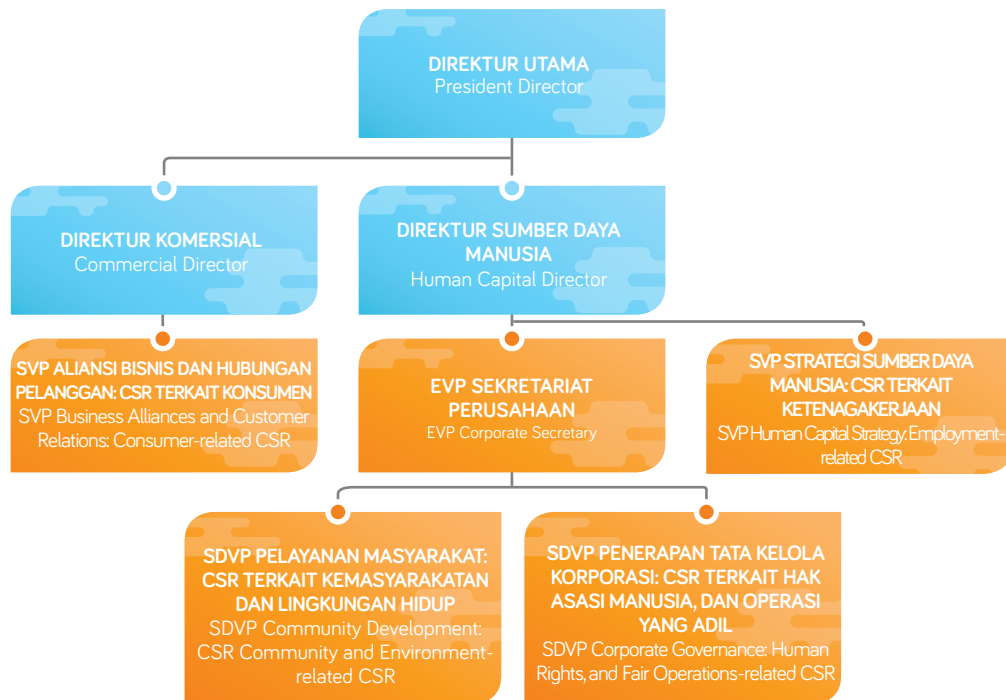
COMMITMENT TO SOCIAL RESPONSIBILITY

The Company is fully aware that business sustainability is highly dependent on the creation of mutually beneficial relationships between all stakeholders, both external and internal, including communities around the operating area, through transparent and ethical behavior. The Company is committed to implementing the principles of transparency and accountability to stakeholders. This is represented by the Company's sustainable development policies. These policies include:

1. IPC Board of Directors Decree number: HK.568/30/12/7/PI.II-16 concerning Employee Development in IPC;
2. IPC Board of Directors Decree number: HK.56/6/1/PI.II-13 concerning Maintenance and Health Services for Employees and Retirees and Their Families in IPC;
3. IPC Board of Directors Decree number: KP.07.02/24/4/1/KRF/UT/PI.II-18 concerning Income for Employees in PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
4. Decree of IPC Board of Directors No. MB.01/2/12/1/LMS/UT/PI.II-19 concerning Guidelines for Implementing Partnership Programs, Community Development Programs, and Corporate Social Responsibility (CSR) Programs within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); and
5. Board of Directors Decree number: HK.568/19/1/2/PI.II-17 dated January 19, 2017 concerning Guidelines for Managing Customer Relations.

Organisasi dan pengorganisasian inisiatif tanggung jawab sosial Perseroan disajikan pada bagan di bawah ini:

The Corporate social responsibility organization and organizing initiatives can be seen in in the chart below:



METODE DAN LINGKUP *DUE DILIGENCE* TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PERSEROAN

Untuk mendukung keberlanjutan bisnis Perseroan yang berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, IPC terus melaksanakan aktivitas berkelanjutan sebagai tanggung jawab sosial Perseroan yang memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif pada kegiatan yang dilakukan. Perseroan senantiasa memastikan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan telah memenuhi prinsip:

1. Memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Memenuhi harapan para *stakeholder*;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Konsisten dengan norma perilaku internasional;
5. Terintegrasi ke seluruh kegiatan usaha dan hubungan kerja sama Perseroan;
6. Mendorong perilaku bertanggung jawab pada seluruh bagian organisasi.

DUE DILIGENT METHODS AND SCOPE ON THE SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

To support the Company's business continuity that is oriented towards economic, social and environmental aspects, IPC continuously conduct sustainable activities as part of its corporate social responsibility that have a positive impact and reduces any negative impact on the activities carried out. The Company always ensures that the Company's social responsibility activities meet the principles of:

1. Contributing towards sustainable development, including community health and welfare;
2. Meeting the expectations of stakeholders;
3. Complying with laws and regulations;
4. Consistent with international behavioral norms;
5. Integrated with all business activities and Company cooperative relations;
6. Encouraging responsible behavior in all parts of the organization.



Oleh karena itu, Perseroan telah memiliki *due diligence* dari kegiatan tanggung jawab Perseroan nya yang meliputi:

- Survei kepuasan karyawan;
- Survei pelanggan;
- Survei kepuasan penyedia;
- *Focus Group Discussion*;
- Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta Laporan Manajemen Triwulanan.

Perseroan telah menyediakan sarana penyampaian keluhan pelanggan dengan berbagai saluran di masing-masing Cabang Pelabuhan. Perseroan melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan jasa kepelabuhanan dari perspektif pelanggan dengan survei kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dalam hal ini, survei pelanggan dilakukan oleh pihak ketiga untuk menjaga transparansi, independensi dan akuntabilitas hasil. Responden yang dipilih adalah pelanggan yang menggunakan layanan jasa kapal, layanan bongkar muat peti kemas, bongkar muat barang *non* peti kemas, serta layanan terminal penumpang yang merupakan kriteria survei.

STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PERSEROAN

IPC mengidentifikasi pemangku kepentingannya berdasarkan kepentingan dan hubungannya dengan Perseroan, yakni pelanggan, Pemegang Saham dan investor, Insan, pemerintah, mitra kerja, media massa, masyarakat dan asosiasi. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, keterlibatan Pemangku Kepentingan IPC dapat dilihat pada tabel berikut:

Therefore, the Company performs due diligent on its corporate responsibility activities through:

- Employee satisfaction survey;
- Customer survey;
- Supplier satisfaction survey;
- Focus group discussion;
- Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and Quarterly Management Reports.

The Company provides a means for delivering customer complaints through various channels in each Port Branch. The Company monitors and evaluates the performance of port services from a customer's perspective with customer satisfaction and loyalty surveys. Customer surveys are carried out by third parties to maintain transparency, independence and accountability of results. The selected respondents are customers who use ship services, container loading and unloading services, loading and unloading of container goods, and passenger terminal services as survey criteria.

IMPORTANT STAKEHOLDERS THAT ARE SOCIALLY, ECONOMICALLY, AND ENVIRONMENTALLY IMPACTED BY OR AFFECTED THE COMPANY'S ACTIVITIES

IPC has identified its stakeholders based on their interests and relationships with the Company, namely customers, Shareholders and Investors, insan IPC, government, work partners, mass media, society and associations. Based on this identification, the involvement of IPC stakeholders can be seen in the following table:

Pemangku Kepentingan <i>Stakeholders</i>	Topik Utama yang Diajukan <i>Diajukan Main Topics</i>
Pelanggan Customers	Hubungan komersial/ <i>customer retention</i> /kualitas layanan Commercial relations/ <i>customer retention</i> /service quality
Pemegang Saham dan Investor Shareholders and Investors	Dividen/pengembangan usaha/tata kelola/manajemen Dividends/ business development/governance/management
Insan Insan IPC	Ketenagakerjaan/kesejahteraan Employment/welfare
Pemerintah Government	<i>Sustainable Sinergi, Bekerja Nyata Untuk Negeri</i> Sustainable Synergy, Concrete Works for the Country
Mitra Kerja Business Partners	Hubungan komersial Commercial relations
Media Massa Mass Media	Kinerja usaha/tata kelola/keterbukaan informasi Business performance/governance/information disclosure
Masyarakat CSR implementation	Pelaksanaan program Program implementation
Asosiasi Association	<i>Sustainable Sinergi, Bekerja Nyata Untuk Negeri</i> Sustainable Synergy, Concrete Works for the Country

ISU PENTING SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERSEROAN

Dalam memaparkan isu-isu, data dan informasi terkini yang relevan dengan hak para Pemangku Kepentingan, IPC melakukan *Focus Group Discussion* kepada para Pemangku Kepentingan. Adapun isu-isu penting sosial, ekonomi dan lingkungan adalah sebagai berikut:

SOCIAL, ECONOMY, AND ENVIRONMENTAL IMPORTANT ISSUES RELATED TO THE IMPACT OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

In presenting the latest issues, data and information that are relevant to the rights of Stakeholders, IPC carried out a Focus Group Discussions to Stakeholders. The important social, economic and environmental issues are as follows:

Isu Penting <i>Important Issues</i>	Keterangan <i>Description</i>
Kinerja Ekonomi <i>Economic Performance</i>	Menggambarkan pencapaian dan kinerja IPC selama tahun pelaporan. <i>Describe IPC's achievements and performance during the reporting year.</i>
Anti Korupsi <i>Anti Corruption</i>	Menggambarkan komitmen IPC dalam mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan <i>fraud</i> . <i>Describe IPC's commitment to creating a workplace that is clean from fraud.</i>
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan <i>Environmental Protection and Management</i>	Menggambarkan komitmen IPC dalam mewujudkan <i>green port</i> (pelabuhan yang ramah lingkungan) baik pada kegiatan Perseroan (<i>office</i>) maupun operasional di lapangan untuk menciptakan <i>sustainability</i> Perseroan dan mencapai <i>world class port</i> . <i>Describe IPC's commitment in realizing green port (environmentally friendly port) both in office and operational activities in the field to create Corporate sustainability and achieve world class port.</i>
Keselamatan dan Kesehatan Kerja <i>Occupational Health and Safety</i>	Menggambarkan Komitmen IPC dalam mengendalikan risiko kecelakaan di tempat kerja yang dapat berpengaruh produktivitas. <i>Describe IPC's commitment to controlling the risk of accidents in the workplace that can affect productivity.</i>
Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training</i>	Menggambarkan Komitmen IPC dalam memberikan pelatihan serta peningkatan kompetensi secara merata, aktif dan berkesinambungan untuk menciptakan sumber daya manusia kompeten, berkualitas dan berkinerja tinggi. <i>Describe IPC's Commitment to providing training and competency enhancement evenly, actively and continuously to create competent, high quality and high-performing human capital.</i>
Masyarakat Setempat <i>Local Community</i>	Menggambarkan Komitmen IPC untuk menopang kesejahteraan masyarakat setempat melalui bimbingan ataupun bantuan. <i>Describe IPC's Commitment to supporting the welfare of local community through guidance or assistance.</i>
Sosial Ekonomi <i>Socio-economic</i>	Menggambarkan Komitmen IPC dalam memberikan kebutuhan pelanggan dan menerapkan program-program yang fokus dan berorientasi pelanggan. <i>Describe IPC's commitment to providing customer needs and implementing focused and customer-oriented programs.</i>

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

Perseroan juga melakukan *review* terhadap seluruh regulasi terkait isu-isu penting tanggung jawab sosial. Perseroan telah melaksanakan tanggung jawab sosial yang merupakan kewajiban dan yang melebihi kewajiban dengan baik. Peraturan-Peraturan yang telah dipatuhi oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:

SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Company also reviews all regulations related to important social responsibility issues. The Company carries out social responsibility as an obligation and exceeds its obligations well. The regulations that the Company have been complied with, include:



Kegiatan Activity	Dasar Regulasi Basic regulations
Ketenagakerjaan Employment	Undang- Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.
Keselamatan Kerja Work Safety	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 01 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. • Law No. 01 of 1970 concerning Occupational Safety and Health. • Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems.
Lingkungan Hidup Nature Environment	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Partnership Program and Community Development Program	Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/ MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Minister of SOE Regulation PER-03/MBU/12/2016 dated December 16, 2016 concerning Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/ MBU/07/2015 on the Partnership Program and the Community Development Program for State-Owned Enterprises.
Program Anti Korupsi Anti-Corruption Program	Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law No. 20 of 2001 concerning Amendment to Law No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption Crimes.

STRATEGI DAN PROGRAM KERJA

Isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan telah dikelola dengan baik oleh Perseroan dengan dimilikinya rencana kerja dan anggaran yang relevan. Strategi CSR menekankan pada upaya menciptakan manfaat bagi Perseroan, *Stakeholders* dan pembangunan berkelanjutan. Perseroan menitikberatkan pengelolaan isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Rencana Kerja Manajemen terkait dengan program kemitraan meliputi upaya preventif dan upaya penyehatan kembali. Upaya preventif merupakan usaha pencegahan meningkatnya pinjaman macet yang dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pinjaman (termasuk proses evaluasi dan analisis yang akurat serta pemberlakuan jaminan) serta optimalisasi dan pengintensifan fungsi Pembinaan, *Monitoring* dan Penagihan Langsung untuk memantau perkembangan usaha Mitra Binaan dan kedisiplinan Mitra Binaan dalam penggunaan dana pinjaman dan dalam pengembalian pinjaman. Upaya penyehatan kembali pinjaman macet dilakukan melalui prosedur *Reschedulling* (penjadwalan kembali) dan *Reconditioning* (penyesuaian persyaratan) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/07/2017/ tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

STRATEGY AND WORK PROGRAM

Social, economic and environmental issues have been well managed by the Company with the right relevant work plans and budgets. The CSR strategy emphasizes the efforts required to create benefits for the Company, *Stakeholders* and sustainable development. The Company emphasizes social, economic and environmental management through the partnership and community development programs. The partnership program management Work Plan covers preventive efforts and restructuring efforts. Preventive measures are taken to prevent any increase in bad loans made by applying the precautionary principle during loan disbursements (using an accurate evaluation and analysis process and enforcing guarantees), and optimizing and intensifying the guidance, direct monitoring and Billing functions to monitor the Partners' business development and discipline in their use of loan funds and its repayment. efforts for restructuring bad loans are made by rescheduling and reconditioning in accordance with the provisions in the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-02/MBU/07/2017 dated July 5, 2017 on the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program State-Owned Enterprises with Small Business and Community Development Program.

Rencana Kerja Manajemen terkait dengan program Bina Lingkungan disusun Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/07/2017/ tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, manajemen telah menyalurkan bantuan Program Bina Lingkungan meliputi 7 objek bantuan, yaitu:

1. Bantuan kepada Korban Bencana Alam;
2. Bantuan Pendidikan dan atau Pelatihan;
3. Bantuan Peningkatan Kesehatan;
4. Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum;
5. Bantuan Sarana Ibadah;
6. Bantuan Pelestarian Alam;
7. Bantuan Sosial Masyarakat Pengentasan Kemiskinan.

Sasaran Program Bina Lingkungan adalah masyarakat sekitar Perseroan dengan sifat bantuan untuk pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan terciptanya pola hubungan yang harmonis dan bersifat mutualisme (saling menguntungkan) yaitu dengan terciptanya iklim yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan usaha dan pengamanan asset Perseroan (*assets safeguarding*).

Selain rencana kerja jangka pendek, Perseroan juga telah menyusun *Roadmap* kebijakan implementasi CSR yang dimulai pada tahun 2018 hingga 2020 yang sejalan dengan *Roadmap Corporate*, seperti yang diuraikan di atas. Dalam *roadmap* telah ditetapkan sasaran untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 yaitu *Synergize, Energize dan Sustainable*.

Sedangkan upaya *Stakeholders engagement* dan meningkatkan *stakeholders value* adalah sebagai berikut:

The Community development Program management Work Plan was prepared in accordance with the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-02/ MBU/07/2017 dated July 5, 2017 on the Second Amendment to the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-09/MBU/07/2015 concerning the SOE Small Business Partnership and Community Development Program. The management has distributed Community development Program assistance covering 7 areas of assistance, including:

1. Assistance to Victims of natural disasters;
2. Education and/or training assistance;
3. Health Improvement assistance;
4. Assistance for Public facilities and Infrastructure development;
5. Place of worship facilities;
6. Nature Conservation assistance;
7. Social assistance for poverty alleviation.

The target of the Community development Program are communities located near the Company using the assistance for community empowerment so as to create a pattern of harmonious and mutually beneficial relationships, namely by creating a conducive climate for the continuity of business activities and safeguarding of Company assets.

As the short-term work plan, the Company has also compiled a roadmap for implementing its CSR policies covering 2018 to 2020 in line with the Corporate roadmap, as described above. In the roadmap, the targets set for 2018, 2019 and 2020 are called *Synergize, Energize and Sustainable*.

Whereas the efforts for *Stakeholders engagement* and increasing *stakeholder value* are as follows:



Pemangku Kepentingan Stakeholders	Metode Pelibatan Method of Engagement	Frekuensi Frequency
Pelanggan Customer	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Customer Gathering</i> di masing-masing Cabang Pelabuhan; 2. Kunjungan ke pelanggan potensial (<i>customer visit</i>); 3. <i>Coffee Morning</i> di masing-masing Cabang Pelabuhan; 4. <i>Customer Award</i> yang diselenggarakan secara terpusat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal 1 (satu) tahun 1 (satu) kali di tiap Cabang Pelabuhan; 2. Dalam satu tahun minimal 2 (dua) kali kunjungan ke setiap cabang dimana satu kali kunjungan dapat mencakup 6 (enam) kali pertemuan dengan pelanggan; 3. 1 (satu) tahun 4 (empat) kali di tiap Cabang Pelabuhan; 4. 1 (satu) tahun 1 (satu) kali di kantor pusat.
Pemegang Saham dan Investor Shareholders and Investors	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	Minimal 2 (dua) pertemuan dalam 1 (satu) tahun At least 2 (two) meetings per year
Karyawan Employee	Pertemuan dengan Serikat Pekerja Meeting with Workers' Union	Minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun At least 4 (four) meetings per year
Pemerintah Government	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Stakeholders Gathering</i> di Museum Maritim tanggal 20 Februari 2020; 2. <i>Coffee Morning</i> di masing-masing Cabang Pelabuhan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) kali dalam setahun; 2. 1 (satu) tahun 4 (empat) kali disetiap Cabang Pelabuhan.
Mitra Kerja Business Partners	Proses Operasional Operational Process	Sepanjang tahun Throughout the year
Media Massa Mass Media	Konferensi Pers/Siaran Pers/Keterbukaan Informasi Disclosure	Sepanjang tahun Throughout the year
Masyarakat Public	Penerapan CSR Implementation of CSR	Sepanjang tahun Throughout the year
Asosiasi Associates	<i>Stakeholders Gathering</i> di Museum Maritim. Stakeholders Gathering at the Maritime Museum.	1 (satu) kali dalam setahun. 1 (one) time per year

PROGRAM YANG MELEBIHI TANGGUNG JAWAB MINIMAL PERSEROAN

IPC memiliki program kerja yang melebihi tanggung jawab minimal di antaranya adalah:

- Kapal Pengangkut Sampah dan Mobil Penyapu Jalan (*Road Sweeper*);
- Penyulingan Air Laut (*Reverse Osmosis*);
- Pengelolaan Limbah Kapal (*Reception Facility*).

PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Selama tahun 2019 IPC telah melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk Program Kemitraan sebesar Rp30 miliar dan Program Bina Lingkungan sebesar Rp24,27 miliar. Sedangkan untuk pembiayaan tanggung jawab sosial di luar Program Kemitraan dan Bina Lingkungan melekat pada tiap-tiap kegiatan operasional yang terkait.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IS MORE THAN JUST AN OBLIGATION

IPC has work programs that exceed minimal obligation, such as:

- Kapal Pengangkut Sampah dan Mobil Penyapu Jalan (*Road Sweeper*);
- Penyulingan Air Laut (*Reverse Osmosis*);
- Pengelolaan Limbah Kapal (*Reception Facility*).

FINANCING AND BUDGET OF SOCIAL RESPONSIBILITY

In 2019, IPC has carried out the Partnership and Community Development Program with costs incurred for the Partnership Program of Rp30 billion and the Community Development Program of Rp24.27 billion. While the financing for social responsibility other than the Partnership and Community Development Program, is inherent in each related operational activity.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO HUMAN RIGHTS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

IPC memiliki komitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait HAM meliputi pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin meninggalkan pekerjaan. Perseroan juga telah memiliki sarana penanganan keluhan kesah Karyawan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perseroan dengan Serikat Karyawan Pelabuhan Indonesia II.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Dalam rumusan terhadap hak asasi manusia didasari dalam pengelolaan hubungan industrial dimulai dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memayungi kepentingan Karyawan dan Perseroan dalam aspek ketenagakerjaan. Dengan ruang lingkup yakni hubungan kerja (meliputi pengakuan para pihak, jaminan para pihak, kewajiban dan fasilitas Serikat Karyawan), waktu kerja, serta keluhan kesah, Bipartit dan Tripartit.

RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Perseroan menargetkan untuk senantiasa menjalankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini ditujukan untuk membina hubungan industrial secara proporsional serta menciptakan hubungan yang sinergis, *mutual understanding*, *mutual respect*, *mutual trust*, dan *mutual benefit*. Selain itu, kegiatan tanggung jawab terkait dengan hak asasi manusia diharapkan akan membawa dampak positif bagi peningkatan produktivitas dan kinerja Perseroan, sehingga pada akhirnya dapat membawa pengaruh kepada peningkatan kesejahteraan karyawan sesuai dengan harapan *Stakeholder*.

PELAKSANAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Kegiatan-kegiatan dalam tanggung jawab sosial Perseroan terkait hak asasi manusia meliputi:

1. Pengakuan dan Jaminan Bagi Serikat Pekerja
Perseroan telah mengakui bahwa Serikat Pekerja adalah organisasi Karyawan yang didirikan secara sah yang mewakili anggotanya untuk melakukan koordinasi, konsultasi dan perundingan dengan manajemen mengenai hubungan

COMMITMENT AND POLICIES

IPC is fully committed to the enforcement of Human Rights (HAM). Social responsibility related to human rights includes prevention of acts of discrimination, freedom of association, work time arrangements, permission to leave work. The Company also has facilities for handling complaints from employees. The policies are contained in the Collective Labor Agreement (PKB) between the Company and Pelabuhan Indonesia II Labor Union.

SCOPE OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN HUMAN RIGHTS

In the formulation of human rights based on industrial relations management starts from the implementation of Collective Labor Agreement (CLA) that protect the interests of employees and the Company in the aspect of employment, with the scope of work relations (including recognition of the parties, guarantees of the parties, obligations and Trade union facilities), working hours, complaints, Bipartite and Tripartite.

ACTIVITY PLAN OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN HUMAN RIGHTS

The Company has a target to always follow the principles of human rights. This is intended to foster proportional industrial relations and create synergic relationships, mutual understanding, mutual respect, mutual trust, and mutual benefits. In addition, the responsibility activities related to human rights are expected to have a positive impact on improving the productivity and performance of the Company so that in the end will influence the improvement of employee welfare in accordance with Stakeholders' expectations.

IMPLEMENTATION OF INITIATIVES OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN HUMAN RIGHTS

Corporate social responsibility activities related to human rights include:

1. Recognition and Guarantees for Employees
The Company recognizes Labor Union as an organization established to legally represent their members to coordinate, consult and negotiate with management regarding work relations. The Labor Union has also acknowledged that the

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO HUMAN RIGHTS

kerja. Serikat Pekerja juga telah mengakui bahwa Perseroan mempunyai hak dan kewajiban untuk memimpin dan menjalankan Perseroan sesuai dengan kebijakan manajemen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Perseroan juga telah menjamin untuk tidak melakukan diskriminasi atau tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Karyawan yang dipilih oleh Serikat Karyawan atau ditunjuk oleh Pengurus menjadi Wakil Serikat Karyawan di dalam kapasitasnya untuk melaksanakan tugas. Perseroan juga menjamin untuk menyelesaikan dengan Serikat Karyawan atas setiap keluhan Karyawan, baik yang diajukan secara langsung kepada Pengusaha maupun melalui Serikat.

IPC memberikan bantuan fasilitas dan pendanaan yang tidak mengikat serta perijinan/dispensasi untuk menunjang kegiatan operasional dan melaksanakan program kerja Serikat Karyawan. Dalam hal ini, Perseroan menyediakan fasilitas ruang kantor kesekretariatan beserta kelengkapannya yang memadai. Hal ini merupakan salah satu upaya Perseroan untuk pencegahan pelanggaran HAM.

2. Waktu Kerja, Lembur, Cuti dan Izin Meninggalkan Pekerjaan

Perseroan telah menetapkan waktu kerja, lembur, cuti dan izin meninggalkan pekerjaan dan upah lembur dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai berikut:

- a. Jumlah waktu kerja para Konsistensi IPC selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu. Jumlah jam kerja IPC adalah 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan maksimum 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu;
- b. Bagi Karyawan yang bekerja melebihi jumlah jam kerja selama 1 (satu) bulan karena pengaturan sistem kerja diberikan uang lembur. Dengan besaran uang lembur per jam ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bagi Karyawan yang bekerja pada hari libur nasional berhak mendapat kompensasi kehadiran yang besarnya di atur dalam Surat Keputusan Pengusaha;
- d. Cuti tahunan diberikan kepada karyawan telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus terhitung sejak diangkat sebagai Karyawan dalam Masa Percobaan;
- e. Cuti sakit diberikan kepada Karyawan yang sakit minimal selama 1 (satu) hari dan maksimal selama 1 (satu) tahun berdasarkan Surat Keterangan Dokter/Dokter Ahli;

Company has the rights and obligations to lead and run the Company in accordance with management policies with due observance of the applicable provisions.

The Company has also guaranteed not to discriminate or pressure either directly or indirectly against workers selected by the Trade Union or appointed by the management to become a representative of the Trade Union in their capacity to carry out their duties. The Company also guarantees to settle with the Trade Union any employee complaints, whether submitted directly by the employer or through the union.

IPC provides non-binding facilities and funding as well as licensing/dispensation to support operational activities and carry out Trade Union's work programs. In this case, the Company provides secretarial office space facilities along with adequate equipment. This is one of the Company's efforts to prevent human rights violations.

2. Working Hours, Overtime, Leave and Permission to be absent from Work

The Company established working hours, overtime, leave and permission to be absent, and overtime wages by taking into account the following human rights principles:

- a. Total working hours for IPC Consistency for 5 (five) days. The number of IPC working hours is at 8 (eight) hours in 1 (one) day with a maximum of 40 (forty) hours in 1 (one) week;
- b. For workers who work more than the number of working hours in 1 (one) month due to the work system arrangement is given overtime. With the amount of overtime pay set according to the applicable legal provisions;
- c. Workers who work on national holidays are entitled to compensation in the form of the amount set in the Company decree;
- d. Annual leave is given to employees who have worked for at least 1 (one) year continuously from the time they are appointed as Workers in their Probation Period;
- e. Sick leave is given to sick Workers for at least 1 (one) day and a maximum of 1 (one) year based on a doctor's certificate;



- | | |
|--|---|
| <p>f. Cuti bersalin diberikan kepada Karyawan wanita yang melahirkan. Lama cuti bersalin adalah 1,5 (satu setengah) bulan sebelum persalinan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah persalinan;</p> <p>g. Cuti gugur kandungan diberikan kepada Karyawan wanita sesuai rekomendasi dokter;</p> <p>h. Cuti karena alasan penting diberikan kepada Karyawan dengan alasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ibu/bapak, istri/suami, anak, mertua sakit keras atau meninggal dunia diberikan cuti selama 2 (dua) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender; • Melangsungkan perkawinan yang pertama diberikan cuti selama 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari kalender; • Melaksanakan ibadah haji ke tanah suci diberikan cuti paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender. <p>i. Izin meninggalkan pekerjaan diberikan kepada Karyawan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Khitanan anak Karyawan selama 2 (dua) hari kerja; • Pernikahan anak Karyawan selama 2 (dua) hari kerja; • Karyawan pindah rumah selama 2 (dua) hari kerja; • Istri Karyawan melahirkan atau keguguran selama 2 (dua) hari kerja. | <p>f. Maternity leave is given to pregnant female Workers. The length of maternity leave is 1.5 (one and a half) months before delivery and 1.5 (one and a half) months after delivery;</p> <p>g. Obstetric leave is given to female Workers according to doctor's recommendations;</p> <p>h. Leave due to important reasons are given to Workers for the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mother/father, wife/husband, child, parents-inlaw are seriously ill or dies, leave is given for 2 (two) days to 7 (seven) calendar days; • For first marriage leave is given for 2 (two) to 7 (seven) calendar day; • Carrying out pilgrimage to the holy land, leave is given for a maximum of 45 (forty five) calendar day. <p>i. Permits to be absent from work are given as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Circumcision of Workers' children of 2 (two) working days; • Marriage of Workers' children of 2 (two) working days; • Workers moving house of 2 (two) working days; • Workers' Wife giving birth or miscarriage of 2 (two) working days. |
|--|---|

Perseroan memiliki mekanisme pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan HAM yang merupakan salah satu bagian dari laporan manajemen. Laporan manajemen senantiasa di *review* oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada para Pemegang Saham.

The Company has a mechanism for reporting human rights implementation activities results as part of the management report. The management report is always reviewed by Board of Directors and Board of Commissioners for submission to the Shareholders.

CAPAIAN DAN PENGHARGAAN ATAS INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG HAK AZASI MANUSIA

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip HAM, pada tahun 2019 hasil *Engagement Ratio Index* (ERI) mengalami kenaikan menjadi 4,57 skala *likert* dibandingkan tahun 2018 dengan skor sebesar 4,37 skala *likert*.

ACHIEVEMENT AND AWARD FOR INITIATIVE OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN HUMAN RIGHTS

In order to apply human rights principles, in 2019, the results of the Engagement Ratio Index (ERI) increased to 4.57 Likert scale compared to 2018 with a score of 4.37 Likert scale.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATIONS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Salah satu komitmen membangun budaya Tata Kelola Perseroan yang Baik (GCG) yang dilakukan oleh Insan IPC adalah dengan melakukan Kepatuhan pada Kode Etik Bisnis, yang berdasarkan pedoman Kode Etik Bisnis IPC. Hal ini sebagai komitmen Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Insan IPC terhadap pelaksanaan operasi bisnis yang adil. IPC telah memiliki berbagai kebijakan yang mengatur dilaksanakan operasi yang adil diantaranya kebijakan kode etik dan *Whistleblowing System* (WBS). Kebijakan tersebut dibangun di atas fondasi yang kuat dari visi, misi serta tata nilai Perseroan yang diimplementasikan di seluruh fungsi serta seluruh wilayah operasional Perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi semua ketentuan pemerintah dan menerapkan standar baku yang berlaku di industri jasa pelabuhan, baik di bidang tata kelola maupun dalam praktik bisnis secara umum. Kode Etik merupakan bentuk komitmen dan kepatuhan kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG OPERASI YANG ADIL

Lingkup kegiatan operasi yang adil antara lain meliputi pencegahan *fraud*, *Whistleblowing System* (WBS), penghormatan terhadap Hak Intelektual (HAKI), larangan gratifikasi/penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, aktivitas politik dan sosial, serta pencegahan benturan kepentingan.

RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG OPERASI YANG ADIL

IPC senantiasa berusaha dalam menjalankan operasi yang adil. IPC menargetkan seluruh insan IPC untuk berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perseroan serta menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perseroan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan dan dapat membangun reputasi Perseroan yang baik. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya menegakkan kebijakan-kebijakan terkait dengan operasi yang adil sehingga bisa meningkatkan nilai para pemangku kepentingan Perseroan, selanjutnya akan memberikan dampak pada peningkatan nilai Perseroan.

COMMITMENT AND POLICIES

One of the commitments to building a culture of Good Corporate Governance (GCG) carried out by IPC personnel is through the compliance with Code of Conduct, based on IPC's Code of Conduct, as a commitment of Board of Commissioners, Board of Directors, and all IPC Personnel toward the implementation of fair operations. IPC has various policies governing fair operations including Code of Conduct and Whistleblowing System (WBS). The policies are built on the strong foundation of the Company's vision, mission and values that are implemented in all functions and all operational areas of the Company.

The Company is committed to complying with all government provisions and implementing the standards that apply in the port service industry, in the field of governance and in general business practices. The Code of Conduct is a form of commitment and compliance with applicable laws and regulations.

SCOPE OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN FAIR OPERATIONS

The fair operations activities included fraud prevention, Whistleblowing system (WBS), respect for Intellectual rights, prohibition from gratification/acceptance of gifts/souvenirs and entertainment, political and social activities, and prevention of conflicts of interest.

ACTIVITY PLAN OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN FAIR OPERATIONS

IPC always endeavors to carry out fair operations. IPC targets all IPC personnel to behave well in carrying out the Company's activities as well as creates a healthy and comfortable working atmosphere within the Company. This is to minimize opportunities for irregularities and to build a good Company reputation. Therefore, the Company constantly strives to uphold the fair operations policies to increase the value for the Company's stakeholders, which in turn will impact on the Company's rating.



PELAKSANAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG OPERASI YANG ADIL

PENCEGAHAN FRAUD

Fraud adalah tindakan kecurangan, korupsi, pencurian, pelanggaran kebijakan dan peraturan Perseroan, benturan kepentingan, penyuaipan atau gratifikasi, penggelapan, penipuan, maupun pemerasan di lingkungan Perseroan. Sebagai bagian dari semangat untuk menciptakan BUMN Bersih, Perseroan melakukan pendekatan preventif dan kuratif untuk mencegah terjadinya *fraud*. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan *reminder* tentang Kode Etik Bisnis yang harus dilakukan seluruh Insan IPC setiap tahun serta kegiatan pelatihan dan promosi anti korupsi di lingkungan Perseroan.

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Whistleblowing System diperkenalkan sejak tahun 2014 untuk memperkuat pelaksanaan GCG yang memberikan jalan bagi seluruh Insan IPC dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk melaporkan indikasi pelanggaran terhadap Kode Etik Bisnis maupun *fraud*, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik. Untuk menjaga independensi, WBS dikelola oleh pihak ketiga yang bertugas menerima dan memonitor pengaduan baik internal dan eksternal serta membuat laporan bulanan kepada Tim IPC Bersih sebagai *counterpart*.

PENGHORMATAN TERHADAP HAK INTELEKTUAL (HAKI)

Dalam menjalankan bisnis, IPC senantiasa menghargai karya seseorang atau institusi dan memberikan penghormatan terhadap hak intelektual seseorang atau institusi. Hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan tidak berwujud yang merupakan hasil dari kreativitas seperti hak paten, hak cipta dan merek dagang. IPC mengedepankan sikap:

1. Menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain;
2. Seluruh insan IPC harus berpartisipasi secara aktif dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perseroan;
3. Insan IPC harus mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kepemilikan kekayaan intelektual;
4. Seluruh Insan IPC harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama maupun di luar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi Perseroan. IPC berhak atas seluruh manfaat (*exclusive benefits*) dari paten, dan lain-lain yang terkait dengan hasil karya dimaksud di atas.

IMPLEMENTATION OF INITIATIVES OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN FAIR OPERATIONS

FRAUD PREVENTION

Fraud is cheating, corruption, theft, violation of Company policies and regulations, conflicts of interest, bribery or gratuities, embezzlement, fraud, and extortion in the Company. As part of the spirit to create Clean SOE, the Company takes preventive and curative approaches to prevent fraud. The preventive approach is carried out through socialization and reminders of the Code of Conduct that must be carried out by all IPC Personnel every year as well as training and promotion of anti-corruption activities within the Company.

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

The Whistleblowing system was introduced in 2014 to strengthen the implementation of GCG and provides a way for all IPC Personnel and other stakeholders to report indications of violations of the Code of Conduct or fraud, based on evidence that can be accounted for and with good intentions. To maintain independence, the WBS is managed by a third party tasked with receiving and supervising complaints both internally and externally and making monthly reports to the IPC Bersih Team as a counterpart.

RESPECT FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

In conducting business, IPC always respects the work of a person or institution and respects the intellectual rights of a person or institution. Intellectual property rights are intangible assets that are the result of creativity such as patents, copyrights and trademarks. IPC promotes the following attitudes:

1. Respect the intellectual property rights of others;
2. All IPC personnel must actively participate in protecting the intellectual property rights of the Company;
3. IPC personnel must comply with the laws and regulations governing intellectual property rights;
4. All IPC personnel must report the work they produce both during and outside working hours, if the work is related to the business or operations of the Company. IPC has the right to all benefits (*exclusive benefits*) from patents, and others related to the results of the work referred to above.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATIONSLARANGAN GRATIFIKASI/PENERIMAAN HADIAH/
CINDERAMATA DAN HIBURAN

Insan IPC yang karena jabatannya dan/atau anggota keluarga (keluarga inti), dilarang untuk menerima atau meminta secara langsung atau tidak langsung hadiah/cinderamata dan/atau hiburan dari setiap pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis atau pesaing IPC, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal yang berkaitan dengan kedudukan/jabatan. Insan IPC apabila ditawarkan/diberikan hadiah/cinderamata dan/atau hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi wajib melakukan penolakan dengan cara santun terhadap tawaran/pemberian, dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga. Himbauan terkait larangan menerima gratifikasi ini tertuang pada Pengumuman nomor SK.01.01/23/12/2/KPP/SDM/PI.II-19/ tanggal 23 Desember 2019 perihal Larangan Pungutan Liar dan Penerimaan Gratifikasi Pada Perayaan Hari Besar dan Tahun Baru serta Pengumuman nomor SK.01.01/16/5/2/KPP/UT/PI.II-19/ tanggal 16 Mei 2019 perihal Pengumuman Larangan Pungutan Liar dan Penerimaan Gratifikasi Pada Perayaan Hari Besar.

AKTIVITAS POLITIK DAN SOSIAL

IPC dapat mengemukakan pandangan kepada Pemerintah dan pihak lain yang terkait mengenai aspek operasional yang mempengaruhi aktivitas bisnis demi kepentingan Pemegang Saham, karyawan dan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis. IPC mengharuskan Direksi dan karyawan untuk patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perseroan dalam urusan politik.

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan terjadi atau mungkin terjadi pada Insan IPC yang memiliki hubungan keluarga atau pertemanan dengan kompetitor, vendor, atau rekan kerja. Dalam menghadapi adanya benturan kepentingan maka setiap Insan IPC dilarang untuk:

1. Terlibat dalam pengambilan keputusan atau mencoba mempengaruhi keputusan IPC dalam proses pengadaan untuk kepentingan Perseroan yang dimiliki keluarga atau teman, atau Perseroan dimana keluarga atau teman adalah pejabat pengambil keputusan;

PROHIBITION AGAINST GRATIFICATION/RECEIPT OF
GIFTS/SOUVENIRS AND ENTERTAINMENT

IPC Personnel are prohibited from receiving or requesting directly or indirectly gifts/favors and/or entertainment from any party that does not have a business relationship or is a competitor of IPC, which aims to obtain information, or something that is not justified by the applicable legal provisions, or to influence parties to do and/or not do anything related to their position/title. If IPC Personnel are offered/given gifts/favors and/or entertainment that are not in accordance with the provisions stipulated in the gratification control guidelines, they must refuse politely, by explaining these policies and rules to the Third Parties. The appeal related to the prohibition on receiving gratification is stated in Announcement number SK.01.01/23/12/2/KPP/SDM/PI.II-19 dated December 23, 2019 concerning the Prohibition of Illegal Levies and Gratification Receipts on Holidays and New Year Celebrations and Announcement number SK.01.01/16/5/2/KPP/UT/PI.II-19 dated May 16, 2019 concerning the Announcement of the Prohibition of Illegal Levies and Gratification Receipts on Holidays Celebrations.

POLITICAL AND SOCIAL ACTIVITIES

IPC can express views to the Government and other related parties regarding operational aspects that affect business activities for the benefit of Shareholders, employees and related parties in the business. IPC requires that the Directors and employees comply with all laws and regulations governing the Company's involvement in political affairs.

PREVENTION OF CONFLICTS OF INTEREST

Conflicts of interest occur or may occur if IPC personnel have family relationships or friendships with competitors, vendors, or coworkers. In the face of conflicts of interest, all IPC Personnel are prohibited from:

1. Engaging in decision making or trying to influence IPC's decisions in the procurement process for the interests of a company owned by family or friends, or a company where family or friends are decision-making officials;



2. Berupaya selalu menghindari segala bentuk keterlibatan keluarga dalam hubungan bisnis untuk menghindari konflik kepentingan. Segala bentuk transaksi yang dilakukan dengan keterlibatan yang harus dihindari dan didiskusikan terlebih dahulu dengan atasan langsung, atasan tidak langsung maupun Pemimpin Unit Pengelola SDM.

Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi kepada vendor terkait dengan operasi yang adil yang telah dituangkan dalam pedoman pengadaan barang dan jasa.

BIAYA

Pada tahun 2019, IPC telah mengeluarkan anggaran untuk tanggung jawab sosial perusahaan terkait operasi yang adil (termasuk pelaksanaan program *Whistleblowing System* yang bekerjasama dengan pihak ketiga) sebesar Rp360.459.000.

CAPAIAN DAN PENGHARGAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG OPERASI YANG ADIL

Dengan komitmen penuh dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait praktik operasi yang adil telah meningkatkan kepercayaan serta kegiatan usaha IPC dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pencapaian sesuai yang diharapkan oleh para Pemangku Kepentingan. Selama tahun 2019, IPC telah mampu meningkatkan laba tahun berjalan sebesar 3,01% di tahun 2019.

Namun demikian Perseroan akan menghadapi risiko jika terjadi pelanggaran terkait operasi yang adil. Perseroan akan menghadapi risiko materiil yaitu hilangnya aset Perseroan maupun imateriil yaitu menurunnya reputasi Perseroan. Di samping itu, beberapa *Stakeholder* juga akan dirugikan karena tingginya biaya transaksi yang muncul dari adanya benturan kepentingan yang merupakan pelanggaran praktik operasi yang adil.

2. Try to always avoid all forms of family involvement in business relationships to avoid conflicts of interest. all forms of transactions carried out with involvement must be avoided and discussed in advance with direct supervisors, indirect supervisors or HC Management Unit Leaders.

The Company always carries out socialization with vendors regarding fair operations, as outlined in the procurement of goods and services guidelines.

COST

In 2019, IPC has issued a budget for corporate social responsibility related to fair operations (including the implementation of Whistleblowing System program in collaboration with third parties) amounting to Rp360,459,000.

ACHIEVEMENT AND AWARD FOR INITIATIVE OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN FAIR OPERATIONS

Full commitment in the implementation of social responsibility related to fair operations practices has increased the trust and IPC's business activities were running well and generated the achievements as expected by the Stakeholders. During 2019, IPC has been able to increase profit for the year by 3.01% in 2019.

However, the Company will deal with risks if violations occur regarding fair operations. The Company will face material risks, such as the loss of the Company's assets, and nonmaterial risks, such a decline in the Company's reputation. In addition, some stakeholders could also be disadvantaged due to high transaction costs arising from conflicts of interest that are violation of fair operation practices.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATIONS

SERTIFIKASI PRAKTEK OPERASI YANG ADIL

Sampai dengan Desember 2019, Perseroan belum memiliki sertifikasi dan penghargaan terkait operasi yang adil.

PENGHARGAAN PRAKTEK OPERASI YANG ADIL

IPC telah memperoleh penghargaan sebagai *Big Corporate* Kategori Tata Kelola Terbaik dalam acara Anugerah BUMN 2019 yang diselenggarakan oleh BUMNTrack & PPM Manajemen. Selain itu, IPC juga mendapatkan penghargaan *Trusted Company Based On Corporate Governance Perception Index (CGPI)* dalam acara Indonesia *Good Corporate Governance Award 2019* yang diselenggarakan oleh Majalah SWA.

MEKANISME PENANGANAN KONFLIK

Penanganan konflik terkait operasi yang adil dilakukan melalui penerapan *whistleblowing system* dan *code of conduct*. Uraian tentang *whistleblowing system* dan *code of conduct* disajikan dalam tata kelola Perseroan dalam laporan tahunan ini. *Stakeholder* berharap bahwa mekanisme *whistleblowing system* dan *code of conduct* ditegakkan sehingga bisa meningkatkan nilai para Pemangku Kepentingan Perseroan, selanjutnya akan memberikan dampak pada peningkatan nilai Perseroan.

CERTIFICATION IN FAIR OPERATIONS

As of December 2019, the Company did not have certification and awards related to fair operations.

AWARDS IN FAIR OPERATIONS

IPC has been awarded as the Big Corporate with Best Management Category in the 2019 SOE Award event organized by BUMNTrack & PPM Manajemen. Besides that, IPC also received the Trusted Company Award based on the Corporate Governance Perception Index (CGPI) in the 2019 Indonesia Good Corporate Governance event organized by Majalah SWA.

CONFLICT HANDLING MECHANISM

Handling conflicts related to fair operations is carried out through the whistleblowing system and code of conduct. A description of the whistleblowing system and code of conduct can be found in the corporate governance section of this annual report. Stakeholders expect the whistleblowing system and code of conduct mechanisms are enforced so that the Company's value to the Stakeholders will increase, which in turn will have an impact on increasing the Company's value.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO ENVIRONMENT

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

IPC berkomitmen untuk menjalankan seluruh kegiatan Perseroan yang berwawasan lingkungan, baik kegiatan perkantoran (*office*) maupun operasional di lapangan. Komitmen tersebut dituangkan oleh Direksi melalui penerbitan kebijakan Sistem Manajemen Lingkungan pada 10 Oktober 2018. Kebijakan Sistem Manajemen Lingkungan tersebut yaitu, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Perseroan penyedia layanan pelabuhan terkemuka di Indonesia memiliki tujuan untuk menjadi operator pelabuhan kelas dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berkomitmen untuk menerapkan kebijakan lingkungan sebagai berikut:

1. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundangan, persyaratan lain dan prosedur yang berlaku baik Nasional dan Internasional terkait perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran;
2. Menerapkan konsep *Green Port* dalam kegiatan operasional Perseroan;
3. Memberikan keteladanan perilaku dan mengembangkan inovasi kreatif untuk peduli lingkungan;
4. Melakukan pembinaan terhadap komunitas dan partisipasi perlindungan ekosistem di sekitar pelabuhan;
5. Melakukan perbaikan berkelanjutan Sistem Manajemen Lingkungan demi terciptanya lingkungan kerja yang baik di wilayah Perseroan.

Tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh Karyawan dan mitra kerja serta dilaksanakan dalam bidang tugas masing-masing.

Untuk langkah di tahun selanjutnya, Perseroan tidak hanya aktif menyosialisasikan di Kantor Pusat, melainkan di seluruh Cabang Pelabuhan dan Entitas Anak. Sosialisasi tersebut, termasuk menginformasikan mengenai perlu adanya program kerja yang mendukung implementasi kebijakan Sistem Manajemen Lingkungan.

Sebagai salah satu upaya IPC menuju *Green Port*, Direktorat Operasi mengeluarkan Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan No. IPC/SMK3L/M-01 pada tanggal 24 April 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Operasi. Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan ini menguraikan penerapan persyaratan standar Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015.

COMMITMENT AND POLICIES

IPC is committed to carrying out environmentally friendly activities, both office and operational activities in the field. This commitment was stated by Board of Directors through the issuance of the Environmental Management System policy on October 10, 2018. The Environmental Management System Policy, said, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as a leading port service provider company in Indonesia has the goal to become a world-class port operator. To achieve this goal, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is committed to implement environmental policies as follows:

1. Complying with and implementing laws and regulations, other requirements and procedures that apply both nationally and internationally related to environmental protection and prevention of pollution;
2. Applying the green Port concept in the company's operational activities;
3. Providing behavioral modeling and developing creative innovations to care for the environment;
4. Fostering community and participation in protecting ecosystems around the port;
5. Carrying out continuous improvements to the environmental management system to create a good work environment in the company's area.

Responsibility for environmental protection is a shared responsibility of all workers and partners and is carried out in their respective fields of duty.

Moving into the following year, the Company will not only be active in socializing and implementing at the head office, but in all Port Branches and subsidiaries. The socialization includes information regarding the need for work programs that support the implementation of the environmental management system policy.

As one of IPC's efforts towards Green Port, the Directorate of Operations issued Environmental Management System Guide No. IPC/SMK3L/M-01 on April 24, 2019 which was signed by the Director of Operations. This Environmental Management System Guide describes the application of requirements of ISO 14001:2015 Environmental Management System standard.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO ENVIRONMENT

DAMPAK DAN RISIKO PENTING SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

Kegiatan kepelabuhanan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, dampak tersebut terutama timbul dari pemakaian energi, limbah dari kapal-kapal yang sandar di pelabuhan, pemanfaatan air, perubahan bentang alam, sampah dan limbah serta perubahan kualitas udara ambien dari tingginya aktivitas peralatan dan manusia dengan demikian lingkup pengaruh Perseroan pada para pemangku kepentingan terkait isu lingkungan adalah pada masyarakat di sekitar kegiatan operasional Perseroan.

Bila tidak ditangani dengan benar, hal-hal tersebut dapat berkembang menjadi masalah lingkungan seperti pencemaran (air, udara dan tanah), kebisingan dan keselamatan kerja, polusi bau, debu, dan degradasi kualitas lingkungan hidup, kekeruhan air dan pencemaran perairan yang berdampak pada keanekaragaman hayati perairan.

TARGET/RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pada tahun 2019, Perseroan memiliki beberapa rencana kerja terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik yang dilaksanakan sebagai RKM (Rencana Kerja Manajemen) maupun *non* RKM. Adapun pada divisi konstruksi sipil-departemen survei dan lingkungan telah melakukan rencana kerja terkait:

1. Pengelolaan energi diantaranya melakukan elektrifikasi dan pengembangan *Remote Crane Management and Monitoring System* (RCMMS);
2. Efisiensi penggunaan energi di antaranya melakukan teknologi *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO);
3. Pengendalian emisi diantaranya adalah pemantauan dan pengelolaan emisi;
4. Pengolahan limbah di antaranya pengendalian emisi limbah padat, limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), dan limbah cair;
5. Pelaksanaan Sertifikasi ISO 14001:2015.

Dalam perencanaan kegiatan CSR terhadap lingkungan hidup, Perseroan telah mempertimbangkan dampak penting langsung atau tidak langsung aktivitas dan keputusan Perseroan terhadap lingkungan hidup diantaranya: penghematan energi, pengendalian emisi dan dampak yang diakibatkan dari limbah padat dan cair. Di samping itu, Perseroan juga

DIRECT AND INDIRECT IMPORTANT IMPACT AND RISK

Port activities can have a significant impact on the environment, and the impacts mainly arise from energy use, waste from ships anchored in ports, water use, landscape changes, garbage and waste, and changes in ambient air quality from high equipment and human activities the Company's sphere of influence on stakeholders concerning environmental issues is in the community areas around the company's operations.

If not handled properly, these issues can develop into environmental problems such as pollution (water, air and soil), noise and work safety, odor pollution, dust, degradation of environmental quality, turbidity of water and water pollution that could impact the water biodiversity.

ACTIVITY TARGET/PLAN OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN ENVIRONMENT

In 2019, the Company has several work plans related to environmental protection and management, carried out as part of the RKM (Management Work Plan) and non RKM. In the civil construction division, the survey and environment department carried out the following work plan:

1. Energy management includes electrification and development in the *Remote Crane Management and Monitoring System* (RCMMS);
2. Efficient use of energy including *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) technology;
3. Emission control including emissions monitoring and management;
4. Processing waste including controlling solid waste emissions, B3 waste (hazardous and Toxic materials), and liquid waste;
5. Implementing ISO 14001:2015 Certification.

When planning CSR activities concerning the environment, the Company considers the important direct or indirect impact of its activities and decisions on the environment including: energy saving, emissions control and the effects of solid and liquid waste. In addition, the Company also considers the expectations of Stakeholders, especially the communities for the environmental



mempertimbangkan harapan Pemangku Kepentingan, khususnya masyarakat yaitu tercapainya pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut perwujudan upaya untuk menciptakan manfaat bersama inisiatif bidang lingkungan hidup bagi *Stakeholder* dan Perseroan.

Dalam melaksanakan CSR terkait dengan lingkungan hidup, Perseroan senantiasa mendorong seluruh Karyawan Perseroan baik di kantor pusat dan cabang untuk turut aktif berperan dalam kegiatan CSR terkait dengan lingkungan hidup di atas.

KEGIATAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL PERSEROAN

Menuju implementasi *green port* pada tahun 2020, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam *Corporate Roadmap* Tahun 2016-2020, IPC terus aktif melakukan sejumlah kegiatan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kegiatan tersebut meliputi bidang efisiensi penggunaan energi, efisiensi penggunaan air, pengendalian emisi, dan pengelolaan limbah.

PENGELOLAAN ENERGI

Perseroan melakukan pengelolaan energi di lingkungan pelabuhan, meliputi pengelolaan energi pada bangunan/gedung, peralatan, dan sistem utilitas. Pengelolaan energi ini penting untuk dilakukan terutama agar mampu meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Sebagai bentuk pencapaian dari pengelolaan energi, pada tahun 2019, telah diselesaikan program audit energi peralatan dan kajian efisiensi energi di 5 cabang pelabuhan IPC, yaitu Tanjung Priok, Banten, Pontianak, Panjang, dan Palembang. Berdasarkan hasil audit Energi terhadap 5 (lima) cabang pelabuhan tersebut, telah diperoleh data *Specific Energy Consumption* (SEC) tiap cabang dan *Significant Energi Used* (SEU) yang akan menjadi *baseline* atau acuan awal dalam melakukan analisis pengelolaan penggunaan energi di cabang-cabang tersebut. Selanjutnya hasil tersebut akan diterapkan diseluruh cabang-cabang pelabuhan lainnya.

Di dalam audit energi, diperoleh data bahwa pengguna energi yang paling mempengaruhi jumlah konsumsi energi adalah Peralatan Bongkar Muat dengan persentase penggunaan energi secara total lebih dari 80% terhadap keseluruhan energi. Setiap jenis alat bongkar muat dimaksud menggunakan energi

preservation. This embodiment effort will create environmental benefits for Stakeholders and the Company.

In implementing CSR concerning the environment, the Company encourages all Company employees both at the head office and branches to play an active role the CSR environment activities.

ENVIRONMENTAL ACTIVITIES RELATED TO THE COMPANY'S OPERATIONAL ACTIVITIES

For the implementation of a green port in 2020, as determined in the Corporate roadmap for 2016-2020, IPC continues to actively carry out activities related to environmental protection and management. These activities include energy management, water use efficiency, emissions control, and waste management programs.

ENERGY MANAGEMENT

Company manages the energy use in the port area, which includes energy management in buildings, equipment and utility systems. This energy management is important in increasing the efficiency of energy consumption.

The achievement of energy management in 2019 is the completion of energy audit program for equipment and energy efficiency studies in 5 IPC port branches, namely Tanjung Priok, Banten, Pontianak, Panjang, and Palembang. From the Energy Audit in 5 (five) port branches, data on the Specific Energy Consumption (SEC) of each branch and the Significant Energy Used (SEU) will then be used as the initial reference in analyzing energy management in those branches. The results will be applied to all other port branches.

Energy audits show that the user who has the most influence on energy consumption is Loading Unloading Equipment with more than 80% total energy use. Each type of loading and unloading equipment uses more than 5% of total energy. Thus the energy

lebih dari 5% terhadap keseluruhan energi. Berdasarkan hasil tersebut, upaya-upaya efisiensi penggunaan energi di peralatan dapat meningkatkan efisiensi biaya operasi dengan melakukan program penghematan energi pada proses Bongkar/Muat. Program-program efisiensi tersebut secara garis besar dapat dilakukan melalui:

1. Metode Teknis yang membutuhkan biaya investasi diantaranya melalui konversi energi, *hybrid* dan lain-lain;
2. Metode *Non* teknis yaitu melalui upaya-upaya perubahan prosedur sehingga diperoleh penggunaan energi minimal yang relatif tidak membutuhkan biaya.

Beberapa upaya yang telah, sedang dan akan dilaksanakan adalah:

1. Program elektrifikasi lanjutan merupakan pekerjaan memodifikasi sumber daya utama alat, yang semula menggunakan *diesel generator set on board*, menjadi *fully electric* dengan sumber daya listrik darat (*shore power plant*) telah berdampak pada penghematan energi BBM, yang akan diterapkan pada keseluruhan Alat B/M dan Alat Apung (Kapal Tunda dan Kapal Pandu) diseluruh cabang pelabuhan di tahun-tahun ke depan secara bertahap;
2. Program lanjutan pengembangan perangkat *Remote Crane Management and Monitoring System (RCMMS)* tahap II, dimana satu fitur yang ada pada RCMMS ini adalah memonitor penggunaan energi (listrik atau bahan bakar minyak) pada peralatan *crane* tersebut. Dengan memonitor penggunaan energi ini di peralatan *crane* akan didapat profil penggunaan energi yang nantinya dapat dievaluasi dan dianalisis untuk peningkatan efisiensi penggunaan energi.
3. *Pilot Program* Penerapan Teknologi Hemat Energi Pada Alat Bongkar Muat.
Program ini merupakan tindak lanjut dari kajian efisiensi energi yang dilakukan di tahun 2018, dengan penerapan teknologi hemat energi khususnya pada alat bongkar muat yang masih menggunakan *diesel generator set*, menjadi berupa penggunaan *hybrid system*, *variable speed generator*, *solar panel*, dan lainnya. Dengan penerapan teknologi hemat energi ini diharapkan dapat menurunkan jumlah penggunaan bahan bakar fosil pada peralatan bongkar muat dimaksud.

PENGENDALIAN POLUSI

Selain pengendalian energi, Perseroan sedang berupaya melakukan pengendalian polusi atau upaya penurunan polusi di lingkungan pelabuhan yaitu melalui upaya-upaya konversi penggunaan energi fosil (BBM) menjadi energi listrik. Pengendalian polusi ini penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitar wilayah pelabuhan sehingga tercipta lingkungan pelabuhan yang bersih dan hijau atau diistilahkan dengan "Green Port".

efficiency efforts of the equipment will increase the efficiency of operating costs through energy saving program in the Unloading / Loading process. The efficiency programs outline is:

1. Technical methods that require investment, through energy conversion, hybrid and others;
2. Non-technical methods, through changing procedures so that energy consumption can be minimal and relatively cost free.

Some of the efforts that have been done, being done and will be implemented are:

1. The advanced electrification program, which is an effort to modify the main power source of the tool. Originally it used diesel generator set on board and then became fully electric with power plant onshore; this has impact on fuel energy savings, and will be applied to all loading-unloading tools and Floating Equipment (Tugs and Pilotage Vessels) in all branches of the port in the years ahead gradually;
2. Continued development of the Phase II Remote Crane Management and Monitoring System (RCMMS) device, where one feature is the ability to monitor the consumption of energy (electricity or fuel oil). With the monitoring of energy usage, the energy consumption profile will be obtained which could later be evaluated and analyzed to increase the efficiency of energy use.
3. Pilot Program for Application of Energy-Saving Technology in Loading Unloading Equipment.
This program is a follow-up of the energy efficiency study in 2018, by applying energy-saving technologies, especially for loading and unloading equipment which still used diesel generator sets, into using hybrid systems, variable speed generators, solar panels, and others. The application of energy saving technology is expected to reduce the amount of fossil fuel used in loading and unloading equipment.

POLLUTION CONTROL

In addition to energy control, Company strives to control pollution or reduce pollution in the port environment through the efforts of converting fossil energy (BBM) into electricity. Pollution control is important to improve the quality of the environment around the port area so as to create a clean and green environment or "Green Port".



Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pengendalian polusi diantaranya adalah seluruh program penghematan energi dan program penyediaan daya listrik untuk kapal-kapal niaga pada saat sandar atau *Shore Conncetion* ke kapal, dimana saat ini sedang dilakukan *pilot project* di beberapa dermaga Pelabuhan Tanjung Priok yang dilaksanakan oleh anak perusahaan IPC yang mengelola energi dan diperkirakan akan diselesaikan pada tahun 2020. Diharapkan dapat diterapkan di seluruh Pelabuhan di Tanjung Priok dan diseluruh wilayah Pelabuhan milik IPC.

EFISIENSI PENGGUNAAN AIR

Kantor Pusat dan Kantor Cabang Pelabuhan Tanjung Priok memanfaatkan fasilitas pengelolaan air bersih dengan teknologi *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO). Sistem ini menggunakan air laut yang dimurnikan dan disuling untuk kebutuhan *non* konsumsi seperti kebutuhan sanitasi dan kebutuhan penunjang operasional lainnya termasuk kebutuhan air untuk kapal. Dengan teknologi tersebut, akan terdapat penghematan penggunaan air tanah.

Selain 2 (dua) unit instalasi SWRO dengan kapasitas 1.000 ton/hari dan 500 ton/hari, Pelabuhan Tanjung Priok memasok air bersih komersial dengan bersinergi dengan Perseroan Air Minum. Jaringan pipa air bersih tersedia dalam pelabuhan untuk mengantisipasi jika terjadi kerusakan atau keterbatasan suplai dari SWRO.

PENGENDALIAN EMISI

Pengendalian emisi di IPC dilakukan melalui dua (2) metode, yaitu pemantauan dan pengelolaan emisi. Untuk kegiatan pemantauan dan pengelolaan emisi dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dari Izin Lingkungan kegiatan yang telah dimiliki, baik kegiatan di Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan, maupun Entitas Anak. Pemantauan adalah pengukuran emisi secara langsung seperti pada kendaraan/peralatan (*crane & genset*) ataupun kualitas udara pada suatu area (*indoor & outdoor/ambient*). Pada pelaksanaannya, IPC rutin melakukan pemantauan kualitas udara ambien khusus pada parameter TSP (Debu) dan Karbon Monoksida (CO).

Pengelolaan emisi adalah langkah untuk menjaga nilai emisi atau kualitas udara agar tetap di bawah baku mutu yang telah ditetapkan sesuai Izin Lingkungan kegiatan terkait. Emisi yang dihasilkan oleh kegiatan usaha IPC berasal dari kegiatan operasional kantor dan terminal.

Efforts that have been made to control pollution include energy saving programs and electricity supply program for commercial vessels when docked or *Shore Connection* to ships; the pilot project is currently being carried out at several docks owned by the Port of Tanjung Priok, and is carried out by IPC's subsidiary managing energy, and is expected to be completed in 2020. It is expected that the results can be applied in all Ports in Tanjung Priok and throughout IPC Port area.

WATER USE EFFICIENCY

The Head Office and Tanjung Priok Port Branch office use clean water management facilities using *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO). This system uses purified and refined seawater for non-consumption needs such as sanitation needs and other operational support needs include water requirements for ships. Through this technology, there will be savings in the use of ground water.

In addition to 2 (two) SWRO installation units with a capacity of 1,000 tons/day and 500 tons/day, Tanjung Priok Port supplies commercial clean water by synergizing with the Water supply Company. Clean water pipelines are available in ports to anticipate damage or limited supply from SWRO.

EMISSION CONTROL

Emission control at IPC IS carried out using two (2) methods, namely monitoring and management of emission. The monitoring and management of emission is done as a form of obligation fulfillment from Environmental Permit obtained, both activities in Head Office, Port Branches, and Subsidiaries. Monitoring is direct measurement of emissions such as vehicles/equipment (*cranes & generators*) or air quality in indoor & outdoor/ambient areas. In its implementation, IPC routinely monitors ambient air quality specifically for TSP (dust) and Carbon Monoxide (Co) parameters.

Emission management is a step to maintain the emissions or air quality to remain below the quality standard that has been set according to the environmental Permit related activities. emissions generated by the business activities of IPC originate from office and terminal operations.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO ENVIRONMENT

PEMANTAUAN EMISI

Kegiatan operasional kantor menghasilkan emisi dari mobil operasional kantor, kendaraan yang berlalu lintas di area kantor, dan genset. Pemantauan emisi mobil operasional kantor dilakukan secara rutin oleh vendor/pihak ketiga yang dikoordinasi oleh Departemen Umum dan Rumah Tangga. Berikut ini data uji emisi mobil operasional yang pelaksanaan uji emisinya dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 yakni sebagai berikut:

EMISSION MONITORING

Office operational activities produce emissions from operational cars, vehicles in the office areas, and generators. Monitoring of operational office car emissions is carried out routinely by vendors / third parties coordinated by the General and Household Departments. The following shows operational car emission test data that carried out emission tests on February 12, 2020:

Tabel Pelaksanaan Uji Emisi Mobil Operasional
Operational Car Emission Test

No	4 Gas Emission Analyzer	Hasil Pemantauan Monitoring Results													
		B 1511 PIQ	B 1524 PIQ	B 1676 PIP	B 1512 PIQ	B 1526 PIQ	B 1752 PIQ	B 1523 PIQ	B 1662 PIP	B 1753 PIQ	B 1171 PIR	B 1796 PIQ	B 1390 PIQ	B 1159 PIR	B 1406 PIR
1	Mobil Operasional Operational Vehicles														
2	Tahun Mobil Year of Vehicles	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
3	Temp. Oli mesin Engine Oil Temperature	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
4	Putaran mesin Engine Speed	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5	CO	0.02	0.32	0.01	0.13	0.01	0	0.25	0.01	0	0.04	0.01	0.01	0	0.01
6	COcorr	0.02	0.32	0.01	0.13	0.01	0	0.25	0.01	0	0.04	0.01	0.01	0	0.01
7	CO ₂	15.2	14.5	15.2	14.5	15.4	15	14.6	15.2	15.4	15.1	15.4	15.4	15.2	15.1
8	HC	89	147	37	160	37	36	162	59	75	66	64	35	64	70
9	O ²	0.19	0.77	0.07	0.63	0.14	0.05	0.93	0.09	0.08	0.07	0.88	0.14	0.05	0.09
10	Lamda	1	1.02	1	1.02	1	1	1.03	1	1	1	1	1	1	1

Pemantauan emisi kendaraan yang berlalu lintas di area kantor dapat mempengaruhi kualitas udara di area kantor. Hal ini dipantau melalui pengukuran kualitas udara di area kantor, baik di dalam maupun di luar gedung (*ambient*).

Monitoring of vehicle emissions that pass through the office area can affect the air quality. This is monitored by measuring the air quality in the office area, both inside and outside the building (*ambient*).

Berikut ini data hasil pemantauan kualitas udara *ambient* pada tiga belas (13) Cabang Pelabuhan dan 1 Kantor Pusat pada tahun 2018 sampai dengan 2019 sesuai dengan kewajiban di dalam dokumen izin lingkungan yang dimiliki oleh seluruh Cabang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

The following are the results of *ambient* air quality monitoring at thirteen (13) Port Branches and 1 Head Office in 2018 to 2019, in accordance with the obligations stated in the environmental permit documents owned by all Branches of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).



Tabel Monitor IPC pada Kualitas Udara Selama Tahun 2018 - 2019

Table - IPC Air Quality Monitors During 2018 - 2019

No	Lokasi IPC IPC Locations	2019				2018			
		Memenuhi Baku Mutu Meets Quality Standards		Tidak Memenuhi Does not Meet Quality Standards		Memenuhi Baku Mutu Meets Quality Standards		Tidak Memenuhi Does not Meet Quality Standards	
		Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
1	Tanjung Priok	14	14	0	0	14	14	0	0
2	Tanjung Pandan	6	6	0	0	6	6	0	0
3	Banten	8	7	0	1	5	7	3	1
4	Cirebon	4	4	0	0	4	4	0	0
5	Panjang	4	7	4	1	8	6	0	2
6	Sunda Kelapa	6	6	0	0	6	6	0	0
7	Jambi (Talang Duku)	3	3	0	0	0	3	3	0
8	Pontianak	8	8	0	0	8	8	0	0
9	Pangkal Balam	3	3	0	0	3	0	0	0
10	Teluk Bayur	6	6	0	0	6	0	0	0
11	Palembang	5	5	0	0	5	5	0	0
12	Bengkulu	5	6	1	0	6	6	0	0
13	Bojonegara	2	2	0	0	2	2	0	0
14	Kantor Pusat Head Office	2	2	0	0	2	2	0	0
Jumlah Total		76	79	5	2	75	69	6	3
Persentase Percentage		94%	98%	6%	2%	93%	85%	7%	5%

*Catatan

1. Indikator parameter yang diambil adalah Debu (TSP) dan Karbon Monoksida (CO)
2. Bakumutu sesuai Keputusan Menteri LH No.41. tahun 1999

* Note

- 1.Indicator parameters are Dust (TSP) and Carbon Monoxide (CO)
- 2..Standard Quality is in accordance with the Decree of Minister of Environment No.41. in 1999

Pada tahun 2019, hasil *monitoring* pada kualitas udara mengalami peningkatan perbaikan dibandingkan dengan tahun 2018, hal ini merupakan salah satu indikator meningkatnya pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh seluruh Cabang Pelabuhan sesuai dengan dokumen izin lingkungan yang dimiliki. Pada Semester I dan II tahun 2019 total 94% dan 98% kualitas udara di Cabang Pelabuhan IPC memenuhi Bakumutu untuk parameter Debu dan Karbon Monoksida.

In 2019, the results of air quality monitoring have improved compared to 2018, this is one indicator of the increasing implementation of environmental management carried out by all Port Branches in accordance with the environmental permit documents. In Semester I and II 2019 a total of 94% and 98% of air quality in the IPC Port Branch meet standard quality for the Dust and Carbon Monoxide parameters.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO ENVIRONMENT

PENGELOLAAN EMISI

Secara umum kegiatan pengelolaan kualitas udara yang dilakukan oleh IPC, antara lain:

1. Melakukan penanaman pohon di area kegiatan usaha;
2. Mewajibkan kendaraan yang masuk Terminal telah diwajibkan lolos emisi gas buang;
3. Mewajibkan kendaraan yang masuk Terminal telah diwajibkan memiliki sertifikat layak jalan/KIR;
4. Melakukan uji petik terhadap emisi yang dihasilkan kendaraan yang masuk ke Terminal.

PENGENDALIAN POLUSI

Selain pengendalian energi, Perseroan sedang berupaya melakukan pengendalian polusi atau upaya penurunan polusi di lingkungan pelabuhan yaitu melalui upaya-upaya konversi penggunaan *energy fosil* (BBM) menjadi energi listrik. Pengendalian polusi ini penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitar wilayah pelabuhan sehingga tercipta lingkungan pelabuhan yang bersih dan hijau atau diistilahkan dengan "Green Port".

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pengendalian polusi diantaranya adalah seluruh program penghematan energi dan program penyediaan daya listrik untuk kapal-kapal niaga pada saat sandar atau *Shore Connction* ke kapal, dimana saat ini sedang dilakukan *pilot project* di beberapa dermaga Pelabuhan Tanjung Priok yang dilaksanakan oleh anak perusahaan IPC yang mengelola energi dan diperkirakan akan diselesaikan pada tahun 2020. Diharapkan dapat diterapkan di seluruh Pelabuhan di Tanjung Priok dan diseluruh wilayah Pelabuhan milik IPC.

PENGELOLAAN LIMBAH

IPC telah melakukan pengendalian limbah B3 dengan baik. Pengendalian limbah tersebut dilakukan berdasarkan jenis limbah. Jenis limbah tersebut dibedakan menjadi limbah padat/sampah, limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), dan limbah cair domestik. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai pengendalian limbah-limbah tersebut.

LIMBAH PADAT/SAMPAH

Baik di area gedung perkantoran, maupun di area Terminal/Operasional, sampah dari kegiatan yang dihasilkan oleh IPC, selama ini telah dikelola dengan baik. Bentuk pengelolaan ini, antara lain adanya penyediaan wadah sampah dengan jumlah yang memadai pada area-area tersebut, pengangkutan sampah

EMISSION MANAGEMENT

In general, the air quality management activities carried out by IPC includes:

1. Planting trees in the area of business activities;
2. Requiring vehicles entering the Terminal to pass exhaust emission tests;
3. Requiring vehicles entering the Terminal to be have a roadworthy certificate/KIR;
4. Conducting emission tests on vehicles entering the Terminals.

POLLUTION CONTROL

In addition to energy control, Company strives to control pollution or reduce pollution in the port environment through the efforts of converting fossil energy (BBM) into electricity. Pollution control is important to improve the quality of the environment around the port area so as to create a clean and green environment or "Green Port".

Efforts that have been made to control pollution include energy saving programs and electricity supply program for commercial vessels when docked or Shore Connection to ships; the pilot project is currently being carried out at several docks owned by the Port of Tanjung Priok, and is carried out by IPC's subsidiary managing energy, and is expected to be completed in 2020. It is expected that the results can be applied in all Ports in Tanjung Priok and throughout IPC Port area.

WASTE MANAGEMENT

IPC carries out B3 waste control properly. Waste control is carried out based on the type of waste. The type of waste is divided into solid/waste, B3 waste (Hazardous and Toxic Materials), and domestic liquid waste. The following further explains the control of these wastes.

SOLID WASTE/GARBAGE

Both in the office building area, as well as in the Terminal/operational area, waste produced from IPC activities has been well managed so far. This form of management, includes providing adequate waste containers in all areas, routine transportation of waste from waste containers to TDS (Temporary Disposal Site),



secara rutin dari wadah sampah ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara), dan pengangkutan dari TPS ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Pada tahun 2019, melaksanakan program implementasi pengelolaan sampah terpilah dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)

Limbah B3 di IPC dihasilkan dari kegiatan perkantoran dan terminal/operasional. Dari kegiatan perkantoran, limbah B3 yang dihasilkan antara lain seperti *toner, cartridge, kain majun, oli bekas genset, bangkai lampu, dan sebagainya*. Dari kegiatan terminal/operasional, limbah B3 yang dihasilkan antara lain bahan bakar bekas dari *crane, oli bekas genset, bangkai lampu, dan sebagainya*. Salah satu Entitas Anak IPC yang telah mengelola limbah B3 tersebut adalah PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Sampai dengan tahun 2019, selain Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) juga telah menerbitkan izin RF untuk tiga (3) Cabang Pelabuhan lainnya, yaitu Panjang, Palembang, dan Teluk Bayur.

and transportation from TDS to FPS (Final Processing Site). In 2019, implementing segregated waste management program with the concept of 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

B3 WASTE (HAZARDOUS AND TOXIC MATERIALS)

B3 waste at IPC is generated from office and terminal/operational activities. From office activities, B3 waste produced includes toner, cartridges, woven cloth, used generator oil, used bulbs, and so on. From terminal/operational activities, B3 waste produced includes used fuel from cranes, used generator oil, used bulbs, and so on. One of the subsidiaries of IPC managing its B3 waste is PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Until 2019, in addition to Tanjung Priok Port Branch, the Ministry of Environment & Forestry (KLHK) has also issued RF permits for three (3) other Port Branches, namely Panjang, Palembang and Teluk Bayur.

Tabel Fasilitas di Reception Facilities Tanjung Priok
Tanjung Priok Reception Facilities

No	Perlengkapan Equipment	Unit Unit	Kapasitas Capacity	Penjelasan Explanation
1	TUG BOAT • TB TANJUNG V • KT TANJUNG VII	2	350 HP 350 HP	3 Captains, 3 KKM, 3 crews
2	BARGE • TK DPS I • TK BPP 105 • TK RF 1 TK RF 2	3	185 M ³ 285 M ³ 300 M ³ 200 M ³	6 crews
3	RECEPTION TANK	1	25 M ³	Steel Material
4	CONTAINER	2	60 M ³	Steel Material
5	SAPARATOR	1	10 M ³ /Jam	3 Officer
6	OIL BOOM	1	200 M	
7	BRIDGE FACILITY	1	6 M	

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO ENVIRONMENT

No	Cabang Branch	Nomor Izin Permit Number	Jenis Izin Pengelolaan Limbah B3 Type of B3 Waste Management Permit	Tanggal Terbit Issuance Date	Berlaku Validity Period	Jenis Limbah B3 Type of B3 Waste	Kode Limbah Waste Code
1	Palembang	S.530/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2019	Izin Pengumpulan Limbah B3 di RF B3 Waste Collecting Permit in RF	28 Mei 2019 May 28, 2019	5 Tahun 5 years	Pelumas Bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolis, mesin gear, insulasi, <i>heat transmission, grit chamber</i> , Separator dan/atau campurannya Used lubricants include used hydraulic grease, engine gear, lubrication, insulation, heat transmission, grit chamber, separator and/or mixtures thereof	B105d
2	Panjang, Bandar Lampung	S.529/Menlhk/Setjen/PLB.3/7/2019	Izin Pengumpulan Limbah B3 di RF B3 Waste Collecting Permit in RF	31 Juli 2019 July 31, 2019	5 Tahun 5 years	Pelumas Bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolis, mesin gear, insulasi, <i>heat transmission, grit chamber</i> , Separator dan/atau campurannya Used lubricants include used hydraulic grease, engine gear, lubrication, insulation, heat transmission, grit chamber, separator and/or mixtures thereof	B105d
						Residu Proses produksi yang meliputi <i>Manufakturing</i> , Perakitan dan Pemeliharaan Residual of production processes that include Manufacturing, Assembly and Maintenance	A323-3
3	Teluk Bayur, Padang	S.533/Menlhk/Setjen/PLB.3/7/2019	Izin Pengumpulan Limbah B3 di RF B3 Waste Collecting Permit in RF	31 Juli 2019 July 31, 2019	5 Tahun 5 years	Pelumas Bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolis, mesin gear, insulasi, <i>heat transmission, grit chamber</i> Used lubricants include used hydraulic grease, engine gear, lubrication, insulation, heat transmission, grit chamber, separator and/or mixtures thereof	B105d
						Residu Proses produksi yang meliputi <i>Manufakturing</i> , Residual of production processes that include Manufacturing, Assembly and Maintenance	A323-3

LIMBAH CAIR

Limbah cair yang dihasilkan oleh Perseroan dapat memengaruhi kualitas badan air. Secara keseluruhan badan air yang dimaksud adalah air laut, kecuali hanya pada cabang pelabuhan Jambi, Palembang dan Pontianak berupa air sungai. Limbah cair ini dipengaruhi oleh kegiatan toilet, *pantry* dan kegiatan operasional di terminal. Beberapa unit kerja di IPC yang telah mengelola limbah ini, antara lain Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT IKT, PT PPI, dan PT PMLI.

LIQUID WASTE

The liquid waste produced by the Company can affect the quality of water bodies. overall, the water body in question is sea water, except for Jambi, Palembang and Pontianak port branches where it is river water. This liquid waste is influenced by the activities of toilets, pantries and operational activities in the terminal. several work units at IPC managing this waste include Head Office, Tanjung Priok Port Branch, PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT IKT, PT PPI, and PT PMLI.



Untuk Pengelolaan Limbah Domestik dari Kegiatan Operasional Perkantoran khususnya di Kantor Pusat IPC dan Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kapasitas masing-masing sebesar 50m³ untuk memastikan air yang dibuang ke badan air sudah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Fasilitas ini telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04.37.12 tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Nomor 04.38.12 tahun 2014 tentang Pembuangan Air Limbah ke Laut PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok.

For Domestic Waste management from office operational activities, especially at IPC Head Office and PT Pelabuhan Tanjung Priok Office, Waste Water Treatment Plants (WWTP) with a capacity of 50m³ each ensure that water discharged into water bodies meets the required quality standards. These facilities received permits from the Ministry of Environment and Forestry Number 04.37.12 in 2014 concerning Permits to Dispose Waste Water into the Sea at Head Office of PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) and Number 04.38.12 in 2014 concerning the Disposal of Wastewater into the Sea by PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Tabel Monitor IPC Pada Kualitas Air Laut/Air Sungai Selama Tahun 2018 - 2019
IPC Sea Water/River Water Quality Monitoring for 2018 - 2019

No	Lokasi IPC IPC Location	2019				2018			
		Memenuhi Baku Mutu Meets Quality Standards		Tidak Memenuhi Did Not Meet Quality Standards		Memenuhi Baku Mutu Meets Quality Standards		Tidak Memenuhi Did Not Meet Quality Standards	
		Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
1	Tanjung Priok	10	10	0	0	10	10	0	0
2	Tanjung Pandan	7	7	0	0	7	7	0	0
3	Banten	4	4	0	0	10	10	0	0
4	Panjang	4	4	0	0	4	4	0	0
5	Sunda Kelapa	9	9	0	0	9	9	0	0
6	Jambi (Talang Duku)	6	6	0	0	6	6	0	0
7	Pontianak	2	2	0	0	2	2	0	0
8	Pangkal Balam	9	9	0	0	9	9	0	0
9	Teluk Bayur	3	3	0	0	3	3	0	0
10	Palembang	10	10	0	0	8	8	0	0
11	Bengkulu	5	5	0	0	5	5	0	0
12	Bojonegara	8	8	0	0	8	8	0	0
13	Kantor Pusat	4	4	0	0	4	4	0	0
14	Kantor Pusat Head Office	0	0	2	2	2	0	0	0
Jumlah Total		85	87	4	2	84	87	3	0
Persentase Percentage		96%	98%	4%	2%	97%	100%	3%	0%

***Catatan**

- Indikator parameter yang diambil adalah TSS (Pelabuhan Laut), TDS (Pelabuhan Sungai) beserta parameter minyak dan lemak
- Bakumutu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 51 tahun 2004 dan PP No. 82 Tahun 20019

***Note**

- Indicator parameters are TSS (Sea Port), TDS (River Port) along with oil and fat parameters
- Standard Quality is in accordance with the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 51 of 2004 and PP No. 82 of 2001

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO ENVIRONMENT

Pada tahun 2019, hasil *monitoring* pada kualitas air mengalami fluktuatif dari tahun 2018. Terdapat penambahan titik pemantauan kualitas air laut di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur sehingga jumlah titik pemantauan kualitas air laut seluruh Cabang menjadi 89 Titik. Target pemenuhan Baku Mutu Kualitas Air Laut masih terjaga di besaran 96% dan 98% di semester I dan II tahun 2019.

In 2019, the water quality monitoring results fluctuated from 2018. There were additional points for sea water quality monitoring at Teluk Bayur Port Branch which lead to sea water quality monitoring points in all Branches became 89 points. The target of Sea Water Quality Standards is still maintained at 96% and 98% in semester I and II of 2019.

IPC juga melaksanakan Program CSR yang dilaksanakan dalam praktik bisnis Perseroan untuk meminimalisir penggunaan air bersih dan pembersihan sampah di wilayah perairan.

IPC also implements CSR programs in the Company's business practices to minimize the use of clean water and clean up waste in the waters.

Adapun program CSR tersebut yakni:

The CSR programs are as follows:

- Kapal Pengangkut Sampah dan Mobil Penyapu Jalan (*Road Sweeper*).

- Garbage cleaning Ship and Vehicles

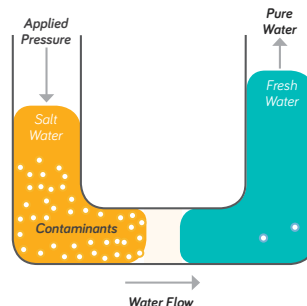
Sebagai kepedulian Perseroan terhadap pencemaran lingkungan, IPC mengoperasikan kapal pengangkut sampah dan mobil penyapu jalan untuk pelayanan menjalankan Bisnis Kepelabuhanan.

As a commitment of the Company's concern for environmental pollution, IPC operates garbage ship and road sweeper for the Port Business services.



- Penyulingan Air Laut (*Reverse Osmosis*).
Sebagai kepedulian Perseroan terhadap lingkungan, dalam penggunaan air bersih IPC menerapkan Penyulingan Air Laut untuk meminimalisir penggunaan air tanah yang dapat merusak permukaan tanah melalui kerja sama dengan pihak ketiga (*vendor*).

- Seawater Distillation
As part of the Company's concern for the environment, for clean water IPC uses a Sea Water distillation to minimize the use of ground water that can damage the soil surface through cooperation with a third party (*vendor*).





- Pengelolaan Limbah Kapal (*Reception Facility*). Untuk mendukung bisnis perusahaan untuk mencapai kelas dunia, IPC menyediakan fasilitas pengelolaan limbah kapal untuk menciptakan perusahaan yang ramah terhadap lingkungan.
- Ship Waste Management To support the Company's business to become world class, IPC provides ship waste management facilities to create a company that is environmentally friendly.



Perseroan memiliki mekanisme pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan CSR bidang lingkungan hidup yang merupakan salah satu bagian dari laporan manajemen. Laporan manajemen senantiasa di-review oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada para Pemegang Saham.

The Company has a reporting mechanism on the results of environment-related CSR activities as a part of the management report. The management report is always reviewed by Board of Directors and Board of Commissioners before being submitted to the Shareholders.

PELAKSANAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVE IN ENVIRONMENT

GREEN PORT ASSESSMENT KEMENKO MARITIM

GREEN PORT ASSESSMENT OF COORDINATING MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS

Pada tanggal 3–6 September 2019, IPC telah melaksanakan *Assessment Green Port* oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI bekerja sama dengan Lembaga Audit Sucofindo. Area yang ditentukan adalah PT Terminal Petikemas Terminal 2.

On September 3–6, 2019, IPC has conducted a Green Port Assessment by the Indonesian Coordinating Ministry for Maritime Affairs in collaboration with Sucofindo Audit Institute. The area specified is PT Terminal Petikemas Terminal 2.

Sebagai salah satu rangkaian *assessment*, di hari terakhir pada tanggal 6 September 2019, dilakukan juga Penanaman Pohon Mangrove di Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.

As one of the series of assessments, on the last day on September 6, 2019, a Mangrove Tree Planting was carried out in Segarajaya Village, Tarumajaya District, Bekasi Regency.



Pelaksanaan Penanaman Mangrove sebagai Salah Satu Rangkaian *Assessment Green Port* Kemenko Maritim
Implementation of Mangrove Planting as a Series Port Green Assessment of the Ministry of Maritime Affairs

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO ENVIRONMENT

Kriteria Assessment yang digunakan adalah sebagai berikut: The Assessment Criteria used are as follows:

No	Kode Aspek Aspect Code	Nama Aspek Aspect Name
Aspek Manajemen Management Aspect		
1	KK	Komitmen dan kebijakan penerapan <i>green port</i> Green port commitment and application policy
2	PG	Promosi <i>green port</i> Green port promotion
Aspek Teknis Technical Aspect		
3	KP	Tata kelola kawasan pelabuhan Port area management
4	TP	Tata kelola transportasi pendukung Supporting transport governance
5	KU	Pengelolaan kualitas udara Management of air quality
6	KL	Pengelolaan kualitas air laut, air permukaan dan sedimen Management of sea water quality, surface water and sediment
7	AT	Pengelolaan kualitas tanah dan air tanah Management of soil and groundwater quality
8	PR	Pengerukan dan reklamasi berkelanjutan Continuous dredging and reclamation
9	DK	Minimalisasi dampak kebisingan Minimization of noise impacts
10	PE	Pengelolaan energi Energy management
11	EB	Penerapan emisi karbon dan penggunaan energi bersih Implementation of carbon emissions and clean energy use
12	HA	Manajemen konservasi habitat alam Management of natural habitats conservation
13	K3	Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja Application of occupational safety and health
14	LB	Manajemen pengelolaan limbah Waste management
15	3R	Penerapan <i>reduce, reuse</i> dan <i>recycle</i> <i>Reduce, reuse and recycle implementation</i>

Adapun hasil Assessment terdiri dari 12 *Opportunity for Improvement* (OFI), dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. IPCTPK Terminal Peti Kemas 2 telah memenuhi target capaian *Green Port* Kemenko Maritim tahun 2019 sebesar 30–50%;
2. Masih terdapat *Opportunity For Improvement* (OFI) pada kriteria wajib yang belum terpenuhi;
3. Pemenuhan OFI untuk diselesaikan sebelum pengumuman penghargaan *Green Port* pada Desember 2019.

Perseroan memiliki mekanisme pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan CSR bidang lingkungan hidup yang merupakan salah satu bagian dari laporan manajemen. Laporan manajemen senantiasa di-review oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada para Pemegang Saham.

The assessment results consist of 12 *Opportunity for Improvement* (OFI), with the following conclusions:

1. IPCTPK Container Terminal 2 has fulfilled the Ministry of Maritime Affairs *Green Port* target in 2019 of 30–50%;
2. There is still *Opportunity For Improvement* (OFI) on mandatory criteria that have not been met;
3. OFI fulfillment to be completed before the announcement of *Green Port* award in December 2019.

The Company has a reporting mechanism on the results of environment-related CSR activities as a part of the management report. The management report is always reviewed by Board of Directors and Board of Commissioners before being submitted to the Shareholders.



PELIBATAN STAKEHOLDER

Sampai saat ini Perseroan masih menitikberatkan pada pelibatan *Stakeholder* internal Perseroan yaitu Direksi dan seluruh Karyawan dalam berbagai kegiatan lingkungan hidup yang dilakukan Perseroan. Pencegahan, penurunan dan perbaikan lingkungan hidup secara umum masih dilakukan oleh pihak internal Perseroan.

CAPAIAN DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

DAMPAK EFISIENSI PENGGUNAAN ENERGI

Dengan dilakukannya program pengelolaan energi yang lebih baik dan berkesinambungan, maka hal ini memberikan dampak positif bagi terjadinya efisiensi dalam penggunaan energi. Sebagai contoh, berikut ini adalah dampak dari dilakukannya elektrifikasi peralatan yaitu perubahan penggunaan energi dari bahan bakar fosil ke energi listrik pada 11 (sebelas) unit GLC di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Dampak dari perubahan penggunaan energi tersebut, berupa penurunan biaya operasi dan polusi udara. Sebelum dilakukan elektrifikasi (tahun 2018), biaya bahan bakar fosil rata-rata perbulan untuk per tonase throughput adalah Rp3.127,54. Sedangkan setelah dilaksanakan elektrifikasi biaya penggunaan energi listrik rata-rata perbulan untuk per tonase throughput adalah Rp2.066,04. Dari hasil tersebut diperoleh efisiensi terhadap penggunaan energi untuk proses bongkar muat sebesar 34%.

Dampak langsung lainnya dengan dilakukannya elektrifikasi adalah peningkatan kualitas udara (penurunan polusi udara) di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok. Pada tabel dibawah ini pada kolom UA.4 dan UA.8 yang merupakan titik lokasi 11 (sebelas) unit GLC, dapat dilihat peningkatan kualitas udara di lingkungan sekitar 11 (sebelas) unit GLC tersebut.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

To date, the Company has focused on the involvement of the Company's internal stakeholders, namely Directors and all employees in various environmental activities of the Company. Prevention, reduction and improvement of the environment in general is still carried out by the internal parties in the Company.

ACHIEVEMENT OF QUANTITATIVE IMPACTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ENVIRONMENT

IMPACT OF ENERGY EFFICIENCY

With the implementation of good and sustainable energy management program, positive impact is obtained in the efficiency of energy consumption. For example, the following is the impact of equipment electrification, which is the change in the energy consumption from fossil fuels to electricity in 11 (eleven) GLC units at the Tanjung Priok Port Branch. The impact in energy consumption is a decrease in operating costs and air pollution. Before electrification (2018), the average monthly cost of fossil fuels per tonnage throughput was Rp3,127.54. Whereas after electrification, the average monthly cost of using electrical energy per tonnage throughput is Rp2,066.04. From these results, the efficiency of energy consumption obtained for the loading and unloading process is 34%.

Another direct impact with electrification is the improved air quality (decreasing air pollution) in Tanjung Priok Port environment. In the table below in columns UA.4 and UA.8 which are the location points of 11 (eleven) GLC units, we can see the increase in the air quality in the environment around 11 (eleven) GLC units.



Potret Pelabuhan

IRC
Kawasan Maritim Indonesia



Laporan Pelaksanaan RKL-RPL
Kegiatan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok – Semester I Tahun 2018

Tahun 2018 Tabel Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien

No	Parameter Parameters	Waktu Pengukuran Measurement Time	Satuan Unit	Baku Mutu Quality Standards*)
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂) Sulfur Dioxide (SO ₂)	1 Jam 1 Hour	µg/Nm ³	900
2.	Nitrogen Dioksida (NO ₂) Nitrogen Dioxide (NO ₂)	1 Jam 1 Hour	µg/Nm ³	400
3.	Oksidan (O ₃) Oxidant (O ₃)	1 Jam 1 Hour	µg/Nm ³	200
4.	Amoniak (NH ₃) Ammonia (NH ₃)	1 Jam 1 Hour	ppm	2**
5.	Karbon Monoksida (CO) Carbon Monoxide (CO)	1 Jam 1 Hour	µg/Nm ³	26.000
6.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Hydrogen Sulfide (H ₂ S)	1 Jam 1 Hour	ppm	0,02**
7.	Debu (TSP) Dust (TSP)	24 Jam 24 Hour	µg/Nm ³	230

Sumber : Data Primer Hasil Laboratorium PT. KBL 2018

Acuan : *) Kep. Gub Provinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 (Lampiran I) tentang Baku Mutu Udara Ambien

**) KepMenLH No. 50 Tahun 1996

Keterangan :

UA.1 = PT IKT dengan titik koordinat S: 06006'08,9"; E: 106054' 54,24

UA.2 = Lapangan 217 X dengan titik koordinat S:06006'28,76"; E: 106053'19,25

UA.3 = Halaman Parkir Pelindo dengan titik koordinat S: 06°06'30,31" ; E: 106°52'59,7"

UA.4 = Lapangan Ex. 105 dengan titik koordinat S: 06°06'61,44" ; E: 106°52'54,60"

UA.5 = Pertengahan antara JICT dan PT. Graha Segara dengan titik koordinat S: 06°06'19,8" ; E: 106°53'55,5"

UA.6 = Pemukiman Penduduk RW. 10 Kelurahan Kalibaru dengan titik koordinat S: 06°06'13,6" ; E: 106°55'10,9"

UA.7 = Lapangan Ex. Gudang CFS dengan titik koordinat S: 06°06'28,87" ; E: 106°52'32,8"

UA.8 = PT. Bima Sepaja Abadi dengan titik koordinat S: 06°05'51,96" ; E: 106°53'7,19"

UA.9 = Terminal Multipurpose Area Kali Japat dengan titik koordinat S: 06°06'41,77" ; E: 106°51'35,8"

UA.10 = Lapangan Ex. Inggom dengan titik koordinat S: 06°06'45,5" ; E: 106°52'11,0"

UA.11 = PT MAL dengan titik koordinat S: 06°05'54,27" ; E: 106°53'22,1"

UA.12 = JICT II dengan titik koordinat S: 06°06'16,66" ; E: 106°54'54,3"

UA.13 = Paliat dengan titik koordinat S: 06°06'30,18" ; E: 106°52'37,9"

UA.14 = PT Bogasari dengan titik koordinat S: 06°06'27,95" ; E: 106°54'33,0"

Pemantauan Lingkungan Tahap Operasi Pelabuhan
Tanjung Priok
*Environmental Monitoring Operation Phase
Tanjung Priok Harbour*

Laporan Pemantauan Lingkungan
Pelaksanaan RKL dan RPL
*Environmental Monitoring Report
Implementation of RKL and RPL*

Tabel Hasil Analisis Parameter Kualitas Udara Ambien

No	Parameter Parameters	Satuan Unit	Hasil Analisis Results of Analysis						
			UA.1	UA.2	UA.3	UA.4	UA.5	UA.6	UA.7
1	Sulfur Dioksida (SO ₂) Sulfur Dioxide (SO ₂)	µg/Nm ³	<26	<26	<26	<26	<26	<26	<26
2	Karbon Monoksida (CO) Carbon Monoxide (CO)	µg/Nm ³	69	687	<11	687	332	355	916

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO ENVIRONMENT

RKL-RPL Report
Tanjung Priok Port Operational
Activities of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tanjung Priok Branch – 1st Semester of 2018

Ambient Air Quality Measurement Results in 2018

Hasil Pengukuran Semester I Tahun 2018 Measurement Results of 1 st Semester of 2018														
UA.1	UA.2	UA.3	UA.4	UA.5	UA.6	UA.7	UA.8	UA.9	UA.10	UA.11	UA.12	UA.13	UA.14	
42	43	51	51	45	42	50	43	55	48	48	45	46	53	
79	77	102	105	81	84	101	77	102	88	89	80	93	110	
87	82	77	90	81	84	77	97	91	100	98	103	87	78	
0.016	0.019	0.016	0.019	0.012	0.015	0.017	0.011	0.019	0.014	0.018	0.012	0.019	0.021	
964	1.224	1.756	765	997	1.503	898	1.252	1.061	1.032	1.285	997	1.420	903	
<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
145	132	139	133	142	123	137	128	133	124	119	144	124	72	

Source: Primary Data Laboratory Results of PT. KBL 2018

Acuan : *) Governor of DKI Jakarta Province Decree No. 551 of 2001 (Appendix I) concerning Ambient Air Quality Standards

***) Ministry of Environment Decree No. 50 of 1996

Information:

UA.1 = PT IKT with coordinate S: 06006'08,9"; E: 106054' 54,24

UA.2 = 217 X Field with coordinate S:06006'28,76"; E: 106053'19,25

UA.3 = Pelindo Parking Lot with coordinate S: 06°06'30,31"; E: 106°52'59,7"

UA.4 = Ex. 105 Field with coordinate S: 06°06'61,44"; E: 106°52'54,60"

UA.5 = Middle area of JICT and PT. Graha Segara with coordinate S: 06°06'19,8"; E: 106°53'55,5"

UA.6 = Residence of RW. 10 Kalibaru Subdistrict with coordinate S: 06°06'13,6"; E: 106°55'10,9"

UA.7 = Ex. CFS Warehouse Field with coordinate S: 06°06'28,87"; E: 106°52'32,8"

UA.8 = PT. Bima Sepaja Abadi with coordinate S: 06°05'51,96"; E: 106°53'7,19"

UA.9 = Multipurpose Terminal Area Kali Japat with coordinate S: 06°06'41,77"; E: 106°51'35,8"

UA.10 = Ex. Inggom Field with coordinate S: 06°06'45,5"; E: 106°52'11,0"

UA.11 = PT MAL with coordinate S: 06°05'54,27"; E: 106°53'22,1"

UA.12 = JICT II with coordinate S: 06°06'16,66"; E: 106°54'54,3"

UA.13 = Paliat with coordinate S: 06°06'30,18"; E: 106°52'37,9"

UA.14 = PT Bogasari with coordinate S: 06°06'27,95"; E: 106°54'33,0

Semester II Tahun 2019
Semester II of 2019

Ambient Air Quality Measurement Results in 2018

UA.8	UA.9	UA.10	UA.11	UA.12	UA.13	UA.14	Baku Mutu
<26	<26	<26	<26	<26	<26	<26	900
<11	206	355	34	458	424	<11	26000



Pemantauan Lingkungan Tahap Operasi Pelabuhan
Tanjung Priok
*Environmental Monitoring Operation Phase
Tanjung Priok Harbour*

Laporan Pemantauan Lingkungan
Pelaksanaan RKL dan RPL
*Environmental Monitoring Report
Implementation of RKL and RPL*

Tabel Hasil Analisis Parameter Kualitas Udara Ambien

No	Parameter <i>Parameters</i>	Satuan <i>Unit</i>	Hasil Analisis <i>Results of Analysis</i>						
			UA.1	UA.2	UA.3	UA.4	UA.5	UA.6	UA.7
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂) <i>Nitrogen Dioxide (NO₂)</i>	µg/Nm ³	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
4	Oksidan (O ₃) <i>Oxidant (O₃)</i>	µg/Nm ³	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8
5	Hidrokarbon <i>Hydrocarbon</i>	µg/Nm ³	7	7	8	8	10	9	8
6	PM ₁₀	µg/Nm ³	16	32	24	52	1	43	42
7	PM _{2,5}	µg/Nm ³	5	15	16	23	0,3	1	21
8	TSP (Dust)	µg/Nm ³	46	99	57	103	25	135	234
9	Lead (Pb)	µg/Nm ³	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

Sumber : Data Primer, 2019.

Baku Mutu sesuai Per.Gub. DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien.

Keterangan:

UA1	S 06° 06' 7.63"	E 106° 54' 54.3"	PT. IKT
UA2	S 06° 06' 27.64"	E 106° 53' 11.1"	Lapangan 217X
UA3	S 6° 06' 30.31"	E 106° 52' 59.7"	Halaman Parkir Pelindo
UA4	S 06° 06' 6.44"	E 106° 52' 54.6"	Lapangan EX 105
UA5	S 06° 6.36246"	E 106° 54.01872"	Tengah antara JICT & PT. Graha Segara
UA6	S 06° 06' 13.65"	E 106° 55' 1.09"	Pemukiman Penduduk RW 10, Kelurahan Kalibaru
UA7	S 06° 06' 28.87"	E 106° 52' 32.8"	Lapangan EX Gudang CFS
UA8	S 06° 05' 52.0"	E 106° 53' 07.2"	PT Bima Sepaja Abadi
UA9	S 06° 06' 41.77"	E 106° 51' 35.8"	Terminal Multipurpose Area Kalijapat (PT. Ekanuri)
UA10	S 06° 06' 45.5"	E 106° 52' 11.0"	Lapangan EX Inggom
UA11	S 06° 05' 54.27"	E 106° 53' 22.1"	PT. MAL
UA12	S 06° 06' 16.66"	E 106° 53' 8.73"	JICT II
UA13	S 06° 6.6708"	E 106° 52.537"	Paliat
UA14	S 06° 5' 59.046"	E 106° 54' 34.5492"	PT Bogasari

Tabel Perbandingan Tingkat Efisiensi Biaya Penggunaan Energi Di 11 (sebelas) Unit GLC Cabang Pelabuhan Tanjung Priok

Table - Comparison of Cost Efficiency in Energy Consumption in 11 (eleven) GLC Units of Tanjung Priok Port Branch

Uraian <i>Description</i>	Sebelum Elektrifikasi (Rata-Rata Biaya BBM/Ton) <i>Before Electrification (Electricity and Fuel Cost/ Month)</i>	Sesudah Elektrifikasi (Rata-Rata Biaya Listrik/Ton) <i>After Electrification (Electricity Cost/Month)</i>	Efisiensi (selisih Rata-Rata Biaya Listrik/Ton) <i>Efficiency (difference in Avg Electric / Ton Costs)</i>
Biaya Energi Untuk Pengoperasian 11 (sebelas) Unit GLC di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok Energy Costs for 11 (eleven) GLC Units of Tanjung Priok Port Branch	Rp3.127,54	Rp2.066,04	Rp1.061,54

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO ENVIRONMENT

Semester II Tahun 2019
Semester II of 2019

Ambient Air Quality Measurement Results in 2018

	UA.8	UA.9	UA.10	UA.11	UA.12	UA.13	UA.14	Baku Mutu
	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	400
	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	200
	7	9	12	5	11	7	4	160
	0,4	22	52	0,8	17	21	0,5	150
	0,1	33	0,1	0,4	6	2	0,4	65
	23	54	189	36	60	85	1,9	230
	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	2

Source: Primary Data, 2019

Quality Standards are in accordance with Governor of DKI Jakarta Regulation No. 551 of 2001 on Ambient Air Quality Standards.

Information:

UA1	S 06° 06' 7.63"	E 106° 54' 54.3"	PT. IKT
UA2	S 06° 06' 27.64"	E 106° 53' 11.1"	217X Field
UA3	S 6° 06' 30.31"	E 106° 52' 59.7"	Pelindo Parking Lot
UA4	S 06° 06' 6.44"	E 106° 52' 54.6"	Ex 105 Field
UA5	S 06° 6.36246"	E 106° 54.01872"	Middle area of JICT & PT. Graha Segara
UA6	S 06° 06' 13.65"	E 106° 55' 1.09"	Residence of RW 10 Kalibaru Subdistrict
UA7	S 06° 06' 28.87"	E 106° 52' 32.8"	EX CFS Warehouse Field
UA8	S 06° 05' 52.0"	E 106° 53' 07.2"	PT Bima Sepaja Abadi
UA9	S 06° 06' 41.77"	E 106° 51' 35.8"	Multipurpose Terminal Area Kalijapat (PT. Ekanuri)
UA10	S 06° 06' 45.5"	E 106° 52' 11.0"	Ex Inggom Field
UA11	S 06° 05' 54.27"	E 106° 53' 22.1"	PT. MAL
UA12	S 06° 06' 16.66"	E 106° 53' 8.73"	JICT II
UA13	S 06° 6.6708"	E 106° 52.537"	Paliat
UA14	S 06° 5' 59.046"	E 106° 54' 34.5492"	PT Bogasari

Tabel Volume Penggunaan Listrik

Table - Electricity Consumption Volume

No	Nama Perusahaan Company	2019	2018	Pertumbuhan (Growth) %
Kantor Pusat Head Office				
1	IPC	2.420.818	4.034.021	-40,0%
Kantor Cabang Branch Offices				
1	Cabang Pelabuhan Tanjung Priok Branch Pelabuhan Tanjung Priok	5.422.940	8.933.965	-39,3%
2	Cabang Pelabuhan Palembang Branch Pelabuhan Palembang	757.373	5.916.857	-87,2%
3	Cabang Pelabuhan Panjang Branch Pelabuhan Panjang	3.897.865	9.097.448	-57,2%



Tabel Volume Penggunaan Listrik
Table - Electricity Consumption Volume

No	Nama Perusahaan Company	2019	2018	Pertumbuhan (Growth) %
Entitas Anak Subsidiaries				
1	PT Jasa Armada Indonesia	369.204	782.614	-52,8%
2	PT Jakarta International Container Terminal	7.404.880	15.995.920	-53,7%
3	PT Pelabuhan Tanjung Priok	5.159.943	9.191.831	-43,9%
4	PT Indonesia Kendaraan Terminal	2.118.269	2.600.879	-18,6%
5	PT IPC Terminal Petikemas	5.952.610	6.510.852	-8,6%
6	PT Multi Terminal Indonesia	3.494.420	4.458.963	-21,6%
7	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	55.175	151.040	-63,5%
8	PT New Priok Container Terminal One	13.824.615	20.261.457	-31,8%
Total		50.878.112	87.935.847	-42,1%

Merujuk pada tabel tersebut, pada tahun 2019 diperoleh efisiensi penggunaan listrik di beberapa Cabang dan Anak Perusahaan IPC dengan nilai rata-rata total pertumbuhan sebesar -42,1%.

Referring to the table, in 2019 it can be seen the efficiency of electricity consumption in several Branches and IPC Subsidiaries with an average total growth of -42.1%.

DAMPAK EFISIENSI PENGGUNAAN AIR

IMPACT OF WATER USE EFFICIENCY

Tabel Volume Penggunaan Air (m³)
Water Usage Volume (m³)

Uraian	Wilayah Area	2019	2018	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease
Volume Air dari <i>Water Recycle</i> Water volume from recycled wate	Cabang priok Priok Branch	103.196	89.481	15,33%

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2019 IPC, IPC telah melakukan penghematan penggunaan air. Hal ini terlihat menurunnya penggunaan volume air dari *water recycle* mengalami penurunan sebesar 13.715 m³.

In 2019, IPC made savings on water use in office. The use of water from the water recycling decreased by 13,715 m³.

SERTIFIKASI DI BIDANG LINGKUNGAN

CERTIFICATION IN ENVIRONMENT

Untuk mendukung pengelolaan lingkungan, IPC telah menerapkan *standard* internasional ISO 14001 yang meliputi:

1. PT Pelabuhan Tanjung Priok area Tanjung Priok untuk ruang lingkup: Terminal Operasi III, *Container Yard, Technical Support, Customer Service and Office Management*;
2. PT Pengembang Pelabuhan Indonesia untuk ruang lingkup: *Provision of Project Management for Port Development Work*;
3. PT Jasa Armada Indonesia untuk ruang lingkup: *Office Based Activity of Supporting Pilotage and Towage*;

To support environmental management, IPC has implemented ISO 14001 international standard which includes:

1. PT Pelabuhan Tanjung Priok for: operation Terminal III, Container yard, Technical support, Customer service and Office Management;
2. PT Pengembang Pelabuhan Indonesia for: Provision of Project Development for Port Development Work;
3. PT Jasa Armada Indonesia for: Office Based Activity of Supporting Pilotage and Towage;

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO ENVIRONMENT

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. PT Pengerukan Indonesia untuk ruang lingkup: <i>Provision of Dredging and Reclamation Services</i>; 5. PT Indonesia Kendaraan Terminal untuk ruang lingkup: Pelayanan Jasa Bongkar Muat dan Penumpukan di Lapangan Terminal Domestik, Lapangan Terminal Internasional dan Perkantoran; 6. Cabang Pelabuhan Tanjung Priok untuk ruang lingkup: Penyediaan Layanan Pelabuhan untuk Gedung Cabang Tanjung Priok, Terminal Penumpang, dan <i>Reception Facilities</i>; 7. Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk ruang lingkup: <i>Management of Head Office and Facilities</i>; 8. PT Pelabuhan Tanjung Priok area Banten; 9. PT Pelabuhan Tanjung Priok area Panjang; 10. PT Pelabuhan Tanjung Priok area Bengkulu; 11. PT Pelabuhan Tanjung Priok area Jambi. | <ol style="list-style-type: none"> 4. PT Pengerukan Indonesia for: Provision of Dredging and Reclamation Services; 5. PT Indonesia Kendaraan Terminal for: Loading and Stacking Services at Domestic Terminal Fields, International Terminal Fields and Offices; 6. Tanjung Priok Port Branch for: Provision of Port Services for Tanjung Priok Branch Building, Passenger Terminal and Reception Facilities; 7. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Head Office for: Management of Head Office and Facilities; 8. PT Pelabuhan Tanjung Priok Banten area; 9. PT Pelabuhan Tanjung Priok Panjang area; 10. PT Pelabuhan Tanjung Priok Bengkulu area; 11. PT Pelabuhan Tanjung Priok Jambi area. |
|--|---|

CAPAIAN INISIATIF CSR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Selama tahun 2019, IPC belum mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup.

SALURAN PENGADUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

IPC berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, termasuk mengelola pengaduan terkait masalah lingkungan. Untuk mengadakan permasalahan lingkungan, masyarakat dan seluruh pihak berkepentingan dapat menghubungi Sekretariat Perusahaan melalui Telepon di nomor +62-21 4367505/+62-214301080 atau *e-mail* di alamat corp_sec@indonesiaport.co.id.

Selanjutnya, Tim Sekretariat Perusahaan akan menindaklanjuti pengaduan ini dengan mencatat perihal pengaduan dan berkoordinasi dengan Tim Lingkungan untuk pengelolaan masalah yang dilaporkan agar dapat diselesaikan dengan baik dan tepat.

ACHIEVEMENT OF INITIATIVES OF CSR IN ENVIROMENT

In 2019, IPC has not yet received any award in environmental field.

COMPLAINT MECHANISM OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN ENVIRONMENT

The Company plays an active role in environmental protection and management, including managing complaints related to environmental issues. To complain on environmental issues, the public and all interested parties can contact the Corporate Secretary by telephone at + 62-21 4367505/+ 62-21 4301080 or e-mail at the address corp_sec@indonesiaport.co.id.

Furthermore, the Corporate Secretary Team will follow up complaints by recording the complaint and coordinating with the Environmental Team to manage the reported problems so that they can be resolved properly and appropriately.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

IPC telah mengatur beberapa kebijakan terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja yang tertuang pada:

1. Surat Keputusan Direksi IPC Nomor: HK.568/30/12/7/PI.II-16 tentang Pengembangan Karyawan di Lingkungan IPC;
2. Surat Keputusan Direksi IPC Nomor: HK.56/6/1/PI.II-13 tentang Pemeliharaan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Karyawan dan Pensiunan Beserta Keluarganya di Lingkungan IPC;
3. Surat Keputusan Direksi IPC Nomor: HK.01/25/7/1/KRF/UT/PI.II-19 tentang Penghasilan Bagi Karyawan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Perseroan juga melakukan *review* terhadap seluruh regulasi terkait isu-isu penting bidang ketenagakerjaan.

LINGKUP DAN PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Lingkup kegiatan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja antara lain meliputi program ketenagakerjaan (kesetaraan gender dan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja lokal, kesetaraan kesempatan pengembangan kompetensi, remunerasi, kebebasan berserikat serta program pensiun), program pengelolaan kesehatan kerja serta program keselamatan kerja (pengelolaan keselamatan kerja Karyawan dan penerapan *international ship and port security code*).

RENCANA KEGIATAN

IPC berupaya untuk menjadi Perseroan yang taat asas dan selalu menaati setiap peraturan perundang-undangan termasuk di bidang ketenagakerjaan sehingga dapat menurunkan dampak operasional Perseroan pada ketenagakerjaan. Perseroan berupaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam kegiatan Perseroan sehingga Perseroan berusaha untuk meminimalisir risiko-risiko pada kegiatan Perseroan. Salah satunya yaitu kebakaran di area pelabuhan yang dapat berimbas pada masyarakat di sekitar pelabuhan. Untuk itu, Perseroan telah memberikan saluran pengaduan agar dapat memberikan tindakan langsung pada risiko kebakaran tersebut.

COMMITMENT AND POLICIES

IPC has several policies related to employment, occupational health and safety including:

1. Decree of Board of Directors of IPC Number: HK.568/30/12/7/PI.II-16 concerning Employee Development in IPC Environment;
2. Decree of Board of Directors of IPC Number: HK.56/6/1/PI.II-13 concerning Maintenance and Health Services for Employees and Retirees and Their Families in IPC environment;
3. Decree of Board of Directors of IPC Number: KP.07.02/24/4/1/KRF/UT/PI.II-18 concerning Income for Employees of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

The Company also reviews all regulations related to important issues in the employment sector.

SCOPE AND FORMULATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

The employment, occupational health and safety activities includes the employment program (gender equality and employment opportunities, the use of local labor, equal opportunities for competency development, remuneration, freedom of association and pension programs), occupational health and safety program management (employee work safety management and application of the *international ship and port security code*).

ACTIVITY PLAN

IPC endeavors to be a Company that is fully compliant with the principles as well as all laws and regulations including those related to employment so as to reduce any impact on the Company's operations. The Company also strives to create conducive conditions in the Company's activities, to minimize risks in the Company's activities. One such risk is fire in the port areas that can affect the communities around the ports. For this, the Company has provided a complaint channel to provide direct action regarding the risk of fire.

Sampai saat ini Perseroan masih menitikberatkan pada pelibatan *Stakeholder* internal Perseroan, khususnya Serikat Pekerja dalam berbagai kegiatan ketenagakerjaan yang dilakukan Perseroan. Pelaksanaan, kegiatan ketenagakerjaan secara umum masih dilakukan oleh pihak internal Perseroan. Untuk itu IPC memberikan komitmen dan perhatian yang tinggi dalam hal kesetaraan gender dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme Karyawan, serta sistem imbal jasa yang sepadan sehingga memberikan dampak positif bagi karyawan maupun Perseroan.

Perseroan senantiasa mempertimbangkan risiko terkait bidang ketenagakerjaan, baik risiko bagi Perseroan maupun *Stakeholder* dalam melakukan perencanaan kegiatan bidang ketenagakerjaan. Risiko yang dipertimbangkan antara lain tingginya *turnover* karyawan yang akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan. Ekspektasi karyawan terkait dengan kompensasi, kebebasan menyampaikan pendapat dan kenyamanan kerja menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan bidang ketenagakerjaan.

Dalam melakukan perencanaan kegiatan bidang ketenagakerjaan, Perseroan telah melakukan *due diligence* terhadap tanggung jawab sosial Perseroan dengan memperhatikan data-data terkait *turnover* dan kepuasan karyawan. Perencanaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei kebutuhan karyawan yaitu survei *engagement*, kepuasan karyawan dan survei industri sejenis terkait ketenagakerjaan (*benchmarking*).

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

KEGIATAN KETENAGAKERJAAN

Perseroan mendorong pada seluruh karyawan dan jajaran manajemen yang berwenang dalam pengambilan keputusan untuk memiliki komitmen dalam menjalankan kegiatan CSR bidang ketenagakerjaan. Perseroan memiliki mekanisme pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan CSR bidang ketenagakerjaan yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Manajemen. Laporan Manajemen senantiasa di-review oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada para Pemegang Saham. Seluruh karyawan, jajaran manajemen, dan serikat pekerja terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan CSR bidang ketenagakerjaan. Pelaksanaan kebijakan Perseroan terkait bidang ketenagakerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

To date, the Company has been focusing on the involvement of internal stakeholders, especially the Trade Union in employment activities carried out by the Company. In general, the employment activities are still carried out by the Company's internal parties. For this, IPC is highly committed, and pays attention to gender equality and employment opportunities, job training to improve worker professionalism, and commensurate reward systems so as to have a positive impact on the employees and the Company.

The Company always considers the risks related to the field of employment, both risks for the Company and Stakeholders when planning labor issues. The risks include high employee turnover that could disrupt the Company's operational activities. Employee expectations related to compensation, freedom to express opinions and work comfort are taken into consideration in planning employment activities.

When planning employment activities, the Company conducts due diligence towards corporate social responsibility by analyzing turnover and employee satisfaction data. Planning involves surveys of employee's needs, including engagement surveys, employee satisfaction and similar industry surveys related to employment (*benchmarking*).

ACTIVITIES OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

EMPLOYMENT ACTIVITIES

The Company encourages all authorized employees and management to commit to carrying out CSR activities related to employment. The Company has a reporting mechanism on the results of employment-related CSR activities as a part of the management report. The management report is always reviewed by Board of directors and Board of Commissioners before being submitted to the Shareholders. All employees, management and trade union are actively involved in the implementation of CSR activities in the employment sector. The Company's policies related in the employment sector include.



KESETARAAN GENDER DAN KESEMPATAN KERJA

IPC memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, baik pria atau wanita tanpa memandang perbedaan etnik agama, ras, gender ataupun kondisi fisik untuk mengikuti rekrutmen Karyawan. Pengangkatan calon Karyawan di lingkungan IPC didasarkan atas hasil seleksi, evaluasi pada masa percobaan dan orientasi Karyawan. Perseroan juga menetapkan waktu kerja yang fleksibel bagi karyawan wanita, seperti memberikan cuti untuk karyawan wanita yang melahirkan atau keguguran dan fasilitas ibu menyusui.

Bagi karyawan yang berkebutuhan khusus, Perseroan memberikan fasilitas yang dibutuhkan sehingga dapat memperoleh kesempatan kerja yang sama.

PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL

Perseroan senantiasa melakukan proses rekrutmen yang mengedepankan asas-asas keterbukaan, kewajaran dan kompetensi yang dimiliki oleh kandidat dengan memperhatikan ketersediaan tenaga kerja lokal/nasional.

KESETARAAN KESEMPATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

IPC telah memiliki *Corporate University* yang berlokasi di Ciawi. Fungsi *Corporate University* ini adalah tempat Karyawan untuk memperoleh kesempatan belajar dan mendapatkan pengetahuan yang aplikatif untuk tumbuh menjadi Insan IPC yang lebih baik dan mampu memberikan kontribusi secara signifikan dalam pencapaian kinerja bisnis Perseroan.

Seluruh Program Pengembangan Kompetensi Karyawan yang dilakukan oleh *Corporate University* ditentukan sesuai kebutuhan IPC dan juga kebutuhan Karyawan dengan memperhatikan persamaan kesempatan kepada seluruh level organisasi. Untuk program pengembangan kompetensi lainnya, IPC juga mengikutkan Karyawan yang pelaksanaannya dilakukan di luar *Corporate University*.

REMUNERASI

Bagi IPC, tahun 2019 merupakan tahun dengan fase "*sustainable*", dimana Perseroan fokus dengan *growth strategy*, *national connectivity*, dan *global expansion*. Sebagai salah satu upaya dalam mendukung penerapan strategi "*sustainable*", Perseroan menerapkan kebijakan remunerasi yang berlandaskan pada prinsip dasar yaitu *Internal Equity*. Melalui prinsip tersebut, Perseroan memastikan bahwa remunerasi yang diberikan

GENDER EQUALITY AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

The Company provides equal opportunities for all people, both men and women regardless of ethnic, religion, racial, occupational, gender or physical qualities to participate in the employee recruitment programs. The appointment of a prospective employee is based on the selection results as well as the evaluation during employee probation and orientation period. The Company has also established flexible working hours for female employees, such as giving leave to female employees that are pregnant or having a miscarriage and provides nursing mothers' facilities.

For employees with special needs, the Company provides the facilities needed so that they can obtain the same employment opportunities.

USE OF LOCAL MANPOWER

When carrying out its recruitment process, the Company always prioritizes the principles of openness, fairness and equality based on competency needs and competencies possessed by candidates, and by taking into account the availability of local/national manpower.

EQUALITY OF COMPETENCY DEVELOPMENT OPPORTUNITIES

IPC has a *Corporate University* located in Ciawi. The *Corporate University* functions as a place for employees to gain learning opportunities and obtain knowledge to grow into better Insan IPC that are able to contribute significantly to the Company's business performance.

All Employee Competency Development Programs carried out by *Corporate university* are determined according to the needs of IPC and also the needs of employees by paying attention to equal opportunities at all levels of the organization. For other competency development programs, IPC also includes employees whose implementation is carried out outside the *Corporate University*.

REMUNERATION

For IPC, 2019 is a year with "*sustainable*" phase, in which the Company focuses on *growth strategy*, *national connectivity*, and *global expansion*. As one of the efforts in supporting the implementation of "*sustainable*" strategy, the Company applies a remuneration policy based on the basic principle of *Internal Equity*. Through this principle, the Company ensures that the remuneration provided is in accordance with Employee

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

sesuai dengan kinerja Karyawan (*pay for performance*) melalui pemberian insentif performansi serta Perseroan juga selalu mempertimbangkan aspek kenaikan biaya hidup. Hal ini dibuktikan melalui penetapan kebijakan penyesuaian penghasilan Karyawan di tahun 2019 dengan menaikkan penghasilan merit sebesar 10%, tunjangan perumahan 25% dan bantuan *transport* sebesar 75%. Diharapkan dengan kesejahteraan yang baik, Karyawan dapat lebih giat dan termotivasi dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan.

KEBEBASAN BERSERIKAT

IPC senantiasa berkomitmen untuk mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis dengan Serikat Pekerja sebagai perwakilan dari Karyawan. Di dalam usaha memajukan IPC, Manajemen telah menjalin hubungan industrial yang harmonis dengan serikat pekerja untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan menjalin kelangsungan kerja Perseroan.

Manajemen memandang serikat pekerja sebagai mitra strategis, sehingga kebijakan-kebijakan khususnya di bidang SDM terkait masalah kesejahteraan dapat memperoleh masukan dari serikat pekerja. Manajemen secara intens melakukan pertemuan dengan serikat pekerja minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Untuk itu, IPC telah membentuk wadah atau forum bipartit dengan serikat pekerja yang berfungsi untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang timbul maupun yang berpotensi menjadi masalah dan bertujuan sebagai wadah untuk memberikan saran kepada Manajemen dalam pengambilan keputusan di bidang ketenagakerjaan. Wadah tersebut mempermudah Karyawan dalam menyampaikan aspirasi kepada Perseroan secara berjenjang sehingga komunikasi dua arah antara IPC dan Karyawan tetap terjaga. Kegiatan Serikat Pekerja dengan Manajemen IPC adalah sebagai berikut:

performance (*pay for performance*) through the provision of performance incentives and the Company also considers the aspect of rising living costs. This is evidenced through the establishment of employee income adjustment policy in 2019 by increasing merit income by 10%, housing allowances by 25% and transport assistance by 75%. It is expected that with good welfare, employees can be more active and motivated in carrying out their duties to achieve the Company's Vision and Mission.

FREEDOM OF ASSOCIATION

IPC is committed to promoting the harmonious industrial relations with the Labor Union as representatives of the employees. In an effort to advance IPC, the management has established harmonious industrial relations with trade union to create a conducive working atmosphere and establish the continuity of the Company's business.

The management views the union as strategic partners, hence policies, especially in HC and related to welfare issues can receive input from the trade union. The management intensively conducts meetings with trade union at least every 3 (three) months.

For this reason, IPC has formed a bipartite forum or union with trade union that serves to accommodate and resolve employment dispute that arise as well as those that have the potential to become problems and as a forum to provide advice to the management in employment decisions. This forum makes it easier for employees to convey their aspirations to the Company so that two-way communication between IPC and employees is maintained. The labor union activities with IPC management are as follows:

No.	Kegiatan Activities	Tanggal Date	Tempat Place
1	Pembahasan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2019–2020 Discussion on Collective Labor Agreement (PKB) for 2019 - 2020	24–26 Januari 2019 January 24-26 2019	Jakarta
2	Penyaluran bantuan untuk korban bencana alam Lampung Distribution of aid for victims of Lampung natural disaster	29 Januari 2019 January 29, 2019	Lampung
3	Rapat Kerja Pusat ke-I tahun 2019 dengan agenda pembahasan program kerja serikat pekerja tahun 2019 The 1st 2019 Work Meeting with the agenda of discussing the 2019 workers union work program	28 Februari–2 Maret 2019 February 28 - March 2, 2019	Bogor
4	Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2019–2020 The signing of Collective Labor Agreement (PKB) 2019 - 2020	9 April 2019 April 9, 2019	Jakarta



No.	Kegiatan Activities	Tanggal Date	Tempat Place
5	Pergantian tim Bipartit Substitution of the Bipartite team	25 April 2019 April 25, 2019	Jakarta
6	Musyawahar Kerja FSPPI FSPPI Working Meeting	10–13 Juli 2019 July 10-13, 2019	Medan
7	Rapat Bipartit antara Tim Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Tim Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II Bipartite Meeting between the Management Team of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with Pelabuhan Indonesia II Workers Union Team	20 Agustus 2019 August 20, 2019	Jakarta
8	Rapat Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II Meeting of Board of Pelabuhan Indonesia II Workers Union	5–6 November 2019 November 5-6, 2019	Jakarta

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2019–2020 dilakukan oleh Tim Perunding Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Tim Perunding Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II); Penyaluran bantuan untuk korban bencana alam Lampung dilakukan oleh Pengurus Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) difasilitasi oleh Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); Rapat Kerja Pusat ke-I tahun 2019 dengan agenda pembahasan program kerja serikat pekerja tahun 2019 diselenggarakan oleh Pengurus Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) yang difasilitasi oleh Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2019–2020 dilakukan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Elvyn G. Massasya dengan Ketua Umum Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) Dodi Nurdiana; Musyawahar Kerja FSPPI perjalanan dinas difasilitasi oleh Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); Rapat Bipartit antara Tim Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Tim Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II penyelenggaraan difasilitasi oleh Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); Rapat Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II diselenggarakan oleh Pengurus Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) yang difasilitasi oleh Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). | <ol style="list-style-type: none"> The discussion of Collective Labor Agreement (PKB) for the 2019-2020 Period by the Management Team of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with Pelabuhan Indonesia II Workers Union Negotiation Team (SPPI II); Distribution of aid for victims of Lampung natural disasters carried out by the Board of Pelabuhan Indonesia II Workers Union (SPPI II) and facilitated by the Management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); The 2019 First Work Meeting with the agenda of discussing the 2019 workers union work program, organized by the Board of Pelabuhan Indonesia II Workers Union (SPPI II) and facilitated by the Management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); The signing of Collective Labor Agreement (PKB) for 2019-2020 period, carried out by the President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Elvyn G. Massasa with the Chairman of Pelabuhan Indonesia II Workers Union (SPPI II) Dodi Nurdiana; FSPPI Work Meeting on official travel, facilitated by the Management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); Bipartite Meeting between the Management Team of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with the team of Pelabuhan Indonesia II Workers Union, facilitated by the Management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); The Leaders Meeting of Pelabuhan Indonesia II Workers Union Central Management Board, held by the Board of Pelabuhan Indonesia II Workers Union (SPPI II) and facilitated by the Management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). |
|--|---|

PROGRAM PENSIUN

IPC menyadari pentingnya kesejahteraan paska kerja bagi Karyawan Perseroan, sehingga Perseroan memastikan agar para Karyawan Perseroan sejahtera ketika memasuki masa pensiun melalui Program Pensiun. Program pensiun Perseroan diselenggarakan dengan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan serta sebagai wujud apresiasi Perseroan

RETIREMENT PROGRAM

The Company is fully aware the importance of post-employment welfare for its employees, hence the Company ensures that its employees will be prosper when entering retirement through the Pension Program. The Company's pension program is carried out based on statutory provisions and as a manifestation of the Company's appreciation for the contribution and performance of

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

atas kontribusi dan kinerja Karyawan selama bekerja di Perseroan. Beberapa program pensiun yang diselenggarakan Perseroan antara lain:

1. Program pensiun
 - a. Program Pensiun Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 - b. Program Pensiun luran Pasti pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
 - c. Program Asuransi Tunjangan Hari Tua;
 - d. Program Tambahan Manfaat Purna Bakti;
 - e. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. Program Asuransi Jiwa.
2. Penghargaan atas jasa pengabdian
 - a. Pemberian Penghargaan Masa Bakti;
 - b. Penghargaan Kenaikan Kelas Jabatan Pengabdian;
 - c. Pemberian Cenderamata.
3. Fasilitas Pasca Kerja
 - a. Fasilitas Kesehatan Pensiunan beserta Keluarga;
 - b. Bantuan Pindah Pensiun;
 - c. Bantuan Musibah Kematian;
 - d. Bantuan Uang Duka dan Sumbangan Kematian.

MEKANISME PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN

IPC membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Karyawan untuk berperan serta dalam perkembangan IPC ke arah yang lebih baik. Komitmen ini ditunjukkan dengan disediakannya sarana pengaduan. Jika Karyawan memiliki keresahan terkait masalah ketenagakerjaan, dapat mengikuti tata cara sebagaimana tertuang dalam pasal 41 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) IPC dengan Serikat Karyawan Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) Periode 2019–2020, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Karyawan menyampaikan kepada Atasan Langsung di unit kerjanya untuk didiskusikan untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang adil dan memuaskan kedua belah pihak;
- b. Apabila tidak dicapai kesepakatan atau penyelesaian yang memuaskan maka Karyawan dapat meneruskan kepada Pejabat berwenang yang lebih tinggi dengan diketahui oleh atasan langsung;
- c. Apabila cara sebagaimana huruf a dan b tidak dicapai kesepakatan atau mendapatkan penyelesaian yang memuaskan, maka Karyawan dapat meneruskan kepada Pengurus Cabang Serikat Pekerja setempat untuk diselesaikan dalam forum komunikasi tingkat cabang setempat;

employees while working at the Company. The pension programs organized by the Company include:

1. Pension Program
 - a. Defined Benefit Pension Plan under the Employer Pension Fund;
 - b. Defined Contribution Pension Program in the Pension Fund of a Financial Institution;
 - c. Life Insurance Allowance Program;
 - d. Supplementary Allowance for Retirement;
 - e. Labor Social Security Program by Social Security Administering Body of BPJS Employment;
 - f. Life Insurance Program.
2. Award for Service
 - a. Rewards for Years of Service;
 - b. Promotion of Years of Service;
 - c. Souvenirs.
3. Post employment facilities
 - a. Pension and Family Health Facilities;
 - b. Pension Moving Allowance;
 - c. Fatality Allowance;
 - d. Mourning Money and Fatality Donation

COMPLAINT MECHANISM ON EMPLOYMENT ISSUES

IPC opens as wide opportunities for Employees to participate in IPC's development for the better. This commitment is demonstrated by the provision of complaint chanel. If Employees have concerns related to employment issues, they can follow the procedures as stipulated in article 41 of IPC Collective Labor Agreement with Pelabuhan Indonesia II Employee Union (SPPI II) for 2019-2020, with the following details:

- a. Employees communicate to Immediate supervisors in their work units to be discussed in order to achieve an understanding or settlement that satisfy both parties.
- b. In the event an agreement or settlement cannot be reached, the employee may forward it to a higher authority officer with the notice of the immediate superior.
- c. In the event the issue in which the letters a and b are not reached by agreement or obtain a satisfactory settlement, the employee may forward the issue to the Branch manager of the local Workers union to be resolved in the local Branch level communication forum.



d. Jika cara sebagaimana dimaksud butir c juga tidak tercapai kesepahaman dan atau permasalahannya merupakan wewenang pengusaha, maka dapat diteruskan kepada Lembaga Bipartit tingkat pusat.

Dalam hal tidak tercapainya kesepahaman atau penyelesaian yang memuaskan setelah ditempuh tahapan sebagaimana huruf a, b, c dan d maka penyelesaiannya dapat diteruskan kepada Lembaga Tripartit sebelum ditempuh prosedur penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KETENAGAKERJAAN

Perseroan rutin melaksanakan survei kepuasan karyawan tiap tahunnya. Pada tahun 2019 survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan karyawan berada pada level 4,51 skala *likert* dengan kategori "Sangat Puas", sama dengan tahun 2018. Berdasarkan hasil survei kepuasan karyawan dapat dikatakan bahwa karyawan IPC loyal terhadap Perseroan. Hal ini sejalan dengan adanya tingkat kesejahteraan, peluang, dan lingkungan kerja yang mendukung. Sementara itu, IPC juga rutin melakukan survei keterikatan Karyawan pada tiap tahunnya. Di tahun 2019, hasil pada survei sebesar 4,57 skala *likert* dengan kategori "Sangat Terikat" sama dengan tahun 2018.

Dengan adanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman memberikan dampak penurunan pada *turnover* karyawan IPC. Hal ini dibuktikan menurunnya angka *turnover* karyawan pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,35% dibandingkan tahun 2018 sebesar 2,58%. Adapun jumlah tingkat *turnover* karyawan IPC selama tahun 2018-2019 disajikan pada tabel di bawah ini:

d. In the event the measure referred in letter c is also not able to reach an understanding and or the issue is the authority of the Company, it can be forwarded to the Central Bipartite Institution.

In terms of any unsettled agreement or satisfied settlement after stages of letter a, b, c, and d have been pursued, the settlement may be forwarded to the Tripartite Institution prior to the dispute settlement procedure in accordance with the applicable laws and regulations.

QUANTITATIVE IMPACT OF EMPLOYMENT ACTIVITIES

The Company routinely carries out the employee satisfaction survey every year. In 2019, the survey showed that the level of employee satisfaction was at the level of 4.51 Likert scale with the category "Very Satisfied", the same as in 2018. Based on the results of employee satisfaction survey, it can be said that IPC employees are loyal to the Company. This was in line with the level of welfare, opportunities, and supportive work environment. Meanwhile, IPC also routinely conducts the employee engagement survey on an annual basis. In 2019, the results of the survey was 4.57 Likert scale with the category "Very Engaged", the same as in 2018.

Having a safe and comfortable work environment has impacted on the decrease of IPC employee turnover. This was evidenced by the decline in employee turnover in 2019 to 2.35% compared to 2018 of 2.58%. The turnover rate for IPC employees during 2018-2019 is presented in the table below:

Tabel Tingkat *Turnover* Tahun 2018-2019
Turnover Rate 2018-2019

Uraian Description	2019	2018
Jumlah Karyawan Masuk Number of Employees Joining	128	1
Jumlah Karyawan Keluar Number of Employees Leaving		
Pensiun Normal Normal Retirement	48	48
Meninggal Dunia Death	6	13
Mengundurkan Diri Resignation	6	5
Diangkat menjadi Direksi BUMN Appointed as SOE Director	1	1

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Tabel Tingkat Turnover Tahun 2018-2019
Turnover Rate 2018-2019

Uraian Description	2019	2018
Pensiun Permintaan Sendiri Pension with Own Request	1	0
Diberhentikan dengan Tidak Hormat Dismissed Disrespectfully	0	1
Total Jumlah Karyawan Keluar Total Number of Employees Leaving	62	68
% Turnover	2,35%	2,58%

Dengan meningkatnya kepuasan karyawan dan menurunnya *turnover* karyawan, maka hal ini menunjukkan rendahnya risiko ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Perseroan. Penurunan *turnover* juga berdampak pada efisiensi biaya yang timbul karena pelaksanaan kegiatan rekrutmen.

Increasing employee satisfaction and reduced employee turnover indicates the low employment risks faced by the Company. The reduced turnover also has an impact on cost efficiencies due to lower recruitment activities.

KEGIATAN KESEHATAN

PENGELOLAAN KESEHATAN KERJA

Karyawan merupakan aset penting yang berkontribusi besar dalam pencapaian tujuan Perseroan. Oleh karenanya Karyawan Perseroan termasuk keluarganya mendapatkan fasilitas kesehatan dengan pola *fee for service* yang diberikan melalui jaringan Rumah Sakit Pelabuhan dan pola *reimbursement*, termasuk fasilitas alat bantu kesehatan. Sebagai tindakan pencegahan dan deteksi dini atas kondisi kesehatan Karyawan, Perseroan memberikan fasilitas *general check up* bagi seluruh Karyawan.

HEALTH ACTIVITIES

OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT

Employees are important assets that contribute greatly to achieving the Company's goals. Therefore, employees of the Company, including their families, receive health facilities in the form of reimbursement for services provided through the Port hospital, including health aid facilities. as a precautionary measure and early detection of employees' health, the Company provides general check-up facilities for all employees.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan komitmen atas kesehatan Karyawan, Perseroan mengikutsertakan seluruh Karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas ini diberikan untuk memberikan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian serta jaminan hari tua bagi seluruh Karyawan.

As a form of compliance with the prevailing laws and regulations and a commitment to the health of employees, the Company includes all employees in the BPJS Health and BPJS Employment program. This facility is provided to provide health insurance, work accident and death guarantees as well as retirement benefits for all employees.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KESEHATAN

Dengan pengelolaan fasilitas kesehatan yang baik dari Perseroan, sepanjang tahun 2019 telah memberikan dampak pada tingkat produktivitas karyawan IPC. Pada 2019 produktivitas karyawan Perseroan tercatat sebesar Rp221.982.771 per karyawan menurun dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp308.505.541 per karyawan. Namun demikian, Perseroan tetap memberikan pelayanan kesehatan yang baik agar produktivitas karyawan IPC dapat terus meningkat.

QUANTITATIVE IMPACT OF HEALTH ACTIVITIES

Good management of Company health facilities throughout 2019 has had an impact on the productivity level of IPC employees. In 2019 the productivity was recorded at Rp221,982,771 per employee decreased compared to 2018 which was Rp308,505,541 per employee. However, Company continues to provide good health services so that the productivity of IPC employees can continue to increase.



KEGIATAN DAN DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KESELAMATAN KERJA

PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi IPC No. HK.01/19/2/1/MKK/UT/PI.II-18 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menetapkan bahwa pedoman SMK3 di IPC mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta mengacu pada standar SMK3 lainnya. Selain itu, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) juga secara aktif melaksanakan kegiatan P2K3 dan memperbarui susunan Tim nya seperti yang tercantum pada Surat Keputusan Direksi Nomor: PW.06.03/19/9/1/MKK/UT/PI.II-17 tanggal 19 September 2017 dengan Direktur Utama sebagai Ketua Tim (Puncak Manajemen), yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Nomor: 247 tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal keselamatan kerja, IPC menerapkan ketentuan dasar sesuai dengan syarat-syarat keselamatan kerja dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan dalam upaya mendorong penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di seluruh wilayah operasional IPC, antara lain dengan:

1. Perseroan berperan aktif melaksanakan pembinaan keselamatan kerja bagi seluruh Karyawan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan keselamatan kerja. P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang telah dibentuk di Kantor Pusat dan beberapa cabang Pelabuhan yang telah disahkan oleh Disnakertrans Provinsi setempat. Sedangkan beberapa cabang pelabuhan lainnya sedang dalam proses pembentukan;
2. Memasang kelengkapan rambu-rambu dan/atau tanda peringatan terkait keselamatan kerja di seluruh lingkungan kerja operasional, terutama pada lokasi-lokasi yang berisiko terjadinya kecelakaan kerja;
3. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang dibutuhkan bagi seluruh Karyawan operasional, termasuk pihak lain yang berada di lingkungan IPC (*visitor*) dalam upaya menjamin keselamatan kerja dalam melaksanakan aktivitas pelayanan jasa kepelabuhanan;
4. Menyediakan perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di lokasi kerja;

OCCUPATIONAL SAFETY ACTIVITIES

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SYSTEM MANAGEMENT (OHSMS)

In accordance with the Decree of Board of Directors of IPC No. HK.01/19/2/1/MKK/UT/PI.II-18 dated February 19, 2018 concerning Guidelines for Implementing Occupational Safety and Health Management System (OHSMS) in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Environment stipulates that the OHSMS guidelines in IPC refer to the Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management System and refers to other OHSMS standards. In addition, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is also actively carrying out P2K3 activities and updating the Team composition as stated in the Board of Directors Decree Number: PW.06.03/19/9/1/MKK/UT/PI.II-17 dated September 19, 2017 with the President Director as Team Leader (Top Management) and has been approved by the Transmigration and Energy Manpower Agency Number: 247 in 2020 DKI Jakarta Province.

For work safety, IPC applies basic provisions in accordance with work safety requirements in the applicable laws and regulations. This is done to encourage the implementation of Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) in all operational areas of IPC, including:

1. The Company plays an active role in implementing work safety guidance for all employees in an effort to improve work safety. IPC has an Occupational Health and Safety Steering Committee (OHSSC) that was formed at the Head Office and several Port Branches and have been approved by the Local Provincial Manpower Office. While several other port branches are in the process of forming this committee;
2. Installing warning signs related to work safety in all operational work environments, especially in locations at risk of workplace accidents;
3. Providing Personal Protective equipment (PPE) needed for all operational employees, including other parties in IPC (*visitor*) in an effort to guarantee work safety in carrying out port service activities;
4. Providing First Aid Equipment (P3K) at the work site;

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

5. Membentuk organisasi kelembagaan K3 dengan menempatkan Karyawan berkualifikasi ahli keselamatan kerja yang berperan membantu manajemen dalam menyiapkan penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) diseluruh wilayah operasional IPC;
 6. Menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, antara lain berupa 13 (tiga belas) unit mobil pemadam kebakaran yang tersebar di seluruh wilayah operasional Perseroan, menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berupa Tabung APAR, *Hydrant*, Bonpet dan *Sprinkle* pada seluruh bangunan kantor rumah dinas dan fasilitas pelayanan termasuk pelayanan produksi yang dimiliki;
 7. Melaksanakan simulasi pemadaman kebakaran dan tanggap darurat sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kesigapan seluruh Karyawan dalam menghadapi kondisi darurat di tempat kerja;
 8. Melakukan sertifikasi terhadap seluruh fasilitas pelayanan, peralatan produksi termasuk Karyawan yang mengoperasikan peralatan produksi sesuai dengan kualifikasi kelayakan keselamatan kerja dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Menerapkan standar SMK3 sesuai PP 50 Tahun 2012 dan OHSAS 18001:2007 sebagai bagian dari sistem manajemen IPC, khususnya pada pelabuhan kelas utama (hal ini telah mendapat pengakuan dari Kementerian Tenaga Kerja);
 10. Partisipasi dalam bulan K3 Nasional pada kantor pusat, 12 Cabang Pelabuhan, dan 17 Entitas Anak.
5. Establishing an OHS organization by placing qualified employees as occupational safety experts who play a role in helping management prepare the implementation of the Occupational Health and Safety Management System in all operational areas of IPC;
 6. Providing fire fighting facilities and infrastructure, including 13 (thirteen) fire engines spread throughout the Company's operational areas, providing light fire extinguishers in the form of APAR, Hydrant, Bonpet and sprinkle Tubes in all office buildings, official houses and service facilities including production services owned;
 7. Conducting fire fighting and emergency response simulations in an effort to improve preparedness and alertness of all workers in the face of emergencies in the workplace;
 8. Conducting certification of all service facilities, production equipment including workers who operate production equipment in accordance with work safety feasibility qualifications in the applicable laws and regulations;
 9. Implementing OHSMS standards in accordance with PP 50 of 2012 and OHSAS 18001: 2007 as part of IPC management system, especially in the main class ports (this has received recognition from the Ministry of Manpower);
 10. Participating in the National OHS month at the Head Office, 12 Port Branches, and 17 Subsidiaries.

Pada awal tahun 2019, Direktorat Operasi Kantor Pusat mendistribusikan Manual SMK3 dan K3 kepada 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan sebagai langkah awal pemenuhan penerapan SMK3 di masing-masing Cabang Pelabuhan. Manual tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di masing-masing Cabang Pelabuhan yang kemudian akan dilakukan evaluasi atas penerapan tersebut melalui audit internal maupun eksternal di tahun berikutnya.

In early 2019, the Directorate of Operations at the Head Office distributed the OHSMS and OHS Manual to 12 (twelve) Port Branches as an initial step in fulfilling the implementation of OHSMS in each Port Branch. The manual is expected to improve the implementation of the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) in each Port Branch which will then be evaluated for implementation through internal and external audits in the following year.



Berikut merupakan ringkasan implementasi SMK3 di Lingkungan IPC tahun 2019:

The following is a summary of the implementation of OHSMS in IPC in 2019:

No.	Unit Kerja/Cabang Pelabuhan <i>Work Unit/Port Branch</i>	Jenis Sertifikasi <i>Type of Certification</i>	Status Pekerjaan <i>Work Status</i>
1	<p>PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Kantor Pusat telah mengimplementasikan SMK3 secara konsisten di kriteria lanjutan (166 kriteria) sejak tahun 2018 hingga saat ini yang dibuktikan dengan dilaksanakannya 3x Audit Internal oleh lembaga Sertifikasi PT Sucofindo (Persero) setiap tahunnya. Pemenuhan terhadap implementasi SMK3 dimaksud dapat dilihat dari perolehan skor SMK3. Adapun Skor SMK3 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dari 166 kriteria adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 17 – 19 Januari 2018 = 85,54% (pemenuhan 141 dari 166 kriteria); b. 15 – 16 November 2018 = 87,34% (pemenuhan 145 dari 166 kriteria); c. 18 – 19 November 2019 = 92,77% (pemenuhan 154 dari 166 kriteria). <p>The Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has consistently implemented OHSMS in advanced criteria (166 criteria) from 2018 to present, as evidenced by the implementation of 3 (three) Internal Audits by the Certification Institution PT Sucofindo (Persero) each year. The fulfillment of OHSMS implementation can be seen from the acquisition of OHSMS scores. OHSMS Score of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) of 166 criteria is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. January 17-19, 2018 = 85.54% (fulfillment of 141 out of 166 criteria). b. November 15-16, 2018 = 87.34% (fulfillment of 145 out of 166 criteria). c. November 18-19, 2019 = 92.77% (fulfillment of 154 of 166 criteria). 	<p>PP 50/2012 (Masa Berlaku 2018–2021) (Validity Period 2018–2021)</p>	100%

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

No.	Unit Kerja/Cabang Pelabuhan Work Unit/Port Branch	Jenis Sertifikasi Type of Certification	Status Pekerjaan Work Status
2	Tanjung Priok	OHSAS 18001:2007 (Masa Berlaku 2018–2021) (Validity Period 2018–2021) PP 50/2012 (2 sertifikasi) PP 50/2012 (2 Certification)	Proses Sertifikasi 50% Certification Process 50% On Progress 90% (menunggu terbit sertifikat bulan April 2020) On Progress 90% (waiting for the certificate to be issued in April 2020)
3	Banten	PP 50/2012	On progress sertifikasi di tahun 2020 On progress certificate in 2020
4	Palembang	PP 50/2012	On Progress 90% (menunggu terbit sertifikat) On Progress 90% (waiting for the certificate to be issued)
5	Panjang	PP 50/2012	On Progress 90% (menunggu terbit sertifikat bulan April 2020) On Progress 90% (menunggu terbit sertifikat bulan April 2020)
6	Teluk Bayur	PP 50/2012 ISO 45001:2018	On progress sertifikasi di tahun 2020 On progress certification in 2020
7	Cirebon	PP 50/2012	On Progress 90% (menunggu terbit sertifikat bulan April 2020) On Progress 90% (menunggu terbit sertifikat bulan April 2020)
8	Pontianak	PP 50/2012	On Progress 90% menunggu sertifikat On Progress 90% (menunggu terbit sertifikat bulan April 2020)
9	Bengkulu	PP 50/2012 (Masa Berlaku 2019–2022) (Validity Period 2019–2022)	100%
10	Jambi	PP 50/2012	On progress sertifikasi di tahun 2020 On progress certification in 2020
11	Sunda Kelapa	PP 50/2012 (Masa Berlaku 2019–2022) (Validity Period 2019–2022)	100%
12	Tanjung Pandan	-	Usulan RKM 2020 untuk PP 50/2012 RKM 2020 proposal for PP 50/2012
13	Pangkal Balam	-	Usulan RKM 2020 untuk PP 50/2012 RKM 2020 proposal for PP 50/2012

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Kantor Pusat telah mengimplementasikan SMK3 secara konsisten di kriteria lanjutan (166 kriteria) sejak tahun 2018 hingga saat ini yang dibuktikan dengan dilaksanakannya 3 (tiga) kali Audit Internal oleh lembaga Sertifikasi PT Sucofindo (Persero) setiap tahunnya. Pemenuhan terhadap implementasi SMK3 dimaksud dapat dilihat dari perolehan skor SMK3. Adapun Skor SMK3 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dari 166 kriteria adalah sebagai berikut:

1. 17 – 19 Januari 2018 = 85,54% (pemenuhan 141 dari 166 kriteria);
2. 15 – 16 November 2018 = 87,34% (pemenuhan 145 dari 166 kriteria);
3. 18 – 19 November 2019 = 92,77% (pemenuhan 154 dari 166 kriteria).

The Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has consistently implemented OHSMS in advanced criteria (166 criteria) from 2018 to present, as evidenced by the implementation of 3 (three) Internal Audits by the Certification Institution PT Sucofindo (Persero) each year. The fulfillment of OHSMS implementation can be seen from the acquisition of OHSMS scores. OHSMS Score of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) of 166 criteria is as follows:

1. January 17-19, 2018 = 85.54% (fulfillment of 141 out of 166 criteria).
2. November 15-16, 2018 = 87.34% (fulfillment of 145 out of 166 criteria).
3. November 18-19, 2019 = 92.77% (fulfillment of 154 of 166 criteria).



PENERAPAN INTERNATIONAL SHIP AND PORT SECURITY CODE

Selain menerapkan SMK3 dan ISO 45001:2018, IPC menerapkan instrumen *International Ship and Port Security (ISPS)* sesuai dengan standar internasional yang mengacu kepada *ISPS Code* yang dikeluarkan oleh IMO. Indonesia merupakan salah satu anggotanya.

ISPS telah diimplementasikan secara prinsip di 11 Cabang Pelabuhan dan telah dilakukan asesmen eksternal atau verifikasi pertengahan untuk menilai konsistensi penerapan *ISPS Code* yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut sebagai persyaratan wajib terhadap fasilitas pelabuhan yang sudah memenuhi persyaratan *ISPS Code*.

Untuk mendukungnya penerapan ISPS, IPC menyelenggarakan *Training, Drill & Exercise* yang dipersyaratkan dalam *ISPS Code* serta pelatihan *awareness (IMO Model Course 3.24 Security Awareness Training)* dan internal auditor *ISPS Code*. IPC juga aktif terlibat dalam Seminar Temu Nasional Forum *ISPS Code* 2018.

Pada tahun 2019, akan direalisasikan pada 10 (sepuluh) Cabang Pelabuhan untuk comply terhadap *ISPS Code* dengan melaksanakan perpanjangan *SoCPF (Statement of Compliance of A Port Facility)* yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan RI. Sertifikat *SoCPF* diterbitkan setelah Cabang Pelabuhan melaksanakan *Assessment Eksternal* atau *Verifikasi Ketiga* terhadap masing-masing fasilitas pelabuhan. Berikut daftar fasilitas Pelabuhan, nomor *SoCPF* beserta masa berlakunya:

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL SHIP AND PORT SECURITY CODE

In addition to implementing OHSMS and ISO 45001:2018, IPC has implemented the *International Ship and Port Security (ISPS)* instrument in accordance with international standards that refer to the *ISPS Code* issued by International Maritime Organization (IMO). Indonesia is one of its members.

ISPS has been implemented in principle in 11 Port Branches, with external assessments performed to assess consistency of *ISPS Code* implementation. The assessments are conducted by the Directorate General of Sea Transportation as a mandatory requirement for port facilities to meet *ISPS code* requirements.

To support the implementation of ISPS, IPC organizes training, drills and exercises as required in the *ISPS Code* as well as awareness training (*IMO model Course 3.24 Security Awareness Training*) and internal auditor of *ISPS Code*. IPC is also actively involved in the 2018 *ISPS Code National Forum Gathering Seminar*.

In 2019, 10 (ten) Port Branches will be realized to comply with the *ISPS Code* by extending the *SoCPF (Statement of Compliance of A Port Facility)* issued by the Government through the Directorate General of Sea Transportation (Ditjen Hubla) of the Indonesian Ministry of Transportation. The *SoCPF* certificate is issued after the Port Branch carries out an External Assessment or Third Verification of each port facility. The following is a list of Port facility, *SoCPF* numbers and its validity period:

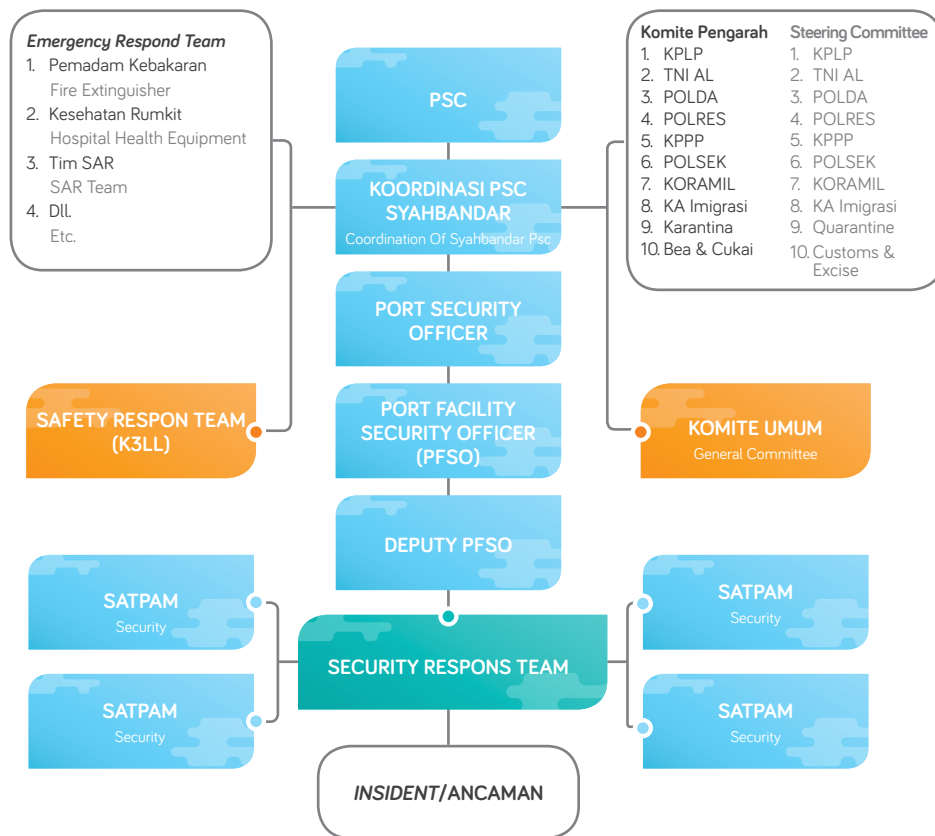
No.	Nama Fasilitas Pelabuhan <i>Name of Port Facility</i>	Nomor SoCPF <i>SoCPF Number</i>	Masa Berlaku <i>Validity Period</i>	Status Pekerjaan <i>Work Status</i>
1	Tanjung Priok	02-04702-DV	31 Desember 2018–19 Desember 2023 December 31, 2018–December 19, 2023	Terjadwal audit Internal oleh Kantor Pusat tahun 2020 Scheduled internal audit by Headquarters in 2020
2	Banten	002-0219-DN	3 November 2014–2 November 2019 November 3, 2014–November 2, 2019	SoCPF 2019 – 2024 telah terbit SoCPF 2019 – 2024 has been issued
3	Palembang	002-0070-DN	21 Oktober 2014–20 Oktober 2019 October 21, 2014–October 20, 2019	SoCPF 2019 – 2024 telah terbit SoCPF 2019 – 2024 has been issued
4	Panjang	002-0009-DN	14 Agustus 2014–13 Agustus 2019 August 14, 2014–August 13, 2019	SoCPF 2019 – 2024 telah terbit Awaiting the issuance of new SoCPF (2019 - 2024)
5	Teluk Bayur	002-0032-DN	20 Agustus 2014–19 Agustus 2019 August 20, 2014–August 19, 2019	Persiapan Verifikasi Ketiga oleh Dirjen Hubla) Preparation of third verification
6	Cirebon	002-0072-DN	2 Oktober 2014–1 Oktober 2019 October 2, 2014–October 1, 2019	SoCPF 2019 – 2024 telah terbit SoCPF 2019 – 2024 has been issued
7	Pontianak	002-0068-DN	15 September 2014–14 September 2019 September 15, 2014–September 14, 2019	SoCPF 2019–2024 telah terbit SoCPF 2019 – 2024 has been issued

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

No.	Nama Fasilitas Pelabuhan <i>Name of Port Facility</i>	Nomor SoCPF <i>SoCPF Number</i>	Masa Berlaku <i>Validity Period</i>	Status Pekerjaan <i>Work Status</i>
8	Bengkulu	002-0066-DN	14 Oktober 2014–13 Oktober 2019 October 14, 2014–October 13, 2019	SoCPF 2019 – 2024 telah terbit SoCPF 2019 – 2024 has been issued
9	Jambi	002-0093-DN	20 Agustus 2014–19 Agustus 2019 August 20, 2014– August 19, 2019	SoCPF 2019 – 2024 telah terbit SoCPF 2019 – 2024 has been issued
10	Tanjung Pandan	002-0102-DN	27 Agustus 2014–26 Agustus 2019 August 27, 2014–August 26 2019	SoCPF 2019 – 2024 telah terbit SoCPF 2019 – 2024 has been issued
11	Pangkal Balam	002-0120-DN	1 September 2014–31 Agustus 2019 September 1, 2014–August 31, 2019	Persiapan Verifikasi Ketiga oleh Dirjen HublaPreparation the third of verification

Pengelola keamanan fasilitas tingkat cabang bertanggung jawab atas keamanan di masing-masing wilayah fasilitas pelabuhan. Setiap ancaman wajib dilaporkan agar diketahui oleh *Deputy General Manager Hukum dan Pengendalian Internal* selaku *Perwira PFSO (Port Facility Security Officer)* sampai ke Adpel/Kampel selaku *PSC (Port Security Committee)*. Berikut adalah susunan struktur *Port Security Committee (PSC)*:

The facility security manager at branch level is responsible for security in each port facility area. Each threat must be reported to be acknowledged by the Deputy General Manager of Legal and Internal Control as a PFSO Officer (Port Facility Security Officer) to the Adpel/Kampel as the PSC (Port Security Committee). Following is the structure of Port Security Committee (PSC):





Keterangan/Note:

PSC (<i>Port Security Committee</i>)	:	Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Head of Port and Port Authority
PSO (<i>Port Security Officer</i>)	:	Kabid/Kasie/Petugas KPLP Department Head/Section Head/KPLP Officer
PFSO (<i>Port Facility Security Officer</i>)	:	<i>Deputy General Manager</i> Hukum & Pengendalian Internal Deputy General Manager of Legal & Internal Control
<i>Deputy</i> PFSO	:	<i>Assistant</i> DGM Pengendalian Mutu & PFSO Assistant DGM Quality Control & PFSO

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KESELAMATAN KERJA

Perseroan menilai bahwa pelaksanaan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang didukung dengan kegiatan sosialisasi dan berbagai pelatihan, telah memberikan dampak yang cukup efektif. *Stakeholder* berharap dengan pengelolaan keselamatan kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja Perseroan yang selanjutnya akan memberikan dampak peningkatan nilai Perseroan. Selama tahun 2019, Perseroan telah mencatat bahwa penurunan kecelakaan kerja para karyawan dibandingkan tahun sebelumnya, Disampaikan dalam tabel rekap kecelakaan kerja tahun 2018–2019.

Adapun tabel rekap kecelakaan kerja di Kantor Pusat IPC maupun Kantor Cabang Pelabuhan disampaikan sebagai berikut;

QUANTITATIVE IMPACT OF WORK SAFETY ACTIVITIES

The Company considers that the implementation of occupational safety and health management which is supported by socialization activities and various trainings, has had quite an effective impact. Stakeholders hope that good work safety management can improve the performance of the Company which in turn will have an impact on increasing company value. During 2019, the Company has noted that the reduction in workplace accidents of employees compared to the previous year, as presented in the table of work accident recap in 2018–2019.

The table of work accident recap at IPC Head Office and Port Branch Offices is as follows:

Unit Kerja <i>Work Unit</i>	2019		2018	
	Kecelakaan <i>Accident</i>	Kematian <i>Fatality</i>	Kecelakaan <i>Accident</i>	Kematian <i>Fatality</i>
Kantor Pusat Head Office	0	0	0	0
Cabang Priok Priok Branch	5	0	8	1
Panjang	4	0	2	0
Palembang	1	0	3	0
Teluk Bayur	1	0	0	0
Pontianak	0	0	0	0
Cirebon	0	0	1	1
Banten	0	0	0	0
Sunda Kelapa	0	0	6	0
Jambi	0	0	0	0
Bengkulu	0	0	0	0
Pangkal Balam	0	0	2	1
Tanjung Pandan	0	0	0	0
Jumlah Total	11	0	22	3

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

IPC Cabang Pelabuhan juga meraih penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja (*Zero Accident*) dan Panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2019 yang diserahkan oleh Gubernur Banten Dr.H. Wahidin Halim, M.Si pada 27 Februari 2020.

IPC Port Branch IPC also obtained the Zero Accident award and the Banten Provincial Work Safety Steering Committee (P2K3) in 2019, which was given by the Governor of Banten Dr.H. Wahidin Halim, M.Sc on February 27, 2020.

SALURAN PENGADUAN

Untuk saluran pengaduan yang dilakukan IPC dapat disampaikan selama 24 jam, jika terjadi keadaan darurat di area pelabuhan dan sekitarnya. Adapun PIC Operator Damkar pada setiap cabang kepelabuhan yang dimiliki IPC sebagai berikut:

COMPLAINT CHANNEL

Complaints made to IPC can be delivered 24 hours a day, in the event of an emergency in the port area and its surroundings. PIC fire fighting operators in each IPC port branch are as follows:

Tabel PIC Operator Damkar di Setiap Cabang
Fire Fighting Operator in Each Branch

No.	Cabang Pelabuhan Port Branch	No. telp darurat Emergency Phone Number
1	Kantor Pusat Head Office	021-4352229
2	Cabang Priok Priok Branch	021-4301080 ext. 2633
3	Panjang	0721-31146 0721-31149
4	Palembang	0711-710611 0812-7146-9565
5	Teluk Bayur	0751-61746
6	Pontianak	0561-732181 0811-4348-508 0822-5414-2118
7	Cirebon	0813-1025-0923 0898-3552-534 0823-1766-6573
8	Banten	0254-601221
9	Sunda Kelapa	-
10	Jambi	0811-7434-282
11	Bengkulu	0736 - 51409
12	Pangkal Balam	-
13	Tanjung Pandan	-

Pada Cabang Pelabuhan Pangkal Balam, Tanjung Pandan dan Sunda Kelapa tidak memiliki sarana mobil pemadam kebakaran sehingga pada saat keadaan darurat, saluran yang dapat dihubungi adalah Damkar PEMDA setempat.

Pangkal Balam, Tanjung Pandan and Sunda Kelapa Port Branches do not have fire truck facilities so that during an emergency, the local government fire fighting can be contacted.

BIAYA

Pada tahun 2019, Perseroan telah mengeluarkan anggaran untuk tanggung jawab untuk keselamatan kerja di bidang pemadam

COST

In 2019, the Company has issued a budget for responsibility in work safety, specifically fire fighting for Head Office work units



kebakaran untuk unit kerja Kantor Pusat sebesar Rp398.270.000. Adapun anggaran terkait Keselamatan kerja meliputi Pemasam Kebakaran, Obat-obatan & medis, Perlengkapan (Alat Pelindung Diri, dan Fasilitas Pelabuhan).

SERTIFIKASI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pada tahun 2019, IPC Kantor Pusat memperoleh sertifikasi SMK3 sesuai PP No. 50 tahun 2012 dengan hasil pencapaian 92,77% untuk katagori Tingkat Lanjutan (166 kriteria audit). Oleh karena itu, IPC Kantor Pusat memperoleh Bendera Emas yang telah dipasang di halaman IPC Kantor Pusat IPC di area sebelah kiri bendera merah putih.

PENGHARGAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pada tahun 2019, Perseroan belum memperoleh penghargaan bidang ketenagakerjaan.

PENGHARGAAN 2019

Pada tahun 2019, Cabang Pelabuhan Bengkulu dan Pelabuhan Sunda Kelapa memperoleh penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

amounting to Rp398,270,000. As for the budget related to work safety, including fire fighting, medicine & medical, equipment (personal protective equipment, and port facilities).

CERTIFICATION IN EMPLOYMENT

In 2019, IPC Head Office obtained OHSMS certification according to PP No. 50 of 2012 with 92.77% achievement score for the Advanced Level category (166 audit criteria). Therefore, IPC Head Office received the Golden Flag that has been displayed in the yard of IPC Central Office IPC, to the left of the red and white flag.

AWARDS IN EMPLOYMENT

In 2019, the Company has not yet received an award in the field of employment.

AWARDS IN 2019

In 2019, Bengkulu Port Branch and Sunda Kelapa Port Branch received the Occupational Safety and Health Management System award given by the Ministry of Manpower.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO CONSUMERS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

IPC memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan yang salah satunya adalah dengan secara aktif meluncurkan berbagai program yang fokus dan berorientasi kepada pelanggan. Sebagai Perseroan yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan, beberapa program yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah melalui pelayanan berbasis teknologi.

Dengan mewujudkan komitmen pada peningkatan kualitas layanan ke para pelanggan, IPC memiliki kebijakan dalam pengelolaan pelanggan yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi No HK.568/19/1/2/PI.II-17 Tanggal 19 Januari 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Pelanggan. SK tersebut mengatur tentang:

1. Pelayanan Pendaftaran Pelanggan;
2. Pelayanan Perubahan Data Pelanggan;
3. Pelayanan Keluhan Pelanggan;
4. Pelayanan Klaim Pelanggan;
5. Pengelolaan Hubungan Pelanggan;
6. Survei dan *Monitoring* Survei Kepuasan, Ketidakpuasan, dan Loyalitas Pelanggan.

Dengan demikian rumusan lingkup tanggung jawab sosial Perseroan terhadap konsumen meliputi:

1. Informasi produk/jasa;
2. Kesehatan dan keselamatan konsumen;
3. Layanan pengaduan konsumen;
4. Program peningkatan kepuasan dan loyalitas bagi konsumen.

RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEPADA KONSUMEN

Dalam rangka mencapai Visi Perseroan menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan, IPC memiliki rencana maupun target dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi pelanggan. Pelayanan tersebut dilaksanakan dalam beberapa kegiatan seperti *customer of the years*, *customer gathering* serta strategi atau apresiasi lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan hubungan pelanggan utama (*Key Account Relationship*). Adapun rencana-rencana untuk mencapai Visi Perseroan tersebut antara lain:

1. Melakukan pemahaman untuk informasi layanan IPC kepada seluruh masyarakat sebagai upaya dalam meningkatkan pemahaman mengenai layanan kepelabuhanan yang dimiliki Perseroan, yang dilakukan dalam kegiatan *coffee morning* yang ditargetkan diadakan setiap triwulan;

COMMITMENT AND POLICY

IPC is highly committed to improving the quality of services to customers, including actively launching various customer-focused and oriented programs. as a company engaging in the port services, programs undertaken to support customers include technology-based services.

To realize its commitment on improving customer service quality, IPC has a policy for managing customers as stated in the Board of directors' Decree (SK) No HK.568/19/1/2/PI.II-17 dated January 19, 2017 concerning Guidelines for Customer Relations Management. The decree regulates:

1. Customer registration services;
2. Services for Changing Customer data;
3. Customer Complaint services;
4. Customer Claim services;
5. Customer relations management;
6. Survey and monitoring of Customer satisfaction, dissatisfaction and loyalty survey.

The Company's scope of corporate social responsibility towards consumers includes:

1. Information on products/services;
2. Consumer health and safety;
3. Customer complaint services;
4. Program to increase satisfaction and loyalty for consumers.

ACTIVITY PLAN OF SOCIAL RESPONSIBILITY TO CONSUMERS

In order to achieve the Company's vision to become a world-class port manager that excels in operations and services, IPC has plans and targets to improve the quality of service for customers. The service is carried out in several activities such as customer of the years, customer gathering and other strategies or appreciation used to support key customer relationship activities. The plans to achieve the Company's Vision include:

1. Carrying out an understanding of IPC services information for the community in an effort to improve understanding of the Company's port services, in targeted morning coffee activities held quarterly;



2. IPC memberikan kemudahan pengaduan bagi para pelanggan, sebagai upaya Perseroan dalam meningkatkan loyalitas pelayanan bagi para pelanggan, yang dituangkan dalam kegiatan *customer visit*, *direct mailing* dan *web portal*;
3. Melakukan kegiatan survei kepuasan pelanggan setiap tahun sebagai bagian dari perbaikan kualitas atas pelayanan yang diberikan Perseroan kepada pelanggan, dengan memonitor dan mengevaluasi hasil tindak lanjut survei kepuasan tersebut.

Dalam melakukan perencanaan kegiatan CSR terkait dengan konsumen, Perseroan telah melakukan *due diligence* dengan memperhatikan hasil survei kepuasan dan loyalitas pelanggan yang menggambarkan informasi kebutuhan konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah melakukan evaluasi hasil survei kepuasan dan loyalitas pelanggan sebagai bahan untuk menyusun program kerja tahun berikutnya.

Perseroan telah mempertimbangkan dampak penting langsung atau tidak langsung aktivitas dan keputusan Perseroan pada konsumen yaitu meningkatnya kepuasan dan loyalitas konsumen yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan Perseroan.

Perseroan juga melakukan *review* terhadap seluruh regulasi terkait isu-isu penting bidang konsumen dalam perencanaan CSR terkait dengan konsumen seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya.

Perseroan senantiasa mempertimbangkan risiko terkait konsumen dalam melakukan perencanaan kegiatan. Risiko tersebut antara lain adanya komplain dari konsumen yang berdampak pada loyalitas konsumen. Dengan kata lain, Perseroan senantiasa mempertimbangkan harapan konsumen antara lain kecepatan pelayanan, kebersihan pelabuhan, dan tarif yang kompetitif dalam melakukan perencanaan kegiatan CSR terkait konsumen.

Perseroan menitikberatkan pada pelibatan *stakeholders* internal yang terkait dengan pelayanan kepada konsumen. Pelayanan yang diberikan untuk kegiatan bongkar muat adalah mulai dari proses *gate in* sampai dengan *gate out*. Sementara dari sisi *back office* pelayanan dimulai dari bagian keamanan, *receptionist* dan Karyawan IPC. Semua pihak yang terlibat dari proses tersebut terlibat dalam pelaksanaan CSR terkait konsumen. Hal ini dituangkan dalam berbagai kebijakan manajemen dan *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai upaya Perseroan dalam melindungi konsumen.

2. IPC provides convenience for customers, in an effort by the Company to increase customers service loyalty, in the form of customer visits, direct mailing and through the web portal;
3. Carrying out customer satisfaction surveys every year as part of improving the quality of services provided by the Company to customers, by monitoring and evaluating the results of the satisfaction survey follow-up.

When planning consumer-related CSR activities, the Company conducts due diligence by paying attention to the results of customer satisfaction and loyalty surveys that describe information on consumer needs. The approach used involves evaluating the customer satisfaction and loyalty surveys results of as material for developing the following year's work program.

The Company pays attention to the important direct or indirect impact of Company activities and decisions on consumers, namely increasing customer satisfaction and loyalty that in turn will increase the Company's revenue.

The Company also reviews all regulations related to important consumer issues in CSR planning related to consumers such as the Consumer Protection Act and other regulations.

The Company considers the risks related to consumers when planning its activities, including those risks complaints that could have an impact on consumer loyalty. In other words, the Company always considers consumer expectations, including speed of service, port cleanliness and competitive rates in planning Csr activities related to consumers.

The Company focuses on involving internal stakeholders related to service to consumers. services provided for loading and unloading are through the gate in to the gate out process. While from the back-office side the services starts with the security, receptionist and IPC employees. Thus, all parties involved in the processes are involved in implementing consumer-related CSR. This is laid down in the management policies and standard operating Procedures (SOPs) as the Company's effort to protect consumers.

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEPADA KONSUMEN

Perseroan mendorong pada seluruh karyawan dan jajaran manajemen yang berwenang dalam pengambilan keputusan untuk memiliki komitmen dalam menjalankan kegiatan CSR bidang konsumen. Perseroan memiliki mekanisme pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan CSR bidang konsumen yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Manajemen. Laporan Manajemen senantiasa direview oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada para Pemegang Saham. Seluruh karyawan dan jajaran manajemen terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan CSR terkait konsumen khususnya Divisi Aliansi Bisnis dan Hubungan Pelanggan. Agenda yang dilaksanakan antara lain:

1. *Coffee morning* yang ditargetkan diadakan setiap triwulan;
2. Kegiatan pengaduan pelanggan dan peningkatan loyalitas melalui *customer visit*, *direct mailing* dan *web portal*;
3. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan yang dilaksanakan setiap tahun;
4. Pelaksanaan kegiatan *customer of the years*, *customer gathering*, dan strategi atau apresiasi lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan hubungan pelanggan utama.

LAYANAN IPC E-SERVICE

Sejalan dengan program digitalisasi pelabuhan, IPC melalui PT IPC TPK sebagai Entitas Anak mengembangkan layanan berbasis elektronik atau *e-Service* untuk kepentingan pengguna jasa terminal petikemas. Layanan ini ditujukan untuk memberikan transparansi dan efektifitas dalam memangkas waktu sehingga lebih efisien dalam memberikan layanan kepelabuhanan bagi pengguna jasanya. *E-Service* terus dilakukan sosialisasi oleh IPC TPK mengingat layanan tersebut merupakan penyediaan akses pengguna jasa (pemilik barang, pelayaran dan *forward*) pada transparansi layanan jasa kepelabuhanan.

Portal *e-Service* meliputi sistem layanan dokumen dan *billing* untuk penerimaan dan pengeluaran peti kemas. Portal *e-Service* dapat diakses secara aman oleh pelanggan IPC sehingga memudahkan dalam bertransaksi. Selain itu, dapat melakukan *tracing* layanan kepelabuhanan dan pengurusan dokumen secara *real time*. Sehingga dengan menggunakan portal *e-Service* juga memberikan opsi kemudahan dan kepraktisan pembayaran.

Dengan *e-service* pada pengelolaan terminal maka pengguna jasa tidak perlu lagi datang kepelabuhan saat mengajukan kegiatan *receiving* maupun *delivery* (R/D) peti kemas hingga penerbitan *billing* layanan secara keseluruhan. Adapun fitur layanan portal *e-Service* tersebut meliputi: *e-Registration*, *e-Booking*, *e-Tracking*, *e-Payment*, *e-Billing* dan *e-Care*.

ACTIVITIES OF SOCIAL RESPONSIBILITY TO CONSUMERS

The Company encourages all authorized employees and management to commit to carrying out consumer-related CSR activities. The Company has a reporting mechanism on the results of consumer-related CSR activities as a part of the management report. The management report is always reviewed by Board of Directors and Board of Commissioners before being submitted to the Shareholders. All employees and management are actively involved in CSR activities related to consumers, especially the Business Alliance and Customer Relations Division. The agenda carried out include:

1. Coffee morning, which is targeted to be held every quarter;
2. Customer complaint and increasing loyalty through customer visit, direct mailing and web portal;
3. Customer satisfaction survey, which is carried out annually;
4. Customer of the years and customer gathering activities, as well as other strategies or appreciation to support key customer relations activities.

IPC E-SERVICE

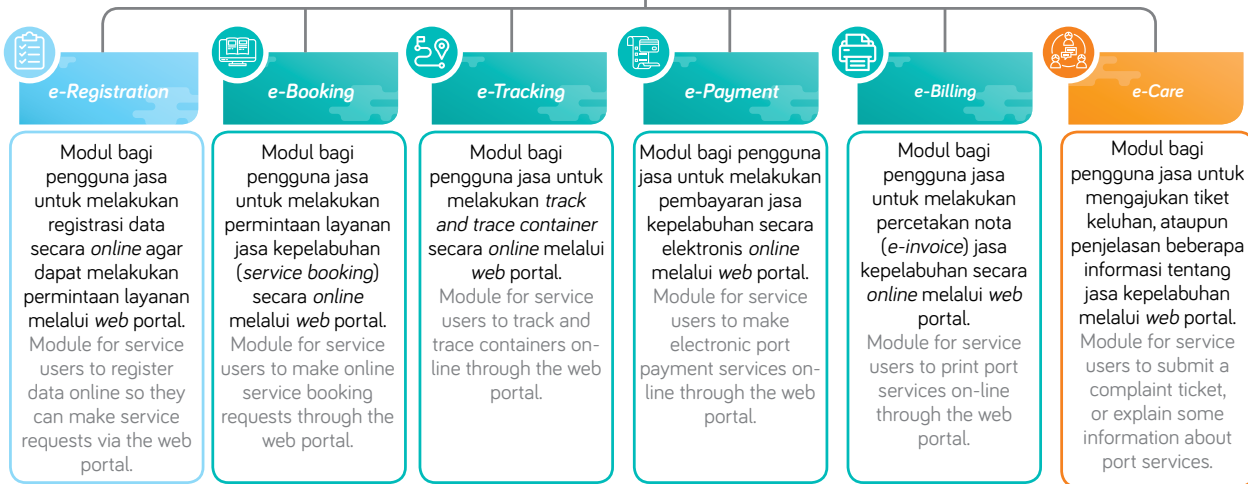
In line with the port digitalization program, IPC through PT IPC TPK as a subsidiary, develops electronic-based service or *e-service* for the benefit of container terminal users. This service is intended to provide transparency and effectiveness in cutting time so that can be more efficient in providing port services for service users. *E-Service* socialization continues to be carried out by IPC TPK considering that the service is providing access to service users (owners of goods, shipping and forwarding) on the transparency of port services.

The *e-Service* portal includes document and billing service system for container receipts and payments. The *e-Service* portal can be accessed securely by IPC customers and making it easier to transact. In addition, tracing port services and document management can be done in real time. Therefore, using the *e-Service* portal also provides payment convenience and payment options.

With *e-service* in terminal management, service users no longer need to come to port when submitting container receiving and delivery (R/D) activities to the issuance of billing services as a whole. The *e-Service* portal service features include: *e-Registration*, *e-Booking*, *e-Tracking*, *e-Payment*, *e-Billing* and *e-Care*.



IPCSERVICE



INFORMASI PRODUK/JASA

IPC melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayanan bagi pelanggan antara lain:

1. Survei pelanggan yang dilakukan setahun sekali oleh Cabang Pelabuhan untuk mendapatkan indeks kepuasan, indeks loyalitas, indeks *engagement* dan keterikatan pelanggan;
2. Setelah pelaksanaan survei dilakukan *monitoring* tindak lanjut hasil survei di seluruh cabang;
3. *Coffee Morning*, merupakan pertemuan yang sifatnya tukar menukar informasi dengan pelanggan yang dilakukan oleh Cabang Pelabuhan satu kali per triwulan. Tujuan dari pertemuan ini adalah agar Cabang Pelabuhan dapat menyosialisasikan program-program yang sejalan dengan kebijakan serta informasi perkembangan Perseroan sampai dengan saat ini dan target-target apa saja di tahun mendatang;
4. *Visit Customer*, merupakan kunjungan manajemen Perseroan ke tempat pelanggan dilakukan oleh Cabang tiap bulan dan kantor pusat satu kali per semester, khususnya kepada pelanggan utama di masing-masing Cabang Pelabuhan yang dilakukan secara reguler, berkesinambungan, dan terjadwal;
5. *Customer Gathering*, merupakan pertemuan pelanggan dalam suatu acara tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas para pelanggan dalam kurun waktu satu kali dalam satu tahun. Tujuan dari pertemuan ini, sebagai bentuk apresiasi Perseroan terhadap pelanggan setianya;

PRODUCT/SERVICE INFORMATION

IPC conducts several activities for improving services for customers, including:

1. Customer survey conducted once a year by Port Branches to obtain satisfaction index, loyalty index, engagement index and customer engagement;
2. Afterward, conducting monitoring of follow-up on the survey results by all branches;
3. Coffee morning, which is a meeting to exchange information with customers and is conducted by the port branches every quarter. The purpose of the meetings is so that the port branch can socialize programs related to the company's policies and information on developments to date and any targets for the coming year;
4. Customer Visit, is the visit of Company's management to customer's location, which is conducted by the Branch once a month and by the Head Office once per semester, especially to the key customers in each Port Branch. This visit is carried out regularly and continuously with a predetermined schedule.;
5. Customer Gathering, is a customer meeting at a particular event that aims to increase customer loyalty and held once a year. This gathering is also as a form of Company's appreciation for its loyal customers;

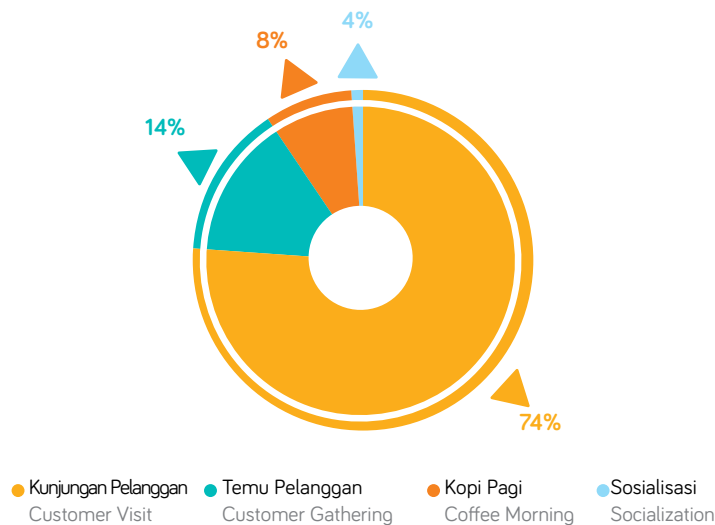
6. *Customer of The Years*, kegiatan yang dilakukan Perseroan kepada pelanggannya dalam bentuk apresiasi penghargaan yang dapat diberikan secara periodik setiap tahun sekali;
 7. *Direct Mailing Customer* merupakan komunikasi Perseroan kepada pelanggan dalam bentuk surat, *email*, telepon, yang disampaikan pada momen tertentu.
6. Customer of The year, which is an activity conducted by the Company for its customers in the form of appreciation awards given every year;
 7. Direct Mailing Customer, is Company's communication to customers in the form of letter, e-mail, telephone, which are delivered at specific times.

Berikut kegiatan Cabang dengan pelanggan tahun 2019:

Activities of Branches with Customers in 2019 are as follows:

No	Cabang Pelabuhan Port Branch	Jumlah Kegiatan Pelanggan Number of Customer Activities				Jumlah Total
		Kunjungan Pelanggan Customer Visit	Temu Pelanggan Customer Gathering	Kopi Pagi Coffee Morning	Sosialisasi Socialization	
1	Cirebon	40	0	3	2	45
2	Pangkal Balam	14	3	1	0	18
3	Jambi	45	8	1	1	55
4	Tanjung Pandan	11	0	1	0	12
5	Tanjung Priok	6	1	3	4	14
6	Teluk Bayur	10	4	4	1	19
7	Banten	26	8	1	0	35
8	Bengkulu	4	12	3	0	19
9	Sunda Kelapa	13	0	1	0	14
10	Panjang	18	1	1	2	22
11	Pontianak	10	1	2	2	15
12	Palembang	10	0	1	0	11
Jumlah Total		207	38	22	12	279

Kegiatan Cabang Tahun 2019
Branch Activities in 2019





KESEHATAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN

Kesehatan dan keselamatan konsumen telah tertuang dalam kebijakan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang berisi seluruh karyawan, mitra kerja dan tamu wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan dan kebutuhan berdasarkan prosedur kerja dalam lingkup area kerja IPC. Merujuk kebijakan pada kebijakan tersebut, Keselamatan Kerja dan Kesehatan (K3) diberikan kepada setiap orang untuk setiap orang yang melakukan aktivitas di lingkungan kerja pelabuhan (tamu, vendor, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), pelanggan dan lain sebagainya).

LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN

Jika terdapat keluhan atas layanan yang diberikan, IPC telah menyediakan sarana penyampaian keluhan pelanggan dengan berbagai saluran di masing-masing Cabang Pelabuhan, antara lain:

- Datang langsung ke *customer service*;
- Penyampaian melalui surat, telepon dan *e-mail*;
- Web* portal.



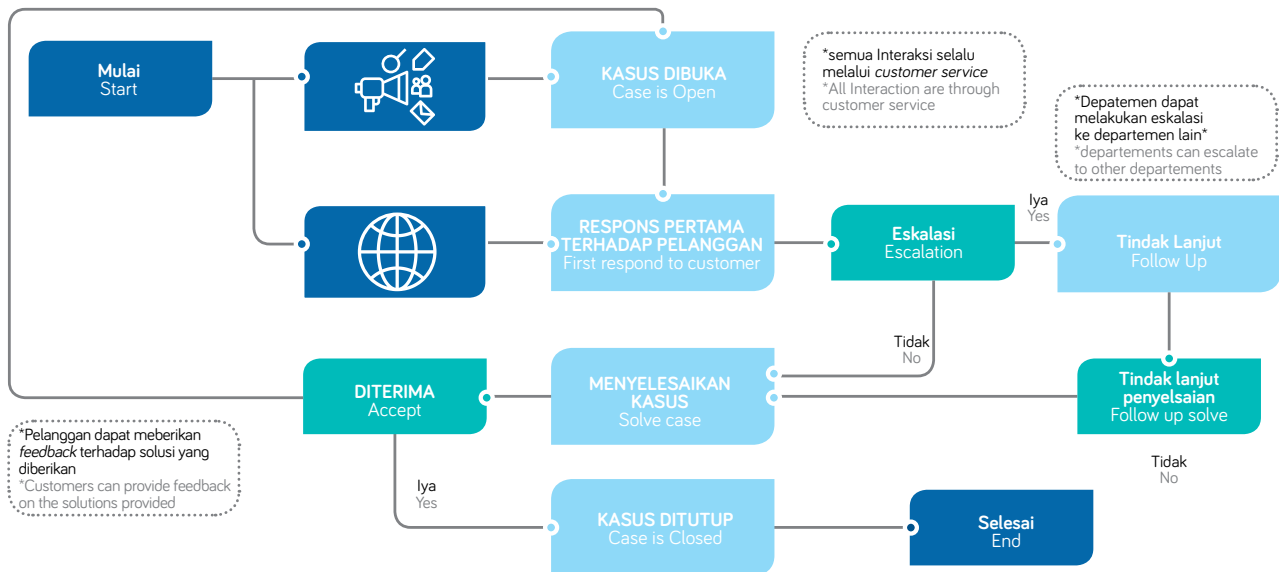
Pelanggan
Customer



Customer Service Cabang/Entitas Anak
Customer Service Branch/Subsidiary



Departement
Support



GAMBAR SINGLE CHANNEL UNTUK INTERAKSI DENGAN CUSTOMER
Customer Single Channel for Customer Interaction

CONSUMER HEALTH AND SAFETY

Consumer health and safety is stated in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s Occupational Health and Safety (OHS) System policy that states that all employees, work partners and guests must use Personal Protective equipment (PPE) according to the provisions and requirements in IPC work procedures. The Occupational Health and Safety (OHS) policy is given to everyone involved in port work activities (guests, vendors, unloading workers (TKBM), customers etc.).

CUSTOMER SERVICE CENTER

If there are complaints about the services provided, IPC has provided a means of delivering customer complaints with various channels in each of the Port Branches, including:

- Coming directly to customer services;
- Submissions by mail, telephone and e-mail;
- Web portal.

Tabel Penyelesaian Pengaduan Konsumen Tahun 2019
Settlement of Customer Complaints in 2019

No	Klasifikasi Masalah <i>Classification of Issues</i>	Status Keluhan <i>Complaint Status</i>			Jumlah <i>Total</i>
		Ditutup <i>Closed</i>	Dalam penanganan <i>In Progress</i>	Baru <i>New</i>	
1	Nota Memorandum	106	5	14	125
2	Order/ <i>Request</i>	119	-	-	119
3	Operasi Operation	27	1	3	31
4	Pembayaran Payment	26	2	2	30
5	<i>Autocollection</i>	22	3	2	27
6	Fasilitas Facilities	18	6	-	24
7	<i>Billing</i>	13	1	-	14
8	Keluhan lainnya Another complaint	8	3	2	13
9	Lainnya Others	12	1	-	13
10	Cetak Kartu Print Card	11	-	-	11
11	Peralatan Equipment	6	1	1	8
12	Sistem Informasi Information System	7	1	-	8
13	Klaim Claim	7	-	-	7
14	Keamanan Security	4	1	-	5
15	Tarif Tariff	2	-	2	4
16	SDM HC	1	-	-	1
Jumlah Total		389	25	26	440

Pada tahun 2019, Perseroan dapat menyelesaikan seluruh jenis interaksi, yang terdiri dari keluhan pelanggan (antara lain perbaikan seperti kekurangan alat penerangan dan sebagainya, keterlambatan penerbitan nota, koreksi nota, kelebihan tagihan, dan keluhan lainnya), permintaan (antara lain penambahan limit cetak kartu/*gatepass* pada *e-service* dan pengalihan agen) dan pertanyaan (antara lain simulasi tarif, jadwal bongkaran kapal dan status *handling container*).

PROGRAM PENINGKATAN KEPUASAN DAN LOYALITAS BAGI KONSUMEN

IPC secara berkala melakukan *monitoring* terhadap seluruh cabang dalam menindaklanjuti permintaan atau keluhan yang diterima dari pelanggan. Selain itu IPC juga telah menyiapkan

In 2019, Company can resolve all types of interactions, which consist of customer complaints (including repairs, lack of lighting equipment, delay in issuance of memorandum, correction of memorandum, overdraft, etc.), requests (like adding printing limit for *gatepass* on *e-service* and agent transfer) and questions (for example tariff simulations, ship unloading schedules and container handling status).

CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY IMPROVEMENT PROGRAM

IPC periodically monitors all branches by following up on requests or complaints received from customers. In addition, IPC has also prepared an IT-based customer management system



sistem pengelolaan *customer* berbasis IT yang kami sebut sebagai *Customer Relationship Management* (CRM) yang di dalamnya terdapat 6 modul yakni: *Master Customer Data*, *Customer Survey*, *Customer Service*, *Customer Visit Management*, *Customer Profiling*, dan Pencatatan Peluang Bisnis. Melalui sistem tersebut diharapkan IPC dapat menjaga hubungan baik dengan seluruh pelanggannya dan secara bersama-sama dengan pelanggan menjadi lebih baik. Selain itu, bentuk lain upaya menjaga kepuasan pelanggan adalah dengan program pembinaan seperti *customer award* dan *customer gathering*.

Perseroan memiliki mekanisme pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan CSR terkait konsumen yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Manajemen. Laporan Manajemen senantiasa di-review oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada para Pemegang Saham.

DAMPAK KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEPADA KONSUMEN

Melalui survei pelanggan, IPC melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil survei pelanggan. Hasil survei pelanggan ini digunakan IPC sebagai pengukuran capaian KPI Kontrak Manajemen Tahun 2019 dan juga sebagai upaya peningkatan kinerja unggul dalam pelayanan jasa kepelabuhanan berbasis KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul). Hal ini agar IPC mampu bersaing dengan kinerja para pesaing dan sebagai data pendukung penilaian Pelayanan Prima yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam melakukan survei pelanggan, IPC menggunakan pihak ketiga agar lebih transparan, independen dan akuntabel. Responden survei pelanggan adalah pelanggan yang menggunakan layanan jasa kapal, layanan bongkar muat peti kemas, bongkar muat barang *non* peti kemas, serta layanan terminal penumpang. Indeks kepuasan pelanggan pada tahun 2019 mencapai 4,67 skala *likert*. Indeks ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 4,58 skala *likert* serta melampaui target yang ditetapkan di tahun 2019 yaitu sebesar 4,65 skala *likert*.

Sementara indeks loyalitas pelanggan pada tahun 2019 mencapai 4,65 skala *likert*. Indeks ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 4,59 skala *likert* serta melampaui target yang ditetapkan di tahun 2019 yaitu sebesar 4,59 skala *likert*.

called Customer Relationship Management (CRM) that includes 6 modules: Customer Data Master, Customer Survey, Customer Service, Customer Visit Management, Customer Profiling, and Business Opportunity Records. Through this system, IPC can maintain good relations with all its customers and grow together with customers. In addition, other efforts to maintain customer satisfaction are through programs such as customer awards and customer gatherings.

The Company has a reporting mechanism on the results of consumer-related CSR activities as a part of the management report. The management report is always reviewed by Board of directors and Board of Commissioners before being submitted to the Shareholders.

IMPACT OF SOCIAL RESPONSIBILITY TO CONSUMERS ACTIVITIES

Through customer surveys, IPC conducts monitoring and evaluation of the follow-up to customer survey results. The results of this customer survey were used by the IPC as a measurement of the achievements of the 2019 Management Contract KPI and also as an effort to improve KPKU-based excellence performance of port services (Excellence Performance Assessment Criteria). This has been done in order to enable IPC to compete with the performance of competitors and as supporting data for the assessment of Excellent Services organized by the Ministry of Transportation. In conducting customer surveys, IPC uses third party to be more transparent, independent and accountable. Respondents of customers surveys who use ship services, container loading and unloading services, non-container loading and unloading services, and passenger terminal services. Customer satisfaction index in 2019 reached 4.67 Likert scale. This index is higher compared to 2018 of 4.58 Likert scale and exceeded the target set in 2019 of 4.65 Likert scale.

While the customer loyalty index in 2019 reached 4.65 Likert scale. This index is higher than in 2018 of 4.59 Likert scale and exceeded the target set in 2019 of 4.59 Likert scale.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO CONSUMERS

Tabel Indeks Survey Pelanggan Tahun 2018-2019
Survey Satisfaction Index 2018-2019

Indeks Index	Skala Scale	2019			2018		
		Target Target	Pencapaian Achievement	Kesimpulan Conclusion	Target Target	Pencapaian Achievement	Kesimpulan Conclusion
Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction	Likert	4,65	4,67	Tercapai Achieved	4,26	4,58	Tercapai Achieved
Loyalitas Pelanggan Customer Loyalty	Likert	4,59	4,65	Tercapai Achieved	4,35	4,59	Tercapai Achieved

Tercapainya target kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan telah memberikan manfaat pada peningkatan pendapatan Perseroan seperti yang diuraikan dalam Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini. Hal ini menunjukkan bahwa CSR terkait konsumen telah mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial.

Achieving customer satisfaction targets and customer loyalty provides benefits for increasing the Company's revenue as described in the Management Analysis and Discussion Chapter in this Annual Report. This shows that consumer-related CSR has encouraged sustainable development, especially in the economic and social aspects.

SERTIFIKASI CSR TERKAIT KONSUMEN

Sampai dengan 31 Desember 2019, IPC belum memperoleh sertifikasi CSR terkait konsumen.

CSR CERTIFICATION IN CONSUMER

As of December 31, 2019, IPC had not yet received CSR certification related to consumers.

PENGHARGAAN CSR TERKAIT KONSUMEN

Pada tahun 2019, Perseroan telah memperoleh berbagai penghargaan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang seperti yang telah disampaikan bagian Penghargaan pada bab Profil dalam Laporan Tahunan ini.

CSR AWARDS RELATED TO CUSTOMERS

In 2019, the Company has received a number of awards, both at the Head Office and Branch Offices, as conveyed in the discussion regarding Awards of the Profile chapter in this Annual Report.

SALURAN PENGADUAN

Untuk peningkatan layanan kepada konsumen, IPC menyediakan saluran pengaduan bagi konsumen yang memiliki keluhan dan sebagainya. Konsumen dapat menghubungi *contact center* ke nomor 1500-767 atau melalui email ke alamat customercare@indonesiaport.co.id.

COMPLAINT CHANNEL

To improve customer service, IPC provides a complaint channel for consumers. Consumers can contact the contact center at 1500-767 or by email to customercare@indonesiaport.co.id.

Sedangkan layanan pengaduan keluhan terkait layanan *billing* petikemas melalui *e-service* juga dapat disampaikan melalui fitur *e-care* pada *website e-service*.

While complaints related to container billing services via e-service can be submitted via e-care features on the e-service website.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

STRUKTUR PENGELOLA PROGRAM PKBL DAN CSR

Struktur pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) di lingkungan IPC berada di bawah Divisi Sekretariat Perusahaan pada Direktorat Utama. Dengan demikian, secara teknis pengelolaan kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan berada dalam pengawasan Sekretariat Perusahaan. Dalam pelaksanaan PKBL dan CSR terdapat pendelegasian kewenangan kepada Direktur Sumber Daya Manusia hingga batasan tertentu yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Direksi IPC. Adapun struktur organisasi pengelola program PKBL dan CSR IPC adalah sebagai berikut:

PKBL AND CSR PROGRAM MANAGEMENT STRUCTURE

PKBL and CSR management structure in IPC is under the Corporate Secretary Division in the Main Directorate. Therefore, the management of Corporate Social Responsibility activities is technically under the supervision of the Corporate secretary. for the implementation of PKBL and CSR, there is a delegation of authority to the Human Capital Director up to certain limits as stipulated in the Minutes of Agreement of Board of Directors of IPC. The organizational structure of IPC PKBL and CSR program management is as follows:



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terkait pengembangan kemasyarakatan, pendekatan yang dilakukan Perseroan difokuskan pada pemberdayaan sosial kemasyarakatan melalui program kemitraan dan bina lingkungan untuk masyarakat dan komunitas di wilayah operasional IPC. Adapun pelaksanaan tanggung jawab sosial Perseroan terkait pemberdayaan sosial kemasyarakatan dilakukan dengan merujuk pada ketentuan berikut:

COMMITMENT AND POLICY

For implementing social responsibility related to community development, the approach taken by the Company is focused on community social empowerment through partnership and community development programs for communities in IPC's operational areas. The implementation of the Company's responsibilities related to social empowerment is carried out by referring to the following provisions:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

1. Pelaksanaan CSR (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan;
2. Pelaksanaan PKBL BUMN (Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara);
3. Surat Keputusan Direksi IPC Nomor MB.01/2/12/1/LMS/UT/PI.II-2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan, dan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

ROADMAP PKBL

Sebagai salah satu komitmen untuk menjalankan bisnis berkelanjutan, IPC menyusun *Roadmap Corporate Social Responsibility* (CSR). *Roadmap* CSR ini menjadi panduan bagi Insan IPC dalam melaksanakan kegiatan CSR yang meliputi kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pelaksanaan PKBL merujuk pada peraturan PKBL yaitu PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan pelaksanaan TJSL mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

Salah satu tujuan disusunnya *Roadmap* CSR adalah untuk menentukan strategi dari setiap kegiatan atau program CSR IPC yang akan dilaksanakan. Tentunya dibutuhkan program yang efektif dan terintegrasi dengan visi, misi, *value* serta strategi bisnis Perseroan. Dengan demikian strategi dan program CSR ini akan menjadi bagian dari strategi bisnis IPC. Tahapan dalam *roadmap* CSR ini dikembangkan dengan memperhatikan tema tahunan *Corporate Roadmap* IPC 2016-2020.

Roadmap CSR ini juga disusun berdasarkan ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility* yang secara komprehensif memiliki tujuh *core subject* sebagai acuan dalam melakukan CSR. Pada tahap awal penyusunan dokumen *Roadmap* CSR ini dilakukan asesmen atas kegiatan CSR saat ini berbasis tujuh *core subject* ISO 26000.

PKBL ROADMAP

As a commitment to running a sustainable business, IPC has developed a Roadmap for Corporate Social Responsibility (CSR). This CSR roadmap is a guide for IPC employees in carrying out CSR activities that include the activities for the Partnership and Community development Program (PKBL) and the Social and Environmental Responsibility (TJSL). PKBL implementation refers to the PKBL regulation, namely PER-02/MBU/7/2017 on the Second Amendment to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 Regarding the Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises. Whereas the implementation of TJSL refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies that are cascaded in Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Environmental Social Responsibility (TJSL).

One of the objectives of CSR roadmap preparation is to determine the strategy for each IPC CSR activity or program that will be implemented. An effective and integrated program is needed with the Company's vision, mission, values and business strategy. Thus this CSR strategy and program will become a part of IPC business strategy. The CSR roadmap stages were developed by taking into account the annual theme of 2016-2020 IPC Corporate roadmap.

The CSR roadmap was also compiled based on ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility* that has seven core subjects as a reference in conducting CSR. In the initial stages of CSR roadmap document preparation, an assessment of current CSR activities was carried out based on ISO 26000 seven core subjects. The



Hasil asesmen tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan *Roadmap* CSR yang berisi berbagai inisiatif untuk mensinergikan kekuatan Perseroan dengan *Stakeholder* terkait.

Dengan diberlakukannya *Roadmap* CSR Nomor MB.02/24/12/1/LMS/UT/PI.II-18 tanggal 24 Desember 2018, diharapkan kinerja keberlanjutan dapat tercapai dengan baik dan terjalin sinergi dari berbagai pihak dalam meningkatkan kinerja Perseroan. Dengan demikian kinerja IPC secara keseluruhan baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang Pelabuhan dan Entitas Anak juga dapat meningkat dan lebih *sustainable*. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan kontribusi IPC bagi seluruh *Stakeholder* baik internal maupun eksternal juga terus meningkat.

assessment results were used as a reference in the preparation of CSR roadmap containing various initiatives to synergize the Company's strengths with related Stakeholders.

With the enactment of the CSR Roadmap No. MB.02/24/12/1/LMS/UT/PI.II-18 dated December 24, 2018, it is expected that sustainability performance can be achieved well, and the established synergies from various parties will improve the Company's performance. Thus the overall performance of IPC, both at the head office, port branch offices and subsidiaries will increase and be more sustainable. In line with this, IPC's contribution to all internal and external Stakeholders is also expected to continue to increase.



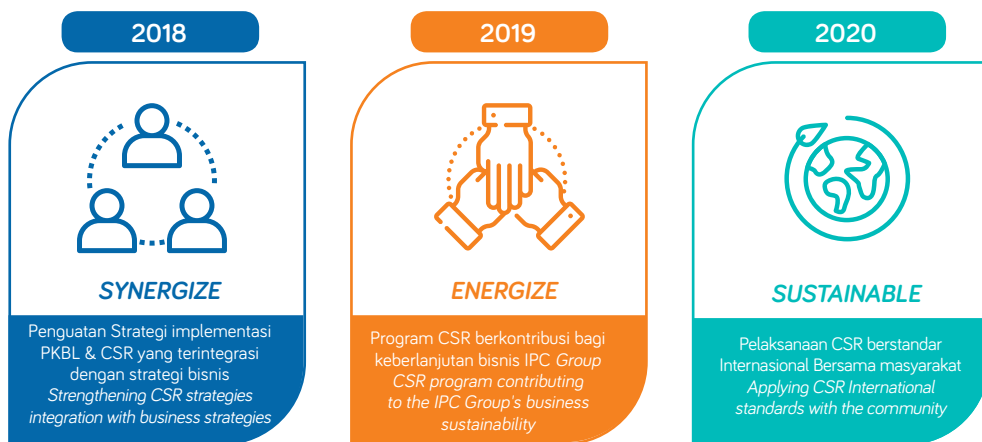
Gambar 1 Holistic Integrated Approach (ISO 26000: Guidance on Social Responsibility)
Image 1 Holistic Integrated Approach (ISO 26000: Guidance on Social Responsibility)

Dalam menjalankan perannya, organisasi seharusnya bekerja berdasarkan standar pedoman perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial. ISO 26000 menetapkan tujuh subyek inti (*core subject*) yang penting untuk diperhatikan

In carrying out its role, an organization should work based on standards of behavior guidelines that are in accordance with the principles of social responsibility. ISO 26000 defines seven core subjects that are important and become an integral part of

dan menjadi bagian integral dalam perencanaan aktivitas tanggung jawab sosial organisasi. Berdasarkan hal tersebut IPC menyusun *Roadmap* kebijakan implementasi CSR yang dimulai pada tahun 2018 hingga 2020 yang sejalan dengan *Roadmap Corporate*.

planning the organization's social responsibility. Based on this, IPC compiled a CSR implementation policy Roadmap for 2018 to 2020 in line with the Corporate Roadmap.



Synergize

- Mendesign program CSR dan PKBL yang Mendukung Strategi Bisnis berbasis ISO 26000;
- Kelengkapan kebijakan dan infrastruktur CSR;
- Memotret dan mengevaluasi pelaksanaan CSR dan PKBL;
- Mendesign Komunikasi Perseroan tentang CSR dan PKBL;
- Integrasi CSR lintas unit kerja di Pusat dan Cabang;
- Penyiapan SDM pelaksana program.

Energize

- Penumbuhan kesadaran dan inisiatif sinergi CSR di sepanjang rantai/rentang kendali bisnis IPC;
- Pengorganisasian masyarakat untuk melaksanakan sinergi CSR;
- Pelaksanaan program-program CSR kolaboratif yang memberikan manfaat bersama (*shared value*);
- Pelaksanaan program-program CSR dan PKBL di lokasi proyek-proyek strategis IPC;
- Meningkatkan *Branding* IPC sebagai Perseroan yang ramah lingkungan;
- Membuat internal *award* di *IPC Group* (Cabang dan Entitas Anak).

Sustainable

- Tumbuh inisiatif pelaksanaan CSR secara mandiri oleh *Stakeholder*;
- Integrasi pelaksanaan CSR di seluruh rantai bisnis IPC;

Synergize

- Designing CSR and PKBL programs that support ISO 26000-Based Business Strategies;
- Completeness of CSR policies and infrastructure;
- Recording and evaluating CSR and PKBL implementation;
- Designing Corporate Communication regarding CSR and PKBL;
- CSR integration across work units at the Head Office and Branches;
- Preparing HC for program implementation.

Energize

- Awareness raising and CSR synergy initiatives throughout IPC chain/range of business control;
- Organizing the community to implement CSR synergies;
- Implementing collaborative CSR programs that provide shared value;
- Implementing CSR and PKBL programs at the location of IPC strategic projects;
- Increasing IPC's Branding as an environmentally friendly company;
- Creating internal awards in IPC group (Branches and Subsidiaries).

Sustainable

- Growing CSR implementation initiatives independently by Stakeholders;
- Integrating CSR implementation throughout IPC business chain;



- Aktif di forum-forum internasional dalam pengembangan bisnis berkelanjutan;
- Pelaksanaan CSR IPC menjadi rujukan bagi Perseroan di tingkat nasional dan internasional;
- Memiliki program CSR dan PKBL yang menjadi simbol IPC;
- Audit CSR berdasarkan ISO 26000.

Tema Roadmap IPC

Tema : **"ALIGNING SUSTAINABLE PORT"**
 Sub Tema : Menyelaraskan Strategi Menuju Pelabuhan Berkelanjutan

IPC memiliki inisiatif *green port* sebagai bentuk komitmen dukungan terhadap bisnis berkelanjutan. Inisiatif ini terus dijalankan secara menyeluruh oleh seluruh unit kerja terkait di IPC. Inisiatif ini juga akan lebih memberikan nilai tambah bagi Perseroan, negara dan lingkungan jika dilakukan secara partisipatif bersama *Stakeholder*.

IPC mendapatkan manfaat (*Profit*) dan reputasi yang optimal, *Stakeholder* (*People*) akan mendapatkan manfaat ekonomis yang lebih baik, ekologi (*Planet*) lebih terjaga dan negara merasakan kontribusi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat (*3P*).

RISIKO SOSIAL

Dalam menyalurkan Program Kemitraan, Perseroan menghadapi beberapa resiko terutama terkait piutang macet, maka perlu adanya upaya-upaya khusus untuk melakukan *collecting* piutang mitra binaan dan melakukan investigasi internal. Selain itu, perlu melakukan *monitoring* terhadap perkembangan pengembalian dan melakukan langkah-langkah untuk mengurangi timbulnya kerugian.

TARGET/RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pada tahun 2019, fokus kegiatan CSR dan PKBL IPC mengacu pada "3P", yaitu *Planet*, *People* dan *Profit* yang diwujudkan dalam tiga program utama: IPC Cinta Pendidikan, IPC Cinta Lingkungan dan IPC Cinta Kesehatan.

- Being active in international forums in sustainable business development;
- IPC's CSR implementation as a reference for companies at national and international levels;
- Having CSR and PKBL program that become a symbol of IPC
- CSR audit based on ISO 26000.

IPC Roadmap Theme

Theme : "Aligning Sustainable Port"
 Sub Theme : Aligning Strategies Towards Sustainable Port

IPC has a green port initiative as a form of commitment to support sustainable business. This initiative continues to be carried out in all relevant work units in IPC. This initiative will provide added value for the Company, the state, and the environment if it is carried out in a participatory manner with Stakeholders.

IPC will receive (*Profit*) benefits and an optimal reputation, the Stakeholders (*People*) will receive better economic benefits, the ecology (*Planet*) will be better maintained and the state will feel the economic contribution, and job creation for the community (*3P*).

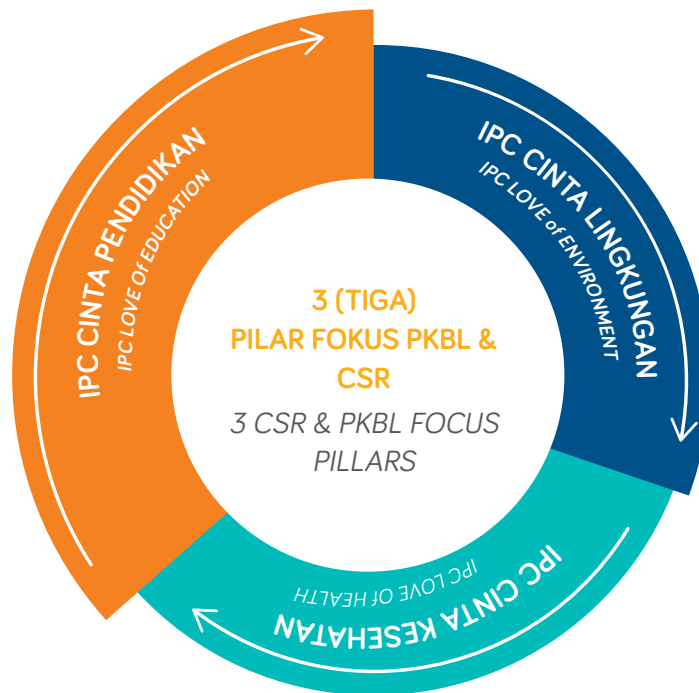
SOCIAL RISK

In channeling the Partnership Program, the Company faces several risks, especially related to bad debt, so it is necessary to make special efforts to collect accounts receivables from partners, and carry out internal investigations. In addition, it is necessary to monitor the development of repayments and take steps to reduce losses.

ACTIVITY PLAN OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

In 2019, the focus of IPC's CSR and PKBL activities refers to "3P", namely *Planet*, *People* and *Profit* which is realized in three main programs: IPC Love Education, IPC Love Environment and IPC Love Health.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT



Dalam melakukan perencanaan kegiatan bidang pengembangan masyarakat, Perseroan telah melakukan *due diligence* terhadap tanggung jawab sosial Perseroan terkait pengembangan masyarakat dengan melakukan *monitoring* dan tindak lanjut kegiatan khususnya Program Kemitraan. *Monitoring* dan tindak lanjut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak kegiatan dilaksanakan. Hasil *monitoring* dijadikan dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan dalam merencanakan kegiatan CSR selanjutnya.

Perencanaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei kebutuhan masyarakat dan hasil *monitoring* kegiatan CSR yang telah dilaksanakan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, kegiatan CSR terkait pengembangan masyarakat diharapkan akan tepat sasaran. Perencanaan kegiatan CSR pengembangan masyarakat telah dituangkan dalam *Roadmap* PKBL dan CSR tahun 2018–2020.

Perseroan telah mempertimbangkan dampak penting langsung atau tidak langsung aktivitas dan keputusan Perseroan pada CSR terkait pengembangan masyarakat. Program Kemitraan diharapkan akan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. Melalui bantuan yang diberikan diharapkan seluruh Mitra Binaan dapat lebih berkembang, menjadi mandiri dan menemukan potensi-potensi yang membawa produk Mitra Binaan menjadi lebih kompetitif. Sedangkan Program Bina Lingkungan diharapkan terciptanya pola hubungan yang harmonis dan

When planning community development activities, the Company conducts due diligence towards corporate social responsibility by monitoring and following up on activities, especially in the Partnership Program. The monitoring and follow-up take a period of 1 (one) up to 5 (five) years since the activity started. The results of monitoring are used as a basis in assessing the effectiveness of program implementation and in planning subsequent CSR activities.

Planning is carried out using a community needs survey approach, and the results of CSR activity monitoring carried out. With this approach, CSR activities related to community development are expected to be on target. Community development CSR planning activities has been outlined in CSR and PKBL roadmap in 2018–2020.

When planning CSR activities concerning community development, the Company considers the important direct or indirect impact of its activities and decisions. The Partnership Program is expected to improve the ability of small businesses to become resilient and independent through the use of soe funds. Through the assistance provided, it is expected that all Partners can develop more, become independent and discover the potential for their products, making them more competitive. While the Community development Program is expected to create a harmonious and mutually beneficial relationship pattern



bersifat mutualisme (saling menguntungkan) antara IPC dengan masyarakat, yaitu dengan terciptanya iklim yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan usaha dan pengamanan aset Perseroan.

Perseroan juga melakukan *review* terhadap seluruh regulasi terkait isu-isu penting terkait pengembangan kemasyarakatan seperti Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara serta peraturan terkait lainnya.

CSR terkait pengembangan masyarakat dirumuskan dan dilaksanakan melalui pelibatan Departemen Pelayanan Masyarakat serta masyarakat guna efektifnya pelaksanaan kegiatan CSR. Untuk kegiatan-kegiatan tertentu, pelaksanaan CSR dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian BUMN dalam Program BUMN Hadir Untuk Negeri yang diikuti oleh seluruh Perseroan BUMN.

Perseroan senantiasa mempertimbangkan risiko terkait dengan aspek kemasyarakatan, risiko tersebut antara lain komplain dari masyarakat sekitar atas dampak kegiatan Perseroan seperti kondisi keamanan sekitar pelabuhan, kebisingan, polusi udara, dan lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yaitu tercipta suasana lingkungan yang kondusif, nyaman dan sejahtera. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain bantuan sarana ibadah dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian akan menciptakan manfaat bersama bagi masyarakat dan Perseroan.

Di samping itu, Perseroan juga menghadapi risiko terkait dengan kolektibilitas dana kemitraan. Perseroan telah memitigasi risiko tersebut dengan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan survei, *collecting* dana kemitraan dan menerapkan sistem pembayaran angsuran dengan menggunakan *Virtual Account* untuk mempermudah identifikasi penerimaan angsuran dari mitra.

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Kegiatan CSR terkait pengembangan kemasyarakatan melibatkan Direksi, Departemen Pelayanan Masyarakat, dan seluruh karyawan sesuai dengan penugasan dari Perseroan.

Untuk menunjang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan IPC terus melakukan optimalisasi terhadap

between IPC and the community, and create a conducive climate for the continuity of the business activities and safeguard the Company's assets.

The Company also reviews all regulations related to important community development issues including ministry of SOE Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/7/2017 on the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and the Community Development Program of the State Owned Enterprises and other related regulations.

The CSR for community development is formulated and implemented by involving the Department of Community Development and the community to ensure effective implementation. For certain activities, CSR is jointly carried out with the Ministry of SOE in the program BUMN Hadir Untuk Negeri, which invites all State Owned Enterprises.

The Company always considers risks related to social aspect, these risks include complaints from surrounding communities on the impact of Company activities such as security conditions around the ports, noise, air pollution, and others. This is conducted to meet the expectations of the community in creating a conducive, comfortable and prosperous environment. Efforts made to date include assistance with places of worship and poverty alleviation. Thus, it will create mutual benefits for the community and the Company.

In addition, Company also faces the credit risk of partnership funds. Company has mitigated these risks by cooperating with third parties to conduct surveys, collect partnership funds and implement installment payment system using Virtual Accounts to ease the identification of installment receipts from partners.

ACTIVITIES OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT

CSR for community development involves the Board of Directors, the Community Development Department, and all employees in line with Company's assignments.

To support the Partnership Program and Community Development Program, IPC continues to optimize the

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

pengelolaan PKBL & CSR terutama dalam bidang operasional PKBL sendiri, terlihat pada tahun 2018 telah *Go Live* aplikasi PKBL & CSR berbasis *Web* untuk mempercepat penyaluran bantuan. Aplikasi PKBL milik Perseroan ini telah menjadi *role model* bagi BUMN lain untuk menjalankan PKBL di Perseroannya.

IPC selaku Perseroan BUMN yang bergerak dalam Bidang Jasa Kepelabuhanan memiliki 12 Cabang Pelabuhan yang mana masing-masing Cabang Pelabuhan memiliki perwakilan yang bertanggung jawab pada pengelolaan PKBL. Untuk menjamin pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan, IPC telah melakukan *training* CSR berbasis ISO 26000 kepada seluruh pengelola PKBL di lingkungan Perseroan.

PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM KEMITRAAN

Program Kemitraan IPC mengacu pada Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Aturan tersebut menyebutkan, Program Kemitraan BUMN dilakukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN.

Untuk memenuhi amanat yang terkandung dalam aturan tersebut, IPC melakukan seleksi ketat dan memberikan kesempatan pada pengusaha-pengusaha kecil yang memiliki produk dengan daya saing tinggi namun memiliki keterbatasan dalam pemasaran, SDM, manajemen, permodalan dan teknologi. Terhadap para pengusaha yang telah terpilih untuk menjadi Mitra Binaan, IPC memberikan bantuan dengan beberapa metode berikut:

1. Pemberian pinjaman modal kerja;
2. Pemberian wawasan dan keterampilan untuk mengembangkan usaha dalam bentuk pendidikan dan pelatihan manajerial;
3. Keikutsertaan Mitra Binaan pada beragam pameran dalam rangka membuka dan mengembangkan jaringan pemasaran produk, investasi maupun kerjasama bisnis;
4. Melalui bantuan yang diberikan tersebut, diharapkan seluruh Mitra Binaan dapat lebih berkembang, menjadi mandiri dan menemukan potensi-potensi yang membawa produk mereka menjadi lebih kompetitif.

Kinerja IPC dalam Program Kemitraan pada tahun 2018 dan 2019 menyalurkan bantuan sebesar Rp31.500.000.000 untuk mendukung usaha kecil di Indonesia agar menjadi tangguh dan mandiri melalui kerjasama BUMN Khusus dan Entitas Anak BUMN.

management of its PKBL & CSR, especially in the operational field of PKBL itself, as can be seen in 2018, the PKBL & CSR-based Web application has been *Go Live*, to speed up the distribution of assistance. The Company's PKBL application has become a role model for other SOE to run PKBL in their companies.

IPC as an SOE is engaged in Port services has 12 port branches, in which each port branch has a representative responsible for the management of PKBL. To guarantee the Company's Partnership Program and Community Development Program management, IPC conducted ISO 26000-based CSR training for all PKBL managers within the Company.

IMPLEMENTATION OF PARTNERSHIP PROGRAM ACTIVITIES

IPC's Partnership Program refers to the Minister of SOE Regulation PER-02/MBU/7/2017 on the Second Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 regarding the Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises. The regulation states that the SOE Partnership Program is conducted to improve the ability of small enterprises to become resilient and independent through the utilization of SOE's funds.

To fulfill the mandate contained in the regulation, IPC performs rigorous selection and provides opportunities for small entrepreneurs with high competitiveness but with limitations in marketing, HC management, capital and technology. For the entrepreneurs selected to be Fostered Partners, IPC provides assistance through the following methods:

1. Provision of working capital loan;
2. Provision of knowledge and skills to develop the business in form of education and managerial training;
3. Participation of Partners in various exhibitions in pursuant of opening and developing a product marketing network, investments, and business cooperations;
4. Through this assistance, all Partners are expected to become more developed, independent, and able to find potentials that will make their products more competitive.

In 2018 and 2019, IPC in the Partnership Program channeled assistance amounting to Rp31,500,000,000 to support small businesses in Indonesia to become resilient and independent. By the end of 2019, the number of fostered partners reached



Hingga akhir 2019, jumlah mitra binaan mencapai 3.814 usaha kecil yang tersebar di seluruh sektor usaha yang dapat dilihat pada tabel berikut:

3,814 small businesses spread across all business sectors as shown in the following table:

No	Sektor Penyaluran <i>Distribution Sector</i>	2019	2018
1	Sektor Industri Industrial Sector	813	839
2	Sektor Perdagangan Trade Sector	1.562	1.627
3	Sektor Pertanian Agriculture Sector	84	87
4	Sektor Peternakan Livestock Sector	81	83
5	Sektor Perkebunan Plantation Sector	50	52
6	Sektor Perikanan Fisheries Sector	120	122
7	Sektor Jasa Service Sector	561	588
8	Sektor Lainnya Other Sectors	543	560
Jumlah Mitra Binaan Total Fostered Partners		3.814	3.958

PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Sasaran Program Bina Lingkungan adalah masyarakat sekitar IPC dengan sifat bantuan untuk pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan terciptanya pola hubungan yang harmonis dan bersifat mutualisme (saling menguntungkan) yaitu dengan terciptanya iklim yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan usaha dan pengamanan aset Perseroan.

Lingkup kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan yang dilaksanakan dalam program Bina Lingkungan, sejalan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Ada tujuh bidang yang menjadi sasaran program, yaitu:

- Bantuan kepada korban bencana alam merupakan bentuk kepedulian Perseroan terhadap terdampak bencana yang terjadi, bantuan tersebut terdiri dari:
 - Bantuan Bencana Kabut Asap di Sumatera;
 - Bantuan Bencana Banjir Jambi.
- Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan.
 - Beasiswa Cinta IPC kepada masyarakat wilayah Sumatera Selatan.

IMPLEMENTATION OF COMMUNITY DEVELOPMENT ACTIVITY

The Community Development Program target is surrounding communities through assistance to empower the communities. Thus, we expect that harmonious and mutual relations can be established, through the creation of a favorable climate for continuous business activities and the safeguarding of the Company's assets.

The scope of corporate social responsibility activities carried out in the Community Development program, in line with the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/7/2017 on the Second Amendment to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and the Community Development Program of State-Owned Enterprises.

There are seven areas targeted by the program:

- Donation to victims of natural disasters, is a form of the Company's concern for the affected people, which consists of:
 - Donation for Smog Disaster in Sumatera;
 - Donation for Jambi Flood Disaster.
- Educational and/or training assistance.
 - Cinta IPC Scholarship for the people of South Sumatera.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak, bantuan ini meliputi pembiayaan terhadap biaya sekolah, memberikan pengetahuan lain seperti kunjungan lapangan tempat-tempat wisata dan bisnis yang ada di wilayah Jakarta, serta memberikan pelatihan *e-commerce* untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi perdagangan dunia *online*;

- Program Pengenalan Dunia Maritim kepada siswa dan siswi SD di wilayah Perseroan.

Program ini bertujuan untuk mengenalkan masyarakat sekitar Perseroan bahwa peran Perseroan (Jasa Kepelabuhan) sangat penting dalam menunjang perekonomian suatu Bangsa karena Perseroan (Pelabuhan) merupakan tempat ekspor dan impor barang-barang yang ingin masuk dan keluar suatu wilayah;

- Bantuan Biaya Pendidikan.
Program ini bertujuan untuk meringankan beban keluarga siswa dan siswi yang kurang mampu dalam membiayai biaya pendidikan, dengan adanya bantuan ini diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah;
- Pendidikan Gratis dan berkualitas kepada masyarakat di wilayah Jakarta Utara melalui program SD Juara Cinta IPC. Bentuk kepedulian Perusahaan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada putra putri yang berasal dari keluarga kurang mampu di Jakarta Utara mendapatkan pengetahuan;
- IPC Cinta Difabel.
Memperingati Hari Disabilitas Internasional, IPC menyelenggarakan kegiatan IPC Cinta Difabel dengan memberikan bantuan pendidikan dan peralatan sekolah kepada para difabel. IPC Cinta Difabel ini juga merupakan bentuk dukungan IPC kepada Pemerintah dalam menciptakan inklusi dan disabilitas yang unggul;
- Kelas Kreatif & Buka Puasa Bersama.
IPC menyelenggarakan program kelas kreatif yang diikuti oleh anak-anak sekolah dasar bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan mengenalkan kepada anak-anak sejak dini tentang perkembangan dunia digitalisasi.

3. Bantuan peningkatan kesehatan.

- IPC Peduli Mata Anak.
Program IPC Peduli Mata Anak diikutsertakan oleh 5.000 anak, dengan memberikan layanan pemeriksaan mata dan pembagian kaca mata. Program ini diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan mata yang banyak dialami anak-anak di sekitar Perseroan;

This program aims to provide opportunities for the underprivileged to continue to get a decent education. This assistance includes financing of school fees, providing other knowledge such as field trips to tourist attractions and businesses in Jakarta area, and providing *e-commerce* training to prepare the community to face online commerce;

- Maritime World Introductory Program for elementary school students within the Company's area.

This program aims to introduce the community around the Company that the role of the Company (Port Service) is very important in supporting the economy of a Nation because the Company (Port) is a place of export and import of goods that enter and exit an area;

- Education Fee Assistance.
This program aims to ease the burden on the families of students and underprivileged students to pay for education costs. With this assistance, it is hoped that there will be no more children who drop out of school;
- Free and quality education to people in North Jakarta area through SD Juara Cinta IPC program.
This form of Company's awareness aims to provide opportunities for children coming from underprivileged families in North Jakarta to gain knowledge;
- IPC Love People with Disability (IPC Cinta Difabel).
Commemorating International Disability Day, IPC organized IPC Cinta Difable activity by providing educational assistance and school equipment for the disabled. This IPC Cinta Difable is also a form of IPC support to the Government in creating superior inclusion and disability;
- Creative Classes & Iftar Together
IPC organized a creative classroom program that is attended by elementary school children aimed at increasing creativity and introducing children from an early age about the development of the world of digitalization.

3. Health improvement assistance.

- IPC Cares for Children's Eyes (IPC Peduli Mata Anak).
IPC Peduli Mata Anak Program was attended by 5,000 children, in which eye examination and eyewear distribution service were provided. This program is expected to help overcome the eye problems that are experienced by many children around the Company.



- Donor Darah dan Mobil Transfusi Donor Darah. Untuk memenuhi kebutuhan darah yang diperlukan oleh Palang Merah Indonesia Jakarta Utara, Perseroan membuat program Donor Darah yang dilakukan secara berkala pada setiap triwulan. Serta untuk mendukung operasional Palang Merah Indonesia, Perseroan memberikan bantuan Mobil Unit Donor Darah bertujuan untuk mempermudah PMI Jakarta Utara dalam mencari dan mendistribusikan darah kepada masyarakat;
 - Pemeriksaan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) Gratis Kegiatan ini merupakan kepedulian Perseroan terhadap masyarakat di sekitar dengan cara memberikan pemeriksaan saluran pernapasan secara gratis untuk memastikan bahwa masyarakat di lingkungan Perseroan terhindar dari penyakit saluran pernapasan.
- Blood Donor and Blood Donor Transfusion Car; To meet the blood needs needed by the North Jakarta Indonesian Red Cross, the Company establishes a Blood Donor program which is conducted regularly every quarter. As well as to support the operations of the Indonesian Red Cross, the Company provided assistance in the form of Blood Donor Car aimed at facilitating the North Jakarta PMI in finding and distributing blood to the public;
 - Free upper respiratory infection (ARI) examination This activity is one of the Company's concern to the surrounding community by providing free respiratory examination to ensure that people around the Company's environment are not having respiratory diseases.
4. Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum.
- Pembangunan Jembatan Gantung Sebagai salah satu sarana penyeberangan orang dan barang, jembatan gantung sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena banjir dan longsor di wilayah Bengkulu Utara. Sebagai program lanjutan pasca bencana, IPC berinisiatif untuk membangun jembatan gantung sebagai sarana penyeberangan orang dan barang;
 - Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau merupakan program IPC Cinta Lingkungan, lingkungan disekitar Perseroan yang dibangun tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbondioksida (CO₂), menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan menjadi tujuan Perseroan dalam membangun ruang terbuka hijau.
4. Public facilities and infrastructure development assistance.
- Construction of a suspension bridge As one of the means of crossing people and goods, a suspension bridge is needed by people affected by floods and logs in North Bengkulu. As a post-disaster follow-up program, IPC took the initiative to build a suspension bridge as a means of crossing people and goods;
 - Green Open Space Development Green Open Space is an IPC Love Environment (IPC Cinta Lingkungan) program. The environment around the Company that is filled with plants and green plants can absorb carbon dioxide (CO₂) level, add oxygen, reduce temperatures with shade and coolness of plants, become water catchment areas, and reduce noise are the Company's goals in building green open space.
5. Bantuan sarana ibadah.
- Merupakan bentuk dukungan Perseroan terhadap pembangunan dan perbaikan sarana ibadah, guna untuk memberikan tempat ibadah yang layak bagi pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan warga negara. Sehingga masyarakat lebih agamis yang berdampak pada lingkungan kerja Perseroan yang bebas dari kriminalisasi.
5. Assistance in religious facilities.
- Is a form of Company's support for the construction and improvement of religious facilities, in order to provide a suitable place of worship for followers of religion to carry out worship in accordance with their beliefs. Hence, the community can be more religious and can have an impact on the Company's work environment, to be free from criminalization.
6. Bantuan pelestarian alam.
- Padat Karya Tunai. Beragam kegiatan dilaksanakan, mulai dari pembersihan sungai, penanaman pohon mangrove, pembersihan sampah di pesisir pantai dan pemberian peralatan kebersihan beserta tempat sampah kepada masyarakat di lingkungan Perseroan.
6. Assistance for nature conservation.
- Intensive Works Various activities were carried out, starting from cleaning up the river, planting mangrove trees, cleaning up trash on the coast and providing cleaning equipment and trash bins to the community in the company.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

- | | |
|---|--|
| <p>7. Bantuan sosial masyarakat pengentasan kemiskinan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembagian Sembako Gratis Ramadhan.
Sebagai bentuk kepedulian Perseroan terhadap masyarakat, IPC melakukan pembagian Sembako Gratis di wilayah Perseroan dengan tujuan agar masyarakat dapat merayakan bulan Ramadhan dengan menyediakan sembako gratis bagi masyarakat yang kurang mampu; • Pembagian Hewan Qurban.
Untuk merayakan hari Idul Adha, IPC memiliki program pembagian hewan qurban untuk memeriahkan perayaan hari besar Islam. | <p>7. Social assistance for poverty alleviation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Free distribution of groceries for Ramadan
As a form of Company's concern for the community, IPC is distributing Free Groceries within the Company's area with the aim that the surrounding community can celebrate the month of Ramadan by providing free food for the poor; • Distribution of Sacrificial Animals
To celebrate Eid al-Adha, IPC has a qurban animal distribution program to enliven the Islamic holiday celebration. |
|---|--|

"RANGKAIAN KEGIATAN "BUMN HADIR UNTUK NEGERI"

"BUMN HADIR UNTUK NEGERI" PROGRAMME ACTIVITIES"

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Siswa Mengenal Nusantara
Untuk menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air sejak dini kepada siswa SMA/SMK/SLB. Keragaman kekayaan nusantara dan potensi daerah diperkenalkan melalui interaksi langsung siswa dengan komponen Pemerintah dan masyarakat di provinsi yang di kunjungi. Pada tahun 2019 IPC berkesempatan memberangkatkan 23 siswa serta 3 guru teladan di Provinsi Sumatera Selatan menuju Provinsi Kalimantan Selatan; • Upacara HUT RI
Untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta untuk memeriahkan HUT RI bersama masyarakat, IPC ditunjuk Kementerian BUMN untuk merayakan HUT RI di Provinsi Bangka Belitung; • Jalan Sehat
Untuk memeriahkan peringatan HUT RI serta menumbuhkan rasa kebersamaan dalam jalan sehat agar tercipta lingkungan kerja yang sehat; • Mudik Gratis BUMN
Untuk membantu pemerintah dalam menekan kepadatan serta sebagai wujud kepedulian Perseroan kepada masyarakat untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan mudik; • Program Anti Korupsi
Perseroan telah memiliki beberapa mekanisme pencegahan korupsi yaitu sistem pengendalian internal, <i>Whistleblowing System</i> dan Kebijakan Gratifikasi. Prosedur sistem pengendalian internal, <i>Whistleblowing System</i> dan Kebijakan Gratifikasi telah disajikan pada bagian Tata Kelola Perseroan dalam Laporan Tahunan ini. | <ul style="list-style-type: none"> • Students Explore the Nation
To instill a sense of pride and love of the country from an early age to high school/vocational school students. The diversity of the richness of archipelago and the potential of the region are introduced through direct interaction of students with the Government and community components in the provinces visited. In 2019, IPC had the opportunity to send 23 students and 3 exemplary teachers in South Sumatra Province to South Kalimantan Province; • RI Anniversary Ceremony
To instill a sense of patriotism and to enliven the Republic of Indonesia anniversary together with the community, IPC was appointed by the Ministry of SOEs to celebrate the Republic of Indonesia Anniversary in Bangka Belitung Province; • Healthy walk
To enliven the Republic of Indonesia Anniversary and foster a sense of togetherness in a healthy way in order to create a healthy work environment; • SOE Free homecoming
To assist the government in suppressing overcrowding as well as a manifestation of the Company's concern for the community to obtain a sense of security and comfort in their homecoming; • Anti-Corruption Program
The Company has several corruption prevention mechanisms, namely internal control system, Whistleblowing System and Gratification Policy. Internal control system procedures, Whistleblowing System and Gratification Policy have been presented in the Corporate Governance section of this Annual Report. |
|--|--|



PROGRAM CSR KEMASYARAKATAN LAINNYA

Program tanggung jawab sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) IPC merupakan kegiatan yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan kegiatan ini berada dalam lingkungan Divisi Sekretariat Perusahaan. Adapun tujuan dari kegiatan ini, terutama merupakan bentuk kepedulian IPC terhadap lingkungan sosial, sekaligus ikut berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Program ini berbeda dengan pelaksanaan PKBL seperti telah diuraikan di atas, karena PKBL direalisasikan dalam kapasitas IPC sebagai BUMN yang kegiatannya telah terikat dengan *frame work* yang dibuat oleh pemerintah.

IPC juga melaksanakan PKBL dan CSR dalam rangka menyejahterakan dan membantu masyarakat yang terkena imbas proyek strategis Perseroan.

- Pelabuhan Kalibaru
Pembangunan Terminal Kalibaru yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelabuhan ini direncanakan untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka mendukung distribusi logistik nasional;
- Pelabuhan Kijing/Mempawah
Terminal Kijing sebagai pengembangan Pelabuhan Pontianak, dimana adanya keterbatasan area pengembangan di Kota Pontianak, keterbatasan kedalaman sungai dan tingkat sedimentasi yang tinggi serta untuk mendukung program Pemerintah "Tol Laut" untuk meningkatkan konektivitas laut guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Sumber Daya Alam;
- Pembangunan Terminal dan *Inland Waterways* Cikarang Bekasi Laut;

PROGRAM PENGEMBANGAN SENI DAN BUDAYA

IPC meresmikan Museum Maritim Indonesia pada 7 Desember 2018, museum ini didirikan oleh IPC dalam rangka memberikan kesempatan kepada generasi muda mengetahui bagaimana sejarah dan budaya maritim Indonesia. Di museum ini akan dilihat berbagai artefak bagaimana perjalanan pembuatan pelabuhan di Indonesia dan bagaimana Indonesia menjadi negara maritim. Museum Maritim Indonesia dibuka untuk umum dan dapat menjadi salah satu tujuan wisata yang bersifat pendidikan.

Perseroan memiliki mekanisme pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan CSR terkait pengembangan kemasyarakatan yang merupakan salah satu bagian dari laporan manajemen. Laporan manajemen senantiasa di-review oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada para Pemegang Saham.

OTHER COMMUNITY CSR PROGRAMS

IPC's Corporate social responsibility (CSR) programs focus on community empowerment. The management of these activities is held by the Corporate Secretary division. The purpose of these activities is primarily as a form of IPC's concern for the social environment, as well as contributing to sustainable development. These programs are different from the implementation of PKBL as described above, as PKBL is realized in the capacity of IPC as an SOE, where the activities are tied to the government frame work.

IPC also implements PKBL and CSR to improve the welfare and help communities affected by the Company's strategic projects.

- Kalibaru Port
Construction of Kalibaru Terminal located in Tanjung Priok, North Jakarta. This port is planned to increase the capacity of Tanjung Priok Port to support national logistics distribution;
- Kijing/Mempawah Port
Kijing Terminal as the development of Pontianak Port, where there are limited development areas in Pontianak, limited river depth and high sedimentation levels and to support the government's "sea Toll" program to improve sea connectivity to reduce logistics costs and improve the competitiveness of natural resource products;
- Construction of Cikarang Bekasi Laut Terminal and Inland Waterways;

CULTURAL ARTS DEVELOPMENT PROGRAM

IPC inaugurated the Indonesian Maritime Museum on December 7, 2018, a museum founded by IPC to provide opportunities for the younger generation to learn about the history and culture of Indonesian maritime culture. In this museum, various artifacts can be seen on how ports in Indonesia were developed and how Indonesia became a maritime country. The Indonesian Maritime Museum is open to the public and can become an educational destination.

The Company has a reporting mechanism on the results of community development-related CSR activities as a part of the management report. The management report is always reviewed by Board of Directors and Board of Commissioners before being submitted to the Shareholders.

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT****SALURAN PENGADUAN DI BIDANG
PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN**

Untuk saluran pengaduan di bidang pengembangan sosial kemasyarakatan dapat disampaikan pada Divisi Sekretariat Perusahaan atau dapat email: ipcckbl@gmail.com maupun corp_sec@indonesiaport.co.id.

**DAMPAK KEGIATAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN**

Program Kemitraan yang dilakukan IPC untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. Melalui bantuan yang diberikan tersebut, diharapkan seluruh Mitra Binaan dapat lebih berkembang, menjadi mandiri dan menemukan potensi-potensi yang membawa produk Mitra Binaan menjadi lebih kompetitif.

Sedangkan Program Bina Lingkungan yang dilakukan IPC untuk masyarakat sekitar Perseroan dengan sifat bantuan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan terciptanya pola hubungan yang harmonis dan bersifat mutualisme (saling menguntungkan) antara IPC dengan masyarakat, yaitu dengan terciptanya iklim yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan usaha dan pengamanan aset Perseroan.

Untuk kegiatan CSR lainnya juga telah memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menyejahterakan dan membantu masyarakat yang terkena imbas proyek strategis Perseroan. Dengan demikian, secara umum bisa disampaikan bahwa kegiatan CSR telah memberikan manfaat terhadap pembangunan berkelanjutan khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

**BIAYA YANG DIKELUARKAN TERKAIT TANGGUNG
JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN****REALISASI BIAYA PELAKSANAAN PKBL**

Pada tahun 2019, IPC merealisasikan penyaluran Program Kemitraan sebesar Rp30 miliar melalui BUMN Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara, hal ini dikarenakan IPC

**COMMUNITY DEVELOPMENT COMPLAINT
CHANNEL**

For channeling complaints related to social development, they can be submitted via email to ipcckbl@gmail.com or corp_sec@indonesiaport.co.id.

**IMPACT OF ACTIVITIES OF SOCIAL
RESPONSIBILITY IN SOCIAL COMMUNITY
DEVELOPMENT**

The Partnership Program carried out by IPC aims to improve the ability of small businesses to become resilient and independent through the use of SOE's funds. By using the assistance provided, it is expected that all Fostered Partners can develop more, become independent and find the potential to make their products more competitive.

Whereas the Community Development Program conducted by IPC for the communities around the Company takes the form of assistance for community empowerment activities that are expected to create a harmonious and mutually beneficial relationship between IPC and the communities, and create a conducive climate for business continuity and for safeguarding the Company's assets.

Other CSR activities also provide benefits to the community by prospering and helping communities affected by the Company's strategic projects. Thus, in general it can be stated that CSR activities have provided benefits for sustainable development, especially related to poverty alleviation, eliminating hunger and improving the quality of public education.

**COSTS OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL
COMMUNITY DEVELOPMENT****REALIZATION OF PKBL COSTS**

In 2019, IPC realized the distribution of Partnership Program in the amount of Rp30 billion through a Special SOE established by the Ministry of State-Owned Enterprises, because IPC is very



sangat memperhatikan kolektibilitas dan prinsip kehati-hatian serta bentuk upaya sinergi BUMN dalam usaha pemberdayaan masyarakat. Realisasi Penyaluran tersebut terdiri dari:

concerned about the collectibility and the principle of prudence as well as the form of SOE synergy in community empowerment. The realization of the distribution consists of:

Tabel Realisasi Penyaluran Program Kemitraan berdasarkan Sektor Usaha (dalam ribuan Rupiah)

Realization of Distribution of Partnership Programs by Business Sector (in thousands of Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth (%)
Sektor Perdagangan Trade Sector	-	-	-
Sektor Jasa Service Sector	-	-	-
Sektor Lainnya Other Sectors	30.000.000	1.500.000	1.900
Total Penyaluran Pinjaman Total Loan Distribution	30.000.000	1.500.000	1.900

Pada tahun 2019, IPC juga merealisasikan penyaluran dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp24,27 miliar yang disalurkan kepada masyarakat di wilayah kerja IPC.

In 2019, IPC also realized the distribution of funds for Community Development Program amounting to Rp24.27 billion, which was distributed to the communities within IPC work area.

Tabel Realisasi Program Bina Lingkungan berdasarkan Wilayah (dalam ribuan Rupiah)

Realization of Community Development Programs by Area (in thousands of Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth (%)
DKI Jakarta	10.626.487	7.818.183	35,92
Kantor Pusat Head Office	9.046.883	5.884.323	53,75
Cabang Tanjung Priok Tanjung Priok Branch	1.247.882	1.629.328	(23,41)
Cabang Sunda Kelapa Sunda Kelapa Branch	331.721	304.532	8,93
Lampung	944.950	776.280	21,73
Sumatera Selatan South Sumatera	1.974.232	447.012	341,65
Sumatera Barat West Sumatera	2.363.278	2.997.408	(21,16)
Kalimantan Barat West Kalimantan	1.677.837	3.260.783	(48,54)
Banten	1.333.851	230.877	477,73
Cirebon	2.108.503	1.974.141	6,81
Jambi	302.881	-	-
Bengkulu	1.254.538	1.001.865	25,22
Bangka Belitung	1.679.619	624.164	169,10
Bangka (Cabang Pangkal Balam) Bangka (Pangkal Balam Branch)	1.037.245	-	-
Belitung (Cabang Tanjung Pandan) Belitung (Tanjung Pandan Branch)	642.373	624.164	2,92
Total Penyaluran Pinjaman Total Loan Distribution	24.266.180	19.436.961	26,84

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEORAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

REALISASI BIAYA PELAKSANAAN CSR KEMASYARAKATAN

Sepanjang tahun 2019, total dana kegiatan CSR kemasyarakatan lainnya yang disalurkan IPC mencapai Rp13,92 miliar. Adapun rincian Rincian pemanfaatannya dijelaskan pada tabel di bawah ini:

REALIZATION OF COSTS OF CSR FOR COMMUNITY

During 2019, the total funds for other social CSR activities distributed by IPC reached Rp13.92 billion. The details of the utilization are explained in the table below:

Tabel Realisasi Pelaksanaan CSR (dalam ribuan Rupiah)
Realization of CSR Implementation (in thousands Rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth (%)
Pemberdayaan/Pembinaan masyarakat kurang mampu Empowerment/Guidance for underprivileged communities	3.736.562	258.000	1.348,28
Pembangunan/Pengembangan lingkungan, fasilitas serta pelestarian alam Construction/development of the environment, facilities and nature conservation	2.774.149	1.431.052	93,85
Pendidikan/Pelatihan, kegiatan olah raga dan kesenian Education/Training, sports and arts activities	2.154.749	633.355	240,21
Kegiatan sosial masyarakat dan keagamaan Social community and religious activities	5.082.887	4.285.382	18,61
Peningkatan Kesehatan Health Improvement	171.089	581.694	(70,59)
Total Pelaksanaan CSR Total CSR Implementation	13.919.436	7.189.483	93,61

PENGHARGAAN BIDANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Perseroan berkomitmen untuk terus melaksanakan tanggung jawab sosialnya terkait pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, di tahun 2019 Perseroan berhasil memperoleh penghargaan Rangking 1 predikat Platinum (kategori BUMN) pada acara Indonesia CSR Award III 2019 (ICSRA-III-2019) yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review.

AWARDS IN COMMUNITY DEVELOPMENT

The Company is committed to continuing to carry out its social responsibilities related to community development. Therefore, in 2019, the Company succeeded in obtaining the Platinum Rank 1 award (SOE category) at the Indonesia CSR Award III 2019 (ICSRA-III-2019) held by Economic Review Magazine.

SALURAN PENGADUAN DI BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Untuk saluran pengaduan di bidang pengembangan sosial kemasyarakatan dapat disampaikan pada Divisi Sekretariat Perusahaan atau dapat email: ipcckbl@gmail.com maupun corp_sec@indonesiaport.co.id.

COMPLAINT CHANNEL IN SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

Complaints in the field of social development can be submitted to the Corporate Secretary Division or to the email: ipcckbl@gmail.com or corp_sec@indonesiaport.co.id.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA PEMASOK

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO RESPONSIBILITY TO SUPPLIERS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan Jasa di Lingkungan IPC, Divisi Pengadaan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi IPC Nomor HK.568/2/6/2/PI.II-17 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan IPC dan saat ini telah diperbaharui menjadi Surat Keputusan Direksi IPC Nomor HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019. Perseroan memiliki kebijakan bahwa pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan akuntabel. Di samping itu, Perseroan juga memiliki kebijakan untuk memprioritaskan Penyedia lokal dalam Pemilihan Penyedia.

RENCANA KEGIATAN

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi kepentingan para Penyedia. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan senantiasa merencanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kepuasan penyedia, antara lain memberikan pelayanan yang terbaik, menyediakan saluran pengaduan dan mengembangkan sistem *e-procurement* yang terdiri dari beberapa modul yaitu *Vendor Management System (VMS)*, *e-Tender*, *e-Documents*, Standar Dokumen Pemilihan Penyedia (SDP), *e-Catalogue* dan *Contract Management System (CMS)* yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan proses Pemilihan Penyedia dan/atau Pengadaan Barang dan Jasa menjadi sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa yaitu efektif, efisien, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka dan akuntabel.

KEGIATAN

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dilakukan melalui metode pelelangan/seleksi umum, pemilihan langsung/seleksi langsung, penunjukkan langsung dan pengadaan langsung. Proses Pemilihan Penyedia dilakukan berdasarkan ketentuan:

1. Proses Pelelangan/Seleksi Umum diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman resmi, *website* dan media massa;
2. Semua tahapan pemilihan penyedia diikuti dan diketahui oleh seluruh Pelaku Usaha yang mendaftar;
3. Seluruh peserta pemilihan penyedia melakukan penandatanganan Pakta Integritas bersama-sama dengan penyelenggara dan Pengguna;

COMMITMENT AND POLICY

In carrying out the procurement of goods and services in IPC, the Procurement Division is guided by IPC Board of Directors Decree No. HK.568/2/6/2/PI.II-17 dated June 2, 2017 concerning Guidelines for Procurement of Goods/Services in IPC Environment and currently has been updated to IPC Board of Directors Decree No. HK. 01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 dated March 1, 2019. The Company's policy states that the procurement of goods and services is carried out based on the principles and ethics of the procurement of goods and services, namely efficient, effective, competitive, transparent, fair and accountable. In addition, the Company also has a policy to prioritize local suppliers when selecting suppliers.

ACTIVITY PLAN

The Company is committed to meeting the interests of its suppliers. In this regard, the Company plans activities to increase supplier satisfaction, including providing the best service, providing complaints channels and developing e-procurement systems that consist of several modules, namely Vendor Management System (VMS), e-Tender, e-Document, Supplier Selection Document Standards (SDP), e-Catalog and Contract Management System (CMS), which enable the implementation of selection process of suppliers and/or Procurement of Goods and Services to be in accordance with the principles of Procurement of Goods and Services that is effective, efficient, competitive, transparent, fair and reasonable, open and accountable.

ACTIVITIES

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

Supplier selection is carried out through public auction/ selection method, direct selection, direct appointment and direct procurement. The supplier selection process is based on the following conditions:

1. The auction process is publicly announced through official announcement boards, websites and mass media;
2. All stages of supplier selection are followed and known by all suppliers who register;
3. All supplier selection participants sign an Integrity Pact together with procurement providers;

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA PEMASOK
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO RESPONSIBILITY TO SUPPLIERS

4. Seluruh hasil proses pemilihan penyedia disampaikan dan diketahui oleh penyedia yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa.

SOSIALISASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Untuk menjamin dilakukannya Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan dan adil, Perseroan telah melaksanakan sosialisasi Kebijakan Gratifikasi dan *Whistleblowing System* pada tahun 2019 dilaksanakan:

1. Sosialisasi yang diselenggarakan melalui penyampaian perubahan Pedoman Barang dan Jasa Nomor HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 tanggal 1 Maret 2019 kepada Penyedia seluruh Pelaku Usaha;
2. Sosialisasi yang diselenggarakan melalui sistem *IGOOD* kepada seluruh karyawan;
3. Sosialisasi pada Anak Perusahaan IPC sesuai Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor SK.01.01/25/7/1/KPP/SDM/PI.II-19 tanggal 25 Juli 2019;
4. Sosialisasi pada Cabang Pelabuhan IPC sesuai Surat Dinas PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor SK.01.01/25/7/1/KPP/SDM/DIT.SDM-19 tanggal 25 Juli 2019;
5. Penempatan sosialisasi saluran pelaporan *Whistleblowing System* pada media komunikasi internal dan eksternal Perseroan.

Dengan disosialisasikannya dua kebijakan tersebut, diharapkan para Penyedia memiliki kesadaran untuk menyampaikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak para Penyedia.

PENGEMBANGAN SISTEM E-PROCUREMENT

Pada tahun 2019, Perseroan telah mengimplementasikan sistem *e-procurement* yang terdiri dari *Vendor Management System (VMS)*, *e-tendering*, *e-Document* dan Standar Dokumen Pemilihan Penyedia (SDP). Sampai dengan akhir tahun 2019, perseroan sedang mengembangkan modul *e-Catalogue* dan *Contract Management System (CMS)*, yang direncanakan akan di implementasikan di Tahun 2020.

SURVEI KEPUASAN PENYEDIA

Untuk memastikan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial terhadap penyedia berjalan dengan baik, maka dilaksanakan survei kepuasan penyedia. Pada tahun 2019, Survei Kepuasan Penyedia dilaksanakan di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Cabang Perusahaan. Penjelasan mengenai pelaksanaan Survei Kepuasan Penyedia adalah sebagai berikut:

4. The results of the supplier selection process is conveyed and known to the suppliers involved in the procurement of goods and services process.

SOCIALIZATION OF GRATIFICATION AND WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

To ensure transparent and fair procurement of goods and services, the Company has carried out the socialization of the Gratification and Whistleblowing System Policy in 2019:

1. Socialization conducted through the submission of amendments to the Guidelines of Goods and Services Number HK.01/1/3/1/ADP/UT/PI.II-19 dated March 1, 2019 to all providers;
2. Socialization conducted through the *IGOOD* system to all employees;
3. Socialization to IPC Subsidiaries in accordance with the Letter of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) number SK.01.01/25/7/1/KPP/SDM/PI.II-19 dated July 25, 2019;
4. Socialization at IPC Port Branch in accordance with the Official Letter of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) number SK.01.01/25/7/1/KPP/SDM/DIT.SDM-19 dated July 25, 2019.
5. Placement of information dissemination on Whistleblowing System channels on the Company's internal and external communication media.

With the socialization of these two policies, it is expected that suppliers will have the awareness to report when a violation of the suppliers' rights of occurs.

DEVELOPMENT OF E-PROCUREMENT SYSTEM

In 2019, the Company has implemented an e-procurement system consisting of *Vendor Management System (VMS)*, *e-tendering*, *e-Document* and *Provider Selection Document Standards (SDP)*. Until the end of 2019, the Company is developing an *e-Catalogue* and *Contract Management System (CMS)*, which is planned to be implemented in 2020.

SUPPLIER SATISFACTION SURVEY

To ensure that social responsibility activities for suppliers are running well, a supplier satisfaction survey is conducted. In 2019, the supplier satisfaction survey was carried out in IPC head office. An explanation of the supplier satisfaction survey is as follows:



Tabel Persentase Responden Berdasarkan Jumlah Responden di Tiap Cabang dan Pelabuhan

Percentage of Respondents based on the Number of Respondents in Each Branch and Port

Area Area	Jumlah Responden Total Respondents	Persentase Percentage
Kantor Pusat Head Office	51	20,56%
Cabang Pelabuhan Tanjung Priok Tanjung Priok Port Branch	17	6,58%
Cabang Pelabuhan Panjang Panjang Port Branch	24	9,68%
Cabang Pelabuhan Palembang Palembang Port Branch	23	9,27%
Cabang Pelabuhan Pontianak Pontianak Port Branch	19	7,66%
Cabang Pelabuhan Teluk Bayur Teluk Bayur Port Branch	25	10,08%
Cabang Pelabuhan Cirebon Cirebon Port Branch	15	6,05%
Cabang Pelabuhan Bengkulu Bengkulu Port Branch	18	7,26%
Cabang Pelabuhan Banten Banten Port Branch	18	7,26%
Cabang Pelabuhan Jambi Jambi Port Branch	11	4,44%
Cabang Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Balam Port Branch	10	4,03%
Cabang Pelabuhan Tanjung Pandan Tanjung Pandan Port Branch	10	4,03%
Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa Sunda Kelapa Port Branch	7	2,82%
Jumlah Total	248	100%





Hasil Survei Kepuasan Penyedia

Results of Supplier Satisfaction Survey

Keterangan Description	Indeks Kepuasan Penyedia Supplier Satisfaction Index	Keterbukaan Informasi Information Disclosure	Mekanisme dan Proses Pengadaan Procurement Mechanism and Process
Total IPC	5,23	5,35	5,23
Berdasarkan Area Based on Area			
Kantor Pusat Head Office	5,13	5,23	5,12
Tanjung Priok	5,26	5,47	5,33
Panjang	5,38	5,35	5,40
Palembang	5,37	5,48	5,39
Pontianak	5,28	5,37	5,23
Teluk Bayur	5,13	5,38	5,16
Cirebon	5,18	5,38	5,20
Bengkulu	5,16	5,33	5,21
Banten	5,32	5,50	5,33
Jambi	5,19	5,40	5,05
Pangkal Balam	5,33	5,46	5,27
Tanjung Pandan	5,39	5,40	5,36
Sunda Kelapa	5,06	5,14	5,08
Masa Menjadi Vendor Period of Being a Vendor			
Kurang dari 1 tahun Less than 1 year	5,27	5,36	5,28
1–3 tahun 1–3 years	5,25	5,40	5,25
Lebih dari 3 tahun More than 3 years	5,19	5,32	5,19
Bidang Pekerjaan Work Field			
Pekerjaan Kontruksi Construction works	5,23	5,33	5,22
Pengadaan Barang Goods procurement	5,24	5,41	5,23
Jasa Konsultan Consultant service	5,24	5,40	5,24
Jasa Lainnya Other service	5,17	5,26	5,19
Nilai Pekerjaan Contract Value			
< Rp50 Juta <Rp50 Million	5,03	5,40	5,13
Rp50 Juta–Rp200 Juta Rp50 Million–Rp200 Million	5,09	5,22	5,10
Rp200 Juta–Rp1 Miliar Rp200 Million–Rp1 Billion	5,25	5,37	5,26
Rp1 Miliar–Rp5 Miliar Rp1 Billion–Rp5 Billion	5,31	5,37	5,28
Rp5 Miliar Rp5 Billion	5,18	5,41	5,19

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA PEMASOK
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO RESPONSIBILITY TO SUPPLIERS

	Personil <i>Personnel</i>	Perizinan dan Kontrak <i>Permit and Contract</i>	Sarana dan Teknologi <i>Facilities and Technology</i>	Indeks <i>Engagement</i> Vendor <i>Vendor Engagement Index</i>
	5,29	5,00	4,97	5,38
	5,25	4,79	4,78	5,34
	5,36	4,87	4,38	5,38
	5,41	5,35	5,25	5,51
	5,36	5,27	5,27	5,41
	5,35	5,12	5,24	5,63
	5,14	4,80	5,04	5,27
	5,20	4,87	5,12	5,19
	5,22	4,85	4,67	5,30
	5,42	4,93	5,07	5,50
	5,28	5,29	5,02	5,25
	5,43	5,28	5,04	5,41
	5,45	5,40	5,16	5,61
	5,07	4,89	4,97	5,35
	5,30	5,13	5,08	5,38
	5,32	5,00	4,98	5,42
	5,26	4,94	4,91	5,40
	5,29	5,04	5,01	5,37
	5,30	5,02	4,98	5,45
	5,31	4,97	4,94	5,39
	5,22	4,91	5,00	5,46
	5,97	4,80	4,32	5,33
	5,14	4,90	4,77	5,37
	5,31	5,05	4,97	5,39
	5,42	5,14	5,01	5,52
	5,22	4,77	5,13	5,34



DAMPAK KEGIATAN

Perseroan telah merasakan dampak dari kegiatan tanggung jawab terhadap penyedia yaitu:

1. Tidak adanya komplain dari penyedia Barang/Jasa atas kegiatan/interaksi selama tahun 2019 yang telah berlangsung antara penyedia dan penyelenggara Kantor Pusat;
2. Tidak adanya sanggahan dari penyedia Barang/Jasa atas proses pemilihan penyedia yang telah berlangsung selama tahun 2019 antara peserta/calon penyedia dan penyelenggara Kantor Pusat; dan
3. Tingkat kepuasan penyedia yang tinggi yaitu sebesar 5,23 dengan interval 1–6, atau secara rata-rata tingkat kepuasan penyedia adalah pada tingkat sangat puas.

SALURAN PENGADUAN UNTUK PENYEDIA

Perseroan telah menyediakan saluran pengaduan untuk penyedia yaitu:

Telepon : (021) 430-1080 Ext: 1333

Fax : +62-21 43911704

Email : procurement_hq@indonesiaport.co.id

IMPACT OF ACTIVITIES

The Company has felt the impact of its responsibility towards suppliers, namely:

1. No complaints from goods/services providers for activities/interactions during 2019 between the providers and head office organizers;
2. No objections from the goods/services providers on the process of selecting suppliers during 2019 between the participants/prospective providers and head office organizers; and
3. A high supplier satisfaction level of 5.23, on a scale of 1–6, or on average supplier satisfaction level at the very satisfied level.

COMPLAINT CHANNELS FOR SUPPLIERS

The Company provides complaint channels for suppliers through:

Phone : +62-21 430-1080 ext: 1333

Fax : +62-21 43911704

Email : procurement_hq@indonesiaport.co.i

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KREDITUR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO RESPONSIBILITY TO CREDITORS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Kebijakan terkait dengan hubungan dengan kreditor dituangkan menjadi tugas dan tanggung jawab *Investor Relations* (IR) yakni menjembatani komunikasi antara IPC dengan Investor dan Perseroan Pemeringkat yang mencakup informasi keuangan, operasional, keadaan industri dan lainnya baik skala nasional maupun internasional dalam rangka mendukung upaya IPC dalam menjaga hubungan baik dengan para kreditor.

COMMITMENT AND POLICY

Policies related to creditor relationships include the Investor Relations (IR) duties and responsibilities, namely facilitating communication between IPC and its Investors and Rating Companies, and includes the national and international financial, operational, industrial and other information needed to support IPC efforts in maintaining good creditor relationships.

RENCANA KEGIATAN

Lingkup kerja *Investor Relations* dituangkan dalam rencana kegiatan seperti:

1. Menginformasikan kepada Bursa Efek Singapura dan melakukan korespondensi kepada Wali Amanat secara periodik terkait dengan informasi laporan keuangan;
2. Mengaudiensi kunjungan investor, *Analyst* maupun Perseroan Pemeringkat;
3. Melakukan *Non-Deal Roadshow*;
4. Pembayaran bunga sesuai jadwal pembayaran.

ACTIVITY PLAN

The scope of Investor Relations work is set forth in the activity plan as follows:

1. Informing the Singapore Stock Exchange and preparing correspondence to the Trustee periodically related to financial statements information;
2. Handling the visits for investors, analysts and rating companies;
3. Conducting Non-Deal roadshow;
4. Paying interest according to the payment schedule.

KEGIATAN

Adapun program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh *Investor Relation* IPC selama tahun 2019, dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini:

ACTIVITY

The programs or activities carried out by IPC Investor Relations during 2019, can be described in the table below:

No	Tanggal Date	Instansi/Investor Investment / Inventor	Acara Event	Tempat Location
1	11 April 2019 April 11, 2019	Standard & Poor's Global	Kunjungan Perusahaan Pemeringkat Tahunan Visit of Annual Rating Company	Jakarta
2	18 Juni 2019 June 18, 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Massachusetts Financial Services Co. • Loomis Sayles & Co • Manulife Asset Management(JS) LLC • Liberty Mutual Group Asset Management • Eaton Vance Management 	<i>Non-Deal Roadshow</i>	Boston
3	19 Juni 2019 June 19, 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Marathon Asset Management LLC • NWI Management LP • Blackrock Financial Management • Metlife Investment Advisors LLC • Doubleline Group/Conference Call 	<i>Non-Deal Roadshow</i>	New York



No	Tanggal Date	Instansi/Investor Investment / Inventor	Acara Event	Tempat Location
4	20 Juni 2019 June 20, 2019	<ul style="list-style-type: none"> Lazard Asset Management LLC TIAA CREF Investment Management LLC Van Eck Associates Invesco Advisers, INC. Lord Abbett and Co LLC 	<i>Non-Deal Roadshow</i>	New York
5	3 Juli 2019 July 3, 2019	FitchRatings	Kunjungan Perusahaan Pemeringkat Tahunan Visit of Annual Rating Company	Jakarta
6	24 Juli 2019 July 24, 2019	Moody's Investor Service Inc.	Kunjungan Perusahaan Pemeringkat Tahunan Visit of Annual Rating Company	Jakarta
7	21 Agustus 2019 August 21, 2019	Moody's Investor Service Inc.	Perkenalan <i>Relationship Manager</i> Introduction of Relationship Manager	Jakarta

BIAYA

Pada tahun 2019, IPC telah mengeluarkan anggaran untuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kreditor yang besaran realisasinya sudah termasuk dalam anggaran yang telah ditetapkan.

DAMPAK KEGIATAN

Sebagai bagian dari praktik Tata Kelola Perseroan yang Baik, Perseroan menerapkan perlakuan seimbang kepada para kreditor dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. *Investor Relations* bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyampaian dan penyebaran informasi material dan *non-material* kepada para kreditor. Diharapkan Perseroan mendapatkan kepercayaan dari kreditor dan apabila pada tahun-tahun berikutnya Perseroan membutuhkan pendanaan kembali, Perseroan akan mendapatkan perspektif positif dari kreditor.

SALURAN PENGADUAN BAGI KREDITUR

Para kreditor dapat menyampaikan saran dan masukan kepada Divisi *Investor Relation* IPC, dengan informasi sebagai berikut:

JL. Pasoso No 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310 Indonesia
 Telepon : +62 21 430 1080
 Faksimili : +62 21 435 1225
 Email : investor.relations@indonesiaport.co.id
 Website : www.indonesiaport.co.id

COST

In 2019, IPC has issued a budget for corporate social responsibility towards creditors, in which the amount of realization was already included in the stipulated budget.

IMPACT OF ACTIVITIES

As part of its Good Corporate Governance practices, the Company applies a equal treatment with its creditors by providing accurate and timely information. *Investor Relations* is responsible for coordinating the delivery and dissemination of material and non-material information for creditors. It is expected that the Company will gain the trust of investors, and if in the following years the Company requires refinancing, it will gain a positive perspective from creditors.

COMPLAINT CHANNEL FOR CREDITORS

Creditors can submit suggestions and input to the IPC *Investor Relations* Division, as follows:

JL. Pasoso No 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310 Indonesia
 Telephone : +62 21 430 1080
 Facsimile : +62 21 435 1225
 Email : investor.relations@indonesiaport.co.id
 Website : www.indonesiaport.co.id





LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT



**Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II dan
entitas anaknya/*and its subsidiaries***

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen/
*Consolidated financial statements
as of December 31, 2019 and for the year then ended
with independent auditors' report*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4-5	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8-191	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA**

**DIRECTOR'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama/*Name*
Alamat kantor/*Office address*

Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Residential address/in accordance with personal identity card*

Nomor telepon/*Telephone number*
Jabatan/*Title*
2. Nama/*Name*
Alamat kantor/*Office address*

Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Residential address/in accordance with personal identity card*

Nomor telepon/*Telephone number*
Jabatan/*Title*

- : Arif Suhartono
- : Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok,
Jakarta 14310, Indonesia
- : Jl. Tunas Kelapa Raya / 167
RT/RW 005/007 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa
Lumbu Kota Bekasi
Jawa Barat, Indonesia
- : 61-21-4301080
- : Direktur Utama/*President Director*
- : Yon Irawan
- : Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok,
Jakarta 14310, Indonesia
- : Griya Permata Gedangan Blok LI/19
RT/RW 003/007 Kel. Keboansikep Kec. Gedangan
Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
- : 61-21-4301080
- : Direktur/*Director*

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

1. *I am responsible for the preparation and presentation of the Company's consolidated financial statements as of December 31, 2019 and for the year then ended.*
2. *The Company's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Company's consolidated financial statements, and*
b. *The Company's consolidated financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.*
4. *I am responsible for the Company's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 31 Maret 2020 / March 31, 2020


Arif Suhartono **Yon Irawan**
 Direktur Utama/*President Director* Direktur/*Director*

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00369/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/III/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditors' Report

Report No. 00369/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/III/2020

**The Shareholder and the Board of Commissioners and Board of Directors
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00369/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/III/2020 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00369/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/III/2020 (continued)

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00369/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/III/2020 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

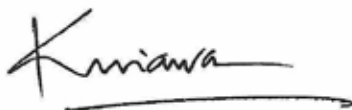
Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00369/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/III/2020 (continued)

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II and its subsidiaries as of December 31, 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Muhammad Kurniawan

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240/Public Accountant Registration No. AP.0240

31 Maret 2020/March 31, 2020

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	Catatan/ Notes	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	15.603.533.329	2c,2d,2f,2u,4 41,42,43,44	18.018.671.479	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	2.596.701.126	2c,2d,2f,2u 5,41,42,43,44 2c,2g,2u	3.836.007.289	Short-term investments
Piutang usaha - neto		6,41,42,43,44		Trade receivables - net
Pihak ketiga	712.826.744		634.078.032	Third parties
Pihak berelasi	135.198.738	2d,41	155.875.322	Related parties
Piutang lain-lain - neto		2g,2u,7,42,43,44		Other receivables - net
Pihak ketiga	45.117.978		9.530.083	Third parties
Pihak berelasi	784.951.419	2d,41	640.168.731	Related parties
Uang muka dan beban dibayar di muka	104.181.981	2i,8 2c,2u,9	120.068.178	Advances and prepaid expenses
Pendapatan masih akan diterima		41,43,44		Accrued revenues
Pihak ketiga	258.865.863		256.914.263	Third parties
Pihak berelasi	46.586.491	2d,41	65.953.809	Related parties
Persediaan	82.940.596	2h,10	59.139.424	Inventories
Pajak dibayar di muka	680.605.067	2s,22a	751.789.998	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	10.253.126	2u,43,44	6.139.521	Other current assets
Total Aset Lancar	21.061.762.458		24.554.336.129	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Investasi jangka panjang	3.211.023.600	2j,11,43,44	3.211.737.431	Long-term investment
Properti investasi - neto	357.295.487	2k,12	377.142.447	Investment properties - net
Aset tetap - neto	13.387.155.835	2l,13	12.628.997.433	Fixed assets - net
Aset kerjasama operasi - neto	461.100.101	2n,14	482.390.189	Joint operation assets - net
Aset pajak tangguhan	73.873.814	2s,22f	47.498.765	Deferred tax assets
Aset takberwujud - neto	10.818.271.480	2o,15	9.038.949.144	Intangible assets - net
Taksiran tagihan restitusi pajak	958.917.154	2s,22a	841.931.567	Estimated claims for tax refund
Aset tidak lancar lainnya	1.711.199.806	2u,16,43,44	249.893.918	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar	30.978.837.277		26.878.540.894	Total Non-current Assets
TOTAL ASET	52.040.599.735		51.432.877.023	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	Catatan/ Notes	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	34.193.914	17,41,43	4.000.000	Short-term bank loans
Utang usaha		2c,2u		Trade payables
Pihak ketiga	359.929.551	18,42,43,44	418.899.213	Third parties
Pihak berelasi	1.076.552.787	2d,41	1.247.008.500	Related parties
Pendapatan diterima di muka jangka pendek	845.489.224	2d,2q,19 24,40	834.098.021	Short-term unearned revenues
Utang pajak	445.015.994	2s,22b	389.495.675	Taxes payable
Beban akrual	2.274.726.626	2u,20,43,44	2.290.832.616	Accrued expenses
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang		2u,43,44		Current maturities of long-term liabilities
Utang bank	12.000	2c,23,42	-	Bank loans
Liabilitas jangka panjang lainnya - pihak berelasi	19.887.737	2c,26	38.272.280	Other long-term liabilities - related parties
Liabilitas jangka pendek lainnya Pihak ketiga	206.170.895	2u,21,43,44	185.350.553	Other current liabilities Third parties
Pihak berelasi	91.743.873	2d,41	90.237.622	Related parties
Total Liabilitas Jangka Pendek	5.353.722.601		5.498.194.480	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang obligasi	21.984.178.194	2c,2u,24	22.890.166.969	Bonds payable
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar				Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	114.978.000	2u,43,44	-	Bank loans
Liabilitas jangka panjang lainnya - pihak ketiga	225.013.928		234.402.238	Other long-term liabilities - third party
- pihak berelasi	10.250.000	2c,26,44	-	- related party
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	4.005.631.257	2q,25	4.290.892.916	Long-term unearned revenue
Liabilitas imbalan kerja	1.966.325.908	2t,27	1.776.917.294	Employee benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	254.289.069	2s,22f	307.846.807	Deferred tax liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	28.560.666.356		29.500.226.224	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	33.914.388.957		34.998.420.704	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019
(Expressed in Thousands Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	Catatan/ Notes	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES AND EQUITY (continued)
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal				Share capital - par value of
Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham				Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal dasar - 4.000.000 saham				Authorized capital - 4,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.444.029 saham	1.444.029.000	28	1.444.029.000	Issued and fully paid - 1,444,029 shares
Modal donasi	26.825.982	29	26.825.982	Donated capital
Tambahan modal disetor	(317.597.475)	2e,33	(317.597.475)	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	13.273.514.540		11.726.994.846	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	2.455.762.802		2.379.261.695	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	(105.008.860)	1e,32	(114.597.288)	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto	16.777.525.989		15.144.916.760	Equity attributable to owners of the parent entity - net
Kepentingan nonpengendali	1.348.684.789	2b,30	1.289.539.559	Non-controlling interests
Ekuitas - neto	18.126.210.778		16.434.456.319	Equity - net
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	52.040.599.735		51.432.877.023	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018	
Pendapatan operasi	11.141.752.225	2r,34	11.436.700.894	Operating revenues
Pendapatan konstruksi	1.542.697.617	2r,35	781.658.834	Construction revenues
Beban operasi	(8.520.357.673)	2r,36	(8.042.554.820)	Operating expenses
Beban konstruksi	(1.542.697.617)	2r,35	(781.658.834)	Construction expenses
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto	717.114.514	2r,37	(196.360.574)	Other operating income (expense) - net
LABA USAHA	3.338.509.066		3.197.785.500	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	836.260.112	2r,38	688.914.300	Finance income
Beban keuangan	(1.200.237.089)	2r,39	(1.130.782.016)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi	240.568.343	2j,2n,40	376.200.594	Equity in income of associates
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	3.215.100.432		3.132.118.378	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX
Beban pajak final	(509.692.491)	22d	(357.113.222)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	2.705.407.941		2.775.005.156	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN				CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	(259.917.054)	2s, 22d, 22e	(353.981.768)	Current
Tanggungan	58.319.461	22d, 22f	9.686.466	Deferred
LABA TAHUN BERJALAN	2.503.810.348		2.430.709.854	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(68.567.665)	2t, 32	32.019.693	Remeasurements of defined benefit plans
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	254.857.849	1e, 32	(18.329.765)	Exchange differences due to financial statements translation
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(170.053.962)	2f, 32	(54.273.223)	Changes in fair value of available-for-sale financial assets
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.520.046.570		2.390.120.559	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018	
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	2.455.762.801		2.379.261.695	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	48.047.547	2b,30	51.448.159	Non-controlling interests
LABA TAHUN BERJALAN	2.503.810.348		2.430.709.854	INCOME FOR THE YEAR
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	2.473.310.918		2.337.030.239	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	46.735.652	2b,30	53.090.320	Non-controlling interests
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.520.046.570		2.390.120.559	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	1.700.633	2v	1.647.655	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to owners of the parent entity									
		Saldo laba/Retained earnings					Pembhasilan komprehensif lain/Other comprehensive income				
Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Modal donasi/ Donation capital	Tambah modal disetor/ Additional paid- in capital	Saldo laba/Retained earnings		Salah kurs perbedaan nilai/ Exchange difference due to financial statement translation	Pengkuan kembali/ program imbalan pasti/ Remeasurments of defined benefit plans	Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual/ Changes in fair value of available-for-sale financial assets	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	Ekuitas - neto/ Equity - net	Balance as of December 31, 2017
				Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated						
	1.444.029.000	26.825.982	(317.597.475)	10.201.069.392	2.179.893.506	391.851.724	(473.163.054)	8.945.498	488.063.225	13.947.917.798	
31	Pembagian dividen kas	-	-	-	(653.968.052)	-	-	-	-	(653.968.052)	
31	Cadangan umum	-	-	1.525.925.454	(1.525.925.454)	-	-	-	-	-	
	Setoran modal pada entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	750.386.014	750.386.014	
1e	Selalih kurs penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	(18.325.578)	-	-	(4.187)	(18.329.765)	
1e, 32	Pengkuan kembali program imbalan pasti	-	-	-	-	-	30.387.672	-	1.652.021	32.019.693	
1e, 32	Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	2.379.261.695	-	-	(54.273.550)	(5.673)	(54.279.223)	
	Laba tahun berjalan	-	-	-	2.379.261.695	-	-	-	51.448.159	2.430.709.854	
	Saldo per 31 Desember 2018	1.444.029.000	26.825.982	(317.597.475)	11.726.994.846	373.526.146	(442.795.382)	(45.328.052)	1.289.539.559	16.434.456.319	
31	Pembagian dividen kas	-	-	-	(832.742.000)	-	-	-	-	(832.742.000)	
31	Cadangan umum	-	-	1.546.519.694	(1.546.519.694)	-	-	-	-	-	
1e	Selalih kurs penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	246.899.366	-	-	12.498.373	259.307.739	
1e, 32	Pengkuan kembali program imbalan pasti	-	-	-	-	-	(67.273.994)	-	(1.293.681)	(68.567.665)	
1e, 32	Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-	-	(170.036.954)	(17.007)	(170.053.961)	
	Laba tahun berjalan	-	-	-	2.455.762.801	-	-	-	46.047.547	2.503.810.348	
	Saldo per 31 Desember 2019	1.444.029.000	26.825.982	(317.597.475)	13.273.514.840	620.425.512	(510.089.366)	(215.365.006)	1.348.694.790	18.126.210.778	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	Catatan/ Notes	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	11.677.175.952		Cash receipts from customers
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(5.642.396.334)		Payment to contractors, suppliers and others
Pembayaran kepada karyawan	(2.609.390.364)		Payment to employees
Pembayaran pajak penghasilan	(1.995.196.071)		Payment for income taxes
Penghasilan bunga	719.435.193		Interest received
Pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya	(1.025.736.701)		Payment of interest and other financial charges
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.123.891.675		Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen	281.858.622		Receipt of dividend
Laba penjualan aset tetap	80.629.851		Receipt of dividend
Perolehan aset tetap dan aset takberwujud	(3.312.163.703)		Acquisition of fixed assets and intangible assets
Penerimaan investasi jangka pendek	1.239.306.163		Receipt of short-term investments
Penerimaan sewa di muka	124.255.688		Receipt of advance rental fee
Penempatan investasi saham	(787.067.050)		Placement of investment in shares of stock
Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(2.373.180.429)		Net Cash (Used in) Provided by Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	145.183.914		Receipt of bank loans and other financial institution
Pembayaran dividen	(832.742.000)	31	Payment of dividend
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(687.558.086)		Net Cash Used in Financing Activities
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(478.291.310)		Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(2.415.138.150)		NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	18.018.671.479	4	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	15.603.533.329	4	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Perusahaan" atau "PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1983 juncto PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 09 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. tanggal 21 Agustus 2019 mengenai perubahan jenis saham dan anggaran dasar Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0323035 tanggal 30 Agustus 2019.

Berdasarkan Akta No. 09 tersebut di atas, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("the Company" or "PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)") was initially established as Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II based on Government Regulation No. 15 of 1983 as amended by Government Regulation No. 5 of 1985. It was a State-Owned Enterprise ("SOE") under the supervision of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on Government Regulation No. 57 Year 1991, the legal entity of Perum Pelabuhan II was changed into a State Owned Company (Persero). As result of such government regulation, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on Notarial Deed No. 3 of Imas Fatimah, S.H., dated December 1, 1992. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993. Since the establishment of the Ministry of State-Owned Enterprise ("MOSOE"), the Company has been under the supervision of MOSOE. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Shareholders Decision Statement notarized by Notarial Deed No. 09 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 21, 2019 regarding change in the types of shares and the Company's Articles of Association. This amendment was registered to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Acceptance of No. AHU-AH.01.03-0323035 dated August 30, 2019.

Based on the Notarial Deed No. 09 as stated above, the Government of the Republic of Indonesia which in this case represented by the Minister of SOEs to changes the type of shares which originally without series, changed to be consisted of Series A Dwiwarna shares and Series B shares.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Selain lingkup usaha tersebut di atas Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan.

Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa informasi teknologi, jasa rumah sakit, jasa pengerukan, jasa kepelatihan dan lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan mengelola 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan yang terdiri dari:

Cabang Pelabuhan Utama	Tanjung Priok, Banten dan/and Panjang	Main Port Branch
Cabang Pelabuhan Madya	Teluk Bayur, Pontianak, Palembang, Bengkulu, Jambi dan/and Cirebon	Medium Port Branches
Cabang Pelabuhan Pratama	Pangkal Balam, Sunda Kelapa dan/and Tanjung Pandan	Small Port Branches

Berikut adalah izin-izin penting yang diperoleh Perusahaan sehubungan dengan operasional pelabuhan:

- Keputusan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The Company's purposes and objectives are managing and operating port services and optimizing resource utilization owned by the Company to produce competitive and high quality goods and/or services to gain profits in order to increase the Company's value by applying the limited liability company principles.

Other than the above-mentioned scope of activities, the Company may establish and manage other businesses related to port business.

Currently, the Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Company") are involved in several businesses consisting of port services, logistic, information technology services, hospital services, dredging services, training services and others.

The Company's head office is located at Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

The Company's parent and ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

The Company manages 12 (twelve) Port Branches as follows:

The following are significant permits obtained by the Company in relation to port operations:

- Decision of Minister of Transportation No. 98 Tahun 2011 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as Port Operation Entity.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

- Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1121 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
- Perjanjian konsesi (Catatan 45a dan 46m).

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut:

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
					2019	2018
Kepemilikan Langsung/Direct Ownership						
PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTP")	Jakarta	Terminal Petikemas dan Konvensional/ Container and multicargo Terminal	2013	99,00%	1.762.867.454	1.882.166.289
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia ("PPI")	Jakarta	Pengembangan Pelabuhan/ Port Development	2012	99,89%	1.841.105.049	2.159.484.557
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	Jakarta	Jasa Logistik/ Logistic Services	2002	99,00%	884.682.897	898.058.263
PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("JAI") ****)	Jakarta	Penyedia Jasa Transportasi Laut/ Ship Transportation Services Provider	2013	76,89%	1.277.801.802	1.192.128.218
PT Pengerukan Indonesia ("Rukindo")	Jakarta	Pengerukan Alur/ Dredging	1991	99,91%	376.359.505	352.868.336
PT Rumah Sakit Pelabuhan ("RSP")	Jakarta	Rumah Sakit/ Hospital	1999	99,84%	575.930.021	423.222.370
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IKT") ****)	Jakarta	Terminal Kendaraan/ Car Terminal	2012	71,28%	1.262.080.951	1.254.556.394
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS")	Jakarta	Sistem Informasi/ Information System	2012	51,00%	160.100.918	179.025.159
PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDII")	Jakarta	Sistem Informasi/ Information System	1995	51,00%	179.282.586	138.970.919
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Jakarta	Penyedia Energi Listrik/ Electricity Provider	2012	55,00%	145.105.432	164.452.796
PT IPC Terminal Petikemas ("IPC TPK")	Jakarta	Terminal Petikemas dan Konvensional/ Container and multicargo Terminal	2013	99,00%	1.099.123.570	1.221.341.130

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

- Decision of Minister of Transportation No. KP 1121 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.
- Concession Agreement (Notes 45a and 46m).

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation

As of December 31, 2019 and 2018, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI")	Jakarta	Jasa Peralatan Pelabuhan/ Port Equipment Services
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia ("PMLI")	Jakarta	Jasa Pelatihan dan Pendidikan Maritim dan Logistik / Maritime and Logistic training and education services
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	Jakarta	Investasi pasar modal dan Konsultan bisnis/ Investment in stock exchange and business consultant

Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership

Dimiliki melalui/Owned through PPI

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities
PT Akses Pelabuhan Indonesia ("API")	Jakarta	Penyertaan Saham pada proyek Jalan Tol/Investment in Toll and access Road Project
PT Menara Maritim Indonesia ("MMI")	Jakarta	Jasa pengelola properti / Building management service

Entitas Asosiasi/Associate Entities

Dimiliki melalui/Owned through IPC TPK

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities
PT New Priok Container Terminal One ("NPCT1") (Catatan 45d/Note 45d) *)	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal

Dimiliki melalui/Owned through API

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP") (Catatan 11/Note 11) **)	Jakarta	Operasi Jalan Tol/Toll Road Operation
PT Jakarta International Container Terminal ("JICT") (Catatan 46b/Note 46b)	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal
PT Terminal Petikemas Indonesia ("TPI")	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal

Operasi Bersama/Joint Operation

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities
Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja ("TPK Koja") (Catatan 46a/Note 46a)	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal
Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia ("MKO MTKI") (Catatan 46c/Note 46c) ***)	Gresik	Terminal Kendaraan/ Car Terminal

*) Laporan keuangan NPCT1 tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan IPC TPK, karena IPC TPK tidak memiliki pengendalian atas NPCT1. (Catatan 45d)

***) Pada bulan September 2015, API melakukan akuisisi 45% kepemilikan saham di CTP (Catatan 11).

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
		2019	2018
2012	99,00%	157.445.101	143.759.943
2013	99,00%	71.354.014	50.067.630
2017	99,00%	1.036.864.363	1.428.675.682
2014	99,52%	779.593.101	776.783.899
2018	70,00%	357.601.919	88.512.621
2014	51,00%	3.878.213.647	4.326.430.446
2006	45,00%	7.375.640.508	4.217.335.404
1999	48,90%	4.342.577.010	4.712.275.127
2013	25,00%	131.111.708	131.715.920
1994	54,91%	520.428.809	523.023.618
2015	45,00%	4.339.729	3.253.132

*) The financial statements of NPCT1 is not consolidated into IPC TPK's financial statements, due to IPC TPK has no control over NPCT1. (Note 45d)

***) On September 2015, API performed an acquisition of 45% share of ownership in CTP (Note 11).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

- ***) Pada bulan April 2015, IKT membentuk manajemen kerjasama operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia dengan porsi pendanaan 45% (Catatan 46o).
- ****) Pada bulan Desember 2017, JAI menerbitkan saham baru sebanyak 1.215.506.500 saham atau 23% dari modal ditempatkan dan disetor JAI setelah penawaran umum perdana saham JAI di Bursa Efek Indonesia.
- ****) Pada bulan Juli 2018, IKT menerbitkan saham baru sebanyak 509.147.700 saham atau 28% dari modal ditempatkan dan disetor IKT setelah penawaran umum perdana saham IKT di Bursa Efek Indonesia.

EDII

EDII didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1995 dari Notaris Sulami Mustafa, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9572.HT.01.01.TH.95 tanggal 3 Agustus 1995.

Pada tanggal 31 Desember 2016, modal dasar EDII adalah sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 25.000.000 saham atau sebesar Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 51,00% atau sebanyak 12.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp12.750.000.
- PT Sisindokom Teknologi memiliki 49,00% atau sebanyak 12.250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.250.000.

Saat ini, EDII bergerak dalam bidang penyediaan data informasi, transfer data, penjualan software dan pelayanan administrasi efek.

MTI

MTI didirikan berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 tanggal 15 Februari 2002. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 April 2002.

Modal dasar MTI sebesar Rp28.500.000 terdiri dari 57.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 34.629.439 saham atau sebesar Rp17.314.719.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

- ***) On April 2015, IKT establishing joint operation management Maspion Terminal Kendaraan Indonesia with funding portion of 45% (Note 46o).
- ***) On December 2017, JAI issued new shares of 1,215,506,500 shares or 23% of JAI's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.
- ****) On July 2018, IKT issued new shares of 509,147,700 shares or 28% of IKT's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.

EDII

EDII was established based on Notarial Deed No. 1 dated June 1, 1995 of Sulami Mustafa, S.H and was approved by Minister of Justice in Decree No. C2-9572.HT.01.01.TH.95 dated August 3, 1995.

As of December 31, 2016, the authorized capital of EDII amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp25,000,000 composed of 25,000,000 shares with share ownership as follows:

- The Company owns 51.00% or 12,750,000 shares amounting to Rp12,750,000.
- PT Sisindokom Teknologi owns 49.00% or 12,250,000 shares amounting to Rp12,250,000.

Currently, EDII's activities consist of providing of information data, data transfer, software sales and securities administration services.

MTI

MTI was established based on Notarial Deed of Notary Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 dated February 15, 2002. The establishment of MTI was approved by Minister of Justice and Human Rights in Decree No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal April 11, 2002.

The authorized capital of MTI amounted to Rp28,500,000 composed of 57,000,000 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp17,314,719 composed of 34,629,439 shares.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

MTI (lanjutan)

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah:

- Perusahaan memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 34.283.150 saham dengan nilai nominal Rp17.141.575.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 1,00% atau sebanyak 346.289 saham dengan nilai nominal Rp173.144.

Saat ini, MTI bergerak dalam bidang jasa logistik.

RSP

RSP didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Nelly Elsy Tahamata, SH., No. 2 tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.11876.HT.01.01 tanggal 29 Juni 1999.

Modal dasar RSP sebesar Rp150.000.000 terdiri dari 150.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,84% atau sebanyak 37.452 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.452.000.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,48% atau sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.

Saat ini, RSP bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya.

IKT

IKT didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 November 2012 oleh Yulianti Irawati, SH., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

MTI (continued)

The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 99.00% or 34,283,150 shares with total amount of Rp17,141,575.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 1.00% or 346,289 shares with total amount of Rp173,144.

Currently, MTI's activities are in logistic services.

RSP

RSP was established based on Establishment Notarial Deed of Notary Nelly Elsy Tahamata, S.H., No. 2 dated May 1, 1999 and has been approved by Minister of Justice of Republic Indonesia with the Decree No. C.11876.HT.01.01 dated June 29, 1999.

The authorized capital of RSP amounted to Rp150,000,000 composed of 150,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share.

The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.52% or 37,452 shares with total amount of Rp37,452,000.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 0.48% or 180 shares with total amount of Rp180,000.

Currently, RSP activities are in health services and other health support services.

IKT

IKT was established based on Notarial Deed No. 10 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, SH., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of IKT was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 dated November 19, 2012.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

IKT (lanjutan)

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa IKT No. 19 tanggal 18 Juli 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui, jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, atau sejumlah sebanyak-banyaknya 557.142.800 saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana IKT, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham, termasuk pengalokasian sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari saham baru yang dikeluarkan dengan program ESA (Employee Stock Option).

Modal dasar IKT sebesar Rp181.838.482 terdiri dari 1.818.384.820 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh IKT adalah sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 71,28% atau sebanyak 1.296.144.749 saham dengan nilai sebesar Rp129.614.475.
- MTI memiliki 0,72% atau sebanyak 13.092.371 saham dengan nilai sebesar Rp1.309.237.
- PII memiliki 5,54% atau sebanyak 100.682.600 saham dengan nilai sebesar Rp10.068.260.
- Masyarakat memiliki 22,46% atau sebanyak 408.465.100 saham dengan nilai sebesar Rp40.486.510.

Saat ini, IKT bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan, bongkar muat barang, pelayanan penumpukan dan pelayanan logistik lainnya.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

IKT (continued)

Based on Deed of Extraordinary General Shareholders Meeting of IKT No. 19 dated July 18, 2018 by Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, the Company's shareholders agreed, amount of shares issued in the context of Public Offering were at most 30% from the issued and paid-up capital after the Public Offering has been completed, or no more than 557,142,800 of new shares offered to the public through the IKT's Initial Public Offering, each with nominal value of Rp100 (full amount) per share, including allocation of at most 10% of new shares issued with the ESA (Employee Stock Option) program.

The authorized capital of IKT amounting Rp181,838,482 consisted of 1,818,384,820 shares with nominal value of Rp100 (full amount) per share. The composition of issued and paid-up capital of IKT are as follow:

- The Company owns 71.28% or 1,296,144,749 shares with total amount of Rp129,615,475.
- MTI owns 0.72% or 13,092,371 shares with total amount of Rp1,309,237.
- PII owns 5.54% or 100,682,600 shares with total amount of Rp10,068,260.
- Public own 22.46% or 408,465,100 shares with total amount of Rp40,846,510.

Currently, IKT's activities consist of car terminal management, stevedoring/ cargodoring, yard operation and other logistic services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

ILCS

ILCS didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 21 September 2012 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 September 2012.

Modal dasar ILCS sebesar Rp400.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 51,00% atau sebanyak 5.100.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp51.000.000.
- PT Multimedia Nusantara memiliki 49,00% atau sebanyak 4.900.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp49.000.000.

Saat ini, ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *e-trade logistic* dan jasa lainnya yang meliputi jasa pengelolaan data, jasa *e-commerce*, konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, jasa pembuatan perangkat lunak, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa konsultan teknologi informasi.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

ILCS

ILCS was established based on Notarial Deed No. 11 dated September 21, 2012 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn. The establishment of ILCS was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 dated September 26, 2012.

The authorized capital of ILCS amounted to Rp400,000,000 composed of 40,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 51.00% or 5,100,000 shares with total amount of Rp51,000,000.
- PT Multimedia Nusantara owns 49.00% or 4,900,000 shares with total amount of Rp49,000,000.

Currently, ILCS' activities consist of providing *e-trade logistic services* and other services including data management, *e-commerce*, consultation on computing and informatics engineering services, software development services, multimedia provision and utilization through telecommunication hardware and consultation in information technology services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PPI

PPI didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57925.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 13 September 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp900.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp225.000.000 yang diambil bagian oleh Perusahaan dan MTI masing-masing sebesar Rp224.750.000 dan Rp250.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0230843 tanggal 9 Agustus 2018.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 25.000 saham yang ada dalam PPI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp342.000.

Modal dasar PPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,89% atau sebanyak 22.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp224.750.000.
- PII memiliki 0,11% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, PPI bergerak dalam bidang pengembangan pelabuhan.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PPI

PPI was established based on Notarial Deed No. 9 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-57925.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012.

Based on Deed No. 11 dated September 13, 2018 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company increased the authorized capital to Rp900,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp225,000,000 which was subscribed by the Company and MTI amounting to Rp224,750,000 and Rp250,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-AH.01.03-0230843 dated August 9, 2018.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 38 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia transfers and hands over all of the shares owned, which are 25,000 shares in PPI to PII with a buying price of Rp342,000.

The authorized capital of PPI amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.89% or 22,475,000 shares with total amount of Rp224,750,000.
- PII owns 0.11% or 25,000 shares with total amount of Rp250,000.

Currently, PPI engages in port development.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JPPI

JPPI didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57978.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 25.000 saham yang ada dalam JPPI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp227.500.

Modal dasar JPPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,00% atau sebanyak 2.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, JPPI bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan usaha teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrik dan mekanikal, bejana tekan (*boiler/pressure vessel*), serta bidang usaha terkait.

EPI

EPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 14 November 2012.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JPPI

JPPI was established based on Notarial Deed No. 8 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in Decision No. AHU-57978.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 38 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia transfers and hands over all of the shares owned, which are 25,000 shares in JPPI to PII with a buying price of Rp227,500.

The authorized capital of JPPI amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.00% or 2,475,000 shares with total amount of Rp24,750,000.
- PII owns 1.00% or 25,000 shares with total amount of Rp250,000.

Currently, JPPI activities are in providing technical activities including installation, reparation and maintenance and installation of technical tools, installation of equipment for water, gas, telecommunication, electrical and mechanical and boiler/pressure vessel and the related activities.

EPI

EPI was established based on Notarial Deed No. 11 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in Decision No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 14, 2012.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

EPI (lanjutan)

Modal dasar EPI sebesar Rp600.000.000 terdiri dari 60.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 55,00% atau sebanyak 8.250.000 saham dengan nilai sebesar Rp82.500.000.
- PT Haleyora Power memiliki 45,00% atau sebanyak 6.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp67.500.000.

Saat ini, EPI bergerak dalam bidang penyedia pasokan energi listrik di wilayah pelabuhan dan sekitarnya.

Rukindo

Rukindo didirikan dengan nama PT Pengerukan Indonesia (Persero) berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 Oktober 1991 dari Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H., yang kemudian diubah dengan Akta No. 51 tanggal 11 Februari 1992 dari Notaris Imas Fatimah, S.H. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Maret 1992.

Modal dasar Rukindo sebesar Rp2.000.000.000 terdiri dari 2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 47 tanggal 28 Desember 2017, para pemegang saham Perusahaan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula berjumlah Rp195.000.000 yang akan dikonversi menjadi modal pada akhir tahun ke-10 (sepuluh). Saham yang diterbitkan sejumlah 195.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

EPI (continued)

The authorized capital of EPI amounted to Rp600,000,000 composed of 60,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 55.00% or 8,250,000 shares with total amount of Rp82,500,000.
- PT Haleyora Power owns 45.00% or 6,750,000 shares with total amount of Rp67,500,000.

Currently, EPI's activities consist of providing electrical supply on port areas.

Rukindo

Rukindo was established under the name of PT Pengerukan Indonesia (Persero) based on Deed No. 2 dated October 1, 1991 of Achmad Bajumi, S.H., a substitute of Notary Imas Fatimah, S.H., which was subsequently amended by Deed No. 51 dated February 11, 1992 of Notary Imas Fatimah, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 dated March 3, 1992.

The authorized capital of EPI amounted to Rp2,000,000,000 composed of 2,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Based on Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., No. 47 dated December 28, 2017, the Company's shareholders approved the following matters:

- Increase in the issued and paid capital from Rp195,000,000 which will be converted into capital at the end of 10 (ten) year. The issued shares amounted to 195,000 shares with a par value of Rp1,000,000 (full amount) per share.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Rukindo (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 48 tanggal 28 Desember 2017 yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-AH.01.03-0007913 tanggal 10 Januari 2018, Perusahaan menerima 70.000 saham baru sebagai hasil konversi utang Rukindo kepada Perusahaan. Kepemilikan saham Perusahaan di Rukindo bertambah menjadi 99,93%.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,91% atau sebanyak 806.622 saham dengan nilai sebesar Rp806.622.000.
- PPI memiliki 0,09% atau sebanyak 542 saham dengan nilai sebesar Rp542.000.

Saat ini, Rukindo terutama bergerak dalam bidang pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan, reklamasi dan transportasi hasil keruk.

JAI

JAI didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 10 Juli 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 9 September 2013.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 14 tanggal 11 Oktober 2017 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham JAI menyetujui diantaranya:

- perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham menjadi Rp100 (nilai penuh) per saham.
- Pengeluaran saham dari portopel JAI, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum selesai dilaksanakan atau sejumlah sebanyak-banyaknya 1.743.987.600 saham baru, yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham JAI.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

Rukindo (continued)

Based on Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., No. 48 dated December 28, 2017, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No AHU-AH.01.03-0007913 dated January 10, 2018, the Company received 70,000 newly-issued shares as a result of the conversion of Rukindo's payable to the Company. The Company's shares ownership in Rukindo increased to 99.93%.

The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.91% or 806,622 shares with total amount of Rp806,622,000.
- PPI owns 0.09% or 542 shares with total amount of Rp542,000.

Currently, Rukindo's main activities consist of dredging of sail navigation channel, port basin, reclamation and transportation of dredging products.

JAI

JAI was established based on Notarial Deed No. 24 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 9, 2013.

Based on Deed of Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company No. 14 dated October 11, 2017 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, JAI's shareholders agrees among others:

- change in par value of share from Rp1,000,000 (full amount) per share to Rp100 (full amount) per share.
- Issuance of shares from JAI's portfolio, which represents new shares issued from the portfolio of as much as 30% of the issued and paid-up capital after the public offering has been completed or as much as 1,743,987,600 new shares, offered to the public through initial public offering.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JAI (lanjutan)

- Meningkatkan modal dasar JAI dari sebesar Rp100.000.000 menjadi Rp1.500.000.000, yang terbagi atas 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp58.000.000 menjadi Rp406.930.460 dimana peningkatan sebesar Rp348.930.460 atau sebesar 3.489.304.600 saham dilakukan oleh Perusahaan melalui inbreng 21 unit kapal, terdiri dari 9 unit kapal pandu, 10 unit kapal tunda dan 2 unit kapal kepil. Inbreng kapal tersebut telah dilakukan penilaian oleh KJPP Toto Suharto & Rekan dengan hasil penilaian No. P.PP.17.00.0111 tanggal 9 Juni 2017.

Modal dasar JAI sebesar Rp1.500.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 76,89% atau sebanyak 4.063.504.600 saham dengan nilai sebesar Rp406.350.460.
- MTI memiliki 0,11% atau sebanyak 5.800.000 saham dengan nilai sebesar Rp580.000.
- PII memiliki 4,75% atau sebanyak 250.864.747 saham dengan nilai sebesar Rp25.086.474.
- Masyarakat memiliki 18,25% atau sebanyak 964.641.753 saham dengan nilai sebesar Rp96.464.175.

Saat ini, JAI bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan kapal, penundaan kapal, angkutan laut, sungai, danau dan penyebrangan, penyewaan kapal dan keagenan kapal.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JAI (continued)

- Increase of the authorized share capital of JAI from Rp100,000,000 to Rp1,500,000,000, divided into 15,000,000,000 shares at par value of Rp100 (full amount) per share and the increase of issued and paid-up capital from Rp58,000,000 to Rp406,930,460 whereby an increase of Rp348,930,460 or 3,489,304,600 shares was performed by the Company through injection of 21 units of vessels, consist of 9 units of pilotage vessels, 10 units of tug vessels and 2 units of mooring vessels. Injection of vessels has been appraised by KJPP Toto Suharto & Partners through appraisal report No. P.PP.17.00.0111 dated June 9, 2017.

The authorized capital of JAI amounted to Rp1,500,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp100 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 76.89% or 4,063,504,600 shares with total amount of Rp406,350,460.
- MTI owns 0.11% or 5,800,000 shares with total amount of Rp580,000.
- PII owns 4.75% or 250,864,747 shares with total amount of Rp25,086,474.
- Public owns 18.25% or 964,641,753 shares with total amount of Rp96,464,175.

Currently, JAI's activities consist of pilotage and tug services, sea, river, lake and crossing transportation, ship rental and ship agencies.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PMLI

PMLI didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45955.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 2 September 2013.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 300 saham yang ada dalam PMLI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp173.500.

Modal dasar PMLI sebesar Rp120.000.000 terdiri dari 120.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,00% atau sebanyak 29.700 saham dengan nilai sebesar Rp29.700.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.

Saat ini, PMLI bergerak dalam bidang penyediaan jasa pendidikan, pelatihan, konsultasi di bidang maritim dan logistik serta mengelola fasilitas dan infrastruktur pendidikan dan pelatihan.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PMLI

PMLI was established based on Notarial Deed No. 26 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PMLI was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-45955.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 2, 2013.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 38 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 300 shares in PMLI to PII with a buying price of Rp173,500.

The authorized capital of PMLI amounted to Rp120,000,000 composed of 120,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.00% or 29,700 shares with total amount of Rp29,700,000.
- PII owns 1.00% or 300 shares with total amount of Rp300,000.

Currently, PMLI's activities consist of providing educational, training services, consultation on maritime and logistic areas and also managing facilities and infrastructure of education and training.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP

PTP didirikan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

Berdasarkan perjanjian No. HK.566/20/13/PI/II-13 tanggal 27 Desember 2013, Perusahaan dan PTP mengadakan Perjanjian Serah Operasi Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan serta Penggunaan Lahan Pelabuhan berdasarkan Hak Pengelolaan (HPL) Perusahaan pada Cabang Tanjung Priok. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan setuju untuk memberikan hak kepada PTP untuk mengoperasikan fasilitas pelabuhan dan fasilitas penunjang pelabuhan serta penggunaan lahan pelabuhan yang merupakan aset milik Perusahaan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perjanjian tersebut telah diperpanjang beberapa kali. Terakhir dengan addendum II No.KS.03/27/12/3/DI.1/GM/C.Tpk-17 dan No. HK.566/27/12/1/PTP-17 tanggal 27 Desember 2017 dimana PTP dan Perusahaan sepakat untuk menambah dan mengurangi beberapa hal, diantaranya tidak lagi mengadakan kerjasama serah operasi Hak Pengelolaan (HPL) milik Perusahaan Cabang Tanjung Priok.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 30 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam PTP kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp16.549.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP

PTP was established based on Notarial Deed No. 27 dated July 10, 2013 of Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PTP was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 dated August 1, 2013.

Based on agreement No. HK.566/20/13/PI/II-13, dated December 27, 2013, the Company and PTP entered into Agreement of Handover of Port Facilities, Port Supporting Facilities and Land under Right to Operate (HPL) of the Company on Tanjung Priok Branch. Based on the agreement, the Company agreed to provide the rights to PTP to operate port facilities and port supporting facilities also the land owned by the Company to perform Port Services and other services based on the terms and condition stipulated in the agreement. This agreement have been extended several times. Recently with addendum II No. KS.03/27/12/3/DI.1/GM/C.Tpk-17 and No. HK.566/27/12/1/PTP-17 dated on December 27, 2017 whereas PTP and the Company agreed to add and change several articles, among others, no longer holding the cooperation of handover of the Right to Operate (HPL) owned by Company's Tanjung Priok Branch.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 30 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 250 shares in PTP to PII with a buying price of Rp16,549,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP (lanjutan)

Modal dasar PTP sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,00% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan tanggal 22 Desember 2017, sebagaimana telah diubah pada tanggal 18 Mei 2018, diatur mengenai zonasi bisnis PTP di cabang pelabuhan Perusahaan, termasuk kegiatan pengoperasian dan pola kerjasama serta pembagiannya.

Pada tanggal 16 Juli 2018, PTP melakukan *spin-off* operasi petikemasnya di pelabuhan Tanjung Priok kepada PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK), pihak berelasi.

Pada tanggal 1 Agustus 2018, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan cabang Panjang, Bengkulu dan Jambi terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

Pada tanggal 1 September 2018, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan cabang Banten terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

Saat ini, PTP bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair, *bunkering* serta jasa pergudangan dan lapangan.

IPC TPK

IPC TPK didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-40641.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP (continued)

The authorized capital of PTP amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.00% or 24,750 shares with total amount of Rp24,750,000.
- PII owns 1.00% or 250 shares with total amount of Rp250,000.

Based on Company's Directors' Decision Letter dated December 22, 2017, as has been amended on May 18, 2018, it regulated PTP's business zonation in Company's port branches, including the operational activities as well as the agreement scheme and allocation.

On July 16, 2018, PTP spins-off its container operation in Tanjung Priok port to PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK), a related party.

On August 1, 2018, PTP cooperates with Company's Panjang branch, Bengkulu branch and Jambi branch in relation to operational and management of non-container terminal.

On September 1, 2018, PTP cooperates with Company's Banten branch in relation to operational and management of non-container terminal.

Currently, PTP's activities consist of container terminal services, dry bulk and liquid bulk services, *bunkering* and warehousing and field services.

IPC TPK

IPC TPK was established based on Notarial Deed No. 25 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of IPC TPK was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-40641.AH.01.01.Tahun 2013 dated July 25, 2013.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

IPC TPK (lanjutan)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 36 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam IPC TPK kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp7.915.500.

Modal dasar IPC TPK sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,00% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, IPC TPK bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas dan jasa kepelabuhanan lainnya.

API

API didirikan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 24 Juli 2014 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-19255.40.10.2014 tanggal 4 Agustus 2014. Anggaran Dasar API telah mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 26 Maret 2015 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 27 April 2015.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

IPC TPK (continued)

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 36 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 250 shares in IPC TPK to PII with a buying price of Rp7,915,500.

The authorized capital of IPC TPK amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.00% or 24,750 shares with total amount of Rp24,750,000.
- PII owns 1.00% or 250 shares with total amount of Rp250,000.

Currently, IPC TPK's activities consist of container terminal services and other port services.

API

API was established based on Deed No. 29 dated July 24, 2014 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-19255.40.10.2014 dated August 4, 2014. API's Articles of Association has been amended based on Deed No. 29 dated March 26, 2015 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, regarding the increase in authorized and paid-in capital, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 dated April 27, 2015.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

API (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 21 Desember 2017 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp1.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp386.000.000 yang diambil bagian oleh PPI dan PTP masing-masing sebesar Rp382.140.000 dan Rp3.860.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 27 Desember 2017.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 28 Desember 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, API melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp805.760.000 yang diambil bagian oleh PPI dan PTP masing-masing sebesar Rp801.900.000 dan Rp3.860.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0018880 tanggal 11 Januari 2019.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PPI memiliki 99,52% atau sebanyak 80.190.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp801.900.000.
- PTP memiliki 0,48% atau sebanyak 386.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.860.000.

Saat ini, kegiatan API terutama terkonsentrasi pada investasi pada CTP, entitas asosiasi yang bergerak dalam penyelenggaraan proyek jalan tol.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

API (continued)

Based on Deed No. 33 dated December 21, 2017 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company increased the authorized capital to Rp1,000,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp386,000,000 which was subscribed by PPI and PTP amounting to Rp382,140,000 and Rp3,860,000, respectively. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 dated December 27, 2017.

Based on Deed No. 26 dated December 28, 2018 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, API increased the issued and fully paid capital to Rp805,760,000 which was subscribed by PPI and PTP amounted to Rp801,900,000 and Rp3,860,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-AH.01.03-0018880 dated January 11, 2019.

The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- PPI owns 99.52% or 80,190,000 shares with total amount of Rp801,900,000.
- PTP owns 0.48% or 386,000 shares with total amount of Rp3,860,000.

Currently, the API's activities are primarily concentrated on investment in CTP, an associate which is engaged in a toll road project.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

NPCT1

NPCT1 didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-11432.40.10.2014 tanggal 3 Juni 2014.

Modal dasar NPCT1 sebesar Rp340.725.600 yang terbagi atas 510 saham Kelas A dan 490 saham Kelas B masing-masing dengan nilai nominal Rp340.725.600 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC TPK memiliki 51,00% atau sebanyak 510 saham Kelas A dengan nilai nominal sebesar Rp173.770.056.
- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., memiliki 49,00% atau sebanyak 490 saham Kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp166.955.544.

Saat ini, NPCT1 bergerak dalam bidang pelayanan jasa bongkar muat barang.

TPI

TPI didirikan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 April 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan AHU-21873.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

Modal dasar TPI sebesar Rp500.000.000 yang terbagi atas 500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

NPCT1

NPCT1 was established based on Deed No. 33 dated May 28, 2014 of Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-11432.40.10.2014 dated June 3, 2014.

The authorized capital of NPCT1 amounted to Rp340,725,600 which is divided into 510 Class A shares and 490 Class B shares with a nominal value of Rp340,725,600 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC TPK owns 51.00% or 510 Class A shares with total amount of Rp173,770,056.
- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., owns 49.00% or 490 Class B shares with total amount of Rp166,955,544.

Currently, NPCT1 engage in cargo handling services.

TPI

TPI was established based on Deed No. 36 dated April 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No. AHU-21873.AH.01.01. Tahun 2013 dated April 24, 2013.

The authorized capital of TPI amounted to Rp500,000,000 which is divided into 500,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 25.00% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

TPI (lanjutan)

- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

Saat ini, TPI belum melakukan kegiatan operasi komersial.

JICT

JICT didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 27 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsy Tahamata, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-5466.HT.01.01.TH'99 tanggal 29 Maret 1999.

Berdasarkan Akta Perubahan No. 77 dan No. 78 tanggal 30 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsy Tahamata, S.H., dinyatakan bahwa modal dasar JICT adalah sebesar Rp221.450.406 terbagi atas 1 saham seri A porsi Pemerintah Republik Indonesia dan 442.900.812 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut (Catatan 46b, 46c, 46d dan 46e):

- Perusahaan memiliki 48,90% atau sebanyak 216.578.498 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp108.289.249.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,10% atau sebanyak 442.899 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp221.449.
- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (dahulu Grosbeak Pte. Ltd.) memiliki 51% atau sebanyak 225.879.415 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp112.939.707.

Saat ini, JICT bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan, jasa terminal petikemas, lapangan penumpukan dan jasa lainnya.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

TPI (continued)

- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.

Currently, TPI has not yet started commercial operation.

JICT

JICT was established based on Notarial Deed No. 72 dated March 27, 1999 of Notary Nelly Elsy Tahamata, S.H., M.Kn. The establishment of JICT was approved by Minister of Law and Human Rights No. C-5466.HT.01.01.TH'99 dated March 29, 1999.

Based on Deed of Amendment No. 77 and 78 dated March 30, 1999 by Notary Nelly Elsy Tahamata, S.H., the authorized capital of JICT amounted to Rp221,450,406, comprising of 1 Series A share for The Government of Republic of Indonesia portion and 442,900,812 Series B shares with par value of Rp500 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows (Notes 46b, 46c, 46d and 46e):

- The Company owns 48.90% or 216,578,498 Series B shares with total amount of Rp108,289,249.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 0.10% or 442,899 Series B shares with total amount of Rp221,449.
- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (formerly Grosbeak Pte. Ltd.) owns 51% or 225,879,415 Series B shares with total amount of Rp112,939,707.

Currently, JICT's activities consist of port services, container terminal services, dockyard and other related services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

TPK Koja

Kerjasama Operasi TPK Koja didirikan berdasarkan Akta No. 53 tanggal 23 Oktober 1996 oleh Imas Fatimah, S.H. dan Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja pada tanggal 16 Agustus 1994 antara Perusahaan dengan PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). Perjanjian tersebut kemudian diubah secara substansial pada tanggal 26 Maret 1999 ("Amandemen I") dan selanjutnya diubah pada tanggal 22 Juni 2011 ("Amandemen II"), tanggal 5 Agustus 2014 ("Amandemen III") dan tanggal 22 Juni 2015. Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun sejak tanggal operasi komersial, yaitu tanggal 1 November 1998 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Maret 2039 (Catatan 46a).

Proporsi investasi partisipan untuk tahun 2019 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Saat ini, TPK Koja bergerak dalam bidang pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan dan terminal petikemas.

CTP

Berdasarkan Perjanjian Pengambilbagian Saham Bersyarat dan Perjanjian Pemegang Saham MTDX tanggal 14 April 2015, yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 28 Agustus 2015, API, MTD Capital Bhd dan PT Nusacipta Etika Pratama sepakat bahwa API akan melakukan investasi di MTDX dengan cara mengambil bagian atas 130.220 saham baru dengan total nilai nominal Rp118.500.200 (mewakili 45% kepemilikan saham) yang diterbitkan MTDX. Pada tanggal 18 September 2015, transaksi telah diselesaikan dan API menjadi pemilik 45% saham MTDX.

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., MTDX mengganti nama menjadi PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP"). Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0011468.AH.01.02 tanggal 26 Mei 2017.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

TPK Koja

Kerjasama Operasi TPK Koja was established based on Deed No. 53 dated October 23, 1996 of Imas Fatimah, S.H. and on Master Cooperation Agreement dated August 16, 1994 between the Company and PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). The agreement was substantially revised on March 26, 1999 ("Amendment I") and revised further on June 22, 2011 ("Amendment II"), August 5, 2014 ("Amendment III") and June 22, 2015. The term of the agreement is 20 years from the date of commencement of full commercial operations on November 1, 1998 and has been extended until March 26, 2039 (Note 46a).

The investment proportions of the participants for the year 2019 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

Currently, TPK Koja's activities consist of operating and managing a container port and terminal.

CTP

Based on Conditional Share Subscription Agreement and Shareholders Agreement of MTDX dated April 14, 2015, which was amended and restated on August 28, 2015, API, MTD Capital Bhd and PT Nusacipta Etika Pratama agreed that API will invest in MTDX by subscribing to 130,220 new shares with a total nominal amount of Rp118,500,200 (representing 45% share ownership) issued by MTDX. On September 18, 2015, the transaction was completed and API became the owner of 45% shares in MTDX.

Based on Deed No. 17 dated May 24, 2017 drawn before Drs. Soebiantoro, S.H., MTDX change the name to PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP"). The deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0011468.AH.01.02 dated May 26, 2017.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

MKO MTKI

Pada tanggal 9 April 2015, IKT mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur dengan PT Maspion Industrial Estate ("MIE") dengan membentuk MKO MTKI. Jangka waktu perjanjian adalah 25 tahun dengan porsi pendanaan IKT dan MIE masing-masing sebesar 45,00% dan 55,00%.

Pada bulan Maret 2016, MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia telah beroperasi secara komersial dan bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan.

PII

PII didirikan berdasarkan Akta No. 112 tanggal 17 November 2017 dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0052776.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 21 November 2017.

Modal dasar PII sebesar Rp800.000.000 yang terbagi atas 800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,00% atau sebanyak 198.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp198.000.000.
- MTI memiliki 1,00% atau sebanyak 2.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000

Saat ini, PII bergerak dalam bidang investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan maupun jasa terkait kepelabuhanan lainnya, investasi di pasar modal dan pasar uang, jasa konsultasi bisnis serta bertindak sebagai penasihat.

MMI

MMI didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 5 Juli 2018 dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0033122.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

MKO MTKI

On April 9, 2015, IKT entered into an Agreement of Construction and Operation of Car Terminal in Gresik Jawa Timur with PT Maspion Industrial Estate ("MIE") by establishing MKO MTKI. The period of agreement is 25 years with the funding portion for IKT and MIE amounted to 45.00% and 55.00%, respectively.

On March, 2016, MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia has operated commercially and engages in car terminal operation.

PII

PII was established based on Deed No. 112 dated November 17, 2017 of Notary Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision letter No. AHU-0052776.AH.01.01. Tahun 2017 dated November 21, 2017.

The authorized capital of PII amounted to Rp800,000,000 which is divided into 800,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.00% or 198,000 shares with total amount of Rp198,000,000.
- MTI owns 1.00% or 2,000 shares with total amount of Rp2,000,000.

Currently, PII's activities consist of investment in companies engaged in port services and other port related services, investment in capital markets and money markets, business consultancy services and acting as advisor.

MMI

MMI was established based on Deed No. 16 dated July 5, 2018 of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision letter No. AHU-0033122.AH.01.01. Tahun 2018 dated July 16, 2018.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

MMI (lanjutan)

Modal dasar MMI sebesar Rp350.000.000 yang terbagi atas 350.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PPI memiliki 70,00% atau sebanyak 612.500.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp61.250.000.
- PT PP Properti Tbk memiliki 30,00% atau sebanyak 262.500.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp26.250.000.
- Saat ini, MMI belum melakukan kegiatan komersial.

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	-
Komisaris Independen	Suaidi Marasabessy
Komisaris	Kushari Suprianto
Komisaris	Montty Giriana
Komisaris	D. Andhi Nirwanto
Komisaris	Djadmiko
Komisaris	R. Agus H. Purnomo

Direksi

Direktur Utama	Elvyn G. Masassya
Wakil Direktur Utama	Hambra
Direktur Komersial	Arif Suhartono
Direktur Teknik	Dani Rusli Utama
Direktur Operasi	Prasetyadi
Direktur Keuangan	Widyaka Nusapati
Direktur SDM	Rizal Ariansyah
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Ogi Rulino

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

MMI (continued)

The authorized capital of MMI amounted to Rp350,000,000 which is divided into 350,000 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 70.00% or 612,500,000 shares with total amount of Rp61,250,000.
- PT PP Properti Tbk owns 30.00% or 262,500,000 shares with total amount of Rp26,250,000.
- At the moment, MMI has not performed any commercial activities.

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees

Board of Commissioners and Directors

As of December 31, 2019 and 2018, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors is as follows:

December 31, 2019

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Vice President of Director
Director of Commercial
Director of Engineering
Director of Operations
Director of Finance
Director of Human Resources
Director of Transformation and Business Development

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

31 Desember 2018

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/
Independen

Komisaris Independen

Komisaris

Komisaris

Komisaris

Komisaris

Komisaris

Direksi

Direktur Utama

Direktur Komersial

Direktur Teknik

Direktur Operasi

Direktur Keuangan

Direktur SDM

Direktur Transformasi dan

Pengembangan Bisnis

Tumpak H. Panggabean

Suaidi Marasabessy

Kushari Suprianto

Montty Giriana

D. Andhi Nirwanto

Djadmiko

R. Agus H. Purnomo

Elvyn G. Masassya

Saptono R. Irianto

Dani Rusli Utama

Prasetyadi

Widyaka Nusapati

Rizal Ariansyah

Riry Syeried Jetta

Sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang telah mengangkat Tumpak H. Panggabean sebagai ketua Dewan Pengawas KPK, maka pada tanggal 23 Desember 2019, Tumpak H. Panggabean telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 2 Januari 2020, Djadmiko ditunjuk untuk melaksanakan fungsi Komisaris Utama Perusahaan sampai dengan ditetapkannya Komisaris Utama Perusahaan oleh RUPS.

Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua

Anggota

Anggota

Sekretaris Perusahaan

Kushari Suprianto

Rakmat Adi Santosa

Muhdi Al Fajar

Shanti Puruhita

1. GENERAL (continued)

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (continued)

December 31, 2018

Board of Commissioners

President/Independent

Commissioner

Independent Commissioner

Commissioner

Commissioner

Commissioner

Commissioner

Commissioner

Directors

President Director

Director of Commercial

Director of Engineering

Director of Operations

Director of Finance

Director of Human Resources

Director of Transformation and

Business Development

In relation to the Decision of the President of the Republic of Indonesia dated December 19, 2019 regarding Appointment of Membership of the Supervisory Board on the Eradication of Corruption (KPK) which appoint Tumpak H. Panggabean as the president of the KPK Supervisory Board, on December 23, 2019, Tumpak H. Panggabean has filed a resignation as the Company's President Commissioner as well as Independent Commissioner.

Based on Board of Commissioner's Decision dated Januari 2, 2020, Djadmiko was appointed to perform the functionality of the Company's President Commissioner until the establishment of Independent Commissioner by RUPS.

Audit Committee and Corporate Secretary

The Company's Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Audit Committee

Head

Member

Member

Corporate Secretary

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Karyawan

Total karyawan tetap Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebanyak 4.640 dan 4.560 karyawan (tidak diaudit).

d. Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan Kelompok Usaha adalah Rupiah, kecuali TPK Koja, NPCT1 dan JICT dalam Dolar Amerika Serikat.

Sebelum tanggal 1 Januari 2019, mata uang fungsional PPI adalah Dolar AS (USD), yang juga digunakan sebagai mata uang penyajian dalam laporan keuangan. Efektif tanggal 1 Januari 2019, PPI mengubah mata uang fungsionalnya menjadi Rupiah (Rp) yang disebabkan oleh terjadinya perubahan secara substansial dalam mata uang yang digunakan dalam sebagian besar transaksi penjualannya. Sebagai akibatnya, efektif tanggal 1 Januari 2019, mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan juga berubah menjadi Rupiah. Manajemen berkeyakinan bahwa perubahan ini akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat dalam laporan keuangan.

e. Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian

Mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional.

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha, laporan keuangan TPK Koja, NPCT1 dan JICT dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan cara sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan;
- Penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- Seluruh hasil dari selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya.

1. GENERAL (continued)

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (continued)

Employees

Total permanent employees of the Company as of December 31, 2019 and 2018 are 4,640 and 4,560 employees, respectively (unaudited).

d. Reporting Currency

The Company's reporting currency is Rupiah, except TPK Koja, NPCT1 and JICT which are in United States Dollar.

Prior to January 1, 2019, the functional currency of PPI is US Dollar (USD), which was also used as presentation currency in the financial statements. Effective January 1, 2019, PPI has changed its functional currency to Rupiah (Rp) due to substantial change in the currency used in majority of its sales transaction. As a result, effective January 1, 2019, the presentation currency used in the financial statements has also been changed to Rupiah. The management believes that such change will result in a more appropriate presentation in the financial statements.

e. Translation into Presentation Currency

The presentation currency of the Company's consolidated financial statements is in Rupiah, which is also the functional currency.

In preparing the consolidated financial statements of the Company, financial statements of TPK Koja, NPCT1 and JICT were translated to Rupiah currency based on the following:

- Assets and liabilities were translated using the prevailing rates at reporting date;
- Income and expenses were translated using the average exchange rate; and
- All resulting exchange differences were recognized in other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

e. Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian (lanjutan)

Mutasi akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebagai berikut:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018
Saldo awal	373.526.146	391.851.724
Efek penjabaran - neto	246.899.366	(18.325.578)
Saldo akhir	620.425.512	373.526.146

1. GENERAL (continued)

e. Translation into Presentation Currency (continued)

Movement for exchange differences due to financial statements translation account are as follows:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018
Saldo awal	373.526.146	391.851.724
Efek penjabaran - neto	246.899.366	(18.325.578)
Saldo akhir	620.425.512	373.526.146

f. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2020. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.

f. Completion of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II and its subsidiaries as of December 31, 2019 and for the year then ended are completed and authorized for issuance on March 31, 2020. The Company's Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such consolidated financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam Catatan yang relevan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which comprises the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared on an accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts that were measured by using a basis as disclosed in the relevant Notes.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI Penting
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Kelompok Usaha seperti yang disebutkan pada Catatan 1.

Perusahaan memiliki kontrol atas entitas anak apabila Perusahaan memiliki dampak dari atau memiliki hak atas penerimaan/imbalance hasil variabel dari hubungannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk penerimaan tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Nonpengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

**2. Summary of Significant Accounting Policies
(continued)**

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

The consolidated statements of cash flow was prepared using direct method and presents receipts and expenditures of cash and cash equivalents, which were classified into operating, investing and financing activities.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company mentioned in Note 1.

The Company have control to entity when the Company have an impact to, or has right of, variable return from its involvement with the subsidiaries and has the ability to affect those returns through its power over the subsidiaries.

All material intercompany transactions and balances have been eliminated in the consolidated financial statements.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control and continue to be consolidated until the date such control ceases.

Losses of a subsidiary that is not fully owned by the Company are attributed to Non-controlling Interest (NCI) even if that will result in a deficit balance.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak.
- menghentikan pengakuan nilai tercatat setiap KNP.
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas (bila ada).
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima.
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya.
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh entitas induk yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Kelompok Usaha pada suatu entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Kelompok Usaha dan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah KNP disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Entitas Induk.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

If it loses control over a subsidiary, the Company:

- derecognizes the assets (including *goodwill*) and liabilities of the subsidiaries.
- derecognizes the carrying amount of any NCI.
- derecognizes any cumulative translation differences recorded in equity (if any).
- recognizes the fair value of the consideration received.
- recognizes the fair value of any investment retained.
- recognizes any surplus or deficit in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and
- reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate.

NCI reflects the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries entity that not attributable directly or indirectly by the parent company which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.

Changes in the Company's ownership interest in a subsidiary that do not impact in loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Company's and non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. Any differences between the amount by which the NCI are adjusted and the fair value of consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Parent Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" (Catatan 1d dan 1e).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian dan aset tak berwujud.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (nilai penuh):

	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Dolar Amerika Serikat (USD) 1	13.901
Euro Eropa (EUR) 1	15.589
Dolar Singapura (SGD) 1	10.321

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Kelompok Usaha memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, seperti yang dijelaskan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

e. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), entitas yang melepas bisnis maupun yang menerima bisnis mencatat selisih antara imbalan yang diterima/dialihkan dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas/jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis di ekuitas dan menyajikannya dalam akun "tambahan modal disetor".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Foreign Currency Transactions and Balances

The Company applied PSAK No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" (Notes 1d and 1e).

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, except for foreign exchange difference that can be attributed to qualifying assets which are capitalized to construction in progress and intangible assets.

Below are the major exchange rates used for translation as of December 31, 2019 and 2018 (full amount):

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	13.901	14.481	United States Dollar (USD) 1
	15.589	16.560	European Euro (EUR) 1
	10.321	10.603	Singapore Dollar (SGD) 1

d. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties, as defined in PSAK No. 7 (revised 2010), "Related Party Disclosures".

The transactions are made based on terms agreed by the parties.

e. Business combinations entities under common control

The Company applied PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combinations Entities Under Common Control".

Based on PSAK No. 38 (Revised 2012), the entity that disposed and received business records the difference between the consideration received/transferred and the carrying amount of the disposed business/carrying amount of any business combination transaction in equity in the "additional paid-in capital" account.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

g. Piutang Usaha dan Penyisihan Penurunan Nilai

Piutang usaha pada awalnya diukur sesuai dengan nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Pembentukan penyisihan penurunan nilai piutang ditentukan berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo dengan menggunakan metode roll rate. Berdasarkan keyakinan manajemen, metode pembentukan penyisihan penurunan nilai piutang tersebut tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo dengan menggunakan basis individual. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

h. Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan identifikasi khusus. Persediaan terdiri dari suku cadang kapal dan crane, bahan bakar, alat tulis kantor, obat dan alat-alat medis.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

i. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka dibebankan pada operasi sesuai dengan masa manfaatnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all investments with maturities of three months or less from the date of placement that were not used as collateral and are unrestricted.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year are presented as short-term investments.

g. Trade Receivables and Allowance for Losses

Trade receivables are initially measured at fair value and subsequently measured at amortized cost, net of allowance for impairment. Allowance for impairment losses is determined based on management's evaluation on the collectability of the balances using roll rate method. Based on the management beliefs, the impairment method will not have a significant difference compared to management evaluation on the collectability of the balances using individual basis. Trade receivables are written off in the period when the receivables cannot be collected.

h. Inventory

Inventory was recorded using the weighted average method and specific identification. Inventories consists of ship and crane spare part, fuels, office supplies, medicine and medical instruments.

Allowance for inventory obsolescence is defined based on analysis of inventory condition on the date of reporting of financial position.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are charged to operations over the useful life.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh perusahaan dimana Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendali. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas dan pada awalnya diakui sebesar harga perolehan. Investasi pada entitas asosiasi tersebut termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi dikurangi rugi penurunan nilai.

Bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca-akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lainnya pasca-akuisisi diakui didalam penghasilan komprehensif lainnya. Mutasi penghasilan komprehensif pasca-akuisisi disesuaikan terhadap nilai tercatat investasinya, jika bagian Kelompok Usaha atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan.

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Kelompok Usaha memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul dari investasi pada entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kelompok Usaha menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal Kelompok Usaha tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan mencatat investasinya sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang mana hilangnya pengaruh signifikan tersebut tidak mengakibatkan entitas asosiasi menjadi entitas anak atau pengaturan bersama sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama". Ketika kehilangan pengaruh signifikan, maka Kelompok Usaha mengukur setiap investasi yang tersisa pada entitas asosiasi pada nilai wajar. Kelompok Usaha mengakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian setiap selisih antara:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Investment in Associates

Associates entities over which the Company has significant influence but not control. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting and are initially recognized at cost. The Company's investment in associates include goodwill identified on acquisition, net of impairment loss.

The Company's share of their associates post acquisition profits or losses is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. Their share of post acquisition movement in other comprehensive income is recognized as other comprehensive income. The cumulative post-acquisition movements are adjusted against the carrying amount of the investment, when the Company's share of losses in an associate exceeds its interest in the associates, including any unsecured receivable.

The Company does not recognize for the losses unless they have incurred obligation or made payments on behalf of the associates. Diluted gains and losses arising in investments in associates are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The Company discontinue the use of the equity method from the date when Company ceases to have significant influence over an associate and records for the investment in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), "Financial Instrument: Recognition and Measurement", from that date, provided the associate does not become a subsidiary or a joint arrangement as defined in PSAK No. 66, "Joint Arrangement". On the loss of significant influence, the Company shall measure at fair value any investment the investor retains in the former associate. The Company shall recognize in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income any difference between:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

- (a) nilai wajar investasi yang tersisa dan hasil pelepasan sebagian kepemilikan pada entitas asosiasi; dengan
- (b) jumlah tercatat investasi dalam tanggal ketika hilangnya pengaruh signifikan.

Ketika investasi dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dan dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), maka nilai wajar investasi ketika dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014).

k. Properti Investasi

Properti investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai Kelompok Usaha untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi tersebut.

Perusahaan telah memilih model biaya untuk mencatat properti investasinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi yang berupa bangunan fasilitas pelabuhan (10 - 50 tahun) dan jalan dan bangunan (10 - 40 tahun).

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Investment in Associates (continued)

- (a) the fair value of any retained investment and any proceeds from disposing of the part of the interest in the associate; and
- (b) the carrying amount of the investment at the date when significant influence is lost.

When an investment ceases to be an associate and is recorded for in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), the fair value of the investment at the date when it ceases to be an associate shall be regarded as its fair value on initial recognition as a financial asset in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014).

k. Investment Properties

Investment properties represents properties (land or building - or part of a building - or both) held by the Company to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. The carrying amount includes the cost of replacement of an existing investment property in the year such costs are incurred, if the recognition criteria are met and does not include the cost of daily use of the investment property.

The Company has chosen the cost model to record for its investment properties.

Depreciation is computed using the straight-line basis over the estimated useful lives of investment properties which consist of building and port facilities (10 - 50 years) and road and building (10 - 40 years).

Investment properties are derecognized when either it has been disposed of or when it is permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the retirement or disposal of investment properties are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the period of retirement or disposal.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Aset tetap

I. Fixed assets

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

All fixed assets are initially recognized at cost which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for the assets to be capable of operating in the manner intended by management.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

After to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets start when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful live of the assets as follows:

<u>Jenis Aset</u>	<u>Tahun/Years</u>	<u>Type of Assets</u>
Bangunan fasilitas pelabuhan	10 - 50	Building and port facilities
Kapal	5 - 20	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	5 - 20	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	10 - 25	Port facility installation
Jalan dan bangunan	10 - 40	Road and building
Peralatan	4 - 25	Equipment
Kendaraan	5	Vehicles
Emplasemen	3 - 25	Emplacement

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year in which the asset is derecognized.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

I. Aset tetap (lanjutan)

Pada akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan disesuaikan secara prospektif jika terjadi perubahan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

Biaya perbaikan yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba pada saat terjadinya.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Aset kerjasama operasi merupakan kegiatan kerjasama yang meliputi pemanfaatan aset dari para pihak atas suatu kegiatan operasi yang didasarkan pada perjanjian kontraktual. Aset kerjasama operasi dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Fixed assets (continued)

At the end of reporting period, the residual values, useful lives and methods of depreciation of assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of reporting period.

Land is stated at cost and not depreciated.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

The cost of major repairs is recognized as the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the profit or loss as incurred.

Major spare parts and stand-by equipments are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

Joint operation assets are joint activities that include utilization of the assets from the parties for operational activities that is based on contractual agreements. Joint operation assets are stated at cost less accumulated depreciation and are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of similar fixed assets.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

m. Sewa

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau mengandung sewa adalah berdasarkan substansi dari perjanjian tersebut pada penetapan awal. Perjanjian dievaluasi apakah pemenuhannya tergantung kepada penggunaan aset atau aset-aset tertentu secara spesifik atau perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, walaupun hak tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian.

Kelompok Usaha sebagai lessee

Sewa pembiayaan yang mengalihkan kepada Kelompok Usaha secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar dari aset sewaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dipisahkan antara beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan diakui sebagai beban pendanaan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Sebuah aset sewaan disusutkan selama masa manfaat dari aset tersebut. Tetapi, jika tidak terdapat kepastian memadai bahwa Kelompok Usaha akan memperoleh kepemilikan diakhir masa sewa, maka aset disusutkan selama mana yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat aset dan masa sewa.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian secara garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Lease

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date. The arrangement is assessed for whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets or the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

Company as a lessee

A finance lease that transfers to the Company substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item is capitalized at the commencement of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognized as financing cost in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the Company will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognized as an operating expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the lease term.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai lessor

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasional jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut.

Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan.

n. Pengaturan bersama

Kelompok Usaha merupakan pihak dalam pengaturan bersama apabila terdapat pengaturan kontraktual yang memberikan pengendalian bersama atas aktivitas relevan kepada Kelompok Usaha dan minimal satu pihak lainnya. Pengendalian bersama diuji dengan prinsip yang sama dengan penilaian pengendalian atas anak perusahaan.

Kelompok Usaha mengklasifikasikan kepentingannya dalam pengaturan bersama sebagai berikut:

- Ventura bersama: ketika Kelompok Usaha memiliki hak hanya pada net aset dari pengaturan bersama
- Operasi bersama: ketika Kelompok Usaha memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas yang terkait dengan pengaturan bersama.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Lease (continued)

Company as a lessor

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership. Leases are classified as operating leases if the lease does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

In a finance lease, the lessor recognizes finance lease assets such as receivables in the consolidated statements of financial position at an amount equal to the net lease investment.

The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the lessor's net investment in the finance lease.

n. Joint arrangements

The Company is a party to a joint arrangement when there is a contractual arrangement that confers joint control over the relevant activities of the arrangement to the Company and at least one other party. Joint control is assessed under the same principles as control over subsidiaries.

The Company classifies its interests in joint arrangements as either:

- Joint ventures: where the Company has rights to only the net assets of the joint arrangement
- Joint operations: where the Company has both the rights to assets and obligations for the liabilities of the joint arrangement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

n. Pengaturan bersama (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian klasifikasi kepentingan dalam pengaturan bersama, Kelompok Usaha mempertimbangkan hal-hal berikut:

- struktur pengaturan bersama
- bentuk hukum pengaturan bersama apabila dibentuk melalui kendaraan terpisah
- persyaratan pengaturan kontraktual

- ketika relevan, fakta dan keadaan lain (termasuk semua perjanjian kontraktual lainnya).

Kelompok Usaha mencatat kepentingannya dalam operasi bersama dengan mengakui hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban dalam ketentuan kontraktual.

o. Aset Takberwujud

Aset takberwujud Kelompok Usaha terdiri dari aset hak konsesi, piranti lunak dan biaya ditangguhkan.

Aset takberwujud diakui jika Kelompok Usaha kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat ekonomi aset dan dievaluasi apabila terdapat indikasi adanya penurunan nilai untuk aset takberwujud. Periode dan metode amortisasi untuk aset takberwujud direvisi setidaknya setiap akhir tahun tutup buku.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat; i) dilepaskan atau ii) ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Joint arrangements (continued)

In assessing the classification of interests in joint arrangements, the Company considers:

- *The structure of the joint arrangement*
- *The legal form of joint arrangements structured through a separate vehicle*
- *The contractual terms of the joint arrangement agreement*
- *Any other facts and circumstances (including any other contractual arrangements).*

The Company accounts for its interests joint operations by recognising its share of assets, liabilities, revenues and expenses in accordance with its contractually conferred rights and obligations.

o. Intangible Assets

Intangible assets of the Company consist of concession rights asset, software and deferred charges.

Intangible assets are recognized if the Company will obtain useful economic benefit from the intangible assets and the cost of assets can be reliably measured.

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and impairment loss, if any.

An intangible asset is amortized over the asset's useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset are reviewed at least at each financial year end.

An intangible asset shall be derecognized; i) on disposal; or ii) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi

Kelompok Usaha telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22).

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Kelompok Usaha membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan terminal Kalibaru yang akan diamortisasi selama periode aset diharapkan dapat digunakan oleh Perusahaan sejak tanggal pengoperasian terminal. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi terminal Kalibaru diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Concession Asset

The Company has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22).

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Company records for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are Kalibaru terminal concession rights which are amortized over the period of assets are expected to use from the date of operation of the Kalibaru terminal. During the construction period, the accumulated Kalibaru terminal construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") tanpa syarat.

Aset konsesi yang diberikan kepada Kelompok Usaha dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/OP. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/OP pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selain itu, Kelompok Usaha mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" (PSAK 34) dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Kelompok Usaha menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Kelompok Usaha diakui pada nilai wajar.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi - Terminal Kalibaru yang meliputi biaya pembangunan dermaga, pengadaan tanah dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Concession Asset (continued)

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") for no consideration.

Concession asset which granted to the Company are transferrable with approval from the Government/OP. These concession assets will be transferred to the Government/OP at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

In addition, the Company recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" (PSAK 34) and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Company provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Company is recognized at its fair value.

Construction contract comprehends all cost directly attributable to the construction of concession assets - Kalibaru Terminal which includes cost of port development, land acquisition and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus the cost of borrowing directly used for financing the construction of concession asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Kelompok Usaha mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset takberwujud dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Aset konsesi diamortisasi selama periode aset diharapkan dapat digunakan oleh Perusahaan dengan menggunakan metode garis lurus.

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya-biaya sehubungan dengan perolehan sistem perangkat lunak yang mempunyai masa manfaat 4-5 tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman".

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan pinjaman dana.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Concession Asset (continued)

The Company recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Company receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Company records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

Construction cost is the value of the construction contract.

The concession assets that amortized over the period of assets are expected to use using straight line method.

Software

Software represents expenses relating to systems software cost, which benefits extend over a period of 4-5 years, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

p. Capitalization of Borrowing Cost

The Company implemented PSAK No. 26 (Revised 2011), "Borrowing Costs".

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of the qualifying assets are capitalized as a part of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Company incurs in connection with the borrowing of funds.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

p. Kapitalisasi Biaya Pinjaman (lanjutan)

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai maksudnya.

q. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima di muka disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

r. Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran.

Berikut merupakan kriteria pengakuan pendapatan yang harus dipenuhi sehingga pengakuan dapat diakui:

- Pendapatan jasa kapal, jasa terminal petikemas, jasa barang, jasa terminal dan logistik diakui pada saat transaksi jasa telah selesai dilakukan.
- Pendapatan pelayanan kesehatan diakui pada saat jasa telah diberikan atau saat barang medis telah diserahkan kepada pasien.
- Pengakuan atas pendapatan jasa jaringan, konsultasi dan pemeliharaan diakui pada saat jasa tersebut telah diserahkan kepada pelanggan. Pendapatan dari penjualan software diakui pada saat risiko dan hak kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pelanggan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**p. Capitalization of Borrowing Cost
(continued)**

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

q. Unearned Revenues

Unearned revenues from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "long term liabilities" in the consolidated statements of financial position.

r. Revenue and Expenses

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivables.

The criteria of revenue recognition are as follows:

- Revenue from ship services, container services, goods services, terminal services and logistic are recognized when the transactions have been performed.
- Revenue from medical services is recognized when the services rendered or when the medical items are have been delivered to the patients.
- Revenue from network services, consulting and maintenance services are recognized when services have been rendered to the customers. Revenue from software sales is recognized when the significant risk and rewards of ownership have been transferred to the customer.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

- Pendapatan jasa pengerukan diakui berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan aktual. Persentase pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan tetapi belum ditagihkan dicatat sebagai pendapatan masih akan diterima. Selisih lebih antara pembayaran yang diterima dengan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka.
- Pendapatan atas kegiatan pelatihan diakui pada saat kegiatan telah dilaksanakan.
- Pendapatan sewa tanah dan bangunan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.
- Pendapatan dividen diakui pada saat hak Kelompok Usaha untuk menerima pembayaran dividen ditetapkan.
- Pendapatan konstruksi Kelompok Usaha mengakui aset takberwujud atas jasa konstruksi dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan basis kontrak biaya-plus.

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

Beban konstruksi diakui sejak kegiatan konstruksi dimulai sampai dengan proses pembangunan aset selesai dan siap untuk digunakan.

Kelompok Usaha mencatat pendapatan dan beban konstruksi bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Revenue and Expenses (continued)

- Revenue from dredging services is recognized based on actual percentage of work completion. Percentage of work that has been completed based on memorandum of work completion but not yet been billed are recorded as accrued income. Excess of payments received from customers over value of work that has been completed the are recorded as unearned revenue.
- Revenue from training services is recognized when the activities are completed.
- Land and building rental revenue is recognized on a straight line basis over the term of the lease contracts.
- Dividend revenue is recognized when the Company's right to receive the dividend payment is established.
- Construction revenues
The Company recognizes intangible assets of construction services in which the Company receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. In the construction period, the Company recorded intangible assets and recognize revenues and costs of construction by using cost-plus contract basis.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

Construction cost are recognized during construction stage up to construction activity was finished and asset ready to use.

The Company accounted for construction revenue and construction cost at the same time of recognition of intangible asset during construction phase.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Perpajakan

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Kelompok Usaha memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penghasilan sewa tanah dan bangunan sebagai pos tersendiri.

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasi dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kelompok Usaha juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Taxation

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subjected to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised PSAK No. 46 as mentioned above, final tax is no longer governed by PSAK No. 46. Therefore, the Company has decided to present all of the final tax arising from land and building rent revenue as separate line item.

The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset, except for certain asset such as land, which realization is taxed with final tax on gross value of transaction.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Corporate Income Tax - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The Company also presented interest/penalty, if any, as part of "Corporate Income Tax - Current".

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if filed an objection, when the result of the objection is determined.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Kelompok Usaha mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Taxation (continued)

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Company reassesses unrecognized deferred tax assets. The Company recognizes a previous unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to the items that previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

t. Imbalan Kerja

Imbalan pascakerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku. Liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada imbalan Program Pensiun kurang dari imbalan yang diharuskan oleh KKB, Perusahaan akan mencadangkan kekurangan tersebut.

Perusahaan memberikan imbalan kerja lainnya, seperti imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Beban untuk imbalan kerja berdasarkan KKB/UU/imbalan kesehatan pascakerja ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Laba atau rugi aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi total 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (*present value of the defined benefit obligation*) pada tanggal tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Employee Benefits

Post-employment benefits

The Company has a defined contribution retirement plan (Pension Plan) covering all of its qualified permanent employees and an unfunded employee benefit liability determined in accordance with the existing Collective Labor Agreement (CLA). The unfunded employee benefit liability is calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plan with the benefit as stipulated in the CLA, after deducting the accumulated employer contribution and the related investment results. If the employer-funded portion of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the CLA, the Company reserves for such shortfall.

The Company also provides other post-employment benefits, such as healthcare benefits and service pay to their retirees. The entitlement to these benefits are usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The estimation costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to defined benefit pension plans.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and prior service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

The costs of providing employee benefits under the CLA/Law/post-retirement healthcare benefits plan are determined using the projected-unit-credit method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang melebihi ketentuan 10% diakui selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang terjadi ketika Perusahaan memperkenalkan program imbalan pasti atau terjadinya perubahan atas imbalan yang terhutang dari program yang berlaku saat ini harus diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan (*vested*).

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Program iuran pasti

Program iuran pasti merupakan program imbalan pascakerja, dimana entitas membayar iuran tetap kepada suatu entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum ataupun konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Kewajiban untuk membayar iuran secara regular merupakan biaya imbalan kerja karyawan untuk periode dimana jasa diberikan oleh pekerja.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

These gains or losses in excess of the 10% threshold are amortized on a straight-line basis over the average of remaining working period of the employees estimates. Further, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Other long term employment benefits included the long services leave benefit which is determined in compliance with the Company's Regulation. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the year of employment, using the method which is applied in calculating obligation for post-employment benefits. These obligations are calculated on a minimum once a year by an independent actuary. Other long term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Defined contribution plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan in which the entity pays fixed contributions into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for the regular contributions constitute employee benefit costs for the period during which services are rendered by employees.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan

i) Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika dibolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.

Semua aset keuangan diakui pertama kali pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali apabila aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan Kelompok Usaha mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi jangka panjang dan aset tidak lancar lainnya diklasifikasikan sebagai "Pinjaman yang diberikan dan Piutang". Kelompok Usaha juga memiliki investasi jangka pendek yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi dan investasi jangka panjang yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- (a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi termasuk aset keuangan untuk dijual dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments

i) Financial assets

Initial recognition

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments and available-for-sale financial assets, as appropriate. The Company determines the classification of the financial assets upon initial recognition and, if allowed and appropriate, will re-evaluate this designation at the end of each financial year.

Financial assets are recognized initially at fair value plus direct attributable transaction costs, except if the financial assets are recorded at fair value through profit or loss.

The financial assets of the Company, which include cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenues, long-term investment and other non-current assets, are all classified as "Loans and Receivables". The Company also has short-term investments which are classified as financial assets measured at fair value through profits or losses and long-term investments which are classified as available-for-sale financial assets.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- (a) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)

- (a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi (lanjutan)

Aset derivatif diklasifikasikan sebagai kelompok untuk dijual kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan Kelompok Usaha pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui sebagai laba atau rugi.

Kelompok Usaha memiliki investasi jangka pendek dalam kategori ini.

- (b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuota di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan dan kerugian terkait diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

Kelompok Usaha memiliki kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset tidak lancar lainnya dalam kategori ini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

- (a) Financial assets at fair value through profit or loss (continued)

Derivative assets are classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit or loss are presented in the Company's statements of financial position at fair value with gains or losses recognized as profit or loss.

The Company has short-term investment classified under this category.

- (b) Loan and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or defined payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are recorded at amortized cost using the effective interest rate method, and gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

The Company has cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenue and other non-current assets are classified under this category.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i) Aset keuangan (lanjutan)

(c) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif akan direklasifikasi sebagai laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Perusahaan memiliki investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan saham - tersedia untuk dijual.

ii) Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi atau sebagai derivatif yang dirancang sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang lebih sesuai. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

i) Financial assets (continued)

**(c) Available-For-Sale ("AFS") financial
Assets**

AFS financial assets are nonderivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the three preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in the shareholders' equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in equity will be reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.

The Company has long-term investment in share of stock - available-for-sale.

ii) Financial liabilities

Initial recognition

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities at fair value through the profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of financial liabilities upon initial recognition. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, included direct attributable transaction costs.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha mencakup pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya, utang obligasi, utang bank serta liabilitas jangka panjang lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian harus diakui sebagai laba atau rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya.

iii) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

ii) Financial liabilities (continued)

Initial recognition (continued)

The financial liabilities of the Company, which include short-term bank loans, trade payables, accrued expenses, other current liabilities, bonds payable, bank loans and other long-term liabilities, are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Subsequent measurement

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Gains and losses are recognized as profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

iii) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a current enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

iv) Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tanpa adanya pengurangan atas biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar (*arm's-length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya.

v) Biaya perolehan yang diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan ini mencakup seluruh premi atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi serta komisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

vi) Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Kelompok Usaha terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

iv) Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined based on to quoted market prices or dealer price quotation (bid price for long position and ask price for short position), without any deduction for transaction costs. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques include recent arm's-length market transactions, referring to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flows analysis, or other valuation models.

v) Amortized cost of financial instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method deducted by allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

vi) Impairment of financial assets

At the end of each reporting period, the Company assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a company of financial assets is impaired.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Company initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**vi) Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)**

Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

**vi) Impairment of financial assets
(continued)**

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a company of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**vi) Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)**

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba atau rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan untuk pengukuran rugi penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Kelompok Usaha. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Pemulihan tidak akan menghasilkan nilai tercatat dari aset keuangan melebihi biaya perolehan yang diamortisasi, jika penurunan nilai tidak diakui pada saat penurunan nilai tersebut dipulihkan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

**vi) Impairment of financial assets
(continued)**

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized as profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Loans and receivables, together with the associated allowances, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Company. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial assets that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized as profit or loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

vii) Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (2) Kelompok Usaha memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a) Kelompok Usaha secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Kelompok Usaha secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

Apabila Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, atau tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Financial Instruments (continued)

vii) Derecognition of financial assets and liabilities

Financial assets

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a company of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired, or (2) the Company have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Where the Company has transferred their rights to receive cash flows from a financial asset or have entered into a pass-through arrangement, or has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset but has transferred control of the financial asset, a new financial asset is recognized to the extent of the Company's continuing involvement in the asset.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**vii) Penghentian pengakuan aset dan
liabilitas keuangan (lanjutan)**

Aset keuangan (lanjutan)

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Liabilitas keuangan

Dalam hal ini, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Kelompok Usaha yang ditahan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui sebagai laba atau rugi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

**vii) Derecognition of financial assets and
liabilities (continued)**

Financial assets (continued)

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Company could be required to repay.

Financial liabilities

In this case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed, and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized as profit or loss.

A financial liability is derecognized when the contractual obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized as profit or loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

v. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yaitu 1.444.029 saham.

w. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

x. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Item-item segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the income for the year attributable to the owners of the parent entity by the weighted-average number of shares outstanding during the year, which is 1,444,029 shares.

w. Provision

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

x. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products or services (business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-company balances and intra-company transactions are eliminated.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

y. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

z. Penerapan standar akuntansi baru

Efektif tanggal 1 Januari 2019, Kelompok Usaha menerapkan beberapa standar akuntansi baru yang relevan terhadap Kelompok Usaha berikut ini:

- Amandemen PSAK 24 (2018) - Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program.
- Penyesuaian 2018 PSAK 22 - Kombinasi Bisnis.
- Penyesuaian 2018 PSAK 26 - Biaya Pinjaman.
- Penyesuaian 2018 PSAK 46 - Pajak Penghasilan.
- Penyesuaian 2018 PSAK 66 - Pengaturan Bersama.
- ISAK 33 - Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka.
- ISAK 34 - Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan.
- Amandemen PSAK 15 - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

Penerapan ini tidak memberikan dampak yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

y. Impairment of Non-financial Assets

Company assesses at reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when impairment testing for an asset is required, Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

z. Adoption of new accounting standards

Effective January 1, 2019, the Company adopted several new accounting standards which are relevant to the Company as follows:

- Amendments to PSAK 24 (2018) - Employee Benefits on the Plan Amendment, Curtailment or Settlement.
- 2018 Improvement to PSAK 22 - Business Combinations.
- 2018 Improvement to PSAK 26 - Borrowing Costs.
- 2018 Improvement to PSAK 46 - Income Taxes.
- 2018 Improvement to PSAK 66 - Joint Arrangements.
- ISAK 33 - Foreign currency Transaction and Advance Consideration.
- ISAK 34 - Uncertainty over Income Tax Treatments.
- Amendments to PSAK 15 - Investments in Joint Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures.

The adoption has no significant impact on the financial reporting and disclosure in the consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif**

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

- PSAK 71: Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan PSAK 71 "Instrumen keuangan" yang secara efektif akan menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". PSAK 71 membahas klasifikasi, pengukuran dan penghentian pengakuan dari aset dan liabilitas keuangan, memperkenalkan aturan baru untuk akuntansi lindung nilai dan model penurunan nilai baru untuk aset keuangan. PSAK 71 berlaku efektif sejak 1 Januari 2020 dimana penerapan dini diperkenankan. Selain untuk akuntansi lindung nilai, penerapan standar ini harus dilakukan secara retrospektif dengan penyajian kembali informasi komparatif tidak diwajibkan.

Terkait dengan penurunan nilai untuk aset keuangan yang dimiliki oleh Kelompok Usaha, model penurunan nilai di dalam PSAK 71 mensyaratkan pengakuan atas provisi penurunan nilai berdasarkan kerugian kredit espektasian dibandingkan kerugian aktual kredit di dalam PSAK 55. Hal ini berlaku untuk aset keuangan diklasifikasi dalam biaya amortisasi, instrumen utang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya, kontrak aset dalam PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak Pelanggan", piutang sewa, komitmen pinjaman dan kontrak garansi keuangan tertentu. Kelompok Usaha masih dalam proses melakukan perhitungan dampak penyesuaian atas penurunan nilai. Kuantum atau besaran atas tambahan nilai penurunan nilai yang perlu dibukukan oleh Kelompok Usaha masih belum dapat ditentukan karena membutuhkan informasi yang mencukupi pada tanggal adopsi PSAK 71 di 1 Januari 2020.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective**

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current consolidated financial statements are disclosed below. Company intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

- PSAK 71: The Financial Accounting Standards Board has adopted PSAK 71 "Financial instruments" which will effectively replace PSAK 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement". PSAK 71 discusses the classification, measurement and derecognition of financial assets and liabilities, introducing new rules for hedge accounting and new impairment models for financial assets. PSAK 71 is effective since January 1, 2020 where early adoption is permitted. In addition to hedge accounting, the application of this standard must be done retrospectively with restatement of comparative information not required.

Regarding impairment for financial assets held by the Company, the impairment model in PSAK 71 requires recognition of the provision for impairment based on expected loan losses compared to actual credit losses in PSAK 55. This applies to financial assets classified as amortization costs, instruments debt is measured at fair value through other comprehensive income, asset contracts in PSAK 72 "Revenues from Customer Contracts", lease receivables, loan commitments and certain financial guarantee contracts. The Company is still in the process of calculating the effects of adjustments for impairment. The quantum or amount of additional impairment needed to be recorded by the Company cannot be determined yet because it requires sufficient information on the adoption date of PSAK 71 on 1 January 2020.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

Standar baru juga memperluas persyaratan pengungkapan dan perubahan penyajian. Hal ini diharapkan mengubah sifat dan batasan dari pengungkapan Kelompok Usaha tentang instrumen keuangan terutama pada tahun penerapan standar baru.

- PSAK 72: merupakan standar baru yang memberikan kerangka kerja yang komprehensif terkait dengan penentuan bagaimana pendapatan harus diakui, waktu pengakuan pendapatan, serta jumlah yang harus diakui oleh Kelompok Usaha. Standar ini memperkenalkan model tunggal yang digunakan dalam pencatatan pendapatan dengan pelanggan, disebut dengan model lima langkah (Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan, Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan, Menentukan Harga Transaksi, Alokasi Harga Transaksi, dan Pengakuan Pendapatan), yang harus diterapkan di seluruh kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memperkenalkan beberapa konsep baru seperti perlakuan akuntansi terkait kontrak modifikasi dan kapitalisasi biaya-biaya yang terkait dengan kontrak dengan pelanggan.

PSAK 72 secara efektif akan menggantikan seluruh standar terkait dengan pendapatan yang berlaku saat ini; yaitu PSAK 23 "Pendapatan", PSAK 34 "Kontrak konstruksi", PSAK 44 "Akuntansi aktivitas pengembangan real estate", dan ISAK 10 "Program loyalitas pelanggan". PSAK 72 akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

The new standard also expands disclosure requirements and changes in presentation. This is expected to change the nature and limits of the Company's disclosure of financial instruments, especially in the year of the adoption of new standards.

- PSAK 72: is a new standard that provides a comprehensive framework related to determining how revenue must be recognized, the timing of revenue recognition, and the amount that must be recognized by the Company. This standard introduces a single model used in recording revenue with customers, called the five-step model (Identification of Contracts with Customers, Identification of Implementation Obligations, Determining Transaction Prices, Transaction Price Allocations, and Revenue Recognition), which must be applied in all contracts with customers. This standard also introduces several new concepts such as accounting treatment related to contract modifications and capitalization of costs associated with contracts with customers.

PSAK 72 will effectively replace all standards relating to current income; namely PSAK 23 "Revenue", PSAK 34 "Contract construction", PSAK 44 "Accounting for real estate development activities", and ISAK 10 "Customer loyalty program". PSAK 72 will be effective as of January 1, 2020 with early application permitted.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

Terdapat dua alternatif metode yang dapat digunakan Kelompok Usaha dalam proses transisi PSAK 72. Metode yang pertama, standar diperkenankan secara retrospektif pada kontrak dengan pelanggan yang terdapat pada setiap periode yang disajikan dalam laporan keuangan. Metode yang kedua, Kelompok Usaha diperkenankan untuk menggunakan metode restrospektif modifikasian dimana PSAK 72 hanya akan diterapkan pada transaksi setelah 1 Januari 2020 dimana dampak kumulatif atas penerapan awal akan dibukukan sebagai penyesuaian saldo laba awal (atas komponen ekuitas lainnya, yang sesuai) per 1 Januari 2020.

Dalam tahap ini, Kuantum atau besaran dampak penyesuaian yang harus dibukukan oleh Kelompok Usaha masih belum dapat ditentukan. Kelompok Usaha akan melakukan peninjauan yang lebih mendalam atas dampaknya terhadap periode dua belas bulan ke depan.

- PSAK 73: memberikan model yang komprehensif dalam mengidentifikasi kontrak sewa serta perlakuan akuntansi atas transaksi sewa baik sebagai lessee ataupun lessor. PSAK 73 mengutamakan pentingnya pengendalian dalam identifikasi kontrak sewa dimana faktor yang membedakan kontrak sewa dan kontrak jasa tergantung pada pihak mana yang memiliki pengendalian atas aset identifikasian. Apabila pelanggan yang memiliki pengendalian atas aset identifikasian, kontrak tersebut memenuhi definisi sewa dalam PSAK 73.

PSAK 73 secara efektif akan menggantikan beberapa standar dan interpretasi, yaitu: PSAK 30 "Sewa", ISAK 8 "Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa", ISAK 23 "Sewa operasi-insentif", ISAK 24 "Evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa", dan ISAK 25 "Hak atas tanah". PSAK 73 akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini atas PSAK 73 diperkenankan selama Kelompok Usaha menerapkan PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan" pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 73.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

There are two alternative methods that the Company can use in the transition process of PSAK.72. The first method, the standard is allowed retrospectively on contracts with customers that exist in each period presented in the financial statements. The second method, the Company is permitted to use a retrospective modification method where PSAK.72 will only be applied to transactions after January 1, 2020 where the cumulative impact on initial adoption will be recorded as an adjustment to the initial profit balance (for other equity components, as appropriate) as of January 1, 2020.

At this stage, the Quantum or the magnitude of the impact of the adjustments that the Company must book is still undetermined. The Company will conduct a more in-depth review of its impact on the next twelve month period.

- PSAK 73: provides a comprehensive model for identifying lease contracts as well as accounting treatment of rental transactions as lessees or lessors. PSAK 73 emphasizes the importance of control in the identification of rental contracts where the factors that differentiate rental contracts and service contracts depend on which party has control over the identification assets. If the customer has control over the identification assets, the contract meets the rental definition in PSAK 73.
- PSAK 73 will effectively replace several standards and interpretations, namely: PSAK 30 "Leases", ISAK 8 "Determination of whether an agreement contains a lease", ISAK 23 "Operating-incentive leases", ISAK 24 "Evaluation of the substance of several transactions involving a legal form of lease ", and ISAK 25 " Land rights ". PSAK 73 will be effective as of January 1, 2020. Early application of PSAK 73 is permitted as long as the Company applies PSAK 72 "Revenue from contracts with customers" on or before the date of PSAK 73's initial adoption.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

Penerapan PSAK 73 akan berdampak pada hampir seluruh sewa yang diakui di laporan posisi keuangan, dimana standar ini menghapuskan perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan. Beban sewa operasi dalam PSAK 73, akan dikapitalisasi sebagai aset (atau hak guna atas barang yang disewakan) dan liabilitas keuangan yang menggambarkan komitmen pembayaran sewa di masa depan setelah mempertimbangkan dampak diskonto dan panduan praktis yang akan digunakan oleh Kelompok Usaha. Pengecualian atas perlakuan tersebut hanya terdapat pada sewa jangka pendek dan aset yang bernilai rendah. Lessee diharuskan untuk mengakui dan menyajikan secara terpisah biaya bunga yang muncul dari kewajiban sewa dengan biaya depresiasi dari hak guna atas barang yang disewakan.

Perlakuan akuntansi untuk lessor tidak akan berbeda secara signifikan.

Dalam tahap ini, kuantum atau besaran dampak penyesuaian yang harus dibukukan oleh Kelompok Usaha masih belum dapat ditentukan. Kelompok Usaha akan melakukan peninjauan yang lebih mendalam atas dampaknya terhadap periode dua belas bulan ke depan.

- Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif yang mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga.
- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan yang mengklarifikasi definisi materi dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

The adoption of PSAK 73 will have an impact on almost all leases recognized in the statement of financial position, where this standard eliminates the difference between operating leases and financing. Operating lease costs in PSAK 73, will be capitalized as assets (or use rights for leased goods) and financial liabilities that reflect future rental payment commitments after considering the impact of discounts and practical guidelines to be used by the Company. Exceptions to this treatment are only for short-term leases and low-value assets. The lessee is required to recognize and present separately the interest expense arising from the lease obligation with the depreciation expense of the leasehold rights.

The accounting treatment for the lessor will not differ significantly.

At this stage, the quantum or magnitude of the impact of the adjustments that the Company must book is not yet determined. The Company will conduct a more in-depth review of its impact on the next twelve month period.

- Amendments to PSAK 71: Financial Instruments concerning the Accelerated Features of Repayment with Negative Compensation which regulates that financial assets with an accelerated repayment feature that can produce negative compensation meet the qualifications as contractual cash flows originating solely from principal and interest payments.
- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements and PSAK 25: Accounting Policies, Changes in accounting estimates and errors that clarify material definitions with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and several related PSAKs.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain.

Estimasi dan asumsi tersebut dibuat berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi sebagian besar pendapatan, biaya dan pendanaan masing-masing entitas.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (2014) dipenuhi. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti dijelaskan pada Catatan 2u.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgements and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources.

These estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgements and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

Judgements

The following judgements are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements.

Determination of functional currency

The functional currency of each entity within the Company is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that mainly influence the revenues, costs and financing of each of the respective entities.

Classification of financial assets and financial liabilities

Classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with accounting policies disclosed in Note 2u.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Penyisihan penurunan nilai piutang

Kelompok Usaha mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan, kualitas jaminan yang diterima dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang.

Bila Kelompok Usaha memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Kelompok Usaha menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 6.

Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

The allowance of impairment of receivables

The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company use judgement, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer, quality of collateral received and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company expect to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.

If the Company determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, it includes the asset in a company of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for companys of such trade receivables by being indicative of the customers' ability to pay all amounts due.

Future cash flows in a company of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for the trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the company. Further details are disclosed in Note 6.

Service concession arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

OP memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak OP dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku (Catatan 45a). Pada akhir masa konsesi jasa, Kelompok Usaha harus menyerahkan terminal Kalibaru kepada OP bebas dari setiap bentuk pembebanan, termasuk tanah reklamasi, aset tidak bergerak dan aset bergerak yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian terminal Kalibaru.

Kelompok Usaha berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

Kelompok Usaha diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Kelompok Usaha mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi masing-masing sebesar Rp1.542.697.617 dan Rp715.708.838.

Kelompok Usaha mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 34. Kelompok Usaha mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima tanpa margin.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Service concession arrangement (continued)

OP granted the rights to the Company, including the right to implement the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of implementing the project without limiting the right of OP in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law (Note 45a). Upon expiry of the service concession period, the Company shall handover the Kalibaru Terminal free of any form of charges, including reclamation land, non-removable assets and movable assets therein directly related to, and in connection with, the operation of the Kalibaru Terminal.

The Company has made judgement that the Concession Agreement qualifies under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

The Company is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. For the years ended December 31, 2019 and 2018, the Company recognized construction revenue amounting to Rp1,542,697,617 and Rp715,708,838, respectively.

The Company recognizes construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK 34. The Company measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received without margin.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 43.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Kelompok Usaha diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 21. Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Fair value of financial assets and financial liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation methods used.

The fair value of financial assets and financial liabilities is disclosed in Note 43.

Estimate useful lives of fixed assets

The useful life of each of the item of the Company's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

Estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 21. There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the year.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Kelompok Usaha.

Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2k, 2l, 12, 13, 14, 15 dan 16.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan dalam kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 22.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba fiskal pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2s dan 22.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

Further details are disclosed in Notes 2k, 2l, 12, 13, 14, 15 and 16.

Income tax

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of taxable income. Further details are disclosed in Note 22.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 2s and 22.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan kerja karyawan

Penentuan provisi dan liabilitas imbalan kerja karyawan dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebesar Rp1.966.325.908 dan Rp1.776.917.294 (Catatan 27).

4. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Kas	4.797.709	2.637.178
Bank	1.169.594.929	3.399.196.648
Deposito berjangka	14.429.140.691	14.616.837.653
Total kas dan setara kas	15.603.533.329	18.018.671.479

a. Kas

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Rupiah	4.797.709	2.637.178

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Employee benefits

The determination of the employee benefits provision and liability is dependent on the selection of certain assumptions used by an actuary in calculating such amounts. Actual results that differ from the Management's assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the management's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of employee benefits liability. As of December 31, 2019 and 2018, employee benefits liability amounted to Rp1,966,325,908 and Rp1,776,917,294 (Note 27).

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Total cash and cash equivalents

a. Cash on hand

Rupiah

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

b. Bank

b. Cash in banks

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah:			Rupiah:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	100.090.077	353.646.552	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Tbk	21.429.637	156.706.420	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	3.771.120	120.164.092	PT Bank Central Asia Tbk
PT DBS Indonesia	1.321.841	4.192.132	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Victoria International Tbk	172.878	10.813.821	PT Bank Victoria International Tbk
Lain-lain			
(masing-masing dibawah Rp2 miliar)	5.523.679	19.326.945	Others (each below Rp2 billion)
Pihak berelasi (Catatan 41a)			Related parties (Note 41a)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	516.127.675	873.774.196	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	140.963.425	767.519.280	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	19.976.271	32.711.087	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	10.386.922	2.814.711	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BNI Syariah	9.671.050	7.222.415	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.244.179	802.805.464	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Subtotal	830.678.754	3.151.697.115	Sub-total
Dolar AS:			US Dollar:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	37.105.758	169.057.553	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	24.681.736	5.589.763	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	15.750.732	1.165.193	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	4.226.276	4.333.711	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	2.817.266	2.918.130	PT Bank Permata Tbk
Lain-lain			
(masing-masing dibawah Rp2 miliar)	91.019	219.330	Others (each below Rp2 billion)
Pihak berelasi (Catatan 41a)			Related parties (Note 41a)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	193.637.340	15.766.760	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	36.287.523	40.066.025	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	24.318.481	8.062.416	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Subtotal	338.916.131	247.178.881	Sub-total
Euro Eropa:			European Euro:
Pihak berelasi (Catatan 41a)			Related parties (Note 41a)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	44	320.652	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total bank	1.169.594.929	3.399.196.648	Total cash in banks

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

c. Deposito berjangka

c. Time deposits

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah:			Rupiah:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Bukopin Tbk	370.200.000	65.670.648	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	200.000.000	100.000.000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank UOB Indonesia Tbk	35.596.970	-	PT Bank UOB Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	31.682.478	37.200.337	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Mega Tbk	26.011.830	2.578.052	PT Bank Mega Tbk
PT Bank J Trust Indonesia	5.000.000	-	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.000.000	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank BCA Syariah	2.000.000	2.000.000	PT Bank BCA Syariah
PT Bank CIMB Niaga Syariah	-	50.000.000	PT Bank CIMB Niaga Syariah
PT Bank Victoria International Tbk	-	4.000.000	PT Bank Victoria International Tbk
Pihak berelasi (Catatan 41a)			Related parties (Note 41a)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.073.096.983	854.768.648	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	583.240.758	930.074.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	548.297.580	557.631.769	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	275.290.490	25.000.000	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	131.816.463	10.535.860	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	19.500.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
Subtotal	3.304.733.552	2.639.459.314	Sub-total
Dolar AS:			US Dollar:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Central Asia Tbk	5.605.624	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	1.785.869.325	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia	-	1.013.670.000	PT Bank Maybank Indonesia
Pihak berelasi (Catatan 41a)			Related parties (Note 41a)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.144.937.050	3.673.467.675	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.906.696.846	5.032.416.814	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	67.167.619	-	PT Mandiri (Persero) Tbk
Subtotal	11.124.407.139	11.505.423.814	Sub-total
Dolar Singapura:			Singapore Dollar:
Pihak berelasi (Catatan 41a)			Related parties (Note 41a)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	471.954.525	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total deposito berjangka	14.429.140.691	14.616.837.653	Total time deposits

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

c. Time deposits (continued)

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2019	2018
Rupiah	5,00% - 9,00%	4,00% - 9,50%
Dolar AS	1,35% - 3,55%	1,25% - 3,70%
Dolar Singapura	-	1,60%

Rupiah
US Dollar
Singapore Dollar

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

31 Desember/December 31,

	2019	2018
Deposito berjangka		
Rupiah:		
Pihak ketiga		
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga	-	17.000.000
PT Bank Panin Syariah	-	2.000.000
Pihak berelasi (Catatan 41b)		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	104.642.400	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	372.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	-	50.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	203.053.994
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	4.000.000
Dolar AS:		
Pihak berelasi (Catatan 41b)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.154.655.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	2.099.745.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	796.455.000
Total deposito berjangka	2.259.297.400	3.544.253.994
Efek yang diperdagangkan	337.403.726	291.753.295
Total investasi jangka pendek	2.596.701.126	3.836.007.289

5. SHORT-TERM INVESTMENTS

Time deposits
Rupiah:
Third parties
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
PT Bank Panin Syariah
Related parties (Note 41b)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
US Dollar:
Related parties (Note 41b)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total time deposits
Marketable securities
Total short-term investments

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

5. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan)

Deposito berjangka merupakan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta tidak dijadikan jaminan.

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2019	2018
Rupiah	7.5%	4,44% - 9,25%
Dolar AS	3.7%	3,00% - 3,50%

Efek yang diperdagangkan merupakan instrumen keuangan dalam bentuk saham yang dibeli melalui PT Syailendra Capital dan PT Sinarmas Asset Management, manajer investasi.

5. SHORT-TERM INVESTMENTS (continued)

Time deposits represent deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year and were not used as collateral.

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2019	2018
Rupiah	7.5%	4,44% - 9,25%
US Dollar	3.7%	3,00% - 3,50%

Marketable securities represent financial instrument in shares of stock purchased through PT Syailendra Capital and PT Sinarmas Asset Management, investment manager.

6. PIUTANG USAHA

a. Berdasarkan pelanggan

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Pihak ketiga Swasta	909.768.844	945.087.249
Perorangan	5.430.314	5.604.648
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(202.372.414)	(316.613.865)
Pihak ketiga - neto	712.826.744	634.078.032
Pihak berelasi (Catatan 41c)	345.392.417	210.172.437
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(210.193.679)	(54.297.115)
Pihak berelasi - neto	135.198.738	155.875.322
Piutang usaha - neto	848.025.482	789.953.354

6. TRADE RECEIVABLES

a. By customer

Third parties Private Individuals
Less: Allowance for impairment
Third parties - net
Related parties (Note 41c)
Less: Allowance for impairment
Related parties - net
Trade receivables - net

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah	1.205.344.597	1.036.949.327	Rupiah
Dolar AS	55.168.076	91.475.032	US Dollar
Dolar Singapura	78.902	32.439.975	Singapore Dollar
Total	1.260.591.575	1.160.864.334	Total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(412.566.093)	(370.910.980)	Allowance for impairment
Neto	848.025.482	789.953.354	Net

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

b. By currency

c. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

c. The movements in the allowance for impairment of receivables is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Saldo awal	370.910.980	376.788.230	Beginning balance
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	41.655.113	(5.877.250)	Provision (recovery) for the year
Saldo akhir	412.566.093	370.910.980	Ending balance

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on a review of the status of each individual receivable accounts at the end of the reporting period, the Company's management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

Tabel berikut menyajikan analisis umur piutang usaha.

The following table presents the aging analysis of trade receivables.

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Belum jatuh tempo	255.115.082	186.544.320	Not yet overdue
Lewat jatuh tempo			Overdue
1-30 hari	255.538.660	185.984.771	1-30 days
31-60 hari	111.820.153	147.141.362	31-60 days
61-150 hari	102.438.411	71.231.027	61-150 days
Lebih dari 150 hari	535.679.269	569.962.854	Over 150 days
Saldo awal	1.260.591.575	1.160.864.334	Beginning balance
Penyisihan penurunan nilai	(412.566.093)	(370.910.980)	Allowance for impairment
Neto	848.025.482	789.953.354	Net

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

7. PIUTANG LAIN-LAIN

7. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak ketiga			Third parties
Swasta	70.235.566	40.109.643	Private
Perorangan	5.414.839	943.136	Individuals
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(30.532.427)	(31.522.696)	Allowance for impairment
Pihak ketiga - neto	45.117.978	9.530.083	Third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 41d)	821.218.704	672.932.848	Related parties (Note 41d)
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(36.267.285)	(32.764.117)	Allowance for impairment
Pihak berelasi - neto	784.951.419	640.168.731	Related parties - net
Piutang lain-lain - neto	830.069.397	649.698.814	Other receivables - net

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

The movement in the allowance for impairment of other receivable are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Saldo awal	64.286.813	61.770.315	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	2.512.899	2.516.498	Provision for the year
Saldo akhir	66.799.712	64.286.813	Ending balance

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan masing-masing piutang pada akhir periode pelaporan, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Based on review of the status of each individual other receivable accounts at the end of the reporting period, the Company's management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

8. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Uang muka			Advances
Operasional	7.033.421	8.921.964	Operational
Lain-lain	892.674	13.268.042	Others
Subtotal	7.926.095	22.190.006	Sub-total
Beban dibayar di muka			Prepaid expenses
Pegawai	47.700.658	41.911.549	Personnel
Asuransi	9.782.442	12.918.214	Insurance
Umum	5.510.554	17.783.362	General
Sewa	5.102.500	7.063.765	Rental
Lain-lain	28.159.732	18.201.282	Others
Subtotal	96.255.886	97.878.172	Sub-total
Total	104.181.981	120.068.178	Total

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, terdapat uang muka operasional yang telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perusahaan namun belum dilakukan pertanggungjawaban masing-masing sebesar Rp712.249 dan Rp13.561.377.

As of December 31, 2019 and 2018, there are advances for operational which has been charged to the Company's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income but has not been accounted amounted to Rp712,249 and Rp13,561,377.

9. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

9. ACCRUED REVENUES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak ketiga			Third parties
Pelayanan tanah, bangunan, air, dan listrik	80.411.283	10.743.824	Land, building, water and electrical services
Pelayanan jasa terminal	60.541.624	120.261.350	Terminal services
Jasa logistik	21.524.157	33.526.077	Logistic services
Pelayanan jasa kapal	12.269.114	9.976.452	Vessel services
Pelayanan kesehatan	9.906.869	22.659.882	Medical services
Pelayanan terminal petikemas	6.653.533	17.255.930	Container terminal services
Pelayanan jasa barang	3.979.721	10.353.249	Cargo services
Pengusahaan peralatan	2.720.876	21.608.684	Equipment services
Lain-lain	60.858.686	10.528.815	Others
Subtotal	258.865.863	256.914.263	Sub-total
Pihak berelasi (Catatan 41e)	46.586.491	65.953.809	Related parties (Note 41e)
Total	305.452.354	322.868.072	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

10. PERSEDIAAN

10. INVENTORIES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Suku cadang	50.398.366	46.300.884	Spareparts
Bahan bakar	16.203.938	1.866.460	Fuels
Obat, bahan, dan alat medis	10.924.650	13.236.622	Medicines, materials and equipment
Alat tulis dan barang cetakan	1.009.483	1.706.454	Stationaries and printings
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	8.580.437	949.230	Others (each below Rp1 billion)
Total	87.116.874	64.059.650	Total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan persediaan usang	(4.176.278)	(4.920.226)	Allowance for inventory obsolescence
Neto	82.940.596	59.139.424	Net

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movements are the allowance for inventory obsolescence is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Saldo awal	4.920.226	3.911.120	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	(710.590)	797.211	Provision for the year
Efek penjabaran mata uang asing	(33.358)	211.895	Effect of foreign exchange translation
Saldo akhir	4.176.278	4.920.226	Ending balance

11. INVESTASI JANGKA PANJANG

11. LONG-TERM INVESTMENT

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Investasi pada entitas asosiasi	2.757.291.330	2.362.825.278	Investment in associates
Investasi pada penyertaan saham	50.906.100	524.362.036	Investment in share of stocks
Investasi pada surat utang	402.826.170	324.550.117	Investment in bonds
Total	3.211.023.600	3.211.737.431	Total

a. Investasi pada entitas asosiasi

a. Investment in associates

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
JICT (Catatan 46b, 46c, 46d dan 46e)	1.802.286.963	1.631.969.829	JICT (Notes 46b, 46c, 46d and 46e)
CTP	584.174.631	448.806.191	CTP
NPCT1 (Catatan 45d)	337.706.705	248.748.056	NPCT1 (Notes 45d)
TPI	33.123.031	33.301.202	TPI
Total	2.757.291.330	2.362.825.278	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

11. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2019

	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value
Metode ekuitas					
Dimiliki melalui Perusahaan					
JICT	48,90%	108.289.248	1.113.555.444	580.442.271	1.802.286.963
TPI	25,00%	37.500.000	(4.376.969)	-	33.123.031
Dimiliki melalui API					
CTP	45,00%	436.255.820	147.918.811	-	584.174.631
Dimiliki melalui IPC TPK					
NPCT1	51,00%	173.770.056	141.558.496	22.378.153	337.706.705
Total		755.815.124	1.398.655.782	602.820.424	2.757.291.330

Equity method

Owned through the Company

JICT

TPI

Owned through API

CTP

Owned through IPC TPK

NPCT1

Total

31 Desember/December 31, 2018

	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value
Metode ekuitas					
Dimiliki melalui Perusahaan					
JICT	48,90%	108.289.248	1.098.225.725	425.454.856	1.631.969.829
TPI	25,00%	37.500.000	(4.198.798)	-	33.301.202
Dimiliki melalui API					
CTP	45,00%	436.255.820	12.550.371	-	448.806.191
Dimiliki melalui IPC TPK					
NPCT1	51,00%	173.770.056	41.145.336	33.832.664	248.748.056
Total		755.815.124	1.147.722.634	459.287.520	2.362.825.278

Equity method

Owned through the Company

JICT

TPI

Owned through API

CTP

Owned through IPC TPK

NPCT1

Total

b. Investasi pada penyertaan saham

b. Investment in share of stock

31 Desember/December 31,

	2019	2018	
Metode biaya			
PT Djakarta Lloyd	20.628.000	20.628.000	PT Djakarta Lloyd
PT Astra International Tbk	17.312.500	5.481.140	PT Astra International Tbk
PT Bukit Asam Tbk	5.320.000	-	PT Bukit Asam Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.102.500	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT United Tractors Tbk	-	26.286.085	PT United Tractors Tbk
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	-	17.212.965	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	-	13.495.422	PT Vale Indonesia Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	-	11.497.500	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT XL Axiata Tbk	-	10.185.318	PT XL Axiata Tbk
PT Adaro Energy Tbk	-	7.310.655	PT Adaro Energy Tbk
PT Holcim Indonesia Tbk	-	6.286.098	PT Holcim Indonesia Tbk
PT Delta Dunia Makmur Tbk	-	5.172.300	PT Delta Dunia Makmur Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	-	2.868.177	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	-	2.664.000	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2.343.132	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	2.543.100	392.931.244	Others (each below Rp2 billion)
Total	50.906.100	524.362.036	Total

Cost method

PT Djakarta Lloyd

PT Astra International Tbk

PT Bukit Asam Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT United Tractors Tbk

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

PT Vale Indonesia Tbk

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

PT XL Axiata Tbk

PT Adaro Energy Tbk

PT Holcim Indonesia Tbk

PT Delta Dunia Makmur Tbk

PT Bumi Serpong Damai Tbk

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Others (each below Rp2 billion)

Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

11. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Investasi pada surat utang

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	97.074.515	95.000.000
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	51.367.050	20.000.000
PT Medco Power Indonesia	50.432.290	86.700.775
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	50.000.000	-
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	-	50.000.000
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	22.940.425
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	153.952.315	49.908.917
Total	402.826.170	324.550.117

11. LONG-TERM INVESTMENT (continued)

c. Investment in bonds

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
PT Medco Power Indonesia
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Others (each below Rp2 billion)

12. PROPERTI INVESTASI

	31 Desember/ December 31, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2019	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	45.011.598	-	-	(8.741)	45.002.857	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	652.779.657	-	-	(8.745.024)	644.034.633	Port facilities
Jalan dan bangunan	12.799.354	-	-	8.745.024	21.545.378	Roads and buildings
Total	710.590.609	-	-	(8.741)	710.582.868	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(326.645.743)	(19.356.777)	-	-	(346.002.520)	Port facilities
Jalan dan bangunan	(6.802.419)	(482.442)	-	-	(7.284.861)	Roads and buildings
Total	(333.448.162)	(19.839.219)	-	-	(353.287.381)	Total
Nilai buku neto	377.142.447				357.295.487	Net book value
	31 Desember/ December 31, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2018	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	45.011.598	-	-	-	45.011.598	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	650.817.393	-	-	1.962.264	652.779.657	Port facilities
Jalan dan bangunan	14.761.618	-	-	(1.962.264)	12.799.354	Roads and buildings
Total	710.590.609	-	-	-	710.590.609	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(305.962.211)	(11.458.812)	-	(9.224.720)	(326.645.743)	Port facilities
Jalan dan bangunan	(10.286.378)	(5.740.761)	-	9.224.720	(6.802.419)	Roads and buildings
Total	(316.248.589)	(17.199.573)	-	-	(333.448.162)	Total
Nilai buku neto	394.342.020				377.142.447	Net book value

Beban penyusutan properti investasi dicatat sebagai bagian dari beban operasi.

Nilai wajar properti investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp11.139.878.868 dan Rp10.035.926.908.

Depreciation expenses of investment properties are recorded as part of operating expenses.

The fair value of investment properties for the years ended December 31, 2019 and 2018 are calculated amounting to Rp11,139,878,868 and Rp10,035,926,908, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP

	31 Desember/ December 31, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2019	
Harga perolehan						Acquisition Costs
Tanah	2.253.903.307	86.852.116	-	155.037	2.340.910.460	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	5.666.729.950	79.842.388	(6.375.332)	35.513.194	5.775.710.200	Port facilities
Kapal	1.694.204.431	87.903.071	(41.781.018)	-	1.740.326.484	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	2.611.900.537	96.315.481	(13.632.860)	60.902.462	2.755.485.620	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	966.492.385	44.202.013	(8.879.365)	30.278.251	1.032.093.284	Port installation
Jalan dan bangunan	1.990.567.548	176.810.615	(87.096.359)	5.201.742	2.085.483.546	Roads and buildings
Peralatan	597.516.344	82.825.244	(3.103.305)	6.557.597	683.795.880	Equipment
Kendaraan	65.026.632	1.018.860	(1.602.507)	17.490	64.460.475	Vehicles
Emplasemen	40.000.139	2.392.134	(992.930)	2.346.609	43.745.952	Emplacement
Subtotal	15.886.341.273	658.161.922	(163.463.676)	140.972.382	16.522.011.901	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	1.272.325.406	700.684.387	-	(148.907.651)	1.824.102.142	Construction in progress
Total	17.158.666.679	1.358.846.309	(163.463.676)	(7.935.269)	18.346.114.043	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(1.292.154.461)	(68.788.295)	3.201.448	-	(1.357.741.308)	Port facilities
Kapal	(788.510.726)	(94.748.495)	41.458.150	-	(841.801.071)	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	(1.238.381.952)	(163.821.487)	13.069.045	-	(1.389.134.394)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(272.636.901)	(46.353.394)	4.260.440	-	(314.729.855)	Port installation
Jalan dan bangunan	(458.559.758)	(80.605.817)	24.396.387	-	(514.769.188)	Roads and buildings
Peralatan	(393.657.642)	(61.263.926)	3.041.239	-	(451.880.329)	Equipment
Kendaraan	(38.710.021)	(3.158.102)	1.015.071	-	(40.853.052)	Vehicles
Emplasemen	(19.154.801)	(3.056.148)	992.930	-	(21.218.019)	Emplacement
Total	(4.501.766.262)	(521.795.664)	91.434.710	-	(4.932.127.216)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(27.902.984)	1.071.992	-	-	(26.830.992)	Less: Allowance for impairment
Nilai buku neto	12.628.997.433				13.387.155.835	Net book value

13. FIXED ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2018	
Harga perolehan						Acquisition Costs
Tanah	1.728.032.428	525.870.879	-	-	2.253.903.307	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	5.453.147.825	47.440.586	-	166.141.539	5.666.729.950	Port facilities
Kapal	1.577.588.016	114.057.373	(565.745)	3.124.787	1.694.204.431	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	2.586.792.790	16.245.067	(7.594.413)	16.457.093	2.611.900.537	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	848.367.746	11.669.632	(218.293)	106.673.300	966.492.385	Port installation
Jalan dan bangunan	1.906.437.903	21.597.414	(45.223)	62.577.454	1.990.567.548	Roads and buildings
Peralatan	562.978.254	46.723.014	-	(12.184.924)	597.516.344	Equipment
Kendaraan	72.079.786	770.745	(1.397.179)	(6.426.720)	65.026.632	Vehicles
Emplasemen	38.245.826	1.716.105	-	38.208	40.000.139	Emplacement
Subtotal	14.773.670.574	786.090.815	(9.820.853)	336.400.737	15.886.341.273	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	538.543.736	1.075.058.340	-	(341.276.670)	1.272.325.406	Construction in progress
Total	15.312.214.310	1.861.149.155	(9.820.853)	(4.875.933)	17.158.666.679	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(1.177.445.767)	(112.744.121)	-	(1.964.573)	(1.292.154.461)	Port facilities
Kapal	(700.135.110)	(89.736.742)	1.693.268	(332.142)	(788.510.726)	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	(1.077.698.551)	(167.739.169)	7.991.198	(935.430)	(1.238.381.952)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(176.170.561)	(97.020.040)	487.073	66.627	(272.636.901)	Port installation
Jalan dan bangunan	(388.168.692)	(73.417.432)	3.710.170	(683.804)	(458.559.758)	Roads and buildings
Peralatan	(389.480.308)	(3.158.773)	-	(1.018.561)	(393.657.642)	Equipment
Kendaraan	(41.378.812)	(3.632.369)	1.111.137	5.190.023	(38.710.021)	Vehicles
Emplasemen	(16.821.231)	(2.011.430)	-	(322.140)	(19.154.801)	Emplacement
Total	(3.967.299.032)	(549.460.076)	14.992.846	-	(4.501.766.262)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(19.064.682)	(8.838.302)	-	-	(27.902.984)	Less: Allowance for impairment
Nilai buku neto	11.325.850.596				12.628.997.433	Net book value

Beban penyusutan aset tetap dicatat sebagai bagian dari beban operasi.

Depreciation expense of fixed assets are recorded as part of operating expenses.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Kelompok Usaha mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Bina Dana Arta, PT Asuransi FPG Indonesia, Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Ramayana Unit Syariah, PT Asuransi Ramayana, PT Fistlight Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Jasindo, MS Amlin, dan Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association dengan total nilai pertanggungan seluruhnya masing-masing sebesar Rp6.125.510.242 dan USD571.000.000 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp7.061.715.528 dan USD565.000.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

Reklasifikasi pada tahun 2019 termasuk reklasifikasi dari akun aset tetap ke akun aset kerjasama operasi dengan nilai perolehan sebesar Rp7.944.010, serta reklasifikasi akun aset properti investasi menjadi akun aset tetap sebesar Rp8.741.

Reklasifikasi pada tahun 2018 termasuk reklasifikasi dari akun aset tetap ke akun aset kerjasama operasi dengan nilai perolehan sebesar Rp4.562.783, serta reklasifikasi akun aset dalam penyelesaian menjadi akun aset takberwujud hak konsesi sebesar Rp313.150.

Penghapusan Aset Tetap

Perusahaan

Pada tahun 2019, Perusahaan menghapusbukan beberapa aset tetap dan telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN berdasarkan surat No. S-69.MBU/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, S-647/MBU/11/2017 tanggal 14 November 2017, S-36/MBU/01/2018 tanggal 16 Januari 2016, S-712/MBU/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018, dan S-536/MBU/09/2016 tanggal 8 September 2016.

Total harga perolehan aset tetap yang dihapuskan pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp113.747.216 dan Rp2.396.484 dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp72.028.966 dan Rp183.492.

13. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2019 and 2018, the Company insured its fixed assets against losses from fire and other insurable risks to PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Bina Dana Arta, PT Asuransi FPG Indonesia, Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Ramayana Unit Syariah, PT Asuransi Ramayana, PT Fistlight Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Jasindo, MS Amlin, and Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association with total insurance coverage amounting to Rp6,125,510,242 and USD571,000,000 as of December 31, 2019 and Rp7,061,715,528 and USD565,000,000 as of December 31, 2018. In management's opinion, the above insurance coverage is adequate to cover any possible losses that may arise from such risks.

Reclassification in 2019 included reclassification from fixed assets to joint operation assets amounted to Rp7,944,010, and reclassification of investment properties to fixed assets amounting to Rp8,741.

Reclassification in 2018 included reclassification from fixed assets to joint operation assets amounted to Rp4,562,783, and reclassification of assets under construction to concession rights assets on intangible assets amounting to Rp313,150.

Write-off of Fixed Assets

The Company

In 2019, the Company has written-off certain fixed assets and has been approved by the Minister of State Owned Enterprises based on letter No. S-69.MBU/02/2018 dated February 1, 2018, S-647/MBU/11/2017 dated November 14 2017, S-36/MBU/01/2018 dated January 16, 2016, S-712/MBU/10/2018 dated October 24, 2018, and S-536/MBU/09/2016 dated September 8, 2016.

Total acquisition cost of fixed assets written-off in 2019 and 2018 amounting to Rp113,747,216 and Rp2,396,484 respectively, with book value amounting to Rp72,028,966 and Rp183,492 respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Penghapusan Aset Tetap (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Atas penghapusan dan penjualan aset tetap yang telah dilakukan di 2019, Perusahaan mencatat rugi penjualan aset tetap sebesar Rp979.810 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian.

Rukindo

Berdasarkan keputusan pemegang saham tanpa melalui RUPS tanggal 16 Oktober 2019, Rukindo melakukan penghapusbukuan dan penjualan aset tetap berupa tiga kapal tidak produktif (Halmahera, KKC Tondano, dan KKC Danau Laut Tawar).

Total harga perolehan aset tetap yang dihapuskan pada tahun 2019 sebesar Rp41.145.060 dengan nilai buku sebesar nihil.

Berdasarkan risalah lelang tanggal 19 November 2019 dijelaskan bahwa Rukindo melelang aset tersebut pada tahun 2019 dan mencatat laba atas penjualan aset tetap sebesar Rp9.189.851 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian.

RSP

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 21 Oktober 2019, RSP menyetujui untuk menghapusbukukan aset tetap tertentu yaitu bangunan gedung Rumah Sakit di Boom Baru beserta emplasemennya.

Total harga perolehan aset tetap yang dihapuskan pada tahun 2019 sebesar Rp7.877.020 dengan nilai buku sebesar Rp5.835.381.

Aset tetap tersebut dirubuhkan dan tidak dijual oleh RSP. Atas penghapusan aset tersebut, RSP mencatat kerugian sebesar Rp5.835.381 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

13. FIXED ASSETS (continued)

Write-off of Fixed Assets (continued)

The Company (continued)

Due to write-off and sales of fixed asset which were already performed in 2019, the Company recorded gain on sale of fixed assets amounting to Rp979,810 on consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Rukindo

Based on the shareholders' decision without going through RUPS dated October 16, 2019, Rukindo carried out write off and sales of fixed assets in the form of three unproductive vessels (Halmahera, KKC Tondano, and KKC Danau Laut Tawar).

Total acquisition cost of fixed assets written-off in 2019 amounting to Rp41,145,060, with book value amounting to nil.

Based on the minutes of auction dated November 19, 2019 explained that Rukindo auctioned the assets in 2019 and recorded a gain on sales of fixed assets of Rp9,189,851 in the consolidated statement of profit or loss and comprehensive income.

RSP

Based on Shareholders Decision dated October 21, 2019, RSP agreed to write off certain fixed assets, i.e. named Hospital in Boom Baru, Palembang and its emplacements.

Total acquisition cost of fixed assets written-off in 2019 amounting to Rp7,877,020, with book value amounting to Rp5,835,381.

The fixed assets were demolished and not sold by RSP. Due to write-off of the fixed asset, RSP recorded loss amounting Rp5,835,381 on consolidated statement of profit loss and other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Penghapusan Aset Tetap (lanjutan)

MTI

Berdasarkan RUPS Sirkuler tanggal 29 April 2019, MTI menghapusbukkan aset tetap tertentu yaitu mobil operasional, *top loader*, *bucket steel medium*, *grabe clamshell*, *conveyor part*, potongan besi, tangga besi, dan *workshop*.

Total harga perolehan aset tetap yang dihapuskan pada tahun 2019 sebesar Rp694.380 dengan nilai buku sebesar Rp212.110.

MTI melelang aset tersebut di tahun 2019 dan mencatat laba penjualan aset tetap sebesar Rp178.734 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian.

Aset dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Bangunan fasilitas pelabuhan	787.031.669	710.107.751
Peralatan	335.905.514	199.706.147
Alat fasilitas pelabuhan	92.417.481	146.352.194
Instalasi fasilitas pelabuhan	6.658.141	95.081.015
Jalan dan bangunan	448.717.217	89.772.941
Emplasemen	2.556.973	2.385.002
Kapal	150.815.147	28.920.356
Total	1.824.102.142	1.272.325.406

Biaya perolehan aset dalam penyelesaian tersebut di atas termasuk beban pinjaman yang dikapitalisasi sebesar Rp6.175.405 dan Rp5.734.460 masing-masing pada tahun 2019 dan 2018.

13. FIXED ASSETS (continued)

Write-off of Fixed Assets (continued)

MTI

Based on RUPS Circular dated April 29, 2019, MTI has written-off certain fixed assets, namely operational cars, *top loader*, *medium bucket steel*, *clamshell grab*, *conveyor part*, *scrap of iron*, *iron ladder*, and *workshop*.

Total acquisition cost of fixed assets written-off in 2019 amounting to Rp694,380 with book value amounting to Rp212,110.

MTI auctioned the goods in 2019 and recorded gain on sale of fixed assets amounting to Rp178,734 on consolidated statement of profit loss and other comprehensive income.

Construction in Progress

Construction in progress consists of:

Port facilities
Equipment
Port equipment
Port installation
Roads and buildings
Emplacement
Vessels
Total

Cost of construction in progress includes capitalized borrowing cost amounting to Rp6,175,405 and Rp5,734,460 in 2019 and 2018, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam Penyelesaian (lanjutan)

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	15% - 94,99%
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	23,53% - 95%
Alat Fasilitas Pelabuhan	0,05% - 94,91%
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	16,04% - 76,04%

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	1,5% - 87,18%
Pekerjaan pembangunan kapal	40%
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	51%
Alat Fasilitas Pelabuhan	63% - 95%
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	30% - 52,47%

13. FIXED ASSETS (continued)

Construction in Progress (continued)

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2019 are as follows:

Target penyelesaian/ Target of completion	Type of assets
2020	Elevation, reinforcement and dredging of dock project
2020	Construction of yard
2020	Port Equipment Facilities
2020	Port Facility Installation

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2018 are as follows:

Target penyelesaian/ Target of completion	Type of assets
2019	Elevation, reinforcement and dredging of dock project
2019	Construction of ship
2019	Construction of yard
2019	Port Equipment Facilities
2019	Port Facility Installation

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET KERJASAMA OPERASI

Aset kerjasama operasi merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola oleh TPK Koja dan MKO MTKI masing-masing berdasarkan perjanjian kontraktual dengan PT Hutchison Ports Indonesia (Catatan 46a) dan PT Maspion Industrial Estate (Catatan 46n), sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2019	
Harga perolehan						Acquisition cost
Bangunan fasilitas pelabuhan	764.725.479	-	-	7.944.010	772.669.489	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	86.424.760	-	-	-	86.424.760	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	10.504.447	-	-	-	10.504.447	Port installation
Jalan dan bangunan	602.861	-	-	-	602.861	Roads and buildings
Peralatan	609.224	-	-	-	609.224	Equipment
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	Emplacement
Total	867.397.291	-	-	7.944.010	875.341.301	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(339.121.390)	(22.102.337)	-	-	(361.223.727)	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	(41.690.939)	(6.008.959)	-	-	(47.699.898)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(3.043.523)	(739.052)	-	-	(3.782.575)	Port installation
Jalan dan bangunan	(170.682)	(56.894)	-	-	(227.576)	Roads and buildings
Peralatan	(447.780)	(149.260)	-	-	(597.040)	Equipment
Emplasemen	(532.788)	(177.596)	-	-	(710.384)	Emplacement
Total	(385.007.102)	(29.234.098)	-	-	(414.241.200)	Total
Nilai buku neto	482.390.189				461.100.101	Net book value

14. JOINT OPERATION ASSETS

Jointly controlled assets represent assets that are transferred to be managed by TPK Koja dan MKO MTKI based on contractual agreement with PT Hutchison Ports Indonesia (Note 46a) and PT Maspion Industrial Estate (Note 46n), respectively, as follow:

	31 Desember/ December 31, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2018	
Harga perolehan						Acquisition cost
Bangunan fasilitas pelabuhan	764.768.859	-	-	(43.380)	764.725.479	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	86.424.760	-	-	-	86.424.760	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	5.898.284	-	-	4.606.163	10.504.447	Port installation
Jalan dan bangunan	602.861	-	-	-	602.861	Roads and buildings
Peralatan	609.224	-	-	-	609.224	Equipment
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	Emplacement
Total	862.834.508	-	-	4.562.783	867.397.291	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(319.669.018)	(19.452.372)	-	-	(339.121.390)	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	(33.046.147)	(8.644.792)	-	-	(41.690.939)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(1.791.447)	(1.252.076)	-	-	(3.043.523)	Port installation
Jalan dan bangunan	(113.788)	(56.894)	-	-	(170.682)	Roads and buildings
Peralatan	(298.520)	(149.260)	-	-	(447.780)	Equipment
Emplasemen	(355.192)	(177.596)	-	-	(532.788)	Emplacement
Total	(355.274.112)	(29.732.990)	-	-	(385.007.102)	Total
Nilai buku neto	507.560.396				482.390.189	Net book value

15. ASET TAKBERWUJUD

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Aset hak konsesi	11.073.294.718	9.150.801.841	Concession rights assets
Piranti lunak	369.777.904	284.412.704	Software application
Aset takberwujud lainnya	25.103.155	25.828.087	Other intangible assets
Subtotal	11.468.175.777	9.461.042.632	Sub-total
Akumulasi amortisasi dan penyisihan penurunan nilai	(649.904.297)	(422.093.488)	Accumulated amortization allowance for impairment
Neto	10.818.271.480	9.038.949.144	Net

15. INTANGIBLE ASSETS

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Aset hak konsesi

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Pontianak kepada Perusahaan masing-masing untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal Kijing di Pelabuhan Pontianak berdasarkan Perjanjian Konsesi (Catatan 45a dan 46o), dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2019	
Biaya perolehan	9.150.801.841	1.930.151.065	(7.658.188)	-	11.073.294.718	Cost
Akumulasi amortisasi	(186.344.486)	(101.462.973)	-	-	(287.807.459)	Accumulated amortization
Nilai tercatat	8.964.457.355				10.785.487.259	Carrying amount
	31 Desember/ December 31, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2018	
Biaya perolehan	8.300.923.917	849.564.774	-	313.150	9.150.801.841	Cost
Akumulasi amortisasi	(92.626.304)	(93.718.182)	-	-	(186.344.486)	Accumulated amortization
Nilai tercatat	8.208.297.613				8.964.457.355	Carrying amount

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing persentase rata-rata penyelesaian pembangunan terminal Kalibaru masih dalam konstruksi sebesar 70,52% dan 62,57%, sedangkan persentase rata-rata penyelesaian pembangunan terminal Kijing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 43,66%.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan terminal Kalibaru untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 and 2018 adalah sebesar Rp123.863.584 dan Rp57.835.654, sedangkan untuk terminal Kijing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp62.200.973.

Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset hak konsesi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

15. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Concession rights assets

Concession rights assets represent assets which were constructed based on the right granted by Main Port Authority Office of Tanjung Priok and Port Authority office of Class II Pontianak Port to the Company to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port and Kijing Terminal at Pontianak Port, respectively, based on Concession Agreement (Notes 45a and 46o), with details as follows:

As of December 31, 2019 and 2018, the average percentage completion of construction of Kalibaru terminal under construction is 70.52% and 62.57%, respectively, while the average percentage construction for Kijing terminal for the year ended December 31, 2019 is 43.66%.

Borrowing costs capitalized for the concession assets of Kalibaru terminal for the year ended December 31, 2019 and 2018 amounting to Rp123,863,584 and Rp57,835,654 while for Kijing terminal for the year ended December 31 2019 is Rp62,200,973.

The Group's management believes that there was no impairment in the value of concession rights assets as of December 31, 2019 and 2018.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi *Port Wide Solution* untuk pelayanan *car terminal*, *container terminal* dan pergudangan beserta *Annual Technical Support (ATS)* dan *change request*, aplikasi piranti lunak yang berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data secara elektronik (*electronic data interchange*), aplikasi bidang operasional, ERP (sistem informasi keuangan, personalia, teknik), pengembangan *Port Community System/Inaportnet*, aplikasi *dash board system* untuk menyajikan informasi mengenai performansi operasional, integrasi antar sistem, integrasi *autogate* dan VGM untuk sistem operasi terminal.

15. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Software

Software application represents cost incurred for the development of *Port Wide Solution* application for *car terminal* services, *container terminal* services and warehouse and *Annual Technical Support (ATS)* and *change request*, licensed software application used for electronic data interchange, operational application, ERP (finance, human resources, technical information system), development of *Port Community System/Inaportnet*, dash board system application to present information regarding operational performance, system integration, *autogate* integration and VGM for terminal operating system.

16. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

16. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pajak final dibayar di muka (Catatan 22g)	1.230.024.963	-	Prepaid final tax (Note 22g)
Piutang pemulihan investasi	269.245.974	30.145.691	Investment recovery receivables
Uang jaminan	45.012.519	47.922.193	Security deposits
Jaminan pelaksanaan	37.082.900	37.000.000	Performance bond
Uang muka aset tetap	13.287.219	60.439.650	Advance for fixed assets
Aset lain-lain - neto	116.546.231	74.386.384	Other assets - net
Total	1.711.199.806	249.893.918	Total

Uang muka aset tetap merupakan uang muka kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) terkait pembangunan Menara Maritim.

Advance for fixed assets represents advance to PT Pembangunan Perumahan (Persero) for construction of Maritim Tower.

Piutang pemulihan investasi adalah piutang atas laba neto TPK Koja yang belum didistribusikan ke Perusahaan.

Investment recovery receivables represents receivables from net income of TPK Koja which has not been distributed to the Company.

Jaminan pelaksanaan merupakan bank garansi kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sehubungan dengan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru (Catatan 45a).

Performance bond represents bank guarantee to the Port Authority Tanjung Priok in relation to the development of Kalibaru terminal (Note 45a).

Uang jaminan diantaranya merupakan jaminan listrik di Tanjung Priok, bank garansi, telepon, jaringan internet dan mesin fotokopi.

Security deposits represents among others electricity deposits at Tanjung Priok, bank guarantee, deposits for telephone, internet connection and photocopy machine.

Aset lain-lain - lain-lain - neto terutama merupakan biaya yang ditangguhkan dari pengerukan kolam, peralatan *vessel traffic service*, perbaikan kapal keruk dan biaya konsultasi kegiatan *Basic Ship Management Fleet*.

Other assets - others - net mainly represents deferred charge for dredging, vessel traffic service equipment, dredges repairment and consultant fee of Basic Ship Management Fleet.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

Pinjaman bank jangka pendek terdiri dari:

	31 Desember/December 31	
	2019	2018
Rupiah		
Pihak Ketiga		
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.000.000	-
Pihak berelasi (Catatan 41f)		
PT Bank Syariah Mandiri	28.193.914	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	4.000.000
Total	34.193.914	4.000.000

Berdasarkan akad pembiayaan tanggal 15 Februari 2019, Bank Syariah Mandiri ("BSM") menyetujui untuk menyediakan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah - pembiayaan dana berputar kepada RSP dengan limit maksimum pembiayaan sebesar Rp30.000.000. Fasilitas ini diberikan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja RSP. Nisbah bagi hasil untuk BSM dan RSP masing-masing sebesar 2,22% dan 97,78%. Jangka waktu pembiayaan adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penarikan oleh Perusahaan. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha senilai Rp30.000.000 dengan nilai pengikatan fidusia sebesar nilai piutang tersebut.

Fasilitas tersebut mensyaratkan RSP untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu sesuai dengan yang tertuang pada akad pembiayaan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo terutang dari fasilitas tersebut adalah sebesar Rp28.193.914.

17. SHORT-TERM BANK LOANS

Short-term bank loans consist of:

	31 Desember/December 31	
	2019	2018
Rupiah		
Third parties		
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.000.000	-
Related parties (Note 41f)		
PT Bank Syariah Mandiri	28.193.914	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	4.000.000
Total	34.193.914	4.000.000

Based on agreement dated February 15, 2019, Bank Syariah Mandiri ("BSM") agreed to provide financing facility based on musyarakah - revolving fund financing to RSP with maximum financing limit amounting to Rp30,000,000. This facility is provided for working capital of RSP. The Nisbah of profit sharing for BSM and RSP amounted to 2.22% and 97.78%, respectively. The facility period is 12 (twelve) months since the drawdown date by RSP. The facility is guaranteed by collateral in the form of trade receivables amounted Rp30,000,000 with fiduciary value amounting as the mentioned receivables.

The facility requires RSP to comply with certain covenants in accordance with the terms stipulated in the agreement.

As of December 31, 2019, the outstanding balance from the facility is amounting to Rp28,193,914.

18. UTANG USAHA

a. Berdasarkan pemasok

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Pihak ketiga Swasta	359.929.551	418.899.213
Pihak berelasi (Catatan 41g)	1.076.552.787	1.247.008.500
Total	1.436.482.338	1.665.907.713

18. TRADE PAYABLES

a. By supplier

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Third parties Private	359.929.551	418.899.213
Related parties (Note 41g)	1.076.552.787	1.247.008.500
Total	1.436.482.338	1.665.907.713

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

18. UTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Rupiah	947.869.630	1.659.372.623
Dolar AS	488.488.004	6.535.090
Euro Eropa	124.704	-
Total	1.436.482.338	1.665.907.713

18. TRADE PAYABLES (continued)

b. By currency

Rupiah
US Dollar
European Euro
Total

**19. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA
PENDEK**

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Uang muka dari pelanggan untuk diperhitungkan		
Swasta	10.697.990	16.658.521
Pihak berelasi (Catatan 41h)	950.251	1.028.107
Lain-lain	7.132.428	11.283.684
Subtotal	18.780.669	28.970.312
Sewa kuartalan (Catatan 45h dan 46a)	520.544.218	555.358.299
Pelayanan jasa perusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	156.088.555	101.043.778
Lain-lain	3.078.074	1.727.923
Subtotal	679.710.847	658.130.000
Bagian lancar pendapatan diterima di muka jangka panjang (Catatan 25)	146.997.708	146.997.709
Total	845.489.224	834.098.021

Advances from customers
Private
Related parties (Note 41h)
Others
Sub-total

Quarterly rent (Notes 45h and 46a)
Land, building, water and electricity
services
Others
Sub-total

Current portion of long-term unearned
revenue (Note 25)

Total

Uang untuk diperhitungkan merupakan penerimaan uang di muka dari pelanggan yang akan memperoleh pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik dari Kelompok Usaha.

Advances from customers represents advances received from customers who will receive ship services, goods services, container services and logistic services from the Group.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

20. BEBAN AKRUAL

20. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Umum	897.590.232	843.328.993	General
Pegawai	537.340.813	623.923.785	Employees
Kerjasama mitra usaha	264.259.150	248.805.652	Partnership
Bunga	159.205.064	163.363.780	Interest
Bahan bakar dan bahan habis pakai	103.074.299	80.085.854	Fuels and supplies
Pemeliharaan	72.828.363	77.873.897	Maintenance
Provisi atas pembangunan aset			Provision for construction of Pemda
Pemda DKI	39.089.633	39.089.633	DKI assets
Biaya konsesi	32.077.764	41.676.724	Concession fee
Lain-lain	169.261.308	176.684.298	Others
Total	2.274.726.626	2.290.832.616	Total

Beban akrual - umum terutama merupakan akrual beban pembelian dan pembangunan aset tetap.

Accrued expenses - general mainly represents accrued expenses for purchase and construction of fixed assets.

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk biaya bonus dan tantiem.

Accrued expenses - employees mainly represents accrued expenses for employee's bonus and directors' tantiem.

Beban akrual - kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi atas kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan serta beban pegawai nonorganik.

Accrued expenses - the partnership expenses mainly represents the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

Beban akrual - biaya konsesi merupakan biaya konsesi yang harus dibayarkan kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan Perjanjian Konsesi tanggal 11 November 2015 (Catatan 46m).

Accrued expenses - concession fee represents concession fee to be paid to Port Authority in accordance with Concession Agreement dated November 11, 2015 (Note 46m).

Provisi atas pembangunan aset Pemda DKI merupakan kewajiban Perusahaan untuk membangun dermaga dan stadion olahraga berdasarkan Memorandum of Understanding tanggal 26 Mei 1995 antara Gubernur DKI Jakarta dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub) dan Surat dari Menhub kepada Perusahaan No. PL.407/3/1Phb.96 tanggal 21 November 1996 mengenai pengalihan kewajiban pembangunan kepada Perusahaan.

Provision of construction of Pemda DKI assets represents the Company's obligation to construct dock and sport stadium under the Memorandum of Understanding dated May 26, 1995 between Governor of DKI Jakarta with Minister of Transportation of the Republic of Indonesia (Menhub) and the letter from Menhub to the Company No. PL.407/3/1Phb.96 dated November 21, 1996 regarding the transfer of construction liability to the Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

21. OTHER CURRENT LIABILITIES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak ketiga	206.170.895	185.350.553	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 41i dan 41j)	91.743.873	90.237.622	Related parties (Note 41i and 41j)
Total	297.914.768	275.588.175	Total
Rincian liabilitas jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:		Details of other current liabilities as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:	
	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Uang titipan dari pelanggan			Deposit from customers
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Swasta	85.926.856	120.764.703	Private
Lain-lain	87.820.980	40.054.582	Others
Pihak berelasi (Catatan 41i)	18.382.047	14.748.481	Related parties (Note 41i)
Subtotal	192.129.883	175.567.766	Sub-total
Pihak ketiga	32.423.059	24.531.268	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 41j)			Related parties (Note 41j)
JICT (Catatan 46f)	38.980.725	38.980.725	JICT (Note 46f)
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (DKB)	31.666.118	31.666.118	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (DKB)
Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	2.714.983	4.842.298	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)
Subtotal	105.784.885	100.020.409	Sub-total
Total	297.914.768	275.588.175	Total

Uang titipan - swasta terutama merupakan sisa uang pengguna jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik yang belum dibayarkan kembali kepada pelanggan atau akan diperhitungkan dengan pelayanan berikutnya.

Uang titipan - lain-lain terutama merupakan uang titipan yang berasal dari gaji bulanan pegawai untuk iuran jamsostek, asuransi dan koperasi pegawai.

Liabilitas jangka pendek lainnya - pihak ketiga terutama merupakan utang yang timbul dari penerimaan uang jaminan penyediaan listrik dan cadangan klaim pelayanan kesehatan.

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada DKB merupakan kekurangan pembayaran kompensasi atas pemindahan dan pengosongan Galangan III DKB ke Pulau Batam berdasarkan Surat Perjanjian No.HK.566/27/11/PI.II-11 dan No.024/Kontr/II/DKB/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada DP4 merupakan kewajiban pembayaran pokok angsuran dan denda atas program pensiun Rukindo.

Deposit from customers - private mainly represents remaining deposits from customers for ship services, goods services, container services and logistic services which have not been settled with the customer or will be taken into account with subsequent services.

Deposit from customers - others mainly represents deposit from employee monthly salary for jamsostek contribution, insurance and employee co-operatives.

Other current liabilities - third party mainly represents payables from deposits received for electricity provision and claim reserves for health services.

Other current liabilities to DKB represents a shortage of payment of compensation to DKB for the removal and emptying of Galangan III in Batam Island based on Letter Agreement No.HK.566/27/11/PI.II-11 and No.024/Kontr/II/DKB/2011 dated August 15, 2011.

Other current liabilities to DP4 represents an obligation on the principal installments and penalties for pension program of Rukindo.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN

22. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Perusahaan			The Company
Pajak Pertambahan Nilai	197.084.038	235.183.098	Value Added Tax
Pajak penghasilan lainnya	27.232.934	8.436.907	Other income taxes
Pajak penghasilan pasal 19 - Penilaian kembali aset tetap	-	32.438.878	Income taxes article 19 - Revaluation of fixed assets
Subtotal	224.316.972	276.058.883	Sub-total
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai	107.873.791	171.572.101	Value Added Tax
Pajak penghasilan lainnya	348.414.304	304.159.014	Other income taxes
Subtotal	456.288.095	475.731.115	Sub-total
Total	680.605.067	751.789.998	Total

Taksiran tagihan restitusi pajak

Estimated claims for tax refund

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Perusahaan			The Company
Pajak penghasilan			Income tax
2014	-	14.423.973	2014
2015	381.563.183	377.958.339	2015
2017	-	153.078.948	2017
2018	171.961.012	171.450.559	2018
2019	152.258.584	-	2019
Subtotal	705.782.779	716.911.819	Sub-total
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai			Value Added Tax
2017	-	7.620.728	2017
2018	16.158.615	10.278.804	2018
Pajak penghasilan			Income tax
2014	-	10.193.276	2014
2015	14.502.241	18.226.979	2015
2016	7.658.230	7.658.230	2016
2017	3.215.362	13.455.592	2017
2018	39.084.807	57.586.139	2018
2019	172.515.120	-	2019
Subtotal	253.134.375	125.019.748	Sub-total
Total	958.917.154	841.931.567	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Perusahaan			The Company
Pajak Pertambahan Nilai	202.732.042	150.325.249	Value Added Tax
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 4(2)	21.706.567	684.648	Article 4(2)
Pasal 21	27.131.331	33.022.872	Article 21
Pasal 22	210.893	86.239	Article 22
Pasal 23	21.611.655	12.547.108	Article 23
Pasal 25	9.750.759	9.750.759	Article 25
Lainnya	133.561	12.560	Others
Subtotal	283.276.808	206.429.435	Sub-total
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai	32.457.179	22.365.260	Value Added Tax
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 4(2)	56.121.269	51.780.203	Article 4(2)
Pasal 21	33.397.029	37.631.713	Article 21
Pasal 23	6.699.520	7.932.378	Article 23
Pasal 25	20.445.076	23.950.376	Article 25
Pasal 29	8.651.061	36.423.783	Article 29
Lainnya	3.968.052	2.982.527	Others
Subtotal	161.739.186	183.066.240	Sub-total
Total	445.015.994	389.495.675	Total

c. Pajak penghasilan badan

c. Corporate income tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi pajak pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before corporate income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated tax loss in 2019 and 2018 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.705.407.941	2.775.005.156	Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi:			Less:
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	1.039.668.216	1.415.927.072	Income before corporate income tax of subsidiaries
Pendapatan kena pajak final	2.672.426.763	3.009.884.361	Income subject to final tax
Rugi sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan	(1.006.687.037)	(1.650.806.277)	Loss before corporate income tax expenses - the Company

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

c. Corporate income tax (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Beda temporer:			Temporary differences:
Penyisihan imbalan kerja karyawan	56.169.583	28.254.134	Provision for employee benefits
Penyisihan penurunan nilai piutang	(30.917.268)	(12.477.994)	Provision for impairment of receivables
Amortisasi aset lain-lain	35.952.965	19.282.281	Amortization of other assets
Penyusutan aset tetap	(131.897.568)	(133.260.394)	Depreciation of fixed assets
Beda permanen:			Permanent differences:
Beban bunga	684.009.132	692.220.214	Interest expenses
Beban umum	143.300.705	77.737.103	General expenses
Beban kesejahteraan karyawan	98.491.347	121.208.223	Employees social welfare expenses
Beban promosi	29.245.190	39.206.898	Promotion expenses
Bagian laba entitas asosiasi	(154.095.482)	(201.379.233)	Income portion from associates
Lainnya	(179.430.708)	365.002.332	Others
Subtotal	550.827.896	995.793.564	Sub-total
Taksiran rugi pajak	(455.859.141)	(655.012.713)	Estimated tax loss

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Reconciliation between corporate income tax expenses and the theoretical tax amount on profit before corporate income tax using the applicable tax rate is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Laba sebelum pajak penghasilan Badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.705.407.942	2.775.005.156	Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi: Pendapatan kena pajak final	2.672.426.763	3.009.884.361	Less: Income subject to final tax
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan badan	32.981.179	(234.879.205)	Income (Loss) before corporate income tax expenses
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	8.245.295	(58.719.801)	Income tax calculated at applicable rate
Dampak perbedaan permanen:			Effect of permanent differences:
Beban bunga	171.002.283	173.055.054	Interest expenses
Beban umum	37.227.356	74.772.199	General expenses
Beban kesejahteraan karyawan	31.049.556	52.436.444	Employees social welfare expenses
Beban promosi	15.026.686	19.296.561	Promotion expenses
Bagian laba entitas asosiasi	(38.523.871)	(50.344.808)	Income portion from associates
Lainnya	35.889.749	143.486.119	Others
Beban pajak penghasilan badan	259.917.054	353.981.768	Corporate income tax expense

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Perhitungan taksiran rugi pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 di atas akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019.

d. Rincian beban pajak penghasilan dan final adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2019	2018
Beban pajak final		
Perusahaan	417.964.858	249.720.243
Entitas anak	91.727.633	107.392.979
Subtotal	509.692.491	357.113.222
Beban pajak penghasilan badan Kini		
Perusahaan	-	-
Entitas anak	259.917.054	353.981.768
Subtotal	259.917.054	353.981.768
Tangguhan		
Perusahaan	(35.356.767)	7.195.030
Entitas anak	(22.962.694)	(16.881.497)
Subtotal	(58.319.461)	(9.686.467)
Total	201.597.593	344.295.301

e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2019	2018
Taksiran penghasilan kena pajak		
Perusahaan	-	-
Entitas anak	1.039.668.216	1.415.927.072
Jumlah taksiran penghasilan kena pajak	1.039.668.216	1.415.927.072
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan		
Perusahaan	-	-
Entitas anak	259.917.054	353.981.768
Jumlah beban pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	259.917.054	353.981.768

22. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax (continued)

The above calculation of estimated fiscal loss for the year ended December 31, 2019 will be used as a basis in filling the 2019 annual corporate income tax return.

d. The details of Income tax expenses and final tax expenses are as follows:

Final tax expense The Company Subsidiaries
Sub-total
Corporate income tax expense Current The Company Subsidiaries
Sub-total
Deferred The Company Subsidiaries
Sub-total
Total

e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows:

Estimated taxable income The Company Subsidiaries
Total estimated taxable income
Corporate income tax expense - current The Company Subsidiaries
Corporate income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

- e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka			<i>Less prepaid income tax</i>
Perusahaan	152.258.584	171.450.559	<i>The Company</i>
Entitas anak	348.414.304	375.144.124	<i>Subsidiaries</i>
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	500.672.888	546.594.683	<i>Total prepaid income tax</i>
Taksiran hutang pajak penghasilan - Pasal 29			<i>Estimated income tax payable - Article 29</i>
Perusahaan	-	-	<i>The Company</i>
Entitas anak	8.651.061	36.423.783	<i>Subsidiaries</i>
Total	8.651.061	36.423.783	Total
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan			<i>Estimated claims for tax refund</i>
Perusahaan	152.258.584	171.450.559	<i>The Company</i>
Entitas anak	172.515.119	57.586.139	<i>Subsidiaries</i>
Total	324.773.703	229.036.698	Total

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Kelompok Usaha menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, entities within the Group calculates and pays tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

f. Pajak tangguhan

f. Deferred taxes

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/Year Ended December 31, 2019						
Dibebankan pada/Charged to						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income	Ekuitas/ Equity	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Pajak Tangguhan						Deferred Tax Assets
Entitas anak	47.498.765	22.880.166	3.494.883	-	73.873.814	Subsidiaries
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
Perusahaan						The Company
Penyusutan	(687.207.680)	(29.860.048)	-	-	(717.067.728)	Depreciation
Amortisasi	(18.595.544)	55.612.743	-	-	37.017.200	Amortization
Penyisihan penurunan nilai piutang	60.653.106	1.534.711	-	-	62.187.817	Provision for impairment of receivables
Penyisihan imbalan kerja karyawan	369.242.847	8.069.361	22.848.469	-	400.160.676	Provision for employee benefits
Subtotal	(275.907.271)	35.356.767	22.848.469	-	(217.702.035)	Sub-total
Entitas anak	(31.939.536)	82.528	702.878	(5.432.904)	(36.587.034)	Subsidiaries
Total	(307.846.807)	35.439.295	23.551.347	(5.432.904)	(254.289.069)	Total
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018/Year Ended December 31, 2018						
Dibebankan pada/Charged to						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income	Ekuitas/ Equity	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Pajak Tangguhan						Deferred Tax Assets
Entitas anak	44.644.534	10.322.756	(2.528.584)	(4.939.941)	47.498.765	Subsidiaries
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
Perusahaan						The Company
Penyusutan	(638.937.738)	(48.269.942)	-	-	(687.207.680)	Depreciation
Amortisasi	(6.026.402)	(12.569.142)	-	-	(18.595.544)	Amortization
Penyisihan penurunan nilai piutang	73.546.366	(12.893.260)	-	-	60.653.106	Provision for impairment of receivables
Penyisihan imbalan kerja karyawan	313.112.199	45.723.981	10.406.667	-	369.242.847	Provision for employee benefits
Subtotal	(258.305.575)	(28.008.363)	10.406.667	-	(275.907.271)	Sub-total
Entitas anak	(42.993.909)	5.493.923	3.431.362	2.129.088	(31.939.536)	Subsidiaries
Total	(301.299.484)	(22.514.440)	13.838.029	2.129.088	(307.846.807)	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2015

Pada tanggal 20 April 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp805.287.733.

Pada tanggal 18 Juli 2017, Perusahaan mengajukan keberatan ke DJP atas SKPKB tersebut.

Sebagai hasil keberatan Perusahaan tersebut, pada tanggal 22 Desember 2017, diterbitkan SKPKB revisi sebesar Rp614.304.124.

Pada tanggal 20 Maret 2018, Perusahaan mengajukan banding ke pengadilan pajak atas SKPKB tersebut.

Pada tanggal 26 Juli 2019, pengadilan pajak menolak pengajuan banding yang diajukan oleh Perusahaan. Pada tanggal 22 Agustus 2019 dan 5 Desember 2019, Perusahaan melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp614.304.124 dan mencatatnya sebagai aset tidak lancar lainnya.

Pada tanggal 17 Oktober 2019, Perusahaan mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, proses peninjauan kembali masih berlangsung.

IPC TPK

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2015

Pada tanggal 24 Mei 2017, IPC TPK menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan badan tahun 2015 berupa pokok dan bunga masing-masing sebesar Rp14.788.285 dan Rp5.028.017. IPC TPK membayar sebagian tagihan pajak tersebut sebesar Rp3.063.854 dengan rincian jumlah pajak penghasilan terutang Rp2.438.761, koreksi atas restitusi pajak tahun 2015 yang dilaporkan sebesar Rp152.302 dan sanksi pajak Rp777.395 pada 16 Juni 2017. Selisih dengan hasil pemeriksaan pajak tersebut sebesar Rp317.627 telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun berjalan.

22. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter

The Company

Tax assessment for fiscal year 2015

On April 20, 2017, the Company received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on corporate income tax for 2015 amounting to Rp805,287,733.

On July 18, 2017, the Company has filed an objection to the DJP for the SKPKB.

As a result of the Company's objection, on December 22, 2017, the Company received a revised SKPKB amounting to Rp614,304,124.

On March 20, 2018, the Company has filed an appeal to the tax court for the SKPKB.

On July 26, 2019, the tax court rejected Company's appeal. As a result, on August 22, 2019 and December 5, 2019, the company made payments of Rp614,304,124, respectively and recorded as other non-current assets.

On October 17, 2019, the Company filed a judicial review to the Supreme Court.

Until the date of the completion of this consolidated financial statement, judicial review is still in process.

IPC TPK

Tax assessment for fiscal year 2015

On May 24, 2017, IPC TPK received a Tax Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) for 2015 corporate income tax in the form of principal and fine amounting to Rp14,788,285 and Rp5,028,017, respectively. IPC TPK paid a portion of the tax bill amounting to Rp3,063,854 with details of the amount of outstanding income tax Rp2,438,761, correction of reported 2015 tax refunds amounting to Rp152,302 and tax penalty of Rp777,395 on June 16, 2017. Difference with the results of the tax audit amounting to Rp317,627 has been charged to the statement of profit or loss and comprehensive income for the year.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

IPC TPK (lanjutan)

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2015 (lanjutan)

Pada tanggal 22 Agustus 2017, IPC TPK mengajukan keberatan atas SKPKB pajak penghasilan badan tahun 2015. Pada tanggal 20 Juli 2018, keberatan untuk kekurangan pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2015 ditolak oleh Kantor Pajak.

Pada tanggal 19 Oktober 2018, IPC TPK mengajukan banding untuk pajak penghasilan badan tahun 2015 ke Pengadilan Pajak. IPC TPK membayar kekurangan tagihan pajak tersebut sebesar Rp15.938.774 pada 23 Oktober 2018. Pada tanggal 21 Desember 2018, Pengadilan Pajak menolak banding atas pajak penghasilan badan tahun 2015. Selisih atas kekurangan pembayaran ketetapan pajak penghasilan badan tahun 2015 telah dibebankan dan dicatat sebagai bagian dari pajak kini sebesar Rp12.501.828, denda pajak sebesar Rp4.250.621 dan utang pajak lainnya sebesar Rp813.675.

Surat Tagihan Pajak

Pada tanggal 7 Mei 2018, IPC TPK menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPN dari Kantor pajak untuk masa pajak Juni, September - Desember 2016 sebesar Rp2.662.188 dan telah dibayar oleh IPC TPK pada tanggal 6 Juni 2018 serta telah dicatat sebagai bagian dari denda pajak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 26 November 2018, IPC TPK menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Kantor pajak untuk masa pajak Desember 2017 - Juni 2018 dan Agustus 2018 sebesar Rp1.689.698 dan telah dicatat sebagai bagian dari denda pajak dan utang pajak lainnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

22. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

IPC TPK (continued)

Tax assessment for fiscal year 2015 (continued)

On August 22, 2017, IPC TPK has filed an objection of the underpayment assesment of 2015 corporate income tax. On July 20, 2018, the objection of the underpayment assesment of 2015 corporate income tax was rejected by the Tax Office.

On October 19, 2018, IPC TPK filed an appeal for the 2015 corporate income tax to the Tax Court. IPC TPK paid for the remaining tax bill in the amount of Rp15,938,774 on October 23, 2018. On December 21, 2018, the Tax Court rejected the appeal of the 2015 corporate income tax. The difference in the underpayment of the 2015 corporate income tax assesment has been charged and recorded as part of the current tax of Rp12,501,828, tax penalties amounting to Rp4,250,621 and other tax payable of Rp813,675.

Tax Collection Letters

On May 7, 2018, IPC TPK receive a Tax Collection Letter (STP) for VAT from the Tax Office for the tax period of June, September - December 2016 amounting to Rp2,662,188 and was paid by IPC TPK on June 6, 2018 and has been recorded as part of tax penalty on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

On November 26, 2018, IPC TPK received a Tax Collection Letter (STP) for Income Tax Article 25 from the Tax Office for the period of December 2017 - June 2018 and August 2018 amounting to Rp1,689,698 and has been recorded as part from tax penalties and other tax debts in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

MTI

Pada tanggal 25 April 2016, MTI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas PPh 23 dan PPh 25 tahun 2014 sebesar Rp10.691.727 dari yang dilaporkan pada surat pemberitahuan pajak tahun 2014 sebesar Rp20.888.914. Pada tanggal 26 Mei 2016, MTI telah menerima pengembalian lebih bayar tersebut. Pada tanggal 22 Juli 2016, MTI mengajukan keberatan atas sisa lebih bayar tersebut. Pada tanggal 11 Juli 2017, MTI menerima surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisi tambahan lebih bayar yang akan dikembalikan kepada MTI sebesar Rp11.861. Pada tanggal 10 Oktober 2017, MTI mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

Pada tanggal 4 Februari 2019, MTI menerima Surat Putusan Pengadilan Pajak atas banding Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh 25 Tahun 2014 yang berisi tambahan lebih bayar yang akan dikembalikan kepada MTI sebesar Rp6.073.151.

Pada tanggal 2 Maret 2019, MTI mengajukan permohonan transfer bank untuk pembayaran imbalan bunga PPh badan tahun 2014 atas keterlambatan sebesar Rp4.350.672

Pada tanggal 30 April 2019, MTI telah menerima pengembalian lebih bayar sebesar Rp3.552.891 setelah dikompensasikan dengan utang pajak PPN, PPh 21 dan PPh 23 sebesar Rp2.520.260.

Pada tanggal 9 Mei 2017, MTI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN tahun 2013 berupa pokok dan bunga sebesar Rp2.795.914. Pada tanggal 7 Agustus 2017, MTI mengajukan keberatan atas sisa kurang bayar tersebut. Pada tanggal 19 Juli 2018, MTI menerima surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak keberatan wajib pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp2.795.914. Pada tanggal 11 Oktober 2018, MTI mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, MTI belum menerima hasil keputusan atas banding tersebut.

22. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

MTI

On April 25, 2016, MTI received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on income tax article 23 and 25 for 2014 amounting to Rp10,691,727 against the overpayment reported in tax return of Rp20,888,914. On May 26, 2016, MTI has received the overpayment. On July 22, 2016, MTI filled an objection on the remaining overpayment. On July 11, 2017, MTI received the Decree of the Director General of Taxation which contains additional overpayment to be returned to MTI amounting Rp11,861. On October 10, 2017, MTI appealed against the Decree of the Director General of Taxation.

On February 4, 2019, MTI received a Tax Court Decree on the appeal of the Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on income tax article 25 for 2014 which contains additional overpayment to be returned to MTI amounting Rp6,073,151.

On March 2, 2019, MTI submitted a bank transfer request for interest compensation of 2014 corporate income tax for a delay payment amounting to Rp4,350,672.

On April 30, 2019, MTI has received this overpayment assessment amounting to Rp3,552,891 after being compensated with income tax payable of VAT, article 21 and article 23 amounting to Rp2,520,260.

On May 9, 2017, MTI received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on PPN for 2013 in the form of principal and interest amounting to Rp2,795,914. On August 7, 2017, MTI filled an objection on the remaining underpayment. On July 19, 2018, MTI received the Decree of the Director General of Taxation which rejected the objection and maintained the amount of tax that has to be paid amounting Rp2,795,914. On October 11, 2018, MTI appealed against the Decree of the Director General of Taxation. Until the completion date of the consolidated financial statements, MTI has not yet received the decision on the appeal.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

MTI (lanjutan)

Pada tanggal 9 Mei 2017, MTI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan tahun 2013 berupa pokok dan bunga sebesar Rp37.746.806 dan telah dibayar sebesar Rp4.485.294 pada tanggal 7 Agustus 2017 serta telah dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pada tanggal 7 Agustus 2017, MTI mengajukan keberatan atas sisa kurang bayar tersebut. Pada tanggal 19 Juli 2018, MTI menerima surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dan mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp6.029.244. Pada tanggal 15 Oktober 2018, MTI mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, MTI belum menerima hasil keputusan atas banding tersebut.

Pada tanggal 20 Juni 2017, MTI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan tahun 2015 sebesar Rp2.792.602 dari yang dilaporkan pada surat pemberitahuan pajak tahun 2015 dengan posisi lebih bayar sebesar Rp14.570.141. Pada tanggal 15 September 2017, MTI mengajukan keberatan atas sisa lebih bayar tersebut. Pada tanggal 24 Agustus 2018, MTI menerima surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dan mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp14.502.241. Pada tanggal 21 November 2018, MTI mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, MTI belum menerima hasil keputusan atas banding tersebut.

22. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

MTI (continued)

On May 9, 2017, MTI received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on corporate income tax for 2013 in the form of principal and interest amounting to Rp37,746,806 and have been paid by MTI amounting to Rp4,485,294 on August 7, 2017 and was recorded as part of "Current Tax Expense" in statement of profit or loss and other comprehensive income. On August 7, 2017, MTI filled an objection on the remaining underpayment. On July 19, 2018, MTI received the Decree of the Director General of Taxation which granted the objection and reduced the amount of tax that has to be paid amounting to Rp6,029,244. On October 15, 2018, MTI appealed against the Decree of the Director General of Taxation. Until the completion date of the consolidated financial statements, MTI has not yet received the decision on the appeal.

On June 20, 2017, MTI received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on corporate income tax for 2015 amounting to Rp2,792,602 against the overpayment reported in tax return of Rp14,570,141. On September 15, 2017, MTI filled an objection on the remaining overpayment. On August 24, 2018, MTI received the Decree of the Director General of Taxation which granted the objection and reduced the amount of tax to be overpayment amounting to Rp14,502,241. On November 21, 2018, MTI appealed against the Decree of the Director General of Taxation. Until the completion date of the consolidated financial statements, MTI has not yet received the decision on the appeal.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

MTI (lanjutan)

Pada tanggal 24 Agustus 2018, MTI menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisi menolak keberatan wajib pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp16.748.687. Pada tanggal 21 November 2018, MTI mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan konsolidasian keuangan ini, MTI belum menerima hasil keputusan atas banding tersebut.

Pada tanggal 16 April 2019, MTI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas PPh 25 tahun 2017 sebesar Rp8.578.787 dari yang dilaporkan pada surat pemberitahuan pajak tahun 2017 sebesar Rp8.697.320. Pada tanggal 13 Mei 2019, MTI telah menerima pengembalian lebih bayar tersebut sebesar Rp8.578.787.

JAI

Pada tanggal 23 Februari 2018, JAI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2016 sebesar Rp15.098.395 Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan JAI sebesar Rp10.268.107 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini. Pada tanggal 5 Juli 2018, JAI telah menerima pengembalian lebih bayar sebesar Rp6.316.452 setelah dikompensasikan dengan utang pajak penghasilan pasal 21, 23, 26 dan PPN sebesar Rp8.781.943.

Pada tanggal 9 Mei 2018, JAI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan badan tahun 2014 sebesar Rp18.326.999. JAI telah membayar atas kurang bayar tersebut beserta utang pajak penghasilan pasal 15, 21, 23 dan PPN sebesar Rp23.845.304. JAI masih dalam proses pengajuan keberatan atas SKPKB tersebut dan mencatatnya sebagai pajak dibayar di muka.

22. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

MTI (continued)

On August 24, 2018, MTI received the Decree of the Director General of Taxation which rejected the objection and maintained the amount of tax that has to be paid amounting to Rp16,748,687. On November 21, 2018, MTI appealed against the Decree of the Director General of Taxation. Until the completion date of the consolidated financial statements, MTI has not yet received the decision on the appeal.

On April 16, 2019, MTI received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on income tax article 25 for 2017 amounting to Rp8,578,787 against the overpayment reported in tax return of Rp8,697,320. On May 13, 2019, MTI has received the overpayment amounting to Rp8,578,787.

JAI

On February 23, 2018, JAI received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on Corporate Income Tax ("CIT") for fiscal year 2016 amounting to Rp15,098,395. The difference of the tax assessment with the JAI's record amounting to Rp10,268,107 has been recorded as part of current tax expense. On July 5, 2018, JAI has received this overpayment assessment amounting to Rp6,316,452 after being compensated with income tax payable of articles 21, 23, 26 dan VAT amounting to Rp8,781,943.

On May 9, 2018, JAI received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on Corporate Income Tax ("CIT") for fiscal year 2014 amounting to Rp18,326,999. JAI has paid this underpayment assessment and income tax payable of articles 15, 21, 23 and VAT amounting to Rp23,845,304. JAI is still in the process of filing an objection of the SKPB and recorded it as prepaid tax.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

RUKINDO

Pada tanggal 10 September 2018, Rukindo menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun fiskal 2014 dan 2015 sebesar Rp7.201.615. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan Rukindo sebesar Rp7.591.762 telah dicatat sebagai bagian dari beban operasi lainnya. Pada tanggal 30 Oktober 2018, Rukindo telah menerima pengembalian lebih bayar sebesar Rp6.161.936 setelah dikompensasikan dengan utang pajak PPN sebesar Rp1.039.839.

22. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

RUKINDO

On September 10, 2018, Rukindo received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on Value Added Tax ("VAT") for fiscal years 2014 and 2015 amounting to Rp7,201,615. The difference of the tax assessment with Rukindo's record amounting to Rp7,591,762 has been recorded as part of current tax expense. On October 30, 2018, Rukindo has received this overpayment assessment amounting to Rp6,161,936 after being compensated with income tax payable of VAT amounting Rp1,039,839.

23. UTANG BANK JANGKA PANJANG

23. LONG-TERM BANK LOANS

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak berelasi (Catatan 41k)			Related party (Note 41k)
PT Bank Syariah Mandiri	114.990.000	-	PT Bank Syariah Mandiri
Bagian lancar jangka panjang	(12.000)	-	Current maturities of long-term bank loans
Total bagian jangka panjang	114.978.000	-	Total long-term portion

PT Bank Syariah Mandiri

RSP

Berdasarkan akad pembiayaan tanggal 15 Februari 2019, BSM menyetujui untuk menyediakan fasilitas pembiayaan investasi berdasarkan prinsip musyarakah mutanaqishah kepada RSP dengan limit maksimum pembiayaan sebesar Rp115.000.000. Fasilitas ini diberikan terutama untuk membiayai kebutuhan investasi dan pembangunan rumah sakit baru di cabang RSP Palembang. Nisbah bagi hasil untuk BSM dan RSP masing-masing sebesar 38,29% dan 61,71%, dengan besaran ujroh sebesar Rp186.366.230. Jangka waktu pembiayaan adalah 120 (seratus dua puluh) bulan sejak tanggal penarikan oleh RSP. Fasilitas ini dijamin dengan agunan berupa tanah dan bangunan seluas 21.330 m² di RSP Cabang Jakarta yang terletak di Jl. Kramat Jaya, Jakarta Utara dengan nilai pengikatan hak tanggungan sebesar Rp181.250.000.

Fasilitas tersebut mensyaratkan RSP untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu sesuai dengan yang tertuang pada akad pembiayaan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo terutang dari fasilitas tersebut adalah sebesar Rp114.990.000.

PT Bank Syariah Mandiri

RSP

Based on agreement dated February 15, 2019, BSM agreed to provide investment financing facility based on musyarakah mutanaqishah principle to RSP with maximum financing limit amounting to Rp115,000,000. This facility is provided to fund the investment to build a new hospital in RSP Palembang branch. The Nisbah of profit sharing for BSM and RSP each amounted at 38.29% and 61.71%, with amount of ujroh amounting to Rp186,366,230. The facility period is 120 (one hundred twenty) months since the drawdown date by RSP. The facility is guaranteed by collateral in the form of land and building with area of 21,330 m² in RSP Jakarta branch, which located in Jl. Kramat Jaya, North Jakarta with mortgage value amounting to Rp181,250,000.

The facility requires RSP to comply with certain covenants in accordance with the terms stipulated in the agreement.

As of December 31, 2019, the outstanding balance from the facility is amounting to Rp114,990,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. UTANG OBLIGASI

24. BONDS PAYABLE

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Senior Notes penerbitan tahun 2015			Senior Notes issued in 2015
USD1.100.000.000	15.291.100.000	15.929.100.000	USD1,100,000,000
USD500.000.000	6.950.500.000	7.240.500.000	USD500,000,000
Dikurangi:			Less:
Diskonto yang belum diamortisasi	(194.965.370)	(210.621.288)	Unamortized discount
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(62.456.436)	(68.811.743)	Unamortized transaction cost
Utang obligasi - neto	21.984.178.194	22.890.166.969	Bonds payable - net

Obligasi/Bonds	Pokok Utang/Debt Principal	Penerbit/Issuer	Tempat Pencatatan/Listed	Tanggal Terbit/Issue Date	Jatuh Tempo/Due Date	Periode Pembayaran Bunga/Interest Payment Period	Tingkat Bunga per Tahun/Interest Rate per Annum
Senior Notes due 2025	USD1.100.000.000	Perusahaan/ the Company	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ May 5, 2015	5 Mei 2025/ May 5, 2025	Setengah tahunan/Semi-Annually	4,250%
Senior Notes due 2045	USD500.000.000	Perusahaan/ the Company	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ May 5, 2015	5 Mei 2045/ May 5, 2045	Setengah tahunan/Semi-Annually	5,375%

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus.

The obligation is not guaranteed by any special collateral.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah The Development Bank of Singapore Limited (dahulunya Australia and New Zealand Banking Company Limited), BNP Paribas, Citicompny Global Markets Inc., PT Bahana Securities dan PT Danareksa Sekuritas. Sedangkan yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah The Bank of New York Mellon Corporation.

Acting as the joint bookrunners are The Development Bank of Singapore Limited (previously Australia and New Zealand Banking Company Limited), BNP Paribas, Citicompny Global Markets Inc., PT Bahana Securities and PT Danareksa Sekuritas. Whereas, acting as the trustee is The Bank of New York Mellon Corporation.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi telah dipergunakan untuk melunasi pinjaman sindikasi dan akan digunakan untuk rencana ekspansi Perusahaan serta tujuan umum Perusahaan.

Proceeds from the bond offering were used to refinance syndicated loan and will be used for Company's expansion plan and general Corporate purposes.

Pada tanggal 31 Desember 2019, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh Moody's Investors Service, Inc., Standard and Poor's Ratings Company dan Fitch Ratings Ltd. masing-masing adalah Baa2, BBB dan BBB.

On December 31, 2019, the Company's bond rating by Moody's Investors Service, Inc., Standard and Poor's Ratings Company and Fitch Ratings Ltd. are Baa2, BBB and BBB, respectively.

Berdasarkan *Offering Circular*, Perusahaan tidak diperbolehkan menjaminkan seluruh atau sebagian aset, dan memastikan entitas anaknya untuk tidak menjaminkan seluruh atau sebagian asetnya.

Based on the Offering Circular, the Company is not allowed to lien all or any part of its assets, and should ensure that its subsidiaries do not lien all or any part of their assets.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANG

25. LONG-TERM UNEARNED REVENUE

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Premium JICT (Catatan 46e)	2.325.614.688	2.444.876.979	JICT Premium (Note 46e)
Sewa diterima di muka - NPCT1 (Catatan 45h)	771.175.595	809.528.380	Advance rental fee - NPCT1 (Note 45h)
Premium TPK Koja (Catatan 46a)	540.840.625	568.576.042	TPK Koja Premium (Note 46a)
Sewa tanah dan/atau bangunan: PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Catatan 46j)	276.168.033	517.584.342	Land rental and/or building: PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Note 46j)
PT Jakarta Tank Terminal (Catatan 46k)	34.634.861	34.634.861	PT Jakarta Tank Terminal (Note 46k)
PT Tunas Baru Lampung	23.378.016	23.378.016	PT Tunas Baru Lampung
PT Bogasari Sentra Flour Mills	5.978.898	5.978.898	PT Bogasari Sentra Flour Mills
PT Wilmar Nabati Indonesia	4.488.750	4.488.750	PT Wilmar Nabati Indonesia
PT Intiboga Sejahtera	3.772.473	3.772.473	PT Intiboga Sejahtera
PT Dok Duasatu Nusantara	3.723.693	3.723.693	PT Dok Duasatu Nusantara
PT Indokarya Internusa	3.467.415	3.467.415	PT Indokarya Internusa
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	159.385.918	17.880.776	Others (each below Rp2 billion)
Total	4.152.628.965	4.437.890.625	Total
Bagian lancar (Catatan 19)	(146.997.708)	(146.997.709)	Current portion (Note 19)
Total bagian jangka panjang	4.005.631.257	4.290.892.916	Total long-term portion

26. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

26. OTHER LONG-TERM LIABILITIES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
<u>Pihak ketiga</u> Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura	225.013.928	234.402.238	<u>Third party</u> Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore
<u>Pihak berelasi (Catatan 41j)</u> PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	27.137.737 3.000.000	29.349.280 8.923.000	<u>Related parties (Note 41j)</u> PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Subtotal	30.137.737	38.272.280	Sub-total
Total	255.151.665	272.674.518	Total
Bagian lancar	(19.887.737)	(38.272.280)	Current portion
Bagian jangka panjang	235.263.928	234.402.238	Long-term portion

Utang kepada Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., merupakan pinjaman sebesar USD15.096.000 yang diperoleh dan digunakan untuk setoran modal IPC TPK di NPCT1 berikut bunga terhutang (Catatan 45e).

Payable to Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., represents loan amounting to USD15,096,000 which was obtained and used by IPC TPK for acquisition of share capital in NPCT1 including the interest payable (Note 45e).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**26. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 13 Agustus 2007 dari Notaris Kartono, S.H., Rukindo memperoleh pinjaman modal kerja sebesar Rp16.000.000.000, Rp24.000.000.000 dan Rp8.000.000.000 masing-masing dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ("Pelindo I"), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Pelindo III") dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ("Pelindo IV"), dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dikenakan suku bunga sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito bank pemerintah dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, yang ditetapkan pada setiap awal tahun.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Berdasarkan Surat Perjanjian No 14/12/3/DIRUT-2018 dan No PKS.55/HK.05018/P.III-2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang restrukturisasi pinjaman modal kerja kepada Pelindo III, disepakati bahwa utang pokok Rukindo tetap sebesar Rp24.000.000 sedangkan utang bunga dan denda yang semula sebesar Rp16.595.467 menjadi sebesar Rp6.267.150. Atas selisih pencatatan utang bunga dan denda dengan hasil kesepakatan, Rukindo mencatat laba sebesar Rp10.328.467 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018.

Berdasarkan kesepakatan di atas, Rukindo akan membayar utang pokok sebesar Rp10.000.000 setelah memperoleh tambahan penyertaan modal dari Perusahaan dan/atau sumber dana lainnya yang diperoleh Rukindo. Sedangkan sisa utang pokok sebesar Rp14.000.000.000 akan diangsur selama 7 tahun dengan dikenakan bunga sebesar rata-rata suku bunga *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) mata uang Rupiah tenor 6 bulan. Sedangkan utang bunga sebesar Rp6.267.150.000 akan diusulkan untuk dihapus maksimal 50% dari total utang bunga dan sisanya dibayarkan secara proposional selama 7 (tujuh) tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp27.137.737 dan Rp29.349.279.

26. OTHER LONG-TERM LIABILITIES (continued)

Based on Deed No. 22 dated August 13, 2007, of Notary Kartono, S.H., the Company obtained working capital loans amounting to Rp16,000,000,000, Rp24,000,000,000 and Rp8,000,000,000 from PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ("Pelindo I"), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Pelindo III") and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ("Pelindo IV"), respectively, with repayment term of 5 (five) years and bears interest at the rate equal to the average interest rate on 1-year time deposits of government-owned banks, which shall be determined at the beginning of each year.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Based on the Agreement No. 14/12/3/DIRUT-2018 and No. PKS.55/HK.05018/P.III-2018 dated December 14, 2018 concerning the capital loan restructuring to Pelindo III, it was agreed that the Rukindo's principal debt still same which is amounted Rp24,000,000 while interest debts and penalties originally amounted Rp16,595,467 became Rp6,267,150. For the difference between recording of the interest payable and penalties resulting from the agreement, Rukindo recorded gain amounting Rp10,328,467 to the 2018 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Based on the agreement above, Rukindo will pay the principal loan amounting Rp10,000,000 after obtaining additional capital injection from the Company and/or other sources of funds obtained from the Company. The remaining principal loan of Rp14,000,000,000 will be paid in installments for 7 years which bears interest at the average rate of Jakarta Interbank Interest Rate (JIBOR) in Rupiah currency with a tenor of 6 months. While the interest payable of Rp6,267,150,000 will be submitted to be written off with maximum of 50% of the total interest and the remaining will be paid proportionally for 7 (seven) years.

As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balances of this loan amounted to Rp27,137,737 and Rp29,349,279.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**26. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA
(lanjutan)**

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No 10/12/1/DIRUT-2018 dan No 8.HK.301/12/DKU-2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal penyelesaian pinjaman modal kepada Pelindo IV, disepakati bahwa utang pokok Rukindo yang semula sebesar Rp10.923.000 menjadi sebesar Rp8.000.000 sedangkan utang bunga dan denda yang semuua sebesar Rp5.531.822 menjadi sebesar Rp2.932.000. Jangka waktu pelunasan utang pokok, bunga dan denda tersebut adalah selama 3 tahun. Atas selisih pencatatan utang bunga dan denda dengan hasil kesepakatan, Rukindo mencatat laba sebesar Rp2.608.822 pada pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018.

Berdasarkan kesepatan pada bulan Desember 2019, Rukindo memperoleh persetujuan dari Pelindo IV untuk menghapus bunga dan denda sebesar Rp2.923.000. Jumlah tersebut di atas telah dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp3.000.000 dan Rp8.923.000. Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 9 Januari 2020.

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Kelompok Usaha mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen, PT Sentra Jasa Aktuaria, PT Towers Watson Purbajaga, PT Padma Radya Aktuaria, PT Pointera Aktuarial Strategis dan PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam laporan aktuaris independen:

	2019	2018
Tingkat diskonto	7,04% - 8,11%	8,39% - 8,77%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	6,00% - 10,00%	7,00% - 10,00%
Tingkat mortalitas	TMI 2011& TMI 2019	TMI 2011
Tingkat cacat tetap (dari tabel mortalitas)	5% - 10%	1% - 10%
Tingkat pengunduran diri	1,00% - 10,00%	1,00% - 5,00%
Usia pensiun normal	55 - 56 tahun/years	55 - 56 tahun/years

26. OTHER LONG-TERM LIABILITIES (continued)

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

Based on the Minutes of Agreement No. 10/12/1/DIRUT-2018 and No.8.HK.301/12/DKU-2018 dated December 10, 2018 concerning the settlement of capital loans to Pelindo IV, it was agreed that the Rukindo's principal debt which originally amounted Rp10,923,000 became Rp8,000,000 while interest debts and penalties originally amounted Rp5,531,822 became Rp2,932,000. For the difference between recording of the interest payable and penalties resulting from the agreement, Rukindo recorded gain amounting Rp2,608,822 to the 2018 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Based on agreement on December 2019, Rukindo obtained approval from Pelindo IV to written off of interests and penalties amounting to Rp2,923,000. All amounts have been charged to the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balances of this loan amounted to Rp3,000,000 and Rp8,923,000. This loan was fully repaid on January 9, 2020.

27. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

As of December 31, 2019 and 2018, the Group recorded employee benefits liabilities based on actuarial computations performed by independent actuaries, PT Sentra Jasa Aktuaria, PT Towers Watson Purbajaga, PT Padma Radya Aktuaria, PT Pointera Aktuarial Strategis and PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, using the "Projected Unit Credit" method.

The basic assumptions used by the independent actuaries are as follows:

Discount rate
Salary increase projection rate
Mortality rate
Permanent disability rate (from mortality table)
Level of resignation
Normal pension age

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Perusahaan		
Program pensiun	174.365.283	164.769.363
Program penghargaan masa bhakti	750.788.445	653.641.759
Program kesehatan pensiunan	646.466.873	634.268.491
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	29.042.101	24.291.771
Subtotal	1.600.642.702	1.476.971.384
Entitas anak		
Program pensiun, penghargaan masa bhakti dan imbalan pasca-kerja lainnya	365.683.206	299.945.910
Total	1.966.325.908	1.776.917.294

a. Program Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pensiun untuk karyawan tetap yang dipekerjakan pada tahun 2001 dan sebelumnya dan dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Liabilitas imbalan kerja dan pencadangan biaya imbalan kerja atas program pensiun ini adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Nilai kini liabilitas	474.260.058	481.507.390
Nilai wajar aset program	(299.894.775)	(316.738.027)
Defisit program	174.365.283	164.769.363
Dampak batas atas aset	-	-
Liabilitas yang diakui	174.365.283	164.769.363

**Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,**

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Biaya jasa kini	4.287.073	4.112.560
Biaya bunga	13.725.288	7.990.407
Beban yang diakui	18.012.361	12.102.967

27. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

The employee benefit liabilities are as follows:

The Company
Pension program
Gratuity and compensation benefits
Pension healthcare program
Other long-term employee benefits
Sub-total
Subsidiaries
Pension program, gratuity and compensation benefits and other post-benefits program
Total

a. Pension Program

The Company has a pension benefit plan covering permanent employees hired in and before 2001 and managed by Dana Pensiun Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Employee benefits liabilities and employee benefits expenses for the pension program are as follows:

Present value of liabilities
Fair value of plan assets

Deficit in plan
Effect of asset ceiling

Recognized liabilities

Current service cost
Interest cost

Recognized expense

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun (lanjutan)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2019	2018
Liabilitas awal tahun	164.769.363	114.148.670
Beban yang diakui dalam laba rugi	18.012.361	12.102.967
Penghasilan komprehensif lain	24.308.157	65.654.789
luran pemberi kerja	(32.724.598)	(27.137.063)
Liabilitas akhir tahun	174.365.283	164.769.363

*Liabilities at beginning of year
Expense recognized in profit or loss
Other comprehensive income
Employer's contributions*

Liabilities at end of year

**Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,**

	2019	2018
Nilai kini liabilitas - awal tahun	481.507.390	528.186.379
Biaya jasa kini	4.287.073	4.112.560
Biaya bunga	40.109.567	36.973.047
luran peserta program	834.748	871.048
Ekspektasi pembayaran imbalan	(67.200.908)	(67.474.150)
Kerugian (keuntungan) aktuarial	14.722.188	(21.161.494)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	474.260.058	481.507.390

*Present value of liabilities - beginning
of year
Current service cost
Interest cost
Plan participants' contributions
Expected benefit payments
Actuarial loss (gain)*

Present value of liabilities - end of year

**Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,**

	2019	2018
Nilai wajar aset program awal tahun	316.738.027	414.037.709
Imbal hasil ekspektasian aset program	26.384.278	28.982.640
luran pemberi kerja	32.724.598	27.137.062
luran peserta program	834.748	871.048
Imbalan yang dibayarkan	(67.200.908)	(67.474.150)
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(9.585.968)	(86.816.282)
Nilai wajar aset program akhir tahun	299.894.775	316.738.027

*Fair value of program assets -
beginning of year
Expected return from program assets
Employer's contributions
Plan participants' contributions
Benefits paid
Actuarial gain (loss)*

*Fair value of program assets -
end of year*

Aset program yang dimiliki oleh Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

- Aset tetap 48,37%
- Reksa dana 33,09%
- Investasi saham 2,86%
- Surat utang negara 9,54%
- Deposito berjangka 0,19%
- Penyertaan langsung 5,95%

Plan assets owned by the Group is as follows:

- Fixed assets 48.37%
- Mutual funds 33.09%
- Investment in shares 2.86%
- State bonds 9.54%
- Time deposits 0.19%
- Direct investment 5.95%

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

27. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

a. Program Pensiun (lanjutan)

a. Pension Program (continued)

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2019 and 2018 is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Jatuh tempo <= 1 tahun	386.268.990	15.928.821	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	51.273.204	43.561.602	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	178.812.694	196.405.395	Maturity > 5 years
Total	616.354.888	255.895.818	Total

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2019 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2019:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	14.219.199	(17.581.503)	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	609.898	(755.684)	Current service cost

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2019 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2019:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	(6.650.413)	6.180.417	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	(293.358)	272.006	Current service cost

Manfaat yang diperhitungkan dalam penghargaan masa bhakti mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Dana Pensiun. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan dengan definisi gaji yang meliputi gaji merit dan tunjangan perumahan. Program ini tidak didanai.

Benefits that are calculated in the gratuity and compensation benefits refer to the Collective Labor Agreement and the Regulations of the Pension Fund. Participants are all permanent employees of the company with the salary definition including merit pay and housing allowance. This program is not funded.

b. Penghargaan masa bhakti

b. Gratuity and compensation benefits

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas	750.788.445	653.641.759	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	-	-	Fair value of plan assets
Liabilitas yang diakui	750.788.445	653.641.759	Recognized liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

27. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Penghargaan masa bhakti (lanjutan)

b. Gratuity and compensation benefits (continued)

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2019	2018	
Biaya jasa kini	52.314.545	45.360.904
Biaya bunga	54.448.359	46.929.958
Keuntungan aktuarial	(32.512)	(195.745)
Beban imbalan kerja lain	292.156	-
Beban yang diakui	107.022.548	92.095.117

*Current service cost
Interest cost
Actuarial gain
Other employee benefit cost
Recognized expense*

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2019	2018	
Liabilitas awal tahun	653.641.759	670.427.967
Beban yang diakui dalam laba rugi	107.022.548	92.095.117
Penghasilan komprehensif lain	34.382.820	(63.006.199)
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(44.258.682)	(45.875.126)
Liabilitas akhir tahun	750.788.445	653.641.759

*Liabilities at beginning of year
Expense recognized in profit or loss
Other comprehensive income
Current year benefit payment
Liabilities at end of year*

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2019	2018	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	653.641.759	670.427.967
Biaya jasa kini	52.314.544	45.360.904
Biaya bunga	54.448.359	46.929.958
Ekspektasi pembayaran imbalan	(44.258.682)	(45.875.126)
Kerugian (keuntungan) aktuarial	34.350.308	(63.201.944)
Biaya jasa lalu	292.157	-
Nilai kini liabilitas akhir tahun	750.788.445	653.641.759

*Present value of liabilities - beginning of year
Current service cost
Interest cost
Expected benefit payments
Actuarial loss (gain)
Past service cost
Present value of liabilities - end of year*

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2019 and 2018 is as follows:

31 Desember/December 31,		
2019	2018	
Jatuh tempo <= 1 tahun	27.438.107	38.409.724
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	192.447.732	150.015.210
Jatuh tempo > 5 tahun	5.227.027.064	4.987.064.913
Total	5.446.912.903	5.175.489.847

*Maturity <= 1 year
Maturity > 1 year and <= 5 years
Maturity > 5 years
Total*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Penghargaan masa bhakti (lanjutan)

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2019 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase
Nilai kini liabilitas	63.989.315
Biaya jasa kini	5.871.567

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2019 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase
Nilai kini liabilitas	(72.934.913)
Biaya jasa kini	(6.878.900)

c. Program kesehatan pensiunan

Perusahaan memberikan imbalan kerja berupa program kesehatan pensiunan dan keluarga (termasuk anak dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang maksimal berumur 25 tahun). Program tersebut berupa bantuan pengobatan dari Perusahaan dalam jumlah tertentu dan telah terdaftar di Perusahaan. Program ini tidak didanai.

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Nilai kini liabilitas	646.446.873	634.268.491
Nilai wajar aset program	-	-
Liabilitas yang diakui	646.446.873	634.268.491

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2019	2018
Biaya jasa kini	10.164.223	9.104.564
Biaya bunga	52.834.565	48.911.666
Beban yang diakui	62.998.788	58.016.230

27. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Gratuity and compensation benefits (continued)

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2019:

	Penurunan/ Decrease	
	(74.507.015)	Present value of liabilities
	(7.026.401)	Current service cost

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2019:

	Penurunan/ Decrease	
	63.724.885	Present value of liabilities
	5.846.263	Current service cost

c. Pension healthcare program

The Company also provides long term post-employment benefits in form of healthcare program for pensioners and family (including up to 3 (three) children with maximum age of 25 years). The program is in the form of medical assistance from the Company in certain amounts and after registering with the Company. This program is not funded.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

27. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

c. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

c. Pension healthcare program (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Liabilitas awal tahun	634.268.491	698.738.087	<i>Liabilities at beginning of year</i>
Beban yang diakui dalam laba rugi	62.998.788	58.016.230	<i>Expense recognized in profit or loss</i>
Penghasilan komprehensif lain	32.702.718	(44.275.256)	<i>Other comprehensive income</i>
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(83.523.124)	(78.210.570)	<i>Current year benefit payment</i>
Liabilitas akhir tahun	646.446.873	634.268.491	<i>Liabilities at end of year</i>

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	634.268.491	698.738.087	<i>Present value of liabilities - beginning of year</i>
Biaya jasa kini	10.164.223	9.104.564	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	52.834.565	48.911.666	<i>Interest cost</i>
Ekspektasi pembayaran imbalan	(83.523.124)	(78.210.570)	<i>Expected benefit payments</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial	32.702.718	(44.275.256)	<i>Actuarial loss (gain)</i>
Nilai kini liabilitas akhir tahun	646.446.873	634.268.491	<i>Present value of liabilities - end of year</i>

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2019 dan 2018 is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Jatuh tempo <= 1 tahun	66.532.257	70.202.653	<i>Maturity <= 1 year</i>
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	301.100.463	317.711.319	<i>Maturity > 1 year and <= 5 years</i>
Jatuh tempo > 5 tahun	756.298.637	704.691.488	<i>Maturity > 5 years</i>
Total	1.123.931.357	1.092.605.460	<i>Total</i>

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	51.114.024	(60.843.569)	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	1.714.145	(2.191.585)	<i>Current service cost</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti besar merupakan manfaat yang diperhitungkan mengacu kepada Peraturan Perusahaan. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus dan diberikan bantuan cuti besar sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap. Program ini tidak didanai.

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

27. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

d. Other long-term employee benefits

Other long-term permanent employee benefits are in the form of long service leave benefits that are calculated in reference to the Company's Regulation. Participants include all employees that have worked at least 6 (six) years of continuous service and given assistance amounting to 1 (one) time the regular income. This program is not funded.

d. Other long-term employee benefits (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas	29.042.101	24.291.771	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	-	-	Fair value of plan assets
Liabilitas yang diakui	29.042.101	24.291.771	Recognized liabilities
	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Biaya jasa kini	4.022.673	3.886.261	Current service cost
Biaya bunga	2.023.505	1.905.647	Interest cost
Kerugian atau (keuntungan) aktuarial	448.046	(7.814.219)	Actuarial loss or (gain)
Beban imbalan kerja lain	(1.437.912)	-	Other employee benefit cost
Beban (keuntungan) yang diakui	5.056.312	(2.022.311)	Recognized expense (income)
	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Liabilitas awal tahun	24.291.771	27.223.534	Liabilities at beginning of year
Beban (penghasilan) yang diakui dalam laba rugi	5.056.312	(2.022.311)	Expense (income) recognized in profit or loss
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(305.982)	(909.452)	Current year benefit payment
Liabilitas akhir tahun	29.042.101	24.291.771	Liabilities at end of year

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

27. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

d. Other long-term employee benefits (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	24.291.771	27.223.534	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini	4.022.673	3.886.261	Current service cost
Biaya jasa lalu	(1.437.912)	-	Past service cost
Biaya bunga	2.023.505	1.905.647	Interest cost
Ekspektasi pembayaran imbalan	(305.982)	(909.451)	Expected benefit payments
Kerugian (keuntungan) aktuarial	448.046	(7.814.220)	Actuarial loss (gain)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	29.042.101	24.291.771	Present value of liabilities - end of year

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2019 and 2018 is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Jatuh tempo <= 1 tahun	3.604.833	4.716.702	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	28.200.991	21.179.476	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	213.737.684	147.505.843	Maturity > 5 years
Total	245.543.508	173.402.021	Total

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2019 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2019:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	1.697.089	(1.916.579)	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	225.807	(255.328)	Current service cost

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2019 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2019:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	(1.913.371)	1.724.657	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	(254.900)	229.472	Current service cost

e. Program pensiun iuran pasti

e. Defined contribution plan

Kelompok Usaha menyediakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sejak tahun 2002. Iuran program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada tahun 2019 dan 2018, iuran program yang dibayarkan Kelompok Usaha masing-masing sebesar Rp5.357.565 dan Rp5.343.045.

The Group provides a defined contribution pension plan for employees hired with permanent status since 2002. The contribution plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. In 2019 and 2018, contribution plan paid by the Group amounted to Rp5,357,565 dan Rp5,343,045, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

28. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah:

Pemegang saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nominal/ Amount	Shareholders
Negara Republik Indonesia	1.444.029	100%	1.444.029.000	Republic of Indonesia

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang telah diaktakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dari Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., modal dasar Perusahaan sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.009.958.000 atau sebanyak 1.009.958 saham.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan sebagai berikut:

- 1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp7.652.976.
- 2) Penambahan penyertaan modal negara tersebut berasal dari pengalihan barang milik negara Kementerian Perhubungan berupa dermaga beton hasil kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Sintete-Sambas, Kalimantan Barat, yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tersebut di atas, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No. RIS-269/MBU/S/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan keputusan sebagai berikut:

- 1) menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (*portepel*) sebesar 7.653 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham sebesar Rp7.653.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.
- 2) menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebesar Rp7.653.000 melalui:

28. SHARE CAPITAL

The Shareholders of the Company as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Based on General Meeting of Shareholders' held on August 15, 2008 that was notarized through Notarial Deed No. 2 of Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., the Company's authorized capital amounted to Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp1,009,958,000 divided into 1,009,958 shares.

Based on the Regulation of Government of The Republic of Indonesia No.58 Year 2011 dated December 22, 2011 about Additional Participation Capital of The Republic of Indonesia in the Company as follows:

- 1) The additional share capital of the government amounted to Rp7,652,976.
- 2) Additional share capital by the government came from the transfer of concrete jetty owned by Ministry of Transportation as a result of port development activities in Sintete-Sambas, West Kalimantan, provided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (State Revenue and Expenditure Budget) in 2005.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2011, the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company was conducted as stipulated in the Minutes of Meeting No. RIS-269/MBU/S/2012 dated July 18, 2012 with decision as follows:

- 1) approved the disbursement/placement of shares that were still in portfolio of 7,653 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share amounting to Rp7,653,000, which was fully taken by the Republic of Indonesia.
- 2) approved additional paid-in capital of the Company owned by the Republic of Indonesia amounting to Rp7,653,000 through:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

28. MODAL SAHAM (lanjutan)

- a) sebesar Rp7.652.976 merupakan penambahan penyertaan modal negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan;
- b) sebesar Rp24 berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana dalam surat No. 020/LA-PL.II/V/12 tanggal 25 Mei 2012.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 03 tanggal 2 Agustus 2013, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada Rukindo dalam rangka restrukturisasi Rukindo.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

Dengan adanya perubahan jenis saham tersebut, modal dasar perseroan adalah sebesar Rp4.000.000.000 yang terdiri dari 4.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 3.999.999 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah di ambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp1.444.029.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 1.444.028 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

28. SHARE CAPITAL (continued)

- a) Rp7,652,976 as additional share capital of the government as stated in Government Regulation No. 58 Year 2011 regarding Additional Capital contribution by the Government of the Republic of Indonesia into the Company's share capital;
- b) Rp24 taken from the Company's reserve capitalization as stated in the 2011 financial statements audited by KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan through letter No. 020/LA-PL.II/V/12 dated May 25, 2012.

Based on the Deed of Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as notarized in the Notarial Deed No. 03 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 2, 2013, the Government of the Republic of Indonesia which in this case was represented by the Minister of SOEs increased its investment in the Company by Rp426,418,000 which was derived from the transfer of the entire share capital owned by the Republic of Indonesia in Rukindo for restructuring of Rukindo.

With the additional capital contribution by the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company changed from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

Based on Minister of SOEs Decree Statement as The General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which was notarized on Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 09 dated August 21, 2019, The Government of the Republic Indonesia, in this case represented by the Minister of SOEs, changed the types of shares that were originally without series became consisted of Series A Dwiwarna Shares and Series B shares.

With the changes in types of shares, Company's authorized capital of the company is Rp4,000,000,000 consisting of 4,000,000 shares and divided into one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 3,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp1,444,029,000 consisting of one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 1,444,028 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. MODAL DONASI

Pada tahun 1997, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa tanah dan gedung CDC dari Yayasan Sekar Laut masing-masing sebesar Rp1.820.092 dan Rp23.957.447.

Pada tahun 2009, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa gedung stasiun pandu dari Pemerintah Daerah Cilegon sebesar Rp1.048.443.

30. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

	Aset Neto/Net Assets	
	31 Desember/ December 31,	
	2019	2018
IKT	734.895.768	656.038.040
JAI	411.528.755	458.295.885
API	68.594.301	28.902.764
EPI	48.589.605	47.475.705
EDII	47.710.363	47.867.154
ILCS	31.094.899	44.028.484
MTI	5.898.716	5.938.965
RSP	194.516	917.987
Rukindo	130.526	(4.276)
PTP	44.218	58.517
IPC TPK	26.039	25.576
PPI	18.370	2.206
JPPI	(206)	(356)
PMLI	(1.834)	(2.850)
PII	(39.247)	(4.242)
Total	1.348.684.789	1.289.539.559

29. DONATED CAPITAL

In 1997, the Company received donated capital in the form of land and CDC building from Yayasan Sekar Laut amounting to Rp1,820,092 and Rp23,957,447.

In 2009, the Company received donated capital in form of pilotage station building from the Local Government of Cilegon amounting to Rp1,048,443.

30. NON-CONTROLLING INTERESTS

	Laba (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)	
	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2019	2018
IKT	30.107.262	17.048.717
JAI	16.483.424	18.459.323
API	316.272	(911.689)
EPI	6.417.198	7.071.063
EDII	7.565.246	8.669.646
ILCS	(13.004.818)	622.252
MTI	202.359	312.339
RSP	(94.703)	88.612
Rukindo	2.179	174
PTP	15.232	36.944
IPC TPK	30.555	35.894
PPI	24.174	13.794
JPPI	150	501
PMLI	1.016	819
PII	(17.998)	(230)
Total	48.047.548	51.448.159

31. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

a. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 13 tanggal 29 April 2019 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:

- penggunaan laba neto konsolidasian Perusahaan tahun buku 2018 sebagai berikut:
 - pembagian dividen tunai sebesar 35% dari laba neto atau sebesar Rp832.742.000.
 - penetapan cadangan sebesar 65% dari laba neto atau sebesar Rp1.546.519.695.

Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 27 Mei 2019.

31. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE

a. Based on the General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 13 on April 29, 2019 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn the shareholders approved, among others:

- utilization of 2018 consolidated net income of the Company as follows:
 - distribution of cash dividends 35% of net income or amounted to Rp832,742,000.
 - reserve 65% of net income or amounted to Rp1,546,519,695.

The Company has paid the above mentioned dividend on May 27, 2019.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

31. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM (lanjutan)

b. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 02 tanggal 3 April 2018 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:

- penggunaan laba neto konsolidasian Perusahaan tahun buku 2017 sebagai berikut:
 - pembagian dividen tunai sebesar 30% dari laba neto atau sebesar Rp653.968.052.
 - penetapan cadangan sebesar 70% dari laba neto atau sebesar Rp1.525.925.454.

Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 30 April 2018.

31. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE (continued)

b. Based on the General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 02 on April 3, 2018 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., the shareholders approved, among others:

- utilization of 2017 consolidated net income of the Company as follows:
 - distribution of cash dividends 30% of net income or amounted to Rp653,968,052.
 - reserve 70% of net income or amounted to Rp1,525,925,454.

The Company has paid the above mentioned dividend on April 30, 2018.

32. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

32. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(510.069.366)	(442.795.382)	Remeasurement of defined benefit plans
Pos yang akan direklasifikasi akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	620.425.512	373.526.146	Exchange difference due to financial statements translation
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(215.365.006)	(45.328.052)	Changes in fair value of available-for-sale financial assets
Total	(105.008.860)	(114.597.288)	Total

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan merupakan penjabaran laporan keuangan JICT, NPCT1 dan TPK Koja yang mata uang fungsionalnya adalah Dolar Amerika Serikat.

Exchange difference due to financial statements translation represents translation of financial statements of JICT, NPCT1 and TPK Koja which functional currency is United States Dollar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(317.597.475)	(317.597.475)	<i>Difference in value of business combination transaction of entities under common control</i>
<p>Pada tanggal 2 Agustus 2013, Perusahaan menerima pengalihan seluruh saham Rukindo milik Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan nilai pengalihan sebesar Rp426.418.000 (Catatan 28). Atas pengalihan tersebut, Perusahaan memiliki 100% saham Rukindo.</p> <p>Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:</p>			
Aset neto Rukindo pada tanggal pengalihan		108.820.525	<i>Net assets of Rukindo as of transfer date</i>
Nilai pengalihan		426.418.000	<i>Transfer amount</i>
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali		(317.597.475)	<i>Difference in value of business combination transaction of entity under common control</i>

34. PENDAPATAN OPERASI

34. OPERATING REVENUES

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Pelayanan jasa terminal	3.267.617.624	3.242.900.495	<i>Terminal services</i>
Pelayanan terminal petikemas	2.603.524.300	2.706.288.702	<i>Container services</i>
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	2.852.740.624	2.873.048.549	<i>Land, building, water and electricity services</i>
Pelayanan jasa kapal	1.322.240.654	1.416.634.965	<i>Vessel services</i>
Jasa logistik	385.563.738	314.494.106	<i>Logistic services</i>
Pelayanan kesehatan	271.456.635	264.847.834	<i>Medical services</i>
Pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi	126.790.040	137.146.663	<i>Network services and consultant of information system</i>
Pendapatan pas pelabuhan	109.219.182	86.651.881	<i>Port entry fee</i>
Pelayanan jasa barang	107.220.693	151.122.002	<i>Cargo services</i>
Pengusahaan peralatan	66.735.164	98.587.873	<i>Equipment services</i>
Pendapatan kebersihan	8.817.006	12.403.493	<i>Cleaning services</i>
Jasa keuangan	6.387.167	111.746.400	<i>Financial service</i>
Lain-lain	13.439.398	20.827.931	<i>Others</i>
Total	11.141.752.225	11.436.700.894	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

35. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan terminal Kalibaru dan Kijing. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

35. CONSTRUCTION REVENUES AND EXPENSES

Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for construction of Kalibaru and Kijing terminal. Construction revenue is measured using cost method, where all costs are directly attributable to the acquiring cost of the assets.

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Pendapatan konstruksi	1.542.697.617	781.658.834	Construction revenues
Beban konstruksi	(1.542.697.617)	(781.658.834)	Construction expenses

36. BEBAN OPERASI

36. OPERATING EXPENSES

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Pegawai	2.639.837.009	2.355.638.314	Employee
Kerja sama mitra usaha	2.568.723.277	2.561.594.144	Partnership
Umum	1.211.702.460	1.050.157.293	General
Bahan bakar dan bahan habis pakai	897.934.623	884.189.512	Fuels and supplies
Penyusutan dan amortisasi	863.705.620	773.359.280	Depreciation and amortization
Pemeliharaan	168.627.849	265.089.798	Maintenance
Administrasi kantor	104.292.888	98.934.022	Office administration
Asuransi	64.907.607	52.834.385	Insurance
Lain-lain	626.340	758.072	Others
Total	8.520.357.673	8.042.554.820	Total

Kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi seperti perusahaan-perusahaan operator fasilitas pelabuhan yang menyediakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan serta beban pegawai nonorganik.

The partnership expenses mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners such as port facilities' management companies for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

Beban umum terutama merupakan beban konsesi, beban jasa konsultan, imbalan kerja, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan dan pemasaran.

General expenses mainly consist of concession fee, consultants, employee benefits, business travelling, education and training and marketing expenses.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

37. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA – NETO

37. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSE) - NET

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Laba (rugi) selisih kurs - neto	322.213.993	(672.041.473)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Amortisasi premium (Catatan 46a, 46b dan 46e)	146.997.708	146.997.708	Amortization of premium (Notes 46a, 46b and 46e)
Pendapatan atas pengalihan aset	67.101.548	535.961.600	Income from assets transfer
Laba (rugi) penjualan aset tetap	45.882.184	6.546.554	Gain (loss) on sale of fixed assets
Pendapatan denda	20.716.447	58.039.661	Income from penalties
Beban pajak penghasilan final	(144.760.388)	(121.554.898)	Final income tax expense
Beban denda	(105.916.793)	(219.167.681)	Expenses from penalties
Lain-lain - neto	364.879.815	68.857.955	Others - net
Total	717.114.514	(196.360.574)	Total

Pendapatan atas pengalihan aset merupakan perolehan aset tetap karena berakhirnya perjanjian kerjasama.

Income from assets transfer represents acquisition of fixed assets as a result of end of cooperation agreement.

Beban denda merupakan denda pajak.

Expense from penalties represents tax penalty.

38. PENDAPATAN KEUANGAN

38. FINANCE INCOME

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Pendapatan bunga deposito	771.045.247	580.413.469	Interest income from deposits
Pendapatan jasa giro	65.214.865	108.500.831	Interest income on current account
Total	836.260.112	688.914.300	Total

39. BEBAN KEUANGAN

39. FINANCE COSTS

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Beban bunga dan amortisasi diskonto dan biaya transaksi	1.197.098.875	1.128.468.251	Interest expenses and amortization of discount and transaction cost
Beban administrasi	3.138.214	2.313.765	Administration expenses
Total	1.200.237.089	1.130.782.016	Total

40. BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI

40. EQUITY IN INCOME OF ASSOCIATES

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
JICT	138.210.596	202.616.584	JICT
NPCT1	101.023.133	171.964.086	NPCT1
CTP	1.894.058	2.857.275	CTP
TPI	(559.444)	(1.237.352)	TPI
Total	240.568.343	376.200.594	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengendalian dengan Kelompok Usaha.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

Sifat hubungan berelasi

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Pemegang saham/ <i>Controlling Shareholder</i>	Negara Republik Indonesia	Jasa konsesi/ <i>Concession service</i>
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i>
	PT Bank Syariah Mandiri	Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i>
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank BNI Syariah	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT BRI Agroniaga Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>

41. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group enters into transactions with related parties. Entities are considered to be related if, among these, the company has the ability, directly or indirectly, to control or jointly control or have significant influence over these entities in making financial and operating decisions. Entities are also considered to be related if they are under common control with the Group.

The Government of the Republic of Indonesia is the controlling shareholder of the Company. All entities that are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and also entities where the Republic of Indonesia has significant influence are related parties.

Nature of relationship with related parties

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**41. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**41. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity		
	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	Koperasi Pegawai Maritim	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Multimedia Nusantara	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Nusantara Regas	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Pertamina Patra Niaga	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	Koperasi Karyawan TPK KOJA	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan jasa/Sales
	PT Semen Padang	Penjualan jasa/Sales
	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penjualan jasa/Sales
	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Dharma Lautan Nusantara	Penjualan jasa/Sales
	Tentara Nasional Indonesia	Penjualan jasa/Sales
	Instansi Pemerintah	Penjualan jasa/Sales
	BPJS Kesehatan	Penjualan jasa/Sales
	PT Pupuk Indonesia Logistik	Penjualan jasa/Sales

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**41. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**41. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity		
	PT Graha Sarana Duta	Penjualan jasa/Sales
	PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT BNI Life Insurance	Penjualan jasa/Sales
	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Pertamina Trans Kontinental (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Bukit Asam Tbk	Penjualan jasa/Sales
	PT Perkebunan Nusantara VII	Penjualan jasa/Sales
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Utama Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Wijaya Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ Construction services
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan (DP4)	Jasa pension/ Pension services
	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Pinjaman/Loan
	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Pinjaman/Loan
	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Pinjaman/Loan
	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Pinjaman/Loan
Entitas asosiasi/Associate entities	JICT	Sewa dan Royalti/ Rental and Royalty
	NPCT1	Investasi/Investment
Operasi bersama/Joint operation	TPK Koja	Sewa dan Royalti Rental and Royalty

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**41. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**41. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi

Transactions with related parties

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

a. Cash and cash equivalent (Note 4)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019		31 Desember 2018/ December 31, 2018		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
Bank					Cash in banks
Rupiah					Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	516.127.675	0,99	873.774.196	1,75	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	140.963.425	0,27	767.519.280	1,49	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	19.976.271	0,04	32.711.087	0,06	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	10.386.922	0,02	2.814.711	0,01	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BNI Syariah	9.671.050	0,02	7.222.415	0,01	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.244.179	0,00	802.805.464	1,56	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Total	698.369.522	1,34	2.486.847.153	4,88	Total
Dolar AS					US Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	193.637.340	0,37	15.766.760	0,03	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	36.287.523	0,07	40.066.025	0,08	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	24.318.481	0,05	8.062.416	0,02	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total	254.243.344	0,49	63.895.201	0,13	Total
Euro					Euro
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	44	0,00	320.652	0,00	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	44	0,00	320.652	0,00	Total
Deposito Berjangka					Time Deposits
Rupiah					Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.073.096.983	2,05	854.768.648	1,66	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	583.240.758	1,11	930.074.000	1,81	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	548.297.580	1,05	557.631.769	1,08	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	275.290.490	0,53	25.000.000	0,05	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	131.816.463	0,25	10.535.860	0,02	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	19.500.000	0,04	-	0,00	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
Total	2.631.242.274	5,03	2.378.010.277	4,62	Total
Dolar AS					US Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.144.937.050	11,73	3.673.467.675	7,14	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.906.696.846	9,37	5.032.416.814	9,78	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	67.167.619	0,13	-	0,00	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	11.118.801.515	21,23	8.705.884.489	16,92	Total
Dolar Singapura					Singapore Dollar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	0,00	471.954.525	0,92	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total	-	0,00	471.954.525	0,92	Total

*) dari total aset

*) from total assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**41. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**41. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

b. Investasi jangka pendek (Catatan 5)

b. Short-term investment (Note 5)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019		31 Desember 2018/ December 31, 2018		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
Deposito berjangka					Time deposits
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	104.642.400	0,20	-	0,00	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	0,00	203.053.994	0,39	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	0,00	4.000.000	0,01	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
<u>Dolar AS</u>					<u>US Dollar</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.154.655.000	4,11	-	0,00	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	0,00	2.099.745.000	4,08	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	0,00	796.455.000	1,55	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	2.259.297.400	4,31	3.103.253.994	6,03	Total

*) dari total aset

*) from total assets

c. Piutang usaha (Catatan 6)

c. Trade receivables (Note 6)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019		31 Desember 2018/ December 31, 2018		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
BPJS Kesehatan	67.589.555	0,13	46.293.536	0,09	BPJS Kesehatan
PT Djakarta Lloyd (Persero)	63.483.316	0,12	5.294.060	0,05	PT Djakarta Lloyd (Persero)
PT Semen Padang	17.401.269	0,03	12.849.176	0,02	PT Semen Padang
Tentara Nasional Indonesia	13.197.544	0,03	19.839.702	0,04	Indonesian Armed Forces
PT Pertamina Trans Kontinental	12.776.013	0,02	27.555.316	0,02	PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertamina (Persero)	9.830.300	0,02	10.441.787	0,02	PT Pertamina (Persero)
PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	5.896.327	0,01	7.619.639	0,01	PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	5.569.386	0,01	5.752.618	0,01	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Dharma Lautan Nusantara	4.797.674	0,01	5.391.534	0,01	PT Dharma Lautan Nusantara
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	4.723.761	0,01	3.360.219	0,01	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	1.448.414	0,00	399.723	0,00	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.024.346	0,00	12.605.742	0,00	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Bukit Asam	606.642	0,00	363.661	0,00	PT Bukit Asam
Instansi Pemerintah	190.719	0,00	2.290.123	0,41	Government Institutions
Lain-lain	136.857.151	0,26	50.115.601	0,04	Others
Subtotal	345.392.417	0,65	210.172.437	0,73	Sub-total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(210.193.679)	(0,41)	(54.297.115)	(0,11)	Less: Allowance for impairment
Total	135.198.738	0,24	155.875.322	0,62	Total

*) dari total aset

*) from total assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**41. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

d. Piutang lain-lain (Catatan 7)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
JICT	659.701.914	1,26
CTP	111.545.526	0,22
Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	11.989.210	0,02
Instansi Pemerintah	2.688.218	0,01
PT Hutama Karya (Persero)	1.550.567	0,00
NPCT1	1.391.404	0,00
Tentara Nasional Indonesia	934.500	0,00
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	336.006	0,00
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	234.199	0,00
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	230.455	0,00
Lain-lain	30.616.705	0,05
Subtotal	821.218.704	1,56
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(36.267.285)	(0,07)
Total	784.951.419	1,49

*) dari total aset

e. Pendapatan masih akan diterima (Catatan 9)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
BPJS Kesehatan	40.512.903	0,08
JICT	2.600.380	0,00
NPCT1	1.730.516	0,00
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	560.228	0,00
PT Graha Sarana Duta	-	-
PT Pupuk Indonesia Logistik	-	-
Lainnya	1.182.464	0,00
Total	46.586.491	0,08

*) dari total aset

f. Pinjaman bank jangka pendek (Catatan 17)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT Bank Syariah Mandiri	28.193.914	0,08
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	0,00
Total	28.193.914	0,08

**) dari total liabilitas

**41. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

d. Other receivables (Note 7)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
JICT	617.883.980	1,20
CTP	-	0,00
Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	11.989.210	0,02
Government Institutions	2.359.080	0,00
PT Hutama Karya (Persero)	1.550.567	0,00
NPCT1	1.171.307	0,00
Indonesia Armed Forces	934.500	0,00
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	336.006	0,00
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	234.199	0,00
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	230.455	0,00
Others	31.317.306	0,07
Sub-total	672.932.848	1,29
Less: Allowance for impairment	(32.764.117)	(0,06)
Total	640.168.731	1,23

*) from total assets

e. Accrued revenues (Note 9)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
BPJS Kesehatan	48.952.082	0,10
JICT	7.757.513	0,00
NPCT1	1.860.619	0,00
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	3.673.517	0,01
PT Graha Sarana Duta	1.798.307	0,00
PT Pupuk Indonesia Logistik	1.469.544	0,00
Others	442.227	0,00
Total	65.953.809	0,11

*) from total assets

f. Short-term bank loans (Note 17)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT Bank Syariah Mandiri	-	0,00
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.000.000	0,00
Total	4.000.000	0,00

**) from total liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**41. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

g. Utang usaha (Catatan 18)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019			31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**		Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	573.631.158	1,69	981.127.161	2,80	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Multimedia Nusantara	12.207.051	0,04	7.150.728	0,02	PT Multimedia Nusantara
PT Wijaya Karya (Persero)	9.570.900	0,03	9.569.863	0,03	PT Wijaya Karya (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	6.607.716	0,02	31.091.334	0,09	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Koperasi Pegawai Maritim	4.772.648	0,01	15.967.235	0,05	Koperasi Pegawai Maritim
PT Pertamina Patra Niaga	3.869.484	0,01	1.930.142	0,01	PT Pertamina Patra Niaga
PT Nusantara Regas	1.366.406	0,00	5.023.508	0,01	PT Nusantara Regas
PT Waskita Karya (Persero)	630.558	0,00	19.640.664	0,06	PT Waskita Karya (Persero)
Koperasi Karyawan TPK KOJA	478.459	0,00	1.715.265	0,00	Koperasi Karyawan TPK KOJA
PT Pertamina (Persero)	240.739	0,00	4.699.556	0,01	PT Pertamina (Persero)
PT Jakarta Internasional Container Terminal	30.369	0,00	18.982.268	0,05	PT Jakarta Internasional Container Terminal
PT Hutama Karya (Persero)	-	0,00	45.800.631	0,13	PT Hutama Karya (Persero)
PT PLN (Persero)	-	0,00	1.612.737	0,00	PT PLN (Persero)
Lain-lain	463.147.299	1,37	102.697.408	0,29	Others
Total	1.076.552.787	3,17	1.247.008.500	3,55	Total

**/ dari total liabilitas

**/ from total liabilities

h. Uang untuk diperhitungkan (Catatan 19)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019			31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**		Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
Tentara Nasional Indonesia	708.865	0,00	8	0,00	Indonesian Armed Forces
PT. Pertamina Trans Kontinental	55.036	0,00	38.799	0,00	PT. Pertamina Trans Kontinental
PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	49.603	0,00	74.770	0,00	PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)
Instansi Pemerintah	18.512	0,00	19.194	0,00	Government Institutions
PT. Semen Padang	1.448	0,00	169.011	0,00	PT. Semen Padang
PT Pertamina (Persero)	-	0,00	14.230	0,00	PT Pertamina (Persero)
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	-	0,00	1.995	0,00	PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain	116.787	0,00	710.100	0,00	Others
Total	950.251	0,00	1.028.107	0,00	Total

**/ dari total liabilitas

**/ from total liabilities

i. Uang titipan pelanggan (Catatan 21)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019			31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**		Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT BNI Life Insurance	5.833.813	0,02	4.351.784	0,01	PT BNI Life Insurance
Instansi Pemerintah	1.682.618	0,00	2.918.247	0,01	Government Institutions
PT Bhanda Ghara Reksa	1.211.447	0,00	1.211.447	0,00	PT Bhanda Ghara Reksa
BPJS Kesehatan	344.708	0,01	2.336.222	0,01	BPJS Kesehatan
Lain-lain	9.309.461	0,01	3.930.781	0,01	Others
Total	18.382.047	0,04	14.748.481	0,04	Total

**/ dari total liabilitas

**/ from total liabilities

**41. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

g. Trade payables (Note 18)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	981.127.161	2,80
PT Multimedia Nusantara	7.150.728	0,02
PT Wijaya Karya (Persero)	9.569.863	0,03
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	31.091.334	0,09
Koperasi Pegawai Maritim	15.967.235	0,05
PT Pertamina Patra Niaga	1.930.142	0,01
PT Nusantara Regas	5.023.508	0,01
PT Waskita Karya (Persero)	19.640.664	0,06
Koperasi Karyawan TPK KOJA	1.715.265	0,00
PT Pertamina (Persero)	4.699.556	0,01
PT Jakarta Internasional Container Terminal	18.982.268	0,05
PT Hutama Karya (Persero)	45.800.631	0,13
PT PLN (Persero)	1.612.737	0,00
Others	102.697.408	0,29
Total	1.247.008.500	3,55

h. Advances from customer (Note 19)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
Indonesian Armed Forces	8	0,00
PT. Pertamina Trans Kontinental	38.799	0,00
PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	74.770	0,00
Government Institutions	19.194	0,00
PT. Semen Padang	169.011	0,00
PT Pertamina (Persero)	14.230	0,00
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.995	0,00
Others	710.100	0,00
Total	1.028.107	0,00

i. Deposits from customer (Note 21)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT BNI Life Insurance	4.351.784	0,01
Government Institutions	2.918.247	0,01
PT Bhanda Ghara Reksa	1.211.447	0,00
BPJS Kesehatan	2.336.222	0,01
Others	3.930.781	0,01
Total	14.748.481	0,04

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**41. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

j. Liabilitas jangka pendek lainnya dan liabilitas jangka panjang lainnya (Catatan 21 and 26)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
Jangka pendek (Catatan 21)		
JICT	38.980.725	0,11
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	31.666.118	0,09
Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	2.714.983	0,00
Total	73.361.826	0,20
Jangka panjang (Catatan 26)		
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	27.137.737	0,08
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	3.000.000	0,01
Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	-	0,01
Total	30.137.737	0,10

**) dari total liabilitas

k. Utang bank jangka panjang (Catatan 23)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT Bank Syariah Mandiri	114.990.000	0,00

**) dari total liabilitas

l. Remunerasi personal manajemen kunci

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar atau diakru untuk Dewan Komisaris dan Direksi Kelompok Usaha adalah sebesar Rp220.171.759 dan Rp169.747.210, masing-masing untuk tahun 2019 dan 2018.

**41. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

j. Other short-term liabilities and other long-term liabilities (Note 21 and 26)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
Short-term (Note 20)		
JICT	38.980.725	0,11
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	31.666.118	0,09
Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	4.842.298	0,01
Total	75.489.141	0,21
Long-term (Note 26)		
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	29.349.280	0,08
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	8.923.000	0,03
Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	-	0,00
Total	38.272.280	0,11

**) from total liabilities

k. Long-term bank loan (Note 23)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT Bank Syariah Mandiri	-	0,00

**) from total liabilities

l. Key management personnel remuneration

Total salaries and other short-term benefits paid to or accrued for the Group's Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp222,171,759 and Rp169,747,210 for 2019 and 2018, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**42. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING**

**42. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

		31 Desember 2019/ December 31, 2019			
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ In foreign currencies (full amount)	Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah		
Aset				Assets	
Kas dan setara kas	USD	824.640.189	11.463.323.271	Cash and cash equivalents	
	EUR	3	44		
Investasi jangka pendek	USD	155.000.000	2.154.655.000	Short-term investments	
Piutang usaha	USD	3.968.641	55.168.077	Trade receivables	
	SGD	7.645	78.902		
Piutang lain-lain	USD	863.760	12.007.121	Other receivables	
Total aset			13.685.232.415	Total assets	
Liabilitas				Liabilities	
Utang obligasi	USD	1.600.000.000	22.241.600.000	Bonds payables	
Utang usaha	USD	35.140.494	488.488.004	Trade payables	
	EUR	8.000	124.704		
Liabilitas jangka pendek lainnya	USD	2.804.167	38.980.725	Other short-term liabilities	
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.888	225.013.928	Other long-term liabilities	
Total liabilitas			22.994.207.361	Total liabilities	
Liabilitas neto			9.308.974.946	Net liabilities	
		31 Desember 2018/ December 31, 2018			
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ In foreign currencies (full amount)	Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah		
Aset				Assets	
Kas dan setara kas	USD	811.587.784	11.752.602.695	Cash and cash equivalents	
	EUR	19.363	320.652		
	SGD	44.511.540	471.954.525		
Investasi jangka pendek	USD	200.000.000	2.896.200.000	Short-term investments	
Piutang usaha	USD	6.316.900	91.475.032	Trade receivables	
	SGD	3.059.518	32.439.975		
Piutang lain-lain	USD	299.916	4.343.080	Other receivables	
Total aset			15.249.335.959	Total assets	
Liabilitas				Liabilities	
Utang obligasi	USD	1.600.000.000	22.890.166.969	Bonds payables	
Utang usaha	USD	384.978	6.535.090	Trade payables	
Liabilitas jangka pendek lainnya	USD	2.691.853	38.980.725	Other short-term liabilities	
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.882	234.402.238	Other long-term liabilities	
Total liabilitas			23.170.085.022	Total liabilities	
Liabilitas neto			7.920.749.063	Net liabilities	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

43. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

43. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

		31 Desember 2019/ December 31, 2019			
		Nilai Tercatat/ Carrying Values	Nilai Wajar/ Fair Value		
Aset Keuangan				Financial Assets	
Kas dan setara kas		15.603.553.329	15.603.553.329	Cash and cash equivalents	
Investasi jangka pendek		2.596.701.126	2.596.701.126	Short-term investments	
Piutang usaha - neto		848.025.482	848.025.482	Trade receivables - net	
Piutang lain-lain - neto		830.069.397	860.069.397	Other receivables - net	
Pendapatan masih akan diterima		305.452.354	305.452.354	Accrued revenues	
Aset lancar lainnya		10.253.126	10.253.126	Other current assets	
Investasi jangka panjang		3.211.023.600	3.211.023.600	Long term investment	
Aset tidak lancar lainnya		306.328.874	306.328.874	Other non-current assets	
Total		23.741.407.288	23.741.407.288	Total	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities	
Pinjaman bank jangka pendek		34.193.914	34.193.914	Short-term bank loans	
Utang usaha		1.436.482.338	1.436.482.338	Trade payables	
Beban akrual		2.274.726.626	2.274.726.626	Accrued expenses	
Liabilitas jangka pendek lainnya		295.199.785	295.199.785	Other current liabilities	
Utang obligasi		21.984.178.194	21.984.178.194	Bonds payable	
Pinjaman bank jangka panjang		114.990.000	114.990.000	Long-term bank loans	
Liabilitas jangka panjang lainnya		257.866.648	257.866.648	Other non-current liabilities	
Total		26.397.637.505	26.397.637.505	Total	
		31 Desember 2018/ December 31, 2018			
		Nilai Tercatat/ Carrying Values	Nilai Wajar/ Fair Value		
Aset Keuangan				Financial Assets	
Kas dan setara kas		18.018.671.479	18.018.671.479	Cash and cash equivalents	
Investasi jangka pendek		3.836.007.289	3.836.007.289	Short-term investments	
Piutang usaha - neto		789.953.354	789.953.354	Trade receivables - net	
Piutang lain-lain - neto		649.698.814	649.698.814	Other receivables - net	
Pendapatan masih akan diterima		322.868.072	322.868.072	Accrued revenues	
Aset lancar lainnya		6.139.521	6.139.521	Other current assets	
Investasi jangka panjang		3.211.737.431	3.211.737.431	Long term investment	
Aset tidak lancar lainnya		67.145.691	67.145.691	Other non-current assets	
Total		26.902.221.651	26.902.221.651	Total	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities	
Pinjaman bank jangka pendek		4.000.000	4.000.000	Short-term bank loans	
Utang usaha		1.665.907.713	1.665.907.713	Trade payables	
Beban akrual		2.316.108.053	2.316.108.053	Accrued expenses	
Liabilitas jangka pendek lainnya		275.588.175	275.588.175	Other current liabilities	
Utang obligasi		22.890.166.969	22.890.166.969	Bonds payable	
Liabilitas jangka panjang lainnya		272.674.518	272.674.518	Other non-current liabilities	
Total		27.424.445.428	27.424.445.428	Total	

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat, baik karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Kelompok Usaha menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang mencakup, antara lain, kas dan setara kas, investasi jangka pendek - deposito berjangka, investasi jangka pendek - aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi jangka panjang - entitas asosiasi, pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual dan liabilitas jangka pendek lainnya, dianggap mendekati jumlah tercatatnya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.
- Investasi jangka pendek - efek yang diperdagangkan dan investasi jangka panjang - penyertaan saham dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar. Investasi jangka panjang - surat utang dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- Aset keuangan tersedia untuk dijual yang terdiri dari investasi pada saham dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dicatat pada biaya perolehan karena investasi pada instrumen ekuitas tersebut tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.
- Nilai wajar aset keuangan tidak lancar lainnya dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**43. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions:

- *The fair value of current financial assets and current financial liabilities which includes, among others, cash and cash equivalents, short-term investments - time deposits, short-term investments - financial assets measured at fair value through profit or losses, trade receivables, other receivables, accrued revenues, long-term investments - associates, short-term bank loans, trade payables, accrued expenses and other current liabilities, are considered to approximate their carrying amounts as a result of insignificant discounting.*
- *Short-term investments - marketable securities and long-term investments - investment in share of stocks are presented at fair value using market price quotation. Long-term investments - bonds are presented at fair value by reference to similar bond price at reporting date.*
- *Available-for-sale financial assets that comprised investments in shares with percentage of ownership interest less than 20% are recognized at cost due to such investments in equity instruments have no quoted market price in an active market and their fair value cannot be reliably measureable.*
- *The fair values of other non-current financial assets are carried at historical cost because their fair values cannot be reliably measured. It is not practical to estimate the fair values of such assets because there are no fixed repayment terms although these are not expected to be settled within 12 months after the consolidated statement of financial position date.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Kelompok Usaha menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut: (lanjutan)

- Estimasi nilai wajar utang obligasi, utang bank dan liabilitas jangka panjang lainnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen dengan syarat, risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Estimasi nilai wajar bersifat judgmental dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Kelompok Usaha akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.
- Tingkat 1 : Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

**43. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions: (continued)

- The estimated fair values of bonds payable, bank loans and other long-term liabilities are determined by discounting the future cash flows using market interest rates for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

Fair value estimation is judgmental and involving various boundaries, including:

- Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.
- Fair value estimation are not always indicating value that the Group will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.
- Level 1 : Fair value measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 : Fair value measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.
- Level 3 : Fair value measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair values that are not based on observable market data (unobservable inputs).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, hirarki nilai wajar Kelompok Usaha untuk aset yang nilai wajarnya diungkapkan adalah sebagai berikut:

**43. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

As of December 31, 2019 and 2018, fair value hierarchy of the Group for assets which fair value were disclosed are as follows:

31 Desember 2019/December 31, 2019				
	Total/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan				Assets for which fair value are disclosed
Aset tidak lancar				Non-current Assets
Properti investasi	11.139.878.868	-	11.139.878.868	-
				<i>Investment properties</i>
31 Desember 2018/December 31, 2018				
	Total/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan				Assets for which fair value are disclosed
Aset tidak lancar				Non-current Assets
Properti investasi	10.035.926.908	-	10.035.926.908	-
				<i>Investment properties</i>

Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar Tingkat 1 dan Tingkat 2 dan tidak ada pengalihan dari Tingkat 3 pengukuran nilai wajar.

As of December 31, 2019, there is no transfer between measurement of fair value of Level 1 and Level 2 and no transfer from Level 3 fair value measurements.

Tidak terdapat aset dan liabilitas lain yang diukur dan diungkapkan berdasarkan nilai wajar selain yang telah dijelaskan di atas.

No other assets and liabilities have been measured and disclosed based on fair value other than above explained.

44. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kelompok Usaha terpengaruh terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga atas arus kas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kelompok Usaha menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Kelompok Usaha. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada Kelompok Usaha bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

44. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is exposed to foreign exchange risk, interest rate risk of cashflow, credit risk and liquidity risk. The Group applies risk management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Group. Such risk management provides assurance to the Group that prudent financial activities are managed according to appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

Kelompok Usaha menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

The Group applies policies for managing each of these risks which is summarized below.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Kelompok Usaha. Eksposur Kelompok Usaha terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang obligasi dalam mata uang USD.

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang ada pada saat ini diungkapkan pada Catatan 42. Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 1% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

	(Kenaikan) penurunan nilai tukar mata uang/ (Increases) decreases on foreign exchange rates	Dampak/ Effect	
Perubahan kurs mata uang asing 2019	(+)-100bps (-)-100bps	(93.089.749) 93.089.749	<i>Fluctuation in the foreign exchange rates 2019</i>
Perubahan kurs mata uang asing 2018	(+)-100bps (-)-100bps	(79.207.490) 79.207.490	<i>Fluctuation in the foreign exchange rates 2018</i>

Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

**44. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Group. Exposure of the Group against exchange rate fluctuations is mainly derived from debt arising from bonds payable denominated in USD.

The current exposure to the foreign currency risk is disclosed in Note 42. Sensitivity analysis of a 1% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follow:

Cash flows interest rate risk

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Loans at variable rates are exposed to cash flows risk.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

44. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko suku bunga atas arus kas (lanjutan)

Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset dan liabilitas Kelompok Usaha yang terekspos terhadap risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2019.

	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Total	
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year		
Aset						Assets
Kas dan setara kas	15.603.533.329	-	-	-	15.603.533.329	Cash and cash equivalent
Investasi jangka pendek	-	-	2.259.297.400	-	2.259.297.400	Short-term investments
Total aset	15.603.533.329	-	2.259.297.400	-	17.862.830.729	Total assets
Liabilitas						Liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	-	-	34.193.914	-	34.193.914	Short-term bank loan
Pinjaman bank jangka panjang	-	-	12.000	114.978.000	114.990.000	Long-term bank loan
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-	1.757.192	256.109.456	257.866.648	Other long-term liabilities
Obligasi	-	-	-	21.984.178.194	21.984.178.194	Bonds
Total liabilitas	-	-	35.963.106	22.355.265.650	22.391.228.756	Total liabilities

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Kelompok Usaha akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

44. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Cash flows interest rate risk (continued)

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk is to evaluate by periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducts a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rates.

The following table presents the carrying amount by maturity of the Group's assets and liabilities exposed to interest rate risk as of December 31, 2019.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

44. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Kelompok Usaha mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Kelompok Usaha dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

Kelompok Usaha memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset lain-lain.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018
Aset Keuangan		
Kas dan setara kas	15.603.553.329	18.018.671.479
Investasi jangka pendek	2.596.701.126	3.836.007.289
Piutang usaha - neto	848.025.482	789.953.354
Piutang lain-lain - neto	860.069.397	649.698.814
Pendapatan masih akan diterima	305.452.354	322.868.072
Aset lancar lainnya	10.253.126	6.139.521
Investasi jangka panjang	3.211.023.600	3.211.737.431
Aset tidak lancar lainnya	306.328.874	67.145.691
Total	23.741.407.288	26.902.221.651

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Mengingat bahwa kebutuhan dana Kelompok Usaha saat ini cukup signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Kelompok Usaha terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Kelompok Usaha.

Selain itu, Kelompok Usaha juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.

44. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Credit Risk (continued)

The Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage in credit trade with the Group and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

The Group is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, short-term investments, trade and other receivables, accrued revenues and other assets.

Credit risk exposure relating to assets in the consolidated statements of financial position is as follow:

Financial Assets
Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade receivables - net
Other receivables - net
Accrued revenues
Other current assets
Long-term investment
Other non-current assets

Total

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk that occurs when short-term revenue cannot cover short-term expenditure.

Given that funding requirements of the Group are currently significant as a result of increased activity in development or expansion of business, in managing liquidity risk, the Group continues to monitor and maintain levels of adequacy of cash and cash equivalents to finance the operational needs of the Group.

In addition, the Group also regularly evaluates cash flow projections and actual cash to cope with the impact of fluctuations in cash flow, including the maturity schedule of long-term liabilities and continue to examine the condition of financial markets for placement and fund-raising initiatives, including bank loans, issuance of equity and debt securities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko Likuiditas

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Kelompok Usaha berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

**44. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Liquidity Risk

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments.

	2019					Jumlah/ Total	
	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years			
Pinjaman bank jangka pendek	34.193.914	-	-	-	-	34.193.914	Short-term bank loan
Utang usaha	1.436.482.338	-	-	-	-	1.436.482.338	Trade payables
Beban akrual	2.274.726.626	-	-	-	-	2.274.726.626	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	295.199.785	-	-	-	-	295.199.785	Other short-term liabilities
Utang obligasi	-	-	-	22.241.600.000	-	22.241.600.000	Bonds payable
Pinjaman bank jangka panjang	12.000	114.978.000	-	-	-	114.990.000	Long-term bank loan
Liabilitas jangka panjang lainnya	1.757.192	256.109.456	-	-	-	257.866.648	Other Long-term liabilities
Total	4.042.371.855	371.087.456	-	22.241.600.000	-	26.655.059.311	Total

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Kelompok Usaha adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Kelompok Usaha mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Kelompok Usaha dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Struktur permodalan Kelompok Usaha terdiri dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (terdiri dari modal saham, modal donasi, tambahan modal disetor, dan saldo laba dan penghasilan komprehensif lainnya).

Capital management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Group manages its capital to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position to ensure optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The capital structure of the Group consists of equity attributable to owners of the Parent (consisting of share capital, additional paid-in capital, retained earnings and other comprehensive income).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Penugasan kepada Perusahaan untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, pada tanggal 31 Agustus 2012, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pemberian Konsesi untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Otoritas Pelabuhan) No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 dan No. HK.566/15/11/Pl.II-12 (Perjanjian Konsesi) dimana Otoritas Pelabuhan memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak Otoritas Pelabuhan dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Konsesi berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh para pihak.
- Berdasarkan Perjanjian Konsesi, Perusahaan diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru kepada Otoritas Pelabuhan berupa bank garansi sebesar Rp37.000.000 dan berlaku sampai dengan 15 Januari 2019. Yang kemudian diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2027. Jaminan pelaksanaan tersebut dicatat oleh Perusahaan sebagai bagian dari akun "Aset tidak lancar lainnya" (Catatan 16).

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office**

Based on Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 36 Tahun 2012 dated April 5, 2012 regarding Assignment to the Company to Build and Operate Kalibaru Terminal Tanjung Priok Port, on August 31, 2012, the Company entered into a Concession Agreement to Build and Operate Kalibaru Terminal Tanjung Priok Port with the Office of Tanjung Priok Main Port Authority (Port Authority) No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 and No. HK.566/15/11/Pl.II-12 (Concession Agreement) in which the Port Authority granted rights to the Company, including the right to execute the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of executing the project without limiting the right of Port Authority in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law. Important conditions in the Concession Agreement are as follows:

- Concession Agreement is valid for 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the required technical documents, financial documents, and performance bonds by the parties.
- Under the Concession Agreement, the Company is required to submit a performance bond for development of Kalibaru terminal to the Port Authority in the form of bank guarantee amounting to Rp37,000,000 and is valid until January 15, 2019. Which was extended until December 31, 2027. The performance bond is recorded by the Company as part of "Other non-current assets" (Note 16).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok (lanjutan)**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office (continued)**

- Perusahaan diwajibkan untuk membayar kepada Otoritas Pelabuhan berupa pendapatan konsesi sebesar 0,5% per tahun dari pendapatan kotor yang berasal dari operasi komersial terminal Kalibaru.
 - Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi, Perusahaan diharuskan untuk membangun:
 - Infrastruktur, termasuk pekerjaan pemecah gelombang, pekerjaan pengerukan, jalan akses, reklamasi dan dermaga.
 - Suprastruktur, termasuk *container terminal equipment, product terminal equipment, electrical mechanical dan information communications technology.*
 - Kapal dan fasilitas pendukung lainnya.
 - Perusahaan berhak mengadakan kerjasama kemitraan, sewa dan perjanjian serupa lainnya dengan kontraktor, mitra kerjasama dan anak perusahaan yang didirikan serta pihak ketiga lainnya.
 - Tarif awal yang akan diterapkan dalam area konsesi ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
 - Penyesuaian tarif yang diterapkan dalam area konsesi dapat dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
 - Perusahaan akan berkonsultasi dengan Otoritas Pelabuhan sehubungan dengan tarif sebelum diterapkan kepada pengguna jasa agar dapat memberikan kesempatan bagi Otoritas Pelabuhan untuk memberikan masukan.
 - Perusahaan berhak atas kebijakannya sendiri untuk mengenakan dan memungut tarif area konsesi di dalam area konsesi.
- *The Company is required to pay to Port Authority, in form of concession revenues, 0.5% per annum of the gross revenue derived from the commercial operations in Kalibaru terminal.*
 - *In accordance with the conditions of the Concession Agreement, the Company is required to build:*
 - *Infrastructure, including breakwater works, dredging works, access roads, reclamation and piers.*
 - *Superstructure, including container terminal equipment, product terminal equipment, electrical mechanical and information communications technology.*
 - *Vessels and other supporting facilities.*
 - *The Company has the rights to enter into partnership cooperation, rental and similar agreements with contractors, partners and subsidiaries established as well as with other third parties.*
 - *The initial rate applied in the concession area is set by the Company based on the type, structure and classification of rates set by the Minister.*
 - *Adjustment on rate applied in the concession area can be made by the Company based on the type, structure and classification of rate set by the Minister.*
 - *The Company will consult with the Port Authority regarding the rate before being applied to service users in order to provide opportunity for the Port Authority to provide advice.*
 - *The Company by its own discretion has the right to impose and levy concession rate within the concession area.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok (lanjutan)**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office (continued)**

- Perusahaan dapat memberikan wewenang kepada mitra kerjasama sehubungan dengan tarif area konsesi, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh Perusahaan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Otoritas Pelabuhan akan mengadakan kerjasama pemanfaatan dan pengoperasian dengan Perusahaan selama 25 tahun yang akan dimulai segera setelah berakhirnya jangka waktu konsesi.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan wajib:
 - Menyerahkan penguasaannya atas tanah reklamasi secara damai dan dalam keadaan kosong bersamaan dengan area konsesi dan infrastruktur area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan dan bebas dari setiap bentuk pembebanan.
 - Menyerahkan penguasaannya atas aset tidak bergerak yang dimiliki Perusahaan secara damai di dalam area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan dan bebas dari setiap bentuk pembebanan.
 - Aset bergerak dalam area konsesi yang dimiliki oleh Perusahaan, Perusahaan dapat memilih dengan kebijaksanaannya sendiri, untuk mempertahankan hak, kepemilikan dan kepentingan atas aset bergerak dengan memindahkan atau mengeluarkan aset bergerak tersebut dari area konsesi, atau dapat menawarkan aset bergerak tersebut untuk dibeli oleh Otoritas Pelabuhan dengan harga buku atau nilai wajar, yang mana lebih rendah.
 - Menyerahkan kepada Otoritas Pelabuhan seluruh dokumen terkait pengoperasian proyek.

- *The Company may authorize cooperation partners in connection with the rate within the concession area, with condition that the implementation of such authority must be approved by the Company and in accordance with applicable legislation.*
- *At the end of the concession period, the Port Authority will enter into a cooperation and operation with the Company for 25 years, which will begin immediately after the expiration of the concession.*
- *At the end of the concession period, the Company is obliged to:*
 - *Transfer the authorization of the reclamation land to the Port Authority in an empty condition and free of encumbrance, along with the concession area and concession area infrastructure free of any form of charges.*
 - *Transfer the authorization of the intangible assets of the Company to the Port Authority free of encumbrance within the concession area and free of any form of charges.*
 - *For movable assets owned by the Company within the concession area, the Company may choose with its own discretion, to retain the rights, title and interest in movable assets by moving or removing the movable assets from the concession area, or may offer the movable assets to be purchased by the Port Authority with book value or fair value, whichever is lower.*
 - *Transfer all documents related to the operation of the project to the Port Authority.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok (lanjutan)**

- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan wajib: (lanjutan)
 - Mengalihkan atau menyebabkan dialihkannya kepada Otoritas Pelabuhan, kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
 - Memindahkan atau mengeluarkan dari area konsesi semua aset bergerak yang ingin dipindahkan atau dikeluarkan oleh Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah melakukan pengeluaran (termasuk kapitalisasi biaya pinjaman) terkait pembangunan terminal Kalibaru tersebut masing-masing sebesar Rp8.905.704.192 dan Rp8.489.070.748 dan dicatat sebagai bagian dari akun "Aset takberwujud - aset hak konsesi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 15).

**b) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP)**

Pada tanggal 11 September 2012, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/17/2/PI.II-12, dengan PP yang kemudian diperpanjang dengan Perjanjian No. HK.566/19/11/PI.II-13 tanggal 6 Desember 2013. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) selama 27 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter), termasuk pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS selama 34 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1B selama 50 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office (continued)**

- At the end of the concession period, the Company is obliged to: (continued)
 - Transfer or effectively cause transfer of contracts made with third parties to the Port Authority.
 - Move or take out from the concession area all current assets which the Company decides to move or take out.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company has made capital expenditures (including capitalization of borrowing cost) related to the construction of the Kalibaru terminal amounting to Rp8,905,704,192 and Rp8,489,070,748 and recorded them as part of "Intangible assets - concession rights assets" in the consolidated statements of financial position of the Company (Note 15).

**b) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP)**

On September 11, 2012, the Company entered into Agreement of Constructing North Kalibaru Container Terminal Phase I Tanjung Priok Port No. HK.566/17/2/PI.II-12 with PP which was extended with Agreement No. HK.566/19/11/PI.II-13 dated December 6, 2013. The period of construction work is as follows:

- Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 27 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- Construction Phase 1A2 (451-850 meters), including dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS for 34 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- Construction Phase 1B for 50 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**b) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (lanjutan)**

Pada tanggal 23 November 2015, Perusahaan dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II No. HK.566/23/11/1/PI.II-15 dimana mengatur perubahan diantaranya mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya seluruh pekerjaan menjadi sebagai berikut:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) selama 39 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter), termasuk pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS selama 45 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Biaya seluruh pekerjaan menjadi sebesar Rp7.075.138.987 dan USD265.973.774 termasuk pajak pertambahan nilai.

Pada tanggal 28 November 2016, Perusahaan dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III No. HK.566/28/11/1/PI.II-16 dimana mengatur perubahan diantaranya mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi sebagai berikut:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) ditetapkan selama 39 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter) ditetapkan selama 45 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan. Disamping itu, pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS harus dilakukan pada tahap 1A, tetapi serah terima pekerjaan pengerukan tersebut dilakukan bersamaan dengan serah terima seluruh pekerjaan pengerukan.

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**b) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (continued)**

On November 23, 2015, the Company and PP agreed to enter into Additional Agreement (Addendum) II No. HK.566/23/11/1/PI.II-15 which changed among others period of work activities and total project cost to become as follows:

- Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 39 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- Construction Phase 1A2 (451-850 meters), including dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS for 45 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- Total project cost to amount to Rp7,075,138,987 and USD265,973,774 including value added tax.

On November 28, 2016, the Company and PP agreed to enter into Additional Agreement (Addendum) III No. HK.566/28/11/1/PI.II-16 which changed among others regarding period of work activities and total project cost to become as follows:

- Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 39 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- Construction Phase 1A2 (451-850 meters) for 45 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields. In addition, dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS should be conducted on phase 1A, however the handover of dredging should be conducted simultaneously with the handover of whole dredging.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**b) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (lanjutan)**

**b) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (continued)**

- Pekerjaan Tahap 1B ditetapkan selama 64 bulan sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III ini berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.

- *Construction Phase 1B for 64 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.*
- *The Additional Agreement (Addendum) III is effective from the day and date it is signed.*

**c) Perjanjian Asuransi Pembangunan dan
Pengembangan Terminal Kalibaru**

**c) Insurance Agreement on Construction and
Development of Kalibaru Terminal**

PPI telah mengadakan polis-polis asuransi sebagai berikut atas seluruh pekerjaan yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok yang berlaku selama masa konstruksi sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan 31 Mei 2019:

PPI has arranged the following insurance policies in respect of all works in connection with the construction and development of the infrastructures of the Kalibaru Terminal of the Tanjung Priok Port during the whole construction period from September 30, 2013 until May 31, 2019:

- Polis *Construction All Risks* dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("Jasindo"), pihak berelasi, sebagai *insurer* utama dan batas pertanggungan sebesar USD2.425.000.000.
- Polis *Third Party Liability* dengan Jasindo sebagai *insurer* dan batas pertanggungan sebesar USD10.000.000 per peristiwa.
- Polis *Excess Third Party Liability* dengan PT Asuransi Astra Buana ("AAB") sebagai *insurer* dan batas pertanggungan sebesar USD40.000.000 per peristiwa atas kelebihan dari USD10.000.000 per peristiwa.
- Polis *Excess Third Party Liability* dengan AAB sebagai *insurer* dan batas pertanggungan sebesar USD40.000.000 per peristiwa atas kelebihan dari USD50.000.000 per peristiwa.

- *Construction All Risks policy with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("Jasindo"), a related party, as the main insurer and limit of indemnity of USD2,425,000,000.*
- *Third Party Liability policy with Jasindo as the insurer and limit of indemnity of USD10,000,000 per one event.*
- *Excess Third Party Liability policy with PT Asuransi Astra Buana ("AAB") as the insurer and limit of indemnity of USD40,000,000 per one event in excess of the USD10,000,000 per one event.*
- *Excess Third Party Liability policy with AAB as the insurer and limit of indemnity of USD40,000,000 per one event in excess of the USD50,000,000 per one event.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**d) Perjanjian Pemegang Saham IPC TPK dan
STMS**

**d) Shareholders Agreement IPC TPK and
STMS**

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura (STMS) menandatangani Perjanjian Pemegang Saham untuk Terminal Petikemas 1 dan Perjanjian Perubahannya pada tanggal 11 September 2014 dimana IPC TPK dan STMS akan mendirikan perusahaan dengan jumlah saham sebesar 1.000 saham yang terbagi menjadi 510 saham seri A yang dimiliki IPC TPK dan 490 saham seri B yang dimiliki STMS. Perusahaan tersebut didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas 1 dan kegiatan lain sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana disetujui oleh IPC TPK dan STMS.

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore (STMS) signed a Shareholders Agreement for Container Terminal 1 and the Amendment Agreement on September 11, 2014, wherein IPC TPK and STMS will establish a company with total shares amounting to 1,000 shares comprising of 510 series A Shares held by IPC TPK and 490 series B Shares held by STMS. The company was set up to operate based on the Construction and Operation Agreement in connection with the operation and development of Container Terminal 1 and other activities in accordance with applicable law as agreed by IPC TPK and STMS.

Jika dalam suatu tahun buku, perusahaan tersebut memiliki laba yang tersedia untuk didistribusikan maka distribusi akan dilakukan pertama untuk STMS hingga pengembalian modal yang diperbolehkan telah tercapai dan kedua dibagikan secara proporsional kepada STMS dan IPC TPK sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing. Syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian.

If, in respect of any financial year, the company has profit available for distribution then distribution will be made first for STMS until permitted equity return has been achieved and secondly distributed proportionally to STMS and IPC TPK in accordance with their respective ownerships. Other term and conditions are stipulated in the agreement.

Kepemilikan saham IPC TPK pada perusahaan yang didirikan tidak diikuti dengan pengendalian dan karenanya laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan IPC TPK.

IPC TPK's ownership in the company established is not followed by control and therefore, the company's financial statements are not consolidated in the IPC TPK's financial statements.

Perusahaan yang didirikan sehubungan dengan perjanjian tersebut di atas bernama PT New Priok Container Terminal One berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 (Catatan 1b).

The company established in relation to the above agreement namely PT New Priok Container Terminal One based on Deed No. 33 dated May 28, 2014 (Note 1b).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**e) Perjanjian Pinjaman - Sea Terminal
Management & Service Pte. Ltd., Singapura**

**e) Loan Agreement - Sea Terminal
Management & Services Pte. Ltd.,
Singapore**

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., (STMS) menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana STMS memberikan fasilitas pinjaman kepada IPC TPK untuk kepentingan pembayaran Saham Seri A pada NPCT1 sebesar USD15.096.000 dengan tingkat bunga tahunan 7%.

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd. (STMS) signed a Loan Agreement where STMS provides loan facilities to IPC TPK for the purpose of A Series Shares payments in NPCT1 amounting to USD15,096,000 with annual interest rate of 7%.

Fasilitas tersebut akan dibayarkan kembali melalui pengurangan modal pada NPCT1, dengan IPC TPK dan STMS sebagai pemegang sahamnya, dan dari dividen yang dapat dibagikan kepada IPC TPK. Seluruh bunga akan dibayarkan dari dividen IPC TPK.

The amount of the facility will be paid back through a reduction of capital in NPCT1, with IPC TPK and STMS as shareholders, and of dividends that can be distributed to IPC TPK. All interest will be paid from IPC TPK dividends.

Pada tanggal 11 September 2014, IPC TPK dan STMS menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman tertanggal 19 April 2014 untuk mengatur mengenai dilakukannya pembebanan bunga setiap tahun.

On September 11, 2014, IPC TPK and STMS signed the Agreement Amendments to the Loan Agreement dated April 19, 2014 regarding interests that was to be charged per annum.

Pada tanggal 10 November 2016, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk merevisi tingkat bunga periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018 menjadi 0%.

On November 10, 2016, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2016 to December 31, 2018 to become 0%.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo pokok pinjaman ke STMS masing-masing sebesar USD15.096.000 dan dicatat sebagai bagian dari liabilitas jangka panjang lainnya.

As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding loan principal to STMS amounted to USD15,096,000 and recorded as part of other long-term liabilities account.

Pada tanggal 31 Desember 2018, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang revisi tingkat bunga periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 menjadi 0%.

As of December 31, 2018, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2019 to December 31, 2020 to become 0%.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

f) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - PPI

Perusahaan mendirikan PPI pada tanggal 5 November 2012 (Catatan 1b). Berdasarkan Surat Perusahaan No. TS.12/1/11/PI.II-13 tanggal 22 Februari 2013, Perusahaan menginstruksikan PPI untuk mempersiapkan dokumen perjanjian pengalihan (novasi) pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor dari Perusahaan kepada PPI. PPI juga diminta untuk menunjuk konsultan yang diperlukan dan pelaksanaan *advisory* yang saat ini dilaksanakan oleh Perusahaan akan dialihkan kepada PPI dimana pembebanan seluruh biaya konsultan diambil dari *proceed* yang akan diterima dari mitra Terminal Kalibaru. Perusahaan kemudian juga mengirimkan Surat No. KU.26/26/13/PI.II-13 tanggal 16 April 2013 yang menginstruksikan PPI agar segera memproses pekerjaan *Technical, Legal, Financial, Tax dan Insurance Advisor*.

Pada tanggal 30 Mei 2013, Perusahaan dan PPI menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 dan No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), dimana Perusahaan memberikan kepada PPI hak untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok.

PIA berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi tertanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Perusahaan dengan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, yaitu selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Inilah yang menjadi dasar hukum PPI menandatangani COA (Catatan 45h).

f) Project Implementation Agreement - PPI

The Company established PPI on November 5, 2012 (Note 1b). Based on Letter of the Company No. TS.12/1/11/PI.II-13 dated February 22, 2013, the Company instructed PPI to prepare the documents for the assignment (novation) agreement on the construction work of Kalibaru Terminal from PT Pembangunan Perumahan (Persero) as the Company's contractor to PPI. PPI was also asked to appoint consultants as required and the implementation of advisory services which is currently under contracts with the Company shall be assigned to PPI in which the consultants' fees shall be taken from proceeds that will be received from the partner of Kalibaru Terminal. The Company then sent Letter No. KU.26/26/13/PI.II-13 dated April 16, 2013 in which it instructed PPI to process the *Technical, Legal, Financial, Tax and Insurance Advisor* works.

On May 30, 2013, the Company and PPI signed Project Implementation Agreement for Kalibaru Terminal, Tanjung Priok Port, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 and No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), in which the Company granted to PPI the rights to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port.

The PIA is valid until the expiration of the term of the Concession Agreement dated August 31, 2012 entered into between the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port, which is 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the requirement on technical documents, financial documents and implementation guarantee by the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port. This is the legal basis on which PPI entered into the COA (Note 45h).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**f) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - PPI
(lanjutan)**

Sesuai dengan PIA, Perusahaan dan PPI selanjutnya harus mengidentifikasi perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan dan pihak ketiga sehubungan dengan proyek untuk dinovasikan kepada PPI. Seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ada akan dinovasikan kepada PPI. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, proses novasi perjanjian tersebut masih belum terjadi.

g) Perjanjian Pengelolaan Proyek - PPI

Pada tanggal 24 Februari 2014, Perusahaan dan PPI menandatangani Perjanjian Manajemen Proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 dan No. PPI-06-1-000495 ("PMA"), dimana Perusahaan menunjuk PPI untuk menangani manajemen proyek yang akan melaksanakan kontrak-kontrak pekerjaan pembangunan terminal Kalibaru, diantaranya manajemen proyek atas kontrak-kontrak pekerjaan konstruksi serta verifikasi dan evaluasi atas pembayaran pekerjaan konstruksi dan pengawasan. PMA berlaku sampai dengan selesainya proyek. Tidak ada keuntungan untuk PPI atas penyediaan jasa ini.

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**f) Project Implementation Agreement - PPI
(continued)**

In accordance with the PIA, the Company and PPI shall then identify the existing agreements signed by the Company and the third parties concerning the project implementation for assignment (novation) to PPI. All rights and obligations under the existing agreements will be novated to PPI. As of the date of completion of the consolidated financial statements, the novation process of these agreements have not yet occurred.

g) Project Management Agreement - PPI

On February 24, 2014, the Company and PPI signed Project Management Agreement on the Construction Work for the Kalibaru Utara Container Terminal Phase 1 at the Port of Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 and No. PPI-06-1-000495 ("PMA"), in which the Company appointed PPI as a project management company to carry out the contractual works of Kalibaru terminal development, among others, the project management of construction works contracts and verification and evaluation on payment of construction and supervision works. The PMA is valid until the end of the project. There is no profit for PPI for providing this service.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1**

Berdasarkan PIA (Catatan 45f), pada tanggal 9 Juni 2014, PPI dan NPCT1, menandatangani Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas 1, Pelabuhan Priok Baru (COA) dimana PPI menunjuk NPCT1 untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Petikemas 1 selama jangka waktu sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah beroperasinya dermaga 850 meter dan NPCT1 harus melakukan pembayaran sewa di muka dan biaya sewa kuartalan kepada PPI.

Based on PIA (Note 45f), on June 9, 2014, PPI and NPCT1, entered into Construction and Operation Agreement - Container Terminal 1, New Priok Port (COA) through which PPI appointed NPCT1 to develop and operate Container Terminal 1 for the period of 25 (twenty five) years after the commencement of operation of 850 meters quay and NPCT1 shall pay advance site rent and quarterly site rent to PPI.

Pembayaran sewa di muka sebesar USD100.000.000 harus dibayarkan dalam beberapa tahap, yaitu USD30.000.000 setelah tanggal mulai COA, USD40.000.000 setelah penyerahan dermaga 450 meter dan USD30.000.000 setelah penyerahan dermaga 850 meter. Berdasarkan Perjanjian Perubahan Kedua terhadap COA tanggal 24 Desember 2014 ("SAA"), USD30.000.000 akan dibayarkan setelah penyelesaian area lapangan tambahan. PPI harus melakukan penyerahan dermaga 450 meter dan dermaga 850 meter kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2015 dan 31 Desember 2015.

The advance rental fee of USD100,000,000 shall be paid in several stages, which consist of USD30,000,000 after the commencement date, USD40,000,000 after the handover of 450 meters quay and USD30,000,000 after the handover of 850 meters quay. Based on the Second Amendment Agreement to the COA dated December 24, 2014 ("SAA"), the final USD30,000,000 will be paid after the completion of additional yard area. PPI shall handover the 450 meters quay and the 850 meters quay to NPCT1 on July 31, 2015 and December 31, 2015, respectively.

Biaya sewa kuartalan harus dibayarkan pada awal setiap kuartal, yaitu sejumlah USD7.000.000 per kuartal untuk periode beroperasinya dermaga 450 meter sampai dengan beroperasinya dermaga 850 meter dan USD14.000.000 per kuartal untuk periode setelahnya.

The quarterly site rent shall be paid at the beginning of each quarter amounting to USD7,000,000 each quarter for the period after the commencement of operation of 450 meters quay up to the commencement of operation of 850 meters quay and USD14,000,000 each quarter for the period thereafter.

Pada tanggal 17 September 2014, PPI menerima pembayaran pertama atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD30.000.000 dari NPCT1.

On September 17, 2014, PPI received the first payment of advance rental fee amounting to USD30,000,000 from NPCT1.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

Penyerahan dermaga 450 meter tidak terjadi pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana tercantum dalam SAA. Pada tanggal 1 Agustus 2015, PPI menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan ini. Melalui surat tanggal 26 Agustus 2015, PPI menyampaikan bahwa keterlambatan penyerahan tidak mengakibatkan NPCT1 mengalami keterlambatan dalam melakukan konstruksinya sehingga hal tersebut bukan merupakan *Liquidated Damage Event*.

The handover of 450 meters quay did not occur on July 31, 2015 as stated in the SAA. On August 1, 2015, PPI received a Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to the delay. Through a letter dated August 26, 2015, PPI responded by stating that the delay in handover did not cause a delay to NPCT1's construction hence it is not a Liquidated Damage Event.

Selain itu, penyerahan dermaga 850 meter yang seharusnya dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015 dan pekerjaan pengerukan tertentu yang seharusnya diselesaikan PPI pada tanggal 31 Januari 2016, juga tidak terjadi. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, PPI tidak menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan tersebut.

In addition, the handover of 850 meters quay which should have occurred on December 31, 2015 and certain dredging works which should have been completed by PPI on January 31, 2016, did not occur as well. As of the date of completion of the consolidated financial statements, PPI has not received any Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to these delays.

Dermaga 450 meter dan 850 meter telah diserahkan oleh PPI kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016 dan 16 Oktober 2016.

450 meters and 850 meters quays have been handed over by PPI to NPCT1 on June 23, 2016 and October 16, 2016, respectively.

Pada tanggal 24 Juni 2016, PPI menerima pembayaran kedua atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD40.000.000 dari NPCT1. Pada tanggal 31 Desember 2016, dermaga 850 meter belum mulai beroperasi sehingga pembayaran pertama dan kedua atas sewa diterima di muka masing-masing sebesar USD30.000.000 dan USD40.000.000 tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

On June 24, 2016, PPI received the second payment of advance rental fee amounting to USD40,000,000 from NPCT1. As of December 31, 2016, commencement of operation of 850 meters quay has not yet occurred hence first and second payment of advance site rent amounting to USD30,000,000 and USD40,000,000, respectively, are recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position.

Pada tanggal 18 Agustus 2016, dermaga 450 meter telah mulai beroperasi secara komersial. Dengan demikian, pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, PPI telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan sebesar USD10.347.826 (setara dengan Rp137.742.143).

On August 18, 2016, 450 meters quay has started its commercial operation. Therefore, for the year ended December 31, 2016, PPI has recorded the revenue from quarterly site rent amounting to USD10,347,826 (equivalent to Rp137,742,143).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

Pada tanggal 13 Desember 2016, PPI dan NPCT1 menandatangani Surat Persetujuan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

On December 13, 2016, PPI and NPCT1 signed a Letter of Acceptance which regulates items as follows:

- Penyediaan akses oleh PPI kepada NPCT1 atas area tertentu pada dermaga 850 meter;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasi komersial dermaga 450 meter, yaitu tanggal 18 Agustus 2016;
- Pemberitahuan Konfirmasi Pekerjaan Lokasi untuk Dermaga 850 Meter diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2016 dengan beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan;
- PPI akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
 - Perkuatan sisi utara tanggal 16 Maret 2017;
 - Penyediaan dan pemasangan *variable speed water drive* dan *pressure tank* dan peralatan terkait tanggal 16 Maret 2017;
 - Pengerukan hingga kedalaman -16m LWS tanggal 31 Mei 2017;
 - Penyelesaian fase kedua dari area *common gate* tanggal 16 Oktober 2017;
 - Penyelesaian hal-hal penting yang belum diselesaikan yang diidentifikasi oleh ahli teknik independen tanggal 16 Maret 2017.
- Kesepakatan bahwa tanggung jawab pemeliharaan area infrastruktur konsesi akan menyesuaikan dengan laporan ahli teknik independen;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasional dermaga 850 meter paling lambat tanggal 16 Maret 2017;
- Jika *PPI Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, NPCT1 akan memperhitungkan pengurangan 25% dari pembayaran sewa kuartalan USD14.000.000 pada pembayaran sewa kuartalan berikutnya;

- *Provision of access to certain areas within 850 meters quay from PPI to NPCT1;*
- *Agreement on the date of commencement of operations of 450 meters quay, which was August 18, 2016;*
- *Site Works Confirmation Notice for 850 meters quay was issued on October 16, 2016 with note on certain outstanding works;*
- *PPI will complete the following works within the time specified for each item:*
 - *Strengthening of north side by March 16, 2017;*
 - *Supplying and installing variable speed water drive and pressure tank and associated equipment by March 16, 2017;*
 - *Dredging to a depth of -16m LWS by May 31, 2017;*
 - *Completion of the second phase of the common gate area by October 16, 2017;*
 - *Completion of major outstanding items identified by the independent engineer by March 16, 2017.*
- *Agreement that the maintenance responsibility of concession area infrastructure will be in accordance with the independent engineer's report;*
- *Agreement that the date of commencement of operations of 850 meters quay will be no later than March 16, 2017;*
- *If PPI Undertakings have not been completed on the predetermined dates, NPCT1 will be credited with 25% of quarterly site rent USD14,000,000 on the next payment of quarterly site rent;*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

- Jika terdapat salah satu *PPI Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal 16 Oktober 2017, NPCT1 hanya akan melakukan pembayaran atas sewa kuartalan dermaga 450 meter, yaitu USD7.000.000 sampai dengan tanggal dimana seluruh *PPI Undertaking* telah diselesaikan.

- *If any one of the PPI Undertakings has not been completed by October 16, 2017, NPCT1 will pay quarterly site rent only on the 450 meters quay, which is USD7,000,000 until the date that all PPI Undertakings have been completed.*

Pada tanggal 16 Januari 2018, PPI dan NPCT1 menandatangani Nota Kesepakatan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

On January 16, 2018, PPI and NPCT1 signed Memorandum of Agreement which regulates items as follows:

- PPI akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
 - Jalan akses keluar sisi timur area CGA tanggal 15 Desember 2017;
 - Pengoperasian Go-live atas sistem IT tanggal 31 Desember 2017;
 - Pengoperasian Go-live OCR di CGA tanggal 31 Januari 2018;
 - Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi selatan di CGA tanggal 31 Januari 2018;
 - Jalan akses masuk di sisi barat CGA tanggal 28 Februari 2018;
 - Tambahan area buffer untuk parkir truk di sisi barat CGA tanggal 30 April 2018;
 - Penyediaan fasilitas untuk petikemas *reefer dan cooling room* tanggal 30 April 2018;
 - Pekerjaan perbaikan jalan akses keluar (lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA) tanggal 30 April 2018;
 - Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA tanggal 31 Mei 2018;
 - Penyediaan fasilitas inspeksi untuk mendukung kegiatan bea dan cukai di CGA tanggal 31 Maret 2019.
- Jika pekerjaan tersebut di atas belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, PPI akan dikenakan pembayaran terhadap setiap pekerjaan sebesar USD5.000/hari kerja.

- *PPI will complete the following works within the time specified for each item:*
 - *East area exit access road of CGA by December 15, 2017;*
 - *Go-live IT system operation by December 31, 2017;*
 - *Go-live OCR operation at CGA by January 31, 2018;*
 - *Reparation of behandle south side dockyard at CGA by January 31, 2018;*
 - *Entry access road west side CGA by February 28, 2018;*
 - *Additional buffer area for trucks park at west side of CGA by April 30, 2018;*
 - *Facility provision for reefer container and cooling room by April 30, 2018;*
 - *Reparation work of exit access road (north side behandle dockyard at CGA) by April 30, 2018;*
 - *Reparation of north side behandle dockyard at CGA by May 31, 2018;*
 - *Inspection facilities provision to support custom activities at CGA March 31, 2019.*
- *If the above works have not been completed on the predetermined dates, PPI will pay USD5,000/day for each work.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

- Kesepakatan dalam Surat Keputusan mengenai pengurangan pembayaran sewa dicabut.

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

- Agreement on Letter of Acceptance regarding reduction of rental payment has been waived.

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja

Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja antara Perusahaan dan HPI (Catatan 1b) mengatur syarat-syarat yang menjadi dasar operasional Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja).

Aspek keuangan penting yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk amandemennya adalah sebagai berikut:

- Bagian investasi dari Partisipan yang dicantumkan dalam Perjanjian yang telah diubah adalah sebagai berikut:

Perusahaan	52,12%
HPI	47,88%

- Nilai investasi dari kedua Partisipan tergantung pada audit atas investasi yang dilakukan oleh auditor independen.
- Aset tetap yang diserahkan oleh Partisipan untuk dipergunakan dalam operasional terminal dimiliki secara langsung oleh Partisipan dan dicatat dalam masing-masing pembukuannya.
- Partisipan berhak atas pengembalian dana penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh masing-masing Partisipan yang digunakan dalam operasi dan berhak menerima laba sesuai dengan investasi dari Partisipan.

46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS

**a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja**

The Master Cooperation Agreement between the Company and HPI (Note 1b) sets out the terms and conditions under which Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja) is operating.

The principal financial aspects of this Agreement including its amendments are as follows:

- The investment proportion of the Participants is specified in the revised Agreement as follows:

Company	52,12%
HPI	47,88%

- Investments by the Participants are subject to audit by an independent auditor.
- Fixed assets provided by the Participants for use in the operations of the terminal are owned directly by the Participants and are recorded in their respective accounting records.
- The Participants are entitled to reimburse depreciation funds from fixed assets owned by the respective Participants used in operation and shall receive profit based on the investments made by the Participants.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

- Laba yang dapat dibagikan kepada Partisipan ditentukan setelah pengurangan biaya operasional, royalti, biaya bank dan dana penyusutan aset tetap dari pendapatan.
- Royalti akan dibayarkan kepada Perusahaan apabila arus petikemas tahunan yang dihasilkan melebihi target minimum tahunan yang ditetapkan.
- Jika ada pengeluaran modal baru, kedua belah pihak sepakat untuk membiayai belanja modal sesuai dengan persentase investasi Partisipan berdasarkan audit investasi tahun sebelumnya.
- Partisipan berhak untuk menerima dana penyusutan dan pembagian laba berdasarkan hasil audit investasi yang berlaku.

Pada tanggal 3 Juni 2014, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang ada di KSO TPK Koja, sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2013.

Pada tanggal 17 November 2014, auditor independen selesai dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2013. Para Partisipan menyetujui dan mendistribusikan sisa hasil investasi dari rekening escrow KSO TPK Koja, untuk tahun 2013 sebesar USD23,66 juta atau setara dengan Rp247,29 miliar untuk Perusahaan dan USD23,54 juta atau setara dengan Rp245,98 miliar untuk HPI pada bulan Desember 2014 (setelah memperhitungkan distribusi interim sebesar USD13,73 juta atau setara dengan Rp143,47 miliar untuk Perusahaan dan USD11,27 juta atau setara dengan Rp117,81 miliar untuk HPI pada bulan Februari 2014). Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2013 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

- Profit distributable to the Participants is determined by deducting operating expenses, royalties, bank administration charges and depreciation funds from revenue.
- Royalties will be paid to the Company if the annual container throughput exceeds the minimum annual target.
- If there are new capital expenditures, both parties agreed to finance the capital expenditures in accordance with the investment percentages of the Participants based on the prior year investment audit.
- The Participants have the right to receive depreciation funds and distribution of profit based on prevailing investment audit result.

On June 3, 2014, the Participants appointed an independent auditor to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of KSO TPK Koja's fixed assets in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2013 net income.

On November 17, 2014, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2013. The Participants approved and distributed the above outstanding return of investment from KSO TPK Koja's escrow account for the year 2013 of USD23.66 million or equivalent to Rp247.29 billion to the Company and USD23.54 million or equivalent to Rp245.98 billion to HPI in December 2014 (after considering interim distribution of USD13.73 million or equivalent to Rp143.47 billion for the Company and USD11.27 million or equivalent to Rp117.81 billion for HPI in February 2014). The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2013 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 11 Juni 2015, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba TPK Koja tahun 2014.

Pada tanggal 15 Desember 2015, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2014 dimana para Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2014 sebesar USD6,56 juta atau setara dengan Rp77,97 miliar untuk Perusahaan dan USD9,17 juta atau setara dengan Rp108,91 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2014 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 22 Agustus 2016, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2015.

Pada tanggal 18 November 2016, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2015 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2015 sebesar USD10,78 juta atau setara dengan Rp143,60 miliar untuk Perusahaan dan USD12,74 juta atau setara dengan Rp169,74 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2015 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 27 Maret 2018, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2017 dan 2016.

46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On June 11, 2015, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of TPK Koja's 2014 net income.

On December 15, 2015, the independent auditors has completed and released the investment audit report for the year 2014 whereby the Participants approved the outstanding return on investment for the year 2014 of USD6.56 million or equivalent to Rp77.97 billion for the Company and USD9.17 million or equivalent to Rp108.91 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for year 2014 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On August 22, 2016, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2015 net income.

On November 18, 2016, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2015 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2015 of USD10.78 million or equivalent to Rp143.60 billion for the Company and USD12.74 million or equivalent to Rp169.74 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2015 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On March 27, 2018, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2017 and 2016 net income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 30 April 2018, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2017 dan 2016 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2017 dan 2016 sebesar USD19,43 juta dan USD14,54 juta atau setara dengan Rp263,27 miliar dan Rp195,31 miliar untuk Perusahaan serta USD21,81 juta dan USD19,28 juta atau setara dengan Rp295,53 miliar dan Rp259,10 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2015 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 2 April 2019, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2018.

Pada tanggal 16 Agustus, 2019, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2018 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2018 sebesar AS\$10,11 juta atau setara dengan Rp140,48 miliar untuk Perusahaan dan AS\$9,64 juta atau setara dengan Rp134 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2018 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan HPI mengadakan Revisi atas Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Terminal Petikemas III Tanjung Priok (Revisi Perjanjian) dimana Perusahaan dan HPI sepakat untuk memperpanjang kerjasama pengoperasian Terminal Petikemas III Tanjung Priok sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Revisi Perjanjian ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD8.750.000, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh TPK Koja kepada Perusahaan.

46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On April 30, 2018, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2017 and 2016 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2017 and 2016 of USD19.43 million and USD14.54 million or equivalent to Rp263.27 billion and Rp195.31 billion for the Company and also USD21.81 million and USD19.28 million or equivalent to Rp295.53 billion and Rp259.10 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2015 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On April 2, 2019, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and the remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2018 net income.

On August 16, 2019, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2018 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2018 of US\$10.11 million or equivalent to Rp140.48 billion for the Company and US\$9.64 million or equivalent to Rp134 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2018 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On August 5, 2014, the Company and HPI entered into a Revised Cooperation Agreement for the Management of Tanjung Priok Container Terminal III (Revised Agreement), whereby the Company and HPI agreed to extend the cooperation for operating Terminal Petikemas III Tanjung Priok until March 26, 2039. The Revised Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Revised Agreement, TPK Koja will have to pay quarterly rent fee amounting to USD8,750,000, while royalty will no longer be paid by TPK Koja to the Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan HPI telah melakukan perubahan terhadap Revisi Perjanjian di atas dimana pada akhir masa perjanjian, seluruh aset yang dimiliki HPI dan bagian HPI dalam aset bersama serta pekerjaan modal akan dialihkan kepada Perusahaan tanpa adanya pembebanan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD35.171.561 (setara dengan Rp503,26 miliar) dan USD35.146.601 (setara dengan Rp494,61 miliar).

Dalam Revisi Perjanjian tersebut, Perusahaan berhak memperoleh pembayaran premium sebesar USD50.000.000 dari HPI sehubungan dengan dilanjutkannya kerjasama antara Perusahaan dan HPI untuk pengelolaan TPK Koja. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp27.735.417. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo yang belum di amortisasi atas premium tersebut adalah sebesar Rp540.840.625 dan Rp568.576.042 dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On June 22, 2015, the Company and HPI has amended the Revised Agreement mentioned above where at the end of the agreement period, all of the HPI's assets and HPI's interest in the joint assets and the capital works will be transferred to the Company free of encumbrances.

For the year ended December 31, 2019 and 2018, the Company has recorded the revenue from quarterly rent fee amounting to USD35,171,561 (equivalent to Rp503.26 billion) and USD35,146,601 (equivalent to Rp494.61 billion), respectively.

In the Revised Agreement, the Company has the right to obtain payment of premium amounting to USD50,000,000 from HPI in relation to the continuing cooperation between the Company and HPI for the management of TPK Koja. For the year ended December 31, 2019 and 2018, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp27,735,417. As of December 31, 2019 and 2018, the balance of unamortized premium amounted to Rp540,840,625 and Rp568,576,042 and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok ("Perjanjian Pemberian Kuasa") dimana Perusahaan menunjuk dan memberikan kuasa pada JICT untuk pengoperasian dan pemeliharaan properti yang telah dikuasakan (mencakup terminal kontainer, fasilitas pendukung terminal kontainer dan utilitas) sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian. Periode perjanjian adalah 20 (dua puluh) tahun sejak 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Sehubungan dengan pemberian kuasa kepada JICT tersebut, JICT akan membayar royalti kepada Perusahaan sebesar 10% dari pendapatan kotor terminal kontainer secara bulanan. Disamping itu, JICT juga akan membayar kepada Perusahaan atas sewa peralatan dan tenaga kerja yang ditempatkan Perusahaan di JICT.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan JICT mengadakan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa - Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok (Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa) dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Pemberian Kuasa sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD21.250.000 (Catatan 46c), sedangkan royalti, sewa peralatan berupa 4 (empat) RTGC dan penempatan tenaga kerja tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan. Perjanjian jasa dan teknis "know how" yang terdapat pada Perjanjian Pemberian Kuasa akan diakhiri. Berdasarkan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, kegiatan usaha dan aset Terminal 2 akan dialihkan dari JICT kepada Perusahaan (Catatan 46f). Berdasarkan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, Perusahaan akan menerima pembayaran premium sebesar USD200.000.000 dari HPJ (Catatan 46e).

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

b) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into Authorization Agreement for The Operation and Maintenance of Container Terminal in Tanjung Priok Seaport ("Authorization Agreement") whereby the Company appointed and conferred authorization on JICT for the operation and maintenance of the authorization property (including container terminal, container terminal support facilities and utilities) as defined in the agreement. The authorization period is 20 (twenty) years from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement. In consideration of the granting of the authorization to JICT, JICT will pay monthly royalties to the Company calculated at 10% of the preceding month container terminal gross revenue. Moreover, JICT will also pay to the Company for equipment rental and Company's employee secondment in JICT.

On August 5, 2014, the Company and JICT entered into an Amended Authorization Agreement - Jakarta International Container Terminal, Port of Tanjung Priok (Amended Authorization Agreement), whereby the Company and JICT agreed to extend the Authorization Agreement until March 26, 2039. The Amended Authorization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Amended Authorization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent fee amounting to USD21,250,000 (Note 46c), while royalty, equipment rental of 4 (four) RTGCs and secondment of employee will no longer be paid by JICT to the Company. As for the technical "know-how" and services agreement in Authorization Agreement, they will be terminated. Based on the Amended Authorization Agreement, Terminal 2 assets and business will be transferred from JICT to the Company (Note 46f). Based on the Amended Authorization Agreement, the Company will receive payment of premium from HPJ amounting to USD200,000,000 (Note 46e).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ kepada Perusahaan diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diatur dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara dan surat Menteri Perhubungan di bawah.

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perusahaan menerima surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Kerjasama Pengelolaan/Pengoperasian JICT dan TPK Koja dimana Menteri Badan Usaha Milik Negara secara prinsip menyetujui rencana kerjasama usaha pengelolaan/pengoperasian JICT dan TPK Koja, dengan kepemilikan minimal di JICT sebesar 51%, dengan persyaratan sebagai berikut:

- Memperhatikan surat Menteri Perhubungan No. HK.201/3/4 Phb 2014 tanggal 18 September 2014, terkait dengan pemisahan fungsi operator dan regulator sesuai UU No. 17 Tahun 2008.
- Melaksanakan surat Wakil Menteri BUMN kepada Direktur Utama BUMN No. S-645/MBU/WK/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 hal penyampaian Hasil Panja Aset BUMN dan Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait kerjasama BUMN.

Berdasarkan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara tanggal 7 Januari 2016, Perusahaan diharuskan melakukan revisi terhadap Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa dimana Perusahaan perlu melakukan penyesuaian agar sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, revisi atas Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa belum selesai dilakukan.

46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

On June 22, 2015, the Company and JICT entered into Amendment Agreement to the Amended Authorization Agreement which changed the amount of premium to be paid by HPJ to the Company amounting to USD215,000,000. The Amended Authorization Agreement needs to have adjustments to be in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Shipping as regulated in the letter of the Minister of State Owned Enterprise and letter of the Minister of Transportation below.

On June 9, 2015, the Company received a letter from the Minister of State Owned Enterprise regarding Cooperation of Management/Operation of JICT and TPK Koja whereas the Minister of State Owned Enterprise principally agrees with the plan of cooperation of JICT and TPK Koja management/operation, with minimum percentage of ownership of 51%, with requirements as follows:

- *To comply with the letter from Minister of Transportation No. HK.201/3/4 Phb 2014 dated September 18, 2014, related to the separation of operator and regulator functions in accordance with UU No. 17 Year 2008.*
- *To execute letter of Vice Minister of State Owned Enterprise to President Director of State Owned Enterprises No. S-645/MBU/WK/10/2014 dated October 9, 2014 regarding result of Assets Working Committee of SOE and Decision of Constitutional Court, especially related to State Owned Enterprises cooperation.*

Based on the Letter of Minister of Transportation of the Republic of Indonesia to the Minister of State Owned Enterprises dated January 7, 2016, the Company was directed to revise the Amended Authorization Agreement where the Company needs to make adjustments to be in accordance with Law No. 17 Year 2008. Until the completion of the consolidated financial statements, the revision on Amended Authorization Agreement has not been finished.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas lainnya – JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas ("Perjanjian Penggunaan") dimana Perusahaan mengizinkan dan memberikan hak kepada JICT untuk menggunakan dan menyewa properti berikut dengan semua perbaikan yang telah dilakukan oleh JICT sejak tanggal efektif Perjanjian Pemanfaatan. Atas pemberian hak Penggunaan oleh Perusahaan, JICT setuju untuk membayar biaya bulanan yang ditetapkan dalam Perjanjian tersebut, dihitung sebesar 5% dari pendapatan kotor.

Perusahaan tetap memiliki hak kepemilikan properti tersebut. Jangka waktu perjanjian adalah dua puluh tahun dari 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan JICT mengadakan Amandemen Perjanjian Penggunaan dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Penggunaan sampai dengan tanggal berakhirnya Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa. Amandemen Perjanjian Penggunaan ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Amandemen Perjanjian Penggunaan tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD21.250.000 sedangkan kompensasi 5% dari pendapatan kotor JICT tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut sebesar Rp1.224.063.750 dan Rp1.191.912.500.

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

c) Utilization Agreement of Land Under HPL Owned by the Company, Port Facilities Building and Other Container Port Supporting Facilities - JICT

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into an Agreement on Utilization of The HPL Land, Port Buildings Facility, and The Container Terminal Support Facility ("Utilization Agreement") whereby the Company granted and conferred the right to utilize and rent to JICT the properties together with all improvements held by JICT commencing from the effective date of the Utilization Agreement. In consideration of the granting of the utilization right by the Company, JICT agreed to pay a monthly fee defined in these Agreement, calculated at 5% of gross revenue.

The Company retained the rights of the ownership of the properties. The utilization period is twenty years from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement.

On August 5, 2014, the Company and JICT entered into an Amended Utilization Agreement whereby the Company and JICT agreed to extend the Utilization Agreement until the date of termination of Amended Authorization Agreement. The Amended Utilization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Amended Utilization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent fee to the Company amounting to USD21,250,000 while compensation of 5% of JICT's gross revenue will no longer be paid by JICT to the Company. For the year ended December 31, 2019 and 2018, the Company has recorded revenue from quarterly rent fee amounting to Rp1,224,063,750 and Rp1,191,912,500, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Amandemen Perjanjian Pemegang Saham – JICT

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan, HPJ, JICT dan Kopegmar mengadakan Amandemen Perjanjian Pemegang Saham dimana para pihak sepakat untuk melakukan penyesuaian kepemilikan saham sebagai berikut:

- Modal Dasar JICT ditingkatkan sejumlah 18.077.584 saham Seri B.
- Tambahan 18.059.505 lembar saham Seri B untuk Perusahaan.
- Tambahan 18.079 lembar saham Seri B untuk Kopegmar.

Atas penyesuaian kepemilikan ini, kepemilikan saham Perusahaan di JICT meningkat menjadi sebesar 50,9%. Amandemen Perjanjian Pemegang Saham ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Peningkatan kepemilikan saham Perusahaan di JICT belum efektif pada tanggal 31 Desember 2015 karena Perusahaan belum melakukan penyetoran tambahan modal dan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh JICT belum memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JICT tanggal 24 November 2015, para pemegang saham JICT setuju antara lain:

- Bergantung pada persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk meningkatkan modal dasar JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh).

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

d) Amended Shareholders Agreement - JICT

On August 5, 2014, the Company, HPJ, JICT and Kopegmar entered into an Amended Shareholder Agreement, whereby all parties agreed to adjust the shares ownership as follows:

- *Authorized Share Capital of JICT is adjusted by increasing 18,077,584 B series shares.*
- *Additional 18,059,505 B series shares for the Company.*
- *Additional 18,079 B series shares for Kopegmar.*

In consideration to the ownership adjustment, the Company's share ownership in JICT increased to 50.9%. The Amended Shareholder Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. The increase of the Company's ownership in JICT has not become effective as of December 31, 2015 since the Company has not paid the additional paid-in capital and the increase of JICT's authorized capital, issued and fully paid capital has not been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Based on the Circular Resolution of Shareholders in Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders of JICT dated November 24, 2015, the shareholders of JICT agreed among others:

- *Subject to approval from the Capital Investment Coordinating Board (BKPM), to increase JICT's authorized capital from Rp221,450,406 divided into 1 (one) A Series share and 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 1 (one) A Series share and 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Amandemen Perjanjian Pemegang Saham - JICT (lanjutan)

- Bergantung pada persetujuan BKPM, untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh).
- Untuk tujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh JICT, agar diterbitkan 18.077.583 lembar saham Seri B sebesar Rp9.038.792 dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh) per lembar saham dengan proporsi sebagai berikut:
 - 18.059.505 lembar saham Seri B sebesar Rp9.029.752 akan diambil oleh Perusahaan.
 - 18.079 lembar saham Seri B sebesar Rp9.039 akan diambil oleh Kopegmar.

Pada tanggal 7 Desember 2015, BKPM telah menyetujui perubahan modal JICT tersebut di atas.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum melakukan penyeteroran atas tambahan setoran modal tersebut di atas. Di samping itu, peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut di atas belum memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Amended Shareholders Agreement - JICT (continued)

- Subject to approval from BKPM, to increase JICT's issued and paid-up capital from Rp221,450,406 divided into 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).
- For the purpose of the increase of JICT's authorized, issued and fully paid capital, to issue 18,077,583 B Series shares amounting to Rp9,038,792 with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) with proportion as follows:
 - 18,059,505 B Series shares amounting to Rp9,029,752 will be subscribed by the Company.
 - 18,079 B Series shares amounting to Rp9,039 will be subscribed by Kopegmar.

On December 7, 2015, BKPM has already approved the above mentioned JICT's capital changes.

Until the completion of the consolidated financial statements, the Company has not paid the additional paid-in capital as mentioned above. Moreover, the increase of authorized capital and issued and paid up capital has not received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Perjanjian Pembayaran Premium - JICT

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan HPJ mengadakan Perjanjian Pembayaran Premium dimana HPJ sepakat untuk melakukan pembayaran premium kepada Perusahaan sebesar USD200.000.000 sebagai imbalan atas tetap dilanjutkannya kerja sama usaha patungan Perusahaan dengan HPJ. Perjanjian ini berlaku efektif pada saat setiap dari persyaratan pendahuluan pada Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa telah dipenuhi (Catatan 45b). Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan HPJ mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pembayaran Premium dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Dalam keadaan tertentu dimana terjadinya pengakhiran secara lebih awal atas Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa, maka premium harus dibayarkan kembali oleh Perusahaan kepada HPJ secara pro-rata. Pada tanggal 2 Juli 2015, Perusahaan telah menerima pembayaran premium tersebut. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp119.262.292. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo yang belum di amortisasi atas premium tersebut adalah sebesar Rp2.325.614.688 dan Rp2.444.876.979 dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

f) Perjanjian Pengalihan Aset - JICT

Pada tanggal 14 Desember 2015, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Pengalihan Aset Terminal 2 dari JICT kepada Perusahaan dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk melakukan pengalihan aset-aset milik JICT yang terdapat di Terminal 2 kepada Perusahaan pada tanggal perjanjian ini. Atas pengalihan aset-aset tersebut, Perusahaan diharuskan melakukan pembayaran sebesar USD2.816.526, yang akan dibayarkan kepada JICT menggunakan mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 November 2015, yaitu sebesar Rp38.980.720. Pada tanggal 31 Desember 2019 Perusahaan belum melakukan pembayaran tersebut dan kewajibannya dicatat sebagai bagian dari akun liabilitas jangka pendek lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 21).

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

e) Premium Payment Agreement - JICT

On August 5, 2014, the Company and HPJ entered into a Premium Payment Agreement, whereby HPJ agreed to pay premium to the Company amounting to USD200,000,000 as consideration for continuing the joint venture of the Company with HPJ. The Premium Payment Agreement will commence on the date on each of the condition precedent in the Authorization Agreement has been satisfied (Note 45b). On June 22, 2015, the Company and HPJ entered into Amendment Agreement to Premium Payment Agreement in which the amount of premium to be paid by HPJ was amended to USD215,000,000. In certain circumstances leading to early termination of the Amended Authorization Agreement, the premium shall be repaid by the Company to HPJ using a pro-rate basis. On July 2, 2015, the Company has received payment of the premium. For the years ended December 31, 2019 and 2018, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp119,262,292, each year. As of December 31, 2019 and 2018, the balance of unamortized premium amounted to Rp2,325,614,688 and Rp2,444,876,979 and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

f) Assets Transfer Agreement - JICT

On December 14, 2015, the Company and JICT entered into Terminal 2 Assets Transfer from JICT to The Company Agreement where the Company and JICT agreed to transfer assets owned by JICT at Terminal 2 to the Company on the date of this agreement. For the transfer of the assets, the Company is obliged to make payment amounting to USD2,816,526, which will be paid to JICT in Rupiah using BI middle rate as of November 30, 2015, amounted to Rp38,980,720. As of December 31, 2019, the Company has not made the payment and the liability was recorded as part of other current liabilities account in the consolidated financial position of the Company (Note 21).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

- g) Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama pengendalian operasi dengan bentuk *Build, Operate and Transfer* (BOT) berupa Dermaga Nusantara II dengan PT Prima Nur Panurjwan selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 2029 dengan total nilai kontribusi sebesar Rp262,98 miliar.
- h) Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) untuk pengelolaan dan pengoperasian terminal serbaguna untuk melayani kapal barang/petikemas milik IKPP. Perjanjian tersebut meliputi pembayaran pendapatan jasa kapal dan barang dengan persentase yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal pengelolaan dan pengoperasian terminal yaitu paling lambat tanggal 15 April 1999. Penggunaan hasil reklamasi dikenakan tarif minimal sebesar 30% dari besaran tarif sesuai Kelompok Usaha yaitu sebesar Rp111,54 juta per tahun.
- i) Perusahaan memiliki Perjanjian Kerjasama Operasi dalam bentuk BOT (*Build, Operate and Transfer*) berupa Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Curah Kering di Pelabuhan Panjang dengan PT Inti Sentosa Alam Bahtera (PT ISAB). Perjanjian tersebut berlaku sejak 14 Mei 1992 hingga 13 Mei 2017.

Pada tanggal 13 Oktober 2011, jangka waktu perjanjian tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2022.

Pada saat perjanjian berakhir seluruh fasilitas Terminal Curah Kering seperti dermaga, gudang dan peralatan pelabuhan menjadi milik Perusahaan. Selain itu, selama masa perjanjian Perusahaan juga mendapatkan bagian pendapatan atas pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa bongkar muat dan penumpukan barang berdasarkan persentase tertentu.

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

- g) *The Company has a joint control and operation agreement in the form of Build Operate and Transfer (BOT) for Dermaga Nusantara II with PT Prima Nur Panurjwan for the period of 25 (twenty five) years commencing from 2005 to 2029 with contribution value amounting to Rp262.98 billion.*
- h) *The Company entered into Joint control entity agreement with PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) for managing and operating a multipurpose terminal that serves vessels/containers owned by IKPP. The agreement covers revenue from vessels and cargo service payments with certain agreed percentage. This agreement is effective for 30 (thirty) years from the date of terminal management and operation. On April 15, 1999, The minimum rate from land reclamation usage is 30% based on the appropriate rate of the Company or amounting to Rp111.54 million per annum.*
- i) *The Company entered into a Joint control entity agreement in the form of BOT (Build, Operate and Transfer) on Construction & Operation of Bulk Terminal at Port of Panjang with PT Inti Sentosa Alam Bahtera (PT ISAB). The agreement commenced since May 14, 1992 until May 13, 2017.*

On October 13, 2011, the term of the agreement was extended until May 13, 2020.

At the end of the agreement, all facilities for Bulk Terminal, such as dock, warehouses and port equipment will be owned by the Company. In addition, during the period of the agreement the Company receives a portion of income on the vessel services, cargo services and loading services based on a certain percentage.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

- j) Pada tanggal 2 Maret 2012, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) atas penggunaan bagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik Perusahaan sesuai Surat Perjanjian No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. Perjanjian ini mencakup pengelolaan tanah seluas 329.833 m² berlokasi di Jl. Sindang laut dan Jl. Raya Cilincing, Jakarta Utara dan berlaku selama 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan 31 Desember 2033.

Perjanjian kerjasama tersebut telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-505/MBU/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Persetujuan Optimalisasi Tanah Perusahaan yang digunakan oleh Indofood.

Pendapatan yang diperoleh Perusahaan atas penggunaan lahan tersebut adalah sebesar Rp1.041.059.197 yang dibayar secara periodik selama 5 (lima) kali pembayaran dan pelunasan pembayaran ke 5 (lima) selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan setelah perjanjian ditandatangani. Perusahaan juga memperoleh pendapatan tambahan atas pengoperasian dermaga/jetty sebesar Rp104.260 per tahun yang dibayarkan setiap awal tahun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah nota tagihan diterima oleh Indofood. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Perusahaan adalah sebesar Rp1.041.059.197. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo yang belum di amortisasi atas penggunaan bagian tanah HPL masing-masing adalah sebesar Rp276.168.033 Rp517.584.342 (sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2)).

- k) Berdasarkan Surat Perjanjian No. HK.566/7/16/c.Tpk-04 tanggal 27 Mei 2004, Perusahaan dan PT AKR Corporindo Tbk mengadakan perjanjian penggunaan bagian tanah HPL milik Perusahaan seluas 130.000 m² untuk digunakan sebagai tangki timbun untuk pelayanan barang-barang termasuk barang curah cair mudah terbakar (*flammable*) dan pembangunan jaringan pipa bawah laut yang melintasi alur kolam pengasinan dan sebelah selatan *breakwater*. Perjanjian ini berlaku selama 18 tahun sampai dengan 17 Mei 2021.

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

- j) On March 2, 2012, the Company entered into an agreement with PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) for the use of a parcel of land under Rights to Manage (HPL) owned by the Company with Agreement No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. The Agreement included land management with area of 329,833 m² which located at Jl. Sindang Laut and Jl. Raya Cilincing, North Jakarta and is valid for 22 (twenty two) years until December 31, 2033.

The agreement has been approved by the Minister of State Owned Enterprise through the letter No. S-505/MBU/2011 dated October 5, 2011 regarding Approval of Optimization of the Company's Land which is used by Indofood.

Revenue earned by the Company from the usage of land amounted to Rp1,041,059,197 and paid periodically for 5 (five) terms, the fifth payment will be settled at the latest 36 (thirty six) months after the agreement was signed. The Company also earned an additional revenue from jetty operations amounting to Rp104,260 annually which will be paid at the latest 7 (seven) work days after the invoice is received by Indofood. As of the date of the financial statements, the payment received by the Company amounted to Rp1,041,059,197. As of December 31, 2019 and 2018, the balance of unamortized use of a parcel of HPL land amounted to Rp276,168,033 and Rp517,584,342 respectively (before deducted by final income tax article 4(2)).

- k) Based on Agreement No. HK/566/7/16/c.Tpk-04 dated May 27, 2004, the Company and PT AKR Corporindo Tbk entered into agreement of usage of land under the HPL owned by the Company with land area of 130,000 m² to be used as storage tank for goods including flammable liquid and the construction of undersea pipeline which passes the salting basin and south breakwater. The agreement is valid for 18 years until May 17, 2021.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

Berdasarkan surat dari AKR tanggal 22 Oktober 2007 dan surat Direksi Perusahaan tanggal 7 November 2007, kedua pihak sepakat untuk mengadakan pengalihan penggunaan lahan dari AKR kepada entitas anaknya yaitu PT Jakarta Tank Terminal (JTT).

Perjanjian ini telah diubah beberapa kali terakhir berdasarkan addendum No. HK.566/14/9/C.Tpk-10 mengenai penggunaan ruang di bawah dasar laut alur kolam pengasinan dan sebelah selatan *break water* seluas 1.400 m² serta perubahan luas lahan menjadi 130.004 m².

I) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat

Petikemas dan kargo

Pada tanggal 12 Juni 2012, PTP dan beberapa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) terseleksi mengadakan Perjanjian Kesepakatan Tingkat Layanan (SLA) dimana para pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat petikemas dan kargo pada wilayah kerja PTP.

Atas pelayanan yang telah dilakukan, PTP dan PBM akan mendapatkan bagi hasil pendapatan masing-masing sebesar 40% dan 60%, kecuali dengan PT PBM Olah Jasa Andal masing-masing sebesar 50% dan 50%.

Jangka waktu perjanjian adalah 14 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2015.

Jangka waktu perjanjian telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 dan tidak diperpanjang kembali dengan rincian sebagai berikut:

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

Based on a letter from AKR dated October 22, 2007 and letter from the Company's Director dated November 7, 2007, both parties agreed to transfer the usage of land from AKR to its subsidiary, PT Jakarta Tank Terminal (JTT).

This agreement has been amended several times, most recently based on addendum No. HK.566/14/9/C.Tpk-10 in relation of the usage of undersea salting basin and south breakwater with area of 1,400 m² and change of land area to 130,004 m².

I) Loading and Unloading Activities Cooperation

Container and cargo

On June 12, 2012, PTP and several Stevedoring Companies (PBM) entered into Service Level Agreement (SLA) whereas the parties agreed to perform loading and unloading activities for container and cargo in PTP's working area.

For the activities that have been performed, PTP and PBM will receive revenue sharing of 40% and 60%, respectively, except with PT PBM Olah Jasa Andal which is 50% and 50%, respectively.

The term of the agreement is from September 14, 2011 until September 13, 2015.

The term of the agreement was extended until March 31, 2018 and were not extended with details as follow:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

I) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat (lanjutan)

Petikemas dan kargo (lanjutan)

No	Perusahaan/ Company	No. Perjanjian / Agreement No.	Wilayah kerja/ Work location	Jangka waktu/ Time period	Thruput minimum/ Minimum throughput
1	PT Mitra Sentosa Abadi	HK.566/16/3/16/ PTP-2018	Terminal III	01/01/18 - 31/03/18	-
2	PT Adipurusa	HK.566/16/3/5/ PTP-2018	Terminal II	01/01/18 - 31/03/18	-
3	PT Kaluku Maritama Utama	HK.566/16/3/15/ PTP-2018	Terminal II	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/ or 100.000 box per tahun/box per year
4	PT Sarana Bandar Nasional	HK.566/16/3/11/ PTP-2018	Terminal II	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/ or 100.000 box per tahun/box per year
5	PT Mitra Karunia Samudera	HK.566/16/3/14/ PTP-2018	Terminal I	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/ or 100.000 box per tahun/box per year
6	PT Dwipa Hasta Utamaduta	HK.566/16/3/19/ PTP-2018	Terminal II	01/01/18 - 31/03/18	-
7	PT Tangguh Samudera Jaya	HK.566/16/3/18/ PTP-2018	Terminal III	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/ or 100.000 box per tahun/box per year
8	PT Sarana Ultra Layanan Kargo	HK.566/16/3/1/ PTP-2018	Terminal I	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/ or 100.000 box per tahun/box per year
9	PT Prima Nur Panurjwan	HK.566/16/3/3/ PTP-2018	Terminal III	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/ or 100.000 box per tahun/box per year
10	PT Mahardi Sarana Tama	HK.566/16/3/17/ PTP-2018	Terminal II	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/ or 100.000 box per tahun/box per year
11	PT Andhika Andalan Tama	HK.566/16/3/6/ PTP-2018	Terminal III	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/ or 100.000 box per tahun/box per year
12	PT Daisy Mutiara Samudera	HK.566/16/3/9/ PTP-2018	Terminal III	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/ or 100.000 box per tahun/box per year
13	PT Escorindo Stevedoring	HK.566/16/3/10/ PTP-2018	Terminal I	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/ or 100.000 box per tahun/box per year
14	PT PBM Olah Jasa Andal	HK.566/16/3/4/ PTP-2018	Terminal III	01/01/18 - 31/03/18	-
15	PT Srikreasi Unggul Persada	HK.566/16/3/13/ PTP-2018	Terminal II	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/ or 100.000 box per tahun/box per year

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**I) Loading and Unloading Activities
Cooperation (continued)**

Container and cargo (continued)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

I) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat (lanjutan)

**I) Loading and Unloading Activities
Cooperation (continued)**

Petikemas dan kargo (lanjutan)

Container and cargo (continued)

Pada berbagai tanggal dari tanggal 19 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, PTP dan PBM mengadakan Berita Acara Kesepakatan (BAK) tentang SLA kerjasama pelaksanaan kegiatan usaha terminal sebagai berikut:

On various dates from April 19, 2018 until December 31, 2018, PTP and PBM entered into Minutes of Agreement (BAK) regarding SLA cooperation of terminal operating activities as follows:

No	Perusahaan/ Company	No. BAK/ BAK No.	Tanggal BAK/ Date of BAK	Wilayah kerja/ Work location	Jangka waktu/ Time period
1	PT Antho Tama	UM.339/19/4/2 2/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
2	PT Daisy Mutiara Samudra	UM.339/19/4/2 6/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
3	PT Escorindo Mitra Setia	UM.339/19/4/1 3/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
4	PT Escorindo Stevedoring	UM.339/19/4/2 4/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
5	PT Jasa Anugerah Samudera	UM.339/19/4/3 0/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
6	PT Kaluku Maritima Utama	UM.339/19/4/1 6/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
7	PT Karya Abadi Luhur	UM.339/19/4/2 5/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
8	PT Lapantiga Lintas Buana	UM.339/19/4/1 4/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
9	PT Mahardi Saranatama	UM.339/19/4/2 3/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
10	PT Mitra Karunia Samudera	UM.339/19/4/2 1/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
11	PT Sinar Berlian Indrapura	UM.339/19/4/1 2/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
12	PT Sarana Bandar Nasional	UM.339/19/4/1 7/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
13	PT Sinatra Dewa Samudra	UM.339/19/4/1 5/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
14	PT Sarana Ultra Layanan Kargo	UM.339/19/4/1 9/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
15	PT Srikreasi Unggul Persada	UM.339/19/4/2 0/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
16	PT PBM Tao Abadi Jaya	UM.339/19/4/3 2/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
17	PT Tangguh Samudera Jaya	UM.339/19/4/1 1/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

I) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat (lanjutan)

**I) Loading and Unloading Activities
Cooperation (continued)**

Petikemas dan kargo (lanjutan)

Container and cargo (continued)

No	Perusahaan/ Company	No. BAK/ BAK No.	Tanggal BAK/ Date of BAK	Wilayah kerja/ Work location	Jangka waktu/ Time period
18	PT Tubagus Jaya Maritim	UM.339/19/4/3 1/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
19	PT Dharma Lautan Nusantara	UM.339/28/5/8/ PTP-18	28 Mei 2018	Terminal I & II	1 Mei 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/May 1, 2018 until released date of SLA
20	PT Hemprisa Karyasaksama	UM.339/28/5/1/ PTP-18	28 Mei 2018	Terminal I & II	1 Mei 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/May 1, 2018 until released date of SLA
21	PT Terminal Jasa Maritim	UM.339/28/5/1/ PTP-18	28 Mei 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
22	PT Andhika Andalantama	UM.339/19/4/2 8/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
23	PT Prima Bandar Samudera	UM.339/31/10/ 9/PTP-18	31 Oktober 2018	Terminal I & II	1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/October 1, 2018 until released date of SLA
24	PT Maritim Polykarya Tama	UM.339/30/11/ 13/PTP-18	30 November 2018	Terminal I & II	1 November 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/November 1, 2018 until released date of SLA
25	PT Roswell Pasific Indonesia	UM.339/30/11/ 2/PTP-18	30 November 2018	Terminal I & II	1 November 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/November 1, 2018 until released date of SLA
26	PT Sinar Citra Lestari	UM.339/30/11/ 5/PTP-18	30 November 2018	Terminal I & II	1 November 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/November 1, 2018 until released date of SLA

BAK tentang SLA kerjasama pelaksanaan kegiatan usaha terminal tersebut di atas tidak diperpanjang.

BAK regarding SLA cooperation of terminal operating activities as mentioned above were not extended.

Pada tanggal 1 November 2019, perjanjian-perjanjian antara PTP dan PBM tentang SLA kerjasama pelaksanaan kegiatan usaha terminal telah diperpanjang:

On November 1, 2019, the agreements between PTP and PBM concerning SLA in cooperation with the implementation of terminal business activities have been extended:

No	Perusahaan/ Company	No. Perjanjian / Agreement No.	Wilayah kerja/ Work location	Jangka waktu/ Time period	Thruput minimum/ Minimum throughput
1	PT Andhika Adidaya Samudra	PR.102/1/11/1/ OPS.TGP.PTP -19	Terminal I & II	04/01/19 - 31/12/19	47.500 ton per sembilan bulan/ ton per nine months
2	PT Andhika Andalantama	PR.102/1/11/1 5/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	348.087 ton per tahun/ton per year
3	PT Anugrah Firdaus Mandiri	PR.102/1/11/4/ OPS.TGP.PTP -19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	236.882 ton per tahun/ ton per year
4	PT Atho Tama	PR.102/1/11/6/ OPS.TGP.PTP -19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	15.747 ton per tahun/ ton per year
5	PT Buena Daya	PR.102/1/11/1 8/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/10/19 - 31/03/18	10.373 ton untuk 3 bulan/ton for 3 months
6	PT Citra Dermaga Perkasa	PR.102/1/11/1 9/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	432.000 ton per tahun/ton per year

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

I) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat (lanjutan)

**I) Loading and Unloading Activities
Cooperation (continued)**

Petikemas dan kargo (lanjutan)

Container and cargo (continued)

No	Perusahaan/ Company	No. Perjanjian / Agreement No.	Wilayah kerja/ Work location	Jangka waktu/ Time period	Thruput minimum/ Minimum throughput
7	PT Escorindo Stevedoring	PR.102/1/11/1 6/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/18 - 31/03/18	343.742 ton per tahun/ ton per year
8	PT Global Trans Servindo	PR.102/1/11/1 4/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	11.460 ton per tahun/ ton per year
9	PT Jasa Anugerah Samudera	PR.102/1/11/1 1/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	720.000 ton per tahun/ ton per year
10	PT Karya Abdi Luhur	PR.102/1/11/9/ OPS.TGP.PTP -19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	516.000 ton per tahun/ ton per year
11	PT Lapantiga Lintas Buana	PR.102/1/11/2/ OPS.TGP.PTP -19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	315.386 ton per tahun/ ton per year
12	PT Maritim Polykarya Tama	PR.102/1/11/1 0/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	108.332 ton per tahun/ ton per year
13	PT Meraseti Maritim Indonesia	PR.102/1/11/1 2/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	76.354 ton per tahun/ ton per year
14	PT Mitra Karunia Samudera	PR.102/1/11/2 1/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	497.858 ton per tahun/ ton per year
15	PT Mitra Multiguna Globalindo	PR.102/1/11/7/ OPS.TGP.PTP -19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	194.057 ton per tahun/ ton per year
16	PT Roswell Pasific Indonesia	PR.102/1/11/3/ OPS.TGP.PTP -19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	342.511 ton per tahun/ ton per year
17	PT Sarana Bandar Nasional	PR.102/1/11/2 0/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	448.972 ton per year/ ton per year
18	PT Sinar Berlian Indrapura	PR.102/1/11/8/ OPS.TGP.PTP -19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	329.219 ton per year/ ton per year
19	PT Sinar Citra Lestari	PR.102/1/11/1 3/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	168.283 ton per tahun/ ton per year
20	PT Sinatra Dewa Samudra	PR.102/19/12/ 1/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	398.368 ton per tahun/ ton per year atau/or 16.647 ekor per tahun
21	PT Srikreasi Unggul Persada	PR.102/1/11/5/ OPS.TGP.PTP -19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	1.181.505 ton per tahun/ ton per year
22	PT Tama Sarana Development	PR.102/1/11/1 7/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/07/19 - 31/12/19	216.000 ton for 6 bulan/ ton for 6 months
23	PT Tubagus Jaya Maritim	TJM/001/06/01 /2020	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	1.290.256 ton per tahun/ ton per year

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

I) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat (lanjutan)

Kendaraan dan alat berat

Pada tanggal 7 November 2013, PTP dan PBM terseleksi mengadakan SLA. Berdasarkan kesepakatan tersebut, para pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat kendaraan dan alat berat pada wilayah kerja PTP. Jangka waktu perjanjian adalah 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015.

Jangka waktu perjanjian telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2018. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perpanjangan atas perjanjian-perjanjian tersebut masih dalam proses penyelesaian.

No	Perusahaan/ Company	No. Perjanjian / Agreement No.	Wilayah kerja/ Work location	Jangka waktu/ Time period	Thruput minimum/ Minimum throughput
1	PT Sapta Kencana Buana	HK.566/16/3/8/ PTP-18	All terminal	01/01/18 - 31/03/18	13.004 ton per tahun/ton per year
2	PT Adimas Bahtera Harapan	HK.566/16/3/2/ PTP-18	All terminal	01/01/18 - 31/03/18	95.000 unit kendaraan per tahun/vehicles per year
3	PT Jaya Cargo Gemilang Indonesia	HK.566/16/3/7/ PTP-2018	All terminal	01/01/18 - 31/03/18	57.775 ton per tahun/ton per year
4	PT Triutama Karuna Samudera	HK.566/16/3/12/ PTP-2018	All terminal	01/01/18 - 31/03/18	59.667 ton per tahun/ton per year

Kendaraan dan alat berat (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut di atas, PTP berkewajiban untuk menyediakan dermaga tambatan dan fasilitas pendukungnya, termasuk lapangan dan gudang dan PBM berkewajiban menyediakan alat-alat, tenaga kerja dan/atau alat bantu bongkar muat serta peralatan lain yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat.

Dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat, PBM berkewajiban memberikan thrupt minimal yang jumlahnya disepakati para pihak.

Reward dan penalti akan diberikan kepada PBM atas pencapaian thrupt minimal per tahun, sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian.

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**I) Loading and Unloading Activities
Cooperation (continued)**

Vehicles and heavy equipment

On November 7, 2013, PTP and several selected PBM entered into SLA whereas the parties agreed to perform loading and unloading activities for vehicles and heavy equipment in PTP's working area. The term of the agreement was from December 3, 2011 until December 3, 2015.

The term of the agreement was extended until March 31, 2018. Until the completion date of the consolidated financial statements, those agreement extension is still in process of completion.

Vehicles and heavy equipment (continued)

Based on the above mentioned agreements, PTP has obligation to provide dock and supporting facilities, including yard and warehouse and PBM has an obligation to provide equipment, workers and/or supporting equipment and other equipment needed to perform the loading and unloading activities.

In performing the loading and unloading activities, PBM has an obligation to provide minimum throughput which was agreed by the parties.

Reward and penalty will be given to PBM for the achievement of the minimum throughput per year, as stipulated in the agreement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

m) Perjanjian Konsesi

Pada tanggal 11 November 2015, Perusahaan dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Otoritas Pelabuhan) telah menandatangani Perjanjian Konsesi tentang Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh Perusahaan (Perjanjian Konsesi), yang telah diadendum tanggal 15 Juli 2016, yang mencakup pemberian hak dari Otoritas Pelabuhan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di area konsesi yang diusahakan oleh Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan Perjanjian Konsesi tersebut, Perusahaan diharuskan untuk membayar pendapatan konsesi yang diperoleh dari kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi pada masing-masing pelabuhan kepada Otoritas Pelabuhan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak setiap 3 (tiga) bulan sebesar 2,5% dari pendapatan kotor dari pelaksanaan kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi. Pada saat berakhirnya Perjanjian Konsesi ini, seluruh aset Perusahaan di dalam area konsesi, termasuk tanah yang berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tanah yang tercatat sebagai aset Perusahaan, tetap menjadi aset dan hak pengelolaan dan/atau tanah Perusahaan.

n) Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur

Pada tanggal 9 April 2015, IKT mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur dengan PT Maspion Industrial Estate (MIE) dengan membentuk manajemen kerjasama operasi (MKO) Maspion Terminal Kendaraan Indonesia. Jangka waktu perjanjian adalah 25 tahun dengan porsi pendanaan IKT dan MIE masing-masing sebesar 45% dan 55%.

46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

m) Concession Agreement

On November 11, 2015, the Company and Tanjung Priok Main Port Authority Office (Port Authority) has signed Concession Agreement regarding Operational Activities at Port that was operated by the Company (Concession Agreement), which has been amended on July 15, 2016, which includes granting rights from the Port Authority to the Company to perform operation on providing and/or servicing of port services on operated concession area in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Shipping. Based on the Concession Agreement, the Company is obliged to pay concession revenue obtained from the port operation at concession area on each port to Port Authority as Non-tax State Revenue every 3 (three) months amounting to 2.5% of gross revenue from port operation at concession area. At the end of Concession Agreement, all the Company's assets in the concession area, including landrights and/or land recorded as the Company's assets, will remain assets and landrights and/or land of the Company.

n) Construction and Operation of Car Terminal in Gresik Jawa Timur

On April 9, 2015, IKT entered into an Agreement of Construction and Operation of Car Terminal in Gresik Jawa Timur with PT Maspion Industrial Estate (MIE) by establishing joint operation management (MKO) Maspion Terminal Kendaraan Indonesia. The period of agreement is 25 years with the funding portion for IKT and MIE amounting to 45% and 55%, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

o) Perjanjian Konsesi - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak

Pada tanggal 12 Juli 2018, Perusahaan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak (Otoritas Pelabuhan Pontianak) mengadakan Perjanjian Konsesi tentang Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (Perjanjian Konsesi Kijing) dimana Otoritas Pelabuhan Pontianak memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak beserta fasilitas pendukungnya pada area konsesi. Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi Kijing adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Konsesi Kijing berlaku selama 69 (enam puluh sembilan) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Konsesi Kijing.
- Perusahaan diwajibkan untuk membayar kepada Otoritas Pelabuhan Pontianak berupa pendapatan konsesi sebesar 2,5% per tahun dari pendapatan kotor yang berasal dari operasi komersial terminal Kijing.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi, Perusahaan diharuskan untuk membangun:
 - Infrastruktur, termasuk jalan akses, dermaga, *trestle*, lapangan penumpukan dan fasilitas lainnya.
 - Suprastruktur, termasuk peralatan di terminal multipurpose, terminal petikemas, terminal curah kering dan terminal curah cair, *electrical mechanical* serta *information communications technology*.
 - Penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan di terminal Kijing Pelabuhan Pontianak.
- Lahan pada area konsesi akan diterbitkan HPL atas nama Otoritas Pelabuhan Pontianak dan HGB atas nama Perusahaan.
- Perusahaan berhak mengadakan kerjasama kemitraan dengan mitra kerjasama dan entitas anak Perusahaan.

46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

o) Concession Agreement - Port Authority Office Class II Pontianak

On July 12, 2018, the Company and Port Authority Office Class II Pontianak (Pontianak Port Authority) entered into a Concession Agreement of Construction and Operation of Port Services of Terminal Kijing Pontianak Port, West Kalimantan Province (Kijing Concession Agreement) in which the Pontianak Port Authority granted rights to the Company, including the right to execute construction and operation of port services as well as development of Kijing Terminal Pontianak Port including its supporting facilities in the concession area. Important provisions in the Kijing Concession Agreement are as follows:

- Kijing Concession Agreement is valid for 69 (sixty nine) years from the signing date of the Kijing Concession Agreement.
- The Company is required to pay to Pontianak Port Authority, in form of concession revenues, 2.5% per annum of the gross revenue derived from the commercial operations in Kijing terminal.
- In accordance with the conditions of the Concession Agreement, the Company is required to build:
 - Infrastructure, including access roads, piers, *trestle*, dock yard and other facilities.
 - Superstructure, including equipment in multipurpose terminal, container terminal, dry bulk terminal and liquid bulk terminal, electrical mechanical and information communications technology.
 - Provision and maintenance of shipping navigation channel and port basin at Kijing Terminal Pontianak Port.
- Land in the concession area will be issued HPL under Pontianak Port Authority and HGB under the Company.
- The Company has the rights to enter into partnership cooperation with partners and subsidiaries of the Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**p) Perjanjian Konsesi - Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kelas II Pontianak (lanjutan)**

- Tarif awal yang akan diterapkan dalam area konsesi ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Penyesuaian tarif yang diterapkan dalam area konsesi dapat dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Perusahaan berhak mengenakan dan memungut tarif jasa kepelabuhan di dalam area konsesi.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan wajib menyerahkan seluruh aset di atas area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan Pontianak.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah melakukan pengeluaran (termasuk kapitalisasi biaya pinjaman) terkait pembangunan terminal Kijing tersebut masing-masing sebesar Rp1.879.783.067 dan Rp417.550.953 dan dicatat sebagai bagian dari akun "Aset takberwujud - aset hak konsesi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 15).

47. PERKARA HUKUM

- a) Permasalahan gugatan dari PT Artha Sempana meminta pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.128/HPL/DA/86 pada tanggal 18 Desember 1986 yang berisi pemberian HPL kepada Perusahaan atas tanah seluas 592.771 m2 di Pelabuhan Sunda Kelapa.

PT Artha Sempana menggugat Perusahaan dan Badan Pertanahan Nasional serta beberapa perseorangan yang diregister dengan No. 650/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan pokok gugatan pembatalan HPL atas tanah seluas 592.771 m2 di Pelabuhan Sunda Kelapa, ganti rugi materiil Rp10.000.000, dan ganti rugi immateriil Rp10.000.000. Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sudah ada putusan inkraht dengan Putusan (Niet Ontvankelijke) atau gugatan tidak dapat diterima.

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**p) Concession Agreement - Port Authority
Office Class II Pontianak (continued)**

- The initial rate applied in the concession area is set by the Company based on the type, structure and classification of rates set by the Minister.
- Adjustment on rate applied in the concession area can be made by the Company based on the type, structure and classification of rate set by the Minister.
- The Company has the right to impose and levy port services rate within the concession area.
- At the end of the concession period, the Company is obliged to transfer all assets within concession area to the Pontianak Port Authority.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company has made capital expenditures (including capitalization of borrowing cost) related to the construction of the Kijing terminal amounting to Rp1,879,783,067 and Rp417,550,953, respectively and recorded them as part of "Intangible assets – concession rights assets" in the consolidated statements of financial position of the company (Note 15).

47. LAWSUIT

- a) Lawsuit Issue of PT Artha Sempana requested for cancellation of Decree of the Minister of Home Affairs No. 128/HPL/DA/86 dated December 18, 1986 regarding the granting of the Right to Operate (HPL) the land to the Company with area of 592,771 m2 in Port of Sunda Kelapa.

PT Artha Sempana sued the Company and National Land Agency also individuals which are registered Number 650/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., in Jakarta Utara District Court, with the principal lawsuit of cancelation of HPL of land with area of 592,771 m2 in Pelabuhan Sunda Kelapa, the material compensation of Rp10,000,000, and immaterial compensation of Rp10,000,000. Based on Jakarta Utara District Court Decision, the verdict stated Niet Ontvankelijke or rejecting the lawsuit from PT Artha Sempana.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- a) Permasalahan gugatan dari PT Artha Sempana meminta pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.128/HPL/DA/86 pada tanggal 18 Desember 1986 yang berisi pemberian HPL kepada Perusahaan atas tanah seluas 592.771 m2 di Pelabuhan Sunda Kelapa. (lanjutan)

Pada tahun 2019, PT Artha Sempana mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dengan tambahan pokok gugatan yang meminta untuk dilakukan ganti kerugian terhadap lahan yang dikuasai oleh PT Arta Sempana apabila pihak Perusahaan ingin menguasai lahan tersebut.

Telah diterbitkan Surat Kuasa khusus dari Direktur Utama Perusahaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Jaksa Pengacara Negara No. KP.20.04/23/4/1/LGI/UT/PI.II-19 tanggal 23 April 2019.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara hukum ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

- b) Gugatan dari Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal menuntut ganti rugi akibat perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Serikat Pekerja PT JICT mengajukan gugatan kepada PT JICT selaku Tergugat, Perusahaan selaku Turut Tergugat I, dan Hutchison Ports Ltd selaku Turut Tergugat II yang diregister dengan nomor perkara 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., dengan pokok gugatan menuntut pembatalan perpanjangan kerja sama pengelolaan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok antara Perusahaan dengan PT JICT, pengembalian rental fee oleh Perusahaan kepada PT JICT sebesar USD147.595.109 atau setara dengan Rp1.976.869.823, dan sita jaminan atas rekening bank milik Perusahaan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr pada amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

47. LAWSUIT (continued)

- a) Lawsuit Issue of PT Artha Sempana requested for cancellation of Decree of the Minister of Home Affairs No. 128/HPL/DA/86 dated December 18, 1986 regarding the granting of the Right to Operate (HPL) the land to the Company with area of 592,771 m2 in Port of Sunda Kelapa. (continued)

In 2019, PT Artha Sempana submitted a new lawsuit to the North Jakarta District Court with No. 194 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr with the addition of the principal lawsuit to request compensation to be made against the land held by PT Arta Sempana if the Company wishes to control the land.

A special Power of Attorney has been issued from the President Director of the Company to the Head of the North Jakarta District Attorney as State Attorney No. KP.20.04 / 23/4/1 / LGI / UT / PI.II-19 dated April 23, 2019.

As of the completion date of the consolidated financial statements, the lawsuit is still in process in the North Jakarta District Court.

- b) Lawsuit filed by Labor Union of PT Jakarta International Container Terminal claiming compensation due to the extension of cooperation agreement on Terminal Petikemas in Pelabuhan Tanjung Priok.

The Labor Union of PT JICT has filed a lawsuit to PT JICT as co-defendant I, and Hutchison Ports Ltd as co-defendant II as registered by Case Number 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., with principal issue to order cancelation of extension cooperation on Terminal Peti Kemas in Pelabuhan Tanjung Priok between the company and PT JICT, repayment of rental fee of the Company to PT JICT amounting to USD147,595,109 or equal to Rp1,976,869,823, and sequestration of Company's bank account. Until the completion date of this consolidated financial statements, this case is still in process in Jakarta Utara District Court.

The verdict of the North Jakarta District Court Number 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr stated that the lawsuit was not accepted, stating that the North Jakarta District Court was not authorized to examine and adjudicate this case.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- b) Gugatan dari Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal menuntut ganti rugi akibat perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. (lanjutan)

Pada tanggal 13 Maret 2018, SP JICT telah mengajukan banding dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara tersebut masih dalam proses di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

- c) Gugatan dari Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution

Penggugat menyatakan bahwa Kantor Pertanahan mengakui adanya tumpang tindih HPL No.1 dan No.2 dengan tanah-tanah milik Penggugat (surat No.300.7-45/1/2010 tanggal 22 Januari 2010 Perihal Klarifikasi Status Tanah 565 Sertifikat Hak Milik dan Salinan Peta Lokasi Tanah yang terletak di Desa Pulo Ampel dan Desa Margasari Kec. Bojonegara Kabupaten Serang).

Penggugat mendalilkan bahwa kantor Pertanahan Kab. Serang telah salah mengeluarkan sertifikat HPL karena dianggap sudah mengetahui adanya sertifikat yang dimiliki oleh para Penggugat, sehingga dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan Nomor 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT tanggal 23 April 2012 telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.

Pada tanggal 14 Agustus 2012, Perusahaan telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut di atas ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan Nomor 634/PDT/2014/PT.DKI jo. 435/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut yang Amarnya pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT tanggal 23 April 2012.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara tersebut sedang pada tahap upaya Peninjauan Kembali (PK) dimana Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) menjadi kuasa dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

47. LAWSUIT (continued)

- b) Lawsuit filed by Labor Union of PT Jakarta International Container Terminal claiming compensation due to the extension of cooperation agreement on Terminal Petikemas in Pelabuhan Tanjung Priok. (continued)

On March 13, 2018, the JICT SP has filed an appeal and until the completion date of this consolidated financial statements, the case is still in process in DKI Jakarta High Court

- c) Lawsuit Filed by Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution

The Plaintiffs claimed that the Land Administration Office has admitted the existence of overlapping of HPL No. 1 and No. 2 with lands owned by the Plaintiffs (Letter No. 300.7-45/1/2010 dated January 22, 2010 regarding Clarifications on Status of Lands 565 Right of Ownership and copy of Land Location Map situated at Pulo Ampel Village and Margasari Village, Sub-District of Bojonegara, District of Serang).

Plaintiffs argued that Land Administration Office of Serang District has mistakenly issued HPL Certificate, on the ground that the Land Administration Office was deemed to have known the existence of certificates owned by the Plaintiffs. Therefore, the Land Administration Office has been categorized to have breached the law.

The North Jakarta District Court in their decision No. 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT dated April 23, 2012 has granted in part the lawsuit filed by the Plaintiffs.

On August 14, 2012, the Company has filed an appeal against the decision issued by the North Jakarta District Court as stated above to the DKI Jakarta High Court.

The DKI Jakarta High Court in their decision No. 634/PDT/2014/PT.DKI jo. 435/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut, strengthened the North Jakarta District Court decision No. 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT dated April 23, 2012.

Until the completion date of this consolidated financial statements, the lawsuit is at the stage of Judicial Review by Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) as the legal counsel of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- d) Perkara dengan No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg., di Pengadilan Negeri Palembang terkait gugatan perdata dari PT Resources Alam Indonesia menuntut pembatalan Sertifikat HPL No.91/Sungai Selincah atas nama Perusahaan yang diklaim tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.100/Sei Selincah dan HGB No.101/Sei Selincah atas nama PT Susel Prima Permai (sekarang PT Resources Alam Indonesia) yang telah berakhir jangka waktunya.

Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg., dalam amarnya menyatakan diantaranya sertifikat HPL No.91/Sungai Selincah atas nama Perusahaan cacat yuridis atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan Perusahaan membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp25.000.000 per tahun sejak terbitnya sertifikat HPL No.91/Sungai Selincah sampai putusan berkekuatan hukum tetap, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah sertifikat HPL No.91/Sungai Selincah seluas 23.500 m2 di Desa Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sesuai Berita Acara Sita Jaminan pada tanggal 28 Februari 2017 dengan No.182/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg, telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.182/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg. Perusahaan telah menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung yang telah didaftarkan pada tanggal 27 Februari 2018. MA dalam Putusan Kasasi No.2725K/PDT/2018 telah menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Perusahaan sehingga perkara dimenangkan oleh Perusahaan.

PT Resource Alam Indonesia telah mendaftarkan Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Agustus 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam hal ini Perusahaan sebagai Termohon Peninjauan Kembali I.

47. LAWSUIT (continued)

- d) Case with No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg., in Palembang Public Court about civil suit from PT. Resources Alam Indonesia demanding the cancellation of the Right to Operate (HPL) certificates No. 91/Sungai Selincah registered under the name of the Company which is claimed to be overlapping with Right to Build (HGB) certificate No.100/Sei Selincah and HGB certificate No.101/Sei Selincah under the name of PT Susel Prima Permai (now PT Resources Alam Indonesia) which terms have terminated.

The Palembang District Court in Decision No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg. In its ruling stated that among them were certificates of HPL No.91/Sungai Selincah registered under the name of the Company is a juridical defective or no binding legal force, ordering the Company to pay compensation to the plaintiff in the amount of Rp. 25,000,000 per year since the issuance of certificate of HPL No.91/Sungai Selincah until the decision has permanent legal force, declares valid and valuable confiscation of collateral that has been placed by the Palembang District Court on land of HPL certificate No.91/Selincah River covering an area of 23,500 m2 in the Village Sungai Selincah, Kalidoni Subdistrict, Palembang City, according to the Official Record of Confiscation on February 28, 2017 with No.182/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg.

Appeal Decision of South Sumatera High Court No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg has reinforced the Palembang State Court Decision No.182/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg. The Company has filed a cassation to the Supreme Court registered on February 27, 2018.

Supreme Court on the Decision No. 2725K/PDT/2018 has granted the cassation request from the Company therefore the decision has favored the Company.

PT Resource Alam Indonesia registered the Judicial Review on August 12, 2019 at the Registrar of the Palembang State Court in this case the Company as the Respondent for Judicial Review I.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- e) Perkara dengan No.151/Pdt.G/2017/PN.Plg., di Pengadilan Negeri Palembang terkait gugatan perdata dari PT Resources Alam Indonesia yang menuntut pembatalan Sertifikat HPL No.88/Sungai Selincah atas nama Perusahaan yang diklaim tumpang tindih dengan Sertifikat HGB No.100/Sei Selincah atas nama PT Resources Alam Indonesia yang telah berakhir jangka waktunya.

Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan No.151/Pdt.G/2017/PN.Plg., dalam amarnya menyatakan diantaranya menyatakan sertifikat HPL No.88/Sungai Selincah atas nama Perusahaan cacat yuridis atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan Perusahaan membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp25.000.000 per tahun sejak terbitnya sertipikat HPL No.88/Sungai Selincah sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

Perusahaan telah menempuh upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.

Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan banding No.80/Pdt/2018/PT.Plg dalam amarnya telah menyatakan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.151/Pdt.G/2017/PN/Plg.

Perusahaan telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2018 dan telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani perkara kasasi dimaksud.

Pada tanggal 13 Maret 2019 Perusahaan telah mengirimkan berkas hukum ke Mahkamah Agung sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, pihak perusahaan masih menunggu putusan kasasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

47. LAWSUIT (continued)

- e) Case with No.151/Pdt.G/2017/PN.Plg., in Palembang Public Court about civil suit from PT Resources Alam Indonesia demanded the cancellation of Right to Operate (HPL) certificate No.88/Sungai Selincah registered under the name of the Company which is claimed to be overlapped with HGB certificate No.100/Sei Selincah registered under the name of PT Resources Alam Indonesia which terms has been terminated.

The Palembang District Court in Decision No.151 / Pdt.G / 2016 / PN.Plg. in its ruling stated that among others certificates of HPL No.88 / Sungai Selincah registered under the name of the Company is a juridical defective or no binding legal force, ordering the Company to pay compensation to the plaintiff in the amount of Rp25,000,000 per year since the issuance of certificate of HPL No.88 / Sungai Selincah until the decision has permanent legal force..

The Company has filed an appeal to the South Sumatera High Court.

Palembang High Court on the appeal decision No.90/Pdt/2018/PT.Plg has decided to strengthen the Decision of Palembang State Court No.151/Pdt.G/2017/PN/Plg

The Company has proposed the cassation on October 23, 2018 and has appointed legal representatives to handle the cassation.

On March 13, 2019, the Company sent the legal file to the Supreme Court. Until the completion date of the consolidated financial statements, the company is still waiting for an cassation from the North Jakarta District Court.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- f) Permasalahan Hubungan Industrial dengan 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan.

Terdapat 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan mengajukan pengunduran diri dari jabatan kepada Manajemen Perusahaan dikarenakan merasa sudah tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh manajemen Perusahaan.

Atas dasar permohonan pengunduran diri dari jabatan tersebut, manajemen Perusahaan mengeluarkan surat persetujuan pengunduran diri sebagai karyawan Perusahaan kepada 33 (tiga puluh tiga) karyawan tersebut dengan dasar bahwa pengunduran diri dari jabatan tidak diatur di dalam Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Terhadap surat persetujuan dimaksud, kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Direksi tentang Pengakhiran Hubungan Kerja kepada masing-masing karyawan, namun demikian ada beberapa orang dari ke-33 orang karyawan tersebut yang mengajukan surat permohonan untuk dapat diangkat kembali sebagai karyawan dan 3 orang karyawan sudah diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan ke 30 (tiga puluh) karyawan tidak terima dengan keputusan Manajemen terkait Pengakhiran Hubungan Kerja, maka melalui kuasa hukumnya yakni Ihza & Ihza Lawfirm, mengirimkan somasi kepada Manajemen Perusahaan dan menuntut untuk dapat dipekerjakan kembali serta diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas somasi tersebut, manajemen Perusahaan melalui kuasa hukumnya (Kantor Hukum Kemalsjah & Associates) menolak somasi dimaksud.

Atas penolakan tersebut, kuasa hukum karyawan mendaftarkan penyelesaian tersebut di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara untuk tujuan mediasi.

Sehubungan dengan gagalnya mediasi ke 30 karyawan yang tidak menerima keputusan manajemen, 30 karyawan tersebut mendaftarkan gugatan industrial pada masing-masing wilayah kerja antara lain Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) DKI Jakarta, PHI Bandung, PHI Serang, PHI Jambi dan PHI Palembang.

47. LAWSUIT (continued)

- f) *Industrial Relations Issue with 33 (thirty three) employees of the Company who resigned from their position.*

There were 33 (thirty three) employees of the Company who rendered their resignation from their position to the management of the Company as they felt they were not in line with the policy undertaken by the Company's management.

In response to such resignation from the position, the management of the Company issued consent letters to those 33 (thirty three) employees for resignation as the employees of the Company on the basis that the resignation from the job position is not regulated in Law No. 13 of 2003 regarding Labor and the Collective Working Agreement.

As a follow up on the consents for resignation, Board of Directors' Decision Letters were issued regarding Employment Termination to each employee. However, there were several terminated employees out of those 33 (thirty three) employees who rendered request letters asking for rehiring as employees. Three employees have been rehired in accordance with the prevailing regulations.

As 30 (thirty) employees did not accept management decisions regarding employment termination, they sent a legal notice to the management of the Company through their legal counsel from Ihza & Ihza Law Firm, demanding for rehiring and receiving their rights in accordance with the prevailing regulations. In response to such legal notice, the management of the Company through their legal counsel from Kemalsjah & Associates Law Firm rejected the legal notice in question.

In response to such rejection, the employees' legal counsel applied for resolution to the case to the Transmigration and Manpower Office of North Jakarta for mediation purpose.

Following the failed mediation process with 30 employees that did not accept the management decision, the 30 employees submitted industrial lawsuit to Industrial Relations Court (PHI) DKI Jakarta, PHI Bandung, PHI Serang, PHI Jambi and PHI Palembang.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- g) PHI Jakarta dalam amarnya melalui surat Putusan No.114/PHI.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 23 Juli 2014 menyatakan bahwa hubungan kerja antara 23 mantan karyawan dan Perusahaan berakhir terhitung 22 Juli 2014 dan tergugat wajib membayar kepada 23 mantan karyawan dengan nilai sebesar Rp15.742.190.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601 K/Pdt.Sus-Phi/2014 tanggal 7 Januari 2015, menyatakan membatalkan putusan pengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakarta Pusat, mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan hubungan kerja putus, mewajibkan kepada Perusahaan untuk membayar hak para Penggugat antara lain manfaat program pensiun, Uang Pisah sebesar 2x Gaji Merit dan bantuan uang pindah sebagaimana diatur dalam PKB.

Putusan PHI Palembang No. 14/Pdt.Sus/PHI/2014/PN.Plg tanggal 25 November 2014 dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan Perusahaan berkewajiban membayar uang bantuan pindah sebesar Rp39.888. Atas putusan tersebut, penggugat mengajukan kasasi. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Mahkamah Agung dalam Putusan No.292 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015 telah menolak permohonan kasasi pekerja sehingga memenangkan Perusahaan.

Putusan PHI Bandung No.121/Pdt/-Sus-PHI/2014/PN.BDG pada tanggal 20 Oktober 2014 dalam amar putusannya menyatakan menerima gugatan penggugat untuk sebagian, menghukum Perusahaan untuk mempekerjakan kembali para penggugat, membayar para penggugat sebesar Rp502.971. Atas putusan tersebut, Perusahaan menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.138k/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 16 April 2015 telah menyatakan menerima permohonan kasasi dari Perusahaan, dan membatalkan Putusan PHI Bandung No.121/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, sehingga memenangkan Perusahaan.

47. LAWSUIT (continued)

- g) The PHI Jakarta through its Decision letter No. 114/PHI.G/2014/PN.JKT.PST dated July 23, 2014, stated that the work relation between the 23 ex-employees and the Company ended as of July 22, 2014 and the defendant was obliged to pay to the 23 ex-employees amounting to Rp15,742,190.

Based on Decision of Supreme Court of Republic Indonesia No. 601 K/Pdt.Sus-Phi/2014 dated January 7, 2015 it was decided to reverse the court decision of the Jakarta Pusat District Court regarding industrial relations, to reject all the claims of the plaintiff to declare the termination of working relationship and to require the Company to pay the Plaintiff's right such as pension program benefit, severance payment amounting to 2x salary and relocation fund as regulated in PKB.

The PHI Palembang through its decision letter No. 14/Pdt.Sus/PHI/2014/PN.Plg dated November 25, 2014, rejected all the plaintiff claims and the Company was required to pay relocation cost of Rp39,888. Against the decision, the plaintiff filed a cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Until the completion date of this consolidated financial statements, this case is still in the cassation process at the Supreme Court. Until the completion date of this consolidated financial statements, Supreme Court has stated in Cassation Verdict No. 292 K/Pdt.Sus-PHI/2015 on June 11, 2015 to reject the appeal from Employee, thus declaring a win to the Company.

The PHI Bandung through its Decision letter No. 121/Pdt/-Sus-PHI/2014/PN.BDG dated October 20, 2014 partially granted the plaintiff claims, and punished the Company to rehire the plaintiffs, to pay the plaintiffs salaries amounting to Rp502,971. The Supreme Court through its Cassation Verdict No. 138k/Pdt.Sus-PHI/2015 on April 16, 2015 has stated to accept the appeal from the Company, and cancelled the Decision Letter of PHI Bandung No.121/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, thus resulting in a win to the Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- h) Putusan PHI Jambi No. 13/G/2014/PHI/PN.Jmb tanggal 20 November 2014 dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menghukum Perusahaan untuk mempekerjakan kembali penggugat dan membayar upah penggugat sampai putusan Inkracht. Atas putusan tersebut, Perusahaan telah menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.123 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 16 April 2015 telah menyatakan mengabulkan permohonan kasasi Perusahaan, dan membatalkan Putusan PHI Jambi No.13/G/2014/PHI.Jmb., sehingga memenangkan Perusahaan.

Putusan PHI Serang No. 49/PHI.G/2014/PN.Srg tanggal 26 November 2014. Dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menghukum tergugat untuk mempekerjakan kembali penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar upah penggugat sebesar 6 (enam) bulan upah sebesar Rp68.546. Perusahaan telah menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.438K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 28 Agustus 2015 menyatakan mengabulkan permohonan kasasi Perusahaan, dan membatalkan Putusan PHI Serang No.49/PHI.G/2014/PN.Srg, sehingga memenangkan Perusahaan.

Dari 23 mantan karyawan tersebut terdapat 5 orang yang menempuh upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana perkara PK Nomor 115PK/Pdt.Sus-Phi/2018 namun pihak Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dan menghukum para pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.

47. LAWSUIT (continued)

- h) *The PHI Jambi through its Decision letter No. 13/G/2014/PHI/PN.Jmb dated November 20, 2014 partially granted the plaintiff claims, and ordered the Company to rehire the plaintiffs, to pay the plaintiffs salary until a binding decision is reached. The Supreme Court through its Cassation Verdict No.123 K/Pdt.Sus-PHI/2015 on April 16, 2015 has stated to accept the appeal from the Company, and cancelled the Decision Letter of PHI Jambi No. 13/G/2014/PHI.Jmb, thus resulting a win to the Company.*

The PHI Serang through its Decision letter No. 49/PHI.G/2014/PN.Srg dated November 26, 2014, partially granted the plaintiff claims, and punished the Company to rehire the plaintiffs, to pay the plaintiffs salary for 6 (six) months amounting to Rp68,546. The Supreme Court through its Cassation Verdict No. 438 K/Pdt.Sus-PHI/2015 on August 28, 2015 has stated to accept the appeal from the Company, and cancelled the Decision Letter of PHI Serang No. 49/PHI.G/2014/PN.Srg, thus resulting a win to the Company.

From 23 ex-employees five of them are preparing Judicial Review with case number 115PK/Pdt.Sus-Phi/2018. However, the Supreme Court rejected the request for reconsideration and sentenced the petitioners to pay the reconsideration examination fee of Rp2,500.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn No.14 tanggal 26 Maret 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan diantaranya menetapkan perubahan nomenklatur serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Independen	Moermahadi Soerja Djanegara
Komisaris Independen	Suaidi Marasabessy
Komisaris	Kushari Suprianto
Komisaris	Montty Giriana
Komisaris	D. Andhi Nirwanto
Komisaris	Djadmiko
Komisaris	R. Agus H. Purnomo

Direksi

Direktur Utama	Arif Suhartono
Wakil Direktur Utama	Hambra
Direktur Komersial	Rima Novianti
Direktur Teknik	Dani Rusli Utama
Direktur Operasi	Muarip
Direktur Keuangan	Yon Irawan
Direktur SDM dan Umum	Ihsanuddin Usman
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Ogi Rulino

- b) Setelah tanggal pelaporan, terdapat ketidakpastian terhadap kondisi makro ekonomi baik di Indonesia maupun global yang terutama disebabkan oleh virus Covid-19. Operasi Kelompok Usaha telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19 yang dimulai di Cina dan kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Kondisi ini berdampak pada menurunnya secara signifikan operasi dan kondisi keuangan Kelompok Usaha. Efek masa depan dari merebaknya virus Covid-19 terhadap Indonesia dan Kelompok Usaha masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan Kelompok Usaha.

48. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- a) Based on The Decree of The Minister of SOEs No. SK-69/MBU/03/2020 which stated on Notarial Deed Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No.14 dated March 26 2020, The Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders (GMS) of The Company stipulated as follows:

Board of Commissioners

President/Independent Commissioner
Independent Commissioner Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Vice President of Director
Director of Commercial
Director of Engineering
Director of Operations
Director of Finance
Director of HR and General Affairs
Director of Transformation and Business Development

- b) After the reporting date, there was uncertainty on the macro-economic condition both in Indonesia and global which mainly due to impact of Covid-19 virus. The Group operation has and may continue to be impacted by the outbreak of Covid-19 virus which started in China and subsequently spread to other countries including Indonesia. This condition has affected the significant decreased in the Group's operation and financial condition. The future effects of the outbreak of Covid-19 virus to Indonesia and the Group are unclear at this time. A significant rise in the number of Covid-19 virus infections or prolongation of the outbreak may affect Indonesia and the Group.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**48. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- c) Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

**48. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

- c) On March 31, 2020, the Government issued a Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2020 which stipulates, among others, reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entities from previously 25% to become 22% for fiscal years 2020 and 2021 and 20% starting fiscal year 2022 and onwards, and further reduction of 3% for corporate income tax payers that fulfill certain criteria.

49. INFORMASI SEGMENT

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

49. SEGMENT INFORMATION

Information concerning the Company's business segments is as follows:

31 Desember/December 31, 2019

	Operasi Kepelabuhanan/ Port Operation	Jasa Lainnya/ Other Services	Total Sebelum Eliminasi/Total Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	10.054.866.623	1.086.885.602	11.141.752.225	-	11.141.752.225	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	3.627.525.315	27.156.463	3.654.681.779	(3.654.681.779)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen	13.682.391.938	1.114.042.065	14.796.434.004	(3.654.681.779)	11.141.752.225	Total segment operating revenues
Beban operasi	(10.862.669.461)	(1.164.951.377)	(12.027.620.837)	3.507.263.164	(8.520.357.673)	Operating expenses
Pendapatan operasi lainnya - neto	720.320.596	51.672.366	771.992.962	(54.878.448)	717.114.514	Other operating income - net
Laba usaha					3.338.509.066	Operating income
Pendapatan keuangan	832.477.623	3.782.489	836.260.112	-	836.260.112	Finance income
Beban keuangan	(1.196.139.389)	(17.046.345)	(1.213.185.734)	12.948.645	(1.200.237.089)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	979.956.870	-	979.956.870	(739.388.528)	240.568.343	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					3.215.100.432	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(505.944.961)	(3.747.530)	(509.692.491)	-	(509.692.491)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan					2.705.407.941	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(240.416.714)	(19.500.340)	(259.917.054)	-	(259.917.054)	Current
Tangguhan	39.603.470	18.715.991	58.319.461	-	58.319.461	Deferred
Laba tahun berjalan					2.503.810.348	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	58.538.271.418	1.351.814.560	59.890.085.978	(7.849.486.244)	52.040.599.734	Segment assets
Liabilitas segmen	37.864.505.082	933.846.256	38.798.351.338	(4.883.962.382)	33.914.388.956	Segment liabilities
Penyusutan dan amortisasi segmen	(803.880.502)	(59.825.118)	(863.705.620)	-	(863.705.620)	Segment depreciation and amortization

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

49. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Company's business segments is as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2018

	Operasi Kepelabuhanan/ Port Operation	Jasa Lainnya/ Other Services	Total Sebelum Eliminasi/Total Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	10.410.223.653	1.026.477.241	11.436.700.894	-	11.436.700.894	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	3.262.402.694	4.160.570	3.266.563.264	(3.266.563.264)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen	13.672.626.347	1.030.637.811	14.703.264.158	(3.266.563.264)	11.436.700.894	Total segment operating revenues
Beban operasi	(10.193.660.949)	(959.616.637)	(11.153.277.586)	3.110.722.766	(8.042.554.820)	Operating expenses
Pendapatan operasi lainnya - neto	(214.188.922)	94.303.039	(119.885.883)	(76.474.693)	(196.360.574)	Other operating income - net
Laba usaha					3.197.785.500	Operating income
Pendapatan keuangan	681.864.210	7.050.090	688.914.300	-	688.914.300	Finance income
Beban keuangan	(1.120.125.705)	(13.526.311)	(1.133.652.016)	2.870.000	(1.130.782.016)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	1.677.185.749	-	1.677.185.749	(1.300.985.155)	376.200.594	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					3.132.118.378	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(344.088.410)	(13.024.812)	(357.113.222)	-	(357.113.222)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan					2.775.005.156	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(344.085.965)	(9.895.803)	(353.981.768)	-	(353.981.768)	Current
Tangguhan	(4.516.972)	14.203.439	9.686.467	-	9.686.466	Deferred
Laba tahun berjalan					2.430.709.854	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	59.489.560.988	1.184.698.666	60.674.259.654	(9.241.382.631)	51.432.877.023	Segment assets
Liabilitas segmen	39.839.642.559	667.223.706	40.506.866.265	(5.508.445.561)	34.998.420.704	Segment liabilities
Penyusutan dan amortisasi segmen	(713.497.663)	(59.861.617)	(773.359.280)	-	(773.359.280)	Segment depreciation and amortization

Informasi yang menyangkut segmen geografis Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

Information concerning the Company's geographical segment is as follows:

Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,

	2019	2018	
Pendapatan Operasi			Operating Revenues
Tanjung Priok	8.426.347.509	9.666.180.682	Tanjung Priok
Panjang	431.012.354	332.388.938	Panjang
Banten	505.505.646	327.697.066	Banten
Palembang	442.335.533	283.449.657	Palembang
Teluk Bayur	353.339.199	250.570.236	Teluk Bayur
Pontianak	366.080.664	187.996.098	Pontianak
Bengkulu	179.902.032	129.757.069	Bengkulu
Cirebon	207.846.157	101.044.253	Cirebon
Sunda Kelapa	56.554.487	56.606.751	Sunda Kelapa
Jambi	107.477.694	56.168.698	Jambi
Pangkal Balam	46.383.534	36.573.146	Pangkal Balam
Tanjung Pandan	18.967.416	8.268.300	Tanjung Pandan
Total	11.141.752.225	11.436.700.894	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

49. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen geografis Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

49. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Company's geographical segment is as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Aset tidak lancar			Non-current asset
Tanjung Priok	26.115.731.872	22.411.760.752	Tanjung Priok
Banten	1.175.481.901	1.086.484.236	Banten
Panjang	798.291.930	711.492.393	Panjang
Teluk Bayur	660.756.402	657.751.014	Teluk Bayur
Pontianak	454.415.947	466.828.200	Pontianak
Bengkulu	456.746.282	443.924.137	Bengkulu
Palembang	387.199.459	371.103.634	Palembang
Jambi	278.532.863	248.972.474	Jambi
Cirebon	233.309.650	226.987.094	Cirebon
Pangkal Balam	122.095.269	116.236.840	Pangkal Balam
Sunda Kelapa	103.639.466	103.637.404	Sunda Kelapa
Tanjung Pandan	40.377.652	33.362.716	Tanjung Pandan
Total	30.826.578.693	26.878.540.894	Total

50. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

50. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Movement of liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

	Non- arus kas/Non-cash flow				31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange difference	Lainnya/ Others		
Pinjaman bank jangka pendek	4.000.000	30.193.914	-	-	34.193.914	Short-term bank loans
Utang bank	-	114.990.000	-	-	114.990.000	Bank loans
Utang obligasi	22.890.166.969	-	(905.988.776)	-	21.984.178.193	Bonds payable
Dividen	(653.968.052)	(832.742.000)	-	653.968.052	(832.742.000)	Dividend
Total	22.240.198.917	(687.558.086)	(905.988.776)	653.968.052	21.300.620.107	Total

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
I. Umum		
I. General		
1. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris	√	1. The Annual Report shall be written in good and correct Indonesian, and is recommended to be presented in English
2. Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca	√	2. The Annual Report shall be printed with good quality using readable type and size of fonts
3. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	√	3. The Annual Report shall present clear identity of the company
4. Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: a. Sampul muka; b. Samping; c. Sampul belakang; dan d. Setiap halaman.	√	4. Company name and the annual report financial year shall be presented on: a. Front Cover; b. Side Cover; c. Back Cover; and d. Every page
5. Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	√	5. The Annual Report shall be posted in the company's website Including the latest annual report as well as those for the last four years, at least.
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting		
II. Key Financial Highlights		
1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	28-30	1. Income statement in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years
Informasi memuat antara lain: a. Penjualan/pendapatan usaha; b. Laba (rugi): • Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan • Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; c. Penghasilan komprehensif periode berjalan : • Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan • Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan d. Laba (rugi) per saham.	√ √ √ √	Information contains the following: a. Income; b. Profit (loss): • Attributable to equity holders of the parent entity; and • Attributable to non controlling interest; c. Total comprehensive profit (loss): • Attributable to equity holders of the parent entity; and • Attributable to non controlling interest; d. Earning (loss) per share.
Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.w		Note: If the company does not have subsidiaries, the profit (loss) and other comprehensive income is presented in total.
2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	24-28	2. √ Financial position in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years
Informasi memuat antara lain: a. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; b. Jumlah aset; c. Jumlah liabilitas; dan d. Jumlah ekuitas.	√ √ √ √	Information contains the following: a. Total investment on associates; b. Total assets c. Total liabilities; and d. Total equity

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	31-32	3. Financial ratio in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years Information covers 5 (five) financial ratios, which are generally applied and relevant to the company's industry.
4. Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik a. Jumlah saham yang beredar; b. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. c. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: <ul style="list-style-type: none"> Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. <p>Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.</p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.</p>	34	4. Share price information in tables and charts a. Number of shares outstanding; b. The table forms contain the following information: <ul style="list-style-type: none"> Market capitalization based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed; Highest, lowest and closing share price based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed; and Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed. c. The graph forms contain at least the following information: <ul style="list-style-type: none"> The closing price of shares based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed; and Trading volume of shares on the Stock <p>Exchange where the shares are listed For each quarter in the latest 2 (two) financial years.</p> <p>Note: Should be disclosed if the company does not have market capitalization, share price, and share trading volume.</p>
5. Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	34-37	5. Information regarding outstanding bonds, sukuk or convertible bonds, in 2 (two) latest financial years
Informasi memuat: a. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); b. Tingkat bunga/imbalan; c. Tanggal jatuh tempo; dan d. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016.		Information contains: a. Number of outstanding bonds, sukuk or convertible bonds; b. Interest rate/yield; c. Maturity date; and d. Rating of bonds/sukuk in 2015 and 2016.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.		Note: Should be disclosed if the company does not have outstanding bonds, sukuk or convertible bonds.
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi		
1. Laporan Dewan Komisaris	50-61	1. Board of Commissioners' Report
Memuat hal-hal sebagai berikut: a. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; b. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; c. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan d. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	√ √ √ √	Contain the following: a. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company and the basis for such evaluation; b. Views on the business prospects of the company as prepared by the Board of Directors and the basis for such consideration; c. Views on the implementation/management of the company's whistleblowing system (WBS), and the role of the Board of Commissioners in the WBS; and d. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reason for such changes.

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
<p>2. Laporan Direksi</p> <p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kebijakan strategis; • perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan • kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; <p>b. Analisis tentang prospek usaha;</p> <p>c. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan</p> <p>d. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.</p>	<p>62-77</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>2. Board of Directors' report</p> <p>Contain the following:</p> <p>a. Analysis of the company's performance, covering among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strategic policies; • comparison between targets and achievements; and • challenges faced by the company and initiatives to deal with those challenges; <p>b. Analysis on business prospects;</p> <p>c. Developments in the implementation of GCG during the fiscal year; and</p> <p>d. Changes in the composition of the Board of Directors (if any) and the reason for such changes.</p>
<p>3. Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi</p> <p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;</p> <p>b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;</p> <p>c. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan</p> <p>d. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.</p>	<p>78-79</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>3. Signatures of members of the Board of Commissioners and Board of Directors</p> <p>Contain the following:</p> <p>a. Signatures on a separate page;</p> <p>b. Statement of responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors for the accuracy of the contents of the Annual Report;</p> <p>c. Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors by stating their names and position; and</p> <p>d. Written explanation in separate letter from the person(s) concerned in the event that member(s) of Board of Commissioners or Board of Directors fail to sign the annual report; or: written explanation in separate letter from other member(s) in the event that there is no written explanation from the person(s) concerned.</p>
IV. Profil Perusahaan		IV. Company Profile
<p>1. Nama dan alamat lengkap perusahaan Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.</p>	82-83	<p>1. Name and complete address of the company Information contains, among others, name and address, post code, telephone number, fax, email and website.</p>
<p>2. Riwayat singkat perusahaan Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.</p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan</p>	84-85	<p>2. Brief history of the company Contain among others: date/year of establishment, name of the company, change of name (if any), and effective date of the change of name.</p> <p>Note: to be disclosed if the company never had a change of name</p>
<p>3. Bidang usaha</p> <p>Uraian mengenai antara lain:</p> <p>a. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;</p> <p>b. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan</p> <p>c. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.</p>	86-89	<p>3. Line of business</p> <p>Description of, among others:</p> <p>a. The line of business as stated in the latest Articles of Association;</p> <p>b. Business activities; and</p> <p>c. Product and/or services offered.</p>
<p>4. Struktur Organisasi</p> <p>Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.</p>	92-94	<p>5. Organization structure</p> <p>Diagram of organization structure, containing name and position of personnel up to one level below Director, at least</p>

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
<p>5. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Mencakup:</p> <p>a. Visi perusahaan;</p> <p>b. Misi perusahaan;</p> <p>c. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan</p> <p>d. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate value) yang dimiliki perusahaan.</p>	<p>96-100</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>5. Vision, Mission and Corporate Culture Covers:</p> <p>a. Vision;</p> <p>b. Mission;</p> <p>c. Statement that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Commissioners/Directors in the fiscal year; and</p> <p>d. Statement on the corporate value.</p>
<p>6. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris</p> <p>Informasi memuat antara lain:</p> <p>a. Nama;</p> <p>b. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);</p> <p>c. Umur;</p> <p>d. Domisili;</p> <p>e. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);</p> <p>f. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan</p> <p>g. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.</p>	<p>102-119</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>6. Profiles of members of the Board of Commissioners</p> <p>Contain information on:</p> <p>a. Name;</p> <p>b. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution);</p> <p>c. Age;</p> <p>d. Domicile;</p> <p>e. Education (study field and education institution);</p> <p>f. Work experience (position, company, and period in position); and</p> <p>g. History of assignments (period and position) as member of the Board of Commissioners at the company since the first appointment.</p>
<p>7. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi</p> <p>Informasi memuat antara lain:</p> <p>a. Nama;</p> <p>b. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);</p> <p>c. Umur;</p> <p>d. Domisili;</p> <p>e. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);</p> <p>f. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan</p> <p>g. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.</p>	<p>120-145</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>7. Profiles of members of the Board of Directors</p> <p>Contain information on:</p> <p>a. Name;</p> <p>b. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution);</p> <p>c. Age;</p> <p>d. Domicile;</p> <p>e. Education (study field and education institution);</p> <p>f. Work experience (position, company, and period in position); and</p> <p>g. History of assignments (period and position) as member of the Board of Directors at the company since the first appointment.</p>
<p>8. Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi</p> <p>Informasi memuat antara lain:</p> <p>a. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;</p> <p>b. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;</p> <p>c. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian;</p> <p>d. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan</p> <p>e. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.</p>	<p>161-180</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>8. Total number of employees (comparative for 2 years) and data on employee competence development programs reflecting equal opportunities for each level of the organization</p> <p>Information contains, among others:</p> <p>a. Number of employees at each level of the organization;</p> <p>b. Number of employees by education;</p> <p>c. Number of employees by employment status;</p> <p>d. Data on employee competence development programs during the fiscal year, concerning position of participants, type of training, and purpose of training; and</p> <p>e. The costs of employee competence development programs in the fiscal year.</p>

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
<p>9. Komposisi Pemegang saham</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <p>a. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya;</p> <p>b. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan • Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. <p>c. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung.</p> <p>Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.</p>	<p>181</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>9. Shareholders composition</p> <p>Covering among others:</p> <p>a. Names of the 20 largest shareholders and their shareholding percentage;</p> <p>b. Details of shareholders and shareholding percentage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Names of shareholders with 5% or more shareholding; and • Group of public shareholders with individual shareholding of less than 5% each. <p>c. Names of Director and Commissioner with director indirect share-ownership and the percentage of such shareholding.</p> <p>Note: should be disclosed if the Director and Commissioner does not own shares, directly or indirectly.</p>
<p>10. Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi</p> <p>Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain:</p> <p>a. Nama entitas anak dan/atau asosiasi;</p> <p>b. Persentase kepemilikan saham;</p> <p>c. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan</p> <p>d. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).</p>	<p>182-213</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>10. List of subsidiaries and/or associated entities</p> <p>In table form, containing:</p> <p>a. Name of subsidiary and/or associated entity;</p> <p>b. Share-ownership percentage;</p> <p>c. Line of business of subsidiary and/or associated entity; and</p> <p>d. Operational status of subsidiary and/or associated entity (in commercial operation/not yet in commercial operation).</p>
<p>11. Struktur grup perusahaan</p> <p>Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).</p>	<p>214</p>	<p>11. Corporate group structure</p> <p>Diagram of corporate group structure involving relationship of the parent company, subsidiary, associated entity, joint venture, and special purpose vehicle (SPV).</p>
<p>12. Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <p>a. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action);</p> <p>b. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan</p> <p>c. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.</p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.</p>	<p>215-216</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>12. Chronology of share listing (including private placement) and/or share listing from the share issuance up to the end of the fiscal year</p> <p>Covers, among others:</p> <p>a. Year of share issuance, number of shares issued, par value, and share offer price, for each separate corporate action;</p> <p>b. Total number of shares outstanding following the corporate action; and</p> <p>c. The stock exchange where the shares are listed.</p> <p>Note: should be disclosed if the company does not have a chronology of share listing.</p>

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
<p>13. Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <p>a. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya;</p> <p>b. Nilai penawaran efek lainnya;</p> <p>c. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan</p> <p>d. Peringkat efek.</p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan</p>	<p>217-220</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>13. Chronology of other securities issuance and/or listing from the time of issuance up until the end of the fiscal year</p> <p>Covers, among others:</p> <p>a. Name of security instrument, year of issuance, interest rate/yield of securities, and maturity date;</p> <p>b. Offering price of other securities;</p> <p>c. The stock exchange where the securities are listed; and</p> <p>d. Rating of securities.</p> <p>Note: should be disclosed if the company does not have chronology of other securities issuance/listing</p>
<p>14. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang</p> <p>Informasi memuat antara lain:</p> <p>a. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan;</p> <p>b. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan</p> <p>c. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.</p>	<p>221-229</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>14. Name and address of supporting institutions and/or professionals</p> <p>Covers, among others:</p> <p>a. Name and address of the company's Share Registrar;</p> <p>b. Name and address of Public Accountant Firm; and</p> <p>c. Name and address of rating agencies.</p>
<p>15. Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun Internasional</p> <p>Informasi memuat antara lain:</p> <p>a. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi;</p> <p>b. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi;</p> <p>c. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan</p> <p>d. Masa berlaku (untuk sertifikasi).</p>	<p>230-243</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>15. Awards received during the fiscal year, or valid certification in the fiscal year, at both national and international levels</p> <p>Covers, among others:</p> <p>a. Name of award and/or certification;</p> <p>b. Year received/issued;</p> <p>c. Name of institution that issued the award/certification; and</p> <p>d. Validity period (certification).</p>
<p>16. Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)</p> <p>Memuat informasi antara lain:</p> <p>a. Nama dan alamat entitas anak; dan</p> <p>b. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.</p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan</p>	<p>244-247</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>16. Name and address of subsidiaries and/or branch offices or representative offices (if any)</p> <p>Covers information on:</p> <p>a. Name and address of subsidiaries; and</p> <p>b. Name and address of branch/representative office.</p> <p>Note: should be disclosed if the company does not have a subsidiary, branch office or representative office.</p>
<p>17. Informasi pada Website Perusahaan</p> <p>Meliputi paling kurang:</p> <p>a. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;</p> <p>b. Isi Kode Etik;</p> <p>c. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan;</p> <p>d. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir);</p> <p>e. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan</p> <p>f. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komitekomite, dan Unit Audit Internal.</p>	<p>248-249</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>17. Information in the corporate website</p> <p>Covers at the very least:</p> <p>a. Information of shareholders up to the individual ultimate shareholder;</p> <p>b. Contents of the Code of Conduct;</p> <p>c. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS), covering at least agenda of the GMS, summary of GMS resolutions, and information of pertinent dates, namely the dates of GMS announcement, GMS invitation, GMS event, and announcement of summary GMS resolutions;</p> <p>d. Annual financial statements (last 5 years);</p> <p>e. Profiles of the Board of Commissioners and Directors; and</p> <p>f. Board manual/Charter of the BoC. BoD, Committees and Internal Audit Unit.</p>

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
<p>18. Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal</p> <p>Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti):</p> <p>a. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris;</p> <p>b. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi;</p> <p>c. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit;</p> <p>d. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi;</p> <p>e. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya;</p> <p>f. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan</p> <p>g. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal.</p> <p>yang diikuti pada tahun buku.</p> <p>Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan</p>	<p>250-258</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>18. Training and education for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit</p> <p>Cover at least information of type of training and participant of:</p> <p>a. Training and/or education for Board of Commissioners;</p> <p>b. Training and/or education for Board of Directors;</p> <p>c. Training and/or education for Audit Committee;</p> <p>d. Training and/or education for Nomination and Remuneration Committee;</p> <p>e. Training and/or education for other Committee(s);</p> <p>f. Training and/or education for Corporate Secretary; and</p> <p>g. Training and/or education for Internal Audit Unit.</p> <p>During the fiscal year.</p> <p>Note: should be disclosed if there are no training and/or education during the fiscal year</p>
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan		V. Management Discussion and Analysis on the Company Performance
<p>1. Tinjauan operasi per segmen usaha</p> <p>Memuat uraian mengenai:</p> <p>a. Penjelasan masing-masing segmen usaha.</p> <p>b. Kinerja per segmen usaha, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produksi; • Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; • Penjualan/pendapatan usaha; dan • Profitabilitas. 	<p>346-424</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>1. Operation review per business segment</p> <p>Includes analysis on:</p> <p>a. Elaboration on each business segment.</p> <p>b. Performance of each business segment, among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Production; • Increase/Decrease of production capacity; • Sales/income; and • Profitability
<p>2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:</p> <p>a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;</p> <p>b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas;</p> <p>c. Ekuitas;</p> <p>d. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan</p> <p>e. Arus kas</p>	<p>462-504</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>2. Description on the Company's financial performance An analysis comparing the performance of the current year and that of the previous year (in the form of narration and tables) and the reasons for the increase/decrease of the accounts, including in:</p> <p>a. Current assets, non-current assets, and total assets;</p> <p>b. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities;</p> <p>c. Equity;</p> <p>d. Sales/operating revenues, expenses, Profit (Loss), other comprehensive income, comprehensive income for the current year; and</p> <p>e. Cash flows</p>
<p>3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan</p> <p>Penjelasan tentang:</p> <p>a. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan</p> <p>b. Tingkat kolektibilitas piutang.</p>	<p>504-507</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>3. Discussion and analysis on solvability and level of the company receivables collectibility, by presenting relevant ratio calculation in line with the company's type of industry</p> <p>Explanation on:</p> <p>a. Solvability, both short term and long term; and</p> <p>b. Level of receivables collectibility.</p>

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
4. Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)	508	4. Discussion on capital structure, and management policy on capital structure
Penjelasan atas:		Explanation of:
a. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan	√	a. Details of capital structure comprising of interestbearing debts/sukuk and equity;
b. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan	√	b. Capital structure policies; and
c. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	√	c. Basis for the determination of capital structure policies.
5. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir	509-510	6. Discussion on material commitments of capital investments (instead of funding commitments) in the last fiscal year
Penjelasan tentang:		Explanation on:
a. Nama pihak yang melakukan ikatan;	√	a. Parties in the commitments;
b. Tujuan dari ikatan tersebut;	√	b. Objectives of the commitments;
c. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;	√	c. Sources of funds to meet the commitments;
d. Mata uang yang menjadi denominasi; dan	√	d. Denomination currency of commitments; and
e. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	√	e. Initiatives taken to mitigate exchange rate risk.
Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if the company does not have any material commitment for capital investments in the fiscal year.
6. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	510-514	6. Discussion on capital investment realized at the latest financial year
Penjelasan tentang:		Explanation on:
a. Jenis investasi barang modal;	√	a. Type of capital investment;
b. Tujuan investasi barang modal; dan	√	b. Objectives of capital investment; and
c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.	√	c. Nominal value of capital investment realized in the last fiscal year.
Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no capital investment.
7. Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan.	515-540	7. Information on the comparison between initial target at the beginning of financial year and the realization and target or projection for the next year concerning income, profit, capital structure, and others considered significant target for the company.
Informasi memuat antara lain:		Contain information on:
a. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan	√	a. Comparison of targets at the beginning of fiscal year and achievements; and
b. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	√	b. Targets or projections set for the next 1 (one) year.

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
<p>8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan</p> <p>Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan</p>	540-542	<p>8. Information and material facts following the date of accounting report (Subsequent events)</p> <p>Description of significant events following the date of accounting report including its impact on business risk and performance in the future.</p> <p>Note: should be disclosed if there are no subsequent events.</p>
<p>9. Uraian tentang prospek usaha perusahaan</p> <p>Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.</p>	453-457	<p>9. Business prospects</p> <p>Description on business prospects related to the general industry and economy including quantitative supporting data from reliable resources</p>
<p>10. Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.</p>	343-345	<p>10. Marketing aspects Description on marketing aspects of the company's products and/or services, among others marketing strategy and market shares</p>
<p>11. Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir</p> <p>Memuat uraian mengenai:</p> <p>a. Kebijakan pembagian dividen;</p> <p>b. Total dividen yang dibagikan;</p> <p>c. Jumlah dividen kas per saham;</p> <p>d. Payout ratio; dan</p> <p>e. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.</p>	543-544	<p>11. Description on dividend policy and total cash dividend per share and total dividend per year that are published or disbursed during last 2 (two) financial years</p> <p>Contain information on:</p> <p>a. Dividend payout policy;</p> <p>b. Total dividend disbursement;</p> <p>c. Total cash dividend per share;</p> <p>d. Payout ratio; and</p> <p>e. Announcement date and cash dividend payout for each year.</p> <p>Note: To disclose if there are no dividend disbursement and its reasons</p>
<p>12. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku</p> <p>Memuat uraian mengenai:</p> <p>a. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya;</p> <p>b. Jangka waktu;</p> <p>c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan</p> <p>d. Harga exercise.</p> <p>Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.</p>	544	<p>12. Employee/Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP) still ongoing in the fiscal year</p> <p>Contain information on:</p> <p>a. Number of ESOP/MSOP shares and its execution;</p> <p>b. Period;</p> <p>c. Eligible employee/management; and</p> <p>d. Exercise price.</p> <p>Note: should be disclosed if there are no such programs</p>

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
<p>13. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)</p> <p>Memuat uraian mengenai:</p> <p>a. Total perolehan dana; ✓</p> <p>b. Rencana penggunaan dana; ✓</p> <p>c. Rincian penggunaan dana; ✓</p> <p>d. Saldo dana; dan ✓</p> <p>e. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). ✓</p> <p>Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.</p>	544-545	<p>13. Realization of initial public offering proceeds (in the event of the company is obligated to submit the report)</p> <p>Covers the following:</p> <p>a. Total proceeds;</p> <p>b. Proceeds utilization plan;</p> <p>c. Proceeds utilization details;</p> <p>d. Proceeds balance; and</p> <p>e. The date of GMS/GMB resolution on the change of proceeds utilization (if any).</p> <p>Note: should be disclosed if there are no such information of realization of proceeds of public offering.</p>
<p>14. Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi</p> <p>Memuat uraian mengenai:</p> <p>a. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; ✓</p> <p>b. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; ✓</p> <p>c. Alasan dilakukannya transaksi; ✓</p> <p>d. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; ✓</p> <p>e. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan ✓</p> <p>f. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. ✓</p> <p>Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.</p>	545-550	<p>14. Material transaction information with conflict of interest and/or transaction with related parties</p> <p>Covers the following:</p> <p>a. Name of transacting parties and the nature of related parties;</p> <p>b. Description of the transaction fairness;</p> <p>c. Transaction background;</p> <p>d. Transaction realization at the last financial year;</p> <p>e. Company policy related with transaction review mechanism; and</p> <p>f. Compliance to relevant regulations and provisions.</p> <p>Note: To disclose if there are no transactions.</p>
<p>15. Uraian mengenai perubahan peraturan perundangundangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir</p> <p>Uraian memuat antara lain:</p> <p>a. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan ✓</p> <p>b. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. ✓</p> <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	552	<p>15. Description on changes in laws and regulations during the fiscal year that impacted on the company</p> <p>Covers information on:</p> <p>a. Name of regulations; and</p> <p>b. The impact (quantitative and/or qualitative) on the company, or statement of the insignificant impact</p> <p>Note: To disclose if there are no changes in the laws and regulations that have significant impacts</p>
<p>16. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir</p> <p>Uraian memuat antara lain:</p> <p>a. Perubahan kebijakan akuntansi;</p> <p>b. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan ✓</p> <p>c. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. ✓</p> <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	552-553	<p>16. Description on the changes in accounting policy implemented by the company at the last financial year</p> <p>Descriptions include among others:</p> <p>a. Changes in accounting policy;</p> <p>b. Reasons for the change; and</p> <p>c. Quantitative impact on the financial statements</p> <p>Note: To disclose if there are no changes in accounting policies during the fiscal year</p>

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
<p>17. Informasi kelangsungan usaha Pengungkapan informasi mengenai:</p> <p>a. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir;</p> <p>b. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan</p> <p>c. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment.</p> <p>Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.</p>	<p>556-557</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>17. Information on business continuity Disclosures on:</p> <p>a. Significant issues on the company business continuity at the last financial year;</p> <p>b. Management assessment on point 1; and</p> <p>c. Assumption implemented by the management in conducting the assessment.</p> <p>Note: if there are no issues that potentially have significant influences to the company's business continuity at the last financial year, to disclose the basis of management assumption in ensuring that there are no issues that potentially have significant influences to the company's business continuity at the last financial year.</p>
VI. Good Corporate Governance		VI. Good Corporate Governance
<p>1. Uraian Dewan Komisaris</p> <p>Uraian memuat antara lain:</p> <p>a. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris;</p> <p>b. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan</p> <p>c. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).</p>	<p>600-603, 681-682, 610</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>1. Description on the Board of Commissioners</p> <p>Covers the following:</p> <p>a. Board of Commissioners responsibilities;</p> <p>b. Assessment of performance of committees under the Board and the basis for such assessment; and</p> <p>a. Board Charter disclosures (Board of Commissioners work guidelines and procedures)</p>
<p>2. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)</p> <p>Meliputi antara lain:</p> <p>a. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan</p> <p>b. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.</p>	<p>619-620</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>2. Independent Commissioners (at least 30% of the total personnel of the Board of Commissioners)</p> <p>Covers the following:</p> <p>a. Assignment criteria of Independent Commissioners; and</p> <p>b. Independence statement of each Independent Commissioner.</p>
<p>3. Uraian Direksi</p> <p>Uraian memuat antara lain:</p> <p>a. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;</p> <p>b. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan</p> <p>c. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).</p>	<p>701-705, 696, 762</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>3. Description on the Board of Directors</p> <p>Covers information on, among others:</p> <p>a. Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;</p> <p>b. Assessment of performance of committees under the Board (if any); and</p> <p>c. Board Charter disclosures (Board of Directors work guidelines and procedures)</p>
<p>4. Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2018 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p>Memuat uraian mengenai:</p> <p>a. Kriteria yang digunakan dalam penilaian;</p> <p>b. Pihak yang melakukan penilaian;</p> <p>c. Skor penilaian masing-masing kriteria;</p> <p>d. Rekomendasi hasil penilaian; dan</p> <p>e. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan.</p>	<p>909-923</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>4. GCG implementation assessment for 2018, at least for aspects of the Board of Commissioners and/or Board of Directors</p> <p>Covers the following:</p> <p>a. Assessment criteria;</p> <p>b. Assessor;</p> <p>c. Assessment score on each criteria;</p> <p>d. Recommendations on results of assessment; and</p> <p>e. Reasons for the delay or non implementation of such recommendations.</p> <p>Note: should be disclosed if there are no GCG assessment for fiscal 2015</p>

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
<p>5. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <p>a. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris;</p> <p>b. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi;</p> <p>c. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris;</p> <p>d. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi;</p> <p>e. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan</p> <p>f. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/ atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada).</p> <p>Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan</p>	<p>831-837</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>5. Description of the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors</p> <p>Covers the following:</p> <p>a. Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Commissioners;</p> <p>b. Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Directors;</p> <p>c. Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Commissioners;</p> <p>d. Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Directors;</p> <p>e. Disclosure of indicators for the remuneration of the Board of Directors; and</p> <p>f. Disclosure of performance bonus, nonperformance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors (if any).</p> <p>Note: should be disclosed if there are no performance bonus, non-performance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors.</p>
<p>6. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)</p> <p>Informasi memuat antara lain:</p> <p>a. Tanggal Rapat;</p> <p>b. Peserta Rapat; dan</p> <p>c. Agenda Rapat.</p> <p>untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.</p>	<p>629-660, 722-753</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>6. Meeting frequency and attendance of Board of Commissioners (at least once in 2 months), Board of Directors (at least once in a month), and joint meetings of BoC and BoD (at least once in 4 months)</p> <p>Covers among others:</p> <p>a. Date;</p> <p>b. Attendance; and</p> <p>c. Agenda.</p> <p>of each of the meetings of BoC, BoD and Joint Meetings of BoC and BoD</p>
<p>7. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu</p> <p>Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali.</p> <p>Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.</p>	<p>573-574</p> <p>√</p>	<p>7. Information on majority and controlling shareholders, direct or indirect, up to the ultimate individual shareholder</p> <p>Diagram with separate illustration for majority shareholders and controlling shareholders</p> <p>Note: majority shareholders are parties that own, directly or indirectly, at least 20% of the voting rights of the total share with voting rights issued by the company, but is not the controlling shareholder</p>

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
<p>8. Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <p>a. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;</p> <p>b. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;</p> <p>c. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali;</p> <p>d. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan</p> <p>e. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.</p> <p>Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.</p>	<p>614-615, 706-707</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>8. Disclosure of affiliation between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Majority/Controlling Shareholders</p> <p>Covers, among others:</p> <p>a. Affiliation between a member of the Board of Directors with fellow members of the Board of Directors;</p> <p>b. Affiliation between a member of the Board of Directors with members of the Board of Commissioners;</p> <p>c. Affiliation between a member of the Board of Directors with Majority and/or Controlling Shareholder;</p> <p>d. Affiliation between a member of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners; and</p> <p>e. Affiliation between a member of the Board of Commissioners with Majority and/or Controlling Shareholder.</p> <p>Note: should be disclosed if there are no affiliation relationship</p>
<p>9. Komite Audit</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <p>a. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit;</p> <p>b. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit;</p> <p>c. Independensi anggota komite audit;</p> <p>d. Uraian tugas dan tanggung jawab;</p> <p>e. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan</p> <p>f. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.</p>	<p>766-777</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>9. Audit Committee</p> <p>Includes the following:</p> <p>a. Name, position and tenure of audit committee members;</p> <p>b. Education qualifications (study field and institution) and work experience (position, company and tenure) of audit committee members;</p> <p>c. Independency of audit committee members;</p> <p>d. Duties and responsibilities;</p> <p>e. Brief report of audit committee activity; and</p> <p>f. Meeting frequency and attendance of audit committee</p>
<p>10. Komite Nominasi dan/atau Remunerasi</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <p>a. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi;</p> <p>b. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi;</p> <p>c. Uraian tugas dan tanggung jawab;</p> <p>d. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku;</p> <p>e. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi;</p> <p>f. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan</p> <p>g. Kebijakan mengenai suksesi Direksi</p>	<p>777-789</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>10. Nomination and/or Remuneration Committee</p> <p>Includes the following:</p> <p>a. Name, position and brief profiles of members of the Nomination and/or Remuneration Committee;</p> <p>b. Independency of Nomination and/or Remuneration Committee;</p> <p>c. Duties and responsibilities ;</p> <p>d. Brief report of committee activity in the fiscal year;</p> <p>e. Meeting frequency and attendance;</p> <p>f. Statement of committee charter; and</p> <p>g. Policies on Director succession.</p>

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
11. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	789-799	11. Other committees under the Board of Commissioners
Mencakup antara lain:		Includes the following:
a. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain;	√	a. Name, position and brief profile of members of committee;
b. Independensi komite lain;	√	b. Independency of committee;
c. Uraian tugas dan tanggung jawab;	√	c. Duties and responsibilities ;
d. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan	√	d. Committee activity in the fiscal year; and
e. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	√	e. Committee meeting frequency and attendance.
12. Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan	800-805	12. Description of duties and functions of Corporate Secretary
Mencakup antara lain:		Information on, among others:
a. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan;	√	a. Name and brief work experience of Corporate Secretary;
b. Domisili;	√	b. Domicile;
c. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan	√	c. Duties and responsibilities; and
d. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	√	d. Report of activities of Corporate Secretary in the fiscal year.
13. Uraian mengenai unit audit internal	805-813	13. Description on Internal Audit Unit
Mencakup antara lain:		Includes the following:
a. Nama ketua unit audit internal;	√	a. Name of internal audit unit head;
b. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal;	√	b. Total employees (internal auditors) in internal audit unit;
c. Sertifikasi sebagai profesi audit internal;	√	c. Certification on internal audit profession;
d. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan;	√	d. Internal audit unit composition in the company's structure;
e. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan	√	e. Brief report on internal audit unit activity implementation; and
f. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	√	f. The parties responsible to appoint/terminate the internal audit unit head.
14. Akuntan Publik	837-839	14. Public Accountant
Informasi memuat antara lain:		Includes the following:
a. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	√	a. Name and year of public accountant that audits the annual financial statements in the last 5 years;
b. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	√	b. Name and year of Public Accountant Firm that audits the annual financial statements in the last 5 years;
c. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan	√	c. The amount of fee for each service provided by public accountant at the last financial year; and
d. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.	√	d. Other services provided by the accountant apart from the audit service of annual financial statements at the last financial year.
Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		Note: to disclose if there are no other services rendered

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
15. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	839-855	15. Description on risk management of the company
Mencakup antara lain:		Includes the following:
a. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan;	√	a. Explanation on risk management system implemented by the company;
b. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku;	√	b. Explanation on risk management system effectiveness evaluation;
c. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan	√	c. Explanation on risks faced by the company; and
d. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	√	d. Risk mitigation.
16. Uraian mengenai sistem pengendalian intern	855-865	16. Description of internal control system
Mencakup antara lain:		Includes the following:
a. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional;	√	a. Brief explanation on internal control system, among others on financial and operational control;
b. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan	√	b. Explanation on internal control system alignment with international standard framework (COSO – internal control framework); and
c. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	√	c. Explanation on internal control system effectiveness evaluation.
17. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait tata kelola Tanggung jawab sosial:	926-933	17. Description of corporate social responsibility related to organizational governance of social responsibility:
a. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial	√	a. Information on Company's commitment to social responsibility;
b. Informasi mengenai methoda dan lingkup due diligent terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas perusahaan	√	b. Information on methods and scope of due diligence on the social, economic and environmental impacts of Company's activities;
c. Informasi tentang stakeholder penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan	√	c. Information on significant stakeholders that are impacted by, or having an influence to the impact of, the Company's activities;
d. Informasi tentang isu isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan	√	d. Information on significant social, economic and environmental issues related to impact of the Company's activities;
e. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban	√	e. Information on the scope of the Company's corporate social responsibility, both obligatory as well as beyond obligatory;
f. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya stakeholders engagement dan meningkatkan value untuk stakeholder dan shareholder	√	f. Information on the Company's strategy and work programs in the management of social, economic and environmental issues, as a form of stakeholder engagement and in creating value for stakeholders and shareholders;
g. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan	√	g. Information on programs that are beyond the minimum obligatory level for the Company as relevant with its business activities;
h. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial	√	h. Information on the funding and budgeting of social responsibility programs.

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
18. Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait core subject Hak Azasi Manusia a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia b. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia c. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang Hak Azasi Manusia d. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia e. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia	934-936 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	18. Description of corporate social responsibility related to core subject - Human Rights: a. Information on commitment and policies related to social responsibility core subject - Human Rights; b. Information on Company's definition on the scope of social responsibility core subject – Human Rights; c. Information on the planning of CSR initiatives in the area of Human Rights; d. Information on the execution of CSR initiatives in the area of Human Rights; e. Information on achievements and awards for CSR initiatives in the area of Human Rights.
19. Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait core subject Operasi yang adil a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Operasi yang adil b. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject operasi yang adil c. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang operasi yang adil d. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil e. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	937-941 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	19. Description of corporate social responsibility related to core subject - Human Rights: a. Information on commitment and policies related to social responsibility core subject - Human Rights; b. Information on Company's definition on the scope of social responsibility core subject – Human Rights; c. Information on the planning of CSR initiatives in the area of Human Rights; d. Information on the execution of CSR initiatives in the area of Human Rights; e. Information on achievements and awards for CSR initiatives in the area of Human Rights.
20. Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup, penyampaian informasi tentang; a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan b. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan c. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; d. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan e. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup f. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. g. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	942-963 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	20. Description of corporate social responsibility related to the environment: a. Information on commitment and policies on environment; b. Information on significant environmental impact and risks, both directly or indirectly related to the Company; c. Information on 2018 activity target/plan established by the Management; d. Information on environment-related activities or programs undertaken as related to the Company's operational activities; e. Information on the execution of CSR initiatives related to the environment; f. Information on the quantitative impact or achievement of such CSR initiatives, such as the use of environmental-friendly and recyclable material and energy, waste processing system, mechanism for environment-related complaints, consideration of environmental aspects in the granting of credit to creditors, and others. g. Environment-related certification.

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
<p>21. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, mencakup antara lain informasi tentang:</p> <p>a. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject ketenagakerjaan</p> <p>b. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan</p> <p>c. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan</p> <p>d. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut</p> <p>e. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.</p>	<p>964-980</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>21. Description of corporate social responsibility related to labor practices, covering information on, among others:</p> <p>a. Commitment and policies on social responsibility core subject - labor practices;</p> <p>b. Information on scope and definition of social responsibility related to labor practices;</p> <p>c. Information on 2018 activity target/plan established by the Management;</p> <p>d. Information on initiatives undertaken and the quantitative impact of such initiatives;</p> <p>e. Information related to labor practices and work health and safety, such as gender equality and equal work opportunity, work health and safety equipment, employee turnover rate, work accident rate, employee remuneration, mechanism for laborrelated complaints, and others.</p>
<p>22. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen, Mencakup antara lain:</p> <p>a. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; dan</p> <p>b. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut</p> <p>c. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.</p>	<p>981-989</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>22. Description of corporate social responsibility related to consumer issues, covering among others:</p> <p>a. Information on 2018 activity target/plan established by the Management;</p> <p>b. Initiatives undertaken and the impact of such initiatives;</p> <p>c. Information related to product stewardship, such as consumer health and safety issues, product information, mechanism, number and resolution of consumer complaints, and others.</p>
<p>23. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan, mencakup antara lain informasi tentang:</p> <p>a. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject pengembangan sosial dan kemasyarakatan</p> <p>b. Informasi tentang isu isu sosial yang relevan dengan perusahaan</p> <p>c. Informasi tentang resiko sosial yang dikelola perusahaan</p> <p>d. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan</p> <p>e. Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen;</p> <p>f. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan</p> <p>g. Biaya yang dikeluarkan</p> <p>h. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.</p>	<p>990-1.005</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>23. Description of corporate social responsibility related to community involvement and development, covering among others:</p> <p>a. Commitment and policies on social responsibility core subject - community involvement and development;</p> <p>b. Information on social issues relevant to the Company;</p> <p>c. Information on social risks managed by the Company;</p> <p>d. Information on scope and definition of social responsibility related to community involvement and development;</p> <p>e. Information on 2018 activity target/plan established by the Management;</p> <p>f. Initiatives undertaken and the impact of such initiatives;</p> <p>g. Budget spent;</p> <p>h. Information related to community involvement and development, such as use of local workers, empowerment of surrounding communities, improvement of public facilities or infrastructure, other forms of donations, communications on anticorruption policies and procedures, training on anti-corruption, and others.</p>

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
<p>24. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pokok perkara/gugatan; ✓ b. Status penyelesaian perkara/gugatan; ✓ c. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan ✓ d. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). ✓ <p>Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.</p>	866-876	<p>24. Significant litigation currently faced by the company, subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and Board of Directors that served the position at the annual report period</p> <p>Includes the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The principal litigation/claims; b. Settlement status of litigation/claims; c. Impact to the company's condition; and d. Administration sanctions charged to the company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by relevant authorities (capital market, banking and others) at the last fiscal year (or a statement of no administration sanction being charged) <p>Note: To disclose in the event of no litigation</p>
<p>25. Akses informasi dan data perusahaan</p> <p>Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.</p>	876-883	<p>25. Access to company information and data</p> <p>Description on the availability of company information and data for public access, including dissemination through company website (in Bahasa and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst gatherings, and others.</p>
<p>26. Bahasan mengenai kode etik</p> <p>Memuat uraian antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pokok-pokok kode etik; ✓ b. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; ✓ c. Penyebarluasan kode etik; ✓ d. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan ✓ e. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. ✓ <p>Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	883-890	<p>26. Discussion on code of conduct</p> <p>Includes the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Contents of Code of Conduct; b. Disclosure of code of conduct application in all level of organization; c. Code of conduct dissemination; d. Sanctions on code of conduct violations; and e. Number of violation and sanction in the last fiscal year. <p>Note: should be disclosed if there are no violations of code of conduct in the last fiscal year.</p>
<p>27. Pengungkapan mengenai whistleblowing system</p> <p>Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. a. Penyampaian laporan pelanggaran; ✓ b. Perlindungan bagi whistleblower; ✓ c. Penanganan pengaduan; ✓ d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan ✓ e. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan ✓ f. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. ✓ <p>Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	897-904	<p>27. Disclosure on whistleblowing system</p> <p>Includes the following mechanism of whistleblowing system:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Violations report submission; b. Whistleblowers protection; c. Claims handling; d. Claims managers; and e. Total claims registered; and f. Sanctions/report processed at the last fiscal year including its follow up measures. <p>Note: should be disclosed if there is no report and follow up action in the last fiscal year.</p>

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
28. Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	905-908	28. Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition
Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.	√	Description of written policy regarding diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors composition regarding education, work experience, age, and gender
Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.		Note: to disclose the reasons and considerations, if there is no policy applied
VII. Informasi Keuangan		VII. Financial Information
1. Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	1020	1. Board of Directors and/or Board of Commissioners' Statements regarding the Responsibility for the Financial Statements
Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	√	Conformity with related regulations regarding the Financial Statements Responsibility
2. Opini auditor independen atas laporan keuangan	1021-1023	2. Independent auditor opinion on financial statement
3. Deskripsi Auditor Independen di Opini	1023	3. Independent Auditor Description in the Opinion
Deskripsi memuat tentang:		Description contains the following:
a. Nama dan tanda tangan;	√	a. Name & signatures;
b. Tanggal Laporan Audit; dan	√	b. Audit Report date; and
c. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	√	c. License of Public Accountant Firm and license of Public Accountant
4. Laporan keuangan yang lengkap	1024-1214	4. Comprehensive financial statements
Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:		Comprehensively covers the financial statements elements:
a. Laporan posisi keuangan;	√	a. Statements of financial position;
b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;	√	b. Statements of comprehensive income and other comprehensive income;
c. Laporan perubahan ekuitas;	√	c. Statements of changes in equity;
d. Laporan arus kas;	√	d. Statements of cash flows;
e. Catatan atas laporan keuangan;	√	e. Notes to financial statements;
f. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan	√	f. Comparative information on previous periods; and
g. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	√	g. Statements of financial position at the beginning of previous periods upon the application of retrospective accounting policy by the entity or representation of financial statements postings, or reclassifications of postings in the financial statements (if relevant).
5. Perbandingan tingkat profitabilitas Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	1027-1028	5. Profitability level comparison Comparison of current profit (loss) with the previous year
6. Laporan Arus Kas	1030	6. Statements of Cash Flows
Memenuhi ketentuan sebagai berikut:		Conformity to the following provisions:
a. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;	√	a. Grouping into three category of activities of operations, investment, and financing;
b. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;	√	b. Direct method application in the statements of cash flows from operations activity;
c. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan	√	c. Separation of presentation between cash in and or cash out during current year in the operation, investment and financing activities;
d. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	√	d. Disclosure of non cash transaction shall be stated in the notes to financial statements.

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
7. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	1057-1091	7. Summary of accounting policies
Meliputi sekurang-kurangnya:		Including at least:
a. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;	√	a. Compliance statement to SAK;
b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;	√	b. Basis of measurement and formulation of financial statements;
c. Pajak penghasilan;	√	c. Recognition of income and expense;
d. Imbalan kerja; dan	√	d. Employee benefits; and
e. Instrumen Keuangan.	√	e. Financial instrument
8. Pengungkapan transaksi pihak berelasi	1151-1158	8. Disclosure of related parties transactions
Hal-hal yang diungkapkan antara lain:		The disclosures includes:
a. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;	√	a. Name of related parties, and the nature and relationship with related parties;
b. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan	√	b. Transaction values and its percentage to total income and expense; and
c. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	√	c. Total balance and its percentage to total assets or liabilities.
9. Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	1125-1131	9. Disclosure related to taxes
Hal-hal yang harus diungkapkan:		The disclosures shall includes:
a. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;	√	a. Fiscal reconciliation and current tax expense calculation;
b. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;	√	b. Explanation of relationship between tax expenses (income) and accounting profit;
c. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016;	√	c. Statement that Taxable Income as a result of reconciliation is use as the basis in completing the 2016 Annual corporate income tax return;
d. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan	√	d. The details of deferred tax assets and liabilities recognized in the financial position statements for every presentation period, and total deferred tax expenses (income) recognized in the income statements if the total are not visible from the total deferred tax assets or liabilities recognized in the financial position statements; and
e. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	√	e. Disclosure of availability or un-availability of tax disputes.
10. Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	1063-1064, 1108-1112	10. Disclosure related to fixed assets
Hal-hal yang harus diungkapkan:		The disclosures shall includes:
a. Metode penyusutan yang digunakan;	√	a. Used depreciation method;
b. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya;	√	b. Description on accounting policies selected between revaluation model and cost model;
c. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan	√	c. Significant methods and assumptions used in estimation of fixed assets fair value (for revaluation model) or disclosure of fixed assets fair value (for cost model); and
d. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	√	d. Reconciliation of gross total recorded and accumulation of fixed assets depreciation at the beginning and end of period by presenting: addition, deduction and reclassification.

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
<p>11. Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi</p> <p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <p>a. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan;</p> <p>b. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan;</p> <p>c. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan</p> <p>d. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.</p>	<p>1086, 1212-1214</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>11. Disclosure related to operations segments</p> <p>The disclosures shall includes:</p> <p>a. General information covering factors used to identify reported segments;</p> <p>b. Information on segment's reported profit loss, assets, and liabilities;</p> <p>c. Reconciliation of segment's total revenues, segment's reported profit loss, segment's assets, segment's liabilities, and segment's other material elements to related total in entity; and</p> <p>d. Disclosure of entity level, which covers information on products and/or services, geographic areas and main customers.</p>
<p>12. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan</p> <p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <p>a. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya;</p> <p>b. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan;</p> <p>c. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrument keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;</p> <p>d. Kebijakan manajemen risiko; dan</p> <p>e. Analisis risiko yang terkait dengan instrument keuangan secara kuantitatif.</p>	<p>1077-1085, 1160-1163, 1163-1165</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>12. Disclosure related to Financial Instruments</p> <p>The disclosures shall includes:</p> <p>a. Accounting requirements, conditions and policies for every financial instruments group;</p> <p>b. Financial instrument classification;</p> <p>c. Fair value of every financial instrument group;</p> <p>d. Risk management objectives and policies;</p> <p>e. Explanation on risks related to financial instrument: market risk, credit risk and liquidity risk; and</p> <p>f. Risk analysis related to financial instrument in quantitative way.</p>
<p>13. Penerbitan laporan keuangan</p> <p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain:</p> <p>a. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan</p> <p>b. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan</p>	<p>1020</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>13. Financial statements publication</p> <p>The disclosures includes:</p> <p>a. Date of financial statements authorized for publication; and</p> <p>b. Parties responsible to authorize the financial statements.</p>

2019 Laporan Tahunan
Annual Report

BUSINESS EXPANSION

FOR SUSTAINABLE SUPERIOR PERFORMANCE
EKSPANSI BISNIS UNTUK MENCAPAI KINERJA UNGGUL YANG BERKELANJUTAN



PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Energizing Trade, Energizing Indonesia.

HEAD OFFICE

PT. Pelabuhan Indonesia II
Jl. Pasoso No.1, Tanjung Priuk
Jakarta Utara, 14310

Phone: +62-21 4367505, +62-21 4301080

Fax : +62-21 43911704

Email : corp_sec@indonesiaport.co.id



www.indonesiaport.co.id